2023 Laporan Tahunan
Annual Report

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

PELNI
We Connect, We Unify

AKSELERASI PERTUMBUHAN MELALUI TRANSFORMASI

Accelerating Growth Through Transformation

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan Tahunan ini memuat sejumlah pernyataan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, hingga tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif serta memiliki risiko dan ketidakpastian, sehingga dapat menghadirkan perbedaan material terhadap perkembangan aktual.

This Annual Report contains several statements regarding the company's financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives, which are classified as forward-looking statements under applicable laws and regulations. These statements are prospective and involve risks and uncertainties, which may result in material differences from actual developments.

Seluruh pernyataan prospektif di dalam laporan tahunan ini disusun berdasarkan kondisi terkini dan berbagai asumsi mengenai kondisi mendatang terkait lingkungan bisnis Perseroan. Perseroan tidak menjamin bahwa informasi prospektif serta tindakan yang diambil berdasarkan informasi tersebut akan menghadirkan hasil yang seluruhnya sesuai dengan yang dinyatakan.

All forward-looking statements in this annual report are based on current conditions and various assumptions regarding future conditions related to the company's business environment. The company does not guarantee that the prospective information and actions taken based on this information will yield results that are entirely consistent with the statements made.

Laporan ini memuat kata "Perusahaan", "Perseroan", "PT PELNI (Persero)", serta "PELNI" yang seluruhnya merujuk pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

This report includes the terms "Company," "Corporation," "PT PELNI (Persero)," and "PELNI," all of which refer to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

TEMA LAPORAN TAHUNAN 2023
2023 ANNUAL REPORT THEME

AKSELERASI PERTUMBUHAN MELALUI TRANSFORMASI

Pada tahun 2023, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) resmi meluncurkan logo baru beserta tagline baru "*We Connect, We Unify*". Pergantian logo ini dibutuhkan seiring dengan perubahan visi dan misi Perusahaan. Untuk menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara, kami membutuhkan identitas diri yang mampu menunjang transformasi besar yang sudah kami lakukan dan masih terus berlangsung.

Salah satu dampak transformasi bagi Perusahaan adalah kinerja bisnis yang meningkat, kepercayaan Pemerintah kepada PELNI semakin besar yang ditunjukkan dari serangkaian penugasan seperti angkutan mudik gratis sepeda motor, perbantuan angkutan penyeberangan Ciwandan – Panjang (PP) dan yang terbaru akomodasi terapung di Labuan Bajo untuk menyukseskan acara kenegaraan KTT ASEAN.

Logo baru yang diusung PELNI diinspirasi oleh haluan kapal yang tampak dari atas dan dilengkapi dengan identitas branding "PELNI" disampingnya. Penempatan logo di sisi kiri seakan mendorong "PELNI" untuk terus maju dan melakukan terobosan pada bisnis pelayaran dan bisnis logistik.

ACCELERATING GROWTH THROUGH TRANSFORMATION

In 2023, PT Pelayaran Nasional Indonesia, or PT PELNI (Persero), officially launched a new logo along with the new tagline "We Connect, We Unify." This logo change was necessary due to the company's evolving vision and mission. To become a leading maritime shipping and logistics company in Southeast Asia, we needed a brand identity that could support the significant transformation we have undertaken and continue to pursue.

One impact of this transformation on the company has been improved business performance and increased government trust in PELNI. This trust is evidenced by various assignments, such as providing free motorbike transportation for the homecoming season, assisting with the Ciwandan – Panjang (round trip) ferry transportation, and most recently, offering floating accommodation in Labuan Bajo to support the success of the ASEAN Summit.

PELNI's new logo is inspired by the bow of a ship as seen from above and is complemented by the branding identity "PELNI" beside it. The placement of the logo on the left side symbolizes pushing "PELNI" forward, driving breakthroughs in both the shipping and logistics businesses.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2019

AIMING FOR BIGGER DREAM

2020

REFOCUSING IN CHALLENGING YEAR

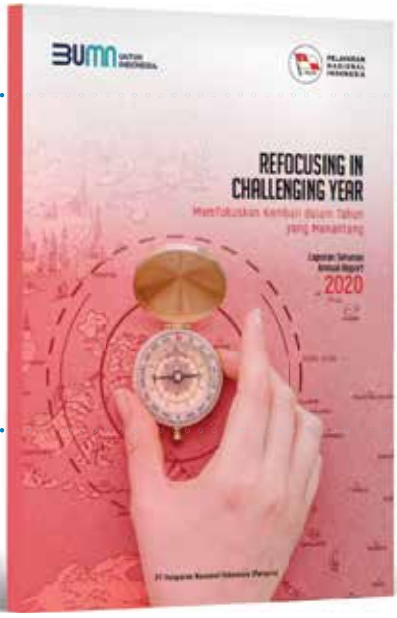

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

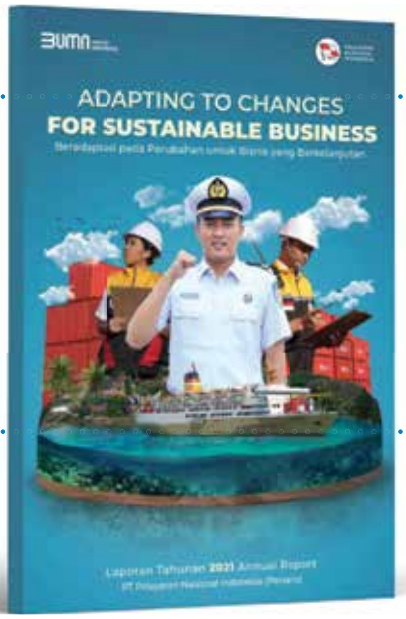

2021

ADAPTING TO CHANGES FOR SUSTAINABLE BUSINESS

2022

BUSINESS INTEGRATION AND MARITIME LOGISTICS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

KILAS KINERJA PELNI
PELNI PERFORMANCE HIGHLIGHTS

JUMLAH KAPAL (PER 31 DESEMBER 2023) | TOTAL NUMBER OF SHIPS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

Total Kapal Dioperasikan
Total Operated Ships
102

Kapal Non-Penugasan
Non-Assignment Ships
1 **Kapal Usulan Write-Off**
Propose Ship Write-Off

Kapal Perintis
Pioneer Ships

42 Kapal Utama Main Ships

06 Kapal Cadangan Reserve Ships

01 Kapal Ternak Cattle Ship
Kapal Utama Main Ships

26 Kapal Penumpang Passenger Ship
Kapal Utama Main Ships

Kapal Tol Laut
Sea Toll Ship
10 Kapal Utama Main Ships
0 Kapal Cadangan Reserve Ships

Kapal Rede
Rede Ship
16 Kapal Utama Main Ships

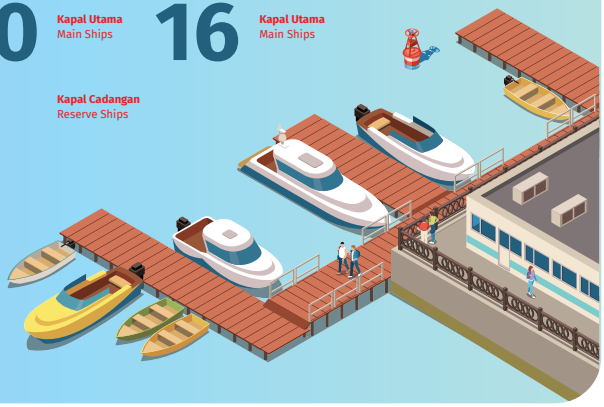

KINERJA OPERASI | OPERATIONAL PERFORMANCE

Kapal Penumpang
Passenger Ship

Penumpang | Passengers
4.330.486 Orang People

Barang | Cargo
38.826 ton/m3 ton/m3

Kendaraan | Vehicles
11.339 unit units

Kontainer | Container
11.105 TEUs

Kapal Perintis
Perintis Ship

Penumpang | Passengers
932.203 Orang People

Barang | Cargo
100.457 ton/m3 ton/m3

Kapal Ternak
Cattle Ship

Kapal Ternak | Cattle Ship
7.308 ekor cattle

Kapal Barang | Cargo Ship
13.653 TEUs

OPERASI | OPERATIONAL

Kapal Penumpang
Passenger Ship
26

Kapal Perintis
Perintis Ship
48

Kapal Tol Laut
Sea Toll Ship
10

Kapal Barang Non-Penugasan
Cargo Ship Non-Assignment
01

Kapal Ternak
Cattle Ship
01

Kapal Rede
Rede Ship
16

KILAS KINERJA PELNI
PELNI PERFORMANCE HIGHLIGHTS

USAHA BARANG KOMERSIAL & PENUNJANG

Kerja sama pengangkutan muatan milik PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Indonesia Logistik

COMMERCIAL & SUPPORTING GOODS BUSINESS

Collaboration in cargo transportation belonging to PT Pupuk Indonesia and PT Pupuk Indonesia Logistik

USAHA PENUMPANG KOMERSIAL & PENUNJANG

Jumlah peserta sebanyak 12.320 orang dan jumlah kegiatan sebanyak 117 kegiatan berupa *Event on Board, Meeting on Board, Study on Board, Tour on Board, City Tour* dan Wisata.

COMMERCIAL CARGO & SUPPORT BUSINESS

The number of participants is 12,320, and there are 117 activities including Event on Board, Meeting on Board, Study on Board, Tour on Board, City Tour, and Tourism.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability 2

Tema Laporan Tahunan 2023
2023 Annual Report Theme 3

Kesinambungan Tema
Theme Continuity 4

Kilas Kinerja PELNI
PELNI Performance Highlights 6

KILAS KINERJA 2023
2023 PERFORMANCE HIGHLIGHTS 12

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position Report 14

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 14

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Cash Flow Statement 15

Rasio Keuangan
Financial Ratios 16

Grafik Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights Chart 18

Informasi Harga Saham
Stock Price Information 20

Aksi Korporasi
Corporate Actions 20

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi
Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds 21

Peristiwa Penting
Significant Events 22

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications 26

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT 40

Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners 42

Laporan Direksi
Report from the Board of Directors 62

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Statement of Responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2023 Annual Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 88

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE 90

Identitas Perusahaan
Corporate Identity 92

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company 93

Penjelasan Logo Perusahaan
Company Logo Explanation 96

Jejak Langkah Perusahaan
Company Milestones 98

Visi dan Misi Perusahaan
Company Vision and Mission 100

Nilai-Nilai Perusahaan
Company Values 102

Bidang Usaha
Business Fields 104

Produk dan Jasa
Products and Services 111

Jaringan Trayek Kapal Penumpang 2023
2023 Passenger Ship Route Network 114

Jaringan Trayek Kapal Tol Laut 2023
2023 Sea Toll Ship Route Network 116

Jaringan Trayek Nasional Kapal Perintis 2023
2023 National Pioneer Ship Route Network 118

Rute Kapal Ternak 2023
2023 Cattle Ship Route 120

Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang, dan Kantor Perwakilan
Names and Addresses of Subsidiaries, Branch Offices, and Representative Offices 122

Struktur Organisasi
Organizational Structure 125

Keanggotaan Perusahaan Di Dalam Asosiasi/Organisasi Industri
Company Membership in Industry Associations/Organizations 128

Profil Direksi
Board of Directors Profile 130

Perubahan Komposisi Direksi
Changes in Board of Directors Composition 140

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile 144

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Changes in Board of Commissioners Composition 152

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Setelah 31 Desember 2023
Changes in the Composition of the Board of Commissioners and/or Directors After December 31, 2023 153

Profil Sumber Daya Manusia
Human Resources Profile 155

Pejabat Eksekutif (pada 31 Desember 2023)
Executive Officers (as of December 31, 2023) 160

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham
Shareholders Holding 5% or More of Shares 191

Persentase Kepemilikan tidak Langsung Atas Saham Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris
Indirect Share Ownership Percentages by Board Members and Commissioners 191

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Per Akhir Tahun Buku Berdasarkan Klasifikasi
Year-End Shareholder Composition by Classification 191

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders 192

Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure 193

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Subsidiaries and Associated Entities 194

Kronologi Pencatatan Saham
Chronology of Share Listings 197

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listings 197

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Support Institutions and Professions 198

Informasi pada Situs *Web* Perusahaan
Company Website Information 199

FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORT REVIEW 204

Sumber Daya Manusia
Human Resources 206

Teknologi Informasi
Information Technology 258

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 284

Tinjauan Ekonomi Makro
Macro Economic Overview 286

Tinjauan Industri
Industry Overview 289

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Overview by Business Segment 290

Tinjauan Keuangan
Financial Overview 300

Rasio-Rasio Keuangan
Financial Ratios 312

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat kolektibilitas Piutang Perusahaan
Company's Debt Repayment Capability and Receivables Collectibility Level 314

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure and Capital Structure Policy 315

Investasi Barang Modal
Capital Goods Investments 317

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investments 318

Perbandingan Target, Realisasi 2023, Dan Proyeksi 2024
2023 Targets, Realization, And 2024 Projection Comparison 318

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investments, Expansions, Divestments, Mergers/Consolidations, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring 321

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Post-Report Date Material Events and Facts 322

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Involving Extraordinary and Rare Occurrences 322

Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan
Impact of Price Changes on Company's Revenue and Profit 323

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Informasi Dividen
Dividend Information 323

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan/ Manajemen (ESOP/ MSOP)
Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) 323

Informasi Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
Conflict of Interest Transactions and Transactions with Affiliated Parties 324

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Amendments in Laws and Regulations and Its Impact on the Company 333

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Public Offering Proceeds 333

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impact on Financial Statements 333

Informasi Kelangsungan Usaha
Company Continuity Information 335

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects 337

Prospek Usaha
Business Prospects 339

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE 344

Komitmen Penerapan GCG
Commitment to GCG Implementation 346

Rapat Umum Pemegang Saham
General Shareholders Meeting 357

Direksi
Board of Directors 403

Dewan Komisaris
Board of Commissioners 475

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners 531

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity in the Board of Commissioners and Directors 544

Organ di Bawah Dewan Komisaris
Subsidiary Bodies of the Board of Commissioners 546

Komite Audit
Audit Committee 547

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee 559

Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee 567

Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee 577

Sekretariat Dewan Komisaris
Secretariat of the Board of Commissioners 588

Kesekretariatan Perusahaan
Corporate Secretariat 593

Satuan Pengawasan Intern
Internal Oversight Unit 615

Akuntan Publik
Public Accountants 623

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System 626

Manajemen Risiko
Risk Management 628

Perkara Penting yang Dihadapi
Significant Legal Cases 653

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions 654

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data 655

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
Code of Conduct 656

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan/ Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee Stock Ownership Program (ESOP) / Management Stock Ownership Program (MSOP) 661

Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Policy on Disclosure of Information Regarding Directors' and Commissioners' Share Ownership 661

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System 662

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Kebijakan dan Praktik Anti-Korupsi
Anti-Corruption Policies and Practices 674

Pelaporan LHKPN
Reporting of Wealth Report (LHKPN) 677

Pengendalian Gratifikasi
Gratuity Control 680

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services 683

Penilaian Penerapan GCG
Assessment of GCG Implementation 684

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 756

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Governance of Social and Environmental Responsibility 759

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia
Social Responsibility Concerning Human Rights 777

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil
Social Responsibility Concerning air Operations 778

Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup
Social Responsibility Concerning the Environment 781

Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Social Responsibility Related to Employment, Health, and Occupational Safety (OHS) 785

Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan
Social Responsibility to Customers 790

Tanggung Jawab Sosial Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Social Responsibility Related to Social and Community Development 792

REFERENSI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
Reference to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Regarding the Format and Contents of the Annual Report of Issuers or Public Companies 804

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Consolidated Financial Report 833

PELNI

We Connect, We Unify

01

KILAS KINERJA 2023

2023 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar Current Assets	5.062.044	4.564.963	4.123.284	3.777.477	3.242.483
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	2.973.989	3.149.015	3.293.457	3.475.562	3.818.799
Jumlah Aset Total Assets	**8.036.033**	**7.713.978**	**7.416.741**	**7.253.039**	**7.061.282**
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	1.012.238	884.410	760.896	649.131	774.741
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	200.053	143.743	232.610	223.313	260.468
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**1.212.292**	**1.028.153**	**993.507**	**872.444**	**1.035.208**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**6.823.741**	**6.685.825**	**6.423.235**	**6.380.595**	**6.026.073**
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**8.036.033**	**7.713.978**	**7.416.741**	**7.253.039**	**7.061.282**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih Operating Revenues, Netto	5.766.619	4.906.600	4.330.266	4.167.428	5.544.230
Beban Pokok Usaha Operating Expenses	(4.894.058)	(4.118.494)	(3.877.717)	(3.747.497)	(4.776.617)
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit	872.561	788.106	452.549	419.129	767.613
Beban Pemasaran dan Distribusi Distribution and Marketing Expenses	(21.181)	15.088	21.613	28.189	35.518
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(732.264)	666.989	443.958	561.132	472.454
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit or (Loss)	119.116	106.030	(13.023)	(14.331)	178.291
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih Non Operating Income - Net	179.405	168.366	104.662	94.404	114.313
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	298.521	274.396	91.639	80.073	292.605

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Beban Pajak Tax Expenses	(96.890)	(100.777)	(50.538)	(49.106)	(111.850)
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Items That Will Not be Reclassified Subsequently To Profit or Loss					
Keuntungan Aktuarial Periode Berjalan Actuarial Gain (Loss) for the Period	(69.937)	88.909	555	(17.990)	32.883
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Fair Values of Property Gain (Loss) Current Period	137.859	262.528	41.656	12.976	213.638
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit for the Current Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	201.202	173.248	40.928	30.737	180.134
Pemilik Non Pengendali Non Controlling Interest	429	371	173	229	620
Laba Tahun Berjalan Profit for the Current Year	201.631	173.619	41.101	30.967	180.755
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(63.772)	88.945	41.656	(17.990)	32.883
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	137.428	262.145	41.483	12.977	213.018
Pemilik Non Pengendali Non Controlling Interest	431	383	173	(1)	620
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income of The Current Year	137.859	262.528	41.656	12.976	213.638
Laba Bersih Per Saham Dasar (dalam Rp) Basic Earnings Per Share (in Rp)	26.426	22.755	5.365	4.058	23.690

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Dalam jutaan Rupiah | Expressed In Million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Cash Flows From Operating Activities	88.197	1.007.468	317.591	207.140	235.834
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Cash Flows From Investing Activities	(55.062)	(126.778)	(46.290)	406.611	(327.830)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows From Financing Activities	20.667	(4.624)	8.542	4.196	41.735
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	53.802	876.066	279.843	617.947	(50.261)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Beginning Balance Cash and Cash Equivalent	3.440.771	2.564.705	2.284.862	1.666.915	1.889.782
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Ending Balance Cash and Cash Equivalent	3.494.573	3.440.771	2.564.705	2.284.862	1.666.914

RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIO

Dalam satuan persen, kecuali dinyatakan lain | Expressed in percent, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas **Liquidity Ratio**					
Rasio Lancar Current Ratio	500,08	516,16	541,90	581,93	418,52
Rasio Kas Cash Ratio	345,23	389,05	337,06	352,78	351,99
Rasio Cepat Quick Ratio	356,97	397,45	413,04	395,90	245,17
Rasio *Leverage* **Leverage Ratio**					
Rasio Liabilitas atas Aset Debt-to-Assets Ratio	15,09	13,33	13,40	12,03	14,66
Rasio Liabilitas atas Ekuitas Debt-to-Equity Ratio	17,77	15,38	15,47	13,67	17,18
Rasio Liabilitas Jangka Panjang atas Ekuitas Long-Term Liabilities to Equity Ratio	2,93	2,15	3,62	3,50	4,32
Rasio Aktivitas **Activity Ratio**					
Rasio Perputaran Persediaan (dalam satuan kali) Turnover Ratio (in times)	14	12	10	9	12
Rasio Perputaran Aset Asset Turnover Ratio	73,32	66,35	60,46	57,56	330,50
Rasio Penagihan Rata-rata (dalam satuan hari) Average Collection Ratio (in days)	8	6	49	25	15
Rasio Profitabilitas **Profitability Ratio**					
Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset Return on Assets	2,51	2,25	0,55	0,42	2,56
Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas Return on Equity	2,95	2,60	0,64	0,49	3,00
Imbalan terhadap Investasi Return on Investment	10,97	9,47	7,17	7,17	10,88
Margin Laba Kotor atas Penjualan Gross Profit Margin	15,13	16,06	10,45	10,06	13,85
Margin Laba Bersih atas Penjualan Net Profit Margin on Sales	3,50	3,54	0,95	0,74	3,26
Rasio EBITDA atas Aset EBITDA on Asset Ratio	9,59	8,39	6,43	6,52	9,68

LOGISTIK NUSANTARA 2

GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL SUMMARY CHART

Dalam jutaan Rupiah
In millions of Rupiah

Jumlah Aset
Total Assets

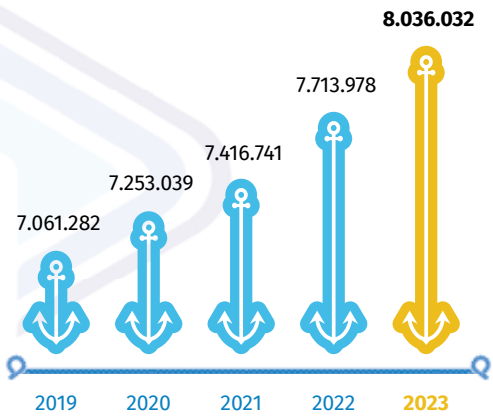

Dalam jutaan Rupiah
In millions of Rupiah

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

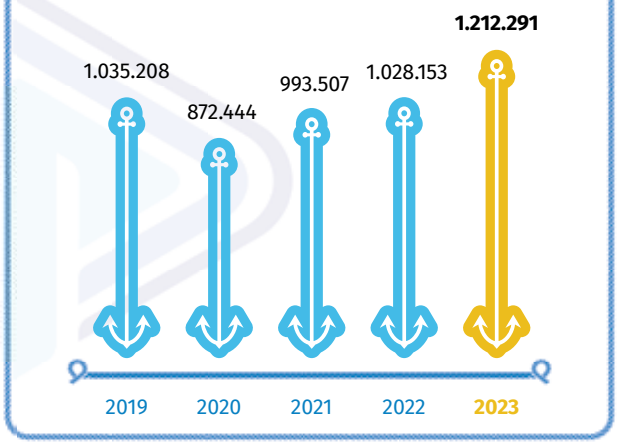

Dalam jutaan Rupiah
In millions of Rupiah

Jumlah Ekuitas
Total Equity

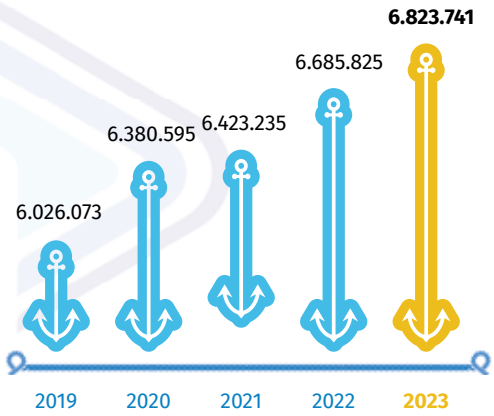

Dalam jutaan Rupiah
In millions of Rupiah

Pendapatan Usaha Bersih
Operating Revenues, Netto

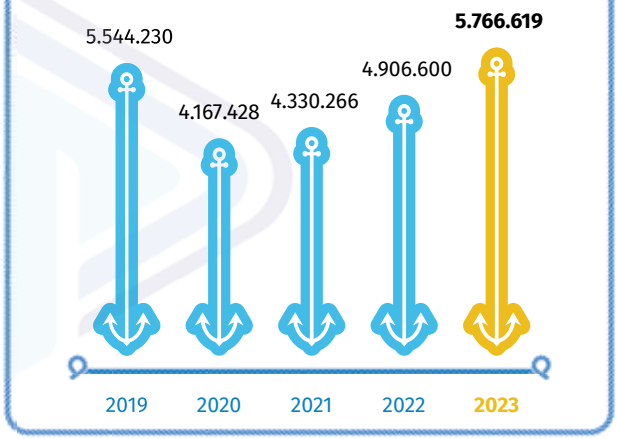

GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL SUMMARY CHART

Dalam jutaan Rupiah
In millions of Rupiah

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Current Year

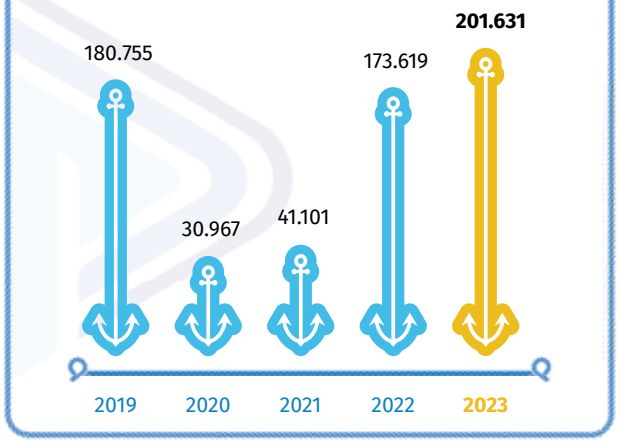

Dalam jutaan Rupiah
In millions of Rupiah

Laba (Rugi) Usaha
Operating Profit or (Loss)

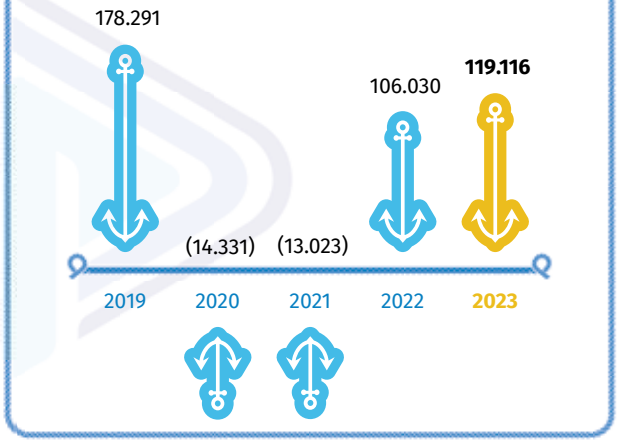

Dalam jutaan Rupiah
In millions of Rupiah

Kas dan Setara Kas Awal Tahun
Beginning Balance Cash and Cash Equivalent

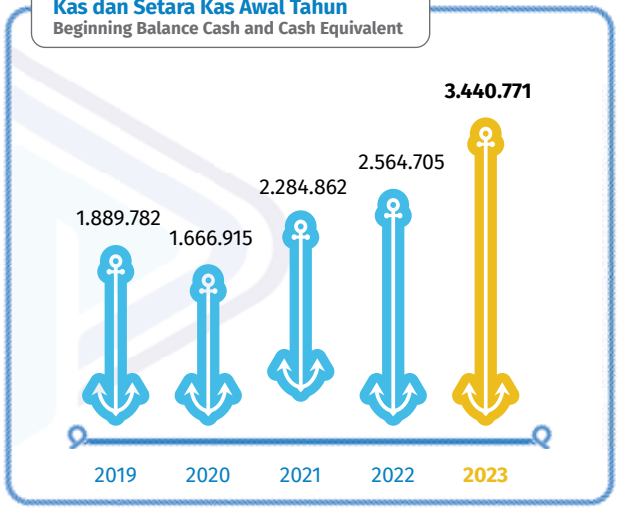

Dalam jutaan Rupiah
In millions of Rupiah

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Ending Balance Cash and Cash Equivalent

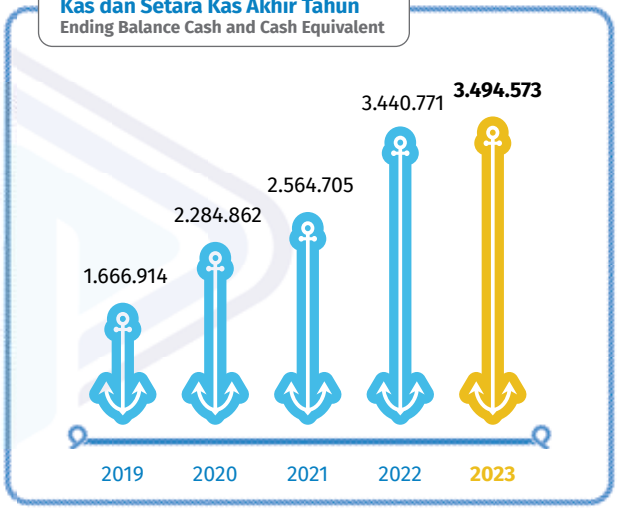

INFORMASI HARGA SAHAM
STOCK PRICE INFORMATION

Perseroan beroperasi dengan modal dasar sejumlah 13.000.000 saham dengan nominal Rp1.000.000,- per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sejumlah 7.629.900 saham, dengan nominal Rp7.629.900.000.000,-.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak melakukan pencatatan saham pada bursa mana pun. Sehingga tidak terdapat informasi terkait:
1. Jumlah saham yang beredar;
2. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;
3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan
4. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.

The Company operates with an authorized capital of 13,000,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000. As of December 31, 2023, and 2022, the Company's issued and fully paid capital consisted of 7,629,900 shares, with a nominal value of Rp7,629,900,000,000.

As of December 31, 2023, the Company had not listed its shares on any stock exchange. Consequently, there is no information available regarding:
1. Number of outstanding shares;
2. Market capitalization based on stock exchange prices where the shares are listed;
3. The highest, lowest, and closing stock prices based on stock exchange prices where the shares are listed; and
4. The trading volume on stock exchanges where the shares are listed.

AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTIONS

Pada tahun 2023, tidak terdapat aksi korporasi.

In 2023, there were no corporate actions.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMATION ON BONDS, SUKUK, AND/OR CONVERTIBLE BONDS

INFORMASI OBLIGASI

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak menerbitkan obligasi. Tidak terdapat informasi mengenai obligasi Perseroan untuk diungkapkan pada bagian ini.

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak menerbitkan sukuk. Tidak terdapat informasi mengenai sukuk Perseroan untuk diungkapkan pada bagian ini.

OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak menerbitkan obligasi konversi. Tidak terdapat informasi mengenai obligasi konversi Perseroan untuk diungkapkan pada bagian ini.

BOND INFORMATION

As of December 31, 2023, the Company had not issued any bonds. Therefore, there is no bond information to disclose in this section.

SUKUK INFORMATION

As of December 31, 2023, the Company had not issued any sukuk. Therefore, there is no sukuk information to disclose in this section.

CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2023, the Company had not issued any convertible bonds. Therefore, there is no convertible bond information to disclose in this section.

PERISTIWA PENTING 2023
2023 SIGNIFICANT EVENTS

04 Januari 2023
Pemuatan Pelayaran Perdana Kapal Tol Laut Tahun 2023 di Surabaya

January 4, 2023
Inaugural Voyage of the 2023 Sea Toll Ship in Surabaya

19 Januari 2023
Rapat Gabungan Terintegrasi BOC, BOD & Komite PELNI Group di Semarang

January 19, 2023
Integrated Joint Meeting of BOC, BOD & PELNI Group Committees in Semarang

24 Januari 2023
Nota Kesepahaman PELNI & UGM di Yogyakarta

January 24, 2023
Memorandum of Understanding between PELNI & UGM in Yogyakarta

30 Januari 2023
RUPS BUMN Klaster Logistik di Jakarta

January 30, 2023
BUMN Logistics Cluster General Meeting of Shareholders in Jakarta

03 Februari 2023
Pelantikan & Pengambilan Sumpah Jabatan di Jakarta

February 3, 2023
Oath-taking and Inauguration Ceremony in Jakarta

08 Februari 2023
Perjanjian Kerja Sama PELNI & DAMRI di Jakarta

February 8, 2023
Cooperation Agreement between PELNI & DAMRI in Jakarta

15 Februari 2023
Pembukaan Rapim PELNI 2023 di Bali

February 15, 2023
Opening of the PELNI 2023 Leadership Meeting in Bali

18 Februari 2023
TJSL RKS di Denpasar

February 18, 2023
CSR Program in Denpasar

12-13 Maret 2023
Penyerahan Bantuan Korban Banjir & Tanah Longsor di daerah Serasan Kepulauan Riau

March 12-13, 2023
Aid Distribution for Flood and Landslide Victims in Serasan, Riau Island

15 Maret 2023
Nota Kesepahaman PELNI & BALTIC di Jakarta

March 15, 2023
Memorandum of Understanding between PELNI & BALTIC in Jakarta

27 Maret 2023
Press Conference Mudik Lebaran 2023 di Jakarta

March 27, 2023
Press Conference on 2023 Eid Al-Fitr Homecoming in Jakarta

30 Maret 2023
Penyerahan LHP di Jakarta

March 30, 2023
Submission of Audit Reports in Jakarta

PERISTIWA PENTING 2023
2023 SIGNIFICANT EVENTS

31 Maret 2023
Safari Ramadan BUMN 2023 di Jakarta

March 31, 2023
BUMN Ramadan Safari 2023 in Jakarta

06 April 2023
Indonesia CEO *Awards* 2023 di Jakarta

April 6, 2023
Pemuatan Pelayaran Perdana Kapal Tol Laut Tahun 2023 di Surabaya

06 April 2023
Ngopi BUMN di Jakarta

April 6, 2023
BUMN Coffee Event in Jakarta

28 April 2023
Tasyakuran HUT KE-71 PELNI, Kunjungan MENHUB & WAMEN II di Jakarta

April 28, 2023
71st PELNI Anniversary Celebration, Visit by the Minister of Transportation & Deputy Minister II in Jakarta

7-10 Mei 2023
KM Sinabung Akomodasi Terapung KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo

May 7-10, 2023
KM Sinabung as Floating Accommodation for ASEAN Summit 2023 in Labuan Bajo

11 Mei 2023
Puncak HUT 71 PELNI - Balai Sarbini di Jakarta

May 11, 2023
71st PELNI Anniversary Celebration at Balai Sarbini in Jakarta

16 Mei 2023
Penyerahan Sertifikat Tanah dari Pemerintah Lembata ke PELNI di Jakarta

May 16, 2023
Certificate Handover from the Lembata Government to PELNI in Jakarta

25 Mei 2023
Grand Launching Logo & *Tagline* Baru PT PELNI (Persero) di Jakarta

May 25, 2023
Grand Launch of PT PELNI's (Persero) New Logo & Tagline in Jakarta

30 Mei 2023
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Manajemen & Serikat Pekerja PELNI di Jakarta

May 30, 2023
Signing of Collective Labor Agreement between Management & PELNI Workers' Union in Jakarta

09 Juni 2023
PKS PELNI dengan TNI AL di Jakarta

June 9, 2023
Cooperation Agreement between PELNI and Indonesian Navy in Jakarta

15 Juni 2023
Mitra *Gathering* 2023 di Jakarta

June 15, 2023
Partner Gathering 2023 in Jakarta

17 Juni 2023
HSE Indonesia *Award* 2023 - *The Best Fire Safety & The Best Safety Induction* 2023 di Jakarta

June 17, 2023
HSE Indonesia Award 2023 - Best Fire Safety & Best Safety Induction 2023 in Jakarta

PERISTIWA PENTING 2023
2023 SIGNIFICANT EVENTS

20 Juni 2023
Pelepasan Pelayaran KM Camara Nusantara 1 di Kupang

June 20, 2023
Inauguration of KM Camara Nusantara 1 Voyage in Kupang

25 Juni 2023
TJSL Yayasan Pendidikan Harapan Papua KM Ciremai di Jayapura

June 25, 2023
CSR Education Foundation Program of KM Ciremai in Jayapura

02 Juli 2023
Pemotongan Hewan Qurban Idul Adha 1444 H PT PELNI (Persero) di Jakarta

July 2, 2023
Qurban Sacrifice Ceremony for Eid al-Adha 1444 H by PT PELNI (Persero) in Jakarta

13 Juli 2023
Konsinyering PSO & Subsidi Kementerian Perhubungan RI Dengan PT PELNI (Persero) di Jakarta

July 13, 2023
PSO & Subsidy Coordination Meeting of the Indonesian Ministry of Transportation with PT PELNI (Persero) in Jakarta

21 Juli 2023
Rapat Koordinasi BPH MIGAS & PT PELNI (Persero) di Bandung

July 21, 2023
Coordination Meeting between BPH MIGAS & PT PELNI (Persero) in Bandung

02 Agustus 2023
Media Expose

August 2, 2023
Media Expose

03 Agustus 2023
Townhall Meeting & Perayaan 3 Tahun AKHLAK

August 3, 2023
Townhall Meeting & 3rd Anniversary Celebration of AKHLAK

15 Agustus 2023
Silaturahmi BOC dan BOD PELNI di Jakarta

August 15, 2023
BOC and BOD PELNI Meeting in Jakarta

04 September 2023
Hari Pelanggan Nasional

September 4, 2023
National Customer Day

06 September 2023
Penghargaan TOP GRC *Awards* 2023

September 6, 2023
TOP GRC Awards 2023

12 September 2023
Penandatanganan Kerja Sama Antara PT PELNI dengan BP2TL di Jakarta

September 12, 2023
Cooperation Agreement Signing between PT PELNI and BP2TL in Jakarta

29 September 2023
Launching Wajah Baru KM Kelud

September 29, 2023
Launch of the New Look of KM Kelud

PERISTIWA PENTING 2023
2023 SIGNIFICANT EVENTS

04 Oktober 2023
MoU PELNI & PINDAD di Bandung

October 4, 2023
MoU between PELNI & PINDAD in Bandung

10 Oktober 2023
Piala *Marketeers Award*

October 10, 2023
Marketeers Award Ceremony

27 Oktober 2023
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PELNI & BMKG

October 27, 2023
Cooperation Agreement Signing between PELNI & BMKG

27-29 Oktober 2023
Leadership Bootcamp BUMN Muda 2023

October 27-29, 2023
BUMN Young Leaders 2023 Bootcamp

02 November 2023
TJSL Terumbu Karang Pantai Bangsring Banyuwangi

November 2, 2023
CSR Coral Reef Program at Bangsring Beach, Banyuwangi

3 November 2023
Penyerahan Sertifikasi HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*)

November 3, 2023
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Certification Handover

06 November 2023
Penghargaan ASRRAT 2023 - *Asia Sustainability Reporting* Rating

November 6, 2023
ASRRAT 2023 Award - Asia Sustainability Reporting Rating

28 November 2023
Bisnis Indonesia *Logistics Awards* 2023

November 28, 2023
Bisnis Indonesia Logistics Awards 2023

08 Desember 2023
Konferensi Pers PELNI Nataru 2023-2024 di Pullman Jakarta

December 8, 2023
PELNI Nataru 2023-2024 Press Conference at Pullman Jakarta

19 Desember 2023
Anugerah KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

December 19, 2023
Public Information Openness Award

20 Desember 2023
Peringatan Hari Ibu & *Launching* Pengurus Srikandi PELNI

December 20, 2023
Mother's Day Celebration & Launching of PELNI Srikandi Committee

29 Desember 2023
BPH Migas *Awards* 2023

December 29, 2023
BPH Migas Awards 2023

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN | AWARDS

Indonesia Best 50 CEO 2023 in Shipping Category

The Iconomics
(6 April 2023 / April 6, 2023)

Transportation Services

HSE Indonesia Awards
(17 Juni 2023 / June 17, 2023)

Tol Laut dengan *On Schedule Performance* dan Tol Laut dengan *Load Factor* Terbaik

Kementerian Perhubungan RI
(9 Agustus 2023)
Kementerian Perhubungan RI
(9 Agustus 2023)

#Star4 dan The Most Committed GRC Leader 2023

TOP Government, Risk & Compliance (GRC) Awards 2023
(6 September 2023)
TOP Government, Risk & Compliance (GRC) Awards 2023
(6 September 2023)

Experiental Education Program of the Year melalui program Tour On Board

Marketeers Editor's Choice Awards 2023
(10 Oktober 2023)

Best Brand Popularity, Best Social Reputation

5th Anniversary Indonesia BUMN Awards 2023
The Iconomics (12 Oktober 2023)

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

ASSRAT 2023

Gold Rank Asia Sustainability Reporting Rating
(6 November 2023)

The Highest Level of Maritime Compliance and Safety Management Commitment

Bisnis Indonesia Logistics Awards 2023
(29 November 2023)
Bisnis Indonesia Logistics Awards 2023
(29 November 2023)

TOP Digital 2023 # Stars 4 dan TOP Leader on Digital Implementation 2023 TOP Digital Awards 2023

Majalah IT Works (4 Desember 2023)
Majalah IT Works (4 Desember 2023)

Ditlala Awards Operator Kapal Ternak Terbaik 2023 dan Operator Perawatan Kapal Terbaik dengan umur Kapal 0 5 Tahun

Kementerian Perhubungan – Ditlala (7 Desember 2023)
Kementerian Perhubungan – Ditlala (7 Desember 2023)

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kategori BUMN Sebagai Badan Publik Informatif Peringkat 4 Komisi Informasi Pusat
(19 Desember 2023)

BPH Migas Awards 2023 Kategori Konsumen Pengguna JBT Minyak Solar Kategori Transportasi Khusus (Angkutan Umum Penumpang/ Barang) Terbaik Dalam Perencanaan dan Pemanfaatan

BPH Migas (29 Desember 2023
BPH Migas (29 Desember 2023

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

SERTIFIKASI | CERTIFICATIONS

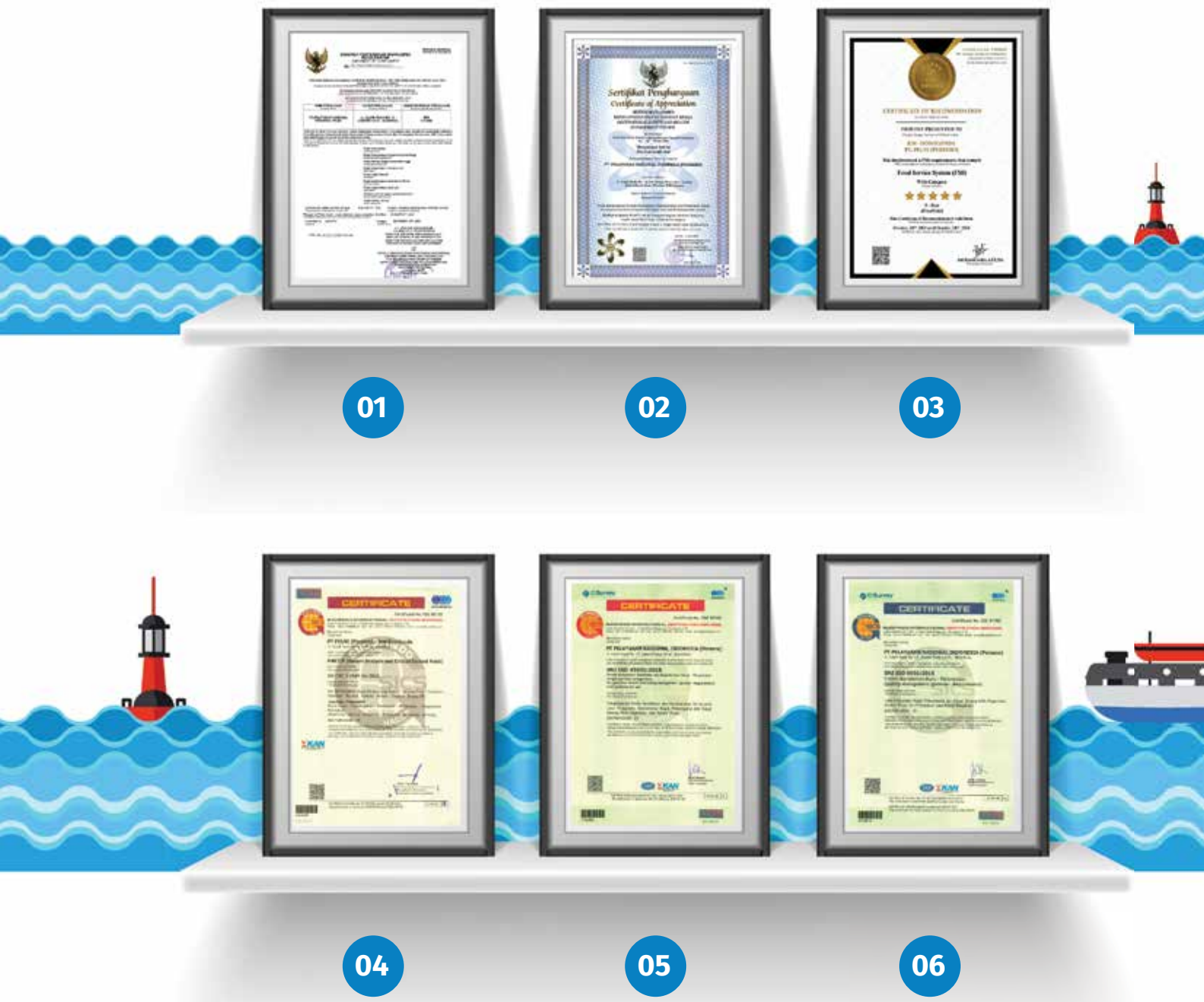

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

01

Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No. AL/601/186/16/DK/2021
Safety Management Adjustment Document No. AL/601/186/16/DK/2021

Penyelenggara: Menteri Perhubungan
Masa berlaku: 07 Agustus 2020-10 Agustus 2025
Issuer: Minister of Transportation
Validity Period: August 7, 2020 - August 10, 2025

02

Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Health and Safety Management System Award Certificate

Penyelenggara: Menteri Ketenagakerjaan
Masa berlaku: 3 tahun sejak dikeluarkan
Issuer: Minister of Manpower
Validity Period: 3 years from issuance

03

Sertifikat Rekomendasi untuk KM DOROLONDA PT PELNI (Persero) yang telah mengimplementasikan persyaratan FSS dengan mematuhi *Food Service System* (FSS) dengan kategori 5-*star* (*Excellent*)
Recommendation Certificate Awarded to KM DOROLONDA PT PELNI (Persero) for implementing the requirements of the Food Service System (FSS) with a 5-star (Excellent) rating

Penyelenggara: PT Denasti Arrashiva Professional
Masa berlaku: 20 Oktober 2023-20 Oktober 2024
Issuer: PT Denasti Arrashiva Professional
Validity Period: October 20, 2023 - October 20, 2024

04

HACCP (*Hazard Alaysis and Critical Control Point*) dan memenuhi standar SNI CXC 1: 1969 rev 2020 Ruang Lingkup KM DOROLONDA (Kapal Penumpang) *Route*: Tanjung Priok-Surabaya-Makassar-Baubau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung (PP)
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Compliance Meeting the standards of SNI CXC 1: 1969 rev 2020 Scope: KM DOROLONDA (Passenger Ship) Route: Tanjung Priok-Surabaya-Makassar-Baubau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung (Round Trip)

Penyelenggara: SUCOFINDO
Masa berlaku: 26 September 2023-25 September 2026
Issuer: SUCOFINDO
Validity Period: September 26, 2023 - September 25, 2026

05

SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Persyaratan dengan Panduan Penggunaan
SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System - Requirements with guidance for use

Penyelenggara: SUCOFINDO
Masa berlaku: 09 Januari 2024-08 Januari 2027
Issuer: SUCOFINDO
Validity Period: January 9, 2024 - January 8, 2027

06

SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan
SNI ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirements

Penyelenggara: SUCOFINDO
Masa berlaku: 03 Februari 2024-02 Februari 2027
Issuer: SUCOFINDO
Validity Period: February 3, 2024 - February 2, 2027

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

SERTIFIKASI KAPAL
SHIP CERTIFICATION

NO	NAMA KAPAL SHIP NAME	SERTIFIKAT GARIS MUAT | LOAD LINE CERTIFICATE				
		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	
			DIKELUARKAN | ISSUED	JATUH TEMPO | DUE		
1	KM AWU	34108	6 April 2021 / April 6, 2021	8 Juni 2026 / June 8, 2026	51610	
2	KM BUKIT RAYA	40415	20 Oktober 2023 / October 20, 2023	30 Desember 2028 / December 30, 2028	60173	
3	KM BINAIYA	28870	3 Mei 2019 / May 3, 2019	21 Juni 2024 / June 21, 2024	43688	
4	KM BUKIT SIGUNTANG	34091	5 April 2021 / April 5, 2021	23 Mei 2026 / May 23, 2026	051031	
5	KM CIREMAI	039851	15 Agustus 2023 / August 15, 2023	1 Agustus 2028 / August 1, 2028	01099-TP	
6	KM DOBONSOLO	039102	19 Mei 2023 / May 19, 2023	10 Maret 2028 / March 10, 2028	00245-TP	
7	KM DOROLONDA	36582	20 Mei 2022 / May 20, 2022	11 Juli 2026 / July 11, 2026	52470	
8	KM EGON	15362	10 Juli 2020 / July 10, 2020	29 Juni 2025 / June 29, 2025	48726	
9	KM G DEMPO	039431	27 Juni 2023 / June 27, 2023	20 Juni 2028 / June 20, 2028	40449	
10	KM KELIMUTU	31321	20 Maret 2020 / March 20, 2020	4 Februari 2025 / February 4, 2025	47123	
11	KM KELUD	40448	30 Oktober 2023 / October 30, 2023	28 September 2028 / September 28, 2028	42499	
12	KM LAWIT	030400	18 November 2019 / November 18, 2019	31 Agustus 2024 / August 31, 2024	45892	
13	KM LEUSER	039464	4 Juli 2023 / July 4, 2023	28 Mei 2028 / May 28, 2028	41031	
14	KM LAMBELU	36234	22 Maret 2022 / March 22, 2022	15 Mei 2027 / May 15, 2027	54120	
15	KM LABOBAR	29317	1 Juli 2019 / July 1, 2019	26 Juni 2024 / June 26, 2024	44340	
16	KM NGGAPULU	36381	17 April 2022 / April 17, 2022	5 April 2027 / April 5, 2027	55345	
17	KM PANGRANGO	36185	12 Maret 2022 / March 12, 2022	9 November 2026 / November 9, 2026	53502	
18	KM SIRIMAU	32093	9 Juni 2020 / June 9, 2020	17 Mei 2025 / May 17, 2025	48091	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

	SERTIFIKAT LAMBUNG HULL CERTIFICATE		SERTIFIKAT MESIN | ENGINE CERTIFICATE			KETERANGAN DESCRIPTION
	TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		
	DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE		DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE	
	12 Agustus 2021 / August 12, 2021	8 Juni 2026 / June 8, 2026	33783	12 Agustus 2021 / August 12, 2021	8 Juni 2026 / June 8, 2026	PERMANEN 2026 / PERMANENT 2026
	4 Februari 2024 / February 4, 2024	30 Desember 2028 / December 30, 2028	39325	4 Februari 2024 / February 4, 2024	30 Desember 2028 / December 30, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
	3 Mei 2019 / May 3, 2019	21 September 2024 / September 21, 2024	28506	3 Mei 2019 / May 3, 2019	21 September 2024/ September 21, 2024	Sementara CN / Temporary CN
	27 Mei 2021 / May 27, 2021	23 Mei 2026 / May 23, 2026	033434	27 Mei 2021 / May 27, 2021	23 Mei 2026 / May 23, 2026	PERMANEN 2026 / PERMANENT 2026
	14 Agustus 2023 / August 14, 2023	16 Juli 2024 / July 16, 2024	01099-TP	14 Agustus 2023 / August 14, 2023	16 Juli 2024 / July 16, 2024	Masih Sertifikat Sementara / Still Temporary Certificate
	24 Februari 2023 / February 24, 2023	10 Juli 2024 / July 10, 2024	00245-TP	24 Februari 2023 / February 24, 2023	10 Juli 2024 / July 10, 2024	*Load Line* Permanen, Masih Sertifikat Sementara TP / Permanent Load Line, Still Certificate Temporary TP
	18 November 2021 / November 18, 2021	11 Juli 2026 / July 11, 2026	34351	18 November 2021 / November 18, 2021	11 Juli 2026 / July 11, 2026	PERMANEN 2026 / PERMANENT 2026
	19 Agustus 2020 / August 19, 2020	29 Juni 2025 / June 29, 2025	31953	19 Agustus 2020 / August 19, 2020	29 Juni 2025 / June 29, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
	31 Agustus 2023 / August 31, 2023	7 Juni 2024 / June 7, 2024	26683	31 Agustus 2018 / August 31, 2018	7 Juni 2024 / June 7, 2024	Sementara Mesin & Lambung TP / Temporary Engine & Hull TP
	20 Maret 2020 / March 20, 2020	4 Februari 2025 / February 4, 2025	30856	20 Maret 2020 / March 20, 2020	4 Februari 2025 / February 4, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
	1 Februari 2019 / February 1, 2019	14 September 2024/ September 14, 2024	27678	1 Februari 2019 / February 1, 2019	14 September 2024/ September 14, 2024	Sementara TP / Temporary TP
	18 November 2019 / November 18, 2019	31 Agustus 2024 / August 31, 2024	30012	18 November 2019 / November 18, 2019	31 Agustus 2024 / August 31, 2024	
	13 Maret 2024 / March 13, 2024	12 Juni 2024 / June 12, 2024	26669	13 Maret 2024 / March 13, 2024	12 Juni 2024 / June 12, 2024	Sementara SB / Temporary SB
	28 Mei 2022 / May 28, 2022	15 Mei 2027 / May 15, 2027	35466	28 Mei 2022 / May 28, 2022	15 Mei 2027 / May 15, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
	1 Juli 2019 / July 1, 2019	26 Juni 2024 / June 26, 2024	28953	1 Juli 2019 / July 1, 2019	26 Juni 2024 / June 26, 2024	
	8 Oktober 2022 / October 8, 2022	5 April 2027 / April 5, 2027	36229	8 Oktober 2022 / October 8, 2022	5 April 2027 / April 5, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
	12 Maret 2022 / March 12, 2022	9 November 2026 / November 9, 2026	35003	12 Maret 2022 / March 12, 2022	9 November 2026 / November 9, 2026	PERMANEN 2026 / PERMANENT 2026
	9 Juni 2020 / June 9, 2020	17 Mei 2025 / May 17, 2025	31524	9 Juni 2020 / June 9, 2020	17 Mei 2025 / May 17, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

NO	NAMA KAPAL SHIP NAME	SERTIFIKAT GARIS MUAT | LOAD LINE CERTIFICATE				
		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	
			DIKELUARKAN | ISSUED	JATUH TEMPO | DUE		
19	KM SINABUNG	36585	19 Mei 2022 / May 19, 2022	18 April 2027 / April 18, 2027	54327	
20	KM SANGIANG	35346	28 Oktober 2021 / October 28, 2021	12 Mei 2024 / May 12, 2024	43477	
21	KM TILONGKABILA	31651	30 April 2020 / April 30, 2020	4 Maret 2025 / March 4, 2025	47545	
22	KM TATAMAILAU	31469	7 April 2020 / April 7, 2020	25 Maret 2025 / March 25, 2025	47312	
23	KM TIDAR	36417	20 April 2022 / April 20, 2022	26 November 2026 / November 26, 2026	54374	
24	KM UMSINI	31745	30 April 2020 / April 30, 2020	31 Maret 2025 / March 31, 2025	47672	
25	KM WILIS	31662	23 April 2020 / April 23, 2020	25 Oktober 2024 / October 25, 2024	47565	
26	KM JET LINER	40300	9 Oktober 2023 / October 9, 2023	4 Juni 2028 / June 4, 2028	42713	
27	KM CAMARA NUSANTARA 1	15755	16 November 2020 / November 16, 2020	23 November 2025 / November 23, 2025	50468	
28	KM KENDHAGA NUSANTARA 7	018253	29 Mei 2023 / May 29, 2023	19 Januari 2028 / January 19, 2028	058652	
29	KM KENDHAGA NUSANTARA 11	19105	12 Januari 2024 / January 12, 2024	20 Februari 2029 / February 20, 2029	060191	
30	KM KENDHAGA NUSANTARA 8	14181	10 September 2019 / September 10, 2019	30 April 2024 / April 30, 2024	45228	
31	KM LOGISTIK NUSANTARA 1	34249	26 April 2021 / April 26, 2021	24 April 2029 / April 24, 2029	51137	
32	KM LOGISTIK NUSANTARA 2	40182	28 September 2023 / September 28, 2023	16 September 2027 / September 16, 2027	58758	
33	KM LOGISTIK NUSANTARA 3	29530	25 Juli 2019 / July 25, 2019	3 Juli 2024 / July 3, 2024	44651	
34	KM LOGISTIK NUSANTARA 4	039611	25 Juli 2019 / July 25, 2019	4 Juni 2028 / June 4, 2028	60018	
35	KM LOGISTIK NUSANTARA 5	039513	12 Juli 2023 / July 12, 2023	10 Februari 2028 / February 10, 2028	58801	
36	KM LOGISTIK NUSANTARA 6	32476	14 Agustus 2020 / August 14, 2020	30 Juli 2025 / July 30, 2025	48771	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

SERTIFIKAT LAMBUNG HULL CERTIFICATE		SERTIFIKAT MESIN | ENGINE CERTIFICATE			KETERANGAN DESCRIPTION
TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		
DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE		DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE	
20 Juni 2022 / June 20, 2022	19 Agustus 2024 / August 19, 2027	35558	20 Juni 2022 / June 20, 2022	18 April 2027 / April 18, 2027	Lambun Sementara SB – Tambah Notasi / Temporary Hull SB - Addition Notation
18 April 2019 / April 18, 2019	12 Mei 2024 / May 12, 2024	28372	18 April 2019 / April 18, 2019	12 Mei 2024 / May 12, 2024	Survei penundaan pengedokan di Bitung / Docking Survey Postponement in Bitung
30 April 2020 / April 30, 2020	4 Maret 2025 / March 4, 2025	31139	30 April 2020 / April 30, 2020	4 Maret 2025 / March 4, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
7 April 2020 / April 7, 2020	25 Maret 2025 / March 25, 2025	30982	7 April 2020 / April 7, 2020	25 Maret 2025 / March 25, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
27 Juni 2022 / June 27, 2022	26 November 2026 / November 26, 2026	35612	27 Juni 2020 / June 27, 2020	26 November 2026/ November 26, 2026	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
30 April 2020 / April 30, 2020	31 Maret 2025 / March 31, 2025	31242	30 April 2020 / April 30, 2020	31 Maret 2025 / March 31, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
23 April 2020 / April 23, 2020	25 Oktober 2024 / October 25, 2024	31156	23 April 2020 / April 23, 2020	25 Oktober 2024 / October 25, 2024	
18 Februari 2019 / February 18, 2019	27 Mei 2024 / May 27, 2024	27818	18 Februari 2019 / February 18, 2019	27 Mei 2024 / May 27, 2024	Sementara, MS / Temporary, MS
13 Maret 2021 / March 13, 2021	23 November 2025 / November 23, 2025	33066	13 Maret 2021 / March 13, 2021	23 November 2025 / November 23, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
15 September 2023 / September 15, 2023	20 Februari 2028 / February 20, 2028	038351	15 September 2023 / September 15, 2023	19 Januari 2028 / January 19, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
5 Februari 2024 / February 5, 2024	20 Februari 2029 / February 20, 2029	039340	5 Februari 2024 / February 5, 2024	20 Februari 2029 / February 20, 2029	PERMANEN 2029 / PERMANENT 2029
10 September 2019 / September 10, 2019	30 April 2024 / April 30, 2024	29557	10 September 2019 / September 10, 2019	30 April 2024 / April 30, 2024	Kapal akan *docking* Maret 2024 / The vessel will dock in March 2024
7 Juni 2021 / June 7, 2021	24 April 2029 / April 24, 2029	33508	7 Juni 2021 / June 7, 2021	24 April 2026 / April 24, 2026	PERMANEN 2026 / PERMANENT 2026
26 September 2023 / September 28, 2023	16 September 2027 / September 16, 2027	38424	28 September 2023 / September 28, 2023	16 September 2027/ September 16, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
25 Juli 2019 / July 25, 2019	3 Juli 2024 / July 3, 2024	29163	25 Juli 2019 / July 25, 2019	3 Juli 2024 / July 3, 2024	
17 Januari 2024 / January 17, 2024	4 Juni 2028 / June 4, 2028	39241	17 Januari 2024 / January 17, 2024	4 Juni 2028 / June 4, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
29 September 2023 / September 29, 2023	10 Februari 2028 / February 10, 2028	38419	29 September 2023 / September 29, 2023	10 Februari 2028 / February 10, 2028	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
26 Agustus 2020 / August 26, 2020	30 Juli 2025 / July 30, 2025	31981	26 Agustus 2020 / August 26, 2020	30 Juli 2025 / July 30, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

DATA SERTIFIKAT KAPAL PERINTIS TAHUN 2023 | PIONEER SHIP CERTIFICATE DATA IN 2023

NO	NAMA KAPAL SHIP NAME	SERTIFIKAT GARIS MUAT | LOAD LINE CERTIFICATE				
		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	
			DIKELUARKAN | ISSUED	JATUH TEMPO | DUE		
1	KM SABUK NUSANTARA 48	15193	2 Juni 2020 / June 2, 2020	22 Januari 2025 / January 22, 2025	48005	
2	KM SABUK NUSANTARA 42	14631	17 Januari 2020 / January 17, 2020	31 Desember 2024 / December 31, 2024	46518	
3	KM SABUK NUSANTARA 52	14561	20 Desember 2019 / December 20, 2019	26 Januari 2025 / January 26, 2025	46256	
4	KM SABUK NUSANTARA 53	15240	10 Juni 2020 / June 10, 2020	5 Desember 2024 / December 5, 2024	48127	
5	KM SABUK NUSANTARA 58	16586	7 Oktober 2021 / October 7, 2021	27 Juni 2026 / June 27, 2026	52546	
6	KM SABUK NUSANTARA 63	16611	21 Oktober 2021 / October 21, 2021	7 Oktober 2026 / October 7, 2026	52485	
7	KM SABUK NUSANTARA 80	017572	10 Oktober 2022 / October 10, 2022	8 Oktober 2027 / October 8, 2027	05538	
8	KM SABUK NUSANTARA 85	018278	5 Juni 2023 / June 5, 2023	22 Januari 2028 / January 22, 2028	057611	
9	KM SABUK NUSANTARA 86	018373	11 Juli 2023 / July 11, 2023	5 April 2028 / April 5, 2028	59337	
10	KM SABUK NUSANTARA 95	018283	8 Juni 2023 / June 8, 2023	21 Maret 2028 / March 21, 2028	058127	
11	KM SABUK NUSANTARA 96	18002	23 Maret 2023 / March 23, 2023	30 April 2028 / April 30, 2028	058601	
12	KM SABUK NUSANTARA 97	018393	17 Juli 2023 / July 17, 2023	21 Maret 2028 / March 21, 2028	45126	
13	KM SABUK NUSANTARA 98	058366	13 Juli 2023 / July 13, 2023	13 April 2028 / April 13, 2028	41914	
14	KM SABUK NUSANTARA 100	018453	1 Agustus 2023 / August 1, 2023	8 Maret 2028 / March 8, 2028	58880	
15	KM SABUK NUSANTARA 106	18709	5 Oktober 2023 / October 5, 2023	13 April 2028 / April 13, 2028	58938	
16	KM SABUK NUSANTARA 112	18618	12 September 2023 / September 12, 2023	27 April 2028 / April 27, 2028	58662	
17	KM SABUK NUSANTARA 104	018565	5 September 2023 / September 5, 2023	20 April 2028 / April 20, 2028	58894	
18	KM SABUK NUSANTARA 105	018378	7 Desember 2023 / December 7, 2023	24 April 2028 / April 24, 2028	58975	
19	KM SABUK NUSANTARA 81	017890	2 Februari 2023 / February 2, 2023	26 Oktober 2027 / October 26, 2027	056353	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

SERTIFIKAT LAMBUNG HULL CERTIFICATE		SERTIFIKAT MESIN | ENGINE CERTIFICATE			KETERANGAN DESCRIPTION
TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		
DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE		DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE	
2 Juni 2020 / June 2, 2020	22 Januari 2025 / January 22, 2025	31463	2 Juni 2020 / June 2, 2020	22 Januari 2025 / January 22, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
17 Januari 2020 / January 17, 2020	31 Desember 2024 / December 31, 2024	30433	17 Januari 2020 / January 17, 2020	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
20 Desember 2019 / December 20, 2019	26 Januari 2025 / January 26, 2025	30269	20 Desember 2019 / December 20, 2019	26 Januari 2025 / January 26, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
10 Juni 2020 / June 10, 2020	5 Desember 2024 / December 5, 2024	31548	10 Juni 2020 / June 10, 2020	5 Desember 2024 / December 5, 2024	
16 November 2021 / November 16, 2021	27 Juni 2026 / June 27, 2026	34317	16 November 2021 / November 16, 2021	27 Juni 2026 / June 27, 2026	PERMANEN 2026 / PERMANENT 2026
23 November 2021 / November 23, 2021	7 Oktober 2026 / October 7, 2026	34338	23 November 2021 / November 23, 2021	7 Oktober 2026 / October 7, 2026	PERMANEN 2026 / PERMANENT 2026
13 Oktober 2022 / October 13, 2022	8 Oktober 2027 / October 8, 2027	036257	13 Oktober 2022 / October 13, 2022	8 Oktober 2027 / October 8, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
26 Juni 2023 / June 26, 2023	22 Januari 2028 / January 22, 2028	037668	26 Juni 2023 / June 26, 2023	22 Januari 2028 / January 22, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
14 November 2023 / November 14, 2023	5 April 2028 / April 5, 2028	38787	14 November 2023 / November 14, 2023	5 April 2028 / April 5, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
9 Agustus 2023 / August 9, 2023	21 Maret 2028 / March 21, 2028	037988	9 Agustus 2023 / August 9, 2023	21 Maret 2028 / March 21, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
13 September 2023 / September 13, 2023	30 April 2028 / April 30, 2028	038313	13 September 2023 / September 13, 2023	30 April 2028 / April 30, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
30 Agustus 2023 / August 30, 2023	21 Maret 2028 / March 21, 2028	29482	30 Agustus 2019 / August 30, 2019	21 Maret 2028 / March 21, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
24 Agustus 2023 / August 24, 2023	13 April 2028 / April 13, 2028	27269	24 Agustus 2023 / August 24, 2023	13 April 2028 / April 13, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
3 Oktober 2023 / October 3, 2023	8 Maret 2028 / March 8, 2028	38482	3 Oktober 2023 / October 3, 2023	28 Maret 2028 / March 28, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
5 Oktober 2023 / October 5, 2023	13 April 2028 / April 13, 2028	38536	5 Oktober 2023 / October 5, 2023	13 Oktober 2028 / October 13, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
12 September 2023 / September 12, 2023	27 April 2028 / April 27, 2028	38360	12 September 2023 / September 12, 2023	27 April 2028 / April 27, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
4 Oktober 2023 / October 4, 2023	20 April 2028 / April 20, 2028	38505	4 Oktober 2023 / October 4, 2023	20 April 2028 / April 20, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
12 Oktober 2023 / October 12, 2023	24 April 2028 / April 24, 2028	38562	12 Oktober 2023 / October 12, 2023	24 April 2028 / April 24, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
2 Februari 2023 / February 2, 2023	26 Oktober 2027 / October 26, 2027	036902	2 Februari 2023 / February 2, 2023	26 Oktober 2027 / October 26, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

DATA SERTIFIKAT KAPAL PERINTIS TAHUN 2023 | PIONEER SHIP CERTIFICATE DATA IN 2023

NO	NAMA KAPAL SHIP NAME	SERTIFIKAT GARIS MUAT | LOAD LINE CERTIFICATE			
		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER
			DIKELUARKAN | ISSUED	JATUH TEMPO | DUE	
20	KM SABUK NUSANTARA 68	18697	4 Oktober 2023 / October 4, 2023	1 Agustus 2028 / August 1, 2028	68886
21	KM SABUK NUSANTARA 93	18424	24 Juli 2023 / July 24, 2023	12 Juli 2028 / July 12, 2028	58244
22	KM SABUK NUSANTARA 92	18577	8 September 2023 / September 8, 2023	10 Agustus 2028 / August 10, 2028	59205
23	KM SABUK NUSANTARA 69	19122	16 Januari 2024 / January 16, 2024	14 November 2028 / November 14, 2028	60284
24	KM SABUK NUSANTARA 94	18590	9 September 2023 / September 9, 2023	12 Juli 2028 / July 12, 2028	59055
25	KM SABUK NUSANTARA 71	018044	3 April 2023 / April 3, 2023	27 Februari 2028 / February 27, 2028	056826
26	KM SABUK NUSANTARA 78	018180	12 Mei 2023 / May 12, 2023	7 Maret 2028 / March 7, 2028	59395
27	KM SABUK NUSANTARA 75	14108	21 Agustus 2019 / August 21, 2019	14 Mei 2024 / May 14, 2024	45003
28	KM SABUK NUSANTARA 90	18756	17 Oktober 2023 / October 17, 2023	19 Desember 2028 / December 19, 2028	59837
29	KM SABUK NUSANTARA 91	19243	19 Februari 2024 / February 19, 2024	27 Februari 2029 / February 27, 2029	44274
30	KM SABUK NUSANTARA 108	18818	7 November 2023 / November 7, 2023	6 Agustus 2028 / August 6, 2028	48755

DATA SERTIFIKAT KAPAL REDE TAHUN 2023 | PIONEER SHIP CERTIFICATE DATA IN 2023

NO	NAMA KAPAL SHIP NAME	SERTIFIKAT GARIS MUAT | LOAD LINE CERTIFICATE			
		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER
			DIKELUARKAN | ISSUED	JATUH TEMPO | DUE	
1	KM. Gandha Nusantara 4	17347	5 Juli 2022 / July 5, 2022	22 Juni 2027 / June 22, 2027	54892
2	KM. Gandha Nusantara 7	17594	18 Oktober 2022 / October 18, 2022	26 Juli 2027 / July 26, 2027	55408
3	KM. Gandha Nusantara 8	17593	19 Oktober 2022 / October 19, 2022	26 Juli 2027 / July 26, 2027	55741
4	KM. Gandha Nusantara 10	17280	14 Juni 2022 / June 14, 2022	22 Juni 2027 / June 22, 2027	55341
5	KM. Gandha Nusantara 15	16884	28 Januari 2022 / January 28, 2022	28 Januari 2027 / January 28, 2027	53580

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

SERTIFIKAT LAMBUNG HULL CERTIFICATE		SERTIFIKAT MESIN | ENGINE CERTIFICATE			KETERANGAN DESCRIPTION
TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		
DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE		DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE	
4 Oktober 2023 / October 4, 2023	1 Agustus 2028 / August 1, 2028	38494	4 Oktober 2023 / October 4, 2023	1 Agustus 2028 / August 1, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
16 Agustus 2023 / August 16, 2023	12 Juli 2028 / July 12, 2028	38063	16 Agustus 2023 / August 16, 2023	12 Juli 2028 / July 12, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
2 November 2023 / November 2, 2023	10 Agustus 2028 / August 10, 2028	38704	2 November 2023 / November 2, 2023	10 Agustus 2028 / August 10, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
16 Februari 2024 / February 16, 2024	14 November 2028 / November 14, 2028	39398	16 Februari 2024 / February 16, 2024	14 November 2028 / November 14, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
19 Oktober 2023 / October 19, 2023	12 Juli 2028 / July 12, 2028	38604	19 Oktober 2023 / October 19, 2023	12 Juli 2028 / July 12, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
31 Maret 2023 / March 31, 2023	27 Februari 2028 / February 27, 2028	037186	31 Maret 2023 / March 31, 2023	27 Februari 2028 / February 27, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
23 November 2023 / November 23, 2023	7 Maret 2028 / March 7, 2028	38832	23 November 2023 / November 23, 2023	7 Maret 2028 / March 7, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
21 Agustus 2019 / August 21, 2019	14 Agustus 2024 / August 14, 2024	29408	21 Agustus 2019 / August 21, 2019	14 Agustus 2024 / August 14, 2024	Sementara AB / Temporary AB
4 Januari 2024 / January 4, 2024	19 Desember 2028 / December 19, 2028	39116	4 Januari 2024 / January 4, 2024	19 Desember 2028 / December 19, 2028	PERMANEN 2028 / PERMANENT 2028
20 Juni 2019 / June 20, 2019	14 Agustus 2024 / August 14, 2024	28906	20 Juni 2019 / June 20, 2019	14 Agustus 2024 / August 14, 2024	Sementara SB / Temporary SB
27 Agustus 2020 / August 27, 2020	6 Agustus 2024 / August 6, 2024	31986	27 Agustus 2020 / August 27, 2020	6 Agustus 2024 / August 6, 2024	Sementara - AB / Temporary - AB

SERTIFIKAT LAMBUNG HULL CERTIFICATE		SERTIFIKAT MESIN | ENGINE CERTIFICATE			KETERANGAN DESCRIPTION
TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		
DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE		DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE	
21 Agustus 2022 / August 21, 2022	22 Juni 2027 / June 22, 2027	35932	21 Agustus 2022 / August 21, 2022	22 Juni 2027 / June 22, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
18 Oktober 2022 / October 18, 2022	26 Juli 2027 / July 26, 2027	36275	18 Oktober 2022 / October 18, 2022	26 Juli 2027 / July 26, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
19 Oktober 2022 / October 19, 2022	26 Juli 2027 / July 26, 2027	36496	19 Oktober 2022 / October 19, 2022	26 Juli 2027 / July 26, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
10 Oktober 2022 / October 10, 2022	22 Juni 2027 / June 22, 2027	36226	10 Oktober 2022 / October 10, 2022	22 Juni 2027 / June 22, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
17 Maret 2022 / March 17, 2022	28 Januari 2027 / January 28, 2027	35055	17 Maret 2022 / March 17, 2022	28 Januari 2027 / January 28, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

DATA SERTIFIKAT KAPAL REDE TAHUN 2023 | PIONEER SHIP CERTIFICATE DATA IN 2023

NO	NAMA KAPAL SHIP NAME	SERTIFIKAT GARIS MUAT | LOAD LINE CERTIFICATE				
		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	
			DIKELUARKAN | ISSUED	JATUH TEMPO | DUE		
6	KM. Gandha Nusantara 16	17192	15 Mei 2022 / May 15, 2022	25 Maret 2027 / March 25, 2027	54006	
7	KM. Gandha Nusantara 13	14985	17 April 2020 / April 17, 2020	27 Februari 2025 / February 27, 2025	47453	
8	KM. Gandha Nusantara 18	14986	17 April 2020 / April 17, 2020	10 Maret 2025 / March 10, 2025	47454	
9	KM. Gandha Nusantara 6	14603	7 Januari 2020 / January 7, 2020	15 Juli 2024 / July 15, 2024	46402	
10	KM. Gandha Nusantara 9	18420	24 Juli 2023 / July 24, 2023	22 Juni 2027 / June 22, 2027	57805	
11	KM. Gandha Nusantara 12	017818	13 Januari 2023 / January 13, 2023	22 Juni 2027 / June 22, 2027	056161	
12	KM. Gandha Nusantara 19	17068	24 Februari 2022 / February 24, 2022	24 Februari 2027 / February 24, 2027	53672	
13	KM. Gandha Nusantara 20	17186	4 Mei 2022 / May 4, 2022	24 Februari 2027 / February 24, 2027	53970	
14	KM. Gandha Nusantara 5	15082	5 Mei 2020 / May 5, 2020	10 Maret 2025 / March 10, 2025	47726	
15	KM. Gandha Nusantara 14	14827	17 Maret 2020 / March 17, 2020	19 Februari 2025 / February 19, 2025	47058	
16	KM. Gandha Nusantara 17	15048	28 April 2020 / April 28, 2020	20 Maret 2025 / March 20, 2025	47612	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

	SERTIFIKAT LAMBUNG HULL CERTIFICATE		SERTIFIKAT MESIN | ENGINE CERTIFICATE			KETERANGAN DESCRIPTION
	TANGGAL | DATE		NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	TANGGAL | DATE		
	DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE		DIKELUARKAN ISSUED	JATUH TEMPO DUE	
	15 Mei 2022 / May 15, 2022	25 Maret 2027 / March 25, 2027	35387	15 Mei 2022 / May 15, 2022	25 Maret 2027 / March 25, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
	17 April 2020 / April 17, 2020	27 Februari 2025 / February 27, 2025	31088	17 April 2020 / April 17, 2020	27 Februari 2025 / February 27, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
	17 April 2020 / April 17, 2020	10 Maret 2025 / March 10, 2025	31089	17 April 2020 / April 17, 2020	10 Maret 2025 / March 10, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
	7 Januari 2020 / January 7, 2020	15 Juli 2024 / July 15, 2024	30359	7 Januari 2020 / January 7, 2020	15 Juli 2024 / July 15, 2024	
	24 Juli 2023 / July 24, 2023	22 Juni 2027 / June 22, 2027	37782	24 Juli 2023 / July 24, 2023	22 Juni 2027 / June 22, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
	12 Januari 2023 / January 12, 2023	22 Juni 2027 / June 22, 2027	036760	12 Januari 2023 / January 12, 2023	22 Juni 2027 / June 22, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
	4 April 2022 / April 4, 2022	24 Februari 2027 / February 24, 2027	53672	4 April 2022 / April 4, 2022	24 Februari 2027 / February 24, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
	4 Mei 2022 / May 4, 2022	24 Februari 2027 / February 24, 2027	35359	4 Mei 2022 / May 4, 2022	24 Februari 2027 / February 24, 2027	PERMANEN 2027 / PERMANENT 2027
	5 Mei 2020 / May 5, 2020	10 Maret 2025 / March 10, 2025	31282	5 Mei 2020 / May 5, 2020	10 Maret 2025 / March 10, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
	17 Maret 2020 / March 17, 2020	19 Februari 2025 / February 19, 2025	30812	17 Maret 2020 / March 17, 2020	19 Februari 2025 / February 19, 2025	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025
	28 April 2020 / April 28, 2020	20 Maret 2025 / March 20, 2025	31190	28 April 2020 / April 28, 2020	22 Juni 2027 / June 22, 2027	PERMANEN 2025 / PERMANENT 2025

PELNI
We Connect, We Unify

02

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

"Secara umum pencapaian tahun 2023 telah memenuhi target, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dewan Komisaris yakin bahwa PT PELNI (Persero) akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang positif dan berkelanjutan."

"Overall, the achievements in 2023 have met the targets and have shown an improvement compared to the previous year. The Board of Commissioners is confident that PT PELNI (Persero) will continue to advance towards a positive and sustainable future."

MUHAMMAD AWALUDDIN

Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently Independent Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, pada tahun 2023 PT PELNI (Persero) dapat mencatatkan kinerja yang baik di tengah kondisi ketegangan geopolitik dan suku bunga yang relatif tinggi.

Melalui laporan ini, perkenankan kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang terdiri dari penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2023, pandangan atas prospek usaha yang di susun oleh Direksi, penerapan Governansi, penilaian atas Komite di bawah Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Pemulihan ekonomi global di tahun 2023 masih menghadapi tantangan yaitu: peningkatan tensi geopolitik, tren inflasi global yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter global serta pertumbuhan perekonomian China yang lebih rendah dari perkiraan. Meski dalam suasana perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan cenderung melambat, ekonomi Indonesia tetap bertahan dengan baik (*resilient*), yang ditopang permintaan domestik sebagai substitusi pelemahan eksternal.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (YoY), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (YoY). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05% (YoY), lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

All praise and gratitude to God Almighty for His blessings and grace. In 2023, PT PELNI (Persero) was able to record good performance amid geopolitical tensions and relatively high-interest rates.

Through this report, allow us as the Board of Commissioners to present the supervisory and advisory report of the Board of Commissioners on the management of the Company for the fiscal year 2023. This report includes an assessment of the performance of the Board of Directors throughout 2023, views on the business prospects prepared by the Board of Directors, governance implementation, assessment of Committees under the Board of Commissioners, and changes in the composition of the Board of Commissioners.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

Global economic recovery in 2023 continued to face challenges such as increasing geopolitical tensions, high global inflation trends, global monetary policy tightening, and lower-than-expected economic growth in China. Despite the global economic uncertainty and slowdown, Indonesia's economy remained resilient, supported by domestic demand as a substitute for external weakness.

According to data released by the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth in the fourth quarter of 2023 was 5.04% (YoY), an increase from the previous quarter's growth of 4.94% (YoY). With this development, Indonesia's overall economic growth in 2023 was recorded at 5.05% (YoY), lower than the 2022 achievement of 5.31%.

Growth occurred in all business sectors. The highest growth was seen in the Transportation and Warehousing sector at 13.96%, followed by Other Services at 10.52%, and Accommodation and Food and Beverage Provision at 10.01%. Meanwhile, the Manufacturing Industry, which plays a dominant role, grew by 4.64%. Agriculture, Forestry, and Fisheries, as well as Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, grew by 1.30% and 4.85%, respectively.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Industri pelayaran masih dihadapkan pada tantangan berat ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Namun, Asosiasi Industri Pelayaran di Tanah Air tetap optimis bahwa ekonomi nasional akan tetap solid ditengah tantangan kondisi global yang tidak menentu.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai hal, khususnya pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahan dan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dewan Dewan Komisaris menyadari bahwa pencapaian KPI dan target RKAP dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sehingga menjadi salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan Dewan Komisaris.

Hingga akhir tahun 2023 Dewan Komisaris melakukan penilaian atas pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara kolegial maupun individu, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penilaian Kolegial
   Total skor *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Secara Kolegial (Kontrak Manajemen) PT PELNI (Persero) Tahun 2023 *Audited* secara keseluruhan dari total bobot 100,00 tercapai sebesar 104,19, dengan pencapaian masing-masing perspektif sebagai berikut:
   a. Perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia yang terealisasi sebesar 37,70 dari bobot maksimal sebesar 35,00;
   b. Perspektif Inovasi Model Bisnis yang terealisasi sebesar 16,80 dari bobot maksimal sebesar 17,00;
   c. Perspektif Kepemimpinan Teknologi yang terealisasi sebesar 17,60 dari bobot maksimal sebesar 16,00;
   d. Perspektif Pengembangan Investasi yang terealisasi sebesar 13,11 dari bobot maksimal sebesar 14,00; dan
   e. Perspektif Pengembangan Talenta yang terealisasi sebesar 18,90 dari bobot maksimal sebesar 18,00.

   Dari uraian di atas, terdapat 3 perspektif yang mampu melampaui bobot yang ditetapkan, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Kepemimpinan Teknologi, dan Pengembangan Talenta. Sedangkan perspektif Inovasi Model Bisnis dan Pengembangan Investasi belum berhasil melampaui skor maksimal karena belum terealisasinya kontribusi pendapatan non penugasan dan capaian indikator pengembangan infrastruktur logistik maritim masih dibawah target.

The shipping industry continues to face significant challenges amid the uncertain global economic conditions. However, the National Shipping Industry Association remains optimistic that the national economy will stay solid despite the uncertain global conditions.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In assessing the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners considers various factors, particularly the achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPI) and the targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The Board of Commissioners recognizes that the achievement of KPIs and RKAP targets is influenced by economic conditions, which is also considered by the Board of Commissioners.

By the end of 2023, the Board of Commissioners evaluated the achievement of the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPIs) both collectively and individually, with the results as follows:

1. Collective Assessment
   The total score for the collective Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Directors (Management Contract) of PT PELNI (Persero) for 2023, audited, achieved 104.19 out of a total weight of 100.00, with the achievements for each perspective as follows:
   a. Economic and Social Value Perspective for Indonesia realized at 37.70 out of a maximum weight of 35.00;
   b. Business Model Innovation Perspective realized at 16.80 out of a maximum weight of 17.00;
   c. Technology Leadership Perspective realized at 17.60 out of a maximum weight of 16.00;
   d. Investment Development Perspective realized at 13.11 out of a maximum weight of 14.00; and
   e. Talent Development Perspective realized at 18.90 out of a maximum weight of 18.00.

   From the above description, three perspectives exceeded the established weight, namely Economic and Social Value for Indonesia, Technology Leadership, and Talent Development. Meanwhile, the Business Model Innovation and Investment Development perspectives did not exceed the maximum score due to the unrealized contribution of non-assignment revenue and the maritime logistics infrastructure development indicators being below target.

2. Penilaian Individu

Pelaksanaan assesmen atau audit hasil pencapaian KPI Individu Direksi sesuai Per-02/MBU-03/2023 Pasal 105 yang menyatakan bahwa "Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan". Sehingga untuk perhitungan pencapaian KPI Direksi Individu ini telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra, Nomor: 00012/2.0999/NASS.KPI/06/139/1/IV/2024 pada tanggal 30 April 2024.

Adapun pencapaian skor akhir untuk masing-masing KPI Individu Direksi PT PELNI (Persero) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2. Individual Assessment

The assessment or audit of the Individual KPIs of the Board of Directors was conducted in accordance with Per-02/MBU-03/2023 Article 105, which states that "The calculation of the achievement of the Board of Directors' KPIs both collectively and individually is reviewed by the Public Accounting Firm that audits the Company's Financial Statements." Therefore, the calculation of the achievement of the Individual KPIs of the Board of Directors was carried out by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra, Number: 00012/2.0999/NASS.KPI/06/139/1/IV/2024 on April 30, 2024.

The final score achievements for each Individual KPI of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) in 2023 are as follows:

No	Direksi Board of Directors	Skor Akhir KPI KPI Final Score
1	Usaha Angkutan Penumpang Passenger Transport Business	101,53
2	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight & Sea Toll Business	93,93
3	Armada & Teknik Fleet & Engineering	106,17
4	SDM & Umum HR & General Affairs	103,69
5	Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management	106,40

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menempuh langkah efektif untuk mengatasi tantangan yang ada. Direksi telah berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan yang sehat, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan melalui berbagai inovasi dan inisiatif strategis yang juga telah dituangkan dalam RKAP.

Dari aspek keuangan, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp201,63 Miliar atau sebesar 105,67% dari target laba tahun 2023. Jika dibandingkan dengan perolehan laba audited 2022 Rp173,62 miliar, pencapaian laba audited tahun 2023 sebesar 116,13%. Pendapatan usaha konsolidasi *audited* sebesar Rp5.766,62 miliar atau sebesar 104,50% dari target RKAP 2023 sebesar Rp5.518,15 miliar dan EBITDA Rp 770,26 miliar atau sebesar 117,23% dari target RKAP 2023 sebesar Rp657,02 miliar.

The Board of Commissioners evaluates that the Board of Directors has taken effective steps to address existing challenges. The Board of Directors has succeeded in maintaining the stability and healthy growth of the Company's business, as well as maintaining the trust of stakeholders through various innovations and strategic initiatives outlined in the RKAP.

From a financial perspective, the Company recorded a net profit of IDR 201.63 billion for the current year, which is 105.67% of the target profit for 2023. Compared to the audited net profit of IDR 173.62 billion in 2022, the audited net profit for 2023 represents an achievement of 116.13%. The audited consolidated revenue was IDR 5,766.62 billion, or 104.50% of the 2023 RKAP target of IDR 5,518.15 billion, and EBITDA was IDR 720.26 billion, or 117.23% of the 2023 RKAP target of IDR 657.02 billion.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Tingkat Kesehatan Perusahaan di Tahun 2023 berada dalam kategori "SANGAT SEHAT" dengan kualifikasi "AAA". Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2023 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan total skor Tahun 2022 sebesar 79,50 yang juga berada dalam kategori "SEHAT" dengan kualifikasi "A".

The Company's Health Level in 2023 is in the "VERY HEALTHY" category with an "AAA" qualification. The Company's Health Level in 2023 increased compared to the total score of 2022 of 79.50, which was also in the "HEALTHY" category with an "A" qualification.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi dalam proses implementasi strategi untuk pencapaian target dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, industri dan bisnis. Dewan Komisaris juga memastikan strategi yang dijalankan Direksi telah sesuai dengan rencana kerja, baik tahunan maupun rencana jangka panjang Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sebelumnya telah disampaikan Direksi dan telah mendapat persetujuan Pemegang Saham. Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan reviu terhadap setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan RKAP tersebut.

Mekanisme pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan juga dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerja dalam rangka memantau dan mengawasi jalannya pengelolaan bisnis dan kinerja operasional Perusahaan di lapangan secara langsung. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 29 kali, sesuai jumlah yang ditargetkan dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2023.

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE STRATEGY

The Board of Commissioners supervises and provides guidance to the Board of Directors in the process of implementing strategies to achieve targets, considering economic, industry, and business developments. The Board of Commissioners ensures that the strategies implemented by the Board of Directors align with the Company's annual and long-term work plans.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adheres to the Company's Work Plan and Budget (RKAP), previously submitted by the Board of Directors and approved by the Shareholders. The Board of Commissioners monitors and reviews each strategic initiative implemented by the Board of Directors and assesses its alignment with the RKAP.

The mechanism for supervising the implementation of the Company's strategy is also carried out through work visits to directly monitor and oversee the business management and operational performance of the Company in the field. Throughout 2023, the Board of Commissioners conducted 29 work visits, according to the targeted number in the Board of Commissioners' Work Program for 2023.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Dalam memberikan arahan kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan beberapa mekanisme antara lain melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Pembahasan Permasalahan Strategis serta mekanisme evaluasi, arahan, tanggapan dan persetujuan. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi pada tahun 2023, telah dilaksanakan 12 kali. Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kinerja Perseroan berkala, laporan masing-masing Divisi, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya. Pada tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat

FREQUENCY AND METHODS OF PROVIDING ADVICE TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In providing guidance to the Board of Directors, the Board of Commissioners uses several mechanisms, including Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, Strategic Issue Discussion Meetings, as well as mechanisms for evaluation, direction, feedback, and approval. Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors in 2023 were held 12 times. These meetings discussed, among other things, periodic Company performance, reports from each Division, follow-ups on previous meetings, and other agendas. In 2023, the Board

Pembahasan Permasalahan Strategis dengan Direksi yang antara lain membahas mengenai pengembangan sistem informasi, manajemen SDM, dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, serta rencana strategis Perseroan lainnya.

of Commissioners held Strategic Issue Discussion Meetings with the Board of Directors to discuss, among other things, the development of information systems, HR management, and customer service improvement, as well as other strategic Company plans.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya perusahaan di PT PELNI (Persero) pada Tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan, saran dan pendapat kepada Direksi, sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar disiapkan sistem informasi PSO yang secara database khusus (*dedicated*) terhadap penugasan PSO dan pertanggungjawabannya, dimana harus memenuhi kriteria atau ketentuan yang tunduk kepada aturan-aturan/ kebijakan PSO yang telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Kementerian terkait berkenaan dengan pengakuan beban biaya PSO yang dapat diperhitungkan. Meskipun memiliki database terpisah, tetapi sistem informasi pertanggungjawaban dan pelaporan PSO tersebut tetap terintegrasi dengan sistem aplikasi akuntansi keuangan *Oracle EBS (Enterprise Business Suite*) yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan PT PELNI (Persero).
2. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar dilakukan evaluasi (*assessment*) secara terpadu dan terintegrasi secara rutin (triwulanan) di tahun 2024 oleh fungsi PSO, SPI, manajemen risiko, hukum, dan akuntansi, sehingga melibatkan disiplin ilmu dan latar belakang pemahaman di lapangan untuk sekaligus sebagai inisiatif manajemen PT PELNI (Persero) untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi pertanggung-jawaban kegiatan penugasan PSO secara rutin kepada pihak verifikator. Selanjutnya, memberikan saran/masukan/rekomendasi kepada Direksi PT PELNI (Persero) dari hasil evaluasi (*assessment*) tersebut.
3. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar Kantor Cabang dan Divisi Keagenan melaksanakan ketentuan sebagaimana di atur dalam Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Keagenan di lingkungan PT PELNI (Persero) sebagai bagian dari mitigasi risiko yang timbul dalam kegiatan pelayanan keagenan.
4. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar dilakukan revisi Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Keagenan di Lingkungan PT PELNI (Persero), khususnya pada ketentuan uang muka (*advance disbursement*) yang harus dilunasi oleh *Principal, Charterer* atau *Operator* .
5. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar meningkatkan keandalan aplikasi dengan melakukan

In carrying out the supervisory duties of the Company's operations at PT PELNI (Persero) in 2023, the Board of Commissioners has provided direction, advice, and opinions to the Board of Directors, as follows:

1. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors prepare a dedicated database PSO information system for PSO assignments and accountability, which must meet criteria or provisions subject to PSO rules/ policies issued and determined by the relevant Ministry concerning recognized PSO expense charges. Despite having a separate database, the PSO accountability and reporting information system should still be integrated with the Oracle EBS (Enterprise Business Suite) financial accounting application system used for preparing PT PELNI (Persero) financial reports.
2. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors conduct integrated and routine (quarterly) assessments in 2024 by the PSO function, SPI, risk management, legal, and accounting, involving field discipline and understanding to provide management initiatives for PT PELNI (Persero) to regularly report PSO assignment accountability to verifiers. Additionally, provide suggestions/inputs/recommendations to the Board of Directors of PT PELNI (Persero) from these assessment results.
3. The Board of Commissioners recommends that the Branch Office and Agency Division implement the provisions as regulated in the Standard Operating Procedure of Agency Governance within PT PELNI (Persero) as part of risk mitigation arising from agency service activities.
4. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors revise the Standard Operating Procedure of Agency Governance within PT PELNI (Persero), specifically on the advance disbursement provisions that must be settled by the Principal, Charterer, or Operator.
5. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors improve the reliability of applications

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

perbaikan atas kelemahan fitur dalam Sistem Informasi MyCargoo!, Sistem Informasi CIS dan Sistem Informasi MyDepo.

6. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya yang tidak dicover dalam PM dan jika dipandang perlu mengajukan usulan perubahan PM dimaksud.
7. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melakukan pemenuhan kualifikasi personal sesuai standar yang diberlakukan oleh Perusahaan.
8. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar KPI Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pemegang Saham Manajemen sehingga dapat mempersiapkan infrastruktur terkait pemenuhan kualifikasi tersebut sehingga pemenuhan dapat direalisasikan sesuai harapan dan kemudian menyampaikan laporannya secara periodik kepada Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melaksanakan rencana perlakuan risiko terhadap 7 *Top Risk* PT PELNI sesuai dengan yang direncanakan dalam upaya menghasilkan Residual Risk sesuai dengan target dan secara periodik menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar mengoptimalkan fungsi faktor produksi untuk melaksanakan strategi bisnis secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapai target pendapatan usaha dan Laba Konsolidasi tahun 2024 kemudian secara periodik menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar dalam melaksanakan investasi sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sehingga kejadian pada tahun 2023 tidak terulang kembali dimana realisasi investasi hanya sebesar 20,02% dari target yang telah ditentukan. Oleh karenanya perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi atas Pengelolaan Risiko pada Pelaksanaan Investasi tahun 2024 kemudian hasil evaluasi dan monitoring tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
12. Untuk kesejahteraan pegawai PT PELNI (Persero) yang memasuki usia pensiun, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar segera mengimplementasikan *roadmap* penyehatan Dana Pensiun Pelni (DPP). Dengan begitu, pegawai memiliki harapan ketika memasuki masa pensiun.
13. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar segera mengimplementasikan *roadmap (grand design)* SDM. Hal tersebut dapat memberikan motivasi bagi pegawai dalam melaksanakan beban kerja yang ditetapkan PT PELNI (Persero).

by addressing feature weaknesses in the MyCargoo! Information System, CIS Information System, and MyDepo Information System.

6. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors evaluate costs not covered in PM and, if deemed necessary, propose changes to the PM.
7. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors fulfill personnel qualifications according to the standards applied by the Company.
8. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors fulfill the KPI Qualification for Risk Management Organs according to Shareholder Management provisions, prepare infrastructure related to meeting these qualifications, and periodically report to the Board of Commissioners.
9. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors implement risk treatment plans for the 7 Top Risks of PT PELNI as planned to achieve targeted Residual Risk and periodically report to the Board of Commissioners.
10. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors optimize production factor functions to implement business strategies effectively and efficiently to achieve revenue and Consolidated Profit targets for 2024, and periodically report to the Board of Commissioners.
11. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors carry out investments according to the target timeline to avoid a recurrence of the 2023 incident where investment realization was only 20.02% of the target. Therefore, monitoring and evaluation of Risk Management in Investment Implementation 2024 should be conducted, and the results reported to the Board of Commissioners.
12. For the welfare of PT PELNI (Persero) employees entering retirement age, the Board of Commissioners recommends that the Board of Directors immediately implement the roadmap for revitalizing the PELNI Pension Fund (DPP). This provides employees with hope as they enter retirement.
13. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors immediately implement the HR roadmap (grand design). This can motivate employees in carrying out the workload set by PT PELNI (Persero).

14. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melanjutkan program Implementasi AKHLAK *Culture Journeys*, sehingga diharapkan PT PELNI memiliki pedoman untuk dapat mengevaluasi dan melakukan refleksi atas penerapan fundamental AKHLAK.
15. Sehubungan dengan banyaknya hal yang telah berubah dalam dunia kerja, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar segera mengimplementasikan program *Employee Well-being Policy*, sehingga akan memberikan informasi terkait tingkat kesejahteraan pegawai baik dari sisi pendapatan, budaya kerja, hingga lingkungan kerja yang diatur oleh Perseroan.
16. Terkait perbaikan perubahan nomenklatur Hotel Bahtera menjadi Learning Center, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar segera mengimplementasikannya termasuk penyusunan dan implementasi program pelatihan dan pengembangan bersama Divisi SDM.
17. Terkait optimalisasi aset, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melakukan pengkajian yang komprehensif dan perlu kehati-hatian, sehingga aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan PT PELNI (Persero). Selain itu, diperlukan aturan untuk mengoptimalisasi aset tersebut, seperti membuat kerjasama jangka panjang seperti BOT dalam jangka waktu 20 - 30 tahun, sementara dari sisi aset itu akan jadi milik PT PELNI (Persero).

PANDANGAN ATAS GOVERNANSI

Dewan Komisaris sangat memperhatikan penerapan prinsip-prinsip Governansi di lingkungan PELNI. Governansi merupakan aspek yang sangat penting dalam membantu PELNI untuk mempertahankan kinerja positif dan mencapai tujuan Perseroan. Secara khusus, Perseroan menggunakan prinsip-prinsip Governansi sebagai acuan pengambilan Keputusan yang bertanggung jawab, menghindari benturan kepentingan, optimalisasi kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Dalam rangka penilaian atas penerapan prinsip-prinsip Governansi tahun 2023 di Perseroan, berdasarkan hasil asesmen GCG yang telah dilakukan oleh internal dengan didampingi Konsultan Kantor Jasa Akuntan Willy Wilarjo, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan Governansi PELNI mencapai skor 86,821. Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat “SANGAT BAIK”. Skor yang meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya merupakan cerminan implementasi prinsip-prinsip Governansi dalam setiap proses bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

14. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors continue the implementation of the AKHLAK Culture Journeys program, so PT PELNI can have guidelines to evaluate and reflect on the implementation of AKHLAK fundamentals.
15. Given the many changes in the work environment, the Board of Commissioners recommends that the Board of Directors immediately implement the Employee Well-being Policy program to provide information on employee welfare levels in terms of income, work culture, and work environment regulated by the Company.
16. Regarding the renaming of Hotel Bahtera to Learning Center, the Board of Commissioners recommends that the Board of Directors immediately implement it, including the preparation and implementation of training and development programs in collaboration with the HR Division.
17. Regarding asset optimization, the Board of Commissioners recommends that the Board of Directors conduct a comprehensive and careful study so that these assets can be utilized for the benefit of PT PELNI (Persero). Additionally, rules for optimizing these assets are needed, such as establishing long-term cooperation like BOT for 20-30 years, while the asset will become the property of PT PELNI (Persero).

VIEWS ON GOVERNANCE

The Board of Commissioners places great emphasis on the application of governance principles within PELNI. Governance is a crucial aspect in helping PELNI maintain positive performance and achieve the Company’s objectives. Specifically, the Company uses governance principles as a reference for responsible decision-making, avoiding conflicts of interest, optimizing performance, and enhancing accountability.

Regarding the assessment of the application of governance principles in 2023 within the Company, based on the results of the GCG assessment conducted internally with the assistance of the Public Accountant Office Consultant Willy Wilarjo, it can be concluded that the implementation of governance in PELNI achieved a score of 86.821. This score falls under the category of “VERY GOOD.” The increased score compared to the previous year’s achievement reflects the continuous implementation of governance principles in every business process of the Company.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

PANDANGAN ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan penerapan pengendalian risiko, Perseroan telah menyusun pedoman yang tertuang pada Pedoman Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.14/03/SK/HKO.01/2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 PT PELNI (Persero). Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko perseroan yang dibantu oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR). Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan sistem manajemen risiko telah diterapkan dengan baik dan dilakukan secara proaktif oleh Perseroan dengan memelihara Tingkat profil risiko selama tahun 2023. Hal tersebut tercermin pada hasil *Assessment* Indeks Maturitas Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode a*ssessment eksternal (Risk Management Maturity Level/RMML*). Kriteria assessment yang digunakan mengacu pada ISO 31000:2018 *Risk Management Guidelines* dengan menggunakan model maturitas yang dikembangkan oleh *Risk Insurance and Management Society* (RIMS). Model maturitas Manajemen Risiko/*Risk Maturity Model* RIMS (RMM–RIMS) membagi tingkat kematangan penerapan (maturitas) Manajemen Risiko ke dalam 5 (lima) tingkatan/level, dengan PT PELNI (Persero) masuk dalam fase awal level IV dengan sebutan "*managed/strong* practice phase" dengan nilai skor 3.92.

VIEWS ON RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

In implementing risk control, the Company has developed guidelines outlined in the Risk Management Guidelines as per the Board of Directors' Decree No.: 01.14/03/SK/HKO.01/2022 on PT PELNI (Persero) Risk Management Guidelines Based on ISO 31000:2018. The Board of Commissioners also actively supervises the implementation of the company's risk management, assisted by the Risk Management Monitoring Committee (KPMR). The Board of Commissioners believes that the risk management system has been well implemented and proactively maintained by the Company throughout 2023. This is reflected in the results of the Risk Management Maturity Index Assessment of PT PELNI (Persero) in 2023, conducted using an external assessment method (Risk Management Maturity Level/RMML). The assessment criteria used refer to the ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines, utilizing the maturity model developed by the Risk Insurance and Management Society (RIMS). The RIMS Risk Maturity Model (RMM-RIMS) divides the maturity levels of Risk Management into five stages/levels, with PT PELNI (Persero) entering the initial phase of level IV, known as the "managed/strong practice phase," with a score of 3.92.

PANDANGAN ATAS KINERJA KEPATUHAN

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan agar Perseroan terus berkomitmen dalam menerapkan pelaksanaan kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan antara lain memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat dan mengawasi pencegahan penyimpangan. Untuk meningkatkan kualitas implementasi Governansi, PELNI juga mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurut pandangan kami, kinerja *Compliance* telah dilakukan dengan baik. Pandangan tersebut didukung oleh pelaporan LHKPN yang mencapai 100% serta kebijakan dan praktik antikorupsi dan pengendalian gratifikasi yang berjalan efektif pada 2023.

VIEWS ON COMPLIANCE PERFORMANCE

The Board of Commissioners actively supervises the Company to ensure its ongoing commitment to compliance in corporate management. The monitoring and supervision conducted include ensuring the Company's adherence to its commitments and overseeing the prevention of irregularities. To enhance the quality of governance implementation, PELNI also complies with the regulations of the State Officials' Wealth Report (LHKPN). In our view, the performance of Compliance has been well-executed. This view is supported by the 100% reporting of LHKPN and the effective implementation of anti-corruption policies and gratification control practices in 2023.

PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

Whistleblowing system (WBS) sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan Governansi yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh Insan PELNI dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Komisaris telah menjalankan perannya secara aktif sebagai pengawas dalam penerapan WBS. Dalam menjalankan perannya Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit khususnya dalam melakukan proses investigasi.

Meskipun penerapan WBS telah berjalan baik, namun Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan untuk lebih meningkatkan efektivitas sosialisasi mekanisme WBS, agar para *stakeholder* lebih termotivasi dalam menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan. Selama tahun 2023, tidak terdapat pelaporan pengaduan yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun organ di bawah Dewan Komisaris.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan dan implementasi proses-proses bisnis. Kami menilai bahwa ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2023 dengan baik. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil KPI masing-masing komite pada tahun buku dan laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing komite selama tahun 2023.

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor

ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN MANAGING THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

The whistleblowing system (WBS) is essential for strengthening the implementation of Governance, providing an opportunity for all PELNI personnel and other stakeholders to report indications of violations of prevailing ethical values, based on accountable evidence.

The Board of Commissioners has actively played its role as a supervisor in the implementation of the WBS. In executing its role, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, particularly in conducting the investigation process.

Although the implementation of the WBS has been well-established, the Board of Commissioners continuously provides guidance to further enhance the effectiveness of WBS socialization mechanisms, so that stakeholders are more motivated to report violations that could harm the Company. Throughout 2023, there were no reports of complaints allegedly made by the Board of Directors, the Board of Commissioners, or organs under the Board of Commissioners.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is assisted by several committees, namely the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee, and the Nomination and Remuneration Committee, in carrying out their duties and responsibilities to oversee the management of the Company and the implementation of business processes. We assess that these committees have performed their duties and responsibilities well throughout 2023. This assessment is based on the results of each committee's KPIs for the fiscal year and the activity reports from each committee during 2023.

ASSESSMENT OF THE AUDIT COMMITTEE'S PERFORMANCE

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the execution of tasks by internal and

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

eksternal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan PELNI, melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris PELNI, dan melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

external auditors. The committee assesses the activities and audit results carried out by internal and external auditors, provides recommendations on improving management control systems and their implementation, ensures satisfactory evaluation procedures for all information released by PELNI, identifies issues requiring the Board of Commissioners' attention, and performs tasks related to risk management as stipulated in the prevailing laws and regulations.

Kinerja Komite Audit selama tahun 2023 tercermin pada hasil KPI Komite Audit tahun 2023, dengan perolehan skor sebesar 100% dari bobot maksimal sebesar 100%. Komite Audit secara aktif menghadiri rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, mengadakan rapat internal Komite Audit sebanyak 26 kali, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali, serta melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang Medan, Pontianak, Semarang, Surabaya, Ambon, Bima dan Batam.

The Audit Committee's performance in 2023 is reflected in the Audit Committee's KPI results for the year, achieving a score of 100% out of a maximum weight of 100%. The Audit Committee actively attended joint meetings with the Board of Commissioners 12 times, held 26 internal Audit Committee meetings, participated in 12 joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and conducted work visits to branch offices in Medan, Pontianak, Semarang, Surabaya, Ambon, Bima, and Batam.

Selain itu, pada tahun 2023 Komite Audit juga berpartisipasi dalam melakukan *review* dan memberikan tanggapan atas usulan Direksi tentang:

1. Penghapusan aset.
2. Revisi RJPP PMN.
3. Laporan Manajemen selama Tahun 2023 PT PELNI (Persero).
4. Penilaian dan penunjukan KAP.
5. Persetujuan *Cash Loan.*

Additionally, in 2023, the Audit Committee also participated in reviewing and providing feedback on the Board of Directors' proposals concerning:

1. Asset disposal.
2. Revision of the PMN RJPP.
3. Management Reports for 2023 of PT PELNI (Persero).
4. Assessment and appointment of Public Accounting Firms (KAP).
5. Approval of Cash Loans.

Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk merekomendasikan kepada Direksi agar:

1. Terus melakukan Upaya meningkatkan pendapatan dan efesiensi biaya yang melebihi target seperti biaya perkapalan, biaya penunjang dan biaya *overhead.*
2. Memberikan penjelasan secara rinci terkait inefisiensi manajemen, khususnya biaya kehumasan dan perjalanan dinas.
3. Menyelesaian rencana *docking* sesuai penjadwalan.
4. Melakukan Sosialisasi ke beberapa daerah yang disinggahi trayek tol laut dan *support* dari Kementerian Perhubungan dalam optimalisasi muatan balik.
5. Menjaga pertumbuhan laba konsolidasi selama Tahun 2023 dengan meningkatkan pendapatan (usaha penunjang, usaha sampingan, usaha perkapalan, Perusahaan anak) dan melakukan efisiensi biaya serta melakukan Langkah-langkah terukur dan sistematis untuk menjawab *anomaly* manajemen.

The Audit Committee recommended to the Board of Commissioners to advise the Board of Directors to:

1. Continue efforts to increase revenue and cost efficiency beyond targets, such as shipping costs, support costs, and overhead costs.
2. Provide detailed explanations regarding management inefficiencies, particularly in public relations and business travel expenses.
3. Complete docking plans according to the schedule.
4. Conduct socialization in several areas visited by sea toll routes and support from the Ministry of Transportation to optimize return cargo.
5. Maintain consolidated profit growth throughout 2023 by increasing revenue (supporting businesses, side businesses, shipping business, subsidiary companies) and reducing costs, as well as taking measured and systematic steps to address management anomalies.

6. Direksi memberikan penjelasan konkrit tentang usaha Penunjang khususnya hotel bahtera diberikan *time line* waktu atas keberlangsungan usaha penunjang.
7. Memberikan penjelasan secara rinci terkait inefisensi manajemen, khususnya biaya kehumasan dan perjalanan dinas dan beban operasional kapal Rede.
8. SPI melakukan audit dengan tujuan tertentu.
9. Memberikan perhatian dalam hal pengawasan/ pengendalian Intern atas temuan-temuan *Fraud*/ penyalahgunaan keuangan baik di tingkat kegenan maupun cabang.
10. Divisi pelayanan angkutan penumpang agar lebih proaktif menindaklanjuti hasil Audit SPI yang masih status BDL.
11. Meningkatkan pengawas baik terhadap penagihan-penagihan maupun pengajuan-pengajuan dokumen pengadaan *sparepart* BBM.
12. Melengkapi SOP/Juknis terkait kegiatan-kegiatan perkapalan dan perundangan.
13. Segera memenuhi kebutuhan/pengajuan perbaikan apabila ada kerusakan-kerusakan terkait peralatan operasional.
14. Meningkatan pengawasan atas kegiatan-kegiatan yang menggunakan SPJ perjalanan dinas agar sesuai aturan.
15. Melakukan pengawasan terhadap *stock opname* gudang atas penggunaan minyak pelumas maupun BBM dan melakukan cek lapangan secara priodik.
16. Segera menjelaskan tentang progress kapal roro, kapal tongkang dan kapal *tugboat* yang masih belum terealisasi.
17. Memperhatikan *Commission Days*, Frekwensi dan memantau penggunaan alat pemakaian BBM (Vessel WEB Analyzer, Flowmeter Coriolis).
18. Meningkatan pengamanan tempat penyimpanan BBM baik dikapal maupun dipenampungan (*Banker*).

PENILAIAN KINERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko yang diterapkan di PT PELNI (Persero).

Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko selama tahun 2023 tercermin pada hasil KPI Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun 2023, dengan perolehan skor sebesar 100% dari bobot maksimal sebesar 100%. Komite Pemantau Manajemen Risiko secara aktif menghadiri rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, mengadakan rapat internal

6. Provide a concrete explanation of supporting businesses, particularly the Bahtera Hotel, with a timeline for the continuation of supporting businesses.
7. Provide detailed explanations regarding management inefficiencies, particularly in public relations and business travel expenses and operational expenses of Rede ships.
8. Conduct specific purpose audits by the SPI.
9. Pay attention to internal control and supervision over findings of fraud/financial misuse both at the agency and branch levels.
10. The passenger transportation service division should proactively follow up on SPI audit results that are still in BDL status.
11. Enhance supervision over billing and procurement document submissions for fuel spare parts.
12. Complete SOP/technical guidelines related to shipping activities and regulations.
13. Immediately address repair needs/submissions in case of operational equipment damage.
14. Enhance supervision over activities using travel SPJ to ensure compliance with regulations.
15. Supervise stock opname of warehouses for the use of lubricants and fuel and conduct periodic field checks.
16. Provide an update on the progress of ro-ro ships, barges, and tugboats that have not yet materialized.
17. Pay attention to Commission Days, frequency, and monitor the use of fuel consumption tools (Vessel WEB Analyzer, Flowmeter Coriolis).
18. Improve the security of fuel storage locations both on ships and in storage tanks (Banker).

ASSESSMENT OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE'S PERFORMANCE

The Risk Management Monitoring Committee was established to assist the Board of Commissioners in monitoring, supervising, and assessing the effectiveness of risk management implemented at PT PELNI (Persero).

The performance of the Risk Management Monitoring Committee in 2023 is reflected in the KPI results of the Risk Management Monitoring Committee for the year, achieving a score of 100% out of a maximum weight of 100%. The Risk Management Monitoring Committee actively attended 12 meetings with the Board of Commissioners, held 12 internal

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Komite Pemantau Manajemen Risiko sebanyak 12 kali, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali, serta melakukan kunjungan kerja ke sejumlah cabang sebanyak 12 kali.

Selain itu, pada tahun 2023 Komite Pemantau Manajemen Risiko juga berpartisipasi dalam melakukan *review* dan memberikan tanggapan atas usulan Direksi tentang:

1. Evaluasi laporan manajemen risiko Tahun Anggaran 2023.
2. *Risk Register* dan Potensi Risiko dengan Level Ekstrim dan Tinggi pada Tahun 2023.
3. Program Kerja manajemen risiko 2023 pada Anak Perusahaan.
4. *Top Risk* 2023 pada Anak Perusahaan.
5. Program Kerja Tata Kelola Terintegrasi (khususnya manajemen risiko & pengendalian internal) tahun 2023.
6. Kajian Pengembangan Investasi (Kapal Roro, Kapal *Tugboat* dan Modifikasi Kapal).
7. Tindak Lanjut atas Pemeriksaan dan Klarifikasi Kecelakaan Kapal (PKKK).
8. Persiapan Operasional *Peak Season* Lebaran 2023.
9. Implementasi *Roadmap*/*Masterplan* TI.
10. Evaluasi Angkutan Lebaran dengan Sistem Pengelolaan Mutu dan Pelayanan, atas Kinerja Angkutan Barang.
11. Penyelarasan Peran SPI Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko sesuai dengan Permen BUMN Nomor 02.
12. Melakukan telaah terhadap Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan.
13. Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Secara Langsung Dilapangan pada Kantor Cabang.
14. Melakukan pemantauan terhadap Proses Pelaksanaan Teknolgi Informasi di Perusahaan.
15. Melakukan telaah terhadap Sistem Manajemen Mutu Perusahaan.
16. Melakukan telaah terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi nominasi dan fungsi remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero), meliputi pemberian masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja individu Direksi, penyusunan talenta yang terdiri dari pejabat setingkat di bawah Direksi yang akan disampaikan kepada Pemegang

committee meetings, participated in 12 joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and conducted 12 work visits to various branches.

Additionally, in 2023, the Risk Management Monitoring Committee also participated in reviewing and providing feedback on the Board of Directors' proposals concerning:

1. Evaluation of the 2023 Fiscal Year risk management report.
2. Risk Register and Potential Risks with Extreme and High Levels in 2023.
3. 2023 risk management work program for subsidiaries.
4. Top Risks of 2023 for subsidiaries.
5. Integrated Governance Work Program (specifically risk management & internal control) for 2023.
6. Investment Development Study (RoRo Ships, Tugboats, and Ship Modifications).
7. Follow-up on Ship Accident Examination and Clarification (PKKK).
8. Preparation for Operational Peak Season Lebaran 2023.
9. Implementation of the IT Roadmap/Masterplan.
10. Evaluation of Lebaran Transportation with Quality and Service Management Systems, on Freight Transport Performance.
11. Alignment of the SPI Role in Risk Management Based on Ministry of SOEs Regulation Number 02.
12. Reviewing the Company's Risk Management Guidelines.
13. Conducting direct field risk management evaluations at branch offices.
14. Monitoring the Information Technology implementation process in the Company.
15. Reviewing the Company's Quality Management System.
16. Reviewing the Implementation of Integrated Governance.

ASSESSMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S PERFORMANCE

The Nomination and Remuneration Committee was established to assist the Board of Commissioners in performing nomination and remuneration functions for the Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero). This includes providing input to the Board of Commissioners regarding the evaluation of individual Directors' performance, compiling a talent pool of officials at the level below the Directors to be submitted to

Saham, usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta hal-hal yang terkait jika diperlukan.

Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2023 tercermin pada hasil KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023, dengan perolehan skor sebesar 100% dari bobot maksimal sebesar 100%. Komite Nominasi dan Remunerasi secara aktif menghadiri rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, mengadakan rapat internal Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 12 kali, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali.

Selain itu, pada tahun 2023 Komite Nominasi dan Remunerasi juga berpartisipasi dalam melakukan *review* dan menyarankan Direksi agar:

1. Membuat kebijakan yang sifatnya memenuhi kesamaan atau persamaan perlakuan diantara penumpang dalam fasilitas kamar, mengoptimalisasi kan QI dan QC menyangkut terhadap layanan baik di *pre*, di *on* dan paska dalam rangka meningkatkan *customer service vacation*.
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN dalam rangka program pemerintah dalam hal menyangkut program mudik dan balik selama musim liburan.
3. Membuat semua kebijakan terkait penarikan selain yang ditentukan oleh Kemenhub harus dibuat dasar hukumnya dalam bentuk Surat Keputusan Direksi agar tidak mengakibatkan konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh manajemen.
4. Membuat sistem informasi sertifikasi kompetensi di lingkungan PT PELNI (Persero).
5. Pengangkatan BOD-1, Usulan Perubahan Kepala SPI, Usulan Direksi dan Komisaris SBN, Usulan Perubahan Pengurus PT PIDC dan Usulan Remunerasi Direktur dan Komisaris PT PELNI (Persero).
6. Membuat *Roadmap* tentang sertifikasi kompetensi dilingkungan PT PELNI (Persero) khususnya yang *mandatory* baik di pegawai laut maupun pegawai darat.
7. Melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan AKHLAK *implementation index*, mengsinkronkan antara QPY individu dengan hasil *survey* yang menyangkut AKHLAK *implementation index*.
8. Segera dilakukan pengusulan terhadap jabatan Komisaris dan Direksi Perusahaan anak yang kosong untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

the Shareholders, proposing remuneration for the Directors and the Board of Commissioners, and other related matters as needed.

The performance of the Nomination and Remuneration Committee in 2023 is reflected in the KPI results of the Nomination and Remuneration Committee for the year, achieving a score of 100% out of a maximum weight of 100%. The Nomination and Remuneration Committee actively attended 12 meetings with the Board of Commissioners, held 12 internal committee meetings, and participated in 12 joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Additionally, in 2023, the Nomination and Remuneration Committee also participated in reviewing and advising the Board of Directors to:

1. Develop policies to ensure equal treatment among passengers in room facilities, optimize QI and QC regarding services in pre, on, and post-travel stages to enhance customer service satisfaction.
2. Coordinate with the Ministry of Transportation and the Ministry of State-Owned Enterprises regarding government programs related to homecoming and return travel during holiday seasons.
3. Create all policies related to charges, except those determined by the Ministry of Transportation, to be legally based in the form of Board of Directors' Decrees to avoid legal consequences due to management actions.
4. Develop an information system for competency certification within PT PELNI (Persero).
5. Make proposals for the appointment of BOD-1, changes to the Head of SPI, Directors and Commissioners of SBN, changes to the management of PT PIDC, and proposals for the remuneration of Directors and Commissioners of PT PELNI (Persero).
6. Create a roadmap for competency certification within PT PELNI (Persero), particularly for mandatory certifications for both sea and land employees.
7. Take strategic steps to improve the AKHLAK implementation index, synchronizing between individual QPY and survey results related to the AKHLAK implementation index.
8. Propose the filling of vacant positions for Commissioners and Directors of subsidiaries for approval by the Board of Commissioners.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

PENILAIAN KINERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan. Komite Tata Kelola Terintegrasi baru dibentuk pada tanggal 2 Agustus 2023 sehingga belum terdapat informasi terkait penilaian kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi secara aktif menghadiri rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 3 kali, mengadakan rapat internal Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 3 kali, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 kali.

Selain itu, pada tahun 2023 Komite Tata Kelola Terintegrasi juga berpartisipasi dalam melakukan *review* dan memberikan tanggapan atas usulan Direksi tentang:
1. Koordinasi Tim dan *Frame Work* KTKT PELNI Grup.
2. Inventarisasi seluruh kebijakan dan SOP yang ada di Induk dan anak Perusahaan.
3. Pembuatan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Seperti dikutip dari Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mereda. Ekonomi global diprakirakan tumbuh sebesar 3,0% pada 2023 dan melambat menjadi 2,8% pada 2024. Ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India tetap kuat didukung konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, ekonomi Tiongkok melambat seiring dengan tetap lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai dampak lanjutan dari pelemahan kinerja sektor properti, serta terbatasnya stimulus fiskal.

Penurunan inflasi di negara maju, termasuk AS, berlanjut, meski masih berada di atas sasaran, sementara inflasi Tiongkok menurun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat. Siklus kenaikan suku bunga kebijakan moneter negara maju, termasuk *Fed Funds Rate* (FFR), diprakirakan telah berakhir meskipun masih bertahan tinggi

ASSESSMENT OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE'S PERFORMANCE

The Integrated Governance Committee was established to assist the Board of Commissioners in monitoring, supervising, and assessing the Integrated Governance of Subsidiaries. The Integrated Governance Committee was newly formed on August 2, 2023, so there is no performance assessment information available yet.

The Integrated Governance Committee actively attended 3 meetings with the Board of Commissioners, held 3 internal committee meetings, and participated in 3 joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Additionally, in 2023, the Integrated Governance Committee also participated in reviewing and providing feedback on the Board of Directors' proposals concerning:
1. Coordination of the Team and Framework of KTKT PELNI Group.
2. Inventory of all policies and SOPs existing in the Parent and Subsidiary Companies.
3. Preparation of the Integrated Governance Committee Charter.

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS

As cited from the Fourth Quarter 2023 Monetary Policy Report released by Bank Indonesia, it states that global economic growth slowed with reduced financial market uncertainty. The global economy is projected to grow by 3.0% in 2023 and slow to 2.8% in 2024. The economies of the United States and India remain strong, supported by household consumption and investment. Meanwhile, China's economy is slowing due to continued weak household consumption and investment, as a result of the ongoing poor performance of the property sector, and limited fiscal stimulus.

Inflation in advanced economies, including the US, continues to decline, although it remains above target, while China's inflation has decreased, influenced by slowing economic growth. The rate hike cycle of monetary policy in advanced economies, including the Federal Funds Rate (FFR), is expected to have ended, although it will remain high in the first half of

pada semester I 2024, dengan kemungkinan akan mulai menurun pada semester II 2024.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan dalam kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh konsumsi dan investasi sejalan dengan akselerasi belanja Pemerintah pada akhir tahun dan percepatan penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5% didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, termasuk dampak positif penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan PSN termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kunci keberhasilan usaha adalah adanya keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Direksi diharapkan untuk dapat melihat prospek usaha yang telah memperhitungkan berbagai faktor. Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa prospek usaha telah dianalisis dengan baik oleh Direksi. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang ada dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan dalam merespon berbagai peluang tersebut.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PELNI yaitu dengan pengunduran diri Komisaris Utama Ali Masykur Musa pada tanggal 13 November 2023.

2024, with a potential decline starting in the second half of 2024.

On the other hand, Indonesia's economic recovery continues, supported by domestic demand. Economic growth in 2023 is projected to be in the range of 4.5-5.3%, driven by consumption and investment in line with the acceleration of government spending at the end of the year and the completion of several National Strategic Projects (PSN). In 2024, economic growth is projected to increase to a range of 4.7-5.5%, supported by domestic demand, particularly continued consumption growth, including the positive impact of the elections, and increased investment, especially in buildings, in line with the continuation of PSN construction, including the new capital city of Nusantara (IKN).

The key to business success is long-term business sustainability. Therefore, the Board of Directors is expected to consider business prospects that account for various factors. The Board of Commissioners consistently ensures that the business prospects have been well-analyzed by the Board of Directors. In evaluating the business prospects prepared by the Board of Directors, the Board of Commissioners considers various opportunities and challenges, as well as the Company's strengths in responding to these opportunities.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, there was a change in the composition of the PELNI Board of Commissioners with the resignation of the President Commissioner, Ali Masykur Musa, on November 13, 2023.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Komposisi Dewan Komisaris
Board of Commissioner Composition

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Periode Awal Tahun Buku 2023-13 November 2023 Beginning of the Financial Year 2023 - November 13, 2023			
1	Ali Masykur Musa	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Wahyu Adji Hepriarsono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020
13 November 2023-Akhir Tahun Buku 2023 November 13, 2023 - End of Fiscal Year 2023			
1	-	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	-

Komposisi Dewan Komisaris
Board of Commissioner Composition

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Wahyu Adji Hepriarsono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SETELAH 31 DESEMBER 2023

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, susunan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menjadi sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER DECEMBER 31, 2023

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024. The composition of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
1	Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024
6	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
7	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020

Sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) yang terjadi selama tahun 2023, kami segenap jajaran Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ali Masykur Musa dan Bapak Wahyu Adji Hepriarsono atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

PENUTUP

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2023. Atas kepercayaan Pemegang Saham dan dukungan Direksi, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen dan kerja keras Direksi, manajemen, dan seluruh Insan sehingga PT PELNI (Persero) telah mampu menghadapi tantangan dan telah menyajikan kinerja yang baik di tengah kondisi yang menantang di tahun 2023.

In term of the changes in the membership of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) that occurred during 2023, we, the entire Board of Commissioners, express our utmost gratitude to Mr. Ali Masykur Musa and Mr. Wahyu Adji Hepriarsono for their dedication and hard work during their tenure as members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

CLOSING AND APPRECIATION

Thus, this is the supervisory report of the Board of Commissioners on the performance and business activities of the Company in 2023. With the trust of the Shareholders and the support of the Board of Directors, the Board of Commissioners has been able to carry out its duties and responsibilities well.

On this occasion, the Board of Commissioners expresses its high appreciation for the commitment and hard work of the Board of Directors, management, and all personnel, enabling PT PELNI (Persero) to face challenges and achieve good performance amid the challenging conditions in 2023.

Kami juga sampaikan apresiasi kepada pelanggan, mitra bisnis maupun pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan kepada PT PELNI (Persero) dalam mendukung kelangsungan usaha.

We also extend our appreciation to our customers, business partners, and other stakeholders for their support and trust in PT PELNI (Persero) in sustaining the business.

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioner
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

MUHAMMAD AWALUDDIN
KOMISARIS UTAMA MERANGKAP KOMISARIS INDEPENDEN
President Commissioner Concurrently Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

"Beragam inisiatif dan kebijakan strategis yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) sepanjang tahun 2023 membuahkan hasil yang membanggakan sehingga dapat menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan."

"Various initiatives and strategic policies implemented by PT PELNI (Persero) throughout 2023 have yielded impressive results, creating sustainable business growth and delivering the best value to stakeholders."

TRI ANDAYANI

DIREKTUR UTAMA
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas nama Direksi PT PELNI (Persero), perkenankan saya menyampaikan Laporan Tahunan PELNI Tahun Buku 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat gejolak perekonomian dunia dan Direksi telah berupaya secara optimal dalam menjalankan usaha bisnis dan mengelola risiko perusahaan. Dalam kondisi tersebut, Direksi secara konsisten menjalankan penugasan yang diberikan Oleh pemegang saham dengan sebaik- baiknya, dan memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perekonomian Indonesia 2023 menghadapi tantangan yang tidak ringan, bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan divergensi pertumbuhan antarnegara yang melebar. Setelah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 3,5% pada 2022, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 diprakirakan turun ke 3,0%, dan terus melambat menjadi 2,8% pada 2024. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup sejalan dengan berlanjutnya efek luka memar (*scarring effect*) dan meningkatnya fragmentasi geopolitik-ekonomi. Kinerja ekonomi global pada 2023 juga diwarnai dengan divergensi pertumbuhan yang terjadi antara negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif tinggi, dengan negara-negara EMDEs yang mengalami penurunan dan stagnasi. Di negara EMDEs, pertumbuhan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti, sedangkan kinerja ekonomi India dan ASEAN-5 tetap baik.

Satu sisi, inflasi dunia turun menjadi 6,8% pada Desember 2023 dari level tertinggi pada triwulan II 2022. Penurunan inflasi tersebut sejalan dengan penurunan harga energi dan pangan, terurainya keketatan pasokan, serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter bank sentral di banyak negara. Namun pada sisi lain, penurunan inflasi dunia berlangsung lebih lambat dari prakiraan semula. Tetap ketatnya pasar tenaga kerja menyebabkan inflasi di negara-negara maju masih jauh di atas sasaran yang ingin dicapai, yaitu 2%. Sementara di kelompok negara berkembang, inflasi sejumlah negara di atas sasaran seperti Brazil dan Meksiko di Amerika Latin serta Filipina di Asia, sedangkan beberapa negara EMDEs telah mampu menurunkan inflasinya kembali ke sasaran, termasuk Indonesia.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Directors of PT PELNI (Persero), I am honored to present the PT PELNI Annual Report for the 2023 Fiscal Year as a testament to our accountability to the Shareholders and Stakeholders.

2023 was marked by significant challenges due to global economic volatility, and the Board of Directors has strived to the utmost in managing the business operations and mitigating corporate risks. In these circumstances, the Board has consistently fulfilled the mandates given by the shareholders with the highest diligence, while providing the best possible service to the entire Indonesian community.

Indonesia's economy in 2023 faced significant challenges due to the weakening global economic growth and widening divergence in growth among countries. After recording a high growth of 3.5% in 2022, the global economy is projected to slow down to 3.0% in 2023 and further to 2.8% in 2024. The optimism for recovery at the beginning of 2023 gradually faded due to the continued impact of scarring effects and the increasing geopolitical-economic fragmentation. The global economic performance in 2023 also saw divergent growth between developed countries, especially the United States (US), which grew relatively high, and EMDEs (Emerging Markets and Developing Economies) countries, which experienced declines and stagnation. In the EMDEs, China's growth slowed down due to weakened consumption and a decline in the property sector's performance, while the economic performance of India and ASEAN-5 remained strong.

On one hand, global inflation fell to 6.8% in December 2023 from its peak in the second quarter of 2022. This decline in inflation was in line with the decrease in energy and food prices, the easing of supply chain constraints, and the tightening of monetary policies by central banks in many countries. However, on the other hand, the decline in global inflation occurred more slowly than initially predicted. The still tight labor market caused inflation in developed countries to remain far above the target of 2%. Meanwhile, in developing countries, inflation in several countries, such as Brazil and Mexico in Latin America and the Philippines in Asia, was above the target, while some EMDEs were able to bring inflation back to target levels, including Indonesia.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Di AS, kisaran suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) yang saat ini 5,50-5,75% diprakirakan akan dipertahankan pada paruh pertama 2024, sebelum turun pada paruh kedua 2024. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Eropa dengan suku bunga European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BoE) yang saat ini masing-masing sebesar 4,50% dan 5,25% yang masih akan dipertahankan tinggi hingga paruh pertama 2024. Di Amerika Latin, bank-bank sentral yang telah lebih awal dan agresif melakukan pengetatan moneter mulai menurunkan suku bunga. Sementara itu, suku bunga kebijakan moneter di Kawasan EMDEs Asia akan dipertahankan lebih lama hingga tahun 2024 untuk memitigasi dampak rambatan tingginya suku bunga negara maju. Fenomena suku bunga tinggi di negara maju tersebut membatasi ruang gerak bank-bank sentral di negara EMDEs untuk menurunkan suku bunga kebijakan moneternya guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meski inflasi di beberapa negara telah mencapai sasaran.

In the US, the range of the Fed Fund Rate (FFR), currently at 5.50-5.75%, is expected to be maintained in the first half of 2024 before declining in the second half of 2024. A similar trend is also occurring in Europe, with the European Central Bank (ECB) and the Bank of England (BoE) maintaining interest rates at 4.50% and 5.25%, respectively, until the first half of 2024. In Latin America, central banks that had aggressively tightened monetary policies earlier have started to lower interest rates. Meanwhile, in the EMDEs region of Asia, monetary policy interest rates will be maintained longer until 2024 to mitigate the ripple effects of high interest rates in developed countries. This phenomenon of high interest rates in developed countries limits the central banks' room in EMDEs to lower their monetary policy interest rates to stimulate economic growth, despite inflation in several countries having reached the target.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2023 tetap baik ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah penurunan kinerja ekspor sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai kisaran 4,5-5,3% pada 2023 dan akan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi diprakirakan kembali meningkat mencapai kisaran 4,8-5,6% pada 2025.

Indonesia's economic growth up to the third quarter of 2023 remained strong, supported by sustained domestic demand amid declining export performance in line with the global economic slowdown. Private consumption, including consumption in the services sector, remained strong, driven by high consumer confidence, maintained purchasing power amid low inflation, and fiscal policy stimuli, including subsidies and various social assistance programs. Investment also remained strong, driven by the continued completion of National Strategic Projects (PSN) and non-building investments. Spatially, strong economic growth was supported by solid economic growth in almost all regions of Indonesia. Economic growth is projected to reach 4.5-5.3% in 2023 and increase to 4.7-5.5% in 2024. The continued economic improvement in 2024 is mainly driven by domestic demand, in line with salary increases for Civil Servants (ASN), the organization of the General Election, and the development of the National Capital (IKN). Economic growth is projected to increase again to 4.8-5.6% in 2025.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2023 terus berlanjut terutama ditopang oleh permintaan domestik, di tengah melambatnya kinerja sektor eksternal sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi permintaan domestik, konsumsi swasta tetap tumbuh kuat, termasuk konsumsi generasi muda, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Pertumbuhan

The improvement in economic growth up to the third quarter of 2023 continued, primarily supported by domestic demand, amid the slowdown in external sector performance in line with the weakening global economic growth. On the domestic demand side, private consumption continued to grow strongly, including consumption by the younger generation, in line with increased consumption in the services sector, high consumer confidence, maintained purchasing power amid low inflation, and fiscal policy stimuli, including subsidies and various social assistance programs. Investment growth also remained

investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Sementara di sisi eksternal, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara.

strong, driven by the continued completion of National Strategic Projects (PSN) and non-building investments. On the external side, real export growth declined due to weakened demand from major trading partner countries, especially China, and declining commodity prices, while service exports grew strongly in line with the increase in international tourist arrivals.

Memasuki triwulan IV 2023, berbagai indikator terkini seperti penjualan eceran, indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, dan *Purchasing Manager's Index* (PMI) yang berada pada zona ekspansi mengkonfirmasi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetap baiknya pertumbuhan ekonomi juga tercermin pada kinerja lapangan usaha (LU) utama seperti industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan LU yang terkait dengan jasa termasuk transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, serta informasi dan telekomunikasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5-5,3% pada 2023, dan akan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 dan 4,8-5,6% pada 2025. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestic sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bank Indonesia juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan, dengan terus meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dengan sinergitas kebijakan fiskal Pemerintah yang makin erat.

Entering the fourth quarter of 2023, various current indicators such as retail sales, consumer confidence index, cement sales, and the Purchasing Manager's Index (PMI) in the expansion zone confirm the continued economic growth of Indonesia. The sustained good economic growth is also reflected in the performance of key business fields (LU) such as the processing industry, mining, construction, and LU related to services including transportation and warehousing, accommodation and food and beverages, as well as information and telecommunications. With these developments, Bank Indonesia projects economic growth to reach 4.5-5.3% in 2023, and increase to 4.7-5.5% in 2024 and 4.8-5.6% in 2025. The continued economic improvement in 2024 is mainly driven by domestic demand, in line with salary increases for Civil Servants (ASN), the organization of the General Election, and the development of the National Capital (IKN). Bank Indonesia also supports economic growth, particularly from the demand side, by continuously enhancing macroprudential policy stimuli and accelerating the digitalization of the payment system, in close synergy with the Government's fiscal policies.

Harga minyak mentah dunia mengalami gejolak yang membuatnya jatuh bangun selama tahun 2023. Kendati, minyak mentah masih menjadi komoditas unggulan bagi pelaku pasar. Minyak pun menjadi biang kerok konflik geopolitik di negara-negara produsen besar, terutama di Timur Tengah. Harga minyak jenis *West Texas Intermediate* (WTI) untuk kontrak Februari 2024 sebesar US$74,10 pada 28 Desember 2023 pukul 14.30 WIB. Nilainya turun 7,92% sepanjang tahun 2023 berjalan (*year to date/ytd*).

World crude oil prices experienced fluctuations throughout 2023. Despite this, crude oil remained a prime commodity for market players. Oil also became a major source of geopolitical conflicts in major producing countries, especially in the Middle East. The price of West Texas Intermediate (WTI) crude oil for February 2024 contracts was $74.10 on December 28, 2023, at 14.30 WIB, down 7.92% year-to-date (ytd).

Berdasarkan data BPS, selama Januari–November 2023, jumlah penumpang domestik sebanyak 57,0 juta orang dan jumlah penumpang internasional sebanyak 14,1 juta orang, masing-masing naik sebesar 20,66 persen dan 135,11 persen dibanding kondisi pada periode yang sama tahun 2022.

According to BPS data, during January-November 2023, the number of domestic passengers reached 57.0 million, and the number of international passengers reached 14.1 million, up by 20.66% and 135.11%, respectively, compared to the same period in 2022.

Jumlah penumpang kereta api selama Januari–November 2023 mencapai 336,5 juta orang atau naik 36,07 persen dibanding

The number of train passengers during January-November 2023 reached 336.5 million, up 36.07% compared to the same

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

periode yang sama tahun 2022. Hal yang sama untuk jumlah barang yang diangkut kereta api naik 8,62 persen menjadi 60,9 juta ton.

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri selama Januari–November 2023 mencapai 18,0 juta orang atau naik 11,66 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2022, sementara jumlah barang yang diangkut naik 9,69 persen atau mencapai 322,2 juta ton. Pada tahun 2023, PT PELNI (Persero) melakukan kenaikan tarif kapal penumpang sesuai PM 8 Tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli Tahun 2023.

STRATEGI PT PELNI (PERSERO) TAHUN 2020 – 2024

Pada tahun 2023, pertumbuhan global diprediksi hanya akan berada di tingkat 2,9 persen, turun signifikan dari proyeksi *World Economic Outlook* (WEO) April 2022 di tingkat 3,6 persen. Namun, perekonomian Indonesia untuk tahun 2023 secara agregat diperkirakan memiliki pertumbuhan yang masih relatif kuat, di tengah ketidakpastian risiko global, tensi geopolitik, serta tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi global. Potensi pertumbuhan yang lebih baik di tengah transformasi ekonomi akan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tidak setinggi perkiraan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan pada 5,3 persen.

Seiring dengan adanya program vaksinasi booster COVID-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, maka di tahun 2023 PT PELNI (Persero) diharapkan mampu berkontribusi secara positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pada sektor transportasi. Setelah melalui tahap *survival* dan *business recovery* pada tahun 2020 - 2022 sebagai dampak adanya pandemi COVID- 19, tahun 2023 merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk bertumbuh melalui strategi *Market & Business Expansion* sesuai dengan Tema Strategis Perusahaan pada *Roadmap* RJPP PT PELNI (Persero) 2020 - 2024. Strategi yang dilakukan oleh PT PELNI (Persero) juga telah diselaraskan dengan 5 Agenda Prioritas BUMN 2020 - 2024, sebagai berikut:

period in 2022. Similarly, the amount of goods transported by train increased by 8.62% to 60.9 million tons. In 2023, PT PELNI (Persero) implemented a fare increase for passenger ships in accordance with PM 8 of 2023, effective from July 1, 2023.

Meanwhile, the number of domestic sea transport passengers during January–November 2023 reached 18.0 million, an increase of 11.66 percent compared to the same period in 2022. The volume of goods transported also rose by 9.69 percent, reaching 322.2 million tons. In 2023, PT PELNI (Persero) implemented an increase in passenger ship fares in accordance with Regulation PM 8 of 2023, effective from July 1, 2023.

PT PELNI (PERSERO) STRATEGY FOR 2020 – 2024

In 2023, global growth is predicted to be only at 2.9%, significantly down from the World Economic Outlook (WEO) April 2022 projection of 3.6%. However, Indonesia's economy in 2023 is expected to maintain relatively strong growth amid global risk uncertainties, geopolitical tensions, and inflation levels affecting the pace of global economic growth. Better growth potential amid economic transformation will support national economic growth. Although not as high as previously predicted, national economic growth in 2023 is expected to be 5.3%.

Along with the COVID-19 booster vaccination program as a travel requirement, in 2023 PT PELNI (Persero) is expected to contribute positively and drive national economic growth, particularly in the transportation sector. After going through the survival and business recovery stages in 2020-2022 due to the COVID-19 pandemic, 2023 presents an opportunity for the company to grow through the Market & Business Expansion strategy in line with the Strategic Theme of the Company in the PT PELNI (Persero) 2020-2024 RJPP Roadmap. The strategy carried out by PT PELNI (Persero) has also been aligned with the 5 Priority Agendas of SOEs for 2020-2024, as follows:

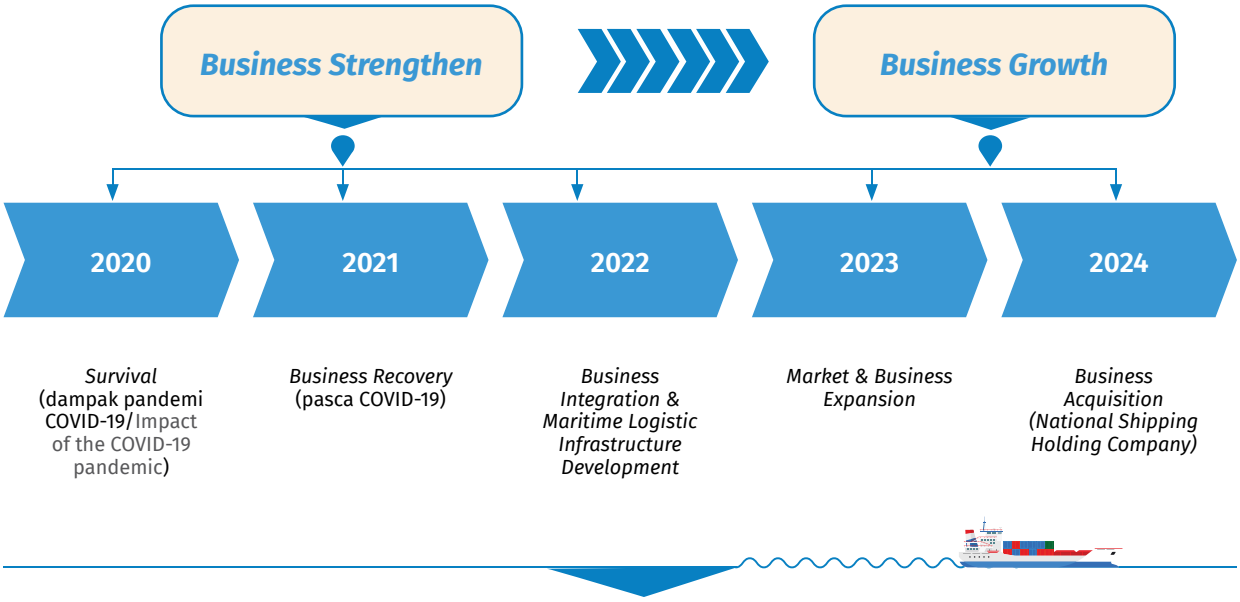

2023

Market & Business Expansion

- ***Implementasi Pola Hub & Spoke Kapal Tol Laut***
- ***Pengembangan Bisnis Ship Chartering & Ship Management***
- ***Modifikasi Kapal Penumpang***
- ***Pengembangan Infrastruktur Logistik Maritim***
- ***Pengembangan Bisnis Learning Center***
- ***Pengembangan Bisnis Maintenance Facility***
- ***Pengembangan Usaha Gudang Konsolidasi***
- ***Pengembangan Integrated Commercial System***
- ***Pengembangan Talent Milenial dan Perempuan***

- Implementation of the Hub & Spoke Model for Sea Toll Vessels
- Development of Ship Chartering & Ship Management Business
- Passenger Vessel Modifications
- Development of Maritime Logistics Infrastructure
- Development of Learning Center Business
- Development of Maintenance Facility Business
- Development of Consolidation Warehouse Business
- Development of Integrated Commercial System
- Development of Millennial and Women Talent

Pada aspek finansial, sasaran strategis perusahaan yaitu "Meningkatnya Kinerja Keuangan Korporat" dengan mengutamakan kelangsungan usaha dan kesehatan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham Nomor: S 683/MBU/10/2022 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023, tercantum dalam inisiatif strategis untuk klaster jasa logistik khususnya pada sub klaster transportasi laut yaitu ekspansi yang profitable, menciptakan

In the financial aspect, the company's strategic goal is "Enhancing Corporate Financial Performance," with a focus on business continuity and corporate health. This is in line with Shareholder Aspirations Number: S 683/MBU/10/2022 regarding Shareholder/Capital Owner Aspirations for the Preparation of the 2023 Company Work Plan and Budget. This aspiration is outlined in the strategic initiative for the logistics services cluster, particularly in the sub-cluster of sea transportation, which includes profitable expansion,

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

economic value add, serta menjaga kondisi keuangan BUMN dengan mempertahankan rasio-rasio *gearing* dan *debt service* setara dengan rasio-rasio yang ada pada perusahaan dengan *rating investment grade*. Sasaran strategis lainnya dari aspek finansial adalah "Meningkatnya Penghasilan dari Bisnis Komersial dan Non Komersial", dengan meningkatkan persentase kontribusi pendapatan dari unit-unit bisnis komersial serta optimalisasi pendapatan dari unit bisnis non komersial.

Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis pada aspek finansial, terdapat beberapa sasaran strategis yang telah diselaraskan dengan strategi perusahaan yang fokus pada:
1. Meningkatkan Penjualan Angkutan Bisnis Non Komersial
2. Meningkatkan Pemasaran Bisnis Komersial
3. Meningkatkan Efektivitas Proses Kerja berbasis *Operational* & *Service Excellence*
4. Meningkatkan Efektivitas *Fleet Management* & *Safety Compliance*
5. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Penugasan Pemerintah
6. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Alat Produksi
7. Mengembangkan Potensi Bisnis *Shipyard*
8. Meningkatkan *Organizational Capital*
9. Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional
10. Mengembangkan Sistem IT untuk Mendukung Strategi dan Bisnis Perusahaan'

Adapun sasaran strategis perusahaan yang akan diterapkan pada tahun 2023 tertuang dalam pemetaan strategi berbasis *balanced scorecard*, sebagai berikut:

creating economic value added, and maintaining the financial condition of SOEs by keeping gearing and debt service ratios equivalent to those of investment-grade rated companies. Another strategic goal from the financial aspect is "Increasing Revenue from Commercial and Non-Commercial Businesses." This involves increasing the percentage contribution of revenue from commercial business units and optimizing revenue from non-commercial business units.

To support the achievement of strategic goals in the financial aspect, several strategic objectives have been aligned with the company's strategy, focusing on:
1. Increasing Sales in Non-Commercial Transport Business
2. Enhancing Marketing in Commercial Business
3. Improving Work Process Effectiveness based on Operational & Service Excellence
4. Enhancing Fleet Management & Safety Compliance Effectiveness
5. Increasing the Effectiveness of Government Assignment Implementation
6. Expanding Infrastructure and Production Tool Capacity
7. Developing Business Potential in Shipyard Operations
8. Enhancing Organizational Capital
9. Creating Superior and Professional Human Resources
10. Developing IT Systems to Support the Company's Strategy and Business

The company's strategic objectives to be implemented in 2023 are outlined in the strategy mapping based on the balanced scorecard as follows:

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

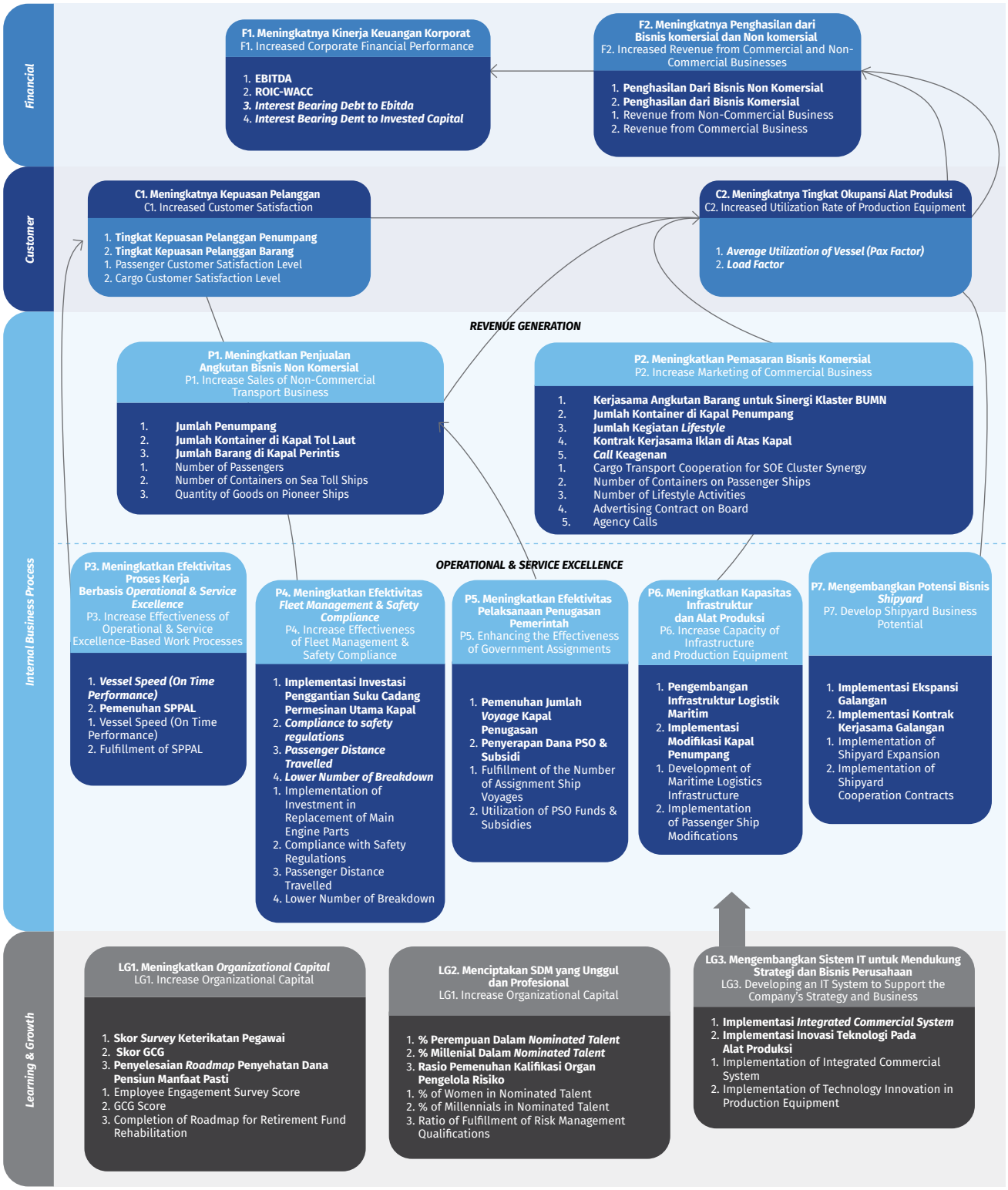

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Kelima Agenda Prioritas Kementerian BUMN, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta memiliki beberapa Inisiatif Strategis Kluster, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM) tahun 2023 level korporat, sebagai berikut:

The five Priority Agendas of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), namely Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development, and Talent Development, include several Strategic Cluster Initiatives, which are then outlined in the 2023 Corporate Management Work Plan (RKM) as follows:

Tema Strategis Strategic Theme	**Inisiatif Strategis Kluster** Cluster Strategic Initiatives	**No.**	**Rencana Kerja Manajemen** Management Work Plan	**Direktorat** Directorate
Nilai Ekonomi & Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	Ekspansi yang *profitable*, menciptakan *economic value added*, dan menjaga kondisi keuangan BUMN Profitable expansion, creating economic value added, and maintaining the financial condition of SOEs	1.	Akselerasi pemasaran dan memperluas jangkauan penjualan angkutan barang & penumpang Marketing acceleration and expanding the sales reach of freight and passenger transport	Usaha Angkutan Penumpang & Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Passenger Transportation & Freight Transportation and Sea Toll
		2.	Pengangkutan muatan produk BUMN, khususnya klaster tambang, pangan dan energi Transporting SOE products, especially from mining, food, and energy clusters	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation and Sea Toll
		3.	Pengangkutan muatan UMKM dan instansi lainnya menggunakan skema LCL Transporting MSME and other agency goods using the LCL scheme	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation and Sea Toll
		4.	Pelaksanaan program TJSL yang selaras dengan prioritas TPB Implementing CSR programs aligned with SDG's priorities	Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management
	Peningkatan operasionalisasi kapal dan pelayanan pelanggan	5.	Peremajaan alat-alat navigasi Modernizing navigation equipment	Armada & Teknik Fleet & Engineering
	Keamanan Perjalanan Kapal Improving ship operations and customer service	6.	Pemenuhan persyaratan/ kelengkapan sesuai standar SOLAS Meeting requirements/completeness according to SOLAS standards	Armada & Teknik Fleet & Engineering
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penugasan pemerintah dalam menjalankan kapal penugasan Increasing effectiveness in managing government assignments for task ships	7.	Implementasi pola *hub & spoke* kapal tol laut Implementing the hub & spoke pattern for sea toll ships	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation and Sea Toll
		8.	Pengajuan perubahan SDUM Submitting SDUM changes | Finance & Risk Management	Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management

Tema Strategis Strategic Theme	**Inisiatif Strategis Kluster** Cluster Strategic Initiatives	**No.**	**Rencana Kerja Manajemen** Management Work Plan	**Direktorat** Directorate
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	Peningkatan produktivitas dan tingkat layanan untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan Increasing productivity and service levels to maintain customer satisfaction and trust	9.	Peningkatan infrastruktur dan perubahan layanan di atas kapal penumpang Improving infrastructure and changing services on passenger ships	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation Business & Sea Toll
		10.	Penataan layanan muatan dan *over* bagasi Organizing cargo services and excess baggage	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation and Sea Toll
	Meningkatkan *market share*	11.	Pengembangan bisnis *ship chartering & ship management* Developing ship chartering & ship management business	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation and Sea Toll
		12.	Diversifikasi bisnis komersial usaha angkutan penumpang Diversifying commercial business for Passenger Transportation	Usaha Angkutan Penumpang Passenger Transportation
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	Pengembangan sistem IT untuk mendukung implementasi bisnis dan strategi perusahaan Developing IT systems to support business implementation and company strategies	13.	Implementasi inovasi teknologi pada alat produksi Implementing technological innovations in production tools	Armada & Teknik Fleet & Engineering
		14.	Pengembangan *integrated commercial system* Developing integrated commercial systems	SDM & Umum HR & General Affairs
		15.	Penyediaan infrastruktur digitalisasi transaksi mitra di atas kapal penumpang Providing digital transaction infrastructure for partners on passenger ships	SDM & Umum HR & General Affairs
		16.	Digitalisasi proses bisnis penunjang *operational excellence* Digitizing business processes to support operational excellence	SDM & Umum, Usaha Angkutan Penumpang, Usaha Angkutan Barang & Tol Laut, Armada & Teknik, Keuangan & Manajemen Risiko HR & General Affairs, Passenger Transportation, Freight Transportation and Sea Toll, Fleet & Engineering, Finance & Risk Management

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Tema Strategis Strategic Theme	Inisiatif Strategis Kluster Cluster Strategic Initiatives	No.	Rencana Kerja Manajemen Management Work Plan	Direktorat Directorate
Peningkatan Investasi Investment Enhancement	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan alat produksi Increasing infrastructure and production tool capacity	17.	Penguatan infrastruktur logistik maritim Strengthening maritime logistics infrastructure	Usaha Angkutan Penumpang Passenger Transportation
	Revitalisasi, dan peningkatan performa armada dan fasilitas penunjang Revitalization and performance improvement of fleet and support facilities	18.	Modifikasi kapal penumpang Modifying passenger ships	Armada & Teknik Fleet & Engineering
		19.	Penggantian suku cadang utama kapal Replacing main ship parts	Armada & Teknik Fleet & Engineering
		20.	Pengembangan bisnis pelayaran Developing shipping business	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation and Sea Toll
		21.	Pengembangan bisnis PELNI *learning center* Developing PELNI learning center business	SBU Hotel Bahtera Bahtera Hotel SBU
		22.	Pengembangan bisnis PELNI *maintenance facility* Developing PELNI maintenance facility business	SBU Galangan PELNI Surya Surya Shipyard SBU
		23.	Revitalisasi *operation room* Revitalizing operation room	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation and Sea Toll
		24.	Pengembangan usaha depo *container*/gudang konsolidasi persmat Developing container depot/ consolidation warehouse business	Direktorat Utama President Director
		25.	Pengajuan dana PMN untuk investasi kapal penumpang & kapal barang Submitting PMN funds for investment in passenger and cargo ships	Usaha Angkutan Penumpang, Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Passenger Transportation, Freight Transportation and Sea Toll

Tema Strategis Strategic Theme	Inisiatif Strategis Kluster Cluster Strategic Initiatives	No.	Rencana Kerja Manajemen Management Work Plan	Direktorat Directorate
Pengembangan Talenta Talent Development	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional Creating superior and professional HR	26.	Program pengembangan bersama klaster logistik laut, srikandi BUMN, dan KBUMN untuk talent milenial dan Perempuan Joint development programs with maritime logistics cluster, SOE women, and SOE millennial talent for millennials and women	SDM & Umum HR & General Affairs
		27.	Evaluasi dan penyempurnaan implementasi penilaian kinerja pegawai (PMS) Evaluating and refining the implementation of employee performance assessments (PMS)	SDM & Umum HR & General Affairs

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Direksi beserta jajaran berinisiatif untuk menurunkannya menjadi 27 Rencana Kerja Manajemen (RKM), yakni Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Dalam perumusan kebijakan dan arah pengembangan Perseroan, Dewan Komisaris juga berperan aktif dalam memberikan saran, masukan, dan nasihat yang membangun dalam perumusan kebijakan strategis. Dewan Komisaris juga berhasil membangun arus komunikasi dua arah yang baik, sehingga meminimalkan terjadinya asimetri informasi dalam lingkungan Perseroan yang menghambat kinerja operasional. Peranan Direksi dalam penentuan, perumusan, dan pengimplementasian kebijakan strategis Perseroan juga sangat penting, dalam memastikan keberhasilan kebijakan strategis.

ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING STRATEGIC POLICIES

The Board of Directors, along with their team, took the initiative to translate the five Priority Agendas into 27 Corporate Management Work Plans (RKM), covering Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development, and Talent Development. In the formulation of policies and the direction of the Company's development, the Board of Commissioners also plays an active role in providing constructive suggestions, inputs, and advice in the strategic policy formulation. The Board of Commissioners has successfully established a good two-way communication flow, thereby minimizing information asymmetry within the Company, which could hinder operational performance. The role of the Board of Directors in determining, formulating, and implementing the Company's strategic policies is also crucial to ensure the success of these strategic policies.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Direksi senantiasa melakukan pengkajian dan observasi mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi. Lebih lanjut, Direksi juga senantiasa melakukan pengawasan secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi pengimplementasian kebijakan strategis untuk memberikan hasil yang lebih baik kedepannya.

PROCESS UNDERTAKEN BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

The Board of Directors consistently conducts in-depth reviews and observations of the challenges faced. Furthermore, the Board also continuously monitors and evaluates the implementation of strategic policies to ensure better outcomes in the future.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

PENCAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Secara umum, PT PELNI (Persero) mampu mencatatkan kinerja yang memuaskan selama tahun 2023. Pendapatan usaha bersih yang berhasil dibukukan Perseroan sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp5,77 triliun atau 104,50% dari target tahun 2023. Nilai ini merupakan nilai bersih setelah dikurangi reduksi pendapatan usaha. Perseroan mampu memperoleh peningkatan pendapatan sebesar 17,53% atau senilai Rp860,02 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,91 triliun. Peningkatan kinerja ini terjadi baik pada pendapatan dari usaha pelayaran maupun pendapatan dari usaha non-pelayaran.

Perseroan membukukan laba tahun berjalan sejumlah Rp201,63 miliar atau 105,67% dari target tahun 2023. Laba tersebut meningkat sebesar 16,13% atau senilai Rp28,01 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp173,62 miliar.

Dari sisi neraca, dimana total aset, total liabilitas dan total ekuitas pada tahun 2023 terealisasi masing-masing sebesar Rp8,04 triliun, Rp1,21 triliun dan Rp6,82 triliun. Sedangkan saldo kas dan setara kas per akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,49 triliun. Seluruh realisasi tersebut mengalami peningkatan secara *year on year* dan tercapai dengan baik dari target tahun 2023.

Dari sisi investasi, pada awal tahun 2023 PT PELNI (Persero) menganggarkan Rp1,08 triliun untuk investasi kapal, alat produksi dan sarana penunjang.

Per 31 Desember 2023, investasi tersebut terealisasi sebesar Rp196,80 miliar atau 18,29% dari target tahun 2023 dan 99,31% dari realisasi tahun 2022. Adapun alokasi realisasi dana investasi tersebut masing-masing senilai Rp108,29 miliar untuk investasi kapal, Rp152,07 miliar untuk alat produksi dan Rp44,72 miliar untuk sarana penunjang.

Dari sisi operasional, Perseroan mencatatkan jumlah penumpang pada tahun 2023 sebanyak 5.262.689 orang atau 122,45% dari target tahun 2023 dan 124,08% dari realisasi tahun 2022. Adapun *vessel speed (on time performance)* tahun 2023 sebesar 95,29% dari target sebesar 90%. *Average Utilization of Vessel (Pax Factor)* tahun 2023 sebesar 73,23% dari target sebesar 55%. Sementara itu, pemenuhan jumlah *voyage* kapal penumpang pada tahun 2023 sebesar 101,45% sedangkan target sebesar 80%.

Pada tahun 2023, dari 11 kapal barang yang dioperasikan, 10 kapal barang dioperasikan untuk penugasan Tol Laut, yaitu 6

COMPANY PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

In general, PT PELNI (Persero) managed to record satisfactory performance throughout 2023. The net operating revenue achieved by the Company for the year 2023 was Rp5.77 trillion or 104.50% of the 2023 target. This value is net after deducting operating income reductions. The Company managed to increase its revenue by 17.53% or Rp860.02 billion compared to the previous year, which was Rp4.91 trillion. This improvement in performance occurred in both the revenue from shipping operations and the revenue from non-shipping operations.

The Company recorded a net profit for the year amounting to IDR 201.63 billion, representing 105.67% of the 2023 target. This profit marks an increase of 16.13% or IDR 28.01 billion compared to the previous year's profit of IDR 173.62 billion.

From a balance sheet perspective, total assets, total liabilities, and total equity in 2023 were realized at IDR 8.04 trillion, IDR 1.21 trillion, and IDR 6.82 trillion, respectively. Meanwhile, the cash and cash equivalents balance as of the end of 2023 stood at IDR 3.49 trillion. All these realizations saw year-on-year increases and were successfully achieved against the 2023 targets.

In terms of investment, at the beginning of 2023, PT PELNI (Persero) allocated IDR 1.08 trillion for investments in ships, production equipment, and supporting facilities.

As of December 31, 2023, these investments were realized at IDR 196.80 billion, or 18.29% of the 2023 target and 99.31% of the 2022 realization. The allocation of these investment funds included IDR 108.29 billion for ship investments, IDR 152.07 billion for production equipment, and IDR 44.72 billion for supporting facilities.

From an operational standpoint, the Company recorded a total of 5,262,689 passengers in 2023, representing 122.45% of the 2023 target and 124.08% of the 2022 realization. The vessel speed (on-time performance) in 2023 was 95.29% of the target of 90%. The average utilization of vessels (Pax Factor) in 2023 was 73.23% of the target of 55%. Additionally, the fulfillment of the number of passenger vessel voyages in 2023 reached 101.45%, against a target of 80%.

In 2023, of the 11 cargo ships operated, 10 were assigned to the Sea Toll program, consisting of 6 KM Logistik Nusantara

KM Logistik Nusantara dan 4 KM Kendhaga Nusantara. Sampai dengan tahun buku 2023 selesai, masih terdapat 1 kapal barang sedang dalam proses *write off* dan 2 kapal barang telah dilakukan *write off*.

vessels and 4 KM Kendhaga Nusantara vessels. By the close of the 2023 fiscal year, 1 cargo ship remained in the write-off process, and 2 cargo ships had already been written off.

Di sisi lain, hasil *Key Performance Indicator* (KPI) Kontrak Manajemen PT PELNI (Persero) tahun 2023 memperoleh bobot maksimal sebesar 104,19, melampaui bobot yang ditetapkan sebesar 100,00. Terdapat 3 Agenda BUMN yang mampu melampaui bobot yang ditetapkan, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Kepemimpinan Teknologi, dan Pengembangan Talenta. Sedangkan perspektif Inovasi Model Bisnis dan Pengembangan Investasi belum berhasil melampaui skor maksimal karena belum terealisasinya kontribusi pendapatan non penugasan dan capaian indikator pengembangan infrastruktur logistik maritim masih dibawah target.

Additionally, PT PELNI (Persero) achieved a maximum Key Performance Indicator (KPI) Contract Management score of 104.19, surpassing the set score of 100.00. Three SOE Agendas surpassed the set scores, namely Economic and Social Value for Indonesia, Technology Leadership, and Talent Development. However, the Business Model Innovation and Investment Development perspectives did not achieve the maximum scores due to unrealized non-assignment revenue contributions and maritime logistics infrastructure development indicators still below target.

Realisasi Tingkat Kesehatan BUMN PT PELNI (Persero) kategori "AAA" dengan kualifikasi "Sangat Sehat")".

PT PELNI (Persero) achieved a "AAA" health rating with the qualification of "Very Healthy."

Berikut ini merupakan uraian kinerja PT PELNI (Persero) selama tahun 2023 yang dikontribusikan dari Kinerja Usaha Perkapalan, Kinerja Usaha Sampingan, Kinerja Usaha Penunjang, dan Kinerja Anak Perusahaan.

The following is a description of PT PELNI (Persero)'s performance in 2023, contributed by Ship Business Performance, Side Business Performance, Supporting Business Performance, and Subsidiary Performance.

KINERJA USAHA PERKAPALAN

SHIPPING BUSINESS PERFORMANCE

Usaha Perkapalan merupakan bidang usaha utama PT PELNI (Persero). Pada tahun 2023, armada kapal yang dioperasikan PT PELNI (Persero) sebanyak 102 unit kapal. Kapal utama yang beroperasi sebanyak 95 kapal dan kapal cadangan sebanyak 6 kapal yang terdiri dari 48 kapal perintis dan 10 kapal tol laut.

The ship business is the main business field of PT PELNI (Persero). In 2023, PT PELNI (Persero) operated 102 ships. The main operating ships were 95 ships, and the reserve ships were 6 ships, consisting of 48 pioneer ships and 10 sea toll ships.

Realisasi *commission days* tahun 2023 sebanyak 24.078 hari atau 107,62% dari target tahun 2023, dan 96,28% dari realisasi tahun 2022. Frekuensi tahun 2023 sebanyak 1.901 voyage atau 110,65% dari target tahun 2023 dan 101,17% dari realisasi tahun 2022. Jumlah penumpang mencapai 5.262.689 orang atau 122,45% dari target tahun 2023 dan 124,08% dari realisasi tahun 2022.

The realization of commission days in 2023 amounted to 24,078 days, which is 107.62% of the target for 2023, and 96.28% of the realization in 2022. The frequency in 2023 reached 1,901 voyages, representing 110.65% of the 2023 target and 101.17% of the 2022 realization. The number of passengers totaled 5,262,689, which is 122.45% of the 2023 target and 124.08% of the 2022 realization.

Pencapaian produksi kendaraan dan *Redpack* telah mencapai target tahun 2023, sedangkan barang dan *container* belum mencapai target tahun 2023. Pencapaian muatan barang sebesar 87,31% dari target tahun 2023 dan 87,99% dari realisasi tahun 2022. Muatan *container* sebesar 96,09% dari target tahun 2023 dan 100,01% dari realisasi tahun 2022. Muatan kendaraan sebesar 109,01% dari target tahun 2023 dan 87,99%

The production of vehicles and Redpack has successfully met the 2023 targets. However, goods and container shipments have not yet reached the 2023 targets. The achievement for goods shipments stands at 87.31% of the 2023 target and 87.99% of the 2022 realization. Container shipments have reached 96.09% of the 2023 target and 100.01% of the 2022 realization. Vehicle shipments have achieved 109.01% of

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

dari realisasi tahun 2022. Produksi muatan *Redpack* sebesar 117,28% dari target tahun 2023 dan 102,59% dari realisasi tahun 2022.

Dari segmen Perkapalan, PT PELNI (Persero) memperoleh pendapatan tahun 2023 sebesar Rp5,17 triliun atau 100,74% dari target tahun 2023 dan 117,10% dari realisasi 2022. Pendapatan usaha perkapalan telah mencapai target 2023.

Sementara itu, laba usaha perkapalan tahun 2023 sebesar Rp647,21 miliar atau sebesar 94,62% dari target tahun 2023 dan 112,98% dari realisasi tahun 2022.

KINERJA USAHA SAMPINGAN

Usaha Sampingan PT PELNI (Persero) terdiri atas Keagenan, *Lifestyle*, Pengusahaan Aset, dan Pengusahaan Logistik. Realisasi laba usaha sampingan tahun 2023 sebesar Rp20,30 miliar atau 126,93% dari target tahun 2023 dan 95,35% dari realisasi tahun 2022.

Keagenan dan *Lifestyle*

Keagenan

Realisasi produksi dan pencapaian penghasilan keagenan tahun 2023 sebesar masing-masing 61,61% dan 63,40% dari target tahun 2023. Sedangkan realisasi laba keagenan tahun 2023 sebesar Rp4,08 miliar atau 68,03% dari target tahun 2023 dan 66,75% dari realisasi tahun 2022.

Dalam upaya mencapai target usaha keagenan, Perseroan melakukan berbagai langkah strategis antara lain:

1. Diversifikasi usaha keagenan
2. Pengembangan aplikasi penjualan keagenan
3. Optimasi sosial media, *website* keagenan dan *branding*
4. Kerjasama keagenan dengan pihak ketiga, baik domestik maupun internasional
5. Mengelola *after sales services*

Lifestyle

Produksi *lifestyle* tahun 2023 adalah sebanyak 117 kegiatan dan jumlah peserta sebanyak 12.320 orang. Produk layanan tambahan (*add on*) Tahun 2023 adalah sebanyak 380 kegiatan dan jumlah peserta sebanyak 51.329 orang. Realisasi laba *lifestyle* tahun 2023 sebesar Rp8,23 miliar atau 215,80% dari target tahun 2023 dan 2.433,11% dari realisasi tahun 2022. Pendapatan *lifestyle* (MICE & Wisata Bahari) sebesar Rp13,87 miliar atau 46,87% dari target tahun 2023 dan 1.123,16% dari realisasi 2022.

the 2023 target and 87.99% of the 2022 realization. Redpack shipment production has reached 117.28% of the 2023 target and 102.59% of the 2022 realization.

From the shipping segment, PT PELNI (Persero) achieved 2023 revenue of Rp5.17 trillion or 100.74% of the 2023 target and 117.10% of the 2022 realization. The shipping business revenue reached the 2023 target.

Meanwhile, the shipping business profit in 2023 was Rp647.21 billion or 94.62% of the 2023 target and 112.98% of the 2022 realization.

SIDE BUSINESS PERFORMANCE

PT PELNI (Persero)'s side business consists of Agency, Lifestyle, Asset Management, and Logistics Operations. The realization of the side business profit in 2023 was Rp20.30 billion or 126.93% of the 2023 target and 95.35% of the 2022 realization.

Agency and Lifestyle

Agency

The realization of production and achievement of agency income for the year 2023 reached 61.61% and 63.40% of the 2023 target, respectively. Meanwhile, the realization of agency profit for 2023 amounted to IDR 4.08 billion, or 68.03% of the 2023 target and 66.75% of the 2022 realization.

In an effort to meet the agency business targets, the company has undertaken various strategic measures, including:

1. Diversification of agency business
2. Development of agency sales applications
3. Optimization of social media, agency websites, and branding
4. Agency collaborations with third parties, both domestic and international
5. Management of after-sales services

Lifestyle

Lifestyle production in 2023 was 117 activities, with a total of 12,320 participants. Additional service products (add-ons) in 2023 were 380 activities, with a total of 51,329 participants. The realization of Lifestyle profit in 2023 was Rp8.23 billion or 215.80% of the 2023 target and 2,433.11% of the 2022 realization. Lifestyle revenue (MICE & Marine Tourism) was Rp13.87 billion or 46.87% of the 2023 target and 1,123.16% of the 2022 realization.

Dalam upaya mencapai target, Perseroan melakukan berbagai langkah strategis antara lain:
1. Merenovasi fasilitas komersial di atas kapal penumpang, antara lain restoran, minimarket dan bioskop.
2. Perubahan skema kerja sama dengan mitra kerja.
3. Membuat produk komersial layanan penumpang antara lain layanan *add on* dan layanan WiFi.

Pengusahaan Aset

Pada tahun 2023, PT PELNI (Persero) memperoleh pendapatan operasional dari Pengusahaan Aset sebesar Rp7,99 miliar atau 108,29% dari target tahun 2023 dan 105,67% dari realisasi tahun 2022. Sedangkan laba usaha Pengusahaan Aset tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7,99 miliar atau 129,26% dari target tahun 2023 dan 191,35% dari realisasi tahun 2022.

Dalam upaya mencapai target, Perseroan melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya:
1. Memperbaiki aset-aset potensial dengan skala prioritas
2. Perubahan tarif sewa
3. Meningkatkan canvasing mitra potensial
4. Menawarkan perpanjangan kontrak
5. Perbaikan Aset Potensial (*Depo Container* dan Kemayoran)
6. Melakukan HBU Aset

KINERJA USAHA PENUNJANG

Kinerja Usaha Penunjang PT PELNI (Persero) bersumber dari Hotel Bahtera Cipayung dan Galangan Surya Surabaya.

Hotel Bahtera

Pada tahun 2023, jumlah tamu di Hotel Bahtera sebanyak 20.460 orang. Pendapatan operasional Hotel Bahtera tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5,25 miliar atau 51,13% dari target tahun 2023 dan 114,32% dari realisasi tahun 2022.

Persaingan tarif antar hotel di kawasan Puncak yang sangat kompetitif mempengaruhi pendapatan operasional yang diperoleh oleh Hotel Bahtera.

Dalam upaya mencapai target, Perseroan melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya:
1. Melakukan pemasaran secara agresif melalui:
   a. *Digital Online Marketing* yaitu media sosial yaitu Facebook, Instagram, Google Maps, You Tube, *Content Marketing*, e-mail dan *website* perusahaan.

In an effort to achieve its targets, the Company has undertaken various strategic measures, including:
1. Renovating commercial facilities aboard passenger ships, such as restaurants, mini-markets, and cinemas.
2. Revising the cooperation scheme with business partners.
3. Developing commercial products for passenger services, including add-on services and WiFi offerings.

Asset Management

In 2023, PT PELNI (Persero) achieved operating revenue from Asset Management of Rp7.99 billion or 108.29% of the 2023 target and 105.67% of the 2022 realization. The realization of Asset Management profit in 2023 was Rp7.99 billion or 129.26% of the 2023 target and 191.35% of the 2022 realization.

To achieve the target, the Company undertook various strategic steps, including:
1. Enhancing potential assets with a priority scale
2. Adjustment of rental rates
3. Improving canvassing of potential partners
4. Offering contract extensions
5. Improvement of Potential Assets (Depot Containers and Kemayoran)
6. Conducting High and Best Use (HBU) Analysis of Assets

SUPPORTING BUSINESS PERFORMANCE

The Supporting Business Performance of PT PELNI (Persero) comes from Hotel Bahtera Cipayung and Surya Surabaya Shipyard.

Hotel Bahtera

In 2023, Hotel Bahtera accommodated a total of 20,460 guests. The operational revenue for Hotel Bahtera in 2023 amounted to IDR 5.25 billion, which represents 51.13% of the target for the year and 114.32% of the revenue achieved in 2022.

The highly competitive rate competition among hotels in the Puncak area has impacted the operational revenue earned by Hotel Bahtera.

To achieve the target, the Company undertook various strategic steps, including:
1. Implementing aggressive marketing strategies through:
   a. Digital Online Marketing, which includes social media platforms such as Facebook, Instagram, Google Maps, YouTube, Content Marketing, email, and the company's website.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

b. *Offline via Telp, Sales Visit* ke Instansi/Perusahaan/ Lembaga Pendidikan/ Asosiasi/Komunitas/Lembaga Kerohanian.
2. Memperluas jaringan pemasaran antara lain dengan Traveloka, Tiket.com, PegiPegi, Mr. Aladin, Expedia.com, Booking.com, Agoda, Trip.com.
3. Menetapkan strategi tarif untuk mengoptimalkan *Occupancy Rate*.
4. Melakukan *upgrade* diversifikasi usaha bisnis non hotel, yaitu antara lain usaha resto, dan *catering*.
5. Melakukan renovasi sarana prasarana hotel.
6. Melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan *branding* dan *image* hotel.

Galangan PELNI Surya

Selama tahun 2023, realisasi jumlah *docking* kapal di Galangan Pelni Surya sebanyak 24 kapal, meningkat dibandingkan realisasi jumlah docking kapal tahun 2022 yaitu sebanyak 20 kapal.

Pada tahun 2023, PT PELNI (Persero) memperoleh pendapatan operasional dari Galangan PELNI Surya sebesar Rp22,74 miliar atau 119,69% dari target tahun 2023 dan 151,83% dari realisasi 2022. Sedangkan laba usaha tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1,57 miliar atau 82,86% dari target tahun 2023 dan 60,69 % dari realisasi tahun 2022.

Dalam upaya mencapai target, Perseroan melakukan berbagai langkah strategis, yaitu:
1. Mengembangkan usaha di luar pengerjaan *docking* kapal di Galangan PELNI Surya
2. Melakukan strategi *marketing* untuk memperluas pasar
3. Penambahan alat produksi

KINERJA ANAK PERUSAHAAN

Pada tahun 2023, PT PELNI (Persero) memperoleh pendapatan operasional dari kedua Anak Perusahaan tersebut sebesar Rp1,12 triliun atau 87,19% dari target tahun 2023 dan 117,22% dari realisasi 2022. Sedangkan laba usaha tahun 2023 terealisasi sebesar Rp77,08 miliar atau 90,31% dari target tahun 2023 dan 112,77% dari realisasi tahun 2022.

PT PELNI (Persero) memiliki 2 (dua) Anak Perusahaan, yaitu PT PBM Sarana Bandar Nasional (PBM SBN) dan PT Pelita Indonesia Djaya (PID). PBM SBN menjalankan usaha di bidang bongkar muat dan *freight forwarding*, sedangkan PID menjalankan usaha di bidang jasa pelayanan, antara lain seperti layanan permakanan, layanan kebersihan, layanan keamanan, layanan hiburan musik.

b. Offline marketing via telephone, sales visits to institutions/companies/educational institutions/ associations/communities/religious organizations.
2. Expanding marketing networks by collaborating with platforms such as Traveloka, Tiket.com, PegiPegi, Mr. Aladin, Expedia.com, Booking.com, Agoda, and Trip.com.
3. Establishing pricing strategies to optimize the occupancy rate.
4. Upgrading and diversifying non-hotel business ventures, including restaurant and catering services.
5. Renovating the hotel's infrastructure and facilities.
6. Collaborating with external parties to enhance the hotel's branding and image.

PELNI Surya Shipyard

In 2023, PELNI Surya Shipyard successfully docked 24 vessels, an increase compared to the 20 vessels docked in 2022.

In 2023, PT PELNI (Persero) generated operational revenue from PELNI Surya Dockyard amounting to IDR 22.74 billion, achieving 119.69% of the 2023 target and 151.83% of the revenue realized in 2022. However, the operating profit for 2023 amounted to IDR 1.57 billion, which is 82.86% of the 2023 target and 60.69% of the profit realized in 2022.

In its efforts to achieve the target, the Company implemented various strategic measures, including:
1. Expanding business activities beyond ship docking at PELNI Surya Dockyard.
2. Implementing marketing strategies to broaden the market.
3. Increasing production equipment.

SUBSIDIARY PERFORMANCE

In 2023, PT PELNI (Persero) generated operational revenue from its two subsidiaries amounting to IDR 1.12 trillion, representing 87.19% of the 2023 target and 117.22% of the 2022 actuals. Meanwhile, the operating profit for 2023 amounted to IDR 77.08 billion, achieving 90.31% of the 2023 target and 112.77% of the 2022 actuals.

PT PELNI (Persero) owns two subsidiaries, namely PT PBM Sarana Bandar Nasional (PBM SBN) and PT Pelita Indonesia Djaya (PID). PBM SBN operates in the fields of cargo handling and freight forwarding, while PID is engaged in service provision, including catering services, cleaning services, security services, and musical entertainment services.

Dalam upaya mencapai target pada tahun 2023, kedua Anak Perusahaan melakukan berbagai langkah strategis di antaranya pengembangan digitalisasi perusahaan, melakukan kerjasama strategis dengan BUMN, BUMD, BUMS serta melakukan peningkatan pendapatan non captive yang terealisasi sebesar Rp269,16 miliar atau 105.31% dari target tahun 2023 dan 134.43% terhadap realisasi tahun 2022.

Sementara secara entitas Anak Usaha langkah strategis yang dilakukan oleh PT PBM Sarana Bandar Nasional (PBM SBN) yaitu:

1. Peningkatan Kerjasama dengan BUMN & BUMS untuk kegiatan project cargo, Angkutan Darat Batu Split PT Semen Indogreen Sentosa, Angkutan Darat & Tongkang Batu Split PT Adhi Karya, Angkutan Darat Batu Split dan Penyewaan Dump Truck untuk proyek batu split PT CBAS, Angkutan Spun Pile Hakaaston.

2. Kerjasama sewa menyewa tanah/lahan dengan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) di Bitung untuk pembukaan Depo Container SBN di Cabang Bitung.
3. Peningkatan kegiatan non-*captive* di Cabang-Cabang, seperti B/M muatan batu bara (PT PLN Batubara Niaga) di Cabang Jayapura, MFO di Cabang Ampenan (PT PLN).

Selanjutnya, PT Pelita Indonesia Djaya (PID) yaitu:

1. Komersialisasi infrastruktur Pre On-Board dan On-Board yang berupa perbaikan kamar mandi di KM. Tatamailau, KM. Tilongkabila dan KM. Gunung Dempo serta penggantian vinyl, karpen dan lantai kayu di KM. Dobonsolo, KM. Lambelu, KM. Binaiya, KM. Leuser dan KM, Nggapulu.

2. Optimalisasi aset untuk pengelolaan kegiatan penunjang pelayanan jasa dengan penambahan sewa kendaraan 3 unit veloz dan addendum kontrak sewa kendaraan di kantor cabang serta Kerjasama sewa kendaraan di labuan bajo.

TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Resiliensi Perseroan diuji di tahun 2023 karena kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak stabil.

Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dan langkah strategis yang diterapkan selama tahun 2023:

In an effort to achieve the targets set for 2023, both subsidiaries have undertaken various strategic initiatives, including the development of digitalization within the company, establishing strategic partnerships with state-owned enterprises (BUMN), regional government-owned enterprises (BUMD), and private enterprises (BUMS), as well as increasing non-captive revenue, which realized Rp269.16 billion or 105.31% of the 2023 target and 134.43% compared to the 2022 realization.

Specifically, the strategic measures implemented by PT PBM Sarana Bandar Nasional (PBM SBN) include:

1. Enhancing partnerships with state-owned enterprises (BUMN) and private enterprises (BUMS) for project cargo activities, land transportation of split stone for PT Semen Indogreen Sentosa, land transportation and barging of split stone for PT Adhi Karya, land transportation of split stone and dump truck rental for the split stone project of PT CBAS, and transportation of spun piles for Hakaaston.
2. Entering into a land lease agreement with PT Industri Kapal Indonesia (Persero) in Bitung for the establishment of the SBN Container Depot at the Bitung Branch.
3. Increasing non-captive activities at various branches, such as the loading and unloading of coal (PT PLN Batubara Niaga) at the Jayapura Branch, and the handling of marine fuel oil (MFO) at the Ampenan Branch (PT PLN).

Furthermore, PT Pelita Indonesia Djaya (PID) has undertaken the following initiatives:

1. Commercializing pre on-board and on-board infrastructure, including the renovation of bathrooms on KM. Tatamailau, KM. Tilongkabila, and KM. Gunung Dempo, as well as the replacement of vinyl, carpets, and wooden flooring on KM. Dobonsolo, KM. Lambelu, KM. Binaiya, KM. Leuser, and KM. Nggapulu.

2. Optimizing assets for the management of service support activities through the addition of three units of Veloz vehicles and an addendum to the vehicle rental contract at branch offices, as well as entering into a vehicle rental agreement in Labuan Bajo.

CHALLENGES AND STRATEGIC STEPS

The Company's resilience was tested in 2023 due to the unstable global and national economic conditions.

Here are the challenges faced and the strategic steps taken in 2023:

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

1. Kendala Cuaca Buruk. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan melakukan koordinasi dengan Nakhoda dan Cabang, dan melakukan optimalisasi jumlah hari pelayaran, serta melakukan penyesuaian jadwal
2. Belum adanya alat ukur barang dan SOP muatan, serta belum maksimalnya kapasitas ruang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan melakukan pengadaan timbangan dan *reviu draft* SOP.
3. *Cyber Attack* MyCargoo pada tanggal 29 November 2023 berdampak pada data bookingan lepas dan transaksi pembayaran tidak terbaca di sistem mycargoo sebanyak 1,28 Miliar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan melakukan proses pengembalian data *booking*-an yang lepas di MyCargoo dan integrasikan ke EBS.
4. Permintaan tiket penumpang yang tinggi di beberapa ruas dan tidak terakomodir karena kapasitas kapal terbatas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Melakukan permintaan dispensasi penumpang untuk kapal penumpang kepada Kementerian Perhubungan
5. Belum adanya social media specialist yang khusus menangani konten sosial media & *lifestyle* Divisi Penumpang Komersial dan Penunjang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan Pembuatan materi video promosi untuk kegiatan MICE dengan media *specialist Thinkwell Project.*

1. Weather Constraints: To overcome this challenge, the Company coordinated with Captains and Branches, optimized sailing days, and adjusted schedules.

2. Lack of Measurement Tools and SOPs for Goods, and Limited Space Capacity: To address this challenge, the Company procured scales and reviewed draft SOPs.

3. Cyber Attack on MyCargoo on November 29, 2023: This impacted booking data loss and unread payment transactions in the MyCargoo system amounting to Rp1.28 billion. To address this challenge, the Company restored lost booking data on MyCargoo and integrated it into the EBS.
4. High Passenger Ticket Demand on Certain Routes and Limited Ship Capacity: To address this challenge, the Company requested passenger dispensation for passenger ships from the Ministry of Transportation.

5. No Social Media Specialist for Content Creation in Commercial Passenger and Supporting Divisions: To address this challenge, the Company created promotional video materials for MICE activities with media specialist Thinkwell Project.

PENERAPAN GOVERNANSI

Komitmen Perseroan untuk terus mempertahankan kinerja yang positif, berkualitas, dan berkelanjutan didukung oleh penerapan governansi dan manajemen risiko yang semakin baik. Kami senantiasa menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip governansi, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dalam setiap kegiatan operasional secara konsisten. Kami memandang bahwa melalui penerapan prinsip-prinsip Governansi secara berkelanjutan pada lingkungan Perseroan mampu mendorong capaian kinerja perusahaan, serta terus menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Di samping itu, Perseroan juga senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai dalam rangka menjamin kegiatan operasional Perseroan berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Penguatan kedua fungsi tersebut membantu untuk memitigasi adanya pengaruh internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi atau faktor lain yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha.

GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company's commitment to maintaining positive, high-quality, and sustainable performance is supported by better governance and risk management. We consistently uphold the principles of Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality in every operational activity. We believe that by continuously implementing these Governance principles within the Company, we can drive corporate performance and create value for stakeholders and the broader community.

Moreover, the Company is also committed to continuously enhancing the implementation of adequate internal control and risk management systems to ensure optimal, effective, and efficient Company operations. Strengthening these functions helps mitigate internal and external influences, whether caused by changes in economic conditions or other factors that could affect business continuity.

Pada tahun 2023, PT PELNI (Persero) melakukan pengkinian *Soft Structure* di antaranya Pedoman GCG, Pedoman *Board Manual*, Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*), dan Pedoman *Whistleblowing System* (WBS). Pembaharuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN, antara lain:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

In 2023, PT PELNI (Persero) updated several Soft Structures, including the GCG Guidelines, Board Manual, Code of Conduct, and Whistle Blowing System (WBS) Guidelines. These updates were made in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises, including:

1. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs.
2. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises.
3. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on State-Owned Enterprises' Organs and Human Resources.

Sejalan dengan perkembangan industri yang semakin masif dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif, penerapan tata kelola PT PELNI (Persero) kini lebih dikembangkan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan risiko dan kepatuhan, atau dikenal dengan istilah *Governance, Risk, dan Compliance* (GRC).

In line with the increasingly massive industry development and more competitive business environment, the governance of PT PELNI (Persero) has been further developed using a risk and compliance management approach, known as Governance, Risk, and Compliance (GRC).

Melalui implementasi GRC, Perseroan dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik dalam lingkungan sadar risiko. Program GRC juga dinilai lebih efektif dalam membantu pemangku kepentingan utama menetapkan kebijakan dari perspektif bersama dan senantiasa berada dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan serta standar yang berlaku.

Through GRC implementation, the Company can make better business decisions in a risk-aware environment. The GRC program is also considered more effective in helping key stakeholders set policies from a shared perspective and always remain within the legal and regulatory frameworks and applicable standards.

Setiap tahun, Perseroan melakukan asesmen GCG untuk mengukur penerapan GCG dan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam hasil asesmen. Pada tahun 2023, parameter penilaian GCG sebagai standar implementasi GCG di Perseroan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN resmi dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara namun belum ada parameter pengganti terkait penerapan GCG.

Each year, the Company conducts a GCG assessment to measure GCG implementation and make improvements based on the assessment recommendations. In 2023, the GCG assessment parameters as the GCG implementation standard in the Company, according to the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs, were officially revoked and replaced with Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises. However, no replacement parameters related to GCG implementation were yet available.

Pada tahun 2023, PELNI melakukan *Self Assessment* terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2023 dengan parameter Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik

In 2023, PELNI conducted a self-assessment of GCG implementation for the 2023 period using the parameters of the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Dalam melakukan *Self Assessment* tersebut, PELNI didampingi pihak independen, yaitu Konsultan Kantor Jasa Akuntan Willy Wilarjo, dengan kesimpulan bahwa kondisi penerapan GCG Perusahaan mencapai skor 86,821 atau berada dalam kategori predikat "SANGAT BAIK".

Sementara itu, pencapaian kinerja aspek *Compliance* tercermin dari pemenuhan pelaporan LHKPN yang mencapai 100% serta penerapan kebijakan anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi yang berjalan efektif pada 2023.

ANALISIS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional memproyeksikan perekonomian global tumbuh 3,1% di 2024. Proyeksi ini dirilis IMF dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) terbaru edisi Januari 2024.

Dalam laporan IMF itu ditulis bahwa proyeksi ekonomi global kali ini didukung oleh ketahanan ekonomi yang lebih besar di Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain, serta pasar negara berkembang yang besar. Selain itu juga didukung kebijakan fiskal Tiongkok.

Namun IMF mencatat, perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk 2024–2025 masih di bawah rata-rata historis (2000–2019) sebesar 3,8 persen, dengan kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral untuk melawan inflasi, penarikan dukungan fiskal di tengah tingginya utang yang membebani aktivitas perekonomian, dan rendahnya produktivitas.

Tetapi inflasi turun lebih cepat dari perkiraan di sebagian besar negara-wilayah, di tengah melemahnya permasalahan sisi penawaran dan kebijakan moneter yang restriktif.

Berdasarkan proyeksi dari beberapa Lembaga, sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil di kisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0% serta OECD sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, selain menyiapkan langkah antisipatif atas kondisi eksternal yaitu ketidakpastian global, kita juga harus mewaspadai tantangan

MBU/2012 dated June 6, 2012. In conducting the Self-Assessment, PELNI was assisted by an independent party, namely the consulting firm Willy Wilarjo Accounting Services. The assessment concluded that the implementation of the company's Good Corporate Governance (GCG) achieved a score of 86.821, placing it in the "EXCELLENT" category.

Meanwhile, the achievement of compliance aspect performance is reflected in the 100% completion of LHKPN reporting and the effective implementation of anti-corruption policies and gratification control in 2023.

BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

The International Monetary Fund (IMF) projects the global economy to grow by 3.1% in 2024. This projection is published in the latest January 2024 edition of the World Economic Outlook (WEO) report.

The report states that this global economic projection is supported by greater economic resilience in the United States (US) and several other countries, as well as large emerging markets. It is also supported by China's fiscal policies.

However, the IMF notes that global economic growth projections for 2024-2025 remain below the historical average (2000-2019) of 3.8%, with central bank policy rate hikes to fight inflation, the withdrawal of fiscal support amid high debt burdens weighing on economic activity, and low productivity.

But inflation has decreased faster than expected in most countries-regions, amid easing supply-side issues and restrictive monetary policies.

Based on projections from several institutions, most predict that Indonesia's economic growth in 2024 will remain stable at around 5%, higher than the above-mentioned global economic growth projection of 2.9%. Several institutions have projected Indonesia's economic growth in 2024, including the World Bank at 4.9%, ADB and IMF at 5.0%, and OECD at 5.2%. The Indonesian government has set an economic growth target of 5.2% for 2024.

To achieve this economic growth target, apart from preparing anticipatory steps for external conditions such as global uncertainty, we must also be aware of domestic challenges.

dari dalam negeri/domestik. Tantangan tersebut antara lain kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kondisi politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

These challenges include domestic interest rate hikes, national food security, rupiah exchange rate weakening, and domestic political conditions ahead of the 2024 General Election.

Berdasarkan uraian di atas, perlu kita gali lebih mendalam langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan yang akan hadir serta bagaimana mengoptimalkan peluang yang muncul di tahun 2024. Hal tersebut sangat penting guna mewujudkan terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan diskusi dan pembahasan bersama narasumber yang ahli di bidangnya baik dari regulator, pelaku industri dan pakar ekonomi.

Based on the above description, we need to delve deeper into the steps that the Government and business actors need to take in facing the upcoming challenges and how to optimize emerging opportunities in 2024. This is very important to achieve economic growth targets and financial sector stability to improve the welfare of the broader community. Therefore, discussions and deliberations with expert sources from regulators, industry players, and economic experts are necessary.

Perseroaan telah menyiapkan rangkaian strategi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Perseroan akan fokus untuk *Business Acquisition (National Shipping Holding Company)* dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

The Company has prepared a comprehensive set of strategies outlined in the 2024 Work Plan and Budget (RKAP). The Company will focus on Business Acquisition, specifically targeting the National Shipping Holding Company, while maintaining a cautious and prudent approach.

Perseroan masih akan melanjutkan fokus strategi di tahun 2024, yang meliputi:

1. Inisiasi *National Shipping Holding Company* melalui pengembangan bisnis dengan Perusahaan pelayaran dan bisnis Pendukung
2. Pengadaan kapal dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Pengajuan Dana PMN untuk mendukung penugasan Pemerintah.
4. Pengembangan Bisnis dan Kapabilitas *Ship Management.*
5. Pengembangan infrastruktur dan kapabilitas logistik maritim.
6. Digitalisasi proses bisnis perusahaan.
7. *Spin on & spin off Strategic Business Unit* (SBU).
8. Pengembangan bisnis *ship chandler.*
9. Implementasi Restrukturisasi *core business* Anak Perusahaan.

The Company will continue to prioritize strategic initiatives in 2024, which include:

1. Initiating the National Shipping Holding Company through business development with shipping companies and supporting businesses.
2. Procuring vessels and other supporting facilities.
3. Submitting a proposal for State Capital Injection (PMN) funds to support government mandates.
4. Developing Business and Ship Management Capabilities.
5. Enhancing maritime logistics infrastructure and capabilities.
6. Digitalizing the Company's business processes.
7. Spinning on and off Strategic Business Units (SBUs).
8. Expanding the ship chandler business.
9. Implementing the restructuring of core businesses in subsidiaries.

Pada aspek finansial, kami juga akan meneruskan sasaran strategis korporasi di tahun 2023 yang mengutamakan kelangsungan usaha dan kesehatan perusahaan melalui ekspansi yang *profitable*, menciptakan *economic value creation*, menjaga kondisi keuangan dengan mempertahankan rasio-rasio *gearing* dan *debt service* setara dengan rasio-rasio yang ada pada perusahaan dengan *rating investment grade*, serta meningkatkan persentase kontribusi pendapatan dari unit-unit bisnis komersial dan optimalisasi pendapatan dari unit bisnis non-komersial.

On the financial front, we will also continue to pursue the strategic corporate objectives set in 2023, emphasizing business continuity and corporate health through profitable expansion, creating economic value, maintaining financial stability by preserving gearing and debt service ratios at levels comparable to those of investment-grade companies, and increasing the percentage contribution of revenue from commercial business units while optimizing income from non-commercial business units.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2023, komposisi Direksi PELNI mengalami 1 (satu) kali perubahan, yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2023, the composition of PELNI's Board of Directors underwent a single change, as detailed in the table below:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Periode Awal Tahun Buku 2023-1 Agustus 2023 Beginning Period January 1, 2023 - August 1, 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Yahya Kuncoro	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022.
4	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
5	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affair	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-571/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-571/MBU/02/2022 dated February 25, 2022.
6	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight Transportation and Sea Toll Road	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
1 Agustus 2023-21 September 2023 / August 1, 2023-September 21, 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
4	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affair	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-571/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-571/MBU/02/2022 dated February 25, 2022.
5	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight Transportation and Sea Toll Road	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
21 September 2023-Akhir Tahun Buku 2023 / September 21, 2023-End of Fiscal Year 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023.
4	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
5	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affair	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-571/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-571/MBU/02/2022 dated February 25, 2022.
6	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight Transportation and Sea Toll Road	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree No: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

APRESIASI

Dinamika industri dan ketidakpastian kondisi perekonomian sepanjang tahun 2023 memberikan banyak pengalaman berharga bagi Perseroan untuk terus bertransformasi dan berinovasi menjadi lebih baik lagi.

Dalam menghadapi iklim yang penuh ketidakpastian serta berbagai tantangan yang muncul, Perseroan diharapkan mampu beradaptasi terhadap segala perubahan yang ada untuk menjaga kelangsungan perseroan ke depan. Implementasi adaptasi tersebut dituangkan dalam kebijakan strategis oleh Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perseroan.

Perseroan telah berupaya memberikan kontribusi kinerja yang optimal dengan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Mengakhiri laporan ini, kami segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih atas arahan, masukan dan dukungan Pemegang Saham, *Stakeholder* terkait dan Dewan Komisaris yang diberikan kepada jajaran Direksi selama tahun 2023, serta memberikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi, loyalitas dan kerja sama kepada Perseroan.

Kami juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah, Pelanggan dan Mitra Bisnis kepada Perseroan.

APPRECIATION

The dynamics of the industry and the economic uncertainties throughout 2023 have provided the Company with invaluable experiences, driving it to continuously transform and innovate towards greater excellence.

In navigating this climate of uncertainty and the various challenges that have arisen, the Company is expected to adapt to all changes to ensure its continued sustainability. The implementation of such adaptations has been articulated through strategic policies by the Board of Directors and the entire management team.

The Company has endeavored to deliver optimal performance, utilizing all available resources.

In closing this report, we, the Board of Directors, extend our deepest gratitude for the guidance, feedback, and support provided by the Shareholders, relevant Stakeholders, and the Board of Commissioners throughout 2023. We also express our appreciation to all Company employees for their dedication, loyalty, and cooperation.

Furthermore, we extend our sincere thanks to the Government, Customers, and Business Partners for the trust they have placed in the Company.

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

TRI ANDAYANI
DIREKTUR UTAMA
President Director

TIDAR
PELNI

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Mei 2024

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

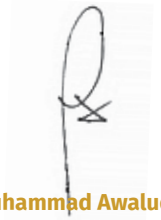

Muhammad Awaluddin
Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Kristia Budiyarto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Faturohman
Komisaris
Commissioner

Budi Mantoro
Komisaris
Commissioner

Raden Suhartono
Komisaris
Commissioner

Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris
Commissioner

Statement of Responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2023 Annual Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2023 Annual Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) has been fully disclosed and we bear full responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report and the Financial Statements.

This statement is made truthfully.

Jakarta, May 2024

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Tri Andayani
Direktur Utama
President Director

Nuraini Dessy W
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Transportation

Direktur SDM dan Umum
Director of Human Resources and General Affairs

Anik Hidayati
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Kokok Susanto
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
Director of Freight and Sea Toll Business

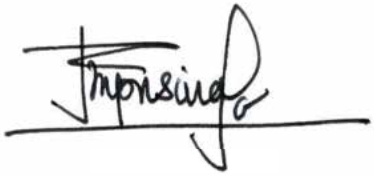

Direktur Armada dan Teknik
Director of Fleet and Engineering

PELNI
We Connect, We Unify
ELNI
BUMN
UNTUK INDONESIA

03

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan | Company Name

PT Pelayaran Nasional Indonesia

Nama Panggilan | Nickname

PELNI

Bidang Usaha | Line of Business

Pelayaran
Shipping

Badan Hukum | Legal Entity

Perseroan Terbatas
Limited Liability Company

Tanggal Pendirian | Date of Establishment

28 April 1952
April 28, 1952

Tanggal Operasi | Date of Operation

28 April 1952
April 28, 1952

Dasar Pendirian | Deed of Establishment

Akta pendirian No. 92 tanggal 28 April 1952 yang dibuat di hadapan Raden Kadiran Notaris di Jakarta
Establishment Act No. 92 dated April 28, 1952, drawn up before Raden Kadiran, Notary in Jakarta

Status Perusahaan | Company Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
State-Owned Enterprise (SOE)

Kepemilikan Saham | Share Ownership

100% Pemerintah Indonesia
100% owned by the Government of Indonesia

Modal Dasar | Authorized Capital

Rp13.000.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital

Rp7.629.900.000.000,-

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Taxpayer Identification Number (NPWP)

01.001.637.6-093.000

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Business Identification Number (NIB)

8120113210736April 28, 1952

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
Maritime Transport Business License (SIUPAL)

AL.010/1645/DA-2023

Jumlah Karyawan (31 Desember 2023)
Number of Employees (as of December 31, 2023)

5.011 karyawan
5,011 employees

Alamat dan Kontak Perusahaan | Company Address and Contact

Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat 10130
T. (021) 6334342
F. (021) 63854130

E. infopelni162@pelni.co.id
W. www.pelni.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

Sejarah PT PELNI (Persero) dimulai melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 sebagai dasar hukum pendirian Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

The history of PT PELNI (Persero) began with the issuance of a Joint Decree (SKB) between the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on September 5, 1950, which served as the legal basis for establishing the Central Ship Control Foundation (PEPUSKA).

Yayasan PEPUSKA didirikan sebagai tindak lanjut atas penolakan pemerintah Belanda terhadap permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda, yaitu N.V. K.P.M (Koninklijke Paketvaart Matschappij), menjadi Perseroan Terbatas. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM menggunakan bendera merah-putih dalam beroperasi di perairan Indonesia. Pemerintah Belanda kembali menolak permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

The PEPUSKA Foundation was established as a response to the Dutch government's rejection of Indonesia's request to change the status of the Dutch shipping company, N.V. K.P.M (Koninklijke Paketvaart Matschappij), to a Limited Liability Company. Additionally, the Indonesian government desired that KPM ships operate under the Indonesian flag. However, the Dutch government again rejected this request.

Dengan 8 (delapan) unit kapal dengan total tonage 4.800 DWT (*Dead Weight Tonnage*) sebagai modal awal, PEPUSKA berlayar berdampingan dengan armada KPM yang telah berpengalaman lebih dari setengah abad. Persaingan tersebut bukanlah persaingan yang seimbang, karena selain telah berpengalaman, armada KPM juga berjumlah lebih banyak serta memiliki kontrak-kontrak monopoli.

With an initial capital of eight vessels totaling 4,800 DWT (Dead Weight Tonnage), PEPUSKA sailed alongside the KPM fleet, which had more than half a century of experience. This competition was unequal, as the KPM fleet not only had more experience but also a larger number of ships and monopoly contracts.

Kemudian, pada 28 April 1952, Yayasan PEPUSKA resmi dibubarkan. Pada saat yang sama, PELNI didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952. R. Ma'moen Soemadipraja diangkat sebagai Presiden Direktur pertama PELNI (1952-1955).

On April 28, 1952, the PEPUSKA Foundation was officially dissolved. Simultaneously, PELNI was established based on the Decree of the Minister of Transportation No. M.2/1/2 dated February 28, 1952, and No. A.2/1/2 dated April 19, 1952, as well as the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 20, 1952. R. Ma'moen Soemadipraja was appointed as the first President Director of PELNI (1952-1955).

Sebagai modal awal, Yayasan PEPUSKA menyerahkan 8 (delapan) unit kapal yang dimiliki kepada PELNI. Sebagai tambahan, Bank Ekspor Impor menyediakan dana yang kemudian digunakan untuk memesan 45 *coaster* dari Eropa Barat. Sembari menunggu datangnya *coaster* tersebut, PELNI men*carter* kapal-kapal asing yang terdiri dari kapal dengan berbagai macam bendera. Langkah tersebut diambil untuk mengisi trayek-trayek yang ditinggalkan KPM. Setelah itu, satu per satu kapal yang di*carter* tersebut diganti dengan yang dipesan dari Eropa, ditambah dengan kapal-kapal rampasan perang dari Jepang.

As initial capital, the PEPUSKA Foundation transferred its 8 (eight) vessels to PELNI. Additionally, the Export-Import Bank provided funds that were used to order 45 coasters from Western Europe. While awaiting the arrival of these coasters, PELNI chartered foreign ships flying various flags to cover the routes abandoned by KPM. Subsequently, these chartered ships were replaced one by one with coasters ordered from Europe, along with war prize ships from Japan.

Sampai dengan saat ini, PELNI telah mengalami 2 (dua) kali perubahan status. Pertama, pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia menetapkan perubahan status dari Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (PN), yang dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. , pada tahun 1975,

To date, PELNI has undergone two status changes. First, in 1961, the Indonesian government changed its status from a Limited Liability Company to a State-Owned Enterprise (PN), as noted in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. LN 1961. Second, in 1975, PELNI's status was changed from a

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

status PELNI diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai Akta Pendirian No. 31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut termuat di dalam Berita Negara RI No. 562-1976 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 1976.

Seiring perkembangan usaha, PELNI mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1975, PELNI beroperasi sebagai badan usaha Perseroan sesuai Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 dan Akte Perubahan Nomor 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT. Pelni yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 Nomor 31 tambahan Berita Negara Nomor 2203.

Kemudian, seiring perkembangan usaha, PELNI tidak hanya melayani jasa transportasi kapal laut. Dengan dukungan Program Tol Laut oleh Pemerintah Indonesia, saat ini PELNI mengoperasikan 8 (delapan) Kapal Tol Laut yang melayani angkutan/muatan kontainer berupa bahan makanan pokok maupun bahan bangunan untuk pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, PELNI juga memiliki layanan keagenan kapal yang siap memenuhi beragam kebutuhan kapal selama berada di perairan Indonesia. PELNI telah menghadirkan dukungan terhadap pengembangan pariwisata bahari Indonesia dengan memberikan layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah laut dan pemandangan alam yang mengagumkan, antara lain Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini.

Sampai dengan saat ini, PELNI mengoperasikan armada kapal penumpang, kapal cepat dan armada kapal barang. PELNI melayani rute perjalanan domestik dan telah menyinggahi lebih dari 94 pelabuhan di seluruh pelosok kepulauan Nusantara. Fasilitas dan layanan yang disediakan pada armada kapal PELNI direncang untuk menjamin standar keselamatan dan kenyamanan seluruh pelanggan dan kru laut, dengan didukung oleh keberadaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan.

Sebagai entitas BUMN, PELNI beroperasi seiring penerapan *core values* "AKHLAK" berdasarkan Surat Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Inti Sumber Daya Manusia BUMN. "AKHLAK" merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, sebagai nilai-nilai budaya yang diterapkan oleh seluruh insan PELNI.

State-Owned Enterprise to a Limited Liability Company (PT) in accordance with the Deed of Establishment No. 31 dated October 30, 1975. This change was recorded in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 562-1976 and Supplement to the State Gazette No. 60 dated June 27, 1976.

As business developed, PELNI experienced several changes in its business form. In 1975, PELNI operated as a Limited Liability Company according to the Deed of Establishment No. 31 dated October 30, 1975, and Deed of Amendment No. 22 dated March 4, 1998, concerning the Articles of Association of PT PELNI, which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia on April 16, 1999, No. 31, Supplement to the State Gazette No. 2203.

Subsequently, as business expanded, PELNI not only provided sea transportation services. Supported by the Sea Toll Program by the Indonesian government, PELNI now operates eight Sea Toll Ships transporting container cargo, including staple foods and building materials for infrastructure development. Moreover, PELNI also offers ship agency services to meet various ship needs while in Indonesian waters. PELNI has supported the development of Indonesian marine tourism by providing marine tourism packages to islands with stunning underwater beauty and natural scenery, including the Raja Ampat Islands, Wakatobi, Banda Neira, Komodo Island, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan, and Tomini.

To date, PELNI operates passenger ships, fast ferries, and cargo ships. PELNI serves domestic routes and has visited over 94 ports throughout the Indonesian archipelago. The facilities and services provided on PELNI's fleet are designed to ensure the safety and comfort of all customers and crew, supported by professional Human Resources who prioritize customer satisfaction.

As a State-Owned Enterprise, PELNI operates by implementing the core values of "AKHLAK," based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises. "AKHLAK" stands for Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal, Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative), as cultural values applied by all PELNI personnel.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

Sejak 2015, PELNI dipercaya oleh Pemerintah Republik Indonesia sebgai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut, dan Kapal Ternak yang menjangkau sejumlah titik terjauh di wilayah Indonesia.

Pada tahun 2023, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) resmi meluncurkan logo baru beserta baru *"We Connect, We Unify"*.

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 26 Kapal Penumpang yang melayani 1.058 ruas dan menyinggahi 71 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 42 trayek Kapal Perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, di mana Kapal Perintis menyinggahi 273 pelabuhan dengan total 3.495 ruas. PELNI juga mengoperasikan sebanyak 16 Kapal Rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini PELNI mengoperasikan 10 trayek Tol Laut serta 1 trayek khusus untuk Kapal Ternak.

INFORMASI PERGANTIAN NAMA PERUSAHAAN

Sejak didirikan sampai dengan 31 Desember 2023, PT PELNI (Persero) belum pernah melakukan pergantian nama.

Since 2015, PELNI has been entrusted by the Government of the Republic of Indonesia as the operator of Pioneer Ships, Sea Toll Ships, and Livestock Ships reaching the farthest points in Indonesia.

In 2023, PT Pelayaran Nasional Indonesia or PT PELNI (Persero) officially launched a new logo and the new tagline "We Connect, We Unify."

As a State-Owned Enterprise engaged in the shipping services sector, PELNI currently operates 26 Passenger Ships serving 1,058 routes and calling at 71 ports.

In addition to passenger transport, PELNI also operates 42 Pioneer Ship routes, providing accessibility for the mobility of residents in the 3TP (frontier, outermost, and remote) areas, where Pioneer Ships call at 273 ports with a total of 3,495 routes. PELNI also operates 16 Rede Ships. For logistics business services, PELNI currently operates 10 Sea Toll routes and one special route for Livestock Ships.

INFORMATION ON COMPANY NAME CHANGE

Since its establishment until December 31, 2023, PT PELNI (Persero) has not changed its name.

PENJELASAN LOGO PERUSAHAAN
COMPANY LOGO EXPLANATION

FILOSOFI LOGO

PELNI adalah perusahaan di bidang tranportasi laut yang menjadi tulang punggung negara. Selalu bergerak maju (*moving forward*) adalah sebuah kredo yang terus ditanamkan bagi perusahaan dalam upayanya mempersatukan dan memajukan Indonesia.

Logo terispirasi dari gerakan maju sebuah kapal memecah laut yang menghasilkan garis-garis arus pada air dan dipadukan dengan segitiga yang membentuk huruf P - sebagai simbol layar kapal – yang melambangkan upaya PELNI yang konsisten bergerak dan terus maju menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara.

Penggunaan gradasi warna biru, selain merupakan warna laut, juga melambangkan stabilitas, kekuatan, keseriusan, integritas, profesionalisme, kepercayaan dan keandalan.

LOGO PHILOSOPHY

PELNI is a company in the field of sea transportation that serves as the backbone of the nation. The motto “always moving forward” is instilled in the company as it strives to unite and advance Indonesia.

The logo is inspired by the forward movement of a ship cutting through the sea, creating lines of currents in the water, combined with a triangle forming the letter “P” - symbolizing the ship’s sail - which represents PELNI’s consistent efforts to move forward and become a leading maritime shipping and logistics company in Southeast Asia.

The use of blue color gradients, besides representing the sea, also symbolizes stability, strength, seriousness, integrity, professionalism, trust, and reliability.

PELNI
We Connect, We Unify

Logo baru PT PELNI (Persero) dilengkapi dengan *tagline* “*We Connect, We Unify*” yang menunjukkan komitmen perusahaan sebagai agen Pembangunan yang berperan memperkuat konektivitas serta aksesibilitas masyarakat.

Komitmen ini dilakukan melalui penguatan konektivitas transportasi laut di Indonesia guna menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara sekaligus menjadikan PELNI menjadi salah satu perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara.

The new PT PELNI (Persero) logo is complemented by the tagline “We Connect, We Unify,” which demonstrates the company’s commitment as an agent of development, playing a role in strengthening community connectivity and accessibility.

This commitment is realized through the enhancement of sea transportation connectivity in Indonesia to support the realization of the Archipelagic Vision, while also positioning PELNI as one of the leading maritime shipping and logistics companies in Southeast Asia.

PENJELASAN LOGO PERUSAHAAN
COMPANY LOGO EXPLANATION

WARNA PRIMER DAN SEKUNDER LOGO

Berikut ini adalah warna primer dari logo PELNI yang bisa diterapkan pada semua media

PRIMARY AND SECONDARY COLORS OF THE LOGO

The following are the primary colors of the PELNI logo, which can be applied across all media.

Biru Primer
Primary Blue

R: 42 G: 67 B: 138
C: 98 M: 88 Y:16 K: 0
Pantone: P 2728 C

Biru Sekunder
Secondary Blue

R: 68 G: 127 B: 193
C: 75 M: 54 Y: 0 K: 0
Pantone: P 2172 C

Biru Tertier
Tertiary Blue

R: 117 G: 190 B: 233
C: 75 M: 54 Y: 0 K: 0
Pantone: P 2190 C

Abu-Abu
Gray

R: 150 G: 153 B: 15
C: 45 M: 35 Y: 35 K: 0
Pantone: P Cool Grey 7 C

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN
COMPANY MILESTONES

1952

PT PELNI (Persero) resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R. Djuanda No. 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952.

PT PELNI (Persero) was officially established based on the Decree of the Minister of Transportation R. Djuanda No. 2/1/2 dated February 23, 1952.

1950

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Issuance of a Joint Decree (SKB) between the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on September 5, 1950, establishing the Central Ship Control Foundation (PEPUSKA).

1953

Perubahan status hukum PT PELNI (Persero) menjadi Perusahaan Negara (PN) dan menjadikan PT PELNI (Persero) sebagai Agen Pemerintah (*Government Agency*).

Legal status change of PT PELNI (Persero) to a State-Owned Enterprise (PN), making PT PELNI (Persero) a Government Agency.

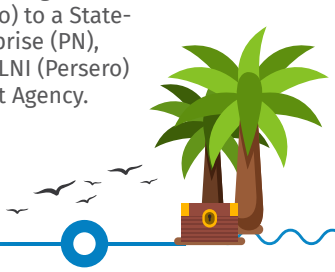

2018

PT PELNI (Persero) menerapkan strategi bisnis berupa sinergi BUMN dan sistem operasi berbasis digital.

PT PELNI (Persero) implemented a business strategy based on SOE synergy and digital operation systems.

2019

PT PELNI (Persero) menetapkan Visi 2020 – 2024: "Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara"

PT PELNI (Persero) set the Vision for 2020-2024: "To Become the Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia."

2020

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Budaya Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai–Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

PT PELNI (Persero) implemented Corporate Culture in line with the Decree of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 on the Core Values of SOE Human Resources, namely AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative).

2021

Perusahaan memiliki strategi sesuai dengan RJPP Transformasi Perusahaan yang meliputi Visi, Misi dan *Roadmap* tahun 2020-2024 Perubahan yang disahkan melalui RUPS RKAP Perseroan No. 01.29/01/BA/090/2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.

The company devised a strategy in accordance with the Corporate Transformation Long-Term Plan (RJPP) encompassing Vision, Mission, and Roadmap for 2020-2024, ratified through the GMS RKAP Perseroan No. 01.29/01/BA/090/2021 on the Ratification of the Corporate Work Plan and Budget for 2021.

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN
COMPANY MILESTONES

1975

PT PELNI (Persero) resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R. Djuanda No. 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952.

PT PELNI (Persero) was officially established based on the Decree of the Minister of Transportation R. Djuanda No. 2/1/2 dated February 23, 1952.

1981

Penyerahan pengelolaan pelayaran Perintis kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 35 unit Kapal Perintis.

Management of Pioneer Shipping handed over to PT PELNI (Persero), operating 35 Pioneer Ships.

2014

PT PELNI (Persero) mulai menggelar paket wisata Let's Go dan Event onboard.

PT PELNI (Persero) began offering "Let's Go" tourism packages and onboard events.

2015

Penunjukkan PT PELNI (Persero) oleh Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Appointment of PT PELNI (Persero) by the Indonesian Government as the operator of Pioneer Ships, Sea Toll Ships, and Livestock Ships covering Indonesian regions.

2016

PT PELNI (Persero) meningkatkan kapasitas armadanya dengan mengoperasikan 80 (delapan puluh) kapal.

PT PELNI (Persero) expanded its fleet capacity by operating 80 ships.

2017

PT PELNI (Persero) menetapkan Tata Nilai (*Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive*), Budaya Perusahaan (Peduli, Ekselen, Inovasi) dan Perilaku "JUARA" (Jujur, Unggul, Adaptasi, Ramah, Akurat).

PT PELNI (Persero) established Core Values (Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive), Corporate Culture (Caring, Excellence, Innovation), and "CHAMPION" behavior (Honest, Excellent, Adaptive, Friendly, Accurate).

2022

Perusahaan menerapkan pengembangan layanan bagi pelanggan, antara lain dengan mengadakan paket *City Tour* bagi penumpang kelas ekonomi. Di samping itu, Perusahaan juga telah menyediakan layanan *Super Apps* (aplikasi pemesanan digital) pada 28 September 2022 (*Google Playstore*) dan 15 Oktober 2022 (*Apps Store*).

The company enhanced customer services, including providing City Tour packages for economy class passengers. Additionally, the company launched the Super Apps (digital booking application) on September 28, 2022 (Google Playstore) and October 15, 2022 (App Store).

2023

PELNI
We Connect, We Unify

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) resmi meluncurkan logo baru beserta *tagline* baru "*We Connect, We Unify*".

PT Pelayaran Nasional Indonesia or PT PELNI (Persero) officially launched a new logo and the new tagline "We Connect, We Unify."

VISI DAN MISI PERUSAHAAN
COMPANY VISION AND MISSION

PENETAPAN VISI DAN MISI

Visi dan Misi PT PELNI (Persero) telah disahkan melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 01.29/01/BA/090/2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021. Visi dan Misi tersebut juga dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara periodik.

VISION AND MISSION ESTABLISHMENT

The Vision and Mission of PT PELNI (Persero) have been ratified through the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01.29/01/BA/090/2021 on the Ratification of the Corporate Work Plan and Budget for 2021. The Vision and Mission are also periodically evaluated by the Board of Commissioners.

VISI

Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara.

VISION

To become the Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia.

MAKNA VISI PT PELNI (PERSERO)

Perusahaan Pelayaran
Suatu badan usaha yang menjalankan operasional kapal atau usaha lain yang erat hubungannya dengan kapal yang ditata dalam sistem transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan, dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan.

LOGISTIK MARITIM

Sistem yang mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam manajemen transportasi maritim yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang atau sumber daya lainnya, dari titik awal menuju titik penggunaan yang mencakup *inland transport*, *warehousing*, *cargo handling*, *shipping*, dan *port services*.

MEANING OF THE VISION OF PT PELNI (PERSERO)

Shipping Company
An enterprise that operates ships or other businesses closely related to ships, organized within a dynamic transportation system capable of adapting to future advancements, characterized by its ability to perform mass transportation, connect, and reach all regions via waterways.

MARITIME LOGISTICS

A system encompassing all activities involved in the management of maritime transport, including planning, implementation, and supervision of the process of moving goods or other resources from the point of origin to the point of use, which includes inland transport, warehousing, cargo handling, shipping, and port services.

VISI DAN MISI PERUSAHAAN
COMPANY VISION AND MISSION

TERKEMUKA

1. Memiliki jaringan trayek yang optimal.
2. Memiliki pertumbuhan kinerja perusahaan yang optimal.
3. Memiliki *operation & service excellence*.
4. *Center of excellence* usaha pelayaran nasional, yang meliputi sumber daya manusia, produksi, distribusi, pelayanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan.

LEADING

1. Having an optimal route network.
2. Exhibiting optimal company performance growth.
3. Ensuring operational and service excellence.
4. Being a center of excellence in national shipping business, encompassing human resources, production, distribution, service, safety, and environmental health.

ASIA TENGGARA

PT PELNI (Persero) akan membuka jaringan bisnis untuk menjaga pertumbuhan dengan melakukan ekspansi ke negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara.

SOUTHEAST ASIA

PT PELNI (Persero) will expand its business network to maintain growth by expanding into countries within the Southeast Asia region.

MISI
MISSION

1. Menjamin aksesibilitas masyarakat dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
2. Mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*.
5. Berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan, serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Ensuring community accessibility by managing sea transportation to support the realization of the Archipelagic Vision.
2. Managing and developing maritime logistics businesses in Indonesia and Southeast Asia.
3. Enhancing company value through creativity, innovation, digitalization of business processes, and human resource development to achieve sustainable growth.
4. Conducting business fairly by considering the principles of benefits for all stakeholders by implementing good corporate governance principles.
5. Contributing positively to the country and employees, and actively participating in environmental development and community service.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES

Menindaklanjuti Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Usaha Milik Negara maka Kementerian BUMN melakukan transformasi SDM sebagai wujud peran BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, *social welfare*, penyedia lapangan kerja dan penyedia talenta. Sehingga dibentuklah nilai-nilai utama yang sama untuk diimplementasikan dan diinternalisasikan di seluruh BUMN sebagai Budaya Perusahaan. Nilai-Nilai Utama tersebut adalah AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Maksud dan tujuan penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK di lingkungan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Agar seluruh insan PT PELNI (Persero) mengetahui, mengimplementasikan, dan menginternalisasikan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja PT PELNI (Persero) yang selaras dengan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) tersebut;
2. Membantu seluruh insan PT PELNI (Persero) agar berperilaku secara benar, baik secara hukum maupun secara etis dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan;
3. Membentuk insan PT PELNI (Persero) berintegritas kuat dan perilaku yang beretika, diharapkan Perusahaan akan memperoleh kepercayaan yang terus-menerus dari para *stakeholders*;
4. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi insan PT PELNI (Persero) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
5. Membentuk karakter insan PT PELNI (Persero) yang bertanggungjawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama insan PT PELNI (Persero) maupun dengan pihak di luar Perusahaan;
6. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan menjunjung tinggi Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK sehingga akan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Mendukung hal tersebut, PT PELNI melakukan *launching* budaya perusahaan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 dan sosialisasi kepada seluruh pegawai pada tanggal 4 September 2020 melalui media daring. Nilai-nilai utama tersebut juga ditetapkan dalam SK Direksi Nomor: 10.07/01/

Following the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree Number: SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of State-Owned Enterprise (SOE) Human Resources (HR), the Ministry of BUMN has undertaken HR transformation to fulfill the role of SOEs as engines of economic growth, social welfare, job providers, and talent suppliers. Therefore, common core values were established to be implemented and internalized across all SOEs as Corporate Culture. These core values are AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative).

The purpose and objectives of establishing the AKHLAK Core Values within PT PELNI (Persero) are as follows:

1. To ensure that all individuals at PT PELNI (Persero) understand, implement, and internalize the AKHLAK Core Values sincerely, consistently, and consequently, thus fostering daily behavior and shaping the work culture of PT PELNI (Persero) aligned with these Core Values.
2. To help all individuals at PT PELNI (Persero) behave correctly, both legally and ethically, to maintain and enhance the company's image.
3. To form individuals at PT PELNI (Persero) with strong integrity and ethical behavior, ensuring that the company continuously gains trust from stakeholders.
4. To provide clarity in attitudes and behavior for individuals at PT PELNI (Persero) in performing their work activities, thereby generating a good reputation and ultimately achieving long-term business success.
5. To develop responsible and ethical individuals at PT PELNI (Persero) in their interactions, both within PT PELNI (Persero) and with external parties.
6. To create a healthy and comfortable work environment by upholding the AKHLAK Core Values, thus supporting sustainable performance improvement.

In support of this, PT PELNI launched the corporate culture on August 27, 2020, and conducted socialization to all employees on September 4, 2020, through online media. These core values were also established in the Director's Decree Number: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 concerning the Establishment

NILAI-NILAI PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES

SK/HKO.01/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan PT PELNI (Persero). Untuk mensosialisasikan Nilai-Nilai Utama ini, PT PELNI (Persero) juga melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi terkait dengan implementasi AKHLAK sebagai budaya perusahaan.

of Core Values for SOE Human Resources within PT PELNI (Persero). To socialize these core values, PT PELNI (Persero) also conducted socialization to all work units, subsidiaries, and affiliated companies regarding the implementation of AKHLAK as corporate culture.

AKHLAK

A — K — H — L — A — K

AMANAH
Panduan Perilaku
d. Memenuhi janji dan komitmen.
e. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
f. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

KOMPETEN
Panduan Perilaku
a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
b. Membantu orang lain belajar.
c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

HARMONIS
Panduan Perilaku
a. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.
b. Suka menolong orang lain.
c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

LOYAL
Panduan Perilaku
a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

ADAPTIF
Panduan Perilaku
a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
c. Bertindak proaktif.

KOLABORATIF
Panduan Perilaku
a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

TRUSTWORTY
Guidelines for Behavior:
a. Fulfill promises and commitments.
b. Take responsibility for tasks, decisions, and actions.
c. Adhere to moral and ethical values.

COMPETENT
Guidelines for Behavior:
a. Enhance personal competence to address ever-changing challenges.
b. Assist others in learning.
c. Complete tasks with the highest quality.

HARMONIOUS
Guidelines for Behavior:
a. Respect everyone regardless of their background.
b. Enjoy helping others.
c. Build a conducive work environment.

LOYAL
Guidelines for Behavior:
a. Uphold the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the country.
b. Be willing to make sacrifices to achieve greater goals.
c. Obey leaders as long as it does not conflict with law and ethics.

ADAPTIVE
Guidelines for Behavior:
a. Quickly adapt to become better.
b. Continuously improve by keeping up with technological developments.
c. Act proactively.

COLLABORATIVE
Guidelines for Behavior:
a. Provide opportunities for various parties to contribute.
b. Be open to cooperation to create added value.
c. Mobilize the use of various resources for common goals

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

KEGIATAN USAHA PERSEROAN MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan yaitu untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan, kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh PT PELNI (Persero) adalah:

1. Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   - Hotel Bintang
   - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
   - Angkutan Laut Perairan
   - Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang
   - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
   - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
   - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
   - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
   - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
   - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
   - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
   - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
   - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
   - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
   - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
   - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
   - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang
   - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
   - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
   - Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
   - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang

COMPANY BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company are to participate in and support the government's policies and programs in the economic and national development sector in general, as well as development in the domestic and international shipping business sector for passenger, livestock, and cargo transportation in the form of dry or liquid bulk units, by applying the principles of a Limited Liability Company.

BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN

In line with the purpose and objectives of the Company's establishment, the business activities conducted by PT PELNI (Persero) include:

1. Business Activities with Effective Business Licenses Before the Implementation of Law Number 11 of 2020 on Job Creation
   - Star Hotels
   - Domestic Port Sea Freight for Goods
   - Sea Freight
   - Domestic Port Sea Passenger Transport
   - International Sea Freight for Tourism
   - International Sea Freight for General Goods
   - Domestic Pioneer Sea Passenger Transport
   - Domestic Liner and Tramp Sea Passenger Transport
   - Domestic Sea Freight for General Goods
   - International Sea Freight for General Goods
   - Domestic Liner and Tramp Sea Passenger Transport
   - Domestic Sea Freight for General Goods
   - Domestic Liner and Tramp Sea Passenger Transport
   - Domestic Sea Freight for General Goods
   - Domestic Sea Tourism Transport
   - Domestic Sea Freight for Special Goods
   - Domestic Pioneer Sea Freight for Goods
   - International Sea Freight for General Goods
   - Domestic Pioneer Sea Passenger Transport
   - International Liner and Tramp Sea Passenger Transport
   - Inter-provincial Pioneer Ferry Transport for Passengers

- Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang
- Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
- Aktivitas Agen Perjalanan Wisata

2. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   - Portal *Web* dan/atau *Platform Digital* Tanpa Tujuan Komersial
   - Aktivitas Konsultansi Pariwisata
   - Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
   - Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
   - Jasa Penyelenggara *Event* Khusus (*Special Event*)
   - Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan *Event* Khusus
   - Jasa interpreter wisata
   - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
   - Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
   - Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
   - Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
   - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
   - Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
   - Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
   - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
   - Perdagangan Besar Buah-buahan
   - Perdagangan Besar Sayuran
   - Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
   - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
   - Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
   - Pergudangan dan Penyimpanan
   - Aktivitas *Cold Storage*
   - Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
   - Jasa Informasi Pariwisata
   - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
   - Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)
   - Kegiatan Penunjang Pendidikan
   - Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital Dengan Tujuan Komersial
   - Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
   - Perdagangan Besar Beras
   - Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut

- Inter-regency/municipality Ferry Transport for Passengers
- Inter-provincial Ferry Transport for Passengers

- Rental and Leasing Activities Without Option of Water Transport Equipment
- Travel Agency Activities

2. Table of Business Activities Based on Risk-Based Licensing
   - Web Portal and/or Digital Platform without Commercial Purpose
   - Tourism Consultancy Activities
   - Provision of Other Short-Term Accommodation
   - Other Travel Agency Activities
   - Special Event Organizer Services
   - Venue Rental for MICE Activities and Special Events
   - Tourist Interpreter Services
   - Wholesale Trade of Food and Beverage Agricultural Products
   - Wholesale Trade of Beef and Processed Beef
   - Wholesale Trade of Other Meats and Processed Meats
   - Wholesale Trade of Eggs and Egg Products
   - Wholesale Trade of Other Foods and Beverages
   - Wholesale Trade of Chicken and Processed Chicken Meat
   - General Purpose Machinery Repair
   - Wholesale Trade on a Fee or Contract Basis
   - Wholesale Trade of Fruits
   - Wholesale Trade of Vegetables
   - Wholesale Trade of Coffee, Tea, and Cocoa
   - Wholesale Trade of Animal Oils and Fats
   - Wholesale Trade of Sea Transportation Equipment, Spare Parts, and Accessories
   - Warehousing and Storage
   - Cold Storage Activities
   - Other Reservation Services YBDI YTDL
   - Tourism Information Services
   - Tourist Attraction Information Services
   - Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) Organizer Services
   - Educational Support Activities
   - Web Portal and/or Digital Platform with Commercial Purpose
   - Wholesale Trade of Milk and Dairy Products
   - Wholesale Trade of Rice
   - Services for Fishing Production Facilities at Sea

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

- Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
- Penyediaan Akomodasi Lainnya
- Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
- Hotel Bintang
- Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
- Aktivitas Konsultansi Transportasi
- Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
- Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
- Perdagangan Besar Hasil Perikanan
- Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya
- Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang

- Travel Bureau Activities
- Provision of Other Accommodation
- Owned or Leased Real Estate Activities
- Maritime Port Service Activities
- Star Hotels
- Ship, Boat, and Floating Structure Repair
- Transportation Consultancy Activities
- Other Warehousing and Storage
- Wholesale Trade of Processed Fishery Products
- Wholesale Trade of Fishery Products
- Other Mining and Quarrying Support Activities
- Warehouse Receipt System Management

JASA PERKAPALAN

KAPAL 2 *IN* 1
Kapal jenis 2 *in* 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Werft dan dibangun di galangan Papenburg, Jerman. Kapal 2 *in* 1 ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu kapal tipe 2 *in* 1 ini secara resmi diberi nama Kapal Motor (KM) Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot. Kapal jenis 2 *in* 1 beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia bagian tengah dan timur seperti kebutuhan pokok masyarakat setempat.

KAPAL:
1. KM Gunung Dempo
2. KM Dobonsolo
3. KM Ciremai
4. KM Nggapulu
5. KM Dorolonda
6. KM Sinabung
7. KM Kelud
8. KM Bukit Siguntang
9. KM Tidar
10. KM Lambelu
11. KM Umsini

KAPAL PENUMPANG SERBAGUNA
Kapal jenis 3 *in* 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan kendaraan sekaligus. KM Dobonsolo dan KM Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 *in* 1.

SHIPPING SERVICES

2 IN 1 SHIPS
The 2 in 1 ships are vessels that can carry passengers and a number of containers, designed by Meyer Werft and built at the Papenburg shipyard in Germany. These 2 in 1 ships have a capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of these 2 in 1 ships is officially named Motor Vessel (KM) Gunung Dempo, built in mid-2006, with a length of 146.80 meters and a sailing speed of over 20 knots. The 2 in 1 ships operate to meet the needs of the central and eastern regions of Indonesia, such as the basic needs of local communities.

SHIPS:
1. KM Gunung Dempo
2. KM Dobonsolo
3. KM Ciremai
4. KM Nggapulu
5. KM Dorolonda
6. KM Sinabung
7. KM Kelud
8. KM Bukit Siguntang
9. KM Tidar
10. KM Lambelu
11. KM Umsini

MULTIPURPOSE PASSENGER SHIPS
The 3 in 1 ships are multipurpose passenger ships capable of carrying containers, passengers, and vehicles simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships that have been modified into 3 in 1 ships.

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

Kemampuan kapal 3 *in* 1 PT PELNI (Persero) dalam mengangkut kontainer dan kendaraan, secara langsung berkontribusi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok di wilayah Indonesia bagian timur yang dipasok dari kotakota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar.

KAPAL BARANG

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, PELNI menyediakan kapal barang untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

Pada 2023, PT PELNI (Persero) memiliki 9 kapal barang dengan kapasitas muat yang berbeda-beda untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional, dengan perincian sebagai berikut:

1. KM Caraka Jaya Niaga III – 4, dibangun pada 1988 dengan 3.000 DWT.
2. KM Caraka Jaya Niaga III – 22, dibangun pada 1990 dengan 3.650 DWT.
3. KM Caraka Jaya Niaga – 32, dibangun pada 1993.
4. Logistik Nusantara 1, dibangun pada tahun 1998 dengan 10822 DWT.
5. Logistik Nusantara 2, dibangun pada tahun 2006 dengan 3893 DWT.
6. Logistik Nusantara 3, dibangun pada tahun 2008 dengan 3901 DWT.
7. Logistik Nusantara 4, dibangun pada tahun 2007 dengan 3901 DWT.
8. Logistik Nusantara 5, dibangun pada tahun 2008 dengan 11184 DWT
9. Logistik Nusantara 6, dibangun pada 2008 dengan 9.021 DWT

KAPAL TOL LAUT

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada:

1. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*).

The 3 in 1 ships of PT PELNI (Persero) contribute directly to distributing basic needs in the eastern regions of Indonesia, supplied from major cities such as Jakarta, Surabaya, and Makassar.

CARGO SHIPS

For the logistics distribution needs across Indonesia, PELNI provides cargo ships to transport large volumes of cargo with the best service and support from professional HR.

As of 2023, PT PELNI (Persero) owns nine cargo ships with varying load capacities to transport large volumes of cargo with the best service and support from professional HR, detailed as follows:

1. KM Caraka Jaya Niaga III – 4, built in 1988 with 3,000 DWT.
2. KM Caraka Jaya Niaga III – 22, built in 1990 with 3,650 DWT.
3. KM Caraka Jaya Niaga – 32, built in 1993.
4. Logistik Nusantara 1, built in 1998 with 10,822 DWT.
5. Logistik Nusantara 2, built in 2006 with 3,893 DWT.
6. Logistik Nusantara 3, built in 2008 with 3,901 DWT.
7. Logistik Nusantara 4, built in 2007 with 3,901 DWT.
8. Logistik Nusantara 5, built in 2008 with 11,184 DWT.
9. Logistik Nusantara 6, built in 2008 with 9,021 DWT.

SEA TOLL SHIPS

The Sea Toll Ships are operated under:

1. Presidential Regulation No. 70 of 2017 on the Implementation of Public Obligations for Sea Freight Transport.
2. Presidential Regulation No. 71 of 2015 on the Determination and Storage of Basic Needs and Essential Goods.
3. Minister of Transportation Regulation No. PM. 4 of 2016 on the Amendment to Minister of Transportation Regulation No. PM 161 of 2015 on the Implementation of Public Service Obligations for Sea Freight Transport.
4. Minister of Transportation Regulation No. 17 of 2017 on Freight Rates at Sea in the Implementation of Public Service Obligations (PSO).

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

Saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 10 armada Kapal Tol Laut, yaitu KM Logistik Nusantara I, II, III, IV, V, dan VI, serta KM Kendhaga Nusantara 01, 07, 08, dan 11.

Currently, PT PELNI (Persero) operates 10 Sea Toll fleets, namely KM Logistik Nusantara I, II, III, IV, V, and VI, as well as KM Kendhaga Nusantara 01, 07, 08, and 11.

JENIS MUATAN KAPAL TOL LAUT:

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 53 tahun 2020, kategorisasi muatan Kapal Tol Laut antara lain sebagai berikut:

TYPES OF CARGO FOR SEA TOLL SHIPS:

According to Presidential Regulation No. 59 of 2020 on the Determination and Storage of Basic Needs and Essential Goods, and Ministry of Trade Regulation (Permendag) No. 53 of 2020, the categorization of cargo for Sea Toll Ships includes:

Barang Kebutuhan Pokok Basic Necessities		
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian, antara lain: 1. Beras 2. Kedelai bahan baku tahu dan tempe 3. Cabai 4. Bawang Merah	Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri, antara lain: 1. Gula 2. Minyak Goreng 3. Tepung Terigu	Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan, antara lain: 1. Daging Sapi 2. Daging ayam ras 3. Telur ayam ras 4. Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/ cakalang
Essential Agricultural Products include: 1. Rice 2. Soybeans for tofu and tempeh production 3. Chili peppers 4. Shallots	Essential Industrial Products include: 1. Sugar 2. Cooking oil 3. Wheat flour	Essential Livestock and Fisheries Products include: 1. Beef 2. Broiler chicken meat 3. Chicken eggs 4. Fresh fish such as milkfish, mackerel, and bonito/tuna/ skipjack

Barang Penting Essential Goods	
1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai	1. Seeds, namely rice, corn, and soybean seeds
2. Pupuk	2. Fertilizer
3. Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram	3. 3-kilogram LPG (Liquefied Petroleum Gas) cylinder
4. Triplek	4. Plywood
5. Semen	5. Cement
6. Besi baja konstruksi	6. Structural steel
7. Baja ringan	7. Light steel

Sedangkan Sesuai Permendag No 38 tahun 2018 Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

Meanwhile, according to Ministry of Trade Regulation No. 38 of 2018, the types of goods referred to in Article 2 paragraph (1) letter b are defined as follows:

Barang Penting Lainnya Other Essential Goods		
1. Air mineral	11. Susu	21. Pakan ternak atau pakan ikan
2. Bawang Putih	12. Teh	22. Asbes/gypsum
3. Garam	13. Kopi	23. Paku
4. Kacang hijau	14. Ikan Kemasan Kaleng	24. Seng
5. Kacang Tanah	15. Biskuit	25. Aspal
6. Margarin	16. Pakaian jadi	
7. Mie instan	17. Popok bayi dan dewasa	
8. Minuman ringan	18. Deterjen/sabun/pasta gigi	
9. Obat-obatan	19. Alat tulis/peralatan sekolah	
10. Sayuran	20. Gas elpiji 12 kg	
1. Bottled mineral water	11. Milk	21. Animal feed or fish feed
2. Garlic	12. Tea	22. Asbestos/gypsum
3. Salt	13. Coffee	23. Nails
4. Green beans	14. Canned fish	24. Zinc
5. Peanuts	15. Biscuits	25. Asphalt
6. Margarine	16. Ready-made clothes	
7. Instant noodles	17. Baby and adult diapers	
8. Soft drinks	18. Detergent/soap/toothpaste	
9. 9. Medicines	19. Stationery/school supplies	
10. 10. Vegetables	20. 12 kg LPG cylinder	

Sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Nomor SE II tahun 2019, kapal tol laut juga memuat produk muatan balik potensi daerah, dengan perincian sebagai berikut:

According to Circular Letter from the Directorate General of Sea Transportation (Dirjen Hubla) Number SE II of 2019, roll-on/roll-off ships also carry potential regional cargo, detailed as follows:

Produk Muatan Balik Potensi Daerah Regional Potential Cargo		
1. Abu Batu	24. Hasil Perindustrian	47. Kulit Hewan
2. Alumina	25. Hasil Laut	48. Kulit Kayu
3. Alumunium	26. Hasil Pertambangan	49. Pakan Ternak
4. Ammonia	27. Hasil Pertanian	50. Melinjo
5. Arang	28. Ikan Asin	51. Minyak Daun Cengkeh
6. Asam	29. Inti Sawit	52. Minyak Sawit
7. Bahan Baku Kertas	30. Jagung	53. Nikel
8. Bantalan Kayu	31. Jambu	54. Pala
9. Barang Kerajinan	32. Jambu Mete	55. Pasir
10. Batu	33. Jengkol	56. Pisang
11. Bauksit	34. Kaca	57. Rempah-rempah
12. Besi	35. Kacang-kacangan	58. Rotan
13. Besi Tua	36. Kapas	59. Rumput Laut
14. Beton	37. Karet	60. Tembaga
15. Biji Besi	38. Karung Goni	61. Tembakau
16. Biji Kokoa/Coklat	39. Kawat	62. Tepung Sagu
17. Biji Sawit	40. Kayu	63. Tepung Tapioka
18. Buah-buahan	41. Kedelai	64. Udang
19. Cangkang	42. Kelapa	65. Urea
20. *Furniture*	43. Kemiri	66. *Wood Chips*
21. Gaplek	44. Kerosin	67. *Wood Pulp*
22. Garam	45. Kertas	
23. Hasil Hutan	46. Kopra	

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

Produk Muatan Balik Potensi Daerah Regional Potential Cargo		
1. Crushed stone	24. Industrial products	47. Animal skins
2. Alumina	25. Marine products	48. Bark
3. Aluminum	26. Mining products	49. Animal feed
4. Ammonia	27. Agricultural products	50. Melinjo
5. Charcoal	28. Salted fish	51. Clove leaf oil
6. Acid	29. Palm kernel	52. Palm oil
7. Paper raw materials	30. Corn	53. Nickel
8. Wooden pallets	31. Guava	54. Nutmeg
9. Handicrafts	32. Cashew nuts	55. Sand
10. Stone	33. Jengkol (dogfruit)	56. Bananas
11. Bauxite	34. Glass	57. Spices
12. Iron	35. Nuts	58. Rattan
13. Scrap iron	36. Cotton	59. Seaweed
14. Concrete	37. Rubber	60. Copper
15. Iron ore	38. Jute sacks	61. Tobacco
16. Cocoa beans/chocolate	39. Wire	62. Sago flour
17. Palm seeds	40. Wood	63. Tapioca flour
18. Fruits	41. Soybeans	64. Shrimp
19. Shells	42. Coconut	65. Urea
20. Furniture	43. Candlenut	66. Wood chips
21. Cassava flour	44. Kerosene	67. Wood pulp
22. Salt	45. Paper	
23. Forest products	46. Copra	

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

KAPAL TERNAK

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan Rute Kupang - Waingapu - Tg.Priok - Cirebon - Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

KAPAL PERINTIS

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak. Dasar hukum pengelolaan Kapal Perintis, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Pelayanan Publik Perintis Negara.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.998/DJPL/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2022.
4. PT PELNI (Persero) mengoperasikan 44 (empat puluh empat) Kapal Perintis utama dan 6 (enam) Kapal Perintis cadangan, yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

KAPAL REDE

Kapal Rede merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 16 Kapal Rede yang tersebar diseluruh Indonesia.

FASILITAS KAPAL

PT PELNI (Persero) menyediakan tenaga kerja profesional dan fasilitas terbaik demi kenyamanan penumpang dalam melakukan perjalanan menggunakan armada PT PELNI (Persero), meliputi:

1. Fasilitas Umum:
   a. *Live Music*;
   b. *Charging Spot*;
   c. Kasur Ekonomi;

LIVESTOCK SHIP

PT PELNI (Persero) operates one livestock ship fleet, namely KM Camara Nusantara I, with routes Kupang - Waingapu - Tg.Priok - Cirebon - Kupang. The presence of livestock ships aims to assist the government in controlling meat prices and improving the welfare of domestic cattle breeders.

PIONEER SHIP

The Pioneer Ship fleet is part of the government assignment to PT PELNI (Persero) in addition to Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) ships and Livestock ships. The legal basis for managing Pioneer Ships includes:

1. Presidential Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Public Service Obligations for State-owned Pioneer Ships.
2. Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number PM 55 of 2019 concerning Cost Components and Revenues Calculated in the Activities of State Pioneer Public Services.
3. Decision of the Director General of Sea Transportation Number KP.998/DJPL/2021 dated November 9, 2021, regarding the Network of Pioneer Sea Transportation Routes for Fiscal Year 2022.
4. PT PELNI (Persero) operates 44 main Pioneer Ships and 6 reserve Pioneer Ships, covering remote areas throughout Indonesia.

REDE SHIP

The Rede Ship is part of the government assignment to PT PELNI (Persero) with 16 Rede Ships operating throughout Indonesia.

SHIP FACILITIES

PT PELNI (Persero) provides professional workforce and best facilities for the comfort of passengers traveling on PT PELNI (Persero) fleets, including:

1. General Facilities:
   a. Live Music;
   b. Charging Spots;
   c. Economy Class Beds;

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

d. *Toilet*;
e. Mushola;
f. Klinik;
g. *Hot Water*;
h. *Cleaning Service*;
i. TV

2. Fasilitas Berbayar:
   a. *Mini Theatre*;
   b. *Add On* (*Sprei*, Selimut, Bantal, dan Aminities).
   c. *Supplement Food* (Susu UHT, biskuit, jus buah kemasan).

3. Fasilitas Permakanan
   a. Restoran (Ruang Makan Penumpang Kelas);
   b. *Bread Toaster*;
   c. *Combi Oven*;
   d. Menu Makan (bento box);
   e. Air Minum dalam Kemasan Branding PELNI.

4. Produk komersial angkutan penumpang atau *Commercial on Board* (COB by PELNI) terdiri dari:
   a. PELNI *TRAFFIC* merupakan pengelompokan layanan komersial angkutan penumpang yang menawarkan konsep B2B seperti branding, promosi, sewa space, dan iklan di kapal
   b. PELNI *EXPERIENCE* merupakan pengelompokan layanan komersial angkutan penumpang yang menawarkan pengalaman (*experience*) pelanggan di Kapal PELNI dengan mengoptimalkan berbagai kegiatan MICE (*Meeting on Board, Tour on Board, Study on Board, Event on Board*), Kapal Phinisi, wisata dan perjalanan (*traveling*)
   c. PELNI PLUS merupakan pengelompokan layanan komersial angkutan penumpang yang memberikan nilai tambah (*added value*) pada pelanggan dengan berbagai layanan penunjang selama berlayar seperti Layanan Tambahan (*Add on*), Layanan Internet Komersial dan Layanan Antarmoda.

5. Keagenan Kapal
   Jenis Layanan Keagenan:
   a. *Clearance in & out*;
   b. *Bunker, Fresh Water, Provision Supply*;
   c. *Crew & Guest Attendance*;
   d. *Protecting Agent*;
   e. *Custom & Immigration Clearance*;
   f. Layanan *Sea Pollution*; dan
   g. Layanan *Garbage Removal*.

d. Toilets;
e. Prayer Rooms;
f. Clinics;
g. Hot Water;
h. Cleaning Services;
i. TV

2. Paid Facilities:
   a. Mini Theatre;
   b. Add-Ons (Sheets, Blankets, Pillows, and Amenities).
   c. Supplement Food (UHT Milk, Biscuits, Packaged Fruit Juices).

3. Dining Facilities:
   a. Restaurants (Passenger Dining Areas);
   b. Bread Toasters;
   c. Combi Ovens;
   d. Meal Menu (bento boxes);
   e. Branded Bottled Drinking Water.

4. Commercial Passenger Transport Products or Commercial on Board (COB by PELNI) consist of:
   a. PELNI TRAFFIC offers commercial passenger transport services with a B2B concept including branding, promotion, space rental, and advertising on ships.
   b. PELNI EXPERIENCE offers commercial passenger transport services enhancing customer experience onboard with various MICE activities (Meeting on Board, Tour on Board, Study on Board, Event on Board), Phinisi Ships, tourism, and travel.
   c. PELNI PLUS offers additional value-added services to customers during sailing such as Additional Services (Add-ons), Commercial Internet Services, and Intermodal Services.

5. Ship Agency Services
   Types of Agency Services:
   a. Clearance in & out;
   b. Bunker, Fresh Water, Provision Supply;
   c. Crew & Guest Attendance;
   d. Protecting Agent;
   e. Customs & Immigration Clearance;
   f. Sea Pollution Services; and
   g. Garbage Removal Services.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

MANAJEMEN KESELAMATAN

1. Regulasi IMO:
   a. SOLAS 1974 *Consolidated* 2004 (*Chapter* IX:ISM *Code*);
   b. MARPOL 78 *Consolidated* 2006;
   c. STCW 95 (KM. 70 tahun 1998, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan);
   d. COLREG 72 (*Collision Regulation* tahun 72).
2. *International Load Line Convention* (ILLC) 1966.

USAHA SAMPINGAN & PENUNJANG

TOUR
1. Tour Paket Kapal Phinisi:
   a. Wisata Pulau Padar;
   b. Wisata Pulau Rinca;
   c. Wisata Pulau Komodo.

HOTEL BAHTERA
Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

GALANGAN SURYA
Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PT PELNI (Persero) tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis.PT PELNI (Persero) *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin *space* dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

BISNIS PROPERTI
Persewaan ruang kantor dari aset gedung PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PT PELNI (Persero) serta persewaan toko dan *cafe* di atas kapal.

CHARTERING
Kegiatan penyewaan atau pengoperasian kapal bukan milik beserta awak kapal dan peralatannya

BROKING
Broking adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal dan/atau sewa kapal.

SAFETY MANAGEMENT

1. IMO Regulations:
   a. SOLAS 1974 Consolidated 2004 (Chapter IX: ISM Code);
   b. MARPOL 78 Consolidated 2006;
   c. STCW 95 (KM. 70 of 1998, Government Regulation No. 7 of 2000 concerning Shipping);
   d. COLREG 72 (Collision Regulation of 1972).
2. International Load Line Convention (ILLC) 1966.

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

TOUR
1. Phinisi Ship Package Tours:
   a. Pulau Padar Tours;
   b. Pulau Rinca Tours;
   c. Pulau Komodo Tours.

BAHTERA HOTEL
A hotel facility for meetings and training centers equipped with meeting rooms that can accommodate more than 200 people and other supporting facilities.

GALANGAN SURYA
Established since May 20, 1996, and involved in the construction of PT PELNI (Persero) type 500 ships such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PT PELNI (Persero) Maintenance Facilities (PMF), a strategic projection that ensures dry dock space and repairs for all ships (including large ships) operated by PT PELNI (Persero).

PROPERTY BUSINESS
Rental of office space from PT PELNI (Persero) buildings located across PT PELNI (Persero) branches. In addition, property business also includes advertising space rental on PT PELNI (Persero) ships as well as rental of shops and cafes on ships.

CHARTERING
The activity of renting or operating non-owned ships along with crew and equipment.

BROKING
Broking is the business activity of intermediary in the sale and purchase or lease of ships.

JARINGAN TRAYEK KAPAL PENUMPANG 2023

PASSENGER SHIP ROUTE NETWORK 2023

Description:

Type 3000

Type 1000

Type 2000

Type 500

JARINGAN TRAYEK KAPAL PENUMPANG 2023

PASSENGER SHIP ROUTE NETWORK 2023

JARINGAN TRAYEK KAPAL TOL LAUT 2023

SEA TOLL ROUTE NETWORK 2023

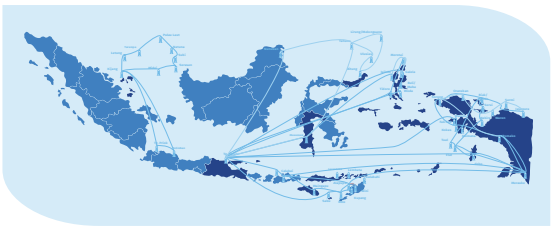

11
Trayek

50
Pelabuhan Singgah

H-1	KM. Lognus 2	Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Nunukan - Tanjung Perak
T-3	KM. Lognus 4	Tanjung Priok - Patimban - Kijang - Letung - Tarempa - Pulau laut - Natuna - Subi - Serasan - Midai - Kijang - Patimban - Tanjung Priok
T-5	KM. Kenus 1	Bitung - Ulu Siau - Tahuna - Lirung/Melangoane - Bitung
T-10	KM. Lognus 5	Tanjung Perak - Tidore - Morotai - Galela - Buli/Maba - Wada - Tanjung Perak
T-11	KM. Lognus 1	Tanjung Perak - Fak-fak - Kaimana - Elat - Dobo - Tanjung Perak
T-13	KM. Kenus 11	Tanjung Perak - Sabu - Rote - Wini - Atapupu - Calabai - Tanjung Perak

JARINGAN TRAYEK KAPAL TOL LAUT 2023

SEA TOLL ROUTE NETWORK 2023

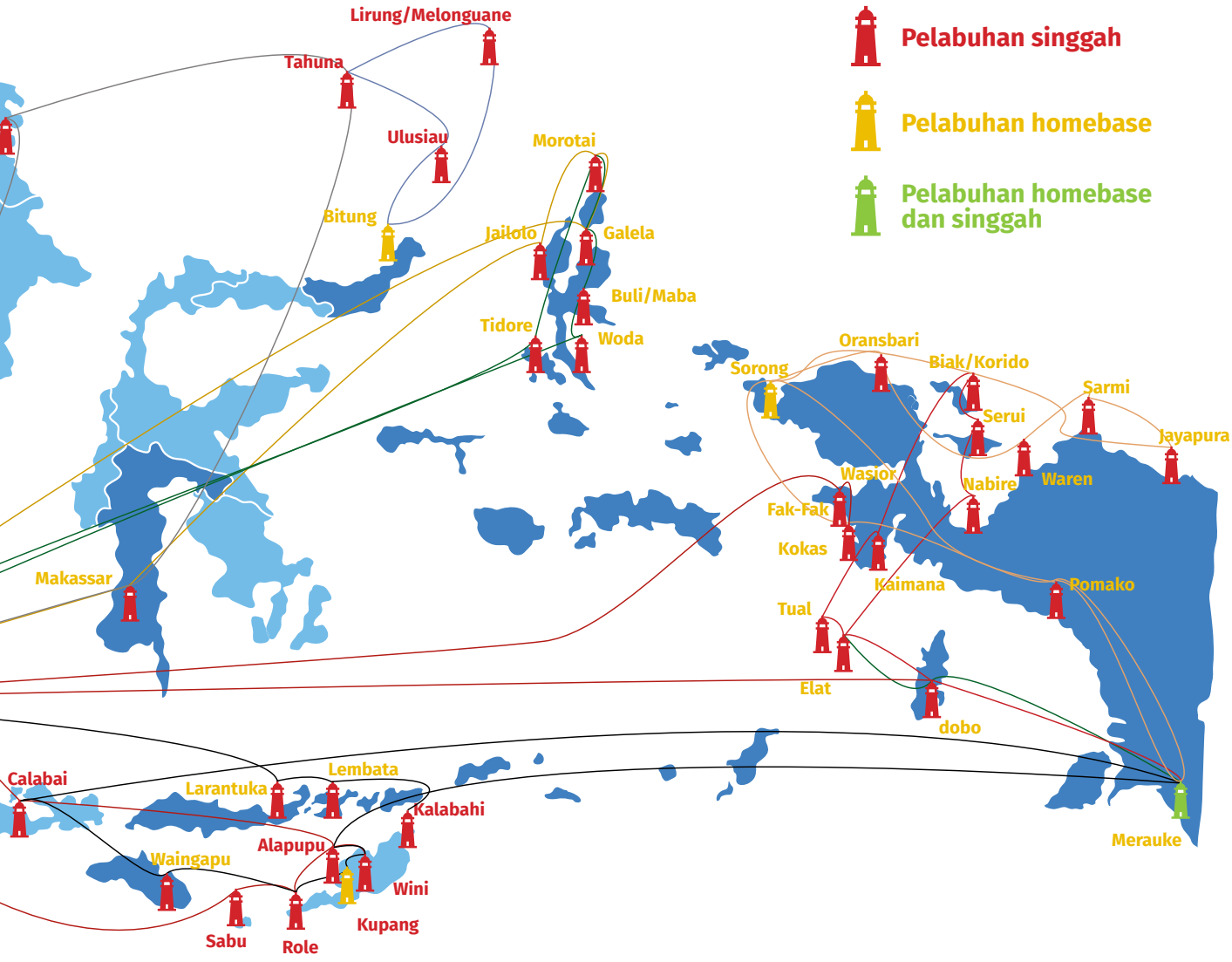

5 Unit

KM Logistik Nusantara

4 Unit

KM Kendagha Nusantara

T-14	KM. Kenus 7	Tanjung Perak - Larantuka - Lembata - Kalabahi - Tanjung Perak
T-15	KM. Lognus 3	Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Morotai - Galela - Tanjung Perak
T-19	KM. Kenus 8	Sorong - Oranbari - Waren - Sarmi - Jayapura - Korido - Sorong Pomako - Merauke - Pomako - Kokas - Sorong
T-27	KM. Kenus	Merauke - Dobo - Elat - Tual - Kaimana - Biak - Serui - Nabire - Elat - Merauke
T-28	KM. Kenus	Kupang - Waingapu - Labuan Bajo - Merauke - Ataupu/Wini - Kupang

JARINGAN TRAYEK NASIONAL KAPAL PERINTIS 2023

NATIONAL PIONEER SHIP ROUTE NETWORK 2023

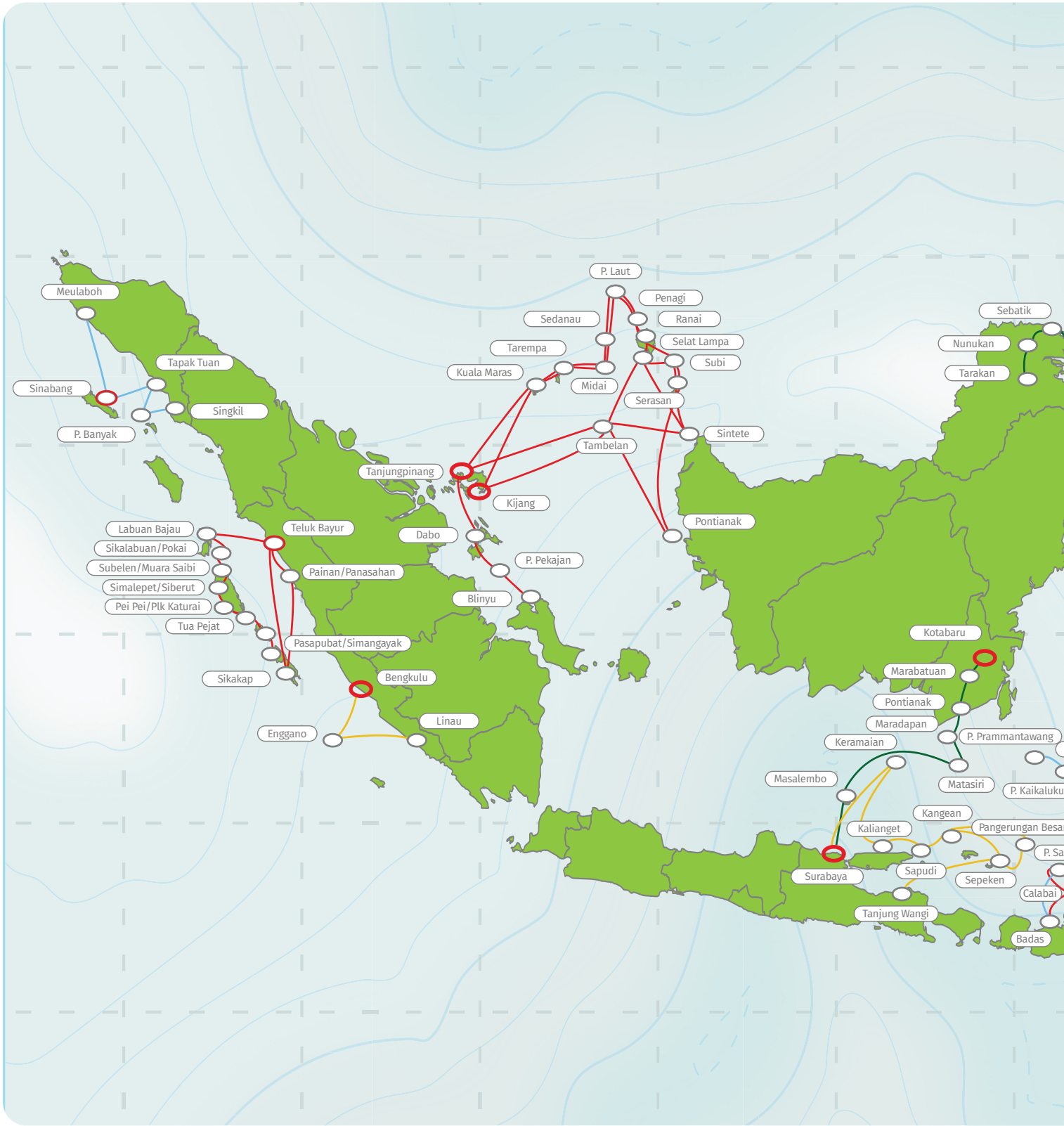

JARINGAN TRAYEK NASIONAL KAPAL PERINTIS 2023

NATIONAL PIONEER SHIP ROUTE NETWORK 2023

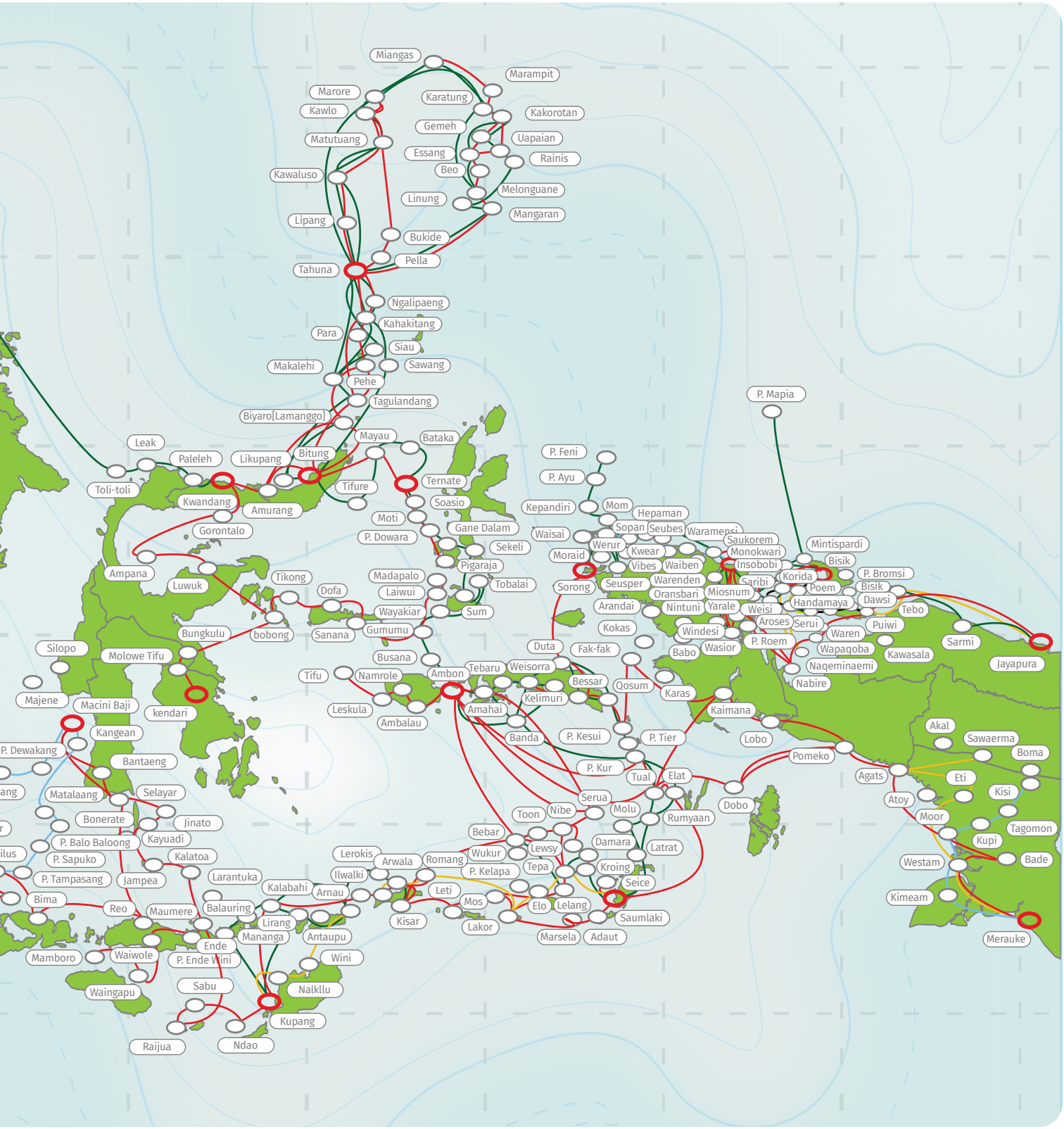

RUTE KAPAL TERNAK 2023
LIVESTOCK SHIP ROUTES 2023

RUTE KAPAL TERNAK 2023
LIVESTOCK SHIP ROUTES 2023

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG, DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, BRANCH OFFICES, AND REPRESENTATIVE OFFICES

PT PELNI (PERSERO)

Kantor Pusat / Head Office
Jl. Gajah Mada No. 14,
DKI Jakarta 10130
T. +6221 6334 342
F. +6221 6385 4130
E. humas@pelni.co.id
W. www.pelni.co.id

Pemasaran / Marketing
Jl. Gajah Mada No. 14,
DKI Jakarta 10130
T. +6221 6385 50962
E. divisi.pemasaran@pelni.co.id

ANAK PERUSAHAAN / SUBSIDIARIES

PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)
Jl. Cempaka Putih Tengah II
B.13-144, Cempaka Putih,
DKI Jakarta – 10510
T. +6221 4287 9000
F. +6221 4287 8389
E. info@ptsbn.co.id
W. www.ptsbn.co.id

PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)
Ruko Cempaka Mas
Jl. Suprapto Blok Q No. 5
Jakarta Pusat
T. +6221 4393 3184
F. +6221 4393 1623
E. pt.pidc@gmail.com

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

Galangan Surya Surabaya
Jl. Nilam Barat No. 39,
Surabaya 60165
T. +6231 3291 909, +6231 3292 961
F. +6231 3291 909
E. galangan@pelni.co.id

Hotel Bahtera Cipayung
Jl. Raya Puncak Cipayung,
No. 256, Bogor
T. +6251 8254 251, +6251 8257 451
F. +6251 8256 663
E. hotelbahtera@hotelbahterapelni.co.id

CABANG A / BRANCH A

Tg Priok
Jl. Palmas No. 2,
Tanjung Priok, Jakarta Utara
T. +6221 4393 3184
F. +6221 4393 1623
E. tg-priok@pelni.co.id

Surabaya
Jl. Pahlawan No.112-114,
Surabaya
T. +6231 3293 197
F. +6231 3538 958, +6231 3293 195
E. surabaya@pelni.co.id

Makassar
Jl. Sawerigading No. 14,
Makassar
T. +62411 3614 861
F. +62411 3631 395, +62411 3614 788
E. makassar@pelni.co.id

CABANG B / BRANCH B

Jayapura
Jl. Argapura No. 15,
Jayapura Selatan, Papua
T. +62967 5332 70, +62967 5330 70, +62967 5314 12
F. +62967 5319 21, +62967 5333 70
E. jayapura@pelni.co.id

Balikpapan
Jl. Yos Sudarso No. 1 Balikpapan
T. +62542 4241 71, +62542 4224 10
F. +62542 7350 09
E. balikpapan@pelni.co.id

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG, DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, BRANCH OFFICES, AND REPRESENTATIVE OFFICES

Sorong
Jl. Jend. A. Yani,
Kompleks Pelabuhan, Sorong
T. +62951 3218 60
F. +62951 323873
E. sorong@pelni.co.id

Kupang
Jl. Pahlawan No.7 Kel. Fatufeto –
Kec. Alak Kupang, NTT
T. +62380 8219 44, +62380 8238 98
F. +62380 8336 46
E. kupang@pelni.co.id

Ambon
Jl. D.I. Panjaitan No. 19, Ambon
T. +62911 3482 19, +62911 3531 61, +62911 3423 28
F. +62911 3520 49
E. ambon@pelni.co.id

Bitung
Jl. Sam Ratulangi No. 7 Bitung,
Bitung Kota - Sulawesi Utara
T. +62438 3635 2, +62438 3581 8
F. +62438 3358 8
E. bitung@pelni.co.id

Semarang
Jl. Mpu Tantular 25-27, Semarang
T. +6224 3540 238, +6224 3546 722
F. +6224 3555 156
E. semarang@pelni.co.id

Manokwari
Jl. Siliwangi No. 24 Manokwari,
Papua Barat
T. +62986 2151 66, +62986 2151 67, +62986 2151 65
F. +62986 2151 68
E. manokwari@pelni.co.id

Bau-Bau
Jl. Pahlawan No.1,
Bau-bau Sulawesi Tenggara
T. +62402 2821 258, +62402 2821 905, +62402 2822 705
F. +62402 2821 188
E. bau-bau@pelni.co.id

Tg. Pinang
Jl. Jend. A. Yani No. 06
Tg. Pinang Kepulauan Riau
T. +62771 2151 3, +62771 2193 3
F. +62771 2342 7
E. tg-pinang@pelni.co.id

CABANG C / BRANCH C

Batam
Jl. DR Cipto Mangunkusumo
No. 4, Tanjung Pinggir,
Sekupang, Pulau Batam
T. +62778 3221 81, +62778 3210 70
F. +62778 3210 85, +62778 3255 86
E. batam@pelni.co.id

Sampit
Jl. Ahmad Yani No 70, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74322
T. (0531) 22006
F. (0531) 24502
E. sampit@pelni.co.id

Pare-Pare
Jl. Lasiming No. 44
Pare-pare, Sulawesi Selatan
T. +62421 2101 7, +62421 2470 9
F. +62421 2307 9
E. pare-pare@pelni.co.id

Denpasar
Jl. Raya Kuta No 299, Kuta, Badung, Bali 80361
T. (0361) 763963
F. (0361) 763964
E. denpasar@pelni.co.id

Nabire
Jl. Frans Kaisepo No. 14,
Nabire, Papua
T. +62984 2285 0, +62984 2318 1, +62984 2507 2
F. +62984 2135 0
E. nabire@pelni.co.id

Maumere
Jl. Don Juan No.6, Alok, Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur 96613
T. (0382) 21013
F. (0382) 22020
E. maumere@pelni.co.id

Ternate
Jl. Jend.A.Yani,
Kompleks Pelabuhan, Ternate,Maluku
Utara T. +62921 3121 434, +62921 4124 434, +62921 3125 474
F. +62921 3121 276
E. ternate@pelni.co.id

Larantuka
Jl. Don Lorenzo Dvg, Lohayong, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur 86216
T. 6285342515038 / (0383) 21155
F. (0383) 21153
E. larantuka@pelni.co.id

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG, DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, BRANCH OFFICES, AND REPRESENTATIVE OFFICES

Medan/Belawan
Jl. Gunung Krakatau No. 17A, Medan
T. +6261 4206 5268
F. +6261 4206 5267
E. belawan@pelni.co.id

Namlea
Jl. Btn Tatanggo, Namlea, Buru, Maluku 97571
T. (0913) 21069
E. namlea@pelni.co.id

Pontianak
Jl. St. Abdurahman No.12 Pontianak, Kalimantan Barat
T. +62561 7481 24, +62561 7481 29
F. +62561 7481 31
E. pontianak@pelni.co.id

Fak Fak
Jl. D.I. Panjaitan Fak Fak, Papua Barat 98612
T. (0956) 23230 / (0956) 23371
F. (0956) 22556

Kumai
Jl. Sudirman, SH No. 16 Pangkalan Bun/Kumai, Kalimantan Tengah
T. +62532 2442 0
F. +62532 2407 3
E. kumai@pelni.co.id

Tual
Jl. Ahmad Yani No.2, Lodar El, Tual, Maluku 97713
T. (0916) 22520
F. (0916) 21181
E. tual@pelni.co.id

Tarakan
Jl. Kusuma Bangsa No. 100, Gunung Lingkas, Tarakan Kota
T. +62551 5116 9, +62551 2544 0
F. +62551 21529
E. tarakan@pelni.co.id

Biak
Jl. Jend. Sudirman No. 37, Burokub, Biak Kota, Biak Numfor, Papua 98115
T. (0981) 23255
F. (0981) 22225
E. biak@pelni.co.id

Nunukan
Jl. A. Yani No. 11, Nunukan, Kalimantan Tenggara
T. +62556 2130 9, +62556 2298 4
F. +62556 2102 9
E. nunukan@pelni.co.id

Serui
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kep. Yapen, Serui, Papua 98211
T. (0983) 32309 / (0983) 23256
F. (0983) 31552
E. serui@pelni.co.id

CABANG D / BRANCH D

Tanjung Balai Karimun
Jl. Mt. Haryono No.11, Kapling, Tebing, Karimun, Kepulauan Riau 21311
T. (0777) 7362041
F. (0777) 325460
E. tg-balai@pelni.co.id

WAINGAPU
JL. Hasanuddin No.1, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 87116
T. (0387) 61665
F. (0387) 61027
E. waingapu@pelni.co.id

Kota Baru / Batulicin
Jl. Pelabuhan Samudera No. 125, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72211
T. (0518) 70822
F. (0518) 71419
E. kotabaru@pelni.co.id

KENDARI
JL. Mayjen Sutoyo No. 75e, Watu-Watu, Kendari Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara
T. 6282328887525 / (0401) 3121935
F. (0401) 3122156
E. kendari@pelni.co.id

Bima
Jl. Kesatria No.2, Penatoi, Mpunda, Bima, Nusa Tenggara Barat 84116
T. 6282144523577 / (0374) 42046
F. (0374) 42625
E. bima@pelni.co.id

LUWUK
JL. Sungai Limboto No. 74, Bungin, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah 94713
T. (0461) 23013 / (0461) 23013
F. (0461) 21888
E. luwuk@pelni.co.id

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG, DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, BRANCH OFFICES, AND REPRESENTATIVE OFFICES

Toli-Toli Jl. Yos Sudarso No.399, Komp. Pelabuhan Dede, Baolan, Tolitoli, Sulawesi Tengah 94512 T. (0453) 22357 / (0453) 23210 F. (0453) 21376 E. toli-toli@pelni.co.id	**KAIMANA** JL. Diponegoro, Kaimana, Papua Barat 98113 T. (0957) 21009 F. (0957) 21464 E. kaimana@pelni.co.id
Palu Jl. Ra Kartini No.96, Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah 94111 T. (0451) 421696 F. (0451) 423237 E. palu@pelni.co.id	**TIMIKA** JL. R.A. Kartini No.5, Inauga, Mimika Baru, Papua 99962 T. 6281344833431 / (0901) 3126660 F. (0901) 321106 E. timika@pelni.co.id
Labuan Bajo Jl. Trans Flores, Pasar Baru, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur 86754 T. (0385) 2440304	**DOBO** JL. Yos Sudarso No.22, Galai Dubu, Kep. Aru, Dobo, Maluku 97613 T. (0917) 21300 F. (0917) 21500 E. dobo@pelni.co.id
ENDE JL. Katedral No.2, Potulando, Ende, Nusa Tenggara Timur 86316 T. (0381) 21043 F. (0381) 21419 E. pelniende@pelni.co.id	**MERAUKE** JL. Sabang No. 318, Merauke, Papua Selatan 99114 T. (0971) 321591 F. (0971) 321631 E. merauke@pelni.co.id

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero) tanggal 27 Januari 2023.

The organizational structure is authorized by Director's Decree Number 01.27/01/SK/HKO.01/2023 Regarding Organizational Structure, Main Duties, and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero) dated January 27, 2023.

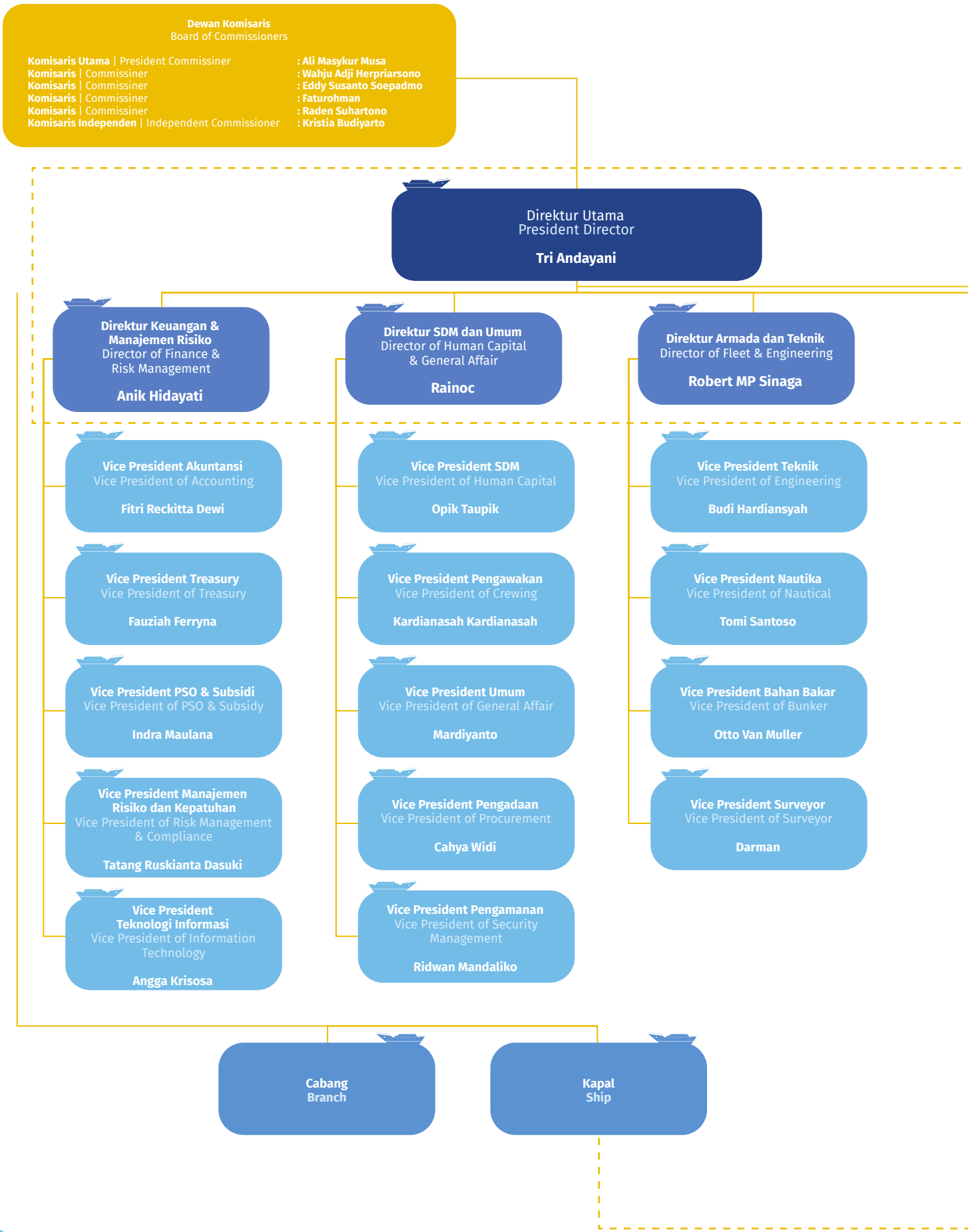
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Komisaris Utama | President Commissiner : Ali Masykur Musa
Komisaris | Commissiner : Wahju Adji Herpriarsono
Komisaris | Commissiner : Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris | Commissiner : Faturohman
Komisaris | Commissiner : Raden Suhartono
Komisaris Independen | Independent Commissioner : Kristia Budiyarto
Direktur Utama
President Director
Tri Andayani
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
Director of Finance & Risk Management
Anik Hidayati
Direktur SDM dan Umum
Director of Human Capital & General Affair
Rainoc
Direktur Armada dan Teknik
Director of Fleet & Engineering
Robert MP Sinaga
Vice President Akuntansi
Vice President of Accounting
Fitri Reckitta Dewi
Vice President Treasury
Vice President of Treasury
Fauziah Ferryna
Vice President PSO & Subsidi
Vice President of PSO & Subsidy
Indra Maulana
Vice President Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Vice President of Risk Management & Compliance
Tatang Ruskianta Dasuki
Vice President Teknologi Informasi
Vice President of Information Technology
Angga Krisosa
Vice President SDM
Vice President of Human Capital
Opik Taupik
Vice President Pengawakan
Vice President of Crewing
Kardianasah Kardianasah
Vice President Umum
Vice President of General Affair
Mardiyanto
Vice President Pengadaan
Vice President of Procurement
Cahya Widi
Vice President Pengamanan
Vice President of Security Management
Ridwan Mandaliko
Vice President Teknik
Vice President of Engineering
Budi Hardiansyah
Vice President Nautika
Vice President of Nautical
Tomi Santoso
Vice President Bahan Bakar
Vice President of Bunker
Otto Van Muller
Vice President Surveyor
Vice President of Surveyor
Darman
Cabang
Branch
Kapal
Ship

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

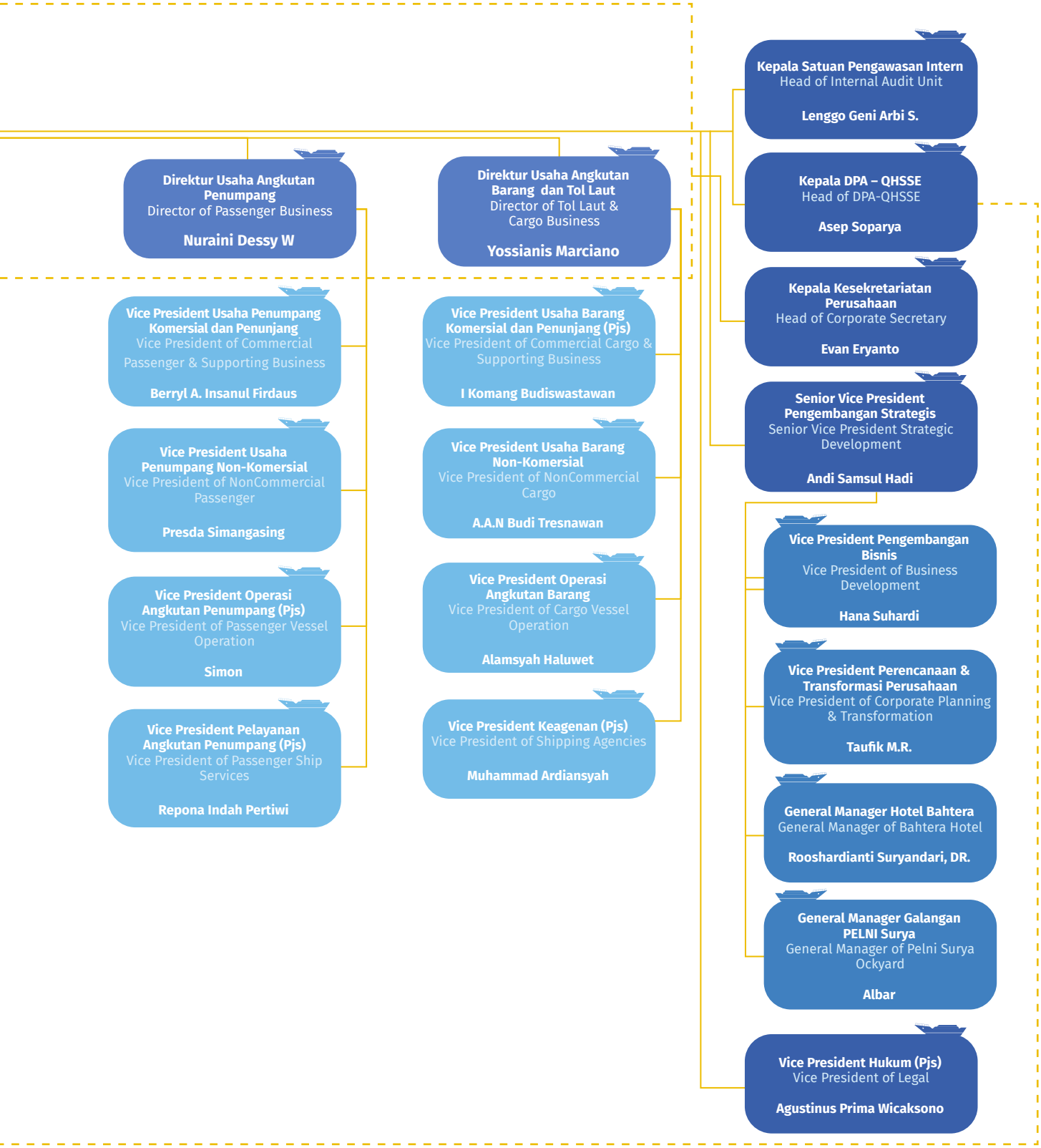

KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DI DALAM ASOSIASI/ORGANISASI INDUSTRI

COMPANY MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS/INDUSTRY ORGANIZATIONS

Pada 31 Desember 2023, PELNI terdaftar sebagai anggota pada asosiasi atau oganisasi industri dengan perincian sebagai berikut:

As of December 31, 2023, PELNI is registered as a member of the following associations or industry organizations:

Keanggotaan di Dalam Asosiasi
Membership in Associations

Asosiasi atau Organisasi Association or Organization	**Alamat** Address	**Posisi di Asosiasi atau Organisasi** Position in Association or Organization
Indonesian National Shipowners Association (INSA)	**SEKRETARIAT DPP INSA** **DPP INSA SECRETARIAT** Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia Wisma BSG, 3rd Floor #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Central Jakarta, 10160, Indonesia P:+62 21 3514348 F: +62 21 351 4347	Anggota Member
Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto No.Kav 36-38 Lt.28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190-Indonesia Mandiri Plaza, 36-38 Gatot Subroto Street, No. Kav, 28th Floor, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta 12190, Indonesia. T: +62 21 2709543	Anggota Member

PELNI
PELNI
BUMN
UNTUK INDONESIA

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

TRI ANDAYANI

Direktur Utama
President Director

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	50 tahun per 31 Desember 2023 50 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 29 Juli 1973 Jakarta, July 29, 1973
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
Pendidikan Education	• Pascasarjana (S2), Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2000) • Sarjana (S1), Sarjana Akuntansi, STIE Perbanas (1996) • Master's Degree (S2), Master of Management, Gadjah Mada University (2000) • Bachelor's Degree (S1), Accounting, STIE Perbanas (1996)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur *Marketing* PT Phapros Tbk (2021-2022) • Komisaris Independen PT Sarana Bandar Nasional (2018-2022) • Direktur Keuangan PT PELNI (Persero) (2017-2019) • Direktur Operasi PT Len Industri (Persero) (2016-2017) • Direktur Keuangan PT Len Industri (Persero) (2015-2016) • *Marketing Director* of PT Phapros Tbk (2021-2022) • Marketing Director of PT Phapros Tbk (2021-2022) • Independent Commissioner of PT Sarana Bandar Nasional (2018-2022) • Finance Director of PT PELNI (Persero) (2017-2019) • Operations Director of PT Len Industri (Persero) (2016-2017) • Finance Director of PT Len Industri (Persero) (2015-2016) • Marketing Director of PT Phapros Tbk (2021-2022)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

ANIK HIDAYATI

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	57 tahun per 31 Desember 2023 57 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Gresik, 20 Oktober 1966 Gresik, October 20, 1996
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
Pendidikan Education	• Pascasarjana (S2), Magister Manajemen, Universitas Airlangga (2002) • Sarjana (S1), Perikanan, Universitas Brawijaya (1989) • Master's Degree (S2), Master of Management, Airlangga University (2002) • Bachelor's Degree (S1), Fisheries, Brawijaya University (1989)
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Senior Executive Vice President, Directorate Of Operation* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022) • *Temporary Substitute, Senior Executive Vice President, Directorate Of Internal* Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022) • *Chief* Regional Audit Jakarta 2, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021 - 2022) • Direktur Pemasaran & Bisnis Syariah, PT Asuransi BRI Life (2018 - 2021) • *Senior Vice President*, Mass Funding Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 - 2018) • Regional *Business Head* BRI Surabaya (2016) • Regional *Business Head* BRI Malang (2014 - 2016) • *Vice President, Procurement Logistic Management Division*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014) • Senior Executive Vice President, Directorate of Operation, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022) • Temporary Substitute, Senior Executive Vice President, Directorate of Internal Audit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022) • Chief Regional Audit Jakarta 2, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021 - 2022) • Marketing & Sharia Business Director, PT Asuransi BRI Life (2018 - 2021) • Senior Vice President, Mass Funding Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 - 2018)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

HERI PURNOMO

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director
(9 Januari 2024-Sekarang)
(January 9, 2024 - Present)

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Kudus, 27 Februari 1971 Kudus, February 27, 1971
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-6/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-6/MBU/01/2024 dated January 9, 2024
Pendidikan Education	• Magister Manajemen dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (2006) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (1994) • Master's Degree in Management from Indonesian Business and Informatics Institute (2006) • Bachelor's Degree in Economics from Sebelas Maret University (1994)

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Pengalaman Kerja Work Experience	• Asisten Deputi Bidang Industri Mineral Dan Batubara (Juni 2020 – 8 Januari 2024) • Plt. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media (18 November 2019 - 8 Juni 2020) • Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II (Januari 2019- Juni 2020) • Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I (18 September 2017- 2 Januari 2019) • Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III (30 Juni 2016- 8 Januari 2019) • Kabid Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa (Oktober 2015-Juni 2016) • Kabag Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Mei 2014-Oktober 2015) • Kabid Jasa III C, Deputi Bidang Usaha Perbankan, Jasa Keuangan, Konstruksi dan Jasa Lainnya (September 2014-Mei 2014) • Kabid Jasa III B, Deputi Bidang Usaha Jasa (Oktober 2010-September 2014) • Komisaris PT Pelindo Multi Terminal (1 Maret 2023- 8 Januari 2024) • Komisaris PT Pelindo Solusi Logistik (September 2021-1 Maret 2023) • Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Oktober 2017-September 2021) • Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (Januari 2017- Oktober 2017) • Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (Juli 2014-Januari 2017) • Komisaris PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (Maret 2012- Juli 2014) • Assistant Deputy for Mineral and Coal Industry (June 2020 – January 8, 2024) • Acting Deputy for Mining, Strategic Industry, and Media (November 18, 2019 - June 8, 2020) • Assistant Deputy for Mining, Strategic Industry, and Media II (January 2019 - June 2020) • Assistant Deputy for Construction and Transportation Infrastructure I (September 18, 2017 - January 2, 2019) • Assistant Deputy for Construction and Transportation Infrastructure III (June 30, 2016 - January 8, 2019) • Head of Construction and Transportation Infrastructure IIIa (October 2015 - June 2016) • Head of Organization and Bureaucratic Reform (May 2014 - October 2015) • Head of Services III C, Deputy for Banking, Financial Services, Construction, and Other Services (September 2014 - May 2014) • Head of Services III B, Deputy for Services (October 2010 - September 2014) • Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal (March 1, 2023 - January 8, 2024) • Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (September 2021 - March 1, 2023) • Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia IV (October 2017 - September 2021) • Commissioner of PT Pos Indonesia (Persero) (January 2017 - October 2017) • Commissioner of PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, and Ratu Boko (Persero) (July 2014 - January 2017) • Commissioner of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (March 2012 - July 2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

ROBERT M.P. SINAGA

Direktur Armada dan Teknik
Director of Fleet and Engineering

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	56 tahun per 31 Desember 2023 56 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Medan, 29 Desember 1967 Medan, December 29, 1967
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
Pendidikan Education	• Pascasarjana (S2), Manajemen Logistik dan Teknik Transportasi, University of Lille I (1998) • Sarjana (S1), Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1992) • Master's Degree (S2), Logistics Management and Transport Engineering, University of Lille I (1998) • Bachelor's Degree (S1), Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1992)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Utama, PT Prima Multi Terminal (2018-2021) • Presiden Direktur Projek Organisasi Pengembangan Kuala Tanjung (2017-2018) • Komisaris PT Prima Husada Cipta Medan (2016-2017) • *Senior Manager*, Bina Usaha (2015-2017) • *General Manager*, Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (2014-2015) • President Director, PT Prima Multi Terminal (2018-2021) • President Director, Kuala Tanjung Development Project Organization (2017-2018) • Commissioner, PT Prima Husada Cipta Medan (2016-2017) • Senior Manager, Business Development (2015-2017) • General Manager, Domestic Container Terminal Belawan (2014-2015)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain. Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

NURAINI DESSY W

Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Transportation Business
(21 September 2023-Sekarang)
(September 21, 2023- Present)

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	48 tahun per 31 Desember 2023 48 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Sukabumi, 8 Desember 1975 Sukabumi, December 8, 1975
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023
Pendidikan Education	Sarjana (S1), Manajemen Transpor Laut, Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti (2010) Bachelor's Degree (S1), Sea Transport Management, Trisakti School of Transport Management (2010)
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Pengawakan PT PELNI (Persero) (2023) • Kepala PT PELNI (Persero) Cabang Tg. Priok Jakarta (2021 - 2023) • *Vice President* Operasi & Layanan Operasional PT PELNI (Persero) (2021) • Pjs. *Vice President* Operasi & Layanan Operasional PT PELNI (Persero) (2020 - 2021) • Vice President of Crewing, PT PELNI (Persero) (2023) • Head of PT PELNI (Persero) Tanjung Priok Branch, Jakarta (2021 - 2023) • Vice President of Operations & Operational Services, PT PELNI (Persero) (2021) • Acting Vice President of Operations & Operational Services, PT PELNI (Persero) (2020 - 2021)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

KOKOK SUSANTO

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
Director of Freight and Sea Toll Business
(18 Maret 2024-Sekarang)
(March 18, 2024 - Present)

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2023 47 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Semarang, 31 Mei 1976 Semarang, May 31, 1976
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-70/MBU/03/2024 dated March 18, 2024
Pendidikan Education	Magister Universitas Airlangga tahun 2000 Master's Degree from Airlangga University (2000)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Strategi & Komersial PT Pelindo Multi Terminal (2023 - 2024) • Direktur Komersial & Teknik PT Solusi Logistik (2022 - 2023) • Direktur Komersial PT Pelindo Solusi Logistik (2021 - 2022) • Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III (2020-2021) • Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (2018-2020) • Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2017-2018) • *Senior* Manajer Supervisi Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (2016-2017) • Strategy & Commercial Director, PT Pelindo Multi Terminal (2023 - 2024) • Commercial & Technical Director, PT Solusi Logistik (2022 - 2023) • Commercial Director, PT Pelindo Solusi Logistik (2021 - 2022) • Director of Transformation and Business Development, PT Pelabuhan Indonesia III (2020 - 2021) • President Director, PT Pelindo Energi Logistik (2018 - 2020) • President Director, PT Pelindo Properti Indonesia (2017 - 2018) • Senior Manager of Technical Supervision, PT Pelabuhan Indonesia III (2016 - 2017)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

RAINOC

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Director of Human Resources and General Affairs
(1 Januari 2023-31 Desember 2023)
(January 1, 2023 - December 31, 2023)

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2023 53 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Sawah Lunto, 7 Oktober 1969
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
Pendidikan Education	Sarjana Ekonomi, Univesitas Andalas (1995) Bachelor's Degree in Economics, Andalas University (1995)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris Pertamina Hulu Indonesia (Maret 2021-Februari 2022) • Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan *Strategic* Kementerian BUMN (2021-2022) • Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan *Strategic* Kementerian BUMN (2020 - 2021) • Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri *Strategic* dan Media I Kementerian BUMN (2019 - 2020) • Commissioner of Pertamina Hulu Indonesia (March 2021 - February 2022) • Head of Public Relations and Strategic Support Facilitation Bureau, Ministry of BUMN (2021 - 2022) • Head of Public Relations and Strategic Support Facilitation Bureau, Ministry of BUMN (2020 - 2021) • Assistant Deputy for Mining, Strategic Industry, and Media I, Ministry of BUMN (2019 - 2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

*) Sudah tidak menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 9 Januari 2024
*) No longer served as Director of the Company as of January 9, 2024.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

YAHYA KUNCORO

Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Transportation Business
(1 Januari 2023-1 Agustus 2023)
(January 1, 2023-August 1, 2023)

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2023 47 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Solo, 15 Oktober 1976 Solo, October 15, 1976
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
Pendidikan Education	• Pascasarjana (S2), Magister, Manajemen Transport Laut STMT Trisakti (2009) • Sarjana (S1), Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (1995) • Master's Degree (S2), Master of Sea Transport Management, STMT Trisakti (2009) • Bachelor's Degree (S1), Industrial Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) Surabaya (1995)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Usaha Angkutan Penumpang (2022-2023) • Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut (2020-2022) • Kepala Kesektariatan Perusahaan PT PELNI (Persero) (2019-2021) • *Vice President*, Keagenan *Tour* (2017-2019) • *Vice President*, Teknologi Informasi (2015-2017) • Direktur PT Solusi Integrasi Utama (2013-2014) • Director of Passenger Transportation Business (2022-2023) • Director of Freight and Sea Toll Business (2020-2022) • Head of Corporate Secretariat, PT PELNI (Persero) (2019-2021) • Vice President, Agency Tour (2017-2019) • Vice President, Information Technology (2015-2017) • Director, PT Solusi Integrasi Utama (2013-2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

*) Sudah tidak menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 1 Agustus 2023
*) No longer served as Director of the Company as of August 1, 2023

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

YOSSIANIS MARCIANO

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
Director of Freight and Sea Toll Business

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	39 tahun per 31 Desember 2023 39 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 8 Maret 1984 Jakarta, March 8, 1984
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
Pendidikan Education	• *Bachelor Degree, Merchant* Marine Higher Education Institute (2016) • Pascasarjana (S2), Magister, Netherlands Maritime University (2013) • *Executive Center for Global Leadership* (ECGL), International Diploma Leadership (2013) • Bachelor's Degree, Merchant Marine Higher Education Institute (2016) • Master's Degree (S2), Netherlands Maritime University (2013) • Executive Center for Global Leadership (ECGL), International Diploma in Leadership (2013)
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Senior Vice President* Pemasaran, PT Pelindo Solusi Logistik (2021-2022) • Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020-2021) • *General Manager*, Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan (2019-2020) • Senior Vice President of Marketing, PT Pelindo Solusi Logistik (2021-2022) • Commercial and Business Development Director, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020-2021) • General Manager, Tanjung Pandan Port Branch (2019-2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

*) Sudah tidak menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 18 Maret 2024
*) No longer served as Director of the Company as of March 18, 2024.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pada tahun 2023, komposisi Direksi PELNI mengalami 1 (satu) kali perubahan. Alasan perubahan komposisi Direksi karena Perubahan strategi pemegang saham. Informasi mengenai perubahan komposisi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

In 2023, the composition of the Board of Directors of PELNI underwent one change. The reason for this change was a shift in the shareholders' strategy. Details of this change can be seen in the following table:

Perubahan Komposisi Direksi PELNI
Changes in the Composition of PELNI's Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Periode Awal Tahun Buku 2023-1 Agustus 2023 Period: Early Fiscal Year 2023 - August 1, 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Yahya Kuncoro	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
4	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
5	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
6	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
1 Agustus 2023-21 September 2023 August 1, 2023 - September 21, 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Perubahan Komposisi Direksi PELNI
Changes in the Composition of PELNI's Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
4	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
5	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
21 September 2023-Akhir Tahun Buku 2023 September 21, 2023 - End of Fiscal Year 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023
4	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
5	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
6	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI SETELAH 31 DESEMBER 2023

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, susunan Dewan Direksi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menjadi sebagai berikut:

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AFTER DECEMBER 31, 2023

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Directors based on the Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises Number: SK-70/MBU/03/2024 dated March 18, 2024. The composition of the Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) is as follows:

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023
3	Heri Purnomo	Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-6/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-6/MBU/01/2024 dated January 9, 2024
4	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
5	Kokok Susanto	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-70/MBU/03/2024 dated March 18, 2024
6	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021

SAFETY

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

MUHAMMAD AWALUDDIN

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently Independent Commissioner
(16 Januari 2024-sekarang)
(January 16, 2024 – Present)

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	55 tahun per 31 Desember 2023 55 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 15 Januari 1968 Jakarta, January 15, 1968
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024
Pendidikan Education	• Doctoral Jurusan *Doctor of Science in Management*, Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung • Magister Jurusan *Master of Business Administration*, European University Antwerp Belgium (1998) • Sarjana Jurusan Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya (1990) • Doctorate in Science in Management, Padjajaran University (UNPAD) Bandung • Master's Degree in Business Administration, European University Antwerp, Belgium (1998) • Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Sriwijaya University (1990)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) (2016-2023) • *CEO of Enterprise Business* PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2016) • Direktur *Enterprise* & *Business Service* PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2012-2016) • Direktur Utama PT Infomedia Nusantara (2010-2012) • President Director, PT Angkasa Pura II (Persero) (2016-2023) • CEO of Enterprise Business, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2016) • Director of Enterprise & Business Service, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2012-2016) • President Director, PT Infomedia Nusantara (2010-2012)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	-
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

KRISTIA BUDIYARTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	45 tahun per 31 Desember 2023 45 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Cirebon, 17 Januari 1978 Cirebon, January 17, 1978
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
Pendidikan Education	Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin (2002) Bachelor's Degree in Communication Science, Hasanuddin University (2002)
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Staff* Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2019-2021) • *Media Planner/Social Media Analysis* PT-G-Indonesia & APP Sinar Mas (2014-2019) • *General Manager E-Comerce* PT Planet Tecno (Makanja.com/*Online Store*) (2012-2013) • Direktur Operational Jaringan Etnikom Bens Radio Jakarta (Bandung, Cirebon, Batam, Baturaja, Kayuagung, Banten) (2009-2011) • Program *Director* Bandung Radio, Jaringan Etnikom *Network* Bens Radio Jakarta (2008-2009) • Special Staff Assistant to the Deputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia (2019-2021) • Media Planner/Social Media Analyst, PT-G-Indonesia & APP Sinar Mas (2014-2019) • General Manager of E-Commerce, PT Planet Tecno (Makanja.com/Online Store) (2012-2013) • Operational Director, Etnikom Network Bens Radio Jakarta (Bandung, Cirebon, Batam, Baturaja, Kayuagung, Banten) (2009-2011) • Program Director, Bandung Radio, Etnikom Network Bens Radio Jakarta (2008-2009)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau menjabat sebagai: *Staff* Khusus Menteri Bidang Protokoler pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019-sekarang) In addition to serving as an Independent Commissioner of the Company, he also holds the position of: Special Staff to the Minister for Protocol Affairs at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (2019 - present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

FATUROHMAN

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2023 47 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tangerang, 26 Juni 1976 Tangerang, June 26, 1976
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
Pendidikan Education	• Magister Jurusan Manajemen, IPB (2018) • Sarjana Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (2001) • Master's Degree in Management, IPB University (2018) • Bachelor's Degree in Accounting, University of Indonesia (2001)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Kementerian BUMN (Januari 2024-sekarang) • PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis, di Kementerian BUMN (2022-Januari 2024) • Koordinator Keasdepan Jasa Infrastruktur, Kementerian BUMN (2020-2022) • Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Perhubungan, Kementerian BUMN (2019-2020) • Komisaris PELNI (Persero) (2021-sekarang) • Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (2019-2021) • Komisaris/Anggota Dewan Pengawas, PT Angkasa Pura Hotels (2016-2019) • Assistant Deputy for Plantation and Forestry Industry, Ministry of BUMN (January 2024-Present) • Acting Head of Public Relations and Strategic Support Bureau, Ministry of BUMN (2022-January 2024) • Coordinator of Infrastructure Services, Ministry of BUMN (2020-2022) • Head of Construction and Transportation Facilities Business Division, Ministry of BUMN (2019-2020) • Commissioner, PT PELNI (Persero) (2021-Present) • Commissioner, PT Hotel Indonesia Natour (2019-2021) • Commissioner/Member of the Supervisory Board, PT Angkasa Pura Hotels (2016-2019)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai: PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis di Kementerian BUMN (2022-Januari 2024) In addition to serving as an Independent Commissioner of the Company, he also holds the position of: Acting Head of Public Relations and Strategic Support Bureau, Ministry of BUMN (2022-January 2024)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

BUDI MANTORO

Komisaris
Commissioner
(16 Januari 2024-sekarang)

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	51 tahun per 31 Desember 2023 51 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Magelang, 15 September 1972 Magelang, September 15, 1972
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024.
Pendidikan Education	• S2 Ilmu Administrasi, Universitas Syeh Islam Yusuf (2010) • Diploma IV Jurusan Nautika, STIP Jakarta (2001) • Diploma III Jurusan Nautika, BPLP Semarang (1996) • Master's Degree in Administrative Science, Universitas Syeh Islam Yusuf (2010) • Diploma IV in Nautical Science, STIP Jakarta (2001) • Diploma III in Nautical Science, BPLP Semarang (1996)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2022-sekarang) • Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Pinang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2021-2022) • Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan (2020 - 2021) • Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2018-2020) • Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa terkait, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2018) • Director of Navigation, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2022-present) • Head of Type A Class I Navigation District Tanjung Pinang, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2021-2022) • Head of Academic Administration and Cadet Affairs, Human Resources Development Agency for Transportation, Ministry of Transportation (2020-2021) • Head of Domestic Sea Transportation Sub-Directorate, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2018-2020) • Head of Special Sea Transportation and Related Services Sub-Directorate, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2018)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai: Direktur Kenavigasian, Ditjen Hubla Kemenhub (2022 sampai dengan Sekarang) In addition to serving as Commissioner of the Company, he also holds the position of: Director of Navigation, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2022-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

RADEN SUHARTONO

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	58 tahun per 31 Desember 2023 58 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Banyumas, 7 Mei 1965 Banyumas, May 7, 1965
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Semarang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022.
Pendidikan Education	• Pascasarjana (S2), Magister Akuntansi, Universitas Tanjung Pura (2021) • Sarjana (S1), Akuntansi, Universitas Diponegoro (1996) • Diploma (D3), Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1988) • Master's Degree (S2) in Accounting, Tanjung Pura University (2021) • Diploma (D3) in Accounting, State College of Accountancy (1988) • Bachelor's Degree (S1) in Accounting, Diponegoro University (1996)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2021 - sekarang) • Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah (2021) • Kepala Biro Umum (2020) • Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (2018) • Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016) • Kepala Bidang Akuntan Negara (2013) • Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (2010) • Deputy Head of BPKP for Regional Financial Management Oversight (2021 - present) • Head of BPKP Representative Office, Central Java Province (2021) • Head of the General Bureau (2020) • Head of BPKP Representative Office, West Kalimantan Province (2018) • Head of BPKP Representative Office, Bangka Belitung Province (2016) • Head of the State Accountant Division (2013) • Head of the Regional Government Accountability Division (2010)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai: Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2021 - sekarang) In addition to serving as Commissioner of the Company, he also holds the position of: Deputy Head of BPKP for Regional Financial Management Oversight (2021 - present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

EDDY SUSANTO SOEPADMO

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	64 tahun per 31 Desember 2023 64 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Madiun, 26 Januari 1959 Madiun, January 26, 1959
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020.
Pendidikan Education	Sarjana, Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia (2003) Bachelor's Degree in Economics, University of Indonesia (2003)
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Special Advisor to the Chief of Staff, Executive Office of the* President Republic of Indonesia (2018) • *Advisior, E bus Technology Innovation*, PT Mobil Anak Bangsa (2016) • *Deputy Secretary General of Innovation to the* Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, (2015) • *Advisior, Agricultural Technology Innovation*, PT Kencana Artha Raya (2015) • *Program Director to the* Planet Inovasi Indonesia (2014) • *Special Advisor to the Commander of* the National Armed Forces (2013-2015) • Special Advisor to the Chief of Staff, Executive Office of the President of the Republic of Indonesia (2018) • Advisor for E-Bus Technology Innovation, PT Mobil Anak Bangsa (2016) • Deputy Secretary General of Innovation, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2015) • Advisor for Agricultural Technology Innovation, PT Kencana Artha Raya (2015) • Program Director at Planet Inovasi Indonesia (2014) • Special Advisor to the Commander of the National Armed Forces (2013-2015)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain. Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

ALI MASYKUR MUSA

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently Independent Commissioner
(1 Januari 2023-13 November 2023)
(January 1, 2023-November 13, 2023)

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	64 tahun per 31 Desember 2023 64 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Madiun, 26 Januari 1959 Madiun, January 26, 1959
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020.
Pendidikan Education	Sarjana, Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia (2003) Bachelor's Degree in Economics, University of Indonesia (2003)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Wakil Ketua Komisi IX (Bidang Perencanaan Pembangunan dan BUMN) DPR-RI (2002-2004) • Sekretaris PAH 1 BP MPR-RI (2000-2003) • Anggota FKB DPR-RI (1999-2009) • Dosen FISIP Universitas Negeri Jember (1987-1999) • Deputy Chairman of Commission IX (Development Planning and State-Owned Enterprises), House of Representatives of the Republic of Indonesia (2002-2004) • Secretary of PAH 1 BP, People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (2000-2003) • Member of FKB, House of Representatives of the Republic of Indonesia (1999-2009) • Lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Jember (1987-1999)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain. Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

*) Sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 13 November 2023
*) No longer served as Commissioner of the Company as of November 13, 2023.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

WAHJU ADJI HERPRIARSONO

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Usia Age	58 tahun per 31 Desember 2023 58 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Purbalingga, 22 Oktober 1965 Purbalingga, October 22, 1965
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019.
Pendidikan Education	• Sarjana Jurusan Hukum, Universitas 17 Agustus 2045 Semarang (1998) • Magister Jurusan Hukum Maritim dan Hukum Transportasi, Unviersite Aix-Marseille (1990) • Bachelor's Degree in Law, Universitas 17 Agustus 2045 Semarang (1998) • Master's Degree in Maritime Law and Transportation Law, Universite Aix-Marseille (1990)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Inspektur III (Transportasi Laut) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-sekarang) • Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (2021-2022) • Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (2017-2021) • Inspektur Investigasi Itjen Kementerian Perhubungan (2021-2022) • Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG (2015-2017) • Inspektur, BMKG (2013-2015) • Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum BMKG (2009-2013) • Kasubag Peraturan Transportasi Laut Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan (2002) • Inspector III (Sea Transportation), Inspectorate General, Ministry of Transportation (2022-present) • Inspector of Investigation, Inspectorate General, Ministry of Transportation (2021-2022) • Head of Legal Bureau, Secretariat General, Ministry of Transportation (2017-2021) • Inspector of Investigation, Inspectorate General, Ministry of Transportation (2021-2022) • Head of Legal and Organization Bureau, BMKG (2015-2017) • Inspector at BMKG (2013-2015) • Head of Legislation and Legal Aid Division, BMKG (2009-2013) • Subdivision Head of Sea Transportation Regulations, Secretariat General, Ministry of Transportation (2002)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai: Inspektur III (Transportasi Laut) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-Sekarang) In addition to serving as Commissioner of the Company, he also holds the position of: Inspector III (Sea Transportation), Inspectorate General, Ministry of Transportation (2022-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

*) Sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 16 Januari 2024
*) No longer served as Commissioner of the Company as of January 16, 2024

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PELNI yaitu dengan pengunduran diri Komisaris Utama Ali Masykur Musa pada tanggal 13 November 2023.

In 2023, there was a change in the composition of the PELNI Board of Commissioners due to the resignation of President Commissioner Ali Masykur Musa on November 13, 2023.

Komposisi Dewan Komisaris PELNI
Composition of the PELNI Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Periode Awal Tahun Buku 2023 - 13 November 2023 Period: Early Fiscal Year 2023 - November 13, 2023			
1	Ali Masykur Musa	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020
13 November 2023 - Akhir Tahun Buku 2023 November 13, 2023 - End of Fiscal Year 2023			
1	-	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	-

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SETELAH 31 DESEMBER 2023
CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER DECEMBER 31, 2023

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, susunan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menjadi sebagai berikut:

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners based on the Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024. The composition of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
1	Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SETELAH 31 DESEMBER 2023

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER DECEMBER 31, 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES PROFILE

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Pada 31 Desember 2023, PELNI beroperasi dengan sejumlah 5.011 orang pegawai. Angka tersebut memperlihatkan peningkatan jumlah pegawai sebesar 100,15% dibanding tahun sebelumnya, yang sejumlah 5.003 pegawai. Peningkatan jumlah pegawai tersebut sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan dan juga untuk mendukung pencapaian rencana jangka menengah dan panjang Perseroan.

Terkait hal tersebut, PELNI menjamin sistem rekrutmen dan pengembangan karier yang diberikan untuk karyawan telah dilaksanakan dengan adil dan setara bagi seluruh pegawai, tanpa praktik diskriminatif apa pun berdasarkan latar belakang identitas dari masing-masing pegawai, mencakup latar belakang jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras, ataupun keterbatasan fisik tertentu.

Komposisi pegawai PELNI berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, level jabatan, hingga status kepegawaian adalah sebagai berikut.

HUMAN RESOURCES PROFILE

As of December 31, 2023, PELNI operated with a total of 5,011 employees. This number represents an increase of 100.15% compared to the previous year, which had 5,003 employees. The increase in the number of employees aligns with the company's business growth and supports the achievement of the company's medium and long-term plans.

PELNI ensures that the recruitment and career development system provided to employees is implemented fairly and equally for all employees, without any discriminatory practices based on the individual identities of each employee, including gender, ethnicity, religion, race, or certain physical limitations.

The composition of PELNI employees based on gender, education level, age, job level, and employment status is as follows:

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, 88,43% pegawai PELNI merupakan pegawai laki-laki atau berkurang dibanding persentase tahun 2022 yang sebesar 88,71%. Tingginya persentase pegawai laki-laki tersebut disebabkan banyaknya pekerjaan operasional yang lebih diminati dan sesuai untuk laki-laki, misalnya di cabang dan kapal. Meski demikian Perseroan berkomitmen untuk tetap memberikan kesempatan yang setara, baik kepada pegawai laki-laki maupun perempuan, dalam berkarier di dalam Perseroan.

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY GENDER

The composition of employees by gender shows that 88.43% of PELNI employees are male, a slight decrease from 88.71% in 2022. The high percentage of male employees is due to the operational nature of the work, which is more preferred and suitable for men, such as positions at branches and on ships. Nevertheless, the company is committed to providing equal opportunities for both male and female employees in their careers within the company.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Uraian Description	2023		2022	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Pegawai Darat Ashore Employees	876	520	848	516
Pegawai Laut Offshore Employees	3.555	60	3.590	49
Jumlah Total	**4.431**	**580**	**4.438**	**565**

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES PROFILE

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pada tahun 2023 jumlah pegawai lulusan Sarjana mengalami peningkatan sebesar 10,79% dari 769 orang pada tahun 2022 menjadi 852 orang. Peningkatan tersebut bisa menciptakan pegawai yang unggul, kompeten dan berdaya saing. Selain itu, Perseroan juga membekali pegawai dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan melalui pelatihan yang diberikan agar pegawai memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Perseroan memandang pengembangan kompetensi SDM sebagai investasi jangka panjang yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja Perseroan di masa mendatang.

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY EDUCATION LEVEL

In 2023, the number of employees with a Bachelor's degree increased by 10.79%, from 769 in 2022 to 852. This increase has the potential to create excellent, competent, and competitive employees. Additionally, the Company equips its employees with the necessary competencies through training, ensuring they possess the skills required to perform their duties and responsibilities effectively. The Company views the development of human resource competencies as a long-term investment that will have a tangible impact on improving the Company's performance in the future.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition by Education Level

Uraian / Description	2023		2022	
	Jumlah / Total	Komposisi / Composition	Jumlah / Total	Komposisi / Composition
Doktor / Doctorate	-	-	-	-
Pascasarjana (S2) / Master's Degree	61	1,22%	81	1,62%
Sarjana / Bachelor's Degree	852	17,00%	769	15,37%
Diploma	428	8,54%	631	12,61%
< SLTA / High School	2.473	49,35%	2.266	45,29%
ANT I	93	1,86%	96	1,92%
ANT II	107	2,14%	110	2,20%
ANT III	251	5,01%	276	5,52%
< ANT IV	119	2,37%	126	2,52%
ATT I	73	1,46%	66	1,32%
ATT II	82	1,64%	82	1,64%
ATT III	287	5,73%	303	6,06%
< ATT IV	185	3,69%	197	3,94%
Jumlah / Total	**5.011**	**100,00%**	**5.003**	**100,00%**

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan kelompok usia, komposisi pegawai PELNI pada kelompok umur terbanyak berada pada rentang 31-39 tahun, dengan persentase sebesar 32,37%. Komposisi secara umum

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY AGE

Based on age groups, the largest proportion of PELNI employees is in the 31-39 age range, with a percentage of 32.37%. Overall, in 2023, employees under the age of 50

pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pegawai yang berusia di bawah 50 tahun sebesar 68,89%, atau meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 66,61%. Terkait hal tersebut, PELNI secara konsisten terus melaksanakan proses regenerasi personil SDM untuk dipersiapkan menggantikan pegawai yang berusia lebih dari 50 tahun.

accounted for 68.89%, an increase from 66.61% in 2022. PELNI consistently conducts personnel regeneration to prepare employees under 50 to replace those over 50 years old.

Uraian Description	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
> 55	191	3,81%	179	3,58%
50 – 55	1.368	27,30%	1.491	29,80%
40 – 49	843	16,82%	976	19,51%
31 - 39	1.640	32,73%	1.087	21,73%
< 30	969	19,34%	1.270	25,38%
Jumlah / Total	**5.011**	**100,00%**	**5.003**	**100,00%**

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Berdasarkan level organisasi, pegawai PELNI didominasi oleh personil pada jenjang tamtama (setara staf/pelaksana) sebesar 39,27%. Hal ini sejalan dengan model bisnis Perseroan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja operasional di kapal.

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY POSITION LEVEL

Based on the organizational level, PELNI employees are predominantly at the enlisted level (equivalent to staff/ operational personnel) at 39.27%. This aligns with the company's business model, which primarily absorbs operational labor on ships.

No.	Uraian Description	2023	2022	Komposisi Composition
Pegawai Darat / Ashore Employees				
A	Direksi	6	6	0,12%
	2 - 4 (Manajer tingkat atas)	65	63	1,30%
	5 - 7 (Manajer tingkat menengah)	200	201	3,99%
	8 - 9 (Manajer tingkat bawah)	244	216	4,87%
	10 - 13 Staf & Pejabat	759	729	15,15%
	14 - 16 Staf	122	149	2,43%
	Jumlah	1.396	1.364	27,86%

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES PROFILE

No.	Uraian Description	2023	2022	Komposisi Composition
Pegawai Laut / Offshore Employees				
B	3 - 9 (Perwira)	1.122	1.267	22,39%
	10 - 12 (Bintara)	525	527	10,48%
	13 - 15 (Tamtama)	1.968	1.845	39,27%
	Jumlah	3.615	3.639	72,14%
Jumlah Keseluruhan **Grand Total**		**5.011**	**5.003**	**100.00%**

*) Tidak mencakup Pegawai Darat (Anak Perusahaan)
*) Excludes Land Employees (Subsidiaries)

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN WILAYAH KERJA DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Secara umum pegawai perusahaan terdiri dari pegawai tetap atau organik dan pegawai kontrak atau Non-Organik. Komposisi pegawai PELNI didominasi oleh pegawai tetap dengan persentase 56,68%.

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY WORK AREA AND EMPLOYMENT STATUS

In general, the company's employees consist of permanent or organic employees and contract or non-organic employees. The composition of PELNI employees is dominated by permanent employees, making up 56.68% of the workforce.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja dan Status Kepegawaian
Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja dan Status Kepegawaian

Uraian Description	2023			2022		
	Non-Organik Non-Organic	Organik Organic	Jumlah Total	Non-Organik Non-Organic	Organik Organic	Jumlah Total
Pegawai Darat Ashore Employees	246	1.150	1.396	126	1.238	1.364
Pegawai Laut Offshore Employees	1.925	1.690	3.615	1.816	1.823	3.639
Jumlah **Total**	**2.171**	**2.840**	**5.011**	**1.942**	**3.061**	**5.003**

BUKIT RAYA
TUG AREA
PELNI

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

FITRI RECKITA DEWI
Pjs. *Vice President* Akuntansi
Acting Vice President of Accounting

Usia Age	39 tahun per 31 Desember 2023 39 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 19 Maret 1984 Jakarta, March 19, 1984
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Akuntansi (25-06-2005) Bachelor's Degree in Accounting, June 25, 2005
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. *Vice President* Akuntansi, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (11-10-2023) • *Manager* Akuntansi Keuangan, 11.30/02/SK/ HKO.01/2021 (30-11-2021) • *Senior Supervisor Area* I ,09.04/05/S/040/2017 (01-10-2017) • *Junior Supervisor* Verifikasi Cabang AREA 1, 12.16/1/SK/HKO.01/2015 (16-12-2015) • Pjs. *Supervisor* Verifikasi Cabang Area 1, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (01-04-2015) • Acting Vice President of Accounting, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (October 11, 2023) • Finance Accounting Manager, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (November 30, 2021) • Senior Supervisor Area I, 09.04/05/S/040/2017 (October 1, 2017) • Junior Supervisor Verification Branch AREA 1, 12.16/1/SK/HKO.01/2015 (December 16, 2015) • Acting Supervisor Verification Branch Area 1, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (April 1, 2015)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

FAUZIAH FERRYNA
Pjs. *Vice President Treasury*
Acting Vice President of Treasury

Usia Age	39 tahun per 31 Desember 2023 39 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Pekalongan, 29-02-1984 Pekalongan, February 29, 1984
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Pekalongan
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	05.08/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Akuntansi (22-04-2006) Bachelor's Degree in Accounting, April 22, 2006
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. *Vice President Treasury*, 05.08/01/SK/HKO.01/2023 (08-05-2023) • *Manager* Administrasi Keuangan, 07.04/01/SK/HKO.01/2018 (04-07-2018) • *Senior Supervisor* Pembayaran & Transaksi Kas, 09.22/28/S/040/2017 (21-11-2017) • *Junior Supervisor* Pembayaran & Transaksi Kas, 12.16/1/SK/HKO.01/2015 (16-12-2015) • Pjs. *Supervisor* Pembayaran & Transaksi, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (01-04-2015) • Acting Vice President of Treasury, 05.08/01/SK/HKO.01/2023 (May 8, 2023) • Finance Administration Manager, 07.04/01/SK/HKO.01/2018 (July 4, 2018) • Senior Supervisor of Payment & Cash Transactions, 09.22/28/S/040/2017 (November 21, 2017) • Junior Supervisor of Payment & Cash Transactions, 12.16/1/SK/HKO.01/2015 (December 16, 2015) • Acting Supervisor of Payment & Transactions, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (April 1, 2015)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

INDRA MAULANA
Vice President PSO dan Subsidi
Vice President PSO and Subsidy

Usia Age	48 tahun per 31 Desember 2023 48 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 26-04-1975 Jakarta, April 26, 1975
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	Magister Manajemen (15-01-2014) Master's Degree in Management, January 15, 2014
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* PSO dan Subsidi, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • *Vice President* Pengelolaan PSO & Subsidi, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Kepala Cabang Semarang, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (22-02-2022) • Kepala Cabang Kota Baru, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (21-01-2020) • *Manager Monitoring* Terminal & Pelabuhan, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Vice President of PSO and Subsidy, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of PSO & Subsidy Management, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Branch Manager of Semarang, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (February 22, 2021) • Branch Manager of Kota Baru, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (January 21, 2020) • Manager of Terminal & Port Monitoring, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2017)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

TATANG RUSKIANTA DASUKI
Vice President Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Vice President of Risk Management and Compliance

Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Semarang, 07-05-1971 Semarang, May 7, 1971
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	05.25/01/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	S1 Pendidikan (02-11-1994) Bachelor's Degree in Education, November 2, 1994
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Manajemen Risiko dan Kepatuhan, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (25-05-2022) • *Vice President* SMK3LH, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (30-11-2021) • *Vice President* SMK3 & Lingkungan Hidup, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (21-01-2020) • *Manager* Pengelolaan Risiko & Proses Bisnis, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • *Manager Risk Management*, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (10-07-2015) • May 25, 2022, Vice President of Risk Management and Compliance, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 • November 30, 2021, Vice President of SMK3LH, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 • January 21, 2020, Vice President of SMK3 & Environmental Affairs, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 • May 4, 2017, Manager of Risk Management & Business Process, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 • July 10, 2015, Manager of Risk Management, 10.07/3/SK/HKO.01/2015

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

ANGGA KRISOSA
Pjs. *Vice President* Teknologi Informasi
Acting Vice President of Information Technology

Usia Age	38 tahun per 31 Desember 2023 38 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bengkulu, 06-04-1985 Bengkulu, April 6, 1985
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	01.28/01/SK/HKO.01/2021
Pendidikan Education	S2 Magister Teknologi Informasi (03-02-2018) Master's Degree in Information Technology, February 3, 2018
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. *Vice President* Teknologi Informasi, 05.08/01/SK/HKO.01/2023 (08-05-2023) • *Manager* Perencanaan & Tata Kelola Teknologi Informasi, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Pjs. *Manager Application Support*, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (07-10-2015) • Pjs. *Manager* Pengendalian Teknologi Informasi, 04.30/1/SK/HKO.01/2015 (30-04-2015) • Plt. *Supervisor Network* & Infrastruktur, 04.30/1/SK/HKO.01/2014 (11-07-2014) • Pjs. Vice President Teknologi Informasi, 05.08/01/SK/HKO.01/2023 (08-05-2023) • Manager Perencanaan & Tata Kelola Teknologi Informasi, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Pjs. Manager Application Support, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (07-10-2015) • Pjs. Manager Pengendalian Teknologi Informasi, 04.30/1/SK/HKO.01/2015 (30-04-2015) • Plt. Supervisor Network & Infrastruktur, 04.30/1/SK/HKO.01/2014 (11-07-2014)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

OPIK TAUPIK
Vice President SDM
Vice President of Human Resources

Usia Age	41 tahun per 31 Desember 2023 41 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Garut, 06-01-1982 Garut, January 6, 1982
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Sistem Komputer (30-04-2008) Bachelor's Degree in Computer Systems, April 30, 2008
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* SDM, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 06.23/01/SK/HKO.01/2023 (24-05-2023) • Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 06.21/01/SK/HKO.01/2022 (21-08-2022) • Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 03.21/01/SK/HKO.01/2022 (21-03-2022) • Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (01-02-2021) • Vice President of Human Resources, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Head of Corporate Secretariat, 06.23/01/SK/HKO.01/2023 (May 24, 2023) • Head of Corporate Secretariat, 06.21/01/SK/HKO.01/2022 (August 21, 2022) • Acting Head of Corporate Secretariat, 03.21/01/SK/HKO.01/2022 (March 21, 2022) • Acting Head of Corporate Secretariat, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (February 1, 2021)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

KARDIANASAH
Vice President Pengawakan
Vice President of Manning

Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2023 47 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Subang, 11-04-1976 Subang, April 11, 1976
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	*Master of Business Administration* (28-05-2011) Master of Business Administration, May 28, 2011
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Pengawakan, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • VP Pengembangan Usaha & Produk AB, 06.25/01/SK/HKO.01/2021 (26-06-2021) • Pjs. VP Pengembangan Usaha dan Produk AB, 10.07/01/SK/HKO.01/2019 (21-10-2019) • Vice President of Crewing, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Vice President of Corporate Planning & Transformation, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of Business & Product Development AB, 06.25/01/SK/HKO.01/2021 (June 26, 2021) • Acting Vice President of Business and Product Development AB, 10.07/01/SK/HKO.01/2019 (October 21, 2019)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

MARDIYANTO
Vice President Umum
Vice President of General Affairs

Usia Age	55 tahun per 31 Desember 2023 55 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 04-09-1968 Jakarta, September 4, 1968
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	Magister Manajemen (13-06-2011) Master's Degree in Management, June 13, 2011
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Umum, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • *Manager* Pengembangan SDM, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • *Staff* Madya Bid. Perencanaan & Evaluasi, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (07-10-2015) • *Manager Strategic Planning*, 06/HKO.01/DIR/I/2014 (13-01-2014) • *Manager* Pemasaran *Asset* & Usaha Lain, 97/HKO.01/DIR/VIII/2012 (01-06-2010) • Vice President of General Affairs, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Human Resources Development Manager, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2017) • Senior Staff in Planning & Evaluation, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (October 7, 2015) • Manager of Strategic Planning, 06/HKO.01/DIR/I/2014 (January 13, 2014) • Manager of Asset & Other Business Marketing, 97/HKO.01/DIR/VIII/2012 (June 1, 2010)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

CAHYA WIDI
Vice President Pengadaan
Vice President of Procurement

Usia Age	43 tahun per 31 Desember 2023 43 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 13-08-1980 Jakarta, August 13, 1980
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	02.03/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Magister Manajemen (27-10-2011) Master's Degree in Management, October 27, 2011
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Pengadaan, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (03-02-2023) • Diperbantukan sebagai Pejabat di PT Pelita Indonesia Djaya (PID), 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (25-05-2022) • *General Manager* Hotel Bahtera, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (22-02-2021) • *Manager* Administrasi Penyediaan & Modifikasi, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (07-10-2015) • *Manager* Operasi, 07.30/SK/HKO.01/2015 (30-07-2015) • Vice President of Procurement, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (February 3, 2023) • Assigned as an Official at PT Pelita Indonesia Djaya (PID), 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (May 25, 2022) • General Manager of Hotel Bahtera, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (February 22, 2021) • Manager of Provision & Modification Administration, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (October 7, 2015) • Operations Manager, 07.30/SK/HKO.01/2015 (July 30, 2015)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

RIDWAN MANDALIKO
Vice President Pengamanan
Vice President of Security

Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2023 53 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Padang, 01-09-1970 Padang, September 1, 1970
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Balikpapan
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	03.03/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Manajemen (18-10-2002) Bachelor's Degree in Management, October 18, 2002
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Pengamanan, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (03-02-2023) • *Vice President* Penjualan Non-Komersial, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • *Vice President* Pemasaran Kapal Barang, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (30-11-2021) • Kepala Cabang Surabaya, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (21-01-2021) • Kepala Cabang Makassar, 02.21/03/SK/HKO.01/2019 (21-02-2010) • Vice President of Security, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (February 3, 2023) • Vice President of Non-Commercial Sales, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of Cargo Ship Marketing, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (November 30, 2021) • Branch Manager of Surabaya, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (January 21, 2021) • Branch Manager of Makassar, 02.21/03/SK/HKO.01/2019 (February 21, 2010)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

BUDI HARDIANSYAH
Vice President Teknik
Vice President of Engineering

Usia Age	37 tahun per 31 Desember 2023 37 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tasikmalaya, 18-06-1986 Tasikmalaya, June 18, 1986
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Magister Manajemen (2022) Master's Degree in Management, 2022
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Teknik, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Pjs. *Vice President Surveyor*, 05.31/01/SK/HKO.01/2022 (31-05-2022) • Koordinator *Surveyor*, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (22-02-2021) • Vice President of Engineering, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Acting Vice President of Surveyor, 05.31/01/SK/HKO.01/2022 (May 31, 2022) • Surveyor Coordinator, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (February 22, 2021)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

TOMI SANTOSO
Vice President Nautika
Vice President of Nautical Affairs

Usia Age	36 tahun per 31 Desember 2023 36 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Trenggalek, 13-01-1987 Trenggalek, January 13, 1987
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Tulungagung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Teknik Perkapalan (04-05-2010) Bachelor's Degree in Naval Engineering, May 4, 2010
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Nautika, 11.10/01/SK/HKO.01/2024 (10-11-2024) • Pengawas Administrasi & Evaluasi , 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (25-05-2022) • Kepala Bagian Operasi dan Pelayanan Cabang Makassar, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (11-11-2021) • *Manager* Perencanaan & Pengendalian BBM & Pelumas Kapal, 08.07/01/SK/HKO.01/2020 (07-08-2020) • *Manager Monitoring* & Evaluasi Perbaikan Kapal, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Vice President of Nautical Affairs, 11.10/01/SK/HKO.01/2024 (November 10, 2024) • Supervisor of Administration & Evaluation, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (May 25, 2022) • Head of Operations and Services Division, Makassar Branch, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (November 11, 2021) • Manager of Fuel and Lubricants Planning & Control for Ships, 08.07/01/SK/HKO.01/2020 (August 7, 2020) • Manager of Ship Repair Monitoring & Evaluation, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2017)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

OTTO VAN MULLER
Vice President Bahan Bakar
Vice President of Fuel

Usia Age	50 tahun per 31 Desember 2023 50 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Medan, 22-10-1973 Medan, October 22, 1973
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	01.28/01/SK/HKO.01/2021
Pendidikan Education	Magister Manajemen (06-10-2014) Master's Degree in Management, October 6, 2014,
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Bahan Bakar, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Pjs. *Vice President* Pengelolaan Bahan Bakar, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (01-11-2021) • *Manager Monitoring* & Evaluasi Perbaikan Kapal, 10.07/02/SK/HKO.01/2020 (07-10-2020) • *Manager* Perencanaan Strategis & Kajian BIsnis, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2021) • *Manager* Pengembangan Bisnis, 07.30/01/SK/HKO.01/2015 (30-07-2015) • Vice President of Fuel, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Acting Vice President of Fuel Management, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (November 1, 2021) • Manager of Ship Repair Monitoring & Evaluation, 10.07/02/SK/HKO.01/2020 (October 7, 2020) • Manager of Strategic Planning & Business Analysis, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2021) • Manager of Business Development, 07.30/01/SK/HKO.01/2015 (July 30, 2015)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

DARMAN
Vice President Surveyor
Vice President of Surveying

Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Ujung Pandang, 11-01-1971 Ujung Pandang, January 11, 1971
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Ujung pandang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Ahli Teknika Tingkat I (28-10-2016) Level I Technical Expert, October 28, 2016
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President Surveyor*, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • *Surveyor* Utama, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (01-07-2021) • KKM, 548/DIV.SDM/ADM.PERS/XII/2010 (01-01-2011) • Masinis I, 3923/PL/M/VII (23-07-2000) • Masinis II, 0392/PL/M/I/00 (31-01-2000) • Vice President of Surveyor, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Principal Surveyor, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (July 1, 2021) • Chief Engineer, 548/DIV.SDM/ADM.PERS/XII/2010 (January 1, 2011) • First Engineer, 3923/PL/M/VII (July 23, 2000) • Second Engineer, 0392/PL/M/I/00 (January 31, 2000)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

BERRYL A. INSANUL FIRDAUS
Vice President Usaha Penumpang Komersial Dan Penunjang
Vice President of Commercial Passenger Business and Support

Usia Age	37 tahun per 31 Desember 2023 37 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bandung, 20-01-1986 Bandung, January 20, 1986
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bandung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	S1 Manajemen (26-08-2009) Bachelor's Degree in Management, August 26, 2009
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Usaha Penumpang Komersial & Penunjang, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2023) • Kepala Cabang Fak Fak, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (28-01-2021) • *Manager* Perencanaan & Evaluasi Pemasaran Angkutan Penumpang, 05.15/01/SK/HKO.01/2019 (15-05-2021) • *Manager* Pengelolaan Penghasilan Angkutan Penumpang, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2021) • *Revenue Management Manager*, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 (21-03-2017) • Vice President of Commercial Passenger Business & Support, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2023) • Branch Manager of Fak Fak, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (January 28, 2021) • Manager of Passenger Transport Marketing Planning & Evaluation, 05.15/01/SK/HKO.01/2019 (May 15, 2021) • Manager of Passenger Transport Revenue Management, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2021) • Revenue Management Manager, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 (March 21, 2017)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

PRESDA SIMANGASING
Vice President Usaha Penumpang Non Komersial
Vice President of Non-Commercial Passenger Operations

Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of Desember 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Surabaya, 2 Februari 1971 Surabaya, February 2, 1971
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	S1 Hukum Pidana (24-05-1995) Bachelor's Degree in Criminal Law, May 05, 1995
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Usaha Penumpang Non-Komersial, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Kepala Satuan Pengawasan Intern, 11.23/01/SK/HKO.01/2020 (21-11-2020) • Kepala Satuan Pengawasan Intern, 02.21/02/SK/HKO.01/2019 (21-02-2019) • Kepala Cabang Surabaya, 123/HKO.01/DIR/XII/2013 (10-12-2013) • Kepala Cabang Bau-Bau, 49/HK0.01/DIR/IV-2012 (30-04-2012) • Vice President of Non-Commercial Passenger Business, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Head of Internal Audit Unit, 11.23/01/SK/HKO.01/2020 (November 21, 2020) • Head of Internal Audit Unit, 02.21/02/SK/HKO.01/2019 (February 21, 2019) • Branch Manager of Surabaya, 123/HKO.01/DIR/XII/2013 (December 10, 2013) • Branch Manager of Bau-Bau, 49/HKO.01/DIR/IV-2012 (April 30, 2012)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

SIMON
Pjs. *Vice President* Operasi Angkutan Penumpang
Acting Vice President of Passenger Transport Operations

Usia Age	48 tahun per 31 Desember 2023 48 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tator, 27 September 1975 Tator, September 27, 1975
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Utara North Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Ahli Nautika Tk.II (23-10-2013) Level II Nautical Expert, October 23, 2013
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. *Vice President* Operasi Angkutan Penumpang, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Pengawas ISM & ISPS *Code*, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Pengawas ISM-*Code*, 05.04/03/SK/HKO.01/17 (16-07-2017) • ISM-*Code Auditor*, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 (21-03-2017) • Pjs *Manager* Operasional & Keselamat, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (07-10-2015) • Acting Vice President of Passenger Transport Operations, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • ISM & ISPS Code Supervisor, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • ISM Code Supervisor, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (July 16, 2017) • ISM Code Auditor, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 (March 21, 2017) • Acting Manager of Operations & Safety, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (October 7, 2015)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

REPONA INDAH PERTIWI
Pjs. *Vice President* Pelayanan Angkutan Penumpang
Acting Vice President of Passenger Transport Services

Usia Age	35 tahun per 31 Desember 2023 35 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Cilacap, 10 November 1988 Cilacap, November 10, 1988
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Cilacap
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Ilmu Komunikasi (11-04-2013) Bachelor's Degree in Communication Studies, April 11, 2013
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. *Vice President* Pelayanan Angkutan Penumpang, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • *Manager* Kesekretariatan Direksi dan Komisaris, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (09-06-2023) • *Manager* Kesekretariatan Direksi & Komisaris, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • *Manager* Pengelolaan Penjualan ABKPP, 03.21/01/SK/HKO.01/2022 (21-03-2022) • Pjs. *Manager* Pengelolaan Penjualan ABKPP, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (01-07-2021) • Acting Vice President of Passenger Transport Services, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Manager of Secretariat for Directors and Commissioners, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (June 9, 2023) • Manager of Secretariat for Directors and Commissioners, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Manager of Sales Management ABKPP, 03.21/01/SK/HKO.01/2022 (March 21, 2022) • Acting Manager of Sales Management ABKPP, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (July 1, 2021)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

I KOMANG BUDISWASTAWAN
Pjs. *Vice President* Usaha Barang Komersial & Penunjang
Acting Vice President of Commercial Goods Business and Support

Usia Age	37 tahun per 31 Desember 2023 37 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Klungkung, 22 Januari 1986 Klungkung, January 22, 1986
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Semarapura
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/202303-02-2023
Pendidikan Education	S1 Sains Terapan Pelayaran (15-10-2008) Bachelor's Degree in Applied Science in Maritime, October 15, 2008
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. *Vice President* Usaha Barang Komersial & Penunjang, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • *Manager Chartering* dan *Brokering*, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (03-02-2023) • Kacab. Merauke, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (01-02-2021) • Kabag. Operasi & Pelayanan/Manokwari, 07.23/01/SK/HKO.01/2019 (23-07-2019) • Pjs. Kabag Usaha/ Cab. Manokwari, 04.09/01/SK/HKO.01/2018 (21-04-2018) • Acting Vice President of Commercial Cargo & Support Business, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Manager of Chartering and Brokering, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (February 3, 2023) • Branch Manager of Merauke, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (February 1, 2021) • Head of Operations & Services Division/Manokwari, 07.23/01/SK/HKO.01/2019 (July 23, 2019) • Acting Head of Business Division/Branch of Manokwari, 04.09/01/SK/HKO.01/2018 (April 21, 2018)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

A.A.N BUDI TRESNAWAN
Vice President Usaha Barang Non-Komersial
Vice President of Non-Commercial Goods Business

Usia Age	52 tahun 52 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Denpasar, 24-03-1971 Denpasar, March 24, 1971
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Denpasar
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Magister Manajemen (M.M) (01-02-2003) Master's Degree in Management (M.M), February 1, 2003
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Usaha Barang Non-Komersial, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Kepala Satuan Pengawas Intern, 06.21/01/SK/HKO.01/2022 (21-08-2022) • Kepala Satuan Pengawas Intern, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • VP Umum, 10.11/01/S/040/2017 (11-10-2017) • KA. SPI, 01.20/01/SK/HKO.01/2016 (20-01-2016) • Kacab. PELNI Jayapura, 07.30/1/SK/HKO.01/2015 (30-07-2015) • Plt. *Mgr*. Operasi Kpl Barang, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (01-04-2015) • *Vice President* SDM, 10.01/1/SK/HKO.01/2014 (01-10-2014) • GM Cabang Semarang, 06.30/1/SK/HKO.01/2014. (30-06-2014) • GM Keagenan , 06/HKO.01/DIR/I/2014 (13-01-2014) • STAF AHLI DIR. OPERASI, 99/HK0.01/DIR/XI/2013 (04-11-2013) • GM Cabang Sorong, 30/HK0.01/DIR/II-2011 (24-02-2011) • Vice President of Non-Commercial Cargo Business, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Head of Internal Audit Unit, 06.21/01/SK/HKO.01/2022 (August 21, 2022) • Head of Internal Audit Unit, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of General Affairs, 10.11/01/S/040/2017 (October 11, 2017) • Head of SPI, 01.20/01/SK/HKO.01/2016 (January 20, 2016) • Branch Manager of PELNI Jayapura, 07.30/1/SK/HKO.01/2015 (July 30, 2015) • Acting Manager of Cargo Operations, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (April 1, 2015) • Vice President of Human Resources, 10.01/1/SK/HKO.01/2014 (October 1, 2014) • General Manager of Semarang Branch, 06.30/1/SK/HKO.01/2014 (June 30, 2014) • General Manager of Agency, 06/HKO.01/DIR/I/2014 (January 13, 2014) • Expert Staff to the Director of Operations, 99/HKO.01/DIR/XI/2013 (November 4, 2013) • General Manager of Sorong Branch, 30/HKO.01/DIR/II-2011 (February 24, 2011)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

ALAMSYAH HALAUWET
Vice President Operasi Angkutan Barang
Vice President of Goods Transport Operations

Usia Age	51 tahun per 31 Desember 2023 51 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Ujung Pandang, 15 Maret 1972 Ujung Pandang, March 15, 1972
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Ahli Nautika Tk I (06-09-2016) Level I Nautical Expert, September 6, 2016
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Operasi Angkutan Barang, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Nakhoda, 05.05/01/SK/HKO.01/2021 (21-05-2021) • Mualim I, 11.03/01/ND/310/2016 (03-11-2016) • Mualim II Yr, 548/DIV.SDM/ADM.PERS/XII/2010 (01-01-2011) • Mualim III, 6578/PL/M/XII (05-12-2000) • Vice President of Cargo Transport Operations, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Captain, 05.05/01/SK/HKO.01/2021 (May 21, 2021) • Chief Officer, 11.03/01/ND/310/2016 (November 3, 2016) • Second Officer, 548/DIV.SDM/ADM.PERS/XII/2010 (January 1, 2011) • Third Officer, 6578/PL/M/XII (December 5, 2000)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

MUHAMMAD ARDIANSYAH
Pjs. *Vice President* Keagenan
Acting Vice President of Agency

Usia Age	33 tahun per 31 Desember 2023 33 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 15 Januari 1990 Jakarta, January 15, 1990
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi Selatan South Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Manajemen Transportasi Laut (27-11-2012) Bachelor's Degree in Sea Transportation Management, November 27, 2012
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. *Vice President* Keagenan, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Kepala Cabang Denpasar/Bali, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (09-06-2023) • *Manager* Perencanaan & Evaluasi Pemasaran Angkutan Kapal Barang, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (07-12-2021) • Kepala Bagian Operasi & Pelayanan, 01.08/01/HKO.01/2018 (09-10-2019) • Pjs. Kepala Bagian Operasi & Pelayanan, 02.28/02/SK/HKO.01/2017 (21-02-2019) • Acting Vice President of Agency, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Branch Manager of Denpasar/Bali, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (June 9, 2023) • Manager of Planning & Marketing Evaluation for Cargo Transport, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (December 7, 2021) • Head of Operations & Services Division, 01.08/01/HKO.01/2018 (October 9, 2019) • Acting Head of Operations & Services Division, 02.28/02/SK/HKO.01/2017 (February 21, 2019)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

LENGGO GENI
Kepala Satuan Pengawas Intern
Head of Internal Audit Unit

Usia Age	55 tahun per 31 Desember 2023 55 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta 16 Maret 1968 Jakarta, March 16, 1968
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S2 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Hukum Master's Degree in Law, Bachelor's Degree in Law
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PELNI (Pesero) (2023-sekarang) • *Vice President* Hukum PT PELNI (Pesero) (2017-2023) • *Vice President* Umum PT PELNI (Pesero) (2016-2017) • Deputi Aset PT PELNI (Pesero) (2015-2016) • Pengawas Intern Area PT PELNI (Pesero) (2013-2015) • Head of Internal Audit Unit, PT PELNI (Persero) (2023-present) • Vice President of Legal Affairs, PT PELNI (Persero) (2017-2023) • Vice President of General Affairs, PT PELNI (Persero) (2016-2017) • Deputy of Assets, PT PELNI (Persero) (2015-2016) • Internal Auditor for the Area, PT PELNI (Persero) (2013-2015)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

ASEP SOPARYA
Kepala DPA-QHSSE
Head of DPA-QHSSE

Usia Age	54 tahun per 31 Desember 2023 54 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Sumedang, 22 Desember 1969 Sumedang, December 22, 1969
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Sumedang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	• ANT I, BP3IP (2012) • S 1 Manajemen, STMT Trisakti (2009) • ANT II, BP3IP (2008) • MPB 3, AKMI (1993) • ANT I, BP3IP (2012) • Bachelor's Degree in Management, STMT Trisakti (2009) • ANT II, BP3IP (2008) • MPB 3, AKMI (1993)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Nakhoda Km. Dorolonda (Maret 2023 – November 2023) • Nakhoda Km. Kelud (November 2020 - Februari 2023) • Nakhoda Km. Kelimutu (September 2018 - September 2020) • Nakhoda Km. Pangrango (Mei 2017- Mei 2018) • Nakhoda Km. Camara N- I (Agustus 2016 - Mei 2017) • Captain of Km. Dorolonda (March 2023 – November 2023) • Captain of Km. Kelud (November 2020 - February 2023) • Captain of Km. Kelimutu (September 2018 - September 2020) • Captain of Km. Pangrango (May 2017 - May 2018) • Captain of Km. Camara N-I (August 2016 - May 2017)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

EVAN ARYANTO
Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan
Acting Head of Corporate Secretariat

Usia Age	34 tahun per 31 Desember 2023 34 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 15 Agustus 1989 Jakarta, August 15, 1989
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Surabaya
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Teknik Perkapalan (02-08-2011) Bachelor's Degree in Naval Engineering, August 2, 2011
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Koordinator *Executive Assistant*, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • *Staff* Madya Divisi Kesekretariatan Perusahaan, 05.24/01/SK/HKO.01/2022 (27-05-2022) • *Manager* Perencanaan & Pengendalian Bahan Bakar & Pelumas Kapal (01-12-2021) • *Senior Personal Assistant*, 03.19/01/SK/HKO.01/2019 (09-10-2019) • Acting Head of Corporate Secretariat, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Coordinator of Executive Assistants, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Senior Staff of Corporate Secretariat Division, 05.24/01/SK/HKO.01/2022 (May 27, 2022) • Manager of Planning & Control for Ship Fuel and Lubricants (December 1, 2021) • Senior Personal Assistant, 03.19/01/SK/HKO.01/2019 (October 9, 2019)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

ANDI SAMSUL HADI
Senior Vice President Pengembangan Strategis
Senior Vice President of Strategic Development

Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2023 53 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Kuningan, 07 Mei 1970 Kuningan, May 7, 1970
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Barat West Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	• Magister Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti (2018 – 2020) • Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada (2005 - 2007) • Sarjana Teknik, Universitas Trisakti (1989 - 1994) • Master's Degree in Islamic Economics, Universitas Trisakti (2018 - 2020) • Master's Degree in Management, Universitas Gajah Mada (2005 - 2007) • Bachelor's Degree in Engineering, Universitas Trisakti (1989 - 1994)
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Senior Vice President* Pengembangan Strategis, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • *Vice President* Perencanaan Korporat & Manajemen Risiko, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • *Senior Manager Corporate Planning*, 07.30/1/SK/HKO.01/2015 (30-07-2015) • *Senior Manager* & Penjualan Angkutan Penumpang, 12.03/2/SK/HKO.01/2014 (03-12-2014) • Senior Vice President of Strategic Development, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of Corporate Planning & Risk Management, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2017) • Senior Manager of Corporate Planning, 07.30/1/SK/HKO.01/2015 (July 30, 2015) • Senior Manager of Passenger Transport Sales, 12.03/2/SK/HKO.01/2014 (December 3, 2014)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

HANA SUHARDI
Vice President Pengembangan Bisnis
Vice President of Business Development

Usia Age	41 tahun per 31 Desember 2023 41 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 15 Desember 1982 Jakarta, December 15, 1982
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	06.09/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Magister Manajemen (23-10-2012) Master's Degree in Management, October 23, 2012
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Pengembangan Bisnis, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (30-03-2023) • *Vice President* Pengelolaan *Asset*, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (06-06-2022) • *Head of SMO*, 02.28/02/SK/HKO.01/2017 (21-2-2019) • Diperbantukan di PT Sarana Bandar Nasional sebagai Manajer Pemasaran dan Pengembangan Usaha, 08.05/19/ND/310/2015 (01-05-2015) • Diperbantukan di PT Sarana Bandar Nasional sebagai Manajer SDM dan Umum, 046/SK/DIR/SBN/X/2014 (06-12-2013) • Vice President of Business Development, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (March 30, 2023) • Vice President of Asset Management, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (June 6, 2022) • Head of SMO, 02.28/02/SK/HKO.01/2017 (February 21, 2019) • Assigned to PT Sarana Bandar Nasional as Marketing and Business Development Manager, 08.05/19/ND/310/2015 (May 1, 2015) • Assigned to PT Sarana Bandar Nasional as HR and General Affairs Manager, 046/SK/DIR/SBN/X/2014 (December 6, 2013)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

TAUFIK M.R
Vice President Perencanaan & Transformasi Perusahaan
Vice President of Corporate Planning and Transformation

Usia Age	38 tahun per 31 Desember 2023 38 years old as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lubuk Sikaping, 15 Februari 1985 Lubuk Sikaping, February 15, 1985
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Pusat Central Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	*Master of Science in Maritime Affairs* (02-12-2012) Master of Science in Maritime Affairs, December 2, 2012
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Vice President* Perencanaan dan Transformasi Perusahaan, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • *Vice President* Usaha Barang Komersial & Penunjang, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • *Vice President* Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (27-05-2022) • Kepala Cabang Nabire, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (01-07-2021) • *Manager* Pengelolaan Penjualan Angkutan Kapal Barang, 05.15/01/SK/HKO.01/2019 (21-05-2019) • Vice President of Corporate Planning and Transformation, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Vice President of Commercial Cargo Business & Support, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of Cargo Transport Marketing for Passenger and Pioneer Ships, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (May 27, 2022) • Branch Manager of Nabire, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (July 1, 2021) • Manager of Cargo Transport Sales Management, 05.15/01/SK/HKO.01/2019 (May 21, 2019)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

ROOSHARDIANTI SURYANDARI, dr.
General Manager Hotel Bahtera
General Manager of Hotel Bahtera

Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2023 47 years as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 23 Januari 1976 Jakarta, January 23, 1976
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Kedokteran Umum (09-08-2000) Bachelor of General Medicine, August 9, 2000
Pengalaman Kerja Work Experience	• *General Manager* Hotel Bahtera, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Direktur Operasi PT PIDC, 02.15/01/SK/HKO.01/2021 (21-03-2021) • Kepala Bagian Manajemen Kinerja & Akreditasi RS PELNI, 810/PUM/XI-2003 (01-11-2003) • General Manager of Hotel Bahtera, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Operations Director of PT PIDC, 02.15/01/SK/HKO.01/2021 (March 21, 2021) • Head of Performance Management & Accreditation Division at PELNI Hospital, 810/PUM/XI-2003 (November 1, 2003)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

ALBAR
General Manager SBU Galangan Pelni Surya
General Manager of SBU Galangan Pelni Surya

Usia Age	51 tahun per 31 Desember 2023 51 years as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lamunre, 23 Desember 1972 Lamunre, December 23, 1972
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	13-12-2011, Ahli Tehnika Tk. I December 13, 2011, Technical Expert Class I
Pengalaman Kerja Work Experience	• 10-11-2023, *General Manager* Galangan Pelni Surya, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 • 22-02-2021, *Vice President* Teknik, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 • 16-07-2017, *Manager* Pemeliharaan & Perbaikan Kapal Penumpang, 05.04/03/SK/HKO.01/17 • 21-03-2017, *Manager Passenger Ship Repair & Maintenance*, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 • 30-04-2015, *Manager Passenger Ship Repair & Maintenance*, 04.30/1/SK/HKO.01/2015 • November 10, 2023, General Manager of SBU Galangan Pelni Surya, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 • February 22, 2021, Vice President Technical, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 • July 16, 2017, Manager of Maintenance & Repair of Passenger Ships, 05.04/03/SK/HKO.01/17 • March 21, 2017, Manager of Passenger Ship Repair & Maintenance, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 • April 30, 2015, Manager of Passenger Ship Repair & Maintenance, 04.30/1/SK/HKO.01/2015

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2023)
EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2023)

AGUSTINUS PRIMA WICAKSONO
Pjs. *Vice President* Hukum
Acting Vice President of Legal Affairs

Usia Age	38 tahun per 31 Desember 2023 38 years as of December 31, 2023
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Mojokerto, 27 Maret 1985 Mojokerto, March 27, 1985
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Pusat Central Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	29-03-2008, S1 Hukum Perdata March 29, 2008, Bachelor of Civil Law
Pengalaman Kerja Work Experience	• 10-11-2023, Pjs. *Vice President* Hukum, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 • 27-05-2022,Kepala Cabang Nabire, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 • 01-02-2021, Kepala Cabang Kendari, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 • 04-05-2017, *Manager* Peraturan & Bantuan Hukum, 02.21/01/SK/HKO.01/2019 • 02-02-2015, Pjs. *Manager* Peraturan & Bantuan Hukum, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 • October 11, 2023, Acting Vice President Legal, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 • May 27, 2022, Branch Manager Nabire, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 • February 1, 2021, Branch Manager Kendari, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 • May 4, 2017, Manager of Regulations & Legal Assistance, 02.21/01/SK/HKO.01/2019 • February 2, 2015, Acting Manager of Regulations & Legal Assistance, 05.04/03/SK/HKO.01/2017

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI 5% ATAU LEBIH SAHAM

SHAREHOLDER COMPOSITION OF HOLDERS WITH 5% OR MORE SHARES

PELNI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham 100%.

PELNI is a State-Owned Enterprise (BUMN) wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, with 100% share ownership.

PERSENTASE KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG ATAS SAHAM OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

INDIRECT SHARE OWNERSHIP PERCENTAGE BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham.

As of December 31, 2023, there are no members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company who own shares.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN PER AKHIR TAHUN BUKU BERDASARKAN KLASIFIKASI

NUMBER OF SHAREHOLDERS AND OWNERSHIP PERCENTAGE PER END OF THE FISCAL YEAR BASED ON CLASSIFICATION

PELNI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham 100%. Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:

1. kepemilikan institusi lokal;
2. kepemilikan institusi asing;
3. kepemilikan individu lokal; dan
4. kepemilikan individu asing.

PELNI is a State-Owned Enterprise (BUMN) wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, with 100% share ownership. Therefore, as of December 31, 2023, there are no classifications of the number of shareholders and ownership percentages per end of the fiscal year based on the following categories:

1. Local institutional ownership;
2. Foreign institutional ownership;
3. Local individual ownership; and
4. Foreign individual ownership.

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

INFORMATION REGARDING THE MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Major and Controlling Shareholder

Pemerintah Republik Indonesia
Government of the Republic of Indonesia

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
COMPANY GROUP STRUCTURE

Pada 31 Desember 2023, PELNI beroperasi dengan kepemilikan terhadap 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) dengan kepemilikan saham 99,47% dan PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dengan kepemilikan saham 99,50%.

Struktur grup PT PELNI (Persero) pada 31 Desember 2023 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

As of December 31, 2023, PELNI operates with ownership of two subsidiaries: PT Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) with a 99.47% shareholding and PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) with a 99.50% shareholding.

The group structure of PT PELNI (Persero) as of December 31, 2023, can be seen in the diagram below:

Struktur Grup PELNI
PELNI Group Structure

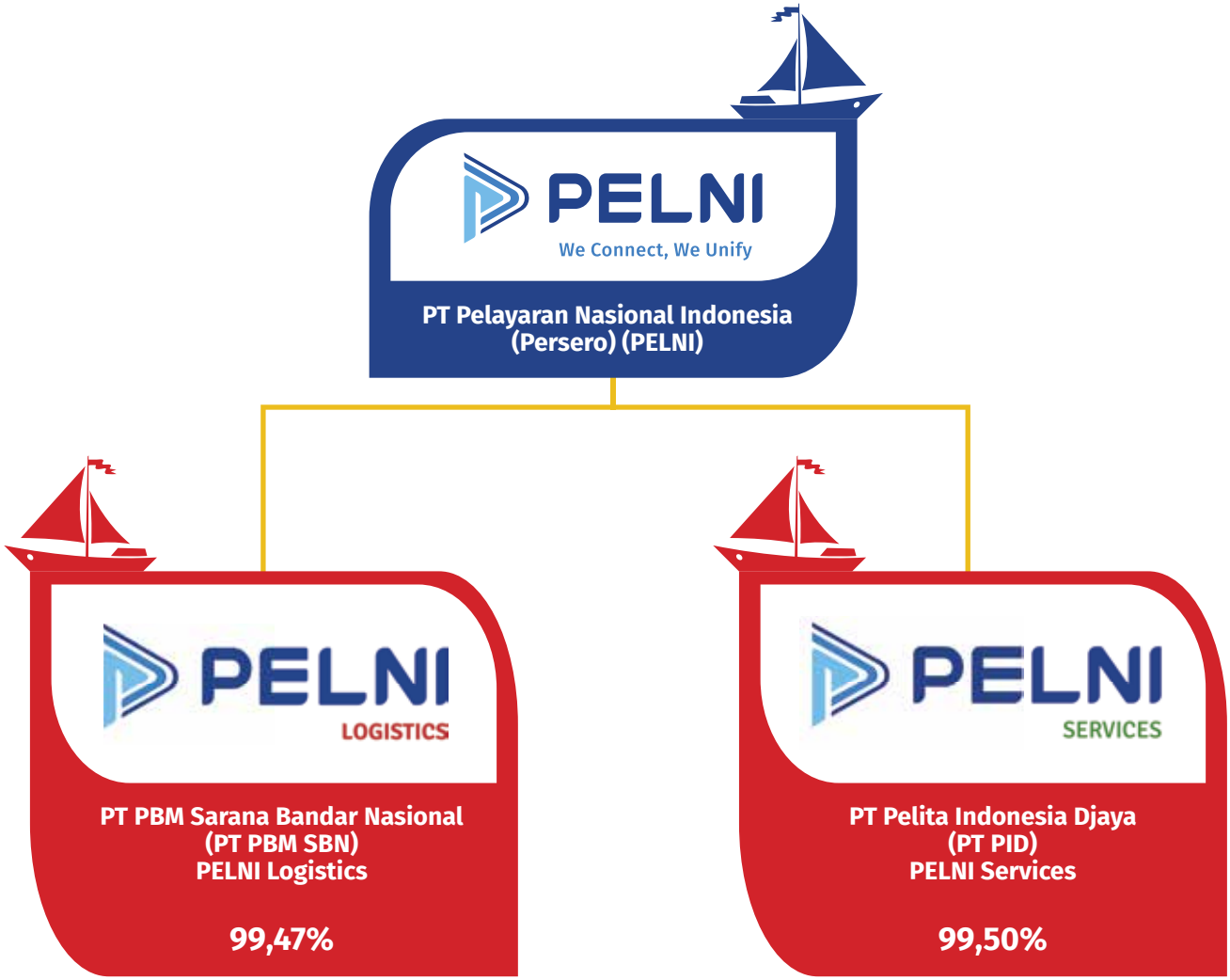

ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

Daftar entitas anak dan entitas asosiasi PT PELNI (Persero) pada 31 Desember 2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

The list of subsidiaries and associates of PT PELNI (Persero) as of December 31, 2023, can be seen in the table below:

No	Nama Perusahaan Company Name	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Bidang Usaha Line of Business	Status Operasi Operational Status	Total Aset 31 Desember 2023 Total Assets as of December 31, 2023
1	PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)	99,47%	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, *custom clearance*, pedalaman *depo*. transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.	Beroperasi In Operation	Rp576.000.030.489
2	PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)	99,50%	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal *General trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services, entertainment services on board.*	Beroperasi In Operation	Rp327.725.790.379

INFORMASI MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Pengungkapan informasi mengenai masing-masing anak perusahaan PELNI adalah sebagai berikut:

PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL (PT PBM SBN)

BIDANG USAHA
PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) merupakan anak perusahaan PELNI yang beroperasi pada bidang usaha Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, *custom clearance*, pedalaman *depo/transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.*

JUMLAH ASET DAN LABA
Pada tahun 2023, PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) membukukan laba sebesar Rp48.914.236.069 dengan perolehan laba atau meningkat sebesar 15,295% dibanding tahun 2022 yang sejumlah Rp42.425.241.965,-

INFORMATION ON SUBSIDIARIES

The disclosure of information regarding each subsidiary of PELNI is as follows:

PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL (PT PBM SBN)

LINE OF BUSINESS
PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) is a subsidiary of PELNI that operates in transportation, loading and unloading, goods shipping, warehousing, marine terminal operations, trucking, customs clearance, and inland depot.

TOTAL ASSETS AND PROFITS
In 2023, PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) recorded a profit of Rp 48,914,236,069, which represents an increase of 15.295% compared to 2022, which was Rp 42,425,241,965.

ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

SUSUNAN MANAJEMEN
Susunan dan nama masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

MANAGEMENT STRUCTURE
The composition and names of the members of the Board of Commissioners and Directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) as of December 31, 2023, are as follows:

Susunan Manajemen PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)
Management Structure of PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	A.A.N. Budi Tresnawan
Komisaris Commissioner	Tatang R. Dasuki
Direksi Board of Director	
Direktur Utama President Director	Edward Tobing
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and Human Resources	Affan Taufan
Direktur Operasi dan Komersial Director of Operations and Commercial	Antonius L Gaol

Alamat dan Informasi Kontak
Address and Contact Information

Alamat Address	Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-14, Cempaka Putih, Jakarta - 10510
Informasi Kontak Contact Information	T : 021- 4287 9000 F : 021-4287 8389
Email	info@saranabandarlogistik.co.id
Situs Web Website	https://saranabandarlogistik.co.id

PT PELITA INDONESIA DJAYA (PT PID)

BIDANG USAHA
PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) merupakan anak Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Jasa Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal.

PT PELITA INDONESIA DJAYA (PT PID)

LINE OF BUSINESS
PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) operates in general trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services, entertainment services on board.

ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

JUMLAH ASET DAN LABA
Pada tahun 2023, PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) membukukan aset sejumlah Rp327.725.790.379,- dengan perolehan laba mencapai Rp28.172.680.577,-, atau meningkat 8,648% dibanding tahun 2022 yang sejumlah Rp25.930.164.803,-.

SUSUNAN MANAJEMEN
Susunan dan nama masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

TOTAL ASSETS AND PROFITS
In 2023, PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) recorded assets totaling Rp 327,725,790,379 with a profit of Rp 28,172,680,577, marking an increase of 8.648% compared to 2022, which was Rp 25,930,164,803.

MANAGEMENT STRUCTURE
The composition and names of the Board of Commissioners and Directors of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) as of December 31, 2023, are as follows:

Susunan Manajemen PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)
Management Structure of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Komisaris Utama President Commissioner	Mardiyanto
Komisaris Commissioner	Anton Mart Irianto
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Sukendra
Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HR & Risk Management	Suparno
Direktur Operasional & Komersial Director of Operations & Commercial	Didik Martono

Alamat dan Informasi Kontak
Address and Contact Information

Alamat Address	Ruko Cempaka Mas Blok Q No.5 Jl. Letjend Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat Ruko Cempaka Mas Blok Q No.5 Jl. Letjend Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran, Central Jakarta
Informasi Kontak Contact Information	T: 021-42883740
Email	corporate@pidc.co.id
Situs Web Website	www.pelniservices.co.id

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF STOCK LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2023, PELNI tidak pernah melakukan penawaran umum perdana saham kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi apa pun terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham, aksi korporasi, serta nama bursa pencatatan saham untuk diungkapkan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2023, PELNI has never conducted an initial public offering. Therefore, there is no information regarding stock issuance years, the number of shares, nominal value of shares, offering prices, corporate actions, or the name of the stock exchange to be disclosed in this Annual Report.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2023, PELNI tidak melakukan pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi apa pun terkait nama efek, nilai penawaran, nama bursa pencatatan saham, hingga peringkat efek untuk diungkapan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2023, PELNI has not listed any other securities. Consequently, there is no information regarding the names of the securities, offering values, the name of the stock exchange, or the ratings of the securities to be disclosed in this Annual Report.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Nama KAP Public Accounting Firm Name	Djoko, Sidik, & Indra
Alamat Address	Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. lmam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia. Gaha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia.
NIUKAP Public Accounting Firm License Number	959/KM.1/2014
Biaya Jasa Audit Audit Service Fee	Rp527.250.000 (Nilai sudah include PPN 11%) Rp527,250,000 (including 11% VAT)
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Audit Laporan Keuangan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Jasa Audit Kepatuhan, Jasa Laporan Key Performance Indicators dan Jasa Laporan Penyertaan Modal Negara (PMN). Financial Statement Audit Services and Financial Statements for Micro and Small Business Funding Programs (PUMK), Compliance Audit Services, Key Performance Indicator Reporting Services, and State Capital Injection (PMN) Reporting Services.
Periode Penugasan Assignment Period	1 November 2023 s/d 20 April 2024 November 1, 2023, to April 20, 2024
Jasa lain yang diberikan Other Services Provided	Jasa *Agreed Upon* dan Jasa Reviu Penilaian *Key Performance Indicators* Manajemen dengan biaya pekerjaan masing-masing sebesar Rp 116.550.000 *include* PPN 11% periode sampai 30 April 2024. The agreed-upon services and the review of the management's Key Performance Indicators are each priced at Rp 116,550,000, including 11% VAT, for the period ending April 30, 2024.

Notaris
Notaries

Nama Lembaga Name of Institution	Kantor Notaris Ida Adiningsih, S.H.,
Alamat Address	Jl. Kembang Raya No.15A 7, RT.7/RW.4, Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat

Nama Lembaga Name of Institution	Kantor Notaris & PPAT Emmy Yatmini Noordjasmani, S.H.,
Alamat Address	Jl. Panglima Polim Raya No.107D, Jakarta Selatan

Konsultan Hukum
Legal Consultants

Nama Lembaga Name of Institution	Kantor Hukum Toni Hendarto, S.H., M.H., MM & Rekan Toni Hendarto, S.H., M.H., MM & Partners Law Office
Alamat Address	Jl. Pemuda Nomor 14B, Pulogadung, Jakarta Timur Jl. Pemuda No. 14B, Pulogadung, East Jakarta

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Nama Lembaga Name of Institution	Namora Sabungan Law Firm
Alamat Address	Jl. Semayang 5 No. 11, Cakung, Jakarta Timur. Jl. Semayang 5 No. 11, Cakung, East Jakarta

Nama Lembaga Name of Institution	Destivano Wibowo & Associates
Alamat Address	Menara Karya Lantai 7, Unit B & C, Jl. H. R. Rasuna Said Block X-5 Kav 1-2, Jakarta Menara Karya 7th Floor, Unit B & C, Jl. H. R. Rasuna Said Block X-5 Kav 1-2, Jakarta

Nama Lembaga Name of Institution	Law Office Iran Sahril & Partner
Alamat Address	Apartemen Tamansari Sudirman, Tower B, Lantai 11/09 Jl. Bek Murad No. 42, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan Tamansari Sudirman Apartment, Tower B, 11th Floor, Unit 09 Jl. Bek Murad No. 42, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Sampai dengan 31 Desember 2023, PELNI tidak mencatatkan saham ataupun efek lain pada bursa mana pun.

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

As of December 31, 2023, PELNI has not listed shares or other securities on any exchange.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

Sampai dengan 31 Desember 2023, PELNI tidak mencatatkan saham ataupun efek lain pada bursa mana pun.

CREDIT RATING AGENCIES

As of December 31, 2023, PELNI has not listed shares or other securities on any exchange.

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
COMPANY WEBSITE INFORMATION

PELNI memiliki komitmen yang kuat untuk dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, secara transparan dan akurat. Komitmen tersebut antara lain terwujud melalui keberadaan situs web PELNI yang dapat diakses pada alamat https://www.pelni.co.id/.

PELNI is committed to providing easy access to information for shareholders and all stakeholders transparently and accurately. This commitment is realized through the PELNI website, which can be accessed at [https://www.pelni.co.id] (https://www.pelni.co.id).

Dengan mengacu pada standar penerapan terbaik *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk ketentuan yang terdapat di dalam Kriteria Penilaian *Annual Report Award* serta Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik, situs *web* PELNI telah memuat sejumlah informasi sebagai berikut:

1. Nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan;

In accordance with best practices in Good Corporate Governance (GCG) implementation, including the provisions in the Annual Report Award Criteria and OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies, the PELNI website includes the following information:

1. Name, address, and contact of the head office and/or representative offices;

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
COMPANY WEBSITE INFORMATION

2. Riwayat singkat;
3. Struktur organisasi;
4. Informasi Pemegang Saham;
5. Isi Kode Etik (Etika Bisnis);
6. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
7. Profil Direksi dan Dewan Komisaris;
8. Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.
9. Dokumen Anggaran Dasar.

Selain informasi yang disebutkan di atas, Website PT PELNI (Persero) juga membuat informasi yang lebih spesifik, yaitu:

2. Brief history;
3. Organizational structure;
4. Shareholder information;
5. Code of Ethics (Business Ethics);
6. General Meeting of Shareholders (GMS) information;
7. Profiles of the Board of Directors and Board of Commissioners;
8. Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit;
9. Articles of Association documents.

In addition to the information mentioned above, PT PELNI (Persero) Website also provides more specific information, including:

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
COMPANY WEBSITE INFORMATION

Tentang Kami About Us	**Profil Perusahaan** • BOD/BOC **Company Profile** • BOD/BOC
	Sejarah History
	Visi & Misi Vision & Mission
	Penghargaan Awards
	Keterbukaan Informasi • Laporan Tahunan • Pemegang Saham • Struktur Organisasi • Nilai Perusahaan Information Disclosure • Annual Reports • Shareholders • Organizational Structure • Corporate Values
Reservasi Tiket Ticket Reservations	Reservasi Tiket PT PELNI (Persero) PT PELNI (Persero) Ticket Reservations
Jasa Logistik Logistics Services	• Tol Laut • Kapal Ternak • Sea Toll • Livestock Ships
Layanan Services	**Gaya Hidup** • Wisata Bahari • MICE **Lifestyle** • Marine Tourism • MICE
	Layanan Lainnya • Hotel Bahtera • Galangan Kapal • Keagenan Kapal • PELNI Aset **Other Services** • Bahtera Hotel • Shipyard • Ship Agency • PELNI Assets
Galeri Gallery	• Perintis • Tol Laut (Kargo) • Pioneer • Sea Toll (Cargo)

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
COMPANY WEBSITE INFORMATION

Berita News	Berita News *Press Release* Press Release
	Event Event
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	• Pedoman *Board Manual* • Pedoman COC • Pedoman Gratifikasi • Pedoman WBS • Pedoman UPG • Pedoman E-LHKPN • Pedoman SMAP • Pedoman Pengadaan • Barang dan Jasa • Piagam Audit Internal • Laporan GCG • Board Manual Guidelines • Code of Conduct Guidelines • Gratification Guidelines • Whistleblowing System Guidelines • Internal Control Unit Guidelines • E-LHKPN Guidelines • Anti-Bribery Management System Guidelines • Procurement Guidelines • Goods and Services Guidelines • Internal Audit Charter • GCG Report

PELNI
We Connect, We Unify

04

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Perseroan meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan secara berkesinambungan menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi pekerja agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang begitu pesat serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja. Perseroan begitu memperhatikan dengan baik kualitas, profesionalitas dan efektivitas SDM dalam menjaga, serta menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM setiap tahunnya. Komitmen-komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan dengan mengacu pada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh SDM. Secara mendasar, seluruh proses tersebut diterapkan sesuai rencana jangka panjang yang termuat di dalam *Roadmap* Pengelolaan SDM PELNI 2020-2024.

The Company firmly believes that capable Human Resources (HR) are pivotal in achieving the company's vision and mission. To this end, the Company continuously implements education and competency development programs for employees to be more competitive in dealing with rapid changes and developments, thereby enhancing effectiveness and productivity in performance. The Company pays meticulous attention to the quality, professionalism, and effectiveness of HR in maintaining and fostering loyalty and productivity annually. These commitments are demonstrated through the provision of training and development of HR, adhering to a comprehensive framework that encompasses all aspects and development methods for all HR. Fundamentally, all these processes are implemented according to the long-term plan outlined in the PELNI HR Management Roadmap 2020-2024.

KEBIJAKAN INTERNAL PENGELOLAAN SDM

Sampai dengan 2023, PELNI menerapkan sejumlah kebijakan internal sebagai dasar pengelolaan SDM sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta pencapaian visi dan misi Perseroan. Sejumlah aturan internal pengelolaan SDM PELNI adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 04.29/03/SK/ HKO.01/2021 tentang Hak-Hak Kesejahteraan Pegawai PT PELNI (Persero);
2. Surat Edaran Direktur SDM & Umum Nomor 06.17/01/01/SE/HKO.03/2021 tentang Budaya Berdoa Bersama dan *Morning Briefing* di Lingkungan PT PELNI (Persero);
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 06.30/01/SK/HKO.01/2021 tentang Pengawasan Kinerja Kapal dan Cabang di PT PELNI (Persero);
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.26/02/SK/HKO.01/2021 tentang Penanganan Awak Kapal Meninggal di Atas Kapal PT PELNI (Persero);
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.07/01/SK/HKO.01/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Unit Bisnis Strategis (*Strategic Business Unit*/SBU) Galangan Pelni Surya;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 09.22/01/SK/HKO.01/2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai PT PELNI (Persero);
7. Surat Keputusan Direksi Nomor 09.24/04/SK/HKO.01/2021 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (PLH.) dan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT.) di PT PELNI (Persero);

INTERNAL HR MANAGEMENT POLICIES

Until 2023, PELNI has implemented several internal policies as the basis for HR management in accordance with the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and in achieving the Company's vision and mission. The internal HR management rules for PELNI are as follows:

1. Board of Directors Decision No. 04.29/03/SK/ HKO.01/2021 regarding Employee Welfare Rights at PT PELNI (Persero);
2. HR & General Affairs Director Circular No. 06.17/01/01/SE/HKO.03/2021 about the Culture of Joint Prayer and Morning Briefing at PT PELNI (Persero);
3. Board of Directors Decision No. 06.30/01/SK/HKO.01/2021 regarding Performance Supervision of Ships and Branches at PT PELNI (Persero);
4. Board of Directors Decision No. 07.26/02/SK/HKO.01/2021 on Handling Crew Deaths Aboard Ships of PT PELNI (Persero);
5. Board of Directors Decision No. 07.07/01/SK/HKO.01/2022 on the Organizational Structure and Governance of the Strategic Business Unit (SBU) Pelni Surya Yard;
6. Board of Directors Decision No. 09.22/01/SK/HKO.01/2021 on Guidelines for Employee Performance Assessment at PT PELNI (Persero);
7. Board of Directors Decision No. 09.24/04/SK/HKO.01/2021 on Guidelines for Appointment of Acting Daily Officials (PLH.) and Temporary Task Officials (PLT.) at PT PELNI (Persero);

8. Surat Keputusan Direksi Nomor 10.07/01/SK/HKO.01/2021 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Pegawai Terpapar COVID-19;
9. Surat Keputusan Direksi Nomor 11.04/01/SK/HKO.01/2021 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Alih Daya di Lingkungan PT PELNI (Persero);
10. Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT. PELNI (Persero);
11. Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/02/SK/HKO.01/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero);
12. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat;
13. Surat Keputusan Direksi Nomor 08.07/02/SK/HKO.01/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 03.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat;
14. Surat Keputusan Direksi Nomor 11.30/03/SK/HKO.01/2021 tentang Standar Kompetensi Direksi Anak Perusahaan dan Pejabat Struktural Satu Level di Bawah Direksi di Lingkungan PT PELNI (Persero);
15. Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi Kantor Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
16. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.30/01/SK/HKO.01/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi Kantor Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
17. Surat Keputusan Direksi nomor 09.22/01/SK/HKO.01/2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
18. Surat Keputusan Direksi nomor 07.07/02/SK/HKO.01/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola *Unit Business Strategic* (SBU) Hotel Bahtera;
19. Surat Keputusan Direksi Nomor 01.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pedoman Tata Nilai Utama (*Core Values*) Akhlak PT PELNI (Persero);
20. Surat Keputusan Direksi Nomor 02.03/02/SK/ HKO.01/2022 tentang Pedoman *Knowledge Management System* di PT PELNI (Persero)
21. Surat Keputusan Direksi nomor 02.17/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pedoman Penilaian Klasifikasi Cabang;
22. Instruksi Direktur SDM & Umum Nomor 04.06/01/INS/HKO.03/2022 tentang Pelaksanaan *Self Directed Learning* (SDL) dan *Sharing Knowledge* di Lingkungan di PT PELNI (Persero);

8. Board of Directors Decision No. 10.07/01/SK/HKO.01/2021 on Health Protocols for Handling COVID-19 Exposed Employees;
9. Board of Directors Decision No. 11.04/01/SK/HKO.01/2021 on Management of Outsourced Labor at PT PELNI (Persero);
10. Board of Directors Decision No. 01.27/01/SK/HKO.01/2023 on Organizational Structure, Main Tasks and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero);
11. Board of Directors Decision No. 02.02/02/SK/HKO.01/2023 on Amendment to Board of Directors Decision No. 01.27/01/SK/HKO.01/2023 on Organizational Structure, Main Tasks and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero);
12. Board of Directors Decision No. 03.02/01/SK/HKO.01/2023 on Work Unit and Position Formation within the Head Office Scope;
13. Board of Directors Decision No. 08.07/02/SK/HKO.01/2023 on Amendment to Board of Directors Decision No. 03.02/01/SK/HKO.01/2023 on Work Unit and Position Formation within the Head Office Scope;
14. Board of Directors Decision No. 11.30/03/SK/HKO.01/2021 on Competence Standards for Subsidiary Directors and Structural Officials One Level Below the Board at PT PELNI (Persero);
15. Board of Directors Decision No. 02.02/01/SK/HKO.01/2023 on Organizational Structure, Main Tasks & Functions of Branch Offices of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
16. Board of Directors Decision No. 03.30/01/SK/HKO.01/2023 on Amendment to Board of Directors Decision No. 02.02/01/SK/HKO.01/2023 on Organizational Structure, Main Tasks & Functions of Branch Offices of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
17. Board of Directors Decision No. 09.22/01/SK/HKO.01/2021 on Employee Performance Assessment;
18. Board of Directors Decision No. 07.07/02/SK/HKO.01/2022 on Organizational Structure and Governance of the Strategic Business Unit (SBU) Hotel Bahtera;
19. Board of Directors Decision No. 01.24/01/SK/HKO.01/2022 on Guidelines for Core Values Ethics of PT PELNI (Persero);
20. Board of Directors Decision No. 02.03/02/SK/ HKO.01/2022 on Guidelines for Knowledge Management System at PT PELNI (Persero);
21. Board of Directors Decision No. 02.17/01/SK/HKO.01/2022 on Guidelines for Branch Classification Assessment;
22. HR & General Affairs Director Instruction No. 04.06/01/INS/HKO.03/2022 on Implementation of Self Directed Learning (SDL) and Knowledge Sharing at PT PELNI (Persero);

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

23. Surat Edaran Direktur SDM & Umum Nomor 08.16/SE/HKO.03/2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan *Medical Check-UP* (MCU) dan General Check-Up (GCU) Pegawai PT PELNI (Persero).
24. Surat Keputusan Direksi Nomor : 164/HKO.01/DIR/XII-2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Kepangkatan Pegawai Di PT PELNI (Persero);
25. Surat Keputusan Direksi Nomor : 01.04/01/SK/HKO.01/2018 tentang Penetapan Jam Kerja Dan Kehadiran Di Lingkungan PT PELNI (Persero);
26. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT PELNI (Persero);
27. Nota Dinas Direktur SDM & Umum Nomor 01.08/01/ND-B/DS/2023 perihal Pemberlakuan Jam Kerja di Lingkungan Kantor Pusat, Kantor Cabang dan SBU PT PELNI (Persero);
28. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.08/01/SK/HKO.01/2023 tentang Penetapan Pemberlakuan PKB Periode 2023 – 2025 Antara PT PELNI (Persero) Dengan Serikat Pekerja PELNI;
29. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.14/01/SK/HKO.01/2023 tentang Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
30. Surat Keputusan Direksi Nomor 01.02/03/SK/HKO.01/2024 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Di PT PELNI (Persero);
31. Surat Keputusan Direksi Nomor 05.06/01/SK/HKO.01/2024 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Di PT PELNI (Persero)

PETA JALAN PENGELOLAAN SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam pertumbuhan perusahaan. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan SDM secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat memiliki SDM yang terampil, kompeten, berkarakter, dan memiliki loyalitas kerja. Berangkat dari pemahaman tersebut, PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk melakukan pengelolaan SDM secara konsisten dan berkesinambungan yang dituangkan dalam peta jalan pengelolaan SDM 2020-2024.

23. HR & General Affairs Director Circular No. 08.16/SE/HKO.03/2022 on Medical Check-Up (MCU) and General Check-Up (GCU) Requirements for Employees of PT PELNI (Persero);
24. Board of Directors Decision No. : 164/HKO.01/DIR/XII-2010 on Guidelines for Employee Promotion in Rank at PT PELNI (Persero);
25. Board of Directors Decision No. : 01.04/01/SK/HKO.01/2018 on Work Hours and Attendance at PT PELNI (Persero);
26. Board of Directors Decision No. 03.04/01/SK/HKO.01/2020 on Employee Discipline Regulations at PT PELNI (Persero);
27. HR & General Affairs Director Memo No. 01.08/01/ND-B/DS/2023 on Work Hours Implementation in the Head Office, Branch Offices and SBU of PT PELNI (Persero);
28. Board of Directors Decision No. 07.08/01/SK/HKO.01/2023 on Implementation of Collective Labor Agreement (CLA) Period 2023 – 2025 Between PT PELNI (Persero) and PELNI Workers Union;
29. Board of Directors Decision No. 07.14/01/SK/HKO.01/2023 on Employee Rights Following Termination of Employment;
30. Board of Directors Decision No. 01.02/03/SK/HKO.01/2024 on Retirement Age Limits for Employees at PT PELNI (Persero);
31. Board of Directors Decision No. 05.06/01/SK/HKO.01/2024 on Awards for Reporting Violations (Whistleblowing System) at PT PELNI (Persero).

HR MANAGEMENT ROADMAP

Human Resources (HR) are a key factor in the company's growth. Therefore, it is crucial for the company to manage HR effectively and efficiently, enabling the company to have skilled, competent, characterful, and loyal employees. Building on this understanding, PT PELNI (Persero) is committed to consistently and sustainably managing HR, as outlined in the HR Management Roadmap 2020-2024.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

2020	2021	2022	2023	2024
***Survival* (Dampak** COVID-19) (Impact of COVID-19)	***Business Recovery* Pasca COVID** Post-COVID Business Recovery	***Market Expansion***	***Business Expansion***	***Profitable Growth***
• Strategi Efisiensi Biaya atas dampak *pandemic* • Divestasi *non-core business* • *Operational Excellence* • Sosialisasi Budaya (AKHLAK)	• Peningkatan Kapasitas Angkutan Barang • Optimalisasi Rute Komersial dan Penugasan • *Integrated Talent Management & Performance System* • Penguatan Digitalisasi Proses bisnis • *Roll Out Sistem Online Logistics*	• Optimalisasi Aset • Skala Bisnis Angkutan Barang melalui kerja sama dengan instansi • Peningkatan Bisnis Wisata • Inisiasi pengembangan bisnis Angkutan barang kawasan Asia Tenggara	• Penguatan aktivitas Logistik Maritim melalui restrukturisasi Sarana Bandar *Indotrading* • Pengembangan Bisnis *Crew Manning* • *Maritime Training Centre* • Penguatan aktivitas Logistik Maritim melalui restrukturisasi PT SBL	• Optimalisasi Pendapatan dari Portofolio bisnis komersial • Peningkatan kapasitas atas alat produksi Angkutan Barang • Pengembangan Bisnis *Crew Manning & Maritime Training Centre* ke Asia Tenggara
• Cost Efficiency Strategy due to the Pandemic Impact • Divestment of Non-Core Business • Operational Excellence • Socialization of Culture (AKHLAK)	• Increase in Cargo Transport Capacity • Optimization of Commercial Routes and Assignments • Integrated Talent Management & Performance System • Strengthening of Business Process Digitalization • Roll Out of Online Logistics System	• Asset Optimization • Business Scaling in Cargo Transport through Collaboration with Agencies • Tourism Business Enhancement • Initiation of Cargo Transport Business Development in Southeast Asia	• Strengthening of Maritime Logistics Activities through Restructuring of Sarana Bandar Indotrading • Crew Manning Business Development • Maritime Training Centre • Strengthening of Maritime Logistics Activities through Restructuring of PT SBL	• Optimization of Revenue from Commercial Business Portfolio • Increase in Production Equipment Capacity for Cargo Transport • Development of Crew Manning & Maritime Training Centre to Southeast Asia

PROGRAM KERJA SDM 2023

PELNI menerapkan pengelolaan SDM berdasarkan program kerja SDM 2023, dengan pengungkapan program kerja dan aktivitas yang telah dilakukan sebagai berikut:

2023 HR WORK PROGRAM

PELNI has established the following 2023 HR Work Program, detailing the implemented programs and activities:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

NO	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	AKTIVITAS YANG SUDAH DILAKUKAN ACTIVITIES ALREADY CONDUCTED
1	Rekrutmen pegawai darat dan *experienced hire* Recruitment of onshore employees and experienced hires	1. Membuat usulan untuk mengisi pegawai *structural* yang MPP dan formasi kosong. 2. Telah melakukan rekrutmen sejumlah 197 orang dengan rincian sebagai berikut: • *Pro hire* : 5 orang • Rekrutmen Bersama BUMN : 5 orang • Rekrutmen PELNI : 187 orang 1. Prepare proposals for filling structural positions that are due for mandatory retirement and are currently vacant. 2. Recruitment has been conducted for 197 individuals, detailed as follows: • Pro hire: 5 individuals • Joint State-Owned Enterprises Recruitment: 5 individuals • PELNI Recruitment: 187 individuals
2	Mutasi Pegawai Employee transfers	Dalam periode 2023, sebanyak 678 pegawai yang dimutasikan baik rotasi, mutasi dan demosi guna mengisi formasi sekaligus penyegaran. Sebanyak 143 pejabat struktural yang dimutasi dan 535 pegawai supervisor dan pelaksana yang dimutasi. During the year 2023, a total of 678 employees were subject to rotation, transfer, and demotion to fill positions and to provide fresh perspectives. Of these, 143 structural officials were relocated, along with 535 supervisory and operational staff.
3	Asesmen kompetensi struktural Assessment of structural competencies	Pada tahun 2023 telah dilaksanakan *assessment* untuk 25 pegawai pada level BOD-1 In 2023, an assessment was conducted for 25 employees at the BOD-1 level.
4	Pelaksanaan pelatihan, baik *in-house training*, *public training* dan sertifikasi Implementation of training, including in-house training, public training, and certification	Pelaksanaan pelatihan menggunakan metode *offline, online* dan *hybrid*. Pelatihan *online* dilaksanakan melalui *e-learning* dan Zoom. Training was administered using offline, online, and hybrid methods. Online training was carried out through e-learning platforms and Zoom.
5	Pelaksanaan magang bersertifikat Implementation of certified internships	1. Program Magang MSIB (Kampus Merdeka) Program terlaksana dengan jumlah pendaftar mencapai 18.309 Mahasiswa dengan jumlah kuota adalah 72 Mahasiswa yang di tempatkan sebagai berikut: • Penempatan Kantor Pusat sejumlah 32 peserta • Penempatan Cabang dan Persmat Priok sejumlah 35 peserta ; dan • Penempatan SBU sejumlah 5 peserta 2. Program Magang generasi bertalenta (MAGENTA) BUMN sebanyak 9 (sembilan) peserta 3. Program Magang Kompetensi sebanyak 3 (tiga) Peserta. 1. The MSIB Internship Program (Kampus Merdeka) was successfully conducted with 18,309 students registering, while the available quota was 72 students. The placements were as follows: • Central Office hosted 32 participants. • Branch and Persmat Priok accommodated 35 participants; and • Strategic Business Unit (SBU) hosted 5 participants. 2. The MAGENTA (Generasi Bertalenta) BUMN Internship Program included 9 (nine) participants. 3. The Competency Internship Program included 3 (three) participants.

NO	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	AKTIVITAS YANG SUDAH DILAKUKAN ACTIVITIES ALREADY CONDUCTED
6	Pelaksanaan program penjenjangan dan purnabakti Implementation of career development programs and retirement planning	Program penjenjangan yang sudah dilakukan: 1. Diklat Managerial Perwira Kapal Tingkat Muda Tahun 2023 Pada Tanggal 07 -11 Agustus 2023 2. Diklat Managerial Perwira Kapal Tingkat Madya Tahun 2023 pada tanggal 02 - 06 Oktober 2023 3. Diklat Managerial Perwira Kapal Tingkat Utama Tahun 2023 pada tanggal 23-27 Oktober 2023 4. Pra Purnabakti Pegawai Laut Tahun 2023 pada tanggal 29 Agustus - 01 September 2023 5. Diklat Teknis Tingkat Mula Angkatan XII Tahun 2023 pada 07 -16 Agustus 2023 6. Diklat Teknis Tingkat Lanjut Angkatan XIII Tahun 2023 Pada 02-10 Agustus 2023 7. Diklat Managerial Tingkat Muda Angkatan XV Tahun 2023 pada tanggal 28 Agustus - 14 September 2023 8. Diklat Managerial Tingkat Madya Angkatan XV Tahun 2023 pada tanggal 25 September - 12 Oktober 2023 9. Diklat Managerial Tingkat Utama Angkatan IX Tahun 2023 pada tanggal 16 Oktober -02 November 2023 10. Pelatihan Pra Purnabakti Pegawai Darat Tahun 2023 pada tanggal 14-17 Juni 2023 Implemented Career Development Programs: 1. 2023 Junior Officer Managerial Training Course, held on August 7-11, 2023. 2. 2023 Intermediate Officer Managerial Training Course, scheduled for October 2-6, 2023. 3. 2023 Senior Officer Managerial Training Course, conducted from October 23-27, 2023. 4. 2023 Pre-Retirement Training for Maritime Employees, taking place from August 29 to September 1, 2023. 5. Technical Training Course Level Beginner, Batch XII, Year 2023, from August 7-16, 2023. 6. Advanced Technical Training Course, Batch XIII, Year 2023, scheduled for August 2-10, 2023. 7. 2023 Junior Managerial Training, Batch XV, held from August 28 to September 14, 2023. 8. 2023 Intermediate Managerial Training, Batch XV, scheduled from September 25 to October 12, 2023. 9. 2023 Senior Managerial Training, Batch IX, conducted from October 16 to November 2, 2023. 10. 2023 Pre-Retirement Training for Land-Based Employees, held on June 14-17, 2023.
7	Sertifikasi pegawai laut (revalidasi, endorsement ijazah dan pembuatan sertifikat baru) Certification of maritime employees (revalidation, endorsement of diplomas, and issuance of new certificates)	1. Proses revalidasi dilakukan secara mandiri oleh pegawai laut ke UPT Proses *reimburse*, selanjutnnya penggantian dilakukan di Kantor Pusat Divisi SDM Cq. Departemen Pengembangan SDM. Penyerahan dokumen administrasi *reimburse*/ penggantian diserahkan kepada bagian Perencanaan SDM Laut 2. Proses revalidasi dilakukan secara Kolektif Oleh Divisi Pengawakan dan selanjutnnya proses revalidasi diserahkan kepada divisi SDM cq. Pengembangan SDM Laut yang bekerja sama dengan UPT (yang telah memiliki PKS dengan PT PELNI (Persero) 1. The revalidation process is independently carried out by maritime staff to the UPT Reimbursement Process, subsequently, the replacement is performed at the Central Office of the HR Division Cq. HR Development Department. The submission of administrative documents for reimbursement/replacement is delivered to the Maritime HR Planning division. 2. The revalidation process is conducted collectively by the Crewing Division and subsequently, the revalidation process is handed over to the HR Division cq. Maritime HR Development, in collaboration with UPT (which has a Cooperation Agreement with PT PELNI (Persero).

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

NO	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	AKTIVITAS YANG SUDAH DILAKUKAN ACTIVITIES ALREADY CONDUCTED
8	Pengelolaan penilaian kinerja pegawai dan pemberian penghargaan kinerja individu Management of employee performance evaluations and individual performance awards	1. Proses *Cascading* KPI & Penyusunan Draft Kontrak Kinerja Individu seluruh pegawai Kantor Pusat, Kantor Cabang, SBU dan Kapal sesuai dengan *Balanced Scorecard.* 2. Validasi Draft Kontrak Kinerja Individu seluruh pegawai Kantor Pusat, Kantor Cabang, SBU dan jabatan Kapal. 3. Sosialisasi Draft Kontrak Kinerja Individu seluruh pegawai Kantor Pusat, Kantor Cabang, SBU dan jabatan Kapal. 4. Tanda tangan Kontrak Kinerja Individu. 5. Penyesuaian Kategori Capaian KPI sesuai dengan arahan Manajemen menjadi : Nilai Akhir ≥ 110% "Baik Sekali" ; 100% ≥ Nilai Akhir < 110% "Baik" ; 75% ≥ Nilai Akhir < 100 % "Kurang" ; Nilai Akhir < 75% "Kurang Sekali". Pelaksanaan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Semester I pada Juli 2023 & penilaian Semester II pada Januari tahun 2024 menggunakan aplikasi PMS (*Performance Management System*). 6. Penyusunan laporan hasil Penilaian Kinerja Individu Pegawai Tahun 2023 setiap semester. 7. Pelaporan hasil Penilaian Kinerja Individu Pegawai Tahun 2023 setiap semester. 1. Cascading of KPI Processes & Drafting of Individual Performance Contract for all employees of the Head Office, Branch Offices, SBU, and Vessels according to the Balanced Scorecard. 2. Validation of Individual Performance Contract Draft for all employees of the Head Office, Branch Offices, SBU, and Vessel positions. 3. Socialization of Individual Performance Contract Draft for all employees of the Head Office, Branch Offices, SBU, and Vessel positions. 4. Signature of Individual Performance Contract. 5. Adjustment of KPI Achievement Categories according to Management directives becomes: Final Score ≥ 110% "Excellent"; 100% ≤ Final Score < 110% "Good"; 75% ≤ Final Score < 100% "Fair"; Final Score < 75% "Poor". Implementation of Individual Employee Performance Assessment for the First Semester in July 2023 & Second Semester assessment in January 2024 using the PMS (Performance Management System). 6. Compilation of reports on Individual Employee Performance Assessment for the year 2023 each semester. 7. Reporting of results from Individual Employee Performance Assessments for the year 2023 each semester.
9	Pengukuran keterikatan pegawai sesuai dengan segmentasi dan kelompoknya Measurement of employee engagement according to segmentation and groups	1. Pengukuran Indeks keterikatan dilakukan pada seluruh pegawai PT PELNI (Persero) pada *December* 2023. 2. Indeks keterikatan pegawai tahun 2023 berada di angka 4,32 yaitu dengan kategori terikat atau *engaged*. 1. 1. The measurement of the engagement index was conducted on all employees of PT PELNI (Persero) in December 2023. 2. 2. The employee engagement index for the year 2023 stood at 4.32, categorized as engaged.

NO	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	AKTIVITAS YANG SUDAH DILAKUKAN ACTIVITIES ALREADY CONDUCTED
10	Penguatan budaya kerja perusahaan / AKHLAK (Pusat, Cabang, Kapal, SBU) Strengthening corporate work culture / AKHLAK (Headquarters, Branches, Vessels, SBUs)	1. Pelaksanaan *Ambidextrous Leadership* Program untuk Dewan Komisaris, Direksi, BOD-1 Kantor Pusat pada tanggal 21 - 22 Juni 2023. 2. Pelaksanaan pembekalan *Change Agent* untuk perwakilan pegawai kantor pusat, cabang, SBU dan kapal pada tanggal 21 - 22 Agustus 2023. 3. Pelaksanaan pembekalan *Change Coordinator* untuk perwakilan pegawai kantor pusat, cabang, SBU dan kapal pada tanggal 23 - 24 Agustus 2023. 4. Pembentukan Tim *Counterpart* Budaya melalui Surat Keputusan Direksi nomor: 10.31/01/SK/HKO.01/2023. 5. Pembuatan program budaya melalui Surat Edaran Direktur SDM & Umum nomor: 09.26/01/SE/HKO.03/2023; 6. Berpartisipasi aktif dalam peringatan 3 tahun AKHLAK bersama dengan BUMN dan KBUMN. 1. Implementation of the Ambidextrous Leadership Program for the Board of Commissioners, Board of Directors, and the 1st Board of Directors Office at the Head Office on 21-22 June 2023. 2. Implementation of the Change Agent briefing for representatives of employees from the head office, branches, SBUs, and ships on 21-22 August 2023. 3. Implementation of the Change Coordinator briefing for representatives of employees from the head office, branches, SBUs, and ships on 23-24 August 2023. 4. Formation of the Cultural Counterpart Team through Board of Directors Decree number: 10.31/01/SK/HKO.01/2023. 5. Development of a cultural program through Director of Human Resources & General Affairs Circular number: 09.26/01/SE/HKO.03/2023. 6. Active participation in the 3rd-year commemoration of AKHLAK together with SOEs and State-Owned Enterprises.
11	Pengembangan *Human Resource Information System* (HRIS) Development of the Human Resource Information System (HRIS)	1. Pembaruan modul Organisasi mengikuti Struktur Organisasi terbaru. 2. Peningkatan modul *Performance Management System*. 3. Perubahan Logo pada aplikasi yang digunakan SDM sebagai BPO nya; 4. Penggunaan *Leave Absence Management* kepada seluruh pegawai darat. 1. The Organization module has been updated to align with the latest Organizational Structure. 2. Enhancement of the Performance Management System module. 3. Logo change in the application used by HR as its BPO. 4. Implementation of Leave Absence Management for all land-based employees.
12	Peraturan Disiplin Pegawai Employee Disciplinary Regulations	1. Pembuatan Draft SK Peraturan Disiplin Pegawai 2. *Review Draft* SK Peraturan Disiplin Pegawai dari Divisi Hukum 1. Drafting of the Draft Employee Discipline Regulation Decree 2. Review of the Draft Employee Discipline Regulation Decree by the Legal Division
13	Pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Updating of Collective Labor Agreements (CLA)	Pengesahan Pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja PELNI Periode 2023 - 2025 pada tanggal 30 Mei 2023 Approval of the Renewal of the Collective Labor Agreement (PKB) between Management and the PELNI Workers' Union for the Period 2023 - 2025 on May 30, 2023

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

NO	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	AKTIVITAS YANG SUDAH DILAKUKAN ACTIVITIES ALREADY CONDUCTED
14	Pemberian Penghargaan Masa Kerja Pegawai Provision of Employee Service Awards	1. Pemberian Penghargaan Masa Kerja 30 Tahun, 25 Tahun dan 08 Tahun Periode 2023 sebanyak 152 pegawai berupa : a. Uang Penghargaan Masa Kerja; b. Lencana Kesetiaan Masa Kerja; c. Piagam Penghargan Masa Kerja. 2. Pemberian Cindera Mata Emas Batangan bagi pegawai yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) periode 2023 sejumlah 121 pcs Cinderamata. 1. The awarding of Long Service Awards for 30, 25, and 08 years of service in the 2023 period to 152 employees, consisting of: a. Long Service Award monetary benefit; b. Long Service Loyalty Badge; c. Long Service Certificate of Appreciation. 2. The presentation of Solid Gold Souvenirs to employees who have entered the Retirement Preparation Period (MPP) in the 2023 period, totaling 121 gift.

NO	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	AKTIVITAS YANG SUDAH DILAKUKAN ACTIVITIES ALREADY CONDUCTED
15	Penyusunan *Grand Design* SDM Development of a Grand Design for Human Resources	Pada Tahun 2023 telah disusun *Grand Design* SDM dengan 13 Inisiatif yang terdiri dari: 1. Mengimplementasi *core values* AKHLAK dan budaya PELNI 2. Re-desain organisasi yang berorientasi bisnis dengan akuntabilitas yang jelas pada setiap posisi 3. *Job design* berdasarkan RASCI Matrix 4. Penyusunan kamus kompetensi teknis & perilaku untuk peningkatan kapabilitas Perusahaan 5. Penyusunan *learning journey* dan pengembangan kapabilitas organisasi secara berkelanjutan 6. Penentuan standar formasi dan perencanaan tenaga kerja yang tepat untuk meningkatkan produktivitas 7. Penyempurnaan proses rekrutmen & seleksi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kualifikasi jabatan 8. Penyusunan sistem pengelolaan karir yang mendukung pengembangan karir dan meningkatkan *engagement* pegawai 9. Penyusunan kebijakan *succession planning* dan *talent pool* untuk menyiapkan *future leader* 10. *Alignment* KPI serta program peningkatan *awareness* seluruh pegawai dalam pengisian *goal settings* 11. Penyempurnaan desain remunerasi dengan *benchmarking* pada *leading practice* 12. Implementasi secara digital melalui fitur *Human Capital Information System* 13. Penguatan fungsi dan kapabilitas HC sebagai *partner* strategis In 2023, the Grand Design for Human Resources was developed, comprising 13 Initiatives, including: 1. Implementation of AKHLAK core values and PELNI culture. 2. Re-design of the organization with a business-oriented approach and clear accountability for each position. 3. Job design based on the RASCI Matrix. 4. Development of technical and behavioral competency dictionaries to enhance Company capabilities. 5. Development of a learning journey and continuous organizational capability development. 6. Establishment of formation standards and workforce planning to increase productivity. 7. Refinement of recruitment and selection processes to ensure that human resource needs are met according to job qualifications. 8. Development of a career management system that supports career development and enhances employee engagement. 9. Development of succession planning policies and talent pools to prepare future leaders. 10. Alignment of KPIs and programs to enhance awareness among all employees in achieving goal settings. 11. Improvement of remuneration design with benchmarks on leading practices. 12. Digital implementation through the Human Capital Information System feature. 13. Strengthening of the HC function and capabilities as a strategic partner.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

NO	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	AKTIVITAS YANG SUDAH DILAKUKAN ACTIVITIES ALREADY CONDUCTED
16	Penyusunan RASCI Matriks, Kamus dan Model Kompetensi Development of RASCI Matrix, Competency Dictionary, and Competency Models	Pada tahun 2023 telah dilaksanakan *review* RASCI Matriks, *Review* dan *Profiling Job Family* baru sesuai dengan Struktur Organisasi baru dan Model serta Kamus untuk Kompetensi Teknis dan Kompetensi Perilaku. Kompetensi Perilaku terdiri dari Kompetensi Inti, Kompetensi Kepemimpinan dan Kompetensi Spesifik untuk seluruh Jabatan dan Kompetensi Teknis untuk Jabatan *Core* In 2023, a review of the RASCI Matrix, Review, and Profiling of new Job Families was conducted in accordance with the new Organizational Structure and Models, as well as a Dictionary for Technical and Behavioral Competencies. The Behavioral Competencies consist of Core Competencies, Leadership Competencies, and Specific Competencies for all Positions, and Technical Competencies for Core Positions.
17	Penyusunan *Blueprint Career & Talent Management* Development of a Blueprint for Career & Talent Management	Pada tahun 2023 telah disusun Pola Karir Pegawai Darat dan Laut serta Penyusunan *Talent Map* atau Peta Talenta In 2023, a Career Pattern for Land and Sea Employees was developed, as well as the Preparation of a Talent Map.
18	Penyusunan *Job Evaluation, Grading Structure* & Remunerasi Development of Job Evaluation, Grading Structure & Remuneration	Pada tahun 2023 telah disusun *Job Evaluation* untuk menentukan *grading* jabatan yang ada di perusahaan dengan mempertimbangkan karakteristik tugas, wewenang, tangung jawab dari setiap jabatan, melalui penilaian faktor-faktor pada setiap jabatan berdasarkan metode tertentu. Namun, belum dilakukan pengesahan dikarenakan harus dipaparkan ke dewan direksi dan diambil keputusan mengenai struktur *grading* jabatan yang ada di Perusahaan. Pada tahun 2023 juga telah dilakukan *review* mengenai desain gaji pokok, tunjangan, bonus tahunan, dan perhitungan dampak biayanya In 2023, a Job Evaluation was conducted to determine the grading of positions within the company, considering the characteristics of tasks, authorities, and responsibilities of each position, through an assessment of factors for each position based on specific methods. However, it has not been approved yet because it needs to be presented to the board of directors, and a decision needs to be made regarding the existing job grading structure in the Company. In 2023, a review of the basic salary design, allowances, annual bonuses, and cost impact calculations was conducted.
19	Pembuatan Konsep *Design* Aplikasi SDM yang Terintegrasi Creation of Integrated HR Application Design Concepts	Telah dilaksanakan *review* terhadap modul Aplikasi SDM dan penyusunan *Business Requirement Specification* difokuskan pada 4 modul yaitu Modul *Recruitment & Selection, Modul Training & Development*, *Modul Career Management* dan *Modul Performance Management* A review was conducted on the HR Application module and the preparation of Business Requirement Specifications focused on 4 modules: Recruitment & Selection Module, Training & Development Module, Career Management Module, and Performance Management Module.
20	Penyusunan & Penyempurnaan SOP SDM Development and Refinement of HR Standard Operating Procedures (SOP)	Telah dilaksanakan *review* terhadap segala kebijakan yang ada untuk kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal dan didapatkan Arsitektur Kebijakan sebagai kerangka pedoman yang memuat informasi terstruktur keseluruhan kebijakan pengelolaan SDM di perusahaan A review was conducted on all existing policies to then be compared with the ideal conditions, resulting in a Policy Architecture as a guideline framework containing structured information on the overall HR management policies in the company.

PROFIL SDM 2023

Uraian mengenai profil SDM PELNI pada posisi 31 Desember 2023, mencakup pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, hingga level jabatan, telah disajikan pada bab Profil Perusahaan bagian Profil SDM 2023.

REKRUTMEN SDM PELNI 2023

Proses rekrutmen di lingkup PELNI dimulai dengan proses analisis kebutuhan dan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni dilakukan secara transparan dan terbuka bagi seluruh pelamar tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, ras, etnis ataupun agama tertentu sepanjang para kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perseroan.

Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perseroan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada 2023, Perseroan telah melaksanakan 3 jenis program rekrutmen pegawai PT PELNI (Persero), dengan penjelasan sebagai berikut.

REKRUTMEN PEGAWAI LAUT
210 Pegawai

REKRUTMEN PEGAWAI DARAT
197 Pegawai

HUMAN RESOURCES PROFILE 2023

The description of PELNI's HR profile as of December 31, 2023, including classification by gender, age, education level, and job level, has been presented in the Company Profile section under Human Resources Profile 2023.

PELNI HUMAN RESOURCES RECRUITMENT 2023

The recruitment process within PELNI begins with an analysis of needs and planning for the required positions. The recruitment process is also conducted adhering to the principles of good corporate governance, being transparent and open to all applicants without discrimination based on gender, ethnicity, race, or religion, provided the candidates meet the criteria set by the Company.

This recruitment system is transparent and open, based on the planning of employee needs to support the achievement of the Company's objectives in both the short and long term. In 2023, the Company implemented three types of recruitment programs for PT PELNI (Persero), detailed as follows.

VOFFSHORE EMPLOYEE RECRUITMENT
210 Employees

ONSHORE EMPLOYEE RECRUITMENT
197 Employees

No	Posisi Position	2023
1	*Contract Recruitment* Information Technology	5 Pegawai 5 Employees
2	*Contract Recruitment* Director's Secretary	1 Pegawai 1 Employee
3	*Staff & Head of Affairs (Internal Job Opening)*	7 Pegawai 7 Employees
4	*Contract Recruitment* Risk Management and Corporate Planning	0 Pegawai 0 Employees
5	*Contract Recruitment* Surveyor	4 Pegawai 4 Employees
6	*Contract Recruitment* Staff/equivalent	170 Pegawai 170 Employees
7	*Contract Recruitment* Officer/equivalent	0 Pegawai 0 Employees

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

No	Posisi Position	2023
8	*Contract Recruitment* Social Media Specialist	0 Pegawai 0 Employees
9	*Recruitment with* BUMNs (D3)	5 Pegawai 5 Employees
10	BAIS (*Assignment*)	5 Pegawai 5 Employees
	Jumlah **Total**	**197 Pegawai** **197 employees**

Selanjutnya, dilaksanakan orientasi Perseroan terhadap calon pegawai (selain *internship*) agar pada saat ditempatkan telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai dasar saat ditempatkan di unit kerjanya.

Subsequently, the Company conducted an orientation for prospective employees (excluding interns) to ensure that upon their placement, they possess the necessary knowledge and skills to serve as a foundation when assigned to their respective work units.

JUMLAH ANGGARAN REKRUTMEN PEGAWAI 2023

Pada tahun 2023, PELNI mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen pegawai darat dan pegawai laut diuraikan sebagai berikut:

EMPLOYEE RECRUITMENT BUDGET FOR 2023

In 2023, PELNI incurred expenses for the recruitment activities of onshore and offshore employees as detailed below:

No.	Posisi Position	Anggaran 2023 2023 Budget	Realisasi 2023 2023 Realization
1	Rekrutmen Pegawai Darat Onshore Employee Recruitment	Rp1.105.000.000,00	Rp545.318.400,00
2	Rekrutmen Pegawai Laut Offshore Employee Recruitment	Rp5.632.470.000,00	Rp2.835.385.398,00
Jumlah **Total**		**Rp6.737.470.000,00**	**Rp3.380.703.798,00**

INFORMASI MUTASI, MENGUNDURKAN DIRI, DAN PENSIUN PEGAWAI

EMPLOYEE TRANSFER, RESIGNATION, AND RETIREMENT INFORMATION

ROTASI, PROMOSI, DAN DEMOSI PEGAWAI

Pada 2023, terdapat sebanyak 678 pegawai PELNI yang dimutasikan baik berupa rotasi, mutasi, dan demosi guna mengisi formasi sekaligus penyegaran, dengan sebanyak 143 pejabat struktural yang dimutasi dan 535 pegawai *supervisor* dan pelaksana yang dimutasi. Perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE ROTATION, PROMOTION, AND DEMOTION

In 2023, a total of 678 PELNI employees were reassigned through rotations, transfers, and demotions to fill formations and refresh. This included 143 structural officials and 535 supervisor and executive employees who were reassigned. The details are as follows:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Pejabat Struktural
Structural Officials

Bulan Month	Rotasi Rotation	Promosi Promotion	Demosi Demotion	Jumlah Total
Januari January	0 Pegawai/ employee	0 Pegawai/ employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai/ employee
Februar Februaryi	62 Pegawai/ employees	37 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	99 Pegawai / employees
Maret March	3 Pegawai / employees	1 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	4 Pegawai / employees
April April	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee
Mei May	2 Pegawai / employees	2 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	4 Pegawai / employees
Juni June	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee
Juli July	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee
Agustus August	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee
September September	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee
Oktober October	4 Pegawai / employees	1 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	5 Pegawai / employees
November November	29 Pegawai / employees	2 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	31 Pegawai / employees
Desember December	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee
Jumlah Total	100 Pegawai / employees	43 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	143 Pegawai / employees

***Supervisor* dan Pelaksana**
Supervisors and Implementers

Bulan Month	Rotasi Rotation	Promosi Promotion	Demosi Demotion	Jumlah Total
Januari January	3 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	3 Pegawai / employees
Februar February	1 Pegawai / employee	0 Pegawai / employees	0 Pegawai / employees	1 Pegawai / employee
Maret March	78 Pegawai / employees	33 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	111 Pegawai / employees
April April	194 Pegawai / employees	23 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	217 Pegawai / employees

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

***Supervisor* dan Pelaksana**
Supervisors and Implementers

Bulan Month	Rotasi Rotation	Promosi Promotion	Demosi Demotion	Jumlah Total
Mei May	85 Pegawai / employees	6 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	91 Pegawai / employees
Juni June	3 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	3 Pegawai / employees
Juli July	8 Pegawai / employees	1 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	9 Pegawai / employees
Agustus August	11 Pegawai / employees	4 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	15 Pegawai / employees
September September	21 Pegawai / employees	40 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	61 Pegawai / employees
Oktober October	6 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	6 Pegawai / employees
November November	7 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	0 Pegawai / employee	7 Pegawai / employees
Desember December	3 Pegawai / employees	8 Pegawai / employees	0 Pegawai / employee	11 Pegawai / employees
Jumlah Total	**420 Pegawai / employees**	**115 Pegawai / employees**	**0 Pegawai / employee**	**535 Pegawai / employees**

MENGUNDURKAN DIRI
Jumlah pegawai PELNI yang mengundurkan diri pada 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

RESIGNATIONS
The number of PELNI employees who resigned in 2023 is shown in the table below:

Penempatan Placement	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Darat Onshore	4	4	8
Laut Offshore	5	1	6
Jumlah Total	**9**	**4**	**14**

PENSIUN
Pada 2023, terdapat sejumlah pegawai yang pensiun dengan perincian sebagai berikut:

RETIREMENT
In 2023, a number of employees retired with the following details:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

No. SK Decision Letter Number	Periode Period	Kantor Pusat Head Office	Cabang Branch	Kapal Ship	Anak Perusahaan	SBU	Jumlah Total
12 .02/03/SK/HKO.01/2022	Januari 2023	7	19	45	23	1	95
06.21/01/SK/HKO.01/2023	Juli 2023	20	20	66	20	2	128
Jumlah		**27**	**39**	**111**	**43**	**3**	**223**

INFORMASI KECELAKAAN KERJA DAN PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA

JUMLAH KECELAKAAN KERJA

Pada 2023, terdapat sebanyak 10 orang pegawai PELNI yang mengalami kecelakaan akibat kerja dengan perincian sebagai berikut:

WORKPLACE ACCIDENT INFORMATION AND DECEASED EMPLOYEES

NUMBER OF WORKPLACE ACCIDENTS

In 2023, there were 10 PELNI employees who suffered from work-related accidents, detailed as follows:

Penempatan Placement	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Darat Onshore	2 Pegawai / Employees	-
Laut Offshore	7 pegawai / Employees	1 pegawai / Employee
Jumlah **Total**	**9 Pegawai / Employees**	**1 pegawai / Employee**

JUMLAH PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA

Pada 2023, terdapat 20 orang pegawai PELNI yang meninggal dunia. Jumlah tersebut terdiri dari pegawai kantor pusat, kantor cabang, kapal, anak perusahaan (PT. PIDC, RS PELNI, dan Hotel Bahtera), dengan perincian sebagai berikut:

NUMBER OF DECEASED EMPLOYEES

In 2023, there were 20 PELNI employees who passed away. This total includes employees from the head office, branch offices, ships, and subsidiaries (PT. PIDC, RS PELNI, and Hotel Bahtera), detailed as follows:

No	Unit Kerja Work Unit	Satuan Unit	Jumlah Total
PT PELNI (Persero)			
1	Kantor Pusat	Orang People	1
2	Kantor Cabang	Orang People	4
3	Kapal	Orang People	14
Pegawai PELNI yang ditempatkan di Anak Perusahaan			
1	PIDC	Orang People	0

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

No	Unit Kerja Work Unit	Satuan Unit	Jumlah Total
2	RS PELNI	Orang People	0
3	Hotel Bahtera	Orang People	1
Jumlah Total			**20**

JUMLAH KLAIM KARENA SAKIT AKIBAT KERJA

Perseroan berupaya untuk menunjang kesehatan kerja pegawai. Pada 2023, jumlah klaim atau pengobatan karena sakit di RS PELNI sebanyak 4.113 kali yang terdiri atas pegawai Kantor Pusat, Cabang, ABK, SBU dan Anak Usaha, yang diberikan untuk pegawai dan keluarga dari bulan Januari hingga Desember 2023, dengan realisasi biaya sebesar Rp11.434.697.786,-. Jumlah tersebut memperlihatkan peningkatan dibanding realisasi pada 2022 yang sejumlah Rp9.119.910.658,- karena ada peningkatan jumlah pegawai, pensiunan direksi, keluarga pegawai yang menjalani rawat jalan dan rawat inap di tahun 2023. Pegawai PT PELNI (Persero) yang terdiagnosis penyakit khusus seperti Jantung, *Hemodialisa* (HD), *Diabetes Militus* (DM), *Cancer Acut* (CA), *Hypertensi*, Asma, TBC, *Stroke top up* RS PELNI dapat melakukan pengobatan di RS PELNI hingga yang bersangkutan dinyatakan sembuh dengan biaya yang dibebankan kepada Perseroan.

THE NUMBER OF CLAIMS FOR WORK-RELATED ILLNESSES

The company endeavors to support employees' occupational health. In 2023, the number of claims or treatments for illness at RS PELNI amounted to 4,113 times, consisting of employees from the Head Office, Branches, ABK, SBU, and Subsidiaries, provided for employees and their families from January to December 2023, with a realized cost of Rp11,434,697,786. This amount shows an increase compared sto the realization in 2022, which amounted to Rp9,119,910,658, due to an increase in the number of employees, retired directors, and employee families undergoing outpatient and inpatient care in 2023. PT PELNI (Persero) employees diagnosed with specific illness such as Heart Disease, Hemodialysis (HD), Diabetes Mellitus (DM), Acute Cancer (CA), Hypertension, Asthma, Tuberculosis (TB), Stroke that exceed RS PELNI's coverage can receive treatment at RS PELNI until they are declared cured, with the costs borne by the company.

Penempatan Placement	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Darat Onshore	868	520
Laut Offshore	3.563	60
Jumlah Total	**4.431**	**580**

Bulan Month	Realisasi Biaya (Rp)
Januari January	Rp953.560.425
Februari February	Rp938.534.937
Maret March	Rp934.165.115

Bulan Month	Realisasi Biaya (Rp)
April April	Rp954.779.689
Mei May	Rp956.981.034
Juni June	Rp957.218.655
Juli July	Rp966.320.150
Agustus August	Rp966.777.602
September September	Rp935.782.458
Oktober October	Rp955.126.146
November November	Rp955.824.093
Desember December	Rp959.627.482
Jumlah **Total**	**Rp11.434.697.786**

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan senantiasa memberikan kebebasan bagi setiap pegawainya untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat. Mengingat pentingnya hubungan industrial dalam perusahaan, PELNI telah menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pegawainya. Di samping itu, Perseroan juga memberikan kesempatan bagi setiap pegawainya untuk berkembang dengan mendengarkan usulan perbaikan, pendapat maupun kritik tentang operasional Perusahaan itu sendiri. Selain memberikan kebebasan kepada pegawainya, Perusahaan juga menghormati kebebasan berpendapat dari setiap karyawan.

INDUSTRIAL RELATIONS

The company consistently provides freedom for each of its employees to assemble, express opinions, and associate. Recognizing the importance of industrial relations within the company, PELNI has provided facilities to support its employees' activities. Additionally, the company also provides opportunities for each of its employees to develop by listening to suggestions for improvements, opinions, and criticisms regarding the company's operations. Apart from granting freedom to its employees, the company also respects the freedom of expression of each employee.

JUMLAH PEGAWAI YANG IKUT SERIKAT PEKERJA PADA 2023

Pada 2023, PELNI memiliki 1 (satu) Serikat Pekerja dengan jumlah pegawai yang terdaftar sebanyak 2.475 Orang pegawai atau setara dengan 49,35% pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

NUMBER OF EMPLOYEES WHO ARE UNION MEMBERS IN 2023

In 2023, PELNI had 1 (one) Labor Union with a total of 2,475 registered employees, equivalent to 49.35% of employees, detailed as follows:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Uraian Description	SP PELNI
Darat Onshore	60
Laut Offshore	1.815
Jumlah Total	2.475

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

PELNI memberi kesempatan yang sama bagi setiap pegawainya untuk mengikuti program pengembangan kompetensi yang dapat mendorong peningkatan keahlian dan kapabilitas karyawan. PELNI menyelenggarakan program pengembangan kompetensi ini secara internal dan membuka kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti *workshop,* seminar dan program pengembangan kompetensi lainnya dari lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal. PELNI menerapkan pengembangan kompetensi SDM sesuai *roadmap* PT PELNI 2020-2024, yang secara mendasar diarahkan untuk memacu motivasi belajar pegawai agar siap bertransformasi sesuai perkembangan internal dan eksternal Perseroan.

Program pelatihan pada 2023 terbagi menjadi beberapa jenis pelatihan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Diklat Orientasi**
   Pelatihan orientasi diselenggarakan bagi calon pegawai agar mengenali ruang lingkup bisnis Perseroan, serta fungsi dan tugas jabatan di lingkungan Perseroan, sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman, serta sikap-sikap dasar untuk beradaptasi dengan budaya Perseroan dan siap bekerja guna mendukung perwujudan visi dan misi Perseroan.

2. **Diklat Teknis**
   Pelatihan teknis merupakan pelatihan untuk jabatan-jabatan pelaksana dan staf pada fungsi-fungsi utama organisasi yang mendukung bisnis inti Perseroan, yang terdiri dari:
   a. **Pelatihan Tingkat Mula**
      - Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat semi analisis, teknis, dan berdasarkan *value chain* Perseroan.

HUMAN RESOURCES COMPETENCY DEVELOPMENT

PELNI provides equal opportunities for all employees to participate in competency development programs that can enhance their skills and capabilities. PELNI conducts these competency development programs internally and also opens opportunities for employees to attend workshops, seminars, and other competency development programs organized by external educational and training institutions. PELNI implements human resources competency development according to the PT PELNI 2020-2024 roadmap, which is fundamentally aimed at motivating employees to learn and be ready to transform according to the company's internal and external developments.

Training programs in 2023 are divided into several types, explained as follows:

1. **Orientation Training**
   Orientation training is conducted for prospective employees to familiarize them with the company's business scope, as well as the functions and duties of positions within the company, so they have the knowledge, understanding, and basic attitudes to adapt to the company's culture and be ready to work to support the realization of the company's vision and mission.

2. **Technical Training**
   Technical training is for executive positions and staff in the organization's main functions that support the company's core business, consisting of:
   a. **Basic Level Training**
      - This training is mandatory for employees to optimize their performance in semi-analytical, technical, and value chain-based job functions.

- Peserta pelatihan tingkat mula adalah pegawai dengan kelas jabatan 13 dan 12.

b. Pelatihan Tingkat Lanjut

- Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat analisis, teknis, dan berdasarkan *value chain* Perseroan.
- Peserta pelatihan tingkat lanjut adalah pegawai dengan kelas jabatan 11 dan 10.

3. Diklat Manajerial

Pelatihan Manajerial diselenggarakan bagi pejabat struktural/fungsional dalam mengembangkan diri dan organisasi agar mampu melaksanakan fungsi dan tugas pokok dari jabatan-jabatan manajerial, yang terdiri dari:

a. Pelatihan Manajerial Tingkat Muda

Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat muda pada kelas jabatan 9 sampai 8.

b. Pelatihan Manajerial Tingkat Madya

Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat madya pada kelas jabatan 7 sampai 5.

c. Pelatihan Manajerial Tingkat Utama

Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat utama pada kelas jabatan 4 sampai 1.

4. Pelatihan Pengayaan

Pelatihan pengayaan bertujuan untuk membekali para pegawai dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap-sikap pegawai yang baik, agar senantiasa dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan bisnis serta kemajuan teknologi informasi yang menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok pada jabatan masing-masing pegawai. Jenis pelatihan pengayaan dapat berupa lokakarya/ *workshop*, seminar, konferensi, simposium, penyuluhan/ sosialiasi yang dikemas dalam bentuk *in-house training* maupun *public training*.

5. Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi merupakan suatu pengakuan profesional secara non-formal yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu, untuk profesi tertentu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau

- Participants in basic level training are employees with job grades 13 and 12.

b. Advanced Level Training

- This training is mandatory for employees to optimize their performance in analytical, technical, and value chain-based job functions.
- Participants in advanced level training are employees with job grades 11 and 10.

3. Managerial Training

Managerial training is conducted for structural/functional officials to develop themselves and the organization to be able to carry out the main functions and duties of managerial positions, consisting of:

a. Junior Managerial Training

This training is mandatory for employees to optimize their performance in junior managerial positions with job grades 9 to 8.

b. Middle Managerial Training

This training is mandatory for employees to optimize their performance in middle managerial positions with job grades 7 to 5.

c. Senior Managerial Training

This training is mandatory for employees to optimize their performance in senior managerial positions with job grades 4 to 1.

4. Enrichment Training

Enrichment training aims to equip employees with good knowledge, understanding, skills, and attitudes so they can anticipate and adapt to business environment developments and technological advancements that support the successful implementation of their job functions and duties. Enrichment training can be in the form of workshops, seminars, conferences, symposiums, or lectures/socialization packaged as in-house or public training.

5. Professional Certification

Professional certification is a non-formal professional recognition given based on specific expertise for specific professions, based on laws and regulations, government regulations, or International Maritime Organization (IMO)

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

ketentuan International Maritime Organization (IMO) yang berlaku dan bersifat *mandatory*, serta diterbitkan oleh lembaga yang *qualified*. Sertifikasi profesi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

a. **Sertifikasi profesi pegawai darat**
   Sertifikasi pegawai darat adalah pelatihan dengan suatu penetapan yang diberikan oleh organisasi profesional tertentu terhadap pegawai darat untuk menunjukkan bahwa pegawai tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
b. **Sertifikasi profesi pegawai laut**
   Sertifikasi pegawai laut adalah pelatihan yang harus dilaksanakan oleh pegawai laut merujuk kepada ketentuan dari *Standards of Training Certification and Watchkeeping* (STCW) sebagai prasyarat untuk dapat berlayar.

6. **Pelatihan Purnabakti**
   Pelatihan purnabakti adalah pelatihan yang diselenggarakan guna membekali para pegawai yang hendak menjalani pensiun dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mental spiritual serta kewirausahaan untuk menghadapi masa pensiun agar siap dan mampu mandiri serta tetap produktif pada saat menjalani masa pensiunnya.

provisions that are applicable and mandatory, issued by qualified institutions. Professional certification consists of two types:

a. **Shore-Based Professional Certification**
   Shore-based professional certification is training with a designation given by a specific professional organization to shore-based employees to demonstrate that they are capable of performing specific tasks or jobs.
b. **Sea-Based Professional Certification**
   Sea-based professional certification is training that must be conducted by seafarers referring to the Standards of Training Certification and Watchkeeping (STCW) as a prerequisite for sailing.

6. **Retirement Training**
   Retirement training is conducted to equip employees who are about to retire with knowledge, skills, mental and spiritual attitudes, as well as entrepreneurship to face retirement so that they are ready and capable of being independent and productive during their retirement.

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN

PELNI telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan secara *in-house* maupun diselenggarakan oleh pihak ketiga. Sepanjang tahun 2023, akumulasi karyawan yang mengikut program pelatihan dan pengembangan kompetensi adalah sebanyak 8.963 peserta.

NUMBER OF EMPLOYEES RECEIVING TRAINING

PELNI has included a number of employees in its training and competency development programs, both conducted in-house and by third parties. Throughout 2023, the total employees participating in training and competency development programs accumulated to 8,963 participants.

Realisasi Program
Program Realization

Peserta Pelatihan | Training Participants
8.963 Orang Peserta | Participant

Dengan jumlah pegawai yang mendapat pendidikan & pelatihan sebanyak 2.932 pegawai
With a total of 2,932 employees receiving education and training

	Peg. Darat | Onshore Employees	**Peg. Laut** | Offshore Employees
Jml. Peserta Total Participant	4.655 Pegawai Employees	4.308 Pegawai Employees
Jumlah Pegawai* Total Participant*	1.036 Pegawai Employees	1.895 Pegawai Employees

* Jumlah pegawai mendapat pelatihan
Number of Employees Receiving Training

% Pegawai Mendapat Pelatihan
% of Employees Received Training

1.036 Pegawai dari 1.139 Pegawai Darat
1,036 out of 1,139 Onshore Employees

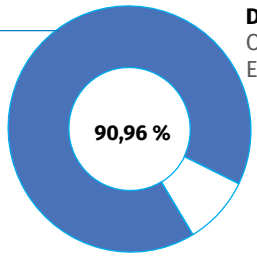

Pegawai Darat
Onshore Employees

84,69%
Pegawai mendapat pelatihan
Employees Received Training

Pegawai Laut
Offshore Employees

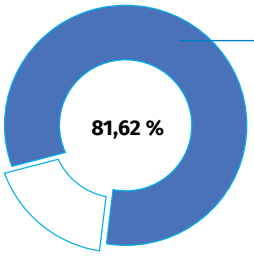

1.896 Pegawai dari 2.323 Pegawai Laut
1,896 out of 2,323 Onshore Employees

1.036 Pegawai
Mendapat Pelatihan
1,036 Employees Received Training

PEGAWAI DARAT
Onshore Employees

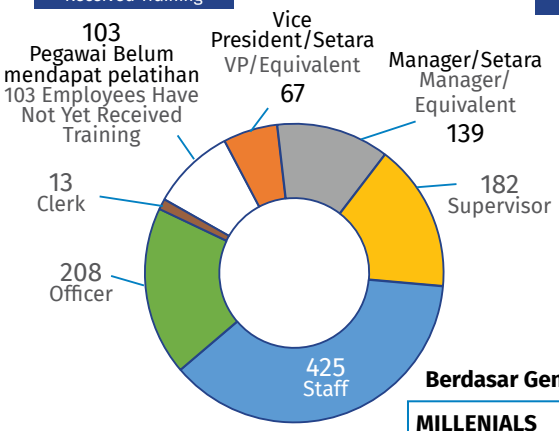

PEGAWAI MENDAPAT PELATIHAN
Employees Received Training

427 Pegawai Belum Mendapat Pelatihan
427 Employees Have Not Yet Received Training

PEGAWAI LAUT
Offshore Employees

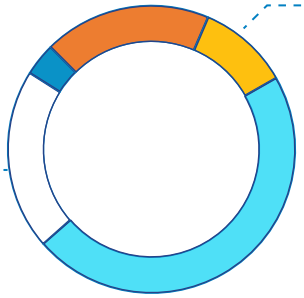

77 Nakhoda/KKM
Captain/Chief Officer
395 Perwira
Officer
216 Bintara
NCO (Non-Commissioned Officer)
981 Tamtama
NCO (Non-Commissioned Officer)

1.896 Pegawai Mendapat Pelatihan
1,896 Employees Received Training

Berdasar Generasi | Based on Generation

MILLENIALS
Darat | Onshore : 748
Laut | Offshore : 604
Total : 1.352

NON-MILLENIALS
Darat | Onshore : 285
Laut | Offshore : 1.071
Total : 1.356

Berdasar Gender | Based on Gender

LAKI-LAKI | MALE
Darat | Onshore : 686
Laut | Offshore : 1.666
Total : 2.352

PEREMPUAN | FEMALE
Darat | Onshore : 349
Laut | Offshore : 9
Total : 358

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE

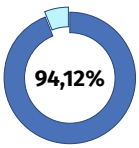

DIR. UTAMA
President Director

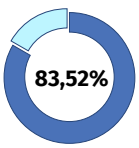

DIR. UAP
Director of Passenger Business

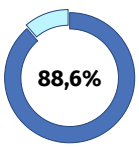

DIR. UABTL
Director of Tol Laut & Cargo Business

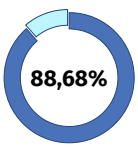

DIR. ARMATEK
Director of Fleet and Engineering

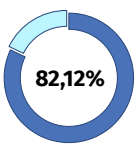

DIR. SDMU
Director of HR & FA

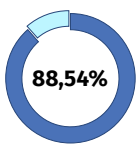

DIR. KEUANGAN
Director of Finance

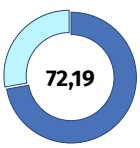

CABANG/SBU
Branch/SBU

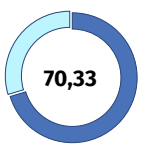

KAPAL
Ships

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

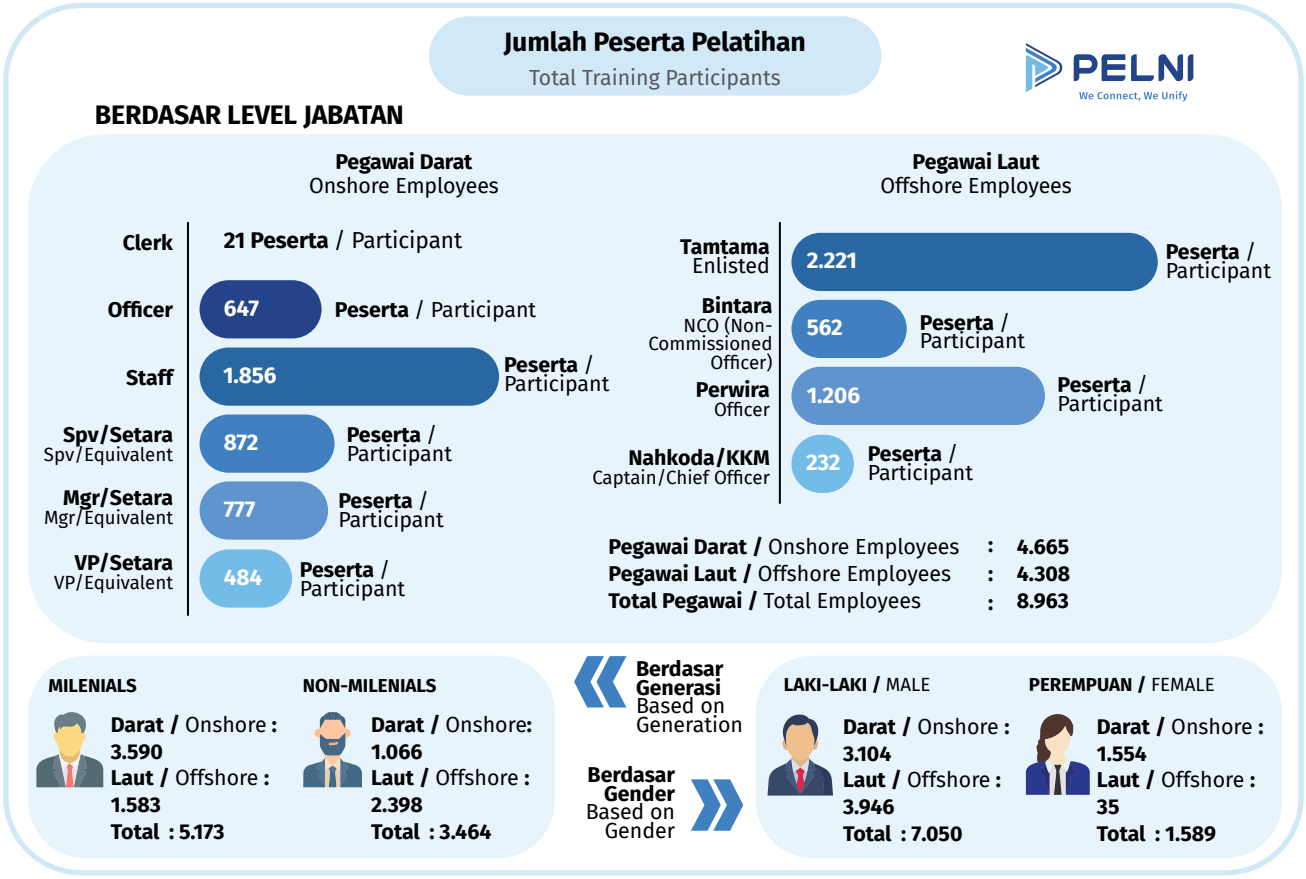

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Biaya yang dikeluarkan oleh PELNI untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan, seminar, *workshop,* sertifikasi dan beasiswa untuk pegawai laut dan darat pada 2023 adalah Rp11.462.703.636,00 atau meningkat dibanding pada 2022 yang sejumlah Rp8.702.190.065,00 dengan perincian sebagai berikut:

REALISASI PELATIHAN PEGAWAI DARAT :

Realisasi sebesar Rp7.968.736.883,00 dari Anggaran Rp4.666.000.000,00.

REALISASI PELATIHAN PEGAWAI LAUT :

Realisasi sebesar Rp3.496.453.595,00 dari Anggaran Rp4.850.400.000,00.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran untuk biaya pendidikan dan pelatihan telah memenuhi 171% dibandingkan Anggaran Pengembangan SDM 2023, atau memperlihatkan tingkat realisasi yang baik.

COST OF EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The expenses incurred by PELNI for employee competency development activities through training, education, seminars, workshops, certifications, and scholarships for sea and shore-based employees in 2023 amounted to Rp 11,462,703,636, an increase compared to 2022 which amounted to Rp 8,702,190,065, with the breakdown as follows:

ONSHORE TRAINING REALIZATION:

Realization amounting to Rp 7,968,736,883 from a Budget of Rp 4,666,000,000.

OFFSHORE TRAINING REALIZATION:

Realization amounting to Rp 3,496,453,595 from a Budget of Rp 4,850,400,000.

Based on the above data, it can be seen that the budget absorption for education and training costs has reached 171% compared to the 2023 Human Resources Development Budget, indicating a good level of realization.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

SISTEM *REWARD AND PUNISHMENT*

PELNI memberikan penghargaan atas kinerja, pelaksanaan tugas, inovasi atau perbaikan serta penghargaan atas kesetiaan pegawai. Penghargaan atas inovasi dan perbaikan berkelanjutan diberikan dalam ajang rutin tahunan yang diadakan oleh Perseroan. Untuk memberikan apresiasi terhadap pegawai yang telah bekerja selama masa kerja tertentu, PELNI memberikan penghargaan dedikasi kerja 30 tahun, 25 tahun dan 16 tahun dan 8 tahun kepada para pegawai di seluruh entitas kantor pusat, kantor cabang dan unit usaha Perseroan lainnya. Sedangkan bagi para pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan menerima hukuman.

THE REWARD AND PUNISHMENT SYSTEM

PELNI awards are given for performance, task execution, innovation or improvement, and loyalty. Awards for innovation and continuous improvement are given in the company's annual routine event. To appreciate employees who have worked for a certain period, PELNI gives dedication awards for 30, 25, 16, and 8 years of service to employees in all entities, including the head office, branch offices, and other business units of the Company. Meanwhile, employees who are proven to have committed violations will receive punishment.

Perincian pemberian *reward and punishment* pada 2023 adalah sebagai berikut:

The details of the reward and punishment system in 2023 are as follows:

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) mengenai penghargaan kepada pegawai, jumlah pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan masa kerja dan tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 04.01/01/SK/HKO.01/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja 30 tahun, 25 tahun, 16 tahun dan 8 tahun. Perincian pemberian penghargaan pada 2023 adalah sebagai berikut:

REWARD DISTRIBUTION

Based on the Collective Labor Agreement between PT PELNI (Persero) and the PT PELNI (Persero) Workers Union regarding employee awards, the number of employees receiving awards is in accordance with their length of service, as stated in Decree Number 04.01/01/SK/HKO.01/2021 dated April 1, 2021, concerning the Awarding of 30, 25, 16, and 8 years of Service Awards. The details of the award distribution in 2023 are as follows:

No	Penghargaan Award	Pusat Head Office	Cabang Branch	ABK ship's crew	SBU	Anak Perusahaan Subsidiary	Jumlah Total
1	30 Tahun / Years	14	30	8	2	33	87
2	25 Tahun / Years	-	-	2	-	22	24
3	16 Tahun / Years	-	-	-	-	-	-
4	8 Tahun / Years	5	-	35	1	-	41
Jumlah Total							**152**

SANKSI DISIPLIN PEGAWAI

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) tentang pemberian sanksi disiplin untuk pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka berikut ini merupakan jumlah pemberian hukuman disiplin yang diberikan pegawai PT PELNI (Persero):

EMPLOYEE DISCIPLINE SANCTIONS

In accordance with the Collective Labor Agreement between PT PELNI (Persero) and the PT PELNI (Persero) Workers Union regarding disciplinary sanctions for employees who violate the regulations established by the company. Based on these regulations, the following is the number of disciplinary sanctions imposed on employees of PT PELNI (Persero):

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

No	Jenis Hukuman Type of Punishment	Pegawai Employee		Jumlah Total
		Darat Onshore	Laut Offshore	
1	Peringatan Lisan Verbal Warning	2	11	13
2	Peringatan Tertulis Written Warning	2	4	6
3	Peringatan Keras Severe Warning	9	13	22
4	Skorsing Suspension	5	7	12
5	PHK Termination	8	6	14
Jumlah Total				**67**

REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas pegawai terhadap Perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan telah menetapkan aturan pemberian fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh Pegawai berdasarkan level jabatan dan status kepegawaian. Pemberian fasilitas dan tunjangan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait lainnya.

Komponen remunerasi yang diberikan kepada pegawai Perseroan, antara lain gaji pokok, insentif prestasi serta berbagai tunjangan dan fasilitas. Tunjangan dan fasilitas yang dimaksud tersebut di antaranya:

Struktur Upah telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 tentang Pengupahan di lingkungan PT PELNI (Persero) tanggal 30 Oktober 2023.

Tunjangan Khusus

1. Tunjangan Struktural dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 diberikan kepada pegawai tetap dengan jabatan
   a. *Senior Vice President/ Vice President/* Kepala di Kantor Pusat
   b. Kepala Cabang
   c. *General Manager* SBU
   d. Pengawas ISM & ISPS *Code*, Pengawas QHSSE, Pengawas

EMPLOYEE REMUNERATION AND WELFARE

In order to enhance employees' performance motivation and loyalty to the Company, as well as to improve their welfare, the Company has established rules regarding the provision of facilities and allowances received by employees based on their job level and employment status. The provision of these facilities and allowances has been adjusted to comply with applicable laws and regulations, including the Provincial Minimum Wage (UMP) limits and other relevant regulations of the Ministry of Manpower and Transmigration.

The components of remuneration provided to the Company's employees include basic salary, performance incentives, as well as various allowances and facilities. These allowances and facilities include:

The Wage Structure has been regulated in the Director's Decree Number 10.30/01/SK/HKO.01/2023 regarding Wages in PT PELNI (Persero) dated October 30, 2023.

Special Allowances

1. Structural Allowance in accordance with Director's Decree Number 10.30/01/SK/HKO.01/2023 is provided to permanent employees with the following positions:
   a. Senior Vice President/Vice President/Head at the Head Office
   b. Branch Manager
   c. SBU General Manager
   d. ISM & ISPS Code Supervisors, QHSSE Supervisors,

Intern Area I & II, Pengawas Investigasi, Pengawas Administrasi & Evaluasi dan Pengawas Kapal
e. *Manager* di Kantor Pusat dan SBU
f. Kordinator *Executive Asisstance* di Kantor Pusat
g. Kepala Bagian di Cabang tipe 1&2
h. Kepala Urusan di Cabang tipe 1,2,3 & 4

2. Tunjangan Fungsional dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 diberikan kepada Staf Utama Direksi, Staf Madya Direksi, Pemeriksa Utama, Pengawas Utama, *Surveyor* Utama, *Expert Developer*
3. Tunjangan Komando dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 diberikan kepada Nakhoda/Kepala Kamar Mesin/Mualim I/Masinis I Senior.
4. Tunjangan Profesi dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 diberikan kepada Dokter dan Perawat di atas Kapal Milik yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).
5. Tunjangan Telekomunikasi dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 diberikan kepada:

   a. *Senior Vice President/ Vice President/* Kepala di Kantor Pusat
   b. Kepala Cabang
   c. Nakhoda, Kepala kamar Mesin dan Mualim 1
   d. GM di SBU
   e. Pengawas ISM & ISPS *Code*, Pengawas QHSSE, Pengawas Intern I & II, Pengawas Administrasi & Evaluasi, Pengawas Investigasi dan Pengawas Kapal

   f. Manager di Kantor Pusat dan SBU
   g. Koordinator *Executive Assistant* di Kantor Pusat
   h. Kepala Bagian di Cabang tipe 1 & 2
   i. Kepala urusan di Cabang
   j. Supervisor di SBU Galangan Pelni Surya
   k. *Dock Master* di SBU Galangan Pelni Surya
   l. Sekretaris Direksi
   m. *Executive Assistance/ Personal Assistance*
6. Tunjangan Perumahan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 diberikan kepada
   a. Senior Vice President/ Vice President/ Kepala di Kantor Pusat
   b. Pengawas ISM & ISPS *Code*, Pengawas QHSSE, Pengawas Intern Area I & II, Pengawas Administrasi & Evaluasi, Pengawas Investigasi dan Pengawas Kapa!;

   c. Manager di Kantor Pusat
   d. Koordinator *Executive Assistant* di Kantor Pusat;
7. Tunjangan Premi tetap awak kapal dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 diberikan

Internal Area I & II Supervisors, Administration & Evaluation Supervisors, and Ship Supervisors
e. Managers at the Head Office and SBU
f. Executive Assistance Coordinator at the Head Office
g. Section Head at Branches types 1 & 2
h. Affairs Head at Branches types 1, 2, 3 & 4

2. Functional Allowance in accordance with Director's Decree Number 10.30/01/SK/HKO.01/2023 is provided to Director's Senior Staff, Director's Middle Staff, Chief Inspectors, Chief Supervisors, Chief Surveyors, Expert Developers
3. Command Allowance in accordance with Director's Decree Number 10.30/01/SK/HKO.01/2023 is provided to Ship Captains/Chief Engineers/First Officers/Senior Engineers.
4. Professional Allowance in accordance with Director's Decree Number 10.30/01/SK/HKO.01/2023 is provided to Doctors and Nurses on Company-operated ships.

5. Telecommunication Allowance in accordance with Director's Decree Number 10.30/01/SK/HKO.01/2023 is provided to:
   a. Senior Vice President/Vice President/Head at the Head Office
   b. Branch Manager
   c. Ship Captain, Chief Engineer, and First Officer
   d. SBU General Managers
   e. ISM & ISPS Code Supervisors, QHSSE Supervisors, Internal Supervisors I & II, Administration & Evaluation Supervisors, Investigation Supervisors, and Ship Supervisors
   f. Managers at the Head Office and SBU
   g. Executive Assistance Coordinator at the Head Office
   h. Section Head at Branches types 1 & 2
   i. Affairs Head at Branches
   j. Supervisors at SBU Pelni Surya Shipyard
   k. Dock Master at SBU Pelni Surya Shipyard
   l. Director's Secretary
   m. Executive Assistance/Personal Assistance
6. Housing Allowance in accordance with Director's Decree Number 10.30/01/SK/HKO.01/2023 is provided to:
   a. Senior Vice President/Vice President/Head at the Head Office
   b. ISM & ISPS Code Supervisors, QHSSE Supervisors, Internal Supervisors I & II, Administration & Evaluation Supervisors, Investigation Supervisors, and Ship Supervisors
   c. Managers at the Head Office
   d. Executive Assistance Coordinator at the Head Office
7. Fixed Premium for Ship Crew in accordance with Director's Decree Number: 10.30/01/SK/HKO.01/2023 is provided to

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

kepada pegawai laut yang telah mengorbankan waktu tidak bertemu dengan keluarga untuk waktu tertentu demi Perusahaan sehingga diberikan Premi yang dipengaruhi faktor Tipe Kapal, Jabatan dan Penugasan berlayar dari Perusahaan dengan perintah berdasarkan SMAT Keputusan Direksi dan/atau Mutasi dan/atau Dokumen Resmi Perusahaan lainnya seperti Mutasi Naik Tetap, Pengganti Cuti (PC), Pengganti Cuti Khusus, ataupun Pengenalan

8. Insentif tim pendukung kinerja direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 10.30/01/SK/HKO.0l/2023 diberikan kepada pegawai tetap yang ditempatkan sebagai *Executive Assistant/ Personal Assistant* Direksi dan Sekretaris Direksi
9. Tunjangan Kemahalan adalah tunjangan untuk memberikan kepada pegawai tetap yang ditempatkan di Kantor Cabang tertentu yang memiliki risiko kerja tinggi dan biaya hidup yang lebih besar pada saat penempatan dari pada Provinsi DKI Jakarta.

sea employees who have sacrificed time away from their families for a certain period for the Company, thus they are given a premium influenced by factors such as Ship Type, Position, and Sailing Assignment from the Company with orders based on Director's Decree and/or other Company Official Documents such as Permanent Promotion Orders, Leave Replacement (PC), Special Leave Replacement, or Introduction

8. Incentive for director's performance support team based on Director's Decree Number: 10.30/01/SK/HKO.01/2023 is provided to permanent employees placed as Director's Executive Assistant/Personal Assistant and Director's Secretary
9. Hardship Allowance is an allowance given to permanent employees placed in certain Branch Offices that have high work risks and higher living costs at the time of placement than in DKI Jakarta Province.

PEMENUHAN HAK KARYAWAN

Perseroan berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan seluruh pegawai, salah satunya dengan memberikan remunerasi bagi para pegawai yang memiliki kinerja baik. Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh Perseroan merupakan bentuk komitmen imbal jasa kepada pegawai mencakup imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang, imbalan pascakerja serta pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Imbalan kerja diberikan melalui gaji/honorarium, tunjangan-tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan dan program pensiun bagi pegawai. Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan struktur remunerasi yang kompetitif.

EMPLOYEE RIGHTS FULFILLMENT

The Company is committed to ensuring the welfare of all employees, one of which is by providing remuneration for employees with good performance. Remuneration or work benefits provided by the Company are a form of commitment to reward employees, including short-term and long-term work benefits, post-employment benefits, and severance pay in the event of termination of employment. Work benefits are provided through salaries/honorariums, allowances, bonuses, long-service awards, and health and pension programs for employees. The Company always strives to provide a competitive remuneration structure.

Jumlah Remunerasi yang Diberikan kepada Karyawan
Total Remuneration Provided to Employees

Jumlah Remunerasi Karyawan Tahun 2023 Total Employee Remuneration for 2023 **Rp197.958.694.291,00**	Diberikan untuk 882 pegawai Provided for 882 employees
Jumlah Remunerasi Karyawan Tahun 2023 Total Employee Remuneration for 2023 **Rp562.549.790.030,00**	Diberikan untuk 3.647 pegawai Provided for 3,647 employees

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Ratio	Skala Perbandingan Scale of Comparison
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah The highest and lowest employee salary ratios	8:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The highest and lowest Director salary ratios	1,18:1
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah The highest and lowest Board of Commissioners salary ratios	1,11:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan karyawan tertinggi The highest Director and highest employee salary ratios	16,80:1

INDEKS KETERIKATAN PEGAWAI 2023

Indeks keterikatan pegawai tahun 2023 berada di skor 4.32 dengan kategori "terikat" atau "*engaged*". Berdasarkan hasil tersebut, Perseroan tetap berupaya untuk meningkatkan hal-hal yang menjadi perhatian sesuai dengan Survei Keterikatan Pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

EMPLOYEE ENGAGEMENT INDEX 2023

The employee engagement index for the year 2023 is at a score of 4.32, categorised as "engaged". Based on these results, the Company continues to strive to improve areas of concern as identified in the Employee Engagement Survey, detailed as follows:

No	Aspek Kepuasan Aspect of Satisfaction	Rencana dan Tindak Lanjut Plans and Follow-up
1	*Pay & Benefit*	**Manajemen Kinerja & Kesejahteraan** Menetapkan pemberian jasa produksi berdasarkan dengan KPI *(Key Performance Indicator)* Individu, dimana pemberian imbalan sesuai dengan beban kerja dan kinerja yang didapatkan sehingga lebih adil bagi pegawai **Performance Management & Welfare** Establishing the provision of production services based on Individual Key Performance Indicators (KPIs), where compensation is commensurate with workload and performance obtained, thus ensuring fairness for employees.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

No	Aspek Kepuasan Aspect of Satisfaction	Rencana dan Tindak Lanjut Plans and Follow-up
2	*Employee Value Proposition (EVP)*	• **Manajemen Kinerja & Kesejahteraan** Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap fasilitas yang diberikan kepada pegawai seperti Klinik Kantor Pusat, *Daycare* Kantor Pusat, Pelayanan Kesehatan dll. • **Pengembangan SDM & Organisasi** Memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan baik melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini juga sudah didukung dengan adanya KPI Divisi SDM terkait dengan *training plan* yang terlaksana dan compliance *updating* sertifikat pegawai laut. • **Perencanaan SDM & Talenta** Memetakan pegawai agar dapat menduduki posisi sesuai dengan kompetensinya. Hal ini didukung dengan adanya *review* untuk perubahan pola karir yang baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. • **Pengawakan Kapal PSO dan Non PSO** Memetakan pegawai agar dapat menduduki posisi sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dengan mensosialisasikan dan mengimplementasikan SK Pola Pengembangan Karir Pegawai Laut yang baru (Desember 2023). • **Hubungan Industrial & Budaya Perusahaan** Meningkatkan implementasi *Core Values* "AKHLAK" hingga tahapan perubahan perilaku (*behaviour change*) dimana nilai-nilai utama SDM BUMN tercermin dalam perilaku positif seluruh insan perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja kondusif. • **Performance Management & Welfare** Evaluating and improving facilities provided to employees such as the Central Office Clinic, Central Office Daycare, Health Services, etc. • **Human Resources & Organizational Development** Ensuring that every employee has an equal opportunity to participate in development programs through training and education. This is also supported by the Division's HR KPIs related to implemented training plans and compliance with updating employee certificates. • **Human Resources & Talent Planning** Mapping employees to positions according to their competencies. This is supported by reviews for new career pattern changes according to the current needs of the company. • **PSO and Non-PSO Ship Operations** Mapping employees to positions according to their competencies. This is done by socializing and implementing the new Career Development Pattern for Maritime Employees (December 2023). • **Industrial Relations & Corporate Culture** Enhancing the implementation of Core Values "AKHLAK" to the stage of behavior change, where the main values of SOE human resources are reflected in the positive behavior of all company personnel, creating a conducive work environment.

No	Aspek Kepuasan Aspect of Satisfaction	Rencana dan Tindak Lanjut Plans and Follow-up
	Job Security	• **Manajemen Kinerja & Kesejahteraan** Melakukan penyesuaian remunerasi serta memberikan peningkatan secara bertahap terhadap iuran jamiran hari tua untuk kesejahteraan pegawai pasca kerja. • **Pengembangan SDM & Organisasi** Melakukan analisa kebutuhan pelatihan dan memberikan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai. • **Perencanaan SDM & Talenta, Pengawakan Kapal PSO & Non PSO** Memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam jenjang karier sesuai dengan *path*/jalur pegawai, dalam hal ini sedang disusun acuan baru dalam pelaksanaan pola karier yang diharapkan lebih relevan dan obyektif untuk diterapkan di lingkungan pegawai darat. • **Manajemen Kinerja & Kesejahteraan** Memastikan bahwa setiap pegawai memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) yang jelas dan sesuai jabatan/tupoksinya, serta mendukung/selaras dengan KPI Atasan dan Perusahaan. • **Performance Management & Welfare** Adjusting remuneration and gradually increasing contributions to the retirement fund for the welfare of post-employment employees. • **Human Resources & Organizational Development** Analyzing training needs and providing the necessary competency development according to the duties of each employee. • **Human Resources Planning & Talent, PSO & Non-PSO Ship Operations** Ensuring that every employee has an equal opportunity for career advancement according to the employee's path/career track, in this case, a new reference is being developed for the implementation of a career pattern that is expected to be more relevant and objective to be applied in the ground staff environment. • **Performance Management & Welfare** Ensuring that every employee has clear Key Performance Indicators (KPIs) according to their position/duties, and supports/aligns with superior and company KPIs.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

No	Aspek Kepuasan Aspect of Satisfaction	Rencana dan Tindak Lanjut Plans and Follow-up
	Career Opportunitis	**Pengembangan SDM & Organisasi** Memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan baik melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan jalur karir pegawai. • **Perencanaan SDM Darat dan Talenta** Memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam jenjang karier sesuai dengan *path*/jalur pegawai. Hal ini didukung dengan adanya *review* untuk perubahan pola karir yang baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. • **Perencanaan SDM & Talenta, Pengawakan Kapal PSO & Non PSO** Memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam jenjang karier sesuai dengan *path*/jalur pegawai. Hal ini dengan mensosialisasikan dan mengimplementasikan SK Pola Pengembangan Karir Pegawai Laut yang baru (Desember 2023). **Human Resources & Organizational Development** Ensuring that every employee has an equal opportunity to participate in development programs through training and education according to the employee's career path. • **Ground Human Resources and Talent Planning** Ensuring that every employee has an equal opportunity for career advancement according to the employee's path/career track. This is supported by reviews for new career pattern changes according to the current needs of the company. • **Human Resources Planning & Talent, PSO & Non-PSO Ship Operations** Ensuring that every employee has an equal opportunity for career advancement according to the employee's path/career track. This is done by socializing and implementing the new Career Development Pattern for Maritime Employees (December 2023).

PENERAPAN NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

PELNI menerapkan *core values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sesuai arah kebijakan Kementerian BUMN, yang termuat di dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SE-7/ MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penerapan kebijakan tersebut merupakan wujud upaya Kementerian BUMN untuk mengoptimalisasi peran BUMN sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, *social welfare*, penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta. Kementerian BUMN telah memberlakukan penerapan nilai-nilai utama untuk diimplementasikan dan diinternalisasikan di seluruh BUMN sebagai budaya perusahaan.

Maksud dan tujuan penetapan *core values* AKHLAK di lingkungan PELNI adalah sebagai berikut:

1. Agar seluruh insan PELNI mengetahui, mengimplementasikan dan menginternalisasikan *core*

IMPLEMENTATION OF COMPANY CULTURE VALUES

PELNI implements the core values of AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, and Kolaboratif) in accordance with the direction of the Ministry of State-Owned Enterprises policy, as outlined in Minister of State-Owned Enterprises Letter No. SE-7/MBU/07/2020 regarding the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises. The implementation of this policy is an effort by the Ministry of State-Owned Enterprises to optimize the role of State-Owned Enterprises as drivers of economic growth, social welfare, providers of employment, and talent providers. The Ministry of State-Owned Enterprises has enforced the application of core values to be implemented and internalized throughout State-Owned Enterprises as a corporate culture.

The purpose and objective of establishing the AKHLAK core values in the PELNI environment are as follows:

1. To ensure that all PELNI personnel know, implement, and internalize the AKHLAK core values sincerely, consistently,

values AKHLAK secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja PELNI yang selaras dengan *core values* tersebut;
2. Membantu seluruh insan PELNI agar berperilaku secara benar, baik secara hukum maupun secara etis dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Perseroan;
3. Membentuk insan PELNI berintegritas kuat dan perilaku yang beretika, diharapkan Perusahaan akan memperoleh kepercayaan yang terus-menerus dari para *stakeholders*;
4. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi insan PELNI dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
5. Membentuk karakter insan PELNI yang bertanggungjawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama insan PELNI maupun dengan pihak di luar Perseroan;
6. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan menjunjung tinggi *core values* AKHLAK sehingga akan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Guna mendukung penerapan *core values* BUMN tersebut, PELNI melakukan pembuatan buku saku Budaya AKHLAK sebagai pedoman seluruh pegawai dalam mengamalkan dan mengimplementasi budaya AKHLAK di dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pada 2023, PELNI melakukan orientasi pengenalan budaya kerja AKHLAK kepada pegawai baru pada tanggal 12 Maret 2023 (*Batch* I), 12 Mei 2023 (*Batch* II), 10 Juli 2023 (*Batch* III) dan 16 November 2023 (*Batch* IV).

PENILAIAN KINERJA

PELNI telah merancang *Key Performance Indicator*, penetapan target, pengukuran realisasi, serta monitoring realisasi. Secara periodik, Perseroan melaksanakan penilaian atas kinerja dan kompetensi pegawai.

Adapun penyusunan indikator kinerja pegawai dilakukan dengan metode *cascading* sesuai *output* kinerja masing-masing jabatan serta mengacu pada *Balanced Scorecard* sehingga selaras dengan Kinerja Kelompok dan menunjang tujuan dari perusahaan.

Proses pengukuran kinerja dilakukan secara periodik setiap semester oleh seluruh pegawai Darat maupun Laut. Pegawai diminta secara aktif dan objektif melakukan *self-assesment* yang akan difinalisasi oleh atasan pada *Performance*

and consistently, thus generating daily behavior and shaping PELNI's work culture in line with these core values;

2. To assist all PELNI personnel in behaving correctly, both legally and ethically, in order to maintain and enhance the Company's image;
3. To shape PELNI personnel with strong integrity and ethical behavior, it is expected that the Company will continuously gain trust from stakeholders;
4. To provide clarity in attitude and behavior for PELNI personnel in carrying out their work activities, thus producing a good reputation, which ultimately achieves long-term business success;
5. To shape the character of PELNI personnel to be responsible and ethical in interacting both with fellow PELNI personnel and with external parties;
6. To create a healthy and comfortable work atmosphere and environment by upholding the AKHLAK core values, thus supporting sustainable performance improvement.

To support the implementation of these State-Owned Enterprise core values, PELNI has created the AKHLAK Culture Pocketbook as a guide for all employees in practicing and implementing AKHLAK culture in their daily lives. In addition, in 2023, PELNI conducted an orientation to introduce the AKHLAK work culture to new employees on March 12, 2023 (Batch I), May 12, 2023 (Batch II), July 10, 2023 (Batch III), and November 16, 2023 (Batch IV).

PERFORMANCE ASSESSMENT

PELNI has designed Key Performance Indicators, target setting, realization measurement, and realization monitoring. Periodically, the Company conducts performance assessments and employee competency assessments.

The preparation of employee performance indicators is carried out using the cascading method according to the performance output of each position and refers to the Balanced Scorecard so that it is in line with Group Performance and supports the company's goals.

The performance measurement process is carried out periodically every semester by all Land and Sea employees. Employees are requested to actively and objectively conduct self-assessment which will be finalized by superiors in the

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Management System. Hasil penilaian akan disampaikan kepada *management* dan selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan atas pemberian *Reward Management* dan pengembangan pegawai yang bersangkutan.

RENCANA PELATIHAN SDM 2024

Program pelatihan dan pengembangan PT PELNI (Persero) tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pembahasan RKAP bersama Direktur Keuangan, anggaran pelatihan yang sudah disetujui dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Program pengembangan SDM Darat: Rp13.463.000.000,00
2. Program pengembangan SDM Laut: Rp18.485.482.000,00

Anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan kompetensi pegawai darat & pegawai laut dengan gambaran demografi sebagai berikut:

Performance Management System. The assessment results will be submitted to management and will then be used as a consideration for providing Reward Management and developing the respective employees.

HUMAN RESOURCES TRAINING PLAN 2024

The training and development program of PT PELNI (Persero) for the year 2024, based on the results of the discussion meeting of the RKAP with the Finance Director, can be mapped as follows:

1. Onshore Human Resources Development Program: Rp 13,463,000,000
2. Offshore Human Resources Development Program: Rp 18,485,482,000

This budget is used to develop the competencies of land and sea employees with the following demographic breakdown:

Demografi SDM Darat & SDM Laut
Land & Marine Human Resources Demographics

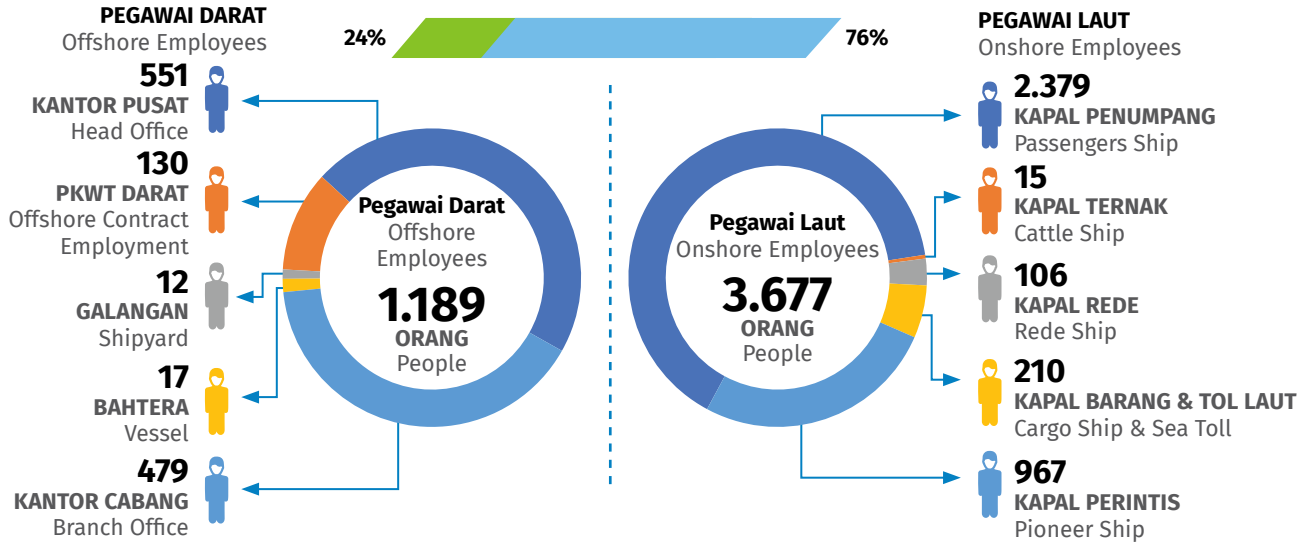

Berdasarkan data tersebut, maka ditetapkan hal-hal yang menjadi *quick wins* dalam program pengembangan SDM PT PELNI (Persero) pada tahun 2024 sebagai berikut:

Based on the data, the following are identified as quick wins in PT PELNI's (Persero) human resources development program for the year 2024:

1 **Penyusunan learning journey dan pembangunan kapabilitas organisasi secara berkelanjutan beserta metode evaluasinya**
Development of Learning Journeys and Continuous Organizational Capability Building Along with Their Evaluation Methods

1. Mengidentifikasi nilai kritikal berdasarkan sasaran strategis dan kebutuhan organisasi (teknis dan pelaku)
2. Menyusun silabus pengembangan, program pelatihan, dan program sertifikasi (*learning journey*) untuk kompetensi perilaku *leadership* serta kompetensi teknis kritikal (fungsi *core*)
3. Menyusun desain evaluasi program pelatihan
4. Meninjau dan *update* desain *Knowledge Management System* (KMS) dan mekanisme *sharing transfer knowledge*

5. Identifying critical values based on strategic goals and organizational needs (technical and behavioral).
6. Developing development syllabi, training programs, and certification programs (learning journeys) for leadership behavior competencies and critical technical competencies (core functions).
7. Designing evaluation programs for training.
8. Reviewing and updating the design of the Knowledge Management System (KMS) and mechanisms for knowledge transfer sharing.

2 **Mengatasi/Mengidentifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Penguatan Fungsi Learning Center**
Addressing/Identifying Training Needs and Strengthening the Function of the Learning Center

1. Menyusun kebutuhan *training* (TNA) untuk level individu (IDP) pada kompetensi non kritikal (fungsi *support*) berdasarkan hasil asesmen kompetensi
2. Menyusun kebutuhan *training* (TNA) untuk level organisasi berdasarkan *gap* kompetensi kritikal yang mendukung sasaran strategis dan, TNA level individu (IDP) berdasarkan hasil asesmen kompetensi pegawai
3. Menyusun rencana dan persiapan pembentukan *Learning Center* sebagai *business unit*
4. Peningkatan fungsi HC baik kapabilitas maupun infrastuktur sebagai *Learning Center* Perusahaan

5. Developing training needs analysis (TNA) for individual level (IDP) on non-critical competencies (support functions) based on competency assessment results.
6. Developing training needs analysis (TNA) for organizational level based on gaps in critical competencies that support strategic goals, and TNA for individual level (IDP) based on employee competency assessment results.
7. Planning and preparing for the establishment of the Learning Center as a business unit.
8. Enhancing the HC function in terms of both capability and infrastructure as the Company's Learning Center.

3 **Pelaksanaan Program Pelatihan, Evaluasi dan *Sharing Knowledge***
Implementation of Training Programs, Evaluation, and Knowledge Sharing

1. Pelaksanaan program pelatihan & sertifikasi untuk kompetensi kritikal (fungsi *core*) sesuai *Learning journey*
2. Pelaksanaan evaluasi program pengembangan & pelatihan, termasuk penghitungan dampak yang diberikan pelatihan terhadap hasil kerja pegawai
3. Pelaksanaan *sharing transfer knowledge* di unit kerja terkait pasca pelaksanaan pelatihan

4. Implementation of training and certification programs for critical competencies (core functions) according to the learning journey.
5. Implementation of program evaluation for development and training, including measuring the impact of the training on employee performance.
6. Implementation of knowledge transfer sharing within relevant work units post-training.

PROGRAM PENGEMBANGAN PEGAWAI DARAT

Berdasarkan hasil analisis yang mencakup analisis individu, jabatan, dan organisasi, maka kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang menjadi rancangan untuk tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Berdasarkan Kelompok Jabatan
   a. BOD
      1) Program Pengayaan
         Divisi SDM dan Kesekretariatan Perusahaan mengupayakan agar Direksi selalu mendapatkan informasi mengenai peraturan baru dan

EMPLOYEE DEVELOPMENT PROGRAM FOR LAND EMPLOYEES

Based on the analysis results covering individual, position, and organizational analysis, the training and development needs planned for 2024 can be outlined as follows:

1. Development Program Based on Job Groups
   a. Board of Directors (BOD)
      1) Enrichment Program
         The HR and Corporate Secretariat divisions endeavor to ensure that the Board of Directors always receives information about new regulations

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

perkembangan terbaru di bidang ekonomi, industri, teknologi pelayaran, logistik maritim, dan aspek-aspek penting lainnya. Dengan demikian, akan dilakukan pengayaan berkala bagi anggota Direksi untuk menghadiri seminar, konferensi, dan program pengembangan sesuai bidang masing-masing.

2) *Sharing Session*
Dalam upaya menciptakan iklim transfer dan *sharing knowledge* yang solid, maka diciptakan instrumen sebagai berikut:
   a) Program *Leaders* Forum yang ditujukan sebagai instrumen peningkatan kompetensi Direksi melalui diskusi yang dilaksanakan secara internal dengan topik tertentu yang dibawakan secara bergantian;
   b) Dalam upaya penguatan kompetensi, anggota Direksi akan menjadi fasilitator dalam *Group Coaching Session* bagi kelompok jabatan BOD-1 dan BOD-2.

b. *Vice President*
1) Program Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Utama
Program Diklat Penjenjangan merupakan bagian dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan berdasarkan analisis jabatan. Program Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Utama idealnya dilaksanakan setiap satu tahun sekali sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, program Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Utama akan dipersyaratkan sebagai berikut:
   a) Bersifat *mandatory* atau wajib bagi kelompok BOD-1 yakni kelompok jabatan *Vice President* atau setara yang belum mengikuti Diklat Manajerial Tingkat Utama;
   b) Pegawai yang berada dibawah level BOD-1 yang sedang disiapkan untuk rencana suksesi dalam menduduki jabatan BOD-1 sehingga tuntutan kompetensi sudah terpenuhi ketika menduduki kelompok jabatan BOD-1.

2) Program Pengembangan *Talent* BOD-1
Pada tahun 2024, Program Pengembangan Talent rencananya akan dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk kader pemimpin yang dipersyaratkan dalam ITMS (*Integrated Talent Management System*). Program ini mencakup *talent* BUMN dan talent perempuan dengan program-program sebagai berikut:

and the latest developments in the fields of economics, industry, maritime shipping technology, maritime logistics, and other important aspects. Thus, periodic enrichment will be provided for the Directors to attend seminars, conferences, and development programs in their respective fields.

2) Sharing Sessions
In an effort to create a climate of knowledge transfer and sharing, the following instruments are created:
   a) The Leaders Forum program aimed at increasing the competence of the Directors through internal discussions on specific topics presented in rotation;
   b) In an effort to strengthen competence, the Directors will act as facilitators in Group Coaching Sessions for the BOD-1 and BOD-2 position groups.

b. Vice President
1) Senior Managerial Development Training Program
The Senior Managerial Development Training Program is part of the training and development needs based on job analysis. The Senior Managerial Development Training Program should ideally be conducted once a year as needed. In this case, the Senior Managerial Development Training Program will be required as follows:
   a) Mandatory for the BOD-1 group, which includes Vice Presidents or equivalent positions who have not yet attended the Senior Managerial Development Training Program;
   b) Employees below the BOD-1 level who are being prepared for succession plans to occupy BOD-1 positions so that competency requirements are met when occupying BOD-1 position groups.

2) BOD-1 Talent Development Program
In 2024, the Talent Development Program is planned as an effort to form leaders required in the Integrated Talent Management System (ITMS). This program includes BUMN talents and female talents with the following programs:

a) *Group Coaching Session* oleh BOD
Pada program ini, BOD akan melakukan *group coaching session* kepada kelompok jabatan BOD-1 secara terjadwal sehingga dapat dicapai transfer dan *sharing knowledge* yang solid.
b) *Leaders Forum*
Program ini dirancang sebagai sebuah program interaktif yang dikemas menjadi sebuah forum diskusi yang membahas salah satu kompetensi BUMN bersama dengan fasilitator yang berperan sebagai pembicara yang dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.
c) *Business Leader Upskilling for Great Performance*
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap strategis kelompok jabatan BOD-1 tentang kompetensi *business*, managerial, dan *leadership*, serta memberikan persiapan untuk menghadapi *assessment* bagi kelompok jabatan BOD-1.
d) *The Leaders as Teachers*
Program ini merupakan program yang bersifat budaya yang memiliki fokus untuk menginternalisasikan dan penguatan perspektif *leaders as teachers.*

3) Program Pengayaan Eksekutif *for* BOD-1
Program pengayaan eksekutif merupakan inisiatif yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan eksekutif di dalam perusahaan. Program ini merupakan program intensif dengan tujuan untuk penguatan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Program pengayaan eksekutif yang ditujukan untuk kelompok jabatan BOD-1 yakni *Vice President* atau setara dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Program pengayaan yang ditujukan untuk kelompok jabatan BOD-1 atau *Vice President* dan setara ini dapat berupa *in-house training* maupun *public training* yang disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas kompetensi *Vice President* yang berkaitan dengan Kualifikasi Profesional (*Professional Qualification*), yaitu:
i. Keuangan *(financial)*
ii. Komersial *(commercial)*

a) Group Coaching Sessions by the BOD
In this program, the BOD will conduct group coaching sessions for the BOD-1 position group on a scheduled basis to achieve solid knowledge transfer and sharing.
b) Leaders Forum
This program is designed as an interactive program packaged as a discussion forum that discusses one of the BUMN competencies with facilitators acting as speakers who can come from internal or external company sources.
c) Business Leader Upskilling for Great Performance
This program aims to enhance the strategic knowledge, skills, and attitudes of the BOD-1 position group regarding business, managerial, and leadership competencies, and to prepare them to face assessments for the BOD-1 position group.
d) The Leaders as Teachers
This program is a cultural program focused on internalizing and strengthening the perspective of leaders as teachers.

3) Executive Enrichment Program for BOD-1
The executive enrichment program is a specially designed initiative to enhance the knowledge, skills, and executive leadership within the company. This intensive program aims to strengthen and develop the competencies needed to support the company's growth and sustainability. The executive enrichment program aimed at the BOD-1 position group, such as Vice Presidents or equivalent positions, can be outlined as follows:
a) Enrichment programs for the BOD-1 position group or Vice Presidents and equivalents can be in the form of in-house or public training tailored to the competencies to be developed, aiming to enhance the Vice Presidents' competence capabilities related to Professional Qualification, namely:
i. Finance
ii. Commercial

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

iii. Sumber Daya Manusia *(people)*
iv. Operasional *(operational)*
v. Teknologi *(technology)*

b) Selain beberapa kompetensi yang sudah disebutkan di atas, program pengayaan ini juga merujuk kepada kompetensi yang dituju berdasarkan 10 Indikator Kompetensi yang menjadi syarat untuk calon eksekutif BUMN.

c. Manager

1) Program Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Madya

Program Diklat Penjenjangan merupakan bagian dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan berdasarkan analisis jabatan. Dalam hal ini, program Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Madya akan dipersyaratkan sebagai berikut:

i. Bersifat *mandatory* atau wajib bagi kelompok jabatan *Manager* atau setara yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Madya;
ii. Pada tahun 2024, akan dilaksanakan sebanyak 1* *batch* dengan jumlah peserta sebanyak 30* orang. (*sewaktu-waktu dapat diajukan kembali dengan mempertimbangkan urgensi dan anggaran yang tersedia)

2) Program Pengembangan *Talent* BOD-2

Pada tahun 2024, Program Pengembangan Talent untuk level BOD-2 dan *manager* millenial rencananya akan dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk kader pemimpin yang dipersyaratkan dalam ITMS (*Integrated Talent Management System*). Rencana program pengembangan talent yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) *Group Coaching Session* oleh BOD atau BOD-1

Pada program ini, masing-masing BOD atau BOD-1 akan ditunjuk untuk memberikan *Group Coaching* secara bergantian kepada peserta *Group Coaching yang* bertujuan untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja yang dapat membantu pegawai dalam kelompok jabatan BOD-2 yakni *Manager* dan setara dalam mencapai keberhasilan dalam melakukan pekerjaannya.

b) *Leaders Forum*

Pada program ini, perusahaan akan menghadirkan pembicara internal atau eksternal untuk membahas salah satu kompetensi BUMN. Berikut ini adalah beberapa kompetensi yang dapat menjadi usulan topik forum tersebut:

iii. Human Resources
iv. Operational
v. Technology

b) In addition to the competencies mentioned above, this enrichment program also refers to the competencies targeted based on the 10 Competency Indicators required for BUMN executive candidates.

c. Manager

1) Middle Managerial Development Training Program

The Middle Managerial Development Training Program is part of the training and development needs based on job analysis. In this case, the Middle Managerial Development Training Program will be required as follows:

i. Mandatory for the Manager position group or equivalent positions who have not yet attended the Middle Managerial Development Training Program;
ii. In 2024, there will be 1 batch conducted with a total of 30 participants. (*subject to review based on urgency and available budget)

2) BOD-2 Talent Development Program

In 2024, the Talent Development Program for BOD-2 level and millennial managers is planned as an effort to form leaders required in the Integrated Talent Management System (ITMS). The planned talent development program is as follows:

a) Group Coaching Sessions by the BOD or BOD-1

In this program, each BOD or BOD-1 will be appointed to provide Group Coaching alternately to the participants of the Group Coaching aimed at transmitting knowledge, skills, or work attitudes that can help employees in the BOD-2 position group, such as Managers and equivalents, to achieve success in their work.

b) Leaders Forum

In this program, the company will invite internal or external speakers to discuss one of the BUMN competencies. The following are some competencies that can be proposed as topics for the forum:

i) *Surfing the Ecosystem:*
   (1) *Digital Savvy*
   (2) *Strategic Orientation*
   (3) *Stakeholder Management*
ii) *Build Your Company:*
   (1) *Change Leadership*
   (2) *People & Culture*
   (3) *Innovation & Creativity*
iii) *Grow Yourself:*
   (1) *Communication*
   (2) *Resilient*
   (3) *Learning Agility*

c) Membudayakan program *The Leaders as Teachers.*

3) Program Pengayaan

Program pengayaan merupakan serangkaian inisiatif pelatihan dan pengembangan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai serta aspek-aspek penting lainnya yang relevan dengan peran dan tanggung jawab pegawai. Program pengayaan untuk kelompok jabatan BOD-2 atau kelompok jabatan Manager dan setara dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Program pengayaan berdasarkan kelompok jabatan *Manager* dapat dibuat dalam bentuk *In-House Training* karena melihat kompetensi sasaran yang bersifat general dan peserta yang menjadi sasaran program adalah seluruh *Manager*.

d. Program Pengembangan Kepala Cabang

1) *Program Pengembangan Kepala Cabang dan setara*

Dikarenakan terdapat kebutuhan dan tuntutan khusus bagi Kepala Cabang yakni kompetensi strategis dan operasional, maka terdapat stimulus dan *treatment* tambahan untuk pengembangan Kepala Cabang. Program pengembangan Kepala Cabang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pada tahun 2024, Program Pengembangan untuk Kepala Cabang & jabatan setara rencananya akan dilaksanakan sebagai program lanjutan dari program penjenjangan managerial yang bersifat mandatory. Namun, karena keterbatasan dari segi anggaran, program pengembangan ini akan dilaksanakan secara daring atau online.

b) *Job Target and Responsibilities* yang menjadi sasaran program tersebut antara lain:

i) Surfing the Ecosystem:
   (1) Digital Savvy
   (2) Strategic Orientation
   (3) Stakeholder Management
ii) Build Your Company:
   (1) Change Leadership
   (2) People & Culture
   (3) Innovation & Creativity
iii) Grow Yourself:
   (1) Communication
   (2) Resilient
   (3) Learning Agility

c) Cultivating The Leaders as Teachers program.

3) Enrichment Program

The enrichment program is a series of training and development initiatives designed to enhance employee knowledge, skills, work attitudes, and other important aspects relevant to employee roles and responsibilities. The enrichment program for the BOD-2 position group or the Manager position group and equivalents can be outlined as follows:

a) Enrichment programs based on the Manager position group can be in the form of In-House Training due to the general nature of the targeted competencies and the participants targeted for the program are all Managers.

d. Branch Manager Development Program

1) Branch Manager and equivalent Development Program

Due to specific needs and demands for Branch Managers, such as strategic and operational competencies, there are additional stimuli and treatments for Branch Manager development. The Branch Manager development program can be outlined as follows:

a) In 2024, the Development Program for Branch Managers & equivalent positions is planned as an advanced program from the mandatory managerial development program. However, due to budget constraints, this development program will be conducted online.

b) Job Targets and Responsibilities targeted by the program include:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Job Target	*Responsibilities*
Pencapaian target profitabilitas dan pencapaian target penjualan	Mampu memahami laporan keuangan
Achievement of profitability targets and sales targets	Ability to understand financial statements
Pencapaian target *market share* atau pangsa pasar	Melakukan segmentasi, *targeting*, *positioning*, dan mendesain *value proposition* yang tepat
Achievement of target market share	Conducting segmentation, targeting, positioning, and designing the right value proposition
Kelancaran dan efisiensi proses bisnis maupun operasional	Mampu memperbaiki alur proses, mengenali *waste*, dan melakukan penyederhanaan kerja
Smoothness and efficiency of business and operational processes	Ability to improve process flow, identify waste, and simplify work
Tercapainya sinergi dan sasaran tim	Mampu mengatur, memimpin, dan mengembangkan tim
Achievement of synergy and team goals	Ability to organize, lead, and develop teams

c) Selain *job target* & *responsibilities*, peningkatan tujuan komersial bisnis dan *strategic business* juga menjadi sasaran dalam program pengembangan Kepala Cabang & jabatan setara.

2) *In-House Training*
Program *in-house training* yang diberikan kepada para Kepala Cabang biasanya berkaitan dengan kompetensi yang general, seperti Penguatan Budaya AKHLAK, dan kompetensi teknis yang menunjang peningkatan pemahaman dan keterampilan para Kepala Cabang.

3) Program *Focus Group Discussion (FGD)*
Pada program FGD ini, para Kepala Cabang dan beberapa unit kerja terkait akan hadir untuk membahas mengenai hal-hal yang spesifik, seperti pemahaman mengenai strategi perusahaan bersama unit kerja Perencanaan Korporat, atau berbagi pengalaman mengenai upaya peningkatan penghasilan kantor cabang, membina *networking*, dan lain-lain.

e. Supervisor

1) Program Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Muda
Program Diklat Penjenjangan merupakan bagian dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan berdasarkan analisis jabatan. Dalam hal ini, program Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Muda akan dipersyaratkan sebagai berikut:

a) Bersifat *mandatory* atau wajib bagi kelompok

c) In addition to job targets & responsibilities, increasing commercial and strategic business goals is also a target in the Branch Manager & equivalent position development program.

2) In-House Training
The in-house training program provided to Branch Managers is usually related to general competencies, such as Strengthening AKHLAK Culture, and technical competencies that support the improvement of understanding and skills of the Branch Managers.

3) Focus Group Discussion (FGD) Program
In this FGD program, Branch Managers and several related units will attend to discuss specific topics, such as understanding the company's strategy with the Corporate Planning unit, or sharing experiences regarding efforts to increase branch office revenue, networking, and others.

e. Supervisor

1) Junior Managerial Development Training Program

The Development Training Program is part of the training and development needs based on job analysis. In this case, the Junior Managerial Development Training Program will be required as follows:

a) Mandatory for the Supervisor or equivalent

jabatan Supervisor atau setara yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan Manajerial Tingkat Muda;

b) Pada tahun 2024, akan dilaksanakan sebanyak 1* *batch* dengan jumlah peserta sebanyak 30* orang. (*sewaktu-waktu dapat diajukan kembali dengan mempertimbangkan urgensi dan anggaran yang tersedia)

2) Program Pengayaan

Program pengayaan merupakan serangkaian inisiatif pelatihan dan pengembangan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai serta aspek-aspek penting lainnya yang relevan dengan peran dan tanggung jawab pegawai. Program pengayaan untuk kelompok jabatan *Supervisor* dan setara dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Program pengayaan berdasarkan kelompok jabatan *Supervisor* dapat dibuat dalam bentuk *In-House Training*. Pelaksanaan *In-House Training* yang biasanya dilakukan adalah Bimbingan Teknis Kementerian Perindustrian Mengenai Transformasi Industri 4.0, Keterbukaan Informasi Publik, Manajemen Risiko, GCG, dan lain-lain.

b) *Sharing Session*

- *Supervisor akan diundang sebagai peserta dalam acara sharing session yang akan diisi oleh level Vice President dan Manager, baik dari internal perusahaan maupun tamu eksternal.*
- *Sebagai suatu sarana latihan, para supervisor akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan sharing session yang sasarannya terbuka untuk semua kalangan dalam internal departemennya. Topik yang dibawa dalam sharing session ini dapat berupa hard skill maupun softskill.*

f. *Staff*

1) *Program Diklat Penjenjangan Bidang Teknis Tingkat Dasar-Lanjut*

Program Diklat Penjenjangan merupakan bagian dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan berdasarkan analisis jabatan. Dalam hal ini, untuk kelompok jabatan *Staff*, program Diklat Penjenjangan diarahkan untuk pemenuhan dan peningkatan kompetensi teknis pegawai yang terbagi menjadi Tingkat Dasar hingga Tingkat

position group who have not yet attended the Junior Managerial Development Training;

b) In 2024, it will be conducted in 1* batch with 30* participants. (*may be reconsidered based on urgency and available budget)

2) Enrichment Program

The enrichment program is a series of training and development initiatives designed to improve employees' knowledge, skills, and work attitudes, as well as other relevant aspects related to their roles and responsibilities. The enrichment program for the Supervisor and equivalent position group can be outlined as follows:

a) Enrichment programs for the Supervisor position can be conducted in the form of In-House Training. The implementation of In-House Training is usually Technical Guidance from the Ministry of Industry Regarding Industrial Transformation 4.0, Public Information Openness, Risk Management, GCG, and others.

b) Sharing Sessions

- Supervisors will be invited as participants in sharing sessions conducted by Vice Presidents and Managers, both from internal and external guests.
- As a training tool, supervisors will be given the opportunity to conduct sharing sessions aimed at all levels within their department. The topics of these sharing sessions can include both hard and soft skills.

f. Staff

1) *Basic-Advanced Technical Development Training Program*

The Development Training Program is part of the training and development needs based on job analysis. In this case, for the Staff position group, the Development Training Program is aimed at meeting and improving technical competencies, which are divided into Basic to Advanced levels. The Basic-Advanced Technical Development

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Lanjut. Dalam hal ini, untuk program Diklat Penjenjangan Manajerial Bidang Teknis Tingkat Dasar-Lanjut akan dipersyaratkan sebagai berikut:

a) Diklat Penjenjangan Bidang Teknis Tingkat Dasar-Lanjut merupakan program penjenjangan yang bersifat wajib/*mandatory* dan harus diikuti oleh *staff* secara berjenjang.
b) Pada tahun 2024, akan dilaksanakan sebanyak 1* batch dengan jumlah peserta sebanyak 30* orang. (*sewaktu-waktu dapat diajukan kembali dengan mempertimbangkan urgensi dan anggaran yang tersedia)
c) Silabus yang digunakan akan disesuaikan dengan arahan dari tim *Subject Matter Expert* (SME) Learning dan Perencanaan SDM.

2) Program Pengayaan

Program pengayaan merupakan serangkaian inisiatif pelatihan dan pengembangan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai serta aspek-aspek penting lainnya yang relevan dengan peran dan tanggung jawab pegawai. Program pengayaan untuk kelompok jabatan *Staff* dan setara dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Program pengayaan yang akan diberikan pada kelompok jabatan *Staff* dan setara adalah *In-House Training*. *In-House Training* untuk *level staff* tidak dibuat secara spesifik. Biasanya, para pegawai di *level staff* akan diikutsertakan pada program kelas terbuka (baik *offline* maupun *online*) atau program yang bersifat *technical skill*. Beberapa program yang direncanakan antara lain adalah Diklat K3, Bimtek GCG, Bimtek INDI 4.0, Bimtek SPI, Bimtek TI, Pelatihan Permesinan, dan bentuk-bentuk pelatihan teknis lainnya.
b) *Sharing Session*
   i) *Staff dapat diarahkan untuk menjadi peserta dalam acara sharing session yang akan diisi oleh level Supervisor atau Manager baik dalam internal maupun lintas departemen dengan topik yang dapat berupa soft skill maupun hard skill sehingga diharapkan dapat terjadi transfer of knowledge dari atasan kepada pegawainya.*
   ii) *Induction Program for Entry Level*
   Berdasarkan informasi dari Perencanaan SDM Darat, akan dilaksanakan rekrutmen

Training Program will be required as follows:

a) The Basic-Advanced Technical Development Training Program is a mandatory program that must be attended by staff in a hierarchical manner.
b) In 2024, it will be conducted in 1* batch with 30* participants. (*may be reconsidered based on urgency and available budget)
c) The syllabus used will be adjusted according to the guidance from the Subject Matter Expert (SME) Learning and HR Planning team.

2) Enrichment Program

The enrichment program is a series of training and development initiatives designed to improve employees' knowledge, skills, and work attitudes, as well as other relevant aspects related to their roles and responsibilities. The enrichment program for the Staff and equivalent position group can be outlined as follows:

a) The enrichment program provided to the Staff and equivalent position group is In-House Training. In-House Training for staff levels is not specifically designed. Usually, staff will participate in open class programs (both offline and online) or technical skill programs. Some planned programs include K3 Training, GCG Technical Guidance, INDI 4.0 Technical Guidance, SPI Technical Guidance, IT Technical Guidance, Machining Training, and other forms of technical training.
b) Sharing Sessions
   i) Staff can be directed to participate in sharing sessions conducted by Supervisors or Managers, both internally and across departments, with topics that can include both soft and hard skills, thus facilitating the transfer of knowledge from superiors to their employees.
   ii) Induction Program for Entry Level
   Based on information from the Land SDM Planning, recruitment will be conducted as

sebagai berikut:

i. Capeg Rekrutmen di Semester II 2023: 36 orang
ii. Capeg Rekrutmen di Semester I 2024: 114 orang
iii. Lanjutan Orientasi Pegawai Pengangkatan Organik: 60 orang

Selanjutnya, akan disusun program orientasi informasi yang disesuaikan dengan sasaran dan anggaran yang tersedia.

follows:

i. Recruitment Candidate in Semester II 2023: 36 people
ii. Recruitment Candidate in Semester I 2024: 114 people
iii. Continued Orientation for Organically Appointed Employees: 60 people

Next, an orientation information program will be developed according to the targets and budget available.

PROGRAM PENGEMBANGAN BERDASARKAN FUNGSI UNIT KERJA/DIREKTORAT

PROGRAM DEVELOPMENT BASED ON UNIT FUNCTION/ DIRECTORATE

1. Kantor Pusat
   Head Office

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Direktorat Utama & SBU Main Directorate & Strategic Business Unit	
Divisi Satuan Pengawas Internal Internal Audit Division	Sertifikasi: 1. Diklat Khusus bagi Kepala SPI + Asesmen (PIA) 2. QIA - Pelatihan dan Asesmen CPIA (*Certified Practitioner of Internal Audit*) *Public Training*: 1. Audit Pengadaan Barang dan Jasa 2. Audit SDM *In-House Training*: 1. *Quality Assurance* atas *Self Assessment* Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PELNI (Persero) 2. *Workshop* dan *Quality Assurance* atas *Self Assessment* Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern PT PELNI (Persero) Certifications: 1. Special Training for SPI Head + Assessment (PIA) 2. QIA - Certified Practitioner of Internal Audit Training and Assessment (CPIA) Public Training: 1. Procurement Audit 2. HR Audit In-House Training: 1. Quality Assurance for Self-Assessment of Internal Audit Unit (SPI) PT PELNI (Persero) 2. Workshop and Quality Assurance for Self-Assessment of Internal Control Effectiveness Evaluation PT PELNI (Persero)

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Divisi DPA-QHSSE DPA-QHSSE Division	Sertifikasi: 1. Penunjukan SKP Dokter Perusahaan 2. *Fire Safety Manager* *In-House Training*: 1. *In-House Training Internal Auditor* ISPS *Code* 2. *In-House Training Internal Auditor* ISM *Code* Certifications: 1. Appointment of Company Doctor 2. Fire Safety Manager In-House Training: 1. Internal Auditor ISPS Code 2. Internal Auditor ISM Code
Divisi Kesekretariatan Perusahaan Corporate Secretariat Division	Sertifikasi: 1. Protokoler *Liaison Officer* 2. Sertifikasi Drone Pilot *Public Training*: 1. Pelatihan Penyusunan *Annual Report* Berbasis GCG & CSR 2. Pelatihan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Perusahaan *In-House Training*: 1. *In-House Training* Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Di PT PELNI (Persero) 2. *In-House Training Public Speaking* Sosialisasi: 1. Sosialisasi PPID PT PELNI (Persero) 2. Sosialisasi KIP oleh Eksternal Certifications: 1. Liaison Officer Protocol 2. Drone Pilot Certification Public Training: 1. Preparation of Annual Reports Based on GCG & CSR 2. Management of Company Correspondence In-House Training: 1. Improvement of Public Information Service Quality at PT PELNI (Persero) 2. Public Speaking Training Awareness Campaigns: 1. PPID Awareness Campaign at PT PELNI (Persero) 2. KIP Awareness Campaign by External Parties
Divisi Pengembangan Bisnis Business Development Division	Sertifikasi: 1. Manajemen Risiko 2. *Data Analyst* Certifications: 1. Risk Management 2. Data Analyst
Divisi Perencanaan dan Transformasi Perusahaan Corporate Planning and Transformation Division	Sertifikasi: 1. Sertifikasi Profesional Sistem Manajemen *Balanced Scorecard* 2. Sertifikasi Profesional *Performance Management* Certifications: 1. Professional Certification in Balanced Scorecard Management System 2. Professional Certification in Performance Management

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Direktorat Keuangan dan Manajemen Resiko Directorate of Finance and Risk Management	
Divisi Akuntansi Accounting Division	Sertifikasi: 1. Brevet Pajak A & B 2. Pendidikan Profesi Akuntan (CA.Ak) *Public Training*: 1. *Tax Planning and Tax Management* 2. *Transfer Pricing* dan Penyiapan Dokumen Pendukung Transaksi *In-House Training*: 1. PSAK *Boot Camp* Finance and Risk Management Directorate Certifications: 1. Tax Brevet A & B 2. Chartered Accountant Education (CA.Ak) Public Training: 1. Tax Planning and Tax Management 2. Transfer Pricing and Preparation of Supporting Transaction Documents In-House Training: 1. PSAK Boot Camp
Divisi *Treasury* Treasury Division	Sertifikasi: 1. Brevet Pajak A & B 2. Analisis Laporan Keuangan *Public Training*: 1. *Cash Flow & Treasury Management* 2. Pelatihan Analisis SROI *In-House Training*: 1. *Letter Of Credit* Certifications: 1. Tax Brevet A & B 2. Financial Statement Analysis Public Training: 1. Cash Flow & Treasury Management 2. Social Return on Investment (SROI) Analysis Training In-House Training: 1. Letter Of Credit
Divisi PSO dan Subsidi PSO and Subsidiary Division	Sertifikasi: 1. *Shipping Management* 2. Brevet Pajak A & B Certifications: 1. Shipping Management 2. Tax Brevet A & B
Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan Risk and Compliance Management Division	Sertifikasi: 1. Qualified Risk Governance Professional (QRGP) 2. Governance, Risk and Compliance Certifications: 1. Qualified Risk Governance Professional (QRGP) 2. Governance, Risk and Compliance

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division	Sertifikasi: 1. *Introduction to DevOps with Kubernetes* 2. *IT Service Management with ITIL* *In-House Training*: 1. *Artificial Intelligence & Machine Learning Fundamentals* Certification: 1. Introduction to DevOps with Kubernetes 2. IT Service Management with ITIL In-House Training: 1. Artificial Intelligence & Machine Learning Fundamentals
Direktorat SDM dan Umum Directorate of Human Resources and General Affairs	
Divisi SDM Human Resources Division	Sertifikasi: 1. *Certification Human Resources Professional* (CHRP) *Manager* 2. Sertifikasi *Human Capital Skema Compensation Benefit (Supervisor)* Certifications: 1. Introduction to DevOps with Kubernetes 2. IT Service Management with ITIL Human Resources and General Directorate Certifications: 1. Certification Human Resources Professional (CHRP) Manager 2. Compensation Benefit Human Capital Scheme (Supervisor)
Divisi Pengawasan Oversight Division	Sertifikasi: 1. *Certified Recruitment & Selection Staff* 2. *Certified Human Resources Management Professional* Certifications: 1. Certified Recruitment & Selection Staff 2. Certified Human Resources Management Professional
Divisi Umum General Affairs Division	Sertifikasi: 1. Sertifikasi Manajemen Aset *Public Training*: 1. Training Manajemen & Pengelolaan Aset Certifications: 1. Asset Management Certification Public Training: 1. Asset Management Training
Divisi Pengadaan Procurement Division	Sertifikasi: 1. *Certified Warehouse Manager* 2. *Certified Logistic Supervisor* Certifications: 1. Certified Warehouse Manager 2. Certified Logistic Supervisor

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Direktorat Armada dan Teknik Fleet and Engineering Directorate	
Divisi Teknik Engineering Division	Sertifikasi: 1. *Maintenance Management* 2. *Time Management* *Public Training*: 1. *The principles and operation of the family of MaK and CM engines* 2. *The principles and operation of the family of Daihatsu Engines* Fleet and Engineering Directorate Certifications: 1. Maintenance Management 2. Time Management Public Training: 1. Principles and Operation of MaK and CM Engines 2. Principles and Operation of Daihatsu Engines
Divisi Nautika Nautical Division	*Public Training*: 1. Marine *Superintendent* Public Training: 1. Marine Superintendent
Divisi Bahan Bakar Fuel Division	Sertifikasi: 1. QIA - Tingkat Dasar Certifications: 1. QIA - Basic Level
Divisi Surveyor Surveyor Division	*Public Training*: 1. Marine *Surveyor* Public Training: 1. Marine Surveyor
Direktorat Usaha Angkutan Penumpang Passenger Transportation Business Directorate	
Divisi Usaha Penumpang Komersial dan Penunjang Commercial Passenger and Support Business Division	Sertifikasi: 1. *Microsoft Office* 2. *Digital Marketing* Sosialisasi: 1. *Sharing & Update Knowledge Product* UPNK 2. Internalisasi Budaya Certifications: 1. Microsoft Office 2. Digital Marketing Awareness Campaigns: 1. Sharing & Update Knowledge Product UPNK 2. Internalizing Culture

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Divisi Usaha Penumpang Non-Komersial Non-Commercial Passenger Business Division	Sertifikasi: 1. *Certified Business Analyst* 2. *Certified Digital Marketing* *Public Training*: 1. *Effective Business Communication* *In-House Training:* 1. *Microsoft excel training* 2. *Power Point* 3. *Data Analytic* Certifications: 1. Certified Business Analyst 2. Certified Digital Marketing Public Training: 1. Effective Business Communication In-House Training: 1. Microsoft Excel Training 2. Power Point 3. Data Analytics
Divisi Operasi Angkutan Penumpang Passenger Transport Operations Division	Sertifikasi: 1. Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan 2. Hukum Maritim dan Hukum Laut *Public Training*: 1. *Data Science* 2. Kepabeanan *In-House Training*: 1. Pelatihan Kepabeanan 2. IELTS Sosialisasi: 1. *Monitoring* Operasional 2. Internalisasi Budaya Certifications: 1. Port Management Expert Certification 2. Maritime Law Public Training: 1. Data Science 2. Customs In-House Training: 1. Customs Training 2. IELTS Awareness Campaigns: 1. Operational Monitoring 2. Internalizing Culture

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang Passenger Transport Services Division	Sertifikasi: 1. Sertifikasi Manajemen Penataan Pertunjukan 2. Brevet Pajak A & B *Public Training*: 1. *Quality Control* 2. *Food Cost* *In-House Training*: 1. *Pest Control* 2. *Food Handler* Certifications: 1. Performance Management Arrangement Certification 2. Tax Brevet A & B Public Training: 1. Quality Control 2. Food Cost In-House Training: 1. Pest Control 2. Food Handler
Direktorat Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Cargo and Sea Toll Transportation Business Directorate	
Divisi Usaha Barang Komersial dan Penunjang Commercial Cargo and Support Business Division	Sertifikasi: 1. Kepabeanan 2. *Digital Marketing* *In-House Training*: 1. *Marketing Pricing Strategy* 2. *Strategic Brand Management* Certifications: 1. Customs 2. Digital Marketing In-House Training: 1. Marketing Pricing Strategy 2. Strategic Brand Management
Divisi Usaha Barang Non-Komersial Non-Commercial Cargo Business Division	Sertifikasi: 1. *Certified Logistic* *Public Training*: 1. *Logistic, Transportation, Distribution* 2. *Digital Marketing* 3. *Digital Content Creation* Certifications: 1. Certified Logistic Public Training: 1. Logistic, Transportation, Distribution 2. Digital Marketing 3. Content Creation

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Unit Kerja Work Unit	Program atau Topik Program or Topic
Divisi Operasi Angkutan Barang Cargo Transport Operations Division	Sertifikasi: 1. Manajemen Operator Terminal & BUP *Public Training*: 1. *Digital Marketing* 2. *Container Terminal Operation* *In-House Training*: 1. Pengoperasian Kapal (roro, tongkang, *tugboat*) 2. Penanganan Muatan diatas Kapal Certifications: 1. Terminal Operator & BUP Management Public Training: 1. Digital Marketing 2. Container Terminal Operation In-House Training: 1. Ship Operations (roro, barge, tugboat) 2. Cargo Handling on Ships
Divisi Keagenan Agency Division	*In House Training*: 1. *Active Speaking* Bahasa Inggris Maritim (*Online Class* 2 Bulan/8x Pertemuan) 2. Pelatihan Aplikasi Bea Cukai In-House Training: 1. Maritime English Active Speaking (2 Months Online Class/8 Meetings) 2. Customs Application Training

2. Kantor Cabang
   Branch Office

Unit Kerja Work Unit	Program atau Topik Program or Topic
Cabang Jakarta Jakarta Branch	*Public Training*: 1. Pelatihan K3 Umum 2. Sertifikasi Pemadam Kebakaran Public Training: 1. Occupational Health and Safety (K3) General Training 2. Firefighter Certification

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Cabang Semarang Semarang Branch	Sertifikasi: 1. Brevet A&B Terpadu *Public Training*: 1. *Professional Public Speaking* 2. *Leadership & Managerial Skills* *In-House Training*: 1. *Transformation for Excellent Personality* 2. *Selling Skills* Certifications: 1. Integrated Brevet A&B 2. Google Certified Professional Cloud Architect Socialization: 1. Utilization of Digital Marketing 2. Occupational Health and Safety (K3) Awareness In-House Training: 1. Transformation for Excellent Personality 2. Selling Skills
Cabang Sampit Sampit Branch	Sertifikasi: 1. *Shipping Management* Tingkat Lanjut (*Expertise*) 2. *Google Certified Professional Cloud Architect* Sosialisasi: 1. Sosialisasi mengenai Pemanfaatan *Digital Marketing* 2. Sosialisasi mengenai K3 Certifications: 1. Advanced Shipping Management (Expertise) 2. Google Certified Professional Cloud Architect Awareness Programs: 1. Awareness Program on Digital Marketing Utilization 2. Awareness Program on Occupational Health and Safety (K3)
Cabang Pontianak Pontianak Branch	Sertifikasi: 1. Brevet A & B Terpadu 2. Sertifikasi Pelabuhan Certifications: 1. Integrated Tax Brevet A & B 2. Port Certification
Cabang Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Branch	Sertifikasi: 1. Brevet A & B Terpadu 2. Sertifikasi Pelabuhan Certifications: 1. Integrated Tax Brevet A & B 2. Port Certification

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Cabang Kumai Kumai Branch	Public Training: 1. Brevet A B 2. Brevet C *In-House Training*: 1. Belajar Mengaplikasikan Strategi Penjualan yang Efektif bagi Pekerja Penjualan 2. Perencanaan Keuangan Public Training: 1. Tax Brevet A & B 2. Tax Brevet C In-House Training: 1. Learning to Apply Effective Sales Strategies for Sales Employees 2. Financial Planning
Cabang Nunukan Nunukan Branch	Sertifikasi: 1. Brevet Pajak A dan B Terpadu 2. Digital Marketing *Public Training*: 1. Pelatihan K3 Umum Certifications: 1. Integrated Tax Brevet A and B 2. Digital Marketing Public Training: 1. General Occupational Health and Safety (K3) Training
Cabang Kota Baru Kota Baru Branch	Sertifikasi: 1. Brevet A&B 2. Uji Kompetensi Sertifikasi PPh BADAN Certifications: 1. Tax Brevet A&B 2. Competency Test for Corporate Income Tax Certification (PPh BADAN)
Cabang Ambon Ambon Branch	Sertifikasi: 1. Brevet A&B 2. Brevet C Certifications: 1. Tax Brevet A&B 2. Tax Brevet C
Cabang Sorong Sorong Branch	Sertifikasi: 1. Brevet Pajak A, B & C Terpadu 2. *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) Certifications: 1. Integrated Tax Brevet A, B & C 2. Qualified Risk Management Officer (QRMO)

Unit Kerja Work Unit	**Program atau Topik** Program or Topic
Cabang Manokwari Manokwari Branch	Sertifikasi: 1. Marine *Surveyor* 2. Marine *Accident and Investigation* *Public Training*: 1. Brevet A&B 2. Brevet C *In-House Training*: 1. *Basic Leadership* 2. *Coaching, Counseling & Mentoring Skill for Leaders* Certifications: 1. Marine Surveyor 2. Marine Accident and Investigation Public Training: 1. Tax Brevet A&B 2. Tax Brevet C In-House Training: 1. Basic Leadership 2. Coaching, Counseling & Mentoring Skills for Leaders
Cabang Ternate Ternate Branch	Sertifikasi: 1. *Human Capital Staff* (CHCO) 2. HR *Selection Staff* (CRSO) Certifications: 1. Human Capital Staff (CHCO) 2. HR Selection Staff (CRSO)
Cabang Fak-Fak Fak-Fak Branch	Sertifikasi: 1. Pelatihan Ahli Kepelabuhanan 2. *Shipping Management* Certifications: 1. Port Expert Training 2. Shipping Management

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengelola dan mengembangkan teknologi informasi (TI). Salah satu wujud komitmen PELNI dalam pengelolaan dan pemanfaatan TI adalah terwujudnya peran TI sebagai *enabler* untuk mengawal transformasi bisnis perusahaan. Divisi Teknologi Informasi merupakan unit kerja pengelola teknologi informasi di PT PELNI (Persero) yang secara struktural berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi nomor 03.02/01/SK/HKO.01/2023. Divisi Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, keamanan (*security*) dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja kesiapan pakai (*serviceability performance*), keamanan (*security*) dan kehandalan (*reliability performance*) fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Teknologi Informasi memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana kerja (jangka panjang, menengah dan pendek) dan program kerja perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, keamanan (*security*) dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi;
2. Menyiapkan konsep peraturan kebijakan dan sistem prosedur dalam pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, keamanan (*security*) dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi yang menjamin dapat dicapainya kinerja kesiapan pakai (*serviceability performance*) dan kehandalan (*reliability performance*) fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal;
3. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan, perawatan, dan perbaikan untuk penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memantau, mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi di Kantor Pusat, Kapal, Kantor Cabang, dan SBU;
5. Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi;

The Company is committed to continuously manage and develop information technology (IT). One form of PELNI's commitment in the management and utilization of IT is the realization of IT's role as an enabler to oversee the company's business transformation. The Information Technology Division is the working unit responsible for managing information technology at PT PELNI (Persero), structurally under the Finance and Risk Management Directorate based on the Board of Directors Decree number 03.02/01/SK/HKO.01/2023. The Information Technology Division has the function of preparing policy formulations, implementation, review, control, and reporting of the management of activities related to provision, preparation for use, security, and reliability of facilities, equipment, and information technology devices (hardware & software) in accordance with applicable regulations to achieve the optimal performance of serviceability, security, and reliability of the company's information technology facilities, equipment, and devices. In carrying out its functions, the Information Technology Division has the following main tasks:

1. Preparing work plans (long-term, medium-term, and short-term) and company work programs related to the management of activities related to provision, preparation for use, security, and reliability of facilities, equipment, and information technology devices (hardware & software);
2. Preparing the concept of regulations, policies, and procedural systems in the management of activities related to provision, preparation for use, security, and reliability of facilities, equipment, and information technology devices (hardware & software) which ensure the achievement of serviceability performance and reliability of optimal facilities, equipment, and information technology devices;
3. Conducting activities related to provision, maintenance, and repair for the preparation for use and reliability of facilities, equipment, and information technology devices (hardware & software) in accordance with applicable regulations;
4. Monitoring, coordinating, and controlling the implementation of activities related to provision, preparation for use, and reliability of facilities, equipment, and information technology devices (hardware & software) at the Head Office, Vessels, Branch Offices, and Strategic Business Units (SBUs);
5. Managing and mitigating risks in the implementation of activities related to provision, preparation for use, and reliability of facilities, equipment, and information technology devices (hardware & software);

6. Menyiapkan laporan berkala dan atau laporan khusus kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Preparing periodic reports and/or special reports on the provision, preparation for use, and reliability of facilities, equipment, and information technology devices (hardware & software) of the company in accordance with applicable regulations.

TEMA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 2020-2024

PELNI menerapkan strategi pengembangan bisnis dengan tema strategis tahun 2020-2024 yaitu *Business Strengthen* (2020-2021) dan *Business Growth* (2022-2024). Guna mendukung tema strategis perusahaan tersebut, teknologi informasi perusahaan memiliki tema strategis yang diselaraskan yaitu *Accelerating Digital Transformation* (2022), *Nurturing New Business Innovation* (2023), *Operational and Service Excellence Through IT Implementation* (2024). Adapun strategi-strategi yang mendukung tema strategis teknologi informasi dijabarkan pada tabel di bawah ini:

STRATEGIC THEME OF INFORMATION TECHNOLOGY 2020-2024

PELNI implements a business development strategy with the strategic themes for the years 2020-2024, namely Business Strengthen (2020-2021) and Business Growth (2022-2024). To support the company's strategic themes, the company's information technology has aligned strategic themes, namely Accelerating Digital Transformation (2022), Nurturing New Business Innovation (2023), Operational and Service Excellence Through IT Implementation (2024). The strategies supporting the strategic theme of information technology are outlined in the table below:

Tema Strategis Perseroan Strategic Themes of the Company	**Tema Strategis Teknologi Informasi** Strategic Theme of Information Technology	**Tahun** Year	**Strategi Teknologi Informasi** Information Technology Strategy
Business Growth (2022-2024)	*Accelerating Digital Transformation*	2022	Peningkatan dukungan layanan TI untuk bisnis-bisnis *core* Perseroan Improvement of IT service support for the company's core businesses
	Nurturing New Business Innovation	2023	Peningkatan layanan TI untuk bisnis *non-core* serta *monitoring* proses operasional Perseroan Enhancement of IT services for non-core businesses and monitoring of the company's operational processes
	Operational & Service Excellence Through IT Implementation	2024	Peningkatan dukungan layanan TI secara merata ke seluruh unit kerja sehingga dapat menciptakan *operational excellence* Enhancement of IT service support evenly across all units to create operational excellence

PENCAPAIAN KINERJA 2023

Divisi Teknologi Informasi dalam menjalankan pekerjaannya di tahun 2023 didasarkan RKAP 2023 dan Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023. Pada RKAP 2023, Divisi Teknologi Informasi menjalankan berbagai program kerja yang diamanatkan baik melalui Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) periode 2022-2024 maupun permintaan-permintaan dari unit-unit kerja yang ada. Sedangkan pada kontrak kerja

ACHIEVEMENT OF PERFORMANCE IN 2023

The Information Technology Division carried out its work in 2023 based on the 2023 RKAP and the 2023 Management Work Contract. In the 2023 RKAP, the Information Technology Division implemented various work programs mandated by both the PT PELNI (Persero) Information Technology Strategic Plan for the 2022-2024 period and requests from existing work units. Meanwhile, in the 2023 management work contract, the

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

manajemen tahun 2023, Divisi Teknologi Informasi dituntut untuk memenuhi *key performance indicator* (KPI) yang tertera pada *score card.*

Information Technology Division was required to meet the key performance indicators (KPIs) stated in the scorecard.

Divisi Teknologi Informasi memiliki program-program kerja yang mampu mendukung percepatan transformasi digital Perseroan. Program-program kerja tersebut dikategorikan sebagai program kerja *quick win* dan strategis. Program-program kerja yang termasuk dalam program kerja *quick win* dan strategis adalah sebagai berikut:

The Information Technology Division has work programs that support the acceleration of the Company's digital transformation. These work programs are categorized as quick win and strategic programs. The quick win and strategic work programs are as follows:

No	Program Kerja	Deskripsi	Kategori Program Kerja	Pencapaian
1	*Integrated Commercial System*	Integrasi seluruh layanan bisnis PELNI pada dua aplikasi komersial (*web & mobile super apps*) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan citra perusahaan yang pada tahun 2023 difokuskan pada Modul *Agencies Services,* selain itu juga dilakukan Pengembangan *Add-On* pada *Ticketing Services*	KPI Kontrak Manajemen 2023	Pada tahun 2023, telah dilakukan pengembangan pada: 1. Modul *Agencies Services* pada aplikasi Pelni Mobile untuk menunjang kegiatan bisnis keagenan. 2. Pengembangan Aplikasi *Add-On* untuk mengakomodir penjualan *Add-Ons* pada layanan *ticketing* PELNI saat ini.
2	*Integrated Monitoring* CCTV Kapal	Integrasi Sistem *Monitoring* CCTV yang terdapat di kapal penumpang dengan memanfaatkan konektivitas SISKOMKAP dan teknologi kompresi data guna memudahkan dalam *monitoring* aktivitas di kapal penumpang PT PELNI (Persero) melalui *dashboard.*	Program Strategis TI	Pada tahun 2023, telah dilakukan pengembangan aplikasi SEAMATA yang digunakan untuk memonitor kegiatan di atas kapal dengan memanfaatkan teknologi kompresi dengan menggunakan jaringan SISKOMKAP
3	Pengembangan *E-Billing System*	Digitalisasi sistem proses pengajuan, verifikasi dan pembayaran penagihan. Pengembangan *E-Billing System* ini mencakup pengembangan standar *invoice* dan integrasi dengan aplikasi keuangan PT PELNI (Persero).	Program Strategis TI	Aplikasi *Billing Management System* (*E-Billing System*) telah rilis pada Desember 2023. Implementasi penggunaan aplikasi akan dilakukan pada Januari 2024
4	Pengembangan *Operational Dashboard*	Penyediaan *dashboard* untuk memonitor kinerja dan operasional perusahaan yang dapat digunakan untuk pendukung pengambilan keputusan manajemen dan *monitoring* kinerja perusahaan.	Program Strategis TI	*Dashboard Operational* telah *go live* pada September 2023 merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi informasi pada alat produksi dengan memanfaatkan teknologi SISKOMKAP (Sistem Komunikasi Kapal) yang bertujuan untuk memonitor kegiatan operasional di kapal, cabang dan pelabuhan.

No	Program Kerja	Deskripsi	Kategori Program Kerja	Pencapaian
5	Pengembangan *Route Management System*	Penyediaan vessel *management system* untuk perencanaan rute kapal (*route management*)	Program Strategis TI	Aplikasi *Route Management System* telah dilakukan *Deployment* pada Desember 2023. Adapun sosialisasi dan implementasi aplikasi akan dilakukan pada tahun 2024.
6	Pengembangan *Human Resource Information System* (HRIS)	Digitalisasi pengelolaan proses bisnis kepegawaian yang bermanfaat untuk mempercepat proses pengelolaan manajemen kepegawaian, memberikan akurasi data informasi pegawai.	Program Strategis TI	Pada tahun 2023, telah dilakukan *enhancement Modul Organization Management System* dan *Perfomance Management System* pada aplikasi HRIS
7	Pengembangan ITSM	Pengembangan *IT Service Management* (ITSM) merupakan pengembangan aplikasi untuk pengelolaan layanan teknologi informasi (TI) yang memiliki fokus pada perspektif pengguna layanan TI terhadap bisnis Perseroan	Program Strategis TI	Sampai tahun 2023, ITSM telah *go live* pada 3 modul yakni: 1. Modul *Incident Management* (*Go Live* : Desember 2022) 2. Modul *Event Management* (*Go Live :* Desember 2022) 3. Modul *Request Management* (*Go Live* : September 2023)

EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS TI 2023

Sesuai Surat Keputusan Direksi no. 09.07/01/SK/HKO.01/2022 tanggal 07 September 2022 tentang Pedoman Rencana Strategis dan Tata Kelola Teknologi Informasi Periode 2022-2024, Divisi Teknologi PT PELNI (Persero) memiliki *roadmap* pengembangan teknologi informasi perusahaan periode 2022-2024. Sebagai unit kerja pengelola teknologi informasi, Divisi Teknologi Informasi menjalankan inisiatif-inisiatif yang diamanatkan dalam roadmap rencana strategis tersebut, dengan pencapaian pada 2023 sebagai berikut:

EVALUATION OF THE ACHIEVEMENT OF THE IT STRATEGIC PLAN 2023

In accordance with Board of Directors Decree no. 09.07/01/SK/HKO.01/2022 dated September 7, 2022 regarding the Guidelines for the Strategic Plan and Governance of Information Technology for the Period 2022-2024, the IT Division of PT PELNI (Persero) has a roadmap for the development of the company's information technology for the period 2022-2024. As the unit responsible for managing information technology, the Information Technology Division has implemented initiatives mandated in the strategic plan roadmap, with achievements in 2023 as follows:

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
Inisatif Kerja Kategori Aplikasi/Sistem Informasi Initiative Work Category Application/Information System			
1	Peningkatan Aplikasi Portal – *Asset Management* Improvement of the Asset Management Portal	Sedang Dilakukan In Progress	Pada tahun 2023, sedang dilakukan peningkatan aplikasi Portal – *Asset Management*, salah satunya yakni Pembaruan Website Winona & *Asset Management* In 2023, improvements to the Asset Management Portal application were underway, including the Update of the Winona & Asset Management Website.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
2	Peningkatan Fedrik Improvement of Fedrik	Tidak Dilakukan Not Done	Aplikasi FEDRIK dinyatakan *retired* dan telah digantikan dengan Aplikasi Moka POS (yang ditangani langsung oleh pihak ketiga) sehingga untuk peningkatan fedrik tidak dilakukan. The FEDRIK application was declared retired and has been replaced by the Moka POS application (handled directly by a third party), so no further improvements to FEDRIK were made.
3	Peningkatan Aplikasi MyCargoo! Improvement of MyCargoo! Application	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, peningkatan aplikasi MyCargoo sudah dilakukan seperti pengembangan fitur login (registrasi) customer, informasi ketentuan pembatalan, penambahan filter ETD laporan transaksi serta integrasi aplikasi MyCargoo dengan MyDepo In 2023, improvements to the MyCargoo application had already been made, such as the development of customer login (registration) features, information on cancellation terms, addition of ETD transaction report filters, and integration of the MyCargoo application with MyDepo.
4	Peningkatan *Online Logistic Platform* Improvement of Online Logistic Platform	Sudah Dilakukan Already Done	Salah satu bentuk peningkatan Online Logistic Platform di Tahun 2023 yakni pengembangan aplikasi MyCargoo yang telah diintegrasikan dengan Aplikasi MyDepo. One form of improvement to the Online Logistic Platform in 2023 was the development of the MyCargoo application, which has been integrated with the MyDepo application.
5	Peningkatan PPSS Improvement of PPSS	Sudah Dilakukan Already Done	Beberapa peningkatan aplikasi PPSS sudah dilakukan pada tahun 2023 seperti penambahan *payment channel* dan integrasi dengan *mobile banking* untuk proses pemesanan tiket Several improvements to the PPSS application were made in 2023, such as the addition of payment channels and integration with mobile banking for ticket ordering processes.
6	Peningkatan Petisy Improvement of Petisy	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, peningkatan aplikasi Petisy sudah dilakukan seperti penambahan penjualan kelas dan penerapan diskon In 2023, improvements to the Petisy application were made, such as the addition of class sales and the implementation of discounts.
7	Peningkatan Pelni *Mobile* Improvement of Pelni Mobile	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, sudah dilakukan peningkatan aplikasi *New* Pelni *Mobile* seperti perubahan logo atau tema aplikasi, peningkatan performa aplikasi dan penambahan modul baru (agencies modul) In 2023, improvements to the New Pelni Mobile application were already made, such as changing the application's logo or theme, improving application performance, and adding a new module (agencies module).
8	Pengembangan Sistem CRM Development of CRM System	Belum dilakukan Not Yet Done	Akan dilakukan pada tahun 2024 sesuai kebutuhan *user* Scheduled in 2024 as needed by users.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
9	Pengembangan *Vessel Management System* Development of Vessel Management System	Sedang Dilakukan In Progress	Salah satu pengembangan *Vessel Management System* adalah pembangunan aplikasi *Route Management System* (RMS). Aplikasi RMS telah dilakukan proses deployment pada Desember 2023. Implementasi penggunaan aplikasi akan dilakukan pada Januari 2024 One of the developments in the Vessel Management System is the development of the Route Management System (RMS). The RMS application underwent deployment processes in December 2023. Implementation of the application will be done in January 2024.
10	Pengembangan *Dashboard Business Intelligence* Development of Business Intelligence Dashboard	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, sudah dilakukan pengembangan *Dashboard Operation* menggunakan *upgrade* fitur SISKOMKAP In 2023, the Dashboard Operation was developed using upgraded SISKOMKAP features.
11	Penerapan *Planned Maintenance System* Implementation of Planned Maintenance System	Sudah Dilakukan Already Done	Implementasi aplikasi *Planned Maintenance System* (PMS) sudah dilakukan di 26 Kapal Penumpang dan 6 Kapal Barang The implementation of the Planned Maintenance System (PMS) application has been done on 26 Passenger Ships and 6 Cargo Ships.
12	Peningkatan SIPARSEL Improvement of SIPARSEL	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, peningkatan aplikasi SIPARSEL sudah dilakukan seperti penambahan form permintaan, penerimaan, penggunaan barang permakanan dan tanda tangan elektronik. Adapun Implementasi aplikasi SIPARSEL sudah dilakukan di 26 Kapal Penumpang dan 1 Kapal Barang In 2023, improvements to the SIPARSEL application were made, such as the addition of request, receipt, use of food items, and electronic signature forms. The SIPARSEL application has been implemented on 26 Passenger Ships and 1 Cargo Ship.
13	Penerapan *e-Procurement* Implementation of e-Procurement	Sudah Dilakukan Already Done	Aplikasi sudah *go live* tahap awal untuk Divisi Pengadaan, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi SDM The application has gone live in the initial stage for the Procurement Division, Information Technology Division, and Human Resources Division.
14	Peningkatan Oracle EBS Improvement of Oracle EBS	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan peningkatan aplikasi Oracle EBS Finance pada tahun 2023 seperti pengembangan integrasi dengan aplikasi *E-Billing System* Improvements to the Oracle EBS Finance application were made in 2023, such as developing integration with the E-Billing System application.
15	Pengembangan *Billing Management System* Development of Billing Management System	Sudah Dilakukan Already Done	Aplikasi *Billing Management System* (*E-Billing System*) telah rilis pada Desember 2023. Implementasi penggunaan aplikasi akan dilakukan pada Januari 2024 The Billing Management System (E-Billing System) application was released in December 2023. Implementation of the application will be done in January 2024.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
16	Pengembangan Portal-PSO Subsidi Development of Subsidiary Portal-PSO	Sedang Dilakukan In Progress	Pada tahun 2023, perubahan (ITCR) dan pengembangan modul SDUM pada Portal-PSO sedang dilakukan In 2023, changes (ITCR) and development of the SDUM module in the Portal-PSO were in progress.
17	Implementasi *Knowledge Management System* Implementation of Knowledge Management System	Sudah Dilakukan Already Done	Aplikasi LENTERA yang mengakomodir *knowledge management system* sudah dikembangkan dan digunakan oleh seluruh pegawai PT PELNI (Persero) The LENTERA application, which accommodates a knowledge management system, has been developed and used by all employees of PT PELNI (Persero).
18	Penerapan *Collaboration Apps* Implementation of Collaboration Apps	Sedang Dilakukan In Progress	Salah satu penerapan *collaboration* apps yakni penggunaan aplikasi Pelni One. Saat ini aplikasi Pelni One sedang dilakukan proses pembaruan aplikasi dan selanjutnya akan dilakukan rilis aplikasi pada Appstore dan Playstore One application of collaboration apps is the use of the Pelni One application. The Pelni One application is currently undergoing an application update process and will subsequently be released on the Appstore and Playstore.
19	Peningkatan Aplikasi QPR Improvement of QPR Application	Sedang Dilakukan In Progress	Pada tahun 2023, sedang dilakukan pengajuan proses pengadaan untuk aplikasi RMIS (*Risk Management Information System*) In 2023, the procurement process for the RMIS (Risk Management Information System) application was proposed.
20	Peningkatan Portal – Audit *Management* Improvement of Audit Management Portal	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, peningkatan aplikasi Portal – Audit *Management* berupa pemenuhan pengembangan ITCR, salah satunya yakni penambahan filter & *view* lampiran dokumen detail temuan telah dilakukan In 2023, improvements to the Portal – Audit Management application in the form of ITCR development fulfillment were made, one of which was the addition of filter & view attachments for detailed finding documents.
21	Peningkatan Portal – ESS Improvement of ESS Portal	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, telah dilakukan peningkatan aplikasi Portal – ESS berupa pemenuhan pengembangan ITCR, salah satunya yakni penambahan fitur edit tanggal lahir dan penambahan fitur *upload* excel pada form 1721-A1 In 2023, improvements to the Portal – ESS application were made in the form of ITCR development fulfillment, one of which was the addition of features to edit date of birth and upload excel features on form 1721-A1.

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
22	Peningkatan Portal – Pelni Doc Improvement of Pelni Doc Portal	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, beberapa peningkatan aplikasi Portal – Pelni Doc sudah dilakukan seperti pembaruan fitur pada aplikasi surat keluar, perubahan format tanda tangan digital (*qrcode*), perubahan kode jabatan dan penomoran takah In 2023, several improvements to the Portal – Pelni Doc application were made, such as updating features in the outgoing mail application, changing the digital signature format (qrcode), changing job codes, and numbering takah.
23	Peningkatan Pelni One Improvement of Pelni One	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, aplikasi Pelni One sedang dilakukan proses pembaruan logo dan tema aplikasi, penambahan fitur informasi cuti dan izin. Selanjutnya akan dilakukan rilis aplikasi pada Appstore dan Playstore In 2023, the Pelni One application was undergoing a process of updating the logo and application theme, adding leave and permit information features. The application will subsequently be released on the Appstore and Playstore.
24	Peningkatan *Trouble Ticketing System* Improvement of Trouble Ticketing System	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, sudah dikembangkan aplikasi ITSM (IT *Service Management*) untuk mengakomodir tiket *troubleshooting*, insiden dan permintaan layanan TI In 2023, the ITSM (IT Service Management) application was developed to accommodate troubleshooting tickets, incidents, and IT service requests.
Inisiatif Teknologi Technology Initiative			
1	Peremajaan *hardware infrastructure* Hardware infrastructure renewal	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pada Data Center di Gedung PELNI Lantai 2 (*backup offline* dan penambahan *storage*) Already done in the Data Center at PELNI Building 2nd Floor (offline backup and additional storage).
2	Penyusunan *Capacity Plan* Capacity Plan preparation	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan penyusunan *Disaster Recovery Plan*, IT *Capacity Plan*, dan IT *Availability Plan* A Disaster Recovery Plan, IT Capacity Plan, and IT Availability Plan have been prepared.
3	Pembaharuan versi *software infrastructure* Software infrastructure version update	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, versi *Software Infrastructure* sudah di*update*, termasuk *upgrade* dari OS Ubuntu 20 ke Ubuntu 22 In 2023, the Software Infrastructure version was updated, including upgrading from OS Ubuntu 20 to Ubuntu 22.
4	Penyediaan Redudansi Perangkat Provision of Device Redundancy	Belum dilakukan Not Yet Done	Akan dilakukan pada tahun 2024 Will be Scheduled in 2024.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
5	Penerapan DMZ (*Demilitarized Zone*) Implementation of DMZ (Demilitarized Zone)	Belum dilakukan Not Yet Done	Akan dilakukan pada tahun 2024 Will be Scheduled in 2024.
6	Penyediaan *Firewall* Tambahan Provision of Additional Firewalls	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, seluruh kapal penumpang menggunakan *firewall* In 2023, all passenger ships were using a firewall.
7	Penghitungan *Availability* Jaringan TI Calculation of IT Network Availability	Sudah Dilakukan Already Done	Perhitungan TI *Network availability* telah dilakukan untuk mewujudkan KPIs setiap kwartal Calculation of TI Network availability has been done to realize KPIs every quarter.
8	*Penetration Testing* Jaringan Network Penetration Testing	Belum dilakukan Not Yet Done	Akan dilakukan pada tahun 2024 Will be Scheduled in 2024.
9	*Penetration Testing* Aplikasi Application Penetration Testing	Sedang Dilakukan In Progress	Pada tahun 2023, proses pengadaan untuk pekerjaan penetration testing pada aplikasi kritis (PPSS dan MyCargoo) sedang berlangsung. Pekerjaan tersebut akan dilaksanakan pada awal 2024 In 2023, the procurement process for penetration testing work on critical applications (PPSS and MyCargoo) was in progress. The work will be carried out in early 2024.
10	Pemisahan *environment* area *production & development* Separation of production & development environment areas	Sedang Dilakukan In Progress	Untuk aplikasi, lingkungan sudah dipisahkan antara produksi dan *development*, tetapi dari sisi server, pemisahan lingkungan masih dilakukan For applications, the environment has been separated between production and development, but from the server side, the separation of the environment is still being done.
11	Pembenahan CCTV di area *Data Center* dan Penomoran Perangkat *Data Center* Improvement of CCTV in Data Center area and Data Center Device Numbering	Sedang Dilakukan In Progress	Peningkatan CCTV di area *Data Center* sudah dilakukan, namun penomoran perangkat untuk *Data Center* akan dilakukan pada tahun 2024 Improvement of CCTV in the Data Center area has been done, but device numbering for the Data Center will be done in 2024.
12	Penyusunan dokumen *Disaster Recovery Plan* Preparation of Disaster Recovery Plan document	Sedang Dilakukan In Progress	Pada tahun 2023, *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk PT PELNI (Persero) sudah dirilis sesuai dengan Keputusan Direksi nomor 12.29/07/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) PT PELNI (Persero) In 2023, the Disaster Recovery Plan (DRP) for PT PELNI (Persero) was released according to the Board of Directors' Decree number 12.29/07/SK/HKO.01/2023 regarding the Guidelines for the Disaster Recovery Plan (DRP) of PT PELNI (Persero).

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
13	Peningkatan & optimalisasi pengelolaan *backup & restore* Improvement & optimization of backup & restore management	Sedang Dilakukan In Progress	Pada tahun 2023, pengadaan perangkat *backup offline* masih dalam proses. Namun untuk backup aplikasi kritis, *backup* sudah dilakukan baik di *data center* maupun DRC In 2023, the procurement of offline backup devices was still in progress. However, for critical application backups, backups have been made both at the data center and DRC.
Inisiatif Tata Kelola Governance Initiative			
1	Pelaksanaan sosialisasi *Digital Transformation* Implementation of Digital Transformation socialization	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2023, program transformasi digital perusahaan disosialisasikan kepada seluruh pegawai In 2023, the digital transformation program of the company was socialized to all employees.
2	Penentuan *Champion & Change Agent Digital Transformation* Determination of Digital Transformation Champion & Change Agent	Sudah Dilakukan Already Done	Champion transformasi digital untuk PT PELNI (Persero) & agen digital telah ditunjuk pada tahun 2023 The champion of digital transformation for PT PELNI (Persero) & digital agent was appointed in 2023.
3	Penentuan & Penerapan KPI *Digital Transformation* Determination & Implementation of Digital Transformation KPIs	Sudah Dilakukan Already Done	KPI Transformasi Digital telah ditentukan dan diterapkan ke Divisi TI Teknologi Informasi serta KPI Kontrak Manajemen 2023 (Teknologi Leadership) Digital Transformation KPIs have been determined and applied to the IT Division Technology Information and 2023 Management Contract KPIs (Technology Leadership).
4	Penyesuaian Struktur Organisasi TI Adjustment of IT Organizational Structure	Sudah Dilakukan Already Done	Struktur Organisasi Divisi TI telah disesuaikan berdasarkan Keputusan Direksi nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kantor Pusat pada PT PELNI (Persero) The Organizational Structure of the IT Division has been adjusted based on the Board of Directors' Decree number 01.27/01/SK/HKO.01/2023 regarding the Organizational Structure, Duties, and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero).
5	Pelaksanaan *Manpower* Planning Divisi TI Implementation of IT Division Manpower Planning	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 03.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat It has been carried out based on the Board of Directors' Decree No. 03.02/01/SK/HKO.01/2023 concerning the Formation of Work Units and Positions within the Central Office.
6	Pemenuhan Personil Divisi TI Fulfillment of IT Division Personnel	Sudah Dilakukan Already Done	Proses rekrutmen untuk Karyawan Kontrak di Divisi TI telah dilakukan hingga tahun 2023 (4 orang) Recruitment processes for Contract Employees in the IT Division have been carried out until 2023 (4 people).

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
7	Pembentukan IT *Steering Committee* Formation of IT Steering Committee	Sudah Dilakukan Already Done	IT *Steering Committee* telah terbentuk berdasarkan Keputusan Direksi nomor 07.24/01/SK/HKO.01/2023 Tentang Komite Penyelenggara Teknologi Informasi (IT *STEERING COMMITTEE*) PT PELNI (Persero) The IT Steering Committee has been formed based on the Board of Directors' Decree number 07.24/01/SK/HKO.01/2023 Regarding the Information Technology Steering Committee (IT STEERING COMMITTEE) of PT PELNI (Persero);
8	Pelaksanaan ITSC *Meeting* Conducting ITSC Meeting	Belum dilakukan Not Yet Done	*ITSC Meeting* akan dilaksanakan pada awal 2024 dengan pembahasan evaluasi pekerjaan di tahun 2023 dan rencana pekerjaan tahun 2024 The ITSC Meeting will be held in early 2024 to discuss the evaluation of work conducted in 2023 and the work plans for 2024.
9	Pelaksanaan & Pemenuhan *Evidence* Tata Kelola TI Implementation & Fulfillment of IT Governance Evidence	Sudah dilakukan Already Done	Beberapa pemenuhan *evidence* tata kelola TI sudah dilakukan seperti: • Pelaksanaan *IT service management* menggunakan aplikasi ITSM, prosedur eskalasi, dan evaluasi tren insiden dan permintaan layanan TI (Proses COBIT2019 : DSS02) • Penunjukkan *Champion of Digital Transformation* PT PELNI (Persero) dan penyusunan *communication plan* RSTI (Proses COBIT2019 : APO02) • Implementasi proses permintaan/pengajuan perubahan terkait pengembangan layanan di *ClickUp* (Proses COBIT2019 : BAI02) • Penyusunan rencana kapasitas aplikasi kritikal PT PELNI (Persero) (Proses COBIT2019 : BAI04) • Penyusunan List/Daftar Kepatuhan terkait Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan *Area Of Improvement* (AOI) Assessment GCG PT PELNI (Persero) Tahun 2022 (Proses COBIT2019 : MEA03) • Pembentukan *IT Steering Commitee* dan penetapan tingkat kritikalitas aplikasi pada *Business Impact Analysis* (Proses COBIT2019 : APO01) Some IT governance evidence fulfillments have been conducted, such as: • Implementation of IT service management using ITSM applications, escalation procedures, and evaluation of trends in IT service incidents and requests (COBIT2019 Process: DSS02) • Appointment of the Champion of Digital Transformation of PT PELNI (Persero) and development of the RSTI communication plan (COBIT2019 Process: APO02) • Implementation of change request processes related to service development in ClickUp (COBIT2019 Process: BAI02) • Development of a capacity plan for critical applications of PT PELNI (Persero) (COBIT2019 Process: BAI04) • Preparation of a Compliance List related to the Minister of SOE Regulation PER-2/MBU/03/2023 and the Area Of Improvement (AOI) Assessment of GCG PT PELNI (Persero) in 2022 (COBIT2019 Process: MEA03) • Formation of an IT Steering Committee and determination of application criticality levels in the Business Impact Analysis (COBIT2019 Process: APO01)

No	Inisiatif Initiative	Status	Penjelasan Explanation
10	Pelaksanaan *review* dan update kebijakan, standar dan prosedur pengelolaan insiden dan permintaan layanan TI Review and update of policies, standards, and procedures for managing IT incident and service requests	Sudah Dilakukan Already Done	Prosedur pengelolaan insiden dan permintaan layanan TI sudah dilakukan berdasarkan SK Direksi nomor 03.15/02/SK/HKO.01/202 tentang Kebijakan Pengelolaan Aplikasi PT PELNI (Persero) Incident and service request management procedures have been conducted based on the Board of Directors' Decree number 03.15/02/SK/HKO.01/202 regarding the Application Management Policy of PT PELNI (Persero).
11	Pembuatan dan implementasi kebijakan, standar dan prosedur pengelolaan problem layanan TI Development and implementation of policies, standards, and procedures for managing IT service problems	Belum dilakukan Not Yet Done	Akan dilakukan pada tahun 2024 Scheduled for 2024
12	Penyusunan Data *Governance* Development of Data Governance	Belum dilakukan Not Yet Done	Akan dilakukan pada tahun 2024 Scheduled for 2024
13	Pelaksanaan Data *Cleansing* & Konsolidasi Data Implementation of Data Cleansing & Data Consolidation	Belum dilakukan Not Yet Done	Akan dilakukan pada tahun 2024 Scheduled for 2024

STRUKTUR ORGANISASI TI

Sesuai SK Direksi nomor. 03.02/01/SK/HKO.01/2023, pada tahun 2023 terdapat perubahan struktur organisasi di Divisi TI untuk Departemen Pengembangan TI. Saat ini pada Departemen Pengembangan TI menggunakan struktur organisasi berbentuk *ellips* yang terdiri dari *Expert Developer* dan *Developer.* Adapun untuk Departemen Perencanaan dan Tata Kelola TI, terdapat 3 (tiga) *supervisor* yaitu *Supervisor Program & Portfolio Management, Supervisor IT Service Perfomance, Assurance* dan *Governance, Supervisor IT Planning & Architecture;* serta pada Departemen Operasional TI ada 6 (enam) supervisor yaitu *Supervisor Commerce System Operation; Supervisor Enterprise System Operation; Supervisor Operational System Operation; Supervisor Infrastructure, Security & Data Center; Supervisor Seat Management, Peripheral & Operational Services; Supervisor IT Service Desk.*

INFORMATION TECHNOLOGY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In accordance with Board of Directors Decree no. 03.02/01/SK/HKO.01/2023, there was an organizational structure change in the IT Division for the IT Development Department in 2023. Currently, the IT Development Department uses an ellipsis-shaped organizational structure consisting of Expert Developers and Developers. As for the IT Planning and Governance Department, there are 3 (three) supervisors, namely the Program & Portfolio Management Supervisor, IT Service Performance, Assurance, and Governance Supervisor, and IT Planning & Architecture Supervisor. Additionally, in the IT Operational Department, there are 6 (six) supervisors, namely the Commerce System Operation Supervisor, Enterprise System Operation Supervisor, Operational System Operation Supervisor, Infrastructure, Security & Data Center Supervisor, Seat Management, Peripheral & Operational Services Supervisor, and IT Service Desk Supervisor.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Berikut ini gambaran struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi sesuai SK Direksi:

The following is an overview of the Information Technology Division's organizational structure according to the Board of Directors Decree:

Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi
Information Technology Division Organizational Structure

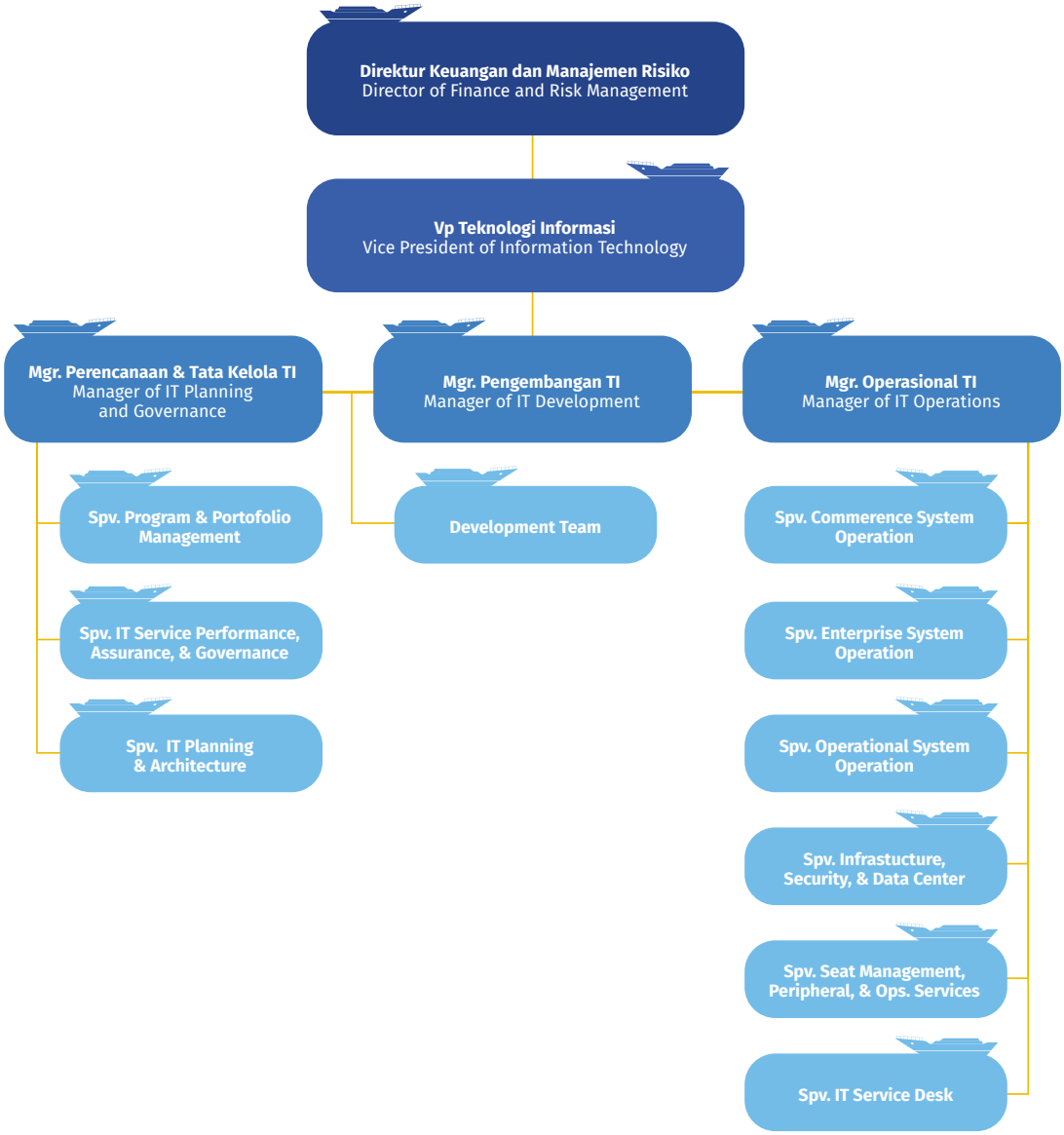

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah pegawai Divisi Teknologi Informasi sebanyak 41 orang, dengan 24 orang pegawai organik dan 10 orang pegawai non-organik serta 7 orang manage service (5 orang Helpdesk, 2 orang petugas NOC). Berdasarkan SK Direksi nomor 03.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat, Divisi TI memiliki 48 formasi pegawai. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Divisi TI bekerja sama dengan Divisi SDM merencanakan rekrutmen untuk memenuhi formasi pegawai yang masih kosong.

APLIKASI/SISTEM INFORMASI

Aplikasi-aplikasi dan sistem informasi yang ada di PELNI dibangun berdasarkan kebutuhan dari setiap unit kerja/fungsi bisnis yang ada di Perusahaan. Berdasarkan RKAP 2023 dan *roadmap* inisiatif aplikasi/sistem informasi pada tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi 2022-2024, ada beberapa aplikasi yang telah berhasil diimplementasikan dan ada beberapa aplikasi yang sudah masuk tahapan pembangunan. Berikut pencapaian pengembangan aplikasi-aplikasi penting di PT PELNI (Persero).

INTEGRATED COMMERCIAL SYSTEM

1. *Agencies Modul* – Pelni *Mobile* (*Integrated Commercial System*)
   Dalam rangka integrasi seluruh layanan bisnis PELNI pada dua aplikasi komersial (*web & mobile super apps*) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan citra Perseroan. Pada tahun 2023, Divisi Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) telah mengembangkan modul baru pada aplikasi Pelni *Mobile* yakni modul *Agencies Services* yang bisa digunakan oleh masyarakat luas untuk menggunakan jasa keagenan yang dimiliki oleh PT PELNI (Persero). Program ini juga termasuk dalam KPI Kontrak Manajemen 2023.

HUMAN RESOURCES TOTAL

As of December 31, 2023, the number of employees in the Information Technology Division is 41 people, with 24 organic employees and 10 non-organic employees, as well as 7 managed services (5 Helpdesk personnel, 2 NOC officers). Based on the Board of Directors Decree number 03.02/01/SK/HKO.01/2023 regarding the Formation of Work Units and Positions within the Central Office Scope, the IT Division has 48 employee formations. Therefore, in 2024, the IT Division, in collaboration with the HR Division, plans to recruit to fill the vacant employee formations.

APPLICATION/INFORMATION SYSTEMS

Applications and information systems at PELNI are built based on the needs of each business unit/function within the Company. Based on the 2023 RKAP and the roadmap for application/information system initiatives in 2023 outlined in the 2022-2024 Information Technology Strategic Plan, several applications have been successfully implemented, and several applications are in the development stage. Here are the achievements in developing important applications at PT PELNI (Persero).

INTEGRATED COMMERCIAL SYSTEM

1. Agencies Module - Pelni Mobile (Integrated Commercial System)
   In order to integrate all PELNI's business services into two commercial applications (web & mobile super apps) aimed at increasing revenue and the Company's image. In 2023, the Information Technology Division of PT PELNI (Persero) developed a new module in the Pelni Mobile application, namely the Agencies Services module, which can be used by the general public to use the agency services owned by PT PELNI (Persero). This program is also included in the 2023 Management Contract KPI.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

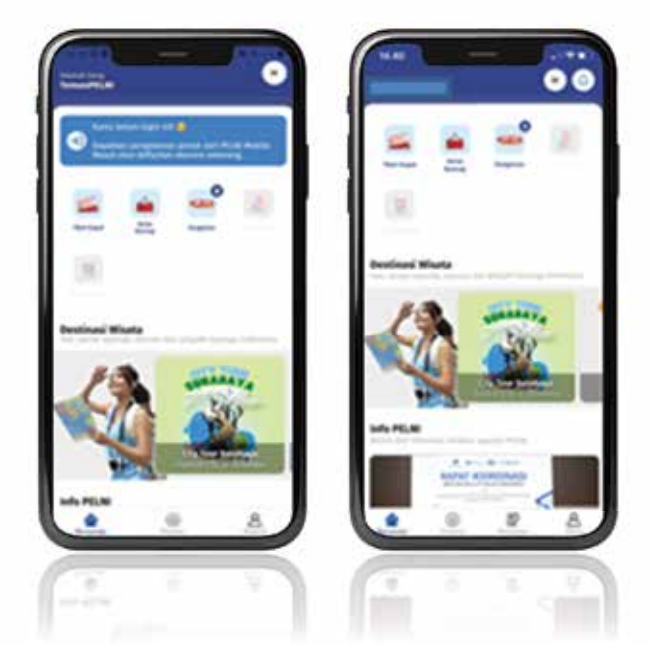

2. Aplikasi *Add On* pada *Ticketing Services*
Dalam rangka menunjang terlaksananya penjualan *Add On* pada layanan *ticketing* PELNI saat ini, telah dikembangkan aplikasi *Add On* yang terintegrasi dengan aplikasi PPSS (Pelni *Passenger Service System*). Aplikasi ini telah diimplementasikan dan memberikan dampak peningkatan pendapatan dan citra perusahaan. Program kerja ini merupakan program kerja yang menjadi kontrak kerja manajemen tahun 2023. Berikut ini contoh tampilan aplikasi *Add On* untuk *ticketing services*

2. Add-Ons Application for Ticketing Services
In order to support the implementation of Add-Ons sales in PELNI's current ticketing services, an Add-Ons application has been developed, integrated with the PPSS (Pelni Passenger Service System) application. This application has been implemented and has had an impact on increasing revenue and the company's image. This work program is a management contract work program for the year 2023. Below is an example display of the Add-Ons application for ticketing services.

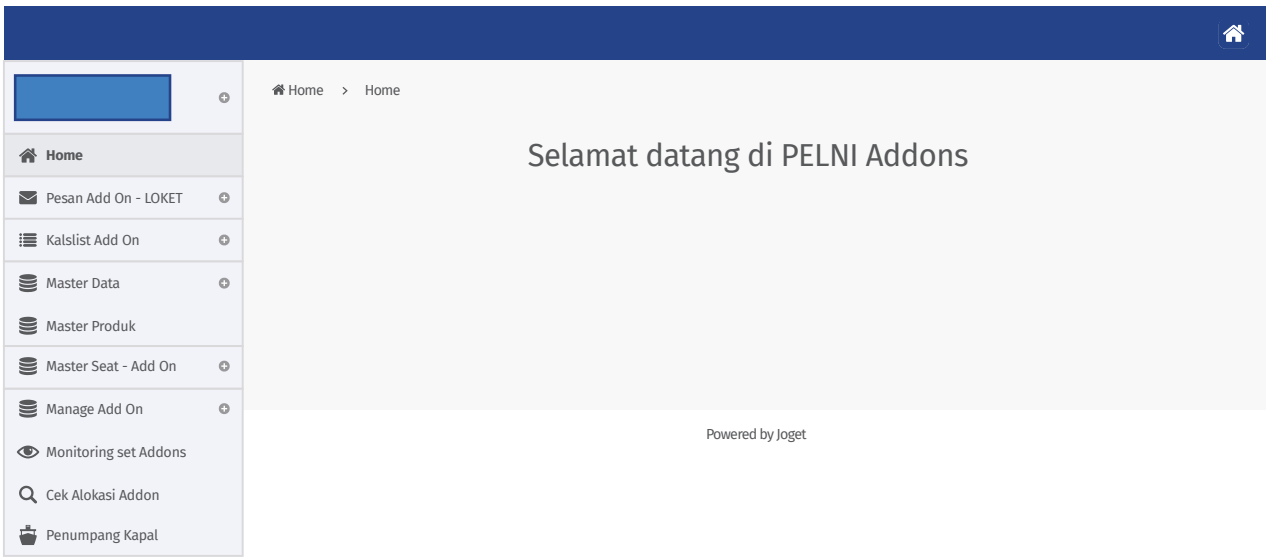

INTEGRATED MONITORING CCTV KAPAL – SEAMATA

Salah satu bentuk inovasi teknologi pada alat produksi yang dikembangkan oleh Divisi Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) yakni melakukan pengembangan Integrasi Sistem *Monitoring* CCTV yang terdapat di kapal penumpang dengan memanfaatkan konektivitas SISKOMKAP dan teknologi kompresi data guna memudahkan dalam *monitoring* aktivitas di kapal penumpang PT PELNI (Persero) melalui *dashboard.* Program kerja ini merupakan salah satu program kerja strategis Divisi TI pada tahun 2023.

INTEGRATED MONITORING CCTV SHIP - SEAMATA

One form of technological innovation in production tools developed by the Information Technology Division of PT PELNI (Persero) is the development of an Integrated CCTV Monitoring System on passenger ships utilizing SISKOMKAP connectivity and data compression technology to facilitate monitoring activities on PT PELNI (Persero) passenger ships through a dashboard. This work program is one of the strategic work programs of the IT Division in 2023.

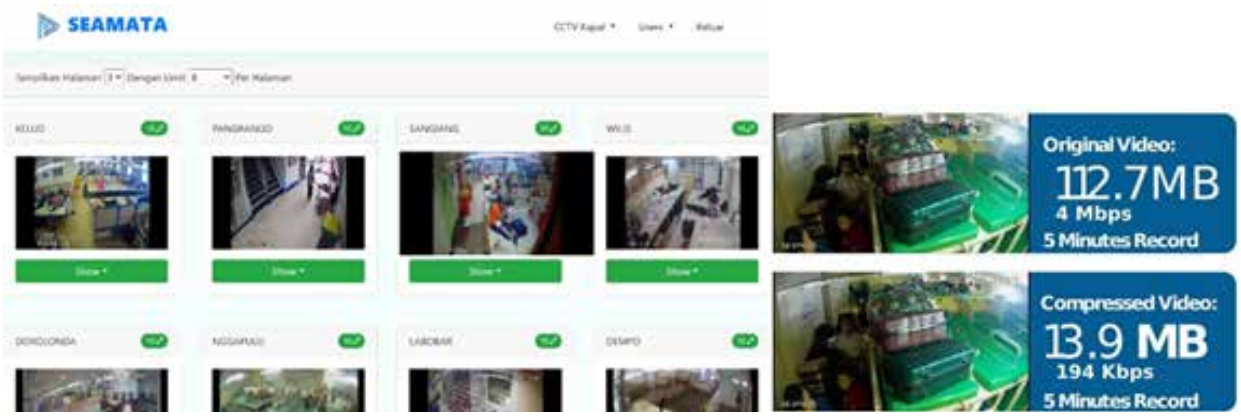

Dengan pengembangan aplikasi SEAMATA ini tentunya memberikan beberapa manfaat seperti:

a. Meningkatkan pengawasan terhadap keamanan penumpang (pencurian, pelecehan, dll)
b. Kemudahan *monitoring* kegiatan operasional menggunakan CCTV di Kapal Penumpang melalui *dashboard*
c. Mengoptimalkan penggunaan *bandwidth* SISKOMKAP dalam *transfer data livestream* CCTV ke Kantor Pusat

The development of the SEAMATA application undoubtedly provides several benefits, such as:

a. Enhancing supervision over passenger safety (theft, harassment, etc.).
b. Facilitating the monitoring of operational activities using CCTV on Passenger Ships through a dashboard.
c. Optimizing the use of SISKOMKAP bandwidth in transferring CCTV livestream data to the Head Office.

PENGEMBANGAN E-BILLING SYSTEM

Dalam mewujudukan digitalisasi sistem proses pengajuan, verifikasi dan pembayaran penagihan di PT PELNI (Persero), pada tahun 2023 telah dikembangkan sebuah aplikasi yakni *E-Billing System*. Program kerja ini merupakan salah satu program kerja strategis Divisi TI pada tahun 2023. Pengembangan *E-Billing System* ini mencakup pengembangan standar *invoice* dan integrasi dengan aplikasi keuangan PT PELNI (Persero). Berikut ini merupakan contoh tampilan aplikasi *E-Billing System*

DEVELOPMENT OF E-BILLING SYSTEM

In realizing the digitization of the billing submission, verification, and payment process system at PT PELNI (Persero), an application called the E-Billing System has been developed in 2023. This work program is one of the strategic work programs of the IT Division in 2023. The development of the E-Billing System includes the development of invoice standards and integration with the financial application of PT PELNI (Persero). Below is an example display of the E-Billing System application.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

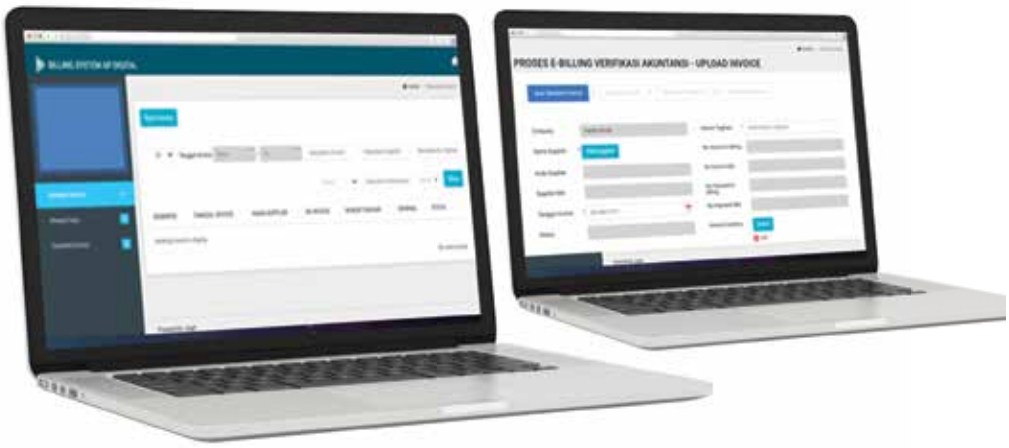

PENGEMBANGAN OPERATIONAL DASHBOARD

Pada tahun 2023, Divisi TI telah mengembangkan *dashboard* untuk memonitor kinerja dan operasional perusahaan yang dapat digunakan untuk pendukung pengambilan keputusan manajemen dan *monitoring* kinerja perusahaan. Berikut ini merupakan contoh tampilan aplikasi *Operational Dashboard.*

DEVELOPMENT OF OPERATIONAL DASHBOARD

In 2023, the IT Division developed a dashboard to monitor the performance and operations of the company, which can be used to support management decision-making and monitor company performance. Below is an example display of the Operational Dashboard application.

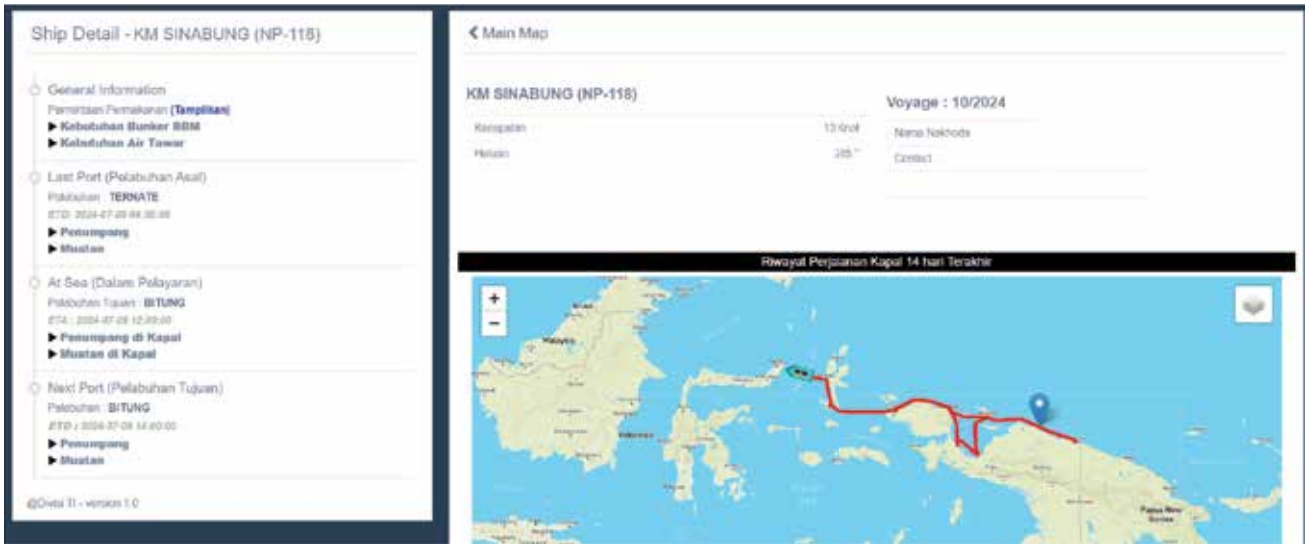

Program kerja ini merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi informasi pada alat produksi dengan memanfaatkan teknologi SISKOMKAP (Sistem Komunikasi Kapal) yang bertujuan untuk memonitor kegiatan operasional di kapal, cabang dan pelabuhan. Adapun informasi yang disajikan pada operational *dashboard* antara lain:

1. Kegiatan Operasional Kapal (*Tracking, Positioning,* Penggunaan BBM, Jumlah Penumpang Naik/Turun, dan sebagainya)
2. Kegiatan Operasional di Cabang dan Pelabuhan (Informasi Kapal Tiba, ETA dan ETD Kapal, dan sebagainya)
3. Komunikasi VoIP (Telekomunikasi antara pihak *Operation Room* dan Kapal menggunakan *Voice over IP* (VoIP)

PENGEMBANGAN *ROUTE MANAGEMENT SYSTEM*

Pada tahun 2023, PT PELNI (Persero) telah melakukan penerapan AI (*Artificial Intelligence*) yakni dengan pengembangan aplikasi *Route Management System*. Aplikasi *Route Management System* digunakan untuk mengelola optimalisasi perencanaan dan perjalanan kapal. Program kerja ini merupakan salah satu program kerja strategis TI Tahun 2023.

Aplikasi *Route Management System* terdiri dari bebeapa fitur sebagai berikut:

1. Informasi biaya operasional kapal, pelabuhan dan histori trayek/rute
2. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk rute
3. Estimasi jumlah penumpang dan penghasilan untuk rute
4. Estimasi laba/rugi untuk rute
5. Rute/trayek optimal (efektif dan efisien) dari berbagai

This work program is one form of information technology innovation in production tools utilizing SISKOMKAP (Ship Communication System) technology aimed at monitoring operational activities on ships, branches, and ports. The information presented on the operational dashboard includes:

1. Ship Operational Activities (Tracking, Positioning, Fuel Consumption, Number of Passengers Boarding/Alighting, etc.)
2. Operational Activities at Branches and Ports (Ship Arrival Information, ETA and ETD of Ships, etc.)
3. VoIP Communication (Telecommunication between the Operation Room and the Ship using Voice over IP (VoIP))

DEVELOPMENT OF ROUTE MANAGEMENT SYSTEM

In 2023, PT PELNI (Persero) implemented AI (Artificial Intelligence) by developing the Route Management System application. The Route Management System application is used to optimize ship planning and travel management. This work program is one of the strategic IT work programs for 2023.

The Route Management System application consists of several features, including:

1. Information on ship, port operational costs, and route history
2. Estimated costs required for the route
3. Estimated number of passengers and revenue for the route
4. Estimated profit/loss for the route
5. Optimal routes (effective and efficient) based on various

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

parameter (biaya, estimasi jumlah penumpang, estimasi jumlah muatan, dll)
6. Menampilkan tanda peringatan untuk kapal yang menyinggahi pelabuhan sama pada waktu yang bersamaan

Berikut ini merupakan contoh tampilan aplikasi *Route Management System*:

parameters (cost, estimated number of passengers, estimated cargo volume, etc.)
6. Displaying warnings for ships visiting the same port at the same time

Below is an example display of the Route Management System application:

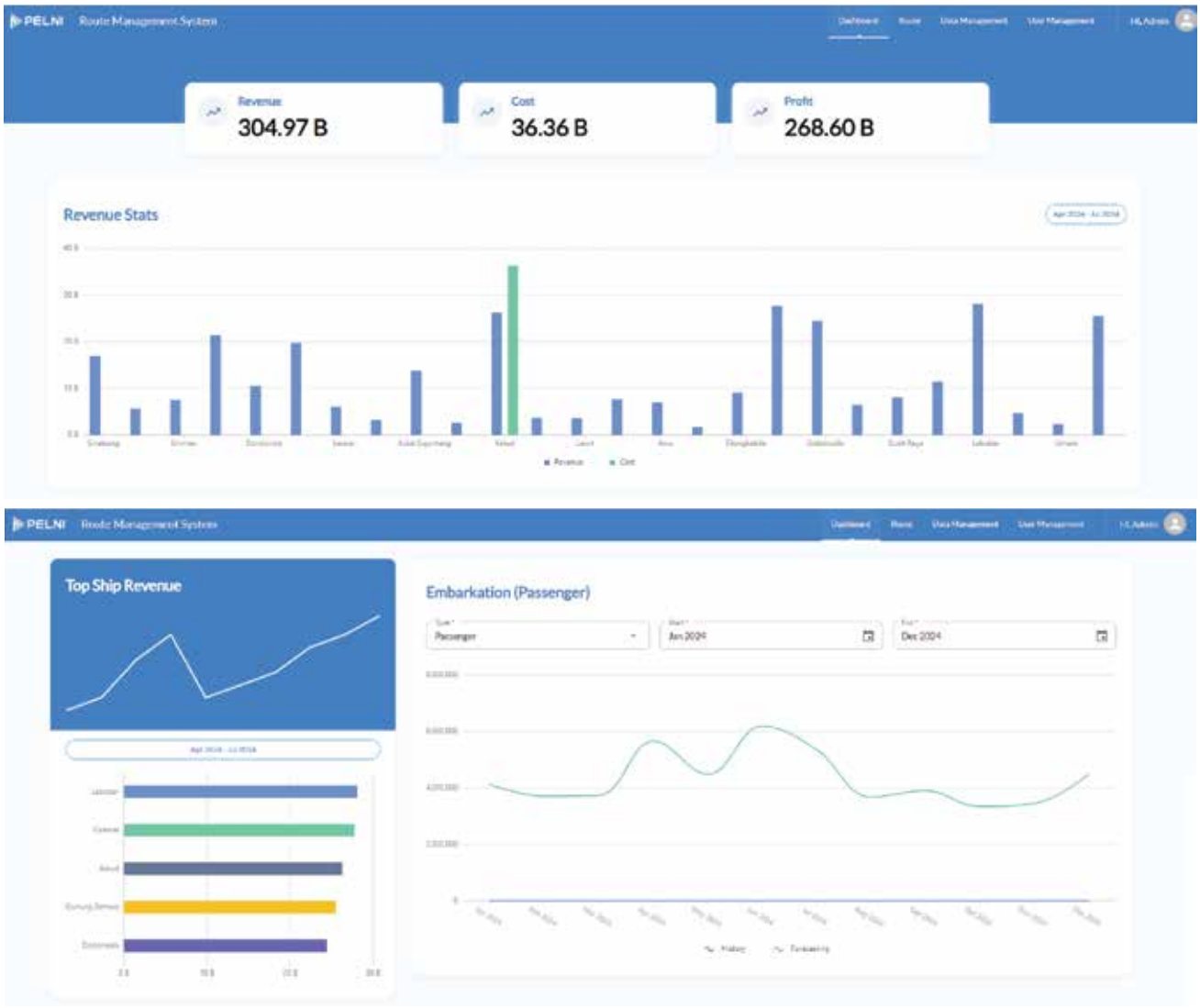

Dengan telah dikembangkannya aplikasi *Route Management System* tentunya memberikan manfaat seperti:
1. Mendapatkan rute/ruas pelayaran yang lebih optimal dari sisi biaya dan penghasilan
2. Evaluasi atas rute/ruas yang dilayari kapal-kapal PELNI

With the development of the Route Management System application, it provides benefits such as:
1. Obtaining more optimal sailing routes/segments in terms of cost and revenue.
2. Evaluation of the routes/segments sailed by PELNI ships.

ENHANCEMENT APLIKASI HRIS

Pada tahun 2023, telah dilakukan *enhancement* untuk *Modul Perfomance Management System* dan *Organization Management System* pada aplikasi HRIS. Adapun *enhancement* yang dilakukan berupa:

1. *Modul Perfomance Management System*
   a. Penambahan fitur penunjang
   b. Peningkatan proses penilaian
2. *Modul Organization Management System*
   a. Penambahan fitur *drafting* mutasi secara otomatis
   b. Fitur yang ada pada modul menjadi lebih fleksibel

ENHANCEMENT OF HRIS APPLICATION

In 2023, enhancements were made to the Performance Management System and Organization Management System modules in the HRIS application. The enhancements made include:

1. Performance Management System Module
   a. Addition of supporting features.
   b. Improvement of the assessment process.
2. Organization Management System Module
   a. Addition of automatic mutation drafting features.
   b. Enhancement of existing features in the module to be more flexible.

PENGEMBANGAN IT *SERVICE MANAGEMENT – REQUEST MANAGEMENT*

Sebagai upaya dalam meningkatkan proses pengelolaan layanan TI di lingkungan PT PELNI (Persero), Divisi Teknologi Informasi juga telah membangun layanan aplikasi baru yang disebut IT *Service Management*. Pada tahun 2023, Divisi TI telah melakukan pengembangan untuk modul *Request Management* yang digunakan untuk mengelola permintaan pada layanan TI yang diajukan oleh pengguna. Berikut ini merupakan contoh tampilan aplikasi ITSM – *Request Management:*

DEVELOPMENT OF IT SERVICE MANAGEMENT - REQUEST MANAGEMENT

As an effort to improve the IT service management process at PT PELNI (Persero), the Information Technology Division has also developed a new application service called IT Service Management. In 2023, the IT Division developed the Request Management module, which is used to manage requests for IT services submitted by users. Below is an example display of the ITSM - Request Management application:

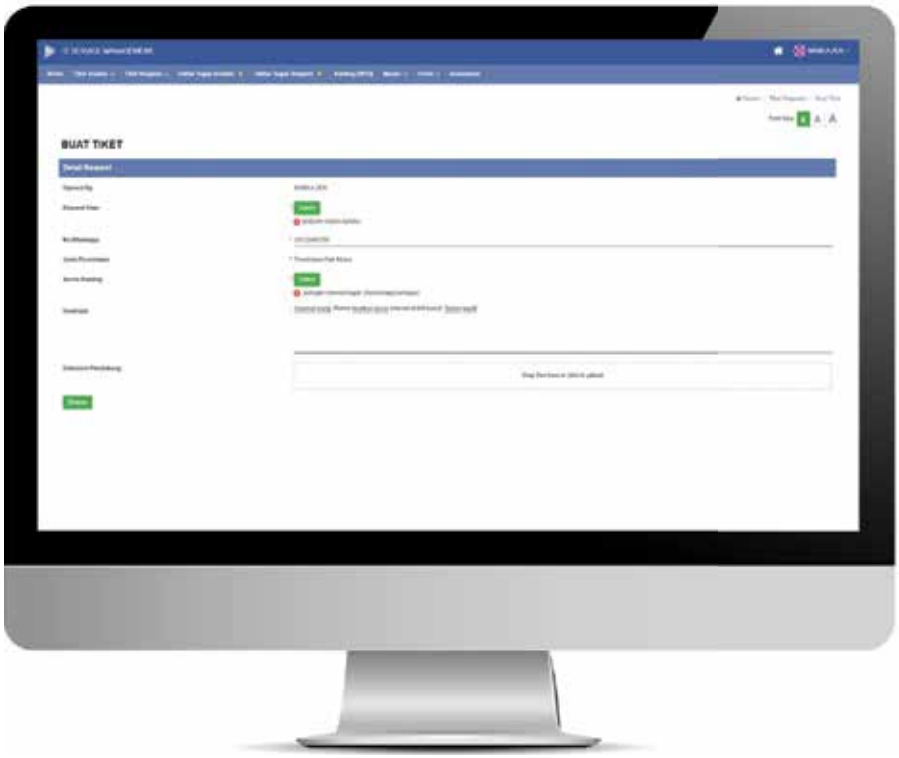

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi PT PELNI (Persero) pada 2023, Divisi TI telah membangun dan mengimplementasikan *Disaster Recovery Center* (DRC). Sistem DRC ini terkoneksi dengan *data center* primer milik PELNI. Data-data dan informasi yang penting secara regular disimpan di sistem DRC PT PELNI (Persero) sehingga perusahaan memiliki *backup* data yang akan berfungsi jika terjadi peristiwa/bencana yang menyebabkan *data center* primer PT PELNI (Persero) mengalami kerusakan.

Topologi infrastruktur teknologi informasi PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

To strengthen the information technology infrastructure of PT PELNI (Persero) in 2023, the IT Division has built and implemented a Disaster Recovery Center (DRC). This DRC system is connected to PELNI's primary data center. Important data and information are regularly stored in the DRC system of PT PELNI (Persero) so that the company has data backups that will function if an event/disaster occurs that causes damage to PELNI's primary data center.

The topology of PT PELNI (Persero)'s information technology infrastructure is as follows:

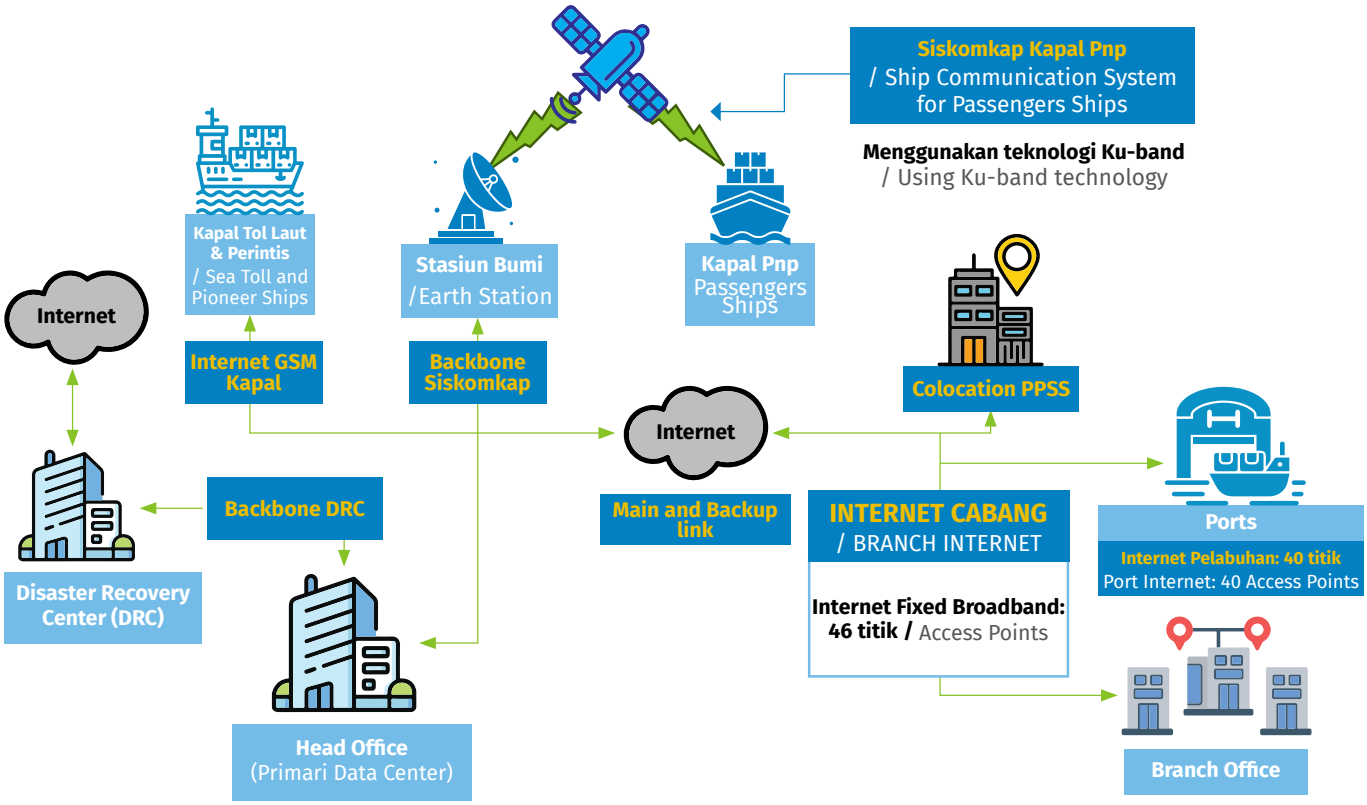

Pada tahun 2023 Divisi Teknologi Informasi melanjutkan peremajaan perangkat-perangkat jaringan di kantor pusat dengan metode managed service. Pekerjaan ini meliputi pembuatan *centralized access point*, WLAN *controller,* perangkat *access point,* dan *software* pendukungnya. Pekerjaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan dan kemudahan manajemen infrastruktur jaringan

In 2023, the Information Technology Division continued the refurbishment of network devices at the head office using the managed service method. This work includes creating centralized access points, WLAN controllers, access point devices, and their supporting software. The aim of this work is to improve network quality and facilitate network infrastructure management at the head office. One of the

di kantor pusat. Salah satu kontrol manajemen jaringan ini adalah para pegawai gedung kantor pusat dapat dengan mudah terhubung.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN MANAJEMEN RISIKO

PELNI memahami bahwa tata kelola teknologi informasi dan manajemen risiko teknologi informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan teknologi informasi, sesuai perkembangan lingkup industry dan kebutuhan keorganisasian perusahaan. Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja dan kualitas dari layanan teknologi informasi yang dihasilkan, sedangkan manajemen risiko yang baik akan melindungi pengelolaan layanan teknologi informasi perusahan.

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 09.07/01/SK/HKO.01/2022 dan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023, tata kelola teknologi informasi PELNI mengadopsi proses-proses yang ada pada *framework* (kerangka kerja) COBIT 5.

Kerangka kerja tata kelola teknologi informasi di PELNI adalah sebagai berikut:

network management controls is that employees at the head office can easily connect.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

PELNI understands that information technology governance and information technology risk management are important parts of information technology management, in line with industry developments and the organizational needs of the company. A high level of maturity in information technology governance will affect the performance and quality of the information technology services produced, while good risk management will protect the company's information technology service management.

According to Board of Directors Decree number 09.07/01/SK/HKO.01/2022 and Minister of State-Owned Enterprises Regulation PER-2/MBU/03/2023, PELNI's information technology governance adopts processes from the COBIT 5 framework.

The information technology governance framework at PELNI is as follows:

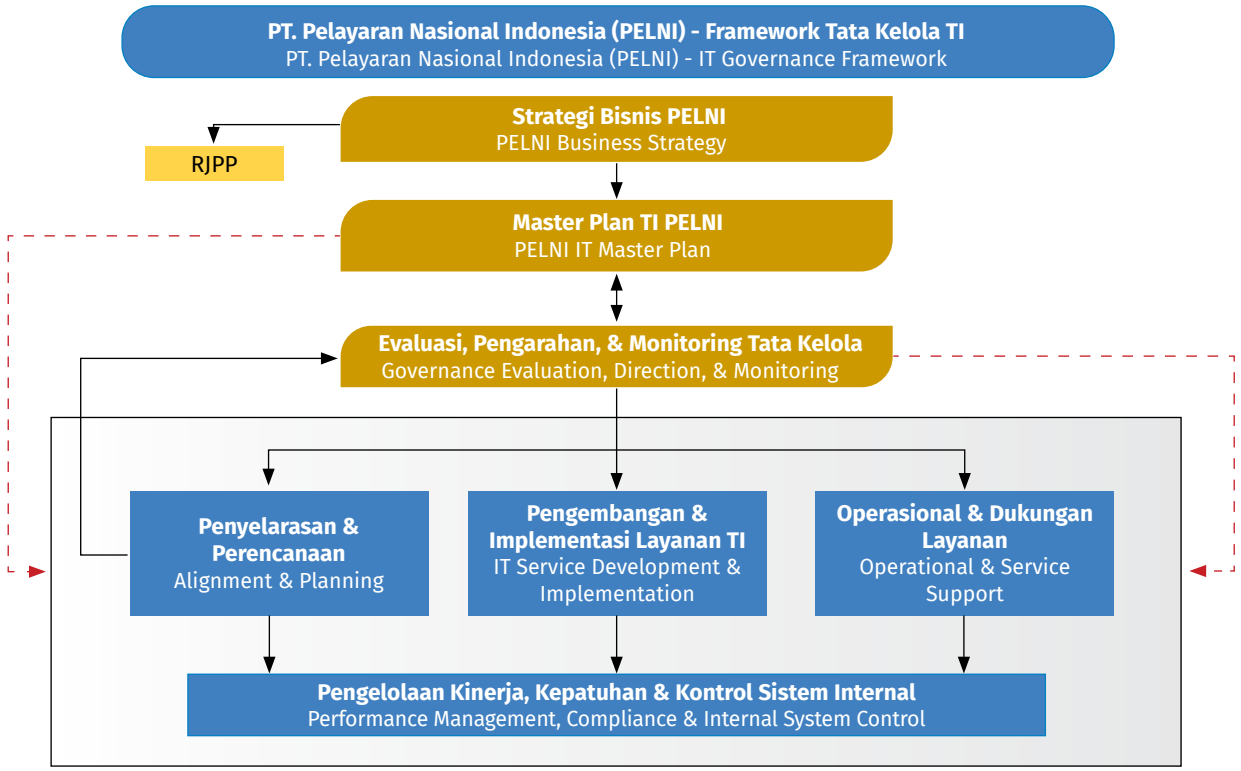

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Framework Tata Kelola TI yang digambarkan di atas memperlihatkan keseluruhan proses tata kelola TI yang dilaksanakan oleh Divisi TI PELNI. Segala kegiatan yang dijalankan oleh segenap personil Divisi TI PELNI tidak terlepas dari tujuan dan strategi yang ditetapkan, yaitu strategi TI yang selaras dengan tujuan dan strategi bisnis PELNI.

ASSESSMENT TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TI

Setiap BUMN diwajibkan untuk melakukan *assessment* tingkat kematangan tata kelola TI. Berdasarkan Surat Penyesuaian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dengan Arahan Pemegang Saham terkait Teknologi dan Teknolog Informasi, Kementerian BUMN mensyaratkan setiap BUMN melakukan *assessment* dengan *framework* COBIT 5 atau COBIT 2019. Atas arahan tersebut, Divisi Teknologi Informasi telah melakukan assessment Tingkat Kematangan Tata Kelola TI pada November – Desember 2023.

Kegiatan *assessment* dilakukan oleh asesor *independent* yaitu, PT Equine Global. Skor yang didapatkan dari hasil *assessment* tersebut adalah 2.00. Hasil ini menandakan Perseroan perlu menguatkan tata kelola teknologi informasi yang dimiliki sehingga tetap selaras dengan kemajuan zaman.

Berdasarkan hasil penilaian IT Maturity Level, saat ini nilai kapabilitas proses TI di PT PELNI (Persero) berada pada level 2 (*Managed*) dengan nilai kapabilitas proses secara keseluruhan adalah 2.00. Hasil ini menandakan perusahaan perlu menguatkan tata kelola teknologi informasi sehingga dapat selaras dengan kemajuan zaman.

KUESIONER KEPUASAN LAYANAN TI *STAKEHOLDER*

Divisi Teknologi Informasi mengadakan kegiatan pengisian Kuesioner Kepuasan Layanan TI dengan jangka waktu pengisian tanggal 31 Oktober–14 November 2023. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan *stakeholder* pada layanan aplikasi, jaringan, maupun infrastruktur yang disajikan oleh Divisi TI.

Berdasarkan hasil 3 (tiga) kategori survei di atas, maka rata-rata nilai survei tingkat kepuasan *stakeholder* layanan TI PELNI tahun 2023 adalah 4,19 (skala 1-5) dengan rincian sebagai berikut:

The above-described IT Governance Framework illustrates the overall IT governance process carried out by PELNI's IT Division. All activities undertaken by the entire personnel of PELNI's IT Division are closely tied to the goals and strategies set, namely IT strategies that align with PELNI's business goals and strategies.

ASSESSMENT OF IT GOVERNANCE MATURITY LEVEL

Every state-owned enterprise (BUMN) is required to conduct an assessment of its IT governance maturity level. Based on the Adjustment Letter for the Preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 with Shareholder Directives related to Technology and Information Technology, the Ministry of SOEs requires every BUMN to conduct an assessment using the COBIT 5 or COBIT 2019 framework. Following this directive, the Information Technology Division conducted an IT Governance Maturity Level Assessment in November - December 2023.

The assessment was conducted by an independent assessor, PT Equine Global. The score obtained from the assessment was 2.00. This result indicates that the company needs to strengthen its IT governance to remain aligned with the advancements of the times.

Based on the IT Maturity Level assessment, the current value of IT process capability at PT PELNI (Persero) is at level 2 (Managed) with an overall process capability value of 2.00. This result indicates that the company needs to strengthen its IT governance to align with the advancements of the times.

IT STAKEHOLDER SERVICE SATISFACTION QUESTIONNAIRE

The Information Technology Division conducted an IT Stakeholder Service Satisfaction Questionnaire filling activity from October 31 to November 14, 2023. The purpose of filling out this questionnaire is to determine the level of stakeholder satisfaction with the application, network, and infrastructure services provided by the IT Division.

Based on the results of the above 3 (three) survey categories, the average stakeholder satisfaction survey score for PELNI's IT services in 2023 is 4.19 (on a scale of 1-5), with the details as follows:

No	Kategori Category	Nilai Score
1	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan TI PELNI Employee Satisfaction Level with PELNI's IT Services	4,13
2	Tingkat Kepuasan Vendor Terhadap Layanan TI PELNI Vendor Satisfaction Level with PELNI's IT Services	4,47
3	Tingkat Kepuasan Mitra Terhadap Layanan TI PELNI Partner Satisfaction Level with PELNI's IT Services	3,96
Nilai Rata-Rata Keseluruhan **Overall Average Value**		**4,19**

Pada tahun 2023, kepuasan *stakeholder* terhadap layanan teknologi informasi PELNI diharapkan dapat semakin meningkat.

In 2023, it is expected that stakeholder satisfaction with PELNI's information technology services will continue to increase.

PENGHARGAAN TOP DIGITAL AWARDS 2023

Pada tanggal 05 Desember 2023, PT PELNI (Persero) mendapatkan sejumlah penghargaan TOP DIGITAL Awards 2023 dengan tema *IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services*, untuk kategori:

TOP DIGITAL AWARDS 2023

On December 5, 2023, PT PELNI (Persero) received several TOP DIGITAL Awards 2023 with the theme of IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services, for the following categories:

Kategori Penghargaan Category of Awards	Pemenang Penghargaan Award Winners
Top Digital Implementation 2023 #*Level Star* 4	PT PELNI (Persero)
Top Leader on Digital Implementation 2023	Direktur Utama PT PELNI (Persero) Tri Andayani President Director of PT PELNI (Persero) Tri Andayani

Kegiatan TOP DIGITAL Awards 2023 ini diselenggarakan oleh majalah It Works yang bekerja sama dan didukung oleh beberapa Asosiasi dan Perusahaan Konsultan TI dan TELCO. Berikut ini foto penghargaan *TOP DIGITAL Awards* 2023 yang dimenangkan oleh PT PELNI (Persero).

The TOP DIGITAL Awards 2023 event was organized by the magazine It Works in collaboration with and supported by several IT and TELCO Association and Consulting Companies. Here is a photo of the TOP DIGITAL Awards 2023 won by PT PELNI (Persero).

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Agar pemanfaatan TI dapat memberikan dampak yang optimal terhadap operasional Perseroan, dibutuhkan investasi khusus yang ditujukan untuk mengoptimalkan peran TI itu sendiri. Investasi TI dilakukan dengan menambah kapasitas perangkat keras dan juga perangkat lunak yang digunakan Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan TI sesuai dengan tuntutan industri dan kebutuhan Perseroan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah Penyediaan dana untuk melakukan investasi dalam pengembangan TI. Berikut investasi di bidang TI di tahun 2023

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

To ensure that the utilization of IT can have an optimal impact on the company's operations, special investments are needed to optimize the role of IT itself. IT investment is carried out by adding hardware and software capacity used by the company.

The company is committed to continuing the development of IT in accordance with industry demands and the company's needs. One form of this commitment is the provision of funds for investment in IT development. Below are the investments in the field of IT in 2023

No	Kelompok Anggaran Budget Group	Biaya Cost
1	Komputerisasi *Software* Computerization of Software	Rp16.864.470.000,00
2	Komputerisasi *Hardware* Computerization of Hardware	Rp16.375.530.000,00
3	Komputerisasi Lisensi Computerization of Licenses	Rp5.200.000.000,00
	Total Investasi **Total Investment**	**Rp38.440.000.000,00**

MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

PELNI menerapkan manajemen risiko teknologi informasi berdasarkan SK Direksi No.10.06/2/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 di PT PELNI (Persero). Sesuai ketentuan tersebut, setiap unit kerja/cabang/SBU berkewajiban untuk menyampaikan laporan *risk register* dan *response plan* per triwulan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk dilaporkan kepada manajemen (Direksi dan Komisaris). Sesuai laporan risk register TW IV pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) risiko beserta mitigasi risikonya yang ada pada teknologi informasi perusahaan, dengan penjabaran sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT

PELNI implements information technology risk management based on Board of Directors Decree No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 regarding the Determination of Risk Management Guidelines Based on ISO 31000 at PT PELNI (Persero). According to these provisions, each work unit/branch/SBU is required to submit a risk register and response plan report every quarter to the Risk Management and Compliance Division for reporting to management (Board of Directors and Commissioners). According to the TW IV risk register report in 2023, there is 1 (one) risk along with its risk mitigation that exists in the company's information technology, detailed as follows:

No	Risiko Risk	Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company	Rencana Mitigasi Mitigation Plan
1	Kegagalan dalam Mengintegrasikan Aplikasi *Commercial* Failure in integrating commercial applications	• Tidak ada penambahan integrasi aplikasi • *Customer Experience* yang kurang baik • *Loss Opportunity* dalam potensi bisnis • Proses bisnis kurang efektif dan efisien • No additional application integration • Poor customer experience • Loss of opportunity in business potential • Ineffective and inefficient business processes	• Melibatkan *user* dalam pembuatan BRS, TDD, SIT dan UAT dalam suatu pengembangan project IT • Melaksanakan rapat koordinasi bersama *user* untuk mengevaluasi implementasi project TI • *Monitoring progress* pekerjaan secara periodik dan menyelesaikan kendala yang timbul • Involving users in the creation of Business Requirements Specification (BRS), Technical Design Document (TDD), System Integration Testing (SIT), and User Acceptance Testing (UAT) in an IT project development. • Conducting coordination meetings with users to evaluate the implementation of IT projects. • Periodically monitoring work progress and resolving arising issues.

PELNI
We Connect, We Unify

05

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

TINJAUAN EKONOMI MAKRO
MACROECONOMIC OVERVIEW

Pemulihan ekonomi global di tahun 2023 pasca pandemi masih diwarnai peningkatan tensi geopolitik, berjalan lambat dan tidak merata. Meskipun sempat menunjukkan resiliensi pada awal tahun, namun kemudian melambat hingga akhir tahun akibat penurunan permintaan global yang dipengaruhi oleh suku bunga yang tinggi. Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia. Ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 juga menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan juga dunia. Hal ini turut berperan pada perlambatan proses pemulihan ekonomi global.

The global economic recovery in 2023 post-pandemic was marked by increasing geopolitical tensions, progressing slowly and unevenly. Although initially showing resilience at the beginning of the year, it slowed down towards the end due to a decline in global demand influenced by high-interest rates. Geopolitical-economic fragmentation also intensified with the ongoing Russia-Ukraine war, causing supply constraints and persistently high global energy and food prices. The continued trade tensions between the United States (US) and China affected not only their bilateral exports and imports but also global trade volumes. The escalation of the Israel-Palestine conflict since early October 2023 further added to geopolitical tensions in the Middle East and worldwide, contributing to the slowdown in the global economic recovery process.

Kinerja perekonomian dan pasar keuangan global selama 2023 bergerak sangat dinamis dengan ketidakpastian yang tinggi dan tidak merata. Perekonomian di berbagai negara terdivergensi di tengah perlambatan ekonomi global, inflasi yang tinggi, prospek suku bunga *higher for longer*, peningkatan tensi geopolitik, serta berbagai permasalahan domestik. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang cukup mencolok, terlihat dari perekonomian Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif resilien ditopang oleh pasar tenaga kerja yang ketat, sementara prospek pertumbuhan ekonomi China terus menurun akibat krisis sektor properti yang tidak kunjung membaik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi Euro Area (EA) relatif lambat seiring tingginya eksposur terhadap konflik geopolitik di Ukraina.

Global economic and financial market performance in 2023 was highly dynamic with high and uneven uncertainty. Economies across different countries diverged amid the global economic slowdown, high inflation, higher-for-longer interest rate prospects, increasing geopolitical tensions, and various domestic issues. This divergence is evident from the stark differences in economic growth, with the US economy showing relative resilience supported by a tight labor market, while China's economic growth prospects continued to decline due to the ongoing property sector crisis. On the other hand, the economic recovery in the Euro Area (EA) was relatively slow due to high exposure to the geopolitical conflict in Ukraine.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tetap lambat yang merefleksikan tingginya risiko dan ketidakpastian prospek perekonomian global. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2023, IMF mempertahankan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,0% yoy pada 2023, sama dengan prakiraan Juli 2023, lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,5%.

The International Monetary Fund (IMF) projects that global economic growth will remain slow, reflecting high risks and uncertainty in the global economic outlook. In the October 2023 World Economic Outlook (WEO), the IMF maintained its forecast for global economic growth at 3.0% year-on-year (yoy) for 2023, the same as the July 2023 forecast, slower than the 2022 economic growth of 3.5%.

Di tengah meningkatnya tekanan sektor eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global, perekonomian domestik Indonesia tetap solid. Stabilitas makro dan eksternal tetap terjaga, dengan inflasi yang berada pada rentang target tahun 2023 dan kinerja neraca pembayaran yang masih terjaga. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di angka 5,05% (c-to-c) lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Selama tahun 2023, perekonomian Indonesia dilihat secara spasial

Amid increasing external pressures due to global economic uncertainty, Indonesia's domestic economy remained solid. Macroeconomic and external stability were maintained, with inflation within the 2023 target range and a stable balance of payments. Cumulatively, national economic growth was 5.05% (c-to-c), lower than the 2022 growth of 5.31%. Throughout 2023, Indonesia's economy continued to grow spatially. The group of provinces by island with the highest growth were Maluku and Papua, Sulawesi, and Kalimantan, with growth (c-to-c) of

masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (c-to-c) sebesar 6,94%; 6,37%; dan 5,43%. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05% terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96% (c-to-c).

6.94%, 6.37%, and 5.43%, respectively. Meanwhile, the group of provinces on Java Island, contributing 57.05% to the national economy, recorded a growth of 4.96% (c-to-c).

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%.

Growth occurred across all business sectors. The sectors with the highest growth were Transportation and Warehousing at 13.96%, followed by Other Services at 10.52%, and Accommodation and Food and Beverage Provision at 10.01%. Meanwhile, the Manufacturing Industry, which plays a dominant role, grew by 4.64%. Agriculture, Forestry, and Fisheries, as well as Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, grew by 1.30% and 4.85%, respectively.

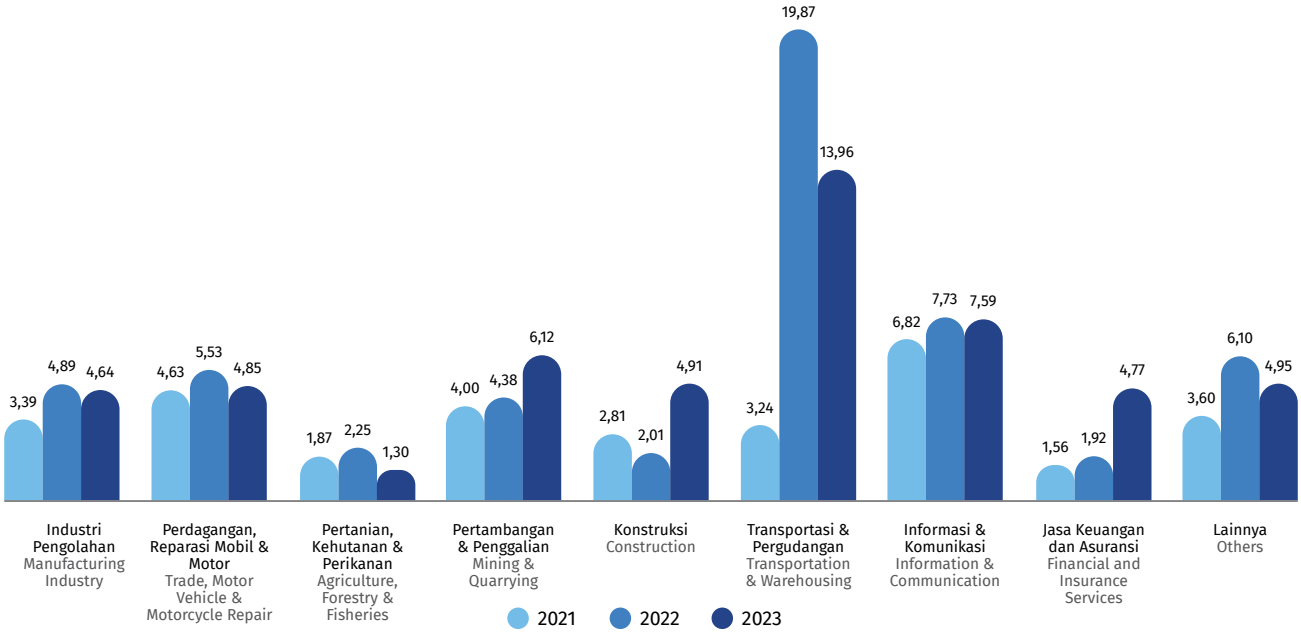

Tingginya permintaan domestik menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang terjaga, di tengah melemahnya ekspor akibat pelemahan ekonomi global dan penurunan tren harga komoditas. Reformasi struktural yang terus berlanjut, diantaranya melalui hilirisasi industri, menjadi faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang berkelanjutan.

High domestic demand supported economic growth, remaining resilient amidst weakening exports due to the global economic downturn and declining commodity prices. Ongoing structural reforms, including industrial downstreaming, are factors that can drive sustainable medium-term economic growth.

Disamping isu ekonomi, tahun 2023 juga diwarnai dengan isu perubahan iklim berupa fenomena cuaca *extreme*,

In addition to economic issues, 2023 was also marked by climate change issues, such as unprecedented extreme weather

TINJAUAN EKONOMI MAKRO
MACROECONOMIC OVERVIEW

belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah fenomena *heatwave* yang terjadi di banyak tempat secara bersamaan. Hal ini adalah bukti nyata bagaimana dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh manusia di berbagai belahan dunia.

Adanya perubahan iklim tersebut juga sedikit banyak berdampak pada melonjaknya harga beras lebih dari 20% dibandingkan tahun 2022, hal ini dimungkinkan karena kekeringan yang berkepanjangan dan penurunan volume produksi akibat hal tersebut. Pada akhirnya dengan adanya kenaikan harga beras yang cukup signifikan di sepanjang tahun 2023 sangat berdampak terhadap masyarakat pada umumnya terutama kalangan ekonomi menengah bawah.

phenomena, with heatwaves occurring simultaneously in many places. This is concrete evidence of the impact of climate change experienced by people around the world.

The impact of climate change also contributed to a more than 20% increase in rice prices compared to 2022. This was likely due to prolonged drought and decreased production volumes. Ultimately, the significant rise in rice prices throughout 2023 had a considerable impact on the general population, especially the lower-middle economic class.

TINJAUAN INDUSTRI
INDUSTRIAL OVERVIEW

Menurut data Badan Pusat Statistik, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 adalah Transportasi dan Pergudangan yakni sebesar 13,96%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri sepanjang 2023 tercatat 19,9 juta orang naik 11,69% dibandingkan periode yang sama. Sementara itu, jumlah barang yang diangkut sepanjang 2023 mencapai 351,0 juta ton atau naik 9,47%. Hal ini seiring dengan peningkatan mobilitas Masyarakat sebagai imbas penghapusan pemberlakuan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta danya penyelenggaraan beberapa acara nasional dan internasional juga turut menjadi faktor pendorong tumbuhnya sektor transportasi.

Disamping itu, Industri pelayaran masih dihadapkan pada tantangan berat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Namun, Asosiasi Industri Pelayaran di Tanah Air tetap optimis bahwa ekonomi nasional akan tetap solid di tengah tantangan kondisi global yang tidak menentu. Sehingga industri pelayaran diperkirakan akan tetap tumbuh dan tidak terlalu terkena dampak dari sentimen negatif kondisi ekonomi 2023. Selain itu, salah satu faktor pendukung sektor pelayaran saat ini berasal dari Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hal ini memberikan kontribusi yang baik pada peningkatan muatan terutama material konstruksi. Disamping itu, sektor pelayaran juga akan memainkan peran yang cukup penting sebagai sarana transportasi pemenuhan kebutuhan dan logistik Pembangunan. Hal ini dirasa akan mampu berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor pelayaran nasional.

According to data from the Central Bureau of Statistics, the sector with the highest growth in 2023 was Transportation and Warehousing, which grew by 13.96%. Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the number of domestic sea transport passengers in 2023 was recorded at 19.9 million, an increase of 11.69% compared to the same period last year. Meanwhile, the amount of cargo transported in 2023 reached 351.0 million tons, an increase of 9.47%. This growth is attributed to the increased mobility of the public following the lifting of the Public Activity Restrictions (PPKM). Additionally, the increase in foreign tourist visits and the hosting of several national and international events have also contributed to the growth of the transportation sector.

The shipping industry continues to face significant challenges amid the uncertainty of global economic conditions. However, the National Shipping Industry Association remains optimistic that the national economy will remain solid amid global uncertainties. Thus, the shipping industry is expected to continue growing and not be significantly impacted by the negative economic sentiment of 2023. Additionally, one of the supporting factors for the shipping sector comes from the development of the new capital city, Nusantara (IKN), which has positively contributed to the increase in cargo, especially construction materials. Moreover, the shipping sector will play an essential role as a means of transportation for fulfilling the needs and logistics of the development. This is expected to contribute to the improvement of the national shipping sector's performance.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Pembahasan tinjauan per segmen usaha pada Laporan Tahunan ini disajikan sesuai dengan pembagian segmen yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sesuai PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi. Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan Entitas Anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

The business segment review presented in this Annual Report is aligned with the segment classification listed in the Company's Consolidated Financial Statements in accordance with PSAK No. 5 on Operating Segments. A segment is a distinct part of the Company and its Subsidiaries engaged in either providing products and services (business segment) or providing products and services in a specific economic environment (geographical segment) that bears different risks and rewards from other segments.

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi menjadi dua segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi bruto dan diukur secara konsisten dengan laba rugi bruto pada laporan keuangan konsolidasi. Grup juga melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil Keputusan operasional Grup.

For management purposes, the Group is divided into two operating segments based on independently managed products and services. Segment performance is evaluated based on gross profit and is measured consistently with gross profit in the consolidated financial statements. The Group also performs reporting segmentation based on financial information used by the chief operating decision maker in evaluating segment performance and determining the allocation of resources. The Board of Directors is the Group's chief operating decision maker.

PELNI membagi segmen usaha menjadi 2 (dua) segmen, yakni:
1. Segmen Penugasan;
2. Segmen Non-Penugasan;

PELNI divides its business segments into two (2) segments:
1. Assignment Segment;
2. Non-Assignment Segment;

Kontribusi segmen terhadap kinerja keuangan Perusahaan disajikan pada tabel-tabel di bawah ini :

The contribution of each segment to the Company's financial performance is presented in the tables below:

Segmen Usaha | Business Segment	**2023**	**2022**	**Perubahan /** Changes		**Kontribusi** Contribution
			Nominal	**Persentase (%) /** Percentage (%)	
Penugasan / Assignment	4.812.113	4.066.031	746.082	18,35	83,45%
Non-Penugasan / Non-Assignment	954.506	840.569	113.937	13,55	16,55%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenue	5.766.619	4.906.600	860.019	17,53	100,00%

Pendapatan usaha Perseroan diperoleh berdasarkan aktivitas operasi yang berlangsung pada 2023, dengan pengungkapan kinerja produksi 2023-2022 sebagai berikut:

The Company's operating revenues were earned from the operations throughout 2023, with the disclosure of production performance for 2023-2022 as follows:

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

No.	Uraian / Description	2023	2022	Anggaran 2023 / 2023 Budget	Perubahan (yoy) / Change (yoy)	Pemenuhan Anggaran 2022 / 2022 Budget Realization
Kapal Penumpang / Passenger Ship						
1	Penumpang (Orang) / Passenger (People)	4.330.486	3.488.633	3.637.388	841.853	119,05%
2	Muatan / Cargo					
	Barang (Ton/M3) / Goods (Ton/M3)	38.826	39.175	44.469	(349)	87,31%
	Container (TEUs)	11.105	11.104	11.557	1	96,09%
	Kendaraan (Unit) / Vehicles (Unit)	11.339	12.886	10.402	(1.547)	109,01%
	Red Pack	992.122	967.080	845.972	25.041	117,28%
Kapal Perintis / Perintis Ship						
1	Penumpang (Orang) / Passenger (People)	932.203	752.724	644.324	179.479	144,68%
2	Muatan / Cargo					
	Barang (Ton/M3) / Goods (Ton/M3)	100.457	88.223	98.230	12.234	102,27%
	Container (TEUs)	-	-	-	-	-
Kapal Barang / Cargo Ship						
1	Muatan / Cargo					
	Barang (Ton/M3) / Goods (Ton/M3)	-	-	-	-	-
	Container (TEUs)	13.653	14.678	15.225	(1.025)	89,67%
	Batu Bara (Ton/M3) / Coal (Ton/M3)	-	-	-	-	-
Kapal Barang Tol Laut / Sea Toll Cargo Ship						
1	Muatan / Cargo					
	Barang (Ton/M3) / Goods (Ton/M3)		-			
	Container (TEUs)	13.653	14.678	15.225	(1.025)	89,67%
	Batu Bara (Ton/M3) / Coal (Ton/M3)		-			
Kapal Barang Non-Penugasan dan Kapal Cadangan / Non-Assignment Cargo Ship and Reserve Ship						
1	Muatan / Cargo					
	Barang (Ton/M3) / Goods (Ton/M3)		-			
	Container (TEUs)	—				
	Batu Bara (Ton/M3) / Coal (Ton/M3)		-			
Kapal Ternak / Cattle Ship						

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

No.	Uraian / Description	2023	2022	Anggaran 2023 / 2023 Budget	Perubahan (yoy) / Change (yoy)	Pemenuhan Anggaran 2022 / 2022 Budget Realization
1	Penumpang (Orang) / Passenger (People)		-			
2	Muatan / Cargo					
	Barang (Ton/M3) / Goods (Ton/M3)		-			
	Ternak (Ekor) / Livestock (Cattle)	7.308	7.886	6.300	(578)	116,00%
Kapal Rede / Rede Ship						
1	Penumpang (Orang) / Passenger (People)	-	-	-	-	-
2	Muatan / Cargo					
	Barang (Ton/M3) / Goods (Ton/M3)	-	-	-	-	-
	Ternak (Ekor) / Livestock (Cattle)	-	-	-	-	-

SEGMEN USAHA PENUGASAN

Pendapatan segmen usaha penugasan merupakan kompensasi yang diterima dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation* - PSO) dan subsidi meliputi:

1. Angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
2. Kegiatan pengoperasian kapal ternak;
3. Angkutan barang di laut (tol laut);
4. Kapal perintis milik negara; dan
5. Kapal rede.

ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

Kegiatan angkutan laut untuk penumpang merupakan jasa transportasi yang disediakan oleh PT PELNI (Persero) melalui pengoperasian armada kapal penumpang, dengan rute perjalanan domestik yang menyinggahi lebih dari 83 pelabuhan di seluruh area Indonesia. Fasilitas dan layanan yang diberikan dirancang secara khusus untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan, didukung Sumber Daya Manusia yang profesional.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian angkutan laut untuk penumpang tahun anggaran 2023 sebesar Rp2,39 triliun, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA – 999.07.1.985120/2023 tanggal 30 Desember 2023.

ASSIGNMENT BUSINESS SEGMENT

Revenue from the assignment business segment represents compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation – Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) assignments and subsidies, which include:

1. Sea transportation for economy class passengers;
2. Cattle ship operations;
3. Sea freight transportation (sea toll);
4. State-owned pioneer ship; and
5. Rede ship.

SEA TRANSPORTATION FOR ECONOMY CLASS PASSENGERS

The sea transportation service for passengers is provided by PT PELNI (Persero) through the operation of a passenger ship fleet, with domestic routes that call at more than 83 ports throughout Indonesia. The facilities and services offered are specifically designed to ensure the safety and comfort of customers, supported by professional human resources.

The value of the agreement for the subsidized operation of sea transportation for passengers for the 2023 fiscal year is Rp2.39 trillion, charged to the Budget Implementation List (DIPA) Number DIPA – 999.07.1.985120/2023 dated December 30, 2023.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Jumlah *voyage* dan kompensasi per unit kapal yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The number of voyages and compensation per unit of ship performing the Public Service Obligation in the field of sea transportation for economy class passengers for the fiscal years 2023 and 2022 is as follows:

Jumlah Kapal / Total Ships	Jumlah Voyage / Total Voyage		Pendapatan PSO (Rp juta) / PSO Revenue (Rp million)	
	2023	2022	2023	2022
26	631	599	2.642.581	2.220.616

KEGIATAN ANGKUTAN BARANG DI KAPAL PENUMPANG

PT PELNI (Persero) melaksanakan kegiatan angkutan barang melalui kapal penumpang sebagai jasa pengangkutan muatan ke seluruh pelabuhan singgah kapal PELNI. Kegiatan ini mencakup jasa angkut muatan *container (dry container dan reefer container), general cargo, red pack*, serta kendaraan. Pada kegiatan angkut ini, PELNI menghadirkan total estimasi *voyage* kurang lebih 14 hari pp, dilengkapi dengan kemudahan transaksi berupa layanan pemesanan melalui aplikasi MyCargoo!.

CARGO TRANSPORT ACTIVITIES ON PASSENGER SHIPS

PT PELNI (Persero) conducts cargo transport activities using passenger ship as a service to transport goods to all PELNI ship port calls. This activity includes the transportation of container cargo (dry containers and reefer containers), general cargo, red pack, and vehicles. In these transport activities, PELNI offers a total estimated voyage duration of approximately 14 days for round trips, accompanied by the convenience of transactions through the MyCargoo!application.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian angkutan barang kapal penumpang tahun anggaran 2023 sebesar Rp2,39 miliar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-999.07.1.985120/2023 tanggal 30 Desember 2023.

The value of the agreement for the subsidized operation of cargo transport on passenger ship for the 2023 fiscal year is Rp2.39 billion, charged to the Budget Implementation List (DIPA) Number SP DIPA-999.07.1.985120/2023 dated December 30, 2023.

Jumlah *voyage* dan kompensasi per unit kapal yang melaksanakan kegiatan angkutan barang di kapal penumpang tahun anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The number of voyages and compensation per unit of ship performing cargo transport activities on passenger ship for the fiscal years 2023 and 2022 is as follows:

Jumlah Kapal / Total Ships	Jumlah Voyage / Total Voyage		Pendapatan PSO (Rp juta) / PSO Revenue (Rp million)	
	2023	2022	2023	2022
26	631	599	2.642.581	2.220.616

KAPAL TERNAK

Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2023 dilakukan berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal

CATTLE SHIP

The operation of subsidized cattle ships for the 2023 fiscal year is based on the Subsidized Cattle Ship Operations Agreement for the 2022 Fiscal Year Numbers: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2022 and TH.12.28-10/SS/2022 dated December 12, 2022,

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Ternak Tahun Anggaran 2022 Nomor: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2022 dan Nomor: TH.12.28-10/SS/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD-II/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 pada tanggal 08 Desember 2023.

which was amended twice with Number: ADD-II/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 on December 8, 2023.

Lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) *round voyage* sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal (*home base*) sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal, setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

The maximum voyage duration for a cattle ship in one round voyage is as specified in the decree of the Director General of Sea Transportation, starting from the vessel's arrival at the home base port until its return after sailing according to the predetermined sequence of ports.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi tahun anggaran 2023 untuk pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1, tanpa menggunakan kapal pengganti kode Trayek: RT-1, yaitu Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok/Patimban - 1179/1005 - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 dengan target frekuensi per tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

The vessel used for the subsidized cattle ship operations for the 2023 fiscal year is KM. Camara Nusantara 1, without any replacement vessel. The route code is RT-1, which covers Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok/Patimban - 1179/1005 - Kupang. The operational period for KM. Camara Nusantara 1 is from January 1, 2023, to December 31, 2023, with a targeted frequency.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2023 sebesar Rp11,24 miliar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.439454/2023 tanggal 30 November 2022.

The value of the agreement for the subsidized cattle ship operations for the 2023 fiscal year is Rp11.24 billion, charged to the Budget Implementation List (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.439454/2023 dated November 30, 2022.

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan rute Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam menekan harga daging dan mensejahterakan peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

PT PELNI (Persero) operates one cattle ship, KM Camara Nusantara I, with the route Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang. The purpose of the cattle ship is to assist the government in reducing meat prices and improving the welfare of livestock farmers in domestic cattle farming centers.

Jumlah Kapal / Total Ships	Jumlah Ternak (ekor) / Total Livestock (Cattle)		Jumlah Voyage / Total Voyage		Pendapatan PSO (Rp juta) / PSO Revenue (Rp million)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
1	7.308	7.886	15	18	8.593	11.049

ANGKUTAN BARANG DI LAUT (TOL LAUT)

Jasa angkutan barang di laut dihadirkan sebagai upaya Perseroan bersama Pemerintah dalam menghadirkan konektivitas laut yang efektif secara rutin dan terjadwal, dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Tol laut sendiri merupakan program Pemerintah yang diterapkan dengan

SEA FREIGHT TRANSPORTATION (SEA TOLL)

The sea freight transportation service is provided as part of the Company's and the Government's efforts to establish effective sea connectivity regularly and on a scheduled basis, from the western to the eastern regions of Indonesia. The sea toll program itself is a Government initiative aimed at

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

maksud dan tujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan muatan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, serta untuk menjamin ketersediaan barang sehingga mengurangi disparitas harga, sebagai dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

reaching and distributing logistics cargo to underdeveloped, remote, outermost, and border areas, ensuring the availability of goods to reduce price disparities, thereby supporting the improvement of community welfare.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) tahun anggaran 2023 sebesar Rp174,25 miliar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.04.1.439454/2022 tanggal 17 November 2021.

The value of the agreement for the subsidized operation of Sea Freight Transportation (Sea Toll) for the 2023 fiscal year is Rp174.25 billion, charged to the Budget Implementation List (DIPA) Number SP DIPA-022.04.1.439454/2022 dated November 17, 2021.

Jumlah *voyage* dan kompensasi per unit kapal dan kode trayek yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The number of voyages and compensation per unit of vessel and route code performing the Public Service Obligation for Sea Freight Transportation for the fiscal years 2023 and 2022 are as follows:

Jumlah Kapal / Total Ships	Produksi Kontainer (TEUs) / Container Production (TEUs)		Jumlah Voyage / Total Voyage		Pendapatan Subsidi (Rp juta) / Subsidy Revenue (Rp million	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
10	13.653	14.508	109	141	174.249	181.451

KAPAL PERINTIS

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2023 Nomor KP-DJPL 192 tahun 2022 dan Nomor: 04/KTRK/PRTS/PELNI/IX/2023 dan Nomor TH.09.25-01/KNP/2023 tanggal 25 September 2023, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD.01/PRTS/PELNI/III/2023 pada tanggal 02 Maret 2023.

PIONEER SHIPS

Revenue from the assignment for the implementation of public service activities for state-owned pioneer ships is based on the Public Service Implementation Agreement for State-Owned Pioneer Ships for the 2023 Fiscal Year, Number KP-DJPL 192 of 2022 and Number: 04/KTRK/PRTS/PELNI/IX/2023 and Number TH.09.25-01/KNP/2023 dated September 25, 2023, which was amended twice with Number: ADD.01/PRTS/PELNI/III/2023 on March 2, 2023.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan public kapal perintis milik negara tahun anggaran 2023 sebesar Rp380,35 miliar, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2023 tanggal 30 November 2022.

The value of the agreement for the implementation of public service activities for state-owned pioneer ships for the 2023 fiscal year is Rp380.35 billion, charged to the Budget Implementation List (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454/2023 dated November 30, 2022.

Jumlah Kapal / Total Ships	Jumlah Voyage / Total Voyage		Pendapatan Subsidi (Rp juta) / Subsidy Revenue (Rp million	
	2023	2022	2023	2022
48	1.146	1.119	578.850	557.281

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

KAPAL REDE
Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) tahun anggaran 2023 adalah sejumlah Rp44,00 miliar, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor SP-DIPA 022.04.1.439454/2023 Tanggal 30 November 2022.

REDE SHIPS
The value of the agreement for the implementation of water transportation services using state-owned vessels (Rede Ships) for the 2023 fiscal year is Rp44.00 billion, charged to the Budget Implementation List (DIPA) of the Central Work Unit for Sea Traffic Safety Improvement, Number SP-DIPA 022.04.1.439454/2023 dated November 30, 2022.

Jumlah Kapal / Total Ships	Pendapatan Subsidi (Rp juta) / Subsidy Revenue (Rp million	
	2023	2022
16	41.054	40.164

PENDAPATAN SEGMEN USAHA PENUGASAN
Pendapatan segmen usaha penugasan pada tahun 2023 adalah sejumlah Rp4,81 triliun, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 18,35% atau senilai Rp746,09 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,07 triliun. Pada tahun 2023, segmen penugasan berkontribusi sebesar 83,45% atas total pendapatan yang diperoleh Perseroan.

REVENUE OF THE ASSIGNMENT BUSINESS SEGMENT
The revenue of the assignment business segment in 2023 amounted to Rp4.81 trillion, marking an increase of 18.35% or Rp746.09 billion from the previous year's Rp4.07 trillion. In 2023, the assignment segment contributed 83.45% of the Company's total revenue.

PROFITABILITAS SEGMEN USAHA PENUGASAN

Sepanjang tahun 2023, segmen usaha penugasan menghasilkan laba kotor sebesar Rp782,80 miliar, nilai ini meningkat 17,27% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp667,51 miliar. Dan segmen usaha penugasan juga mampu mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp381,04 miliar, nilai ini juga meningkat dari tahun 2022 yang sebesar Rp307,22 miliar.

Peningkatan ini sebanding dengan meningkatnya jumlah pendapatan usaha yang mampu diperoleh segmen penugasan di sepanjang tahun 2023.

PROFITABILITY OF THE ASSIGNMENT BUSINESS SEGMENT
Throughout 2023, the assignment business segment generated a gross profit of Rp782.80 billion, an increase of 17.27% from the previous year's Rp667.51 billion. The assignment business segment also recorded a net profit of Rp381.04 billion for the year, up from Rp307.22 billion in 2022.

This increase is proportional to the rise in business revenue that the assignment segment was able to achieve throughout 2023.

Uraian / Description	2023	2022	Pertumbuhan / Growth	
			Rp	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenue	4.812.113	4.066.031	746.082	18,35
Beban Pokok Usaha / Revenue Operating Expenses	(4.029.30)	(3.398.517)	630.793	18,56
Laba Bruto / Gross Profit	782.804	667.515	115.289	17,27

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Uraian / Description	2023	2022	Pertumbuhan / Growth	
			Rp	%
Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	438.784	381.053	57.731	15,15
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	381.039	307.220	73.819	24,03

SEGMEN USAHA NON-PENUGASAN

Pendapatan segmen usaha non-penugasan merupakan pendapatan yang diterima selain daripada kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*/PSO) dan subsidi, yang meliputi:

1. Tambang pasasi;
2. Tambang muatan;
3. Usaha perkapalan lainnya;
4. Usaha perbengkelan;
5. Usaha perhotelan;
6. Usaha keagenan;
7. Usaha lifestyle, antara lain:
   a. Kapal Phinisi;
   b. MICE;
   c. *Tour On Board*;
   d. *City Tour*;
   e. *Study on Board*.
8. Usaha penunjang lainnya.

TAMBANG PASASI

Tambang Pasasi melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dengan pendapatan tambang pasasi sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang pasasi (B60A). Tambang Pasasi terdiri dari Tambang pasasi Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Pasasi Kelas Wisata dan Tambang Pasasi Kelas Ekonomi.

TAMBANG MUATAN

Usaha tambang muatan melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dengan pendapatan tambang muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang daftar tambang muatan (B60). Tambang muatan terdiri dari Tambang Muatan Palka, Muatan *Dry Container* dan Muatan *Reefer Container, General Cargo*, Overbagasi, dan *Redpack*.

NON-ASSIGNMENT BUSINESS SEGMENT

Revenue from the non-assignment business segment is income received apart from compensation from the Government of the Republic of Indonesia - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) assignments and subsidies, which includes:

1. Ticketing;
2. Cargo Freight;
3. Other Shipping Services;
4. Workshop Services;
5. Hotel Business;
6. Agency Services;
7. Lifestyle Business, which includes:
   a. Phinisi Ship;
   b. MICE;
   c. Tour On Board;
   d. City Tour;
   e. Study On Board.
8. Other Supporting Businesses.

TICKETING

Ticketing involves the transportation of specific goods according to specified requirements, managed by PT PELNI (Persero) Headquarters with ticketing revenue recognized based on the completion of services according to the ticketing rate list (B60A). Ticketing includes Class I, Class II, Class III, Class IV, Tourist Class, and Economy Class Ticketing.

CARGO FREIGHT

The cargo freight business involves the transportation of specific goods according to specified requirements, managed by PT PELNI (Persero) Headquarters with cargo freight revenue recognized based on the completion of services according to the cargo freight rate list (B60). Cargo Freight includes Hold Cargo, Dry Container Cargo, Reefer Container Cargo, General Cargo, Over-baggage, and Redpack.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

USAHA PERKAPALAN LAINNYA
Usaha perkapalan lainnya mencakup usaha pelayanan jasa yang diberikan Perseroan dengan beberapa jenis kapal seperti kapal perintis yang menyediakan pelayanan transportasi ke bagian-bagian wilayah Republik Indonesia bagian timur. Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan menyejahterakan peternak di sentral peternakan sapi dalam negeri.

USAHA PERBENGKELAN
Usaha perbengkelan adalah jasa pemeliharaan kapal, reparasi kapal yang dilakukan oleh *Strategic Business Unit* PT PELNI (Persero) yakni Galangan "Pelni Surya" yang beroperasi sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin *space dock* dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

USAHA PERHOTELAN
Usaha perhotelan adalah sewa ruangan wisma yang dilakukan oleh *Strategic Business Unit* PT PELNI (Persero) yakni Hotel Bahtera Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

Untuk realisasi laba (rugi) usaha Hotel Bahtera tahun 2023 (audited) sebesar Rp2,72 miliar. Kerugian tersebut tersebut disebabkan oleh cukup ketatnya persaingan tarif antar hotel di kawasan puncak yang kompetitif sangat mempengaruhi penjualan Hotel Bahtera.

USAHA KEAGENAN
Usaha keagenan dan angkutan merupakan salah satu usaha andalan PT PELNI (Persero) yang dimulai sejak tahun 1960 yang meliputi jasa keagenan kapal-kapal baik domestik maupun luar negeri. Jenis jasa yang dilakukan untuk mendukung segmen usaha ini meliputi *Full Port Agency, Husbandry Services*, serta *Other Services.* Keagenan kapal yang banyak diageni oleh PT PELNI (Persero) merupakan kapal barang lokal dan kapal barang dari luar negeri.

Pada 2023, produksi usaha keagenan PELNI mencapai 62% dari target yang telah ditetapkan, jumlah ini mengalami penurunan dari kinerja produksi tahun sebelumnya. Atas perolehan produksi tersebut, Perseroan memperoleh laba mencapai 68% dari target yang ditetapkan. Saat ini, PELNI melayani keagenan kapal terutama pada keagenan kapal lokal

OTHER SHIPPING SERVICES
Other shipping services include the provision of transport services by the Company using various types of vessels such as pioneer ships that provide transport services to parts of eastern Indonesia. Cattle Ships aim to help the Government reduce meat prices and improve the welfare of livestock farmers in domestic cattle farming centers.

WORKSHOP SERVICES
Workshop services involve ship maintenance and repair services provided by the Strategic Business Unit of PT PELNI (Persero) known as the "Pelni Surya" Shipyard, which has been operational since May 20, 1996, servicing PELNI type 500 ships, such as KM Sangiang, KM Pangrango, and KM Wilis. The PELNI Maintenance Facilities (PMF) strategically ensure dock space and repairs for all ships (including large vessels) operated by PT PELNI (Persero).

HOSPITALITY BUSINESS
The hospitality business involves room rentals at the Bahtera Hotel, managed by the Strategic Business Unit of PT PELNI (Persero). The hotel offers meeting and training center facilities with meeting rooms accommodating over 200 people and other supporting facilities.

For the 2023 fiscal year (audited), Bahtera Hotel recorded a net profit (loss) of Rp2.72 billion. This loss was due to the intense competitive pricing among hotels in the Puncak area, significantly affecting Bahtera Hotel's sales.

AGENCY SERVICES
Agency and transport services are one of PT PELNI (Persero)'s main businesses since 1960, covering agency services for both domestic and international vessels. The services offered to support this business segment include Full Port Agency, Husbandry Services, and Other Services. PT PELNI (Persero) predominantly provides agency services for local and international cargo ships.

In 2023, the production of PELNI's agency services reached 62% of the target set, a decline from the previous year's production performance. Despite this, the Company achieved 68% of the targeted profit from this production. Currently, PELNI mainly serves local vessel agency and international cargo ship agency services, as cruise ships have no scheduled

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

ataupun kapal barang dari luar negeri, dikarenakan kapal *cruise* belum ada jadwal beroperasi ke Indonesia (hanya ada kegiatan kapal wisata lokal seperti pinisi dan kapal wisata kecil seperti *yacht*).

operations to Indonesia (only local tourist vessels such as phinisi and small yachts).

USAHA LIFESTYLE

Usaha lifestyle merupakan salah satu produk pengembangan usaha komersial dari PT PELNI (Persero) yang meliputi *study on board, tour on board, mice on board* dan *virtual on board*. Salah satu jenis layanan yang disediakan oleh Perusahaan adalah paket Kapal Phinisi yang menyediakan paket-paket ke berbagai destinasi di Labuan Bajo.

Produksi *lifestyle* (MICE, Wisata Bahari & *City Tour*) Tahun 2023 adalah sebanyak 117 kegiatan dan jumlah peserta sebanyak 12.320 orang. Sedangkan produksi layanan tambahan (add on) Tahun 2023 adalah sebanyak 380 kegiatan dan jumlah peserta sebanyak 51.329 orang.

LIFESTYLE BUSINESS

The lifestyle business is a commercial business development product of PT PELNI (Persero), including study on board, tour on board, MICE on board, and virtual on board. One of the services provided by the Company is the Phinisi Ship package, offering various destination packages in Labuan Bajo.

In 2023, the lifestyle (MICE, Marine Tourism & City Tour) segment produced 117 activities with a total of 12,320 participants. Additionally, the add-on service production in 2023 amounted to 380 activities with a total of 51,329 participants.

PENDAPATAN SEGMEN USAHA NON-PENUGASAN

Pendapatan usaha bersih segmen usaha non-penugasan pada tahun 2023 adalah sejumlah Rp954,50 miliar, meningkat 13,55% atau senilai Rp113,94 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp840,57 miliar. Kontribusi yang diberikan segmen sauah non-penugasan terhadap total pendapatan PT PELNI (Persero) secara keseluruhan di sepanjang tahun 2023 adalah sebesar 16,55%.

REVENUE OF THE NON-ASSIGNMENT BUSINESS SEGMENT

Net revenue for the non-assignment business segment in 2023 was Rp954.50 billion, an increase of 13.55% or Rp113.94 billion from the previous year's Rp840.57 billion. The contribution of the non-assignment business segment to PT PELNI (Persero)'s total revenue for the year 2023 was 16.55%.

PROFITABILITAS SEGMEN USAHA NON-PENUGASAN

Laba kotor yang berhasil dicatatkan oleh segmen usaha non-penugasan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp89,76 miliar, nilai ini menurun 25,57% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp120,59 miliar. Di tahun 2023, segmen usaha non penugasan masih mencatatkan adanya rugi usaha sebesar Rp319,67 miliar dan rugi tahun berjalan sebesar Rp179,41 miliar.

PROFITABILITY OF THE NON-ASSIGNMENT BUSINESS SEGMENT

The gross profit recorded by the non-assignment business segment in 2023 was Rp89.76 billion, a decrease of 25.57% compared to Rp120.59 billion in 2022. In 2023, the non-assignment business segment still recorded an operating loss of Rp319.67 billion and a net loss for the year of Rp179.41 billion.

Uraian / Description	**2023**	**2022**	**Pertumbuhan /** Growth	
			Rp	**%**
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenue	954.505	840.569	113.936	13,55
Beban Pokok Usaha / Revenue Operating Expenses	(864.749)	(719.977)	144.772	20,11
Laba Bruto / Gross Profit	89.756	120.591	(30.835)	(25,57)
Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	(319.668)	(275.023)	(44.645)	16,23
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) for the Year	(179.407)	(133.601)	(45.806)	34,29

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Penyusunan analisa dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini telah mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak ("Grup") untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra sesuai dengan Laporan Audit No. 00056/2.0999/AU.1/06/0139-3/1/IV/2024 tanggal 1 April 2024, dengan opini disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal lersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi' Keuangan di lndonesia.

Bahasan serta analisis tentang kondisi keuangan ini disajikan dalam empat bagian sebagai berikut:
1. Kinerja Posisi Keuangan Konsolidasian
2. Kinerja Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
3. Kinerja Arus Kas Konsolidasian
4. Kinerja Rasio Keuangan

The preparation of the financial performance analysis and discussion in this Annual Report has referred to the Consolidated Financial Statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries ("Group") for the years ended December 31, 2023, and 2022, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra in accordance with Audit Report 00056/2.0999/AU.1/06/0139-3/1/IV/2024 dated April 1, 2024, with an unqualified opinion. The report states that the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, as well as the consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, are presented fairly, in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The discussion and analysis of the financial condition are presented in four sections as follows:
1. Performance of the Consolidated Statements of Financial Position
2. Performance of the Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income
3. Performance of the Consolidated Cash Flows
4. Performance of the Financial Ratios*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	5.062.044	4.564.963	497.081	10,89
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	2.973.988	3.149.015	(175.027)	(5,56)
Jumlah Aset / Total Assets	8.036.032	7.713.978	322.053	4,17
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Short-Term Liabilities	1.012.238	884.410	127.828	14,45
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Long-Term Liabilities	200.053	143.743	56.310	39,17
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	1.212.291	1.028.153	184.138	17,91
Jumlah Ekuitas / Total Equity	6.823.741	6.685.825	137.916	2,06
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	8.036.032	7.713.978	322.054	4,17

ASET

Nilai aset Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8,04 triliun, nilai ini mengalami peningkatan 4,17% atau senilai Rp322,05 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,71 triliun. Komposisi Aset Perusahaan di tahun 2023 terdiri dari 63% Aset Lancar dan 37% Aset Tidak Lancar.

ASSETS

The value of the Company's assets as of December 31, 2023, was Rp8.04 trillion, representing an increase of 4.17% or Rp322.05 billion compared to the previous year's Rp7.71 trillion. The composition of the Company's assets in 2023 consisted of 63% Current Assets and 37% Non-Current Assets.

Uraian / Description	2023	2022	Pertumbuhan / Growth	
	(Rp-Juta) (Rp-Million)	(Rp-Juta) (Rp-Million)	Nominal (Rp) Amount (Rp)	Persentase (%) / Percentage (%)
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalent	3.494.572	3.440.770	53.801	1,56
Piutang Usaha / Account Receivables	118.837	74.325	44.513	59,89
Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Assets	811.020	408.775	402.245	98,40
Persediaan / Inventories	375.462	424.244	(48.781)	(11,50)
Pajak Dibayar di Muka / Prepaid Taxes	39.966	97.177	(57.210)	(58,87)
Uang Muka / Advances Payment	154.888	49.958	104.930	210,04
Biaya Dibayar Di Muka / Prepaid Expenses	67.295	69.713	(2.417)	(3,47)
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	5.062.044	4.564.964	497.080	10,89

ASET LANCAR

Aset lancar Perseroan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5,03 triliun, jumlah ini mengalami peningkatan 10,89% atau senilai Rp497,08 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,56 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada sejumlah komponen aset tetap seperti meningkatnya nilai piutang usaha serta adanya peningkatan pada jumlah aset keuangan lancar lainnya di sepanjang tahun 2023.

CURRENT ASSETS

The Company's current assets as of December 31, 2023, were recorded at Rp5.03 trillion, an increase of 10.89% or Rp497.08 billion from the previous year's Rp4.56 trillion. This increase was primarily due to the rise in several fixed asset components, such as the increased value of trade receivables and the growth in other current financial assets throughout 2023.

Uraian / Description	2023	2022	Pertumbuhan / Growth	
	(Rp-Juta) (Rp-Million)	(Rp-Juta) (Rp-Million)	Nominal (Rp) Amount (Rp)	Persentase (%) / Percentage (%)
Investasi Pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates	240.324	208.284	32.041	15,38
Properti Investasi / Investment Properties	183.938	173.439	10.498	6,05
Alat Produksi / Production Equipment	2.157.776	2.407.461	(249.685)	(10,37)
Aset Tetap / Fixed Assets	298.021	267.428	30.592	11,44
Aset Tak berwujud / Intangible Assets	18.294	20.819	(2.525)	(12,13)
Aset Hak Guna / Right of Use Assets	3.903	2.342	1.560	66,58

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	71.661	68.767	2.894	4,21
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	69	471	(403)	(85,38)
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	**2.973.988**	**3.149.014**	**(175.028)**	**(5,56)**

ASET TIDAK LANCAR

Nilai asset tidak lancar Perusahaan per 31 Desember 2023 adalah Rp2,97 triliun, turun sebesar 5,56% atau senilai Rp175,03 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,15 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan nilai pada beberapa komponen aset tidak lancar seperti alat produksi, aset tak berwujud, serta aset tidak lancar lainnya dimana hal ini disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan lebih besar jika dibandingkan dengan penambahan investasi pada aset tersebut.

NON-CURRENT ASSETS

The value of the Company's non-current assets as of December 31, 2023, was Rp2.97 trillion, a decrease of 5.56% or Rp175.03 billion from the previous year's Rp3.15 trillion. This decline was mainly due to the reduction in the value of several non-current asset components such as production equipment, intangible assets, and other non-current assets, primarily caused by higher accumulated depreciation compared to the additions in investment in these assets.

LIABILITAS

Nilai liabilitas Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1,21 triliun, nilai ini mengalami peningkatan 17,91% atau senilai Rp184,14 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,03 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan baik pada jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 14,45% maupun liabilitas jangka panjang sebesar 39,17%. Komposisi liabilitas Perseroan terdiri atas 83% liabilitas jangka pendek dan 17% liabilitas jangka panjang.

LIABILITIES

The Company's liabilities as of December 31, 2023, were valued at Rp1.21 trillion, an increase of 17.91% or Rp184.14 billion compared to the previous year's Rp1.03 trillion. This rise was due to increases in both current liabilities by 14.45% and non-current liabilities by 39.17%. The composition of the Company's liabilities consisted of 83% current liabilities and 17% non-current liabilities.

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Pinjaman Jangka Pendek / Short-Term Loans	22.000	0	22.000	∞
Utang Usaha / Trade Payable	205.462	209.169	(3.707)	(1,77)
Beban Akrual / Accrued Expenses	599.334	485.845	113.489	23,36
Liabilitas kontrak / Contract Liability	78.061	53.637	24.424	45,54
Utang Pajak / Tax Payable	59.340	78.375	(19.035)	(24,29)
Bagian Lancar atas: / Current Position of:				
Utang Kepada Negara / Debt to the State	3.621	3.210	411	12,80
Liabilitas Jangka Panjang / Long-Term Liabilities	4.519	5.519	(1.000)	(18,12)

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short- Term Financial Liabilities	39.898	48.653	(8.755)	(17,99)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Short-Term Liabilities	1.012.238	884.410	127.827	14,45

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2023 adalah Rp1,01 triliun, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 14,45% atau senilai Rp127,83 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp884,41 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pada jumlah beban akrual disepanjang tahun 2023 dari Rp485,85 miliar menjadi Rp599,33 miliar serta adanya kenaikan pada nilai liabilitas kontrak dan pinjaman jangka pendek.

CURRENT LIABILITIES

The Company's current liabilities as of December 31, 2023, amounted to Rp1.01 trillion, an increase of 14.45% or Rp127.83 billion compared to the previous year's Rp884.41 billion. This increase was due to the rise in accrued expenses throughout 2023 from Rp485.85 billion to Rp599.33 billion, as well as an increase in contract liabilities and short-term loans.

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Utang Kepada Negara / Debt to the State	28.972	32.102	(3.131)	(9,75)
Liabilitas Jangka Panjang / Long-Term Liabilities	8.228	9.975	(1.747)	(17,51)
Liabilitas imbalan Paska Kerja Jangka Panjang / Long- Term Employee Benefits	162.853	101.665	61.188	60,19
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Long-Term Liabilities	200.053	143.743	56.310	39,17

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Nilai liabilitas jangka Panjang yang dimiliki Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp200,05 miliar, jumlah liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 39,17% atau senilai Rp56,31 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp143,74 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang dari Rp101,67 miliar menjadi Rp162,85 miliar.

NON-CURRENT LIABILITIES

The Company's non-current liabilities as of December 31, 2023, amounted to Rp200.05 billion, an increase of 39.17% or Rp56.31 billion from the previous year's Rp143.74 billion. This increase was primarily due to a rise in long-term post-employment benefit liabilities from Rp101.67 billion to Rp162.85 billion.

EKUITAS

Pada 31 Desember 2023, jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar Rp6,82 triliun, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 2,06% atau senilai Rp137,92 miliar jika dibanding dengan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2022 yang sejumlah Rp6,69 triliun. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan jumlah cadangan yang dimiliki Perseroan dari Rp1,17 triliun di tahun 2022 menjadi Rp1,34 triliun.

EQUITY

As of December 31, 2023, the Company's equity amounted to Rp6.82 trillion, an increase of 2.06% or Rp137.92 billion compared to the equity of Rp6.69 trillion as of December 31, 2022. This increase was contributed by the rise in the Company's reserves from Rp1.17 trillion in 2022 to Rp1.34 trillion.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Uraian / Description	2023	2022	Pertumbuhan / Growth	
	(Rp-Juta) (Rp-Million)	(Rp-Juta) (Rp-Million)	Nominal (Rp) Amount (Rp)	Persentase (%) / Percentage (%)
Modal Saham / Shares Capital	7.629.900	7.629.900	0	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah / Government Capital	143	143	0	0,00
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-In Capital	397.878	397.878	0	0,00
Cadangan / Appropriated Related Earnings	1.342.665	1.169.417	173.248	14,81
Saldo Laba (Defisit) / Accumulated Deficit	(2.453.137)	(2.481.091)	27.954	1,13
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Component	(97.593)	(33.821)	63.772	188,56
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: / Total Equity attributable to:				
Pemilik Entitas Induk / Parent Entity	6.819.856	6.682.426	137.430	2,06
Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interests	3.884	3.397	486	14,30
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Long-Term Liabilities	6.823.740	6.685.824	137.916	2,06

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian / Description	2023	2022	Pertumbuhan / Growth	
	(Rp-Juta) (Rp-Million)	(Rp-Juta) (Rp-Million)	Nominal (Rp) Amount (Rp)	Persentase (%) / Percentage (%)
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	5.766.618	4.906.600	860.019	17,53
Beban Pokok Usaha / Operating Expenses	(4.894.057)	(4.118.494)	775.564	18,83
Laba (Rugi) Kotor / Gross Profit (Loss)	872.561	788.106	84.455	10,72
Beban Pemasaran dan Distribusi / Distribution and Marketing Expenses	(21.181)	(15.087)	6.093	40,38
Beban Umum dan Administrasi / General and Administrative Expenses	(732.263)	(666.988)	65.275	9,79
Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	119.115	106.029	13.087	12,34
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih / Non Operating Income - Net	179.404	168.365	11.039	6,56
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	298.520	274.395	24.125	8,79
Beban Pajak / Tax Expense	(96.889)	(100.776)	(3.887)	(3,86)

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi / Items That Will Not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss				
Keuntungan Aktuarial Periode Berjalan / Actuarial Gain of Current Period	(69.936)	88.908	(158.846)	(178,66)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income of the Current year	137.859	262.527	(124.669)	(47,49)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: / Profit for the Current Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk / Owner of the Company	201.201	173.247	27.954	16,14
Pemilik Non Pengendali / Non-Controlling Interest	429	371	58	15,63
Laba Tahun Berjalan / Profit Current Year	201.631	173.619	28.012	16,13
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	(63.771)	88.945	(152.717)	(171,70)
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: / Total Comprehensive Income Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk / Owner of the Company	137.428	262.145	(124.717)	(47,58)
Pemilik Non Pengendali / Non-Controlling Interest	431	383	48	12,53
Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income in the Current year	137.859	262.527	(124.669)	(47,49)
Laba Bersih Per Saham Dasar (dalam Rp) / Basic Earnings Per Share (in Rp)	26.426	22.755	3.671	16,13

PENDAPATAN USAHA BERSIH

Pendapatan usaha bersih yang berhasil dibukukan Perseroan sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp5,77 triliun nilai ini merupakan nilai bersih setelah dikurangi reduksi pendapatan usaha. Perseroan mampu memperoleh peningkatan pendapatan sebesar 17,53% atau senilai Rp860,02 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,91 triliun. Peningkatan kinerja ini terjadi baik pada pendapatan dari usaha pelayaran dan jasa lainnya.

BEBAN POKOK USAHA

Seiring dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh Perseroan, beban pokok usaha juga tercatat mengalami peningkatan yakni sebesar 18,83% atau senilai dengan Rp775,56 miliar menjadi Rp4,89 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,12 triliun.

NET OPERATING REVENUE

The Company's net operating revenue for the year 2023 amounted to Rp5.77 trillion. This is the net value after deducting revenue reductions. The Company achieved a revenue increase of 17.53% or Rp860.02 billion compared to the previous year's Rp4.91 trillion. This performance improvement was seen in both shipping revenue and other service revenues.

OPERATING EXPENSES

In line with the increase in revenue, the Company's operating expenses also recorded an increase of 18.83% or Rp775.56 billion, reaching Rp4.89 trillion compared to the previous year's Rp4.12 trillion.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Beban pokok usaha Perseroan pada 2023 terdiri dari:

The Company's operating expenses in 2023 consisted of:

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Perkapalan / Shipping	1.902.893	1.621.172	281.721	17,38
Penumpang / Passenger	540.460	435.576	104.884	24,08
Pegawai / Employee	788.042	744.800	43.242	5,81
Pemeliharaan dan Perbaikan / Maintenance and Repair	725.217	555.861	169.356	30,47
Penyusutan dan Amortisasi / Depreciation and Amortization	429.790	341.371	88.419	25,90
Asuransi / Insurance	52.597	46.553	6.044	12,98
Muatan Ternak / Livestock Cargo	9.106	3.358	5.748	171,17
Kendali Mutu Pelayanan / Quality Service Control	14.209	13.342	867	6,50
Perbengkelan / Workshop	16.662	10.043	6.619	65,91
Perhotelan / Hospitality	2.553	2.480	73	2,94
Sewa / Rent	2.932	2.070	862	41,64
Pajak dan Retribusi / Taxes and Levies	21	7	14	200,00
Beban Pokok Lainnya / Other Cost of Revenues	409.575	341.861	67.714	19,81
Jumlah / Total	**4.894.057**	**4.118.494**	**775.563**	**18,83**

LABA KOTOR
Total Laba Bruto yang mampu dicatatkan Perseroan per 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp872,56 miliar, nilai ini bertumbuh 10,72% atau senilai dengan Rp84,45 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp788,11 miliar.

GROSS PROFIT
The Company's gross profit as of December 31, 2023, reached Rp872.56 billion, growing by 10.72% or Rp84.45 billion compared to the previous year's Rp788.11 billion.

BEBAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI
Perseroan membukukan beban pemasaran dan distribusi di sepanjang tahun 2023 sebesar Rp21,18, jumlah ini meningkat 40,38% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp15,09 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah beban yang terjadi pada komponen beban pemasaran dan distribusi seperti beban kehumasan, beban penjualan, beban promosi dan periklanan, serta beban pemasaran lainnya.

MARKETING AND DISTRIBUTION EXPENSES
The Company recorded marketing and distribution expenses of Rp21.18 billion throughout 2023, a 40.38% increase from the previous year's Rp15.09 billion. This increase was due to higher expenses in components such as public relations, sales expenses, promotional and advertising costs, and other marketing expenses.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Jumlah beban umum dan administrasi yang dibubukan Perseroan di sepanjang tahun 2023 berjumlah Rp732,26 miliar, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
The Company's general and administrative expenses for 2023 amounted to Rp732.26 billion, up from the previous year's Rp666.99 billion. This increase was primarily due to higher

Rp666,99. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada beberapa komponen beban umum dan administrasi yang dikeluarkan oleh Perseroan di sepanjang tahun 2023.

LABA USAHA

Laba usaha yang diperoleh Perseroan di tahun 2023 mengalami peningkatan 12,34% dari Rp106,03 miliar ditahun 2022 menjadi Rp119,12 miliar hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh Perseroan di sepanjang tahun 2023. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan kinerja Perseroan di tahun 2023.

PENDAPATAN (BEBAN) NON-USAHA BERSIH

Perseroan mencatat pendapatan (beban) non-usaha sebesar Rp179,40 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp11,04 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp168,37 miliar.

Pendapatan non-usaha yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp229,93 miliar yang berasal dari pendapatan bunga, klaim asuransi, laba entitas asosiasi, kenaikan perubahan nilai wajar property investasi tanah dan gedung, keuntungan penjualan aset, dan lain-lain. Sedangkan beban non-usaha yang dicatatkan Perseroan adalah sebesar Rp50,53 miliar yang berasal dari administrasi bank, kerugian selisih kurs, beban keuangan, dan lainnya.

LABA SEBELUM PAJAK

Seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha yang diperoleh Perseroan, maka laba sebelum pajak yang dihasilkan Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 8,79% menjadi sebesar Rp298,52 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp274,40 miliar.

BEBAN PAJAK

Jumlah beban pajak yang menjadi kewajiban Perseroan tahun 2023 adalah sebesar Rp96,89 miliar, nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp3,89 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp100,78 miliar. Penurunan ini disebabkan karena turunnya jumlah beban pajak final serta adanya peningkatan pada manfaat pajak tangguhan yang dari entitas induk.

LABA TAHUN BERJALAN

Perseroan membukukan laba tahun berjalan sejumlah Rp201,63 miliar, meningkat sebesar16,13% atau senilai Rp28,01 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp173,62 miliar.

expenses in several general and administrative components incurred by the Company throughout 2023.

OPERATING PROFIT

The Company's operating profit for 2023 increased by 12.34%, from Rp106.03 billion in 2022 to Rp119.12 billion. This increase is in line with the rise in revenue the Company achieved throughout 2023, reflecting the improved performance of the Company in 2023.

NON-OPERATING INCOME – NET

The Company recorded net non-operating income of Rp179.40 billion, an increase of Rp11.04 billion from the previous year's Rp168.37 billion.

The Company's non-operating income amounted to Rp229.93 billion, derived from interest income, insurance claims, profit from associated entities, increases in the fair value of investment properties (land and buildings), gains from asset sales, and others. The non-operating expenses recorded by the Company were Rp50.53 billion, originating from bank administration fees, foreign exchange losses, financial expenses, and others.

PROFIT BEFORE TAX

With the increase in operating revenue, the Company's profit before tax also rose by 8.79% to Rp298.52 billion from the previous year's Rp274.40 billion.

TAX EXPENSES

The Company's tax expenses for 2023 amounted to Rp96.89 billion, a decrease of Rp3.89 billion compared to the previous year's Rp100.78 billion. This decline was due to a reduction in final tax expenses and an increase in deferred tax benefits from the parent entity.

PROFIT FOR THE CURRENT YEAR

The Company recorded a profit for the current year of Rp201.63 billion, an increase of 16.13% or Rp28.01 billion compared to the previous year's Rp173.62 billion.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pada tahun 2023, Perseroan membukukan adanya laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp137,86 miliar, nilai ini menurun 47,49% atau senilai Rp124,67 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp262,53 miliar. Rp220,87 miliar atau 530,23% dari perolehan pada 2021 yang sejumlah Rp41,66 miliar.

COMPREHENSIVE INCOME IN THE CURRENT YEAR

In 2023, the Company recorded comprehensive income for the year of Rp137.86 billion, a decrease of 47.49% or Rp124.67 billion from the previous year's Rp262.53 billion.

LABA BERSIH PER SAHAM

Perseroan mencatatkan laba bersih per saham dasar pada tahun 2023 sebesar Rp26.426 (Rupiah penuh), nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp22.755 (Rupiah penuh).

BASIC EARNINGS PER SHARE

The Company recorded basic earnings per share of Rp26,426 (full Rupiah) in 2023, an increase from the previous year's Rp22,755 (full Rupiah).

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENTS OF CASH FLOWS

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows from Operating Activities	88.197	1.007.468	(919.271)	(91,25)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Net Cash Flows from Investing Activities	(55.062)	(126.778)	(71.716)	(56,57)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows from Financing Activities	20.667	(4.624)	25.291	546,95
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase in Cash and Cash Equivalent	53.802	876.066	(822.264)	(93,86)
Kas dan Setara Kas Saldo Awal / Cash and Cash Equivalent Beginning Balance	3.440.771	2.564.705	876.066	34,16
Kas dan Setara Kas Saldo Akhir / Cash and Cash Equivalent Ending Balance	3.494.573	3.440.771	53.802	1,56

Posisi per 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan kenaikan bersih kas dan setara kas sejumlah Rp53,80 miliar, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp822,26 miliar dibanding kenaikan kas bersih tahun sebelumnya yang sebesar Rp876,06 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya jumlah *Public Service Obligation* (PSO) dan subsidi yang diterima Perseroan sepanjang tahun 2023 dari sebelumnya Rp3,56 triliun di tahun 2022 menjadi Rp3,04 triliun di tahun 2023.

As of December 31, 2023, the Company recorded a net increase in cash and cash equivalents of Rp53.80 billion, a decrease of Rp822.26 billion compared to the previous year's net increase of Rp876.06 billion. This decline was mainly due to the decrease in Public Service Obligation (PSO) funds and subsidies received by the Company throughout 2023, which fell from Rp3.56 trillion in 2022 to Rp3.04 trillion in 2023.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Jumlah kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasi sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp88,20 miliar, nilai ini mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,01 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya kas dari penerimaan *Public Service Obligation* (PSO) dan subsidi sepanjang tahun 2023, turunnya jumlah kas yang diperoleh dari aktivitas lainnya, serta naiknya jumlah kas yang digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pembayaran biaya overhead yang dilakukan oleh Perseroan.

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

The net cash provided by the Company's operating activities in 2023 was Rp88.20 billion, a significant decrease from the previous year's Rp1.01 trillion. This decrease was primarily due to the reduction in cash received from Public Service Obligation (PSO) funds and subsidies throughout 2023, the decline in cash generated from other activities, and the increase in cash used for payments to suppliers and overhead costs paid by the Company.

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows from Operating Activities				
Penerimaan Kas dari Pelanggan / Receipt from Customers	2.705.260	2.688.796	16.464	0,61
Penerimaan Public Service Obligation & Subsidi / Receipt from Public Service Obligation (PSO) and Subsidies	3.040.918	3.559.893	(518.975)	(14,58)
Pembayaran Kepada Pemasok / Payment to Suppliers	(3.575.041)	(3.439.158)	135.883	3,95
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya / Receipt of other operating activities	50.650	113.360	(62.710)	(55,32)
Pembayaran Biaya Operasional / Payment of Operating Expenses	(680.015)	(592.131)	87.884	14,84
Pembayaran Biaya Overhead / Payment of Overhead Expenses	(1.017.019)	(871.184)	145.835	16,74
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya / Payment of Other Operating Expenses	(95.382)	(103.649)	8.267	(7,98)
Pembayaran Pajak / Tax Payments	(341.174)	(348.459)	(7.285)	(2,09)
Jumlah / Total	**88.197**	**1.007.468**	**(919.271)**	**(91,25)**

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

Sepanjang tahun 2023, jumlah arus kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi adalah sejumlah Rp55,06 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sejumlah Rp126,78 miliar. Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah kas yang digunakan untuk perolehan alat produksi dan aset tetap serta adanya penurunan pada penerimaan bunga deposito dan jasa giro di tahun 2023.

CASH FLOWS FROM (USED FOR) INVESTING ACTIVITIES

Throughout 2023, the net cash flow used by the Company for investing activities amounted to Rp55.06 billion. This is a decrease from the previous year's Rp126.78 billion. The reduction in net cash flow from investing activities was primarily due to an increase in cash used for the acquisition of production equipment and fixed assets, as well as a decrease in interest income from deposits and current account services in 2023.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi / Net Cash Flows from Investing Activities				
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro / Interest Deposit and Demand Deposit Receipt	24.840	46.310	(21.470)	(46,36)
Penerimaan Dividen / Dividend Receipt	105.675	17.984	87.691	487,61
Perolehan Alat Produksi dan Aset Tetap / Acquisition Production Equipment and Fixed Assets	(183.409)	(168.098)	15.311	9,11
Perolehan Aset Dalam Konstruksi / Acquisition of Asset Under Construction	(932)	(8.119)	(7.187)	(88,52)
Perolehan Aset Tak Berwujud / Acquisition Intangible Assets	(1.291)	(14.905)	(13.614)	(91,34)
Investasi Langsung / Direct Investment	55	50	5	10,00
Jumlah / Total	**(55.062)**	**(126.778)**	**(71.716)**	**(56,57)**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan mencatatkan arus kas bersih yang berasal dari aktivitas pendanaan pada 2023 mencapai Rp20,67 miliar, nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 Perseroan mencatatkan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus Rp4,62 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan memperoleh kas yang berasal dari pinjangan Bank/Pihak Ketiga sebesar Rp226,50 miiliar.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

The Company recorded net cash flow from financing activities in 2023 amounting to Rp20.67 billion, an increase from the previous year, where in 2022 the Company recorded net cash flow from financing activities of negative Rp4.62 billion. This increase was due to the Company receiving cash from bank/ third-party loans amounting to Rp226.50 billion.

Uraian / Description	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2022 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Pertumbuhan / Growth Nominal (Rp) Amount (Rp)	Pertumbuhan / Growth Persentase (%) / Percentage (%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows from Financing Activities				
Penerimaan Pinjaman Bank/ Pihak Ketiga Receipt from Bank Loan / Third Parties	226.500	58.948	167.552	284,24
Pembayaran Pinjaman Bank / Pihak Ketiga Payment of Bank Loan / Third Parties	(205.833)	(63.572)	142.261	223,78
Jumlah / Total	**20.667**	**(4.624)**	**25.291**	**546,95%**

TARUNA PELNI

RASIO-RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIOS

Uraian / Description	Satuan / Unit	2023	2022
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio			
Rasio Lancar / Current Ratio	%	500,08	516,16
Rasio Kas / Cash Ratio		345,23	389,05
Rasio Cepat / Quick Ratio		356,97	397,45
Rasio Leverage / Leverage Ratio			
Rasio Liabilitas atas Aset / Debt-to-Assets Ratio	%	15,09	13,33
Rasio Liabilitas atas Ekuitas / Debt-to-Equity Ratio		17,77	15,38
Rasio Liabilitas Jangka Panjang atas Ekuitas / Long-Term Liabilities to Equity Ratio		2,93	2,15
Rasio Aktivitas / Activity Ratio			
Rasio Perputaran Persediaan/ Inventory Turnover Ratio	Kali / *Times*	14	12
Rasio Perputaran Aset / Asset Turnover Ratio	%	73,32	66,35
Rasio Penagihan Rata-rata / Average Collection Ratio	Hari / *Days*	8	6
Rasio Profitabilitas / Profitability Ratio			
Imbalan terhadap Ekuitas / Return on Equity	%	2,95	2,60
Imbalan terhadap Investasi / Return on Investment		10,97	9,47
Margin Laba Kotor atas Penjualan / Gross Profit Margin on Sales		15,13	16,06
Margin Laba Bersih atas Penjualan / Net Profit Margin on Sales		3,50	3,54
Rasio EBITDA atas Aset / EBITDA on Asset Ratio		9,59	8,39

RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek Perusahaan. Rasio yang digunakan Perseroan dalam mengukur tingkat likuiditasnya adalah rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat, dimana masing-masing yakni sebesar 500,08%, 345,23%, dan 356,97%.

Meskipun rasio likuiditas di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun angka ini tetap menunjukkan bahwa tingkat likuiditas Perseroan masih sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

RASIO LEVERAGE

Rasio leverage adalah sebuah ukuran untuk melihat terkait pendanaan aset yang berasal dari utang serta kemampuan Perusahaan dalam membayar utang. PELNI mengukur rasio

LIQUIDITY RATIOS

Liquidity ratios are used to measure the Company's ability to meet its short-term obligations. The ratios used by the Company to measure its liquidity are the current ratio, cash ratio, and quick ratio, which were 500.08%, 345.23%, and 356.97%, respectively.

Although the liquidity ratios in 2023 experienced a decline from the previous year, these figures still indicate that the Company's liquidity level is very good in meeting its short-term obligations.

LEVERAGE RATIOS

Leverage ratios measure the extent of asset financing from debt and the Company's ability to repay its debt. PELNI measures leverage ratios by calculating the liabilities to assets ratio,

RASIO-RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIOS

leverage melalui perhitungan rasio liabilitas atas aset, rasio liabilitas atas ekuitas, dan rasio liabilitas jangka Panjang atas ekuitas, yang masing-masing diperoleh sebesar 15,09%, 17,77%, dan 2,93%.

Rasio leverage yang dimiliki Perseroan di tahun 2023 menunjukkan adanya sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini mengindikasi bahwa adanya peningkatan penggunaan utang dalam operasional Perseroan. Namun, secara keseluruhan pendanaan operasional Perseroan yang berasal dari utang masih tergolong relatif kecil dibanding pendanaan yang berasal dari modal sendiri (ekuitas).

RASIO AKTIVITAS

Rasio aktivitas digunakan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dikendalikannya. PELNI mengukur rasio aktivitas melalui perhitungan rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset, dan rasio penagihan rata-rata, dengan perolehan masing-masing adalah 14 kali, 73,32%, dan 8 hari pada 2023.

Hasil tersebut memperlihatkan tingkat efektivitas yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya yang dikendalikan, pada 2023 dibanding 2022.

RASIO PROFITABILITAS

Rasio profitabilitas merupakan perhitungan yang digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, sekaligus mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. PELNI mengukur rasio profitabilitas melalui perhitungan (1) rasio imbalan terhadap ekuitas, (2) imbalan terhadap investasi, (3) margin laba kotor terhadap penjualan, (4) margin laba bersih terhadap penjualan, dan (5) rasio EBITDA terhadap aset yang masing-masing sebesar 2,95%, 10,97%, 15,13%, 3,50%, dan 9,59% pada 2023.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan yang tetap baik dalam memperoleh laba pada tahun 2023. Di samping itu, hasil tersebut memperlihatkan manajemen tetap mampu mempertahankan efektivitas yang baik pada tahun 2023.

liabilities to equity ratio, and long-term liabilities to equity ratio, which were 15.09%, 17.77%, and 2.93%, respectively.

The Company's leverage ratios in 2023 showed a slight increase from the previous year, indicating an increase in the use of debt in the Company's operations. However, overall, the Company's operational funding from debt is still relatively small compared to funding from equity.

ACTIVITY RATIOS

Activity ratios are used by the Company to measure the effectiveness of utilizing all resources under its control. PELNI measures activity ratios through inventory turnover ratio, asset turnover ratio, and average collection period, which were 14 times, 73.32%, and 8 days, respectively, in 2023.

These results indicate better effectiveness in utilizing controlled resources in 2023 compared to 2022.

PROFITABILITY RATIOS

Profitability ratios measure the Company's ability to generate profits and assess the management's effectiveness in managing the Company. PELNI measures profitability ratios through (1) return on equity, (2) return on investment, (3) gross profit margin on sales, (4) net profit margin on sales, and (5) EBITDA to assets ratio, which were 2.95%, 10.97%, 15.13%, 3.50%, and 9.59%, respectively, in 2023.

These results demonstrate a continued strong ability to generate profits in 2023. Additionally, the results indicate that management has maintained good effectiveness in 2023.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

ABILITY TO PAY DEBT AND COMPANY'S RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE

Uraian / Description	Satuan / Unit	2023	2022
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio			
Rasio Lancar / Current Ratio	%	500,08	516,16
Rasio Kas / Cashratio		345,23	389,05
Rasio Cepat		356,97	397,45

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tetap mampu mempertahankan posisi keuangan yang solid. Hal ini dapat dilihat dari sisi likuiditas, dimana rasio lancar dan rasio kas tetap terjaga dengan baik. Pada akhir tahun 2023, rasio lancar dan rasio kas PELNI adalah sebesar 500,08% dan 345,23%, dimana hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki tingkat likuiditas yang sangat baik untuk membayar utang usaha yang dimiliki.

Perseroan melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga, serta menjaga kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Perseroan juga mempertahankan kemampuannya untuk melakukan operasional pembayaran atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal.

Throughout 2023, the Company maintained a solid financial position. This is evident from its liquidity, where the current ratio and cash ratio were well-maintained. At the end of 2023, PELNI's current ratio and cash ratio were 500.08% and 345.23%, respectively, indicating that the Company has an excellent liquidity level to pay its trade debts.

The Company manages liquidity risk by monitoring the maturity profile of its loans, maintaining sufficient cash balances and securities, and ensuring readiness to maintain its market position. The Company also retains its ability to meet operational payment obligations on its loans by securing various binding financing facilities from reliable lenders.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan periode 2023 Audited adalah sejumlah 7,52 hari, berselisih 1,99 hari dibandingkan dengan Tahun 2022 Audited yang sejumlah 5,53 hari.

Perseroan meninjau tingkat kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain secara berkala. Dibentuk penyisihan piutang sebagai bentuk pencadangan terkait tingkat kolektibilitas piutang.

Terkait piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih, maka perseroan mengklasifikasikan piutang menjadi piutang tidak tertagih dan dicadangkan seluruhnya. Piutang diklasifikasikan menjadi tidak tertagih ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit, melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar, atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

The collectability rate of the Company's receivables for the audited period of 2023 was 7.52 days, a difference of 1.99 days compared to the audited period of 2022, which was 5.53 days.

The Company regularly reviews the collectability rate of trade receivables and other receivables. A provision for receivables is established as a reserve related to the collectability rate of receivables.

For receivables that are genuinely uncollectible, the Company classifies them as uncollectible receivables and fully reserves them. Receivables are classified as uncollectible when there is objective evidence that the Company cannot collect the full amount due under the original terms of the receivables. Significant financial difficulties experienced by the debtor, the likelihood of the debtor being declared bankrupt, undergoing financial reorganization, defaulting, or delinquent payments are indicators that are considered to show a decrease in the value of the receivables.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

STRUKTUR MODAL

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Perusahaan berkeyakinan bahwa struktur modal yang optimal akan memaksimalkan nilai Perusahaan. Perusahaan mengelola struktur permodalan untuk menjaga rasio modal yang sehat untuk menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan mengelola struktur modal secara optimal, dengan mempertimbangkan laba Perusahaan saat ini dan proyeksi laba tahun mendatang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi investasi barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Pada 2023, struktur modal Perseroan terdiri atas 15,09% liabilitas dan 84,91% ekuitas. Struktur modal ini mengalami sedikit pergeseran persentase dibandingkan dengan 2022 yang terdiri atas 13,33% liabilitas dan 86,67% ekuitas.

CAPITAL STRUCTURE

Capital structure is the balance or ratio between liabilities and equity. The Company believes that an optimal capital structure will maximize the Company's value. The Company manages its capital structure to maintain a healthy capital ratio to operate its business activities and provide benefits to stakeholders. The Company optimizes its capital structure by considering current profits, projected future profits, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic investment opportunities.

In 2023, the Company's capital structure consisted of 15.09% liabilities and 84.91% equity. This capital structure shows a slight shift in percentage compared to 2022, which consisted of 13.33% liabilities and 86.67% equity.

Uraian (dalam jutaan Rupiah) Decription (in million Rupiah)	**2023**	**Komposisi /** Composition	**2022**	**Komposisi /** Composition	**Pertumbuhan /** Growth	
					Nominal (Rp)	**Persentase (%) /** Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek / Short-Term Liabilities	1.012.238	12,60%	884.410	11,47%	127.828	14,45%
Liabilitas Jangka Panjang / Long-Term Liabilities	200.053	2,49%	143.743	1,86%	56.310	39,17%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	1.212.291	15,09%	1.028.153	13,33%	184.138	17,91%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	6.823.741	84,91%	6.685.825	86,67%	137.916	2,06%
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	8.036.032	100,00%	7.713.978	100,00%	322.054	4,17%

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Perusahaan menerapkan kebijakan struktur modal dengan mengutamakan penggunaan dana internal untuk membiayai keperluan modal kerja dan pengembangan usaha. Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan guna melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha untuk dapat tetap memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham dan manfaat secara luas bagi pemangku kepentingan, di samping mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

CAPITAL STRUCTURE POLICY

The Company implements a capital structure policy that prioritizes the use of internal funds to finance working capital needs and business development. Management's policy on capital structure is aimed at protecting the Company's ability to continue as a going concern to provide optimal returns to shareholders and broader benefits to stakeholders, while maintaining an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

The Company manages its capital structure and makes adjustments in response to changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust dividend payments to shareholders, issue new shares, or seek financing through loans.

DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perseroan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Modal yang dikelola oleh manajemen adalah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali.

Kebijakan manajemen atas struktur modal ditentukan atas dasar-dasar pemilihan sebagai berikut. Pertama, Perseroan senantiasa berupaya menetapkan target struktur modal yang optimal. Kedua, penggunaan proporsi utang yang lebih besar (dari ekuitas) dapat dilakukan bila risiko usaha lebih kecil. Ketiga, struktur modal senantiasa ditinjau dengan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Keempat, struktur modal diusahakan memberi kontribusi optimal dengan mengatur kombinasi utang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan.

BASIS FOR DETERMINING CAPITAL STRUCTURE POLICY

As per common practice, the Company evaluates its capital structure using the debt-to-equity ratio (gearing ratio), calculated by dividing net debt by equity. Net debt is the total liabilities minus cash and cash equivalents. The capital managed by management includes equity attributable to the owners of the parent entity and non-controlling interests.

Management's policy on capital structure is based on the following considerations. First, the Company continuously strives to establish an optimal capital structure target. Second, a higher proportion of debt (compared to equity) may be used if business risk is lower. Third, the capital structure is always reviewed considering the balance between financial risk and return to enhance the Company's value. Fourth, the capital structure is designed to contribute optimally by managing a combination of debt and equity to maximize the Company's value.

INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL INVESTMENT

Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2023 berupa penambahan inventaris mesin, inventaris kantor, inventaris proyek, dan juga kendaraan.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah merealisasikan investasi terhadap barang modal yang bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. Perseroan telah menganggarkan dana investasi sebesar Rp1,08 triliun miliar pada RKAP 2023, per 31 Desember 2023 Perseroan telah merealisasikan investasi terhadap barang modal sebesar Rp196,80 miliar, atau 18,29% terhadap anggaran.

Throughout 2023, the Company made capital investments in the addition of machinery inventory, office inventory, project inventory, and vehicles.

The Company has realized capital investments aimed at supporting its operational activities throughout 2023. The Company budgeted an investment fund of Rp1.08 trillion in the 2023 Work Plan and Budget (RKAP). As of December 31, 2023, the Company has realized capital investments amounting to Rp196.80 billion, or 18.29% of the budget.

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	**2023** **(Rp-Juta)** (Rp-Million)	**2022** **(Rp-Juta)** (Rp-Million)
Alat Produksi / Production Equipment		
Suku Cadang Permesinan Utama Kapal	108.285	136.967
Alat Produksi Lainnya / Other Production Equipment	43.787	25.849
Jumlah Investasi Alat Produksi / Total Production Equipment Investment	152.072	162.816
Sarana Penunjang / Supporting Facilities		
Bangunan Perkantoran / Office Building	22.784	7.575
Tanah & Sertifikat Tanah / Land & Land Certificate	2.979	1.737
Kendaraan Bermotor / Motorized Vehicle	545	2.380
Investasi Perkantoran / Office Investment	18.415	23.648
Jumlah Investasi Sarana Penunjang / Total Supporting Facilities Investment	**44.723**	**35.340**
Jumlah Investasi / Total Investment	**196.795**	**198.156**

NILAI INVESTASI

Total investasi barang modal yang direalisasikan Perseroan sepanjang tahun 2023 berjumlah Rp196,80 miliar. Dimana atas investasi tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis investasi, yaitu investasi alat produksi dan investasi sarana penunjang, yang masing-masing telah terealisasi sejumlah Rp152,07 miliar dan Rp44,72 miliar.

TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi barang modal adalah untuk mendukung pencapaian rencana bisnis Perseroan, seta mendukung kegiatan operasional Perseroan agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

INVESTMENT VALUE

The total capital investments realized by the Company throughout 2023 amounted to Rp196.80 billion. These investments are categorized into two types: production equipment investments and supporting facility investments, which have been realized at Rp152.07 billion and Rp44.72 billion, respectively.

INVESTMENT PURPOSE

The purpose of capital investments is to support the achievement of the Company's business plans and to enhance the Company's operational activities to achieve optimal performance.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

PT PELNI (Persero) tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Investasi barang modal dilakukan secara langsung menggunakan dana yang telah dianggarkan.

PT PELNI (Persero) does not have any material commitments related to capital investments. Capital investments are made directly using the budgeted funds.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI 2023, DAN PROYEKSI 2024
2023 TARGETS, REALIZATION, AND 2024 PROJECTION COMPARISON

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2023

Secara periodik, PELNI melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil operasional yang dicapai pada tahun buku. Hal tersebut dilakukan dengan mengukur kinerja Perseroan berdasarkan perbandingan antara target atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi pada tahun anggaran.

Perbandingan antara target dan realisasi pada 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION 2023

Periodically, PELNI conducts evaluations of the operational results achieved during the fiscal year. This is done by measuring the Company's performance based on a comparison between the targets or the Company's Work Plan and Budget (RKAP) set at the beginning of the year and the actual realization during the fiscal year.

The comparison between targets and realization in 2023 can be seen in the following table:

Keterangan / Description	RKAP 2023 / 2023 Work Plan and Budget	Realisasi 2023 / 2023 Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Operasional / Operational			
Kapal Milik / Ships Owned			
Kapal Penumpang / Passenger Ship	26	26	100%
Kapal Perintis / Pioneer Ship	48	48	100%
Kapal Tol Laut / Sea Toll Ship	10	10	100%
Kapal Non-Penugasan / Non-Duty Ships	-	1	100%
Kapal Ternak / Cattle Ship	1	1	100%
Kapal Rede / Rede Ship	16	16	100%
Kapal Roro / Roro Ship	1	-	0%
Kapal Wisata / Cruise Ship	-	-	-
Jumlah Kapal Beroperasi / Total Operating Ships	102	102	100%
Produksi / Production			
Angkutan Penumpang (orang) / Passenger Transport (person)	4.297.758	5.262.689	122,45%

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI 2023, DAN PROYEKSI 2024

2023 TARGETS, REALIZATION, AND 2024 PROJECTION COMPARISON

Keterangan / Description	RKAP 2023 / 2023 Work Plan and Budget	Realisasi 2023 / 2023 Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Angkutan Barang (Ton/M3) / Cargo Transport (Ton/M3)	142.699	139.283	97,61%
Container (Teus) / Container	26.782	24.758	92,44%
Kendaraan (unit) / Vehicle (unit)	12.652	11.339	89,62%
Efisiensi Operasional / Operational Efficiency			
Commission Day (hari layar) / Commission Day (sailing days)	22.373	23.974	107,16%
Frekuensi (pelayaran) / Frequency (voyage)	1.718	1.901	110,65%
Gross Profit Margin (%) / Gross Profit Margin (%)	15,06	15,13	100,46%
Net Profit Margin (%) / Net Profit Margin (%)	2,94	3,49	118,71%
Keuangan / Financial			
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Current Year	190.085	201.631	105,67%
Imbalan terhadap Ekuitas (%) / Return to Equity (%)	2,81	2,95	105,34%
Imbalan terhadap Investasi (%) / Return to Investment (%)	8,41	10,97	130,20%
Rasio Lancar (%) / Current Ratio (%)	405,08	500,08	123,45%
Rasio Kas (%) / Cash Ratio (%)	195,42	345,23	176,66%

PERBANDINGAN REALISASI 2023 DAN TARGET 2024

Perseroan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 disusun sebagai pedoman kerja dan perangkat pengendalian kinerja, sesuai pemenuhan pasal 21 Anggaran Dasar Perusahaan. Materi dan sistematika Penyusunan RKAP 2024 mengacu pada: (1) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan (2) Surat Menteri BUMN tanggal 31 Agustus 2018 Nomor S-564/ MBU/2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal tahun 2021 untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Penyusunan RKAP 2024 telah dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi kondisi eksternal dan internal yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan bisnis Perseroan pada tahun 2024.

COMPARISON OF 2023 REALIZATION AND 2024 TARGETS

The Company has prepared the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) as a work guideline and performance control tool, in accordance with Article 21 of the Company's Articles of Association. The material and systematic preparation of the 2024 RKAP refers to: (1) the Decision of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number KEP-101/MBU/2002 dated June 4, 2002, regarding the Preparation of the Work Plan and Budget for State-Owned Enterprises, and (2) the Letter from the Minister of BUMN dated August 31, 2018, Number S-564/ MBU/2018 concerning Shareholder/Owner Aspirations for the Preparation of the Company's Work Plan and Budget.

The preparation of the 2024 RKAP has been conducted by considering assumptions of external and internal conditions that significantly affect the Company's business continuity in 2024.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI 2023, DAN PROYEKSI 2024

2023 TARGETS, REALIZATION, AND 2024 PROJECTION COMPARISON

Keterangan / Description	RKAP 2024 / 2024 Work Plan and Budget	Realisasi 2023 / 2023 Realization	Target Pertumbuhan / Growth Target
Operasional / Operational			
Kapal Milik / Ships Owned			
Kapal Penumpang / Passenger Ship	26	26	-
Kapal Perintis / Pioneer Ship	48	48	-
Kapal Tol Laut / Sea Toll Ship	10	10	-
Kapal Non-Penugasan / Non-Duty Ships	1	1	-
Kapal Ternak / Cattle Ship	1	1	-
Kapal Rede / Rede Ship	16	16	-
Kapal Roro / Roro Ship	0	2	-
Jumlah Kapal Beroperasi / Total Operating Ships	84	102	(17,65%)
Produksi / Production			
Angkutan Penumpang (orang) / Passenger Transport (person)	4.662.769	5.262.689	(11,40%)
Angkutan Barang (Ton/M3) / Cargo Transport (Ton/M3)	98.792	139.283	(29,07%)
Container (Teus) / Container	28.552	24.758	15,32%
Kendaraan (unit) / Vehicle (unit)	23.164	11.339	104,29%
Efisiensi Operasional / Operational Efficiency			
Commission Day (hari layar) / Commission Day (sailing days)	20.792	23974	(13,27%)
Frekuensi (pelayaran) / Frequency (voyage)	1.621	1.901	(14,73%)
Gross Profit Margin (%) / Gross Profit Margin (%)	15,54	15,13	2,71%
Net Profit Margin (%) / Net Profit Margin (%)	2,55	3,49	(26,93%)
Keuangan / Financial			
Laba Konsolidasi (Rp juta) / Consolidated Income (Rp million)	190.318	201.631	(5,61%)
Imbalan terhadap Ekuitas (%) / Return to Equity (%)	2,81	2,96	(5,07%)
Rasio Lancar (%) / Current Ratio (%)	476,29	500,08	(4,76%)
Rasio Kas (%) / Cash Ratio (%)	326,72	345,23	(5,36%)

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND CAPITAL/ PAYABLES RESTRUCTURIZATION INVESTMENT

INVESTASI

Pada tahun 2023, Perseroan melakukan investasi berupa penyertaan pada entitas asosiasi dengan pengungkapan sebagai berikut:

INVESTMENT

In 2023, the Company made investments in associates with the following disclosures:

Uraian / Description	2023	2022
PT Rumah Sakit Pelni	240.324.819.715	208.284.214.875
Jumlah / Total	**240.324.819.715**	**208.284.214.875**

Mutasi nilai penyertaan saham pada PT Rumah Sakit Pelni pada 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The following table shows the movement in the value of the Company's share investments in PT Rumah Sakit Pelni for the years 2023 and 2022:

Uraian / Description	2023	2022
Saldo Awal / Beginning Balance	208.284.214.875	196.333.983.575
Dividen / Dividend	0	(17.984.141.674)
Laba tahun berjalan / Current Profit for the Year	32.401.750.716	29.777.496.890
Laba Komprehensif / Comprehensive Income	(361.145.876)	156.876.084
Penyesuaian / Adjustment	0	0
Saldo Akhir / Ending Balance	**240.324.819.715**	**208.284.214.875**

EKSPANSI

PT PELNI (Persero) tidak melakukan ekspansi pada 2023. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

EXPANSION

PT PELNI (Persero) did not undertake any expansion activities in 2023. Therefore, there is no information available for disclosure in this section.

DIVESTASI

PT PELNI (Persero) tidak melakukan divestasi pada 2023. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

DIVESTMENT

PT PELNI (Persero) did not undertake any divestment activities in 2023. Therefore, there is no information available for disclosure in this section.

PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

PT PELNI (Persero) tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha pada 2023. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

MERGER/CONSOLIDATION

PT PELNI (Persero) did not undertake any merger or consolidation activities in 2023. Therefore, there is no information available for disclosure in this section.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND CAPITAL/ PAYABLES RESTRUCTURIZATION INVESTMENT

AKUISISI

PT PELNI (Persero) tidak melakukan akuisisi pada 2023. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

PT PELNI (Persero) tidak melakukan restrukturisasi utang/ modal pada 2023. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

ACQUISITION

PT PELNI (Persero) did not undertake any acquisition activities in 2023. Therefore, there is no information available for disclosure in this section.

DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

PT PELNI (Persero) did not undertake any debt or capital restructuring activities in 2023. Therefore, there is no information available for disclosure in this section.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL

INFORMATION AND FACTS OCCURRING PRIOR TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Tidak ada peristiwa penting setelah periode pelaporan yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan grup Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

There is no significant event prior to the reporting period which has material effects on the Company's group financial statements for the year ending on December 31, 2023.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION WHICH CONTAINS EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Pada 2023, tidak terdapat kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

In 2023, there is no occurrence of extraordinary and rare events which affects the Company's financial performance.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA PERUSAHAAN

IMPACT OF PRICE CHANGES ON COMPANY'S REVENUE AND PROFIT

DAMPAK PERUBAHAN TARIF PENUMPANG

Tidak terdapat perubahan tarif angkutan penumpang PELNI pada 2023. Dengan demikian, tidak terdapat informasi dampak perubahan tarif penumpang terhadap pendapatan dan laba perusahaan untuk diungkapkan pada bagian ini.

EFFECTS OF THE PASSENGER FARE CHANGES

There were no changes on PELNI's passenger fare account in 2023. Therefore, no information on the impact of changes on passenger fare on the Company's revenue and income is disclosed in this chapter.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan harga bahan bakar yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

EFFECTS OF FUEL PRICE CHANGES

Throughout 2023, there were no changes in fuel prices that had a significant impact on the Company's financial performance.

INFORMASI DIVIDEN

DIVIDEND INFORMATION

Pada periode tahun buku 2022 dan 2023, PT PELNI (Persero) tidak membagikan dividen sesuai dengan risalah RUPST yang menetapkan untuk mencadangkan seluruh laba bersih Perseroan.

In the period of 2022 and 2023 fiscal year, PT PELNI (Persero) does not distribute dividends in accordance with the GMS minutes, which spares all the Company's net income.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/ MANAJEMEN (ESOP/ MSOP)

EMPLOYEES/MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/ MSOP)

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/ESOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program*/MSOP).

As of December 31, 2022, the Company does not have Employee Stock Ownership Program (ESOP) and/or Management Stock Ownership Program (MSOP).

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

Informasi Transaksi dengan Benturan Kepentingan Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Manajemen memastikan masing-masing transaksi dilakukan secara wajar tanpa adanya benturan kepentingan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Grup Perseroan melakukan transaksi dengan pihak pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).

The Company engaged in transactions with related parties through mutually agreed terms and conditions. The Management ensures that each transaction is carried out fairly without any conflict of interest.

TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Company Group enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7, Related Party Disclosures.

1. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   a. The entity. and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   c. Both of entities are joint ventures of the same third parties.
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   e. The entity is a post-employment benefit plan for employees benefit from one of the reporting entities, or entity that are related to reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.
   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

g. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) angka (1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
h. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

g. A person who is identified in (a) (1) has significant influence over the entity or key of management entity personnel (or parent of the entity).

h. The entity or members of a group of which it's a part of the group it's provides key management personnel services to reporting entity or to parent of entity reporter.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Daftar pihak berelasi beserta sifat hubungan dan jenis transaksi dijabarkan sebagai berikut:

NATURE OF AFFILIATIONS

The list of related parties and the nature of the relationship and types of transactions is described as follows:

No.	Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi / Nature of Relationship with Related Parties	Transaksi / Transactions
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas, Piutang, Utang Usaha Cash Equivalent, Receivable, Account Payable
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas, Piutang Cash Equivalent, Receivable
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas Cash Equivalent
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas Cash Equivalent
5	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas Cash Equivalent
6	Bank Indonesia	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
7	Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi / Nature of Relationship with Related Parties	Transaksi / Transactions
8	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
9	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
10	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
11	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
12	PT Pertamina (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by th Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
13	13 JKN-BPJS	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
14	PT Nindya Karya (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
15	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
16	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
17	PT Jasa Raharja (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
18	PT Sucofindo (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
19	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
20	PT Telkom Enterprise (Persero), Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
21	PT Pertamina Patra Niaga	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi / Nature of Relationship with Related Parties	Transaksi / Transactions
22	PT Dock Perkapalan Kodja Bahari	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
23	PT Sigma Cipta Caraka	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
24	Syahbandar	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
25	PT Wijaya Karya (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
26	PT Kimia Farma Apotek	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
27	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
28	PT Energi Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
29	PT Pal Indonesia	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
30	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Personil Kunci Common Key Management	Utang Piutang Receivable - Payable
31	PT Sarana Gama Sejahtera	Personil Kunci Common Key Management	Utang Piutang Receivable - Payable
32	PT Pal Indonesia	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
33	PT Hakaaston	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
34	PT PP Urban	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
35	PT Waskita Karya (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
36	PT Petrokimia Gresik	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi / Nature of Relationship with Related Parties	Transaksi / Transactions
37	PT PINDAD Internasional	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
38	PT Telekomunikasi Seluler	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
39	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable

REALISASI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Realisasi transaksi Perseroan dengan pihak-pihak berelasi tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

REALIZATION OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The realization of the Company's transactions with related parties in 2023 and 2022 are as follows:

No.	Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi / Transactions	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)	
			2023	2022
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	235.150.752.261	276.929.840.428
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya / Restricted Cash and Cash Equivalent	180.182.740.328	175.514.618.712
		Piutang Usaha / Account Receivable	-	36.850.000
		Utang Usaha / Account Payable	73.447.082	71.689.333
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	15.729.104.249	13.758.507.822
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya / Restricted Cash and Cash Equivalent	57.300.000	57.300.000
		Piutang Usaha / Account Receivable	119.304.857	119.304.857
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	218.109.742.993	73.165.377.941
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya / Restricted Cash and Cash Equivalent	-	-
		Utang Usaha / Account Payable	-	3.122.064
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	1.737.458.217	103.541.167.016

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi / Transactions	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)	
			2023	2022
5	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	3.781.896.822	102.437.947.376
6	PT Bank Jabar Banten, Tbk	Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	15.232.475	15.324.221
7	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Piutang Usaha / Account Receivable	8.115.482.777	8.103.632.777
		Utang Usaha / Account Payable	1.079.238.547	8.158.605.928
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities	1.946.534.199	-
8	PT Telkom Enterprise (Persero), Tbk	Piutang Usaha / Account Receivable	-	-
		Utang Usaha / Account Payable	68.122.438	67.720.242
9	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Piutang Usaha / Account Receivable	1.093.148.035	1.215.711.924
		Utang Usaha / Account Payable	6.822.642.017	14.069.793.470
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities	10.606.857.460	9.748.323.407
10	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Piutang Usaha / Account Receivable	860.817.498	860.817.498
11	PT Sucofindo (Persero)	Piutang Usaha / Account Receivable	-	-
		Utang Usaha / Account Payable	1.237.095.000	210.357.000
12	PT Pos Indonesia (Persero)	Piutang Usaha / Account Receivable	298.463.390	300.067.270
13	PT Sarana Gama Sejahtera	Piutang Usaha / Account Receivable	93.206.075	-
		Utang Usaha / Account Payable	3.931.063.578	2.803.254.769
14	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Piutang Usaha / Account Receivable	22.381.379	13.915.702
		Utang Usaha / Account Payable	471.024.780	505.729.751
15	PT Pertamina Patra Niaga	Utang Usaha / Account Payable	6.200.424.585	10.378.475.386
16	PT Pertamina (Persero)	Utang Usaha / Account Payable	628.552.000	628.552.000
17	PT Dock Perkapalan Kodja Bahari	Utang Usaha / Account Payable	1.283.022.367	525.111.339
18	PT Sigma Cipta Caraka	Utang Usaha / Account Payable	687.405.600	1.039.083.334
19	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Utang Usaha / Account Payable	2.469.768.877	1.295.688.751

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi / Transactions	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)	
			2023	2022
20	PT Pal Indonesia	Utang Usaha / Account Payable	-	539.609.000
21	PT Industri Kapal Indonesia	Utang Usaha / Account Payable	716.504.276	25.142.191
22	Syahbandar	Utang Usaha / Account Payable	562.101.196	520.423.002
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities	508.754.780	237.222.057
23	PT Energi Pelabuhan Indonesia (Persero)	Utang Usaha / Account Payable	-	563.102.000
24	PT Jasa Raharja (Persero)	Utang Usaha / Account Payable	-	-
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities	77.660.652	1.391.310.938
25	Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut	Piutang Usaha / Account Receivable	-	245.793.670
26	JKN - BPJS	Utang Usaha / Account Payable	308.226.667	-
27	PT Wijaya Karya (Persero)	Utang Usaha / Account Payable	38.675.719	-
28	PT Kimia Farma Apotek	Utang Usaha / Account Payable	110.907.761	203.215.356
29	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Piutang Usaha / Account Receivable	-	-
		Utang Usaha / Account Payable	600.601.583	2.339.501.254
30	PT Nindya Karya (Persero)	Piutang Usaha / Account Receivable	-	-
31	Bank Indonesia	Piutang Usaha / Account Receivable	-	-
32	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Piutang Usaha / Account Receivable	-	-
33	PT Hakaaston	Piutang Usaha / Account Receivable	7.881.677.596	12.246.366.112
34	PT PP Urban	Piutang Usaha / Account Receivable	1.037.171.496	1.237.171.496
35	PT Waskita Beton Precast (Persero)	Piutang Usaha / Account Receivable	1.067.443.000	1.107.700.000
36	PT Petrokimia Gresik	Piutang Usaha / Account Receivable	53.386.811	910.267.434
37	Pupuk Kaltim	Piutang Usaha / Account Receivable	139.279.263	834.321.750
38	PT PINDAD Internasional	Piutang Usaha / Account Receivable	700.000.000	700.000.000

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi / Transactions	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)	
			2023	2022
39	PT Telekomunikasi Seluler	Piutang Usaha / Account Receivable	1.233.546.730	1.338.540.250
40	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Utang Usaha / Account Payable	34.324.958	768.523.104
41	PT Adhikarya	Piutang Usaha / Account Receivable	16.688.163.256	-
42	PT Jembatan Nusantara	Piutang Usaha / Account Receivable	8.445.206.939	5.113.493.723
43	Kementerian Perhubungan CQ Direktorat Jenderal Directorate Perhubungan Laut	Piutang Usaha / Account Receivable	8.169.761.989	-
44	RS PELNI	Piutang Usaha / Account Receivable	18.305.626.414	12.342.047.154
45	PT Semen Indogreen Sentosa	Piutang Usaha / Account Receivable	6.114.263.118	-
46	Jasa Prima Logistik	Piutang Usaha / Account Receivable	2.110.678.934	-
47	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Piutang Usaha / Account Receivable	1.829.078.586	245.793.670
48	PT Asuransi Kredit Indonesia	Utang Usaha / Account Payable	4.388.619.145	2.779.319.306
49	PT Isa Telkom	Utang Usaha / Account Payable	1.158.154.950	278.350.000
50	Kepala Operasi QQ Pelabuhan	Utang Usaha / Account Payable	748.301.885	1.228.646.376
51	Pegawai	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities	3.351.559.841	8.368.858.398
52	PT Jasa Raharja Putera	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities	1.297.195.356	3.302.351.086
53	Otoritas Pelabuhan	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities	130.048.499	775.857.135
54	Lainnya	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities	11.413.457.976	2.187.570.962

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan prinsip profesionalitas dan situasi saling membutuhkan, dengan maksud menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

REASON FOR CONDUCTING AFFILIATE TRANSACTIONS

The Company engages in transactions with related parties based on the principles of professionalism and mutual necessity, with the intention of generating benefits for both parties.

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED PARTIES

PERNYATAAN KEWAJARAN TRANSAKSI OLEH DIREKSI

Direksi memastikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan pada 2023 telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan masing-masing transaksi dilakukan sesuai prinsip *arm's length principle*.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME

Review Terhadap Transaksi Dewan Komisaris bersama Komite Audit Perseroan telah melakukan review terhadap masing-masing transaksi melalui proses audit, di samping proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai auditor eksternal. Mekanisme audit tersebut telah dilakukan sesuai PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Berdasarkan review yang dilakukan pada tahun buku 2022 dan 2023, manajemen menyimpulkan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi selama tahun-tahun tersebut telah dilakukan dengan memenuhi peraturan dan ketentuan terkait.

Dewan Komisaris bersama Komite Audit telah melakukan prosedur yang memadai dalam memastikan seluruh transaksi afiliasi telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle).*

STATEMENT OF TRANSACTIONS FAIRNESS BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors ensures that affiliate transactions conducted in 2023 have undergone adequate procedures to ensure that each transaction is carried out according to the arm's length principle.

COMPANY POLICY ON THE REVIEW MECHANISM FOR TRANSACTIONS

The Board of Commissioners, together with the Company's Audit Committee, has reviewed each transaction through an audit process, in addition to the audits conducted by public accountants as external auditors. This audit mechanism has been conducted in accordance with PSAK 7 (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures." Based on the reviews conducted for the fiscal years 2022 and 2023, management concluded that all transactions with related parties during those years were conducted in compliance with relevant regulations and provisions.

The Board of Commissioners, together with the Audit Committee, has taken adequate procedures to ensure that all affiliate transactions have been conducted in accordance with general business practices, specifically by adhering to the arm's length principle.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

AMENDMENTS IN LAWS AND REGULATIONS AND ITS IMPACT ON THE COMPANY

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan baik dari sisi keuangan maupun operasional.

Throughout 2023, there were no changes in laws and regulations that had a significant impact on the Company, either financially or operationally.

REALISASI PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak menawarkan sahamnya kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana (IPO). Oleh sebab itu, Perseroan tidak memiliki informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

As of December 31, 2022, the Company's shares were not publicly listed through Initial Public Offering (IPO). Therefore, the Company has no information regarding the actual use of proceeds from public offerings

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

AMENDMENTS IN ACCOUNTING POLICIES AND ITS IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

1. Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:
   a. Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
   b. Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
   c. Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
   d. Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
   e. Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal; dan
   f. Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

   Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS")

1. The following are amendments and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:
   a. Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
   b. Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding the classification of liabilities as short term or long term;
   c. Amendments to PSAK 16: Fixed Assets related to Proceeds before Intended Use;
   d. Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
   e. Amendment to PSAK 46: With-holding Tax regarding Asset-Related Deferred Tax and Liabilities Arising From a Single Transaction; and
   f. Revised PSAK 107: Accounting for Ijara.

   The implementation of the above standards had no

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

AMENDMENTS IN ACCOUNTING POLICIES AND ITS IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS

dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2. Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut:

   Efektif 1 Januari 2024
   a. Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;

   b. Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

   Efektif 1 Januari 2025
   c. PSAK 74, "Kontrak Asuransi"
   d. Amendemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

   Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.
3. DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan-perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak mempengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2. Amendments to the Statement of Financial Accounting Standards that have been issued but have not yet become effective for the financial year starting on 1 January 2023 are as follows:

   Effective January 1, 2024
   a. Amendment PSAK 1, "Presentation of Financial statements" regarding non-current liabilities with covenants;
   b. Amendment to PSAK 73 "Leases" regarding lease liabilities in a sale and leaseback transaction

   Effective January 1, 2025
   c. SFAS 74, "Insurance Contracts";
   d. Amendment to SFAS 74, "Insurance Contracts" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.

   As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.
3. DSAK-IAI also ratified changes to the numbering of PSAK and ISAK which will be effective on January 1 2024, these changes do not affect the substance of requirement in each PSAK and ISAK.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan aktivitas usaha, Perseroan menghadapi beragam tantangan dengan beberapa di antaranya berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku 2023. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko keselamatan kapal dan penumpang (Armatek, Operasi, *Designated Person Ashore*).
2. Risiko *public service obligation*;
3. Risiko *pax factor* kapal penumpang;
4. Risiko subsidi kapal barang tol laut; dan
5. Risiko kenaikan BBM.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI

Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Assessment manajemen atas hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000 yang menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Dalam menyikapi perubahan konteks eksternal secara berkala atau periode triwulanan dilakukan pembahasan risiko-risiko yang ada terhadap pengelolaan perusahaan antara unit manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN PENGKAJIAN

Dalam penyusunan RKAP 2023, PT PELNI (Persero) salah satu acuannya berdasarkan *Risk Based Budgeting*, dalam hal ini penyusunan anggaran berdasarkan risiko-risiko yang telah terpetakan.

Adapun, beberapa asumsi yang digunakan Perseroan berkaitan dengan kelangsungan usaha PT PELNI (Persero) di antaranya adalah kondisi ekonomi makro, kondisi industri pelayaran nasional serta kebijakan Pemerintah. Adapun data sumsi tersebut sebagai berikut:

MATTERS WITH POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

In conducting its business, the Company certainly faces a number of challenges. From such challenges, some might potentially have significant impact to the company's business continuity in the fiscal year 2022. The matters are described as follows:

1. Ship and passenger safety risks (Armatek, Operation, Designated Person Ashore);
2. Public service obligation risk;
3. Passenger ship pax factor risk;
4. Subsidizing Sea Toll carriages risk; and
5. Rising fuel prices risk.

THE MANAGEMENT'S ASSESSMENT ON MATTERS WITH POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

For the management's assessment on matters with significant effect on the Company's business continuity, PT PELNI (Persero) implements a Risk Management System in accordance with the ISO 31000 framework which produces risk management practices with broader perspective that are easy to understand, measurable and supports coordination and integration between work units in the Company.

In responding to external changes periodically or quarterly, the Company's management holds discussions on existing risks between the risk management unit, the Board of Commissioners and the Board of Directors

ASSUMPTIONS USED BY THE MANAGEMENT FOR THE ASSESSMENT

In preparing PT PELNI (Persero) 2022 RKAP, one of the assumptions used is Risk Based Budgeting, in which budgeting is carried out based on risks mapped.

Meanwhile, assumptions used by the Company related to business continuity of PT PELNI (Persero) include macroeconomic conditions, of national shipping industry conditions and Government policies. The assumptions are described as follows:

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Indikator Ekonomi / Economic Indicator	**Asumsi ABPN 2024 /** 2023 APBN (State Budget) Assumption
Pertumbuhan ekonomi / Economic Growth	5,3%
Tingkat inflasi / Inflation Rate	3,3%
Kurs Rp / USD	Rp14.750/USD
Tingkat Suku Bunga / Interest Rate	7,90%
Harga Minyak / Oil Price	USD90/barel USD90/barrel
Lifting Minyak / Oil Lifting	635 ribu barel/hari 635 thousand barrels/day
Lifting Gas / Gas Lifting	1.033 ribu barel setara minyak/hari 1.033 thousand barrels of oil equivalents/day

Sumber: APBN 2023 / Source: State Budget 2023 - https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/104566fc-217a-4d54-9193-888810246cd5

Asumsi tersebut juga didukung oleh peran PT PELNI (Persero) dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Infrastruktur Negara
   PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi public antar pulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang) termasuk angkutan transmigrasi dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

2. Agen Pembangunan
   PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi public ke wilayah pulau terpencil dan terluar guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis.

3. Sistem Logistik
   PT PELNI (Persero) mengangkut kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat seluruh Indonesia termasuk di pulau-pulau terpencil dan terluar guna stabilisasi.

4. Kedaulatan NKRI
   PT PELNI (Persero) menyediakan akses untuk keperluan sosial politik Negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan reguler antar-pulau.

5. Tanggap Darurat
   PT PELNI (Persero) menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat dan andal ke seluruh pelosok nusantara untuk kondisi darurat nasional.

Such assumptions are supported by the role of PT PELNI (Persero) in the following matters:

1. National Infrastructure
   PT PELNI (Persero) provides access to inter-island public transportation (developed and developing regions) including for transmigration and TKI (Indonesian Migrant Workers).

2. Agent of Development
   PT PELNI (Persero) provides access to public transportation to remote and border island areas in order to accelerate development and eliminate geographical isolation.

3. Logistics System
   PT PELNI (Persero) transports basic needs and other needs for people throughout Indonesia, including those in remote and border islands for stabilization.

4. State Sovereignty
   PT PELNI (Persero) provides access for socio-political needs of the State and national defense through regular inter-island visits.

5. Emergency Response
   PT PELNI (Persero) provides large capacity, fast and reliable transportation to all corners of the archipelago for national emergency conditions.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

ASSESSMENT ATAS KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen telah melakukan assessment terhadap kelangsungan usaha Perseroan pada 2022, antara lain dengan menggunakan metode Z-score, yaitu model yang dikembangkan atas kombinasi beberapa formula analisis risiko keuangan.

Hasil assessment tersebut adalah sebagai berikut:

ASSESSMENT OF BUSINESS CONTINUITY

The Management has conducted an assessment on business continuity using Z-score model, a model developed by a combination of several financial ratio analysis formula.

Results of the assessment are as follows:

2023			
Rasio / Ratio	**Rumus/**Formula Altman Z-Score		**Jumlah /** Amount
Likuiditas / Liquidity	6,56 X	4.049.805.832.315 / 8.036.032.497.605	3,31
Profitabilitas / Profitability	3,26 X	(1.110.472.524.206) / 8.036.032.497.605	(0,45)
Profitabilitas / Profitability	6,72 X	299.093.786.141 / 8.036.032.497.605	0,25
Solvabilitas / Solvency	1,05 X	6.823.740.993.005 / 1.212.291.504.600	5,91
Jumlah / Total			**9,02**

Berdasarkan hasil perhitungan Z-Score model pada tahun berjalan diperoleh skor sebesar 9,02 nilai ini berada jauh diatas batas minimum dari kepailitan (Z>2,60). Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan dalam kondisi bagus dan aman dari kepailitan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perseroan dan entitas anaknya secara konsolidasi berada dalam kondisi sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.

Based on the Z-Score model calculation for the current year, a score of 9.02 was obtained, which is well above the minimum threshold for bankruptcy (Z > 2.60). This indicates that the Company is in good condition and safe from bankruptcy. Therefore, it can be concluded that the Company and its subsidiaries, on a consolidated basis, are very capable of maintaining their business continuity.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

STRATEGI PEMASARAN

Pada 2023, PT PELNI (Persero) melakukan penjualan antara lain melalui sejumlah channel penjualan yang terbagi dalam kategori Mitra B to B serta Agen Penjualan B to C. Khusus pada channel Agen Penjualan, Perseroan bekerja sama dengan 192 travel agent serta 13 mitra penjualan pada 2023, dengan rincian sebagai berikut:

MARKETING STRATEGY

In 2023, PT PELNI (Persero) made sales through a number of sales channels divided into B-to-B partners and B-to-C Sales Agents categories. Specifically, for the Sales Agent channel, the Company worked with 192 travel agents and 13 sales partners in 2023, with the following details:

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

Mitra Penjualan PT PELNI (Persero) 2023
1. PT Anugerah Tetap Abadi
2. PT Bimasakti Multi Sinergi
3. PT Darmawisata Indonesia
4. PT Easybook Teknologi Indonesia
5. PT Indomarco Prismatama (Indomaret)
6. Medussa Multi Business Center
7. PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)
8. PT Teknologi Layanan Pelanggan
9. PT Topindo Solusi Komunika
10. PT Adya Tours
11. PT Versa Technology
12. PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi)
13. PT. Mitra Kasih Perkasa (BCA Mobile)

Travel Agent Penjualan PT PELNI (Persero) 2023
1. Cabang 144 (Medan/Belawan): 11 travel agent.
2. Cabang 251 (Tanjung Pinang): 6 travel agent.
3. Cabang 256 (Pulau Batam): 8 travel agent.
4. Cabang 266 (Tanjung Balai Karimun): 3 travel agent.
5. Cabang 335 (Pangkal Pinang/Muntok): 2 travel agent.
6. Cabang 431 (Tanjung Priok): 7 travel agent.
7. Cabang 494 (Semarang): 9 travel agent.
8. Cabang 563 (Surabaya): 16 travel agent.
9. Cabang 613 (Denpasar): 1 travel agent.
10. Cabang 655 (Bima): 4 travel agent.
11. Cabang 662 (Labuan Bajo): 2 travel agent.

Sales Partners of PT PELNI (Persero) in 2023
1. PT Anugerah Tetap Abadi
2. PT Bimasakti Multi Sinergi
3. PT Darmawisata Indonesia
4. PT Easybook Teknologi Indonesia
5. PT Indomarco Prismatama (Indomaret)
6. Medussa Multi Business Center
7. PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)
8. PT Teknologi Layanan Pelanggan
9. PT Topindo Solusi Komunika
10. PT Adya Tours
11. PT Versa Technology
12. PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi)
13. PT. Mitra Kasih Perkasa (BCA Mobile)

Sales Travel Agent of PT PELNI (Persero) in 2023
1. 144 Branch (Medan/Belawan): 11 travel agents.
2. 251 Branch (Tanjung Pinang): 6 travel agents.
3. 256 Branch (Batam Island): 8 travel agents.
4. 266 Branch (Tanjung Balai Karimun): 3 travel agents.
5. 335 Branch (Pangkal Pinang/Muntok): 2 travel agents.
6. 431 Branch (Tanjung Priok): 7 travel agents.
7. 494 Branch (Semarang): 9 travel agents.
8. 563 Branch (Surabaya): 16 travel agents.
9. 613 Branch (Denpasar: 1 travel agent.
10. 655 Branch (Bima): 4 travel agents.
11. 662 Branch (Labuan Bajo): 2 travel agents.

PANGSA PASAR
Pangsa pasar PT PELNI (Persero) didominasi oleh karakter penumpang menengah ke bawah dengan barang bawaan (kargo) yang signifikan serta penumpang yang tinggal atau menuju daerah tanpa adanya layanan transportasi udara dan juga untuk ruas jarak pendek-menengah. Pangsa pasar Perseroan yang lain adalah shipper yang membutuhkan alat angkut terjadwal.

MARKET SHARE
Market share of PT PELNI (Persero) is dominated by middlelow passenger with significant cargo as well as passengers who stay or depart to several areas without airplane transportation service. The other market served by the Company is shipper that needs scheduled transportation. The Company's other market share is shipper that needs scheduled means of transportation.

Tahun / Year	2023
Penumpang Pelayaran Domestik / Domestic Cruisers	19.900.000
Penumpang PELNI / PELNI Passengers	5.262.689
Pangsa Pasar PELNI (Pelayaran) / PELNI Market Share (Shipping)	26%

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

PROSPEK USAHA

Menghadapi tahun 2024 yang kemungkinan masih akan diwarnai oleh dinamika ekonomi global dan domestik, akan memunculkan serangkaian tantangan dan peluang. Hal ini disebabkan karena masih tingginya ketidakpastian kondisi global yang akan berdampak pada tingkat konsumsi dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diproyeksikan masih akan tertahan dan cenderung melambat dari 3% di tahun 2023 menjadi 2,9% di tahun 2024, hal ini disampaikan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Proyeksi ini didasarkan pada masih tingginya risiko ekonomi dan geopolitik yang diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2024. Di sisi lain *World Bank* justru memproyeksikan sebaliknya, dimana diperkirakan bahwa *gross domestic product* (GDP) global akan mencapai angka 2,4% di tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 2,1%, pandangan positif ini didasarkan pada normalisasi suku bunga dan inflasi.

Di tahun 2024, Indonesia akan menggelar rangkaian acara pesta demokrasi, hal ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Sejumlah Lembaga moneter internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan stagnan dan cenderung menurun dari tahun 2023. Hal ini disebabkan karena tahun politik akan menghambat kinerja investasi meskipun keyakinan akan tingkat konsumsi masih akan tetap solid seiring dengan mobilitas yang telah dibuka dan berbagai Upaya pemerintah dalam menjaga daya beli Masyarakat.

Prospek usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh proyeksi industri pelayaran. Mengacu pada INSA, industri pelayaran Indonesia diperkirakan akan mengalami situasi yang kondusif seiring kelanjutan pemulihan ekonomi nasional yang masih akan ditunjang oleh tingkat daya beli masyarakat yang terjaga, hal tersebut diperkirakan tidak memberi dampak yang signifikan bagi kelangsungan usaha Perseroan kedepannya.

STRATEGI PERUSAHAAN TAHUN 2024

Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia, PELNI telah menyusun kebijakan strategis yang akan diterapkan pada 2024, sebagai bagian dari rencana jangka panjang perusahaan. Rencana jangka panjang PELNI termuat di dalam Roadmap PELNI 2020-2024, dengan uraian sebagai berikut:

BUSINESS PROSPECTS

Facing 2024, which will likely continue to be marked by global and domestic economic dynamics, will present a series of challenges and opportunities. This is due to the high level of global uncertainty that will impact consumption and investment levels.

Economic growth in 2024 is projected to remain restrained and tend to slow down from 3% in 2023 to 2.9% in 2024, as stated by the International Monetary Fund (IMF). This projection is based on the still high economic and geopolitical risks that are expected to continue in 2024. On the other hand, the World Bank projects otherwise, predicting that the global gross domestic product (GDP) will reach 2.4% in 2024, up from 2.1% in 2023. This positive outlook is based on the normalization of interest rates and inflation.

In 2024, Indonesia will hold a series of democratic events, which are expected to affect economic growth in 2024. Several international monetary institutions predict that Indonesia's economic growth in 2024 will be stagnant and tend to decline from 2023. This is because the political year will hinder investment performance, although confidence in consumption levels will remain solid along with the reopening of mobility and various government efforts to maintain people's purchasing power.

The Company's business prospects are also influenced by the shipping industry projections. According to INSA, the Indonesian shipping industry is expected to experience a conducive situation along with the continuation of national economic recovery, which will still be supported by maintained purchasing power. This is not expected to have a significant impact on the Company's business continuity in the future.

COMPANY STRATEGY FOR 2024

Considering the various opportunities and risks that Indonesia might face, PELNI has formulated strategic policies to be implemented in 2024, as part of the company's long-term plan. PELNI's long-term plan is outlined in the PELNI Roadmap 2020-2024, as follows:

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Roadmap & Corporate Strategic Initiatives Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
Survival **(Dampak Covid-19/** Covid-19 Impact**)**	***Business Recovery (pasca Covid-19)***	***Business Integration & Maritime Logistic Infrastructure Development***	***Market & Business Expansion***	***Business Expansion***
1. Strategi Efisiensi Biaya atas dampak pandemi / Cost Efficiency Strategy of the pandemic effect 2. Divestasi non-*core Bussines* / Non-core business divestment 3. *Operational Exellence* melalui digitalisasi proses bisnis / Operation Exellence through business process digitalization 4. Sosialisasi Budaya AKHLAK / Cultural Dissemination AKHLAK	1. Peningkatan kapasitas angkutan barang / Increased cargo transportation capacity 2. Optimalisasi rute komersial & penugasan / Optimization of commercial and assignment routes 3. Penguatan digitalisasi proses bisnis / Strengthening the digitization of business processes 4. *Integrated talent management & performance system* / Integrated talent management and performance system 5. Penguatan budaya perusahaan / Strengthening corporate culture	1. *Core business focus on shipping* / Core business focus on shipping 2. Kerja sama strategis space muatan dengan BUMN/BUMS / Strategic cooperation on cargo space with SOEs/Private Companies 3. Perluasan *marketing* penjualan aplikasi MyCargoo! / Expansion of marketing for the MyCargoo! application 4. Finalisasi Kajian (*Revitalisasi PELNI Maintenance Facility, Modifikasi Kapal Penumpang, Pengadaan Kapal Penumpang dan Kapal Cruise/ Wisata*) / Finalization of studies (Revitalization of PELNI Maintenance Facility, Modification of Passenger Ships, Procurement of Passenger Ships and Cruise/Tourism Ships) 5. Implementasi sistem monitoring *container* / Implementation of container monitoring system 6. Implementasi Mobile Sweeping & Mobile DCS / Implementation of Mobile Sweeping & Mobile DCS 7. Organizational & Culture Strengthening / Organizational & Culture Strengthening	1. Re-branding Perusahaan / Company re-branding 2. Implementasi Pola Hub & Spoke Tol Laut / Implementation of the Hub & Spoke Sea Toll pattern 3. Pengembangan Bisnis Ship Chartering & Ship Management / Development of Ship Chartering & Ship Management Business 4. Pengembangan Infrastruktur Logistik Maritim / Development of Maritime Logistics Infrastructure 5. Peningkatan Ship Safety Management / Improvement of Ship Safety Management 6. Pengembangan Bisnis Learning Center / Development of Learning Center Business 7. Pengembangan Bisnis Maintenance Facility / Development of Maintenance Facility Business 8. Pengembangan Integrated Commercial System / Development of Integrated Commercial System 9. Pengembangan Talent Milenial dan Perempuan / Development of Millennial and Female Talent 10. Pengembangan Bisnis Ship Chandler / Development of Ship Chandler Business 11. Inisiasi restrukturisasi core business Anak Perusahaan / Initiation of core business restructuring of Subsidiaries	1. Inisiasi National Shipping Holding Company melalui Pengembangan Bisnis dengan Perusahaan Pelayaran dan Bisnis Pendukung / Initiation of National Shipping Holding Company through Business Development with Shipping Companies and Supporting Businesses 2. Pengadaan Kapal dan Fasilitas Pendukung Lainnya / Procurement of Ships and Other Supporting Facilities 3. Pengajuan Dana PMN untuk Pengembangan Bisnis Logistik Maritim / Submission of PMN Funds for Maritime Logistics Business Development 4. Pengembangan Bisnis dan Kapabilitas Ship Management / Development of Ship Management Business and Capabilities 5. Pengembangan Infrastruktur dan Kapabilitas Logistik Maritim Development of Maritime Logistics Infrastructure and Capabilities 6. Digitalisasi Proses Bisnis Perusahaan / Digitization of Company Business Processes 7. Spin On & Spin Off Strategic Business Unit (SBU) / Spin On & Spin Off Strategic Business Unit (SBU) 8. Pengembangan Bisnis Ship Chandler / Development of Ship Chandler Business 9. Implementasi Restrukturisasi Core Business Anak Perusahaan / Implementation of Core Business Restructuring of Subsidiaries

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Lebih lanjut, PELNI telah menyusun dan tengah melaksanakan Corporate Strategic Initiatives 2022-2024, dengan penjabaran sebagai berikut:

Furthermore, PELNI has prepared and is currently implementing the Corporate Strategic Initiatives 2022-2024 with the following description:

***Coporate Strategic Initiatives* tahun 2022-2024**

Coporate Strategic Initiatives 2022-2024

Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara
To be the Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia

Usaha Angkutan Penumpang / Passenger Transportation Business	**Usaha Angkutan Barang /** Freight Business	**Usaha Penunjang & Diversifikasi /** Supporting Business & Diversification
10. Peningkatan Pelayanan Pelanggan/ Improve Customer Service a. Membangun operational & *service excellence* secara berkesinambungan / Build operational & service excellence on an ongoing basis b. Memperluas *channel* penjualan & *payment point* / Expand sales & payment channels point c. Sinergi *shipping operations* dengan BUMN Pelayaran / Synergy of shipping operations with shipping SOEs	**3. Diferensiasi Bisnis dan Peningkatan Produktivitas /** Business Differentiation and Increased Productivity a. Membangun *strategic partnership* usaha angkutan barang dengan BUMN, BUMD, dan Swasta/ Build strategic partnership in the freight buisness with SOEs, Regional-Own Companies, and private companies b. Pengembangan Jaringan Logistik Matitim ke Kawasan Asia Tenggara/ Develop the Maritime Logistics Network in Southeast Asia	**5. Pengembangan Bisnis Diversifikasi /** Business Development Diversification a. Pengembangan MICE & Wisata Bahari / Development of MICE and Marine Tourism b. pengoperasian kapal wisata / cruise / Tour Ships c. Optimalisasi Komersialisasi Aset PELNI / Optimize the commercialization of PELNI Assets d. Pembangunan bisnis *Crew Manning* / Crew Manning Business Development e. Pengembangan Bisnis Maritime Training Centre / Maritime Training Center Business Development f. Pengembangan Bisnis Galangan Kapal / Shipyard Business Development
11. Penguatan Kapasitas Sarana & Prasarana / Capacity Building of Facilities & Infrastucture a. Peningkatan alat produksi Pelayaran Penumpang/ Improvement production equipment for Passenger Shipping	**4. Penguatan Kapasitas Sarana & Prasarana /** Capacity Building of Facilities & Infrastucture a. Peningkatan kapasitas bisnis angkutan barang melalui investasi alat produksi & alat penunjang/ Increase the capacity of freight business through investment in production equipment & shipping support equipment b. Optimalisasi aset untuk pengelolaan kegiatan penunjang pelayanan dan Logistic Pelni Group / Optomize assets for the management of shipping support activities and Maritime Logistics of The Pelni Group	

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Armada / Fleet	Digitalisasi / Digitalization	Sumber Daya Manusia / Human Capital
6. Peningkatan Efektivitas & Efesiensi Pengelolaan Armada/ Effectiveness & Effeiciency of Fleet Management	**3. Pengembangan Sistem IT Untuk Mendukung Implementasi Bisnis /** Development of IT System to Support Business Implementation	**5. Pengembangan Talenta /** Talent Development
a. Peningkatan kehandalan kapal melalui revitaslisasi alat produksi / Increase ship reliability through revitalization of production equipment b. Inovasi Teknologi Pada Alat Produksi untuk meningkatkan efesiensi operasional / Technological Innovation in Production Equipment to improve operational effeciency	*a. Digitalization for Customer Experriences* *b. Digitalization for All Operational Processes* *c. Digitalization for New Business Models*	*a. Performance management & reward system* *b. Talent acquisition & development* *c. Organizational & Culture Strengthening* *d. Pengembangan Knowledge Management System*

PANGRANGO
PELNI

PELNI

We Connect, We Unify

06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan menyadari bahwa diperlukan suatu komitmen nyata untuk menjaga kesinambungan usaha di situasi bisnis yang sangat kompetitif. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi *Shareholder* namun juga segenap *Stakeholders.*

In conducting its business activities, the Company recognizes the need for a genuine commitment to maintaining business sustainability in a highly competitive environment. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a step towards continuously enhancing business value and long-term growth not only for the Shareholders but also for all Stakeholders.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen nyata dari Perseroan dalam menerapkan tata kelola di lingkungan Perseroan. Komitmen penerapan GCG ini tidak hanya sekadar sebagai pemenuhan aturan yang berlaku namun sebagai praktik yang praktiknya dilandasi oleh kesadaran pentingnya GCG di Perseroan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

To achieve these goals, the Company requires a firm commitment to implementing governance within the organization. The commitment to applying GCG is not merely a fulfillment of regulatory requirements but is practiced based on the awareness of its importance for upholding integrity in conducting a healthy and sustainable business.

Perseroan menjadikan tata kelola perusahaan sebagai instrumen untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan usaha yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada praktik-praktik bisnis terbaik (*best practices*). Selain itu, tata kelola juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi secara terus-menerus. Perseroan meyakini komitmen atas penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif pada kinerja Perseroan secara keseluruhan. Karena itu, seluruh Insan Perseroan diharapkan untuk berperan aktif dalam penerapan GCG dan menjadikan GCG sebagai nilai utama dalam aktivitas di lingkungan Perseroan.

The Company views corporate governance as an instrument to fulfill its responsibility in managing sustainable business operations based on best practices. Additionally, governance serves as an ongoing effort to improve and refine the organization. The Company believes that a consistent and continuous commitment to implementing GCG will positively impact its overall performance. Therefore, all Company personnel are expected to actively participate in GCG implementation and to embrace GCG as a core value in their activities within the organization.

PRINSIP UMUM GCG

Penerapan GCG di PELNI mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yang berlaku umum dalam rangka menjalankan praktik bisnis dengan standar etika tertinggi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

GENERAL PRINCIPLES OF GCG

The implementation of GCG in PELNI adheres to five fundamental principles commonly accepted for conducting business practices with the highest ethical standards, as outlined in the following table:

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Prinsip Principle	**Penjelasan** Explanation	**Bentuk Implementasi di PT PELNI (Persero)** Implementation at PT PELNI (Persero)
Transparansi (*Transparency*)	Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparency, which refers to openness in the decision-making process and the disclosure of material and relevant information about the company.	Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh PT PELNI (Persero) dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya, PT PELNI (Persero) membuat kebijakan tentang klasifikasi infomasi yang bersifat terbuka atau tertutup sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh Insan PT PELNI (Persero). Transparansi ini diwujudkan PT PELNI (Persero) dengan selalu mengungkapkan informasi baik keuangan maupun non keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan. Transparansi diartikan terhadap Pemegang Saham dan juga kepada seluruh *stakeholders* Perusahaan. PT PELNI (Persero) ensures transparent disclosure of information while complying with applicable laws and GCG principles. Implementation includes a policy on classifying information as open or confidential, guiding all PT PELNI (Persero) personnel. Transparency is achieved by consistently disclosing both financial and non-financial information to relevant stakeholders, ensuring clarity for shareholders and all company stakeholders.
Akuntabilitas (*Accountability*)	Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Accountability, which refers to the clarity of functions, implementation, and accountability of the Company's organs so that the management of the company is conducted effectively.	Persiapan akuntabilitas mengharuskan pimpinan Perusahaan mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Hal tersebut dilaksanakan dengan menetapkan rincian peran dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan dan Karyawan dengan menetapkan rincian peran dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan dan Karyawan secara jelas sesuai dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perusahaan. PT PELNI (Persero) meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengatur hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan. Accountability requires company leadership to transparently and fairly account for their performance. This is executed by clearly defining the roles and responsibilities of each Company Organ and Employee, aligning them with the Company's vision, mission, goals, and strategies. PT PELNI (Persero) believes accountability is linked to the existence of a system regulating the relationships between individuals and/or organs within the Company.

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Prinsip Principle	**Penjelasan** Explanation	**Bentuk Implementasi di PT PELNI (Persero)** Implementation at PT PELNI (Persero)
Pertanggungjawaban (*Responsibility*)	Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Responsibility, which refers to the alignment of company management with statutory regulations and sound corporate principles.	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya antara lain kewajiban PT PELNI (Persero) dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha korporasi antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan dan keselamatan kerja dan persaingan usaha. Responsibility is realized by PT PELNI (Persero) fulfilling obligations under applicable laws and regulations from both central and local governments, covering areas such as labor, taxation, occupational health and safety, and business competition.
Kemandirian (*Independency*)	Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Independency, which refers to a condition where the company is managed professionally without conflicts of interest and undue influence/pressure from any party, in accordance with statutory regulations and sound corporate principles.	Dalam pelaksanaannya, kemandirian dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak & kewajiban, tugas & tanggung jawab serta wewenang masing-masing Organ. Independency is manifested by respecting the rights & obligations, duties & responsibilities, and authorities of each Organ.

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Prinsip Principle	**Penjelasan** Explanation	**Bentuk Implementasi di PT PELNI (Persero)** Implementation at PT PELNI (Persero)
Kewajaran (*Fairness*)	Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fairness, which refers to justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders based on agreements and statutory regulations.	Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dalam pola karir tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan juga diberlakukan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab RUPS/ Menteri, Dewan Komisaris, dan Direksi; 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern; 3. Penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern; 4. Penerapan Manajemen Risiko; 5. Pedoman Benturan Kepentingan; 6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan 7. Pedoman perilaku etika (*code of conduct*). Fairness is reflected in providing opportunities for stakeholders to offer input, suggestions, and opinions in the Company's interest. Equality is realized in career development practices without discrimination based on ethnicity, religion, race, gender, and in the procurement system for goods and services in accordance with applicable laws and regulations. The implementation of Good Corporate Governance principles is at least realized in: 1. The duties and responsibilities of the GMS/ Minister, the Board of Commissioners, and the Board of Directors; 2. The completeness and execution of duties of committees that perform internal control functions; 3. Implementation of compliance, Internal Audit, and External Audit functions; 4. Risk Management implementation; 5. Conflict of Interest Guidelines; 6. Transparency of financial and non-financial conditions; 7. Code of conduct ethics.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di lingkungan PELNI mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta ketentuan internal Perseroan. Selain itu, Perseroan

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PELNI adheres to various legal provisions in Indonesia and the company's internal regulations. Additionally, the company

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

juga melakukan *benchmark* terhadap *best practices* dalam penerapan GCG. Berbagai peraturan yang dijadikan rujukan penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PELNI antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
8. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2021.
9. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* Tahun 2008.
10. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

benchmarks against best practices in GCG implementation. The following regulations serve as references for developing Good Corporate Governance policies at PELNI:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.
4. Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping.
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
8. Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI) 2021 issued by the National Committee on Governance Policy in 2021.
9. Whistleblowing System Reporting Guidelines (WBS) issued by the National Committee on Governance Policy in 2008.
10. Deed of Establishment of PT PELNI (Persero) Number 31 dated October 30, 1975, made before Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notary in Jakarta; Deed Number 10 dated December 19, 2008, concerning the Adjustment of the Articles of Association of PT PELNI (Persero) made before Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H. Sp.N., Notary in Jakarta; and Deed Number 2 dated February 7, 2022, concerning Amendments to the Articles of Association of PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia made before Ida Adiningsih, S.H., Notary in Jakarta, along with the latest changes in the Deed of Statement of Decisions of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number 1 dated October 3, 2023, made before Ida Adiningsih, S.H., Notary in Jakarta.

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT PELNI (Persero) bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai PT PELNI (Persero) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan PT PELNI (Persero).
2. Mendorong pengelolaan PT PELNI (Persero) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero;
3. Mendorong agar Organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PT PELNI (Persero) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT PELNI (Persero);
4. Meningkatkan kontribusi PT PELNI (Persero) dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

ROADMAP GCG

PELNI memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam menerapkan GCG di Perseroan. Perseroan berusaha memperbaiki dan menyempurnakan penerapan GCG di Perseroan, dengan membangun kesadaran pada insan Perseroan akan pentingnya penerapan GCG, maupun penetapan berbagai kebijakan pendukung. Perseroan berharap, melalui konsistensi penerapan GCG dapat mendorong peningkatan nilai Perseroan di hadapan seluruh pemangku kepentingan. Melalui *Roadmap* GCG, PT PELNI (Persero) berusaha untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen Perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG diharapkan dapat terus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten dalam rangka mendukung tercapainya level *Good Corporate Citizen*, di mana GCG telah melekat dalam budaya internal perusahaan di masa depan.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at PT PELNI (Persero) aims to:

1. Optimize the value of PT PELNI (Persero) to ensure strong competitiveness both nationally and internationally, enabling it to sustain its existence and achieve its purposes and objectives.
2. Encourage the professional, efficient, and effective management of PT PELNI (Persero), as well as empower and enhance the independence of its corporate organs.
3. Ensure that the corporate organs make decisions and take actions based on high moral values and compliance with regulatory provisions, with an awareness of PT PELNI (Persero)'s social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability.
4. Increase PT PELNI (Persero)'s contribution to the national economy.
5. Foster a conducive climate for the development of national investment.

GCG ROADMAP

PELNI is committed to the consistent and robust implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the company. We strive to improve and enhance the application of GCG by fostering awareness among our personnel about its importance and establishing various supporting policies. Through the consistent application of GCG, the company aims to enhance its value in the eyes of all stakeholders. The GCG Roadmap of PT PELNI (Persero) outlines concrete steps to be undertaken by all elements of the company. The comprehensive and consistent implementation of GCG is anticipated to support the achievement of becoming a Good Corporate Citizen, where GCG is embedded in the company's internal culture in the future.

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

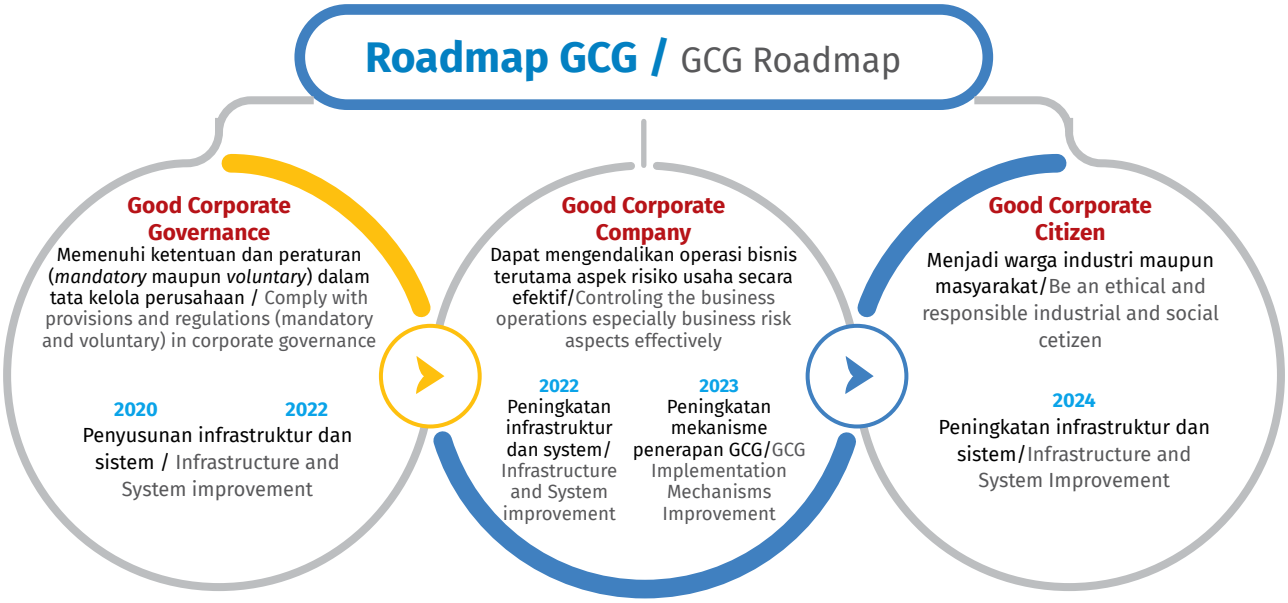

MEKANISME PELAKSANAAN GCG

Mekanisme Tata Kelola merupakan proses penerapan prinsip *Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan. Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam *soft structure* berupa kebijakan dan prosedur operasional yang terkait GCG senantiasa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dan selalu di-*review* secara periodik untuk kemudian dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan masing-masing level karyawan untuk dijadikan acuan/ landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan.

GCG IMPLEMENTATION MECHANISM

The Governance Mechanism is the process of applying Corporate Governance principles supported by adequate structure and infrastructure. The company's commitment to Good Corporate Governance (GCG) is reflected in the soft structure, which includes policies and operational procedures related to GCG. These are consistently applied in daily activities and periodically reviewed. The updated policies and procedures are then communicated to all elements and levels of employees to serve as a reference and foundation for applying GCG principles within the company. This ensures outcomes that meet the expectations of the company's stakeholders.

MEKANISME PELAKSANAAN GCG

Mekanisme Tata Kelola merupakan proses penerapan prinsip *Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan. Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam *soft structure* berupa kebijakan dan prosedur operasional yang terkait GCG senantiasa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dan selalu di-*review* secara periodik untuk kemudian dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan masing-masing level karyawan untuk dijadikan acuan/ landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan.

GCG IMPLEMENTATION MECHANISM

The Governance Mechanism is the process of applying Corporate Governance principles supported by adequate structure and infrastructure. The company's commitment to Good Corporate Governance (GCG) is reflected in the soft structure, which includes policies and operational procedures related to GCG. These are consistently applied in daily activities and periodically reviewed. The updated policies and procedures are then communicated to all elements and levels of employees to serve as a reference and foundation for applying GCG principles within the company. This ensures outcomes that meet the expectations of the company's stakeholders.

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan | **Good Corporate Governance Mechanism**

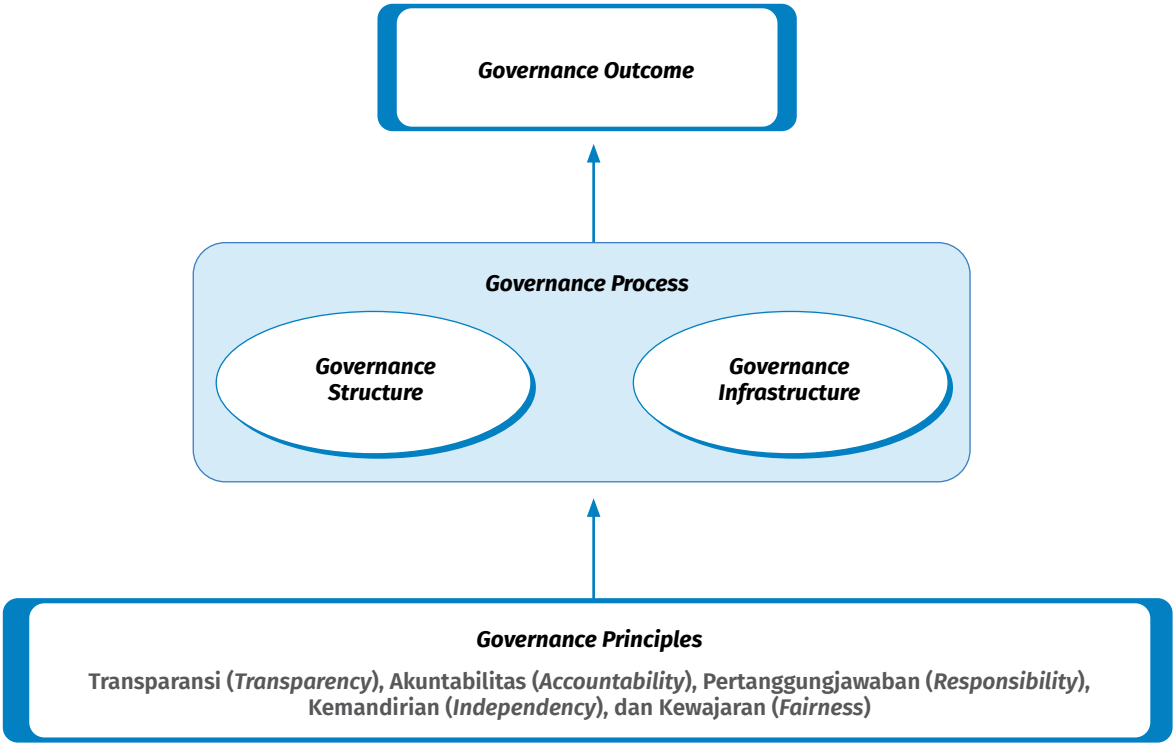

STRUKTUR ORGAN GCG PERUSAHAAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG, PELNI telah melengkapi Struktur Tata Kelola dengan membentuk unsur-unsur pendukung yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang secara individu maupun kolektif dan berperan penting terhadap kelancaran pelaksanaan GCG di Perseroan.

Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perseroan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG.

Sesuai Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, struktur organ tata kelola perusahaan PELNI terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ tersebut disebut sebagai organ utama karena menjalankan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG.

CORPORATE GCG STRUCTURE

To support the effective implementation of Good Corporate Governance (GCG), PELNI has established a governance structure with supporting elements that have individual and collective duties, responsibilities, and authorities, playing a crucial role in the smooth implementation of GCG in the company.

The Governance Structure consists of organs or instruments established either to comply with prevailing laws and regulations or to meet internal needs to enhance GCG implementation.

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the company's Articles of Association, PELNI's corporate governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. These three organs are referred to as the main organs because they play key roles in the successful implementation of GCG.

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Sementara itu, Organ Pendukung Perseroan merupakan Organ Perseroan yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Organ Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Sekretariat Dewan Komisaris. Sedangkan Organ Pendukung Direksi terdiri dari Divisi Kesekretariatan Perusahaan selaku pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern yang berada di bawah wewenang Direktorat Utama, serta Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang berada di bawah wewenang Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. Berikut adalah Struktur GCG PT PELNI (Persero):

Meanwhile, the Supporting Organs of the Company assist the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties and obligations. The Supporting Organs of the Board of Commissioners include the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee, and the Secretariat of the Board of Commissioners. The Supporting Organs of the Board of Directors include the Corporate Secretariat Division, which performs the function of the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit under the authority of the Chief Executive Officer, and the Risk Management and Compliance Division under the authority of the Finance and Risk Management Directorate. The following is the GCG Structure of PT PELNI (Persero):

Struktur GCG PT PELNI (Persero)
Corporate Governance Structure of PT PELNI (Persero)

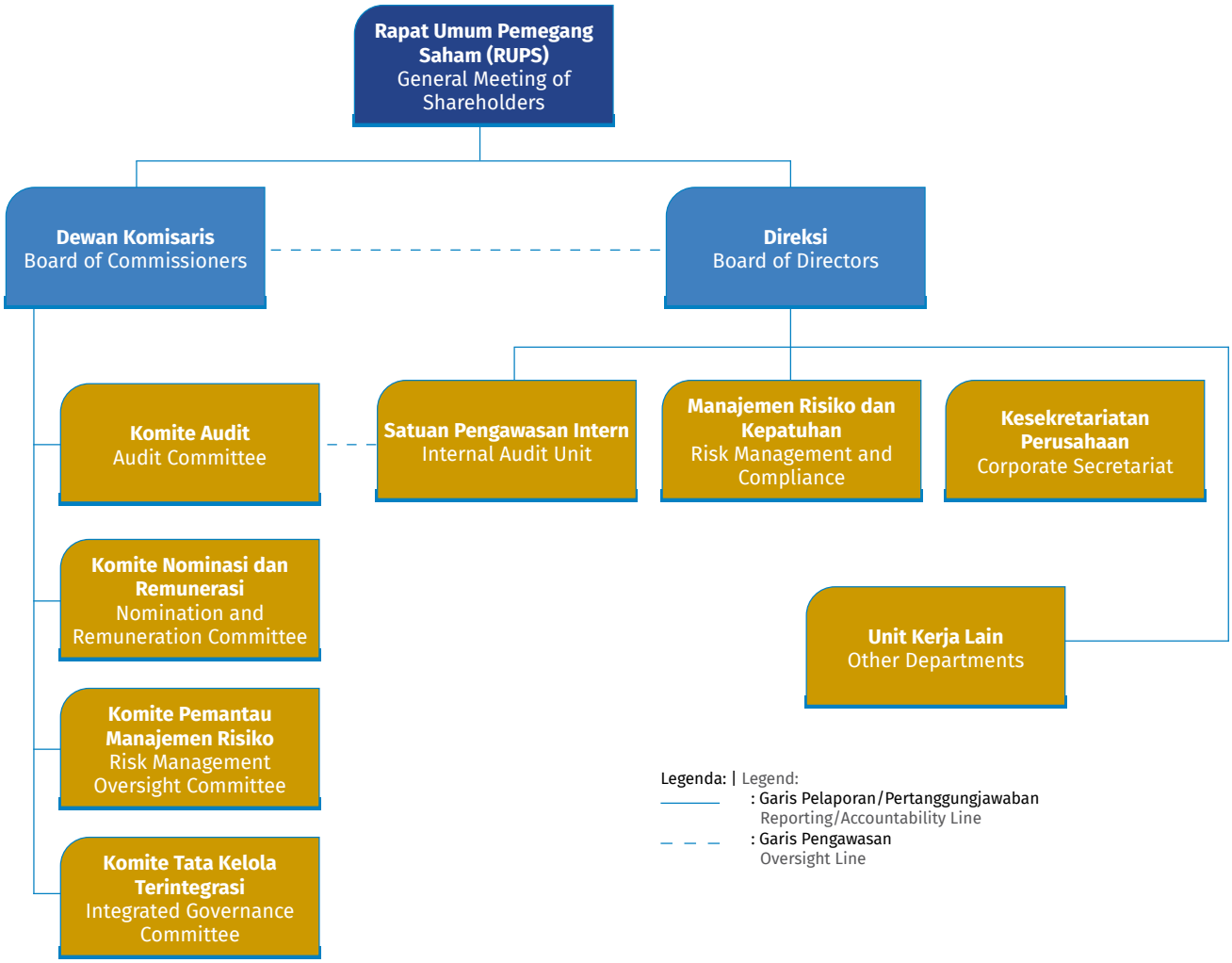

SOFT STRUCTURE GCG PERUSAHAAN

Dalam mendukung penerapan GCG di Perseroan, PELNI telah memiliki *Governance Soft Structure* yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, agar senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun *Governance Soft Structure* yang dimiliki PELNI, sebagai berikut :

1. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)*;
2. Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct);*

COMPANY GCG SOFT STRUCTURE

To support the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the company, PELNI has established a Governance Soft Structure that serves as a guideline for conducting the company's operational activities, ensuring they are always based on the principles of good corporate governance. The Governance Soft Structure at PELNI includes the following:

1. General Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)
2. Code of Conduct and Ethics

KOMITMEN PENERAPAN GCG
COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

3. Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
5. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
6. Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
7. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan di Lingkungan PT PELNI (Persero);
8. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan PT PELNI (Persero);
9. Pedoman Sistem Pengendalian Intern PT PELNI (Persero);
10. Pedoman dan Sistem Manajemen Risiko PT PELNI (Persero);
11. Tata Kelola Teknologi Informasi PT PELNI (Persero);
12. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PELNI (Persero);
13. Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 PT PELNI (Persero);

3. Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners
4. Guidelines for Gratification Control
5. Guidelines for the Whistleblowing System for Handling Alleged Violations
6. Guidelines for the Gratification Control Unit (UPG)
7. Guidelines for Reporting Wealth of Company Officials within PT PELNI (Persero)
8. Guidelines for the Anti-Bribery Management System (SMAP) within PT PELNI (Persero)
9. Guidelines for the Internal Control System of PT PELNI (Persero)
10. Guidelines and Risk Management System of PT PELNI (Persero)
11. Information Technology Governance of PT PELNI (Persero)
12. Guidelines for Procurement of Goods/Services of PT PELNI (Persero)
13. Risk Management Guidelines Based on ISO 31000:2018 of PT PELNI (Persero)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski demikian, RUPS tidak dapat mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan atau pengurusan Perseroan dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan di dalam RUPS senantiasa dilakukan secara wajar dan transparan, serta didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is the highest governing body of the Company, holding all authority not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners. However, the GMS cannot interfere with the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors in managing the Company's operations without diminishing the GMS's authority as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Decisions within the GMS are always made fairly and transparently, based on the long-term interests of the Company.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan saat ini, pemegang saham utama dan pengendali dari PT PELNI (Persero) adalah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan jumlah kepemilikan saham 100% atau kepemilikan penuh.

SHAREHOLDER INFORMATION

As of now, the principal and controlling shareholder of PT PELNI (Persero) is the Government of Indonesia, through the Ministry of State-Owned Enterprises, holding 100% of the shares or full ownership.

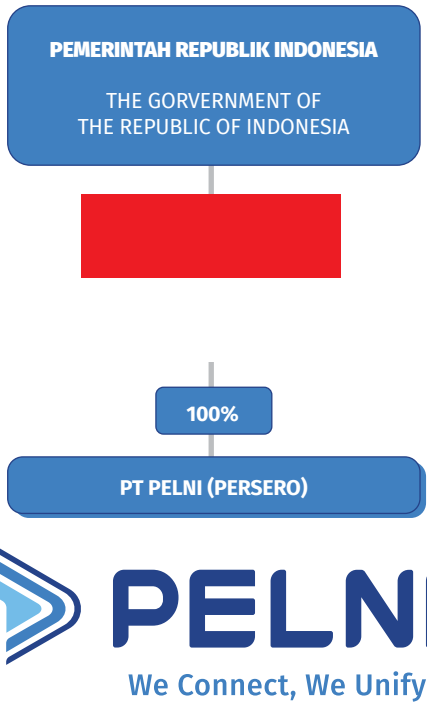

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HAK PEMEGANG SAHAM

1. PT PELNI (Persero) melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham;
2. PT PELNI (Persero) memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas;
3. Hak pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
   a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
   b. Memperoleh informasi material mengenai PT PELNI (Persero), secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
   c. Menerima pembagian dari keuntungan PT PELNI (Persero) yang diperuntukkan bagi pemegang saham bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
   d. Hak semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham untuk diperlakukan setara yang didukung aturan dan prosedur PT PELNI (Persero), atau hak untuk menerima pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya;
   e. PT PELNI (Persero) memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor;
   f. PT PELNI (Persero) memastikan bahwa kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berlaku bagi entitas anak dan entitas pengendali;
   g. PT PELNI (Persero) memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penggabungan, pengambilalihan, peleburan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan transaksi luar biasa yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar serta melindungi hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya;dan
   h. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hak dimiliki pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham.

SHAREHOLDER RIGHTS

1. Protection and Facilitation of Rights: PT PELNI (Persero) protects and facilitates the exercise of shareholder rights.
2. Fair Treatment: PT PELNI (Persero) ensures fair treatment for all shareholders, including minority shareholders.
3. Specific Rights:
   a. Attendance and Voting: Shareholders can attend and vote at a General Meeting of Shareholders (GMS), with each share granting one vote.
   b. Information Access: Shareholders are entitled to receive timely, accurate, and regular material information about PT PELNI (Persero).
   c. Profit Distribution: Shareholders are entitled to dividends and the remaining assets from liquidation proportional to their shareholding.
   d. Equal Treatment: All shareholders of the same series and class of shares are treated equally, supported by PT PELNI (Persero)'s rules and procedures, which include the disclosure of rules and procedures, as well as the disclosure of capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control disproportionately to their share ownership.
   e. Communication Policy: PT PELNI (Persero) has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.
   f. GCG Policies for Subsidiaries: PT PELNI (Persero) ensures that Good Corporate Governance (GCG) policies apply to its subsidiaries and controlled entities.
   g. Rules for Significant Transactions: PT PELNI (Persero) has rules and procedures for mergers, acquisitions, consolidations, splits, dissolutions, liquidations, and significant extraordinary transactions to ensure they are conducted transparently and fairly, protecting the rights of all shareholders according to their class.
   h. Other Rights: Shareholders have other rights as specified in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
4. Recorded Shareholders: Rights are held by shareholders whose names are recorded in the shareholder register.

5. Hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.
6. Pemegang saham melalui RUPS/Menteri harus memastikan perusahaan dijalankan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

WEWENANG PEMEGANG SAHAM

RUPS adalah organ Persero yang memegang wewenang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatuhan (*Fit And Proper Test*).
2. Mengambil keputusan mengenai:
   a. Perubahan jumlah modal.
   b. Perubahan Anggaran Dasar.
   c. Rencana penggunaan laba.
   d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Perusahaan.
   e. Investasi dan pembiayaan jangka Panjang.
   f. Kerjasama Perusahaan.
   g. Pembentukan Anak Perusahaan atau penyertaan.
   h. Pengalihan aktiva.
3. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi apabila RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
4. Menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Menunjuk dan menetapkan Auditor Eksternal Perusahaan dari calon yang diajukan Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit.
6. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) beserta perubahannya.
7. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.
8. Menetapkan aturan perangkapan jabatan Dewan Komisaris bagi anggota Komisaris.
9. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.

5. Legal Consistency: Shareholder rights as mentioned in points a and c apply as long as they are not otherwise regulated by laws governing limited liability companies.
6. GMS/MoSOE Responsibilities: Shareholders, through the GMS/Minister of State-Owned Enterprises, must ensure the company operates based on Good Corporate Governance principles.

SHAREHOLDER AUTHORITIES

The General Meeting of Shareholders (RUPS) is the highest authority within PT PELNI (Persero), holding powers not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners.

1. Appointment and Dismissal: Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners through a Fit and Proper Test mechanism.
2. Decision-Making:
   a. Change in capital amount.
   b. Amendments to the Articles of Association.
   c. Profit utilization plans.
   d. Mergers, consolidations, acquisitions, splits, and dissolution of the Company.
   e. Long-term investments and financing.
   f. Company partnerships.
   g. Formation of subsidiaries or equity participation.
   h. Transfer of assets.
3. Delegation of Duties: Establish the division of tasks and management authority among the members of the Board of Directors if not determined by the RUPS.
4. Compensation: Determine the remuneration and type of income for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. External Auditor: Appoint and determine the Company's External Auditor from candidates proposed by the Board of Commissioners based on the Audit Committee's recommendations.
6. Corporate Plans: Approve the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Corporate Budget and Work Plan (RKAP) and their amendments.
7. Corporate Actions: Approve corporate actions that require RUPS approval/decision.
8. Concurrent Positions: Establish rules for concurrent positions of the Board of Commissioners for its members.
9. Independent Commissioners: The Articles of Association may specify one or more Independent Commissioners and one Commissioner Representative.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

10. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi.

11. Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual.

12. Selain ditandatangani oleh Direksi, Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial, ditandatangani juga oleh Dewan Komisaris dan RUPS/Menteri.
13. RUPS/Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri untuk masing-masing BUMN yang berada di bawah pembinaannya guna menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial.
14. Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara individual ditandatangani oleh anggota Direksi dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama.
15. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
16. Dewan Komisaris perusahaan melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar:
    a. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris;
    b. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
    c. Menetapkan Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;
    d. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS;
    e. Menetapkan penggunaan laba bersih;
    f. Pengumuman neraca dan laporan laba rugi dilakukan paling lambat 7 hari setelah mendapat Pengesahan RUPS.

10. Performance Reporting: The Board of Directors prepares and submits performance reports to the Board of Commissioners based on the collective targets of the Board of Directors.
11. Annual Management Contract: The Board of Directors must sign the Annual Management Contract, which includes collective and individual Key Performance Indicators (KPIs).
12. Signatories of Management Contract: The Annual Management Contract signed by the Board of Directors also requires signatures from the Board of Commissioners and RUPS/Minister.
13. Substitution Authority: The RUPS/Minister may delegate authority with substitution rights to the Deputy Minister for each state-owned enterprise (BUMN) under their supervision to sign the Annual Management Contract with collective KPIs.
14. Individual Management Contract: The Annual Management Contract with individual KPIs is signed by Board members with the President Director and Chief Commissioner.
15. Business Decisions: Provide decisions necessary to safeguard the Company's business interests in the short and long term in accordance with laws and/or the Articles of Association.
16. Sub-Entity Oversight: The Board of Commissioners evaluates the appointment process of the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures and provides written approval (agree or disagree) on these appointments. RUPS also approves the Annual Report, including financial statements and the Board of Commissioners' supervisory duties report as required by laws and/or the Articles of Association:
    a. Evaluate the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
    b. Determine salaries/honorariums, allowances, facilities, and performance incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
    c. Appoint an External Auditor to audit the Company's financial statements.
    d. Approve the Annual Report, including financial statements and the Board of Commissioners' supervisory report.
    e. Determine the use of net profit.
    f. Announce the balance sheet and income statement no later than 7 days after RUPS approval.

17. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;
18. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;

    a. Memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
    b. Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan;
    c. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi;

    d. Merespon informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

PERLAKUAN SETARA PARA PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (*equal treatment*).

AKUNTABILITAS PEMEGANG SAHAM

1. Perseroan melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Perseroan memastikan bahwa sesuai dengan aturan perundangan berlaku, pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.
2. Pemegang saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Kegiatan operasional perusahaan menjadi tanggung jawab Direksi, tidak dicampuri pemegang saham.

JENIS RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari:

    a. RUPS Tahunan
    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi:
        i. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan tahunan;

17. Fair and Transparent Decision-Making: Make decisions through an open, fair, and accountable process.
18. Good Corporate Governance: Implement Good Corporate Governance in accordance with their authority and responsibility:
    a. Provide guidance on the implementation of Good Corporate Governance to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
    b. Guide the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies.
    c. Refrain from interfering with the Company's operational activities, which are the responsibility of the Board of Directors.
    d. Respond to information received from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners regarding significant performance declines and Company losses.

EQUAL TREATMENT OF SHAREHOLDERS

Shareholders holding shares of the same classification must be treated equally.

SHAREHOLDER ACCOUNTABILITY

1. The Company protects and facilitates the exercise of shareholder rights and ensures fair treatment of all shareholders, including minority shareholders. The Company ensures that, in accordance with applicable regulations, shareholders have the opportunity to receive effective remedies for any violations of their rights.

2. Shareholders must adhere to Good Corporate Governance principles according to their authority and responsibilities.

3. The operational activities of the company are the responsibility of the Board of Directors and should not be interfered with by shareholders.

TYPES OF GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) consists of:

    a. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
    The Annual General Meeting of Shareholders is held each year and includes:
        i. A General Meeting of Shareholders for the approval of the annual report.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ii. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

RUPS/Menteri memberikan persetujuan laporan tahunan telah diaudit (*audited*) termasuk pengesahan atas laporan keuangan tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:

i. Laporan Tahunan.
ii. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.
iii. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.

RUPS memberikan pengesahan atas rancangan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

i. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi laporan keuangan.
ii. Hal-hal yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu, jika dianggap perlu, berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS Luar Biasa dapat dilalukan secara *on paper* (sirkuler), yaitu pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara fisik.

Tempat dan Pemanggilan RUPS, Ketua dan Berita Acara RUPS, Korum, Hak Suara dan Keputusan diatur dalam Anggaran Dasar.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023

Selama tahun 2023, PT PELNI (Persero) menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebanyak 1 (satu) kali dan RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan sebanyak 1 (satu) kali.

RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.

ii. General Meeting of Shareholders for the approval of the Company's Work Plan and Budget.

The GMS/Minister provides approval for the audited annual report, including ratification of the annual financial statements, no later than 6 (six) months after the end of the relevant fiscal year. During this meeting, the Board of Directors presents:

i. The Annual Report.
ii. Proposals for the use of the Company's Net Profit.
iii. Other matters requiring GMS approval for the benefit of the Company.

The GMS provides ratification of the draft Company Work Plan and Budget (RKAP) no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year, during which the Board of Directors presents:

i. The draft Company Work Plan and Budget, including financial projections.
ii. Matters requiring GMS approval for the benefit of the Company that are not included in the draft Company Work Plan and Budget.

2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

The Extraordinary General Meeting of Shareholders can be held at any time, if deemed necessary, based on the needs of the Company. The EGMS can be conducted in writing (circular resolution), where decisions are made by the Shareholders without a physical meeting.

The location and convening of the GMS, the Chairperson and Minutes of the GMS, quorum requirements, voting rights, and decisions are regulated in the Articles of Association.

IMPLEMENTATION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

During 2023, PT PELNI (Persero) held one Annual General Meeting of Shareholders to approve the Company's Work Plan and Budget and one Annual General Meeting of Shareholders to approve the Annual Report.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Annual General Meeting of Shareholders for the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023
Stages of Organizing the AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget

Pemanggilan RUPS AGMS Invitation	Pemanggilan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT PELNI (Persero) disampaikan melalui Surat Undangan No. 01.27/01/S-B/DUA/2023 tanggal 15 Januari 2023 perihal Undangan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 PT PELNI (Persero). The invitation for the AGMS to approve the 2023 Work Plan and Budget was sent to the Minister of State-Owned Enterprises as the Shareholder of PT PELNI (Persero) through Invitation Letter No. 01.27/01/S-B/DUA/2023 dated January 15, 2023, regarding the Invitation to the AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget of PT PELNI (Persero).
Pelaksanaan RUPS AGMS Implementation	1. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 pukul 16.42–17.32 WIB dilaksanakan di Hotel Aryaduta. 2. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dipimpin oleh Ibu Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham 1. The AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget was held on Monday, January 30, 2023, from 16:42 to 17:32 WIB at the Aryaduta Hotel. 2. The AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget was chaired by Mrs. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of State-Owned Enterprises), representing the Government as the Shareholder.
Risalah RUPS Minutes of the AGMS	Risalah RUPS RKAP Tahun 2023 diaktakan dalam Akta No. 39 tanggal 30 Januari 2023 mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Yatmini, S.H. di Jakarta. The minutes of the AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP) were notarized in Deed No. 39 dated January 30, 2023, concerning the Approval of the 2023 Work Plan and Budget, prepared before Notary Emi Yatmini, S.H., in Jakarta.

Peserta RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023
Participants of the AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP)

Pemegang Saham Shareholders	Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN), sebagaimana Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-28/MBU/01/2023 tanggal 27 Januari 2023. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of SOEs), as per the Power of Attorney from the Minister of SOEs Number: SKU-28/MBU/01/2023 dated January 27, 2023.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir: 1. Ali Masykur Musa (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2. Wahju Adji Herpriarsono (Komisaris) 3. Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) 4. Kristia Budiyarto (Komisaris Independen) 5. Faturohman (Komisaris) Tidak Hadir / Absent: Nihil / None / Nil Present: 1. Ali Masykur Musa (President Commissioner and Independent Commissioner) 2. Wahju Adji Herpriarsono (Commissioner) 3. Eddy Susanto Soepadmo (Commissioner) 4. Kristia Budiyarto (Independent Commissioner) 5. Faturohman (Commissioner) Absent: None
Direksi Directors	Hadir: 1. Tri Andayani (Direktur Utama) 2. Rainoc (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum) 3. Yahya Kuncoro (Direktur Usaha Angkutan Penumpang) 4. Robert MP Sinaga (Direktur Armada dan Teknik) 5. Yossianis Marciano (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut) 6. Anik Hidayati (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) Tidak Hadir / Absent: Nihil / None / Nil Present: 1. Tri Andayani (President Director) 2. Rainoc (Director of Human Resources and General Affairs) 3. Yahya Kuncoro (Director of Passenger Transport Business) 4. Robert MP Sinaga (Director of Fleet and Technical) 5. Yossianis Marciano (Director of Freight and Sea Toll Business) 6. Anik Hidayati (Director of Finance and Risk Management) Absent: None

KUORUM KEHADIRAN RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2023

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 telah dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan Pemegang Saham. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELIBATAN PIHAK EKSTERNAL DALAM RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2023

Dalam penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023, PT PELNI (Persero) melibatkan pihak eksternal independen,

QUORUM ATTENDANCE OF THE 2023 RKAP APPROVAL GMS

The 2023 RKAP Approval General Meeting of Shareholders (GMS) was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the representative of the Shareholder. The quorum for attendance and decisions for the 2023 RKAP Approval GMS was met as required by the articles of association and the prevailing laws and regulations.

INVOLVEMENT OF EXTERNAL PARTIES IN THE 2023 RKAP APPROVAL GMS

In the organization of the 2023 RKAP Approval GMS, PT PELNI (Persero) involved an independent external party, Notary Emi

yaitu Notaris Emi Yatmini, S.H. selaku pihak yang menyusun notulensi rapat dan mengesahkan akta RUPS.

Yatmini, S.H., who was responsible for recording the minutes of the meeting and certifying the GMS deed.

Keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 (General Meeting of Shareholders Decision on the Ratification of Company Work Plan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan - RKAP) for the year 2023)

MATA ACARA RAPAT PERTAMA / First Meeting Agenda

Agenda	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 Termasuk di dalamnya Penetapan Klasifikasi Risiko Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023 Ratification of the company work plan and budget (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan – RKAP) for the year 2023 which includes determination of the risk classification of state-owned enterprises (BUMN), and the Board of Commissioner' work plan and budget for the year 2023.
Hasil Keputusan *Decision Results*	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk didalamnya Penetapan Klasifikasi Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) pada Kuadran Sistemik B serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut: Ratifying the company work plan and budget (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan – RKAP) for the year 2023 including the determination of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Risk Classification in Systemic Quadrant B, as well as work plans and budget of the Board of Commissioners, with the following key points:

Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar)
Key of Financial Reports Points (in Billion Rupiah)

Uraian Description	**RKAP 2023 Rp Miliar** RKAP 2023 IDR Billion
Pendapatan (Revenue/Income)	6.480,64
Laba Usaha (Operating Profit)	223,09
EBITDA	657,02
Laba Bersih (Net profit)	190,32
Total Aset (Total Assets)	8.173,69
Ekuitas (Equity)	6.778,37
Interest Bearing Debt	172,85
Net Operating Cash Flow	218,51
Total Investasi *CAPEX* (Total CAPEX Investment)	1.075,92

MATA ACARA RAPAT KEDUA / Second Meeting Agenda

Agenda	Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023. Ratification of the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hasil Keputusan / *Decision Results*	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) , dengan Total Pendanaan Non-PUMK sebesar Rp25.652 Juta dan Dana PUMK sebesar Rp1.650 Juta.. Ratifying the 2023 Work Plan and Budget for the Social and Envirsonmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with total Non-PUMK Funding of IDR 25,652 million and PUMK Fund of IDR 1,650 million.
MATA ACARA RAPAT KETIGA / Third Meeting Agenda	
Agenda	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara Kolegial Tahun 2023. Establish an Annual Management Contract containing Key Performance Indicator (KPI) targets between the Directors collegiately in 2023, as attached which is an inseparable part of this Decree.

Hasil Keputusan
Decision Results

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicator* (KPI) antara Direksi secara kolegial Tahun 2023, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

No	KPI	ESG	PS 88	Satuan / Unit	Target RKAP / RKAP Target	Polaritas / Polarity	Bobot / Weight	
							Sub	Total
A. Nilai ekonomi dan sosial untuk indonesia / Economic and Social Values for Indonesia								35
Finansial / Financial								9
1	*Profitable Ratio*							
	a. EBITDA	C	-	Rp Miliar Rp Billion	657,024	*Maximize*	3	6
	b. ROIC-WACC	C	-	%	-1,80	*Maximize*	3	
2	Rasio *Interest Bearing Debt* Interest Ratio Bearing Debt							3
	Interest Bearing Debt to EBITDA	G		Kali Times	0,26	*Minimize*	1,5	
	Interest Bearing Debt to Invested Capital	G	-	%	2,49	*Minimize*	1,5	
Operasional / Operational							18	
3	*Vessel Speed* (*On Time Performance*)	C	-	%	90,00	*Maximize*	6	
4	*Average Utilization of Vessel* (*Pax Factor*)	C	-	%	55,00	*Maximize*	6	
5	*Compliance to Safety*	S	-	%	80,00	*Maximize*	6	
Sosial / Social							8	
6	Pemenuhan Jumlah *Voyage* Kapal Penugasan Quantity Fulfillment of Voyage Ship Assignments	S	-	%	80,00	*Maximize*	8	
B. Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation								17
7	Kontribusi Pendapatan Non Penugasa Non-Assignment Income Contribution	C	-	%	45,00	*Maximize*	9	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	KPI	ESG	PS 88	Satuan / Unit	Target RKAP / RKAP Target	Polaritas / Polarity	Bobot / Weight	
							Sub	Total
8	Kerjasama Angkutan Barang untuk Sinergi Klaster BUMN Goods Transport Cooperation for BUMN Cluster Strategy	C	-	Instansi Institution	3	*Maximize*	8	
C. Kepemimpinan Teknologi / Technological Leadership								16
9	Implementasi *Integrated Commercial System* Implementation of Integrated Commercial Systems	C	-	%	80,00	*Maximize*	8	
10	Implementasi Inovasi Teknologi pada Alat Produksi Implementation of Technological Innovation in Production	C	-	%	80,00	*Maximize*	8	
D. Peningkatan Investasi / Increased Investment								
11	Implementasi Investasi Penggantian Suku Cadang Permesinan Utama Kapal Investment Implementation on Replacement of Ship Main Machinery Parts	C	-	%	80,00	*Maximize*	7	
12	Implementasi Infrastruktur Logistik Maritim Implementation of Maritime Logistic Infrastructure	C	-	%	80,00	*Maximize*	7	
E. Pengembangan Talenta / Talent Development								18
13	*Talent Management & Development*							

No	KPI	ESG	PS 88	Satuan / Unit	Target RKAP / RKAP Target	Polaritas / Polarity	Bobot / Weight	
							Sub	Total
	a. % Perempuan dalam Nominated Talent / % *(Percentage) of Talented Woman Nominee*	S	-	%	25,00	*Maximize*	4	8
	b. % Milenial dalam *Nominated Talent / % (Percentage) of Talented Millennial Nominees*	S	-	%	20,00	*Maximize*	4	
14	Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Roadmap Completion of Restructured Pension Funds Defined Benefit	G	-	%	100,00	*Maximize*	5	
15	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio	G	-	%	40,00	*Maximize*	5	
Total							100	100

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT / Fourth Meeting Agenda

Agenda	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris Tahun 2023. Determination of the Board of Commissioners' Annual Management Contract (Key Performance Indicator) for 2023.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris Tahun 2023, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Establish the Annual Management Contract (Key Performance Indicator) for the Board of Commissioners for 2023, as attached which is an inseparable part of this decision.

	No (1)	Aspek dan Parameter / Aspect & Parameter (2)	Periode / Period (3)	Satuan Output / Output Unit (4)	Skor / Score (5)	Rencana Output / Output Plan (6)
	Aspek Perencanaan / Planning Aspects					
	1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2024 Preparation for Board Commisionner' Work Plan and Budget, and Key Performance Indicator for the year 2024.	Tahunan / Annually	Dokumen / Documents	10	1
	Sub Total I				10	
	II. Aspek Pengawasan dan Nasihat / Supervision and Adivisory Aspects					
Hasil Keputusan Decision Results	1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2. Laporan Tahunan 3. Analisis Kinerja Triwulanan Provide response/recommendations to Shareholders regarding: 1. Company Work Plan & Budget 2. Annual Report 3. Quarterly Performance Analysis	Tahunan / Annually Tahunan, Triwulan / Annually, *Quarterly*	Surat / Letter Surat / Letter Surat / Letter	5 5 5	1 1 3
	2	Memberi nasihat kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris Provide advice to the Board of Directors in accordance with Board of Commisioners duities	Setahun / Annually	Surat/Risalah Letter / Pamphlet	10	12
	3	Rapat Dewan Komisaris 1. Jumlah Rapat 2. Kehadiran Rapat 3. Penyelesaian Risalah Rapat Board of Commisioners Meeting 1. Number of Meetings 2. Meeting Attendance 3. Completion of Meeting Minutes	Bulanan / Monthly Bulanan / Monthly Bulanan / Monthly	Kali / Times % Risalah / Minutes-of-meeting	10 5 5	12 100 12
	4	Rapat Komite Dewan Komisaris Board of Commisioners Committee Meeting	Tahunan / Annually	Risalah / Minutes-of-meeting	5	36

No (1)	Aspek dan Parameter / Aspect & Parameter (2)	Periode / Period (3)	Satuan Output / Output Unit (4)	Skor / Score (5)	Rencana Output / Output Plan (6)
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Working Visit	Tahunan	Kunjungan / Times of Visit	5	12
6	Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Realization of the Board of Commissioners' Work Plan	Tahunan	%	5	100
Sub Total II				60	
III. Aspek Pelaporan / Reporting Aspects					
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Realization of the Implementation of the Board of Commissioners' KPI	Triwulanan / Quarterly	Laporan / Report	5	3
2	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Board of Commissioners Supervision Report	Tahunan / Annually	Laporan / Report	10	1
Sub Total III				15	
IV. Aspek Dinamis / Dynamic Aspects					
1	Pengusulan Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham Proposition of a Public Accounting Firm to Shareholders	Tahunan / Annually	Surat / Letter	4	1
2	Peningkatan kompetensi melalui seminar, *workshop*, dll Increasing competency through seminars, workshops, etc	Tahunan / Annually	Kali / Times	4	6
3	Hasil *Assessment* GCG Dewan Komisaris (*Self-Assessment*/BPK) Results of the Board of Commissioners' GCG Assessment (Self-Assessment/BPK)	Tahunan / Annually	Surat / Letter	4	89
4	Tanggapan terhadap tindaklanjut temuan Auditor/SPI Response to follow-up on Auditor/SPI findings	Tahunan / Annually	Surat / Letter	3	1

Sub Total IV	**15**
Total (I+II+III+IV)	**100**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KELIMA / FIFTH MEETING AGENDA	
Agenda	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023 Determination of Operational Aspect Indicators for measuring Company Health Level in 2023
Hasil Keputusan *Decision Results*	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023, sebagai berikut: Determining Operational Aspect Indicators for measuring the Health Level of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2023, as follows: Indikator Aspek Operasional / Operational Aspect Indicator

No	**Indikator** / Indicator	**Satuan** / Unit	**Bobot** / Weight
Aspek Operasional / Operational Aspect			**35,00**
1	*Passenger Factor*	%	8,00
2	*Low Number of Breakdown*	%	5,00
3	*Commission Days*	Hari	9,00
4	*On Time Performance*	%	7,00
5	Efisiensi Pemakaian BBM / *Fuel Usage Efficiency*	%	6,00

MATA ACARA RAPAT KEENAM / SIXTH MEETING AGENDA	
Agenda	Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.
Hasil Keputusan *Decision Results*	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.

ARAHAN RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2023 DAN TINDAK LANJUTNYA

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

GMS DIRECTIONS FOR APPROVAL OF THE 2023 RKAP AND FOLLOW-UP

In implementing the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners and Directors are asked to pay attention to the following matters:

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya
GMS Directions for Approval of the 2023 RKAP and Follow-Up

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholders Instruction	TIndak Lanjut / Follow-up Actions
1	RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan tahun 2023. RKAP tersebut termasuk di dalamnya program Manajemen Risiko agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi pencapaiannya, serta dilakukan *cascading* ke seluruh jajaran perusahaan. The ratified RKAP is a guideline for the Board of Directors in carrying out business activities and a guideline for the Board of Commissioners in carrying out company supervision duties in 2023. The RKAP includes the Risk Management program so that it is broken down into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation of its achievements and is carried out cascading throughout the company.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
2	Berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP 2023 dan *Key Performance Indicators* (KPI(tahun 2023 dengan tetap melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Committed to achieving the 2023 RKAP targets and Key Performance Indicators (KPI) in 2023 while continuing to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).	Sudah ditindaklanjuti / Completed
3	Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Lainnya agar diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta lntegritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko. Directors' actions that require approval from the GMS in accordance with the Articles of Association and other regulations must be submitted separately, accompanied by at least a response from the Board of Commissioners, the Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies, and risk studies.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
4	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/ saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. The Board of Directors must follow up and completely resolve the findings, as well as suggestions and recommendations of auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2022 and in previous years. Follow-up actions to resolve the auditor's findings/suggestions should be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and reported in writing to Shareholders.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
5	Memastikan pemenuhan ketentuan terkait manajemen risiko pada Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/ MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko/RMI secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian BUMN. Untuk hasil penilaian tingkat risiko/RMI tahun 2022 agar disampaikan paling lambat pertengahan Triwulan III Tahun 2023. Ensure compliance with provisions related to risk management at the Company and its subsidiaries by referring to the provisions in the Minister of BUMN Regulation Number PER-5/ MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management/RMI on a regular basis and reporting the results to the Ministry of BUMN. The results of the 2022 risk level/RMI assessment must be submitted no later than the middle of Quarter III 2023.	Sudah ditindaklanjuti / Completed

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya
GMS Directions for Approval of the 2023 RKAP and Follow-Up

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholders Instruction	TIndak Lanjut / Follow-up Actions
6	Menyampaikan laporan manajemen risiko, tata Kelola, dan audit intern yang menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala triwulanan dan tahunan. Submitting risk management, governance and internal audit reports which are integrated into quarterly and annual periodic reports.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
7	Melakukan langkah-langkah efisiensi di segala bidang dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan sehingga tingkat realisasi biaya tidak lebih tinggi dari tingkat realisasi pendapatan. Carry out efficiency measures in all fields while maintaining productivity and service quality so that the level of realized costs is not higher than the level of realized income.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
8	Pelaksanaan investasi agar memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada rencananya (*cost & schedule*) serta dijaga supaya tidak terjadi *cost overrun*, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan targetnya. Investment implementation must pay attention to the priority scale, the company's financial capabilities and be guided by its plan (cost & schedule) and ensure that cost overruns do not occur, so that it can be completed according to the target.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
9	Direksi agar melaporkan realisasi program *blueprint* amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk Tahun 2023, serta menyusun dan melaksanakan strategi implementasinya pada tahun 2023. Apabila *blueprint* dimaksud belum disusun, Direksi diminta untuk memenuhinya pada tahun 2023 di mana dapat dilakukan melalui kolaborasi/ *benchmarking* dengan BUMN lain, sekaligus mengakselerasi implementasinya pada tahun 2023. The Board of Directors is required to report on the realization of the blueprint program mandated by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities for 2023, as well as to prepare and implement an implementation strategy in 2023. If the blueprint in question has not been prepared, the Board of Directors is asked to fulfill it in 2023 which can be done through collaboration /benchmarking with other BUMN, while accelerating its implementation in 2023.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
10	Direksi agar melengkapi Data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN pada portal *Human Capital* BUMN. Directors must complete data on BUMN Management, BUMN Subsidiaries and BUMN Consolidated Affiliate Companies on the BUMN Human Capital portal.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
11	Direksi agar meningkatkan pembinaan Anak Perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan senantiasa tumbuh dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan lnduk. The Board of Directors should improve the development of subsidiaries so that their performance is expected to continue to grow well and can make a positive contribution to the Parent Company.	Sudah ditindaklanjuti / Completed

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya
GMS Directions for Approval of the 2023 RKAP and Follow-Up

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholders Instruction	TIndak Lanjut / Follow-up Actions
12	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya minggu ke-1 April 2023 dan melakukan *Agreed Upon Procedures* (AUP) dan Jasa Reviu Penilaian *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen atas paket informasi laporan audit dan selanjutnya menyampaikan beserta laporan audit paling lambat minggu ke-2 April 2023. Submit the Company's Annual Report including the 2022 Financial Year Financial Report which has been audited by the Public Accounting Firm no later than the 1st week of April 2023 and carry out an Agreed Upon Procedures (AUP) and Review Services for Management Key Performance Indicators (KPI) Evaluation on the audit report information package and then submit the audit report no later than the 1st week April 2, 2023.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
13	Mengimplementasikan hal-hal terkait aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), antara lain: *Implementing matters related to aspects of Social and Environmental Responsibility (TJSL), including:* a. Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS-2020/DSI.MBU.B/12/2022. a. Follow up and implement the recommendations for discussing the TJSL Work Plan and Budget with the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting Number: RIS-2020/DSI.MBU.B/12/2022. b. Memastikan bahwa TJSL telah menjadi *tools* bagi Direksi untuk memitigasi dampak risiko usaha Perusahaan dan menjamin *sustainability* Perusahaan. b. Ensure that TJSL has become a tool for the Board of Directors to mitigate the impact of the Company's business risks and ensure the Company's sustainability. c. Mengoptimalkan pelaksanaan penaggihan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta memberikan pembinaan terhadap UMK. c. Optimizing the implementation of collection for the Micro and Small Business (UMK) Funding program and providing guidance to MSEs. d. Menyusun program TJSL yang lebih kreatif dan berdampak lebih besar, untuk selanjutnya diukur kemanfaatnnya melalui *social return on investment.* d. Develop a TJSL program that is more creative and has a bigger impact, to then measure its benefits through social return on investment. e. Memprioritaskan program-program *creating shared values* sebagai program prioritas. e. Prioritize programs creating shared values as priority programs.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
14	Direksi agar menyusun dan menerapkan *Master Plan* Teknologi Informasi, melakukan Asesmen IT *Maturity Level,* Asesmen Transformasi Digital, dan berpartisipasi dalam *Program Digital Talent* BUMN dan melaporkan dalam laporan berkala triwulanan dan tahunan. The Board of Directors must prepare and implement an Information Technology Master Plan, carry out an IT Maturity Level Assessment, a Digital Transformation Assessment, and participate in the BUMN Digital Talent Program and report in regular quarterly and annual reports.	Sudah ditindaklanjuti / Completed

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya
GMS Directions for Approval of the 2023 RKAP and Follow-Up

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholders Instruction	TIndak Lanjut / Follow-up Actions
15	Melakukan Upaya penanganan permasalahan hukum dengan mengedepankan proses mediasi penyelesaian masalah hukum antar/terkait BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan yang terafiliasi, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan melalui Lembaga peradilan. Make efforts to handle legal problems by prioritizing the mediation process for resolving legal problems between/related to BUMN/BUMN subsidiaries/affiliated companies before the problems are resolved through the judiciary.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
16	Direksi agar menyusun *roadmap* penggunaan produk dalam Negeri (P3DN) dan membentuk Tim P3DN serta SPI BUMN melakukan *monitoring/review* atas pelaksanaan program tersebut dan melaporkannya dalam laporan berkala triwulanan dan tahunan. The Board of Directors should prepare a roadmap for the use of domestic products (P3DN) and form a P3DN Team and BUMN SPI to monitor/review the implementation of the program and report it in regular quarterly and annual reports.	Sudah ditindaklanjuti / Completed
17	Direksi agar melakukan evaluasi atas pengelolaan DPPK termasuk pengelolaan aset likuid dan non likuid DPPK serta menyusun *roadmap*/rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun bagi BUMN. The Board of Directors should evaluate the management of DPPK including the management of DPPK liquid and non-liquid assets as well as prepare a roadmap/plan for improvement/completion initiatives in accordance with statutory regulations in the field of pension funds for BUMN.	Sudah ditindaklanjuti / Completed

RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022
Annual GMS regarding Approval of the 2022 Financial Year Annual Report
Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
Stages of holding the Annual GMS for the 2022 Financial Year

Pemanggilan RUPS GMS Invitation	Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT PELNI (Persero) disampaikan melalui Surat Undangan Nomor 06.07/02/S-B/DU/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Undangan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT PELNI (Persero). The invitation for the 2022 Annual GMS to the Minister of BUMN as the Shareholder of PT PELNI (Persero) was conveyed via Invitation Letter Number 06.07/02/SB/DU/2023 dated 7 June 2023 regarding the Invitation to the GMS for the 2022 Financial Report of PT PELNI (Persero).
Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	1. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 pukul 10.07- 11.23 WIB di Auditorium Kantor Pusat PT PELNI (Persero) Lantai 2 Jalan Gajah Mada No.14-Jakarta. 1. The Annual GMS for the 2022 Fiscal Year will be held on Wednesday, June 21, 2023, at 10.07-11.23 WIB at the PT PELNI (Persero) Head Office Auditorium, Floor 2, Jalan Gajah Mada No.14-Jakarta. 2. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dipimpin oleh Ibu Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham. 2. The 2022 Annual GMS is chaired by Mrs. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Minsstry of BUMN) as the Government's representative as Shareholder.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Risalah RUPS Minutes of the AGMS	Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 diaktakan dalam Akta No. 32 tanggal 21 Juni 2023 mengenai Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Yatmini, S.H. di Jakarta. The minutes of the 2022 Annual GMS are notarized in Deed No. 32 dated 21 June 2023 concerning Ratification of the 2022 Fiscal Year Annual Report prepared before Notary Emi Yatmini, SH in Jakarta.

Peserta RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
Participants in the Annual GMS for Fiscal Year 2022

Pemegang Saham Shareholders	Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN), sebagaimana Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-107/MBU/06/2023 tanggal 19 Juni 2023.
Dewan Komisaris Board of Commissioner	**Hadir / Present:** 1. Ali Masykur Musa (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2. Wahju Adji Herpriarsono (Komisaris) 3. Raden Suhartono (Komisaris) 4. Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) 5. Kristia Budiyarto (Komisaris Independen) 6. Faturohman (Komisaris) **Tidak Hadir / Absent:** Nihil / None / Nil / *None / Nil*
Direksi Board of Directors	**Hadir / Present:** 1. Tri Andayani (Direktur Utama) 2. Rainoc (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum) 3. Yahya Kuncoro (Direktur Usaha Angkutan Penumpang) 4. Robert MP Sinaga (Direktur Armada dan Teknik) 5. Yossianis Marciano (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut) 6. Anik Hidayati (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) **Tidak Hadir / Absent:** Nihil / None / Nil / *None / Nil*

KUORUM KEHADIRAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan Pemegang Saham. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELIBATAN PIHAK EKSTERNAL DALAM RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, PT PELNI (Persero) melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Notaris Emi Yatmini, S.H sebagai penyusun notulensi rapat dan akta RUPS.

QUORUM FOR ATTENDANCE AT THE ANNUAL GMS FOR FISCAL YEAR 2022.

The Annual GMS for Fiscal Year 2022 was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors as well as representatives of Shareholders. The attendance quorum and decisions of the 2022 Annual GMS have been fulfilled as required in the articles of association and applicable laws and regulations.

INVOLVEMENT OF EXTERNAL PARTIES IN THE ANNUAL GMS FOR FISCAL YEAR 2022

In holding the Annual GMS for Fiscal Year 2022, PT PELNI (Persero) involved an independent external party, namely Notary Emi Yatmini, SH as the compiler of meeting minutes and GMS deeds.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

MATA ACARA RAPAT PERTAMA / FIRST MEETING AGENDA

Agenda Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the 2022 Financial Year as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year.
Hasil Keputusan Decision Result	1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor 00061/2.0999/AU.1/06/0139-2/1/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Approve the Annual Report for the Fiscal Year 2022, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022 and the Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the Fiscal Year 2022, as well as ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022, which ended on December 31, 2022. The financial statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as stated in their Report Number 00061/2.0999/AU.1/06/0139-2/1/IV/2023 dated April 13, 2023, with an opinion of "fair, in all material respects," with the following key points: a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ditutup dengan: a. Consolidated Statement of Financial Position The Consolidated Statement of Financial Position of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the year ended December 31, 2022, concluded with: • Total Aset sebesar Rp7.713.978.371.331 / Total Assets of IDR 7,713,978,371,331 • Total Liabilitas sebesar Rp1.028.153.820.099 / Total Liabilities of IDR 1,028,153,820,099 • Ekuitas Rp6.685.824.551.232 / Equity IDR 6,685,824. 551.232 b. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Laba Setelah Pajak Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp173.247.926.578. b. Consolidated Profit (Loss) Report Consolidated Profit After Tax of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the year ending 31 December 2022 amounted to IDR 173,247,926,578. 2. Memberikan penunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. 2. Grant full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all Members of the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for their supervisory actions undertaken during the Fiscal Year ended December 31, 2022, insofar as these actions are not criminal in nature and are reflected in the Company's report books.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KEDUA / SECOND MEETING AGENDA	
Agenda Agenda	Pengesahaan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 . *Ratification of the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year.*
Hasil Keputusan Decision Result	1. Mengesahkan Laporan Keuangan Program PUMK Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor 00052/2.0999/AU.1/06/0139-1/1/III/2023 tanggal 6 Maret 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Ratifying the PUMK Program Financial Report for the 2022 Financial Year ending on December 31, 2022 which is part of the Social and Environmental Responsibility Report which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as contained in Report Number 00052/2.0999/ AU.1/06/0139-1/1/III/2023 dated March 6 2022 with an opinion of "fair, in all material respects" with the following points: a. Laporan Posisi Keuangan Posisi Keuangan Program PUMK per 31 Desember 2022 ditutup dengan Jumlah Aset serta Kewajiban dan Aset Bersih sebesar Rp7.372.850.975. a. Financial Position Report of the PUMK Program as of 31 December 2022 closed with Total Assets and Liabilities and Net Assets of IDR 7,372,850,975. b. Efektivitas Penyaluran Dana Program PUMK Realisasi dana Program PUMK per 31 Desember 2022 ditutup dengan jumlah Dana Tersedia sebesar Rp1.656.944,035 dan jumlah Dana disalurkan sebesar Rp1.565.000.000, -. b. Effectiveness of Distribution of PUMK Program Funds Realization of PUMK Program funds as of 31 December 2022 closed with total available funds amounting to IDR 1,656,944,035 and total funds distributed amounting to IDR 1,565,000,000. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan-laporan tersebut. 2. Provide full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions in the Micro and Small Business Funding Program which has been carried out in the 2022 Fiscal Year throughout these actions. is not a criminal act and is reflected in these reports.

MATA ACARA RAPAT KETIGA / THIRD MEETING AGENDA	
Agenda Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year.
Hasil Keputusan Decision Result	Menerapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp173.247.926.578, - seluruhnya sebagai cadangan. Applying the use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year amounting to IDR 173,247,926,578, - entirely as reserves.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT / FOURTH MEETING AGENDA	
Agenda Agenda	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Determination of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for 2023 and Tantiem for the 2022 Financial Year for Directors and Board of Commissioners.
Hasil Keputusan Decision Result	Besaran Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022, akan ditetapkan secara tersendiri. The amount of Tantiem for the 2022 Financial Year, Salaries for Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with other Facilities and Allowances for 2022, will be determined separately.
MATA ACARA RAPAT KELIMA / FIFTH MEETING AGENDA	
Agenda Agenda	Penunjukan Akuntan Publik (KAP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023. Appointment of a Public Accountant (KAP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Report and the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year.
Hasil Keputusan Decision Result	1. Menetapkan KAP Djoko, Sidik, & Indra untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 1. Appoint KAP Djoko, Sidik, & Indra to conduct a general audit of the Company's consolidated financial report for the 2023 financial year and the Financial Report of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 financial year. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 2. Grant authority and power to the Board of Commissioners The Company to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statements for other periods in the 2023 Financial Year for the purposes and interests of the Company. 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, & Indra, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk tahun buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. 3. Grant delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, increase the scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm, as well as determine a replacement Public Accounting Firm in the case of the Djoko, Sidik, & Indra Public Accounting Firm, for any reason unable to complete the audit of the Company's Financial Report, Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other reports for the 2023 financial year, including determining fees for audit services and other requirements for the Substitute Public Accounting Firm.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KEENAM / SIXTH MEETING AGENDA	
Agenda Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Report on the Realization of Additional Use of State Capital Participation Funds
Hasil Keputusan Decision Result	Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015 untuk periode Tahun Buku 2022 dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dnegan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-2/MBU.03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Miliki Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudia hari. Receive the Realization Report on the Use of Additional State Capital Participation Funds (PMN) originating from the 2015 Fiscal Year APBN for the 2022 Financial Year period provided that all activities and use are in accordance with the PMN Joint Review and BUMN Ministerial Regulation Number: Per-2/MBU.03/ 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as long as no irregularities are found in the future.

ARAHAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 DAN TINDAK LANJUTNYA

Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

DIRECTIONS FOR THE 2022 ANNUAL GMS AND FOLLOW-UP ACTIONS

The Board of Commissioners and Directors are asked to pay attention to the following matters:

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Tindak Lanjutnya
Directions for the 2022 Annual GMS and Follow-up Actions

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Instructions	Tindak Lanjut / Follow-up Actions
1	Direksi agar mempertajam strategi perencanaan secara terukur dan melakukan inovasi untuk pengembangan bisnis komersil Perusahaan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap PSO dan subsidi. The Board of Directors should sharpen planning strategies in a measurable manner and innovate to develop the Company's commercial business, thereby reducing dependence on PSO and subsidies.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
2	Direksi terus melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelayanan perusahaan khususnya saat masa puncak liburan (*peak season*) dengan melakukan koordinasi bersama pihak/instansi terkait, sehingga ke depan peningkatan kualitas pelayanan terus semakin baik, termasuk kesiapan armada kapal dan aplikasi pemesanan tiket. The Board of Directors continues to carry out a comprehensive evaluation of the company's services, especially during the peak season, by coordinating with related parties/agencies, so that in the future the quality of service will continue to improve, including the readiness of the ship fleet and ticket booking applications.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
3	Direksi agar memastikan modifikasi armada kapal penumpang berjalan sesuai dengan target sehingga potensi pendapatan dapat dimaksimalkan. The Board of Directors must ensure that modifications to the passenger ship fleet are carried out according to targets so that potential income can be maximized.	Sudah ditindaklanjuti / Finished

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Tindak Lanjutnya
Directions for the 2022 Annual GMS and Follow-up Actions

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Instructions	Tindak Lanjut / Follow-up Actions
4	Direksi agar melaksanakan evaluasi dan mengkaji kembali terkait keberlangsungan usaha Hotel Bahtera Cipayung yang mengalami kerugian. The Board of Directors should carry out an evaluation and review the sustainability of the Bahtera Cipayung Hotel business which is experiencing losses.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
5	Direksi agar memperhatikan langkah-langkah efisiensi di segala bidang, terutama Biaya *Overhead* dan tetap menjaga produktivitas serta kualitas pelayanan. Directors must pay attention to efficiency measures in all areas, especially overhead costs and maintain productivity and service quality.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
6	Direksi agar memperhatikan penyerapan investasi mengingat capaian penyerapan investasi lebih rendah dibandingkan target agar berdampak terhadap peningkatan kapasitas operasional. The Board of Directors should pay attention to investment absorption considering that the achievement of investment absorption is lower than the target so that it has an impact on increasing operational capacity.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
7	Direksi agar segera merealisasikan rencana pengadaan 1 (satu) unit Kapal RoRo sebagai pemanfaatan sisa dana PMN TA 2015 dan melaporkan realisasi secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023. The Board of Directors should immediately realize the plan to procure 1 (one) unit of RoRo Ship to utilize the remaining PMN funds for FY 2015 and report the realization periodically in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
8	Direksi agar meningkatkan pembinaan Anak Perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan senantiasa meningkat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk. The Board of Directors should improve the development of subsidiaries so that their performance is expected to continue to improve and can make a positive contribution to the Parent Company.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
9	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Nomor: RSI-38/DSI/MBU.B/6/2023. The Board of Directors should follow up on matters that need attention in the Minutes of Meeting for Discussion of Financial Reports and Implementation of the TJSL Program of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number: RSI-38/DSI/MBU.B/6/2023.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
10	Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. The Board of Directors and Board of Commissioners need to ensure that every implementation of the Company's business activities is carried out by considering the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably, guided by the applicable rules and regulations.	Sudah ditindaklanjuti / Finished

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Tindak Lanjutnya
Directions for the 2022 Annual GMS and Follow-up Actions

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Instructions	Tindak Lanjut / Follow-up Actions
11	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan selesai ditindak lanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-temuan dimaksud agar dapat dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham. The Board of Directors must follow up and complete thoroughly any findings, notes and suggestions/recommendations from external auditors (Public Accounting Firm/KAP, Financial and Development Supervisory Agency/BPKP, and the Indonesian Financial Audit Agency/BPK-RI including other authorized supervisory agencies) as well as the Company's internal auditors whose follow-up has not been declared complete. The progress of the follow-up to the completion of the findings in question can be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and submitted in writing periodically to Shareholders.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
12	Direksi agar senantiasa menjaga konsistensi dalam melakukan *monitoring* dan *updating* data pada Portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal *Human Capital* (HC), Portal TJSL, dan Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan. The Board of Directors must always maintain consistency in monitoring and updating data on the BUMN Portal, namely the Silaba Portal, Human Capital (HC) Portal, TJSL Portal and Public Portal. The progress of updating data in the portal so that it is reported in quarterly management reports and annual reports.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
13	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor 58/DK/V-2023 tanggal 10 Mei 2023. The Board of Directors should follow up on matters recommended by the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in accordance with the letter submitted Number 58/DK/V-2023 dated 10 May 2023.	Sudah ditindaklanjuti / Finished
14	Laporan Keuangan, Laporan Keuangan PUMK, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra serta tanggapan Dewan Komisaris baik yang dibacakan dalam rapat ini maupun yang disampaikan tertulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS. Financial Reports, PUMK Financial Reports, Performance Evaluation Reports, Compliance Reports with Legislation, and Internal Control which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as well as the Board of Commissioners' responses both read at this meeting and submitted in writing is an inseparable part of the Minutes of the GMS.	Sudah ditindaklanjuti / Finished

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PELAKSANAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Selama tahun 2022, PT PELNI (Persero) menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebanyak 1 (satu) kali dan RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan sebanyak 1 (satu) kali.

IMPLEMENTATION OF THE PREVIOUS YEAR'S GMS

In 2022, PT PELNI (Persero) held an Annual GMS to approve the Company's Work Plan and Budget 1 (one) time and an Annual GMS to approve the Annual Report 1 (one) time.

RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022.

ANNUAL GMS

Annual GMS regarding Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022
Stages of holding the 2022 RKAP RKAP ratification GMS

Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT PELNI (Persero) disampaikan melalui Surat Undangan No. 01.26/01/S-B/090/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Undangan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 PT PELNI (Persero). The invitation for the GMS to ratify the 2022 RKAP to the Minister of BUMN as the Shareholder of PT PELNI (Persero) was conveyed through Invitation Letter No. 01.26/01/SB/090/2022 dated January 6, 2022, concerning Invitation to the GMS Ratifying the 2022 RKAP of PT PELNI (Persero)
Pelaksanaan RUPS	1. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 pukul 13.32 – 14.29 WIB secara Virtual *Meeting* dengan metode Video Konferensi melalui Aplikasi Zoom. 1. The 2022 RKAP Ratification GMS was held on Thursday, January 27, 2022, at 13.32 – 14.29 WIB in a virtual meeting using the video conference method via the Zoom application. 2. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dipimpin oleh Ibu Desty Arlaini (Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik) selaku Kuasa Pemegang Saham. 2. The 2022 RKAP Ratification GMS was chaired by Mrs. Desty Arlaini (Plt. Assistant Deputy for Logistics Services) as Shareholder Proxy.
Risalah RUPS	Risalah RUPS RKAP Tahun 2022 diaktakan dalam Akta No. Akta Nomor 60, Tanggal 27 Januari 2022 dibuat di hadapan Notaris Notaris: Emmy Yatmini, S.H., di Jakarta The Minutes of the General Meeting of Shareholders for the 2022 Annual Work Plan were formalized in Deed Number 60, dated January 27, 2022, executed before Notary Emmy Yatmini, S.H., in Jakarta.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Peserta RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022
Peserta RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022

Pemegang Saham / Shareholders	Desty Arlaini (Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik), sebagaimana Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-18/MBU/01/2022 tanggal 26 Januari 2022.
Dewan Komisaris Board of Commisionner	**Hadir/Present:** 1. Ali Masykur Musa (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2. Wahju Adji Herpriarsono (Komisaris) 3. Haryo Indratno (Komisaris) 4. Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) 5. Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris) 6. Kristia Budiyarto (Komisaris Independen) **Tidak Hadir / Absent:** Nihil / None / Nil
Direksi Board of Directors	**Hadir/Present:** 1. Ony Suprihartono (Plt. Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Manajemen 2. Ganefi (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum 3. Olih Masolich Sodikin (Direktur Usaha Angkutan Penumpang 4. Robert MP Sinaga (Direktur Armada dan Teknik) 5. Yahya Kuncoro (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut) **Tidak Hadir / Absent:** Nihil / None / Nil

KUORUM KEHADIRAN RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2022

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 telah dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan Pemegang Saham. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELIBATAN PIHAK EKSTERNAL DALAM RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2022

Dalam penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022, PT PELNI (Persero) melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Notaris Ida Adiningsi, S.H. selaku pihak yang menyusun notulensi rapat dan mengesahkan akta RUPS.

QUORUM FOR ATTENDANCE AT THE 2022 RKAP RATIFICATION GMS

The 2022 RKAP Ratification GMS was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors as well as representatives of Shareholders. The attendance quorum and resolution of the GMS to Ratify the 2022 RKAP have been fulfilled as required in the articles of association and applicable laws and regulations.

INVOLVEMENT OF EXTERNAL PARTIES IN THE 2022 RKAP RATIFICATION GMS

In holding the 2022 RKAP Ratification GMS, PT PELNI (Persero) involved an independent external party, namely Notary Ida Adiningsi, SH as the party who prepared the meeting minutes and ratified the GMS deed.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022
Keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022

MATA ACARA RAPAT PERTAMA / FIRST MEETING AGENDA	
Agenda / *Agenda*	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 Termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022. Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022, including the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2022
Hasil Keputusan / *Decision Result*	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 Termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut: Ratify the 2022 Company Work Plan and Budget (RKAP), including the 2022 Board of Commissioners Work Plan and Budget of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with the following points:

Asumsi Penyusunan RKAP 2022 / *Assumptions for Preparing the 2022 RKAP*

Uraian / Description	**RKAP 2022**
Nilai Tukar Rupiah/USD (Exhange Rate)	14,350
Tingkat Inflasi (%) / Inflation Rate (%)	3,00
Suku Bunga (%) / Interest Rate (%)	6,82
Pertumbuhan Ekonomi (%) / Economic Growth (%)	5,20

Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar)

Uraian / Description	**RKAP 2022**
Pendapatan Usaha (Operating Income)	5.572,00
Laba Usaha (Operating Profit)	150,43
EBITDA	578,54
Laba Bersih (Net Profit)	102,15
Jumlah aset (Total Assets)	7.672,14
Ekuitas (Equity)	6.530,22
Interest Bearing Debt	175,86
Arus kas bersih operasi Operating Income Operating Profit EBITDA Net Profit Total assets Equity Interest bearing debt Operating net cash flow	54,10

Investasi/ CAPEX (Rp Miliar

Uraian / Description	**RKAP 2022**
Kapal	350,00
Alat Produksi Lainnya	80,60
Investasi Alat Produksi	430,60
Investasi Saranan Penunjang	109,15
Total Investasi	539,7

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KEDUA / SECOND MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022. Ratification of the 2022 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL).
Hasil Keputusan / Decision Result	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Ratify the 2022 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
MATA ACARA RAPAT KETIGA / THIRD MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara Kolegial Tahun 2022. Determination of the Annual Management Contract which contains the Directors' Collegial Key Performance Indicator (KPI) Targets for 2022.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hasil Keputusan / Decision Result

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) antara Direksi secara kolegial Tahun 2022.

Establish an Annual Management Contract (Key Performance Indicator) between the Directors collegiately in 2022.

Indikator Kinerja Utama / Key Performance Indicators

No	Indikator / Indicator	Satuan / Unit	Target	Polaritas / Polarity	Bobot	
					Sub	Total
Nilai ekonomi dan sosial untuk indonesia						
Finansial / Financial						33
1	EBITDA	Rp Miliar In million Rupiah	578,54	Max	3	
2	ROIC-WACC (*cost of equity* 6,99%)	Persen / Percentage	-4,69	Max	1,5	
3	*Interest Bearing Debt to* EBITDA	Kali / Time	0,30	Min	1,5	
	Interest Bearing Debt to Invested Capital	Persen / Percentage	2,60	Max		
Operasional / Operational						16
4	*Vessel Speed* (On Time Performance)	Persen / Percentage	90,00	Max	9	
5	*Average Utilization of Vessel* (*Pax Factor*)	Persen / Percentage	40,00	Max	7	
Sosial / Social						8
6	Pemenuhan Jumlah *Voyage* Kapal Penugasan	Persen / Percentage	80,00	Max	8	
Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation						
7	Implementasi Sistem *Monitoring* Kontainer Implementation of Container Monitoring System	Persen / Percentage	Max	Max	6	
8	Optimalisasi Kerja Sama Strategi melalui Sinergi BUMN, BUMS & Instansi Lainnya Optimizing Strategic Cooperation through Synergy between BUMN, BUMS & Other Agencies	Instansi	3	Max	6	
9	Penambahan *Ticketing Channel* & Penerapan *Payment Gateway* Addition of Ticketing Channel & Implementation of Payment Gateway	*Channel*/ Payment Gateway	2	Max	6	

No	Indikator / Indicator	Satuan / Unit	Target	Polaritas / Polarity	Bobot	
					Sub	Total
Kepemimpinan Teknologi / Technological Leadership						17
10	Implementasi *Integrated Commercial System* Implementation of Integrated Commercial System	Persen	60,00	Max	8	
11	Implementasi Inovasi Teknologi pada Alat Produksi Implementation of Technological Innovation in Production Equipment	Persen	70,00	Max	9	
D. Pengembangan Investasi / Investment Development						
12	Implementasi Investasi Penggantian Suku Cadang Permesinan Utama Kapal	Persen	80,00	Max	8	
13	Realisasi Investasi Kapal	Unit	1	Max	8	
E. Pengembangan Talenta						16
14	Perempuan dalam *Nominated Talent* /	Persen	20,00	Max	8	
15	Milennial dalam *Top Talent*	Persen	5,00	Max	8	
Total Bobot						100

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT / FOURTH MEETING AGENDA

Agenda / Agenda	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris Tahun 2022.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hasil Keputusan / *Decision Result*

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris Tahun 2022.
Indikator Kinerja Utama Dewan Komisaris

No	Indikator Indicator	Periode Period	Satuan Output Unit of Output	Bobot Weight	Rencana Output Output Plan
I. Aspek Perencanaan / Planning Aspect					
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris. Formulating the 2024 Work Plan, Budget, and KPI of the Board of Commissioners	Tahunan Annually	Dokumen Document	10	1
Sub Total I				**10**	
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat / Supervision and Advisory Aspect					
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Providing feedback/recommendations to Shareholders on:				
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan a. Company's Work Plan and Budget	Tahunan Annually	Surat Letters	5	1
	b. Laporan Tahunan b. Annual Report	Tahunan Annually	Surat Letters	5	1
	c. Analisis Kinerja Triwulanan c. Quarterly Performance Analysis	Triwulanan	Surat Letters	5	3
2	Memberi Nasehat kepada Direksi sesuai Bidang Tugas Dewan Komisaris	Tahunan Annually	Surat Letters	10	12
3	Rapat Dewan Komisaris: Board of Commissioners Meetings:				
	a. Jumlah Rapat a. Number of Meetings	Bulanan Monthly	Kali Times	10	12
	b. Kehadiran Rapat b. Meeting Attendance	Bulanan Monthly	%	5	100
	c. Penyelesaian Risalah Rapat c. Completion of Meeting Minutes	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	5	12
4	Rapat Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee Meetings	Tahunan Annually	Risalah Minutes	5	36
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite Work Visits by the Board of Commissioners and Committees	Setahun One Year	Kunjungan / Visits	5	12
6	Realisasi Rencana kerja Dewan Komisaris Realization of the Board of Commissioners' Work Plan	Setahun One Year	%	5	100
Sub Total II				**60**	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Indikator Indicator	Periode Period	Satuan Output Unit of Output	Bobot Weight	Rencana Output Output Plan
III. Aspek Pelaporan / Reporting Aspect					
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Realization of the Board of Commissioners' KPI Implementation	Triwulanan Quarterly	Laporan Report	5	3
2	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners	Tahunan Annually	Laporan Report	10	1
Sub Total III				**15**	
IV. Aspek Dinamis / Dynamic Aspect					
1	Pengusulan Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham Proposal of Public Accounting Firm to Shareholders	Tahunan Annually	Surat Letters	4	1
2	Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, Workshop, dll Competence Enhancement through Seminars, Workshops, etc.	Tahunan Annually	Kali Times	4	6
3	Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris (*self assessment*/BPK) Results of the GCG Assessment of the Board of Commissioners (self-assessment/BPK)	Tahunan Annually	Skor Score	4	88
4	Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan Auditor SPI Response to Follow-Up on Auditor SPI Findings	Tahunan Annually	Surat Letter	3	1
Sub Total IV				**15**	
Total (I+II+III+IV)				**100**	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KELIMA / FIFTH MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2022. Determination of Operational Aspect Indicators for measuring Company Health Level in 2022
Hasil Keputusan / Decision Result	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2022, sebagai berikut: Determining Operational Aspect Indicators for measuring the Health Level of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2022, as follows: Indikator Aspek Operasional / Operational Aspect Indicators

No	**Indikator /** Indicator	**Satuan /** Unit	**Target /** Target	**Bobot /** Weight
Aspek Operasional				
1	*Passenger Factor*	%	40,00	7,00
2	*Number of Call*	%	80,00	7,00
3	*Commission Days*	Hari /	22.689	7,00
4	*On Time Performance*	%	90,00	7,00
5	Efisiensi Pemakaian BBM / *Fuel Usage Efficiency*	%	65,00	7,00

MATA ACARA RAPAT KEENAM / *SIXTH MEETING AGENDA*	
Agenda / Agenda	Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.
Hasil Keputusan / Decision Result	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.

ARAHAN RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2022 DAN TINDAK LANJUTNYA

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

GMS DIRECTIONS FOR APPROVAL OF THE 2022 RKAP AND FOLLOW-UP IN IMPLEMENTING THE 2022

Company Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners and Directors are asked to pay attention to the following matters:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya
GMS Directions for Approval of the 2022 RKAP and Follow-Up

No	**Arahan Pemegang Saham /** Shareholders Instructions	**TIndak Lanjut /** Follow-up Action
1	RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan tahun 2022. RKAP tersebut termasuk di dalamnya program Manajemen Risiko agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi pencapaiannya, serta dilakukan *cascading* ke seluruh jajaran perusahaan. The ratified RKAP is a guideline for the Board of Directors in carrying out business activities and a guideline for the Board of Commissioners in carrying out company supervision duties in 2022. The RKAP includes the Risk Management program so that it is broken down into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation of its achievements and is carried out cascading throughout the company.	Telah direalisasikan Accomplished
2	Berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP 2022 dan *Key Performance Indicators* (KPI tahun 2022 dengan tetap melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Committed to achieving the 2022 RKAP targets and 2022 Key Performance Indicators (KPI) while continuing to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).	Telah direalisasikan Accomplished
3	Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Lainnya agar diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta lntegritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko. Directors' actions that require approval from the GMS in accordance with the Articles of Association and other regulations must be submitted separately, accompanied by at least a response from the Board of Commissioners, the Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies, and risk studies.	Telah direalisasikan Accomplished
4	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. The Board of Directors must follow up and completely resolve the findings, as well as suggestions and recommendations of auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2021 and previous years. Follow-up actions to resolve the auditor's findings/ suggestions should be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and reported in writing to Shareholders.	Telah direalisasikan Accomplished
5	Melakukan langkah-langkah efisiensi di segala bidang dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan. Carry out efficiency measures in all fields while maintaining productivity and service quality.	Telah direalisasikan Accomplished
6	Melakukan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko/RMI secara berkala dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian BUMN. Untuk penilaian tingkat kematangan risiko/RMI tahun 2021, hasil penilaiannya agar disampaikan paling lambat pertengahan Triwulan II tahun 2022.	Telah direalisasikan Accomplished

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya
GMS Directions for Approval of the 2022 RKAP and Follow-Up

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholders Instructions	TIndak Lanjut / Follow-up Action
7	Pelaksanaan investasi agar memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada rencananya (*cost & schedule*) serta dijaga supaya tidak terjadi *cost overrun*, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan targetnya. Conduct regular assessments of risk management/RMI maturity levels by referring to applicable provisions and guidelines and report the results to the Ministry of BUMN. For the 2021 risk maturity/RMI level assessment, the results of the assessment must be submitted no later than the middle of the second quarter of 2022.	Telah direalisasikan Accomplished
8	Direksi agar melaporkan realisasi program *blueprint* amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk Tahun 2021, serta menyusun dan melaksanakan strategi implementasinya pada tahun 2022. Apabila *blueprint* dimaksud belum disusun, Direksi diminta untuk memenuhinya pada tahun 2022 di mana dapat dilakukan melalui kolaborasi/ *benchmarking* dengan BUMN lain, sekaligus mengakselerasi implementasinya pada tahun 2022. The Board of Directors is required to report on the realization of the blueprint program mandated by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities for 2021, as well as to prepare and implement an implementation strategy in 2022. If the blueprint in question has not been prepared, the Board of Directors is asked to fulfill it in 2022 which can be done through collaboration / benchmarking with other BUMN, while accelerating its implementation in 2022.	Telah direalisasikan Accomplished
9	Direksi agar melengkapi Data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN serta Talent Pool pada portal Human Capital BUMN. Directors must complete data on BUMN Management, BUMN Subsidiaries and BUMN Consolidated Affiliate Companies as well as the Talent Pool on the BUMN Human Capital portal.	Telah direalisasikan Accomplished
10	Direksi agar meningkatkan pembinaan anak perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan senantiasa tumbuh dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan lnduk. The Board of Directors should improve the development of subsidiaries so that their performance is expected to continue to grow well and can make a positive contribution to the Parent Company.	Telah direalisasikan Accomplished
11	Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: Ris-08/DSI.MBU.8/12/2021. Follow up and implement the recommendations for discussing the TJSL Work Plan and Budget with the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting Number: Ris-08/DSI.MBU.8/12/2021.	Telah direalisasikan Accomplished
12	Pelaksanaan akselerasi/percepatan program Komersialisasi PT PELNI (Persero), sehingga diharapkan dapat menjadi *opportunity business development and diversification* yang berdampak pada *Revenue Enhancement* Perusahaan. Implementation of the acceleration/acceleration of the PT PELNI (Persero) Commercialization program, so that it is hoped that it will become an opportunity for business development and diversification which will have an impact on the Company's Revenue Enhancement.	Telah direalisasikan Accomplished

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya
GMS Directions for Approval of the 2022 RKAP and Follow-Up

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholders Instructions	TIndak Lanjut / Follow-up Action
13	Segera menyelesaikan proses pengusulan penggunaan sisa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai dengan rekomendasi *Legal Opinion* dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Immediately complete the process of proposing the use of remaining State Capital Participation (PMN) funds in accordance with the Legal Opinion recommendations from the Deputy Attorney General for Civil and State Administration.	Telah direalisasikan Accomplished
14	Agar senantiasa mengutamakan dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai terutama dalam melaksanakan proses operasional dan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa aman dalam bekerja, melindungi aset perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. To always prioritize and implement the Occupational Health and Safety Management System (K3) for employees, especially in carrying out operational processes and services so that it can provide a sense of security at work, protect company assets, and increase customer trust.	Telah direalisasikan Accomplished

RUPS TAHUNAN MENGENAI PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

ANNUAL GMS REGARDING APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT FOR THE 2021 FINANCIAL YEAR

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
Annual GMS for the 2021 Financial Year

Pemanggilan RUPS GMS Invitation	Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT PELNI (Persero) disampaikan melalui Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor Nomor 06.14/02/S-B/090/2022 tanggal 14 Juni 2022. The invitation for the Annual GMS for the 2021 Financial Year to the Minister of BUMN as the Shareholder of PT PELNI (Persero) was conveyed through the Invitation Letter to the General Meeting of Shareholders Number 06.14/02/SB/090/2022 dated 14 June 2022.
Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	1. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, 09.00 WIB melalui *Video Conference*. 2. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dipimpin oleh Desty Arlaini selaku Plt. Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN RI. 1. The 2021 Fiscal Year Annual GMS will be held on Wednesday, June 29, 2022, 09.00 WIB via Video Conference. 2. The 2021 Fiscal Year Annual GMS was chaired by Desty Arlaini as Plt. Assistant Deputy for Plantations and Forestry, Ministry of BUMN RI.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Risalah RUPS	Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 diaktakan dalam Akta No. 47 tanggal 29 Juni 2022 mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Adiningsi, S.H. di Jakarta. The minutes of the 2021 Annual GMS are notarized in Deed No. 47 dated 29 June 2022 concerning Ratification of the 2021 Company Work Plan and Budget made before Notary Ida Adiningsi, SH in Jakarta.

Peserta RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
Participants in the Annual GMS for Fiscal Year 2021

Pemegang Saham Shareholders	Desty Arlaini (Plt. Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN RI) sebagaimana Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-95/MBU/06/2022 tanggal 27 Juni 2022. Desty Arlaini (Plt. Assistant Deputy for Plantations and Forestry, Ministry of BUMN RI) as per Power of Attorney of the Minister of BUMN Number: SKU-95/MBU/06/2022 dated 27 June 2022
Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Hadir/Present:** 1. Ali Masykur Musa (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2. Kristia Budiyarto (Komisaris Independen) 3. Wahju Adji Herpriarsono (Komisaris) 4. Haryo Indratno (Komisaris) 5. Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) 6. Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris) **Tidak Hadir/Absent:** Nihil / None / Nil/*None*/*Nil*.
Direksi Board of Directors	**Hadir/Present:** 1. Insan Purwarisya L. Tobing (Direktur Utama/*President Director*) 2. Ganefi (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/*Director of Human Resources and General Affairs*) 3. Olih Masolich Sodikin (Direktur Usaha Angkutan Penumpang/ *Director of Passenger Transport Business*) 4. Ony Suprihartono (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ *Director of Finance and Risk Management*) 5. Robert MP Sinaga (Direktur Armada dan Teknik/*Director of Fleet and Engineering*) 6. Yahya Kuncoro (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut/ *Director of Goods Transport and Sea Highway Business*) **Tidak Hadir/Absent:** Nihil / None / Nil/*None*/*Nil*.

KUORUM KEHADIRAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan Pemegang Saham. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

QUORUM FOR ATTENDANCE AT THE ANNUAL GMS FOR FISCAL YEAR 2021.

The Annual GMS for Fiscal Year 2021 was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors as well as representatives of Shareholders. The attendance quorum and decisions of the 2021 Annual GMS have been fulfilled as required in the articles of association and applicable laws and regulations.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PELIBATAN PIHAK EKSTERNAL DALAM RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, PT PELNI (Persero) melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Notaris Ida Adiningsih S.H. sebagai penyusun notulensi rapat dan akta RUPS.

INVOLVEMENT OF EXTERNAL PARTIES IN THE ANNUAL GMS FOR FISCAL YEAR 2021.

In holding the Annual GMS for Fiscal Year 2021, PT PELNI (Persero) involved an independent external party, namely Notary Ida Adiningsih SH as the compiler of meeting minutes and GMS deeds.

MATA ACARA RAPAT PERTAMA / FIRST MEETING AGENDA / FIRST MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021. Ratification of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the 2021 Financial Year and Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2021 Financial Year.
Hasil Keputusan / Decision Result	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor 0077//2.0999/AU.1/06/0139-1/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" serta memberikan penunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Approved the Annual Report for the 2021 Financial Year including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and ratified the Company's Financial Report for the 2021 Financial Year, which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as contained in Report Number 0077//2.0999/AU. 1/06/0139-1/1/IV/2022 dated 27 April 2022 with an opinion of "fair, in all material respects" and granting full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out in the Financial Year ending 31 December 2021 as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's books of reports.
MATA ACARA RAPAT KEDUA / SECOND MEETING AGENDA / SECOND MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2021. Annual Report on the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) for the 2022 Financial Year and Ratification of the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2021 Financial Year.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hasil Keputusan / Decision Result	1. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor 0077//2.0999/AU.1/06/0139-1/1/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material". 1. Approved the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) for the 2021 Financial Year and Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2021 Financial Year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as stated in Report Number 0077//2.0999/AU.1/06/0139-1/1/III/2022 dated 10 March 2022 with the opinion "fair, in all material respects". 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan TJSL Tahun Buku 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan Perseroan. 2. Provide full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for actions in managing and supervising TJSL for the 2021 Financial Year as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's report.
MATA ACARA RAPAT KETIGA / THIRD MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2021 Financial Year.
Hasil Keputusan / Decision Result	Menerapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp40.927.811.171,- seluruhnya sebagai cadangan. Applying the use of the Company's Net Profit for the 2021 Fiscal Year amounting to IDR 40,927,811,171, - entirely as reserves.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT / FOURTH MEETING AGENDA / FOURTH MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022. Determination of Tantiem for the 2021 Financial Year, Salaries for Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for 2022.
Hasil Keputusan / Decision Result	Besaran Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022. Amount of bonus for financial year 2021, salary for directors and honorarium for board of commissioners along with other facilities and allowances for 2022.
MATA ACARA RAPAT KELIMA / FIFTH MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year as well as the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hasil Keputusan / Decision Result	Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Appoint the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra to conduct a general audit of the Company's consolidated financial report for the 2022 financial year and the Financial Report of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year.
MATA ACARA RAPAT KEENAM / SIXTH MEETING AGENDA	
Agenda / Agenda	Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Ratification of the Realization Report on the Use of Additional State Capital Participation (PMN) Funds.
Hasil Keputusan / Decision Result	1. Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015 untuk periode tahun buku 2021. 1. Ratify the Realization Report on the Use of Additional State Capital Participation Funds (PMN) originating from the 2015 Fiscal Year APBN for the 2021 financial year period. 2. Direksi diminta melakukan upaya-upaya untuk mendorong realisasi PMN secara penuh dan tepat waktu antara lain dengan menyusun program/rencana pemanfaatan sisa dana PMN Tahun Anggaran 2015 dan selanjutnya diajukan kepada Menteri BUMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Directors are asked to make efforts to encourage the full and timely realization of PMN, including by preparing a program/plan for utilizing the remaining PMN funds for the 2015 Fiscal Year and then submitting it to the Minister of BUMN in accordance with applicable regulations.

ARAHAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 DAN TINDAK LANJUTNYA

Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

DIRECTIONS FOR THE 2021 ANNUAL GMS AND FOLLOW-UP ACTIONS

The Board of Commissioners and Directors are asked to pay attention to the following matters:

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Tindak Lanjutnya
Directions for the 2021 Annual GMS and Follow-up Actions

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Direction	Tindak Lanjut / Follow-up Action
1	Direksi agar meningkatkan pendapatan perusahaan sejalan dengan berkurangnya dampak pandemi Covid-19 yang ditandai dengan diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan namun tetap mematuhi protokol kesehatan. The Board of Directors should increase the company's income in line with the reduced impact of the Covid-19 pandemic, which is marked by giving people the freedom to travel while still adhering to health protocols.	Telah direalisasikan Accomplished
2	Direksi agar meningkatkan langkah-langkah efisiensi di segala bidang, terutama Biaya Usaha Perkapalan dan Biaya *Overhead* dan tetap menjaga produktivitas serta kualitas pelayanan. The Board of Directors should increase efficiency measures in all fields, especially Shipping Business Costs and Overhead Costs and continue to maintain productivity and service quality.	Telah direalisasikan Accomplished

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Tindak Lanjutnya
Directions for the 2021 Annual GMS and Follow-up Actions

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Direction	Tindak Lanjut / Follow-up Action
3	Direksi terus melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelayanan perusahaan khususnya saat masa puncak liburan (*peak season*) dengan melakukan koordinasi bersama pihak/instansi terkait, sehingga ke depan peningkatan kualitas pelayanan terus semakin baik, termasuk kesiapan armada kapal, sistem pembayaran dan klasifikasi jasa layanan penumpang. The Board of Directors continues to carry out a comprehensive evaluation of the company's services, especially during the peak season, by coordinating with related parties/agencies, so that in the future the quality of service will continue to improve, including the readiness of the ship fleet, payment system and classification of passenger services.	Telah direalisasikan Accomplished
4	Direksi agar menyusun strategi dan melakukan inovasi untuk pengembangan bisnis komersil perusahaan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap PSO dan subsidi, serta menambah sumber pendapatan. The Board of Directors should develop strategies and innovate to develop the company's commercial business, thereby reducing dependence on PSO and subsidies, as well as increasing sources of income.	Telah direalisasikan Accomplished
5	Direksi agar menyusun langkah-langkah perbaikan kinerja operasional, antara lain memaksimalkan potensi angkutan barang dengan memodifikasi armada kapal penumpang dan bersinergi dengan BUMN pemilik kargo. The Board of Directors should develop steps to improve operational performance, including maximizing the potential for goods transportation by modifying the passenger ship fleet and synergizing with state-owned cargo owners.	Dalam proses realisasi In Progress
6	Direksi agar memperhatikan koreksi BPK atas beban-beban yang terkoreksi besar sehingga dapat meminimalisasi koreksi tersebut agar cadangan biaya lebih optimal yang tidak diperhitungkan di subsidi. Directors should pay attention to BPK corrections for large, corrected expenses so that they can minimize these corrections so that cost reserves are more optimal which are not taken into account in subsidies.	Telah direalisasikan Accomplished
7	Direksi agar melakukan evaluasi dan mengkaji kembali terkait bisnis usaha penunjang perusahaan agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan. The Board of Directors should evaluate and review the company's supporting businesses in order to maximize potential income.	Telah direalisasikan Accomplished
8	Direksi agar memperhatikan penyerapan investasi mengingat capaian penyerapan investasi lebih rendah dibandingkan target agar berdampak terhadap peningkatan kapasitas operasional. The Board of Directors should pay attention to investment absorption considering that the achievement of investment absorption is lower than the target so that it has an impact on increasing operational capacity.	Telah direalisasikan Accomplished
9	Direksi agar meningkatkan pembinaan anak perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan meningkat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk. The Board of Directors should improve the development of subsidiaries so that their performance is expected to increase and can make a positive contribution to the Parent Company.	Telah direalisasikan Accomplished

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Tindak Lanjutnya
Directions for the 2021 Annual GMS and Follow-up Actions

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Direction	Tindak Lanjut / Follow-up Action
10	Direksi agar melaporkan realisasi pemanfaatan sisa dana PMN TA 2015 secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/03/2021. Directors are required to report the realization of the utilization of remaining PMN funds for FY 2015 periodically in accordance with the Minister of BUMN Regulation Number: PER-01/MBU/03/2021.	Telah direalisasikan Accomplished
11	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Nomor: RSI-49/DSI/MBU.B/6/2022. The Board of Directors should follow up on matters that need attention in the Minutes of Meeting for Discussion of Financial Reports and Implementation of the TJSL Program of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number: RSI-49/DSI/MBU.B/6/2022.	Telah direalisasikan Accomplished
12	Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. The Board of Directors and Board of Commissioners need to ensure that every implementation of the Company's business activities is carried out by considering the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably, guided by the applicable rules and regulations.	Telah direalisasikan Accomplished
13	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya). The Board of Directors must follow up and complete thoroughly any findings, notes, and suggestions/recommendations from external auditors (Public Accounting Firm/KAP, Financial and Development Supervisory Agency/BPKP, and the Indonesian Financial Audit Agency/BPK-RI including other authorized supervisory agencies).	Telah direalisasikan Accomplished
14	Direksi agar senantiasa menjaga konsistensi dalam melakukan monitoring dan *updating* data pada Portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal *Human Capital* (HC), Portal TJSL, dan Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan. The Board of Directors must always maintain consistency in monitoring and updating data on the BUMN Portal, namely the Silaba Portal, Human Capital (HC) Portal, TJSL Portal and Public Portal. The progress of updating data in the portal so that it is reported in quarterly management reports and annual reports.	Tidak terealisasi dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Unaccomplished and will be continued the following year.
15	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor 52/DK/VI-2022 tanggal 16 Juni 2022. The Board of Directors should follow up on matters recommended by the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in accordance with the letter submitted Number 52/DK/VI-2022 dated 16 June 2022.	Telah direalisasikan Accomplished

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Tindak Lanjutnya
Directions for the 2021 Annual GMS and Follow-up Actions

No	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Direction	Tindak Lanjut / Follow-up Action
16	Laporan Keuangan, Laporan Keuangan PUMK, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra serta tanggapan Dewan Komisaris baik yang dibacakan dalam rapat maupun yang disampaikan tertulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS. Financial Reports, PUMK Financial Reports, Performance Evaluation Reports, Compliance Reports with Legislation and Internal Control which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as well as the Board of Commissioners' responses, whether read out in meetings or submitted in writing, are an inseparable part of the GMS Minutes.	Telah direalisasikan Accomplished

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Bab I Pasal 1, Direksi adalah Organ Persero yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

According to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Chapter I Article 1, the Board of Directors is the corporate body responsible for the management of state-owned enterprises (SOEs) in the interest and purpose of the SOE and represents the SOE both in and out of court.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Persyaratan

Terdapat 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Direksi. Persyaratan tersebut mencakup persyaratan materiil, persyaratan formal, dan persyaratan lain:

a. Persyaratan Materiil
   Untuk dapat diangkat sebagai Direksi BUMN seseorang harus memenuhi persayaratan materiil, yaitu:
   1) Keahlian;
   2) Integritas;
   3) Kepimpinan;
   4) Pengalaman;
   5) Jujur;
   6) Perilaku yang baik;dan
   7) Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

b. Persyaratan Formal
   Selain menenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada point a, untuk dapat diangkat sebagai Direksi Persero, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
   1) Orang Perseorangan
   2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum
   3) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
   4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
   5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

c. Persyaratan Lain
   Untuk dapat diangkat sebagai Direksi BUMN, selain memenuhi syarat materiil dan syarat formal, seseorang

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Requirements

There are three requirements that must be met by a member of the Board of Directors. These requirements include material requirements, formal requirements, and other requirements:

a. Material Requirements
   To be appointed as a member of the Board of Directors of an SOE, a person must meet the following material requirements:
   1) Expertise;
   2) Integrity;
   3) Leadership;
   4) Experience;
   5) Honesty;
   6) Good behavior; and
   7) High dedication to advancing and developing the company.

b. Formal Requirements
   In addition to meeting the criteria as specified in point a, to be appointed as a member of the Board of Directors, a person must meet the following formal requirements:
   1) An individual;
   2) Capable of performing legal acts;
   3) Has not been declared bankrupt within the last 5 (five) years before the appointment;
   4) Has not served as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board who was found guilty of causing an SOE, Subsidiary, or other business entity to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before the appointment; and
   5) Has not been convicted of a crime that harmed the state's finances, SOEs, subsidiaries, other business entities, and/or the financial sector within the last 5 (five) years before the appointment.

c. Other Requirements
   To be appointed as a member of the Board of Directors of an SOE, in addition to meeting the material and

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

1) Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2) Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
3) Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
4) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/Lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;

5) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
6) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
7) Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
8) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Mekanisme penetapan daftar dan rekam jejak Direksi Perusahaan dan/atau calon Direksi Perusahaan dilaksanakan melalui proses:
1. pengumpulan data daftar dan rekam jejak;
2. validasi data daftar dan rekam jejak; dan
3. penetapan daftar dan rekam jejak.

Manajemen Talenta dilaksanakan melalui proses:
1. penjaringan dan pemilihan Talenta;
2. penilaian Talenta;
3. pengklasifikasian Talenta;
4. pengembangan Talenta; dan
5. perputaran Talenta.

formal requirements, a person must also meet the following other requirements:
1) Not a political party official, legislative candidate, and/or member of the legislature in the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial Regional House of Representatives, and Regency/Municipal Regional House of Representatives;
2) Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
3) Has not served as a member of the Board of Directors of the relevant SOE or subsidiary for 2 (two) periods;
4) Not holding a position in ministries/agencies, a member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board in other SOEs, a member of the Board of Directors in other SOEs, a member of the Board of Directors in subsidiaries and/or other business entities;
5) Not holding a position prohibited by law from being concurrently held with the position of a member of the Board of Directors;
6) Has dedication and provides full time to perform their duties, as stated in a declaration letter from the person concerned;

7) Physically and mentally healthy, not suffering from any illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a health certificate from a hospital; and
8) Possesses a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has fulfilled tax obligations for the last 2 (two) years.

The mechanism for establishing the list and track record of the company's Board of Directors and/or candidates for the Board of Directors is carried out through the process of:
1. Collecting data on the list and track record;
2. Validating data on the list and track record; and
3. Establishing the list and track record.

Talent management is carried out through the process of:
1. Screening and selecting talents;
2. Assessing talents;
3. Classifying talents;
4. Developing talents; and
5. Rotating talents.

PENGANGKATAN DIREKSI

1. RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN.
2. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
3. Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
4. Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 3 memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
5. Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
6. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:
   1) Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
   2) Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
7. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
8. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
9. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.
10. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The General Meeting of Shareholders (GMS)/Minister may appoint candidates proposed by the Succession Committee as members of the Board of Directors of the SOE.
2. For certain SOEs, the appointment of a person as a member of the Board of Directors can be made after passing the Sectoral Competence Test (UKK) according to sectoral regulations.
3. If the appointment of members of the Board of Directors is made before the UKK according to sectoral regulations, the Board of Directors of the SOE has the authority to perform actions, duties, and functions as members of the Board of Directors of the SOE starting from the date of passing the UKK according to sectoral regulations.
4. Members of the Board of Directors of the SOE as referred to in point 3 have a term of office that becomes effective from the date determined by the GMS/Minister.
5. If certain members of the Board of Directors of the SOE are declared not to have passed the UKK according to sectoral regulations, the GMS/Minister may dismiss those members of the Board of Directors of the SOE with due regard to sectoral regulations.
6. The appointment of a person as a member of the Board of Directors of the SOE can be made through:
   1) Ministerial Decision as the GMS/owner of capital if all shares/capital of the SOE are owned by the state; or
   2) GMS Decision or circular decision of all shareholders if not all shares are owned by the state.
7. Before being appointed as a member of the Board of Directors of the SOE, the person concerned must sign a resignation letter from other positions that are prohibited from being concurrently held with the position of a member of the Board of Directors of the SOE, effective from the date of appointment as a member of the Board of Directors of the SOE.
8. If the person concerned does not resign within the period specified in the regulations, their position as a member of the Board of Directors of the SOE will terminate at the end of that period.
9. If the appointment decision is made through a Ministerial Decision or circular decision of all shareholders, the Deputy will process the delivery of the Decree to the selected member of the Board of Directors of the SOE after the decision is made.
10. During the delivery of the Decree, the Deputy is assisted by senior primary officials responsible for legal affairs,

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan Asisten Deputi Sektor.

11. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
12. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
13. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada poin 11 dan poin 12 termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
15. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
16. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/2023/03.

PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sebagai berikut:
   a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen dan/atau kontrak manajemen tahunan Direksi BUMN;
   b. adanya perubahan strategi bisnis pada BUMN;
   c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
   e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
   f. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
   g. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
   h. melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi BUMN;
   i. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
   j. berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit berkepanjangan.

Assistant Deputy, and Assistant Deputy Sector.

11. After the delivery of the Decree, all documents are handed over to the Deputy for administration.
12. If the appointment is to be determined in the GMS, the UKK results are submitted to the Minister along with the candidate's appointment letter and a power of attorney to attend and make decisions in the GMS.
13. After the GMS is held, all documents related to the appointment of members of the Board of Directors of the SOE are handed over to the Deputy for administration.
14. The administration process by the Deputy as referred to in points 11 and 12 includes documenting the appointment and evaluation process.
15. Members of the Board of Directors start their tenure effectively from the date specified in the Ministerial/GMS/all shareholders' circular decision.
16. The format of the declaration letter related to the appointment and dismissal of the Board of Directors is as stated in Appendix IV, which is an integral part of the Ministerial Regulation of SOEs Number PER-3/MBU/2023/03.

DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Members of the Board of Directors of SOEs can be dismissed at any time based on the decision of the GMS/Minister with reasons stated.
2. The reasons for dismissing members of the Board of Directors of SOEs as referred to in point 1 are as follows:
   a. Failure to fulfill obligations agreed upon in the Management Contract and/or annual management contract of the Board of Directors of the SOE;
   b. Changes in business strategy at the SOE;
   c. Inability to perform duties properly;
   d. Involvement in actions that harm the SOE and/or state finances;
   e. Violation of laws and/or bylaws;
   f. Being designated as a suspect or defendant by the authorities in actions that harm the SOE and/or state finances;
   g. Conduct that violates ethics and/or propriety;
   h. Conduct that violates the code of ethics of the Board of Directors of the SOE;
   i. Being found guilty by a final and binding court decision; or
   j. Permanent incapacity, including severe/prolonged illness.

3. Selain alasan pemberhentian Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada poin 2, anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.

4. Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2, pemberhentian Direksi BUMN memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUMN yang bersangkutan.
5. Selain alasan tersebut di atas, RUPS berwenang memberhentikan Anggota Direksi apabila antara para Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian terhadap Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
8. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
9. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat dan RUPS diatas tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal

KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

1. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dan paling sedikit (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan

3. In addition to the reasons for dismissal of the Board of Directors of SOEs as referred to in point 2, members of the Board of Directors of SOEs can be dismissed based on other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister in the interest and purpose of the SOE.
4. Apart from the reasons for dismissal as referred to in points 1 and 2, the dismissal of the Board of Directors of SOEs considers the reasons for dismissal as stipulated in the relevant SOE's bylaws.
5. In addition to the above reasons, the GMS has the authority to dismiss members of the Board of Directors if there are family relationships up to the third degree, both in a direct line and in a lateral line, including relationships arising from marriage, between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

6. Members of the Board of Directors can be temporarily dismissed by the Board of Commissioners if they act against the bylaws or are suspected of causing harm to the company or neglecting their duties or if there are urgent reasons for the company.

7. The temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned with reasons for the action, with a copy to the shareholders and the Board of Directors.

8. Within a maximum of 30 (thirty) days after the temporary dismissal, a General Meeting of Shareholders must be held to decide whether to revoke or confirm the temporary dismissal. The GMS is held by the Board of Commissioners. In the GMS, the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to defend themselves.

9. If the 30 (thirty) days period has elapsed and the GMS has not been held or the GMS cannot make a decision, the temporary dismissal becomes void.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The company is managed and led by a Board of Directors onsisting of at least two members, one of whom is appointed as the President Director.
2. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.
3. Members of the Board of Directors are appointed from candidates proposed by the shareholders, and this nomination binds the GMS.
4. If the Board of Directors consists of two or more members, the distribution of duties and authorities among the

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pada tahun 2023, komposisi Direksi PELNI mengalami 1 (satu) kali perubahan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor: SK-223/MBU/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.
2. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor: SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

members of the Board of Directors is determined by the GMS decision.

5. If the GMS as described above does not determine the distribution, the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors is determined by the Board of Directors' decision.

In 2023, the composition of the Board of Directors of PELNI underwent one change, as documented in:

1. Copy of the Minister of State-Owned Enterprises' Decree as the General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number: SK-223/MBU/08/2023 dated August 1, 2023, regarding the Dismissal of Members of the Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
2. Copy of the Minister of State-Owned Enterprises' Decree as the General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, regarding the Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Periode Awal Tahun Buku 2023-1 Agustus 2023 Beginning of the Financial Year 2023 - August 1, 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Yahya Kuncoro	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
4	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
5	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK -57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
6	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
1 Agustus 2023-21 September 2023 August 1, 2023-September 21, 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
4	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK -57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022. Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
5	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
21 September 2023-Akhir Tahun Buku 2023 September 21, 2023 - End of Fiscal Year 2023			
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023
4	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
5	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK -571/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
6	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Kriteria hubungan afiliasi antara Direksi meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara sesama anggota Direksi;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Seluruh anggota Direksi PT PELNI (Persero) yang menjabat selama tahun 2023 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

PENGATURAN RANGKAP JABATAN

1. Para Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
   a. Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
   d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan;
   e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
   f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
   g. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
2. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di atas, Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:

AFFILIATION RELATIONSHIPS OF DIRECTORS

Criteria for affiliation relationships among the Directors include:

1. Affiliation relationships between fellow Directors;
2. Affiliation relationships between Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliation relationships between Directors and major and/or controlling shareholders.

All members of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) who served during 2023 did not have any affiliation relationships with fellow Directors, members of the Board of Commissioners, or major and/or controlling shareholders.

CONCURRENT POSITIONS REGULATIONS

1. Directors are prohibited from holding concurrent positions as outlined below:
   a. Directors in State-Owned Enterprises (BUMN) and other businesses;
   b. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other State-Owned Enterprises;
   c. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
   d. Other positions in accordance with statutory regulations;
   e. Political party officials, legislators, and/or candidates for regional head/deputy regional head;
   f. Other positions that may cause conflicts of interest; and/or
   g. Legislative candidates or candidates for regional head/deputy regional head.
2. Besides the concurrent positions mentioned above, Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other enterprises, except:

a. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN/ perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, selain sebagai Komisaris Utama; dan
b. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri.

3. Masa Jabatan Anggota Direksi BUMN yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di atas sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
4. Berakhirnya jabatan Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dikukuhkan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri atau RUPS.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi PT PELNI (Persero) berkewajiban untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada PT PELNI (Persero) dan perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2023 maupun keluarga dari masing-masing anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di PT PELNI (Persero) maupun di perusahaan lain.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Direksi berperan penting dalam mengelola jalannya usaha Perseroan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pedoman kerja sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam upaya memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Direksi telah memiliki Pedoman Kerja sebagaimana diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang menjelaskan tata laksana bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan antara kedua organ perusahaan secara terstruktur dan Tata Laksana Kerja Direksi dalam *Board Manual* diatur dalam Bab II, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. As members of the Board of Commissioners in subsidiaries or affiliated companies of the BUMN, other than as the Chief Commissioner;
b. As members of the Board of Commissioners in other enterprises to represent/promote the interests of the BUMN, provided they have obtained permission from the Minister.

3. The term of office for Directors who hold concurrent positions as described above as BUMN Directors shall end upon assuming the concurrent position.

4. The termination of BUMN Directors as mentioned in point 1 (a), (b), and (d) shall be confirmed by a Ministerial Decision or a General Meeting of Shareholders (RUPS).

SHARE OWNERSHIP BY DIRECTORS

The Directors of PT PELNI (Persero) are required to report their share ownership and/or their family's share ownership in PT PELNI (Persero) and other companies to the Company. All Directors who served during the fiscal year 2023 and their families did not have any share ownership in PT PELNI (Persero) or other companies.

DIRECTORS' WORK GUIDELINES

The Directors play a crucial role in managing the Company's business operations. Therefore, a work guideline is necessary to guide the Directors in carrying out their duties, responsibilities, and authorities in the interest of the shareholders and other stakeholders.

The Directors have established a Work Guideline as regulated in the Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), which has been published on the Company's official website.

The Board Manual for the Board of Commissioners and Directors is a guideline that broadly explains the governance for the Directors and the Board of Commissioners, as well as the working relationship processes between them and other company organs in a structured manner and the Directors' Governance in the Board Manual is regulated in Chapter II, which covers the following:

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

1. Kebijakan Umum
2. Pengaturan Rangkap Jabatan
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
4. Pengunduran Diri Direksi
5. Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Lowong
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
7. Tanggung Jawab Direksi
8. Tugas Direksi
9. Direktur Penanggungjawab GCG
10. Wewenang Direksi
11. Kewajiban Direksi
12. Hak-Hak Direksi
13. Etika Jabatan
14. Penetapan Kebijakan
15. Pengelolaan Perusahaan Oleh Direksi
16. Komposisi dan Pembidangan Tugas Direksi
17. Rapat Direksi
18. Organ Pendukung Direksi

Selain itu, dalam *Board Manual* tersebut juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

TUGAS UMUM DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
4. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan.

1. General Policies
2. Regulations on Concurrent Positions
3. Appointment and Termination of Directors
4. Directors' Resignation
5. Implementation of Duties for Vacant Director Positions
6. Introduction and Capability Enhancement Programs
7. Directors' Responsibilities
8. Directors' Duties
9. Director Responsible for Good Corporate Governance (GCG)
10. Directors' Authorities
11. Directors' Obligations
12. Directors' Rights
13. Office Ethics
14. Policy Establishment
15. Company Management by the Directors
16. Composition and Task Division of Directors
17. Directors' Meetings
18. Supporting Organs for Directors

Additionally, the Board Manual regulates the working relationship mechanism between the Board of Commissioners and the Directors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DIRECTORS

GENERAL DUTIES OF THE DIRECTORS

1. The Directors are responsible for conducting all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company both in and out of court on all matters and events with the limitations as stipulated in laws, the Articles of Association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders (RUPS).
2. Each member of the Board of Directors is required to carry out their duties in good faith and full responsibility for the interest and business of the Company, in compliance with applicable laws and regulations.
3. The Directors are fully responsible for the management of the Company.
4. The Directors must manage the Company in accordance with their authority and responsibilities as outlined in the Articles of Association and statutory regulations.
5. One member of the Board of Directors is appointed by the Board meeting to be responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance in the Company.

6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari:
   a. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit Intern;
   b. Temuan Auditor Eksternal;
   c. Nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris;
   d. Laporan BPK;
   e. Laporan BPKP; dan/atau
   f. Temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada RUPS/Menteri.
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya, mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
10. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi.
11. Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direksi wajib:
    a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS/surat Menteri, dan risalah rapat Direksi;
    b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan;
    c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
    d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
12. Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 11. a atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS/surat Menteri dan laporan tahunan serta mendapatkan Salinan risalah RUPS dan laporan tahunan.
13. Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 11. d, Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip di lingkungan Perusahaan.

6. The Directors must follow up on findings and recommendations from:
   a. Risk Management, Compliance, and Internal Audit functions;
   b. External Auditor findings;
   c. Advice and supervision results from the Board of Commissioners;
   d. Audit Board (BPK) reports;
   e. Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) reports; and/or
   f. Other findings and recommendations that must be followed up by the Directors as required by statutory regulations.
7. Members of the Board of Directors are prohibited from granting general powers to others that result in the transfer of the duties and functions of the Directors.
8. The Directors must be accountable for their duties to the RUPS/Minister.
9. Perform all other actions and deeds regarding the management or ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company both in and out of court on all matters and events, with the limitations as stipulated in laws, the Articles of Association, and/or the decisions of the RUPS.
10. Establish the organizational structure up to one level below the Board of Directors.
11. To meet the requirements of accountability, transparency, and orderly administration in accordance with statutory regulations, the Directors must:
    a. Create a list of shareholders, a special register, minutes of RUPS/Ministerial letters, and minutes of Directors' meetings;
    b. Prepare annual reports and financial documents of the company;
    c. Maintain all lists, minutes, and financial documents of the company and other documents; and
    d. Store all lists, minutes, financial documents, and other documents at the company's domicile.
12. In carrying out the obligations referred to in point 11.a, upon written request from a shareholder, the Directors must allow the shareholder to inspect the list of shareholders, special register, minutes of RUPS/Ministerial letters, and annual reports, and obtain copies of the minutes of RUPS and annual reports.
13. In fulfilling the obligations referred to in point 11.d, the Directors are responsible for the management of archives within the Company.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

14. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Direksi menurut *Board Manual* PT PELNI (Persero):
1. Tugas Direksi terkait Hubungan dengan RUPS.
2. Tugas Direksi terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja.
3. Tugas Direksi terkait dengan Penyusunan RJPP.
4. Tugas Direksi terkait dengan Penyusunan RKAP.
5. Tugas Direksi terkait dengan Penyusunan Laporan Tahunan.
6. Tugas Direksi terkait dengan Laporan Triwulanan.
7. Tugas Direksi terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
8. Tugas Direksi terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi.
9. Tugas Direksi Kebijakan Operasional dan SOP.
10. Tugas Direksi terkait Manajemen Risiko.
11. Tugas Direksi terkait dengan Pengendalian Internal.
12. Tugas Direksi terkait dengan Perubahan Lingkungan Bisnis dan Permasalahan yang Berdampak Besar bagi Usaha dan Kinerja Perusahaan.
13. Tugas Direksi terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pembukuan.
14. Tugas Direksi terkait Informasi Perseroan kepada *Stakeholder.*
15. Tugas Direksi terkait dengan Pemenuhan Target Kinerja.
16. Tugas Direksi terkait dengan Teknologi Informasi (TI).
17. Tugas Direksi terkait dengan Mutu dan Pelayanan.
18. Tugas Direksi terkait dengan Pengadaan Barang Jasa.
19. Tugas Direksi terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

14. Each member of the Board of Directors is fully personally responsible for the Company's losses if they are at fault or negligent in performing their duties in accordance with regulations.
15. The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders does not determine the division of duties and authorities, the division of duties and authorities among the Directors shall be determined by the decision of the Board of Directors.
16. Provide explanations on any matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and shareholders.

The following are the duties and responsibilities of the Directors according to the Board Manual of PT PELNI (Persero):
1. Directors' duties related to the relationship with the RUPS.
2. Directors' duties related to strategy and work plans.
3. Directors' duties related to the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP).
4. Directors' duties related to the preparation of the Work Plan and Budget (RKAP).
5. Directors' duties related to the preparation of the annual report.
6. Directors' duties related to the preparation of quarterly reports.
7. Directors' duties related to transparency and confidentiality of information.
8. Directors' duties related to business ethics and anti-corruption.
9. Directors' duties related to operational policies and Standard Operating Procedures (SOP).
10. Directors' duties related to risk management.
11. Directors' duties related to internal control.
12. Directors' duties related to changes in the business environment and issues significantly impacting the business and performance of the Company.
13. Directors' duties related to the accounting and bookkeeping system.
14. Directors' duties related to providing information to stakeholders.
15. Directors' duties related to meeting performance targets.
16. Directors' duties related to information technology (IT).
17. Directors' duties related to quality and service.
18. Directors' duties related to procurement of goods and services.
19. Directors' duties related to corporate social responsibility.

20. Tugas Direksi terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM).
21. Tugas Direksi terkait dengan Anak Perusahaan (*Subsidiary Perusahaan*) dan/atau Perusahaan Patungan.
22. Tugas Direksi terkait dengan Pengendalian Operasional dan Keuangan.
23. Tugas Direksi terkait dengan Pengurusan Perseroan.
24. Tugas Direksi terkait dengan *Stakeholder*.
25. Tugas Direksi terkait dengan Benturan Kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Perseroan, Direksi dapat melakukan pembidangan tugas, dengan tetap tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolektif dalam pengurusan Perseroan. Pembidangan tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembidangan tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, dan apabila terjadi perubahan struktur organisasi, sebelum ditetapkan harus mendapat persetujuan tertulis dan Dewan Komisaris. Pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

20. Directors' duties related to human resources (HR).
21. Directors' duties related to subsidiaries and/or joint ventures.
22. Directors' duties related to operational and financial control.
23. Directors' duties related to company management.
24. Directors' duties related to stakeholders.
25. Directors' duties related to conflicts of interest.

To enhance the effectiveness and efficiency of the Company's management, the Directors may assign task areas while maintaining collective responsibility for the Company's management. The division of tasks among the Directors is determined by the RUPS; if the RUPS does not determine the task division, it will be determined by the Directors' decision. Any organizational structure changes must be approved in writing by the Board of Commissioners before implementation. The task division for each member of the Board of Directors as of December 31, 2023, is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	1. Menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Salam; 2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh para Direktur; 3. Mengendalikan pelaksanaan tugas *Internal Audit*, DPA- QHSSE, *Corporate Secretary*, *Corporate Planning* & *Risk Management*, Legal, bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya selaku Direksi perusahaan mengendalikan pelaksanaan fungsi staf Kantor Pusat; 4. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh unit kerja Kapal dan Kantor Cabang/*Terminal Point* serta Unit Bisnis Strategis/ *Strategic Business Unit* (SBU) perusahaan secara menyeluruh. 1. To manage the Company in accordance with applicable regulations and perform other tasks as determined by the Shareholders. 2. To oversee the implementation of the Board of Directors' policies executed by the Directors. 3. To oversee the execution of Internal Audit, DPA-QHSSE, Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management, and Legal functions. Together with the Directors, manage the staff functions at the Head Office. 4. To control the implementation of the Board of Directors' policies carried out by the Ship and Branch Office/Terminal Point units and the company's Strategic Business Units (SBUs).

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Membina pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi pengelolaan kegiatan akuntansi, perbendaharaan, serta kewajiban layanan publik (*Public Service Obligation*/PSO) dan subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja pengelolaan keuangan, serta PSO dan subsidi yang optimal, pengelolaan teknologi informasi, serta manajemen risiko dan kepatuhan To oversee the financial management of the company, which includes accounting activities, treasury, public service obligations (PSO), and subsidies, ensuring compliance with prevailing regulations to achieve optimal financial management performance, and the efficient management of PSO and subsidies, information technology, risk management, and compliance.
3	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Membina pengelolaan pemasaran, operasi dan pelayanan kapal penumpang dan perintis serta ke agenan & *tour* agar dicapai kinerja citra produk jasa (*brand image*), pangsa pasar (*market share*), volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa perusahaan, pendapatan usaha jasa angkutan penumpang perusahaan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal. To oversee the management of marketing, operations, and services of passenger and pioneering vessels, as well as agency and tour services, to achieve optimal performance in brand image, market share, service sales volume, customer growth, and revenue. Prioritize optimal performance in maritime safety, service quality, and customer satisfaction.
4	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Membina pengelolaan kegiatan penyediaan dan penyiapan pakai sertifikat, fasilitas serta peralatan nautika, teknika, penyediaan dan modifikasi kapal, bahan bakar kapal dan *surveyor* serta *parenting* SBU Galangan PELNI Surya Surabaya agar dicapai kinerja kelaikan laut (*seaworthiness*), kesiapan pakai (*semi capability performance*), keandalan (*reliability performance*), efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penyiapan pakai alat produksi jasa angkutan laut perusahaan yang optimal. To supervise the activities related to the provision and preparation of certificates, facilities, and nautical and technical equipment, the provision and modification of vessels, fuel supply, and surveyors. Also, to parent the PELNI Surya Surabaya shipyard SBU to achieve optimal performance in seaworthiness, readiness, reliability, and the effective and efficient provision and preparation of maritime transportation production tools.

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
5	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Membina kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, administrasi dan pelayanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan di wilayah kerja perusahaan serta pengelolaan aset dan sebagai *parenting* untuk SBU Hotel Bahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja produktivitas sumber daya manusia dan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan pengawakan, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan administrasi serta layanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan dan ketertiban umum serta pemanfaatan aset pada wilayah kerja perusahaan yang optimal, serta pengadaan barang dan jasa. To oversee the management of human resources and organization, administration and general office housekeeping services, security within the company's working area, asset management, and the parenting of the Bahtera Hotel SBU in compliance with applicable regulations. Ensure optimal productivity and organizational performance, improve human resource quality, manage staffing, maintain order and smooth administrative operations, and provide general housekeeping services, security, public order, asset utilization, and procurement of goods and services.
6	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Membina pengelolaan kegiatan pemasaran angkutan barang kapal penumpang & perintis, pemasaran kapal tol laut dan ternak, operasi dan pelayanan kapal tol laut & ternak serta pengembangan usaha angkutan barang & tol laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja citra produk jasa (*brand image*), pangsa pasar (*market share*), volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa perusahaan, pendapatan usaha jasa angkutan barang perusahaan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal. To manage the marketing of cargo transport for passenger and pioneering vessels, the marketing of sea toll and livestock vessels, the operations and services of sea toll and livestock vessels, and the development of cargo and sea toll transport business in accordance with applicable regulations. Aim to achieve optimal performance in brand image, market share, service sales volume, customer growth, and cargo transport business revenue, while prioritizing optimal performance in maritime safety, service quality, and customer satisfaction.

DIREKTUR PENANGGUNGJAWAB GCG

Salah seorang Direksi ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan, dalam hal ini Direktur yang ditunjuk menjadi penanggung jawab GCG. Dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

DIRECTOR RESPONSIBLE FOR GCG

One of the Directors is appointed as the person responsible for the implementation and monitoring of GCG within the Company, in this case, the appointed Director is responsible for GCG. The responsibilities are as follows:

1. Developing a work plan necessary to ensure the Company complies with the Guidelines for Good Corporate Governance Implementation and other regulations to implement good corporate governance principles;
2. Monitoring and ensuring that the Company's business activities do not deviate from the applicable provisions;

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

3. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

Direktur Penanggung Jawab GCG juga berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan GCG minimal setahun sekali, disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dengan muatan laporan, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (*action plan*) untuk penerapan GCG;
2. Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada *stakeholders.*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) Nomor SK 05.19/SK/HKO.01/2022 tentang Penetapan dan Penunjukan Direktur Sebagai Penanggungjawab dalam Penerapan dan Pemantauan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan, ditunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai Ditektur Penanggung Jawab GCG.

PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI

Kebijakan terkait rapat diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu. Pada umumnya, penyelenggaraan rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).

Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi.

3. Monitoring and ensuring the Company's compliance with all agreements and commitments made with third parties.

The Director responsible for GCG is also required to prepare an annual GCG implementation report, submitted to the Board of Commissioners and Shareholders, containing the following:

1. Work Plan (action plan) for GCG implementation;
2. Monitoring of compliance with applicable provisions and commitments to stakeholders.

Based on the Board of Directors Decree of PT PELNI (Persero) Number SK 05.19/SK/HKO.01/2022 concerning the Appointment and Designation of a Director Responsible for the Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance (GCG) in the Company, the Director of Finance and Risk Management is appointed as the GCG Responsible Director.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

POLICY ON HOLDING BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

The policy regarding meetings is regulated in the Joint Decree between the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual of PT PELNI (Persero) and has been published on the Company's official website.

The Board of Directors' meeting is held whenever deemed necessary, but at least once a month. The Board of Directors' meeting can be held outside the regular schedule if deemed necessary. Generally, the Board of Directors' meeting is chaired by the President Director. In the absence of the President Director, the meeting is chaired by a designated member of the Board of Directors.

The Board of Directors' meeting is valid and has the authority to make binding decisions if attended by more than 50% of the members of the Board of Directors or their representatives. There are provisions regarding the formal decision-making mechanism of the Board of Directors, which include (1) decision-making through Board of Directors meetings; (2) decision-making outside meetings (via circulars, etc.).

If the Board of Directors makes binding decisions at a physical Board of Directors meeting, the decision must be approved in writing by all members of the Board of Directors. These

Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya mengikat dengan ketentuan hukum yang sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik. Direksi juga dapat mengambil keputusan di luar rapat atau secara sirkuler, asalkan pengambilan keputusan tersebut dan usul yang akan diputuskan disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua Direksi.

Pengambilan keputusan pada rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi sesuai dengan tingkat kesegeraan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan yang diajukan kepada Direksi dan/atau disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Direksi secara fisik (sirkuler).

Hasil keputusan Direksi dikomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak disahkan dan atau ditandatanganinya keputusan tersebut.

decisions have the same legal binding force as decisions made at physical Board of Directors meetings. The Board of Directors can also make decisions outside of meetings or by circular, provided that the decision-making and the proposal to be decided are approved in writing and signed by all members of the Board of Directors.

Decision-making at the Board of Directors meeting or outside the Board of Directors meeting is based on the urgency within 14 working days from the receipt of the proposal submitted to the Board of Directors and/or approved in writing by all members of the Board of Directors when making binding decisions outside the physical Board of Directors meeting (circular).

The decisions made by the Board of Directors are communicated to the relevant organizational levels below the Board of Directors within 7 days at the latest after the decision is ratified and/or signed.

REALISASI PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI TAHUN 2023

RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi PT PELNI (Persero) menyelenggarakan rapat sebanyak 62 (enam puluh dua) kali, sesuai dengan jumlah Rapat Direksi yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direksi.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT DIREKSI

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023:

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS IN 2023

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Throughout 2023, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) held 62 meetings, in line with the number of Board of Directors meetings planned in the Board of Directors' Work Plan and Budget (RKA).

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN MEETINGS

Below is the frequency and attendance rate of each member of the Board of Directors in meetings held during 2023:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi
Frequency and Attendance Rate of Directors in Board of Directors Meetings

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	62	57	91,94%
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	62	61	98,39%

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi
Frequency and Attendance Rate of Directors in Board of Directors Meetings

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
3	Yahya Kuncoro*)	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	31	31	100,00%
4	Nuraini Dessy W**)	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	21	21	100,00%
5	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	62	62	100,00%
6	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	62	62	100,00%
7	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	62	60	96,77%

*) Berakhir masa jabatan pada tanggal 1 Agustus 2023
**) Mulai menjabat pada tanggal 21 September 2023
*) Term of office ended on August 1, 2023
**) Assumed office on September 21, 2023

RISALAH RAPAT DIREKSI

Berikut ini merupakan risalah Rapat Direksi yang memuat waktu pelaksanaan rapat, agenda rapat, dan daftar Direksi yang hadir dalam rapat internal selama tahun 2023:

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Below are the minutes of the Board of Directors meetings, including the time of the meeting, agenda, and list of Directors present at internal meetings throughout 2023:

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
1	Selasa, 3 Januari 2023 Tuesday, January 3, 2023	1. Penetapan BoD-2 pada SO Divisi SDM dan Divisi Pengawakan 2. Penyampaian Daftar Pegawai MPP dan Kandidat penggantinya 3. Penyampaian Usulan Mutasi/Rotasi BoD-1 dan BoD-2 4. Penyampaian Usulan Nakhoda/KKM 1. Confirmation of BoD-2 in the HR Division and Crew Management Division 2. Presentation of the List of MPP Employees and Their Replacement Candidates 3. Presentation of Proposals for Transfers/ Rotations for BoD-1 and BoD-2 4. Presentation of Captain/Chief Engineer Proposals	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. VP SDM / VP of HR 7. Yossianis Marciano
2	Selasa, 10 Januari 2023 Tuesday, January 10, 2023	1. Penetapan Data Usulan PSO tahun 2024 (VP PSO) 2. Penyelesaian Utang-Piutang YKPP ke RS Pelni (VP *Treasuri*) 3. Pemaparan *Final Report* Reklasifikasi Kelas Cabang, Terminal *Point*, serta Optimalisasi SO & SDM Cabang oleh Konsultan Fortia (VP SDM) 4. Pembahasan SDM/*Talent Pool* 1. Confirmation of 2024 PSO Data Proposals (VP of PSO) 2. Settlement of YKPP's Accounts Payable to RS Pelni (VP of Treasury) 3. Presentation of Final Report on Branch Class Reclassification, Terminal Points, and SO & HR Optimization by Fortia Consultants (VP of HR) 4. Discussion on HR/Talent Pool	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 8. VP PSO / VP of PSO 9. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 10. VP SDM / VP of HR
3	Jumat, 13 Januari 2023 Friday, January 13, 2023	1. Organisasi Pengembangan IT + *Manage Service* Siparsel 2. Finalisasi *Draft* SOP PSO (remedial) 3. Finalisasi RJPP 2024/2025 (remedial) 1. IT Development Organization + Manage Service Siparsel 2. Finalization of Draft SOP PSO (remedial) 3. Finalization of RJPP 2024/2025 (remedial)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP PSO / VP of PSO 8. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
4	Selasa,17 Januari 2023 Tuesday, January 17, 2023	1. Laporan Manajemen s/d Desember 2022 (*Unaudited*) 2. Lain-Lain 1. Management Report until December 2022 (Unaudited) 2. Miscellaneous	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Akuntansi / VP of Accounting 8. VP *Treasury* / VP of Treasury 9. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management
5	Kamis, 26 Januari 2023 Thursday, January 26, 2023	1. *Highlight* Materi Persiapan RUPS RKAP 2023 2. Pembahasan bisnis proses dan rencana peningkatan layanan *pre on board, on board* dan *post on board* tahun 2023 yang mengacu pada sppal 1. Highlights of Preparation Materials for 2023 RKAP RUPS 2. Discussion on business processes and plans to improve pre on board, on board, and post on board services in 2023 in reference to sppal	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services 8. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 9. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 10. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
6	Kamis, 02 Februari 2023 Thursday, February 2, 2023	1. Paparan Kajian Struktur Bisnis Pelni Grup oleh konsultan UI (mengundang Direksi Anak dan Cucu Usaha PT PELNI) 2. Progres Pengadaan Kapal Roro (*Timeline*) 3. Pemaparan Pelayanan Penumpang meliputi: a. Paparan keluhan pelanggan melalui ke *Contact Centre* 162 b. Pemetaan penempatan mesin Cetak *Boarding Pass* di pelabuhan c. Pemetaan layanan *pre-on board* dan *post-onboard* untuk semua pelabuhan masa normal maupun *peak season* 4. Laporan Kasus Keamanan di atas kapal 1. Presentation of Pelni Group Business Structure Study by UI Consultant (inviting Directors of Subsidiaries and Sub-subsidiaries of PT PELNI) 2. Progress on Roro Ship Procurement (Timeline) 3. Presentation of Passenger Services including: a. Presentation of customer complaints via Contact Center 162 b. Mapping of boarding pass printing machine placements at ports c. Mapping of pre-on board and post-on board services for all ports during normal and peak seasons 4. Report on Security Cases on Board	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development 8. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations 9. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary 10. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services
7	Selasa, 07 Februari 2023 Tuesday, February 7, 2023	1. Pertemuan dengan Tim Bipartit Perundingan PKB PT PELNI (Persero) 2. Penentuan Klastering Koordinator Cabang (*hybrid*) oleh Konsultan Fortia 3. Paparan konsep Rapim 2023 4. Pembahasan Materi *Roadshow* PMN 1. Meeting with the Bipartite Negotiation Team for the PT PELNI (Persero) Collective Labor Agreement 2. Determination of Branch Coordinator Clustering (hybrid) by Fortia Consultants 3. Presentation of the 2023 Management Meeting Concept 4. Discussion on PMN Roadshow Materials	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 9. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary 10. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
8	Selasa, 21 Februari 2023 Tuesday, February 21, 2023	1. Laporan Kondisi ASPAN 2. Laporan Manajemen s/d Januari 2023 3. Realisasi dan Rencana Pemeliharaan Armada Kapal PELNI 2023 4. Progres Penghapusbukuan kapal Caraka 5. Progres Pengadaan Kapal Roro (sisa dana PMN) 6. Progres Modifikasi Kapal 7. Progres Pengadaan Kapal Tongkang dan *Tugboat* (Kajian Internal) 8. Paparan Kajian Internal Bisnis *Docking* PELNI 1. ASPAN Condition Report 2. Management Report until January 2023 3. Realization and Plan for PELNI Fleet Maintenance in 2023 4. Progress on the Write-off of Caraka Ship 5. Progress on Roro Ship Procurement (remaining PMN funds) 6. Progress on Ship Modifications 7. Progress on Barge and Tugboat Procurement (Internal Study) 8. Presentation of Internal Study on PELNI Docking Business	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP *Treasury* / VP of Treasury 10. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development 11. VP Teknik / VP of Engineering 12. VP Usaha Barang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Goods & Support Services
9	Selasa, 28 Februari 2023 Tuesday, February 28, 2023	1. Laporan Manajemen Januari 2023 2. Penyampaian isu-isu dari tiap Direktorat 3. Diskusi 1. January 2023 Management Report 2. Presentation of Issues from Each Directorate 3. Discussion	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. Seluruh VP / All of VP
10	Kamis, 9 Maret 2023 Thursday, March 9, 2023	1. Rencana strategis Hotel Bahtera tahun 2023 2. Menyampaikan Rencana MoU PELNI dengan Baltic 3. Tindak Lanjut atas kasus keagenan di Lhokseumawe 4. Rencana Pelayanan Penumpang tahun 2024 dengan Kenaikan Biaya Makan 65K pada PSO 2024 5. Rencana Pemeliharaan Kapal tahun 2024 setelah Penyesuaian Biaya Pemeliharaan untuk PSO 2024 1. Strategic Plan for Hotel Bahtera in 2023 2. Presentation of PELNI's MoU Plan with Baltic 3. Follow-up on agency case in Lhokseumawe 4. Passenger Service Plan for 2024 with a Meal Cost Increase of 65K in 2024 PSO 5. Ship Maintenance Plan for 2024 after Adjustment of Maintenance Costs for 2024 PSO	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Keagenan / VP of Agency 8. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services 9. VP PSO / VP of PSO 10. VP Teknik / VP of Engineering

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
11	Selasa, 14 Maret 2022 Tuesday, March 14, 2022	1. Persiapan Angkutan Lebaran 2023 2. Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan (*Security*) di atas Kapal 3. Paparan PMO-Diversifikasi Bisnis Komersial Usaha Angkutan Penumpang-Peningkatan Infrastruktur dan Layanan di atas kapal penumpang untuk pemenuhan SPPAL (Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut) 1. Preparation for Eid Transport 2023 2. Extension of Security Contract on Board 3. Presentation of PMO-Diversification of Commercial Business for Passenger Transport-Improvement of Infrastructure and Services on passenger ships to meet SPPAL (Passenger Sea Transport Service Standards)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. Seluruh VP / All of VP
12	Jumat, 24 Maret 2023 Friday, March 24, 2023	1. Lapmen s/d Februari 2023 2. Permohonan Ijin Asuransi Kapal dan Pengadaan Pelumas 3. Penyampaian Hasil kajian ACT oleh VP SDM 1. Management Report until February 2023 2. Request for Ship Insurance and Lubricant Procurement Permits 3. Presentation of ACT study results by VP of HR	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Akuntansi / VP of Accounting 8. VP *Treasury* / VP of Treasury 9. VP SDM / VP of HR 10. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management
13	Selasa, 28 Maret 2023 Tuesday, March 28, 2023	1. Pembahasan Laporan Manajemen s/d Februari 2023 2. Tindak Lanjut Rapim Sebelumnya 3. Persiapan Angkutan Lebaran 2023 1. Discussion on Management Report until February 2023 2. Follow-up on Previous Management Meetings 3. Preparation for Eid Transport 2023	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. Semua VP dan Kepala Cabang / All of VP and Branch Managers
14	Selasa, 4 April 2023 Tuesday, April 4, 2023	1. Pelayanan Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero) 2. *Man Power Planning* Pegawai Laut 3. *Man Power Planning* Kapal Penumpang 1. PT PELNI (Persero) Passenger Transport Services 2. Sea Employee Man Power Planning 3. Passenger Ship Man Power Planning	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. VP Pengawakan / VP of Manning

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
15	Selasa, 18 April 2023 Tuesday, April 18, 2023	1. Evaluasi Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran 2023 2. Rencana Penyiapan Floating Hotel pada KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo 1. Evaluation of 2023 Eid Homecoming Transport Services 2. Plan for Preparing Floating Hotels at the 2023 ASEAN Summit in Labuan Bajo	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. Semua VP / All of VP
16	Rabu, 26 April 2023 Wednesday, April 26, 2023	1. Pembahasan Laporan Manajemen s/d Maret 2023 dan Laporan Manajemen *Audited* 2022 2. Persiapan *Floating* Hotel Km. Sinabung dan Pelita Arunika untuk KTT ASEAN di Labuan Bajo 1. Discussion on Management Report until March 2023 and Audited Management Report 2022 2. Preparation for Floating Hotels Km. Sinabung and Pelita Arunika for the ASEAN Summit in Labuan Bajo	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Usaha Penumpang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Passenger Business & Support 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP *Treasury* / VP of Treasury
17	Senin,8 Mei 2023 Monday, May 8, 2023	1. Pemaparan Laporan Final Kajian Kelayakan Modifikasi Kapal Penumpang KM. Lambelu & KM Bukit Siguntang oleh DKPU-ITS 2. Pembahasan *Draft* Materi Rapat Teknis dengan Keasdepan KBUMN 1. Presentation of the Final Feasibility Study Report on the Modification of KM. Lambelu & KM Bukit Siguntang Passenger Ships by DKPU-ITS 2. Discussion on Draft Technical Meeting Materials with the Deputy Assistant of KBUMN	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Teknik / VP of Engineering 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP *Treasury* / VP of Treasury
18	Senin, 15 Mei 2023 Monday, May 15, 2023	1. *Update* Progres Investasi 2. Paparan rencana Program workshop pencegahan korupsi. 3. Pembahasan Kandidat Komisaris Anper dan Afiliasi 1. Update on Investment Progress 2. Presentation of Corruption Prevention Workshop Program Plan 3. Discussion on Candidates for Anper and Affiliated Commissioners	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management 8. VP SDM / VP of HR

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
19	Selasa, 23 Mei 2023 Tuesday, May 23, 2023	1. Pemaparan Program Budaya untuk Kegiatan *Ambidextrous Leadership* Program oleh konsultan ACT 2. Pembahasan Laporan Manajemen s/d April 2023 3. Pemaparan Acara *Lauching* Logo Baru PT PELNI (Persero) dan Rencana Implementasi Tindaklanjut Logo Baru 1. Presentation of the Ambidextrous Leadership Program Culture for Activities by ACT Consultants 2. Discussion on Management Report until April 2023 3. Presentation of PT PELNI (Persero) New Logo Launch Event and Follow-up Plan for New Logo Implementation	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP *Treasury* / VP of Treasury 10. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary 11. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management
20	Selasa, 30 Mei 2023 Tuesday, May 30, 2023	1. Laporan Manajemen 2. Komersialisasi Kapal Lognus 5 3. Usulan Kerjasama *Ship Management* 4. Progres lelang Kapal Caraka CJN III-4 1. Management Report 2. Commercialization of Lognus 5 Ship 3. Proposal for Ship Management Cooperation 4. Progress on the Auction of Caraka CJN III-4 Ship	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Usaha Barang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Goods & Support Services 8. VP Pengawakan / VP of Manning 9. TIM Penghapusbukuan Aset 10. VP *Treasury* / VP of Treasury 11. VP Akuntansi / VP of Accounting

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
21	Selasa, 6 Juni 2023 Tuesday, June 6, 2023	1. Pemaparan Kajian Remunerasi Direksi oleh Konsultan WTW 2. Pemaparan tindak lanjut dari biaya pemeliharaan dan perawatan kapal perintis (*General Overhaul*) 3. Pemaparan materi PELNI untuk Wamen Ke Menteri Perhubungan 4. Pemaparan Sistem Pengawakan (VP Pengawakan, VP SDM) 5. Ke-SDM-an: (VP SDM) Pembahasan : a. Kandidat Komisaris Anper dsn Afiliasi b. Usulan Pengurus Dapen 1. Presentation of the Director's Remuneration Study by WTW Consultants 2. Presentation of Follow-up on the Maintenance and Overhaul Costs of Pioneer Ships (General Overhaul) 3. Presentation of PELNI Materials for the Vice Minister of Transportation 4. Presentation of the Manning System (VP of Manning, VP of HR) 5. HR Matters: (VP of HR) Discussion: a. Candidates for Anper and Affiliated Commissioners b. Proposals for Dapen Management	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. VP Pengawakan / VP of Manning
23	Selasa, 13 Juni 2023 Tuesday, June 13, 2023	1. Pertanggungjawaban atas tindakpidana sdr. Febri Dirut ASPAN 2. Optimalisasi Hotel Bahtera 3. Penyelesain Pembayaran Temuan BPK Pertamina dan Lebih Bayar PELNI 4. Penyusutan Aset Tetap 5. Perpanjangan Kredit dari BNI 1. Accountability for the criminal act by Febri, Director of ASPAN 2. Optimization of Hotel Bahtera 3. Settlement of BPK Pertamina Findings and PELNI Overpayments 4. Depreciation of Fixed Assets 5. Extension of Credit from BNI	6. Tri Andayani 7. Anik Hidayati 8. Yahya Kuncoro 9. Robert M.P. Sinaga 10. Rainoc 11. Yossianis Marciano 12. VP SDM / VP of HR 13. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 14. Kepala SPI / Head of Internal Audit 15. VP Akuntansi / VP of Accounting 16. VP *Treasury* / VP of Treasury

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
24	Selasa, 20 Juni 2023 Tuesday, June 20, 2023	1. Paparan persiapan RUPS Laporan Keuangan *Audited* 2022 PT PELNI (Persero) 2. Paparan Lapmen s/d Mei 2023 3. Presentasi persiapan materi Wamen II dan Dirjen Hubla 4. Usulan Penyelesaian Kerjasama Pemanfaatan Lahan PELNI dan Pelindo 5. Progres investasi 1. Presentation of Preparation for the 2022 Audited Financial Report RUPS of PT PELNI (Persero) 2. Presentation of Management Report until May 2023 3. Presentation of Preparation Materials for Vice Minister II and Director General of Sea Transportation 4. Proposal for Settlement of Land Utilization Cooperation between PELNI and Pelindo 5. Investment Progress	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP Treasury / VP of Treasury 10. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations 11. VP Umum / VP of General Affairs 12. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development
25	Senin, 26 Juni 2023 Monday, June 26, 2023	1. Persiapan Bisnis *Crewing* Pada Anak Perusahaan 2. Tindaklanjut atas Tanggapan Permohonan Persetujuan Optimalisasi Sisa Dana PMN Tahun 2015 3. Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Laporan Final Kajian Komersialisasi Kapal Hasil PMN Tahun 2015 4. Manipulasi Muatan Tol Laut di kepulauan Anambas 5. Laporan Kebakaran KM Bukit Siguntang 6. Permohonan Dispensasi Penumpang Periode Idul Adha & Libur Sekolah 2023 1. Preparation for Crewing Business in Subsidiaries 2. Follow-up on Response to Approval Request for Optimization of Remaining PMN Funds in 2015 3. Request for Approval and Submission of Final Report on the Commercialization Study of Ships Resulting from 2015 PMN 4. Manipulation of Sea Freight Load in Anambas Islands 5. Report on the Fire Incident on KM Bukit Siguntang 6. Request for Passenger Dispensation during Eid al-Adha & School Holidays 2023	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Pengawakan / VP of Manning 8. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development 9. VP Usaha Barang Non Komersial / VP of Non-Commercial Cargo 10. VP Teknik / VP of Engineering 11. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations 12. Kepala DPA QHSSE / Head of DPA QHSSE

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
26	Selasa, 4 Juli 2023 Tuesday, July 4, 2023	1. Laporan hasil audiensi dengan Wamen BUMN II 2. Tindaklanjut kunjungan ke Pj. Gubernur Jakarta 3. Tindaklanjut PKS antara PT PELNI (Persero) dengan ke KASAL 4. Pembahasan besaran Jaspro 2022 dan Rencana kenaikan gaji tahun 2023 5. Pembahasan Final GSM Logo Baru PELNI 1. Report on the results of the meeting with the Vice Minister of SOEs II 2. Follow-up on visit to the Acting Governor of Jakarta 3. Follow-up on PKS between PT PELNI (Persero) and the Navy 4. Discussion on 2022 Jaspro Amount and 2023 Salary Increase Plan 5. Discussion on the Final GSM New PELNI Logo	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Hukum / VP of Legal 8. VP Pengamanan / VP of Security Management 9. VP SDM / VP of HR 10. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
27	Selasa, 11 Juli 2023 Tuesday, July 11, 2023	1. Pembahasan Pengelolaan PELNI Mart 2. Progres Pengadaan Kapal Roro 3. Progres Penghapusbukuan Kontainer 4. Tindaklanjut kunjungan ke Pj. Gubernur Jakarta (lanjutan) 5. Skema Remunerasi 6. Finalisasi Disain Seragam dan Cat Kapal (lanjutan) 7. Persiapan Rapat Konsinyering PSO dan Subsidi 2023 1. Discussion on PELNI Mart Management 2. Progress on Roro Ship Procurement 3. Progress on Container Write-off 4. Follow-up on visit to the Acting Governor of Jakarta (continued) 5. Remuneration Scheme 6. Finalization of Uniform Design and Ship Paint (continued) 7. Preparation for PSO and Subsidy 2023 Consignment Meeting	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Hukum / VP of Legal 8. VP SDM / VP of HR 9. VP PSO / VP of PSO
28	Rabu, 12 Juli 2023 Wednesday, July 12, 2023	1. Finalisasi Disain Seragam dan Cat Kapal (lanjutan) 2. Skema Remunerasi 1. Finalization of Uniform Design and Ship Paint (continued) 2. Remuneration Scheme	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
29	Selasa, 18 Juli 2023 Tuesday, July 18, 2023	1. Pelepasan saham YKPP dan DPP di PT ASPAN 2. Pembahasan Pengelolaan *Tenant* di atas Kapal 3. Pemaparan Fasilitas Kesehatan Pegawai 4. Persetujuan Realokasi Anggaran Investasi PT PBM SBN 5. Laporan Usulan KPI Kapal 6. Pengusulan penggantian pengurus Yayasan Sekar Laut 1. Divestment of YKPP and DPP Shares in PT ASPAN 2. Discussion on Tenant Management on Board 3. Presentation of Employee Health Facilities 4. Approval of Investment Budget Reallocation for PT PBM SBN 5. Report on Ship KPI Proposals 6. Proposal for Replacement of Sekar Laut Foundation Management	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services 9. VP Usaha Penumpang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Passenger Business & Support 10. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation
30	Selasa, 25 Juli 2023 Tuesday, July 25, 2023	1. Laporan Manajemen s/d Bulan Juni 2023 (SM.I) 2. Pembahasan Surat KBUMN atas Penetapan Penghasilan Direksi dan Dekom tahun 2023 3. Pembahasan optimalisasi dan penghapusbukuan aset diwilayah Pelindo 4. Presentasi Program Kerja 2023 dan Pengamanan di Pusat dan Cabang oleh Tim TNI AL 1. Management Report until June 2023 (SM.I) 2. Discussion on KBUMN Letter on Director and Commissioner Income Determination for 2023 3. Discussion on Asset Optimization and Write-off in Pelindo Area 4. Presentation of 2023 Work Program and Security in Central and Branch Offices by the Navy Team	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary 8. VP Umum / VP of General Affairs 9. VP Hukum / VP of Legal 10. LO TNI AL / Indonesian Navy Logistics Organization
31	Selasa, 01 Agustus 2023 Tuesday, August 1, 2023	1. Pembahasan fasilitas kesehatan pegawai PELNI (lanjutan) 2. Penetapan Tantiem TB 2022 dan Remunerasi 2023 serta Fasilitas Direksi dan Komisaris Anak Usaha dan Afiliasi. 3. Pembahasan SK Capital & Investment Commite 1. Discussion on PELNI Employee Health Facilities (continued) 2. Determination of Tantiem TB 2022 and Remuneration 2023 and Facilities for Directors and Commissioners of Subsidiaries and Affiliates. 3. Discussion on Capital & Investment Committee SK	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary 9. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
32	Senin, 07 Agustus 2023 Monday, August 7, 2023	Pembahasan Terkait Investasi Discussion on Investment Matters	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development
33	Selasa, 08 Agustus 2023 Tuesday, August 8, 2023	1. Presentasi SBI terkait dengan PELNI Mart 2. Pembahasan penyesuain remunerasi pegawai (lanjutan) 3. Remun dan Tantiem BOC BOD PT PID dan PT SBN (lanjutan) 1. Presentation by SBI related to PELNI Mart 2. Discussion on Employee Remuneration Adjustment (continued) 3. Remuneration and Tantiem for BOC and BOD of PT PID and PT SBN (continued)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. Direksi SBI / Board of Directors of SBI 7. VP SDM / VP of HR
34	Selasa, 15 Agustus 2023 Tuesday, August 15, 2023	1. Pembahasan penyesuaian remunerasi pegawai (lanjutan) 2. Penetapan KPI Kapal (lanjutan) 3. KAK (TOR) penyusunan RJPP 2025-2029 4. Pelaporan Timeline Pengadaan Tongkan dan *Tugboat* 5. Pemaparan Kajian Internal *Shipping* Manajemen 1. Discussion on Employee Remuneration Adjustment (continued) 2. Determination of Ship KPI (continued) 3. Terms of Reference (TOR) for RJPP 2025-2029 4. Reporting Timeline for Barge and Tug Boat Procurement 5. Presentation of Internal Study on Shipping Management	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 7. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 8. VP Pengadaan / VP of Procurement 9. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development
35	Selasa, 22 Agustus 2023 Tuesday, August 22, 2023	1. Materi persiapan rapat APS RKAP 2024 2. Laporan Kinerja s/d Bulan Juli 2023 1. Preparation Materials for APS RKAP 2024 Meeting 2. Performance Report until July 2023	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 7. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP *Treasury* / VP of Treasury 10. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
36	Jumat. 25 Agustus 2023 Friday, August 25, 202	1. Laporan Mingguan Investasi Pengadaan Tongkang, *Tugboat* dan Roro Bukan Baru (*Weekely Report*) 2. Pemaparan proses bisnis Divisi Pengamanan (SOP, alur proses, dll) 3. Pengeloaan Gudang Persmat Tg Priok 1. Weekly Report on Investment for Barge, Tug Boat, and Non-New Roro Procurement 2. Presentation of Business Process Division Security (SOP, process flow, etc.) 3. Management of Tg Priok Persmat Warehouse	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Pengamanan / VP of Security Management 7. VP Teknik / VP of Engineering 8. VP Pengadaan / VP of Procurement
37	Rabu, 6 September 2023 Wednesday, September 6, 2023	1. Pemaparan Materi Rapim SM.1/2023 2. Penyampaian Ijin Prinsip Addendum Pekerjaan Pengadaan Suplai Bahan Baku Makanan di Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Tahun 2023 3. Progres Investasi Kapal *Tugboat,* Tongkang dan Roro 4. Pembahasan Komponen Perjalanan Dinas Pegawai 5. Pembahasan Penyesuaian Remunerasi Pegawai (lanjutan) 1. Presentation of SM.1/2023 Management Meeting Materials 2. Submission of Principal Permit for Addendum to Food Supply Procurement Work on PT PELNI (Persero) Passenger Ships for 2023 3. Progress on Tugboat, Barge, and Roro Ship Investments 4. Discussion on Employee Business Travel Components 5. Discussion on Employee Remuneration Adjustment (continued)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services 7. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development 8. VP Umum / VP of General Affairs 9. VP SDM / VP of HR 10. VP Usaha Barang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Goods & Support Services

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
38	Kamis, 7 September 2023 Thursday, September 7, 2023	1. *Road Map* Penyehatan DPP oleh Konsultan 2. Pembahasan Nomenklatur Komite Manajemen Risiko dan Perubahan *Risk Appetite Statement* 3. Tindak lanjut lebih bayar dan temuan BPK atas transaksi BBM dengan Pertamina 4. Pembahasan hasil Audit Anak dan Cucu Perusahaan (*BoD Only*) 5. Ke-SDM-an (Pembahasan Kandidat *BoC-BoD* Anak Usaha dan Afiliasi) (*BoD only*) 1. DPP Health Roadmap by Consultant 2. Discussion on Management Risk Committee Nomenclature and Risk Appetite Statement Changes 3. Follow-up on Overpayment and BPK Findings on Fuel Transactions with Pertamina 4. Discussion on Subsidiary and Sub-subsidiary Audit Results (BoD Only) 5. HR Matters (Discussion on Subsidiary and Affiliated BoC-BoD Candidates) (BoD only)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP SDM / VP of HR 7. VP Manajemen Risiko 8. VP BBM / VP of Fuel 9. Kepala SPI / Head of Internal Audit
39	Selasa, 12 September 2023 Tuesday, September 12, 2023	1. Pembahasan Pagu anggaran dan Realisasi Kapal Perintis 2. Laporan Kinerja s/d Agustus 2023 3. Ke-SDM-an 1. Discussion on Budget Ceiling and Realization for Pioneer Ships 2. Performance Report until August 2023 3. HR Matters	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Akuntansi / VP of Accounting 7. VP *Treasury* / VP of Treasury 8. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management 9. VP SDM / VP of HR
40	Selasa, 19 September 2023 Tuesday, September 19, 2023	1. Penyampaian Kajian *Subsidiary Governance* oleh Konsultan (Divisi Corplan) 2. Pemaparan Pengelolaan Aset Kapal Penumpang PELNI (Divisi Usaha Penumpang Komersial) 1. Presentation of Subsidiary Governance Study by Consultant (Corplan Division) 2. Presentation on Management of PELNI Passenger Ship Assets (Commercial Passenger Business Division)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 7. VP Usaha Penumpang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Passenger Business & Support

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
41	Rabu, 20 September 2023 Wednesday, September 20, 2023	Pembahasan Pengelolaan Tenan di atas kapal Discussion on Tenant Management on Board	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Usaha Penumpang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Passenger Business & Support
42	Jumat, 22 September 2023 Friday, September 22, 2023	1. Laporan Kinerja Pengamanan Angkatan Laut di 4 Cabang Kelas 1 (Divisi Pengamanan) 2. *Approval Desain Tugboat* Tongkang (Divisi Bangbis) 3. Pembahasan tentang Tagihan PT Raja Malikul Mandiri di Lhokseumawe 1. Performance Report on Naval Security in 4 Class 1 Branches (Security Division) 2. Approval of Tugboat Barge Design (Business Development Division) 3. Discussion on PT Raja Malikul Mandiri Invoice in Lhokseumawe	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development 8. VP Keagenan / VP of Agency
43	Selasa, 03 Oktober 2023 Tuesday, October 3, 2023	1. Pemaparan Kajian Alokasi Investasi Pemanfaatan Pengelolaan Dana Internal oleh Konsultan Danareksa (Divisi Bangbis) 2. Konsep Layanan Permakanan Kapal Penumpang Tahun 2024 (Divisi PAP) 3. Temuan Penyalahgunaan Bahan Bakar pada Armada Perintis (Divisi BBM) 4. Pembahasan Temuan SPI pada Aplikasi Audit *Management* tahun 2015 s/d Januari 2022 (Divisi SDM) 5. Pembahasan Rencana Pengelolaan Toko Kapal oleh PT SBI (lanjutan) 1. Presentation of Investment Allocation Study by Danareksa Consultant (Business Development Division) 2. Concept of Passenger Ship Food Service for 2024 (PAP Division) 3. Findings on Fuel Misuse in Pioneer Fleet (Fuel Division) 4. Discussion on SPI Findings in Audit Management Application 2015 to January 2022 (HR Division) 5. Discussion on Ship Store Management Plan by PT SBI (continued)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services 8. VP BBM / VP of Fuel 9. Kepala SPI / Head of Internal Audit

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
44	Selasa, 10 Oktober 2023 Tuesday, October 10, 2023	1. Pemaparan Desain *Final Pilot Project* Renovasi Kamar Mandi oleh PINDAD (Divisi Teknik) 2. Pemaparan Kajian *Assessment* Pre-IPO PT PBM SBN oleh Konsultan Fortia (PT SBN) 3. Pemaparan PT SBN dan PT PID berikut Anak Usahanya terkait Struktur Keuangan Perusahaan dan Proyeksinya 5 tahun kedepan termasuk kebutuhan modalnya dan rencana perubahan Bisnis PT PBN menjadi *Crew Maning* (PT SBN dan PT PID) 4. Kajian penambahan dispensasi kapal penumpang persiapan Nataru (Divisi Operasi) 1. Presentation of Final Design for Bathroom Renovation Pilot Project by PINDAD (Technical Division) 2. Presentation of PT PBM SBN Pre-IPO Assessment Study by Fortia Consultant (PT SBN) 3. Presentation of PT SBN and PT PID including Subsidiaries on Financial Structure and Projections for the next 5 years, including capital needs and plans to change PT PBN's business to Crew Manning (PT SBN and PT PID) 4. Study on Additional Passenger Ship Dispensation for Nataru Preparation (Operations Division)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. Direksi Anak Perusahaan 8. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
45	Selasa, 17 Oktober 2023 Tuesday, October 17, 2023	1. Pemaparan *Corporate Strategic Initiatives* PELNI 2024 (SVP Bangstrat,Vp Bangbis, Vp Corplan) a. PELNI *Maintenance Facility* oleh Konsultan *BDO Consulting* b. PELNI *Learning Center* oleh Konsultan Prasetya Mulya 2. Pemaparan Kinerja Anak Usaha dan Perusahaan Afiliasi 3. Pemaparan Layanan Permakanan Kapal Penumpang Tahun 2024 4. Pemaparan Hasil *Survey* Penawaran Aset dengan PELINDO 5. Laporan Pencatatan Aset PELNI 6. Finalisasi Desain Renovasi Kantor 1. Presentation of PELNI 2024 Corporate Strategic Initiatives (SVP Bangstrat, VP Business Development, VP Corplan) a. PELNI Maintenance Facility by BDO Consulting b. PELNI Learning Center by Prasetya Mulya Consultant 2. Presentation of Subsidiary and Affiliate Performance 3. Presentation of Passenger Ship Food Service for 2024 4. Presentation of Asset Offering Survey Results with PELINDO 5. PELNI Asset Recording Report 6. Finalization of Office Renovation Design	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 8. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 9. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services 10. VP Umum / VP of General Affairs
46	Rabu, 18 Oktober 2023 Wednesday, October 18, 2023	1. Pemaparan Kajian Alokasi Investasi Pemanfaatan Pengelolaan Dana Internal oleh Konsultan Danareksa (Divisi Bangbis) (lanjutan) 2. Pemaparan Laporan Kinerja s/d September 2023 3. Pemaparan RKAP 2024 4. Pemaparan Materi *National Holding Shipping Company* 1. Presentation of Investment Allocation Study by Danareksa Consultant (Business Development Division) (continued) 2. Presentation of Performance Report until September 2023 3. Presentation of 2024 RKAP 4. Presentation of National Holding Shipping Company Materials	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development 8. VP Akuntansi / VP of Accounting tansi 9. VP *Treasury* / VP of Treasury 10. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 11. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
49	Selasa, 24 Oktober 2023 Tuesday, October 24, 2023	1. Pemetaan perencanaan SDM Tahun 2023 s/d 5 Tahun Kedepan oleh Konsultan FED (Divisi SDM) 2. Pengukuran Kinerja dalam proses bisnis (KPKU) oleh konsultan (Divisi Corplan) 3. Pemaparan Persiapan *Event BoatCamp* BUMN Muda dan Sail Cendrawasih 4. Pemaparan terkait sanksi SDM (Divisi SDM) 5. Pemaparan Hasil pemeriksaan Penyalahgunaan Bahan Bakar pada Armada Perintis (Divisi SPI) 1. HR Planning Mapping for 2023 to the next 5 Years by FED Consultant (HR Division) 2. Performance Measurement in Business Processes (KPKU) by consultant (Corplan Division) 3. Presentation of Preparation for BoatCamp BUMN Youth and Sail Cendrawasih Events 4. Presentation on HR Sanctions (HR Division) 5. Presentation of Fuel Misuse Inspection Results in Pioneer Fleet (SPI Division)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 8. VP Usaha Penumpang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Passenger Business & Support 9. VP SDM / VP of HR 10. Kepala SPI / Head of Internal Audit
50	Selasa. 31 Oktober 2023 Tuesday, October 31, 2023	1. Pemaparan *Corporate Strategic Initiatives* PELNI 2024 terkait PELNI *Maintenance Facility* oleh Konsultan BDO (Divisi Bangbis, lanjutan) 2. Pemaparan perubahan Struktur Organisasi (Divisi SDM) 3. Penyampaian kajian *Roadmap* Penyehatan DPP oleh Konsultan (Divisi SDM, lanjutan) 1. Presentation of PELNI 2024 Corporate Strategic Initiatives related to PELNI Maintenance Facility by BDO Consultant (Business Development Division, continued) 2. Presentation of Organizational Structure Changes (HR Division) 3. Submission of DPP Health Roadmap Study by Consultant (HR Division, continued)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development 8. VP SDM / VP of HR

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
51	Selasa, 07 November 2023 Tuesday, November 7, 2023	1. Pemaparan Kinerja YKPP dan Anak Usaha serta Afiliasinya (Ketua YKPP) 2. Pemaparan Stategi TW.4/2023 muatan Kapal Tol Laut, Kapal Penumpang dan Kapal Perintis (Dit. UAB) 3. Pemaparan Pelaksanaan *Survey* Kepuasan Pelanggan (SKP) tahun 2023 oleh Konsultan Kadence (Divisi Corsec) 4. Laporan hasil rakor *roadmap* KBUMN di Bali (SVP Bangstrat) 5. Laporan hasil pembukaan dokumen pengadaan kapal Ropax (Div. Pengadaan) 6. Laporan progres penyelesaian aset belakang kantor (Div. Hukum) 7. Laporan pengawasan tim TNI AL (Div. Pengamanan) 1. Presentation of YKPP and Subsidiary and Affiliate Performance (Chairman of YKPP) 2. Presentation of TW.4/2023 Strategy for Cargo of Sea Toll Ships, Passenger Ships, and Pioneer Ships (UAB Directorate) 3. Presentation of 2023 Customer Satisfaction Survey Implementation (SKP) by Kadence Consultant (Corsec Division) 4. Report on KBUMN Roadmap Coordination Meeting Results in Bali (SVP Bangstrat) 5. Report on the Opening of Ropax Ship Procurement Documents (Procurement Division) 6. Report on the Progress of Rear Office Asset Settlement (Legal Division) 7. Report on Naval Team Supervision (Security Division)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP SDM / VP of HR 8. Ketua YKPP / Chairman of YKPP 9. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary 10. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 11. VP Pengadaan / VP of Procurement 12. VP Hukum / VP of Legal 13. VP Pengamanan / VP of Security Management

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
52	Kamis, 9 November 2023 Thursday, November 9, 2023	1. Kinerja Perusahaan s/d September 2023 2. Progress Persiapan Operasional dan Pelaksanaan Nataru 2023 3. Arahan-Arahan Direksi 1. Company Performance until September 2023 2. Progress on Nataru 2023 Operational and Implementation Preparation 3. Directors' Directions	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Akuntansi / VP of Accounting 8. VP *Treasury* / VP of Treasury 9. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management 10. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations 11. VP Teknik / VP of Engineering 12. VP Surveyor / VP of Surveyor 13. VP BBM / VP of Fuel 14. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services
53	Selasa, 14 November 2023 Tuesday, November 14, 2023	1. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 DPP (DPP, Divisi SDM) 2. Pemaparan Perangkat Analisa Bisnis (Divisi Bangbis) 3. Pemaparan RJPP 2023-2027 dan RKAP 2024 RS PELNI oleh Direksi RS PELNI 4. Pemaparan bisnis proses dan rencana kerja PT SGS dan PT SOLUSI (YKPP, SGS dan SOLUSI) 5. Pembahasan *update* seluruh SOP dan Pedoman PT PELNI (Persero) (Divisi Corplan) 6. Pembahasan terkait Nomenklatur Komite *Capital* dan Investasi (SVP Pengembagan Strategis) 7. Pembahasan Kajian Pedoman Pengeloaan Anak Perusahaan (Divisi Corplan) 1. Approval of 2022 DPP Financial Statements (DPP, HR Division) 2. Presentation of Business Analysis Tools (Business Development Division) 3. of 2023-2027 RJPP and 2024 RKAP of RS PELNI by RS PELNI Directors 4. Presentation of PT SGS and PT SOLUSI Business Processes and Work Plans (YKPP, SGS, and SOLUSI) 5. Discussion on Updating all SOPs and Guidelines of PT PELNI (Persero) (Corplan Division) 6. Discussion on Capital and Investment Committee Nomenclature (SVP Strategic Development) 7. Discussion on Subsidiary Management Guidelines Study (Corplan Division)	1. Anik Hidayati 2. Nuraini Dessy W 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. VP SDM / VP of HR 6. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development 7. Direksi RS PELNI 8. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 9. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
54	Selasa, 20 November 2023 Monday, November 20, 2023	1. Pembahasan Angkutan Nataru 23/24 2. Laporan Manajemen Bulan Oktober dan s.d Oktober 2023 3. Progres Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Kapal CJN 1. Discussion on Nataru 23/24 Transport 2. October 2023 and Year-to-October Management Report 3. Progress on the Write-off and Disposal of CJN Ships	1. Anik Hidayati 2. Nuraini Dessy W 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. VP Akuntansi / VP of Accounting 6. VP *Treasury* / VP of Treasury 7. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management 8. Tim Penghapusbukuan Aset / Asset Deregistration Team 9. VP Pengadaan / VP of Procurement
55	Jumat, 24 November 2023 Friday, November 24, 2023	Tindaklanjut Perubahan Penugasan Kapal Perintis Follow-up on Pioneer Ship Task Changes	1. Anik Hidayati 2. Nuraini Dessy W 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations 7. VP PSO / VP of PSO
56	Sabtu, 25 November 2023 Saturday, November 25, 2023	Finalisasi RKAP 2024 Finalization of 2024 RKAP	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 8. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 9. VP Akuntansi / VP of Accounting 10. VP *Treasury* / VP of Treasury

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
57	Senin, 27 November 2023 Monday, November 27, 2023	Pembahasan Teknis Usulan RKAP TA 2024 Discussion on Technical Proposals for 2024 RKAP	1. Anik Hidayati 2. Nuraini Dessy W 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 7. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP *Treasury* / VP of Treasury
58	Selasa, 28 November 2023 Tuesday, November 28, 2023	1. Persiapan Rapat Gabungan BoD-BoC 2. Pembahasan Permakanan Penumpang TA 2024 3. Kajian penugasan - penugasan kepada PT PELNI (Persero) 4. Pembahasan proses bisnis dan struktur organisasi pengoperasian kapal roro 5. Evaluasi dan Reviu bisnis *Add On* di atas kapal 6. Pembahasan Proses Bisnis dan Kewenangan Divisi Hukum 1. Preparation for Joint BoD-BoC Meeting 2. Discussion on Passenger Food Service for 2024 3. Study on Assignments to PT PELNI (Persero) 4. Discussion on Business Processes and Organizational Structure for Roro Ship Operations 5. Evaluation and Review of Add-On Business on Board 6. Discussion on Business Processes and Legal Division Authorities	1. Anik Hidayati 2. Nuraini Dessy W 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 7. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP *Treasury* / VP of Treasury 10. VP Hukum / VP of Legal 11. VP Usaha Penumpang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Passenger Business & Support
59	Kamis, 30 November 2023 Thursday, November 30, 2023	Pembahasan Permakanan Penumpang dan Kontrak Lainnya di Divisi PAP Tahun Anggaran 2024 Discussion on Passenger Food Service and Other Contracts in PAP Division for 2024 Fiscal Year	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Pelayanan Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Services

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
60	Senin, 04 Desember 2023 Monday, December 4, 2023	1. Serah terima kapal perintis 2. Laporan hasil pengadaan kapal Roro tender ulang 1. Handover of Pioneer Ships 2. Report on Roro Ship Re-Tender Procurement Results	1. Tri Andayani 2. Nuraini Dessy W 3. Robert M.P. Sinaga 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano 6. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations 7. VP Pengadaan / VP of Procurement
61	Jumat, 08 Desember 2024 Friday, December 8, 2024	Penugasan Perintis PT PELNI (Persero) 2024 Assignment of Pioneer Ships PT PELNI (Persero) 2024	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations
62	Selasa, 19 Desember 2023 Tuesday, December 19, 2023	*Kick Off Meeting* Kajian RJPP PELNI Group 2025 - 2029 bersama Konsultan PwC (PAGI) Kick-Off Meeting for RJPP PELNI Group 2025-2029 Study with PwC Consultant (MORNING)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. SVP Pengembangan Strategis / SVP of Strategic Development 8. VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan / VP of Corporate Planning & Transformation 9. Konsultan
63	Selasa, 19 Desember 2023 Tuesday, December 19, 2023	1. Rencana Pengalihan Status Kepegawaian Karyawan PELNI di RS Pelni 2. Pembahasan Kerjasama PELNI dengan Zanzibar *Shipping Corporation* - Tanzania (MoU) 3. Laporan *progress* penyerahan kapal perintis 4. Pembahasan *Progress* PMN PELNI Tahun 2025 1. Plan for the Transfer of PELNI Employee Status at RS Pelni 2. Discussion on PELNI's Cooperation with Zanzibar Shipping Corporation - Tanzania (MoU) 3. Report on the Progress of Pioneer Ship Handover 4. Discussion on PELNI PMN Progress for 2025	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations 8. VP Pengembangan Bisnis / VP of Business Development

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
64	Selasa, 27 Desember 2023 Tuesday, December 27, 2023	1. Laporan Manajemen sd bulan November 2023 2. Pembahasan penugasan pengoperasian kapal milik BPSDM 3. Pembahasan SK Nomenklatur Komite *Capital* dan Investasi 4. Pembahasan biaya perjalanan dinas pada Terminal Poin 5. Pengelolaan hiburan di atas kapal 1. Management Report until November 2023 2. Discussion on the Operation of BPSDM-owned Ships 3. Discussion on Capital and Investment Committee SK Nomenclature 4. Discussion on Business Travel Costs at Terminal Points 5. Management of On-Board Entertainment	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano 7. VP Treasury / VP of Treasury 8. VP Akuntansi / VP of Accounting 9. VP Manajemen Risiko / VP of Risk Management 10. VP Operasi Angkutan Penumpang / VP of Passenger Transport Operations 11. VP Usaha Penumpang Komersial & Penunjang / VP of Commercial Passenger Business & Support

RAPAT GABUNGAN DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023, Direksi PT PELNI (Persero) mengikuti rapat gabungan bersama anggota Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali.

JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) participated in 12 (twelve) joint meetings with the members of the Board of Commissioners.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2023:

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF DIRECTORS IN JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD MEMBERS

Below is the frequency and attendance rate of each member of the Board of Directors in the joint meetings with the Board of Commissioners and Board Members held during 2023:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan
Frequency and Attendance Rate of Directors in Joint Meetings

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	12	12	100%
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	12	12	100%
3	Yahya Kuncoro*)	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	8	8	100%
4	Nuraini Dessy W**)	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	4	4	100%
5	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	12	12	100%
6	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	12	12	100%
7	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	12	12	100%

*) Berakhir masa jabatan pada tanggal 1 Agustus 2023
**) Mulai menjabat pada tanggal 21 September 2023
*) Term of office ended on August 1, 2023
**) Assumed office on September 21, 2023

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

RISALAH RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

MINUTES OF JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS

Risalah Rapat Gabungan
Minutes of Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	18 Januari 2023 January 18, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Desember 2022; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to December 2022; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
2	28 Februari 2023 February 28, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Januari 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to January 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
3	29 Maret 2023 March 29, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Februari 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to February 2023; 3. `Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano

Risalah Rapat Gabungan
Minutes of Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
4	27 April 2023 April 27, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Maret 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to March 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
5	31 Mei 2023 May 31, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d April 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to April 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
6	27 Juni 2023 June 27, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Mei 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to May 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Risalah Rapat Gabungan
Minutes of Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
7	26 Juli 2023 July 26, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Juni 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to June 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
8	29 Agustus 2023 August 29, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Juli 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to July 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Yahya Kuncoro 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
9	25 September 2023 September 25, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Agustus 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to August 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahju Adji Herpriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano

Risalah Rapat Gabungan
Minutes of Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
10	31 Oktober 2023 October 31, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d September 2023; 3. Pembahasan *Draft* RKAP Tahun 2024 4. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to September 2023; 3. Discussion of the 2024 RKAP Draft; 4. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Ali Masykur Musa 2. Kristia Budiyarto 3. Faturohman 4. Wahyu Adji Hepriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossioanis Marciano
11	29 November 2023 November 29, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Oktober 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to October 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Kristia Budiyarto 2. Faturohman 3. Wahju Adji Herpriarsono 4. Raden Suhartono 5. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
12	28 Desember 2023 December 28, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d November 2023; 3. Lain-lain. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Management Report up to November 2023; 3. Miscellaneous.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Kristia Budiyarto 2. Faturohman 3. Wahju Adji Herpriarsono 4. Raden Suhartono 5. Eddy Susanto Soepadmo Direksi / Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RUPS

Informasi terkait kehadiran anggota Direksi dalam RUPS tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian RUPS.

PRESENCE OF BOARD MEMBERS IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Information regarding the presence of Board members in the GMS is detailed in the Corporate Governance Chapter, specifically in the GMS section.

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN OLEH DIREKSI

Setiap kebijakan pengelolaan Perseroan harus ditetapkan dalam suatu kebijakan tertulis. Kebijakan tertulis tersebut ditetapkan oleh Direksi, baik dengan keputusan Direksi atau keputusan Direksi terkait. Bentuk-bentuk Kebijakan Pengurusan Perusahaan seperti Surat Keputusan dan lain-lain, diatur dalam Dokumen Perusahaan tersendiri.

Kebijakan terkait pengelolaan PT PELNI (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

ESTABLISHMENT OF CORPORATE MANAGEMENT POLICIES BY THE BOARD OF DIRECTORS

Every corporate management policy must be established in written form. Such written policies are determined by the Board of Directors, either through a Board decision or a relevant Board decision. The various forms of Corporate Management Policies, such as Decrees and others, are regulated in separate Company Documents.

The policies related to the management of PT PELNI (Persero) established by the Board of Directors during 2023 are as follows:

No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
01.05/02/SK/HKO.01/2023	Pencabutan Pemberian Kompensasi Jasa Pandu Untuk Nakhoda di PT PELNI (Persero). Revocation of Pilotage Service Compensation for Captains at PT PELNI (Persero).	05 Januari 2023 January 5, 2023
01.27/01/SK/HKO.01/2023	Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pusat Di PT PELNI (Persero) Organizational Structure, Main Duties, and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero).	27 Januari 2023 January 27, 2023
01.31/01/SK/HKO.01/2023	Tim Bipartit Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT PELNI (Persero). Bipartite Team for Collective Labor Agreement (CLA) Negotiations at PT PELNI (Persero).	31 Januari 2023 January 31, 2023
02.01/01/SK/HKO.01/2023	Penetapan Kelas Cabang. Branch Class Designation.	01 Februari 2023 February 1, 2023
02.02/01/SK/HKO.01/2023	Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi Kantor Cabang PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Organizational Structure, Main Duties, and Functions of Branch Offices at PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).	02 Februari 2023 February 2, 2023
02.02/02/SK/HKO.01/2023	Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero). Amendment to the Board of Directors Decree No. 01.27/01/SK/HKO.01/2023 on the Organizational Structure, Main Duties, and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero).	02 Februari 2023 February 2, 2023

No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
02.08/01/SK/HKO.01/2023	Tarif Batas Minimum Media Periklanan Di Atas Kapal PT PELNI (Persero). Minimum Advertising Rate on Ships of PT PELNI (Persero).	08 Februari 2023 February 8, 2023
02.10/02/SK/HKO.01/2023	Pencabutan Tim Pengadaan Kapal di PT PELNI (Persero). Revocation of the Ship Procurement Team at PT PELNI (Persero).	10 Februari 2023 February 10, 2023
02.27/01/SK/HKO.01/2023	Pengelolaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT PELNI (Persero). Management of Additional State Equity Participation (PMN) at PT PELNI (Persero).	27 Februari 2023 February 27, 2023
03.02/01/SK/HKO.01/2023	Formasi Unit Kerja dan Jabatan Pada Lingkup Kantor Pusat. Work Unit and Position Formation at the Head Office.	02 Maret 2023 March 2, 2023
03.03/01/SK/HKO.01/2023	Pemberian Kuasa Sebagian Kewenangan Direksi di Lingkungan PT PELNI (Persero). Delegation of Partial Authority of the Board of Directors within PT PELNI (Persero).	03 Maret 2023 March 3, 2023
03.02/02/SK/HKO.01/2023	Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 04.09/03/SK/HKO.01/2021 tentang Tim Penghapusbukuan dan Tim Penjualan Aktiva Tetap KM Caraka Jaya Niaga III-22, KM Caraka Jaya Niaga III-32, dan KM Caraka Jaya Niaga III-4 Milik PT PELNI (Persero). Third Amendment to the Board of Directors Decree No. 04.09/03/SK/HKO.01/2021 regarding the Depreciation and Sale Team for Fixed Assets KM Caraka Jaya Niaga III-22, KM Caraka Jaya Niaga III-32, and KM Caraka Jaya Niaga III-4 Owned by PT PELNI (Persero).	02 Maret 2023 March 2, 2023
03.15/02/SK/HKO.01/2023	Kebijakan Pengelolaan Aplikasi PT PELNI (Persero). Application Management Policy of PT PELNI (Persero).	15 Maret 2023 March 15, 2023
03.30/01/SK/HKO.01/2023	Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi nomor 02.02/01/SK/HKO.01/2023 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi Kantor Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Amendment to the Board of Directors Decree No. 02.02/01/SK/HKO.01/2023 on the Organizational Structure, Main Duties, and Functions of Branch Offices at PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).	30 Maret 2023 March 30, 2023
03.30/03/SK/HKO.01/2023	Formasi Unit Kerja Dan Jabatan Pada Lingkup Kantor Cabang. Work Unit and Position Formation at Branch Offices.	30 Maret 2023 March 30, 2023
02.14/01/SK/HKO.01/2023	Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero). Code of Conduct at PT PELNI (Persero).	14 Februari 2023 February 14, 2023
02.14/04/SK/HKO.01/2023	Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PELNI (Persero) Whistleblowing System Management Guidelines at PT PELNI (Persero).	14 Februari 2023 February 14, 2023
02.14/05/SK/HKO.01/2023	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PELNI (Persero) Gratification Control Policy at PT PELNI (Persero).	14 Februari 2023 February 14, 2023
02.14/06/SK/HKO.01/2023	Pendoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan PT PELNI (Persero). Gratification Control Unit (UPG) Guidelines at PT PELNI (Persero).	14 Februari 2023 February 14, 2023
04.17/01/SK/HKO.01/2023	Tim Posko Angkutan Lebaran 2023 di PT PELNI (Persero). 2023 Eid Transport Task Force at PT PELNI (Persero).	17 April 2023 April 17, 2023

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
04.17/05/SK/HKO.01/2023	Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Direksi nomor: 08.30/01/SK/HKO.01/2021 tentang Pengurus Badan Kerohanian Islam PT PELNI (Persero) Periode 2021 - 2024. Third Amendment to the Board of Directors Decree No. 08.30/01/SK/HKO.01/2021 on the Management of the Islamic Spiritual Body of PT PELNI (Persero) for the 2021-2024 Period.	17 April 2023 April 17, 2023
04.06/02/SK/HKO.01/2023	Pembagian Tugas Pembinaan Kapal dan Cabang. Division of Ship and Branch Management Duties.	06 April 2023 April 6, 2023
04.18/01/SK/HKO.01/2023	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sertifikat Kapal PT PELNI (Persero). Standard Operating Procedure for Ship Certificate Management at PT PELNI (Persero).	18 Apri 2023 April 18, 2023
05.17/01/SK/HKO.01/2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal di Lingkungan PT PELNI (Persero). Standard Operating Procedure (SOP) for Monitoring Follow-Up Recommendations from Internal and External Auditors at PT PELNI (Persero).	17 Mei 2023 May 17, 2023
05.24/01/SK/HKO.01/2023	Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi PT PELNI (Persero). Integrated Compliance and Governance Management System Guidelines at PT PELNI (Persero).	24 Mei 2023 May 24, 2023
05.29/05/SK/HKO.01/2023	Pengesahan Pembayaraan dan Pertanggungjawaban Uang Muka di Kantor Pusat PT PELNI (Persero) Authorization of Payment and Accountability for Advances at the Head Office of PT PELNI (Persero).	29 Mei 2023 May 29, 2023
06.12/01/SK/HKO.01/2023	Penunjukan Perwira Keamanan Perusahaan (*Company Security Officer* (CSO) dan Perwira Keamanan Kapal (*Ship Security Officer* (SSO) PT PELNI (Persero) Appointment of Company Security Officer (CSO) and Ship Security Officer (SSO) at PT PELNI (Persero).	12 Juni 2023 June 12, 2023
06.26/02/SK/HKO.01/202	Tim Implementasi Perubahan Logo PT PELNI (Persero); Logo Change Implementation Team at PT PELNI (Persero).	26 Juni 2023 June 26, 2023
06.26/01/SK/HKO.01/2023	Pencabutan Tim Pengadaan Kapal Pesiar (*CRUISE SHIP*) di PT PELNI (Persero) Revocation of the Cruise Ship Procurement Team at PT PELNI (Persero).	26 Juni 2023 June 26, 2023
06.27/02/SK/HKO.01/2023	Tarif Batas Atas Angkutan Laut Untuk Penumpang di PT PELNI (Persero) Maximum Sea Transport Tariffs for Passengers at PT PELNI (Persero).	27 Juni 2023 June 27, 2023
06.27/01/SK/HKO.01/2023	Tarif Angkutan Laut Perintis di PT PELNI (Persero) Pioneer Sea Transport Tariffs at PT PELNI (Persero).	27 Juni 2023 June 27, 2023
02.15/02/SK/HKO.01/2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara, Angkutan Barang di Laut, Kapal Rede dan Kapal Ternak di PT PELNI (Persero) Standard Operating Procedure (SOP) for Public Service Obligations for State-Owned Pioneer Ships, Sea Freight, Rede Ships, and Livestock Ships at PT PELNI (Persero).	15 Februari 2023 February 15, 2023

No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
02.15/01/SK/HKO.01/2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi di PT PELNI (Persero) Standard Operating Procedure (SOP) for Public Service Obligations in Sea Transport for Economy Class Passengers at PT PELNI (Persero).	15 Februari 2023 February 15, 2023
07.03/03/SK/HKO.01/2023	Tarif Layanan Tambahan (*ADD ON*) untuk Penumpang Kapal PT PELNI (Persero) Additional Service Tariffs (ADD ON) for Passengers of PT PELNI (Persero).	03 Juli 2023 July 3, 2023
07.12/01/SK/HKO.01/2023	Kop Naskah Dinas Dan Stempel Perusahaan di Lingkungan PT PELNI (Persero); Official Documents and Company Stamps in PT PELNI (Persero).	12 Juli 2023 July 12, 2023
07.27/02//SK/HKO.01/2023	*Counterpart* Audit Sertifikasi ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PELNI (Persero); Counterpart Audit for ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Certification at PT PELNI (Persero).	27 Juli 2023 July 27, 2023
07.25/01//SK/HKO.01/2023	Tarif Jasa Keagenan PT PELNI (Persero); Agency Service Tariffs of PT PELNI (Persero).	25 Juli 2023 July 25, 2023
07.24/01//SK/HKO.01/2023	Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *STEERING COMMITTEE*) PT PELNI (Persero); IT Steering Committee of PT PELNI (Persero).	24 Juli 2023 July 24, 2023
07.01/01//SK/HKO.01/2023	Metode dan Tarif Penyusutan dan Amortisasi, Umur Ekonomis, dan Nilai Residu Aset tetap dan Properti Investasi PT PELNI (Persero); Methods and Tariffs for Depreciation and Amortization, Economic Life, and Residual Value of Fixed Assets and Investment Property at PT PELNI (Persero).	01 Juli 2023 July 1, 2023
07.03/02//SK/HKO.01/2023	Struktur Organisasi Kapal PT Pelayaran Nasional Indoneisa (Persero); Ship Organizational Structure at PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).	03 Juli 2023 July 3, 2023
08.21/01/SK/HKO.01/2023	Pedoman Bantuan Hukum/Penanganan Perkara di Lingkungan PT PELNI (Persero); Guidelines for Legal Assistance/Case Handling at PT PELNI (Persero).	21 Agustus 2023 August 21, 2023
08.21/02/SK/HKO.01/2023	Identitas Perusahaan (*Corporate Identity*) PT PELNI (Persero); Corporate Identity of PT PELNI (Persero).	21 Agustus 2023 August 21, 2023
08.07/02/SK/HKO.01/2023	Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkungan Kantor Pusat; Amendment to the Board of Directors Decree No. 03.02/01/SK/HKO.01/2023 on Work Unit and Position Formation at the Head Office.	07 Agustus 2023 August 7, 2023
08.23/01/SK/HKO.01/2023	Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PELNI (Persero); Establishment of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Committee of PT PELNI (Persero).	23 Agustus 2023 August 25, 2023
09.14/01/SK/HKO.01/2023	Pengurus Persekutuan Oikumene Umat Kristiani PT PELNI (Persero) Periode 2023 - 2025; Management of the Ecumenical Fellowship of Christians at PT PELNI (Persero) for the 2023-2025 Period.	14 September 2023 September 14, 2023

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
09.14/02/SK/HKO.01/2023	Tim Pengelolaan *Website* PT PELNI (Persero); Website Management Team at PT PELNI (Persero).	14 September 2023 September 14, 2023
10.02/03/SK/HKO.01/2023	Tim Tanggap Darurat Penanganan *Coronavirus* dan Virus lainnya di Lingkungan PT PELNI (Persero); Emergency Response Team for Coronavirus and Other Viruses at PT PELNI (Persero).	02 Oktober 2023 October 2, 2023
10.13/01/SK/HKO.01/2023	Pedoman Pengadaan Kapal PT PELNI (Persero); Ship Procurement Guidelines at PT PELNI (Persero).	13 Oktober 2023 October 13, 2023
09.04/01/SK/HKO.01/2023	Pedoman Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT PELNI (Persero); Quality, Occupational Health and Safety, and Environmental Management System Guidelines at PT PELNI (Persero).	04 September 2023 September 4, 2023
10.31/01/SK/HKO.01/2023	Tim *Counterpart* Budaya PT PELNI (Persero); Counterpart Culture Team at PT PELNI (Persero).	31 Oktober 2023 October 31, 2023
10.19/01/SK/HKO.01/2023	Standar Operasional Prosedur Penjualan Komersial Kapal Ro-Ro PT PELNI (Persero); Standard Operating Procedure for Commercial Sales of Ro-Ro Ships at PT PELNI (Persero).	19 Oktober 2023 October 19, 2023
11.10/04/SK/HKO.01/2023	Penetapan Cabang Pengelola Aset; Asset Management Branch Designation.	10 November 2023 November 10, 2023
11.10/02/SK/HKO.01/2023	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT PELNI (Persero); Occupational Health and Safety Committee (P2K3) at PT PELNI (Persero).	10 November 2023 November 10, 2023
11.14/03/SK/HKO.01/2023	Pedoman ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT PELNI (Persero); ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines at PT PELNI (Persero).	14 November 2023 November 14, 2023
12.18/01/SK/HKO.01/2023	Tim Penyerahan Kapal Perintis Milik Negara; Hand-Over Team for State-Owned Pioneer Ships.	18 Desember 2023 December 18, 2023
12.08/01/SK/HKO.01/2023	Tim Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di PT PELNI (Persero) ; 2023 Christmas and 2024 New Year Transport Task Force at PT PELNI (Persero).	08 Desember 2023 December 8, 2023
12.19/01/SK/HKO.01.2023	Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) di PT PELNI (Persero); Standard Operating Procedure (SOP) Development Guidelines at PT PELNI (Persero).	19 Desember 2023 December 19, 2023
12.21/01/SK/HKO.01.2023	Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan (*Subsidiary Governance*) PT PELNI (Persero); Subsidiary Governance Guidelines at PT PELNI (Persero).	21 Desember 2023 December 21, 2023
12.22/01/SK/HKO.01.2023	Pedoman Penetapan Tarif *Demmurage* dan *Detention* Terkait Penggunaan Kontainer Yang Dikelola PT PELNI (Persero); Guidelines for Demurrage and Detention Tariff Determination Related to Container Use Managed by PT PELNI (Persero).	22 Desember 2023 December 22, 2023

No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
12.19/04/SK/HKO.01.2023	*Standard Operating Procedure* Pengelolaan Rencana Jangka Panjang PT PELNI (Persero); Standard Operating Procedure for Long-Term Planning Management at PT PELNI (Persero).	19 Desember 2023 December 19, 2023
12.19/07/SK/HKO.01/2023	Pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) PT PELNI (Persero); Disaster Recovery Plan (DRP) Guidelines at PT PELNI (Persero).	19 Desember 2023 December 19, 2023
12.19/08/SK/HKO.01/2023	Pola Pengembangan Karir Jabatan Pegawai Laut di PT PELNI (Persero) ; Career Development Pattern for Marine Employee Positions at PT PELNI (Persero).	19 Desember 2023 December 19, 2023

KUNJUNGAN KERJA DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi PT PELNI (Persero) telah melaksanakan kunjungan kerja, dengan uraian sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS' WORK VISITS

Throughout 2023, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) has conducted work visits as follows:

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
1	Tri Andayani Direktur Utama President Director	24 Februari 2023 / February 24, 2023	Serah terima jabatan Nakhoda KM Lawit / Handover Ceremony of KM Lawit Captain
		11 Maret 2023 / March 11, 2023	Rakor Angleb 2023 / Coordination Meeting of Angleb 2023
		15 Maret 2023 / March 15, 2023	PELNI jalin nota kesepahaman dengan Baltic / PELNI Signs Memorandum of Understanding with Baltic
		17 Maret 2023 / March 17, 2023	*Monitoring* KTT ASEAN di Labuan Bajo / Monitoring of ASEAN Summit in Labuan Bajo
		2 Mei 2023 / May 2, 2023	Kunker reses KOMISI VI DPR RI / Working Visit of the VI Commission of the House of Representatives of the Republic of Indonesia
		5 Mei 2023 / May 5, 2023	*Monitoring* KM Sinabung dukung KTT Ke-42 ASEAN / Monitoring KM Sinabung Supporting the 42nd ASEAN Summit
		11 Agustus 2023 / August 11, 2023	*Monitoring* KM Kelimutu di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang / Monitoring KM Kelimutu at Tanjung Emas Port, Semarang
		21-31 Agustus 2023 / August 21-31, 2023	Perjalanan Dinas/Europe Business Trip / Business Trip to Europe
		5 September 2023 / September 5, 2023	Eksternal *Meeting* dengan BAKN DPR RI / External Meeting with BAKN of the House of Representatives of the Republic of Indonesia
		8 September 2023 / September 8, 2023	*Monitoring* KM Kelud Saat Proses *Docking* / Monitoring KM Kelud During Docking Process
		9 September 2023 / September 9, 2023	Direktur Utama Kunker ke Surabaya / President Director's Working Visit to Surabaya
		20 September 2023 / September 20, 2023	*Monitoring Docking* KM Kelud / Monitoring Docking of KM Kelud
		29 September 2023 / September 29, 2023	Peresmian dan *Launching* Wajah Baru KM Kelud / Inauguration and Launching of the New Look of KM Kelud
		4 Desember 2023 / December 4, 2023	RPD (Rapat Dengar Pendapat) Komisi VI DPR RI / Hearing Meeting of the VI Commission of the House of Representatives of the Republic of Indonesia
		6 Desember 2023 / December 6, 2023	Kunres Komisi VI / Working Visit of the VI Commission
		8 Desember 2023 / December 8, 2023	*Press Conference* NATARU dengan Media / Press Conference on Christmas and New Year (NATARU) with the Media
		11 Desember 2023 / December 11, 2023	Rapat Persiapan Menjelang NATARU dengan Menko PMK / Preparation Meeting Ahead of NATARU with Coordinating Minister for Human Development and Culture

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
		12-13 Desember 2023/ December 12-13, 2023	Peninjauan KM Tatamailau sebagai Akomodasi Terapung pada Hari Nusantara di Tidore / Inspection of KM Tatamailau as Floating Accommodation on Nusantara Day in Tidore
		17-18 Desember 2023/ December 17-18, 2023	*Monitoring* NATARU 2023/2024 di Manokwari / Monitoring NATARU 2023/2024 in Manokwari
		21 Desember 2023 / December 21, 2023	Pertemuan dengan Dirjenhubla / Meeting with Director General of Sea Transportation
		23-24 Desember 2023/ December 23-24, 2023	*Monitoring* Nataru 2023/2024 di Bitung / Monitoring NATARU 2023/2024 in Bitung
		27-29 Desember 2023/ December 27-29, 2023	*Monitoring* Nataru 2023/2024 di Pontianak / Monitoring NATARU 2023/2024 in Pontianak
2	Anik Hidayati Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	8 Januari 2023 / January 8, 2023	*Monitoring* Arus Balik Nataru di Parepare / Monitoring Return Flow of NATARU in Parepare
		18 Februari 2023 / February 18, 2023	RKS PELNI DENPASAR / RKS PELNI Denpasar
		25 Maret 2023 / March 25, 2023	Sertijab Nakhoda KM Tatamailau / Handover Ceremony of KM Tatamailau Captain
		19 Juli 2023 / July 19, 2023	Kunjungan Kerja Ke KC Palu dan KC Makassar / Working Visit to KC Palu and KC Makassar
		21-31 Agustus 2023 / August 21-31, 2023	Perjalanan Dinas/Europe *Business Trip* / Business Trip to Europe
		5 September 2023 / September 5, 2023	Eksternal *Meeting* dengan BAKN DPR RI / External Meeting with BAKN of the House of Representatives of the Republic of Indonesia
		29 September 2023 / September 29, 2023	Peresmian dan *Launching* Wajah Baru KM Kelud / Inauguration and Launching of the New Look of KM Kelud
		13 Oktober 2023 / October 13, 2023	Kunjungan & Simulasi Perubahan Konsep Layanan Makan Penumpang untuk Tahun 2023 di KM Kelud, Pelabuhan Tg. Priok / Visit and Simulation of Passenger Meal Service Concept Change for 2023 on KM Kelud at Tg. Priok Port
		23-24 Oktober 2023 / October 23-24, 2023	Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Angkutan Kelas Ekonomi dengan Kemenhub / Technical Coordination Meeting for Public Service Provision for Economy Class Transportation with Ministry of Transportation
		30 Oktober 2023 / October 30, 2023	Rapat Koordinasi Maritime *Fund* di Denpasar / Coordination Meeting of Maritime Fund in Denpasar
		22 September 2023 / September 22, 2023	*Monitoring* dan Melihat Persiapan Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih 2023 / Monitoring and Inspection of Preparations for the Peak Event of Sail Teluk Cenderawasih 2023
		23 September 2023 / September 23, 2023	Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih di Biak, Papua / Peak Event of Sail Teluk Cenderawasih in Biak, Papua

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
		21-23 Desember 2023/ December 21-23, 2023	*Monitoring* Nataru 2023/2024 ke Ambon / Monitoring NATARU 2023/2024 in Ambon
		27 Desember 2023 / December 27, 2023	Kunjungan ke PT SBI / Visit to PT SBI
3	Yahya Kuncoro*) Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	4-5 Januari 2023 / January 4-5, 2023	*Monitoring* Arus Balik Nataru di Ambon / Monitoring Return Flow of NATARU in Ambon
		7-8 Januari 2023 / January 7-8, 2023	*Monitoring* Arus Balik Nataru di Baubau / Monitoring Return Flow of NATARU in Baubau
		10 Februari 2023 / February 10, 2023	Kunjungan ke PAL & Pengecekan Kapal Tilongkabila / Visit to PAL & Inspection of KM Tilongkabila
		21 Februari 2023 / February 21, 2023	Rapat Persiapan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 / Preparation Meeting for Lebaran Sea Transportation 2023
		22 Februari 2023 / February 22, 2023	Kunjungan ke KM Labobar di Surabaya / Visit to KM Labobar in Surabaya
		7 Maret 2023 / March 7, 2023	Kunjungan ke Kantor Cabang Bitung / Visit to Bitung Branch Office
		7 Maret 2023 / March 7, 2023	Sertijab Nakhoda KM Sangiang / Handover Ceremony of KM Sangiang Captain
		11 Maret 2023 / March 11, 2023	Rakor Angleb 2023 / Coordination Meeting of Angleb 2023
		13 Maret 2023 / March 13, 2023	RAT Koperasi Bina Sejahtera / Annual General Meeting of Bina Sejahtera Cooperative
		20-21 Maret 2023 / March 20-21, 2023	Sertijab Nakhoda KM JETLINER dan Kunjungan Cabang Kendari / Handover Ceremony of KM JETLINER Captain and Visit to Kendari Branch
		30-31 Maret 2023 / March 30-31, 2023	Kunjungan kerja ke Kendari / Working Visit to Kendari
		1 Mei 2023 / May 1, 2023	*Monitoring* Angkutan Lebaran di Surabaya / Monitoring Lebaran Transportation in Surabaya
		3-4 Mei 2023 / May 3-4, 2023	*Monitoring* Angkutan Lebaran di Tarakan / Monitoring Lebaran Transportation in Tarakan
		5 Mei 2023 / May 5, 2023	*Monitoring* KM Sinabung dukung KTT Ke-42 ASEAN / Monitoring KM Sinabung Supporting the 42nd ASEAN Summit
		6-8 Mei 2023 / May 6-8, 2023	*Monitoring* Persiapan KM. Sinabung Sebagai Akomodasi Terapung KTT ASEAN / Monitoring Preparation of KM Sinabung as Floating Accommodation for the ASEAN Summit
		16 Mei 2023 / May 16, 2023	Kunjungan kerja ke Surabaya / Working Visit to Surabaya
		24 Mei 2023 / May 24, 2023	Pra-Rapat Koordinasi Kapal Perintis / Pre-Coordination Meeting of Pioneer Ships

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
		12 Juni 2023 / June 12, 2023	Konferensi *Pers* & *Talkshow* Radio Implementasi PM 7 & 8 Tahun 2023 di Surabaya / Press Conference & Radio Talkshow on Implementation of PM 7 & 8 of 2023 in Surabaya
		12 Juni 2023 / June 12, 2023	Kunjungan Kerja Direktur Usaha Angkutan Penumpang ke KM. Sabuk Nusantara 92 di Surabaya / Working Visit of Passenger Transportation Business Director to KM Sabuk Nusantara 92 in Surabaya
		16 Juni 2023 / June 16, 2023	Kunjungan ke Kantor Cabang Semarang / Visit to Semarang Branch Office
		16 Juni 2023 / June 16, 2023	*Press Conference* Sosialisasi Implementasi PM 7 & 8 Tahun 2023 di Pesta Keboen Restoran Semarang / Press Conference on Implementation of PM 7 & 8 of 2023 at Pesta Keboen Restaurant in Semarang
		16 Juni 2023 / June 16, 2023	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Kapal KM Kelimutu di Pelabuhan Tg. Emas Semarang / Working Visit and Monitoring of KM Kelimutu at Tanjung Emas Port, Semarang
		24 Juni 2023 / June 24, 2023	*Press Conference* Sosialisasi Implementasi PM 7 & 8 Tahun 2023 di Jayapura / Press Conference on Implementation of PM 7 & 8 of 2023 in Jayapura
		25 Juni 2023 / June 25, 2023	Pelepasan Dukungan Transportasi KM Ciremai (Jayapura - Jakarta) untuk Yayasan Pendidikan Harapan Papua / Dispatching Support Transport of KM Ciremai (Jayapura - Jakarta) for Papua Hope Foundation
		6 Juli 2023 / July 6, 2023	Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Luwuk & *Monitoring* Kapal KM Tilongkabila / Working Visit to Luwuk Branch Office & Monitoring of KM Tilongkabila
4	Nuraini Dessy W**) Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	29 September 2023 / September 29, 2023	Peresmian dan *Launching* Wajah Baru KM Kelud / Inauguration and Launching of the New Look of KM Kelud
		4 Oktober 2023 / October 4, 2023	Pertemuan dengan Bank Mandiri dan Bank BRI / Meeting with Bank Mandiri and Bank BRI
		6 Oktober 2023 / October 6, 2023	*Monitoring Pilot Project* HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) / Monitoring Pilot Project of HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
		11 Oktober 2023 / October 11, 2023	*Talkshow* Sosialisasi Kebijakan Alih Fungsi Loket / Talkshow on Policy Socialization of Ticket Booth Function Change
		13 Oktober 2023 / October 13, 2023	Kunjungan & Simulasi Perubahan Konsep Layanan Makan Penumpang untuk Tahun 2023 di KM Kelud, Pelabuhan Tg. Priok / Visit and Simulation of Passenger Meal Service Concept Change for 2023 on KM Kelud at Tg. Priok Port
		14 Oktober 2023 / October 14, 2023	Kunjungan ke KM Pangrango Untuk Melihat Proses *Docking* di Galangan Kapal PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) / Visit to KM Pangrango to Observe Docking Process at PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
		23-24 Oktober 2023 / October 23-24, 2023	Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Angkutan Kelas Ekonomi dengan Kemenhub / Technical Coordination Meeting for Public Service Provision for Economy Class Transportation with Ministry of Transportation
		25 Oktober 2023 / October 25, 2023	*Talkshow* Sosialisasi Kebijakan Alih Fungsi Loket Kantor Cabang Pelni di Sonora 92 FM Jakarta / Talkshow on Policy Socialization of Ticket Booth Function Change at Pelni Branch Office on Sonora 92 FM Jakarta
		27 Oktober 2023 / October 27, 2023	Penandatanganan PKS antara PT Pelni & BMKG / Signing of Cooperation Agreement between PT Pelni & BMKG
		3 September 2023 / September 3, 2023	Penyerahan Sertifikasi HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) / HACCP Certification Handover (Hazard Analysis Critical Control Point)
		6 September 2023 / September 6, 2023	Pertemuan dengan DPP INSA / Meeting with DPP INSA
		18 September 2023 / September 18, 2023	Kunjungan & *Monitoring* ke KM Lawit dan KM Dobonsolo / Visit and Monitoring of KM Lawit and KM Dobonsolo
		21 September 2023 / September 21, 2023	Rapat Koordinasi Persiapan Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bersama dengan PELINDO / Coordination Meeting for Passenger Service Preparation for Christmas 2023 and New Year 2024 Sea Transportation with PELINDO
		22 September 2023 / September 22, 2023	*Monitoring* dan Melihat Persiapan Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih 2023 / Monitoring and Inspection of Preparations for the Peak Event of Sail Teluk Cenderawasih 2023
		23 September 2023 / September 23, 2023	Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih di Biak, Papua / Peak Event of Sail Teluk Cenderawasih in Biak, Papua
		22-24 November 2023/ November 22-24, 2023	Sail Teluk Cenderawasih 2023 di Biak / Sail Teluk Cenderawasih 2023 in Biak
		6 Desember 2023 / December 6, 2023	Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses MP.II TS 2023-2024 / Working Visit of Commission V of the House of Representatives of the Republic of Indonesia during Recess MP.II TS 2023-2024
		8 Desember 2023 / December 8, 2023	*Press Conference* NATARU dengan Media / Press Conference on NATARU with the Media
		11 Desember 2023 / December 11, 2023	Rapat Persiapan Menjelang NATARU dengan Menko PMK / Preparation Meeting Ahead of NATARU with Coordinating Minister for Human Development and Culture
		12-13 Desember 2023/ December 12-13, 2023	Peninjauan KM Tatamailau sebagai Akomodasi Terapung pada Hari Nusantara di Tidore / Inspection of KM Tatamailau as Floating Accommodation on Nusantara Day in Tidore
		21 Desember 2023 / December 21, 2023	Pertemuan dengan Dirjenhubla / Meeting with Director General of Sea Transportation
		22 Desember 2023 / December 22, 2023	*Monitoring* Arus Mudik dan Pembagian Cendramata dalam Rangka Hari Ibu / Monitoring Homecoming Traffic and Souvenir Distribution for Mother's Day

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
		29 Desember 2023 / December 29, 2023	Kunjungan ke Posko NATARU di Kemenhub / Visit to NATARU Post at Ministry of Transportation
5	Robert M.P. Sinaga Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	11 Januari 2023 / January 11, 2023	*Monitoring* & *Bunkering* KM Labobar / Monitoring & Bunkering of KM Labobar
		23 Februari 2023 / February 23, 2023	*Monitoring Docking* Kapal Nggapulu di PT DKB (Persero) / Monitoring Docking of KM Nggapulu at PT DKB (Persero)
		2-4 Maret 2023 / March 2-4, 2023	Kunker ke cabang & kapal / Working Visit to Branches & Ships
		7 Maret 2023 / March 7, 2023	*Monitoring Docking* KM Lambelu dan KM Logistik Nusantara 5 / Monitoring Docking of KM Lambelu and KM Logistic Nusantara 5
		9 Maret 2023 / March 9, 2023	Sertijab Nakhoda KM Dorolonda / Handover Ceremony of KM Dorolonda Captain
		17 Maret 2023 / March 17, 2023	Sertijab Nakhoda KM Tidar & KM Wilis / Handover Ceremony of KM Tidar & KM Wilis Captain
		17 Maret 2023 / March 17, 2023	Rapat Koordinasi dengan Galangan IKI Makassar / Coordination Meeting with IKI Shipyard Makassar
		25 Maret 2023 / March 25, 2023	*Monitoring Docking* KM Kelimutu / Monitoring Docking of KM Kelimutu
		29 Maret 2023 / March 29, 2023	*Monitoring* KM Dobonsolo / Monitoring KM Dobonsolo
		30 Maret 2023 / March 30, 2023	*Monitoring* KM Umsini pasca docking / Monitoring KM Umsini after Docking
		1 Mei 2023 / May 1, 2023	*Monitoring* Angkutan Lebaran di Ambon / Monitoring Lebaran Transportation in Ambon
		2 Mei 2023 / May 2, 2023	Penutupan Posko Arus Mudik Lebaran 2023 / Closure of Lebaran Homecoming Post 2023
		5 Mei 2023 / May 5, 2023	*Monitoring* KM Sinabung dukung KTT Ke-42 ASEAN / Monitoring KM Sinabung Supporting the 42nd ASEAN Summit
		9 Mei 2023 / May 9, 2023	Kunjungan Menteri BUMN di KM Sinabung / Visit of Minister of SOEs to KM Sinabung
		9 Mei 2023 / May 9, 2023	Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan RI di KM Sinabung / Visit of Presidential Chief of Staff of the Republic of Indonesia to KM Sinabung
		19 Mei 2023 / May 19, 2023	Penandatanganan Kesepahaman Bersama Peningkatan Kompetensi Pelaut / Signing of Memorandum of Understanding for Sailor Competency Improvement
		9 Juni 2023 / June 9, 2023	MaK *Engine Training* oleh MaK Caterpillar Singapore / MaK Engine Training by MaK Caterpillar Singapore
		21-31 Agustus 2023 / August 21-31, 2023	Perjalanan Dinas/Europe *Business Trip* / Business Trip to Europe
		8 September 2023 / September 8, 2023	*Monitoring* KM Kelud Saat Proses Docking / Monitoring KM Kelud During Docking Process

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
		15 September 2023 / September 15, 2023	*Monitoring Docking* KM Kelud / Monitoring Docking of KM Kelud
		20 September 2023 / September 20, 2023	*Monitoring Docking* KM Kelud / Monitoring Docking of KM Kelud
		22 September 2023 / September 22, 2023	Pelatihan Mesin Merek Daihatsu / Daihatsu Engine Training
		29 September 2023 / September 29, 2023	Persiapan *Launching* KM Kelud / Preparation for Launching of KM Kelud
		29 September 2023 / September 29, 2023	Peresmian dan *Launching* Wajah Baru KM Kelud / Inauguration and Launching of the New Look of KM Kelud
		11 Oktober 2023 / October 11, 2023	*Monitoring* FRD KM Bukit Raya / Monitoring FRD KM Bukit Raya
		12 Oktober 2023 / October 12, 2023	*Monitoring* FRD KM Pangrango / Monitoring FRD KM Pangrango
		19 Oktober 2023 / October 19, 2023	Kunjungan Kerja ke LOBP (*Lubricants Oil Blending Plant Shell*) - Marunda / Working Visit to LOBP (Lubricants Oil Blending Plant Shell) - Marunda
		26 Oktober 2023 / October 26, 2023	Rakor Perawatan Armada Perintis dengan Kemenhub / Coordination Meeting for Pioneer Fleet Maintenance with Ministry of Transportation
		5-6 November 2023 / November 5-6, 2023	Pemeriksaan KM Labobar pasca terbakarnya 2 unit sekoci dan pemeriksaan kondisi KM Sabuk Nusantara 105 di Bitung / Inspection of KM Labobar after the Fire Incident of 2 Lifeboats and Inspection of KM Sabuk Nusantara 105 in Bitung
		24-26 November 2023/ November 24-26, 2023	Kunjungan ke Galangan Surya dan KM Kelimutu di Surabaya / Visit to Surya Shipyard and KM Kelimutu in Surabaya
		2 Desember 2023 / December 2, 2023	*Monitoring* kondisi KM Lawit menghadapi Peak Season Nataru 2023/2024 di Pelabuhan Tg Priok / Monitoring Condition of KM Lawit for Peak Season Nataru 2023/2024 at Tg Priok Port
		6 Desember 2023 / December 6, 2023	Kunjungan Reses Komisi V DPR RI di Surabaya / Recess Visit of Commission V of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in Surabaya
		9 Desember 2023 / December 9, 2023	*Monitoring* persiapan petugas cabang di Terminal Jamrud dan *monitoring* KM Gunung Dempo dalam menghadapi *Peak Season* Nataru 2023/2024 di Pelabuhan Tg Perak, Surabaya / Monitoring Preparation of Branch Staff at Jamrud Terminal and Monitoring KM Gunung Dempo for Peak Season Nataru 2023/2024 at Tg Perak Port, Surabaya
		16-18 Desember 2023/ December 16-18, 2023	*Monitoring* Nataru 2023/2024 di Sorong / Monitoring NATARU 2023/2024 in Sorong

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
6	Rainoc Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	17-20 Januari 2023 / January 17-20, 2023	Rapat Integrasi Dewan Komisaris & Direksi PELNI Group / Integration Meeting of PELNI Group Board of Commissioners & Directors
		24 Februari 2023 / February 24, 2023	Serah terima jabatan Nakhoda KM Lawit / Handover Ceremony of KM Lawit Captain
		2-4 Maret 2023 / March 2-4, 2023	Kunker ke cabang & kapal / Working Visit to Branches & Ships
		13 Maret 2023 / March 13, 2023	RAT Koperasi Bina Sejahtera / Annual General Meeting of Bina Sejahtera Cooperative
		3 Mei 2023 / May 3, 2023	*Monitoring* Angkutan Lebaran di Makassar / Monitoring Lebaran Transportation in Makassar
		5 Mei 2023 / May 5, 2023	*Monitoring* Angkutan Lebaran 2023 di Manokwari / Monitoring Lebaran Transportation 2023 in Manokwari
		11 Mei 2023 / May 11, 2023	Peresmian Gedung Merial Tower / Inauguration of Merial Tower Building
		16 Mei 2023 / May 16, 2023	Penyerahan Sertifikat Tanah dari Pemerintah Lembata ke PELNI / Land Certificate Handover from Lembata Government to PELNI
		23 Mei 2023 / May 23, 2023	Monitoring KM Binaiya / Monitoring KM Binaiya
		10 Juni 2023 / June 10, 2023	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* ke Terminal Point Lewoleba / Working Visit and Monitoring to Terminal Point Lewoleba
		9 Juli 2023 / July 9, 2023	Kunjungan Kerja ke KC Batam & KC Tanjung Pinang / Working Visit to KC Batam & KC Tanjung Pinang
		23 Juli 2023 / July 23, 2023	Pelantikan dan Pelepasan Perwira Transportasi Program Diklat Pelaut / Inauguration and Release of Transportation Officer Training Program Graduates
		27 Juli 2023 / July 27, 2023	Kunjungan Kerja ke KC Sampit & KC Kumai / Working Visit to KC Sampit & KC Kumai
		20 September 2023 / September 20, 2023	*Monitoring Docking* KM Kelud / Monitoring Docking of KM Kelud
		29 September 2023 / September 29, 2023	Peresmian dan *Launching* Wajah Baru KM Kelud / Inauguration and Launching of the New Look of KM Kelud
		27 Oktober 2023 / October 27, 2023	Peresmian Gedung Kantor PT PELNI (Persero) Cabang Kendari / Inauguration of PT PELNI (Persero) Kendari Branch Office Building
		21 September 2023 / September 21, 2023	Rapat Koordinasi Persiapan Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bersama dengan PELINDO / Coordination Meeting for Passenger Service Preparation for Christmas 2023 and New Year 2024 Sea Transportation with PELINDO
		11-13 Desember 2023 / December 11-13, 2023	*Monitoring Peak Season* Nataru 2023/2024 / Monitoring Peak Season Nataru 2023/2024
		25 Desember 2023 / December 25, 2023	*Monitoring* Posko Nataru 2023/2024 / Monitoring NATARU 2023/2024 Post

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
7	Yossianis Marciano Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	4 Januari 2023 / January 4, 2023	Pemuatan pelayaran perdana kapal tol laut tahun 2023 / First Voyage of Sea Toll Ship in 2023
		6 Januari 2023 / January 6, 2023	Kunjungan kerja ke cabang Waingapu / Working Visit to Waingapu Branch
		22 Februari 2023 / February 22, 2023	*Business Matching* dengan Direktur Produksi dan *Supply Chain* PT Kimia Farma / Business Matching with Director of Production and Supply Chain PT Kimia Farma
		4 Maret 2023 / March 4, 2023	Serah Terima Nakhoda KM Egon / Handover Ceremony of KM Egon Captain
		9 Maret 2023 / March 9, 2023	PELNI Group kirim barang bantuan ke Serasan / PELNI Group Sends Aid Goods to Serasan
		15 Maret 2023 / March 15, 2023	Sertijab Nakhoda KM Sirimau / Handover Ceremony of KM Sirimau Captain
		17 Maret 2023 / March 17, 2023	Pertemuan dengan West AUS Government / Meeting with West Australian Government
		1 Mei 2023 / May 1, 2023	*Monitoring* Angkutan Lebaran 2023 / Monitoring Lebaran Transportation 2023
		3 Mei 2023 / May 3, 2023	*Business trip to* Singapore / Business Trip to Singapore
		4 Mei 2023 / May 4, 2023	*Monitoring* Angkutan Lebaran 2023 di Batam / Monitoring Lebaran Transportation 2023 in Batam
		5 Mei 2023 / May 5, 2023	Pertemuan dengan K-Line / Meeting with K-Line
		9 Mei 2023 / May 9, 2023	Kunjungan Menteri BUMN di KM Sinabung / Visit of Minister of SOEs to KM Sinabung
		19 Mei 2023 / May 19, 2023	Audiensi dengan Industri galangan kapal (*shipyard*) di Batam / Audience with Shipyard Industry in Batam
		20 Juni 2023 / June 20, 2023	Audiensi dengan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya / Audience with PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) in Surabaya
		3 September 2023 / September 3, 2023	Perayaan HARPELNAS di Makassar / National Customer Day Celebration in Makassar
		8 September 2023 / September 8, 2023	*Monitoring* KM Kelud Saat Proses Docking / Monitoring KM Kelud During Docking Process
		29 September 2023 / September 29, 2023	Peresmian dan *Launching* Wajah Baru KM Kelud / Inauguration and Launching of the New Look of KM Kelud
		11 Oktober 2023 / October 11, 2023	*Ceremonial Launching Program Hub And Spoke* / Ceremonial Launching of Hub And Spoke Program
		27 Oktober 2023 / October 27, 2023	Rangkaian Kegiatan *Leadership Bootcamp* BUMN Muda: *Future Leader* 2045 di KM Kelud / Series of Activities for BUMN Young Leadership Bootcamp: Future Leader 2045 on KM Kelud

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Kunjungan Kerja Work Visit Date	Kegiatan Activity
		28 Oktober 2023 / October 28, 2023	Rangkaian Kegiatan *Leadership Bootcamp* BUMN Muda: *Future Leader* 2045 di KM Kelud / Series of Activities for BUMN Young Leadership Bootcamp: Future Leader 2045 on KM Kelud
		30 Oktober 2023 / October 30, 2023	Kunjungan Kerja ke PT Patria Maritim Perkasa / Working Visit to PT Patria Maritim Perkasa
		21 September 2023 / September 21, 2023	Rapat Koordinasi Persiapan Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bersama dengan PELINDO / Coordination Meeting for Passenger Service Preparation for Christmas 2023 and New Year 2024 Sea Transportation with PELINDO
		5 Desember 2023 / December 5, 2023	Konsinyering Pembahasan *Draft* Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkuran Barang di Laut / Consignment Discussion on Draft Minister of Transportation Decree on Public Service Obligation for Goods Transportation at Sea
		6 Desember 2023 / December 6, 2023	Kunres Komisi VI / Working Visit of the VI Commission
		8 Desember 2023 / December 8, 2023	*Press Conference* NATARU dengan Media / Press Conference on NATARU with the Media
		12 Desember 2023 / December 12, 2023	*Signing* MoU antara PELNI dengan PT Kartika Bina Medikatama / Signing of MoU between PELNI and PT Kartika Bina Medikatama
		14-16 Desember 2023/ December 14-16, 2023	Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke XVIII / 18th Annual General Meeting of INSA
		27 Desember 2023 / December 27, 2023	*Monitoring* Nataru 2023/2024 di Tarakan / Monitoring NATARU 2023/2024 in Tarakan
		28 Desember 2023 / December 28, 2023	*Monitoring* Nataru 2023/2024 di Balikpapan / Monitoring NATARU 2023/2024 in Balikpapan

*) Berakhir masa jabatan pada tanggal 1 Agustus 2023
**) Mulai menjabat pada tanggal 21 September 2023
*) Term of office ended on August 1, 2023
**) Assumed office on September 21, 2023

PERBUATAN DIREKSI YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU RUPS

Berikut ini merupakan perbuatan Direksi yang dilakukan selama tahun 2023, yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS:

1. Tanggapan Permohonan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Inventaris Kantor Gedung PT PELNI (Persero) Pusat 2024 Nomor: 08/DK/I-2023 tanggal 12 Januari 2023;
2. Kendaraan Dinas Direksi Tahun 2023 Nomor: 09/DK/I-2023 tanggal 16 Januari 2023;

ACTIONS BY THE BOARD OF DIRECTORS WITH WRITTEN APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Below are the actions taken by the Board of Directors during 2023, which have received written approval from the Board of Commissioners and/or the General Meeting of Shareholders:

1. Response to the Request for Write-off and Transfer of Office Inventory at PT PELNI (Persero) Headquarters 2024 Number: 08/DK/I-2023 dated January 12, 2023;
2. Official Vehicles for the Board of Directors for 2023 Number: 09/DK/I-2023 dated January 16, 2023;

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

3. Perubahan Logo PT PELNI (Persero) Nomor: 10/DK/I-2023 tanggal 30 Januari 2023;
4. Tanggapan Dewan Komisaris atas Persetujuan Pengajuan Ulang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PELNI (Persero) dari APBN 2024;
5. Kajian Investasi Kapal Barang dan Permohonan Penggunaan Sisa Dana PMN TA 2015 Nomor: 15/DK/II-2023 tanggal 15 Februari 2023;
6. Penghapusbukuan dan Penjualan Reefer Container PT PELNI (Persero) Nomor: 16/DK/II-2023 tanggal 15 Februari 2023;
7. Perubahan Rencana Jangka Panjang (RJPP) PT PELNI (Persero) Tahun 2022-2024 Nomor: 17/DK/II-2023 tanggal 15 Februari 2023;
8. Persetujuan Ulang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Nomor: 18/DK/II-2023 tanggal 17 Februari 2023;
9. Perubahan Logo PT PELNI (Persero) Nomor: 23/DK/II-2023 tanggal 27 Februari 2023;
10. Talenta BOD-1/"*Nominated Talent*" PT PELNI (Persero) Nomor: 25/DK/II-2023 tanggal 28 Februari 2023;
11. Evaluasi terhadap Direksi PT PELNI (Persero) Nomor: 26/DK/II-2023 tanggal 28 Februari 2023;
12. Persetujuan Pengusulan Ulang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 29/DK/III-2023 tanggal 4 Maret 2023;
13. Penghapusbukuan dan Penjualan *ex* pintu *dock* Galangan PELNI Surya Nomor: 31/DK/III-2023 tanggal 7 Maret 2023;
14. Persetujuan *Update* Revisi RJPP PT PELNI (Persero) Tahun 2020-2024 Nomor: 52/DK/IV-2023 tanggal 28 April 2023;
15. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Nomor: 56/DK/V-2023 tanggal 10 Mei 2023;
16. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selama Tahun Buku 2022 Nomor: 57/DK/V-2023 tanggal 10 Mei 2023;
17. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan *Audited* PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2022 Nomor: 58/DK/V-2023 tanggal 10 Mei 2023;
18. Tanggapan atas Penilaian Jasa KAP Tahun Buku 2022 dan Usulan Penggunaan Jasa KAP 2023 Nomor: 64/DK/V-2023 tanggal 22 Mei 2023;
19. Usulan Besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan

3. Change of PT PELNI (Persero) Logo Number: 10/DK/I-2023 dated January 30, 2023;
4. Response from the Board of Commissioners on the Re-submission Approval for Additional State Capital Participation (PMN) for PT PELNI (Persero) from the 2024 State Budget;
5. Investment Study on Cargo Ships and Request for Use of Remaining PMN Funds for the 2015 Fiscal Year Number: 15/DK/II-2023 dated February 15, 2023;
6. Write-off and Sale of Reefer Containers by PT PELNI (Persero) Number: 16/DK/II-2023 dated February 15, 2023;
7. Amendment to the Long-Term Plan (RJPP) of PT PELNI (Persero) for 2022-2024 Number: 17/DK/II-2023 dated February 15, 2023;
8. Re-approval of Additional State Capital Participation (PMN) Number: 18/DK/II-2023 dated February 17, 2023;
9. Change of PT PELNI (Persero) Logo Number: 23/DK/II-2023 dated February 27, 2023;
10. Talenta BOD-1/"Nominated Talent" PT PELNI (Persero) Number: 25/DK/II-2023 dated February 28, 2023;
11. Evaluation of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) Number: 26/DK/II-2023 dated February 28, 2023;
12. Approval for Re-submission of Additional State Capital Participation (PMN) for the 2024 Fiscal Year Number: 29/DK/III-2023 dated March 4, 2023;
13. Write-off and Sale of ex Dock Doors at PELNI Shipyard Surya Number: 31/DK/III-2023 dated March 7, 2023;
14. Approval of the Revision Update to the RJPP of PT PELNI (Persero) for 2020-2024 Number: 52/DK/IV-2023 dated April 28, 2023;
15. Response from the Board of Commissioners on the Performance of PT PELNI (Persero) up to the First Quarter of 2023 Number: 56/DK/V-2023 dated May 10, 2023;
16. Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the Fiscal Year 2022 Number: 57/DK/V-2023 dated May 10, 2023;
17. Response from the Board of Commissioners on the Audited Financial Statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for 2022 Number: 58/DK/V-2023 dated May 10, 2023;
18. Response to the Evaluation of Public Accountant Services for the Fiscal Year 2022 and Proposal for Public Accountant Services for 2023 Number: 64/DK/V-2023 dated May 22, 2023;
19. Proposal for the Salary/Honorarium Amount along with Other Facilities and Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023,

Komisaris Tahun Buku 2022 Nomor: 78/DK/VI-2023 tanggal 19 Juni 2023;

20. Persetujuan Pengajuan *Cash Loan* (Kredit Modal Kerja), *Non Cash Loan*, dan *Treasury Line* Nomor: 81/DK/VII-2023 tanggal 7 Juli 2023;
21. Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022 PT PELNI (Persero) Nomor: 90/DK/VII-2023 tanggal 26 Juli 2023;
22. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Nomor: 92/DK/VII-2023 tanggal 31 Juli 2023;
23. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Laporan Final Kajian Komersialisasi Kapal Hasil PMN PT PELNI (Persero) Tahun 2015 Nomor: 93/DK/VIII-2023 tanggal 7 Agustus 2023;
24. Tanggapan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan PUMK Tahun 2023 Nomor: 95/DK/VII-2023 tanggal 15 Agustus 2023;
25. Persetujuan Penggunaan Sisa Dana PMN Tahun 2015 dan Dana Internal Perusahaan dari Hasil Divestasi RS PELNI untuk Investasi Kapal Ropax Bukan/Tidak Baru Nomor: 117/DK/X-2023 tanggal 17 Oktober 2023;
26. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Tahun 2024 Nomor: 124/DK/X-2023 tanggal 27 Oktober 2023;
27. Persetujuan Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern PT PELNI (Persero) Nomor: 125/DK/X-2023 tanggal 27 Oktober 2023;
28. Persetujuan Pengangkatan Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI (Persero) Nomor: 126/DK/X-2023 tanggal 27 Oktober 2023;
29. Persetujuan Pengangkatan Wakil Perusahaan sebagai anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) Nomor: 127/DK/X-2023 tanggal 27 Oktober 2023;
30. Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2024 Nomor: 128/DK/X-2023 tanggal 31 Oktober 2023;
31. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 Nomor: 130/DK/XI-2023 tanggal 9 November 2023;
32. Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Investasi Kapal *Tugboat* dan Tongkang PT PELNI (Persero) Nomor: 131/DK/XI-2023 tanggal 10 November 2023;

and Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022 Number: 78/DK/VI-2023 dated June 19, 2023;

20. Approval for Cash Loan (Working Capital Credit), Non-Cash Loan, and Treasury Line Number: 81/DK/VII-2023 dated July 7, 2023;
21. Evaluation of Public Accountant Office (KAP) for the Fiscal Year 2022 of PT PELNI (Persero) Number: 90/DK/VII-2023 dated July 26, 2023;
22. Response from the Board of Commissioners on the Performance of PT PELNI (Persero) up to the Second Quarter of 2023 Number: 92/DK/VII-2023 dated July 31, 2023;
23. Response to the Request for Approval and Submission of the Final Report on the Commercialization Study of Ships Funded by PMN of PT PELNI (Persero) in 2015 Number: 93/DK/VIII-2023 dated August 7, 2023;
24. Response to the Appointment of the Public Accountant Office for the Audit of Consolidated Financial Statements and PUMK for 2023 Number: 95/DK/VII-2023 dated August 15, 2023;
25. Approval for the Use of Remaining PMN Funds from 2015 and Internal Company Funds from the Divestiture of PELNI Hospital for Investment in Ropax Ships (Not New) Number: 117/DK/X-2023 dated October 17, 2023;
26. Submission of the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) for 2024 Number: 124/DK/X-2023 dated October 27, 2023;
27. Approval for the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit of PT PELNI (Persero) Number: 125/DK/X-2023 dated October 27, 2023;
28. Approval for the Appointment of the Head of Corporate Secretariat of PT PELNI (Persero) Number: 126/DK/X-2023 dated October 27, 2023;
29. Approval for the Appointment of Company Representatives as Members of the Board of Directors and Commissioners of PT PELNI (Persero) Subsidiaries Number: 127/DK/X-2023 dated October 27, 2023;
30. Response from the Board of Commissioners on the Work Plan and Budget of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for 2024 Number: 128/DK/X-2023 dated October 31, 2023;
31. Response from the Board of Commissioners on the Performance of PT PELNI (Persero) up to the Third Quarter of 2023 Number: 130/DK/XI-2023 dated November 9, 2023;
32. Response from the Board of Commissioners on the Request for Approval of Investment in Tugboats and Barges by PT PELNI (Persero) Number: 131/DK/XI-2023 dated November 10, 2023;

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

33. Tindak Lanjut atas Pengunduran Diri Sdr. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Utama Nomor: 135/DK/XI-2023 tanggal 17 November 2023;
34. Hasil Reviu/Tanggapan terhadap Penyampaian *Draft* Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PELNI (Persero) Tahun 2024 Nomor: 138/DK/XI-2023 tanggal 22 November 2023;
35. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Perjanjian Gadai Nomor: 139/DK/XI-2023 tanggal 22 November 2023;
36. Tanggapan/Reviu atas Revisi Usulan RKAP Tahun 2024 PT PELNI (Persero) Nomor: 140/DK/XI-2023 tanggal 24 November 2023;
37. Tanggapan atas Persetujuan Penunjukan Lembaga Pemeringkat terkait Penilaian Tingkat Kesehatan PT PELNI (Persero) Tahun Buku 2023 Nomor: 144/DK/XI-2023 tanggal 25 November 2023;
38. Tanggapan atas usul penghapusbukuan dan pemindahatanganan 51 (lima puluh satu) Aktiva Tetap PT PELNI (Persero) berupa Kendaraan Dinas dan Kendaraan Alat Berat Nomor: 145/DK/XI-2023 tanggal 30 November 2023;
39. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Kajian Pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN 2025 pada PT PELNI (Persero) Nomor: 158/DK/XII-2023 tanggal 29 Desember 2023;
40. Tindak lanjut atas hasil pelaksanaan *assessment* penerapan GCG PT PELNI (Persero) Tahun 2022 Nomor: 159/DK/XII-2023 tanggal 29 Desember 2023.

33. Follow-up on the Resignation of Mr. Ali Masykur Musa as Chief Commissioner Number: 135/DK/XI-2023 dated November 17, 2023;
34. Review/Response to the Submission of the Draft Work Plan and Budget Proposal (RKAP) of PT PELNI (Persero) for 2024 Number: 138/DK/XI-2023 dated November 22, 2023;
35. Approval for the Use of Pledge Agreement Facilities Number: 139/DK/XI-2023 dated November 22, 2023;
36. Response/Review of the Revised RKAP Proposal for 2024 of PT PELNI (Persero) Number: 140/DK/XI-2023 dated November 24, 2023;
37. Response to the Approval of the Appointment of Rating Agencies for the Health Assessment of PT PELNI (Persero) for the Fiscal Year 2023 Number: 144/DK/XI-2023 dated November 25, 2023;
38. Response to the Proposal for Write-off and Transfer of 51 (fifty-one) Fixed Assets of PT PELNI (Persero) in the form of Service Vehicles and Heavy Equipment Number: 145/DK/XI-2023 dated November 30, 2023;
39. Response to the Request for Approval of the Study Proposal for State Capital Participation (PMN) in the 2025 State Budget at PT PELNI (Persero) Number: 158/DK/XII-2023 dated December 29, 2023;
40. Follow-up on the Implementation Results of the GCG Assessment of PT PELNI (Persero) for 2022 Number: 159/DK/XII-2023 dated December 29, 2023.

PELAPORAN BERKALA DAN INSIDENTIAL DARI DIREKSI KEPADA DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023, Direksi telah menyampaikan sebanyak 13 (tiga belas) laporan berkala dan kepada Dewan Komisaris, dengan perincian sebagai berikut:

PERIODIC AND INCIDENTAL REPORTING BY THE BOARD OF DIRECTORS TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023, the Board of Directors submitted a total of 13 (thirteen) periodic reports to the Board of Commissioners, with the details as follows:

Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
03.01/01/S-B/DU/2023	01 Maret 2023 / March 1, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Bulan Januari Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for January 2023
03.28/04/S-B/DU/2023	28 Maret 2023 / March 28, 2023	Laporan Manajemen PT PELNI (Persero) s.d. Bulan Februari Tahun 2023 Management Report of PT PELNI (Persero) up to February 2023

Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
04.26/02/S-B/DU/2023	26 April 2023 / April 26, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) up to March 2023
05.26/01/S-B/DU/2023	26 Mei 2023 / May 26, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sd Bulan April Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) up to April 2023
06.26/01/S-B/DU/2023	26 Juni 2023 / June 26, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sd Bulan Mei Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) up to May 2023
07.13/02/S-B/DU/2023	13 Juli 2023 / July 13, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Semester I Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the First Half of 2023
08.14/01/S-B/DU/2023	18 Agustus 2023 / August 18, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sd Juli Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) up to July 2023
09.15/01/S-B/DU/2023	15 September 2023 / September 15, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) s.d. Agustus Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) up to August 2023
10.18/05/S-B/DU/2023	18 Oktober 2023 / October 18, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan September Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) up to September 2023
11.14/01/S-B/DU/2023	14 November 2023 / November 14, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan Oktober Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) up to October 2023
12.27/03/S-B/DU/2023	27 Desember 2023 / December 27, 2023	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan November Tahun 2023 Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) up to November 2023
01.26/03/S-B/DU/2024	26 Januari 2024 / January 26, 2024	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023 *Unaudited* Unaudited Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for 2023
04.25/03/S-B/DU/2024	25 April 2024 / April 25, 2024	Laporan Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023 *Audited* Audited Management Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for 2023

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

PENUGASAN KHUSUS DIREKSI

Selama tahun 2023, terdapat penugasan khusus yang dilaksanakan oleh Direksi PT PELNI (Persero), antara lain:
1. Adanya penugasan KM Dobonsolo untuk kegiatan mudik gratis 2023 selama 2 minggu.
2. Adanya penugasan KM Sinabung sebagai akomodasi terapung pada event KTT ke-42 ASEAN 2023 selama 2 minggu.
3. Sail Teluk Cendrawasih di Pelabuhan Biak tanggal Sail Teluk Cendrawasih di Pelabuhan Biak tanggal 20 November 2023 sd 27 November 2023 dengan menggunakan KM Sinabung.
4. *Event BoatCamp* BUMN Muda.

KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN

Kebijakan terkait program pengenalan diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI

Direksi menetapkan kebijakan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Program pengenalan dimaksudkan agar Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perseroan. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota Direksi baru. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:
1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;

SPECIAL ASSIGNMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2023, there were several special assignments carried out by the Board of Directors of PT PELNI (Persero), including:
1. The assignment of KM Dobonsolo for the 2023 free homecoming activities for 2 weeks.
2. The assignment of KM Sinabung as floating accommodation during the 42nd ASEAN Summit 2023 for 2 weeks.
3. Sail Teluk Cendrawasih at Biak Port from November 20, 2023, to November 27, 2023, using KM Sinabung.
4. The BoatCamp BUMN Muda event.

INTRODUCTION PROGRAM POLICY

The policy related to the introduction program is regulated in the Joint Decree between the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, regarding the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), and has been published on the Company's official website.

INTRODUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has established a policy to implement an introduction program for newly appointed members of the Board of Directors. This program is intended to help new Directors, coming from various backgrounds and experiences, to familiarize themselves with the company's activities and conditions. The introduction program must be conducted no later than 3 (three) months after the appointment of a new Director. The responsibility for organizing the introduction program lies with the Corporate Secretary or whoever performs the function of the Corporate Secretary.

The content of the introduction program includes at least:
1. Implementation of Good Corporate Governance principles by the Company;
2. An overview of the Company, including its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan Program Pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi baru, yaitu Ibu Nuraini Dessy W pada tanggal 02 Oktober 2023 di Ruang Rapat Direktur Usaha Angkutan Penumpang. Adapun metode program pengenalan dilakukan dengan cara presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan, kunjungan ke kantor-kantor cabang, serta pengkajian dokumen Perusahaan.

3. Information regarding delegated authorities, Internal and External Audits, internal control systems and policies, including the audit committee; and
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and prohibitions.

In 2023, the Company conducted the Corporate Introduction Program for the new Director, Mrs. Nuraini Dessy W, on October 2, 2023, in the Meeting Room of the Director of Passenger Transportation Business. The introduction program methods included presentations, meetings, visits to Company facilities, visits to branch offices, and review of Company documents.

KEBIJAKAN PELATIHAN

Kebijakan terkait peningkatan kapabilitas diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

TRAINING POLICY

The policy related to capability enhancement is regulated in the Joint Decree between the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, regarding the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), and has been published on the Company's official website.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Pada tahun 2023, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

In 2023, the competency development programs attended by the Board of Directors of the Company were as follows:

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
1	Tri Andayani Direktur Utama President Director	15-16 Juni 2023 / June 15-16, 2023	*Expand Senior Leadership Development Program*	PT Mediatama Sinergi EMAS

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
2	Anik Hidayati Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	14 Juni 2023 / June 14, 2023	*RiskHub Webinar : "The Future of Risk Culture: Navigating The Unknown"*	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
		5-6 Juli 2023 / July 5-6, 2023	Konferensi Audit Internal *Building Resilience In Tuna World : Control Your Future or Someone Else Will* Internal Audit Conference Building Resilience in the Tuna Industry: Control Your Future or Someone Else Will	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
		10 Agustus 2023/ August 10, 2023	BLMI *GRC Masterclass - Pre* IPO dan *Post* IPO BLMI GRC Masterclass - Pre-IPO and Post-IPO	Kementerian BUMN / BUMN Leadership & Management Institute Ministry of SOE / SOE Leadership & Management Institute
		10 Agustus 2023/ August 10, 2023	BLMI GRC *Masterclass* - Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) BLMI GRC Masterclass - Rating and Issuance of Debt Securities and Sukuk (EBUS)	Kementerian BUMN / BUMN Leadership & Management Institute Ministry of SOE / SOE Leadership & Management Institute
		16 Agustus 2023/ August 16, 2023	BLMI GRC *Masterclass - Introduction to ESG & IFC Performance Standard*	Kementerian BUMN / BUMN Leadership & Management Institute Ministry of SOE / SOE Leadership & Management Institute
		31 Agustus - 1 September 2023 / August 31 - September 1, 2023	*Masterclass Program Series XXII Risk Capacity, The Fundamental Missing Puzzle In Risk Management Pratice*	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Professional Certification Institute for Risk Management (LSPMR)
		26 September 2023 / September 26, 2023	*ESG for Boards – Governance of ESG*	Kementerian BUMN / BUMN Leadership & Management Institute Ministry of SOE / SOE Leadership & Management Institute
		04 November 2023 / November 4, 2023	Webinar : Cara Mudah Mengagregasikan Risiko Organisasi Webinar : Effortless Strategies for Aggregating Organizational Risks	*GRC Management, Supported by* Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) GRC Management, Supported by Professional Certification Institute for Risk Management (LSPMR)

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
3	Rainoc Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	14 September 2023 / September 14, 2023	GRC *Masterclass Program* 2023 : Pemeringkatan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN GRC Masterclass Program 2023: Ranking of State-Owned Enterprises and Their Subsidiaries	Kementerian BUMN / BUMN Leadership & Management Institute Ministry of SOE / SOE Leadership & Management Institute
		19 Oktober 2023 / October 19, 2023	GRC *Masterclass Program 2023 : Joint Venture between SOE and Private Sector*	Kementerian BUMN / BUMN Leadership & Management Institute Ministry of SOE / SOE Leadership & Management Institute
		13-14 Oktober 2023 / October 13-14, 2023	*Workshop* CHRO *School* Tahun 2023 Modul I Workshop CHRO School 2023 Module I	Kementerian BUMN/FHCI Ministry of SOE/FHCI
		17-18 November 2023/ November 17-18, 2023	*Workshop* CHRO *School* Tahun 2023 Modul II Workshop CHRO School 2023 Module II	Kementerian BUMN/FHCI Ministry of SOE/FHCI
		14-15 Desember 2023/ December 14-15, 2023	Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko IX : *Navigating Country Risk For Sustainable Growth (Opportunities and challenges* 9th National Conference on Professional Risk Management: Navigating Country Risk for Sustainable Growth (Opportunities and Challenges)	Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko (LSPMR) Professional Certification Institute for Risk Management (LSPMR)
4	Nuraini Dessy W Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	15-17 November 2023/ November 15-17, 2023	Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi. *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	LSP Mitra Kalyana Sejahtera
5	Robert M.P. Sinaga Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	6-9 Juni 2023 / June 6-9, 2023	*Training Program on* MaK Marine Engine Maintenance	Caterpillar Marine Asia Pacific PTE.LTD. (Mak Asia-Singapore)
		21 September 2023 / September 21, 2023	*Seminar of the Daihatsu Engine*	Daihatsu Diesel Asia Pacific PTE. LTD.
		14-15 Desember 2023/ December 14-15, 2023	Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko IX "*Navigating Country Risk For Sustainable Growth : Opportunities and challenges*" 9th National Conference on Professional Risk Management: "Navigating Country Risk for Sustainable Growth: Opportunities and Challenges"	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Professional Certification Institute for Risk Management (LSPMR)

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
6	Yossianis Marciano Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	*Hybrid* : Luring (10-11 Februari 2023) di Bali, Indonesia dan Daring (Maret - April 2023) / Hybrid: Offline (February 10-11, 2023) in Bali, Indonesia, and Online (March - April 2023)	*Chief Business Development Officer Innovation School*	INSEAD dan BUMN Leadership Management & Institute INSEAD and SOE Leadership & Management Institute
		7 - 21 Oktober 2023 / October 7-21, 2023	*Certified Financial Planner*	IPMI International Business School

PENILAIAN KINERJA TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Pada tahun 2023, Direksi belum memiliki Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi terkait:

1. prosedur penilaian kinerja; dan
2. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES SUPPORTING THE BOARD OF DIRECTORS

In 2023, the Board of Directors did not have any committees under its supervision, therefore, there is no information available regarding:

1. Performance assessment procedures; and
2. The criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competencies, and attendance at meetings.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Based on Article 1 paragraph (6) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007, the Board of Commissioners is a corporate organ responsible for general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan
   Syarat Anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) meliputi syarat materiil, syarat formal dan syarat lain.

   a. Syarat Materiil
      Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero), seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:
      1) integritas;
      2) dedikasi;
      3) memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
      4) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
      5) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   b. Syarat Formal
      Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada poin a, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero), seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
      1) orang perseorangan;
      2) mampu melaksanakan perbuatan hukum;
      3) tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
      4) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
      5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
   c. Syarat lain
      1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud poin a dan

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Requirements
   The requirements for members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) include material, formal, and other requirements.
   a. Material Requirements
      To be appointed as a member of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), an individual must meet the following material requirements:
      1) Integrity;
      2) Dedication;
      3) Understanding of company management issues related to one of the management functions;
      4) Sufficient knowledge in the business field in which they are nominated; and
      5) Ability to allocate adequate time to perform their duties.
   b. Formal Requirements
      In addition to the criteria mentioned in point a, an individual must meet the following formal requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero):
      1) An individual person;
      2) Capable of legal action;
      3) Not declared bankrupt within 5 (five) years before the appointment;
      4) Not previously a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a State-Owned Enterprise, Subsidiary, and/or other business entity to go bankrupt within 5 (five) years before the appointment; and
      5) Not convicted of a criminal offense detrimental to the state's finances, SOEs, Subsidiaries, other business entities, and/or related to the financial sector within 5 (five) years before the appointment.
   c. Other Requirements
      1) To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, in addition to meeting the material and formal requirements as specified

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

b, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

a) bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
b) bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
c) tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan;
d) tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan selama 2 (dua) periode;
e) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
f) sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

2) Selain memenuhi kriteria pada poin 1) di atas, anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
   a) bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
   b) bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

in points a and b, an individual must also meet the following other requirements:

a) Not a political party official, legislative candidate, and/or member of the legislature at the House of Representatives, Regional Representatives Council, Provincial House of Representatives, or Regency/City House of Representatives;
b) Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
c) Not holding a position that could potentially cause a conflict of interest with the Company;
d) Not serving as a member of the Board of Commissioners of the Company or a subsidiary's Board of Commissioners for more than 2 (two) terms;
e) Not holding a position that, by law, cannot be concurrently held with the position of a member of the Board of Commissioners;
f) Physically and mentally healthy, not suffering from any disease that could hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners, as proven by a health certificate from a hospital; and
g) Possessing a Taxpayer Identification Number (NPWP) and having fulfilled tax payment obligations for the last 2 (two) years.

2) Besides meeting the criteria in point 1 above, members of the Board of Commissioners must also meet the following other requirements:
   a) For candidates from technical ministries or other government agencies, a nomination letter from the relevant agency's leadership is required; and
   b) For candidates from state officials, they must report their Wealth Report for State Officials (LHKPN) for the last 2 (two) years, as evidenced by the LHKPN report receipt to the competent authority.

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

1. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta

APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The General Meeting of Shareholders (GMS)/Minister can appoint candidates who meet formal and other

telah dilakukan penilaian dengan kriteria 'Disarankan' menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan;

a. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan sektoral;
b. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral;
c. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri;
d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perusahaan dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral;
e. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat dilakukan melalui cara Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal;
f. Penetapan Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/ Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir;
g. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi;
h. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris;
i. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir pada batas waktu tersebut;
j. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka setelah keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan surat keputusan kepada anggota Dewan Komisaris Perusahaan terpilih.
k. Dalam proses penyerahan, Wakil Menteri atau Deputi dibantu oleh pejabat pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor;

requirements and have been assessed with the criteria of 'Recommended' to become members of the Company's Board of Commissioners;

a. The appointment of an individual as a member of the Company's Board of Commissioners can be made after passing the sectoral assessment;
b. If the appointment of the Company's Board of Commissioners is made before the sectoral assessment, their actions, duties, and functions as members of the Board of Commissioners commence from the date they pass the sectoral assessment;
c. Members of the Company's Board of Commissioners have a term of office effective from the date of appointment by the GMS/Minister;
d. If a member of the Company's Board of Commissioners fails the sectoral assessment, the GMS/Minister may dismiss the member by considering sectoral regulations;
e. The appointment of a member of the Company's Board of Commissioners can be made through a Ministerial Decree as the GMS/owner of capital;
f. The appointment of the Board of Commissioners by the GMS/Shareholders must be completed within 30 (thirty) days from the end of the term;
g. The appointment of the Board of Commissioners is not concurrent with the appointment of the Board of Directors;
h. Before being appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, the individual must sign a resignation letter from other positions prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Company's Board of Commissioners, effective from the date of appointment;
i. If the individual does not resign within the timeframe stipulated by law, their tenure as a member of the Company's Board of Commissioners ends at the deadline;
j. If the appointment is made by Ministerial Decree or circular decision of all shareholders, the Deputy processes the delivery of the decision letter to the selected member of the Company's Board of Commissioners;
k. During the delivery process, the Deputy Minister or Deputy is assisted by high-ranking primary officials responsible for legal affairs, Assistant Deputy, and Sector Assistant Deputy;

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

l. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan;
m. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS;
n. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan;
o. Proses administrasi oleh Deputi termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian;

p. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER3-/MBU/2023/03;
q. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan;
r. Penetapan Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir;
s. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi;
t. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;

u. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur, batal karena hukum sejak saat Anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan;
v. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan;
w. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 23 tidak mengurangi tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan;
x. Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris melalui RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris.

l. After the delivery, all documents are handed over to the Deputy for administration;
m. If the appointment is to be determined at the GMS, the assessment results are submitted to the Minister with a candidate appointment letter and a power of attorney to attend and make decisions at the GMS;
n. After the GMS, all documents are handed over to the Deputy for administration;
o. The administration process by the Deputy includes documentation of the appointment and assessment process;
p. The selected member of the Company's Board of Commissioners signs a statement of willingness to perform their duties well and to be dismissed at any time based on the Minister's/GMS's consideration, as stated in Appendix VII, which is an inseparable part of the Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/2023/03;

q. Members of the Company's Board of Commissioners begin their tenure effectively from the date of the decision delivery;
r. The appointment of the Board of Commissioners by the GMS/Shareholders must be completed within 30 (thirty) days from the end of the term;
s. The appointment of the Board of Commissioners is not concurrent with the appointment of the Board of Directors;
t. If the GMS does not specify the effective date of the appointment, the appointment of the Board of Commissioners takes effect from the closing of the GMS;
u. The appointment of the Board of Commissioners that does not meet the stipulated requirements is null and void from the moment other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors become aware of the non-compliance;
v. Legal actions performed by the Board of Commissioners for and on behalf of the Board of Commissioners before the appointment remains binding and become the Company's responsibility;
w. The provisions as mentioned in point 23 do not reduce the responsibility of the respective member of the Board of Commissioners for the Company's losses;
x. The appointment of the Board of Commissioners through the GMS/Board of Commissioners inauguration is supported by the Minutes of the GMS/Board of Commissioners inauguration.

PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya;
2. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, diberhentikan berdasarkan RUPS, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
4. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:
   a. Tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
   b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
   d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   e. Melakukan tindakan yang melanggar dengan etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris;
   f. Menggundurkan diri;
   g. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara; atau
   h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
5. Rencana Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 4 diberitahukan kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham;
6. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud poin 4 a, b, dan h diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
7. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud di atas disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud tersebut di atas;

DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time by the decision of the General Meeting of Shareholders, stating the reasons;
2. The term of office of the Board of Commissioners members ends if: they pass away, their term ends, they are dismissed based on the GMS, and/or they no longer meet the requirements as members of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations;
3. For members of the Board of Commissioners who resign before or at the end of their term, except due to death, they remain responsible for their actions that have not been accounted for to the GMS;

4. The dismissal of members of the Board of Commissioners as referred to in point 3 is carried out if, based on reality, the respective member, among others:

   a. Cannot perform their duties properly;
   b. Does not comply with the laws and regulations and/or the Articles of Association;
   c. Engages in actions detrimental to the Company and/or the State;
   d. Is declared guilty by a court decision with legal force;

   e. Engages in actions violating the ethics and/or propriety expected of a member of the Board of Commissioners;

   f. Resigns;
   g. Is designated as a suspect or defendant by the authorities in actions detrimental to SOEs and/or State finances; or
   h. Other reasons deemed appropriate by the GMS for the Company's interests and objectives.
5. The plan to dismiss a member of the Board of Commissioners as referred to in point 4 is notified to the respective member verbally or in writing by the Shareholders;
6. The decision to dismiss for reasons as referred to in point 4 a, b, and h is taken after the respective member is given an opportunity to defend themselves;
7. If the dismissal is done outside the GMS forum, the self-defense as mentioned above is submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days from the date the respective member is notified as mentioned above;

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

8. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin 4, maka Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
9. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 4 c dan ini merupakan pemberhentian secara tidak hormat;
10. Antara para Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping;
11. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka;
12. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 4, anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat diberhentikan oleh RUPS/Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain:
    a. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
    b. dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan; atau
    c. memasuki masa usia pensiun dari aparatur sipil negara, untuk anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang merupakan penerima penugasan dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain.

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi. Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Selama tahun 2023, terdapat pergantian komposisi Dewan Komisaris, dengan pengunduran diri Komisaris Utama Ali Masykur Musa pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana dituangkan dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor SK-9/MBU/01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

8. During the plan to dismiss as referred to in point 4, the respective member of the Board of Commissioners must perform their duties as usual;
9. Dismissal for reasons as referred to in point 4 c and his constitutes dismissal without honor;
10. There should be no blood relations or marital relations up to the third degree, both in a direct line and a side line, between the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
11. In the event of the situation as referred to, the GMS is authorized to dismiss one of them;
12. Besides the reasons for the dismissal of members of the Company's Board of Commissioners as referred to in point 4, members of the Board of Commissioners can be dismissed by the GMS/Minister for other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the interests and objectives of SOEs, including:
    a. In the context of company restructuring;
    b. In the context of reorganizing the composition of the Company's Board of Commissioners; or
    c. Entering the retirement age for civil servants, for members of the Board of Commissioners who are assigned by technical ministries or other government agencies.

COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Board of Commissioners should be established to enable effective, precise, and quick decision-making and allow acting independently, meaning without interests that could interfere with their ability to perform their duties independently and critically in relation to each other and the Board of Directors. Members of the Board of Commissioners have a term of office of 5 (five) years and can be reappointed for one term.

Throughout 2023, there was a change in the composition of the Board of Commissioners, with the resignation of the Chief Commissioner Ali Masykur Musa on November 13, 2023, as stated in the Minister of State-Owned Enterprises Decision as the General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Indonesia No. SK-9/MBU/01/2024 on the Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 16 Januari 2024. Berikut ini adalah komposisi anggota Dewan Komisaris selama tahun 2023:

Commissioners dated January 16, 2024. The following is the composition of the Board of Commissioners members for the year 2023:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Periode Awal Tahun Buku 2023-13 November 2023 Beginning of the Financial Year 2023 - November 13, 2023			
1	Ali Masykur Musa	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020
13 November 2023-Akhir Tahun Buku 2023 November 13, 2023 - End of Fiscal Year 2023			
1	-	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	-

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020
16 Januari 2024-sekarang January 16, 2024-present			
1	Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4	Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020

KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Dewan Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

KOMPOSISI ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN

Pada periode sebelum tanggal 13 November 2023, Komisaris Independen PT PELNI (Persero) berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Bapak Ali Masykur Musa dan Bapak Kristia Budiyarto, dengan persentase sebesar 33% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris pada waktu periode tersebut. Sementara pada periode setelah tanggal 13 November 2023, anggota Komisaris Independen hanya tersisa 1 (satu) orang, yaitu Bapak Kristia Budiyarto. Dengan demikian, komposisi anggota Komisaris pada waktu periode tersebut adalah 20% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024, Komisaris Independen PT PELNI (Persero) berjumlah 2 (dua) orang dengan tambahan Bapak Muhammad Awaluddin.

Jumlah anggota Komisaris Independen PT PELNI (Persero) yang menjabat selama tahun 2023 telah memenuhi batas minimum jumlah anggota Dewan Komisaris Independen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 15 ayat 3, yaitu Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who have no financial, managerial, shareholding, and/or familial relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders, or relationships with the relevant State-Owned Enterprise (SOE), which could affect their ability to act independently.

COMPOSITION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

Before November 13, 2023, PT PELNI (Persero) had two Independent Commissioners: Mr. Ali Masykur Musa and Mr. Kristia Budiyarto, constituting 33% of the total members of the Board of Commissioners at that time. However, after November 13, 2023, the number of Independent Commissioners was reduced to one, Mr. Kristia Budiyarto, making up 20% of the total members of the Board of Commissioners during that period. On January 16, 2024, PT PELNI (Persero) again had two Independent Commissioners with the addition of Mr. Muhammad Awaluddin.

The number of Independent Commissioners of PT PELNI (Persero) serving during 2023 met the minimum requirements for the number of Independent Commissioners as stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 Article 15 paragraph 3, which states that at least 20% of the composition of the Board of Commissioners must be independent, as specified in their appointment decision.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

PT PELNI (Persero) telah menetapkan persyaratan Komisaris Independen dalam Board Manual, dengan merujuk pada Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berikut adalah pemenuhan persyaratan dari masing-masing Komisaris Independen PT PELNI (Persero) pada tahun 2023:

REQUIREMENTS FOR INDEPENDENT COMMISSIONERS

PT PELNI (Persero) has established the requirements for Independent Commissioners in the Board Manual, referring to the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Below is the fulfillment of the requirements by each Independent Commissioner of PT PELNI (Persero) in 2023:

Persyaratan komisaris independent Requirements for Independent Commissioners	**Komisaris independen PT PELNI (Persero) Tahun 2023** Independent Commissioners of PT PELNI (Persero) in 2023
	Kristia Budiyarto
Memiliki Kompetensi di bidang *auditing*, keuangan, dan akuntansi Possesses expertise in the fields of auditing, finance, and accounting.	√
Tidak menjabat sebagai Direksi Perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Has not held a position as a Director in the concerned company for at least one (1) year.	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya. Is not an individual who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee the company's activities in the last six (6) months, except for reappointment as an Independent Commissioner for the next period.	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not own shares, either directly or indirectly, in the company.	√
Tidak mempunyai afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan. Does not have affiliations with the company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the company.	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan Does not have business relations, either directly or indirectly, related to the company's business activities.	√

PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

AKHLAK

PELNI

SURAT PERNYATAAN TELAH BERTINDAK INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban dan Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 25 tentang Rangkap Jabatan;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Tentang Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Bab II tentang Prinsip Tata Kelola BUMN; dan
4. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soelaiman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soedjarto Soemarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 Tanggal 3 November 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Maka dengan ini saya:

Nama : Kristia Budiyarto
Jabatan : Komisaris PT PELNI (Persero)

Menyatakan bahwa selama periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 tidak memiliki benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima dan memberikan sesuatu apapun kepada pihak lain yang mempengaruhi independensi;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perwakilan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi; dan
3. Tidak merangkap jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
   c. Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 29 Desember 2023

Kristia Budiyarto

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

AKHLAK

PELNI

SURAT PERNYATAAN TELAH BERTINDAK INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban dan Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 25 tentang Rangkap Jabatan;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Tentang Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Bab II tentang Prinsip Tata Kelola BUMN; dan
4. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soedjarto Soenarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 Tanggal 3 November 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Maka dengan ini saya:

Nama : Faturohman
Jabatan : Komisaris PT PELNI (Persero)

Menyatakan bahwa selama periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 tidak memiliki benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima dan memberikan sesuatu apapun kepada pihak lain yang mempengaruhi independensi;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perwakilan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi; dan
3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
   c. Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 29 Desember 2023

Faturohman

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

AKHLAK

PELNI

SURAT PERNYATAAN TELAH BERTINDAK INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban dan Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 25 tentang Rangkap Jabatan;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Tentang Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Bab II tentang Prinsip Tata Kelola BUMN; dan
4. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soedarto Soemarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran National Indonesia Nomor 1 Tanggal 3 November 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Maka dengan ini saya:

Nama : Wahyu Adji Henpriarsono
Jabatan : Komisaris PT PELNI (Persero)

Menyatakan bahwa selama periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 tidak memiliki benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima dan memberikan sesuatu apapun kepada pihak lain yang mempengaruhi independensi;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perwakilan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi; dan
3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
   c. Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 29 Desember 2023

Wahyu Adji Henpriarsono

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

AKHLAK

PELNI

SURAT PERNYATAAN TELAH BERTINDAK INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban dan Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 25 tentang Rangkap Jabatan;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Tentang Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Bab II tentang Prinsip Tata Kelola BUMN; dan
4. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soedjarto Soemarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 Tanggal 3 November 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Maka dengan ini saya:

Nama : Raden Suhartono
Jabatan : Komisaris PT PELNI (Persero)

Menyatakan bahwa selama periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 tidak memiliki benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima dan memberikan sesuatu apapun kepada pihak lain yang mempengaruhi independensi;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping maupun hubungan yang timbul karena perwakilan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi; dan
3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
   c. Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 29 Desember 2023

Raden Suhartono

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

AKHLAK

PELNI

SURAT PERNYATAAN TELAH BERTINDAK INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban dan Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 25 tentang Rangkap Jabatan;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Tentang Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Bab II tentang Prinsip Tata Kelola BUMN; dan
4. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soedjarto Soenarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 Tanggal 3 November 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Maka dengan ini saya:

Nama : Eddy Susanto Soepadmo
Jabatan : Komisaris PT PELNI (Persero)

Menyatakan bahwa selama periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 tidak memiliki benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima dan memberikan sesuatu apapun kepada pihak lain yang mempengaruhi independensi;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perwakilan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi; dan
3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
   c. Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 29 Desember 2023

METERAI TEMPEL

Eddy Susanto Soepadmo

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara sesama anggota Dewan Komisaris;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) yang menjabat selama tahun 2023 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

AFFILIATION RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The criteria for affiliation relationships among the Board of Commissioners include:
1. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners;
2. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors;
3. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholders.

All members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) who served during 2023 had no affiliation relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major and/or Controlling Shareholders.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris Perusahaan dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2. Dewan Komisaris Perusahaan yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris Perusahaan selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.
3. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Perusahaan, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan yang bersangkutan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Members of the Company's Board of Commissioners may hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other business entities, provided they comply with sectoral regulations.
2. Members of the Company's Board of Commissioners who hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other business entities as mentioned in point 1 must attend at least 75% of the Company's Board of Commissioners meetings in one year to be eligible for performance bonuses/incentives/special incentives.
3. Members of the Company's Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners of the Company unless assigned by the Minister.
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors in the Company, other business entities, or positions that are legally prohibited from being held concurrently with the position of the Company's Board of Commissioners, or positions that may cause a conflict of interest with the Company. They must sign a statement of willingness to resign from such positions if elected as members of the Company's Board of Commissioners.

5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan 4, berakhir karena hukum sejak anggota Dewan Komisaris BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan 4, anggota Dewan Komisaris BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/ Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
7. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris BUMN setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada poin 5 adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris BUMN yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 7 tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris BUMN yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris BUMN yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.
9. Apabila anggota Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris BUMN atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 8 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

5. The term of office for members of the Company's Board of Commissioners holding concurrent positions as mentioned in points 3 and 4 ends automatically when other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders (GMS)/ Minister become aware of such concurrent positions.
6. Within seven days from the discovery of concurrent positions as mentioned in points 3 and 4, other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors must notify the GMS/Minister regarding the concurrent positions to initiate the termination process.
7. Any legal acts performed for and on behalf of the Company by members of the Board of Commissioners after their term has ended as per point 5 are invalid and become the personal responsibility of the respective members of the Board of Commissioners.
8. The provisions in point 7 do not reduce the esponsibility of the respective members of the Board of Commissioners for any losses incurred by the Company due to their mistakes or negligence in performing their duties.
9. If the Company's Board of Commissioners consists of two or more members, the responsibility as mentioned in point 8 is shared jointly and severally among all members of the Board of Commissioners.

Pada tahun 2023, terdapat Dewan Komisaris yang merangkap jabatan.

In 2023, there were members of the Board of Commissioners holding concurrent positions.

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Staff* Khusus Menteri Bidang Protokoler pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019-sekarang) Special Staff to the Minister for Protocol Affairs at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2019-present)
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	tbc
Faturohman	Komisaris Commissioner	PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis di Kementerian BUMN (2022-Januari 2024) Acting Head of the Bureau of Public Relations and Strategic Support Facilities at the Ministry of State-Owned Enterprises (2022-January 2024)

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Inspektur III (Transportasi Laut) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-6 Maret 2024) Inspector III (Maritime Transportation) at the Inspectorate General of the Ministry of Transportation (2022-March 6, 2024)
Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2021- sekarang) Deputy Head of BPKP for Regional Financial Management Supervision (2021-present)

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) berkewajiban untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada PT PELNI (Persero) dan perusahaan lain. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2023 maupun keluarga dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham di PT PELNI (Persero) maupun di perusahaan lain.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) is obligated to report to the Company regarding their own share ownership and that of their families in PT PELNI (Persero) and other companies. Throughout the fiscal year 2023, neither the members of the Board of Commissioners nor their families held shares in PT PELNI (Persero) or in any other company.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki peran strategis sebagai pengawas jalannya usaha Perseroan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pedoman kerja sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam upaya memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Kerja sebagaimana diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang menjelaskan tata laksana bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan antara kedua organ Perusahaan secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami dan dapat dijalankan dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya, agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien.

WORK GUIDELINES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners holds a strategic role in overseeing the operations of the Company. Therefore, a set of work guidelines is necessary to guide the Board of Commissioners in executing their duties, responsibilities, and authorities in a manner that meets the interests of Shareholders and other Stakeholders.

The Board of Commissioners has established Work Guidelines as stipulated in the Joint Decree between the Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual for the Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), which has been published on the Company's official website.

The Board Manual for the Board of Commissioners and Directors serves as a guideline that outlines the general procedures for the Board of Commissioners and Directors, as well as the structured and systematic processes for their working relationship, making it easy to understand and implement in carrying out their roles and functions. This aims to ensure the Company is managed professionally, transparently, and efficiently.

Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dalam Board Manual diatur dalam Bab 3, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum;
2. Pengaturan Rangkap Jabatan;
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris;
4. Pengunduran Diri Dewan Komisaris;
5. Pengisian Anggota Dewan Komisaris yang Lowong;
6. Komisaris Independen;
7. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
8. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris;
9. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
10. Tugas Dewan Komisaris;
11. Wewenang Dewan Komisaris;
12. Hak Dewan Komisaris;
13. Etika Jabatan;
14. Rapat Dewan Komisaris;
15. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Selain itu, dalam *Board Manual* tersebut juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DEWAN

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha PT PELNI (Persero) dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Pengawasan dan pemberian nasihat, dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas

The governance procedures for the Board of Commissioners in the Board Manual are detailed in Chapter 3, covering the following aspects:

1. General Policies
2. Regulation of Concurrent Positions
3. Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners
4. Resignation of the Board of Commissioners
5. Filling Vacant Positions on the Board of Commissioners
6. Independent Commissioners
7. Orientation and Capability Enhancement Programs
8. Performance Indicators for the Board of Commissioners
9. Responsibilities of the Board of Commissioners
10. Duties of the Board of Commissioners
11. Authorities of the Board of Commissioners
12. Rights of the Board of Commissioners
13. Professional Ethics
14. Meetings of the Board of Commissioners
15. Supporting Organs of the Board of Commissioners

Additionally, the Board Manual outlines the mechanisms for the working relationship between the Board of Commissioners and the Directors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a corporate body responsible for overseeing the management of the Company by the Directors and providing them with advice. The supervision and advice provided by the Board of Commissioners are guided by the following principles:

1. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the management policies and the general course of the Company's management, including the business of PT PELNI (Persero), and providing advice to the Directors.
2. Supervision and advice are carried out in the interest of the Company and in line with the Company's objectives, without serving the interests of specific parties or groups.
3. In exercising their oversight role, the Board of Commissioners is prohibited from participating in the decision-making of the Company's operational activities unless specified in the Company's articles of association or regulatory provisions.
4. Any decision-making on operational activities by the Board of Commissioners as part of their oversight duties

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak secara kolektif dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.
6. Pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dan pengambilan keputusan operasional yang menjadi tugas Direksi, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada Direksi harus memanggil RUPS untuk mengangkat Direksi.
7. Pengawasan dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil yang dimintakan persetujuan/ rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.
8. Apabila anggota Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) atau lebih, tanggung terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

does not absolve the Directors of their management responsibilities.

5. The Board of Commissioners acts collectively in performing their oversight duties and cannot act individually.
6. The supervision by the Board of Commissioners should not evolve into executive tasks or operational decision-making, which are the responsibilities of the Directors, except in cases where the Company lacks Directors. In such instances, the Board of Commissioners is required to convene a General Meeting of Shareholders to appoint new Directors within 30 days.
7. Supervision covers decisions already made or those requiring approval/recommendation from the Board of Commissioners.
8. If the Board of Commissioners comprises two or more members, they are collectively liable for any loss incurred by the Company due to the actions or negligence of any Commissioner in performing their duties.

Adapun tugas Dewan Komisaris secara umum adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha PT PELNI (Persero) dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta.

The general duties of the Board of Commissioners are as follows:
1. Oversee the management policies and the general course of the Company's management, including the business of PT PELNI (Persero), and provide advice to the Directors.
2. Review, examine, and sign the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Annual Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Directors, in accordance with the articles of association.
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the RJPP and RKAP, including the reasons for signing these plans.
4. Monitor the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS on any significant issues concerning the Company's management.
5. Immediately report to the GMS any signs of declining Company performance.
6. Review periodic and annual reports prepared by the Directors and sign the annual report.
7. Provide explanations, opinions, and suggestions to the GMS on the annual report, upon request.

8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
15. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
16. Beritikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
17. Memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
18. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
19. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
20. Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.
21. Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.
22. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
23. Menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada dibawah Dewan Komisaris.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut *Board Manual* PT PELNI (Persero):

1. Tugas Pengawasan.
2. Tugas Dewan Komisaris terkait Pemberian Arahan dan Persetujuan Atas Rancangan RJPP.

8. Develop an annual work program to be included in the RKAP.
9. Establish an Audit Committee.
10. Propose a Public Accountant to the GMS.
11. Document minutes of Board meetings and retain copies.
12. Report their and their families' shareholdings in the Company and other companies to the Company.
13. Report to the GMS on the supervisory duties performed during the past fiscal year.
14. Fulfill other obligations related to supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with regulations, the articles of association, and/or GMS resolutions.
15. Comply with regulatory provisions and/or the articles of association in carrying out their duties.
16. Act in good faith, with caution, and responsibly in performing their supervisory and advisory roles.
17. Monitor and ensure the effective and sustainable implementation of Good Corporate Governance.
18. Evaluate the performance of external auditors according to applicable standards and regulations.
19. Assess the appointment process of Directors and Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures, providing written approvals or disapprovals.
20. Recommend candidates for Directors to Shareholders based on established policies and selection criteria.
21. Evaluate the performance of the Directors and report the results to Shareholders.
22. Recommend remuneration for the Directors according to applicable regulations and based on performance evaluations.
23. Review reports from committees under the Board of Commissioners.

The specific duties and responsibilities of the Board of Commissioners according to the Board Manual of PT PELNI (Persero) are:

1. Supervisory Duties
2. Duties related to Providing Directions and Approval for the RJPP Draft

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

3. Tugas Dewan Komisaris terkait Pemberian Arahan dan Persetujuan Atas Rancangan RKAP.
4. Tugas Arahan terkait dengan Perubahan Lingkungan Bisnis.
5. Tugas Arahan terkait dengan Hubungan *Stakeholder.*
6. Tugas Arahan terkait Sistem Pengendalian Internal.
7. Tugas Arahan terkait Manajemen Risiko.
8. Tugas Arahan terkait Sistem Teknologi Informasi.
9. Tugas Arahan terkait Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir.
10. Tugas Arahan terkait Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.
11. Tugas Arahan terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
12. Tugas Arahan terkait Mutu dan Pelayanan.
13. Tugas Pengawasan terkait Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Peraturan Perundangan yang Berlaku dan Perjanjian Dengan Pihak Ketiga.
14. Tugas Pengawasan terkait Kepatuhan Direksi Sesuai RKAP dan/atau RJPP.
15. Tugas Pengawasan terkait Persetujuan Atas Transaksi.
16. Tugas Pengawasan terkait Pengajuan Calon Auditor Eksternal.
17. Tugas Pengawasan Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal.
18. Tugas Pengawasan terkait Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan.
19. Tugas Pengawasan terkait Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
20. Tugas Pengawasan terkait Pencalonan Anggota Direksi, Penilaian Kinerja Direksi (Individu Dan Kolegial) dan Pengajuan Usulan Tantiem/Insentif Kinerja Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Mempertimbangkan Kinerja Direksi.
21. Tugas Pengawasan terkait Potensi Benturan Kepentingan yang Menyangkut Dewan Komisaris.
22. Tugas Pengawasan terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris. Pembahasan mengenai pembagian tugas Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat internal Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing Dewan Komisaris dan pembagian per Direktorat Direksi. Adapun pembagian tugas Dewan Komisaris pada tahun 2023 telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/DK/V-2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang

3. Duties related to Providing Directions and Approval for the RKAP Draft
4. Duties related to Adapting to Changes in the Business Environment
5. Duties related to Stakeholder Relations
6. Duties related to Internal Control Systems
7. Duties related to Risk Management
8. Duties related to Information Technology Systems
9. Duties related to Career Development Policies and Implementation
10. Duties related to Accounting Policies and Financial Reporting
11. Duties related to Procurement of Goods and/or Services
12. Duties related to Quality and Service
13. Supervisory Duties related to Compliance of the Directors with Applicable Regulations and Agreements with Third Parties
14. Supervisory Duties related to Compliance of the Directors with the RKAP and/or RJPP
15. Supervisory Duties related to Transaction Approvals
16. Supervisory Duties related to the Appointment of External Auditors
17. Supervisory Duties related to the Effectiveness of Internal and External Audits
18. Supervisory Duties related to Signs of Declining Company Performance
19. Supervisory Duties related to Subsidiaries/Joint Ventures Management Policies
20. Supervisory Duties related to the Nomination of Directors, Individual and Collective Performance Assessments of Directors, and the Proposal of Performance Incentives in accordance with applicable regulations and based on Directors' performance.
21. Supervisory Duties related to Potential Conflicts of Interest involving the Board of Commissioners
22. Supervisory Duties related to Good Corporate Governance Practices

To enhance the effectiveness and success of its supervisory functions, the Board of Commissioners may delegate responsibilities among its members. The discussion regarding the distribution of tasks within the Board of Commissioners is conducted through internal meetings, taking into account the competencies of each Commissioner and the division per Directorate of the Board of Directors. The delegation of tasks for the Board of Commissioners in 2023 has been stipulated in the Board of Commissioners Decree No. KEP-05/DK/V-2022 dated May 24, 2022, concerning the Allocation of Duties of

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan uraian sebagai berikut:

the Members of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with the details as follows:

Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Division of Responsibilities of the Board of Commissioners

No	Nama Name	Posisi Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
1	Ali Masykur Musa	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Mengoordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap hal-hal strategis dan *Good Corporate Governance*, serta merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Coordinating the implementation of tasks and supervisory activities of the Board of Commissioners and providing direction to the Board of Directors on strategic matters and Good Corporate Governance, while also serving as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha dalam bidang *core business* dan komersial serta pengelolaan teknologi informasi. Supervising and providing direction to the Board of Directors regarding the management of core business and commercial operations as well as information technology management.
3	Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha dalam bidang sumber daya manusia, hukum, dan organisasi. Supervising and providing direction to the Board of Directors regarding the management of human resources, legal affairs, and organizational matters.
4	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha dalam bidang transformasi perusahaan, pengelolaan Anak Perusahaan dan *non-core business*, serta merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Supervising and providing direction to the Board of Directors regarding the management of corporate transformation, subsidiary management, and non-core business operations, while also serving as the Chairman of the Risk Management Monitoring Committee.
5	Faturohman	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha dalam bidang investasi, perkapalan, armada, dan teknik. Supervising and providing direction to the Board of Directors regarding the management of investments, shipping, fleet, and technical matters.
6	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha dalam bidang akuntansi, keuangan dan anggaran serta pengawasan internal, serta merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Supervising and providing direction to the Board of Directors regarding the management of accounting, finance, budgeting, and internal supervision, while also serving as the Chairman of the Audit Committee.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan terkait rapat diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu. Pada umumnya, penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Komisaris Utama.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komsiaris yang diwakilinya. Dalam pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris, apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.

Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Standar kesegeraan waktu dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris yaitu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dimintakan pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam Risalah Rapat sebagai bentuk dari dissenting *opinion*.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara

CONDUCTING BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

POLICY ON CONDUCTING BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

The policy regarding meetings is regulated by the Joint Decision Letter between the Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual of the Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), which has been published on the official website of the Company.

Board of Commissioners meetings are held whenever deemed necessary, but at least once a month. Meetings may be convened outside of the regular schedule if considered necessary. Generally, the meetings are chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent or unable to attend, the meeting is chaired by a designated member of the Board of Commissioners appointed specifically by the President Commissioner.

Decisions at the Board of Commissioners meetings are made through deliberation to reach a consensus. If a consensus is not reached, decisions are made by a majority vote. Each member of the Board of Commissioners has one vote, plus one vote for each member they represent. In the event of a tie, the decision aligns with the opinion of the meeting chair, while adhering to the accountability provisions.

Abstentions are considered as agreeing to the proposal presented in the Board of Commissioners meeting. Invalid votes are disregarded and not counted in determining the total number of votes cast. The standard timeframe for decision-making by the Board of Commissioners is a maximum of 14 working days from the time a decision is requested by the relevant party. If a member of the Board of Commissioners has a differing opinion on a decision, that opinion must be recorded in the meeting minutes as a dissenting opinion.

The Board of Commissioners can also make valid and binding decisions without holding a meeting, provided that all members are informed in writing about the proposed

tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

decisions, all members approve the proposals in writing, and sign the written agreement.

REALISASI PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS IN 2023

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) menyelenggarakan rapat dengan mengundang Komite di Bawah Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, sesuai dengan jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris.

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

During 2023, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) held meetings with the Committees under the Board of Commissioners 12 times, as planned in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA).

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2023:

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN MEETINGS

The following table shows the frequency and attendance of each member of the Board of Commissioners in the meetings held during 2023:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Board of Commissioners Meetings and Committees under the Board of Commissioners

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah rapat** Number of Meeting	**Jumlah kehadiran** Number of attendances	**Tingkat kehadiran** Attendance rate
Ali Masykur Musa*	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	10	10	100%
Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
Faturohman	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	12	12	100%

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berikut ini merupakan risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris yang memuat waktu pelaksanaan rapat, agenda rapat, dan daftar Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris selama tahun 2023:

MINUTES OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The following table contains the minutes of the meetings of the Board of Commissioners and the Committees under the Board of Commissioners, including the time of the meeting, the agenda, and the list of attendees:

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris
Minutes of the Meetings of the Board of Commissioners and Committees Under the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta rapat Meeting Participants
1	Senin, 16 Januari 2023 Monday, January 16, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Desember PT PELNI (Persero) Tahun 2022 (*Unaudited*); 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain. 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to December 2022 of PT PELNI (Persero) (Unaudited); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Sekretaris Dewan Komisaris 6. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Secretary to the Board of Commissioners 6. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners
2	Senin, 27 Februari 2023 Monday, February 27, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Januari PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; daN 4. Lain-Lain. 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to January 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Sekretaris Dewan Komisaris 6. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Secretary to the Board of Commissioners 6. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris
Minutes of the Meetings of the Board of Commissioners and Committees Under the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta rapat Meeting Participants
3	Selasa, 28 Maret 2023 Tuesday, March 28, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Februari PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to February 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Sekretaris Dewan Komisaris 6. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Secretary to the Board of Commissioners 6. Staf of the Secretary to the Board of Commissioners
4	Rabu, 26 April 2023 Wednesday, April 26, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Maret PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to March 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Sekretaris Dewan Komisaris 6. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Secretary to the Board of Commissioners 6. Staf of the Secretary to the Board of Commissioners
5	Senin, 29 Mei 2023 Monday, May 29, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d April PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to April 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Sekretaris Dewan Komisaris 6. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Secretary to the Board of Commissioners 6. Staf of the Secretary to the Board of Commissioners

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris
Minutes of the Meetings of the Board of Commissioners and Committees Under the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta rapat Meeting Participants
6	Senin, 26 Juni 2023 Monday, June 26, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Mei PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to May 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Sekretaris Dewan Komisaris 6. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Secretary to the Board of Commissioners 6. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners
7	Senin, 24 Juli 2023 Monday, July 24, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Juni PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to June 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Sekretaris Dewan Komisaris 6. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Secretary to the Board of Commissioners 6. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris
Minutes of the Meetings of the Board of Commissioners and Committees Under the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta rapat Meeting Participants
8	Senin, 28 Agustus 2023 Monday, August 28, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Juli PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to July 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi 6. Sekretaris Dewan Komisaris 7. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Integrated Governance Committee Member 6. Secretary to the Board of Commissioners 7. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners
9	Jum'at, 22 September 2023 Friday, September 22, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Agustus PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to August 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi 6. Sekretaris Dewan Komisaris 7. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Integrated Governance Committee Member 6. Secretary to the Board of Commissioners 7. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris
Minutes of the Meetings of the Board of Commissioners and Committees Under the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta rapat Meeting Participants
10	Jum'at, 27 Oktober 2023 Friday, October 27, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d September PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Pembahasan RKA Dewan komisaris dan RKAP Tahun 2024; 4. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 5. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to September 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Discussion of the Budget and Work Plan of the Board of Commissioners and the Work Plan and Budget for 2024; 4. Report of the Board of Commissioners Committee; and 5. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi 6. Sekretaris Dewan Komisaris 7. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Integrated Governance Committee Member 6. Secretary to the Board of Commissioners 7. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners
11	Selasa, 28 September 2023 Tuesday, November 28, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Oktober PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to October 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi 6. Sekretaris Dewan Komisaris 7. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Integrated Governance Committee Member 6. Secretary to the Board of Commissioners 7. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris
Minutes of the Meetings of the Board of Commissioners and Committees Under the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta rapat Meeting Participants
12	Rabu, 27 Desember 2023 Wednesday, December 27, 2023	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d November PT PELNI (Persero) Tahun 2023; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan 4. Lain-Lain 1. Evaluation of the Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to November 2023 of PT PELNI (Persero); 3. Report of the Board of Commissioners Committee; and 4. Miscellaneous.	1. Dewan Komisaris 2. Anggota Komite Audit 3. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risko 4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi 6. Sekretaris Dewan Komisaris 7. Staf Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Audit Committee Member 3. Risk Management Monitoring Committee Member 4. Nomination and Remuneration Committee Member 5. Integrated Governance Committee Member 6. Secretary to the Board of Commissioners 7. Staff of the Secretary to the Board of Commissioners

RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) menyelenggarakan rapat gabungan bersama anggota Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, sesuai dengan jumlah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris

JOINT MEETINGS BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE DIRECTORS

In 2023, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) held joint meetings with the Directors 12 times, as planned in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA).

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2023:

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS

The following table shows the frequency and attendance of each member of the Board of Commissioners in the joint meetings held during 2023:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Joint Meetings with the Board of Directors

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah rapat** Number of Meeting	**Jumlah kehadiran** Number of attendances	**Tingkat kehadiran** Attendance rate
Ali Masykur Musa	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	10	10	100%
Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
Faturohman	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	12	12	100%

Keterangan:
Komisaris Utama Bapak Ali Masykur Musa mengundurkan diri pada tanggal 13 November 2023.
Note:
President Commissioner Mr. Ali Masykur Musa resigned on November 13, 2023.

RISALAH RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Informasi terkait risalah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Direksi.

MINUTES OF JOINT MEETINGS BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE DIRECTORS

Information related to the minutes of the joint meetings between the Board of Commissioners and the Directors is included in the Corporate Governance section, under the Directors.

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RUPS

Informasi terkait kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam RUPS tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian RUPS.

ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Information regarding the attendance of the Board of Commissioners members in the GMS is included in the Corporate Governance section, under the GMS.

EVALUASI/ARAHAN/TANGGAPAN/PERSETUJUAN YANG DISAMPAIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi usulan dari Direksi dan memberikan tanggapan dan persetujuan sesuai dengan batas kewenangannya, dalam jangka waktu yang dipersyaratkan yaitu paling lama 14 hari sejak usulan diterima.

EVALUATION/GUIDANCE/RESPONSE/APPROVAL PROVIDED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has conducted an evaluation of the proposals from the Board of Directors, providing responses and approvals within the scope of their authority, within the stipulated timeframe of no more than 14 days from receipt

Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan baik dalam forum rapat maupun melalui surat. Adapun evaluasi/arahan/tanggapan/persetujuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar disiapkan sistem informasi PSO yang secara *database* khusus (*dedicated*) terhadap penugasan PSO dan pertanggungjawabannya, dimana harus memenuhi kriteria atau ketentuan yang tunduk kepada aturan-aturan/kebijakan PSO yang telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Kementerian terkait berkenaan dengan pengakuan beban biaya PSO yang dapat diperhitungkan. Meskipun memiliki database terpisah, tetapi sistem informasi pertanggungjawaban dan pelaporan PSO tersebut tetap terintegrasi dengan sistem aplikasi akuntansi keuangan Oracle EBS (*Enterprise Business Suite*) yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan PT PELNI (Persero).
2. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar dilakukan evaluasi (*assessment*) secara terpadu dan terintegrasi secara rutin (triwulanan) di tahun 2024 oleh fungsi PSO, SPI, manajemen risiko, hukum, dan akuntansi, sehingga melibatkan disiplin ilmu dan latar belakang pemahaman di lapangan untuk sekaligus sebagai inisiatif manajemen PT PELNI (Persero) untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi pertanggung-jawaban kegiatan penugasan PSO secara rutin kepada pihak verifikator. Selanjutnya, memberikan saran/masukan/ rekomendasi kepada Direksi PT PELNI (Persero) dari hasil evaluasi (*assessment*) tersebut.
3. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar Kantor Cabang dan Divisi Keagenan melaksanakan ketentuan sebagaimana di atur dalam Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Keagenan di lingkungan PT PELNI (Persero) sebagai bagian dari mitigasi risiko yang timbul dalam kegiatan pelayanan keagenan.
4. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar dilakukan revisi Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Keagenan di Lingkungan PT PELNI (Persero), khususnya pada ketentuan uang muka (*advance disbursement*) yang harus dilunasi oleh *Principal*, *Charterer* atau Operator.
5. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar meningkatkan keandalan aplikasi dengan melakukan perbaikan atas kelemahan fitur dalam Sistem Informasi MyCargoo!, Sistem Informasi CIS dan Sistem Informasi MyDepo.
6. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya yang tidak

of the proposal. Additionally, the Board of Commissioners has offered guidance and advice to the Board of Directors in managing the company, both in meeting forums and through correspondence. The evaluations/guidance/responses/approvals provided by the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) during 2023 are as follows:

1. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors develop a dedicated PSO (Public Service Obligation) information system and database for PSO assignments and accountability, complying with criteria and regulations issued by the relevant Ministry regarding the recognition of PSO costs. Although the database is separate, the PSO accountability and reporting information system should still be integrated with the Oracle EBS (Enterprise Business Suite) accounting application system used for PT PELNI (Persero)'s financial reporting.
2. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors conduct regular integrated assessments (quarterly) in 2024 by the PSO function, internal audit, risk management, legal, and accounting departments. This initiative aims to provide routine reports on PSO assignment accountability to the verifier and to give suggestions, inputs, and recommendations to the Board of Directors of PT PELNI (Persero) based on the assessment results.
3. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors ensure Branch Offices and Agency Divisions comply with the Agency Governance Standard Operating Procedures (SOP) within PT PELNI (Persero) as part of risk mitigation in agency services activities.
4. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors revise the Agency Governance SOP within PT PELNI (Persero), particularly regarding advance disbursements that must be settled by the Principal, Charterer, or Operator.
5. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors improve the reliability of applications by addressing feature weaknesses in the MyCargoo! Information System, CIS Information System, and MyDepo Information System.
6. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors evaluate costs not covered in PM (Public

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

dicover dalam PM dan jika dipandang perlu mengajukan usulan perubahan PM dimaksud.

7. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melakukan pemenuhan kualifikasi personal sesuai standar yang diberlakukan oleh Perusahaan.
8. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar KPI Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pemegang Saham Manajemen sehingga dapat mempersiapkan infrastruktur terkait pemenuhan kualifikasi tersebut sehingga pemenuhan dapat direalisasikan sesuai harapan dan kemudian menyampaikan laporannya secara periodik kepada Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melaksanakan rencana perlakuan risiko terhadap 7 *Top Risk* PT PELNI sesuai dengan yang direncanakan dalam upaya menghasilkan *Residual Risk* sesuai dengan target dan secara periodik menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar mengoptimalkan fungsi faktor produksi untuk melaksanakan strategi bisnis secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapai target pendapatan usaha dan Laba Konsolidasi tahun 2024 kemudian secara periodik menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar dalam melaksanakan investasi sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sehingga kejadian pada tahun 2023 tidak terulang kembali dimana realisasi investasi hanya sebesar 20,02% dari target yang telah ditentukan. Oleh karenanya perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi atas Pengelolaan Risiko pada Pelaksanaan Investasi tahun 2024 kemudian hasil evaluasi dan monitoring tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
12. Untuk kesejahteraan pegawai PT PELNI (Persero) yang memasuki usia pensiun, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar segera mengimplementasikan *roadmap* penyehatan Dana Pensiun Pelni (DPP). Dengan begitu, pegawai memiliki harapan ketika memasuki masa pensiun.
13. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar segera mengimplementasikan *roadmap* (*grand design*) SDM. Hal tersebut dapat memberikan motivasi bagi pegawai dalam melaksanakan beban kerja yang ditetapkan PT PELNI (Persero).
14. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melanjutkan program Implementasi AKHLAK *Culture Journeys*, sehingga diharapkan PT PELNI (Persero) memiliki

Management) and, if necessary, propose amendments to the relevant PM.

7. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors ensure personnel qualifications meet the standards set by the company.
8. The Board of Commissioners recommends that the KPI for the fulfillment of Risk Management Organ qualifications be met as per shareholder management regulations. This includes preparing the necessary infrastructure for qualification fulfillment and periodically reporting to the Board of Commissioners.
9. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors implement the risk treatment plan for the seven Top Risks of PT PELNI, as planned, to achieve the targeted Residual Risk and periodically report to the Board of Commissioners.
10. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors optimize the production factor function to effectively and efficiently implement business strategies, aiming to achieve the 2024 business revenue and consolidated profit targets, and periodically report to the Board of Commissioners.
11. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors carry out investments within the specified timeframe to avoid repeating the 2023 occurrence where only 20.02% of the investment target was realized. Therefore, monitoring and evaluation of risk management in 2024 investments are necessary, with results reported to the Board of Commissioners.
12. For the welfare of PT PELNI (Persero) employees entering retirement age, the Board of Commissioners recommends that the Board of Directors immediately implement the Pelni Pension Fund (DPP) health roadmap to provide employees with future retirement security.
13. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors promptly implement the HR roadmap (grand design) to motivate employees in performing the workload set by PT PELNI (Persero).
14. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors continue the AKHLAK Culture Journeys Implementation Program, providing PT PELNI (Persero)

pedoman untuk dapat mengevaluasi dan melakukan refleksi atas penerapan fundamental AKHLAK.

15. Sehubungan dengan banyaknya hal yang telah berubah dalam dunia kerja, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar segera mengimplementasikan program *Employee Well-being Policy*, sehingga akan memberikan informasi terkait tingkat kesejahteraan pegawai baik dari sisi pendapatan, budaya kerja, hingga lingkungan kerja yang diatur oleh perusahaan.
16. Terkait perbaikan perubahan nomenklatur Hotel Bahtera menjadi *Learning Center*, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar segera mengimplementasikannya termasuk penyusunan dan implementasi program pelatihan dan pengembangan bersama Divisi SDM.
17. Terkait optimalisasi aset, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi agar melakukan pengkajian yang komprehensif dan perlu kehati-hatian, sehingga aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan PT PELNI (Persero). Selain itu, diperlukan aturan untuk mengoptimalisasi aset tersebut, seperti membuat kerjasama jangka panjang seperti BOT dalam jangka waktu 20 - 30 tahun, sementara dari sisi aset itu akan jadi milik PT PELNI (Persero).

KUNJUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) telah melaksanakan kunjungan kerja, dengan uraian sebagai berikut:

with a guide to evaluate and reflect on the fundamental AKHLAK application.

15. In light of numerous changes in the workplace, the Board of Commissioners recommends that the Board of Directors promptly implement the Employee Well-being Policy to inform about employee welfare levels, including income, work culture, and work environment regulated by the company.

16. Regarding the renaming of Hotel Bahtera to the Learning Center, the Board of Commissioners recommends that the Board of Directors promptly implement this change, including developing and implementing training and development programs with the HR Division.

17. Concerning asset optimization, the Board of Commissioners recommends that the Board of Directors conduct a comprehensive and cautious study to ensure assets can be utilized for PT PELNI (Persero)'s interests. Additionally, rules for optimizing these assets, such as long-term cooperation like BOT for 20-30 years, should be established, ensuring asset ownership by PT PELNI (Persero).

OFFICIAL VISITS BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) conducted official visits, detailed as follows:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Tujuan Destination	Kegiatan Activity
1.	1. Ali Masykur Musa Komisaris Utama / President Commissioner 2. Wahju Adji Herpriarsono Komisaris / Commissioner 3. Eddy Susanto Soepadmo Komisaris / Commissioner 4. Raden Suhartono Komisaris / Commissioner 5. Kristia Budiyarto Komisaris / Commissioner 6. Faturohman Komisaris / Commissioner 7. Anton H.G Napitupulu Sekretaris Dekom / Secretary to the Board of Commissioners 8. Fadli Yasir Anggota KNR / Member of the Risk Oversight Committee 9. Agung Syarifuddin Anggota KPMR / Member of the Audit Committee 10. Sukirno Dwi Susilo Anggota KPMR / Member of the Audit Committee 11. Baliya Munadjat Anggota Komdit / Member of the Nomination and Remuneration Committee 12. Teti Rohayati Staf Dekom / Staff of the Board of Commissioners 13. Muhammad Amal Staf Dekom / Staff of the Board of Commissioners 14. Ajeng Eka Yandini Staf Dekom / Staff of the Board of Commissioners 15. Ati Irawati Staf Dekom / Staff of the Board of Commissioners 16. Monica Tashya Staf Dekom / Staff of the Board of Commissioners 17. Toto Untoro Staf Dekom / Staff of the Board of Commissioners 18. Sarwanto Staf Dekom / Staff of the Board of Commissioners	17 – 20 Januari 2023 January 17-20, 2023	Semarang	Rapat Terintegrasi Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Ke Semarang Integrated Meeting of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) to Semarang

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Tujuan Destination	Kegiatan Activity
2.	1. Eddy Susanto Soepadmo Komisaris / Commissioner 2. Krsitia Budiyarto Komisaris Independen / Independent Commissioner 3. Muhammad Amal Staf Dekom / Board of Commissioners Staff 4. Toto Untoro Staf Dekom / Board of Commissioners Staff	2-5 Maret 2023 March 2-5, 2023	Makassar	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Cabang Makassar Working Visit of the Board of Commissioners to the Makassar Branch
3.	1. Ali Maskur Musa Komisaris Utama / President Commissioner 2. Fadli Yasir Anggota KNR / Member of Nomination and Remuneration Committee	9-14 Maret 2023 March 9-14, 2023	Balikpapan Surabaya	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Balikpapan dan Surabaya Working Visit of the Board of Commissioners to Balikpapan and Surabaya
4.	1. Kristia Budiyarto Komisaris Independen / Independent Commissioner	28-31 Maret 2023 March 28-31, 2023	Tarakan Nunukan	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Tarakan dan Nunukan Working Visit of the Board of Commissioners to Tarakan and Nunukan

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Tujuan Destination	Kegiatan Activity
5.	1. Kristia Budiyarto Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Monica Tashya Staf Dekom / Board of Commissioners Staff	9-10 April 2023 April 9-10, 2023	Surabaya	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dalam Rangka Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2023 Work Visit of the Board of Commissioners for Monitoring the 2023 Lebaran Transportation
	1. Eddy Susanto Soepadmo Komisaris / Commissioner 2. Agung Syarifudin Anggota KPMR / KPMR Member	10-12 April 2023 April 10-12, 2023	Makassar	
	1. Kristia Budiyarto Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Monica Tashya / Staf Dekom / Board of Commissioners Staff	14-15 April 2023 April 14-15, 2023	Balikpapan	Arus Bali Lebaran Lebaran Return Flow
	1. Ali Masykur Musa Komisaris Utama / President Commissioner 2. Fadli Yasir Anggota KNR / Nomination and Remuneration Member	14-16 April 2023 April 14-16, 2023	Pontianak	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Cabang Work Visits and Branch Monitoring
	1. Raden Suhartono Komisaris / Commissioner 2. Teti Rohayati Staf Dekom / Board of Commissioners Staff	15-16 April 2023 April 15-16, 2023	Semarang	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Cabang Work Visits and Branch Monitoring
	1. Faturohman Komisaris / Commissioner 2. Anton H.G Napitupulu Sekretaris Dekom / Board of Commissioners Secretary	16-18 April 2023 April 16-18, 2023	Batam	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Cabang Work Visits and Branch Monitoring
	1. Raden Suhartono Komisaris / Commissioner 2. Baliya Munadjat Anggota Komdit / Audit Commitee Member	29 April – 1 Mei 2023 April 29 - May 1, 2023	Ambon	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Cabang Work Visits and Branch Monitoring
	1. Kristia Budiyarto Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Monica Tashya Staf Dekom / Board of Commissioners Staff	1-2 Mei 2023 May 1-2, 2023	Parepare	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Cabang Work Visits and Branch Monitoring

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Tujuan Destination	Kegiatan Activity
	1. Kristia Budiyarto Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Marthin Heryanto GM. Galangan Surya / GM. Galangan Surya 3. Monica Tashya Staf Dekom / Board of Commissioners Staff 4. Toto Untoro Staf Dekom / Board of Commissioners Staff	3-5 Mei 2023 May 3-5, 2023	Makassar	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Cabang Work Visits and Branch Monitoring
	1. Faturohman Komisaris / Commissioner 2. Ajeng Eka Yandini Staf Dekom / Board of Commissioners Staff	4-5 Mei 2023 May 4-5, 2023	Balikpapan	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Cabang Work Visits and Branch Monitoring
	1. Krsitia Budiyarto Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Toto Untoro Staf dekom / Board of Commissioners Staff (April 9-10, 2023)	5-7 Mei 2023 May 5-7, 2023	Manokwari	Kunjungan Kerja dan *Monitoring* Cabang Work Visits and Branch Monitoring
6.	1. Ali Masykur Musa Komisaris Utama / President Commissioner 2. Fadli Yasir Anggota KNR / Member of Nomination and Remuneration Committee 3. Ati Irawati Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	29 April - 2 Mei 2023 April 29 - May 2, 2023	Padang	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Padang Working Visit of the Board of Commissioners to Padang
7.	1. Eddy Susanto Soepadmo Komisaris / Commissioner 2. Sukirno Dwi Susilo Anggota KPMR / Member of KPMR	28-29 April 2023 April 28-29, 2023	Batam	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Batam Working Visit of the Board of Commissioners to Batam
8.	1. Kristia Budiyarto Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Toto Untoro Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	17-18 Mei 023 May 17-18, 2023	Surabaya	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Surabaya Working Visit of the Board of Commissioners to Surabaya
9.	1. Kristia Budiyarto Komisaris independen / Independent Commissioner 2. Monica Tashya Staf Dekom / Board of Commissioner Staff 3. Toto Untoro Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	21-24 Mei 2023 May 21-24, 2023	Bima	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Bima Working Visit of the Board of Commissioners to Bima

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Tujuan Destination	Kegiatan Activity
10.	1. Ali Masykur Musa / Komisaris Utama / President Commissioner 2. Fadli Yasir / Anggota KNR / Member of Nomination and Remuneration Committee	8-12 Juni 2023 June 8-12, 2023	Manado Ternate Palu	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Manado, Ternate dan Palu Working Visit of the Board of Commissioners to Manado, Ternate, and Palu
11.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	10-13 Juni 2023 June 10-13, 2023	Lewoleba	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Lewoleba Working Visit of the Board of Commissioners to Lewoleba
12.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner	7-8 Juni 2023 June 7-8, 2023	Batam	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Batam Working Visit of the Board of Commissioners to Batam
13.	1. Kristia budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner	4-6 Juli 2023 July 4-6, 2023	Kendari	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Kendari Working Visit of the Board of Commissioners to Kendari
14.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Monica Tashya / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff 3. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	9-11 Juli 2023 July 9-11, 2023	Batam Tanjung Pinang	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Batam dan Tanjung Pinang Working Visit of the Board of Commissioners to Batam and Tanjung Pinang
15.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. M. Amal Amrulloh / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff 3. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	27-30 Juli 2023 July 27-30, 2023	Sampit Kumai	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Sampit dan Kumai Working Visit of the Board of Commissioners to Sampit and Kumai
16.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Monica Tashya / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff 3. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	4-7 Agustus 2023 August 4-7, 2023	Batam Tanjung Balai Karimun	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Batam dan Tanjung Balai Karimun Working Visit of the Board of Commissioners to Batam and Tanjung Balai Karimun
17.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Monica Tashya / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff 3. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	18-20 Agustus 2023 August 18-20, 2023	Ambon	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Ambon Working Visit of the Board of Commissioners to Ambon
18.	1. Kristia budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Sukirno Dwi Susilo / Anggota KPMR / Member of KPMR 3. Monica Tashya / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	1-3 September 2023 September 1-3, 2023	Tarakan Nunukan	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Tarakan dan Nunukan Working Visit of the Board of Commissioners to Tarakan and Nunukan

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Tujuan Destination	Kegiatan Activity
19.	1. Ali Masykur Musa / Komisaris Utama / President Commissioner 2. Fadli Yasir / Anggota KNR / Member of Nomination and Remuneration Committee	4-7 Oktober 2023 October 4-7, 2023	Kumai Semarang	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Kumai dan Semarang Working Visit of the Board of Commissioners to Kumai and Semarang
20.	1. Faturohman / Komisaris / Commissioner 2. Anton H.G Napitupulu / Sekretaris Dekom / Secretary of Dekom 3. Ajeng Eka Yandini / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff 4. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	12-14 Oktober 2023 October 12-14, 2023	Banyuwangi	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Banyuwangi Working Visit of the Board of Commissioners to Banyuwangi
21.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Monica Tashya / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff 3. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	26-29 Oktober 2023 October 26-29, 2023	Kendari	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Kendari Working Visit of the Board of Commissioners to Kendari
22.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris independen / Independent Commissioner 2. Sukirno Dwi Susilo / Anggota KPMR / Member of KPMR 3. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	14-16 November 2023 November 14-16, 2023	Pontianak	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Pontianak Working Visit of the Board of Commissioners to Pontianak
23.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	19-24 November 2023 November 19-24, 2023	Biak	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Biak Working Visit of the Board of Commissioners to Biak
24.	3. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 4. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	13-15 Desember 2023 December 13-15, 2023	Manokwari	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Manokwari Working Visit of the Board of Commissioners to Manokwari
25.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	27-29 Desember 2023 December 27-29, 2023	Batam	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Batam Working Visit of the Board of Commissioners to Batam
26.	1. Kristia Budiyarto / Komisaris Independen / Independent Commissioner 2. Toto Untoro / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	3-7 Januari 2024 January 3-7, 2024	Kupang	Kunjungan Kerja Dewan komisaris Ke Kupang Working Visit of the Board of Commissioners to Kupang
27.	1. Faturohman / Komisaris / Commissioner 2. Mahrudin Harahap / Anggota KPMR / Member of KPMR 3. M. Amal Amrulloh / Staf Dekom / Board of Commissioner Staff	5-6 Januari 2024 January 5-6, 2024	Labuan Bajo	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Ke Labuan Bajo Working Visit of the Board of Commissioners to Labuan Bajo

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

PENYAMPAIAN LAPORAN DEWAN KOMISARIS KEPADA PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) telah menyusun beberapa laporan dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham, antara lain:

1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selama Tahun Buku 2022.
3. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2022.
4. Usulan Besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
5. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) sampai dengan Semester I/Triwulan II Tahun 2023.
6. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.
7. Talenta BOD-1/"*Nominated Talent*" PT PELNI (Persero).
8. Evaluasi terhadap Direksi PT PELNI (Persero).
9. Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022 PT PELNI (Persero).

PENUGASAN KHUSUS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023, tidak terdapat penugasan khusus yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN

Kebijakan terkait program pengenalan diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

REPORTS SUBMISSION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS TO SHAREHOLDERS

In 2023, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) has compiled and submitted several reports to the Shareholders, including:

1. Board of Commissioners' response to the performance of PT PELNI (Persero) up to the first quarter of 2023.
2. Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the 2022 financial year.
3. Board of Commissioners' response to the Audited Financial Statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for 2022.
4. Proposal for the salary/honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2023 financial year, and bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2022 financial year.
5. Board of Commissioners' response to the performance of PT PELNI (Persero) up to the first half/second quarter of 2023.
6. Board of Commissioners' response to the performance of PT PELNI (Persero) up to the third quarter of 2023.
7. BOD-1/"Nominated Talent" Talent Management for PT PELNI (Persero).
8. Evaluation of the Board of Directors of PT PELNI (Persero).
9. Evaluation of the Public Accounting Firm (KAP) for the 2022 financial year of PT PELNI (Persero).

SPECIAL ASSIGNMENTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, there were no special assignments carried out by the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

ORIENTATION PROGRAM POLICY

The orientation program policy is governed by the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) No. 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) and has been published on the company's official website.

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menetapkan kebijakan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program pengenalan dimaksudkan agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perseroan. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:
1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2023, tidak terdapat Dewan Komisaris yang baru diangkat sehingga tidak ada program pengenalan yang dilaksanakan.

ORIENTATION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has established a policy to conduct an orientation program for newly appointed members. This program aims to help the new Commissioners understand the company's activities and conditions. The orientation program must be conducted no later than three months after the appointment of new Commissioners. The responsibility for organizing this program lies with the Corporate Secretary or whoever is performing the role.

The orientation program material includes:
1. Implementation of Good Corporate Governance principles by the company;
2. An overview of the company related to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information regarding delegated authority, internal and external audits, internal control systems, and policies, including the audit committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and prohibited actions.

In 2023, there were no new Commissioners appointed, so no orientation program was conducted.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, the competence development programs attended by the Board of Commissioners were as follows:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama dan Jabatan	Tanggal	Nama Pelatihan	Penyelenggara
1	Ali Masykur Musa Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	21 - 22 Juni 2023 June 21-22, 2023	*Ambidextrous Leadership Program*	ACT Consulting
		9 Oktober 2023 October 9, 2023	BUMN GRC *Masterclass 2023 - GRC Integrated Information For Supervisionary Board*	KBUMN Ministry of SOE
		25 Oktober 2023 October 25, 2023	CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	KBUMN Ministry of SOE
2	Kristia Budiyarto Komisaris Commissioner	21 - 22 Juni 2023 June 21-22, 2023	*Ambidextrous Leadership Program*	ACT Consulting
		21 - 22 Agustus 2023 August 21-22, 2023	Pelaksanaan Tata Kelola - CCGO CGOP Governance Implementation - CCGO CGOP	CRMS Indonesia
		9 Oktober 2023 October 9, 2023	BUMN GRC *Masterclass 2023 - GRC Integrated Information For Supervisionary Board*	KBUMN Ministry of SOE
		25 Oktober 2023 October 25, 2023	CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	KBUMN Ministry of SOE
3	Wahju Adji Herpriarsono Komisaris Commissioner	21 - 22 Juni 2023 June 21-22, 2023	*Ambidextrous Leadership Program*	ACT Consulting
		10 Agustus 2023 August 10, 2023	BLMI GRC *MasterClass - Pre IPO* dan *Post* IPO	KBUMN Ministry of SOE
		19 Oktober 2023 October 19, 2023	*Joint Venture between SOE and Private Sector*	KBUMN Ministry of SOE
4	Faturohman Komisaris Commissioner	21 - 22 Juni 2023 June 21-22, 2023	*Ambidextrous Leadership Program*	ACT Consulting
		9 Oktober 2023 October 9, 2023	BUMN GRC *Masterclass 2023 - GRC Integrated Information For Supervisionary Board*	KBUMN Ministry of SOE
		25 Oktober 2023 October 25, 2023	CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	KBUMN Ministry of SOE
5	Eddy Susanto Soepadmo Komisaris Independen Independent Commissioner	21 - 22 Juni 2023 June 21-22, 2023	*Ambidextrous Leadership Program*	ACT Consulting
		9 Oktober 2023 October 9, 2023	BUMN GRC *Masterclass 2023 - GRC Integrated Information For Supervisionary Board*	KBUMN Ministry of SOE
		25 Oktober 2023 October 25, 2023	CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	KBUMN Ministry of SOE
6	Raden Suhartono Komisaris Commissioner	21 - 22 Juni 2023 June 21-22, 2023	*Ambidextrous Leadership Program*	ACT Consulting
		27 September 2024 September 27, 2024	*ESG for Boards-Governance of ESG*	KBUMN Ministry of SOE
		9 Oktober 2023 October 9, 2023	BUMN GRC *Masterclass 2023 - GRC Integrated Information For Supervisionary Board*	KBUMN Ministry of SOE
		19 Oktober 2023 October 19, 2023	*Joint Venture between SOE and Private Sector*	KBUMN Ministry of SOE

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.

1. Menyusun kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.
2. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.
3. Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
4. Direksi PT PELNI (Persero) melakukan pemantauan dan melaporkan pencapaian target kinerja kepada Dewan Komisaris Perusahaan c.q. Komite Nominasi dan Remunerasi setiap tahun.
5. Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.
6. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA KOLEGIAL

Indikator Kinerja Utama atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perseroan, terdiri dari 5 (lima) perspektif berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Penigkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES

The Board of Commissioners evaluates the Board of Directors and reports the results to the Shareholders.

1. Develop the Board of Commissioners' policy on performance evaluation of the Board of Directors and reporting to Shareholders.
2. Develop the Board of Commissioners' plan for monitoring the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders.
3. The Board of Directors must detail the collective KPI of the Board of Directors into individual KPIs and submit them to the Board of Commissioners for approval.
4. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) monitors and reports on the achievement of performance targets to the Company's Board of Commissioners c.q. Nomination and Remuneration Committee annually.
5. The collective KPI achievement of the Board of Directors is reported in quarterly and annual reports.
6. The collective and individual KPI achievement calculations are reviewed by the public accounting firm auditing the company's financial statements.

COLLECTIVE PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Key Performance Indicators (KPI) used to measure the performance of the Board of Directors consist of five perspectives:

1. Economic and Social Value for Indonesia
2. Business Model Innovation
3. Technological Leadership
4. Investment Enhancement
5. Talent Development

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nomor Number		**Uraian** Description	**Satuan** Unit	**Bobot** Weight	**RKAP 2023** 2023 Budget Plan (RKAP)	**Realisasi** Tahun 2023 2023 Realization	**Nilai Capaian Tahun 2023** 2023 Achievement Value	**Nilai Capaian Maksimal Tahun 2023** 2023 Maximum Achievement Value	**Skor KPI** 2023 2023 KPI Score
Perspektif Perspective	**Indikator Indicator**			**A**	**B**	**C**	**D=C:B**	**E**	**F**
		NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA							
		Finansial Financial		**9,00**					**9,90**
	1.a.	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3,00	657,02	770,26	117,24%	110,00%	3,30
	1.b.	ROIC-WACC	%	3,00	-1,80%	1,74%	110,00%	110,00%	3,30
	2.a	*Interest Bearing Debt to EBITDA*	Kali Times	1,50	0,26	0,04	617,59%	110,00%	1,65
	2.b.	*Interest Bearing Debt to Invested Capital*	%	1,50	2,49%	0,47%	526,47%	110,00%	1,65
		Operasional Operational		**18,00**					**19,00**
A	3.	*Vessel Speed (On Time Performance)*	%	6,00	90,00%	95.29%	105,88%	105,88%	6,35
	4.	*Average Utilization of Vessel (Pax Factor)*	%	6,00	55,00%	73,23%	133,14%	110,00%	6,60
	5.	*Compliance to Safety Regulation*	%	6,00	80,00%	80,58%	100,72%	100,72%	6,04
		Sosial Social		8,00					8,80
	6.	Pemenuhan Jumlah Voyage Kapal Penumpang Fulfillment of Passenger Ship Voyage Number	%	8,00	80,00%	101,45%	126,81%	110,00%	8,80
		Jumlah Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia **Total Economic and Social Value for Indonesia**		**35,00**					**37,70**

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Nomor Number		Uraian Description	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2023 2023 Budget Plan (RKAP)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization	Nilai Capaian Tahun 2023 2023 Achievement Value	Nilai Capaian Maksimal Tahun 2023 2023 Maximum Achievement Value	Skor KPI 2023 2023 KPI Score
Perspektif Perspective	**Indikator Indicator**			**A**	**B**	**C**	**D=C:B**	**E**	**F**
		INOVASI MODEL BISNIS BUSINESS MODEL INNOVATION							
B	7.	Kontribusi Pendapatan Non Penugasan Contribution of Non-Assignment Revenue	%	9,00	45,00%	40,25%	89,45%	89,45%	8,05
	8.	Kerjasama Angkutan Barang Untuk Sinergi Klaster BUMN Freight Transport Cooperation for SOE Cluster Synergy	Instansi	8,00	3,00	4,00	133,33%	110,00%	8,80
		Jumlah Inovasi Model Bisnis Total Business Model Innovation		**17,00**					**16,85**
		KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI TECHNOLOGY LEADERSHIP							
C	9.	Implementasi *Integrated Commercial System* Implementation of Integrated Commercial System	%	8,00	80,00%	125,00%	156,25%	110,00%	8,80
	10.	Implementasi Inovasi Teknologi Pada Alat Produksi Implementation of Technology Innovation in Production Equipment	%	8,00	80,00%	125,00%	156,25%	110,00%	8,80
		Jumlah Kepemimpinan Teknologi Total Technology Leadership		**16,00**					**17,60**

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Nomor Number		Uraian Description	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2023 2023 Budget Plan (RKAP)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization	Nilai Capaian Tahun 2023 2023 Achievement Value	Nilai Capaian Maksimal Tahun 2023 2023 Maximum Achievement Value	Skor KPI 2023 2023 KPI Score
Perspektif Perspective	**Indikator Indicator**			**A**	**B**	**C**	**D=C:B**	**E**	**F**
		PENINGKATAN INVESTASI **INVESTMENT INCREASE**							
D	11.	Implementasi Investasi Penggantian Suku Cadang Permesinan Utama Kapal Implementation of Investment in Main Ship Machinery Spare Parts Replacement	%	7,00	80,00%	82,66%	103,33%	103,33%	7,23
	12.	Pengembangan Infrastruktur Logistik Maritim Development of Maritime Logistics Infrastructure	%	7,00	80,00%	67,50%	84,38%	84,38%	5,91
		Jumlah Pengembangan Investasi **Total Investment Development**		**14,00**					**13,14**
		PENGEMBANGAN TALENTA **TALENT DEVELOPMENT**							
E	13.a	% Perempuan dalam Nominated Talent % of Women in Nominated Talent	%	4,00	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%	4,00
	13.b	% Milenial dalam Nominated Talent % of Millennials in Nominated Talent	%	4,00	20,00%	25,00%	125,00%	110,00%	4,40
	14.	Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Completion of Pension Fund Health Roadmap	%	5,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,00
	15.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Qualification Fulfillment Ratio of Risk Management Organ	%	5,00	40,00%	61,11%	152,78%	110,00%	5,50
		Jumlah Pengembangan Talenta **Total Talent Development**		**18,00**					**18,90**
		Jumlah **Total**		**100,00**					**104,19**

Total skor *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Secara Kolegial (Kontrak Manajemen) PT PELNI (Persero) Tahun 2023 Audited secara keseluruhan dari total bobot 100,00 tercapai sebesar 104,19.

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDU

Metode penilaian KPI Individu Direksi menggunakan format yang tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Pada Badan Usaha Milik Negara

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDU

Pelaksanaan assesmen atau audit hasil pencapaian KPI Individu Direksi sesuai Per-02/MBU-03/2023 Pasal 105 yang menyatakan bahwa "Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan". Sehingga untuk perhitungan pencapaian KPI Direksi Individu ini telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra, Nomor : 00012/2.0999/NASS. KPI/06/139/1/IV/2024 pada tanggal 30 April 2024.

Adapun pencapaian skor akhir untuk masing-masing KPI Individu Direksi PT PELNI (Persero) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The total Key Performance Indicators (KPI) score for the collective performance (Management Contract) of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) in 2023 was 104.19 out of a total weight of 100.00.

INDIVIDUAL PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The individual KPI assessment method for the Board of Directors follows the format outlined in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-306/MBU/11/2023 on the Technical Guidelines for the Preparation of Key Performance Indicators for State-Owned Enterprises.

INDIVIDUAL DIRECTOR PERFORMANCE EVALUATION RESULTS

The assessment or audit of the Individual Director KPI achievement results is carried out in accordance with Per-02/MBU-03/2023 Article 105, which states that "The calculation of the KPI achievement of Directors collegially and individually is reviewed by the Public Accounting Firm that audits the Company's Financial Statements." Therefore, the calculation of the Individual Director KPI achievement has been conducted by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra, Number: 00012/2.0999/NASS.KPI/06/139/1/IV/2024 on April 30, 2024.

The final score achievements for each Individual Director KPI of PT PELNI (Persero) for the year 2023 are as follows:

No	Direksi Board of Directors	Skor Akhir KPI Final KPI Score
1	Usaha Angkutan Penumpang Passenger Transportation Business	101,53
2	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation & Sea Toll Business	93,93
3	Armada & Teknik Fleet & Engineering	106,17
4	SDM & Umum Human Resources & General Affairs	103,69
5	Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management	106,40

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi secara berkala oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersamaan dengan penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku. Evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kinerja kolegial maupun individual.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan skema dan besaran remunerasi dan kompensasi Dewan Komisaris maupun pertimbangan dalam penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Selain itu, hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris menjadi salah satu bahan bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas Dewan Komisaris di masa mendatang.

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja yang dilakukan selama tahun buku secara mandiri atau dengan sistem *self assessment* atau *peer evaluation*. Indikator yang menjadi penilaian tersebut mengacu pada Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris beserta target-target yang akan dicapai. Selanjutnya, KPI tersebut disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Dewan Komisaris menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi KPI kepada para Pemegang Saham melalui RUPS dan/atau melalui sirkuler. Adapun kebijakan penyusunan KPI Dewan Komisaris dilakukan sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Dewan Komisaris mengukur pencapaian kinerja/KPI berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan KPI Tahunan Dewan Komisaris;

2. KPI Dewan Komisaris dirancang untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengarahan dan penasehatan, dalam hal:

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance of the Board of Commissioners is periodically evaluated by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) alongside the submission of the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year. The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted collectively and individually.

The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners by the GMS are integral to determining the remuneration and compensation scheme for the Board of Commissioners and considering the reappointment of the concerned members. Additionally, the performance evaluation results serve as a basis for improving and enhancing the effectiveness of the Board of Commissioners in the future.

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners conducts self-assessment or peer evaluation of their performance for the financial year. The evaluation indicators refer to the Key Performance Indicators (KPI) set by the Board of Commissioners and the targets to be achieved. These KPIs are approved by the GMS annually based on the Board of Commissioners' proposal. KPIs measure the success of supervisory duties and advisory responsibilities performed by the Board of Commissioners according to legal regulations and/or the articles of association.

The Board of Commissioners submits quarterly reports on KPI achievement progress to the Shareholders through the GMS and/or circulars. The KPI policy for the Board of Commissioners includes:

1. As part of the control over the implementation of the Annual Work Plan and Budget, the Board of Commissioners measures KPI achievement based on targets set in the Annual Work Plan and Budget and the Annual KPI of the Board of Commissioners;

2. The KPI of the Board of Commissioners is designed to measure the effectiveness and success of supervisory, guidance, and advisory functions in:

a. Pelaksanaan GCG;
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan RJPP dan RKAP;
d. Operasional kerja/bidang;
e. Penyusunan laporan perusahaan.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

1. Aspek Perencanaan
2. Aspek Pengawasan dan Nasihat
3. Aspek Pelaporan
4. Aspek Dinamis

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, diperoleh hasil penilaian Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan KPI sebagai berikut:

a. GCG implementation;
b. Compliance with regulations;
c. RJPP and RKAP implementation;
d. Operational work/field;
e. Company report preparation.

The Board of Commissioners must submit quarterly progress reports on KPI achievement to the Shareholders. The performance evaluation results of the Board of Commissioners are reported in the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Planning Aspect
2. Supervisory and Advisory Aspect
3. Reporting Aspect
4. Dynamic Aspect

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, the performance evaluation results of the Board of Commissioners based on KPI are as follows:

Realisasi KPI Dewan Komisaris 31 Desember 2023
Realization of the Board of Commissioners' KPI as of December 31, 2023

Key Performance Indicators	**Periode** Period	**Satuan** ***Output*** Unit of Output	**Bobot** Weight	***OUTPUT* 2023** 2023 OUTPUT		%
				Rencana Plan	**Realisasi** Realization	
Aspek Perencanaan Planning Aspect						
1 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2024 Formulating the 2024 Work Plan, Budget, and KPI of the Board of Commissioners	Tahunan Annually	Dokumen Document	10%	1 Dokumen / Document	1 Dokumen / Document	100%
Sub Total I			**10%**			**10%**
Aspek Pengawasan dan Nasehat Supervision and Advisory Aspect						

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Realisasi KPI Dewan Komisaris 31 Desember 2023
Realization of the Board of Commissioners' KPI as of December 31, 2023

	Key Performance Indicators	Periode Period	Satuan *Output* Unit of Output	Bobot Weight	*OUTPUT* 2023 2023 OUTPUT		%
					Rencana Plan	Realisasi Realization	
1	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Providing feedback/ recommendations to Shareholders on:						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan a. Company's Work Plan and Budget	Tahunan Annually	Surat Letters	5%	1 Surat / Letter	1 Surat / Letter	100%
	b. Laporan Tahunan b. Annual Report	Tahunan Annually	Surat Letters	5%	1 Surat / Letter	1 Surat / Letter	100%
	c. Analisis Kinerja Triwulanan c. Quarterly Performance Analysis	Triwulanan	Surat Letters	5%	3 Surat / Letters	3 Surat / Letters	100%
2	Memberi Nasehat kepada Direksi sesuai Bidang Tugas Dewan Komisaris	Tahunan Annually	Surat/Risalah Letters/Minutes	10%	12 Surat/Risalah Letters/Minutes	12 Surat/Risalah Letters/Minutes	100%
3	Rapat Dewan Komisaris: Board of Commissioners Meetings:						
	a. Jumlah Rapat a. Number of Meetings	Bulanan Monthly	Kali Times	10%	12 Kali / Times	12 Kali / Times	100%
	b. Kehadiran Rapat b. Meeting Attendance	Bulanan Monthly	%	5%	100%	100%	100%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat c. Completion of Meeting Minutes	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	5%	12 Risalah / Minutes	12 Risalah / Minutes	100%
4	Rapat Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee Meetings	Tahunan Annually	Risalah / Minutes	5%	36 Risalah / Minutes	36 Risalah / Minutes	100%
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite Work Visits by the Board of Commissioners and Committees	Tahunan Annually	Kunjungan / Visits	5%	12 Kunjungan / Visits	27 Kunjungan / Visits	100%
6	Realisasi Rencana kerja Dewan Komisaris Realization of the Board of Commissioners' Work Plan	Tahunan Annually	%	5%	100%	100%	100%

Realisasi KPI Dewan Komisaris 31 Desember 2023
Realization of the Board of Commissioners' KPI as of December 31, 2023

Key Performance Indicators	Periode Period	Satuan *Output* Unit of Output	Bobot Weight	*OUTPUT* 2023 2023 OUTPUT		%
				Rencana Plan	Realisasi Realization	
Sub Total II			**60,0%**			**60,0%**
Aspek Pelaporan Reporting Aspect						
1 Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Realization of the Board of Commissioners' KPI Implementation	Triwulanan Quarterly	Laporan Report	5%	3 Laporan / Reports	3 Laporan / Reports	100%
2 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners	Tahunan Annually	Laporan Report	10%	1 Laporan / Reports	1 Laporan / Reports	100%
Sub Total III			**15,0%**			**15,0%**
Aspek Dinamis Dynamic Aspect						
1 Pengusulan Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham Proposal of Public Accounting Firm to Shareholders	Tahunan Annually	Surat Letters	4%	1 Surat / Letter	1 Surat / Letter	100%
2 Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, *Workshop*, dll Competence Enhancement through Seminars, Workshops, etc.	Tahunan Annually	Kali Times	4%	6 Kali / Times	7 Kali / Times	100%
3 Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris (*self assessment*/ BPK) Results of the GCG Assessment of the Board of Commissioners (self-assessment/BPK)	Tahunan Annually	Skor Score	4%	89,0 Skor / Score	91,87 Skor / Score	100%
4 Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/SPI Response to Follow-Up on Auditor/SPI Findings	Tahunan Annually	Surat Letters	3%	1 Surat / Letter	1 Surat / Letter	100%
Sub Total IV			**15,0%**			**15,0%**
			100%			**100%**

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

PERFORMANCE EVALUATION OF THE COMMITTEES SUPPORTING THE BOARD OF COMMISSIONERS

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Prosedur Penilaian Kinerja Komite audit menggunakan pembobotan aspek realisasi program kinerja Komite Audit dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Komite Tahun 2023.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE AUDIT COMMITTEE PROCEDURES

The performance assessment procedures of the Audit Committee use the weighting aspect of the realization of the Audit Committee's performance program against the planned 2023 Work Plan.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

1. Aspek Perencanaan (25%)
2. Aspek Pelaksanaan (25%)
3. Aspek Pelaporan (25%)
4. Aspek Dinamis (25%)

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Planning Aspect (25%)
2. Implementation Aspect (25%)
3. Reporting Aspect (25%)
4. Dynamic Aspect (25%)

HASIL PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Hasil penilaian kinerja Komite Audit adalah 100%.

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE AUDIT COMMITTEE

The performance evaluation results of the Audit Committee are 100%.

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi menggunakan pembobotan aspek realisasi program kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Komite Tahun 2023.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROCEDURES

The performance assessment procedures of the Nomination and Remuneration Committee use the weighting aspect of the realization of the Nomination and Remuneration Committee's performance program against the planned 2023 Work Plan.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Aspek Perencanaan (30%)
2. Aspek Pelaksanaan (40%)
3. Aspek Pelaporan (30%)

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

1. Planning Aspect (30%)
2. Implementation Aspect (40%)
3. Reporting Aspect (30%)

HASIL PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Hasil penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 100%.

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The performance evaluation results of the Nomination and Remuneration Committee are 100%.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko menggunakan pembobotan aspek realisasi program kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Komite Tahun 2023.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

1. Aspek Perencanaan (30%)
2. Aspek Pelaksanaan (40%)
3. Aspek Pelaporan (30%)

HASIL PENILAIAN KINERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Hasil penilaian kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah 100%.

PENILAIAN KINERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi baru dibentuk pada tanggal 2 Agustus 2023 sehingga belum terdapat informasi terkait prosedur penilaian Komite Tata Kelola Terintegrasi, kriteria yang digunakan untuk penilaian kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil penilaian kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES

The performance assessment procedures of the Risk Management Monitoring Committee use the weighting aspect of the realization of the Risk Management Monitoring Committee's performance program against the planned 2023 Work Plan.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

1. Planning Aspect (30%)
2. Implementation Aspect (40%)
3. Reporting Aspect (30%)

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The performance evaluation results of the Risk Management Monitoring Committee are 100%.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Integrated Governance Committee was newly formed on August 2, 2023, so there is no information related to the performance assessment procedures, criteria used for performance evaluation, and performance evaluation results for the Integrated Governance Committee.

PELNI
We Connect, We Unify
BUKIT RAYA
TUG AREA

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

KEBIJAKAN DAN PROSES NOMINASI ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan suksesi manajemen dan penerapan untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tersebut.
2. Menyampaikan arahan tentang penerapan kebijakan suksesi manajemen perusahaan kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris Perusahaan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi atas daftar Talenta Terseleksi (*selected talent*) berdasarkan kinerja dan kapasitas.
4. Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

Mekanisme penetapan daftar dan rekam jejak Direksi Perusahaan dan/atau calon Direksi Perusahaan dilaksanakan melalui proses:

1. pengumpulan data daftar dan rekam jejak;
2. validasi data daftar dan rekam jejak; dan
3. penetapan daftar dan rekam jejak.

Manajemen Talenta dilaksanakan melalui proses:

1. penjaringan dan pemilihan Talenta;
2. penilaian Talenta;
3. pengklasifikasian Talenta;
4. pengembangan Talenta; dan
5. perputaran Talenta.

Sumber Bakal Calon

Sumber bakal calon Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) berasal dari:

1. mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah;atau
4. sumber lain.

POLICIES AND NOMINATION PROCESS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners' policies on providing guidance regarding career development policies and implementation are as follows:

1. The Board of Commissioners assigns the relevant committee to review the quality of the management succession policy and its implementation to ensure it meets the Board of Commissioners' directives.
2. The Board of Commissioners provides directives on the implementation of the company's management succession policy to the Board of Directors.
3. Through the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners evaluates the list of selected talent based on performance and capacity.
4. 4. The Board of Commissioners ensures that all issues related to management succession policies and their implementation are discussed in the Board of Commissioners' meetings.

The process for establishing the list and track record of the company's directors and/or prospective directors includes:

1. Collecting data on the list and track record.
2. Validating the data on the list and track record.
3. Finalizing the list and track record.

Talent Management is carried out through the following process:

1. Screening and selecting talent.
2. Assessing talent.
3. Classifying talent.
4. Developing talent.
5. Rotating talent.

Sources of Candidates

The sources of candidates for the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) include:

1. Former directors of SOEs.
2. Members of the Board of Commissioners/Board of Supervisors of SOEs.
3. Government structural and functional officials.
4. Other sources.

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Penjaringan

1. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
2. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi. Pengusulan tantien/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan, dan fasilitas serta tantiem/insentifkinerja) Direksi kepada RUPS.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023, serta
3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero) tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 yang disahkan pada tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 21 Juni 2023.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-1/Wk.MBU.11/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023, penetapan Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem/Insentif Kinerja (IK) atas kinerja Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Screening

1. The Minister, Deputy Minister, Secretary of the Ministry, and/or Deputy conduct searches for candidates from various sources.
2. All candidates are administered by the Deputy.

PROCEDURES FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners, assisted by the Nomination and Remuneration Committee, reviews the proposed remuneration for the Board of Directors. The proposal for bonuses/performance incentives takes into account the performance evaluation results of the Board of Directors (KPI) and the achievement of the Company's health level. The Board of Commissioners submits the proposed remuneration (salaries, allowances, and facilities as well as bonuses/performance incentives) for the Board of Directors to GMS.

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-181/MBU/07/2023 dated July 4, 2023, concerning the Determination of Income for the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises for the year 2023, and
3. Resolution of the General Meeting of Shareholders of PT PELNI (Persero) regarding the Ratification of the Annual Report for the Fiscal Year 2022, ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2022 on June 21, 2023.

REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the letter from the Ministry of SOE No. SR-1/Wk.MBU.11/07/2023 dated July 24, 2023, regarding the Determination of Income for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for 2023, the determination of Salaries/Honorariums for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the year 2023 and Performance Incentives (Tantiem/IK) for the performance in the Fiscal Year 2022 is as follows:

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama.
   b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, dan honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
   c. Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Salaries/Honorariums, Allowances, and Facilities
   a. The salary of the President Director is set at Rp223,000,000.00 (two hundred and twenty-three million rupiahs) per month. The salaries of other members of the Board of Directors are set at 85% of the President Director's salary.
   b. The honorarium for the President Commissioner is set at 45% of the President Director's salary, and the honorarium for Commissioners is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.
   c. Allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Tunjangan dan Fasilitas Direksi
Allowances and Facilities for the Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Description
1.	Tunjangan Allowances		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali gaji 1 (one) month salary	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Asuransi Purna Jabatan Post-Retirement Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar maksimal 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premiums covered by the company up to a maximum of 25% of the annual salary	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Rp27.500.000,00 per bulan Rp27,500,000.00 per month	Sesuai PER-3/MBU/03/2023. Apabila Direksi BUMN masih mendapatkan fasilitas rumah dinas, maka tetap dapat menggunakan fasilitas tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2023. According to PER-3/MBU/03/2023. If the Board of Directors of the SOE still receives official housing facilities, they may continue to use such facilities until December 31, 2023.
2.	Fasilitas Facilities		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan 1 (one) unit, including maintenance and operational costs, considering the company's financial condition	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) Specifications and types of vehicles are regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc for fuel-powered vehicles or a maximum limit of 100 kWh for battery electric vehicles

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Tunjangan dan Fasilitas Direksi
Allowances and Facilities for the Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Description
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses at cost	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian (*at cost*) At cost	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023

Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris
Allowances and Facilities for the Board of Commissioners

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Description
1.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance		
	Asuransi Purna Jabatan Post-Retirement Insurance	1 (satu) kali gaji 1 (one) month salary	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar maksimal 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premiums covered by the company up to a maximum of 25% of the annual honorarium	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of the monthly honorarium	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
2.	Fasilitas Facilities		
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses at cost	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian (*at cost*) At cost	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

d. Gaji/honorarium serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023.

2. Total Tantiem/IK untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 ditetapkan sebesar Rp12.604.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat juta rupiah), dengan ketentuan:
   a. Tantiem/IK bagi Direktur Utama, Anggota Direksi lainnya, Komisaris Utama, dan Komisaris dengan faktor jabatan sebagai berikut:
      1) Direktur Utama: 100%
      2) Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama
      3) Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama
      4) Komisaris : 90% dari Komisaris Utama
   b. Besaran Tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2022.
   c. Pembayaran Tantiem/IK bagi anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, agar berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
   d. Sebesar 21% dari nilai Tantiem/IK sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar ditangguhkan selama 2(tiga) tahun, dengan mekanisme yang tercantum pada Lampiran II Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-1/Wk.MBU.11/07/2023 tanggal 24 Juli 2023.
   e. Pajak penghasilan (PPH) atas Tantiem/IK menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.
3. Direksi yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi BUMN dilarang menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di anak perusahaan/ patungan/perusahaan terafiliasi BUMN sebagaimana ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan dimaksud menjadi pendapatan lain-lain BUMN induk (*holding)* yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN.

d. Salaries/honorariums, allowances, and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2023 are effective from January 1, 2023.

2. The total bonuses/IK for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022 is set at Rp12,604,000,000.00 (twelve billion six hundred and four million rupiah), with the following provisions:
   a. Bonuses/IK for the President Director, other Directors, President Commissioner, and Commissioners with position factors as follows:
      1) President Director: 100%
      2) Other Directors: 85% of the President Director
      3) President Commissioner: 45% of the President Director
      4) Commissioners: 90% of the President Commissioner
   b. The amount of bonuses/IK is calculated proportionally based on the tenure of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners during the Fiscal Year 2022.
   c. The payment of bonuses/IK to members of the Board of Commissioners who concurrently serve as commissioners in companies other than State-Owned Enterprises (BUMN) must comply with the provisions of Article 72 paragraph (2) of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.
   d. 21% of the value of the bonuses/IK as referred to in point 2 shall be deferred for two (three) years, following the mechanism outlined in Attachment II of the Ministry of State-Owned Enterprises' Letter Number: SR-1/Wk.MBU.11/07/2023 dated July 24, 2023.
   e. Income tax (PPH) on bonuses/IK is the responsibility of the recipient and must not be charged as a company expense.
3. Directors who concurrently serve as members of the Board of Commissioners in subsidiaries/joint ventures/affiliated companies of BUMN are prohibited from receiving any income as members of the Board of Commissioners in such subsidiaries/joint ventures/affiliated companies of BUMN as per the provisions of Article 120 of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises. Such income shall become other income for the parent BUMN (holding) paid by the subsidiary/joint venture/affiliated company of BUMN.

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

4. BUMN dapat memberlakukan pedoman penetapan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

NILAI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2023

Rincian jumlah nominal remunerasi yang diterima oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Tantiem Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022
Calculation of Bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022

No	Nama Name	Jabatan Position	Jangka Waktu Term of Office			
			Mulai Start Date	Sampai Dengan End Date	Masa Jabatan (Hari) Term of Office (Days)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
DIREKSI **BOARD OF DIRECTORS**						
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	25 Februari 2022 February 25, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	310	
2	Ganefi	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	1 Januari 2022 January 1, 2022	24 Februari 2022 February 24, 2022	55	
3	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	25 Februari 2022 February 25, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	310	
4	O.M Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director Of Passenger Transportation Business	1 Januari 2022 January 1, 2022	24 Februari 2022 February 24, 2022	55	

4. BUMN may apply the income determination guidelines stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises when determining the income of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the relevant BUMN Subsidiaries.

REMUNERATION VALUE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS FOR 2023

The detailed nominal amount of remuneration received by each member of the Board of Commissioners and Directors during the year 2023 is as follows:

Alokasi Per Jabatan Allocation per Position		**Tantiem (Gross)** Bonus (Gross)	**Tantiem Ditangguhkan** Deferred Bonus	**Estimasi Tantiem (Gross)** Estimated Bonus (Gross)	**Pajak Penghasilan** Income Tax	**Tantiem (Net)** Bonus (Net)
Faktor Jabatan Position Factor	**Bobot** Weight					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(masa jabatan/365 hari) x faktor jabatan (term of office/365 days) x position factor	(bobot/total bobot) x jumlah Tantiem sebelum porsi) Sekom (weight/total weight) x amount of Tantiem before Sekom portion	(9) x 21%	(9) x (10)	(11) x tarif pajak 30% (11) x 30% tax rate	(11)-(12)
100%	85%	1.413.298.368	296.792.657	1.116.505.711	334.951.713	781.553.997
85%	13%	213.134.512	44.758.248	168.376.264	25.256.440	143.119.825
85%	72%	1.201.303.613	252.273.759	949.029.854	284.708.956	664.320.898
85%	13%	213.134.512	44.758.248	168.376.264	25.256.440	143.119.825

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Perhitungan Tantiem Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022

Calculation of Bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022

No	Nama Name	Jabatan Position	Jangka Waktu Term of Office		
			Mulai Start Date	Sampai Dengan End Date	Masa Jabatan (Hari) Term of Office (Days)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Yahya Kuncoro	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director Of Passenger Transportation Business	25 Februari 2022 February 25, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	310
		Direktur Usaha Angkutan Barang Dan Tol Laut Director Of Freight Transportation Business And Sea Toll	1 Januari 2022 January 1, 2022	24 Februari 2022 February 24, 2022	55
6	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang Dan Tol Laut Director Of Freight Transportation Business And Sea Toll	25 Februari 2022 February 25, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	310
7	Ony Suprihartono	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director Of Finance & Risk Management	1 Januari 2022 January 1, 2022	24 Februari 2022 February 24, 2022	55
8	Andy Saleh Bratamihardja	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director Of Finance & Risk Management	25 Februari 2022 February 25, 2022	20 November 2022 November 20, 2022	269
9	Anik Hidayat	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director Of Finance & Risk Management	21 November 2022 November 21, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	41
10	Robert MP Sinaga	Direktur Armada Dan Teknik Director Of Fleet And Engineering	1 Januari 2022 January 1, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	365
JUMLAH TANTIEM DIREKSI **TOTAL DIRECTORS' BONUSES**					

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Alokasi Per Jabatan Allocation per Position			**Tantiem (Gross)** Bonus (Gross)	**Tantiem Ditangguhkan** Deferred Bonus	**Estimasi Tantiem (Gross)** Estimated Bonus (Gross)	**Pajak Penghasilan** Income Tax	**Tantiem (Net)** Bonus (Net)
	Faktor Jabatan Position Factor	**Bobot** Weight					
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	85%	85%	1.414.438.125	297.032.006	1.117.406.118	335.221.836	782.184.283
	85%	72%	1.201.303.613	252.273.759	949.029.854	284.708.956	664.320.898
	85%	13%	213.134.512	44.758.248	168.376.264	25.256.440	143.119.825
	85%	63%	1.042.421.522	218.908.520	823.513.002	247.053.901	576.459.102
	85%	10%	158.882.091	33.365.239	125.516.852	37.655.055	87.861.796
	85%	85%	1.414.438.125	297.032.006	1.117.406.118	335.221.836	782.184.283
		510%	**8.485.488.990**	**1.781.952.688**	**6.703.536.302**	**1.935.291.572**	**4.768.244.731**

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Perhitungan Tantiem Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022

Calculation of Bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022

No	Nama Name	Jabatan Position	Jangka Waktu Term of Office			
			Mulai Start Date	Sampai Dengan End Date	Masa Jabatan (Hari) Term of Office (Days)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
DEWAN KOMISARIS **BOARD OF COMMISSIONERS**						
1	Ali Masykur Musa	Komisaris Utama	1 Januari 2022 January 1, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	365	
2	Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris	1 Januari 2022 January 1, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	365	
3	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris	1 Januari 2022 January 1, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	365	
4	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen	1 Januari 2022 January 1, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	365	
5	Faturohman	Komisaris	19 Mei 2022 May 19, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	227	
6	Raden Suhartono	Komisaris	19 Mei 2022 May 19, 2022	31 Desember 2022 December 31, 2022	227	
7	Haryo Indratmo	Komisaris	1 Januari 2022 January 1, 2022	18 Mei 2022 May 18, 2022	138	
8	Iwan Taufik Purwanto	Komisaris	1 Januari 2022 January 1, 2022	18 Mei 2022 May 18, 2022	138	
%						

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Alokasi Per Jabatan Allocation per Position		**Tantiem (Gross)** Bonus (Gross)	**Tantiem Ditangguhkan** Deferred Bonus	**Estimasi Tantiem (Gross)** Estimated Bonus (Gross)	**Pajak Penghasilan** Income Tax	**Tantiem (Net)** Bonus (Net)
Faktor Jabatan Position Factor	**Bobot** Weight					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
45%	45%	748.820.184	157.252.239	591.567.945	177.470.384	414.097.562
40,5%	41%	673.938.165	141.527.015	532.411.151	159.723.345	372.687.805
40,5%	41%	673.938.165	141.527.015	532.411.151	159.723.345	372.687.805
40,5%	41%	673.938.165	141.527.015	532.411.151	159.723.345	372.687.805
40,5%	25%	419.134.147	88.018.171	331.115.976	99.334.793	231.781.183
40,5%	25%	419.134.147	88.018.171	331.115.976	99.334.793	231.781.183
40,5%	15%	254.804.019	53.508.844	201.295.175	30.194.276	171.100.899
40,5%	15%	254.804.019	53.508.844	201.295.175	30.194.276	171.100.899
	248%	**4.118.511.010**	**864.887.312**	**3.253.623.698**	**915.698.557**	**2.337.925.141**
	757%	**12.604.000.000**	**2.646.840.000**	**9.957.160.000**	**2.850.990.129**	**7.106.169.871**

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Remunerasi Direksi Tahun 2023 per Bulan
Remuneration of the Board of Directors for 2023 per Month

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	GAJI POKOK BASIC SALARY	TUNJANGAN RUMAH HOUSING ALLOWANCE	POTONGAN JAMSOSTEK JAMSOSTEK DEDUCTION		JUMLAH YANG DI TERIMA TOTAL RECEIVED
					JHT	JP	
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	223.000.000	27.500.000	5.010.000	95.596	245.394.404
2	Robert MP Sinaga	Direktur Armada Dan Teknik Director of Fleet and Technical Affairs	189.550.000	27.500.000	4.341.000	95.596	212.613.404
3	Anik Hidayat	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	189.550.000	27.500.000	4.341.000	95.596	212.613.404
4	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	189.550.000	27.500.000	4.341.000	95.596	212.613.404
5	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang Dan Tol Laut Director of Cargo and Sea Toll Business	189.550.000	27.500.000	4.341.000	95.596	212.613.404
6	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	189.550.000	27.500.000	4.341.000	95.596	212.613.404
		Jumlah **Total**	**1.170.750.000**	**165.000.000**	**26.715.000**	**573.576**	**1.308.461.424**
		Potongan Jamsostek **JAMSOSTEK Deduction**			**27.288.576**		

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Gaji Dewan Komisaris Tahun 2023 per Bulan
Remuneration of the Board of Commissioners for 2023 per Month

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	HONOR HONOR	TRANSPORT	POTONGAN JAMSOSTEK JAMSOSTEK DEDUCTION		JUMLAH YANG DI TERIMA TOTAL RECEIVED
					JHT	JP	
1	Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	100.350.000	20.070.000	2.408.400	100.423	117.911.177
2	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	90.315.000	18.063.000	2.167.560		106.210.440
3	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	90.315.000	18.063.000	2.167.560	100.423	106.110.017
4	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	90.315.000	18.063.000	2.167.560		106.210.440
5	Faturohman	Komisaris Commissioner	90.315.000	18.063.000	2.167.560	100.423	106.110.017

RASIO REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KARYAWAN TAHUN 2023

Informasi mengenai rasio remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

REMUNERATION RATIO OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND EMPLOYEES IN 2023

The information regarding the remuneration ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company is as follows:

Rasio Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Tahun 2023
Remuneration Ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees in 2023

Keterangan / Description	Rasio / Ratio
Direksi terhadap Direktur Utama Board of Directors to President Director	1:1,18
Dewan Komisaris terhadap Komisaris Utama Board of Commissioners to President Commissioner	1:1,11
Komisaris Utama terhadap Direktur Utama President Commissioner to President Director	1:2,22
Karyawan Level Tertinggi terhadap Direktur Utama Highest-Level Employee to President Director	1:16,80
Karyawan Level Terendah terhadap Direktur Utama Lowest-Level Employee to President Director	1:31

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan dinamika bisnis yang semakin masif, sehingga keberadaan level manajemen yang profesional dengan beragam latar belakang disiplin ilmu sangat penting dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha di masa depan.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the Company's efforts to foster a decision-making process that is more objective, comprehensive, optimal, and has a positive impact on the supervision and management of the Company. This aligns with the increasing dynamics of business, making it crucial to have a professional management level with diverse academic backgrounds to ensure the sustainability of the business in the future.

Selain itu, adanya komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam juga dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perseroan, serta penerapan praktik GCG di lingkup PT PELNI (Persero).

Furthermore, the diverse composition of the Board of Commissioners and Directors also enriches the perspectives and interests in the decision-making process within both bodies, thereby adding value to the operational and business aspects of the Company, as well as to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices within PT PELNI (Persero).

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan belum memiliki kebijakan spesifik yang mengatur mengenai keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, dalam kebijakan Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) telah mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang secara umum kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam sebagai kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

As of the end of 2023, the Company has not yet established a specific policy regarding diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors. However, the Board Manual of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) outlines the criteria for members of the Board of Commissioners and Directors, which generally encourages the selection of candidates from diverse backgrounds.

Berikut ini merupakan indikator keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan kewarganegaraan, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan keahlian/*skill* yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Below are the indicators of diversity within the Company's Board of Commissioners and Directors based on nationality, gender, age, highest level of education, and the skills/expertise of each member:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Jenis Kelamin** Gender	**Usia (per 31 Desember 2023)** Age (as of December 31, 2023)	**Pendidikan Terakhir** Highest Level of Education	**Keahlian** Expertise
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**					
Ali Masykur Musa*) (Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen) (President Commmissioner concurrently Independent Commissioner)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	61 tahun 61 years old	S3 Doctoral Degree	Hukum dan Politik Law and Politics

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nama dan Jabatan Name and Position	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Jenis Kelamin** Gender	**Usia (per 31 Desember 2023)** Age (as of December 31, 2023)	**Pendidikan Terakhir** Highest Level of Education	**Keahlian** Expertise
Kristia Budiyarto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	45 tahun 45 years old	S1 Bachelor's Degree	Komunikasi Communications
Faturohman (Komisaris) (Commissioner)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	47 tahun 47 years old	S2 Master's Degree	Akuntansi dan Manajemen Accounting and Management
Wahju Adji Herpriarsono (Komisaris) (Commissioner)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	58 tahun 58 years old	S2 Master's Degree	Hukum Maritim dan Transportasi Laut Maritime Law and Ocean Transportation
Raden Suhartono (Komisaris) (Commissioner)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	58 tahun 58 years old	S2 Master's Degree	Ekonomi, Akuntansi, dan Keuangan Economics, Accounting, and Finance
Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) (Commissioner)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	64 tahun 64 years old	S1 Bachelor's Degree	Ekonomi Economics
Direksi **Board of Directors**					
Anik Hidayati (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Director of Finance and Risk Management)	WNI Indonesian citizen	Perempuan Female	50 tahun 50 years old	S2 Master's Degree	Akuntansi, Keuangan, Pemasaran, Manajemen SDM Accounting, Finance, Marketing, Human Resource Management
Yahya Kuncoro**) (Direktur Usaha Angkutan Penumpang) (Director of Passenger Transport Operations)	WNI Indonesian citizen	Perempuan Female	57 tahun 57 years old	S2 Master's Degree	Keuangan, Manajemen Risiko Finance, Risk Management
Nuraini Dessy W***) (Direktur Usaha Angkutan Penumpang) (Director of Passenger Transport Operations)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	47 tahun 47 years old	S2 Master's Degree	Manajemen Transportasi Laut, Teknik Industri Maritime Transportation Management, Industrial Engineering
Robert M.P. Sinaga (Direktur Armada dan Teknik) (Director of Fleet and Technical Services)	WNI Indonesian citizen	Perempuan Female	48 tahun 48 years old	S1 Bachelor's Degree	Manajemen Transportasi Laut Maritime Transportation Management

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nama dan Jabatan Name and Position	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Jenis Kelamin** Gender	**Usia (per 31 Desember 2023)** Age (as of December 31, 2023)	**Pendidikan Terakhir** Highest Level of Education	**Keahlian** Expertise
Rainoc (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum) (Director of Human Resources and General Affairs)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	56 tahun 56 years old	S2 Master's Degree	Manajemen Logistik, Teknik Transportasi, Teknik Industri Logistics Management, Transportation Engineering, Industrial Engineering
Yossianis Marciano (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut) (Director of Freight Transport and Sea Toll Operations)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	53 tahun 53 years old	S1 Bachelor's Degree	Ekonomi Economics
Yossianis Marciano (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut) (Director of Freight Transport and Sea Toll Operations)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	39 tahun 39 years old	S2 Master's Degree	Manajemen, Pengiriman dan Transportasi, Pelayaran Management, Shipping and Transportation, Maritime Services

Keterangan:
*) Komisaris Utama Bapak Ali Masykur Musa mengundurkan diri pada tanggal 13 November 2023.
**) Berakhir masa jabatan pada tanggal 1 Agustus 2023
***) Mulai menjabat pada tanggal 21 September 2023
Explanation:
*) Mr. Ali Masykur Musa, the Chief Commissioner, resigned on November 13, 2023.
**) The term ended on August 1, 2023.
***) Began tenure on September 21, 2023.

ORGAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
ORGAN UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk membentuk organ-organ pendukung dalam rangka mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

The Board of Commissioners is authorized to establish supporting bodies to enhance the effectiveness of their supervisory functions and advisory roles to the Board of Directors. This policy is guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 regarding the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

ORGAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
ORGAN UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Per tahun 2023, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) memiliki organ di bawah Dewan Komisaris, terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Sekretariat Dewan Komisaris.

As of 2023, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) includes subsidiary organs under its governance, comprising the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee, and the Secretariat of the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan telah berfungsi secara efisien dan efektif. Komite Audit juga membantu menjamin bahwa pelaksanaan audit eksternal maupun internal berjalan dengan lancar. Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee is a committee established by the Board of Commissioners to assist in the execution of the duties and functions of the Board of Commissioners in ensuring that the Company's internal control system operates efficiently and effectively. The Audit Committee also helps ensure that both external and internal audits run smoothly. The Audit Committee is one of the supporting organs of the Commissioners, formed based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners. The Audit Committee operates independently both in the execution of its tasks and in its reporting, and it reports directly to the Board of Commissioners.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Dalam mengangkat Komite Audit, Dewan Komisaris perlu memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Pihak eksternal yang diangkat menjadi Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas.
2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik
3. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang Pendidikan Akuntansi atau Keuangan.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE AUDIT COMMITTEE

The appointment and dismissal of the Audit Committee members are carried out by the Board of Commissioners based on a Decree issued by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders (GMS). In appointing the Audit Committee, the Board of Commissioners must consider the following requirements:

1. External parties appointed to the Audit Committee must not have business or affiliation relationships with the Company, Directors, Commissioners, or Majority Shareholders.
2. Possess high integrity, capabilities, adequate knowledge, and experience in their field of duties, as well as good communication skills.
3. At least one member of the Audit Committee must have an educational background in Accounting or Finance.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

The dismissal of Audit Committee members can occur when their term of office ends, and based on the decision of the Board of Commissioners, they are dismissed due to not meeting the established performance criteria and/or incompetence in carrying out their duties.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Dasar penetapan Komite Audit tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-07/DK/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Berikut ini adalah komposisi Komite Audit yang menjabat selama tahun buku 2023:

COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

The tenure of the Audit Committee members must not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, and they can only be re-elected for one subsequent period.

The basis for the establishment of the Audit Committee is outlined in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-07/DK/VII/2022 dated July 29, 2022, concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) as Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Below is the composition of the Audit Committee serving throughout the 2023 fiscal year:

Komposisi Komite Audit Tahun 2023
Composition of the Audit Committee in 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Posisi di Perusahaan** Position in the Company	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Raden Suhartono	Ketua Komite Audit Audit Committee Chairman	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision No. KEP-07/DK/VII/2022	29 Juli 2022 – Sekarang (periode 1) July 29, 2022 – Present (Period 1)
Wahju Adji Herpriarsono	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-14/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision No. KEP-14/DK/XI-2020, as amended by Board of Commissioners Decision No. KEP-07/DK/VII/2022	30 Juli 2020 – Sekarang (periode 1) July 30, 2020 – Present (Period 1)
Baliya Munadjat	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-14/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision No. KEP-14/DK/XI-2020, as amended by Board of Commissioners Decision No. KEP-07/DK/VII/2022	30 Juli 2020 – Sekarang (periode 2) July 30, 2020 – Present (Period 2)

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komposisi Komite Audit Tahun 2023
Composition of the Audit Committee in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perusahaan Position in the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Muryati Nini Utami	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/VIII/2022 Board of Commissioners Decision No. KEP-10/DK/VIII/2022	1 September 2022 – Sekarang (periode 1) September 1, 2022 – Present (Period 1)

Profil Komite Audit
Audit Committee Profile

Raden Suhartono **Ketua Komite Audit** Chairman of the Audit Committee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter. KEP-07/DK/VII/2022
Profil lengkap Bapak Raden Suhartono telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The complete profile of Mr. Raden Suhartono is detailed in the Company Profile section of this Annual Report.	

Wahju Adji Herpriarsono **Anggota Komite Audit** Audit Committee Member	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-14/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-14/DK/XI/2020, as amended by Board of Commissioners Decision No. KEP-07/DK/VII/2022
Profil lengkap Bapak Wahju Adji Herpriarsono telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The complete profile of Mr. Wahyu Adji Hepriarsono is detailed in the Company Profile section of this Annual Report.	

Baliya Munadjat **Anggota Komite Audit** Audit Committee Member	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-14/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-14/DK/XI-2020, as amended by Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022
Periode Jabatan Term of Office	30 Juli 2020 – Sekarang (2 periode) July 30, 2020 – Present (2 periods)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Balikpapan, 12 Januari 1977 Balikpapan, January 12, 1977

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Baliya Munadjat Anggota Komite Audit Audit Committee Member	
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	46 tahun 46 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Pendidikan Terakhir Last Education	Magister Management Pamulang University (2017)
Riwayat Pekerjaan Employment History	1. Dosen Universitas Pamulang (2017 – Sekarang) 2. Anggota Komite Audit PT PELNI (Persero) (2020 – Sekarang) 1. Lecturer at Pamulang University (2017 – Present) 2. Member of the Audit Committee of PT PELNI (Persero) (2020 – Present)

Muryati Nini Utami Anggota Komite Audit Audit Committee Member	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/VIII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-10/DK/VIII/2022
Periode Jabatan Term of Office	1 September 2022 – Sekarang (periode 1) September 1, 2022 – Present (1st period)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Magetan, 10 Juni 1966 Magetan, June 10, 1966
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	57 tahun 57 years old
Domisili Domicile	Bekasi
Pendidikan Terakhir Last Education	1. S1 Universitas Islam indonesia 2. S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI 1. Bachelor's Degree from the Islamic University of Indonesia 2. Master's Degree from the Institute of Economic Science IPWI
Riwayat Pekerjaan Employment History	1. Kepala Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan (2020) 2. Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor, Kementerian Perhubungan (2021 – 2022) 3. Kepala Bagian Perbendaharaan, Kementerian Perhubungan (2022 – sekarang) 1. Head of the Subdirectorate for Safety Promotion and Partnership (2020) 2. Head of the Subdirectorate for Motor Vehicle Weighing, Ministry of Transportation (2021 – 2022) 3. Head of Treasury Division, Ministry of Transportation (2022 – present)

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit PT PELNI (Persero) memiliki pedoman kerja

AUDIT COMMITTEE WORK GUIDELINES

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee of PT PELNI (Persero) adheres to the work

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit Nomor: 01/DK/I/2016 yang disahkan tanggal 8 Januari 2016 dan diperbarui tanggal 30 September 2020 dengan Nomor: 96/ DK/IX-2020. Piagam Komite Audit mengatur hal-hal mengenai Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab Komite Audit, Tugas Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit, Tanggung Jawab Pelaporan dan Masa Tugas.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dari Komite Audit Perseroan terutama adalah untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Tugas Komite Audit berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan berpedoman pada Piagam Komite Audit PT PELNI (Persero) sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern (SPI), yaitu
   a. Reviu perencanaan audit SPI (Program Kerja Pengawasan Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) Tahun 2023, termasuk penentuan sample *auditee* berbasis risiko.
   b. Mereviu/menelaah pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa audit SPI telah dilaksanakan sesuai rencana dan supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin mutu pelaksanaan audit.
   c. Mereviu pelaporan SPI terutama mengevaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dan secara uji petik menguji Kertas Kerja Pemeriksaannya untuk mendapat keyakinan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan yang disajikan telah didukung dengan bukti-bukti memadai.
   d. Memonitor tindak lanjut hasil audit untuk kemudian mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam hal audite tidak menindaklanjuti laporan SPI.
   e. Melakukan komunikasi secara periodik dengan SPI dalam rangka mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
2. Menelaah kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan seperti laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan serta rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan informasi keuanganlainnya.
3. Menelaah efektivitas sistem pengendalian intern.

guidelines as outlined in the Audit Committee Charter Number: 01/DK/I/2016, ratified on January 8, 2016, and updated on September 30, 2020, with Number: 96/DK/IX-2020. The Audit Committee Charter governs matters regarding the Audit Committee Structure, Membership Requirements, Responsibilities of the Audit Committee, Duties of the Audit Committee, Authority of the Audit Committee, Audit Committee Meetings, Reporting Responsibilities, and Term of Office.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The primary duty of the Company's Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory functions over the Company, with the details as follows:

The duties of the Audit Committee are based on the principles of good corporate governance and guided by the Audit Committee Charter of PT PELNI (Persero) as follows:

1. Assessing the effectiveness of the Internal Audit Unit (SPI) implementation, which includes:
   a. Reviewing the audit plan of the SPI (Annual Work Supervision Program or Annual Work and Budget Plan) for 2023, including the risk-based determination of audit samples.
   b. Reviewing/assessing the execution of audits to ensure that SPI audits have been conducted as planned and that audit supervision has been adequately performed to guarantee the quality of the audit execution.
   c. Reviewing SPI reports, primarily evaluating the Internal Audit Report (LHP) and selectively testing the Working Papers to ensure that the presented Internal Audit Reports are supported by adequate evidence.
   d. Monitoring the follow-up on audit findings and taking necessary steps in cases where the audit reports are not addressed by the auditee.
   e. Periodically communicating with the SPI to discuss issues of concern to the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
2. Reviewing the quality of financial information presented by the company, such as monthly reports, quarterly reports, semi-annual reports, and annual reports, as well as the company's work plans and budgets (RKAP) and other financial information.
3. Reviewing the effectiveness of the internal control system.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

4. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE AUDIT
1. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi kepada unit selain SPI, dilakukan dengan surat tugas yang ditandatangani Dewan Komisaris.

KEWAJIBAN KOMITE AUDIT
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Komite Audit tersebut, maka kewajibanyang harus dijalankan oleh Komte Audit adalah:
1. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan melalui Dewan Komisaris.
2. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya Kinerja Perseroan.
3. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

4. Reviewing the company's compliance with applicable laws and regulations.
5. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners.

AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE
1. To perform its duties, the Audit Committee is authorized to fully, freely, and unrestrictedly access records, employees, resources and funds, and other company assets related to its duties.

2. For any assignment related to requests for data and information from units other than the SPI, it must be carried out with an assignment letter signed by the Board of Commissioners.

OBLIGATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE
In carrying out the duties and authority of the Audit Committee, the obligations to be fulfilled by the Audit Committee are:

1. Monitoring the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders on issues deemed important for the Company's management through the Board of Commissioners.
2. Reporting immediately to the General Meeting of Shareholders if there are signs of declining Company performance.
3. Proposing the appointment of a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders.

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee performs its functions and duties professionally and independently, without interference from any parties that are inconsistent with the laws and regulations. According to the Audit Committee Charter, the independence qualifications of the Audit Committee members must meet the following criteria:

Kriteria Independensi Komite Audit Independence Criteria of the Audit Committee	**Komite Audit PT PELNI (Persero)** Audit Committee of PT PELNI (Persero)			
	Raden Suhartono	**Wahju Adji Herpriarsono**	**Baliya Munadjat**	**Muryati Nini Utami**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Has no financial relationship with other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Kriteria Independensi Komite Audit Independence Criteria of the Audit Committee	Komite Audit PT PELNI (Persero) Audit Committee of PT PELNI (Persero)			
	Raden Suhartono	Wahju Adji Herpriarsono	Baliya Munadjat	Muryati Nini Utami
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Does not have managerial relationships within the Company, its Subsidiaries, or Affiliated Companies.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not serve as an official in political parties, or as a government or public official.	✓	✓	✓	✓

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023, bagi anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, program pengembangan kompetensi yang diikuti selama tahun 2023 telah tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Dewan Komisaris. Sedangkan, anggota Komite Audit dari eksternal Perseroan tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.

RAPAT KOMITE AUDIT

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Throughout 2023, for members of the Audit Committee who are also members of the Company's Board of Commissioners, the competency development programs attended throughout 2023 are listed in the Corporate Governance section of the Board of Commissioners. However, external members of the Company's Audit Committee did not participate in the competency development program.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

AUDIT COMMITTEE MEETING POLICY

The Audit Committee holds meetings at least as frequently as the minimum number of Board of Commissioners meetings stipulated in the Company's Articles of Association. The Audit Committee meetings are chaired by the Chairman of the Audit Committee or the most senior member of the Audit Committee if the Chairman is unable to attend.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

If deemed necessary, the Audit Committee may invite members of Management related to the meeting material to attend the Audit Committee meetings. Each Audit Committee meeting is documented in minutes of the meeting, which are signed by all Audit Committee members present. The Audit Committee holds coordination meetings with the Internal Audit Unit (SPI) at least once every three months.

PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Selain itu, Komite Audit juga mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam seluruh rapat yang diselenggarakan oleh internal Komite Audit maupun yang diikuti selama tahun 2023:

CONDUCT OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS IN 2023

Throughout 2023, the Audit Committee held internal meetings a total of 26 (twenty-six) times. In addition, the Audit Committee also attended meetings of the Board of Commissioners and its Subsidiary Bodies, as well as Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The following is the frequency and attendance rate of each Audit Committee member in all meetings organized by the internal Audit Committee and those attended throughout 2023:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Internal Komite Audit** Internal Audit Committee Meeting			**Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris** Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			**Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi** Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate
Raden Suhartono	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	26	26	100%	26	26	100%	26	26	100%
Wahju Adji Herpriarsono	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	26	26	100%	26	26	100%	26	26	100%
Baliya Munadjat	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	26	26	100%	26	26	100%	26	26	100%
Muryati Nini Utami	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	26	26	100%	26	26	100%	26	26	100%

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Adapun agenda rapat internal Komite Audit diuraikan pada tabel berikut ini:

The agenda of the internal Audit Committee meetings is outlined in the following table:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
6 Januari 2023 January 6, 2023	Rapat Internal Komite Audit : • Penghapusan Aset • Usulan Investasi PMN • Persiapan Data GCG BPKP Audit Committee Meeting: • Asset Write-off • PMN Investment Proposal • Preparation of BPKP GCG Data
9 Januari 2022 January 9, 2022	Rapat Koordinasi Komite Audit Induk dengan Anak Usaha PT PELNI (Persero): • PKAT Tahun 2022 dan Pemantapan PKAT Tahun 2023 Coordination Meeting of the Parent Audit Committee with Subsidiaries of PT PELNI (Persero): • 2022 PKAT and 2023 PKAT Finalization
15 Januari 2022 January 15, 2022	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Desember Tahun 2021 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of December 2021
05 Februari 2023 February 5, 2023	Rapat Komite Audit dengan KPMR-TIM RJPP: • Terkait Pembahasan Revisi RJPP Tahun 2022-2023 Audit Committee Meeting with KPMR-RJPP Team: • Discussion on RJPP Revision for 2022-2023
08 Februari 2023 February 8, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • PMN • Penghapusbukuan Reefer Container Internal Audit Committee Meeting: • PMN • Write-off of Reefer Containers
25 Februari 2023 February 25, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Januari 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of January 2023
23 Maret 2023 March 23, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Februari 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of February 2023
25 Maret 2023 March 25, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Februari 2023 • Dana Pensiun Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of February 2023 • Retirement Fund
25 April 2023 April 25, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Maret 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of March 2023

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
10 Mei 2023 May 10, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Manajemen Aset Internal Audit Committee Meeting: • Asset Management
23 Mei 2023 May 23, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Manajemen Aset Tahun 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Asset Management for 2023
24 Juni 2023 June 24, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Mei 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of May 2023
16 Juli 2023 July 16, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Juni 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of June 2023
26 Juli 2023 July 26, 2023	Rapat Komite Audit dengan Dir Keu & Dir UAB • Pembahasan Pemanfaatan PMN dan Usulan Direksi Kapal melalui PMN Committee Meeting with Finance Director & UAB Director: • Discussion on Utilization of PMN and Directorate Proposal of Ships through PMN
2 Agustus 2023 August 2, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Pembahasan PMN dan Susunan Nota Dinas Internal Audit Committee Meeting: • Discussion on PMN and Drafting of Official Memorandums
21 Agustus 2023 August 21, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Juli 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of July 2023
21 September 2023 September 21, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Agustus 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of August 2023
17 Oktober 2023 October 17, 2023	Rapat Komite Audit dengan Dir UABTL & Tim: • Pembahasan Laproan Investasi Kapal Tongkang & Tugboath Tahun 2023 Audit Committee Meeting with UABTL Director & Team: • Discussion on Investment Report of Barges & Tugboats for 2023
21 Oktober 2023 October 21, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd September 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of September 2023
26 Oktober 2023 October 26, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Finalisasi LapMen sd September 2023, DLL Internal Audit Committee Meeting: • Finalization of Management Report as of September 2023, etc.
15 November 2023 November 15, 2023	Rapat Komite Audit dengan Dir UABTL & Tim: • Pembahasan Permohonan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Perjanjian Gadai Audit Committee Meeting with UABTL Director & Team: • Discussion on Request for Approval of Pledge Agreement Facility Usage

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
22 November 2023 November 22, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd Oktober 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of October 2023
13 Desember 2023 December 13, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Studi Kelayakan Pengadaan Kapal Roro Bukan Baru Modifikasi Ramp Door Internal Audit Committee Meeting: • Feasibility Study for Acquisition of Non-New Roro Ships with Ramp Door Modifications
15 Desember 2023 December 15, 2023	Rapat Komite Audit dengan Dir UABTL & Tim: • Pembahasan Feasibility Study Pengadaan Kapal Roro Bukan Baru Modifikasi Ramp Door Audit Committee Meeting with UABTL Director & Team: • Discussion on Feasibility Study for Acquisition of Non-New Roro Ships with Ramp Door Modifications
25 Desember 2023 December 25, 2023	Rapat Internal Komite Audit: • Laporan Manajemen sd November 2023 Internal Audit Committee Meeting: • Management Report as of November 2023
29 Desember 2023 December 29, 2023	Rapat Komite Audit dengan Dir UABTL & Tim: • Pembahasan Permohonan Persetujuan Kajian Pengajuan PMN APBN Tahun 2025 PT PELNI (Persero) Internal Audit Committee Meeting: • Discussion on Request for Approval of PMN APBN Submission Study for 2025 of PT PELNI (Persero)

Sedangkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang dihadiri oleh Komite Audit telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Meanwhile, the agenda of the Board of Commissioners' meetings with the Organs under the Board of Commissioners and Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors attended by the Audit Committee has been outlined in the Corporate Governance Chapter of this Report.

LAPORAN PELAKSANAAN KINERJA KOMITE AUDIT

Pada tahun 2023, Komite Audit PT PELNI (Persero) telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Komite Audit telah mengevaluasi Laporan Realisasi Anggaran (Laporan Manajemen)
2. Melakukan koordinasi rutin dengan SPI, melakukan reviu atas laporan kinerja SPI triwulan tahun 2023.
   Untuk meningkatkan pengawasan diharapkan SPI dapat menerapkan sistem sehingga mampu memberikan *early warning* terhadap semua aktifitas perusahaan yang terindikasi adanya kecurangan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
   Komite Audit sesuai surat Nomor 37/K.Audit/V-2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan KAP sebagai Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan PUMK tahun 2023 memberikan persetujuan KAP Djoko, Sidik & Indra sebagai KAP yang akan melakukan audit atas

AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE REPORT

In 2023, the Audit Committee of PT PELNI (Persero) has realized the following programs and work activities:

1. The Audit Committee has evaluated the Budget Realization Report (Management Report).
2. Conducted routine coordination with the Internal Audit Unit (SPI) and reviewed the SPI performance reports for the 2023 quarters.
   To enhance supervision, it is expected that the SPI can implement a system capable of providing early warnings for all company activities that indicate fraud.
3. Appointment of Public Accounting Firm (KAP)
   The Audit Committee, in accordance with letter Number 37/K.Audit/V-2023 dated May 29, 2023, concerning the appointment of a KAP as the Executor of the Consolidated Financial Statements and PUMK audit for 2023, approved KAP Djoko, Sidik & Indra as the KAP to audit the Consolidated

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

4. Komite Audit melaksanakan tugas yang diberikan Dewan Komisaris yaitu kunjungan kerja lapangan
   Kunjungan kerja Komisaris PT PELNI (Persero) ke lapangan dalam rangka *monitoring* kegiatan pelayanan PT PELNI (Persero) merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta penasehatan Dewan Komisaris.

Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the fiscal year ending December 31, 2022.

4. The Audit Committee carried out tasks assigned by the Board of Commissioners, namely field work visits.
   The field work visits by the Commissioners of PT PELNI (Persero) to monitor the service activities of PT PELNI (Persero) are part of the implementation of the supervisory and advisory duties and functions of the Board of Commissioners.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi nominasi dan fungsi remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal *Talent & Succession Management* Direksi BUMN.

Adapun dasar pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP- 02/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

The Nomination and Remuneration Committee is one of the supporting organs of the Commissioners, established based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Company's Nomination and Remuneration Committee was formed to assist the Board of Commissioners in fulfilling their responsibilities in carrying out the nomination and remuneration functions for the Board of Directors and the Board of Commissioners, referring to the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number: S-254/MBU/04/2020 dated April 17, 2020, regarding Talent & Succession Management of SOEs Directors.

The basis for the establishment of the Nomination and Remuneration Committee is outlined in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02/DK/IV-2020 dated April 20, 2020, concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee in the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: KEP-04/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelayaran Indonesia (Indonesia)i, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: KEP-04/DK/IV-2020 dated April 20, 2020, concerning the Appointment of the Membership Structure of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) is as follows:

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023
Composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Posisi di Perusahaan** Position in the Company	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Ali Masykur Musa	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DK/IV-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-04/DK/IV-2020, as amended by Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	20 April 2020-13 November 2023 (periode 1) April 20, 2020 - November 13, 2023 (first term)

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023
Composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Posisi di Perusahaan** Position in the Company	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Faturohman	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	29 Juli 2022-sekarang (periode 1) July 29, 2022 - present (first term)
Fadli Yasir	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DK/IV-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-04/DK/IV-2020, as amended by Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	20 April 2020 – 8 Maret 2024 (periode 2) April 20, 2020 - March 8, 2024 (second term)

Ali Masykur Musa **Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi** Chairman of the Nomination and Remuneration Commitee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DK/IV-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-04/DK/IV-2020, as amended by the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-07/DK/VII/2022
Profil lengkap Bapak Ali Masykur Musa telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The complete profile of Mr. Ali Masykur Musa is detailed in the Company Profile chapter of this Annual Report.	

Faturohman **Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi** Mmber of the Nomination and Remuneration Commitee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022
Profil lengkap Bapak Faturohman telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The complete profile of Mr. Faturohman is detailed in the Company Profile chapter of this Annual Report.	

Fadli Yasir **Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi** Mmber of the Nomination and Remuneration Commitee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DK/IV-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-04/DK/IV-2020, as amended by Decree of the Board of Commissioners No. KEP-07/DK/VII/2022
Periode Jabatan Term of Office	20 April 2020-8 Maret 2024 (periode 1) April 20, 2020 - March 8, 2024 (First Period)

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Fadli Yasir **Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi** Mmber of the Nomination and Remuneration Commitee	
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tanjung Balai, 3 Juni 1976 Tanjung Balai, June 3, 1976
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	47 tahun 47 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Pendidikan Terakhir Last Education	• Sarjana Perbandingan Agama di IAINSU (1999) • Sarjana Ekonomi di USBM Medan (1999) • Magister Pemikiran Politik Islam di UINSU (2018) • Magister Managemen Bisnis Meneger di IMBT (2020) • Bachelor's Degree in Comparative Religion from IAINSU (1999) • Bachelor's Degree in Economics from USBM Medan (1999) • Master's Degree in Islamic Political Thought from UINSU (2018) • Master's Degree in Business Management from IMBT (2020)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Wartawan/Redaktur Harian Global Sumatera Utara; Wartawan/Redaktur Harian Mimbar Umum (2005 – 2008) • Tim Ahli Bidang Komunikasi Gubernur Sumatera Utara; Direktur Umum/SDM PT Papan Dayan; Direktur Umum/SDM PT Gardanews Mandiri (2008 – 2010) • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) (2020 – Maret 2024) • Journalist/Editor at Harian Global Sumatera Utara; Journalist/Editor at Harian Mimbar Umum (2005 – 2008) • Expert Team Member in Communication for the Governor of North Sumatra; General Manager/HR Director at PT Papan Dayan; General Manager/HR Director at PT Gardanews Mandiri (2008 – 2010) • Member of the Nomination and Remuneration Committee at PT PELNI (Persero) (2020 – March 2024)

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tabel pengungkapan independensi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:

INDEPENDENCE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

All members of the Nomination and Remuneration Committee are professionals with experience who do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities. This is to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities as committee members.

The Nomination and Remuneration Committee has met the criteria for independence, expertise, experience, and integrity as required by applicable regulations. The following table discloses the independence of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2023:

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Kriteria Independensi Criteria of Independence	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee		
	Ali Masykur Musa	Faturohman	Fadli Yasir
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have financial relationships with fellow members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have familial relationships through marriage and descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Does not have managerial relationships in the Company, its Subsidiaries, or Affiliate Companies.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not hold positions as political party officials, government officials, or public officials.	✓	✓	✓

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2023, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, program pengembangan kompetensi yang diikuti selama tahun 2023 telah tercantum pada bab Tata Kelola Perusahaan

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Throughout 2023, the competency development programs attended by members of the Nomination and Remuneration Committee who are also members of the Company's Board of Commissioners have been detailed in the Corporate

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari eksternal Perseroan tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Mengacu pada tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) Nomor 5/DK/IV-2021 tanggal 22 April 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu:
   a. Mereviu perencanaan SDM terutama dengan cara:
      1) Mengevaluasi Program Kerja pengelolaan SDM.
      2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen terkait Pengelolaan SDM.
      3) Memberikan saran dan rekomendasi terkait Perencanaan SDM.
   b. Mereviu pelaksanaan pengelolaan SDM yang dilakukan Divisi SDM untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM telah dilaksanakan sesuai rencana yang disepakati.
   c. Memonitor dan menilai tindak lanjut hasil pengelolaan SDM. untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal pengelolaan SDM yang lebih baik.
   d. Melakukan komunikasi secara periodik dengan Divisi SDM dalam rangka mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Menelaah efektivitas pengelolaan SDM.
3. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan komisaris.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi kepada unit/divisi selain SDM dengan surat tugas yang ditandatangani Komisaris.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) Nomor 5/DK/IV-2021 tanggal 22 April 2021.

Governance chapter of this Annual Report. However, external members of the Nomination and Remuneration Committee did not participate in any competency development programs.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Referring to the duties and responsibilities as stipulated in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) Number 5/DK/IV-2021 dated April 22, 2021, they are as follows:

1. Assessing the effectiveness of Human Resources (HR) management, which includes:
   a. Reviewing HR planning, particularly by:
      1) Evaluating the HR management work program.
      2) Evaluating management policies related to HR management.
      3) Providing suggestions and recommendations related to HR planning.
   b. Reviewing the implementation of HR management carried out by the HR Division to ensure that HR management has been executed according to the agreed plan.
   c. Monitoring and evaluating the follow-up results of HR management to then take necessary steps for better HR management.
   d. Conducting periodic communication with the HR Division to discuss issues of concern to the Nomination and Remuneration Committee.
2. Reviewing the effectiveness of HR management.
3. Reviewing the company's compliance with applicable laws and regulations.
4. Performing other duties assigned by the commissioners.

AUTHORITY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

1. To carry out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has the authority to fully, freely, and unrestrictedly access records, employees, resources and funds, and other company assets related to its duties.
2. For any assignment related to requests for data and information from units/divisions other than HR, an assignment letter signed by the commissioners is required.

CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee has the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) Number 5/DK/IV-2021 dated April 22, 2021.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kebijakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) Nomor 5/DK/IV-2021 tanggal 22 April 2021.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam seluruh rapat yang diselenggarakan oleh internal Komite Nominasi dan Remunerasi maupun yang diikuti selama tahun 2023:

MEETING POLICY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee's meeting policy is stipulated in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) Number 5/DK/IV-2021 dated April 22, 2021.

MEETINGS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee held 12 (twelve) internal meetings. Additionally, the Nomination and Remuneration Committee also attended Board of Commissioners meetings and meetings with the Organs under the Board of Commissioners as well as Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The following table shows the frequency and attendance rate of each Nomination and Remuneration Committee member in all meetings held internally by the Nomination and Remuneration Committee and those attended throughout 2023:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi** Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee			**Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris** Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			**Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi** Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate
Ali Masykur Musa	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	11	11	100%	12	12	100%	12	12	100%
Faturohman	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
Fadli Yasir	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	11	92%

Adapun agenda rapat internal Komite Nominasi dan Remunerasi diuraikan pada tabel berikut ini:

The agenda of the internal meetings of the Nomination and Remuneration Committee is outlined in the following table:

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agendas
11 Januari 2023 January 11, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum dan Dir Penumpang: • Usulan Pengadaan Mobil Dinas Baru Direksi (Dir. SDM) • Kebijakan Layanan Fasilitas Penumpang di Kapal (Dir. Penumpang) Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs and Director of Passengers: • Proposal for the Procurement of New Official Cars for Directors (Director of Human Resources) • Policy on Passenger Service Facilities on Ships (Director of Passengers)
15 Februari 2023 February 15, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum: • Persiapan SDM pada Arus Mudik dan Balik Idul Fitri 1444 H Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs: • Preparation of Human Resources for the Homecoming and Return Flow during Eid al-Fitr 1444 H
21 Maret 2023 March 21, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum: • Persiapan SDM pada Arus Mudik dan Balik Idul Fitri 1444 H Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs: • Preparation of Human Resources for the Homecoming and Return Flow during Eid al-Fitr 1444 H
13 April 2023 April 13, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum: • Tindaklanjut dan Monitoring Evaluasi *Crew* Kapal Penumpang. Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs: • Follow-up and Monitoring Evaluation of Passenger Ship Crew
17 Mei 2023 May 17, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum: • Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan PT. PELNI (Persero) Baik di Darat maupun di Kapal. Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs: • Enhancement of the Quantity and Quality of Competency Certifications within PT. PELNI (Persero) both on Land and at Sea
18 Juni 2023 June 18, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dewan Komisarid dan Direksi: • Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.PT. PELNI (Persero). Internal Meetings of KNR with the Board of Commissioners and Directors: • Proposal for Remuneration of Directors and Board of Commissioners of PT. PELNI (Persero)
21 Juli 2023 July 21, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum: • Optimalisasi Sertifikasi Kompetensi Pegawai Darat. Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs: • Optimization of Competency Certification for Onshore Employees
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum: • *Review* Program-program Terkait SDM sampai dengan Semester I 2023. Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs: • Review of Human Resources-related Programs up to Semester I of 2023
21 September 2023 September 21, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum: • Posisi Komisaris dan Direksi yang kosong pada Induk dan Anak Perusahaan Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs: • Positions of Commissioners and Directors Vacant in Parent and Subsidiary Companies
24 Oktober 2023 October 24, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum dan Ketua Komite Audit: • Penjelasan Direksi atas Usulan Personalia Organ Perusahaan. Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs and Chairman of the Audit Committee: • Explanation by the Directors on the Proposal for Personnel of the Company's Organs

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
10 November 2023 November 10, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum, Dir UAP dan VP IT: • Penjelasan Direksi atas Usulan Personalia Organ Perusahaan. Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs, Director of UAP, and VP of IT: • Explanation by the Directors on the Proposal for Personnel of the Company's Organs
27 Desember 2023 December 27, 2023	Rapat Internal KNR dengan Dir SDM & Umum: • Program-Program Strategis Direktorat SDM dan Umum Tahun 2023 Internal Meetings of KNR with the Director of Human Resources & General Affairs: • Strategic Programs of the Directorate of Human Resources and General Affairs for 2023

Sedangkan agenda rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Meanwhile, the agenda of the Board of Commissioners' meetings and the Organs under the Board of Commissioners, as well as the Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, has been outlined in the Corporate Governance Chapter of this Report.

LAPORAN PELAKSANAAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja/Program Kerja.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Manajemen.
3. Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Dewan Komisaris.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PERFORMANCE REPORT

In 2023, the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) has realized the following programs and work activities:

1. Preparation of Work Plans/Work Programs.
2. Nomination and Remuneration Committee meetings with Management.
3. Internal meetings of the Nomination and Remuneration Committee.
4. Nomination and Remuneration Committee meetings with the Board of Commissioners.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN.

KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Organisasi Komite Pemantau Manajemen Risiko saat ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : Kep-04/DK/XI/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, KEP-11/DK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, Kep-1/DK/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Perubahan Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) serta KEP-04/DK/IV-2021 Tentang Pemberhentian Sekertaris Komite Pemantau Manjemen Risiko dan Pengangkatan Staf Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Adapun susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

The Risk Management Monitoring Committee is one of the supporting organs of the Commissioners, established based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Company's Risk Management Monitoring Committee was formed to assist the Board of Commissioners in fulfilling their responsibilities in monitoring, supervising, and assessing the effectiveness of risk management, referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-5/MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises.

COMPOSITION OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The current organization of the Risk Management Monitoring Committee was formed based on the Decree of the Board of Commissioners Number: Kep-04/DK/XI/2017 dated December 4, 2017, concerning the dismissal and appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee, KEP-11/DK/VIII/2022 dated August 31, 2022, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee, Kep-1/DK/IV/2023 dated April 18, 2023, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee, as well as the Changes in the Composition of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), and KEP-04/DK/IV-2021 concerning the Dismissal of the Secretary of the Risk Management Monitoring Committee and the Appointment of Staff to the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). The composition of the Risk Management Monitoring Committee based on these decisions is as follows:

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko
Composition of the Risk Management Monitoring Committee

Nama Name	**Jabatan** Position	**Posisi di Perusahaan** Role in the Company	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Eddy Susanto Supadmo	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Monitoring Committee	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	3 November 2020 – Sekarang (1 periode) November 3, 2020 – Present (1 term)
Kristia Budiyarto	Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Vice Chairman of the Risk Management Monitoring Committee	Komisaris Independen Independen Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	3 November 2020 – Sekarang (1 periode) November 3, 2020 – Present (1 term)
Agung Syarifuddin*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No Kep–17/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. Kep–17/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	30 November 2020 – 18 April 2023 (1 periode) November 30, 2020 – April 18, 2023 (1 term)
Sukirno Dwi Susilo	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-11/DK/VIII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-11/DK/VIII/2022	1 September 2022 – Sekarang (1 periode) September 1, 2022 – Present (1 term)
Mahruddin Harahap**	Anggota Manajemen Risiko Member of Risk Management	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-1/DK/IV/ 2023 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-1/DK/IV/2023	18 April 2023-Sekarang (1 periode) April 18, 2023 – Present (1 term)

*) Berhenti menjabat sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 18 April 2023
**) Baru menjabat sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 18 April 2023
*) Ceased to serve as a member of the Risk Management Monitoring Committee as of April 18, 2023.
**) Commenced serving as a member of the Risk Management Monitoring Committee as of April 18, 2023.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Eddy Susanto Soepadmo **Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko** Cahirman of the Risk Management Oversight Committee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by Decision of the Board of Commissioners No. KEP-07/DK/VII/2022
Profil lengkap Bapak Eddy Susanto Soepadmo telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The complete profile of Mr. Eddy Susanto Soepadmo has been outlined in the Company Profile chapter of this Annual Report.	

Kristia Budiyarto **Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko** Member of the Risk Management Oversight Committee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioners Descision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022
Profil lengkap Bapak Kristia Budiyarto telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The complete profile of Mr. Kristia Budiyarto has been outlined in the Company Profile chapter of this Annual Report.	

Sukirno Dwi Susilo **Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko** Member of the Risk Management Oversight Committee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-11/DK/VIII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-11/DK/VIII-2022
Periode Jabatan Term of Office	1 September 2022-Sekarang (periode 1) September 1, 2022 – Present (P\period 1)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Purworejo, 19 Oktober 1969 Purworejo, Oktober 19, 1969
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	54 tahun 43 years old
Domisili Domicile	Depok
Pendidikan Terakhir Last Education	• S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara • S2 Sekolah Tingi Manajemen Transpor (STMT) Trisakti • Bachelor's Degree (S1): School of Administrative Sciences, State Administration Institute • Master's Degree (S2): Trisakti School of Transportation Management (STMT)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Kementerian Perhubungan (2020 – 2022) • Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi Pegawai, Kementerian Perhubungan (2022) • Kepala Bagian Manajemen Talenta SDM, Kementerian Perhubungan (2022 – sekarang) • Head of the Mutation, Welfare, and Discipline Section, Ministry of Transportation (2020 – 2022) • Head of the Employee Competency Development Section, Ministry of Transportation (2022) • Head of the HR Talent Management Section, Ministry of Transportation (2022 – present)

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Mahruddin Harahap **Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko** Member of the Risk Management Oversight Committee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No Kep–1/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/DK/IV/2023 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-1/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioners Descision Letter No. KEP-01/DK/XI/2023
Periode Jabatan Term of Office	18 April 2023 – Sekarang April 18, 2023 - Present
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lubuk Pakam, Sumatera Utara 14 Oktober 1981 Lubuk Pakam, North Sumatera Oktober,14 1981
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	43 tahun 43 years old
Domisili Domicile	Depok
Pendidikan Terakhir Last Education	• Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN Jakarta • Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia • Magister Bisnis Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor • Diploma III: State College of Accountancy (STAN), Jakarta • Extension Program: Faculty of Economics, University of Indonesia • Master of Business: Business School, Bogor Agricultural Institute (IPB)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Staf Bagian Perencanaan Sekretariat Kementerian BUMN (Oktober 2010 - September 2013) • Pemeriksa Anggaran Inspektorat Kementerian BUMN (Oktober 2013 - Desember 2017) • Auditor Muda Kementerian BUMN (Januari 2018 - sekarang) • Staff of the Planning Section, Secretariat of the Ministry of State-Owned Enterprises (October 2010 - September 2013) • Budget Examiner, Inspectorate of the Ministry of State-Owned Enterprises (October 2013 - December 2017) • Junior Auditor, Ministry of State-Owned Enterprises (January 2018 - present)

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tabel pengungkapan Independensi dari Komite Pemantau Manajemen Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:

INDEPENDENCE OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

All members of the Risk Management Monitoring Committee are professionals with experience who do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities. This is to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities as committee members.

The Risk Management Monitoring Committee has met the criteria for independence, expertise, experience, and integrity as required by applicable regulations. The following table discloses the independence of the Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2023:

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Kriteria Independensi Independence Criteria	**Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PELNI (Persero)** Risk Management Monitoring Committee				
	Eddy Susanto Soepadmo	**Kristia Budiyarto**	**Agung Syarifudin***	**Mahruddin Harahap****	**Sukirno Dwi Susilo**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have financial relationships with fellow members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have family relationships through marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Does not hold management positions in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Companies.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not own shares directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not serve as a political party official, public official, or government official.	✓	✓	✓	✓	✓

*) Berhenti menjabat sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 18 April 2023
**) Baru menjabat sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 18 April 2023
*) Ceased to serve as a member of the Risk Management Monitoring Committee as of April 18, 2023.
**) Commenced serving as a member of the Risk Management Monitoring Committee as of April 18, 2023.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2023, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, program pengembangan kompetensi yang diikuti selama tahun 2023 telah tercantum pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan bagi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dari eksternal Perseroan mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Throughout 2023, the competency development programs attended by members of the Risk Management Monitoring Committee who are also members of the Company's Board of Commissioners have been detailed in the Corporate Governance chapter of this Annual Report. Meanwhile, external members of the Risk Management Monitoring Committee participated in the following competency development programs:

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
1	Sukirno Dwi Susilo	16 Agustus 2023	Skema QRGP CRMS Publik	LSP MKS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-04/DK/VIII/2017 tanggal 4 Desember 2017, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
2. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan;
3. Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi;
4. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaanya serta semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut;
5. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
6. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar melakukan tidak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The Risk Management Monitoring Committee has duties and responsibilities as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-04/DK/VIII/2017 dated December 4, 2017, with the following details:

1. Provide input to the Board of Commissioners regarding the formulation and improvement of risk management related to risk control in all areas of the Company before obtaining the approval of the Board of Commissioners;
2. Engage in discussions with the Board of Directors or relevant work units concerning risk management, if necessary;
3. Study and review the policies and regulations regarding risk management policies formulated by the Board of Directors;
4. Conduct periodic reviews of risk management policies and their implementation guidelines, as well as all changes and adjustments to these risk management policies;
5. Evaluate the accuracy of the models and the validity of the data used to measure risk; and
6. Provide input to the Board of Commissioners on matters requiring attention and discussion with the Board of Directors to take follow-up actions based on the risk management evaluation results by the Committee.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

PIAGAM KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko yaitu 114/KPMR/XII-2023.

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko tercantum dalam 114/KPMR/XII-2023.

RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali. Selain itu, Komite Pemantau Manajemen Risiko juga mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam seluruh rapat yang diselenggarakan oleh internal Komite Pemantau Manajemen Risiko maupun yang diikuti selama tahun 2023:

CHARTER OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The Risk Management Monitoring Committee has a Charter, numbered 114/KPMR/XII-2023.

MEETING POLICY OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The meeting policy of the Risk Management Monitoring Committee is outlined in 114/KPMR/XII-2023.

MEETINGS OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Throughout 2023, the Risk Management Monitoring Committee held 12 (twelve) internal meetings. Additionally, the Risk Management Monitoring Committee also attended Board of Commissioners meetings and meetings with the Organs under the Board of Commissioners, as well as Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The following table shows the frequency and attendance rate of each Risk Management Monitoring Committee member in all internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee and those attended throughout 2023:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Internal Pemantau Manajemen Risiko** Internal Risk Management Monitoring Committee Meeting			**Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris** Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			**Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi** Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate
Eddy Susanto Supadmo	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Monitoring Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
Kristia Budiyarto	Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Deputy Chairman of the Risk Management Monitoring Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Pemantau Manajemen Risiko Internal Risk Management Monitoring Committee Meeting			Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Agung Syarifuddin*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
Mahruddin Harahap**	Anggota Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	9	9	100%	9	9	100%	9	9	100%
Sukirno	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	4	4	100%	4	3	75%	4	4	100%

*) Berhenti menjabat sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 18 April 2023
**) Baru menjabat sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 18 April 2023

Adapun agenda rapat internal Komite Pemantau Manajemen Risiko diuraikan pada tabel berikut ini:

The agenda of the internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee is outlined in the following table:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
13 Januari 2023 January 13, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan: 1. Laporan Kinerja MR Tahun 2022; 2. Program Kerja MR 2023 pada Anak Perusahaan; 3. *Top Risk* 2023 pada Anak Perusahaan; 4. Program Kerja Tata Kelola Terintegrasi (khususnya MR & pengendalian internal) tahun 2023. The internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee discussed the following topics: 1. Performance Report of Risk Management for 2022; 2. Risk Management Work Program for 2023 in Subsidiaries; 3. Top Risks for 2023 in Subsidiaries; 4. Integrated Governance Work Program (specifically Risk Management & Internal Control) for 2023.
20 Februari 2023 February 20, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan *Progress* Kajian Pengembangan Investasi (Kapal Roro, Kapal *Tugboat* dan Modifikasi Kapal). The internal meeting of the Risk Management Monitoring Committee discussed the progress of Investment Development Studies (Ro-Ro Ships, Tugboats, and Ship Modifications).

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agendas
15 Maret 2023 March 15, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan: *1. Progress* Tindak Lanjut atas Pemeriksaan dan Klarifikasi Kecelakaan Kapal (P3K); 2. Persiapan Operasional Peak Season Lebaran 2023. The internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee discussed the following topics: 1. Progress on Follow-Up Actions of Ship Accident Investigations and Clarifications (P3K); 2. Operational Preparations for the 2023 Eid Peak Season.
12 April 2023 April 12, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan: *1. Progress* Implementasi Roadmap/Masterplan TI; 2. Prioritas Rencana TI 2023. The internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee discussed the following topics: 1. Progress of IT Roadmap/Masterplan Implementation; 2. IT Plan Priorities for 2023.
15 Mei 2023 May 15, 2023	Rapat *Internal* Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan: *1. Progress* tindak lanjut Investasi (Kapal Roro, Tongkang, *Tugboat*, dan Modifikasi Kapal) atas *Freeze* Penggunaan Sisa dana PMN oleh DJKN; 2. Risiko Kehilangan BBM. The internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee discussed the following topics: 1. Progress of Follow-Up Actions on Investments (Ro-Ro Ships, Barges, Tug Boats, and Ship Modifications) regarding the Freeze on the Use of Remaining PMN Funds by DJKN; 2. Risks of Fuel Loss.
15 Juni 2023 June 15, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan Evaluasi Angkutan Lebaran & Sistem Pengelolaan Mutu dan Pelayanan, Atas Kinerja Angkutan Barang The internal meeting of the Risk Management Monitoring Committee discussed the Evaluation of Eid Transportation & Quality Management and Service Systems for Goods Transportation Performance.
21 Juli 2023 July 21, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan Penyelarasan Peran SPI Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Base On Permen BUMN Nomor 02. The internal meeting of the Risk Management Monitoring Committee discussed the Alignment of the Internal Audit Unit's Role in Risk Management Based on Ministry of SOEs Regulation Number 02.
21 Agustus 2023 August 21, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan: 1. Risiko Proses Bisnis Penjualan Tiket dan Program Strategis Direktur Usaha Angkutan Penumpang (UAP); 2. Risiko Penglolaan BBM dan Progress Program Strategis Direktur Armatek. The internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee discussed the following topics: 1. Risks of Ticket Sales Business Processes and Strategic Programs of the Passenger Transport Business Director (UAP); 2. Risks in Fuel Management and Progress of Strategic Programs of the Armatek Director.
18 September 2023 September 18, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan: 1. Risiko Pendapatan Keagenan dan Progres Aplikasi Keagenan; 2. Progres Transisi Keagenan menjadi SBU; 3. Progres Sertifikasi ISO Keagenan dan Lingkungan Hidup. The internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee discussed the following topics: 1. Risks of Agency Revenue and Progress of Agency Application; 2. Progress of Agency Transition to SBU; 3. Progress of Agency and Environmental ISO Certification.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
18 Oktober 2023 October 18, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan: 1. Portofolio Angkutan Barang dan Tol Laut; 2. Risiko Target Penghasilan *Charter* yang tidak tercapai; 3. *Progress* Komersialisasi Kapal Lognus. The internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee discussed the following topics: 1. Portfolio of Goods Transportation and Sea Toll; 2. Risks of Unachieved Charter Revenue Targets; 3. Progress of Commercialization of Lognus Ships.
21 November 2023 November 21, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko membahas terkait dengan: 1. Persiapan *Peak Season* NATARU 2024 2. Risiko tidak tercapainya target Investasi pengadaan *spare part*. The internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee discussed the following topics: 1. Preparations for the 2024 Christmas and New Year Peak Season; 2. Risks of Unachieved Investment Targets for Spare Part Procurement.
15 Desember 2023 December 15, 2023	Rapat Internal Komite Pemantau Manjemen Risiko membahas terkait dengan Risiko Proses Penarikan Kapal Perintis. The internal meeting of the Risk Management Monitoring Committee discussed the Risks of the Pioneer Ship Withdrawal Process.

Sedangkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Meanwhile, the agenda of the Board of Commissioners' meetings with the Organs under the Board of Commissioners, as well as the Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, has been outlined in the Corporate Governance Chapter of this Report.

LAPORAN PELAKSANAAN KINERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Mengadakan Rapat Internal.
2. Melakukan Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko.
3. Melakukan pertemuan dengan Direktorat dan Divisi.
4. Melakukan evaluasi Manajemen Risiko Perusahaan.
5. Melakukan telaah terhadap Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan.
6. Melakukan evaluasi pengelolaan risiko secara langsung di lapangan pada Kantor Cabang.
7. Melakukan pemantauan terhadap Proses pelaksanaan Teknologi Informasi di Perseroan.
8. Melakukan telaah terhadap sistem manajemen mutu Perseroan.
9. Melakukan telaah terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE PERFORMANCE REPORT

In 2023, the Risk Management Monitoring Committee of PT PELNI (Persero) has realized the following programs and work activities:

1. Held Internal Meetings.
2. Conducted Meetings with the Risk Management Division.
3. Held meetings with the Directorate and Divisions.
4. Conducted evaluations of the Company's Risk Management.
5. Reviewed the Company's Risk Management Guidelines.
6. Conducted direct evaluations of risk management at branch offices.
7. Monitored the implementation process of Information Technology in the Company.
8. Reviewed the Company's quality management system.
9. Reviewed the implementation of Integrated Governance.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban pemantauan, pengawasan dan ebaluasi atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

KOMPOSISI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Organisasi Komite Tata Kelola Terintegrasi saat ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : Kep-05/DK/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi. Adapun susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan keanggotaan:
   a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   c. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PBM Sarana Bandar Nasional, dengan keanggotaan:
   a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelita Indonesia Djaya, dengan keanggotaan:
   a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

The Integrated Governance Committee is one of the supporting organs of the Commissioners, established based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Company's Integrated Governance Committee was formed to assist the Board of Commissioners in fulfilling their responsibilities in monitoring, supervising, and evaluating the implementation of Integrated Governance, referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

COMPOSITION OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The current organization of the Integrated Governance Committee was formed based on the Decree of the Board of Commissioners Number: Kep-05/DK/VIII/2023 dated August 2, 2023, concerning the Integrated Governance Committee. The composition of the Integrated Governance Committee based on this decree is as follows:

1. Risk Management Monitoring Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with the following membership:
   a. Chairman of the Risk Management Monitoring Committee as Chairman of the Integrated Governance Committee;
   b. Vice Chairman of the Risk Management Monitoring Committee as Vice Chairman of the Integrated Governance Committee;
   c. Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Integrated Governance Committee.
2. Risk Management Monitoring Committee of PT PBM Sarana Bandar Nasional, with the following membership:
   a. Chairman of the Risk Management Monitoring Committee as a Member of the Integrated Governance Committee;
   b. Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Integrated Governance Committee.
3. Risk Management Monitoring Committee of PT Pelita Indonesia Djaya, with the following membership:
   a. Chairman of the Risk Management Monitoring Committee as a Member of the Integrated Governance Committee;
   b. Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Integrated Governance Committee.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi
Composition of the Integrated Governance Committee

Nama Name	**Jabatan** Position	**Posisi di Perusahaan** Position in the Company	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Eddy Susanto Supadmo	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Chairman of the Integrated Governance Committee	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	3 November 2020 – Sekarang (1 periode) 3 November 2020 – Present (1 term)
Kristia Budiyarto	Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Deputy Chairman of the Integrated Governance Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	3 November 2020 – Sekarang (1 periode) 3 November 2020 – Present (1 term)
Sukirno Dwi Susilo	Anggota Tata Kelola Terintegras Member of the Integrated Governance	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-11/DK/VIII/2022 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-11/DK/VIII/2022	1 September 2022 – Sekarang (1 periode) 1 September 2022 – Present (1 term)
Mahruddin Harahap	Anggota Tata Kelola Terintegras Member of the Integrated Governance	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-1/DK/IV/ 2023 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-1/DK/IV/2023.	18 April 2023-Sekarang (1 periode) 18 April 2023 – Present (1 term)
Luqmanul Hakim	Anggota Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Committee	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/IX-2023 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-07/DK/IX-2023	30 September 2023- Sekarang (1 periode) 30 September 2023 – Present (1 term)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Profile

Eddy Susanto Soepadmo **Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi** Cahirman of Integrated Governance Committee Profile	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022
Profil lengkap Bapak Eddy Susanto Soepadmo telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The complete profile of Mr. Eddy Susanto Soepadmo is detailed in the Company Profile chapter of this Annual Report.	

Kristia Budiyarto **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi** Member of Integrated Governance Committee Profile	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022
Profil lengkap Bapak Kristia Budiyarto telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The complete profile of Mr. Kristia Bduiyarto is detailed in the Company Profile chapter of this Annual Report.	

Sukirno Dwi Susilo **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi** Member of Integrated Governance Committee Profile	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-11/DK/VIII/2022 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-11/DK/VIII/2022
Periode Jabatan Term of Office	1 September 2022-Sekarang (periode 1) September 1, 2022 – Present (period 1)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Purworejo, 19 Oktober 1969 Purworejo, Oktober 19, 1969
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	54 tahun 54 years old
Domisili Domicile	Depok

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Pendidikan Terakhir Last Education	• S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Admiistrasi Negara • S2 Sekolah Tingi Manajemen Transpor (STMT) Trisakti • Bachelor's degree from the School of Administrative Sciences, National Institute of Public Administration • Master's degree from Trisakti Institute of Transport Management (STMT)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Kementerian Perhubungan (2020 – 2022) • Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi Pegawai, Kementerian Perhubungan (2022) • Kepala Bagian Manajemen Talenta SDM, Kementerian Perhubungan (2022 – sekarang) • Head of the Division of Employee Transfers, Welfare, and Discipline, Ministry of Transportation (2020 – 2022) • Head of the Division of Employee Competency Development, Ministry of Transportation (2022) • Head of the Division of Human Resources Talent Management, Ministry of Transportation (2022 – present)

Mahruddin Harahap **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi** Member of Integrated Governance Committee Profile	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No Kep–1/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/DK/IV/2023 Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-1/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-01/DK/VIX/2022
Periode Jabatan Term of Office	18 April 2023 – Sekarang April 18, 2023 – Present
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lubuk Pakam, Sumatera Utara 14 Oktober 1981 Lubuk Pakam, North Sumatera Oktober 14, 1981
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	43 tahun 43 years old
Domisili Domicile	Depok
Pendidikan Terakhir Last Education	• Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN Jakarta • Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia • Magister Bisnis Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor • Diploma III: State College of Accountancy (STAN), Jakarta • Extension Program: Faculty of Economics, University of Indonesia • Master of Business: Business School, Bogor Agricultural Institute (IPB)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Staf Bagian Perencanaan Sekretariat Kementerian BUMN (Oktober 2010 - September 2013) • Pemeriksa Anggaran Inspektorat Kementerian BUMN (Oktober 2013 - Desember 2017) • Auditor Muda Kementerian BUMN (Januari 2018 - sekarang) • Staff of the Planning Section, Secretariat of the Ministry of State-Owned Enterprises (October 2010 - September 2013) • Budget Examiner, Inspectorate of the Ministry of State-Owned Enterprises (October 2013 - December 2017) • Junior Auditor, Ministry of State-Owned Enterprises (January 2018 - present)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Luqmanul Hakim Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of Integrated Governance Committee Profile	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/IX-2023. Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-07/DK/XI-2023
Periode Jabatan Term of Office	30 September 2023- sekarang (periode 1) September 30, 2023 – Present (Period 1)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jember, 5 juni 1965 Jember, June 5, 1965
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	58 Tahun 58 Years old
Domisili Domicile	Kota Tangerang, Banten Tangerang City, Banten
Pendidikan Terakhir Last Education	S2 Master's Degree
Riwayat Pekerjaan Employment History	• VP Aero Retail Management SBU Garuda Indonesia • SM Corporate and Sales PT. Garuda Indonesia

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tabel pengungkapan Independensi dari Komite Pemantau Manajemen Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:

INDEPENDENCE OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

All members of the Integrated Governance Committee are professionals with experience who do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities. This is to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities as committee members.

The Integrated Governance Committee has met the criteria for independence, expertise, experience, and integrity as required by applicable regulations. The following table discloses the independence of the Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2023:

Kriteria Independensi Criteria of Independence	**Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PELNI (Persero)** Integrated Governance Committee of PT PELNI (Persero)				
	Eddy Susanto Soepadmo	**Kristia Budiyarto**	**Sukirno Dwi Susilo**	**Mahruddin Harahap**	**Luqmanul Hakim**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have financial relationships with fellow members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Kriteria Independensi Criteria of Independence	Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PELNI (Persero) Integrated Governance Committee of PT PELNI (Persero)				
	Eddy Susanto Soepadmo	Kristia Budiyarto	Sukirno Dwi Susilo	Mahruddin Harahap	Luqmanul Hakim
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have familial relationships through marriage and descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Does not have managerial relationships in the Company, its Subsidiaries, or Affiliate Companies.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not hold positions as political party officials, government officials, or public officials.	✓	✓	✓	✓	✓

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Selama tahun 2023, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, program pengembangan kompetensi yang diikuti selama tahun 2023 telah tercantum pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan bagi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dari eksternal Perseroan tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Fungsi Manajemen Risiko:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Throughout 2023, the competency development programs attended by members of the Integrated Governance Committee who are also members of the Company's Board of Commissioners have been detailed in the Corporate Governance chapter of this Annual Report. Meanwhile, external members of the Integrated Governance Committee did not participate in any competency development programs.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

1. Risk Management Function:

a. melakukan evaluasi kebijakan serta strategi Manajemen Risiko;
b. melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;

2. Fungsi Audit Intern:
a. memastikan bahwa Direksi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN memiliki SPI yang menjalankan fungsi Audit Intern;
b. memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi;
c. memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai BUMN yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;
d. memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern (internal audit *charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI;
e. mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
f. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*quality assurance review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan
g. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

3. Fungsi Tata Kelola Terintegrasi:
a. melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
b. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan BUMN agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko BUMN Induk;
c. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BUMN Induk, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi BUMN Induk atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
d. mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
e. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan BUMN agar selaras dengan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk dan Anak Perusahaan BUMN; dan

a. Evaluate risk management policies and strategies;
b. Evaluate the Board of Directors' accountability for implementing the risk management policies and strategies as mentioned in point a;
c. Supervise and provide advice on the implementation of the risk management function in accordance with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.

2. Internal Audit Function:
a. Ensure that the SOE Board of Directors and its subsidiaries have an Internal Audit Unit (SPI) that performs the internal audit function;
b. Approve the appointment and dismissal of the head of SPI as proposed by the Board of Directors;
c. Ensure SPI has access to information and/or data regarding the SOE necessary for carrying out its duties;
d. Approve the internal audit charter proposed by the Board of Directors, considering suggestions from SPI;
e. Review the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from SPI at least once a year;
f. Appoint an independent external quality controller to review SPI performance (quality assurance review) at least once every three years; and
g. Supervise and provide advice on the implementation of other internal audit functions in accordance with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.

3. Integrated Governance Function:
a. Evaluate and approve integrated governance policies;
b. Supervise the implementation of integrated governance in SOE subsidiaries to ensure alignment with the parent SOE's risk management policies;
c. Supervise the duties and responsibilities of the parent SOE's Board of Directors and provide direction or advice on implementing integrated governance policies;
d. Evaluate integrated governance policies and direct improvements;
e. Supervise the implementation of integrated governance in SOE subsidiaries to ensure alignment with the integrated governance policies of the parent SOE and its subsidiaries; and

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

f. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

f. Supervise and provide advice on the implementation of other integrated governance functions in accordance with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yaitu 09/KTKT/XII-2023.

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Kebijakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tercantum dalam Bab 3. Poin B pasal 1 dan 2 Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu, Tata Kelola Terintegrasi juga mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam seluruh rapat yang diselenggarakan oleh internal Tata Kelola Terintegrasi maupun yang diikuti selama tahun 2023:

CHARTER OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Integrated Governance Committee has a Charter, numbered 09/KTKT/XII-2023.

MEETING POLICY OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The meeting policy of the Integrated Governance Committee is stipulated in Chapter 3, Points B, Articles 1 and 2 of the Integrated Governance Committee Charter.

MEETINGS OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Throughout 2023, the Integrated Governance Committee held 3 (three) internal meetings. Additionally, the Integrated Governance Committee also attended Board of Commissioners meetings and meetings with the Organs under the Board of Commissioners, as well as Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The following table shows the frequency and attendance rate of each Integrated Governance Committee member in all internal Integrated Governance Committee meetings and those attended throughout 2023:

Nama	Jabatan	Rapat Internal Komite Tata Kelola Terintegrasi Internal Integrated Governance Committee Meeting			Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Eddy Susanto Soepadmo	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Chairman of the Integrated Governance Committee	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
Kristia Budiyarto	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Committee	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Nama	Jabatan	Rapat Internal Komite Tata Kelola Terintegrasi Internal Integrated Governance Committee Meeting			Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate
Luqmanul Hakim	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Committee	3	3	100%	3	3	3	3	3	100%
Mahruddin Harahap	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Committee	3	3	100%	3	3	3	3	3	100%
Muhamad Amal Amrulloh	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Committee	3	3	100%	3	3	3	3	3	100%

Adapun agenda rapat internal Komite Tata Kelola Terintegrasi diuraikan pada tabel berikut ini:

The agenda of the internal meetings of the Integrated Governance Committee is outlined in the following table:

Agenda Rapat Internal Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023
Internal Meeting Agenda of the Integrated Governance Committee in 2023

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
20 Oktober 2023 October 20, 2023	Koordinasi Tim dan *Frame Work* KTKT PELNI Grup Coordination of Teams and Framework of KTKT PELNI Group
15 November 2023 November 15, 2023	Pelaksanaan kegiatan Organ KTKT Induk dan Anak perusahaan Implementation of Activities of the KTKT Main Body and Subsidiaries
15 Desember 2023 December 15, 2023	*Review* Pedoman/Kebijakan Tentang KTKT Review of Guidelines/Policies on KTKT

Sedangkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Meanwhile, the agenda of the Board of Commissioners' meetings with the Organs under the Board of Commissioners, as well as the Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, has been outlined in the Corporate Governance Chapter of this Report.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

LAPORAN PELAKSANAAN KINERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pada tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PELNI (Persero) telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Regular *Meeting* Tim Teknis setiap bulan.
2. Regular *Tematic Meeting* Tim KTKT dengan Direksi setiap bulan.
3. Turut serta secara aktif dalam Rapat Gabungan dengan BOD/BOC.
4. Inventarisasi seluruh kebijakan dan SOP yang ada di Induk dan anak Perusahaan.
5. Pembuatan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE PERFORMANCE REPORT

In 2023, the Integrated Governance Committee of PT PELNI (Persero) has realized the following programs and work activities:

1. Monthly regular meetings of the Technical Team.
2. Monthly regular thematic meetings of the Integrated Governance Committee (IGC) Team with the Board of Directors.
3. Active participation in joint meetings with the Board of Directors/Board of Commissioners.
4. Inventory of all policies and SOPs in the parent and subsidiary companies.
5. Creation of the Integrated Governance Committee Charter.

PELNI
PELNI

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS
SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

The Secretariat of the Board of Commissioners is appointed to facilitate the smooth execution of the Board of Commissioners' duties, particularly in the fields of secretarial work and liaison between the Board of Commissioners and other parties, including the Board of Directors.

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu oleh seorang Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris maupun Staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

MEMBERSHIP OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Secretary of the Board of Commissioners, supported by a Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners. Both the Secretary of the Board of Commissioners and the Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The term of office for the Secretary of the Board of Commissioners and the Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners of the Company, with a maximum of 3 (three) years, and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss them at any time.

Adapun keanggotaan Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The members of the Secretariat of the Board of Commissioners of the Company who served in 2023 are as follows:

Keanggotaan Sekretariat Dewan Komisaris
Membership of the Board of Commissioners Secretariat

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Anton H. G. Napitupulu	Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Secretary	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-16/DK/XI-2020 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-16/DK/XI-2020	30 November 2020 – Sekarang (periode 2) 30 November 2020 – Present (Period 2)
Ajeng Eka Yandini	Staf Sekretariat Dewan Komisaris Staff of the Board of Commissioners Secretariat	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/I-2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-02/DK/I-2022	20 Januari 2022 – Sekarang (periode 1) 20 January 2022 – Present (Period 1)
Teti Rohayati	Staf Sekretariat Dewan Komisaris Staff of the Board of Commissioners Secretariat	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/XI-2019 tanggal 13 November 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/IV-2021 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-10/DK/XI-2019 dated November 13, 2019, as amended by Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-03/DK/IV-2021	1 Desember 2019 – Sekarang (periode 2) 1 December 2019 – Present (Period 2)

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS
SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Keanggotaan Sekretariat Dewan Komisaris
Membership of the Board of Commissioners Secretariat

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
M. Amal Amrullah	Staf Sekretariat Dewan Komisaris Staff of the Board of Commissioners Secretariat	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DK/IV-2021 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-04/DK/IV-2021	22 April 2021 – Sekarang (periode 1) 22 April 2021 – Present (Period 1)
Ati Irawati	Staf Sekretariat Dewan Komisaris Staff of the Board of Commissioners Secretariat	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-6/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-06/DK/VII/2022	1 Agustus 2022 – Sekarang (periode 1) 1 August 2022 – Present (Period 1)

Profil Anggota Sekretariat Dewan Komisaris
Profile of the Members of the Board of Commissioners Secretariat

Anton H. G. Napitupulu
Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretary

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-16/DK/XI-2020 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-9/DK/XI-2023 Board of Commissioners Decree No. KEP-16/DK/XI-2020 as amended by Board of Commissioners Decree No. KEP-9/DK/XI-2023
Periode Jabatan Term of Office	30 November 2020 – Sekarang (periode 2) November 30, 2020 – Present (Period 2)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 23 November 1976 Jakarta, November 23, 1976
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	47 tahun 47 years old
Domisili Domicile	Bekasi
Pendidikan Terakhir Last Education	S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu (2003) Bachelor's Degree in Accounting from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu (2003)
Riwayat Pekerjaan Employment History	Analis Hukum, Kementerian BUMN (2014 – Sekarang) Legal Analyst, Ministry of State-Owned Enterprises (2014 – Present)

Ajeng Eka Yandini
Staf Sekretariat Dewan Komisaris
Staff of the Board of Commissioners Secretariat

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/I-2022 Board of Commissioners Decree No. KEP-02/DK/I-2022
Periode Jabatan Term of Office	20 Januari 2022 – Sekarang (periode 1) January 20, 2022 – Present (Period 1)

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS
SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Ajeng Eka Yandini **Staf Sekretariat Dewan Komisaris** Staff of the Board of Commissioners Secretariat	
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 19 Maret 1997 Jakarta, March 19, 1997
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	27 tahun 27 years old
Domisili Domicile	Depok
Pendidikan Terakhir Last Education	S1 di Universitas Lampung (2018) Bachelor's Degree from University of Lampung (2018)
Riwayat Pekerjaan Employment History	Analis Kinerja BUMN, Kementerian BUMN (2019 – Sekarang) State-Owned Enterprises Performance Analyst, Ministry of State-Owned Enterprises (2019 – Present)

Teti Rohayati **Staf Sekretariat Dewan Komisaris** Staff of the Board of Commissioners Secretariat	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/XI-2019 tanggal 13 November 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/IV-2021 Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-10/DK/XI-2019 dated November 13, 2019, as amended by the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-03/DK/IV-2021
Periode Jabatan Term of Office	1 Desember 2019 – Sekarang (periode 2) December 1, 2019 – Present (period 2)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 17 Desember 1968 Jakarta, December 17, 1968
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	56 tahun 56 years old
Domisili Domicile	Bekasi
Pendidikan Terakhir Last Education	• S1 IKOPIN, MSDM (1991) • S2 Universitas Borobudur, MSDM (2006) • S3 Universitas Negeri Jakarta, MSDM (2020) • Bachelor's Degree in Human Resource Management from IKOPIN (1991) • Master's Degree in Human Resource Management from Borobudur University (2006) • Doctorate in Human Resource Management from Jakarta State University (2020)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• PT RIU (Persero), Senior Manager Pajak (1999 - 2018). • PT Sakti Group, Direktur SDM (2019-2023). • Binus University, Faculty Member of Business Management (2021- sekarang) • Senior Tax Manager at PT RIU (Persero) (1999 - 2018) • Human Resources Director at PT Sakti Group (2019-2023) • Faculty Member of Business Management at Binus University (2021-present)

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS
SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

M. Amal Amrullah **Staf Sekretariat Dewan Komisaris** Staff of the Board of Commissioners Secretariat	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DK/IV-2021 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-04/DK/IV-2021
Periode Jabatan Term of Office	22 April 2021 – Sekarang (periode 1) April 22, 2021 – Present (period 1)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tulungagung, 29 Juli 1985 Tulungagung, July 29, 1985
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	28 tahun 28 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Pendidikan Terakhir Last Education	S1 UIN Tulungagung Jurusan Pendidikan Bachelor's Degree in Education from UIN Tulungagung
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Tenaga Ahli DPR RI Tahun 2014-2019 • Komusaris PT SWABINA GATRA 2020-sekarang • Expert Staff at the House of Representatives of the Republic of Indonesia (2014-2019) • Commissioner of PT SWABINA GATRA (2020-present)

Ati Irawati **Staf Sekretariat Dewan Komisaris** Staff of the Board of Commissioners Secretariat	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-6/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decree No. KEP-6/DK/VII/2022
Periode Jabatan Term of Office	1 Agustus 2022 – Sekarang (periode 1) Period: August 1, 2022 – Present (Period 1)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 12 September 1971 Jakarta, September 12, 1971
Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023	52 tahun 52 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Pendidikan Terakhir Last Education	S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Jayabaya Bachelor's Degree in Economics, Jayabaya University
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Asisten Notaris (2010 - Sekarang) • Manager Keuangan LSP PARSYA (2021 - sekarang) • Manager Keuangan LAZ El ZaWa (2021 - sekarang) • Notary Assistant (2010 - Present) • Financial Manager at LSP PARSYA (2021 - Present) • Financial Manager at LAZ El ZaWa (2021 - Present)

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS
SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

INFORMASI RANGKAP JABATAN SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris BUMN tidak boleh merangkap sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
2. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
3. Anggota komite lain pada Perusahaan; dan/atau
4. Anggota komite pada BUMN/Perusahaan lain.

Baik Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) yang menjabat sepanjang tahun 2023 tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sekretariat Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Bertindak sebagai penghubung (*liasion officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

INFORMATION ON CONCURRENT POSITIONS OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the Secretary and Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners of SOEs are prohibited from concurrently holding positions as:

1. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other SOEs/companies;
2. Secretary/Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other SOEs/companies;
3. Members of other committees within the Company; and/or
4. Members of committees in other SOEs/companies.

Neither the Secretary of the Board of Commissioners nor the Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) who served throughout 2023 held any concurrent positions prohibited under the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duties and responsibilities of the Secretariat of the Board of Commissioners include the following:

1. Preparing meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners;
2. Drafting the minutes of the Board of Commissioners' meetings according to regulations;
3. Administering documents of the Board of Commissioners, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents;
4. Preparing the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
5. Drafting reports of the Board of Commissioners;
6. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners.

The Secretariat of the Board of Commissioners also undertakes additional tasks such as:

1. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of good corporate governance;
2. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or upon request;
3. Coordinating committee members when necessary to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
4. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

Direksi membentuk Kesekretariatan Perusahaan sebagai pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan dalam rangka membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG di PT PELNI (Persero). Pembentukan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

PROFIL KEPALA KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN

Posisi Kepala Kesekretariatan Perusahaan hingga saat ini dijabat oleh Bapak Evan Eryanto, dengan dasar pengangkatan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.10/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 10 November 2023. Profil lengkap Bapak Evan Eryanto telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN

Secara struktural, Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI (Persero) berada di bawah wewenang Direktorat Utama dan diketuai oleh seorang Kepala Kesekretariatan Perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kesekretariatan Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Kesekretariatan Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

Kesekretariatan Perusahaan terbagi dalam 3 (tiga) departemen, terdiri atas Departemen Kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris, Departemen Dokumen Korporat, Departemen Komunikasi Internal dan Eksternal. Jumlah anggota Kesekretariatan Perusahaan per 31 Desember 2023 sebanyak 36 (tiga puluh enam) karyawan.

FUNGSI DAN TUGAS POKOK KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN

Fungsi sekretaris perusahaan, meliputi:

1. memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan

The Board of Directors has established the Corporate Secretariat to execute the functions of the Corporate Secretary in order to assist the Board of Directors in implementing GCG principles and fulfilling the requirements of GCG practices at PT PELNI (Persero). This establishment refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

PROFILE OF THE HEAD OF CORPORATE SECRETARIAT

The position of Head of Corporate Secretariat is currently held by Mr. Evan Eryanto, based on the appointment outlined in the Board of Directors Decree Number: 11.10/01/SK/HKO.01/2023 dated November 10, 2023. The complete profile of Mr. Evan Eryanto has been detailed in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

POSITION AND MEMBERSHIP OF THE CORPORATE SECRETARIAT

Structurally, the Corporate Secretariat of PT PELNI (Persero) is under the authority of the Main Directorate and is headed by the Head of Corporate Secretariat. The appointment and dismissal of the Head of Corporate Secretariat are carried out by the President Director based on the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners. The Head of Corporate Secretariat is responsible for and reports on the execution of their duties periodically to the President Director and, upon request, to the Board of Commissioners.

The Corporate Secretariat is divided into three departments: the Secretariat Department of the Board of Directors and Board of Commissioners, the Corporate Documents Department, and the Internal and External Communication Department. As of December 31, 2023, the Corporate Secretariat had 36 (thirty-six) employees.

FUNCTIONS AND MAIN DUTIES OF THE CORPORATE SECRETARIAT

The functions of the corporate secretary include:

1. Ensuring the Company complies with regulations on disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles;
2. Providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or upon request;
3. Acting as a liaison with stakeholders; and

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

4. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS/Menteri.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Sekretaris Perusahaanmenjalankan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat risalah rapat;
2. Menyiapkan Daftar Khusus;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham;
4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporanlaporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
5. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
6. Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin;
7. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat Direksi dan memantau serta mengecek tindak lanjut hasil rapat.

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perusahaan.

4. Administering and storing company documents, including but not limited to the list of shareholders, special registers, and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS/Minister.

The Corporate Secretary is responsible for and reports on the execution of their duties periodically to the President Director and, upon request, to the Board of Commissioners.

In addition to performing the core functions mentioned above, the Corporate Secretary carries out the following tasks:
1. Attending Board of Directors meetings and preparing the minutes of meetings;
2. Preparing the Special Register;
3. Compiling the List of Shareholders;
4. Preparing materials related to routine reports/activities of the Board of Directors to be submitted to external parties;
5. Preparing materials related to matters requiring the Board of Directors' decisions concerning the management of the Company;
6. Facilitating meetings within the Board of Directors, both routine and non-routine;
7. Following up on each decision of the Board of Directors by recording each decision made in the meetings of the Board of Directors and monitoring and checking the follow-up results of the meetings.

The Board of Directors must maintain and evaluate the quality of the corporate secretary function.

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2023, program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY TRAINING

In 2023, the training programs attended by the Corporate Secretary were as follows:

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Name of Training	Penyelenggara Organizer
1	Opik Taupik	27 Oktober 2023 October 27, 2023	*Workshop* Isu - isu terkait transaksi merger, akuisisi dan *spin of* BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Workshop on Issues Related to Merger, Acquisition, and Spin-off Transactions of SOEs and SOE Subsidiaries	KORAN BUMN
2	Opik Taupik	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Sertifikasi Profesi *Public Relation* Professional Certification in Public Relations	LSP Public Relation
3	Opik Taupik	16-17 Maret 2023 March 16-17, 2023	*Exclusive Training "Legal for Non Legal"*	Indonesia Training Institute and Consulting Service

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN

Selama tahun 2023, Kesekretariatan Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

REPORT ON THE EXECUTION OF CORPORATE SECRETARIAT DUTIES

Throughout 2023, the Corporate Secretariat has undertaken various activities, as follows:

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
Dept Kesekretariatan Direksi & Komisaris Secretariat of the Board of Directors & Commissioners Department					
1	Penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan Preparation of the Company's Annual Report	Rutin Routine	• Penyusunan *Annual Report* sesuai dengan standar ARA (*Annual Report Awards*) • Penyusunan *Sustainability Report* sesuai dengan GRI (*Global Reporting Initiative*) • Preparation of the Annual Report in accordance with ARA (Annual Report Awards) standards. • Preparation of the Sustainability Report in accordance with GRI (Global Reporting Initiative) standards.	Januari-September January-September	

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
2	Pengelolaan Remunerasi bagi Direksi & Komisaris Management of Remuneration for Directors & Commissioners	Rutin Routine	1. Pengelolaan Dana Tantiem yang Ditangguhkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris TA 2022 2. Pengelolaan Tunjangan Asuransi Purna Jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023 1. Management of Deferred Tantiem Funds for the Board of Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2022. 2. Management of Post-Employment Insurance Allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2023.	Oktober-November October-November	Penempatan Dana Tantiem yang Ditangguhkan TA 2022 telah dilakukan pada rekening *escrow account* BRI Cab. Hayam Wuruk The placement of the deferred tantiem funds for the fiscal year 2022 has been made in an escrow account at BRI Hayam Wuruk Branch.
				Januari-Desember January-December	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki Asuransi Purna Jabatan (ASPURJAB) All Directors and the Board of Commissioners have obtained Post-Employment Insurance (ASPURJAB).
3	Pengelolaan Fasilitas bagi Direksi & Komisaris Management of Facilities for Directors & Commissioners	Rutin Routine	• Pengelolaan Fasilitas Direksi: Kendaraan dinas, Kesehatan, Corporate Card, Pakaian Dinas, Alat Perangkat Kerja, Operasional Kesekretariatan Pengelolaan Fasilitas Dewan Komisaris: Kesehatan, Pakaian Dinas, Operasional Kesekretariatan • Management of Facilities for the Board of Directors: official vehicles, health services, corporate cards, uniforms, work equipment, and secretarial operations. • Management of Facilities for the Board of Commissioners: health services, uniforms, and secretarial operations.	Januari-Desember January-December	Pengelolaan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris terakomodir dengan baik sesuai Peraturan yang berlaku The management of facilities for the Directors and the Board of Commissioners has been well accommodated in accordance with the applicable regulations.

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
4	Digitalisasi Risalah Rapat/e-risalah Digitization of Meeting Minutes/e-Minutes	Transformasi Transformation	Implementasi digital untuk Risalah Rapat Direksi, mulai dari pembuatan, sirkulir penandatanganan, penomoran, pendistribusian hingga penyimpanan risalah rapat Digital implementation for the minutes of the Board of Directors meetings, covering creation, circulation for signatures, numbering, distribution, and storage of meeting minutes.	November-Desember November-December	*Dummy* dan *Go Live* akan dilaksanakan pada Januari 2024 Dummy and Go Live will be conducted in January 2024

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
5	Pengelolaan Penyelenggaraan Rapat Dinas PT PELNI (Persero) Management of Official Meetings of PT PELNI (Persero)	Rutin Routine	Penyelenggaraan Rapat Dinas di PT PELNI (Persero), diantaranya: 1. Rapat Direksi 2. Rapat Gabungan Direksi & Dewan Komisaris 3. Rapat Integrasi Direksi & Dewan Komisaris 4. Rapat Pimpinan 5. RUPS PT PELNI 6. RUPS Anak Perusahaan Organization of official meetings at PT PELNI (Persero), including: 1. Board of Directors Meetings 2. Joint Meetings of the Board of Directors & Board of Commissioners 3. Integration Meetings of the Board of Directors & Board of Commissioners 4. Leadership Meetings 5. General Meetings of Shareholders (GMS) of PT PELNI 6. GMS of Subsidiaries	Januari-Desember January-December	Rapat Dinas selama tahun 2023 terselenggara dengan baik, dengan rincian sbb: 1. Rapat Direksi: 1x dalam seminggu 2. Rapat Gabungan Direksi & Dewan Komisaris: 1x dalam sebulan 3. Rapat Integrasi: 1x dalam setahun 4. Rapat Pimpinan: 1x dalam sebulan (*hybrid meeting*) dan 2x dalam setahun 5. RUPS PT PELNI: 2x dalam setahun 6. RUPS Anak Perusahaan: 2x dalam setahun Official meetings throughout 2023 have been conducted effectively, with the details as follows: 1. Board of Directors Meetings: Once a week 2. Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners: Once a month 3. Integration Meetings: Once a year 4. Leadership Meetings: Once a month (hybrid meetings) and twice a year 5. Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PT PELNI: Twice a year 6. Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Subsidiaries: Twice a year

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
Dept Komunikasi Internal & Eksternal Internal and External Communication Department					
1	*Townhall Meeting*	Rutin Routine	Komunikasi Internal antara Manajemen dengan seluruh Pegawai untuk menyampaikan kinerja, target dan strategi Perusahaan di tahun 2023. Tahun 2023 telah 2x dilaksanakan *Townhall* yaitu: 1. *Townhall Meeting* Strategi dan RKAP 2023 (31 Januari 2023) 2. *Townhall Meeting* Kinerja Semester 1 2023 (3 Agustus 2023) Internal Communication Internal communication between management and all employees to convey the company's performance, targets, and strategies for 2023. Two Townhall meetings have been held in 2023: 1. Townhall Meeting on Strategy and Corporate Budget Work Plan (RKAP) 2023 (January 31, 2023) 2. Townhall Meeting on Performance for the First Half of 2023 (August 3, 2023)	Januari & Agustus January & August	Pegawai mengetahui kinerja, target dan strategi Perusahaan dengan baik Employees are well-informed about the company's performance, targets, and strategies

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
2	*Media Relation*	Rutin	1. *Media setting* 2. Media tur 3. *Media briefing* 4. Konferensi pers/*media expose* 5. *Talkshow* radio 6. *Press release*	Januari – Desember	Kegiatan media relations PELNI terselenggara dengan baik dan menghasilkan pemberitaan positif untuk Perusahaan. Tercatat hingga November, Perusahaan memiliki sebanyak 6.471 ekspose pemberitaan positif. Berikut rincian kegiatan media PELNI: 1. Media *setting*: 43 rilis -> 1.052 pemberitaan 2. Media tur • Mudik Gratis Sepeda Motor (Jakarta - Semarang: 15 - 16 April) • Angkutan Lebaran (Kumai - Surabaya: 17 - 18 April) • Kapal tol laut (Tahuna: 26 - 29 November) 3. *Media briefing* - Lunch bersama Corsec PELNI (22 November) 4. Konferensi pers/media *expose* • Angkutan Lebaran 1444 H/2023 (Jakarta: 27 Maret) • Sosialisasi PM 7 & 8 (Ambon: 9 Juni) • Sosialisasi PM 7 & 8 (Surabaya: 12 Juni) • Sosialisasi PM 7 & 8 (Semarang: 16 Juni) • Sosialisasi PM 7 & 8 (Jayapura: 25 Juni) • Sosialisasi PM 7 & 8 (Makassar: 27 Juni) • Sosialisasi PM 7 & 8 (Batam: 30 Juni) • Kinerja Semester I (Jakarta: 2 Agustus) • Alihfungsi loket (Makassar: 9 Oktober) • Alihfungsi loket (Surabaya: 11 Oktober) • Alihfungsi loket (Jakarta: 25 Oktober) • Angkutan Nataru 2023/2024 (Jakarta: 8 Desember) 5. *Talkshow* radio

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
					• Sosialisasi PM 7 & 8 (Surabaya: 12 Juni) • Alihfungsi loket (Makassar: 9 Oktober) • Alihfungsi loket (Surabaya: 11 Oktober) • Alihfungsi loket (Jakarta: 25 Oktober) 6. *Press release*: 43 rilis

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
2	*Media Relation*	Routine	1. Media setting 2. Media tour 3. Media briefing 4. Press conference/media expose 5. Radio talk show 6. Press release	January - December	The media relations activities of PELNI were successfully carried out, resulting in positive media coverage for the company. As of November, the company has achieved a total of 6,471 instances of positive media exposure. The following are the details of PELNI's media activities: 1. Media Setting: 43 releases -> 1,052 reports 2. Media Tours: • Free Motorcycle Homecoming (Jakarta - Semarang: April 15 - 16) • Lebaran Transportation (Kumai - Surabaya: April 17 - 18) • Sea Toll Ship (Tahuna: November 26 - 29) 3. Media Briefing: Lunch with PELNI's Corporate Secretary (November 22) 4. Press Conferences/Media Exposures: • Lebaran Transportation 1444 H/2023 (Jakarta: March 27) • PM 7 & 8 Socialization (Ambon: June 9) • PM 7 & 8 Socialization (Surabaya: June 12) • PM 7 & 8 Socialization (Semarang: June 16) • PM 7 & 8 Socialization (Jayapura: June 25) • PM 7 & 8 Socialization (Makassar: June 27) • PM 7 & 8 Socialization (Batam: June 30) • First Semester Performance (Jakarta: August 2) • Ticket Office Conversion (Makassar: October 9) • Ticket Office Conversion (Surabaya: October 11) • Ticket Office Conversion (Jakarta: October 25)

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
					• Christmas and New Year Transportation 2023/2024 (Jakarta: December 8) 5. Radio Talk Shows: 6. Press Release: 43 release
3	Portofolio Produk Product Portfolio	Transformasi Transformation	Pembuatan portofolio produk PELNI dalam bentuk cetak dan video sebagai media promosi produk komersial yang dimiliki oleh PELNI The creation of PELNI's product portfolio in both print and video formats as promotional media for PELNI's commercial products	Oktober – Desember October – December	Memberikan kemudahan untuk Divisi Komersial dalam mempromosikan produk komersial PELNI Facilitating the Commercial Division in Promoting PELNI's Commercial Products
4	HUT PELNI ke 71 71st Anniversary of PELNI	Rutin Routine	Perayaan HUT ke 71 PELNI, dengan beberapa agenda yaitu: 1. Olimpiade PELNI - Maret s.d April 2. Tasyakuran HUT ke 71 PELNI - 28 April 3. Puncak HUT ke 71 PELNI - 11 Mei The 71st anniversary of PELNI was celebrated with several events, including: 1. PELNI Olympics - March to April 2. 71st Anniversary Thanksgiving - April 28 3. 71st Anniversary Main Event - May 11	April	Pegawai PELNI merasakan *euforia* perayaan HUT ke 71, selain itu kegiatan HUT juga dapat mempererat kebersamaan dan kekompakan dari pegawai PELNI employees experienced the euphoria of the 71st anniversary celebration, which also fostered a sense of togetherness and solidarity among the staff.
5	*Launching* Logo Baru PELNI Launch of the New PELNI Logo	Transformasi Transformation	*Launching logo* baru PELNI merupakan bagian dari transformasi Perusahaan. Launching logo dihadiri oleh Menteri BUMN RI pada tanggal 25 Mei 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta The launch of PELNI's new logo as part of the company's transformation. The logo launch event was attended by the Indonesian Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) on May 25, 2023, at JiExpo Kemayoran, Jakarta.	25 May May 25	*Rebranding* logo baru PELNI Rebranding of PELNI's New Logo

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
6	Pelatihan Komunikasi Kepala Cabang Branch Manager Communication Training	Transformasi Transformation	Pelatihan Komunikasi untuk seluruh Kepala Cabang dengan tema "*Personal Branding* dan *Excellent Public Speaking Skill*" yang mengundang narasumber Wahyu Wiwoho. Communication Training for all Branch Heads on the theme "Personal Branding and Excellent Public Speaking Skills," featuring speaker Wahyu Wiwoho.	25 September September 25	Memberikan *skill* komunikasi yang baik bagi seluruh Kepala Cabang Providing good communication skills for all Branch Heads.
7	Pelatihan *Social Media Rangers* 162 Social Media Rangers 162 Training	Transformasi Transformation	Pelatihan Social Media Rangers 162 untuk seluruh admin sosmed @pelni162 cabang. Tema yang diangkat adalah "Pegawai Rasa *Influencer*, Siapa Takut!" dengan narasumber Dea Rizkita dan Ezra Komunitas Melaut. Social Media Rangers 162 Training for all social media administrators of @pelni162 branches. The theme was "Employees as Influencers, Who's Afraid?" featuring speakers Dea Rizkita and Ezra from the Melaut Community.	25 September September 25	Memberikan *skill* mengelola konten sosial media yang kreatif dan menarik untuk @pelni162 di cabang Providing creative and engaging social media content management skills for @pelni162 at branches.

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
8	*Launching* Logo Baru PELNI di Kapal PELNI Launch of the New PELNI Logo on PELNI Ships	Transformasi Transformation	*Launching* logo baru PELNI pada kapal PELNI yaitu KM Kelud, dimana KM Kelud ini merupakan *pilot project* penggantian cat yang sesuai dengan *corporate identity* Perusahaan di badan kapal. Acara dilaksanakan pada 29 September 2023 di KM Kelud Pelabuhan Tg Priok. The launch of the new PELNI logo on the PELNI ship KM Kelud, which serves as a pilot project for repainting the ship's body to align with the company's corporate identity. The event was held on September 29, 2023, at KM Kelud, Tanjung Priok Port.	29 September September 29	*Rebranding* logo baru PELNI di kapal KM Kelud Rebranding of PELNI's new logo on the KM Kelud ship.

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
9	Penerimaan Penghargaan di Tahun 2023	Rutin	Pemberian apresiasi dari eksternal untuk PELNI atas kinerja Perusahaan	Januari – Desember	1. Indonesia *Best 50 CEO 2023 in Shipping Category - The Iconomics* (6 April 2023) 2. *Transportation Services - HSE Indonesia Awards* (17 Juni 2023) 3. Tol Laut dengan *On Schedule Performance* dan Tol Laut dengan *Load Factor* Terbaik - Kementerian Perhubungan RI (9 Agustus 2023) 4. #Star4 dan *The Most Committed GRC Leader* 2023 - *TOP Government, Risk & Compliance* (GRC) *Awards* 2023 (6 September 2023) 5. *Experiental Education Program of the Year melalui program Tour On Board - Marketeers Editor's Choice Awards* 2023 (10 Oktober 2023) 6. *Best Brand Popularity, Best Social Reputation - 5th Anniversary Indonesia BUMN Awards 2023* - The Iconomics (12 Oktober 2023) 7. *The Highest Level of Maritime Compliance and Safety Management Commitment* - Bisnis Indonesia Logistics Awards 2023 (29 November 2023) 8. *TOP Digital 2023* #Stars 4 dan *TOP Leader on Digital Implementation* 2023 - *TOP Digital Awards* 2023 - Majalah IT Works (4 Desember 2023)

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
9.	Receipt of Awards in 2023	Routine	External Recognition and Employee Awareness	January - December	1. Indonesia Best 50 CEO 2023 in the Shipping Category - The Iconomics (April 6, 2023) 2. Transportation Services - HSE Indonesia Awards (June 17, 2023) 3. Best On-Schedule Performance and Best Load Factor in Sea Toll - Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (August 9, 2023) 4. #Star4 and The Most Committed GRC Leader 2023 - TOP Government, Risk & Compliance (GRC) Awards 2023 (September 6, 2023) 5. Experiential Education Program of the Year through the Tour On Board Program - Marketeers Editor's Choice Awards 2023 (October 10, 2023) 6. Best Brand Popularity, Best Social Reputation - 5th Anniversary Indonesia BUMN Awards 2023 - The Iconomics (October 12, 2023) 7. The Highest Level of Maritime Compliance and Safety Management Commitment - Bisnis Indonesia Logistics Awards 2023 (November 29, 2023) 8. TOP Digital 2023 #Stars 4 and TOP Leader on Digital Implementation 2023 - TOP Digital Awards 2023 - IT Works Magazine (December 4, 2023)

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
10	Survei Brand Awareness Perusahaan Company Brand Awareness Survey	Rutin Routine	Survei yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh *awareness* pegawai PELNI terhadap Perusahaan setelah *rebranding* logo baru PELNI A survey conducted to measure the level of employee awareness of PELNI following the rebranding of the company's new logo.	Desember December	Mengetahui sejauh mana tingkat *awareness* pegawai PELNI terhadap Perusahaan Assessing the level of awareness PELNI employees have about the Company
Dept Dokumen Korporat Corporate Document Department					
1	Penataan Arsip Pusat dan Cabang Central and Branch Archive Organization	Rutin Routine	Kerjasama dengan Vendor Collaboration with Vendors	Januari s.d Desember January to December	Arsip Rapi dan terpisahkan berdasarkan jenis arsip (arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, arsip statis) Records are organized and separated based on the type of records (active records, inactive records, vital records, static records)
2	Alih Media Pusat & Cabang Media Transfer for Central and Branch Archives	Rutin Routine	Kerjasama dengan Vendor Collaboration with Vendors	Januari s.d Desember January to December	Arsip terdokumentasi dengan baik di https://arsip.admin-system.net Records are well-documented at https://arsip.admin-system.net
3	Pengelolaan Depo Arsip di Pusat & Kemayoran Management of Archive Depots at Central Office and Kemayoran	Rutin Routine	Kerjasama dengan Vendor dan koordinasi bersama ANRI Collaboration with Vendors and coordination with ANRI	Januari January	Depo Arsip untuk arsip Vital sesuai dengan standar ANRI Archive Depot for vital records is in accordance with ANRI standards
4	Tanda Tangan Digital (*renewal*) & Materai Digital Digital Signatures (Renewal) and Digital Stamps	Transformasi Transformation	Kerjasama dengan Peruri Collaboration with Peruri	Oktober October	Tanda Tangan digital untuk perikatan perjanjian dan Materai Digital Digital signatures for contract agreements and digital stamps

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
5	Sosialisasi Pedoman Kearsipan di Pusat & Cabang Dissemination of Archiving Guidelines at Central and Branch Offices	Strategis Strategic	Sosialisasi dilakukan dengan mengundang ANRI Outreach conducted by inviting ANRI	Januari s.d Maret January to March	Insan PELNI memahami mengenai kearsipan di PT PELNI (Persero) PELNI personnel understand archiving at PT PELNI (Persero)
6	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Public Information Disclosure Outreach	Strategis Strategic	Sosialisasi dilakukan dengan mengundang Komisioner KIP Outreach conducted by inviting KIP Commissioners	Juni June	Pemahaman Insan PELNI mengenai Keterbukaan Informasi Publik PELNI personnel understand Public Information Disclosure
7	Pelatihan Peningkatan Layanan Publik di Pusat & Cabang Public Service Improvement Training at Central and Branch Offices	Rutin Routine	Sosialisasi dilakukan dengan mengundang Tim Komisi Informasi Pusat Outreach conducted by inviting the Central Information Commission Team	April – September April to September	Insan PELNI memahami mengenai Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU No.14 tahun 2018 PELNI personnel understand Public Information Disclosure according to Law No. 14 of 2018
8	Pelatihan Kearsipan untuk tim dokumen Archival Training for the Document Team	Rutin	*Update* peraturan dan paham pengelolaan kearsipan Updating regulations and understanding archive management	Januari s.d Desember January to December	Tim Dokumen memahami peraturan dan tata cara pengolahan arsip dan dapat ikut serta dalam *awarding* kearsipan The Document Team understands regulations and procedures for archive management and can participate in archiving awards

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
9	Pembuatan/ Pembaharuan Pedoman di Departemen Dokumen Perusahaan (Tata Naskah Dinas Perusahaan, PPID, SP4N LAPOR) Creation/ Updating of Guidelines in the Company Document Department (Corporate Document Administration, PPID, SP4N LAPOR)	Rutin Routine	Memperbaharui pedoman PPID, tata naskah dinas, dan membuat pedoman pengelolaan SP4N Lapor Updating PPID guidelines, official correspondence templates, and creating SP4N Lapor management guidelines	April – Juni April to June	Pedoman / SOP yang dapat digunakan sebagai acuan seluruh pegawai PT PELNI (Persero) Guidelines / SOPs that can be used as a reference for all PT PELNI (Persero) employees
10	Penerimaan Dokumen di Corsec Document Receipt at the Corporate Secretary	Rutin Routine	Terpusatnya penerimaan dokumen melalui email corporate.secretary@pelni.co.id dan wa corporate Centralized document reception through email corporate.secretary@pelni.co.id and corporate WhatsApp	Januari s.d Desember January to December	Tidak ada dokumen perusahaan yang terlewat diterima dan dicatat No company documents are missed in receiving and recording
11	Pengembangan Manajemen Dokumen (Pelni Doc) Development of Document Management (Pelni Doc)	Transformasi Transformation	Template Tata Naskah Dinas tersedia di Pelni Doc Official Correspondence Templates available on Pelni Doc	April s.d Juni April to June	Insan PELNI dapat dengan mudah dalam pembuatan Naskah Dinas dan penomoran yang sudah di *generate* by Sistem PELNI personnel can easily create official documents and numbering generated by the system
12	Evaluasi Implementasi Korespondensi (Pelni Doc) Evaluation of Correspondence Implementation (Pelni Doc)	Rutin Routine	ITCR	Januari s.d Desember January to December	No Issue untuk Pelni Doc No issues with Pelni Doc

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
13	Pengelolaan *Website* PPID Management of the PPID Website	Rutin Routine	Tersedia informasi terupdate di *website* PPID dan penerimaan permohonan informasi yang dapat terlayani sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Updated information available on the PPID website and information requests can be processed within the stipulated time	Januari s.d Desember January to December	Website PPID PPID website
14	Monev Keterbukaan Informasi Publik Monitoring and Evaluation of Public Information Disclosure	Strategis Strategic	Pengisian Lembar *Assestment* melalui *website* https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ dan dilanjutkan dengan uji presentasi Completing the Assessment Form via the website https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ followed by a presentation test	Oktober s.d Desember October to December	Informatif Informative
15	Pengelolaan SP4N LAPOR! Management of SP4N LAPOR!	Rutin Routine	Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat melalui https://www.lapor.go.id/ Following up on public complaints through https://www.lapor.go.id/	Januari s.d Desember January to December	100% pelaporan yang ditindaklanjuti s.d Des 2024 100% of reports followed up until December 2024
16	Monev SP4N LAPOR Monitoring and Evaluation of SP4N LAPOR	Strategis Strategic	Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh KemenpanRB Monitoring and evaluation conducted by KemenpanRB	November s.d Desember November to December	Laporan Pengelolaan SP4N LAPOR SP4N LAPOR Management Report
17	*Awarding* KIP KIP Awards	Strategis Strategic	Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI untuk Keterbukaan Informasi Publik Awards given by the Central Information Commission of Indonesia for Public Information Disclosure	Desember December	Piagam dan Piala Certificate and Trophy
18	*Awarding* Pengawasan Kearsipan Archival Supervision Awards	Strategis Strategic	Penghargaan yang diberikan oleh ANRI untuk pengelolaan arsip Awards given by ANRI for archive management	Desember December	Piala Trophy

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
Dept Kontak Center Contact Center Department					
1.	Pengadaan Pekerjaan Manage Service Petugas Pelayanan Penjualan Tiket di Loket Cabang PT PELNI tahun 2024 Procurement of Manage Service for Ticket Sales Service Officers at PT PELNI Branch Offices for 2024	Rutin Routine	• Pengadaan Pekerjaan Handling *Manage Service* • Petugas Pelayanan Tiket di Cabang Memberikan *update* produk *knowledge* secara berkala dan update produk dan layanan terbaru untuk proses penjualan di kantor cabang • Melakukan pemantauan perangkat maupuan mesin penjualan di cabang untuk kemudian dikoordinasikan dengan tim UPNK dan tim IT • Procurement of Handling Manage Service for Ticket Service Officers at Branch Offices • Providing regular product knowledge updates and updates on the latest products and services for the sales process at branch offices • Monitoring sales devices and machines at branches and coordinating with the UPNK team and IT team	Januari s.d Desember January to December	Operasional penjualan tiket di loket cabang berjalan dengan baik dan pelanggan dapat terlayani dengan maksimal. Ticket sales operations at branch counters are running smoothly, allowing customers to be served optimally.

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
2.	Pengadaan Pekerjaan Manage *Service* Petugas *Handling Contact Center* PT PELNI tahun 2024 Procurement of Manage Service for Contact Center Handling Officers at PT PELNI for 2024	Rutin Routine	• Pengadaan Pekerjaan *Handling Manage Service Contact Center*. • Memberikan *update* produk *knowledge* secara berkala dan *update* informasi terbaru kepada agen untuk dapat disampaikan kepada pelanggan • Melakukan koordinasi penyelesaian keluhan pelanggan kepada unit-unit terkait sesuai dengan jenis keluhannya (keuangan, pelayanan, fasilitas) • Procurement of Handling Manage Service for the Contact Center • Providing regular product knowledge updates and the latest information to agents for communication to customers • Coordinating the resolution of customer complaints with relevant units based on the type of complaint (finance, services, facilities)	Januari s.d Desember January to December	Operasioanl *Contact Center* dapat berjalan, pelanggan mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat, keluhan pelanggan dapat segera diatasi dan diselesaikan. The Contact Center operations are functioning well, providing customers with quick and accurate information, and customer complaints are promptly addressed and resolved.

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARIAT

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity Transformasi/ Rutin Transformation/ Routine	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation	Output/ Outcome
3.	Pengadaan Whatsapp Business dan SMS Blast Procurement of WhatsApp Business and SMS Blast Services	Rutin Routine	• Pengadaan layanan Whatsapp Business API digunakan untuk handling layanan Whatsapp Official PELNI. • Whatsapp Blast dan SMS blast untuk pemberitahuan informasi kepada pelanggan (keterlambatan kapal, rekrutmen, dan marketing) • Procurement of WhatsApp Business API services for handling official PELNI WhatsApp services • WhatsApp Blast and SMS Blast for notifying customers about information (ship delays, recruitment, and marketing)	Januari s.d Desember January to December	Layanan Informasi kepada konsumen tersampaikan dan berjalan dengan baik, pelanggan terlayani secara maksimal sehingga tidak menimbulkan komplain. Information services to consumers are effectively delivered, ensuring customers are served optimally without causing complaints.
4.	Pengadaan Layanan SIP & Trunk Procurement of SIP & Trunk Services	Rutin Routine	Pengadaan layanan jaringan telepon di *contact center* 162 untuk melayani dan memberikan informasi kepada pelanggan secara cepat dan tepat Procurement of telephone network services at the 162 contact center to serve and provide information to customers quickly and accurately	Agustus 2023 s.d Juli 2024 August 2023 to July 2024	Operasional Layanan Telepon berjalan, pelanggan dapat terlayani dengan baik, pelanggan mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Telephone service operations are running efficiently, enabling customers to receive timely and accurate information.

SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT UNIT

Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perseroan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang menjalankan fungsi Audit Internal untuk mengamankan aset dan kepentingan perusahaan. Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

SPI diketuai oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (KaSPI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Posisi KaSPI hingga saat ini dijabat oleh Ibu Lenggo Geni, dengan dasar pengangkatan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.10/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 10 November 2023. Adapun profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, KaSPI dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengawas Intern Area I, Pengawas Intern Area II, Pengawas investigasi, Pengawas Administrasi & Evaluasi. Saat ini, jumlah pegawai SPI Perseroan berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan susunan internal auditor Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

In an effort to implement GCG principles, the Company has established an Internal Audit Unit (SPI) that performs the internal audit function to safeguard the company's assets and interests. The establishment of SPI refers to Chapter VI of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Government Regulation No. 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero), and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

The SPI is led by a Head of the Internal Audit Unit (KaSPI) who is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners. The position of KaSPI is currently held by Mrs. Lenggo Geni, based on the appointment outlined in the Board of Directors Decree Number: 11.10/01/SK/HKO.01/2023 dated November 10, 2023. Her complete profile has been detailed in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

In carrying out her duties, the KaSPI is assisted by the Area I Internal Auditor, Area II Internal Auditor, Investigative Auditor, and Administration & Evaluation Auditor. Currently, the Company's SPI has 20 (twenty) employees, and the composition of the Company's internal auditors as of December 31, 2023, is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Lenggo Geni	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit
2	M. Suwadi	Pengawas Intern Area I Internal Audit Supervisor, Area I
3	Yusman Sugeng Kurniawan	Pengawas Intern Area II Internal Audit Supervisor, Area II
4	Ralna Ayu Utami	Pengawas Investigasi Investigation Supervisor
5	Sundari	Pengawas Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Supervisor
6	Maria Afriyanti	Pemeriksa Utama Area I Senior Auditor, Area I
7	Deni Hendayana	Pemeriksa Utama Area I Senior Auditor, Area I
8	Susidawati	Pemeriksa Utama Area II Senior Auditor, Area II

SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT UNIT

No	Nama Name	Jabatan Position
9	Siti Parwita Eka Kirana	Pemeriksa Utama Area II Senior Auditor, Area II
10	Linda Polontalo	Pemeriksa Utama Investigasi Senior Investigation Auditor
11	Rinna Oktantia	Pemeriksa Madya Investigasi Intermediate Investigation Auditor
12	Anisa Mega Pratiwi	Pemeriksa Muda Area I Junior Auditor, Area I
13	Arifiningtiyas Widyaningrum	Pemeriksa Pratama Area I Junior Auditor, Area I
14	Chicih Nurliyan	Pemeriksa Pratama Area II Junior Auditor, Area II
15	Della Marda Hakiky	Pemeriksa Pratama Area II Junior Auditor, Area II
16	Denny Prayitno	Pemeriksa Pratama Investigasi Junior Investigation Auditor
17	Khariz Arighi	Pemeriksa Pratama Investigasi Junior Investigation Auditor
18	Isnawati Septi Santoso	*Staff* Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Staff
19	Istinganatun Ruhaniyah	*Staff* Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Staff
20	Rega Pratama Putra	*Staff* Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Staff

SERTIFIKASI INTERNAL AUDITOR
Per 31 Desember 2023, seluruh karyawan SPI telah memiliki beberapa sertifikasi sebagai Internal Auditor, sebagai berikut:

INTERNAL AUDITOR CERTIFICATION
As of December 31, 2023, all SPI employees have obtained several certifications as Internal Auditors, as follows:

No	Nama Sertifikasi Certification Name	Jumlah Karyawan SPI Number of SPI Employee
1	PIA - Dasar-Dasar Audit PIA - Fundamentals of Auditing	8
2	PIA - Audit Operasional PIA - Operational Audit	2
3	PIA - Pengelolaan Tugas-Tugas Audit PIA - Audit Task Management	1
4	Audit Internal 1 Akuntansi & Keuangan Internal Audit 1 - Accounting & Finance	1
5	QIA - Tingkat Dasar QIA - Basic Level	11

SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT UNIT

No	Nama Sertifikasi Certification Name	Jumlah Karyawan SPI Number of SPI Employee
6	QIA - Tingkat Lanjutan QIA - Advanced Level	1
7	Audit Forensik Dasar Basic Forensic Audit	1
8	Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Fraud Prevention and Detection	1

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Demi menunjang kebutuhan, tingkat efektifitas dan lancarnya operasional perusahaan dalam melakukan audit internal, maka selama tahun 2023, Perseroan telah memberikan pelatihan bagi para personil SPI. Rincian pelatihan yang diikuti oleh masing-masing internal auditor, sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE INTERNAL AUDIT UNIT

To support the needs, effectiveness, and smooth operation of the company in conducting internal audits, throughout 2023, the Company has provided training for SPI personnel. The details of the training attended by each internal auditor are as follows:

No.	Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Karyawan SPI Number of SPI Employees	Tanggal/Penyelenggara Date/Organizer
1	*Focus Group Discussion* (FGD) terkait pelaksanaan Audit atas Pelaksanaan Pemeriksaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun 2022 pada PT PELNI (Persero) sesuai Surat Nomor: 01.09/03/S-B/DU/2023 Focus Group Discussion (FGD) on the Audit Implementation of Public Service Obligations Examination in the Economy Class Passenger Sea Transportation Sector Domestic Year 2022 at PT PELNI (Persero) as per Letter Number: 01.09/03/S-B/DU/2023	14	Rabu s.d. Kamis/11 s.d.12 Januari 2023 oleh Tim Audit BPK-RI Wednesday to Thursday/11th to 12th January 2023 by the Audit Team of BPK-RI
2	*Training Upgrading* Skill ERM Fundamental ISO 31000:2018 sesuai surat nomor: 11.20/09/ND-B/SDM/2023 dan 11.20/03/ND-B/SPI/2023 Training Upgrading Skill in ERM Fundamental ISO 31000:2018 as per Letter Number: 11.20/09/ND-B/SDM/2023 and 11.20/03/ND-B/SPI/2023	6	Rabu s.d. Jumat/22-24 November 2023 oleh Bpk. Edi Timbul (Centrois) & Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Wednesday to Friday/22nd to 24th November 2023 by Mr. Edi Timbul (Centrois) & Risk and Compliance Division

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perseroan telah membentuk SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dan dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen yang dilakukan secara bebas dan tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan oleh Manajemen maupun pihak lainnya dalam organisasi Perusahaan.

POSITION AND MEMBERSHIP OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Company has established an Internal Audit Unit (SPI) that reports directly to the President Director. The position of the SPI as an organ assisting the President Director is placed within the organizational structure to match its role and responsibilities. The SPI expresses its views and thoughts related to oversight independently, without influence or pressure from Management or any other parties within the organization.

SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT UNIT

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern di Perseroan dijelaskan sebagai berikut:
1. SPI berkedudukan di Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern
3. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
4. Dalam melakukan pemeriksaan, dibentuk Tim Audit dengan posisi fungsional tertentu dan waktu tertentu terdiri dari Pengawas, Ketua Tim dan Anggota Tim

Berikut ini adalah Struktur Organisasi SPI pada tahun 2023:

The position of the Internal Audit Unit in the Company is described as follows:
1. The SPI is headquartered at the Central Office and reports directly to the President Director.
2. The SPI is led by a Head of the Internal Audit Unit.
3. The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.
4. For conducting audits, an Audit Team is formed with specific functional positions and time frames, consisting of Supervisors, Team Leaders, and Team Members.

The following is the Organizational Structure of the SPI in 2023:

SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT UNIT

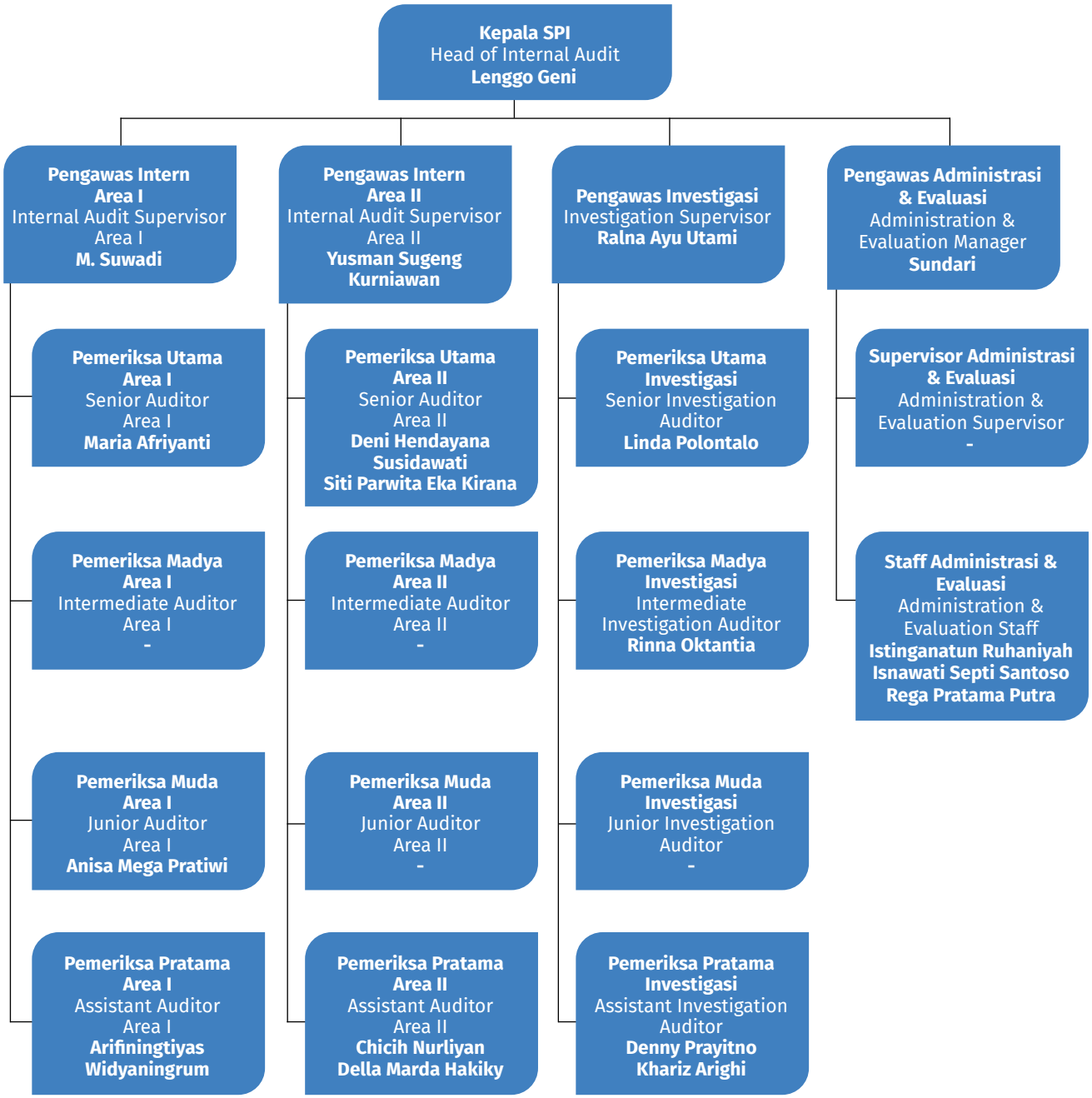

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERN

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Internal Audit *Charter* adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran serta Program Kerja Audit Tahun (PKAT) berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perusahaan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The duties and responsibilities of the SPI, as outlined in the Internal Audit Charter, are as follows:

1. Prepare and implement the Work Plan and Budget as well as the Annual Audit Work Program (PKAT) based on risk priorities in line with the Company's objectives.

SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT UNIT

2. Menyusun program kerja audit berbasis risiko untuk menjamin mutu kegiatan Audit Internal;
3. Mengevaluasi integritas dan keandalan informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut;
4. Mengevaluasi sistem yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur, peraturan perundangan yang memiliki dampak besar terhadap organisasi Perusahaan;
5. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
6. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan penggunaan aset/alat produksi serta kegiatan lainnya;
7. Melakukan audit atas badan usaha afiliasi dan Anak Perusahaan, atas perintah Direktur Utama dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris anak perusahaan;
8. Melakukan audit terhadap objek audit Yayasan atau Lembaga Keuangan Non Bank yang didirikan oleh PT PELNI (Persero) dan/atau PELNI Group atas perintah Direktur Utama;
9. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
10. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, up. Komite Audit;
11. Membuat laporan dan evaluasi hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit;
12. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh SPI dan/atau Auditor Eksternal;
13. Melakukan evaluasi mutu kegiatan dan hasil audit sesuai standar audit;
14. Melakukan Audit Khusus, atas:
    a. Perintah Direktur Utama;
    b. Pengembangan hasil audit sebelumnya;
    c. Menindaklanjuti hasil temuan audit eksternal; Setelah mendapat disposisi penugasan audit khusus dari Direktur Utama;
15. Melakukan kegiatan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern, serta praktik GCG dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan secara berkesinambungan;

2. Develop a risk-based audit work program to ensure the quality of internal audit activities.
3. Evaluate the integrity and reliability of information and the means used to identify, measure, clarify, and report such information.
4. Evaluate systems designed to ensure compliance with policies, work plans, procedures, and regulations that have a significant impact on the Company's organization.
5. Assess the effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance processes in accordance with laws and Company policies.
6. Conduct audits and assessments of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and the use of assets/production tools and other activities.
7. Audit affiliated entities and subsidiaries upon the President Director's order, with reports submitted to the President Director and the subsidiary's Board of Commissioners.
8. Audit foundations or non-bank financial institutions established by PT PELNI (Persero) and/or PELNI Group upon the President Director's order.
9. Provide improvement suggestions and objective information about the activities being audited at all management levels.
10. Prepare audit reports and submit them to the President Director and the Board of Commissioners, to the Audit Committee.
11. Prepare reports and evaluate the monitoring results of the audit recommendations follow-up.
12. Monitor, analyze, and report the implementation of corrective actions suggested by SPI and/or External Auditors.
13. Evaluate the quality of activities and audit results according to audit standards.
14. Conduct Special Audits based on:
    a. Orders from the President Director;
    b. Development of previous audit results;
    c. Follow-up on external audit findings; After obtaining the special audit assignment disposition from the President Director.
15. Provide consultation on risk management, internal control systems, and GCG practices to continuously improve the Company's performance and value.

16. Bertindak sebagai counterpart dengan pihak Auditor Eksternal dan Komite Audit dalam kegiatan Pemeriksaan di Perusahaan;
17. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Auditor Internal di SPI secara profesional dengan sertifikasi.

PEDOMAN KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan, SPI memiliki pedoman kerja sebagaimana tertuang dalam Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 10.28/01/SK/HKO.01/2022. [MOU1]
[MOU1]Pedoman SPI terbaru

Piagam Pengawasan Internal memuat:
1. Latar Belakang
2. Visi dan Misi
3. Tujuan
4. Struktur dan Kedudukan
5. Persyaratan SPI
6. Akuntabilitas
7. Independensi dan Objektivitas
8. Tugas dan Tanggung Jawab
9. Wewenang
10. Lingkup Pekerjaan
11. Standar
12. Kode Etik
13. Larangan Rangkap Tugas
14. Hubungan dengan Auditee
15. Hubungan dengan Auditor Eksternal
16. Hubungan dengan Komite Audit
17. Reviu Internal Audit Charter
18. Masa Berlaku dan Evaluasi

RAPAT SATUAN PENGAWASAN INTERN DENGAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN/ATAU KOMITE AUDIT

Satuan Pengawasan Intern melakukan pembahasan terkait audit Perseroan bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit secara berkala melalui mekanisme rapat kerja. Pada 2023, Satuan Pengawasan Intern menyelenggarakan rapat kerja dengan dihadiri anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit sejumlah 4 kali, dengan uraian sebagai berikut:
1. Laporan Kegiatan SPI Triwulan IV Tahun 2022 sesuai Surat Nomor: 01.25/02/S-B/SPI/2023

16. Act as a counterpart with External Auditors and the Audit Committee in the Company's audit activities.
17. Enhance the knowledge, skills, and capabilities of Internal Auditors in SPI professionally through certification.

INTERNAL AUDIT UNIT WORK GUIDELINES

To exercise its authority, duties, and responsibilities competently, independently, and accountably, SPI follows the work guidelines as stipulated in the Internal Audit Charter set forth in the Board of Directors Decree No. 10.28/01/SK/HKO.01/2022.

The Internal Audit Charter includes:
1. Background
2. Vision and Mission
3. Objectives
4. Structure and Position
5. SPI Requirements
6. Accountability
7. Independence and Objectivity
8. Duties and Responsibilities
9. Authority
10. Scope of Work
11. Standards
12. Code of Ethics
13. Prohibition of Concurrent Duties
14. Relationship with Auditee
15. Relationship with External Auditors
16. Relationship with Audit Committee
17. Internal Audit Charter Review
18. Validity Period and Evaluation

MEETINGS OF THE INTERNAL AUDIT UNIT WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS, AND/OR AUDIT COMMITTEE

The Internal Audit Unit discusses the Company's audit matters with the Board of Commissioners, Directors, and/or Audit Committee regularly through work meetings. In 2023, the Internal Audit Unit held four work meetings attended by members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Audit Committee, as follows:

1. SPI Activities Report for Q4 2022 as per Letter Number: 01.25/02/S-B/SPI/2023

SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT UNIT

2. Laporan Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2023 sesuai Surat Nomor: 04.11/03/S-R/SPI/2023
3. Laporan Kegiatan SPI Triwulan II Tahun 2023 sesuai Surat Nomor: 07.17/02/S-R/SPI/2023
4. Laporan Kegiatan SPI Triwulan III Tahun 2023 sesuai Surat Nomor: 10.17/02/S-R/SPI/2023

2. SPI Activities Report for Q1 2023 as per Letter Number: 04.11/03/S-R/SPI/2023
3. SPI Activities Report for Q2 2023 as per Letter Number: 07.17/02/S-R/SPI/2023
4. SPI Activities Report for Q3 2023 as per Letter Number: 10.17/02/S-R/SPI/2023

Rapat SPI dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit

Meetings of the SPI with the Board of Commissioners, Directors, and/or Audit Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	Jumat, 27 Januari 2023 20.00 WIB – Selesai Friday, January 27, 2023 8:00 PM WIB – End	Penyampaian Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Triwulan IV Tahun 2022 Presentation of the Internal Audit Unit Activity Report for the Fourth Quarter of 2022
2	Kamis, 13 April 2023 09.00 WIB – Selesai Thursday, April 13, 2023 9:00 AM WIB – End	Penyampaian Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Triwulan I Tahun 2023 Presentation of the Internal Audit Unit Activity Report for the First Quarter of 2023
3	Rabu, 19 Juli 2023 19.30 WIB – Selesai Wednesday, July 19, 2023 7:30 PM WIB – End	Penyampaian Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Triwulan II Tahun 2023 Presentation of the Internal Audit Unit Activity Report for the Second Quarter of 2023
4	Kamis, 19 Oktober 2023 15.30 WIB – Selesai Thursday, October 19, 2023 3:30 PM WIB – End	Laporan Kegiatan SPI Triwulan III Tahun 2023 Internal Audit Unit Activity Report for the Third Quarter of 2023

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN

Selama tahun 2023, SPI telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sebanyak 2 (dua) obyek audit pada Divisi Kantor Pusat
2. Pemeriksaan sebanyak 14 (empat belas) obyek audit pada Kantor Cabang
3. Pemeriksaan sebanyak 11 (sebelas) obyek audit pada Kapal
4. Pemeriksaan / Audit Khusus pada 11 obyek audit
5. Reviu atas Penghasilan dan Biaya PSO Tahun Anggaran 2023

REPORT ON THE EXECUTION OF INTERNAL AUDIT UNIT DUTIES

Throughout 2023, the SPI has undertaken various activities, as follows:

1. Examination of 2 (two) audit objects in the Head Office Division.
2. Examination of 14 (fourteen) audit objects in Branch Offices.
3. Examination of 11 (eleven) audit objects on Ships.
4. Special Examination/Audit on 11 audit objects.
5. Review of PSO Income and Expenses for the 2023 Fiscal Year.

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Dalam upaya memperkuat kualitas implementasi GCG di Perseroan, fungsi pengawasan terhadap aspek keuangan juga dilakukan secara eksternal (audit eksternal) yang dijalankan oleh Akuntan Publik. Dalam menjalankan tugasnya, Akuntan Publik melaksanakan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam standar tersebut, akuntan publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dan *independent*.

MEKANISME PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK

Pada umumnya, penunjukan Akuntan Publik dilakukan bersamaan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Berdasarkan Keputusan RUPST Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022, Pemegang Saham menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) dan Entitas Anaknya serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2023 dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut, Komite Audit menyusun draft Kerangka Acuan Kerja beserta rencana anggaran biaya untuk dapat disetujui oleh Dewan Komisaris. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Manajemen melakukan proses pengadaan melalui mekanisme Penunjukan langsung. Selama proses penunjukan berlangsung, Manajemen memberikan laporan progres rutin kepada Komite Audit sampai dengan terbitnya Perjanjian Audit dengan Nomor Perjanjian **TH.10.16-05/SPK/2023 perihal Pengadaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) PT PELNI (Persero) Tahun Buku 2023.**

In an effort to strengthen the quality of GCG implementation in the Company, external supervision of financial aspects is also conducted (external audit) by a Public Accountant. In performing their duties, Public Accountants adhere to auditing standards established and approved by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) in the Professional Standards of Public Accountants (SPAP). According to these standards, public accountants are required to plan and conduct audits to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement.

The audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as assessing the overall presentation of the financial statements independently.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT MECHANISM

Generally, the appointment of a Public Accountant is conducted simultaneously with the Public Accounting Firm (KAP) through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) based on the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. Based on the AGMS Resolution for the Approval of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year, the Shareholders appointed the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra to audit the Consolidated Financial Statements of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries as well as the Financial Statements of the Company's Partnership and Community Development Program for the 2023 Fiscal Year and delegated the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the audit service fees and other reasonable appointment terms for the KAP.

Based on this AGMS resolution, the Audit Committee drafted the Terms of Reference and budget plan for approval by the Board of Commissioners. After obtaining approval from the Board of Commissioners, Management conducted the procurement process through a direct appointment mechanism. During the appointment process, Management provided routine progress reports to the Audit Committee until the Audit Agreement was issued with Agreement Number **TH.10.16-05/SPK/2023 regarding the Procurement of the Audit of Consolidated Financial Statements and the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) of PT PELNI (Persero) for the 2023 Fiscal Year.**

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

PENUGASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2023

Mengacu pada mekanisme penunjukkan KAP dan Akuntan Publik di atas, pada tahun 2023 PT PELNI (Persero) menugaskan KAP Djoko, Sidik, & Indra (*International member of Alliance of Independent Firms* (ANTEA)) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) KAP di OJK STTD.KAP-00025/PM.22/2017 dan Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI dengan Nomor Register Akuntan Publik (NRAP) AP. 0139 sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) beserta Entitas Anaknya dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PELNI (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Dasar penunjukkan dan penugasan KAP Djoko Sidik & Indra dan Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI, antara lain:
1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 32 tanggal 21 Juni 2023;
2. Surat Tanggapan Dewan Komisaris perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan PUMK Tahun 2023 Nomor 95/DK/VII-2023 tanggal 15 Agustus 2023.

JASA YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2023 DAN PERIODE PENUGASANNYA

JASA UTAMA
Jasa utama yang diberikan oleh KAP Djoko, Sidik, & Indra dan Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., Asean CPA., CPI adalah melakukan audit dan *review* Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) beserta Entitas Anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Akuntan Publik berkewajiban memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

JASA LAINNYA
Selain melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, jasa lain yang diberikan oleh KAP Djoko, Sidik, & Indra dan Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI untuk tahun buku 2023 antara lain adalah Jasa

ASSIGNMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT FOR THE 2023 FISCAL YEAR

Referring to the above mechanism for the appointment of KAP and Public Accountant, in 2023 PT PELNI (Persero) assigned KAP Djoko, Sidik, & Indra (an international member of the Alliance of Independent Firms (ANTEA)) with OJK Registered Public Accountant Firm Number STTD.KAP-00025/PM.22/2017 and Public Accountant Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI with Public Accountant Registration Number (NRAP) AP. 0139 as the external auditor responsible for auditing the Consolidated Financial Statements of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of PT PELNI (Persero) for the fiscal year ending December 31, 2023.

The basis for the appointment and assignment of KAP Djoko Sidik & Indra and Public Accountant Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI includes:
1. Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGMS) Number 32 dated June 21, 2023;
2. Letter of Response from the Board of Commissioners regarding the Appointment of the Public Accounting Firm for the Audit of Consolidated Financial Statements and PUMK for 2023 Number 95/DK/VII-2023 dated August 15, 2023.

SERVICES PROVIDED BY THE PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT FOR THE 2023 FISCAL YEAR AND ASSIGNMENT PERIOD

MAIN SERVICES
The main services provided by KAP Djoko, Sidik, & Indra and Public Accountant Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI include auditing and reviewing the Consolidated Financial Statements of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries for the fiscal year ending December 31, 2023. The Public Accountant is responsible for providing an opinion on the fairness and conformity of the Financial Statements with generally accepted accounting principles and standards in Indonesia.

OTHER SERVICES
In addition to auditing the Company's Financial Statements for the 2023 fiscal year, other services provided by KAP Djoko, Sidik, & Indra and Public Accountant Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI for the 2023 fiscal year include Agreed-

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Agreed Upon Procedures (AUP) dan Jasa Reviu Penilaian *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen dengan biaya sebesar Rp116.550.000 include PPN 11% periode sampai 30 April 2024.

Upon Procedures and Review Services for Management Key Performance Indicators Assessment, each costing IDR 116,550,000 including 11% VAT, with a period until April 30, 2024.

PERIODE PENUGASAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Mulai Pekerjaan sampai dengan 20 April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan selambat-lambatnya sampai tanggal 20 April 2024;
2. Pelaksanaan audit Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dimulai pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan penerbitan laporan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2024.

ASSIGNMENT PERIOD

The work execution period begins from the date of signing the Work Commencement Report until April 20, 2024, with the following details:

1. The audit of the Financial Statements starts from the Work Commencement Report and must be completed by April 20, 2024, at the latest;
2. The audit of the Implementation of Prudential Principles (KPPK) starts on November 1, 2023, and the report must be issued by April 20, 2024, at the latest.

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK PERUSAHAAN DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa Pemberian Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan oleh KAP dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Adapun nama Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang mengaudit Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

LIST OF PUBLIC ACCOUNTING FIRMS AND PUBLIC ACCOUNTANTS FOR THE COMPANY IN THE LAST FIVE YEARS

Referring to the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services, the provision of General Audit Services for Financial Statements by a KAP can be performed for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years, while by a Public Accountant for a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

The names of the Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants (AP) that audited the Financial Statements of PT PELNI (Persero) in the last 5 (five) years are as follows:

Tahun Buku Financial Year	Nama KAP Accounting Firm Name	Nama AP Auditor's Name	Biaya Audit (Rp) Audit Fee (Rp)	Opini Audit Audit Opinion
2023	**Djoko, Sidik, & Indra**	**Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., Asean CPA., CPI**	**527.250.000**	Wajar, dalam semua hal yang material Fair, in all material respects
2022	Djoko, Sidik, & Indra	Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., Asean CPA., CPI	414.000.000	
2021	Djoko, Sidik, & Indra	Indra Soesetiawan Ak., CA., CPA	410.300.000	
2020	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo	Welly Adrianto, CPA	440.000.000	
2019	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Hartono, CA, CPA	417.750.000	

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Selain mengoptimalkan pengelolaan risiko di seluruh aspek bisnis dan operasional, Perseroan juga mengaplikasikan Sistem Pengendalian Internal secara terstruktur dan komprehensif di semua lini bisnis guna meminimalisir *error* dan agar terhindar dari aksi kecurangan. Pada implementasinya, Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di Perseroan merupakan sebuah proses penyatuan tindakan dan kegiatan secara berkesinambungan baik yang dilakukan oleh pimpinan Perseroan maupun karyawan untuk memberi keyakinan bahwa tujuan Perseroan telah terealisasi melalui kinerja yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

In addition to optimizing risk management across all business and operational aspects, the Company also applies a structured and comprehensive Internal Control System in all business lines to minimize errors and avoid fraudulent actions. In its implementation, the Internal Control System applied in the Company is a continuous process of integrating actions and activities conducted by both the Company's leadership and employees to ensure that the Company's objectives are achieved through effective and efficient performance, the reliability of financial reporting, asset security, and compliance with laws and regulations.

Agar implementasi Sistem Pengendalian Internal Perseroan senantiasa berjalan efektif dan efisien, Direksi telah menetapkan sistem pengendalian internal yang ketat untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Lingkup sistem pengendalian internal yang dijalankan Perseroan terdiri dari Lingkungan Pengendalian Internal, Pengkajian terhadap Pengelolaan Risiko Usaha (*risk assessment*), Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta *Monitoring* terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang berjalan di Perseroan.

To ensure that the implementation of the Company's Internal Control System remains effective and efficient, the Board of Directors has established a stringent internal control system to safeguard the Company's investments and assets. The scope of the internal control system implemented by the Company consists of the Internal Control Environment, Business Risk Management Assessment, Control Activities, Information and Communication Systems, and Monitoring of the Effectiveness of the Internal Control System in the Company.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Pengendalian Keuangan dan Operasional Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan mencakup aktivitas pengendalian keuangan dan operasional, yaitu:

1. Pengendalian Keuangan
   Sistem pengendalian internal dalam hal keuangan dilakukan guna memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
2. Pengendalian Operasional
   Pengendalian dalam kegiatan operasional yang meliputi kegiatan produksi, penjualan, operasi maupun investasi dilakukan agar tercapainya target Perseroan yang terbebas dari kecurangan dan sesuai dengan peraturan di dalam Perseroan.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROLS

The internal control system implemented in the Company includes financial and operational control activities, namely:

1. Financial Control
   The internal control system in terms of finance is carried out to ensure the accuracy of financial information, the effectiveness and efficiency of the Company's management processes, and compliance with related laws and regulations. The Board of Directors must establish an effective internal control system to safeguard the Company's investments and assets.
2. Operational Control
   Operational controls, including production, sales, operations, and investments, are carried out to achieve the Company's targets free from fraud and in accordance with the Company's regulations.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2023

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif serta

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2023

The Company's management is responsible for ensuring a reliable and effective Internal Control System based on Risk

berbasis Manajemen Risiko. Setiap level organisasi memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab dalam melakukan *review* terkait pengendalian risiko di seluruh aktivitas di unit kerja. Dan untuk menjaga efektivitas pengendalian SPI bekerja sama dengan Bagian Manajemen Risiko dan QSHE dalam melaksanakan audit baik di unit, proyek, maupaun Biro Kantor Pusat.

Hasil Evaluasi atas Pengendalian internal disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjut dan dimonitor pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perseroan memastikan penerapan pengendalian internal untuk periode 2023 telah dilaksanakan secara efektif, mencakup seluruh unsur penerapan sesuai standar yang digunakan. Temuan yang didapat melalui evaluasi telah dilaporkan dan mendapat pembahasan untuk segera ditindaklanjuti guna menjamin kualitas pengendalian internal dapat terjaga secara berkesinambungan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal pada 2023, manajemen PT PELNI (Persero) menilai bahwa Perseroan telah melaksanakan pengendalian internal dengan optimal, melalui perangkat infrastruktur dan kebijakan yang memadai. Terdapat sejumlah catatan sebagai *area improvement,* untuk segera ditindaklanjuti oleh SPI Perseroan pada penerapan pengendalian internal di periode 2024. Manajemen Perseroan optimistis Sistem Pengendalian Internal yang terlaksana secara lebih baik akan berperan sebagai perangkat yang kuat guna mendukung sejumlah aksi korporasi yang akan dilakukan pada tahun mendatang.

Management. Every level of the organization is obliged to enhance a culture of risk awareness.

The Internal Audit Unit (SPI) is responsible for reviewing risk controls in all activities within the work units. To maintain the effectiveness of control, SPI collaborates with the Risk Management and QSHE Department in conducting audits in units, projects, and the Central Office Bureau.

The results of the internal control evaluation are submitted to the Board of Directors for follow-up and monitoring. Based on these evaluation results, the Company ensures that the implementation of internal controls for the period 2023 has been carried out effectively, covering all implementation elements in accordance with the standards used. Findings from the evaluation have been reported and discussed for immediate follow-up to ensure the quality of internal controls is continuously maintained.

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Based on the evaluation conducted on the implementation of the Internal Control System in 2023, the management of PT PELNI (Persero) assesses that the Company has optimally implemented internal controls through adequate infrastructure and policies. There are several notes as areas for improvement to be immediately followed up by the Company's SPI in the implementation of internal controls in the 2024 period. The Company's management is optimistic that a better-implemented Internal Control System will serve as a strong tool to support several corporate actions to be undertaken in the coming year.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) memahami pentingnya pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan berkesinambungan. Mengingat pentingnya kontribusi manajemen risiko bagi keberhasilan Perusahaan, maka PT PELNI (Persero) dalam mengelola risiko Perusahaan melakukan integrasi antara *Balance Scorecard* dengan *Risk Management Based on* ISO 31000:2018 sehingga dapat ditemukenali dan dilakukan pengelolaan *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan yang berkualitas untuk mendorong kinerja organisasi dengan menetapkan *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai *early warning system* untuk mengendalikan ancaman terhadap pencapaian *strategic objective* Perusahaan. Sehingga dapat dikendalikan dan diminimalisir faktor-faktor penghambat kegagalan pencapaian sasaran strategis Perusahaan.

Di samping itu, tetap dilakukan *risk assessment* terhadap risiko-risiko lain yang berbasis di luar risiko integrasi tersebut. Risiko-risiko di luar *integrated* BSC tersebut ditetapkan sebagai *Corporate Risk*. Untuk mendapatkan proses manajemen risiko yang efektif, sebuah standar kerangka kerja manajemen risiko perlu dibangun dan diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Oleh sebab itu, semua pemilik risiko maupun fasilitator manajemen risiko diharuskan untuk melaksanakan kerangka kerja dan proses manajemen risiko dengan basis prioritas. Direksi menetapkan risiko-risiko utama sebagai prioritas, yaitu risiko yang mempunyai dampak besar jika tidak ditangani secara baik. Penanganan risiko utama dapat ditambahkan seiring dengan meningkatnya kemampuan internal dalam menangani risiko.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) understand the importance of implementing Corporate Risk Management in an effort to achieve the company's objectives effectively and sustainably. Given the significant contribution of risk management to the company's success, PT PELNI (Persero) integrates the Balanced Scorecard with Risk Management based on ISO 31000:2018. This integration allows for the identification and management of quality Key Performance Indicators (KPI) to drive organizational performance by establishing Key Risk Indicators (KRI) as an early warning system to control threats to the achievement of the company's strategic objectives. Consequently, this helps control and minimize factors that could impede the achievement of the company's strategic goals.

In addition, risk assessments are conducted for other risks that fall outside of this integration. Risks outside of the integrated BSC are designated as Corporate Risks. To achieve an effective risk management process, a standard risk management framework needs to be built and applied consistently and comprehensively. Therefore, all risk owners and risk management facilitators are required to implement the risk management framework and process based on priority. The Board of Directors prioritizes major risks, which are those that would have a significant impact if not properly addressed. The handling of major risks can be expanded as internal capabilities in risk management improve.

Basis Integrasi Balance Scorecard dengan Enterprise Risk Management
Basis Integrasi Balance Scorecard dengan Enterprise Risk Management

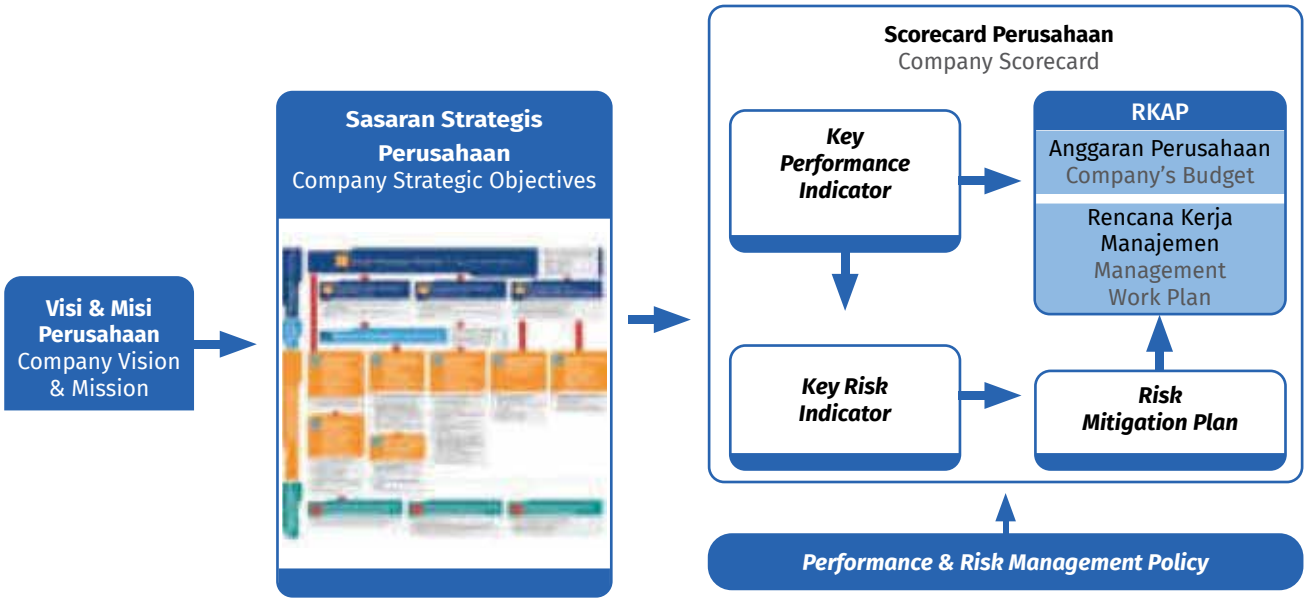

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan manajemen risiko di PT PELNI (Persero) dilakukan berdasarkan ISO 31000: 2018 yang tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.14/03/SK/HKO.01/2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 PT PELNI (Persero). Pedoman Manajemen Risiko mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian yang memadai (*reasonable assurance*) dalam mencapai tujuan perusahaan, menjaga dan meningkatkan nilai dari pemegang saham. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran risiko di seluruh lapisan organisasi, membangun ketahanan dan melakukan mitigasi risiko serta menjaga risiko yang tersisa (*residual risk*) pada tingkat yang dapat ditoleransi (*tolerable level*).

Ruang lingkup dari Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan berlaku untuk seluruh pihak dan seluruh aktivitas usaha yang dilakukan oleh PT PELNI (Persero). Hal ini dimaksudkan agar daya saing (*competitiveness*) dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perusahaan dapat selalu terjaga.

RISK MANAGEMENT GOVERNANCE

Risk management at PT PELNI (Persero) is conducted based on ISO 31000: 2018, as outlined in the Risk Management Guidelines in accordance with the Board of Directors Decree Number: 01.14/03/SK/HKO.01/2022 concerning ISO 31000:2018-based Risk Management Guidelines for PT PELNI (Persero). The Risk Management Guidelines aim to provide reasonable assurance in achieving the company's objectives, preserving and enhancing shareholder value. This is achieved by increasing risk awareness across all levels of the organization, building resilience, mitigating risks, and maintaining residual risks at a tolerable level.

The scope of the Company's Risk Management Guidelines applies to all parties and all business activities conducted by PT PELNI (Persero). This ensures the company's competitiveness and business continuity are always maintained.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Three Lines Model
Three Lines Model

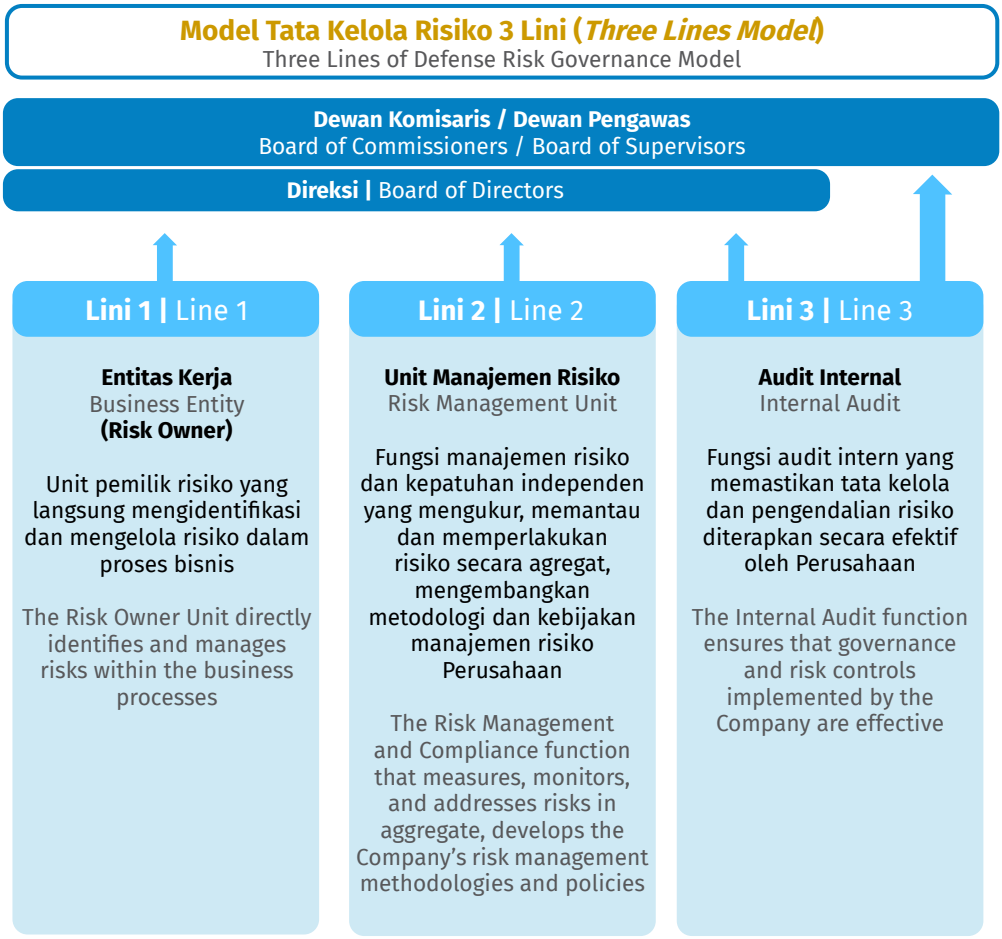

Penerapan *Three Lines Model* pada PT PELNI (Persero), sesuai dengan Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/ DKU.MBU/05/2023.

The implementation of the Three Lines Model at PT PELNI (Persero) follows the Technical Guidelines for the Composition and Qualification of Risk Management Organs within State-Owned Enterprises, Number SK-3/DKU.MBU/05/2023.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Struktur Manajemen Risiko di PT PELNI (Persero)
Risk Management Structure at PT PELNI (Persero)

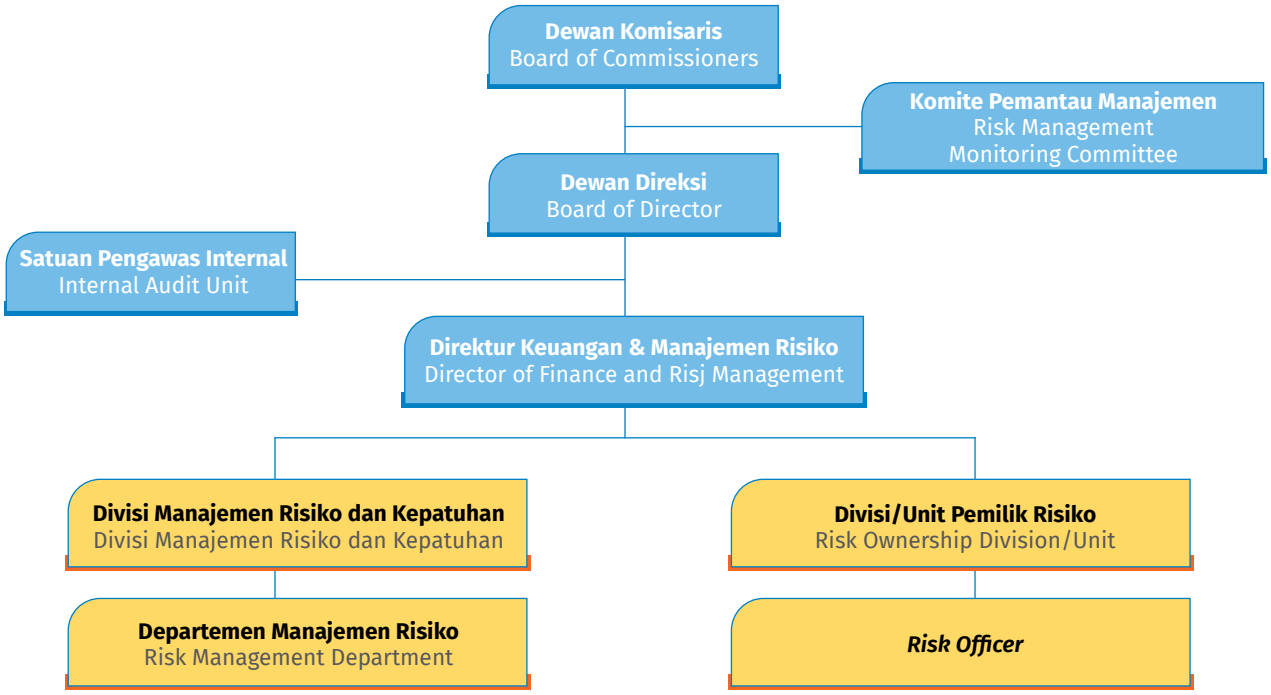

Dari masing-masing struktur manajemen risiko tersebut, memiliki peran dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. **Dewan Komisaris**
   a. Memberikan arahan atas kebijakan Manajemen Risiko.
   b. Melaksanakan pengawasan dan memberikan saran perbaikan kepada Dewan Direksi atas penerapan kebijakan Manajemen Risiko.
2. **Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR)**
   Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk memperkuat praktik pengawasan terhadap kebijakan dan sistem manajemen risiko di Perseroan sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Komite Pemantau Manajemen Risiko bertugas untuk:
   a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
   b. Melakukan diskusi dengan Dewan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan.
   c. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero)

Each structure within the risk management system has the following roles and responsibilities:

1. **Board of Commissioners**
   a. Provide guidance on Risk Management policies.
   b. Supervise and provide improvement suggestions to the Board of Directors on the implementation of Risk Management policies.
2. **Risk Management Monitoring Committee (KPMR)**
   The establishment of the Risk Management Monitoring Committee is part of the Company's efforts to strengthen oversight practices over risk management policies and systems as part of Good Corporate Governance (GCG) implementation. The Committee's duties include:
   a. Providing input to the Board of Commissioners on improving risk management related to controlling risks across all Company areas before approval by the Board of Commissioners.
   b. Discussing with the Board of Directors or work units related to risk management, if necessary.
   c. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

3. **Dewan Direksi**
   a. Menetapkan Kebijakan, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
   b. Menetapkan *risk appetite* dan batas toleransi risiko yang digunakan sebagai ukuran kriteria nilai risiko.
   c. Bertanggung jawab atas penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.
   d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero)
4. **Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko**
   a. Memastikan bahwa organisasi yang dibentuk untuk mengelola Manajemen Risiko telah berfungsi secara independen.
   b. Melaksanakan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi asesmen risiko dan kecukupan implementasi *system*.
   c. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero)
5. **Satuan Pengawas Intern (SPI)**
   a. Memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko.
   b. Berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dan proses bisnis yang dilakukan oleh *risk owner* telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur kerja, dan manual yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk di dalamnya kebijakan manajemen risiko.
   c. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).
6. **Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan**
   a. Menyusun dan mengusulkan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko kepada Dewan Direksi.
   b. Membangun arsitektur, SOP dan strategi manajemen risiko.
   c. Memastikan proses manajemen risiko berjalan dengan efektif di seluruh lingkungan perusahaan.
   d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).
7. **Departemen Manajemen Risiko**
   a. Melakukan penjabaran *risk appetite* dan *risk tolerance level* korporat.
   b. Melakukan penjabaran *risk tolerance* ke *level* unit kerja pemilik risiko sebagai acuan bagi pemilik risiko dalam memutuskan tentang seberapa besar risiko yang dapat diambil.
   c. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua upaya pengelolaan risiko diseluruh Perusahaan.
   d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).

3. **Board of Directors**
   a. Establish written and comprehensive Risk Management Policies and Guidelines.
   b. Set the risk appetite and risk tolerance limits used as criteria for risk value measurement.
   c. Responsible for implementing Risk Management Policies.
   d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).
4. **Director of Finance and Risk Management**
   a. Ensure that the organization formed to manage Risk Management functions independently.
   b. Conduct periodic evaluations of Risk Management policies to ensure the accuracy of risk assessment methodologies and the adequacy of system implementation.
   c. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).
5. **Internal Audit Unit (SPI)**
   a. Oversee the implementation of risk management.
   b. Ensure that all activities and business processes carried out by risk owners comply with the policies, standards, work procedures, and manuals set by the Board of Directors, including risk management policies.
   c. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).
6. **Risk Management and Compliance Division**
   a. Develop and propose Risk Management Policies, Guidelines, and Procedures to the Board of Directors.
   b. Build the architecture, SOPs, and risk management strategies.
   c. Ensure the risk management process runs effectively throughout the company.
   d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).
7. **Risk Management Department**
   a. Articulate the corporate risk appetite and risk tolerance levels.
   b. Translate risk tolerance into the work unit level as a reference for risk owners in deciding the extent of acceptable risk.
   c. Coordinate and integrate all risk management efforts throughout the Company.
   d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

8. **Divisi / Unit Pemilik Risiko**
   a. Mengelola risiko-risiko yang ada di unit kerjanya.
   b. Mengendalikan pengendalian risiko dan melaporkan hasilnya secara berkala.
   c. Bertanggung jawab atas kerugian dan risiko yang terjadi sebagai akibat penyimpangan dan /atau pelanggaran terhadap keputusan Direksi.
   d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).
9. ***Risk Officer***
   a. Merupakan fungsi yang diintegrasikan dengan *risk performance management officer* pada jabatan setingkat manager serta dikukuhkan melalui SK Direksi.
   b. Penugasan fungsi *risk officer* dapat diberikan secara berkala.
   c. Menjadi pendamping para *risk owner* dan unit kerja untuk membantu proses implementasi manajemen risiko.
   d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).
10. **Seluruh Pegawai**
    Seluruh pegawai mempunyai peran dalam mewujudkan Manajemen Risiko yang efektif dan secara aktif berpartisipasi mengidentifikasi risiko potensial yang ada di lingkungannya dan membantu melaksanakan tindakan Penanganan Risiko yang tepat.

Dalam pengelolaan risiko di Perusahaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Membangun Kesadaran dan Budaya Risiko**
   Risiko dapat timbul karena pemilik risiko tidak memahami atau tidak mengetahui secara utuh aktifitas proses bisnis yang dijalankan. Untuk jangka panjang, manajemen risiko dengan pendekatan kesadaran dan budaya risiko jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan dengan cara lain.
2. **Risiko Sebagai Tanggungjawab Bersama**
   Sadar risiko merupakan bagian dari satu rangkaian proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang manajemen risiko, dari pengetahuan lalu timbul kesadaran, terakhir menjadi komitmen dilaksanakan. Komitmen yang terus menerus diperagakan atau dilaksanakan akan menjadi budaya.
3. **Integrasi Manajemen Risiko dengan Manajemen Kinerja**

   Dalam Prinsip Risk Management ISO 31000:2018, tujuan Manajemen Risiko adalah menciptakan Nilai (*Value Creation*). Dalam upaya mencapai hal tersebut, maka melalui manajemen risiko dilakukan suatu langkah

8. **Risk Owner Division/Unit**
   a. Manage risks within their respective work units.
   b. Control risks and report results periodically.
   c. Responsible for losses and risks arising from deviations and/or violations of Board of Directors' decisions.
   d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).
9. **Risk Officer**
   a. Integrated with the risk performance management officer at the managerial level and formalized through a Board of Directors Decree.
   b. The assignment of the Risk Officer function can be conducted periodically.
   c. Assist risk owners and work units in the risk management implementation process.
   d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).
10. **All Employees**
    Play a role in realizing effective Risk Management and actively participate in identifying potential risks in their environment and helping implement appropriate Risk Handling actions.

In managing risk, the Company considers the following aspects:

1. **Building Risk Awareness and Culture**
   Risk can arise because the risk owner does not fully understand or know the business process activities being carried out. In the long term, risk management through awareness and risk culture is far more effective than other approaches.
2. **Risk as a Shared Responsibility**
   Risk awareness is part of a process that begins with knowledge about risk management, leading to awareness, and ultimately becoming a commitment. Continuous commitment will turn into a culture.
3. **Integration of Risk Management with Performance Management**
   According to the Risk Management Principle ISO 31000:2018, the goal of Risk Management is to create Value (Value Creation). To achieve this, strategic steps such as integrating the Balance Scorecard with Risk Management

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

strategis yaitu proses integrasi antara *Balance Scorecard* dengan *Risk Management* ISO 31000:2018. Proses integrasi *performance* yang menggunakan alat *measurement*-nya KPI dengan *Risk Management* alat *measurement*-nya KRI maka Perusahaan akan mampu mencapai *Strategic Objective* Perusahaan secara efektif dan merubah risiko - risiko yang ada menjadi peluang bisnis Perusahaan.

4. **Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja Mempunyai Orientasi kepada Sasaran Strategis Perusahaan dan Unit Kerja**
   Manajemen kinerja mendorong *Critical Success Factor* untuk pencapaian Sasaran Strategis, sedangkan Manajemen Risiko adalah mengendalikan *Critical Risk Factor* agar Sasaran Strategis selamat dari ancaman risiko.
5. **Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based* Audit)**
   Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko - risiko baik strategis, finansial, operasional, regulasi, dan lainnya yang dihadapi oleh Perusahaan. Pendekatan berbasis risiko ini meliputi kegiatan *assurance* dan konsultasi, dimana kesuksesan kedua kegiatan tersebut ditentukan oleh Manajemen Risiko, *internal control,* dan *Good Corporate Governance.*
6. **Anggaran Berbasis Risiko (*Risk-Based Budgetting*)**
   Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada tingkat divisi sudah harus mempertimbangkan profil risiko di unitnya masing-masing yang disusun oleh masing-masing divisi. Demikian pula pada tingkat Direktorat dan Korporat, RJPP dan RKAP yang disusun oleh Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan Divisi Perbendaharaan juga mempertimbangkan profil risiko di tingkat Direktorat dan Korporat.
7. **Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)**
   Risk appetite atau selera risiko merupakan besaran risiko yang bersedia diambil Perusahaan dalam rangka mencapai target komersial yang ditetapkan. Toleransi risiko adalah besaran risiko tertentu yang boleh melewati *risk appetite* sampai limit tertentu. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan wajib dibuat dengan memperhatikan batasan dari selera risiko dan toleransi risiko untuk memastikan Perusahaan dalam melaksanakan strategi tidak melampaui limit risiko.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan pembaharuan pedoman manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang

ISO 31000:2018 are taken. By integrating performance measurement tools (KPIs) with Risk Management measurement tools (KRIs), the Company can achieve its Strategic Objectives effectively and turn existing risks into business opportunities.

4. **Risk Management and Performance Management Oriented to Strategic Objectives**
   Performance management encourages Critical Success Factors for achieving Strategic Objectives, while Risk Management controls Critical Risk Factors to protect Strategic Objectives from risk threats.
5. **Risk-Based Audit**
   This audit approach focuses on evaluating strategic, financial, operational, regulatory, and other risks faced by the company. The risk-based approach includes assurance and consulting activities, where the success of both is determined by Risk Management, internal control, and Good Corporate Governance.
6. **Risk-Based Budgeting**
   The preparation of the Work Plan and Budget at the divisional level must consider the risk profile of each unit, compiled by each division. Similarly, at the Directorate and Corporate levels, the RJPP and RKAP prepared by the Risk Management and Compliance Division and the Treasury Division must consider the risk profile at the Directorate and Corporate levels.
7. **Setting Risk Appetite and Risk Tolerance**

   Risk appetite is the amount of risk the Company is willing to take to achieve set commercial targets. Risk tolerance is the specific amount of risk that can exceed the risk appetite up to a certain limit. The Annual Work Plan must be made with regard to the risk appetite and risk tolerance limits to ensure that the Company does not exceed risk limits while implementing its strategy.

RISK MANAGEMENT POLICY FOR 2023

In 2023, the Risk Management and Compliance Division updated the ISO 31000:2018-based risk management guidelines, in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

disesuaikan dengan proses bisnis korporat, untuk proses penyempurnaan ketentuan manajemen risiko di Perusahaan yang sesuai dengan prinsip utama manajemen risiko untuk menciptakan dan melindungi nilai Perusahan. PT PELNI (Persero) tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap relevansi pedoman manajemen risiko dengan efektifitas pengelolaan risiko yang dipraktikkan dalam Perusahaan.

KAJIAN RISIKO PERUSAHAAN

Identifikasi dan penanganan risiko bukan hanya dilakukan terhadap risiko-risiko utama, tetapi juga terhadap risiko lainnya yang bersifat dinamis yang dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk terkait kajian risiko terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha baru dengan nilai di atas Rp 50 miliar.
2. Pengembangan usaha yang telah ada dengan nilai investasi di atas Rp 100 miliar.
3. Aktivitas atau inisiatif baru yang dapat mengakibatkan korban jiwa.
4. Inisiatif usaha lainnya jika diminta oleh pemilik risiko.

Kajian risiko dapat dibuat secara internal atau eksternal, tergantung kompleksitas inisiatif usaha dan ketersediaan SDM yang berkompeten di Perusahaan dengan Departemen Manajemen Risiko bertugas membuat perencanaan awal dalam pembuatan risk register sebagai langkah strategis dalam mencapai sasaran/tujuan. Selama 2023, telah diterbitkan 9 (sembilan) kajian risiko yaitu :

1. Kajian Risiko Pengadaan Kapal Tongkang
2. Kajian Risiko Komersialisasi Kapal Logistik Nusantara
3. Kajian Risiko *Internal Shipping Management*
4. Kajian Risiko *Shipping Holding*
5. Kajian Risiko *Cold Chain Management*
6. Kajian Risiko Pengadaan Timbangan Overbagasi
7. Kajian Risiko Pelepasan Kapal Perintis Tahun 2024
8. Kajian Risiko Optimalisasi Sisa Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2015 untuk Pengadaan Kapal Roro
9. Kajian Risiko Pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025

TAKSONOMI RISIKO KORPORAT PT PELNI (PERSERO)

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. PT PELNI (Persero) telah melakukan

This update aligns with the corporate business processes to refine the company's risk management provisions, in line with the main principle of risk management to create and protect the Company's value. PT PELNI (Persero) continues to evaluate the relevance of risk management guidelines with the effectiveness of risk management practices within the Company.

COMPANY RISK REVIEW

Risk identification and handling are not only carried out for major risks but also for other dynamic risks that can arise at any time, including risk assessments related to the following:

1. New business development with a value above IDR 50 billion.
2. Existing business development with an investment value above IDR 100 billion.
3. New activities or initiatives that could result in casualties.
4. Other business initiatives if requested by the risk owner.

Risk assessments can be conducted internally or externally, depending on the complexity of the business initiative and the availability of competent human resources in the Company. The Risk Management Department is responsible for creating initial plans for the risk register as a strategic step to achieve targets/objectives. In 2023, nine risk assessments were issued:

1. Risk Assessment of Barge Procurement
2. Risk Assessment of Commercialization of Nusantara Logistics Ships
3. Risk Assessment of Internal Shipping Management
4. Risk Assessment of Shipping Holding
5. Risk Assessment of Cold Chain Management
6. Risk Assessment of Overbaggage Scale Procurement
7. Risk Assessment of Pioneer Ship Disposal in 2024
8. Risk Assessment of Optimizing the Remaining State Capital Injection Funds (PMN) of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the 2015 Fiscal Year for Roro Ship Procurement
9. Risk Assessment of State Capital Injection Proposal (PMN) for the 2025 Fiscal Year

CORPORATE RISK TAXONOMY OF PT PELNI (PERSERO)

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises,

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

penyusunan Taksonomi *corporate risk* yang diturunkan dan diselaraskan dari T1 (Tema Risiko), T2 (Kategori Risiko) hingga T3 (Peristiwa Risiko). Penyusunan taksonomi yang telah disusun, seperti pada gambar di bawah ini:

PT PELNI (Persero) has developed a corporate risk taxonomy derived and aligned from T1 (Risk Theme), T2 (Risk Category) to T3 (Risk Event). The taxonomy is structured as shown in the diagram below:

PT Pelni (Persero)	**Tema Risiko** Risk Theme **(T1)**		**KATEGORI RISIKO** Risk Category **(T2)**		**PERISTIWA RISIKO** | Risk Event **(T3)**					
	7	*Portfolio Performance Risk*	6	*Subsidiary Risk*	16	PID1	Risiko Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi PT PID Risks of Not Achieving Consolidated Profit Targets of PT PID	1	PID2	Risiko Pemutusan Kontrak sebagai Penyedia Bahan Makanan oleh PT PELNI (Persero) Risk of Contract Termination as a Food Supplier by PT PELNI (Persero)
					8	PID3	Risiko Penilaian *Good Corporate Governance* Tidak Mencapai Target Risk of Not Achieving Good Corporate Governance Assessment Targets	1	SBN1	Risiko Ketidaktercapaian Target Laba PT SBN Risk of PT SBN's Profit Target Not Being Achieved
					2	SBN2	Risiko Kontribusi *Non-Captive* Belum Optimal Risk of Suboptimal Non-Captive Contribution	4	SBN3	Risiko Tidak Tercapainya Target Skor GCG Risk of GCG Score Target Not Being Achieved
			11	*Strategic Business Unit Risk*	1	GS1	Risiko Tidak Tercapainya Target Laba SBU Galangan Surya Risk of Not Achieving Profit Targets for SBU Surya Shipyard	7	GS2	Risiko Sengketa Status Pemilikan Lahan yang Tumpang Tindih Risk of Land Ownership Disputes Due to Overlapping Claims
					1	GS3	Risiko Tidak Terpenuhinya Standar ISO 9001 Risk of Not Meeting ISO 9001 Standards	9	GS4	Risiko *Docking* Kapal Tidak Terpenuhi Risk of Unmet Ship Docking Requirements
					7	HB1	Risiko Praktek Manajemen Perusahaan Tidak Sesuai Standar Risk of Non-Standard Corporate Management Practices	25	HB2	Risiko Ketidaktercapaian Target Laba Penjualan SBU Hotel Bahtera Risk of Hotel Bahtera SBU Sales Profit Target Not Being Achieved
					25	HB3	Risiko Target Hunian Hotel Tidak Terpenuhi Risk of Not Meeting Hotel Occupancy Targets			
			7	*Pareto Branch Risk*	5	PB1	Risiko Ketidaktercapaian Pendapatan Cabang Risk of Branch Revenue Shortfalls	2	PB2	Risiko Ketidakakuratan Penyetoran Penghasilan Cabang Risk of Inaccurate Branch Income Reporting
					8	PB4	Risiko Sengketa Status Kepemilikan Lahan yang Tumpang Tindih Risk of Overlapping Land Ownership Disputes	12	PB5	Risiko Pendapatan Angkutan *Cargo* Cabang Tidak Dapat Dipenuhi Risk of Cargo Transportation Revenue Not Being Met by the Branch
					4	PB6	Risiko Ketidaktercapaian Pendapatan Pasabi Cabang Tidak Dapat Dipenuhi Risk of Not Meeting Branch Pasabi Revenue Targets			

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

PT Pelni (Persero)	Tema Risiko Risk Theme (T1)		KATEGORI RISIKO Risk Category (T2)		PERISTIWA RISIKO | Risk Event (T3)					
					1	FC1	Risiko *Foreign Exchange* dan *Interest Rate* Risk of Foreign Exchange and Interest Rate	5	FC2	Risiko Utang Tak Tertagih Risk of Uncollectible Debt
					4	FC3	Risiko Ketidaktersediaan *Cash-On-Hand* Risk of Insufficient Cash-On-Hand	4	FC4	Risiko Tidak Tercapainya Kinerja TJSL Risk of TJSL Performance Not Being Achieved
			4	*Financial Corporate Risk*	1	FC5	Risiko Penyaluran TJSL Tidak Mencapai Target Risk of Not Meeting Corporate Social Responsibility Distribution Targets	6	FC6	Risiko Laporan Keuangan Tidak Akurat & Tidak Tepat Waktu Risk of Inaccurate and Untimely Financial Reporting
					2	FC7	Risiko Piutang Jasa Keagenan Tidak Tertagih Risk of Uncollected Agency Service Receivables			
	5	*Sustainability Risk*	4	*Public Service Obligation and Subsidies Risk*	9	PSO1	Risiko Koreksi Atas Penagihan PSO Risk of Corrections on PSO Billing	1	PSO2	Risiko Pengurangan Anggaran PSO Risk of PSO Budget Reductions
					1	PSO3	Risiko Keterlambatan Pencairan PSO Risk of Delays in PSO Disbursement	8	PSO4	Risiko Koreksi Atas Penagihan Subsidi Risk of Corrections to Subsidy Billing
					1	PSO5	Risiko Pengurangan Anggaran Subsidi Risk of Subsidy Budget Reductions	2	PSO6	Risiko Keterlambatan Pencairan Subsidi Risk of Subsidy Disbursement Delays
			6	*Service Performance Obligation and Subsidies Risk*	1	SPP1	Risiko Pemenuhan Penugasan Kapal Penumpang dan Perintis Tidak Terpenuhi Risk of Unfulfilled Passenger and Pioneer Ship Assignments	3	SPP2	Risiko Kualitas Layanan di Kapal Penumpang Tidak Memenuhi Standar Layanan Makan & Fasilitas Kenyamanan Risk of Passenger Ship Service Quality Not Meeting Meal and Comfort Facility Standards
					22	SPP3	Risiko Layanan Jasa Keagenan Tidak Optimal Risk of Suboptimal Agency Service Performance	1	SPP4	Risiko Pemenuhan Penugasan Kapal Tol Laut & Ternak Tidak Terpenuhi Risk of Unmet Assignment Requirements for Tol Laut and Livestock Ships
					3	SPP5	Risiko Layanan Usaha Angkutan Barang Tidak Optimal Risk of Suboptimal Freight Transport Business Performance	1	SPP6	Risiko Rendahnya Layanan Usaha *Lifestyle* & MICE Risk of Low Quality in Lifestyle & MICE Business Services
	9	*General Business Risk*	6	*Human Resource Risk*	1	HR1	Risiko *Over Budget* Biaya SDM Risk of HR Cost Over Budget	1	HR2	Risiko Pemenuhan SDM Risk of Inadequate Human Resource Fulfillment
					8	HR3	Risiko Pengembangan Sumber Daya Manusia Risk of Human Resource Development	7	HR4	Risiko Keterikatan Pegawai Rendah Risk of Low Employee Engagement

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

PT Pelni (Persero)	Tema Risiko Risk Theme (T1)	KATEGORI RISIKO Risk Category (T2)		PERISTIWA RISIKO | Risk Event (T3)					
				7	HR5	Risiko Kapasitas dan Kapabilitas ABK Risk of Crew Capacity and Capability	7	HR6	Risiko Tidak Terpenuhinya Jumlah Pegawai Laut Sesuai Dengan Kebutuhan (Formasi) Risk of Not Meeting the Required Number of Maritime Employees (Formation
		11	*Branding Image Risk*	11	BI1	Risiko *Brand Corporate Awareness* Risk of Corporate Brand Awareness			
		6	*Compliance Risk*	3	CR1	Risiko Tertindaklanjutinya AOI GCG Risk of Follow-Up on AOI GCG	1	CR2	Risiko Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi Tidak Optimal Risk of Suboptimal Follow-Up on Gratification Reports
				12	CR3	Risiko Pelaksanaan *Additional* Audit untuk Mempertahankan Sertifikat Keselamatan Kapal Risk of Additional Audit Implementation to Maintain Ship Safety Certificates	3	CR4	Risiko *Loss Event Database* Kecelakaan dan Insiden Kapal Tidak Terdokumentasi Risk of Loss Event Database for Ship Accidents and Incidents Not Being Documented
				3	CR5	Risiko Pengendalian Internal yang Tidak Efektif Risk of Ineffective Internal Controls	17	CR6	Risiko Klaim Atas Kerusakan Lingkungan akibat Kecelakaan Kapal Risk of Claims for Environmental Damage Due to Ship Accidents
				1	CR7	Risiko Tidak Mendapatkan ISO 37001:2016 SMAP Risk of Not Obtaining ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification			
		10	*Law Risk*	8	LR1	Risiko Keterlambatan Penyelesaian Litigasi dan Non Litigasi Perkara Hukum Risk of Delays in Resolving Litigation and Non-Litigation Legal Matters	12	LR2	Risiko Penyelesaian Aset Bermasalah Tidak Optimal Risk of Suboptimal Resolution of Problematic Assets
	5 *Operation Risk*	7	*Fleet Reliabitlity Risk*	3	FR1	Risiko *Lead Time* Pengadaan Suku Cadang Lama Risk of Prolonged Lead Time for Spare Parts Procurement	4	FR2	Risiko Kerusakan Perlimbungan Risk of Shipyard Damage
				12	FR3	Risiko *Crane* Tidak Dapat Digunakan Secara Optimal Risk of Inability to Optimize Crane Usage	12	FR4	Risiko Perencanaan dan Perawatan yang Tidak Memadai Risk of Inadequate Planning and Maintenance
				1	FR5	Risiko Performa/Speed Kapal Tidak Dapat Memenuhi Target Voyage Risk of Ship Performance/ Speed Not Meeting Voyage Targets			
		10	*Marketing Risk*	1	MR1	Risiko Tidak Terpenuhinya Penjualan Usaha *Lifstyle* & MICE Risk of Unmet Sales Targets for Lifestyle & MICE Business	1	MR2	Risiko Pemasaran Ruang Komersial Kapal Tidak Optimal Risk of Suboptimal Marketing of Ship Commercial Space

PT Pelni (Persero)	Tema Risiko Risk Theme (T1)	KATEGORI RISIKO Risk Category (T2)		PERISTIWA RISIKO | Risk Event (T3)					
	5 *Strategic Risk*			14	MR3	Risiko *Load Factor* di Kapal Barang Tidak Optimal Risk of Suboptimal Load Factor on Cargo Ships	1	MR4	Risiko *Load Factor* di Kapal Ternak Tidak Optimal Risk of Suboptimal Load Factor on Livestock Ships
				19	MR5	Risiko *Load Factor* Kontainer Kapal Penumpang Tidak Optimal Risk of Suboptimal Load Factor for Passenger Ship Containers	22	MR6	Risiko Pemasaran Jasa Keagenan Tidak Optimal Risk of Suboptimal Marketing of Agency Services
				2	MR7	Risiko Target *Pax Factor* Penumpang Tidak Terpenuhi Risk of Not Meeting Passenger Pax Factor Targets	2	MR8	Risiko Tidakterpenuhinya Kontrak Baru Muatan di Kapal Penumpang Risk of Not Meeting New Cargo Contracts on Passenger Ships
				25	MR9	Risiko Target Penghasilan *Charter* Tidak Tercapai Risk of Not Achieving Charter Income Targets			
		1	*Ship Accident Risk*	1	SA1a	Risiko Kecelakaan dan Insiden di Kapal (Divisi Teknik) Risk of Accidents and Incidents on Ships (Technical Division)	1	SA1b	Risiko Kecelakaan dan Insiden di Kapal (Divisi Nautika) Risk of Accidents and Incidents on Ships (Nautical Division)
				9	SA2	Risiko Insiden Kecelakaan Kapal Risk of Ship Accident Incidents			
		1	*Fuel Oil Risk*	1	FO1	Risiko Operasional Penggunaan BBM Tinggi Risk of High Fuel Usage Operations	1	FO2	Risiko Kehilangan BBM/ Pencurian BBM Risk of Fuel Loss/Theft
				1	FO3	Risiko Penggunaan BBM Biodiesel B35 Risk of Using B35 Biodiesel Fuel			
		6	*Idle Asset Risk*	4	IA1	Risiko Komersialisasi Gedung dan Aset Tidak Optimal Risk of Suboptimal Commercialization of Buildings and Assets	9	IA2	Risiko Terjadinya Kerusakan Bangunan Gedung Risk of Building Damage
				7	IA3	Risiko Keamanan Gedung Kantor Pusat Risk of Headquarters Building Security	1	IA4	Risiko Keamanan Gedung Kantor Cabang Risk of Branch Office Building Security
				7	IA5	Risiko Keamanan Kapal Risk of Ship Security			
		3	*Information Technology Risk*	3	IT1	Risiko Kegagalan dalam Mengintegrasikan Aplikasi *Commercial* Risk of Failure to Integrate Commercial Applications			
		6	*Investment Risk*	1	IV1	Risiko Investasi Alat Penunjang Tertunda Risk of Delayed Investment in Supporting Equipment	4	IV2	Risiko Pengadaan Kapal RoRo Gagal Terlaksana Risk of RoRo Ship Procurement Failure
				1	IV3	Risiko Pengadaan Kapal Tongkang dan *Tugboat* gagal Terlaksana Risk of Failed Procurement of Barges and Tug Boats	15	IV4	Risiko Tidak Dilakukan Peremajaan Kapal Menggunakan Dana PMN Risk of No Ship Renewal Using PMN Funds

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

PT Pelni (Persero)	Tema Risiko Risk Theme (T1)	KATEGORI RISIKO Risk Category (T2)		PERISTIWA RISIKO | Risk Event (T3)					
		5	*Innovation Risk*	5	IN1	Risiko Modifikasi Kapal Gagal Terlaksana Risk of Failed Ship Modifications	4	IN2	Risiko Ketidaktercapaian Sasaran RMI Dalam Implementasi Manajemen Risiko Risk of RMI Target Not Being Achieved in Risk Management Implementation
		3	*Corporate Planning Risk*	3	CP1	Risiko Kegagalan *Cascading* RJPP ke dalam RKAP Risk of Failure to Cascade the RJPP into the RKAP	3	CP2	Risiko Ketidaktercapaian Kinerja Korporat Risk of Corporate Performance Not Being Achieved
				5	CP3	Risiko Tidak Terealisasinya Program Kerja Transformasi Risk of Unfulfilled Transformation Work Program	1	CP4	Risiko SOP Tidak *Update* denga Kondisi *Eksisting* Risk of SOPs Not Being Updated to Current Conditions

Keterangan Warna :
merah = *high*
orange = *modetare to high*
kuning = *moderate*
hijau muda = *low to moderate*
hijau tua = *low*

Color Key:
Red = High
Orange = Moderate to High
Yellow = Moderate
Light Green = Low to Moderate
Dark Green = Low

Berdasarkan dari hasil Taksonomi triwulan IV Tahun 2023, terdapat 5 peristiwa risiko yang menunjukkan level *high*, 2 peristiwa risiko yang menunjukkan level *moderate to high* dan 6 peristiwa risiko yang menunjukkan level *moderate.* Yang kemudian akan dilakukan agregasi dengan seluruh risiko korporat PT PELNI (Persero), yang menunjukkan pada hasil Taksonomi triwulan IV 2023 masuk dalam level ***low to moderate***.

Based on the Taxonomy results for Q4 2023, there were 5 risk events classified as high level, 2 risk events classified as moderate to high level, and 6 risk events classified as moderate level. These will then be aggregated with all corporate risks of PT PELNI (Persero), showing that the Taxonomy results for Q4 2023 fall within the **low to moderate** level.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Pada awal tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 82 deskripsi risiko yang terdiri dari semua Divisi, SBU dan Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) dan 73 deskripsi risiko dari 17 Cabang Pareto.

Departemen Manajemen Risiko telah melakukan pemetaan terhadap risiko yang dihadapi selama tahun 2023. Total dari 155 deskripsi risiko yang ada di awal tahun 2023, terdapat 19 Kategori risiko PT PELNI (Persero), yaitu:

1. *Subsidiary Risk*
2. *Strategic Business Unit Risk*
3. *Pareto Branch Risk*
4. *Financial Corporate Risk*
5. *Public Service Obligation and Subsidies Risk.*
6. *Service Performance of Passengers Transport Risk*
7. *Human Resources Risk*
8. *Branding Image Risk*
9. *Compliance Risk*

TYPES OF RISKS AND THEIR MANAGEMENT

At the beginning of 2023, 82 risk descriptions were established, covering all Divisions, SBUs, and Subsidiaries of PT PELNI (Persero), along with 73 risk descriptions from 17 Pareto Branches.

The Risk Management Department has mapped the risks faced throughout 2023. Of the 155 risk descriptions at the beginning of 2023, there are 19 risk categories for PT PELNI (Persero), namely:

1. Subsidiary Risk
2. Strategic Business Unit Risk
3. Pareto Branch Risk
4. Financial Corporate Risk
5. Public Service Obligation and Subsidies Risk
6. Service Performance of Passengers Transport Risk
7. Human Resources Risk
8. Branding Image Risk
9. Compliance Risk

10. *Law Risk*
11. *Fleet Reability Risk*
12. *Marketing Risk*
13. *Ship Accident Risk*
14. *Fuel Oil Risk*
15. *Idle Asset Risk*
16. *Information Technology Risk*
17. *Investment Risk*
18. *Innovation Risk*
19. *Corporate Planning Risk*

Pada awal tahun 2023 PT PELNI (Persero) memiliki 155 deskripsi risiko korporat, yang terdiri dari:

1. Level risiko ekstrim terdapat 22 deskripsi risiko.
2. Level risiko tinggi terdapat 22 deskripsi risiko.
3. Level risiko moderat terdapat 33 deskripsi risiko.
4. Level risiko rendah terdapat 78 deskripsi risiko.

10. Law Risk
11. Fleet Reliability Risk
12. Marketing Risk
13. Ship Accident Risk
14. Fuel Oil Risk
15. Idle Asset Risk
16. Information Technology Risk
17. Investment Risk
18. Innovation Risk
19. Corporate Planning Risk

At the beginning of 2023, PT PELNI (Persero) identified 155 corporate risk descriptions, consisting of:

1. 22 risk descriptions at the extreme risk level.
2. 22 risk descriptions at the high-risk level.
3. 33 risk descriptions at the moderate risk level.
4. 78 risk descriptions at the low-risk level.

Top Risk PT PELNI (Persero) pada Triwulan I Tahun 2023
Top Risks of PT PELNI (Persero) in Q1 2023

1. Risiko Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi PT PID
2. Risiko Kontribusi *Non-Captive* Belum Optimal PT PBM Sarana Bandar Nasional
3. Risiko Ketidaktercapaian Pendapatan Cabang Jakarta
4. Risiko Ketidaktercapaian Pendapatan Cabang Makassar
5. Risiko Order Angkutan *Cargo* Tidak Dapat Dipenuhi
6. Risiko Ketidaktercapaian Pendapatan Cabang Balikpapan
7. Risiko Ketidaktercapaian Pendapatan Cabang Baubau
8. Risiko Ketidaktercapaian Pendapatan Cabang Medan
9. Risiko *Docking* Kapal Tidak Terpenuhi SBU Galangan Surya
10. Risiko Ketidaktercapaian Target Laba Penjualan SBU Hotel Bahtera
11. Risiko Tingkat Hunian Hotel Tidak Terpenuhi
12. Risiko Tidak Dilakukan Peremajaan Kapal Menggunakan Dana PMN
13. Risiko Tidak Tercapainya Kinerja TJSL
14. Risiko Keterlambatan Pencairan PSO
15. Risiko Koreksi atas Penagihan Subsidi
16. Risiko Pengurangan Anggaran Subsidi
17. Risiko Keterlambatan Pencairan Subsidi
18. Risiko Pemenuhan Penugasan Kapal Penumpang & Perintis Tidak Terpenuhi
19. Risiko Kualitas Layanan di Kapal Penumpang Tidak Memenuhi Standar Layanan Manakanan & Fasilitas Kenyamanan
20. Risiko Layanan Jasa Keagenan Tidak Optimal
21. Risiko *Load Factor* di Kapal Ternak Tidak Optimal
22. Risiko Pemasaran Jasa Keagenan Tidak Optimal
23. Risiko Target Penghasilan *Charter* Tidak Tercapai

1. Risk of Not Achieving PT PID Consolidated Profit Target
2. Risk of Non-Captive Contribution of PT PBM Sarana Bandar Nasional Not Being Optimal
3. Risk of Jakarta Branch Revenue Not Being Achieved
4. Risk of Makassar Branch Revenue Not Being Achieved
5. Risk of Cargo Transport Orders Not Being Fulfilled
6. Risk of Balikpapan Branch Revenue Not Being Achieved
7. Risk of Baubau Branch Revenue Not Being Achieved
8. Risk of Medan Branch Revenue Not Being Achieved
9. Risk of Docking Ships Not Being Fulfilled by SBU Galangan Surya
10. Risk of Sales Profit Target Not Being Achieved by SBU Hotel Bahtera
11. Risk of Hotel Occupancy Rate Not Being Fulfilled
12. Risk of Ship Renewal Not Being Carried Out Using PMN Funds
13. Risk of Not Achieving TJSL Performance
14. Risk of Delays in PSO Disbursement
15. Risk of Corrections to Subsidy Billing
16. Risk of Subsidy Budget Reduction
17. Risk of Delays in Subsidy Disbursement
18. Risk of Fulfillment of Passenger & Pioneer Ship Assignments Not Being Met
19. Risk of Passenger Ship Service Quality Not Meeting Food & Comfort Facilities Standards
20. Risk of Agency Services Not Being Optimal
21. Risk of Load Factor on Livestock Ships Not Being Optimal
22. Risk of Agency Services Marketing Not Being Optimal
23. Risk of Charter Income Target Not Being Achieved

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

***Top Risk* PT PELNI (Persero) pada Triwulan II Tahun 2023** Top Risks of PT PELNI (Persero) in Q2 2023	
1. Risiko Tidak Tercapainya target laba konsolidasi PT PID	1. Risk of Not Achieving the Consolidated Profit Target of PT PID
2. Risiko terhambatnya pembayaran biaya operasional dan utang usaha	2. Risk of Delays in Payment of Operational Costs and Trade Payables
3. Risiko kinerja keuangan PT SBL tidak menjacai target RKAP	3. Risk of PT SBL's Financial Performance Not Meeting RKAP Targets
4. Risiko kinerja keuangan PT SBI tidak menjacai target RKAP	4. Risk of PT SBI's Financial Performance Not Meeting RKAP Targets
5. Risiko ketidaktercapaian pendapatan SBN Cabang Surabaya	5. Risk of SBN Surabaya Branch Revenue Not Being Achieved
6. Risiko ketidaktercapaian pendapatan SBN Cabang Bitung	6. Risk of SBN Bitung Branch Revenue Not Being Achieved
7. Risiko ketidaktercapaian pendapatan SBN Cabang Jayapura	7. Risk of SBN Jayapura Branch Revenue Not Being Achieved
8. Risiko ketidaktercapaian pendapatan SBN Cabang Pontianak	8. Risk of SBN Pontianak Branch Revenue Not Being Achieved
9. Risiko ketidaktercapaian pendapatan SBN Cabang Ampean	9. Risk of SBN Ampean Branch Revenue Not Being Achieved
10. Risiko investasi alat produksi PT SBN	10. Risk of Investment in Production Equipment by PT SBN
11. Risiko *docking* kapal tidak terpenuhi	11. Risk of Docking Ships Not Being Fulfilled
12. Risiko ketidaktercapaian target laba penjualan SBU Hotel Bahtera	12. Risk of Sales Profit Target Not Being Achieved by SBU Hotel Bahtera
13. Risiko tingkat hunian hotel tidak terpenuhi	13. Risk of Hotel Occupancy Rate Not Being Fulfilled
14. Risiko ketidaktercapaian pendapatan cabang Jakarta	14. Risk of Jakarta Branch Revenue Not Being Achieved
15. Risiko ketidaktercapaian pendapatan cabang Surabaya	15. Risk of Surabaya Branch Revenue Not Being Achieved
16. Risiko ketidaktercapaian pendapatan cabang Makassar	16. Risk of Makassar Branch Revenue Not Being Achieved
17. Risiko ketidaktercapaian pendapatan cabang Baubau	17. Risk of Baubau Branch Revenue Not Being Achieved
18. Risiko ketidaktercapaian pendapatan cabang Medan	18. Risk of Medan Branch Revenue Not Being Achieved
19. Risiko koreksi atas penagihan PSO	19. Risk of Corrections to PSO Billing
20. Risiko koreksi atas penagihan subsidi	20. Risk of Corrections to Subsidy Billing
21. Risiko pengurangan anggaran subsidi	21. Risk of Subsidy Budget Reduction
22. Risiko keterlambatan pencairan subsidi	22. Risk of Delays in Subsidy Disbursement
23. Risiko layanan jasa keagenan tidak optimal	23. Risk of Agency Services Not Being Optimal
24. Risiko pengendalian internal yang tidak efektif	24. Risk of Ineffective Internal Control
25. Risiko *crane* tidak dapat digunakan secara optimal	25. Risk of Cranes Not Being Used Optimally
26. Risiko *load factor* di kapal barang tidak optimal	26. Risk of Load Factor on Cargo Ships Not Being Optimal
27. Risiko *load factor* kontainer di kapal penumpang tidak optimal	27. Risk of Load Factor for Containers on Passenger Ships Not Being Optimal
28. Risiko pemasaran jasa keagenan tidak optimal	28. Risk of Agency Services Marketing Not Being Optimal
29. Risiko target penghasilan *charter* tidak tercapai	29. Risk of Charter Income Target Not Being Achieved
30. Risiko operasional penggunaan BBM tinggi	30. Risk of High Fuel Consumption Operationally
31. Risiko keamanan gedung kantor pusat	31. Risk of Central Office Building Security
32. Risiko keamanan kapal	32. Risk of Ship Security
33. Risiko kegagalan dalam mengintegrasikan aplikasi *commercial*	33. Risk of Failure to Integrate Commercial Applications
34. Risiko tidak dilakukan peremajaan kapal menggunakan dana PMN	34. Risk of Not Conducting Ship Renewal Using PMN Funds

***Top Risk* PT PELNI (Persero) pada Triwulan III Tahun 2023** Top Risks of PT PELNI (Persero) in Q3 2023	
1. Risiko Tidak Tercapainya target laba konsolidasi PT PID	1. Risk of Not Achieving the Consolidated Profit Target of PT PID
2. Risiko Pendapatan Angkutan Cargo Cabang Tidak Dapat Dipenuhi	2. Risk of Branch Cargo Transport Revenue Not Being Met
3. Risiko Koreksi atas Penagihan Subsidi	3. Risk of Corrections to Subsidy Billing
4. Risiko Layanan Jasa Keagenan Tidak Optimal	4. Risk of Agency Services Not Being Optimal
5. Risiko *Lead Time* Pengadaan Suku Cadang Lama	5. Risk of Long Lead Time for Spare Parts Procurement
6. Risiko Load Factor di Kapal Barang Tidak Optimal	6. Risk of Load Factor on Cargo Ships Not Being Optimal
7. Risiko Load Factor Kontainer di Kapal Penumpang Tidak Optimal	7. Risk of Load Factor for Containers on Passenger Ships Not Being Optimal
8. Risiko Pemasaran Jasa Keagenan Tidak Optimal	8. Risk of Agency Services Marketing Not Being Optimal
9. Risiko Target Penghasilan Charter Tidak Tercapai	9. Risk of Charter Income Target Not Being Achieved
10. Risiko Kecelakaan dan Near Missed di Kapal	10. Risk of Accidents and Near Misses on Ships
11. Risiko Tidak Dilakukan Peremajaan Kapal Menggunakan Dana PMN	11. Risk of Not Conducting Ship Renewal Using PMN Funds

***Top Risk* PT PELNI (Persero) pada Triwulan IV Tahun 2023** Top Risks of PT PELNI (Persero) in Q4 2023	
1. Risiko Ketidaktercapaian Target Laba Penjualan SBU Hotel Bahtera	1. Risk of Not Achieving the Sales Profit Target of SBU Hotel Bahtera
2. Risiko Tingkat Hunian Hotel Tidak Terpenuhi	2. Risk of Hotel Occupancy Rate Not Being Met
3. Risiko *Load Factor* di Kapal Barang Tidak Optimal	3. Risk of Load Factor on Cargo Ships Not Being Optimal
4. Risiko *Load Factor* Kontainer di Kapal Penumpang Tidak Optimal	4. Risk of Load Factor for Containers on Passenger Ships Not Being Optimal
5. Risiko Pemasaran Jasa Keagenan Tidak Optimal	5. Risk of Agency Services Marketing Not Being Optimal
6. Risiko Target Penghasilan *Charter* Tidak Tercapai	6. Risk of Charter Income Target Not Being Achieved
7. Risiko *claim* atas kerusakan lingkungan akibat kecelakaan kapal	7. Risk of Environmental Damage Claims Due to Ship Accidents
8. Risiko Tidak Dilakukan Peremajaan Kapal Menggunakan Dana PMN	8. Risk of Not Conducting Ship Renewal Using PMN Funds
9. Risiko Layanan Jasa Keagenan Tidak Optimal	9. Risk of Agency Services Not Being Optimal
10. Risiko Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi	10. Risk of Not Achieving Consolidated Profit Target
11. Risiko Pendapatan Angkutan *Cargo* Cabang Tidak Dapat Dipenuhi	11. Risk of Branch Cargo Transport Revenue Not Being Met

No.	**RISIKO DAN MITIGASI** RISKS AND MITIGATION
1	**Risiko:** Risiko Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi PT PID
	Risk: Not Achieving PT PID Consolidated Profit Target
	Mitigasi: 1. Melakukan klarifikasi & negosiasi atas penawaran perpanjangan kontrak pekerjaan yang disampaikan di akhir tahun 2023 sesuai asumsi dasar penyusunan target penghasilan tahun 2024 (RKAP 2024) 2. Melakukan Manajemen *Vendor* 3. Optimalisasi Ketersediaan Modal Kerja 4. Mengupayakan tambahan penghasilan dari *non captive*

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	RISIKO DAN MITIGASI RISKS AND MITIGATION
	Mitigation: 1. Clarify and negotiate the extension of contract offers submitted at the end of 2023 according to the basic assumptions for the preparation of the 2024 income target (RKAP 2024). 2. Implement Vendor Management. 3. Optimize the availability of Working Capital. 4. Seek additional income from non-captive sources.
2	**Risiko:** Risiko Ketidaktercapaian Target Laba Penjualan SBU Hotel Bahtera
	Risk: Not Achieving Sales Profit Target of SBU Hotel Bahtera
	Mitigasi: 1. Usulan pengurangan beban gaji pegawai yang tinggi dengan melakukan restrukturisasi pegawai PELNI Hotel Bahtera ke Kantor Pusat 2. Berkoordinasi dengan pihak BP2TL terkait kerjasama pengadaan diklat bagi pegawai laut untuk pengembangan PELNI *Learning Center* 3. Gencar meningkatkan target tamu instansi baik dari pihak internal PELNI maupun pihak eksternal 4. Menghubungi kembali / *customer retention* tamu yang pernah melakukan reservasi di Hotel Bahtera 5. Menetapkan target *canvassing* ke instansi yang belum pernah melakukan reservasi di Hotel Bahtera 6. Memperluas jaringan pemasaran ke komunitas, non-instansi hingga ke berbagai sekolah
	Mitigation: 1. Propose reducing high employee salary expenses by restructuring PELNI Hotel Bahtera employees to the Head Office. 2. Coordinate with BP2TL for collaboration on training for marine employees to develop the PELNI Learning Center. 3. Aggressively increase the target of institutional guests, both from internal PELNI and external parties. 4. Re-engage past customers who have previously made reservations at Hotel Bahtera. 5. Set canvassing targets for institutions that have never made reservations at Hotel Bahtera. 6. Expand marketing networks to communities, non-institutional entities, and various schools.
3	**Risiko:** Risiko Tingkat Hunian Hotel Tidak Terpenuhi
	Risk: Hotel Occupancy Rate Not Being Met
	Mitigasi: 1. Melakukan penawaran untuk menarik tamu dengan adanya penambahan fasilitas hotel (*fun games*, senam, *karaoke, live cooking* dan lain sebagainya) 2. Menghubungi kembali dan bekerjasama dengan instansi yang pernah melakukan reservasi di Hotel Bahtera 3. *Aggressive marketing* ke instansi maupun non-instansi yang belum pernah melakukan reservasi di Hotel Bahtera 4. Secara gencar melakukan promosi melalui media cetak (brosur, buku profil bahtera, dan lain-lain) maupun media sosial (*instagram, whatsapp* dan lain-lain) 5. Mencoba menawarkan paket promo bundling menginap sambil berwisata, bekerjasama dengan objek wisata disekitar Hotel Bahtera 6. Membuat diversifikasi usaha baru diluar usaha utama hotel 7. Gencar mempromosikan usaha resto yang ada dengan memberikan brosur menu di setiap kamar dan menambah paket menu resto ke dalam menu instansi yang menginap di hotel bahtera 8. Meningkatkan pendapatan dengan menyewakan lahan kepada *tenant*, penyewaan lahan *existing* yang sudah ada yaitu ATM Mandiri dan Puncak *Sport*

No.	RISIKO DAN MITIGASI RISKS AND MITIGATION
	Mitigation: 1. Offer to attract guests with additional hotel facilities (fun games, exercise, karaoke, live cooking, etc.). 2. Reconnect and collaborate with institutions that have previously made reservations at Hotel Bahtera. 3. Aggressively market to institutions and non-institutions that have never made reservations at Hotel Bahtera. 4. Conduct extensive promotions through print media (brochures, Bahtera profile books, etc.) and social media (Instagram, WhatsApp, etc.). 5. Offer bundled promo packages for stays combined with tourism, in collaboration with nearby tourist attractions. 6. Create new business diversifications outside the main hotel business. 7. Aggressively promote the existing restaurant business by providing menu brochures in each room and adding restaurant menu packages to the menu for institutions staying at Hotel Bahtera. 8. Increase revenue by leasing land to tenants and renting existing land such as Mandiri ATM and Puncak Sport.
4	**Risiko:** Risiko Pendapatan Angkutan Cargo Cabang Tidak Dapat Dipenuhi
	Risk: Branch Cargo Transport Revenue Not Being Met
	Mitigasi: 1. Melakukan promosi dengan menyebarkan *flyer* melalui media sosial semua pegawai 2. Melakukan pengecekan, perbaikan, perawatan, dan pengawasan secara rutin terhadap alat produksi, Jika terdapat kerusakan di alat produksi maka akan langsung berkoordinasi dengan Direktorat Armada & Teknik di Kantor Pusat serta instansi terkait 3. Selalu melakukan *agresive canvasing* dan promosi tentang jasa angkutan barang / muatan serta memanfaatkan *peak season* angkutan natal dan tahun baru 4. Koordinasi dengan SDM untuk kemungkinan diisinya formasi staff komersial 5. Maintenance alat kerja kapal (*crane* dan *palka*) agar dapat dioptimalisasikan dengan waktu kegiatan bongkar muat 6. Mobilisasi pengembalian *empty container* di *home base* 7. Penambahan *space* muatan di kapal
	Mitigation: 1. Promote by distributing flyers through all employees' social media. 2. Conduct regular checks, repairs, maintenance, and supervision of production equipment. If there is damage to production equipment, coordinate directly with the Directorate of Fleet & Engineering at the Head Office and related agencies. 3. Always conduct aggressive canvassing and promotion of cargo/transportation services and take advantage of the peak season for Christmas and New Year transportation. 4. Coordinate with HR for the possibility of filling commercial staff positions. 5. Maintain ship work tools (cranes and holds) to optimize loading and unloading times. 6. Mobilize the return of empty containers to the home base. 7. Add cargo space on ships.
5	**Risiko:** Risiko Layanan Jasa Keagenan Tidak Optimal
	Risk: Agency Services Not Being Optimal
	Mitigasi: 1. Menempatkan pegawai dengan keahlian khusus dalam keagenan sebagai *liaison officer* 2. Rilis SOP Penjualan dan Layanan Pelanggan Keagenan 3. Membentuk Regional dan PIC pada setiap regional
	Mitigation: 1. Place employees with specialized skills in agency services as liaison officers. 2. Release SOPs for Sales and Customer Service for Agency Services. 3. Form Regional and PICs in each region.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	RISIKO DAN MITIGASI RISKS AND MITIGATION
6	**Risiko:** Risiko *Claim* atas Kerusakan Lingkungan Akibat Kecelakaan Kapal
	Risk: Environmental Damage Claims Due to Ship Accidents
	Mitigasi: 1. Melakukan pendekatan koorperatif dengan KKP 2. Secara berkala memberikan himbauan ke awak kapal untuk Mematuhi alur pelayaran, sistem *rute*, dan daerah labuh kapal yang sudah ditetapkan menggunakan alat navigasi dan sistem bantu navigasi dan senantiasa melakukan koreksi terhadap peta laut yang ada di atas kapal berdasarkan BPI yang terbaru 3. Menggunakan strategi *risk sharing* bekerjasama dengan pihak asuransi dan membayar sejumlah premi yang disepakati
	Mitigation: 1. Cooperatively approach the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP). 2. Regularly remind ship crews to adhere to established shipping routes, systems, and anchorage areas using navigation tools and navigation aids, and continuously update sea charts on board based on the latest BPI. 3. Use risk-sharing strategies by cooperating with insurance companies and paying agreed premiums.
7	**Risiko:** Risiko *Load Factor* di Kapal Barang Tidak Optimal
	Risk: Load Factor on Cargo Ships Not Being Optimal
	Mitigasi: 1. Sosialisasi di beberapa cabang singgah demi penambahan *shipper* baru untuk meningkatkan *prosentase* muatan balik 2. *Canvassing* ke Instansi BUMN/BUMS 3. Koordinasi dengan Armatek dan Operasi, dan Kemenhub (Kapal Kemenhub) untuk kesiapan Kapal beroperasi dan ketersediaan Kontainer 4. Koordinasi dengan Kemenhub perihal jangka waktu kontrak dan komersialisasi Kapal Logistik Nusantara
	Mitigation: 1. Socialize at several branch stops to attract new shippers and increase the percentage of return cargo. 2. Conduct canvassing to state-owned and private companies (BUMN/BUMS). 3. Coordinate with Armatek and Operations, and the Ministry of Transportation (Kemenhub) regarding ship readiness and container availability. 4. Coordinate with the Ministry of Transportation regarding contract duration and commercialization of the Nusantara Logistics Ship.
8	**Risiko:** Risiko *Load Factor* Kontainer di Kapal Penumpang Tidak Optimal
	Risk: Load Factor for Containers on Passenger Ships Not Being Optimal
	Mitigasi: 1. *Canvassing* 2. kerjasama dengan BUMN/BUMS 3. Sinergitas *Cluster* BUMN Logistik 4. Koordinasi dengan Armatek dan Operasi untuk kesiapan Kapal beroperasi dan ketersediaan Kontainer 5. Evaluasi SK Tarif dan SK Kewenangan Diskon 6. Sterilisasi Muatan di Cabang kelas 1

No.	RISIKO DAN MITIGASI RISKS AND MITIGATION
	Mitigation: 1. Conduct canvassing. 2. Collaborate with state-owned and private companies (BUMN/BUMS). 3. Enhance synergies within the BUMN Logistics Cluster. 4. Coordinate with Armatek and Operations for ship readiness and container availability. 5. Evaluate tariff and discount authority decrees. 6. Sterilize cargo at first-class branches.
9	**Risiko:** Risiko Pemasaran Jasa Keagenan Tidak Optimal
	Risk: Agency Services Marketing Not Being Optimal
	Mitigasi: 1. Menyusun data prospek mitra keagenan 2. Mengajukan kerjasama keagenan dengan mitra 3. strategis dan berkolaborasi dengan *competitor* (SIUPAL & SIUPKK) 4. *Aggressive canvassing* secara *door to door* terutama *tugboat*, tongkang dan tanker 5. Mengembangkan bisnis turunan keagenan
	Mitigation: 1. Compile prospective partner data for agency services. 2. Propose strategic agency partnerships and collaborate with competitors. 3. Obtain necessary business permits (SIUPAL & SIUPKK). 4. Conduct aggressive door-to-door canvassing, especially for tugboats, barges, and tankers. 5. Develop derivative businesses from agency services.
10	**Risiko:** Risiko Target Penghasilan *Charter* Tidak Tercapai
	Risk: Charter Income Target Not Being Achieved
	Mitigasi: 1. Angkut Muatan PUSRI/PILOG Rute Gersik - Gorontalo 2. Angkut Muatan Semen Garuda Rute Jakarta - Malahayati - Sibolga 3. *Canvassing* kepada *ship owner* dan cargo *owner* 4. Kontrak kerjasama dengan BUMN dan BUMS (Mou dan NDA) 5. Kerjasama dengan *ship owner* dan cargo *owner* 6. *Market segmentation* 7. Pengajuan Komersialisasi Kapal Logistik Nusantara kepada Kementerian BUMN 8. Melakukan pendaftaran rekanan tender untuk klaster tambang
	Mitigation: 1. Transport PUSRI/PILOG cargo on the Gersik - Gorontalo route. 2. Transport Semen Garuda cargo on the Jakarta - Malahayati - Sibolga route. 3. Conduct canvassing with ship owners and cargo owners. 4. Establish cooperation contracts with state-owned and private companies (MoUs and NDAs). 5. Collaborate with ship owners and cargo owners. 6. Conduct market segmentation. 7. Propose the commercialization of the Nusantara Logistics Ship to the Ministry of State-Owned Enterprises. 8. Register for tender partnerships in the mining cluster.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	RISIKO DAN MITIGASI RISKS AND MITIGATION
11	**Risiko:** Risiko Tidak Dilakukan Peremajaan Kapal Menggunakan Dana PMN
	Risk: Not Conducting Ship Renewal Using PMN Funds
	Mitigasi: 1. *Support* kepada instansi terkait dengan segala data yag dibutuhkan
	Mitigation: 1. Support relevant agencies with all necessary data.

Berdasarkan agregasi taksonomi pada triwulan I Tahun 2023 menunjukkan level risiko 13, Triwulan II turun menjadi 12, triwulan III menunjukkan level 8 dan pada akhir triwulan IV menunjukkan level 7. Pengelolaan risiko yang efektif dapat menurunkan risiko, hal ini menunjukkan bahwa *risk owner* telah berupaya dalam menjalankan memitigasi risiko dengan memberikan dampak yang signifikan.

REALISASI KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO

Realisasi pelaksanaan kegiatan divisi manajemen risiko pada tahun 2023 berupa:

1. Melakukan *Sharing Knowledge* dengan Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko & Kepatuhan BUMN terkait dengan Penerapan Peraturan Menteri BUMN No: 5/MBU/09/2022 pada BUMN pada bulan Januari 2023.
2. *In-House Training* ISO 31000:2018 & *Workshop* Penyusunan Taksonomi yang di ikuti oleh seluruh *risk management officer* (RMO) kantor pusat, SBU, cabang pareto dan Anak Perusahaan.
3. Sosialisasi Manajemen Risiko Cabang Jakarta, Cabang Batam, Cabang Kupang, Cabang Manokwari, Cabang Sorong, Cabang Ambon, Cabang Bitung, Cabang Medan, Cabang Tual, Cabang Palu dan Anak Perusahaan.
4. Internalisasi budaya sadar risiko dengan melakukan quiz internalisasi budaya sadar risiko I, II dan III
5. *Benchmanrking* maturitas dan efektifitas implementasi manajemen risiko & kepatuhan
6. Mengikuti pelatihan dan sertifikasi bagi tim manajemen risiko sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko tanggal 26 Mei 2023 Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Based on the taxonomy aggregation in Q1 2023, the risk level was 13, which decreased to 12 in Q2, showed a level of 8 in Q3, and ended at level 7 by the end of Q4. Effective risk management has been able to reduce risks, indicating that risk owners have been diligent in mitigating risks, resulting in a significant impact.

RISK MANAGEMENT ACTIVITIES REALIZATION

The realization of risk management division activities in 2023 included:

1. Conducting Knowledge Sharing with the Assistant Deputy for Risk Management & Compliance at SOEs related to the Implementation of the Minister of SOEs Regulation No: 5/MBU/09/2022 in SOEs in January 2023.
2. In-House Training on ISO 31000:2018 & Workshop on Taxonomy Development attended by all risk management officers (RMO) at the headquarters, SBUs, Pareto branches, and subsidiaries.
3. Risk Management Socialization at Jakarta Branch, Batam Branch, Kupang Branch, Manokwari Branch, Sorong Branch, Ambon Branch, Bitung Branch, Medan Branch, Tual Branch, Palu Branch, and Subsidiaries.
4. Internalization of risk awareness culture through internalization quizzes I, II, and III.
5. Benchmarking the maturity and effectiveness of risk management & compliance implementation.
6. Attending training and certification for the risk management team in accordance with the Decision of the Deputy for Finance and Risk Management dated May 26, 2023, Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 on Technical Guidelines for the Composition and Qualification of Risk Management Organs in State-Owned Enterprises.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Based on the Decision of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of

Republik Indonesia Nomor : SK-3/DKU.MBU/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sampai dengan Desember 2023, divisi manajemen risiko telah didukung oleh tenaga profesional yang telah memiliki sertifikasi profesi, program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk peningkatan pengetahuan dengan perincian sebagai berikut:

the Republic of Indonesia Number: SK-3/DKU.MBU/05/2023 on Technical Guidelines for the Composition and Qualification of Risk Management Organs in State-Owned Enterprises. As of December 2023, the risk management division has been supported by professionals with certification, training programs, and competency development for knowledge enhancement with the following details:

Jenis Sertifikasi Type of Cerification	**Jumlah** Total
ERM Implementation: Qualified Chief of Risk Officer (QCRO)	1
Directorship Development Program	1
ERM Fundamentals (with Enterprise Risk Management Associate Professional Certification)	1
Qualified Risk Management Professional (QRMA)	4
Certified Compliance Professional (CCP)	1
Certified Governance Professional (CGP)	1

EVALUASI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Penerapan manajemen risiko di Perusahaan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.14/03/SK/HKO.01/2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 PT PELNI (Persero).

Assessment Indeks Maturitas Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode *assessment* eksternal (*Risk Management Maturity Level*/RMML). Kriteria *assessment* yang digunakan mengacu pada ISO 31000:2018 *Risk Management Guidelines* dengan menggunakan model maturitas yang dikembangkan oleh *Risk Insurance and Management Society* (RIMS). Model maturitas Manajemen Risiko/*Risk Maturity Model* RIMS (RMM–RIMS) membagi tingkat kematangan penerapan (maturitas) Manajemen Risiko ke dalam 5 (lima) tingkatan/level, dengan PT PELNI (Persero) masuk dalam fase awal level IV dengan sebutan "*managed/strong practice phase*" dengan nilai skor **3,92** yang tersusun dari capaian-capaian per atribut sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT EVALUATION FOR 2023

The implementation of risk management at the Company is carried out based on the Board of Directors Decree Number: 01.14/03/SK/HKO.01/2022 concerning ISO 31000:2018-based Risk Management Guidelines for PT PELNI (Persero).

The Risk Management Maturity Index Assessment of PT PELNI (Persero) for 2023 was conducted using an external assessment method (Risk Management Maturity Level/RMML). The assessment criteria used refer to the ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines using the maturity model developed by the Risk Insurance and Management Society (RIMS). The Risk Maturity Model/RIMS (RMM–RIMS) divides the maturity levels of Risk Management implementation into five levels, with PT PELNI (Persero) being in the early phase of level IV, referred to as the "managed/strong practice phase", with a score of 3.92, consisting of achievements per attribute as follows:

No.	**Atribut Penilaian** Attributes for Assessment	**Skor** Score	**Sebutan** Label
1.	*Adoptions of ERM-based approach* Penerapan manajemen risiko mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terstruktur Adoption of ERM-Based Approach Implementation of risk management adopts a systematic and structured approach	3,43	*Define*

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Atribut Penilaian Attributes for Assessment	Skor Score	Sebutan Label
2.	*ERM Process Management* Proses manajemen risiko secara menyeluruh ERM Process Management Comprehensive risk management processes	4,12	*Managed*
3.	*Risk Appetite Management* Penerapan Manajemen Selera Risiko Risk Appetite Management Application of risk appetite management	4,43	*Managed*
4.	*Root Cause Discipline* Penerapan Pengungkapan Risiko/Identifikasi Risiko dengan menggunakan teknik pendekatan "penyebab akan masalah" Root Cause Discipline Risk disclosure/risk identification using the "root cause discipline" approach	3,96	*Managed*
5.	*Uncovering Risk* Proses pengungkapan risiko yang ditemukan Uncovering Risk Process of disclosing identified risks	4,57	*Optimizing*
6.	*Performance Management* Penerapan ERM dikaitkan dengan manajemen kinerja Performance Management Application of ERM linked with performance management	3,27	*Define*
7.	*Business Resiliency and Sustainability* Penerapan ERM dikaitkan dengan ketahanan & keberlanjutan bisnis organisasi Business Resiliency and Sustainability Application of ERM linked with organizational business resilience and sustainability	3,66	*Managed*
Capaian Maturitas Manajemen Risiko Risk Management Maturity Achievement		3,92	*Managed*

Selama tahun 2023, penyempurnaan terhadap *Risk Register* terus dilakukan setiap triwulannya. Sesuai dengan mempertimbangkan dampak kuantifkasi nilai dampak yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi. Pemilahan dilakukan guna menyeleksi risiko-risiko mana saja yang menjadi risiko dengan skala korporat dan risiko mana saja yang menjadi risiko divisi dengan penanganan risiko dilakukan oleh Divisi terkait. Pemilahan tersebut dilakukan dalam rangka agar upaya penanganan risiko dapat dilakukan oleh *risk owner* secara lebih fokus dengan mempertimbangkan biaya penanganan risiko yang dikeluarkan dengan kuantifkasi nilai dampak yang akan diminimalisasi.

Throughout 2023, improvements to the Risk Register have been continuously made each quarter. These improvements consider the quantification of the impact value arising from the risks that occur. The selection process is carried out to distinguish which risks are on a corporate scale and which are division-specific, with risk handling being managed by the respective Division. This selection is conducted to ensure that risk handling efforts by the risk owners are more focused, taking into account the cost of risk handling in relation to the quantifiable value of the impact to be minimized.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi PT PELNI (Persero) meningkatkan kesadaran risiko di seluruh lapisan organisasi, membangun ketahanan dan melakukan mitigas risiko serta menjaga risiko yang tersisa (residual *risk*) pada Tingkat yang dapat ditoleransi (*tolerable level*) sesuai Pedoman Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 dan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk meningkatkan kesadaran risiko, Direksi PT PELNI (Persero) menetapkan selera risiko sebagai berikut:

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors of PT PELNI (Persero) increases risk awareness across all organizational levels, builds resilience, and mitigates risks while maintaining residual risk at a tolerable level in accordance with ISO 31000:2018-based Risk Management Guidelines and based on applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance (GCG). To enhance risk awareness, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) establishes the following risk appetite:

Sikap Terhadap Risiko*) Risk Appetite*)	**Pernyataan Selera Risiko** Statement of Risk Appetite
Tidak Toleran Intolerant	1. Direksi PT PELNI (Persero) tidak memberikan ruang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perusakan terhadap lingkungan dan kelalaian terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi. 2. Direksi PT PELNI (Persero) akan menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi, melengkapi, dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan *prudent* serta menjunjung tinggi *core value* AKHLAK. 3. Direksi PT PELNI (Persero) berkomitmen memenuhi target yang telah ditetapkan. 1. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) does not tolerate violations of laws and regulations, including environmental damage and negligence in cyber security and personal data protection. 2. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) will conduct business by implementing good corporate governance and integrated risk management, complementing and actively and prudently operating the risk management body while upholding the core value of AKHLAK. 3. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) is committed to meeting established targets.
Konservatif Conservative	4. Direksi PT PELNI (Persero) akan mengerjakan penugasan pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan ketentuan secara finansial fisibel atau apabila tidak fisible secara finansial diberikan kompensasi/subsidi atau pembiayaan dari PMN untuk memperoleh margin yang wajar. 5. Direksi PT PELNI (Persero) memenuhi kewajian keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan. 6. Direksi PT PELNI (Persero) berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat waktu, tepat sasaran, dan menjalankan dengan itikad baik. 4. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) will undertake government assignments in the form of national strategic projects or to provide public benefit functions under financially feasible conditions; if financially infeasible, compensation/subsidies or financing from state capital participation (PMN) will be sought to achieve reasonable margins. 5. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) fulfills financial obligations and maintains a healthy financial structure, ensuring sustainable business continuity. 6. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) focuses on executing its core business activities in a timely manner, with precision and good faith.
Moderat Moderate	7. Direksi PT PELNI (Persero) melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makroekonomi dengan menerima konsekuensi beban secara terukur. 7. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) optimizes management of market and macroeconomic volatility, accepting measured burden consequences.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Sikap Terhadap Risiko*) Risk Appetite*)	Pernyataan Selera Risiko Statement of Risk Appetite
Strategis Strategic	8. Direksi PT PELNI (Persero) secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi, dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek *environmental, social,* dan *governance* (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) dengan risiko yang wajar dan terukur serta sepadan dengan kembalian investasi. 9. Direksi PT PELNI (Persero) mengoptimalkan sumber daya *idle* atau yang belum memenuhi kapasitas usaha melalui berbagai upaya *organic* dan anorganik dengan menerima risiko bisnis yang wajar dan terukur. 8. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) actively creates value through innovative business models, exploration, and development, optimizing portfolio structuring, and inorganic growth while considering environmental, social, and governance (ESG) aspects, accepting reasonable and measurable risks of increased capital expenditure (CAPEX) commensurate with investment returns. 9. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) optimizes idle resources or those not yet meeting business capacity through various organic and inorganic efforts, accepting reasonable and measurable business risks.

*)Keterangan:
1. **Tidak Toleran**
   a. Sangat berhati-hati dalam mengambil risiko dan lebih memilih menjaga stabilitas dan konsistensi dalam operasi bisnis.
   b. Keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal.
2. **Konservatif**
   a. Berhati-hati dalam mengambil risiko, dengan memilih beberapa risiko yang terkendali tetapi tetap memprioritaskan kestabilan usaha.
   b. Keputusan bisnis didasarkan pada Upaya untuk melindungki nilai dari risiko besar yang tidak terduga termasuk didalamnya mengindari paparan terhadap fluktuasi pasar yang signifikasi serta dapat menanggung beban yang kecil.
3. **Moderat**
   a. Bersedia mengambil risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap kerugian besar.
   b. Keputusan bisnis mempertimbangan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secaara bersamaan dan dapat menanggung beban yang sedang.
4. **Strategis**
   a. Secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari rencana bisnis, mengambil risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar.
   b. Keputusan bisnis didasarkan pada anlisis risiko dan potensi pengembalian investasi jangka panjang serta dapat menanggung beban yang besar.

*)Explanation:
1. **Not Tolerant**
   a. Very cautious in taking risks and prefers to maintain stability and consistency in business operations.
   b. Business decisions are based on capital preservation.
2. **Conservative**
   a. Cautious in taking risks, choosing controlled risks while prioritizing business stability.
   b. Business decisions are based on efforts to protect against unforeseen significant market fluctuations and manage minor burdens.
3. **Moderate**
   a. Willing to take risks within certain limits to achieve growth and profit, while still focusing on protecting against major losses.
   b. Business decisions balance growth opportunities and risk impacts, able to manage moderate burdens.
4. **Strategic**
   a. Actively implements strategies involving risk management as an integral part of business planning, taking higher risks to achieve greater growth and innovation.
   b. Business decisions are based on risk analysis, long-term investment potential, and can manage significant burdens.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI
SIGNIFICANT CASES FACED

Per 31 Desember 2023, Perseroan mencatat beberapa perkara penting yang melibatkan Perseroan maupun Entitas Anak, antara lain:

As of December 31, 2023, the Company recorded several significant cases involving the Company and its Subsidiaries, including:

Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Claims	**Status Penyelesaian Perkara/Gugatan per 31 Desember 2023** Completion Status of Cases/Lawsuits as of December 31, 2023	**Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan** The Impact on Company Conditions
Dugaan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan dan/atau Penggelapan yang terjadi di PT PELNI (Persero) Terminal Point Lhokseumawe. Allegations of Criminal Acts of Forgery and/or Embezzlement at PT PELNI (Persero) Terminal Point Lhokseumawe.	Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memasuki agenda persidangan. The case files have been deemed complete by the Lhokseumawe District Attorney's Office and will be transferred to the Lhokseumawe District Court for trial scheduling.	Perusahaan mengalami kerugian finansial atas perkara dimaksud. The company incurred financial losses due to the mentioned matter.
Perkara Jatuhnya Kontainer KM Dorolonda yang berisi Bahan Kimia Beracun dan Berbahaya (B3) di Pelabuhan Namlea. Incident of KM Dorolonda Container Falling, containing Hazardous and Toxic Chemicals (B3) at Namlea Port.	Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Buru dan akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Namlea untuk memasuki agenda persidangan. The case files have been deemed complete by the Buru District Attorney's Office and will be transferred to the Namlea District Court for trial scheduling.	Perusahaan mendapatkan preseden buruk dalam melaksanakan kegiatan usahanya. The company set a negative precedent in conducting its business activities.
Dugaan tindak pidana oleh pihak lain terhadap Aset PT PELNI (Persero) di Jl. Jambi/ Kutai/ Cisadane, Kota Surabaya. Allegations of criminal acts by other parties against PT PELNI (Persero) assets on Jl. Jambi/Kutai/Cisadane, Surabaya City.	Perkara dalam tahap penyelidikan dan telah dilakukan permintaan keterangan kepada Lurah Darmo, Kantor Pertanahan, Aria Duta, Bambang Nunuk, Drg Vitria Dewi sebagaimana SP2HP Nomor: B/3363/SP2HP/VII/RES1.2./2022/ Satreskrim dan Salah satu Penghuni Aset di Jl. Cisadane No 24/I. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada pihak yang menempati aset dan saksi lainnya. Cases are in the investigation stage, and statements have been requested from the Head of Darmo, Land Office, Aria Duta, Bambang Nunuk, Drg Vitria Dewi as per SP2HP Number: B/3363/SP2HP/VII/RES1.2./2022/Satreskrim, and one of the Residents of the Asset at Jl. Cisadane No 24/I. Further examinations will be conducted with the occupants of the asset and other witnesses.	Menimbulkan preseden buruk bagi PT PELNI (Persero) dan PT PELNI (Persero) terancam kehilangan hak atas aset. This has created a negative precedent for PT PELNI (Persero) and poses a risk of asset loss.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI
SIGNIFICANT CASES FACED

Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Claims	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan per 31 Desember 2023 Completion Status of Cases/Lawsuits as of December 31, 2023	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan The Impact on Company Conditions
Terdapat pihak yang memanfaatkan aset milik PT PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Seruni Nomor 3 Desa/Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau saat ini dikenal Jl. H.Moh. Faisal Nomor 6 RT 004 RW 002 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, yang merupakan Hasil Nasionalisasi Dari Eks Perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). There are parties who have utilized PT PELNI (Persero) assets located at Jl. Seruni Number 3, Selong Village/Subdistrict, Selong District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, or currently known as Jl. H.Moh. Faisal Number 6, RT 004 RW 002, Sandubaya Village, Selong Subdistrict, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara, which are nationalized assets from the former Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) company.	PT PELNI (Persero) telah melaporkan kasus dimaksud kepada Polda Nusa Tenggara Barat, berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan sedang dilakukan pemeriksaan berkas. PT PELNI (Persero) has reported the case to the West Nusa Tenggara Regional Police, and the files have been forwarded to the District Attorney's Office for ongoing review.	PT PELNI (Persero) tidak dapat memanfaatkan aset secara maksimal dan dapat menimbulkan preseden buruk bagi PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) is unable to fully utilize its assets, potentially setting a negative precedent for the company.

SANKSI ADMINISTRASI
ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Selama periode tahun 2023, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi baik yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi baik oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham maupun otoritas lainnya yang terkait dengan Perseroan.

Throughout the 2023 period, the Company did not receive any administrative sanctions imposed on the company, members of the Board of Commissioners, or the Board of Directors, either by the Ministry of State-Owned Enterprises as the shareholder or by other authorities related to the Company.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY DATA

PT PELNI (Persero) secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada para stakeholders agar mengetahui kondisi Perusahaan secara jelas dan terbuka. PT PELNI (Persero) memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, di antaranya sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) regularly updates information and provides easy access to information regarding the Company's activities and performance to stakeholders to ensure a clear and transparent understanding of the Company's condition. PT PELNI (Persero) has various means that serve as information disclosure channels, including the following:

Media	Keterangan Description
Email: info.corporate@pelni.co.id infopelni162@pelni.co.id	Email info.corporate@pelni.co.id dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan (contoh Surat Keputusan Direksi) kepada seluruh pegawai. Email infopelni162@pelni.co.id dimanfaatkan untuk penyampaian keluhan pelanggan. The email info.corporate@pelni.co.id is utilized for disseminating information regarding policies (e.g., Board of Directors' Decisions) to all employees. The email infopelni162@pelni.co.id is used for customer complaint submissions.
Website: www.pelni.co.id	Biro Teknologi dan Informasi bertindak sebagai admin, dengan penyuplai konten dari tiap divisi yang berkepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk konten Berita & Informasi. The Technology and Information Bureau acts as the administrator, sourcing content from relevant divisions. The Corporate Secretary is responsible for News & Information content.
Portal BUMN State-Owned Enterprises Portal	Majalah Camar dengan 62 halaman diterbitkan secara berkala. Memuat informasi tentang peristiwa Perusahaan yang disebarkan ke kantor pusat, cabang dan kapal. The 62-page Camar Magazine is published periodically, containing updates on Company events distributed to headquarters, branches, and vessels.

PT PELNI (Persero) juga menyediakan akses informasi lain bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi relevan mengenai berita dan kinerja Perseroan, melalui media, sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) also provides access to additional information for shareholders and stakeholders to obtain relevant updates and the company's performance through the following media:

- 021-162 atau 162
- PELNI Point (Fan Page: Pelayaran Nasional Indonesia
- @pelni162_ID
- pelni162
- PELNI162
- INFO PELNI162
- PT. PELNI (Persero)
- infopelni162@pelni.co.id

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

CODE OF CONDUCT

Perseroan menyusun Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) yang menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan. Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh Insan PELNI di seluruh tingkat organisasi. Pedomam Perilaku dan Etika PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

ISI PEDOMAN PERILAKU

Perseroan dengan konsisten mengaitkan *Code of Conduct* dengan nilai-nilai utama Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Pengertian Pedoman Etika & Perilaku
3. Maksud & Tujuan Pedoman Etika & Perilaku
4. Landasan Hukum
5. Visi & Misi Perusahaan
6. Tata Nilai Utama PT PELNI (Persero)
7. Manfaat Pedoman Perilaku dan Etika
8. Daftar Istilah

BAB II Pedoman Etika Usaha
A. Etika yang Terkait dengan *Stakeholders*
   1. Hubungan dengan Pemegang Saham
   2. Hubungan dengan Karyawan
   3. Hubungan dengan Pelanggan
   4. Hubungan dengan Pemasok & Penyedia Barang dan Jasa
   5. Hubungan dengan Mitra Kerja
   6. Hubungan dengan Masyarakat & Lingkungan
   7. Hubungan dengan Kreditur
   8. Hubungan dengan Pemerintah
   9. Hubungan dengan *Principal* Kapal Keagenan
   10. Hubungan dengan Media Massa
   11. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-Undangan
   12. Persaingan Usaha
B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan
   1. Integritas Laporan Keuangan
   2. Penggunaan Aset Perusahaan
   3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
   4. Pengelolaan Anak Perusahaan

BAB III Pedoman Kerja Etika Kerja
A. Menjaga Citra Perusahaan
B. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan
   1. Integritas

The Company has developed a Code of Conduct that serves as a behavioral guideline for the Board of Commissioners, Directors, and Employees of the Company. This Code of Conduct applies to all individuals within PELNI throughout all levels of the organization. The Code of Conduct of PT PELNI (Persero) has been updated and ratified through Board of Directors Decree No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 regarding the Code of Conduct within PT PELNI (Persero) Environment.

CONTENTS OF THE CODE OF CONDUCT

Consistently, the Company aligns the Code of Conduct with its core values, as follows:

CHAPTER I Introduction
1. Background
2. Definition of Ethics & Conduct Guidelines
3. Purpose & Objectives of Ethics & Conduct Guidelines
4. Legal Foundation
5. Company Vision & Mission
6. Core Values of PT PELNI (Persero)
7. Benefits of the Code of Conduct
8. Glossary

CHAPTER II Business Ethics Guidelines
A. Ethics Related to Stakeholders
   1. Relations with Shareholders
   2. Relations with Employees
   3. Relations with Customers
   4. Relations with Suppliers & Service Providers
   5. Relations with Business Partners
   6. Relations with Community & Environment
   7. Relations with Creditors
   8. Relations with Government
   9. Relations with Ship Agency Principals
   10. Relations with Mass Media
   11. Compliance with Laws and Regulations
   12. Business Competition
B. Standards of Corporate Management Ethics
   1. Integrity of Financial Reporting
   2. Use of Company Assets
   3. Health, Safety, and Environmental Management
   4. Management of Subsidiaries

CHAPTER III Workplace Ethics Guidelines
A. Upholding Company Image
B. Responsibility to the Company
   1. Integrity

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

CODE OF CONDUCT

2. Kepatuhan Terhadap Hukum & Peraturan Perundang-Undangan
3. Kerahasiaan Informasi
4. Pencatatan Data, Pelaporan & Dokumentasi
5. Perlindungan Aset/Harta Perusahaan, Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*
6. Penggunaan Komunikasi Elektronik
7. Kepedulian terhadap Kesehatan dan keselamatan Kerja, serta Pelestarian dan Masyarakat
8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol.
9. Keterlibatan Sosial dan Politik.

C. Benturan Kepentingan
1. Menghindari Benturan Kepentingan
2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan
3. Kegiatan di Luar Perusahaan
4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman
5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi.

D. Hubungan Kerja
1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan.
2. Kerja sama Atasan dan Bawahan.

E. Hubungan Dengan Konsumen
1. Pelayanan Kepada Konsumen
2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif

F. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis

G. Perlakuan Terhadap Pesaing

H. Hubungan Dengan Pemerintah
1. Kepatuhan terhadap Ketentuan/ Peraturan Terkait
2. Pola Hubungan dan Komunikasi

I. Hubungan Dengan Masyarakat
1. Pelayanan Masyarakat
2. Pemberian Donasi
3. Kesadaran akan Lingkungan Alam

BAB IV Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika

A. Sosialisasi Pedoman.

B. Pernyataan Kepatuhan Insan PT PELNI (Persero).

C. Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan atas Pelanggaran

D. Pelanggaran dan Sanksi Pedoman Perilaku dan Etika

E. Penghargaan atas Pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Etika

BAB V Penutup

Lampiran

2. Compliance with Laws & Regulations
3. Confidentiality of Information
4. Data Recording, Reporting & Documentation
5. Protection of Company Assets, Company Information, and Intangible Assets
6. Use of Electronic Communication
7. Concern for Health and Safety at Work, Conservation, and Society
8. Misuse of Drugs and Alcohol
9. Social and Political Involvement

C. Conflict of Interest
1. Avoiding Conflict of Interest
2. Employee Personal Stock Ownership and Investment
3. Activities Outside the Company
4. Treatment of Family and Friends
5. Giving and Receiving Bribes, Gifts, Hospitality, and Donations

D. Employment Relations
1. Discrimination-Free Workplace, Harassment, Indecent Acts, Threats, and Violence-Free Environment
2. Collaboration between Superiors and Subordinates

E. Relations with Consumers
1. Service to Consumers
2. Fair and Non-Discriminatory Treatment

F. Treatment towards Business Partners

G. Treatment towards Competitors

H. Relations with Government
1. Compliance with Relevant Regulations
2. Patterns of Relationship and Communication

I. Relations with the Community
1. Community Service
2. Donations
3. Awareness of Environmental Conservation

CHAPTER IV Implementation of the Code of Conduct

A. Dissemination of Guidelines

B. Statement of Compliance by PELNI Personnel

C. Mechanism for Enforcing the Code of Conduct Including Reporting Violations

D. Violations and Sanctions of the Code of Conduct and Ethics

E. Recognition for Implementing the Code of Conduct

CHAPTER V Conclusion

Appendices

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)
CODE OF CONDUCT

PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA

Pedoman GCG dan *Code of Conduct* telah di-*upload* pada *website* PELNI www.pelni.co.id dan dapat diunduh secara langsung. Seluruh Insan PT PELNI (Persero) wajib menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Kepatuhan Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan dalam rangka meningkatkan penerapan tata Kelola perusahaan yang baik.

Bagi setiap Insan Perseroan yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar *Code of Conduct* harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan untuk menegakkan *Code of Conduct* Perusahaan.

Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan Peraturan perusahaan yang mengatur tentang sanksi disiplin.

SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU

PT PELNI (Persero) menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman tentang Perilaku dan Etika (*code of conduct*). Direksi mengomunikasikan secara efektif pedoman tentang Perilaku dan Etika (*code of conduct*) kepada Dewan Komisaris dan seluruh karyawan.

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Perusahaan, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PELNI yang berperilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai yaitu antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas yang memuat komitmen pelaksanaan Pedoman Perilaku.

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The GCG Guidelines and Code of Conduct have been uploaded to the PELNI website www.pelni.co.id and can be downloaded directly. All PELNI Personnel are required to sign a Statement of Commitment to Compliance with the Company's Code of Conduct and Ethics to enhance the implementation of good corporate governance.

Any PELNI Personnel who becomes aware of a situation believed to potentially violate the Code of Conduct must immediately report it in writing to their immediate supervisor or higher management, providing complete and verifiable evidence, free from defamation and personal interest. The Company will protect the confidentiality of any PELNI Personnel who report violations and promptly follow up, unless the report is found to be untrue, in which case the reporter may be subject to sanctions as per applicable regulations. Sanctions for violations of the Code of Conduct are enforced to uphold the Company's Code of Conduct.

Any PELNI Personnel found to have violated the Code of Conduct will be sanctioned. Sanctions will be governed by specific regulations established in accordance with government regulations.

DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCT

PT PELNI (Persero) cultivates a corporate culture ensuring that all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees understand and commit to fulfilling their responsibilities to behave in accordance with the Code of Conduct and Ethics. The Board of Directors effectively communicates the Code of Conduct and Ethics to the Board of Commissioners and all employees.

The Company consistently conducts the dissemination of the Company's Code of Conduct as it is a crucial step in creating PELNI personnel who behave according to the Company's Culture. The Code of Conduct is communicated and disseminated to the Board of Commissioners and its supporting organs, Directors, and officials one level below Directors, as well as all employees, through the signing of an Integrity Pact containing a commitment to adhere to the Code of Conduct.

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)
CODE OF CONDUCT

Dalam ketentuan Bab IV mengenai sosialisasi Pedoman, disebutkan bahwa seluruh Insan PELNI harus membaca dan memahami dengan baik isi Buku Pedoman dan bertanggung jawab untuk menaatinya. Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko Department Kepatuhan berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan PELNI dengan menyampaikan daftar baca. Setiap Insan PELNI dapat meminta penjelasan dari atasan langsung apabila kurang memahami kebijakan Pedoman Perilaku.

As stipulated in Chapter IV regarding the dissemination of guidelines, all PELNI Personnel must read and fully understand the contents of the Guidelines Book and are responsible for adhering to them. The Finance Directorate and Risk Management Compliance Department are responsible for disseminating the Code of Conduct to all PELNI Personnel by delivering a reading list. Any PELNI Personnel may request clarification from their immediate supervisor if they do not fully understand the Policy Guidelines.

KEBIJAKAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

DISCIPLINE ENFORCEMENT POLICY AND VIOLATION HANDLING

Seluruh insan PELNI wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen untuk memenuhi Pedoman Perilaku. Pedoman Penandatanganan Surat Kepatuhan Pedoman perilaku dilakukan secara berkala setiap tahun. Direktorat SDM dan Umum mendokumentasikan Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Perilaku Perseroan.

All PELNI personnel are required to periodically sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct as a commitment to complying with the Code of Conduct. The signing of the Code of Conduct Compliance Statement is conducted annually. The Human Resources and General Directorate documents the Compliance Statement as an integral part of the Company's Code of Conduct.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dijabarkan dalan Bab IV, yaitu dilakukan untuk menegakkan Pedoman Perilaku Perseroan. Setiap Insan PELNI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai Peraturan Perseroan. sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai Peraturan Perseroan.

Sanctions for violations of the Code of Conduct are detailed in Chapter IV, enforced to uphold the Company's Code of Conduct. Any PELNI Personnel found to have violated the Code of Conduct will be sanctioned. Sanctions will be governed by specific regulations established in accordance with Company Regulations. Sanctions will be governed by specific regulations established in accordance with Company Regulations.

Setiap insan PELNI yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman Perilaku harus segera melaporkan kepada atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan buktibukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Pelaporan pelanggaran juga dapat dilakukan melalui mekanisme whistleblowing system (WBS) dan email: wbs@pelni.co.id.

Any PELNI personnel who becomes aware of a situation believed to potentially violate the Code of Conduct must immediately report it to their immediate supervisor or higher management in writing, including the identity of the reporter based on complete and verifiable evidence, free from defamation and personal interest. Reporting violations can also be done through the whistleblowing system (WBS) mechanism and email: wbs@pelni.co.id.

Perseroan akan melindungi kerahasiaan setiap insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

The Company will protect the confidentiality of any PELNI personnel who report violations and promptly follow up, unless the report is found to be untrue, in which case the reporter may be subject to sanctions as per applicable regulations.

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)
CODE OF CONDUCT

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ETIKA PERUSAHAAN

Evaluasi terhadap penerapan Pedoman Perilaku dilakukan secara berkala kepada Insan PELNI. Berdasarkan Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan rasa kepemilikan dari setiap Insan PELNI serta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan secara konsisten. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Perilaku akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CORPORATE ETHICS IMPLEMENTATION

Evaluation of the implementation of the Code of Conduct is periodically conducted on PELNI personnel. Based on this evaluation, it is expected to encourage and enhance ownership among every PELNI personnel, consistently improving employee competence and capabilities. As a dynamic guideline, the Code of Conduct will be periodically and continuously reviewed.

JUMLAH PELANGGARAN ETIKA PERUSAHAAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, terdapat pelanggaran etika Perusahaan dan terdapat sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika Perusahaan.

NUMBER OF COMPANY ETHICS VIOLATIONS IN 2023

In 2023, there were violations of Company ethics, and sanctions were imposed for these violations.

No.	Jenis Hukuman Type of Punishment	Pegawai Employee		Jumlah Total
		Darat Onshore	Laut Offshore	
1	Peringatan Lisan Verbal Warning	2	11	13
2	Peringatan Tertulis Written Warning	2	4	6
3	Peringatan Keras Final Warning	9	13	22
4	Skorsing Suspension	5	7	12
5	PHK Termination	8	6	14
Jumlah Total				**67**

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/ MANAJEMEN (ESOP/ MSOP)

EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) / MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (MSOP)

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/ESOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Strock Ownership Program*/MSOP).

As of December 31, 2023, the Company does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and/or Management Stock Ownership Program (MSOP).

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

POLICY ON DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING DIRECTORS' AND COMMISSIONERS' SHARE OWNERSHIP

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak menawarkan sahamnya kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana (IPO). Oleh sebab itu, Perseroan tidak memiliki kebijakan pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

As of December 31, 2023, the Company has not offered its shares to the public through an Initial Public Offering (IPO). Therefore, the Company does not have a policy for disclosing information regarding the share ownership of Directors and Commissioners within 3 (three) working days after the acquisition or any changes in ownership of shares of a Publicly Listed Company.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan PT PELNI (Persero).

Landasan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT PELNI (Persero) merujuk pada SK Pedoman WBS No. 11.15/04/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan PT PELNI (Persero). Merujuk pada pedoman tersebut, implementasi WBS di PT PELNI (Persero) bertujuan untuk membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) agar berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terdeteksi secara dini (*early warning system*) dan dapat mengurangi/ meminimalisir risiko yang dihadapi oleh Perseroan akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi yang berdampak pada pengurangan biaya (*cost reduction*) dalam mengelola akibat dari terjadinya suatu pelanggaran.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai dilakukan secara tertulis dan berjenjang, dengan mekanisme pada jenjang pertama dapat disampaikan melalui saluran penyampaian sebagai berikut:

- *Website* : www.pelni.co.id
- E-mail perusahaan : wbs@pelni.co.id
- Nomor Whatsapp : 0811-2804-162

Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) maka pengelola WBS PT PELNI (Persero) wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.

The Whistleblowing System (WBS) is a system designed to process complaints/information submitted directly or indirectly related to actions that violate laws, regulations/ standards, codes of ethics, policies, and similar actions threatening public interests, as well as Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) within PT PELNI (Persero).

The policy foundation for the Whistleblowing System at PT PELNI (Persero) refers to Decree No. 11.15/04/SK/HKO.01/2023 regarding the Guidelines for Handling Reports of Alleged Violations (Whistleblowing System) within PT PELNI (Persero). According to these guidelines, the implementation of WBS at PT PELNI (Persero) aims to establish, implement, and manage a Reporting Violations System (WBS) so that various issues within the Company that do not comply with ethical standards and applicable laws can be detected early (early warning system). This helps reduce/minimize risks faced by the Company due to violations, including financial, operational, legal, occupational safety, and reputational risks, which in turn reduce costs in managing the consequences of such violations.

REPORTING VIOLATIONS

Complaints alleging employee misconduct are submitted in writing and through hierarchical channels. Initially, complaints can be submitted through the following channels:

- Website: www.pelni.co.id
- Company Email: wbs@pelni.co.id
- WhatsApp Number: 0811-2804-162

In cases where complaints involve Directors or Commissioners of PT PELNI (Persero), the WBS manager at PT PELNI (Persero) is obligated to forward such complaints to the WBS manager at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

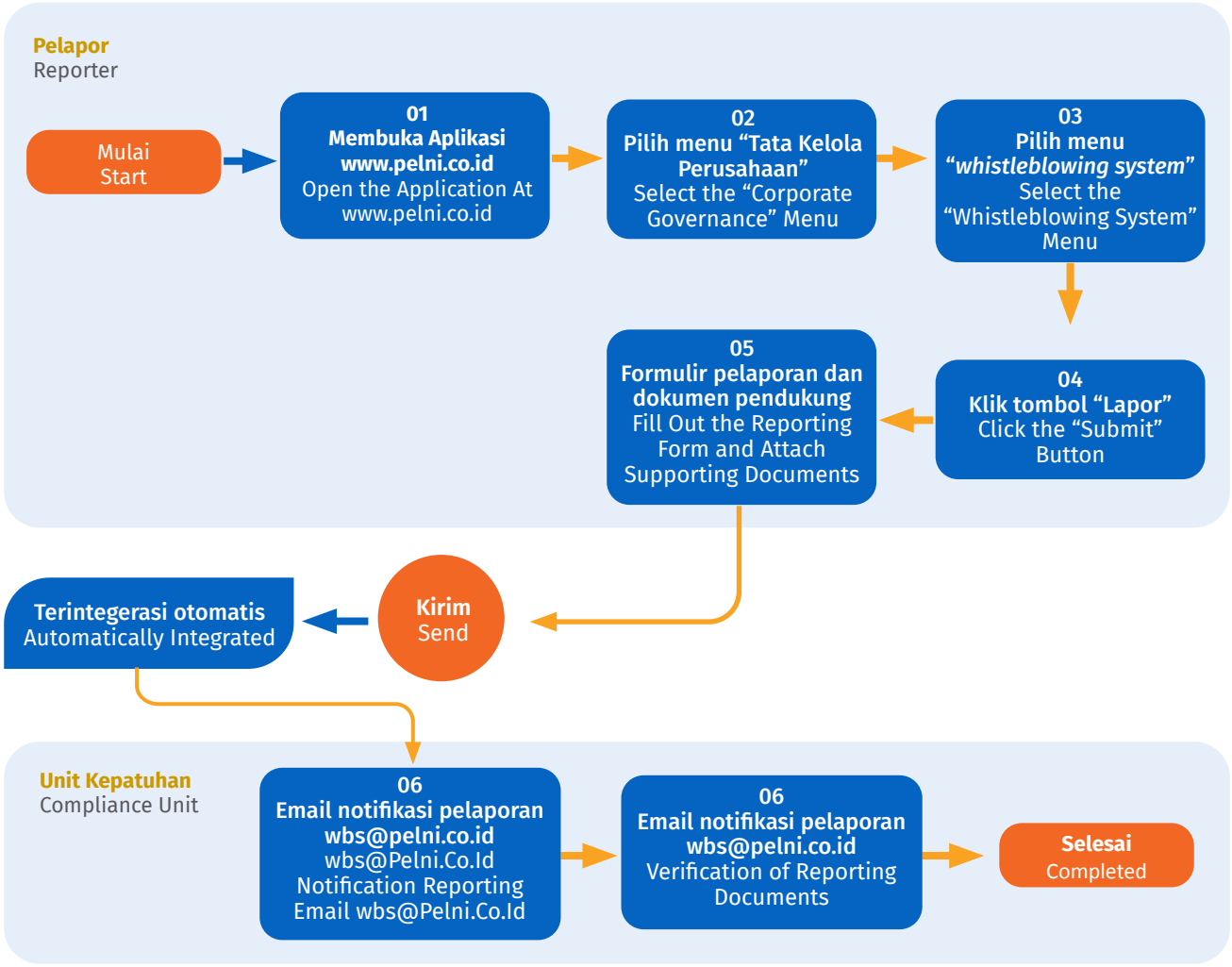

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

FORMULIR PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Identitas Pelapor

NIK *		No. Hp / Whatsaap *	
Nama lengkap *		Email *	
Alamat *		Pekerjaan *	

Informasi Laporan

Upload Dokumen Pendukung

KTP Pelapor * (jpg)	Chosen File No file chosen
Dokumentasi Kejadian *	Chosen File No file chosen
Rekaman Audio	Chosen File No file chosen
Bukti Pendukung Lainnya	Chosen File No file chosen

Upload Dokumen Pendukung

KTP Pelapor * (jpg)	Chosen File No file chosen
Dokumentasi Kejadian *	Chosen File No file chosen
Rekaman Audio	Chosen File No file chosen
Bukti Pendukung Lainnya	Chosen File No file chosen

☐ * Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat di pertanggungjawabkan serta bersedia untuk dihubungi untuk keterangan lebih lanjut

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

MEDIA PENYAMPAIAN PELAPORAN WBS

Disediakan Menu Pilihan Jenis Pelangagaran

1. Korupsi
2. Kecurangan
3. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
4. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, mark up, under invoice, keternagakerjaan, dll);
5. Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopnan pada umumnya;
6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
7. Pelanggaran Prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
8. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan:
10. Pembocoran Rahasia;
11. Penerimaan dan/atau pemberia Gratiikasi;
12. Penyelewangan Aset;
13. Penggelapan Aset;
14. Penipuan
15. Kecurangan

Loading...

TAMPILAN PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI WEBSITE PT PELNI (PERSERO)

Laporkan kepada kami
jika Anda melihat, mengetahui,
mengalami...

www.pelni.co.id

wbs@pelni.co.id

08112804162

Identitas pelapor terlindungi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 02.14/04/SK/HKO.01/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan PT PELNI (Persero

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Pelapor diarahkan untuk membuka web PT PELNI (Persero), lalu klik "Tata Kelola Perusahaan"

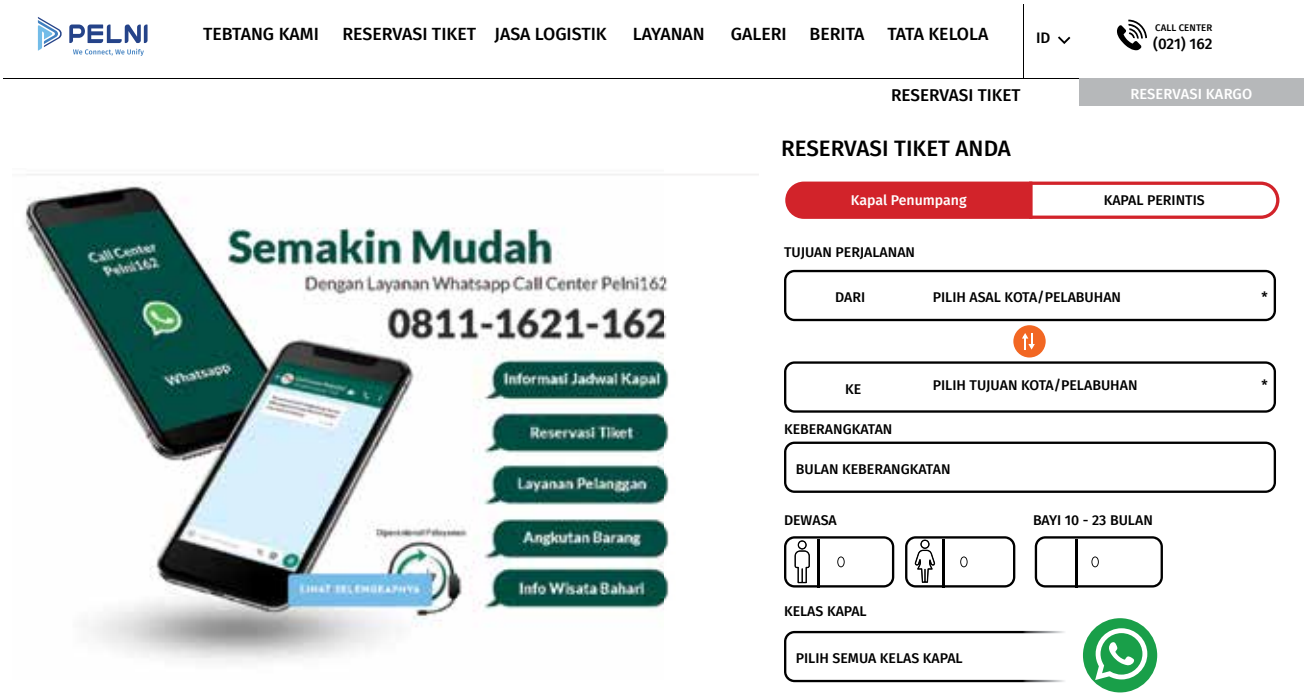

2. Pelapor diarahkan untuk memilih menu Whistleblowing System (WBS), lalu klik "Whistleblowing System (WBS)"

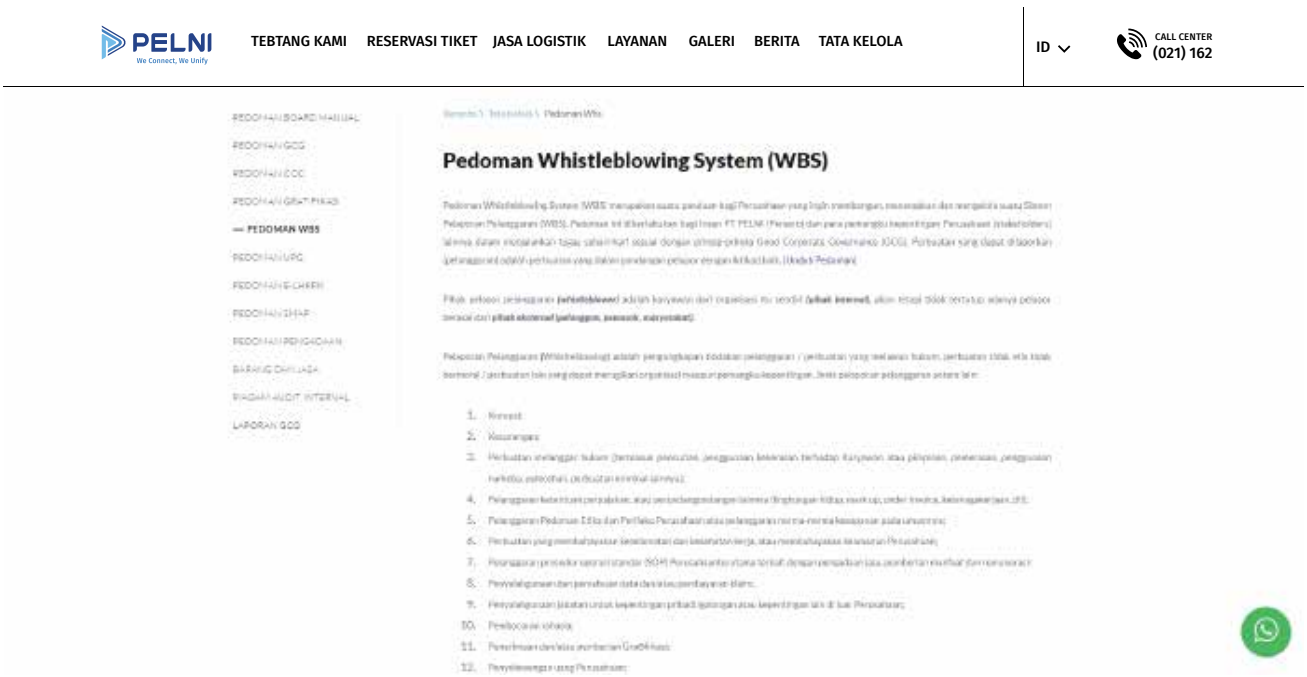

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

3. Pelapor diarahkan untuk klik "Lapor

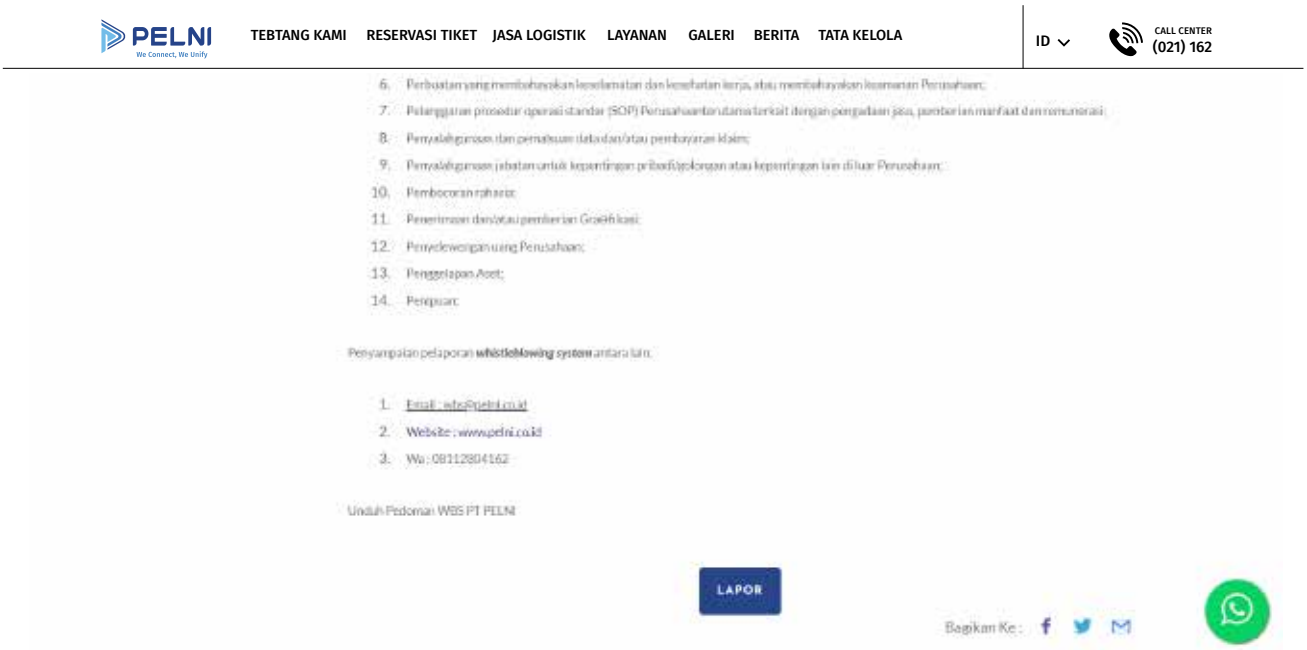

4. Pelapor diarahkan untuk melengkapi form : Identitas Pelapor (NIK, Nama, Alamat lengkap, dan nomor telepon)
Informasi Laporan

- **Perbutan berindikasi pelanggaran yang diketahui?;**
- **Darimana perbuatan tersebut dilakukan?;**
- **Kapan Perbuatan tersebut dilakukan?;**
- **Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut?;**
- **Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan?;**

Setelah lengkap maka, klik tombol "kirim" Laporan akan diterima oleh Tim pengelola Melalui email : wbs@pelni.co.id

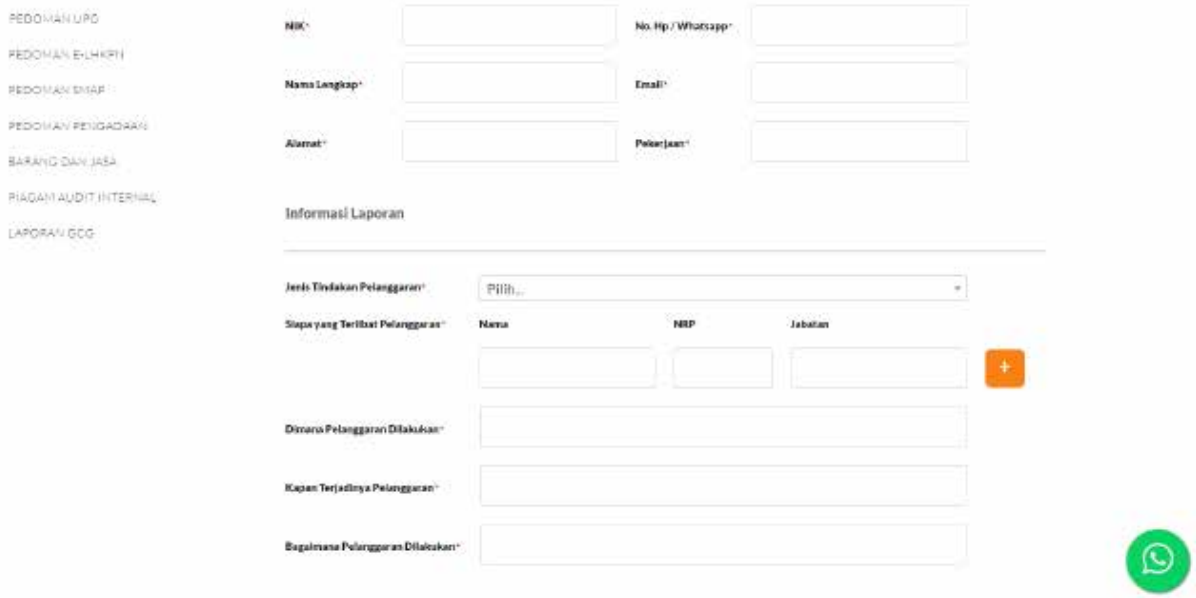

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PELANGGARAN

Perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor Pelanggaran atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

PT PELNI (Persero) memberikan perlindungan terhadap Pelapor baik dari segi pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelaporan dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam menyelenggarakan WBS, PT PELNI (Persero) memiliki pedoman pengaduan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong diadukannya perilaku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana Perusahaan melindungi pengadu yang beritikad baik. Setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik untuk mendorong sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Berikut merupakan beberapa langkah perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pelapor:

1. Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Perusahaan memberikan fasilitas dan perlindungan sebagai berikut:
   a. Fasilitas saluran pelaporan (website perusahaan dengan alamat https://pelni.co.id, whatsapp nomor: 08112804162 dan email: wbs@pelni.co.id yang bebas dan rahasia;
   b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
   c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

Protection for Whistleblowers is a form of safeguard provided by the Company to ensure the safety of Whistleblowers or Witnesses from potential threats that may endanger their lives, well-being, and/or assets, including those of their families.

PT PELNI (Persero) extends protection to Whistleblowers in terms of employment, physical safety, remuneration, and job facilities received by well-intentioned Whistleblowers. In specific cases, protection may be provided in accordance with the legal protection scheme during the performance of official duties.

In implementing the Whistleblowing System (WBS), PT PELNI (Persero) has guidelines for reporting violations intended to encourage the reporting of violations of legal regulations or ethical standards. This includes guidelines on how the Company protects well-intentioned reporters. Every whistleblower and witness in cases of money laundering crimes must be provided with special protection before, during, and after the investigation process. The Board of Commissioners and Directors are committed to protecting well-intentioned whistleblowers to promote the handling of alleged violations and ensure the safety of both the whistleblower and their family. The following are several steps taken by the Company to protect whistleblowers:

1. The Company has a clear and impartial commitment to support and protect all reporters who inform about violations occurring within the Company. The Company provides facilities and protections such as:

   a. Reporting channels (company website at https://pelni.co.id, WhatsApp number: 08112804162, and email: wbs@pelni.co.id) that are free and confidential;

   b. Confidentiality of the whistleblower's identity as long as they maintain the confidentiality of the reported violation to any party. This protection is provided if the whistleblower provides their identity and information that can be used to contact them;

   c. Protection against retaliation from the accused or organization. Protection from pressure, delay in

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;

d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya;
e. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan tersebut.

2. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan seperti Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/*reward* kepada pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.
4. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:
   a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
   b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
   c. Perlindungan terhadap harta pelapor;
   d. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor;
   e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

promotions, dismissal, legal action, property loss, and physical actions. This protection extends not only to the whistleblower but also to their family members;

d. Information on the follow-up actions, including when and how the follow-up is handed over to which institution. This information is provided confidentially to fully identified whistleblowers;
e. Protection for whistleblowers also applies to parties conducting investigations and those providing information related to the complaint/disclosure.

2. Protection and confidentiality guarantees are not provided to whistleblowers proven to have made false reports and/or defamation. If an investigation concludes and proves that the reported complaint contains false, defamatory, or unfounded allegations, the whistleblower may be subject to countersuits or sanctions according to legal regulations such as Criminal Code articles 310 and 311, or internal company regulations such as the Company's Code of Conduct and Ethics or Collective Employment Agreement.
3. If an investigation concludes and proves that the whistleblower's report is truthful and can recover Company funds/assets, the Company rewards the whistleblower according to internal Company regulations.
4. In addition to the protections above, for well-intentioned whistleblowers, the Company also provides legal protection, in line with Article 43 of Law No. 15 of 2002 as amended by Law No. 25 of 2003 regarding Money Laundering Crimes, Article 13 of Law No. 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection, and Article 5 of Government Regulation No. 57 of 2003 regarding Procedures for Special Protection for Reporters and Witnesses in Money Laundering Crimes, namely:
   a. Protection from criminal and/or civil lawsuits;
   b. Protection of personal security for the whistleblower and/or their family from physical and/or mental threats;
   c. Protection of the whistleblower's assets;
   d. Confidentiality and identity concealment of the whistleblower;
   e. Providing testimony without face-to-face confrontation with the accused, at every level of case review in the event of disputes in court.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

PENANGANAN PENGADUAN

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja dan dapat diperpanjang menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Karyawan Perusahaan yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran dilaporkan kepada Direktur Utama/Direktur yang ditunjuk untuk dilakukan investigasi.
4. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan investigasi.
5. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Pemegang Saham/Kementerian BUMN untuk dilakukan investigasi.

HANDLING COMPLAINTS

1. The Violations Complaint Management Team verifies incoming reports and decides within 15 (fifteen) working days whether an investigation into the reported violation is necessary, which may be extended to 30 (thirty) working days.
2. If verification results indicate that the complaint is false and lacks evidence, it will not be further processed.
3. Verification results of violations complaints involving Company Employees meeting the criteria for indications of violations are reported to the CEO/Director designated for investigation.
4. Verification results of violations complaints involving Directors meeting the criteria for indications of violations are reported to the Board of Commissioners for investigation.
5. Verification results of violations complaints involving the Board of Commissioners and Commissioner Support Organs meeting the criteria for indications of violations are reported to Shareholders/the Ministry of State-Owned Enterprises for investigation.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

1. Tim Pengelola *Whistle Blowing System*
   Pengelola *Whistle Blowing System* adalah unit yang melekat pada Departement Kepatuhan. Tugas tim meliputi: menerima Pengaduan Pelanggaran, menindaklanjuti sesuai ketentuan, menyiapkan laporan, melakukan Evaluasi secara berkala dan melaksanakan sosialisasi WBS.
   Direktur utama PT PELNI (Persero) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
2. WBS pada Perusahaan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh pengelola WBS BUMN.
3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, maka Direksi membentuk Tim yang ditetapkan oleh Direksi dengan susunan Tim sebagai berikut:
   a. Penanggung Jawab : Direktur Utama
   b. Pengawas : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
   c. Ketua Tim : Kepala Satuan Internal
   d. Anggota :
      i. VP Manajemen Risiko & Kepatuhan
      ii. VP Hukum
      iii. VP SDM
      iv. Pengawas Investigasi

MANAGEMENT OF COMPLAINTS

1. Whistleblowing System Management Team
   The Whistleblowing System Management Team is a unit attached to the Compliance Department. The team's tasks include: receiving Violations Complaints, following up according to provisions, preparing reports, conducting periodic evaluations, and conducting WBS socialization.

   The President Director of PT PELNI (Persero) is responsible for implementing
2. The WBS at the Company is assisted in daily duties by the State-Owned Enterprises WBS Manager.
3. For violations allegedly committed by Employees, the Board forms a team designated by the President Director with the following composition:
   a. Responsible Person: President Director
   b. Supervisor: Director of Finance and Risk Management
   c. Team Leader: Head of Internal Units
   d. Members:
      i. VP Risk Management & Compliance
      ii. VP Legal Affairs
      iii. VP Human Resources
      iv. Investigation Supervisor

v. *Manager* Penilaian Kinerja Pegawai
vi. *Manager* Perencanaan SDM Darat
vii. *Manager* Perencanaan SDM Laut
viii. *Manager* Peraturan Bantuan Hukum
ix. *Manager* Kepatuhan

4. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) maka pengelola WBS PT PELNI (Persero) wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.
5. Penanggung jawab WBS PT PELNI (Persero) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di Kementerian BUMN secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.

v. Employee Performance Assessment Manager
vi. Land HR Planning Manager
vii. Sea HR Planning Manager
viii. Legal Assistance Regulations Manager
ix. Compliance Manager

4. In cases involving complaints against Directors or Commissioners of PT PELNI (Persero), the PT PELNI (Persero) WBS manager must forward such complaints to the Ministry of State-Owned Enterprises WBS manager.

5. The PT PELNI (Persero) WBS responsible person submits a report on the handling of violations complaints to the mid-level executive who oversees complaint handling functions at the Ministry of State-Owned Enterprises periodically every semester, no later than 1 (one) month after the end of each period.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

ALUR PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

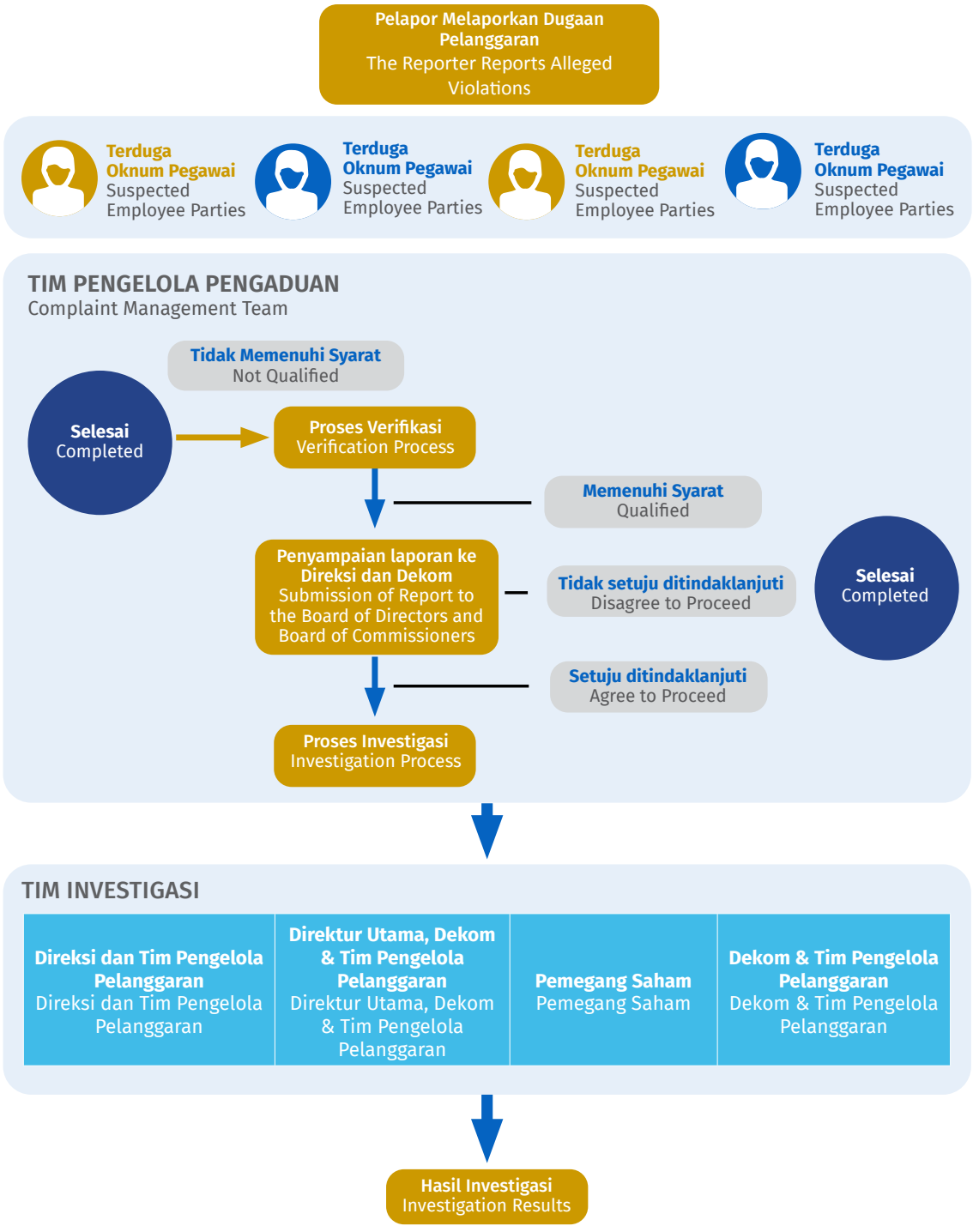

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Per 31 Desember 2023, berdasarkan Nota Dinas Nomor: 12.30/03/ND-B/MRK/2023 tidak ada pelaporan tindakan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang diterima oleh Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan melalui media *website*, email dan nomor WBS *Center* baik dari Kantor Pusat, Cabang dan Kapal.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN BUKU

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan sehingga tidak terdapat sanksi/ tindak lanjut atas pengaduan atau laporan yang diterima melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED AND PROCESSED IN THE LAST FISCAL YEAR

As of December 31, 2023, based on Memorandum Note No. 12.30/03/ND-B/MRK/2023, there were no reports of violations (Whistleblowing System) received by the Risk Management & Compliance Division through the website, email, and WBS Center number, both from the Head Office, Branches, and Ships.

SANCTIONS/FOLLOW-UP ON COMPLAINTS PROCESSED IN THE FISCAL YEAR

As of December 31, 2023, there were no reports or complaints submitted through the Company's Violations Reporting System, hence no sanctions or follow-up actions were imposed on complaints or reports received through the Violations Reporting System.

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK ANTI-KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY AND PRACTICES

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (*KICKBACKS*), *FRAUD*, SUAP DAN/ATAU GRATIFIKASI DALAM PERSEROAN

PT PELNI (Persero) berkomitmen dalam menerapkan kejujuran dan menjunjung integritas dalam menjalin hubungan antara Pemegang Saham dengan Pemangku Kepentingan, antara lain melalui penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) sesuai ISO ISO37001:2016. Atas komitmen tersebut, PT PELNI (Persero) menyusun dan menerapkan pedoman SMAP yang berfungsi sebagai acuan dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan di lingkungan PT PELNI (Persero) sehingga proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Perseroan menerapkan SMAP berdasarkan kebijakan internal yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 0822/01/SK/HKO01/2022 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

DASAR PENERAPAN

Pedoman SMAP PT PELNI (Persero) diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan perincian sebagai berikut:

1. UndaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

PROGRAMS AND PROCEDURES IMPLEMENTED TO ADDRESS CORRUPTION, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERY, AND/OR GRATIFICATION WITHIN THE COMPANY

PT PELNI (Persero) is committed to upholding honesty and integrity in its relationships between Shareholders and Stakeholders, including through the implementation of an Anti-Bribery Management System (ABMS) in accordance with ISO 37001:2016. In line with this commitment, PT PELNI (Persero) has developed and implemented ABMS guidelines to serve as a framework for implementing the Anti-Bribery Management System within PT PELNI (Persero), ensuring that business processes adhere to Good Corporate Governance (GCG) principles.

The company implements ABMS based on internal policies ratified through Board of Directors Decree No. 0822/01/SK/HKO01/2022 regarding the Anti-Bribery Management System (ABMS) Guidelines at PT PELNI (Persero).

BASIS FOR IMPLEMENTATION

The ABMS guidelines at PT PELNI (Persero) are applied in accordance with relevant laws and regulations, detailed as follows:

1. Law Number 28 of 1999 concerning Clean Government Administration free from Corruption, Collusion, and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
2. Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 134, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150);
3. Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 137, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4250);
4. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 70, Supplement to State Gazette Number 4297);
5. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to State Gazette Number 4756);

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN ANTI-PENYUAPAN

Komitmen PT PELNI (Persero) dalam menerapkan SMAP di lingkungan Perseroan antara lain terwujud melalui pemerolehan sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Sertifikat terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diperbaharui di Tahun 2023, dengan auditor ekternal PT Tuvnord Indonesia.

CERTIFICATION OF ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

PT PELNI (Persero)'s commitment to implementing ABMS within the company is realized through the acquisition of certification for the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. The ABMS certification was obtained on July 22, 2020, valid until July 21, 2023, with plans for renewal on May 22, 2023.

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK ANTI-KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY AND PRACTICES

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Program Sosialisasi dan *Workshop* Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi pada tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah peserta 380 orang.

- Sesi 1: Sosialisasi (*all* pegawai) -> *hybrid*
- sesi 2: *Workshop* dan FGD (BoD-1 dan BoD-2) -> *hybrid*

TRAINING/SOCIALIZATION ON ANTI-CORRUPTION FOR EMPLOYEES OF LISTED COMPANIES OR PUBLIC COMPANIES

The Anti-Corruption Awareness Program and Empowerment Workshop for Business conducted on June 7, 2023, with 380 participants.

- Session 1: Socialization (all employees) -> hybrid
- Session 2: Workshop and Focus Group Discussion (BoD-1 and BoD-2) -> hybrid

PELAPORAN LHKPN
REPORTING OF WEALTH REPORT (LHKPN)

PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lebih dari itu, PT PELNI (Persero) memahami arti penting penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diterapkan menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT PELNI (Persero) juga memahami bahwa pelaporan LHKPN yang terselenggara secara baik merupakan wujud pemenuhan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai best practices GCG. Atas komitmen dan pemahaman tersebut, PT PELNI (Persero) menerapkan praktik pelaporan LHKPN yang secara menyeluruh telah diatur melalui kebijakan internal berupa Surat Keputusan Direksi Nomor 06.07/02/SK/ HKO01/2022 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan di Lingkungan PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) is committed to supporting clean governance and freedom from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices. Moreover, PT PELNI (Persero) understands the importance of submitting the Wealth Report of State Officials (LHKPN), implemented comprehensively in accordance with applicable regulations. PT PELNI (Persero) also recognizes that effective LHKPN reporting demonstrates accountability and transparency principles aligned with best practices in Good Corporate Governance (GCG). In pursuit of this commitment and understanding, PT PELNI (Persero) applies comprehensive LHKPN reporting practices governed by internal policies under Board of Directors Decree No. 06.07/02/SK/HKO01/2022 concerning Guidelines for Reporting the Wealth of Company Officials within PT PELNI (Persero).

DASAR PENERAPAN

Pelaporan LHKPN di lingkungan PT PELNI (Persero) diterapkan sesuai sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang

BASIS OF IMPLEMENTATION

The LHKPN reporting at PT PELNI (Persero) is applied in accordance with several laws and regulations, including:

1. Law Number 28 of 1999 concerning Clean Governance Free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
2. Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 134, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150);
3. Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 137, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4250);
4. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 70, Supplement to State Gazette Number 4297);
5. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to State Gazette Number 4756);
6. Minister of State-Owned Enterprises Instruction Number INS-02/MBU/2007 dated September 21, 2007 concerning

PELAPORAN LHKPN
REPORTING OF WEALTH REPORT (LHKPN)

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan BUMN;

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Lebih dari itu, pelaporan LHKPN PT PELNI (Persero) diterapkan sesuai sejumlah dasar hukum internal, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pedomam Perilaku dan Etika PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).
2. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor 11.15/02/SK/HKP.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT PELNI (Persero).
3. Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana dibuah terakhir kali dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero).

PIHAK PENGELOLA LHKPN

PT PELNI (Persero) menetapkan sejumlah pihak pengelola pelaporan LHKPN dengan perincian sebagai berikut:
Ketua Koordinator: *Vice President* Manajemen Risiko & Kepatuhan
Wakil Ketua 1 : Kepala Satuan Pengawasan Intern
Wakil Ketua 2 : Kepala Kesekretariatan Perusahaan
Sekretaris : *Vice President* SDM
Admin Instansi : Manager Kepatuhan
Admin Unit Kerja :

1. Direktorat Utama Pengawas Pratama Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan Hidup (K3LH)
2. Direktorat Usaha Angkutan Penumpang Spv Jaminan Kualitas Angkutan Penumpang

State Officials' Obligation to Submit Wealth Reports (LHKPN) within SOEs;

7. Corruption Eradication Commission Regulation Number 07 of 2016 dated May 31, 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth as amended by Corruption Eradication Commission Regulation Number 02 of 2020 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.

Furthermore, LHKPN reporting at PT PELNI (Persero) is governed by several internal legal bases, detailed as follows:

1. The Code of Conduct and Ethics Guide of PT PELNI (Persero) updated and ratified through Board of Directors Decree No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 concerning the Code of Conduct in the Environment of PT PELNI (Persero).
2. Joint Decree of the Board of Directors and Commissioners No. 11.15/02/SK/HKP.01/2023 dated November 15, 2023 concerning Guidelines for Good Corporate Governance within PT PELNI (Persero).
3. Organizational Structure ratified in Board of Directors Decree No. 01.27/01/SK/HKO.01/2023 dated January 27, 2023, last amended by Board of Directors Decree No. 02.02/01/SK/HKO.01/2023 dated February 2, 2023 concerning Organizational Structure, Main Duties, and Functions of the Headquarters at PT PELNI (Persero).

MANAGEMENT OF LHKPN REPORTING

PT PELNI (Persero) appoints several parties to manage LHKPN reporting, detailed as follows:
Chairman Coordinator: Vice President Risk Management & Compliance
Deputy Chairman 1: Head of Internal Audit Unit
Deputy Chairman 2: Head of Corporate Secretariat
Secretary: Vice President Human Resources
Agency Admin: Compliance Manager
Unit Admin:

1. Main Directorate of Primary Safety, Health & Environment (K3LH) Supervisors
2. Passenger Transport Business Directorate Quality Assurance Supervisor

3. Direktorat SDM & Umum *Supervisor* Sistem Informasi SDM & Pengelolaan Budaya
4. Direktorat Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Analis Kajian Pengembangan Usaha & Produk Angkutan Barang
5. Direktorat Armada & Teknik *Supervisor* Sertifikasi Kapal & Pemeliharaan Kenautikan
6. Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko Analis Kepatuhan

3. HR & General Directorate Supervisor HR Information Systems & Culture Management
4. Cargo Transport Business Directorate & Sea Toll Development Analyst Business & Cargo Product Development Studies
5. Fleet & Engineering Directorate Ship Certification & Maritime Maintenance Supervisor
6. Finance & Risk Management Directorate Compliance Analyst

WAJIB LAPOR LHKPN

Sesuai Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat PT PELNI (Persero), sejumlah pejabat perseroan sebagai wajib lapor LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Direksi PT PELNI (Persero);
2. Komisaris Anak Perusahaan PT PELNI (Persero);
3. Direksi Anak Perusahaan PT PELNI (Persero);
4. Komisaris Perusahaan terafiliasi yang mewakili kepentingan PT PELNI (Persero);
5. Direksi Perusahaan terafiliasi yang mewakili kepentingan PT PELNI (Persero);
6. Dewan Pengawas Dana Pensiun Pelni;
7. Pegawai PT.PELNI (Persero) 1 level di bawah Direksi.

MANDATORY LHKPN REPORTING

According to the Guidelines for Reporting the Wealth of Officials at PT PELNI (Persero), several corporate officials are mandated to report LHKPN, including:

1. Board of Directors of PT PELNI (Persero);
2. Subsidiary Company Commissioners of PT PELNI (Persero);
3. Directors of Subsidiary Companies of PT PELNI (Persero);
4. Commissioners of affiliated companies representing the interests of PT PELNI (Persero);
5. Directors of affiliated companies representing the interests of PT PELNI (Persero);
6. Board of Trustees of Pelni Pension Fund;
7. Employees of PT PELNI (Persero) one level below the Board of Directors.

REALISASI PELAPORAN LHKPN 2023

Realisasi pelaporan LHKPN PT PELNI (Persero) untuk periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

REALIZATION OF LHKPN REPORTING 2023

The realization of LHKPN reporting at PT PELNI (Persero) for 2023 is as follows:

Uraian Description	**Jumlah Wajib Lapor** Total Mandatory Reports	**Sudah Lapor** Reported	**Belum Lapor** Not Yet Reported	**Persentase** Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	6	-	100,00%
Direksi Board of Directors	6	6	-	100,00%
Vice President	25	25	-	100,00%
Kepala Cabang Branch Managers	7	7	-	100,00%

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL

PT PELNI (Persero) menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya terus menerus dalam meningkatkan nilai perusahaan dan tata perilaku dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dan mitra perusahaan. Sebagai implementasi atas hal tersebut, PT PELNI (Persero) memiliki pedoman gratifikasi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 02.14/05/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PELNI (Persero) dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.14/06/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) implements gratification control to support anti-corruption efforts within the company. This initiative serves as a continuous effort to enhance corporate values and business conduct in relationships between the Company and its business partners. As part of this commitment, PT PELNI (Persero) has established guidelines for gratification control outlined in Board of Directors Decree No. 02.14/05/SK/HKO.01/2023 regarding Guidelines for Gratification Control at PT PELNI (Persero) and Board of Directors Decree No. 02.14/06/SK/HKO.01/2023 concerning Guidelines for the Gratification Control Unit (UPG) at PT PELNI (Persero).

Secara mendasar, kebijakan gratifikasi PT PELNI (Persero) disusun dan diterapkan dengan mengacu pada Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-9/MBU/06/2021 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan Pengendalian Gratifkasi tersebut telah dipublikasikan dalam portal internal dan *website* Perusahaan.

Fundamentally, PT PELNI (Persero)'s gratification policy is developed and implemented in accordance with State-Owned Enterprise Regulation Minister Regulation Number PER-9/MBU/06/2021 concerning Gratification Reporting within the Ministry of State-Owned Enterprises. This Gratification Control Policy has been published on the internal portal and the Company's website.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Untuk memperkuat pengendalian gratifikasi di dalam Perusahaan, PT PELNI (Persero) memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki kedudukan yang independen dan berada pada divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Unit Pengendalian Gratifikasi PT PELNI (Persero) memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari penerima gratifikasi di lingkungan PT PELNI (Persero);
2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal penerima gratifikasi melaporkan penolakan gratifikasi;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada Komisi;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing.
6. Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
7. Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;

GRATIFICATION CONTROL UNIT

To strengthen gratification control within the Company, PT PELNI (Persero) has established a Gratification Control Unit (UPG). The Gratification Control Unit operates independently under Risk Management and Compliance Division.

The tasks of PT PELNI (Persero)'s Gratification Control Unit are as follows:
1. Receive, analyze, and administer reports on the receipt of gratuities from gratuity recipients within PT PELNI (Persero).
2. Receive and administer reports on the rejection of gratuities, in cases where gratuity recipients report the rejection of gratuities.
3. Forward reports on the receipt of gratuities to the Commission.
4. Periodically report summaries of gratuity receipt and rejection reports to the Commission.
5. Present the results of managing gratuity receipt and rejection reports and proposals for gratification control policies to respective agency leaders.
6. Conduct socialization of gratuity provisions to internal and external parties.
7. Maintain gratuity items until their status is determined.

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan PT PELNI (Persero).

Selain tugas utama tersebut di atas, UPG juga mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan pengendalian praktik Gratifikasi di lingkungan Perusahaan;
2. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktik Gratifikasi, baik dari penerimaan laporan Gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Penerima dan/ atau Pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi milik Negara;
3. Menindaklanjuti laporan dugaan praktik Gratifikasi yang berasal dan/ atau bersumber dari WBS;
4. Menyusun rencana kerja UPG setiap tahunnya melalui Aplikasi GOL yang dikembangkan oleh KPK, termasuk melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi dan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas UPG setiap triwulan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

MEKANISME PELAPORAN
1. Penerimaan, pemberian, permintaan, dan penolakan gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada UPG PELNI dan dapat dilaporkan secara mandiri melalui Aplikasi GOL (Gratifikasi *Online*) KPK.
2. Gratifikasi *Online* (GOL) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan Insan PELNI dalam melaporkan penerimaan gratifikasi.
3. Insan PELNI dapat memilih metode pelaporan penerimaan gratifikasi secara individu maupun melalui UPG PELNI.
4. Aplikasi GOL tersedia dalam versi *web* dan versi *mobile*, baik itu Android maupun iOS.
5. Untuk membuka *Website* Gratifikasi Online diakses mengikuti aplikasi yang dikembangkan oleh KPK melalui https://gol.kpk.go.id.
6. Insan PELNI apabila ingin melaporkan secara individu melalui aplikasi GOL dapat melakukan registrasi akun, kemudian Insan PELNI dapat memilih menu Pelapor yang akan mengarahkan pada pengisian identitas pelapor.
7. Apabila melalui UPG PELNI, maka UPG PELNI dapat menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi disertai

8. Monitor and evaluate gratification control within PT PELNI (Persero).

In addition to these primary tasks, the UPG also has the following responsibilities:
1. Prepare regulations related to the implementation of gratification practice control within the Company.
2. Prepare tools and facilities related to the control of gratification practices, from receiving gratuity reports to sending Corruption Eradication Commission Decrees to recipients and/or reporters, as well as storing evidence of money deposits received from gratuities if decided by the Corruption Eradication Commission to belong to the State.
3. Follow up on reports of alleged gratification practices originating from or involving SOE work units.
4. Develop UPG work plans annually through the GOL Application developed by the Corruption Eradication Commission, including mapping vulnerable points for receiving and giving gratuities on a periodic basis, annually.
5. Prepare quarterly UPG task implementation reports to the Director of Finance and Risk Management.

MECHANISM OF GRATIFICATION REPORTING AND DETERMINATION OF STATUS

MECHANISM FOR REPORTING GRATUITIES
1. The receipt, giving, request, and rejection of gratifications must be reported to the PELNI UPG (Gratification Control Unit) and can also be independently reported through the GOL (Gratification Online) KPK Application.
2. GOL (Gratification Online) is an application developed by KPK to facilitate PELNI employees in reporting gratifications.
3. PELNI employees can choose to report the receipt of gratifications individually or through the PELNI UPG.
4. The GOL application is available in both web and mobile versions, for Android and iOS.
5. To access the Gratification Online website, follow the application developed by KPK via https://gol.kpk.go.id.
6. If PELNI employees wish to report individually through the GOL application, they can register an account, then choose the Reporter menu, which will direct them to fill in the reporter's identity.
7. If reporting through the PELNI UPG, the UPG can submit the gratification receipt report along with supporting

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL

dengan dokumen pendukung kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan laporan gratifikasi.

8. UPG PELNI membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi sesuai aplikasi GOL KPK dan melaporkannya kepada Direktur Penanggung Jawab *Good Corporate Governance* secara berkala setiap triwulan.
9. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang mudah kadaluwarsa, busuk, atau rusak dalam Batasan kewajaran (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan, atau Lembaga Sosial lainnya selanjutnya melaporkan kepada UPG PELNI dengan melampirkan bukti tanda penyerahan kepada UPG PELNI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagai dimaksud.
10. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) disimpan oleh penerima gratifikasi yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan laporan dan bukti tanda penyimpanan kepada UPG PELNI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.
11. Apabila diketahui adanya Insan PELNI menerima/memberi gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan dan Insan PELNI dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) PELNI dan saluran lainnya.
12. Mekanisme pelaporan akan dituangkan lebih lanjut dalam Pedoman Unit Pengendali Gratifikasi (UPG PELNI).

documents to KPK no later than 14 (fourteen) days from the date of receipt of the gratification report.

8. The PELNI UPG compiles a summary of gratification receipt and rejection reports according to the GOL KPK application and reports them to the Director in Charge of Good Corporate Governance on a quarterly basis.
9. For receipts that are perishable, spoiled, or damaged within reasonable limits (e.g., food and beverages), they can be donated to orphanages, nursing homes, those in need, or other social institutions, and reported to the PELNI UPG with proof of handover within 14 (fourteen) days from the date of receipt.
10. For receipts that are not perishable (e.g., money, gold, and others), they are kept by the respective gratification recipient until the ownership status is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK), with a report and proof of storage submitted to the PELNI UPG no later than 14 (fourteen) days from the date of receipt.
11. If it is found that a PELNI employee receives or gives a gratification that is not permitted or potentially involves misuse of authority/position and the employee does not report it, it can be reported through the PELNI Whistleblowing System (WBS) and other channels.
12. The reporting mechanism will be further outlined in the Guidelines for the Gratification Control Unit (UPG PELNI).

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI 2023

Selama tahun 2023, terdapat 4 (empat) laporan penerimaan gratifikasi dan telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) serta telah ditindaklanjuti.

GRATIFICATION RECEIPT REPORT 2023

Throughout 2023, there were 4 (four) reports of gratification receipt submitted to the Corruption Eradication Commission through the Gratification Online (GOL) application and have been followed up.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

PT PELNI (Persero) menjalankan kegiatan usahanya dengan melibatkan Perusahaan lain, mencakup Perusahaan-Perusahaan penyedia barang dan jasa penunjang pada industri transportasi. Atas hal tersebut, Perseroan menerapkan praktik pengadaan barang dan jasa dengan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar penerapan GCG yang berlaku.

Secara internal, proses pengadaan barang dan jasa Perseroan dilakukan dengan mengacu pada *Standard Operational Procedure* Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 10.23/01/SK/HKO.01/2019 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 07.26/03/SK/HKO.01/2021 dan kewenangan Direksi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau penggunaan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.17/3/SK/HKO.01/2017. Kebijakan internal pengadaan barang dan jasa Perseroan secara mendasar mengacu pada Peraturan Menteri BUMN terkait Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor PER-08/MBU/12/2019.

Manajemen rantai pasok PT PELNI (Persero) juga mencakup *assessment* pada pemasok terkait *quality, delivery*, dan *service* (QDS), yang dilakukan dengan memberikan formulir penilaian kepada user untuk pekerjaan *repeat order*.

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) yang diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 05.27/01/SK/HKO.01/2022 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Direksi Nomor 10.23/01/SK/HKO.01/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, diagram alur pengadaan barang dan jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) conducts its business activities involving other companies, including providers of goods and services supporting the transportation industry. Accordingly, the Company implements practices for the procurement of goods and services, always adhering to applicable laws and GCG standards.

Internally, the procurement process of the Company is conducted in accordance with the Standard Operational Procedure for Procurement of Goods and Services at PT PELNI (Persero) established under Board of Directors Decree No. 10.23/01/SK/HKO.01/2019 as amended by Board of Directors Decree No. 07.26/03/SK/HKO.01/2021, and the authority of the Board of Directors in the procurement process or budget utilization as per Board of Directors Decree No. 01.17/3/SK/HKO.01/2017. The Company's internal procurement policy fundamentally complies with the State-Owned Enterprises Ministerial Regulation concerning Procurement of Goods and Services, Number PER-08/MBU/12/2019.

PT PELNI (Persero)'s supply chain management also includes assessment of suppliers related to quality, delivery, and service (QDS), conducted by providing assessment forms to users for repeat order jobs.

MECHANISM OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Based on the Procurement of Goods and Services Guidelines applicable at PT PELNI (Persero) regulated under Board of Directors Decree No. 05.27/01/SK/HKO.01/2022, which amended the Second Board of Directors Decree No. 10.23/01/SK/HKO.01/2019 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services, the procurement process diagram of the Company is as follows:

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa PELNI
PELNI Goods and Services Procurement Mechanism

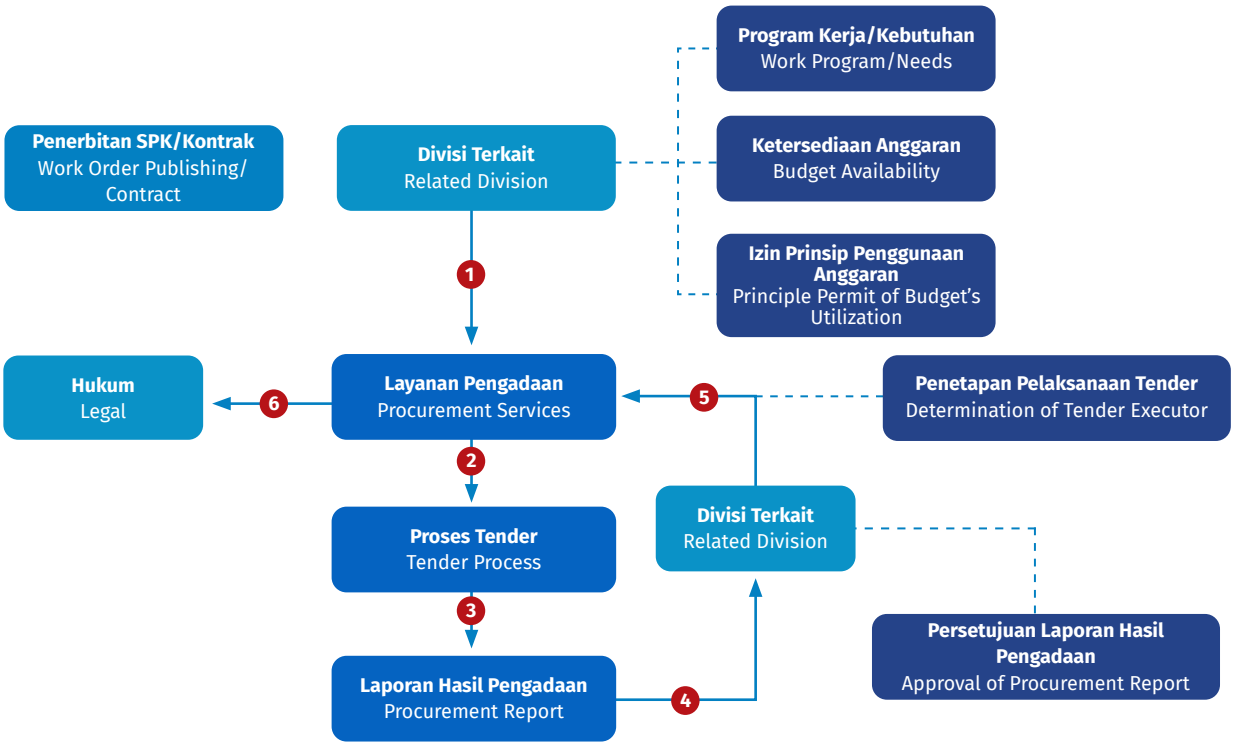

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

PT PELNI (Persero) telah menerapkan penilaian terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2023, yang dilakukan secara *self assessment* yang didampingi oleh Konsultan Kantor Jasa Akuntan Willy Wilarjo pada pelaksanaan *self assessment* GCG untuk tahun buku 2023 dilakukan pada 20 Februari - 14 April 2024.

Aspek-aspek yang digunakan sebagai kriteria penilaian adalah sebagai berikut:
1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Dewan Komisaris.
4. Direksi.
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi.

PT PELNI (Persero) has conducted an assessment of Good Corporate Governance (GCG) for 2023, which was carried out through a self-assessment process accompanied by Consultant from Willy Wilarjo Accounting Office from February 20 to April 14, 2023.

The criteria used for assessment are as follows:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance.
2. Shareholders and General Meeting of Shareholders/ Owners.
3. Board of Commissioners.
4. Board of Directors.
5. Information Disclosure and Transparency.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

HASIL PENILAIAN GCG
Atas penilaian GCG tersebut, PT PELNI (Persero) memperoleh hasil penilaian yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

GCG ASSESSMENT RESULTS
Based on this GCG assessment, PT PELNI (Persero) achieved detailed results as presented in the table below:

Aspek Pengujian/Indikator/ Parameter Testing Aspect/Indicator/ Parameter		Bobot Weight	Capaian Tahun 2021 2021 Achievement		Capaian Tahun 2022 2022 Achievement		Capaian Tahun 2023 2023 Achievement	
			Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,214	88,77%	6,183	88,33%	6,816	97,373%
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)	9	8,149	90,54%	8,143	90,48%	7,557	83,971
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	31,351	89,57%	31,166	89,05%	32,153	91,865
IV	Direksi Board of Directors	35	31,079	88,80%	30,956	88,45%	32,062	91,605
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	8,434	93,71%	7,953	88,37%	8,223	91,480
Sub Total **Subtotal**		**95**	**85,227**		**84,401**		**86,821**	
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5	-		-		-	
SKOR KESELURUHAN **OVERALL SCORE**			**85,227**	**Sangat Baik** **Very Good**	**84,401**	**Baik** **Good**	**86,821**	**Sangat Baik** **Very Good**

Berdasarkan *Self Assessment* terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2023, dengan didampingi Konsultan Kantor Jasa Akuntan Willy Wilarjo, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG Perusahaan mencapai skor 86,821. Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat "SANGAT BAIK".

Based on the Self-Assessment of GCG implementation for 2023, conducted with the assistance of Consultant from Willy Wilarjo Accounting Firm, it is concluded that the Company's GCG implementation achieved a score of 86.821. This score falls within the category of "VERY GOOD."

REKOMENDASI PENILAIAN GCG
Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG dan dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik

GCG ASSESSMENT RECOMMENDATIONS
Regarding weaknesses in GCG implementation and efforts to improve the performance of best practice GCG application,

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

penerapan GCG, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi prioritas tindak lanjut oleh organ Perseroan sebagai berikut:

1. Aspek Pemegang Saham
   a. Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir.
   b. Keputusan RUPS memuat alasan pemberhentian Direksi.
   c. Penetapan anggota Komisaris yang Definitif oleh RUPS tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir.
   d. Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP dilaksanakan tepat waktu.
   e. Pengesahan/persetujuan rancangan RKAP dilaksanakan tepat waktu.
   f. Persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan Pemegang Saham dilaksanakan tepat waktu.
   g. Penilaian Kinerja anggota Direksi (Individu) oleh Pemegang Saham dituangkan dalam risalah RUPS.
   h. Besaran honorarium KAP dituangkan dalam risalah RUPS.
   i. Menetapkan sistem penerimaan laporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Aspek Dewan Komisaris
   a. Memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS dengan simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP.
   b. Permasalahan dan keluhan dari *Stakeholders* dibahas secara intensif dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian serta menyampaikan nya kepada Direksi.
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian arahan terhadap kebijakan:
      i. Sistem pengendalian intern.
      ii. Manajemen risiko Perusahaan.
      iii. Sistem teknologi informasi.
      iv. Mutu dan pelayanan.
   d. Melakukan telaah secara khusus atas laporan hasil *assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta memantau tindak lanjut *Area of Improvement* hasil *assessment* GCG oleh Direksi.
   e. Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris (*Self-assessment*) dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

there are several priorities for follow-up action by the Company's organs as follows:

1. Shareholder Aspect
   a. Appointment of definitive Board members by the General Meeting of Shareholders (RUPS) within 30 (thirty) days of the end of their term.
   b. GMS decisions include reasons for the dismissal of Directors.
   c. Appointment of definitive Commissioners by GMS within 30 (thirty) days of the end of their term.
   d. Timely approval of RJPP draft or RJPP revisions.
   e. Timely approval of RKAP draft.
   f. Approval/decision on corporate action proposals requiring approval/decision from Shareholders is done timely.
   g. Shareholder assessment of Directors' (Individual) performance is documented in the minutes of GMS.
   h. Amount of honorarium for Public Accountant Firm (KAP) is documented in the minutes of GMS.
   i. Establishing a system for receiving reports on indications of performance decline from Directors and/or Board of Commissioners.
2. Board of Commissioners Aspect
   a. Providing opinions and recommendations on RKAP drafts and submitting them to RUPS for consideration, concluding whether the RKAP drafts are aligned and/or not aligned with RJPP.
   b. Issues and complaints from stakeholders are intensively discussed, resulting in conclusions in the form of solution recommendations, which are then conveyed to the Directors.
   c. Conducting oversight and providing guidance on policies:
      i. Internal control system.
      ii. Company's risk management.
      iii. Information technology systems.
      iv. Quality and services.
   d. Conducting specific reviews of the results of implementing Good Corporate Governance assessments, and monitoring follow-up actions in the Area of Improvement resulting from GCG assessment by the Board of Directors.
   e. Evaluating the performance achievements of each member of the Board of Commissioners (Self-assessment) and documenting them in the minutes of the Board of Commissioners meeting.

f. Menginstruksikan kepada Komite Audit untuk melengkapi muatan program kerja Komite Audit yakni *Self-assessment* kinerja Komite Audit.

3. Aspek Direksi
   a. Menyelesaikan pemutakhiran SOP dan menetapkan dengan Keputusan Direksi.
   b. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris calon pejabat satu level di bawah Direksi, untuk pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut sebelum ditetapkan.
   c. Segera melaksanakan penyebaran kuesioner kepada insan PELNI terkait manfaat investasi Pembelian *Reefer Container.*
   d. Meningkatkan kapabilitas proses TI Perusahaan, sehingga tercapai tingkat kapabilitas seperti yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN dalam PER-02/MBU/2023 yaitu Level 3.00.
   e. Meningkatkan pelayanan utamanya layanan penjualan tiket secara *online,* serta berkoordinasi dengan mitra operator yaitu Bank – Bank yang melakukan kerjasama dengan PT PELNI, dengan lebih meningkatkan sistem penjualan tiket *online* untuk meminimalisir jumlah keluhan pelanggan.
   f. Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan menerbitkan *Internal Control Report.*
   g. Menyesuaikan komposisi tenaga auditor SPI pada level Pemeriksa Utama dan Madya serta menginstruksikan Audit Internal untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.
   h. Menyelenggarakan RUPS tepat waktu, yaitu untuk RUPS pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.
4. Aspek Pengungkapan
   a. Meningkatkan kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan.
   b. Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan agar mencantumkan nama pejabatnya.
   c. Berpartisipasi dalam *ARA,* dan berupaya untuk mendapatkan penghargaan.

f. Instructing the Audit Committee to complete the contents of the Audit Committee's work program, including the self-assessment of the Audit Committee's performance.

3. Board of Directors Aspect
   a. Completing the update of SOPs and establishing them with Board of Directors Decisions.
   b. Submitting to the Board of Commissioners the names of candidates one level below the Board of Directors, for guidance on promotion and mutation plans before finalization.
   c. Immediately conducting a survey among PELNI personnel regarding the benefits of investing in Reefer Container Purchases.
   d. Enhancing the Company's IT process capabilities to achieve the required capability level as stipulated by the Ministry of SOEs in PER-02/MBU/2023, which is Level 3.00.
   e. Improving its core service, online ticket sales service, and coordinating with partner operators, namely Banks collaborating with PT PELNI, to enhance the online ticket sales system to minimize customer complaints.
   f. Evaluating/assessing the effectiveness of internal controls at the entity level and issuing an Internal Control Report.
   g. Adjusting the composition of SPI auditor personnel at the Senior and Middle levels and instructing Internal Audit to assess the quality assurance program and enhance the Internal Audit Function covering all aspects of internal oversight activities.
   h. Holding timely RUPS meetings, i.e., for RUPS approval/authorization of RJPP conducted within 60 (sixty) days after receiving the complete RJPP draft or before the next RJPP period begins.

4. Disclosure Aspect
   a. Enhancing adequate compliance of the Company with information control policies.
   b. Organizational structure in the form of charts, including names and positions, to include the names of officials.
   c. Participating in ARA, and striving to achieve awards.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL ASESMEN GCG TAHUN 2022

Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 Status tindak lanjut atas rekomendasi hasil asesmen GCG tahun 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S-MBU/2012, yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
ASPEK KOMITMEN COMMITMENT ASPECT					
1	3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The Board of Directors appoints a member of the Board as the person responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance.	Laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris belum memuat: Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada *stahekolders*. The report on the implementation of Good Corporate Governance submitted to the Shareholders and the Board of Commissioners has not yet included: Monitoring of compliance with applicable regulations and commitment to stakeholders.	Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada stahekolders akan dimuat dalam Laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang disampaikan kepada Direktur Penanggungjawab Penerapan GCG, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham di setiap tahunya Didalam Pelaporanya agar disampaikan rencana perbaikan dan target pelaksanaan Monitoring of compliance with applicable regulations and commitment to stakeholders will be included in the report on the implementation of Good Corporate Governance submitted to the Director in charge of GCG Implementation, the Board of Commissioners, and the Shareholders annually. The report will include improvement plans and implementation targets.	

FOLLOW-UP ON RECOMMENDATIONS FROM GCG ASSESSMENT 2022

Follow-up on recommendations from the GCG Assessment based on the Minister of SOEs Secretary Decision No. SK-16/S-MBU/2012. The status of follow-up on recommendations from the 2022 GCG assessment based on Minister of SOEs Secretary Decision No. SK-16/S-MBU/2012, which was followed up until the end of 2023, is as follows:

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya Laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang memuat: Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada *stahekolders*. Availability of the report on the implementation of Good Corporate Governance submitted to the Shareholders and the Board of Commissioners that includes: Monitoring of compliance with applicable regulations and commitment to stakeholders.	Periode Akhir Semester 2 Tahun 2023 End of Second Semester 2023 Period	Laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang memuat: Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada *stahekolders*. The report on the implementation of Good Corporate Governance submitted to the Shareholders and the Board of Commissioners that includes: Monitoring of compliance with applicable regulations and commitment to stakeholders.	Sudah tertindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
2	12	Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi. The company has implemented Gratification Control.	Belum ada ketentuan untuk melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala perangkat pendukung pengendalian gratifikasi There are currently no provisions for periodic review and improvement of the supporting tools for gratification control.	ketentuan untuk melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala perangkat pendukung pengendalian gratifikasi akan dimuat dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT PELNI (Persero) dan saat ini sedang dilakukan proses pemutakhiran oleh Divisi terkait. Provisions for periodic review and improvement of the supporting tools for gratification control will be included in the Gratification Control Guidelines of PT PELNI (Persero) and are currently being updated by the relevant division. Saat ini pedoman tersebut sedang dalam proses reveiw Divisi Hukum The guidelines are currently under review by the Legal Division.	
ASPEK PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDER APECT					
3	19	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi. The Shareholders/General Meeting of Shareholders/ Capital Owners establish regulations regarding the concurrent positions held by members of the Board of Directors	Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan namun belum mengatur jumlah jabatan yang boleh dirangkap, bila tidak ada konflik kepentingan The Shareholders/General Meeting of Shareholders have established provisions regarding the types of concurrent positions for members of the Board of Directors that may lead to conflicts of interest, but have not yet regulated the number of positions that can be concurrently held if there is no conflict of interest	Berkoordinasi dengan Asisten Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan untuk memasukkan *concern* jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris ke dalam salah satu perbaikan pada PER-3/MBU/2023 Coordinate with the Assistant Deputy for Legal and Legislative Affairs to include concerns about the maximum number of positions the Board of Commissioners can hold in one of the revisions to PER-3/MBU/2023	

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi yang memuat memuat secara ekplisit ketentuan mengenai peninjauan dan penyempurnaan berkala perangkat pendukung pengendalian gratifikasi The availability of the Gratification Control Unit Guidelines explicitly includes provisions for periodic review and improvement of the supporting tools for gratification control.	Akhir Desember 2023 End of December 2023	Ketetapan Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan yang belaku The updated and revised Gratification Control Unit Guidelines will be established in accordance with the applicable regulations.	Sudah tertindaklanjuti Has been followed up.
				Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
4	20	Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The Shareholders/General Meeting of Shareholders/ Capital Owners dismiss members of the Board of Directors in accordance with statutory regulations.	Keputusan RUPS belum memuat alasan pemberhentian Direksi The resolution of the General Meeting of Shareholders does not include the reasons for the dismissal of the Board of Directors.	Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN yang menerangkan pemberhentian anggota Direksi, telah terdapat Diktum alasan pemberhentian ("dalam rangka ...") In the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises explaining the dismissal of members of the Board of Directors, there is a dictum stating the reasons for dismissal ("in the context of...").	
5	26	Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Shareholders/General Meeting of Shareholders/ Capital Owners terminate members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in accordance with the prevailing laws and regulations.	Keputusan RUPS dan/ atau keputusan Menteri belum menyebutkan alasan pemberhentian Dewan Komisaris The resolution of the General Meeting of Shareholders and/ or the decision of the Minister has not yet stated the reasons for the dismissal of the Board of Commissioners.	Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN yang menerangkan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, telah terdapat Diktum alasan pemberhentian ("dalam rangka ...") In the Minister of State-Owned Enterprises' Decree, which explains the dismissal of members of the Board of Commissioners, there is a dictum stating the reasons for the dismissal ("in the context of...").	

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
			Terlampir sebagaimana gambar disamping pada Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK57/MBU/02/2022. Attached as shown in the adjacent image is a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK57/MBU/02/2022.	Sudah tertindaklanjuti Has been followed up.
			Terlampir sebagaimana gambar disamping pada Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-121/MBU/05/2022. Attached, as shown in the adjacent image, is a copy of the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-121/MBU/05/2022.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
6	27	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Penjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP. Shareholders/General Meeting of Shareholders/ Capital Owners provide approval for the Company's Long-Term Plan (RJPP) or its Revision.	Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP belum dilaksanakan tepat waktu The approval/endorsement of the RJPP or its Revision has not been executed on time.	1. Akan intensif berkoordinasi dengan Direksi dan unit terkait di Kementerian BUMN (Asdep Bidang Hukum Korporasi, Asdep Bidang Keuangan, Asdep Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan) untuk memberikan reviu dan evaluasi atas usulan RJPP. 2. Mengupayakan percepatan proses persetujuan RJPP sehingga sesuai dengan batas waktu sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023. 1. Intensive coordination will be undertaken with the Directors and relevant units in the Ministry of State-Owned Enterprises (Deputy for Corporate Law, Deputy for Finance, Deputy for Risk Management and Compliance) to review and evaluate the proposed RJPP. 2. Efforts will be made to expedite the approval process of the RJPP to meet the deadlines set forth in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-02/ MBU/03/2023	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Surat keluar yang diterbitkan atas surat usulan Direksi PELNI terkait pengesahan RJPP atau revisi RJPP. Outgoing correspondence issued regarding the Directors' proposal for the approval of the RJPP or its revision.	Target waktu pemberian tanggapan paling lambat 60 hari setelah diterimanya RJP. The target response time is no later than 60 days after the receipt of the RJPP.	Telah diterbitkan tanggapan atas Surat Direksi PELNI Nomor: 02.22/01/S-B/DU/2023 perihal Permohonan Persetujuan Revisi RJPP Tahun 2020 - 2024 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tanggal 22 Februari 2023. A response has been issued to the Directors of PELNI letter Number: 02.22/01/S-B/DU/2023 concerning the Request for Approval of the RJPP Revision for 2020 - 2024 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dated February 22, 2023 Tanggapan tersebut disampaikan melalui Surat Wakil Menteri BUMN Nomor: S-40/Wk2.MBU/06/2023 perihal Permohonan Persetujuan Revisi RJPP Tahun 2020 - 2024 tanggal 7 Juni 2023 The response was conveyed through the Deputy Minister of State-Owned Enterprises letter Number: S-40/Wk2.MBU/06/2023 concerning the Request for Approval of the RJPP Revision for 2020 - 2024 dated June 7, 2023.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
7	29	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan RUPS/Pemilik Modal. Shareholders/General Meeting of Shareholders (GMS)/Investors provide approval/decisions on proposed corporate actions that require the approval/ decision of the GMS/ Investors.	Persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan Pemegang Saham belum dilaksanakan tepat waktu (lebih dari 30 hari) Approval/decisions on proposed corporate actions that require shareholder approval have not been implemented in a timely manner (more than 30 days).	1. Akan intensif berkoordinasi dengan Direksi dan unit terkait di Kementerian BUMN (Asdep Bidang Hukum Korporasi, Asdep Bidang Keuangan, Asdep Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan) untuk memberikan reviu dan evaluasi atas usulan aksi korporasi. 2. Mengupayakan percepatan proses persetujuan Aksi Korporasi sehingga sesuai dengan batas waktu sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER 02/MBU/03/2023 1. Intensive coordination will be conducted with the Board of Directors and relevant units within the Ministry of State-Owned Enterprises (Deputy Assistant for Corporate Law, Deputy Assistant for Finance, Deputy Assistant for Risk Management and Compliance) to review and evaluate the proposed corporate actions. 2. Efforts will be made to expedite the approval process of the Corporate Actions to comply with the deadline as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER 02/ MBU/03/2023	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Surat keluar yang diterbitkan atas surat usulan Direksi PELNI terkait aksi korporasi. Outgoing letters issued based on the PELNI Board of Directors' proposals related to corporate actions.	Target waktu pemberian tanggapan paling lambat 30 hari. The target response time is a maximum of 30 days.	Dalam tahun 2023 terdapat beberapa surat usulan dari Direksi PELNI terkait aksi korporasi kepada Menteri BUMN selaku RUPS, atas surat tersebut telah diterbitkan surat persetujuan/ keputusan atas usulan aksi korporasi tersebut sebagaimana terlampir dalam tautan google drive berikut. In 2023, several proposals from the PELNI Board of Directors related to corporate actions were submitted to the Minister of State-Owned Enterprises as the GMS. Approval/decisions on these proposed corporate actions have been issued as detailed in the following Google Drive link.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings
8	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. The General Meeting of Shareholders/Capital Owners provides an assessment of the performance of the Board of Directors and the performance of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	1. Belum ada Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individu, yang disahkan/disetujui Pemegang Saham 1. There is no Management Contract that includes the individual performance targets of the Board of Directors, approved by the Shareholders.	Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER 02/ MBU/03/2023, bahwa KPI Direksi secara individu disahkan oleh Dewan Komisaris. KPI Direksi yang telah disahkan Dewan Komisaris akan disatukan dalam Kontrak Manajemen Kolegial. In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER 02/ MBU/03/2023, the individual KPIs of the Board of Directors are approved by the Board of Commissioners. The KPIs of the Board of Directors, which have been approved by the Board of Commissioners, will be consolidated into the Collegial Management Contract.
9	30		2. RUPS/Pemegang Saham belum memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi (Individu) dan capaian kinerja kolegial Dewan Komisaris 2. The General Meeting of Shareholders (GMS)/ Shareholders has not yet provided an assessment of the performance of individual members of the Board of Directors and the collegial performance achievements of the Board of Commissioners.	Akan dilakukan evaluasi atas capaian KPI Direksi secara individu dan capaian KPI Dewan Komisaris An evaluation of the individual KPI achievements of the Board of Directors and the KPI achievements of the Board of Commissioners will be conducted.

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial Tahun 2023 dalam agenda keputusan RUPS RKAP Tahun 2023. The establishment of the Annual Management Contract, which includes the Collegial Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Directors for 2023, was included in the agenda of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the Company Work Plan and Budget (RKAP).	Telah dilaksanakan bersamaan dengan RUPS RKAP Tahun 2023 pada tanggal 30 Januari 2023. This was conducted simultaneously with the 2023 AGMS on January 30, 2023.	Pelaksanaan RUPS tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 39 tanggal 30 Januari 2023. The implementation of this AGMS has been documented in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, Number 39, dated January 30, 2023.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Hasil evaluasi atas capaian KPI Direksi secara individu dan capaian KPI Dewan Komisaris. The evaluation results of the individual KPI achievements of the Board of Directors and the KPI achievements of the Board of Commissioners.	Akan dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi laporan tahunan. Will be conducted concurrently with the evaluation of the annual report.	Evaluasi capaian KPI Direksi secara individu belum dilakukan, karena capaian KPI yang disampaikan dalam laporan manajemen merupakan KPI Kolegial. Evaluasi atas capaian KPI Dewan Komisaris telah disampaikan bersamaan dengan evaluasi laporan tahunan 2022 sebagaimana terlampir. The evaluation of the individual KPI achievements of the Board of Directors has not yet been conducted, as the KPI achievements presented in the management report are collegial KPIs. The evaluation of the KPI achievements of the Board of Commissioners was presented along with the evaluation of the 2022 annual report, as attached.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
10	33	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The Shareholders/General Meeting of Shareholders/ Capital Owners grant approval for the annual report, including the ratification of the financial statements and the supervisory duties of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors.	Belum ada pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ditetapkan Pemegang Saham/RUPS There are no established guidelines for the preparation of the supervisory duty report of the Board of Commissioners as determined by the Shareholders/ General Meeting of Shareholders.	Berkoordinasi dengan Asdep Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan Asdep Bidang Hukum Korporasi untuk menyusun pedoman Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BUMN Coordinate with the Assistant Deputy for Risk Management and Compliance and the Assistant Deputy for Corporate Law to prepare the guidelines for the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises (SOEs).	
11	33	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The Shareholders/General Meeting of Shareholders/ Investors have approved the annual report, including the ratification of the financial statements and the supervisory duties of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors.	Belum ada hasil telaahan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham There has been no review of the supervisory duties report of the Board of Commissioners by the Shareholders.	Sudah dilakukan telaahan dan disampaikan dalam RUPS Tahunan. The review has been conducted and presented at the Annual General Meeting of Shareholders.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
				Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet
	Hasil telaahan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. The results of the review of the supervisory duties report of the Board of Commissioners.	Dilaksanaan bersamaan dengan evaluasi laporan tahunan Conducted concurrently with the evaluation of the annual report.	Telah dilaksanakan RUPS Audited Tahun Buku 2022 pada tanggal 19 Juni 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 32 tanggal 21 Juni 2023. The Audited General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2022 was held on June 19, 2023, as documented in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. 32 dated June 21, 2023.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
12	38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/ pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Shareholders/Investors provide guidance and oversight for the implementation of Good Corporate Governance to the Board of Directors and the Board of Commissioners/ Supervisory Board.	Pemegang Saham belum menindaklanjuti seluruh area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan The Shareholders have not yet addressed all areas of improvement identified in the assessment of the implementation of Good Corporate Governance in the relevant company.	1. Menyusun rencana tindaklanjut *Area of Improvement* hasil *assessment* GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan disampaikan kepada Direksi. 2. Melakukan *monitoring* terhadap tindaklanjut *Area of Improvement assessment* GCG dan membuat rekapitulasi atas penyelesaian *Area of Improvement* tersebut. 1. Develop an action plan for the areas of improvement resulting from the GCG assessment for the Shareholder Aspect and present it to the Board of Directors. 2. Monitor the follow-up on the areas of improvement identified in the GCG assessment and compile a summary of the resolution of these areas of improvement.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	sebagaimana terlampir As attached.	sebagaimana terlampir As attached.	sebagaimana terlampir As attached.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
13	40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan. Shareholders/Capital Owners respond to the information received from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Supervisors regarding indications of performance decline and significant company losses.	RUPS belum menetapkan sistem penerimaan laporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris The General Meeting of Shareholders (GMS) has not yet established a system for receiving reports of performance decline indications from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.	Kementerian BUMN telah membangun sistem informasi manajemen Kementerian BUMN yang memfasilitasi penyampaian laporan kinerja berkala dari BUMN ke Kementerian BUMN.Sistem dibangun tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengetahui adanya gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Namun demikian, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar laporan gejala penurunan kinerja disampaikan oleh Dewan Komisaris. Atas laporan dimaksud, dilakukan evaluasi untuk kemudian disusun langkah-langkah penyehatan atau perbaikan kinerja BUMN secara bersama-sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam tahun 2022 tidak ada gejala penurunan kinerja PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) has developed a management information system that facilitates the submission of periodic performance reports from SOEs to the Ministry. This system is not specifically designed to detect indications of performance decline from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners. However, according to the provisions in the Articles of Association, reports of performance decline indications are submitted by the Board of Commissioners. Based on these reports, an evaluation is conducted, and steps are taken to improve or restore the performance of the SOEs, in collaboration with the Board of Directors and the Board of Commissioners. In 2022, there were no indications of performance decline for PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Jika terdapat indikasi atau gejala penurunan kinerja (berdasarkan laporan keuangan), maka Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat bersurat kepada Keasdepan Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan lanjutan antara Keasdepan Keuangan, Keasdepan Teknis, dan BUMN terkait. Apabila diperlukan, maka akan dilakukan revisi RKAP If there are indications or signs of performance decline (based on financial reports), the Board of Directors and/or the Board of Commissioners may send a letter to the Deputy for Finance for further discussion with the Deputy for Technical Affairs and the relevant SOE. If necessary, the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) will be revised.	Berdasarkan pasal 215 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/3023, laporan triwulan (yang membuat laporan keuangan triwulanan) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir. According to Article 215 of the Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/2023, quarterly reports (including quarterly financial reports) must be submitted no later than one (1) month after the end of the respective quarter. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat bersurat mengenai penurunan gejala bersamaan/setelah penyampaian laporan triwulan, untuk selanjutnya diadakan pembahasan lanjutan The Board of Directors and/or the Board of Commissioners may send a letter regarding performance decline indications together with or after the submission of the quarterly report, for further discussion.	(tidak ada pembahasan penurunan kinerja di tahun 2022) (There was no discussion of performance decline in 2022)	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
ASPEK DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS ASPECT					
14	46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya. The Board of Commissioners/ Supervisory Board has access to company information according to its authority.	Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris/dewan Pengawas tentang informasi yang disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi. There are policies/guidelines from the Board of Commissioners/ Supervisory Board regarding the information provided by the Board of Directors, and these policies have been communicated to the Board of Directors.	Kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi yang disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris telah ditetapkan melalui pedoman *Good Corporate Governance* The policies/guidelines of the Board of Commissioners regarding the information provided by the Board of Directors to the Board of Commissioners have been established through the Good Corporate Governance guidelines. Kebijakan mengenai penyampaian informasi insidentil oleh direksi kepada Direksi akan dimuat kedalam pedoman *Board Manual* The policy regarding the incidental information submission by the Board of Directors to the Board of Commissioners will be included in the Board Manual guidelines.	
15	48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners/ Supervisory Board approves the draft RKAP submitted by the Board of Directors.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners/ Supervisory Board reviews the draft RKAP submitted by the Board of Directors.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit akan melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners/ Supervisory Board, through the Audit Committee, will review the draft of the RKAP (Work Plan and Budget) submitted by the Board of Directors.	

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya Pedoman *Good Corporate Governance* yang memuat memuat secara ekplisit ketentuan mengenai informasi yang disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris The availability of the Good Corporate Governance Guidelines, which explicitly contain provisions regarding the information provided by the Board of Directors to the Board of Commissioners. Tersedianya Pedoman *Board Manual* yang memuat memuat secara ekplisit ketentuan mengenai penyampaian informasi insidentil The availability of the Board Manual Guidelines, which explicitly contain provisions regarding the delivery of incidental information.	Akhir Desember 2023 End of December 2023	Ketetapan Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan yang belaku The updated Good Corporate Governance Guidelines will be established and aligned with prevailing regulations. Ketetapan Pedoman Board Manual yang telah diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan yang belaku The updated Board Manual Guidelines will be established and aligned with prevailing regulations.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi dan tersedianya hasil telaah atau *review* The Board of Commissioners/ Supervisors reviews the proposed RKAP submitted by the Board of Directors and ensures the availability of the review results.	Desember 2023 December 2023	Hasil telaahan terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi Review results of the proposed RKAP submitted by the Board of Directors	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings
16	49	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan. The Board of Commissioners/ Supervisory Board provides timely and relevant guidance on significant business environment changes expected to impact the company's business and performance.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan. The Board of Commissioners/ Supervisory Board holds internal discussions on current issues related to changes in the business environment and challenges faced by the company.	Kebijakan mengenai perubahan bisnis telah dimuat kedalam pedoman *Board Manual* The policy on business changes has been included in the Board Manual guidelines.
17	51	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan. The Board of Commissioners provides guidance on strengthening the company's internal control system.	Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern tetapi belum melakukan telaah atas: 1. hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; 2. hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; 3. internal *control report*. The Board of Commissioners has reviewed the policies/drafts and the implementation of the internal control system but has not yet reviewed: 1. The results of the evaluation of the effectiveness of internal controls at the entity level; 2. The results of the evaluation of the effectiveness of internal controls at the operational/ activity level; 3. The internal control report.	Dewan komisaris akan melakukan telaah terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern dan hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas The Board of Commissioners will review the implementation of the internal control system and the evaluation results of the internal control's effectiveness at the operational/activity level. Manajemen segera membuat internal *control report* Management shall promptly prepare an internal control report.

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya kebijakan mengenai perubahan bisnis yang telah termuat dalam pedoman *Board Manual* The availability of policies regarding business changes included in the Board Manual guidelines	Desember 2023 December 2023	Ketetapan Pedoman Board Manual yang telah diperbaharui dan disesuaikan dengan memuat isu perubahan bisnis The revised and updated Board Manual guidelines incorporate issues related to business changes	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Tersedianya telaah terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern dan hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas An assessment of the implementation of the internal control system and an evaluation of the effectiveness of internal controls at the operational/activity level will be provided. Manajemen akan membuat internal control report Management will prepare an internal control report.	Desember 2023 December 2023	Risalah dan Nota Dinas dari Komite Audit setiap Triwulanan Minutes and Memorandums from the Audit Committee on a quarterly basis.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
18	53	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan. The Board of Commissioners provides guidance on the company's information technology systems.	Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko belum melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan (mencakup aspek TI sesuai *master plan* TI dan kebutuhan perkembangan TI) The Board of Commissioners, assisted by the Risk Management Monitoring Committee, has not yet reviewed the information technology system policies and their implementation in accordance with the established work plan (covering IT aspects as per the IT master plan and IT development needs).	Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan (mencakup aspek TI sesuai *master plan* TI dan kebutuhan perkembangan TI) The Board of Commissioners, assisted by the Risk Management Monitoring Committee, has reviewed the information technology system policy and its implementation according to the established work plan (covering IT aspects according to the IT master plan and IT development needs).	
19	54	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir. The Board of Commissioners provides guidance on career development policies and their implementation.	Dewan Komisaris dibantu Komite Dekom telah melakukan telaah terhadap Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi tetapi belum melakukan telaah terhadap kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi The Board of Commissioners, assisted by the Dekom Committee, has reviewed the promotion and transfer plans for positions one level below the Board of Directors but has not yet reviewed career development policies and their implementation, including the placement of employees in positions within the company's organizational structure, promotions and demotions, as well as transfers.	Dewan Komisaris dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut The Board of Commissioners, assisted by the Nomination and Remuneration Committee, has reviewed the implementation of human resource management policies, including employee placement in positions within the company's organizational structure, promotions and demotions, and transfers within the company, as well as the implementation of these policies. Terkait telaah atas rencana pembaharuan atas kebijakan pola karir akan dilaksanakan setelah dilaksanakannya finalisasi Draf Surat Keputusan Pola Karir The review of the career path policy renewal plan will be conducted after the finalization of the Career Path Decision Letter Draft.	

Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
Tersedianya hasil telaahan atau risalah rapat yang memuat kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan (mencakup aspek TI sesuai *master plan* TI dan kebutuhan perkembangan TI) The availability of the review results or meeting minutes that include information technology system policies and their implementation in accordance with the established work plan (covering IT aspects as per the IT master plan and the needs for IT development).	Desember 2023 December 2023	Hasil telaahan dan risalah rapat Review results and meeting minutes	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
Tersedianya hasil telaahan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut The availability of review results regarding the implementation of human resource management policies, which include employee placement in positions within the company's organizational structure, promotions and demotions, as well as transfers within the company and the execution of these policies	Desember 2023 December 2023	Hasil telaahan dan risalah rapat Review results and meeting minutes	Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
20	56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners/ Supervisory Board provides guidance on procurement policies and their implementation.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan terhadap terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya The Board of Commissioners/ Supervisory Board discusses the procurement policies and their implementation.	Dewan Komisaris dibantu Komite Audit telah melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, has reviewed the procurement policy.	
21	57	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut The Board of Commissioners/ Supervisory Board provides guidance on quality and service policies and their implementation.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan terhadap terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. The Board of Commissioners/ Supervisory Board discusses quality and service policies and their implementation.	Dewan Komisaris dibantu Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya The Board of Commissioners, assisted by the Risk Management Monitoring Committee, has reviewed the quality and service policy along with its implementation.	
22	61	Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS. The Board of Commissioners (based on the Audit Committee's recommendation) proposes candidates for External Auditor to the General Meeting of Shareholders.	Dalam hal pembahasan/simpulan atas usulan calon auditor eksternal belum berdasarkan kriteria yang jelas dan belum ada evaluasi kinerja auditor eksternal sebelumnya. Regarding the discussion/ conclusion on the proposal of external auditor candidates, it is not based on clear criteria and there has been no evaluation of the previous external auditor's performance.	Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit bersama dengan Unit Kerja terkait telah melakukan telaahan terkait evaluasi kinerja Auditor dan disampaikan surat Komisaris kepada Pemegang Saham The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee together with the related Work Unit, has conducted a review related to the performance evaluation of the Auditor and conveyed the letter from the Commissioners to the Shareholder.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya hasil telaahan atau risalah rapat yang memuat kebijakan pengadaan dan pelaksanannya The availability of review results or meeting minutes containing procurement policies and their implementation.	Desember 2023 December 2023	Hasil telaahan dan risalah rapat Review results and meeting minutes	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Tersedianya hasil telaahan atau risalah rapat yang memuat kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya Availability of meeting review results or minutes containing quality and service policies along with their implementation	Desember 2023 December 2023	Hasil telaahan dan risalah rapat Review results and meeting minutes	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Tersedianya Surat Komisaris ke Pemegang Saham terkait Hasil Evaluasi Kinerja Auditor Availability of the Commissioners' Letter to Shareholders regarding the Auditor Performance Evaluation Results	Desember 2023 December 2023	Surat Komisaris ke Pemegang Saham Commissioners' Letter to Shareholders	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
23	62	Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners ensures that external and internal audits are conducted effectively and reviews complaints related to the SOE received by the Board of Commissioners.	Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Dekom telah melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya tetapi belum melakukan penilaian melalui: 1. telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan 2. telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. The Board of Commissioners, assisted by the Dekom Committee, has assessed the effectiveness of the external audit implementation through monitoring the alignment of audit progress completion with the work plan but has not assessed through: 1. Reviewing the compliance of the audit implementation with public accountant professional standards; and 2. Reviewing the external audit results and the quality of external audit recommendations.	Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit bersama dengan Unit Kerja terkait telah melakukan telaahan terkait evaluasi kinerja Auditor dan disampaikan surat Komisaris kepada Pemegang Saham Akan dilaksanakan telaah oleh Komite Audit perihal kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik dan kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee along with the relevant Work Unit, has conducted a review related to the performance evaluation of the Auditor and communicated the Commissioners' letter to the Shareholders. A review will be conducted by the Audit Committee regarding the compliance of the audit implementation with public accounting profession standards, as well as the completeness of the findings' attributes and the quality of recommendations.	

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya Surat Komisaris ke Pemegang Saham terkait Hasil Evaluasi Kinerja Auditor Availability of the Commissioners' Letter to Shareholders regarding the Auditor Performance Evaluation Results	Desember 2023 December 2023	Surat Komisaris ke Pemegang Saham Commissioners' Letter to Shareholders	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
24	65	Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perusahaan/Perusahaan Patungan. The role of the Board of Commissioners in the selection of candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company's subsidiaries/ joint ventures.	Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan/Perusahaan patungan melebihi 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan. The written determination of the appointment process for the Board of Directors and the Board of Commissioners of subsidiaries/ joint ventures exceeds 15 calendar days from the date of receipt of the candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners of subsidiaries/ joint ventures.	Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan tidak melebihi 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan The written determination of the appointment process for the Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/ joint ventures will not exceed 15 calendar days from the date of receipt of the candidates for Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/ joint ventures.	
25	67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. The Board of Commissioners/ Supervisory Board evaluates the Board of Directors and reports the results to the Shareholders/Owners of Capital.		Dekom telah melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dan telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat 26/DK/II/-2023 Tanggal 28 Februari 2023 The Board of Commissioners has conducted an individual performance assessment of the Directors and has conveyed it to the Shareholder through letter 26/DK/II/-2023 dated February 28, 2023.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya Surat Komisaris terkait proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/ perusahaan patungan tidak melebihi 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahan Patungan. The availability of the Commissioner's Letter regarding the appointment process of Directors and the Board of Commissioners of subsidiaries/ joint ventures must not exceed 15 calendar days from the date of receipt of the candidates for Directors and the Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures.	Desember 2023 December 2023	Surat Komisaris tidak lebih dari 15 hari kalender The Commissioner's Letter must be provided within 15 calendar days.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Tersedianya surat Dewan Komisaris penilaian kinerja Direksi secara individu dan telah disampaikan kepada Pemegang Saham. The availability of the letter from the Board of Commissioners regarding the individual performance evaluation of the Directors has been submitted to Shareholder.	Desember 2023 December 2023	Surat Dewan Komisaris Letter from the Board of Commissioners	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings
26	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The Board of Commissioners/ Supervisory Board ensures that the principles of Good Corporate Governance are effectively and sustainably implemented.	Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap tindak lanjut *area of improvement* hasil *assessment* GCG tetapi belum melakukan telaah terhadap laporan hasil *assessment/review* atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan. The Board of Commissioners has reviewed the follow-up on areas of improvement from the GCG assessment results but has not yet reviewed the report on the results of the assessment/review of Good Corporate Governance (GCG) implementation, the GCG Code, and other technical policies/ regulations, as well as the GCG report disclosed in the annual report.	Dekom bersama Komite akan melakukan telaahan terhadap tindak lanjut *area of improvement* hasil *assessment* GCG tetapi belum melakukan telaah terhadap laporan hasil *assessment/review* atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan. The Board of Commissioners, along with the Committee, will review the follow-up on the areas of improvement from the GCG assessment results but has not yet reviewed the assessment/review report on the implementation of Good Corporate Governance, the GCG Code, and other technical policies/regulations, as well as the GCG report disclosed in the annual report.
27	73	Rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau anggaran dasar. Meetings of the Board of Commissioners/Supervisory Board are held regularly in accordance with applicable regulations and/or the articles of association.	1. Belum seluruhnya anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris membuat surat kuasa 2. Risalah Rapat Dewan Komisaris belum memuat penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut 1. Not all members of the Board of Commissioners who are unable to attend the Board of Commissioners' meetings issue a power of attorney. 2. The minutes of the Board of Commissioners' meetings do not provide explanations for absences from the meetings.	Dewan komisaris menyampaikan alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dan disampaikan dalam risalah rapat The Board of Commissioners provides reasons for the absence of the Board of Commissioners and reports it in the meeting minutes. Akan dibuatkan surat kuasa apabila Dewan Komisaris tidak hadir dalam rapat A power of attorney will be issued if the Board of Commissioners is absent from the meeting.

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya hasil telaahan atas AoI GCG Availability of Review Results on AoI GCG	Desember 2023 December 2023	*Updating progress* AoI GCG aspek Dewan komisaris Updating Progress on AoI GCG Aspect of the Board of Commissioners	Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet
	Tersedianya penjelasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam risalah rapat Availability of an Explanation for the Absence of the Board of Commissioners in the Meeting Minutes Tersedianya surat kuasa kepada Dewan Komisaris apabila Dewan Komisaris tidak hadir dalam rapat Availability of a Power of Attorney to the Board of Commissioners in the Event of Their Absence from the Meeting	Desember 2023 December 2023	Risalah rapat dan surat kuasa Meeting Minutes and Power of Attorney	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
28	76			Dewan Komisaris dapat mengakses google drive atau penyimpanan tersentralisasi secara digital untuk mempermudah Dewan Komisaris /Komite dalam mengakses data/ dokumen/informasi sewaktu-waktu The Board of Commissioners can access Google Drive or centralized digital storage to facilitate the access of data/documents/ information by the Board of Commissioners/Committees at any time.	
29	81	Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memiliki piagam/*charter* dan program kerja tahunan. The committees of the Board of Commissioners/ Supervisory Board have a charter and an annual work program.	Program Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi belum memuat telaah *Self-assessment* kinerja Komite Audit. The work programs of the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee do not yet include a review of the Audit Committee's self-assessment performance.	Komite melakukan *self assessment* kinerja atas Program Kerjanya masing-masing The Committee conducts self-assessment of the performance of its respective Work Programs.	
30	83	Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The committees of the Board of Commissioners/ Supervisory Board report their activities and the results of their assignments to the Board of Commissioners/ Supervisory Board.	Komite Dekom telah menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris tetapi belum ada laporan tahunan Komite Dekom kepada Dewan Komisaris The Dekom Committee has submitted Quarterly Reports to the Board of Commissioners but there is no annual report from the Dekom Committee to the Board of Commissioners yet.	Komite membuat laporan secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris The Committee prepares quarterly and annual reports to the Board of Commissioners.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya akses google drive Availability of Google Drive Access	Desember 2023 December 2023	Akses Google Drive Google Drive Access	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Tersedianya hasil *self assessment* tiap Komite Availability of self-assessment results for each Committee	Desember 2023 December 2023	Hasil *self assessment* tiap Komite Self-assessment results for each Committee	Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet
	Tersedianya laporan Komite secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris The availability of the Committee's quarterly and annual reports to the Board of Commissioners	Desember 2023 December 2023	Laporan triwulanan Komite Quarterly Committee Report	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
ASPEK DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT					
31	87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasioanl dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) Perusahaan The Board of Directors establishes operational policies and standard operating procedures (SOP) for the company's core business processes.	1. SOP untuk proses bisnis inti perusahaan belum seluruhnya dilaksanakan konsisten 2. Pedoman Penyusunan SOP belum dilaksanakan secara konsisten dimana perusahaan belum melakukan reviu atas SOP minimal 2 tahun sekali 1. The SOP for the company's core business processes have not been consistently implemented. 2. The SOP Preparation Guidelines have not been consistently followed, as the company has not reviewed the SOP at least once every two years.	Saat ini sedang dilakukan riviu untuk kebijakan atau aturan yang masa berlakunya sudah lebih dari 2 tahun dengan rincian sebagai berikut: - SOP keseluruhan - SOP Melebihi 2 tahun Currently, a review is being conducted for policies or regulations that have been in effect for more than two years, with the following details: - Overall SOP - SOP exceeding two years	
32	92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/ efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya. The Board of Directors responds to business opportunity proposals that have the potential to increase company revenue, achieve company savings/efficiency, optimize asset utilization, and provide other benefits.	Belum ada mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/ Dewan Komisaris There is currently no mechanism for the Board of Directors to respond to business opportunity proposals from management below the Board of Directors/ members of the Board of Directors/ the Board of Commissioners.	Telah disusun peraturan tentang Mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris melalui SK Direksi A regulation has been established regarding the mechanism for the Board of Directors to respond to business opportunity proposals from management below the Board of Directors/members of the Board of Directors/the Board of Commissioners through a Board of Directors Decree.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	konsistensi Perusahaan dalam menetapkan SOP untuk proses inti bisnis The company's consistency in establishing SOP for core business processes	Desember 2023 December 2023	Nota Dinas Permohonan Pembaharuan Pedoman/SOP/SK Direksi yang sudah melebihi massa dari 2 tahun Memorandum Request for Renewal of Guidelines/SOP/Directors' Decrees that have been in effect for more than two years	Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet
	Mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris dapat mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi The mechanism for the Board of Directors to respond to business opportunity proposals from management below the Board of Directors/members of the Board of Directors/the Board of Commissioners can refer to the guidelines established based on the Board of Directors Decree.	Bulan April 2023 April 2023	SK Direksi Nomor 04.17/04/SK/HKO.01/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Pendampingan & Pembuatan Kajian Eksternal PT PELNI (Persero) Board of Directors Decree Number 04.17/04/SK/HKO.01/2023 concerning Standard Operating Procedures for Assistance & Preparation of External Studies of PT PELNI (Persero)	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
33	93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan. The Board of Directors responds to current external issues regarding changes in the business environment and its problems in a timely and relevant manner.	Belum ada mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu- isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan. There is no mechanism for the Board of Directors to promptly discuss current issues regarding changes in the business environment and problems that significantly impact the company's business and performance.	Mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu- isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan telah diatur dalam ketentuan SK Direksi The mechanism for the Board of Directors to promptly discuss current issues regarding changes in the business environment and problems that significantly impact the company's business and performance has been regulated in the Directors' Decree.	
34	95	Direksi memiliki sistem/ pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan. The Board of Directors has an objective and transparent system/ guideline for measuring and evaluating the performance of organizational units and positions (structural).	Sistem pengukuran kinerja untuk Pegawai Kantor Pusat telah didukung dengan aplikasi komputer tetapi untuk pegawai Cabang belum didukung dengan aplikasi Komputer The performance measurement system for Head Office Employees is supported by computer applications, but Branch Office employees are not yet supported by computer applications.	Tersedianya Pengukuran kinerja untuk Pegawai PT PELNI (Persero) di Kantor Pusat , Cabang dan Kapal telah didukung dengan aplikasi komputer, The performance measurement for PT PELNI (Persero) employees at the Head Office, Branch Offices, and Ships is now fully supported by computer applications.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu- isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan dapat mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi The mechanism for the Board of Directors to promptly discuss current issues regarding changes in the business environment and problems that significantly impact the company's business and performance can refer to the guidelines established based on the Directors' Decree.	Bulan April 2023 April 2023	SK Direksi Nomor 04.17/04/SK/HKO.01/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Pendampingan & Pembuatan Kajian Eksternal PT PELNI (Persero) Directors' Decree Number 04.17/04/SK/HKO.01/2023 concerning Standard Operating Procedures for Assistance & External Study Development of PT PELNI (Persero).	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Seluruh Pengukuran kinerja untuk Pegawai PT PELNI (Persero) di Kantor Pusat , Cabang dan Kapal telah didukung dengan aplikasi komputer 100 %G42 All performance measurements for PT PELNI (Persero) employees at the Head Office, Branch Offices, and Ships are 100% supported by computer applications.	Awal September 2023 Early September 2023	Laporan Rekapitulasi Hasil Penilaian Pegawai Darat (Kantor Pusat, Cabang, SBU) dan Pegawai Laut (Kapal Penumpang, Barang , Ternak) Summary Report of Employee Performance Assessments for Onshore Employees (Head Office, Branch Offices, SBUs) and Offshore Employees (Passenger Ships, Cargo Ships, Livestock Ships).	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
35	100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. The Board of Directors implements the information technology system in accordance with the established policies.	Laporan kinerja teknologi (termasuk hasil audit TI) belum disampaikan kepada Dewan Komisaris The technology performance report (including IT audit results) has not yet been submitted to the Board of Commissioners.	Laporan kinerja teknologi (termasuk hasil audit TI) telah disampaikan ke Dewan Komisaris melalui surat Direktur Utama PT PELNI (Persero) Nomor 01.12/02/S-B/DU/2024 Perihal Penyampaian Laporan Evaluasi Pencapaian Program Kerja (PMO) & Rencana Strategis TI Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2024 The technology performance report (including IT audit results) has been submitted to the Board of Commissioners through a letter from the President Director of PT PELNI (Persero) Number 01.12/02/S-B/DU/2024 regarding the Submission of the Evaluation Report on Work Program Achievements (PMO) & IT Strategic Plan for 2023 dated January 12, 2024.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya Laporan kinerja teknologi (termasuk hasil audit TI) yang terdapat pada Laporan Evaluasi Pencapaian Program Kerja (PMO) & Rencana Strategis TI Tahun 2023 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris The availability of the technology performance report (including IT audit results) is included in the Evaluation Report on Work Program Achievements (PMO) & IT Strategic Plan for 2023, which was submitted to the Board of Commissioners.	untuk Awal pelaksanaan audit / *assessment* TI dilaksanakan pada bulan November 2023 The initial implementation of the IT audit/assessment was carried out in November 2023. Proses Penyusunan Laporan Akhir audit / assessment TI Tahun Buku 2023 pada November 2023 The process of preparing the Final Report on the IT audit assessment for the 2023 Fiscal Year took place in November 2023. Pelaksanaan Penyampaian Hasil Audit / assessment TI Tahun Buku 2023 Ke Direksi pada Desember 2023 sedangkan Penyampaian Ke Dekom di TW 1 Tahun 2024 The implementation of the submission of IT audit/assessment results for the 2023 Fiscal Year to the Board of Directors took place in December 2023, while the submission to the Board of Commissioners will occur in the first quarter of 2024.	Laporan kinerja teknologi (termasuk hasil audit TI) yang terdapat pada Laporan Evaluasi Pencapaian Program Kerja (PMO) & Rencana Strategis TI Tahun 2023 The technology performance report (including IT audit results) is included in the Evaluation Report on Work Program Achievements (PMO) & IT Strategic Plan for 2023.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
36	101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan The Board of Directors has implemented a system for improving product and service quality.	Ada peningkatan keluhan pelanggan atas mutu produk/jasa (perbandingan tahun 2021 dan tahun 2022) There has been an increase in customer complaints regarding product/service quality (comparison between 2021 and 2022).	Peningkatan keluhan pelanggan berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penumpang pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, PT PELNI (Persero) telah menindaklanjuti keluhan pelanggan dengan rincian sebagai berikut: • Keluhan Pelanggan Tahun 2022 (Januari - Desember sebanyak 214 keluhan, dan sudah ditindaklanjuti (100%) sedangkan: • Keluhan Pelanggan Tahun 2023 (Januari - Juli) sebanyak 171 keluhan, dan sudah ditindaklanjuti 171 (100%) The rise in customer complaints is directly proportional to the increase in the number of passengers in 2022 compared to 2021. PT PELNI (Persero) has addressed customer complaints with the following details: • Customer Complaints in 2022 (January - December): 214 complaints, all of which have been addressed (100%). In comparison: • Customer Complaints in 2023 (January - July): 171 complaints, all of which have been addressed (100%).	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	peningkatan kinerja *contact center* atas terselsaikanya / terdiklanjutinya keluhan pelanggan There has been an improvement in the contact center's performance in resolving customer complaints.	31 Desember 2023 December 31, 2023	Laporan kinerja contact center atas Tindak Lanjut Hasil Keluhan Tahun Buku 2022 yang disampaikan kepada pimpinan unit kerja dan cabang yang disampaikan tiap bulannya The contact center performance report on the Follow-Up of Customer Complaints for the 2022 Fiscal Year has been submitted to the unit and branch managers on a monthly basis.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
37	103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	Hasil penilaian performance appraisal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan	PT PELNI (Persero) melalui Divisi SDM akan membuat instruksi kepada pimpinan unit kerja (level manager) untuk membuat usulan pengembangan karyawan yang ada di unit kerja masing-masing berdasarkan hasil penilaian *performance* appraisal karyawan. penerbitan instruksi tersebut akan dilaksanakan setelah dilaksanakannya penilaian kinerja pegawai semester I tahun 2023 yang direncanakan selesai pada bulan september minggu pertama. Divisi SDM akan mengimplementasikan sistem pengembanan pegawai berdasarkan nilai/ capaian kinerja pegawai. Divisi SDM sudah mengajukan permohonan penambahan fitur pada aplikasi *Performance Management System* (PMS) yang memungkinkan adanya rekap pegawai dengan kinerja dibawah target , item KPI yang belum tercapai dan rekomendasi pengembangan terhadap pegawai yang bersangkutan berdasarkan Nota Dinas Vp SDM kepada Divisi Tekonologi Informasi Nomor 08.24/26/ND-B/ SDM/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Permohonan *Change Request Modul Management* KPI Pada Aplikasi Portal HRIS (CR Nomor 6).	

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Hasil penilaian *performance* appraisal sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan. Tim SDM sedang melakukan proses pengembangan terhadap aplikasi PMS dengan menyediakan fitur untuk mengetahui Nilai/*performance* pegawai yang belum mencapai target dari yang telah ditetapkan.	Triwulan III Tahun 2024	penilaian *performance* appraisal sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan.	Sudah ditindaklanjuti (Konfirmasi SDM)

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
		The Board of Directors develops human resources (HR), evaluates performance, provides appropriate remuneration, and fosters an effective HR environment to support the company's achievements.	The results of the performance appraisal have not been fully utilized for employee development.	PT PELNI (Persero), through the HR Division, will issue instructions to unit heads (manager level) to propose employee development plans within their respective units based on the results of the performance appraisal. The issuance of these instructions will take place after the completion of the employee performance evaluation for the first semester of 2023, which is scheduled to be finished in the first week of September. The HR Division will implement an employee development system based on the performance scores/achievements of the employees. The HR Division has submitted a request for additional features in the Performance Management System (PMS) application. These features will allow for a summary of employees whose performance is below target, highlight unmet KPI items, and provide development recommendations for the concerned employees. This request was made through an official memo from the VP of HR to the Information Technology Division, numbered 08.24/26/ND-B/SDM/2023, dated August 24, 2023, regarding a Change Request for the KPI Management Module in the HRIS Portal Application (CR Number 6).	

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	The results of the performance appraisal are fully utilized for employee development. The HR team is in the process of enhancing the PMS application to include features that identify employees whose performance scores do not meet the established targets.	The third quarter of 2024	The results of the performance appraisal will be fully utilized for employee development.	Action has been taken (HR Confirmation)

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
38	104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan. The Board of Directors has implemented governance policies for subsidiaries and/or joint ventures.	Direksi belum menetapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan (*subsidiary governance*) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors has not yet established governance policies for subsidiaries and joint ventures, which include: the appointment of the Board of Commissioners and Directors, setting performance targets, performance evaluation, and incentives for the Board of Commissioners and Directors	Kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan (*subsidiary governance*) dan perusahaan patungan sedang dilakukan proses finalisasi bersama konsultan, The governance policies for subsidiaries and joint ventures are currently being finalized in collaboration with consultants.	
39	107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan. The Board of Directors establishes and implements an internal control system to protect and secure the company's investments and assets.	1. Perusahaan belum melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada: a. Tingkat Entitas b. Tingkat operasional 1. The company has not yet conducted an evaluation/assessment of the effectiveness of internal control at: a. The entity level b. The operational level 2. Perusahaan belum menerbitkan internal *control report* 2. The company has not yet issued an internal control report.	1. SPI akan melakukan pemetaan terkait evaluasi atas pengendalian intern untuk tiap obyek audit (pada cabang/kapal/divisi) 1. The Internal Audit Unit (SPI) will map out evaluations of internal controls for each audit object (branches/ships/divisions). 2. Penyusunan internal *control report* akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Sosialisasi dari BPKP terkait Evaluasi/Penilaian atas Efektivitas Pengendalian Intern 2. The preparation of the internal control report will be carried out after the socialization by BPKP regarding the Evaluation/Assessment of Internal Control Effectiveness.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	tersedianya kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan. The availability of governance policies for subsidiaries and/or joint ventures.	15-Nov-23 November 15, 2023	Pedoman *Subsidiary Governance* Subsidiary Governance Guidelines	Sudah ditindaklanjuti (Konfirmasi SDM) Action has been taken (HR Confirmation)
	Tersedianya Laporan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern pada tingkat operasional dan tingkat entitas The availability of the Internal Control Effectiveness Report at the operational level and the entity level.	Laporan efektifitas pengendalian intern Tingkat Operasional diselsaikan pada Triwulan II Tahun 2024 dan Tingkat Entitas di Akhir Tahun 2024 The Internal Control Effectiveness Report at the Operational Level will be completed in the second quarter of 2024, and at the Entity Level by the end of 2024.	Laporan efektifitas pengendalian intern Tingkat Operasional dan entitas The Internal Control Effectiveness Report at the Operational and Entity Levels.	Belum ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
40	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK). The Board of Directors follows up on the findings of the Internal Audit (SPI) and external auditors (KAP and BPK).	*Progress* (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI dan auditor eksternal sebesar 61,46% The progress (completion rate) of the implementation of recommendations from SPI and external auditors is 61.46%.	Progres (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksaan auditor internal dan eksternal 30 September 2023 dengan rincian sebagai berikut: • Internal (SPI) pemeriksaan Tahun 2014-Tahun Berjalan 2023 sebanyak 1.670 rekomendasi, selesai ditindaklanjuti sebesar 1.199 atau 71,8 % • Eksternal (BPK) pemeriksaan Tahun Buku 2007-2022 sebanyak 395 rekomendasi, selesai ditindaklanjuti sebesar 297 atau 75,20% (dalam proses review berdasarkan usulan SPI 64 rekomendasi / 16,2 %) total 91.4 % • Eksternal (KAP) pemeriksaan Tahun Buku 2020-2021 sebanyak 16 rekomendasi, selesai ditindaklanjuti sebesar 12 atau 75,00 % The progress (completion rate) of the implementation of follow-up actions from internal and external audit recommendations as of September 30, 2023, is as follows: • Internal (SPI): For audits conducted from 2014 to the current year 2023, there were 1,670 recommendations, with 1,199 or 71.8% completed. • External (BPK): For audits conducted for the fiscal years 2007-2022, there were 395 recommendations, with 297 or 75.20% completed (currently under review based on SPI's proposal, 64 recommendations or 16.2%), totaling 91.4%. • External (KAP): For audits conducted for the fiscal years 2020-2021, there were 16 recommendations, with 12 or 75.00% completed.	

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Target penyelsaian tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksaan auditor internal dan eksternal yaitu: • Internal (SPI) pemeriksaan Tahun 2014-Tahun Berjalan 2023 sebesar 75 % The target for the completion of follow-up actions from internal and external audit recommendations is: • Internal (SPI): For audits conducted from 2014 to the current year 2023, the target is 75%	31 Desember 2023 December 31, 2023	Laporan *Monitoring* Tindak Lanjut ke Komite Audit PT PELNI (Persearo) Monitoring reports on follow-up actions will be submitted to the Audit Committee of PT PELNI (Persero).	Sudah ditindaklanjuti (Konfirmasi SDM) Action has been taken (HR Confirmation)

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings
41	113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur. Implementation of Relations with Creditors	Belum ada kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, yang memuat terkait covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur. Currently, there is no policy regarding the protection of creditor rights and interests, including covenants, which are commitments by the company to undertake or refrain from certain actions to protect the interests of creditors.	PT PELNI (Persero) melalui Divisi *Treasury* telah melakukan penyusunan pembaharuan terkait draft SOP Pengelolaan Kredit Jangka Pendek, Menengah dan Panjang PT PELNI (Persero), untuk selanjutnya sedang dilakukan telaah oleh Divisi terkait. PT PELNI (Persero), through the Treasury Division, has drafted updates to the Standard Operating Procedures (SOP) for the Management of Short, Medium, and Long-Term Credit. This draft is currently under review by the relevant division.
42	115	Hubungan dengan karyawan Employee Relations	Belum ada kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasankaryawan/ *survey* kepuasan karyawan There is currently no policy regarding the assessment methods for measuring employee satisfaction/employee satisfaction surveys.	PT PELNI (Persero) melalui Divisi SDM telah melakukan penyusunan terkait draft SOP metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan/survey kepuasan karyawan PT PELNI (Persero), untuk selanjutnya sedang dilakukan review oleh Divisi terkait. PT PELNI (Persero), through its Human Resources Division, has drafted an SOP for the assessment methods to measure employee satisfaction/employee satisfaction surveys. This draft is currently under review by the relevant division.
43	124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan. The Board of Directors holds meetings as needed, at least once every month.	Rencana rapat Direksi belum masuk dalam RKAT The Board of Directors' meeting schedule has not yet been included in the Annual Work and Budget Plan (RKAT).	Direksi melalui Kesekretariatan Perusahaan telah menyusun Agenda Rapat Direksi tahun 2023 The Board of Directors, through the Corporate Secretariat, has prepared the 2023 Board of Directors Meeting Agenda.

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, yang memuat terkait covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur. The availability of a policy regarding the protection of creditor rights and interests, including covenants, which are commitments by the company to undertake or refrain from certain actions to protect the interests of creditors.	2024	Draft SOP	Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet
	tersediannya kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan/*survey* kepuasan karyawan The availability of a policy regarding the assessment methods for measuring employee satisfaction/ employee satisfaction surveys.	2024	Draft SOP	Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet
	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan RKAT Tahun 2023 The Board of Directors holds meetings as needed, aligned with the 2023 Annual Work and Budget Plan (RKAT).	Desember 2023 December 2023	Dokumen Rencana Agenda Rapat Direksi Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Seluruh Direksi The 2024 Board of Directors Meeting Agenda Document, signed by all members of the Board of Directors.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
44	126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. The Board of Directors evaluates the implementation of decisions from previous meetings.	Di dalam setiap rapat Direksi, belum sepenuhnya terlihat evaluasi (pemantauan progress) dan progres tindak lanjut terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya In each meeting of the Board of Directors, there has not yet been a complete evaluation (progress monitoring) and follow-up progress regarding the implementation of decisions from previous meetings.	Direksi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang dituangka dalam risalah/ keputusan rapat direksi kemudian Divisi Kesekretariatan Perusahaan telah menyusun *draft* SOP Rapat Internal di lingkungan PT PELNI (Persero) yang mana didalamnya memuat terkait Template Risalah Rapat yang mencakup evaluasi dan progress tindak lanjut rapat terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya Saat ini sedang dalam proses *review* oleh Divisi Perencanaan dan Transformasi Perusahaan The Board of Directors has conducted evaluations on the implementation of decisions from previous meetings, which are documented in the minutes/ decisions of the Board of Directors' meetings. Subsequently, the Corporate Secretariat Division has drafted the Internal Meeting SOP within PT PELNI (Persero), which includes a template for meeting minutes that covers evaluations and follow-up progress on the implementation of decisions from previous meetings. Currently, this draft is under review by the Corporate Planning and Transformation Division	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	adanya evaluasi/tindak lanjut hasil rapat sebelumnya yang dituangkan dalam Keputusan/risalah rapat direksi There is evaluation/follow-up of the outcomes from previous meetings documented in the Board of Directors' meeting resolutions/minutes.	setiap agenda rapat direksi For each agenda of the Board of Directors' meetings	Tersedianya template keputusan/ risalah rapat direksi A template for the Board of Directors' meeting decisions/ minutes is available.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
45	129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya. The Internal Audit Function is equipped with success factors to support its task execution.	Pimpinan Fungsi Audit Internal belum memiliki sertifikasi profesi yang tepat (*Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor*). The Head of the Internal Audit Function does not yet possess the appropriate professional certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).	Kepala SPI telah mengikuti pelatihan *Certified Internal Audit Executive* (CIAE) yang diselenggarakan oleh BPKP pada tanggal 31 Juli - 03 Agustus 2023, untuk selanjutnya akan dilaksanakan uji kompetensi tanggal 22 - 23 Agustus 2023. The Head of Internal Audit has completed the Certified Internal Audit Executive (CIAE) training conducted by BPKP on July 31 - August 3, 2023, and will undergo competency testing on August 22 - 23, 2023.	
46	129		Staf Auditor Internal belum seluruhnya memiliki sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal (yang telah memiliki sertifikat sebanyak 12 auditor dari total 16 auditor) Not all Internal Audit Staff currently hold the appropriate professional certifications corresponding to their job levels within the Internal Audit Function (with 12 out of 16 auditors currently certified).	Sampai dengan tanggal 26 Juni 2023, Pegawai SPI yang telah melaksanakan diklat audit sebanyak 18 dari total 21 pegawai As of June 26, 2023, 18 out of 21 Internal Audit Function employees have completed audit training.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Sertifikat Kompetensi Auditor Internal (*Certified Internal Audit Executive* (CIAE) yang dikeluarkan oleh BPKP Certified Internal Audit Executive (CIAE) Competency Certificate issued by BPKP.	07-Sep-23 September 7, 2023	Dokumen Sertifikat Kompetensi Certificate of Competency Document	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Melakukan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang kepada seluruh pegawai dalam Fungsi Auditor Internal sebanyak 21 Pegawai Certifying all employees within the Internal Audit Function with appropriate professional certifications, totaling 21 employees.	31 Desember 2023 December 31, 2023.	Dokumen Sertifikat Kompetensi Competency Certificate Documents.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
47	129		SPI/Fungsi Audit Internal belum melakukan penilaian/reviu (*assessment*) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan untuk menilai: a. Kepatuhan terhadap *charter* audit internal, b. Kepatuhan terhadap standar, c. Kepatuhan terhadap kode etik, d. Efisiensi dan efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholders*-nya, e. Assessment yang dilakukan oleh *assessor* independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, f. Ada tindak lanjut atas hasil reviu. SPI/Internal Audit Function has not conducted periodic internal assessments/reviews of the quality assurance program and overall improvement of the Internal Audit Function to assess: a. Compliance with the internal audit charter, b. Compliance with standards, c. Compliance with the code of ethics, d. Efficiency and effectiveness of the Internal Audit Function in meeting the needs of its various stakeholders, e. Assessment conducted by an independent assessor at least once every 5 (five) years, f. Follow-up on review findings.	SPI/Fungsi Audit Internal telah melakukan upaya penilaian/reviu (*assessment*) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut: SPI telah bersurat kepada BPKP perihal permohonan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan evalauasi atas efektifitas pengendalian intern tingkat operasional dan entitas PT PELNI (Persero) sesuai Surat Keluar Nomor: 06.19/03/S-B/DU/2023 Tanggal 19 Juni 2023 SPI telah telah bersurat kepada BPKP perihal Permohonan Penilaian Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PELNI (Persero) sesuai Surat Keluar Nomor: 06.19/03/S-B/DU/2023 Tanggal 19 Juni 2023 SPI/Internal Audit Function has made efforts to conduct periodic internal assessments/reviews of the quality assurance program and overall improvement of the Internal Audit Function as follows: SPI has written to BPKP regarding a request to serve as a resource person in the socialization activities and accompanying evaluation of the effectiveness of internal control at the operational level and at PT PELNI (Persero) entities, as per Outgoing Letter Number: 06.19/03/S-B/DU/2023 dated June 19, 2023. SPI has written to BPKP regarding a Request for Assessment of the Capabilities of the Internal Audit Unit (SPI) of PT PELNI (Persero), as per Outgoing Letter Number: 06.19/03/S-B/DU/2023 dated June 19, 2023.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya laporan hasil penilaian kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PELNI (Persero) Tahun Buku 2023 Availability of the assessment report on the capabilities of the Internal Audit Unit (SPI) of PT PELNI (Persero) for the Fiscal Year 2023	Triwulan 1 Tahun 2024 Quarter 1 of Fiscal Year 2024	laporan hasil penilaian kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PELNI (Persero) The report on the assessment results of the Internal Audit Unit (SPI) of PT PELNI (Persero).	Belum tertindaklanjuti No action has been taken yet

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
48	130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.	SPI belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengendalian intern kepada perusahaan dan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis Perusahaan.	Kontribusi SPI terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (*governance*), manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan rincian sebagai berikut: a. SPI telah memberikan rekomendasi terkait perbaikan/pembuatan SOP jika dibutuhkan sesuai dengan hasil pemeriksaan audit sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan/ peningkatan proses GCG dan/ atau melaksanakan reviu atas pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik secara korporat b. SPI akan mengacu pada *risk* register obyek audit (jika sudah terdapat *risk register*) tiap penugasan audit sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses manajemen risiko dan/atau melaksanakan reviu atas pelaksanaan manajemen risiko secara korporat c. peningkatan pengendalian intern kepada perusahaan akan sejalan dengan terlaksananya Evaluasi/ Penilaian atas Efektivitas Pengendalian Intern	

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	SPI memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengendalian intern kepada perusahaan dan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis Perusahaan	Tahun 2024	Tersedianya laporan Audit Internal terkait kontribusi SPI dalam memberikan peningkatan pengendalian intern kepada perusahaan dan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis Perusahaan	sudah ditindaklanjuti

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
		SPI conducts internal oversight to add value and improve company operations.	SPI has not yet fully contributed to enhancing internal controls for the company and providing input on efforts to achieve the company's business strategies.	SPI's contributions to the improvement/enhancement of Governance, Risk Management, and Internal Control processes are detailed as follows: 1. a. SPI has provided recommendations related to the improvement/ development of SOPs as needed based on audit findings, as a contribution to enhancing GCG processes and/or conducting reviews of the implementation of good corporate governance. 2. b. SPI will refer to the audit object's risk register (if available) for each audit assignment as a contribution to improving risk management processes and/or conducting reviews of corporate risk management implementation. 3. c. Enhancing internal controls for the company will align with the completion of the Evaluation/Assessment of Internal Control Effectiveness.	

	Target Penyelesaian Target Completion		**Bukti Tindak Lanjut *Output*** Follow-Up Evidence Output	**Status**
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	SPI contributes to enhancing internal controls for the company and provides input on efforts to achieve the company's business strategies.	2024	Availability of Internal Audit reports related to SPI's contribution to enhancing internal controls for the company and providing input on efforts to achieve the company's business strategies.	Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
49	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya. The Corporate Secretary is equipped with factors supporting the successful execution of their duties.	Sekretaris Perusahaan belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan Pengalaman professional dan kompetensi yang dimiliki Sekretaris Perusahaan belum mencakup hukum dan pasar modal The Corporate Secretary does not yet fully meet the qualifications specified by the company. The professional experience and competencies possessed by the Corporate Secretary do not currently include law and capital markets.	Kepala Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi perihal Komunikasi Perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 untuk selanjutnya permohonan Pelatihan untuk Kepala Kesekretariatan Perusahaan telah diajukan ke Divisi SDM melalui Nota Dinas sebagai berikut: • 05.19/03/ND-B/KSP/2023: *Training* Manajemen Keuangan • 05.17/17/ND-B/KSP/2023: Pelatihan Praktisi Hukum Perusahaan The Head of the Corporate Secretary has completed training and certification in Corporate Communication conducted on September 16, 2023. Furthermore, a Training Request for the Head of Corporate Secretariat has been submitted to the HR Division through an Official Memorandum as follows: • 05.19/03/ND-B/KSP/2023: Financial Management Training • 05.17/17/ND-B/KSP/2023: Corporate Law Practitioner Training	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Kepala Kesekretariatan Perusahaan telah memiliki kompetensi dan pengalaman profesional untuk memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan The Head of Corporate Secretariat already possesses the competencies and professional experience to meet the specified qualifications.	31 Desember 2023 December 31, 2023	sertifikat pelatihan dan kompetensi Training and competency certificates	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
50	132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya. The company secretary is performing their function.	Terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat; There is a work plan regarding the company introduction program for newly appointed Board of Directors members and Board of Commissioners/Supervisory Board members.	Divisi Kesekretariatan Perusahaan telah menyusun Program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2023 The Corporate Secretariat Division has prepared a Company Introduction Program for newly appointed Board of Directors and Board of Commissioners members, included in the Corporate Budget Work Plan for Fiscal Year 2023.	
51	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. The Board of Directors provides access to and comprehensive explanations, as well as accurate information regarding the conduct of the General Meeting of Shareholders (RUPS) so that shareholders can exercise their rights based on the articles of association and applicable laws and regulations.	Substansi panggilan RUPS belum mencakup: Usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS. Apabila informasi yang terkait dengan usul tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, informasi dan/atau usul-usul tersebut harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS diselenggarakan. The substance of the RUPS call does not yet include: Proposals planned by the Board of Directors to be submitted at the RUPS. If information related to such proposals is not yet available at the time of the RUPS call, this information and/or proposals must be provided at the company's office before the RUPS is held.	Manajemen PT PELNI (Persero) akan menyediakan informasi informasi yang terkait dengan usulan saat dilakukannya panggilan untuk RUPS Management of PT PELNI (Persero) will provide information related to proposals when the RUPS call is made.	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat telah dimuat dalam Rencana Kerja Perusahaan The Company Introduction Program for newly appointed Board of Directors and Board of Commissioners members has been included in the Company's Work Plan.	Januari 2023 January 2023	Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2023 yang memuat didalamnya Program Kerja Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat. The Fiscal Year 2023 Corporate Budget Work Plan, which includes the Newly Appointed Board of Directors and Board of Commissioners Introduction Program.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
				sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
Follow-Up Table on GCG Assessment Recommendations Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises

No	Parameter	Uraian Parameter Parameter Description	*Area of Interest* (AOI)	Tindak Lanjut/Temuan Hasil *Assessment* GCG Follow-up/ Findings	
ASPEK PENGUNGKAPAN DISCLOSURE ASPECT					
52	136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting. The company has established a system and procedures for controlling corporate information with the aim of securing critical corporate information.	Kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan belum mengatur informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan. The policy on corporate information control does not yet specify which information is categorized as public information and which as confidential corporate information.	Informasi Publik sudah terdapat dalam SOP Layanan Informasi Publik. Public information is already covered in the Public Information Service SOP. Untuk Informasi Rahasia sedang dalam proses pengisian *Risk Register* oleh *user* (divisi) PT PELNI (Persero) dan ditetapkan Confidential information is currently being entered into the Risk Register by PT PELNI (Persero) users (divisions) and will be finalized.	
53	141	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting. The company has established a system and procedures for controlling corporate information with the aim of securing critical company information.	Perusahaan belum mengatur mekanisme update informasi dalam *website* perusahaan atau *website* lainnya. The company has not yet set up mechanisms for updating information on the company's website or any other websites.	*Update* informasi dalam *website* Perusahaan akan ditambahkan dalam SK Direksi 11.18/04/SK/HKO.01/2019 (SK akan di*update*) Updates to information on the Company's website will be added in Board Decree 11.18/04/SK/HKO.01/2019 (the decree will be updated).	

	Target Penyelesaian Target Completion		Bukti Tindak Lanjut *Output* Follow-Up Evidence Output	Status
	Target *Output*	**Target Waktu** Target Time		
	Tersedianya: a. Pedoman Layanan Informasi Publik di PT PELNI (Persero) sesuai UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik b. Tersedianya sistem Keterbukaan Informasi Publik PT PELNI (Persero) yang memuat Informasi publik dan informasi dikecualikan yang dapat diakses oleh External Available: a. Guidelines for Public Information Services at PT PELNI (Persero) in accordance with Law No. 14 of 2018 concerning Public Information Disclosure and Information Classification Regulation No. 1 of 2017 by the Information Commission. b. Availability of PT PELNI (Persero) Public Information Disclosure System containing public information and exempt information accessible to external parties.	Desember Tahun 2023 December 2023	sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting dapat diakses melalu *website* www.ppid.pelni.co.id The system and procedures for controlling critical corporate information with the objective of securing it can be accessed via the website www.ppid.pelni.co.id.	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.
	Sudah disahkan Salinan Surat Keputusan Direksi nomor 09.14/02/SK/HKO.01/2023 Tentang Tim Pengelolaan *Website* PT PELNI (Persero) pada tanggal 14 September 2023 dan sudah didistribusikan pada email info *corporate* kepada seluruh insan PELNI pada tanggal 23 September 2023 A certified copy of the Board Decree number 09.14/02/SK/HKO.01/2023 regarding the Website Management Team of PT PELNI (Persero) dated September 14, 2023, has been issued and distributed via corporate info email to all PELNI stakeholders on September 23, 2023.	14 September 2023 September 14, 2023	Surat Keputusan Direksi nomor 09.14/02/SK/HKO.01/2023 Tentang Tim Pengelolaan *Website* PT PELNI (Persero) Board Decree number 09.14/02/SK/HKO.01/2023 regarding the Website Management Team of PT PELNI (Persero)	sudah ditindaklanjuti Has been followed up.

PELNI
We Connect, We Unify

07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Sebagai BUMN yang harus memberikan kontribusi positif bagi negeri, PELNI memandang keberlanjutan dalam bisnis pelayaran sebagai segenap upaya untuk menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara.

As a State-Owned Enterprise that must contribute positively to the nation, PELNI views sustainability in the shipping business as a comprehensive effort to become a Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

PELNI menyadari bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik. PELNI memiliki komitmen yang kuat dalam menjalin hubungan antara *Stakeholder* dan Shareholder melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dengan prinsip *triple bottom line*. Di mana PELNI tidak hanya fokus dalam memperoleh profit, tetapi juga menjaga kelesetarian dengan pemenuhan kepentingan dan kewajiban kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) dan mendukung kesejahteraan masyarakat (*people*). Serta berturut peran dalam pembangunan berkerlanjutan.

PELNI recognizes that Corporate Social Responsibility (CSR) is a critical component of good Corporate Governance. PELNI is strongly committed to fostering relationships between stakeholders and shareholders through the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs, adhering to the triple bottom line principle. PELNI not only focuses on generating profit but also on maintaining sustainability by fulfilling interests and obligations to preserve the environment (planet) and support community welfare (people), playing an active role in sustainable development.

PELNI dalam menerapkan TJSL berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/09/2022 mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023, tanggal 3 Maret 2023, tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Pelaksanaan Program TJSL PELNI juga berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan.

In implementing TJSL, PELNI follows the Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/09/2022, as amended by the Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023, dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. Additionally, the implementation of PELNI's TJSL programs is oriented towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and is guided by ISO 26000, ensuring the programs are measurable, impactful, and sustainable.

Sebagai BUMN Pembina, perusahaan dihadapkan pada risiko bisnis yang bersumber dari perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan usahanya dan kebutuhan bisnis global. Hal ini sejalan dengan prinsip dan perencanaan TJSL yang harus berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis perusahaan. TJSL merupakan bagian dari manajemen risiko pada ISO 31000 yang mengacu pada 7 *core subject* ISO 26000, 4 (empat) pilar utama yang merupakan penggolongan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga melalui TJSL perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan mempersiapkan penaganganan ancaman.

As a State-Owned Enterprise, the company faces business risks arising from changes in internal and external environments related to its business management and global business needs. This aligns with the TJSL principles and planning, which must be based on risk analysis and the company's business processes. TJSL is part of the risk management under ISO 31000, referencing the seven core subjects of ISO 26000 and the four main pillars derived from the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Through TJSL, the company can leverage opportunities and prepare for threat management.

Selain mengacu pada 7 *cores subject* ISO 26000, Program TJSL PT PELNI (Persero) juga mencakup 4 (empat) pilar utama yang merupakan penggolongan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu:

1. Pilar Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
2. Pilar Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;

In addition to referencing the seven core subjects of ISO 26000, PT PELNI (Persero)'s TJSL Program encompasses the following four main pillars derived from the 17 Sustainable Development Goals (SDGs):

1. Social Pillar, aimed at achieving the fulfillment of basic human rights in a fair and equal manner to enhance the welfare of all communities;
2. Environmental Pillar, aimed at sustainable management of natural resources and the environment as a foundation for all life;

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

3. Pilar Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomu berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusi, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata Kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

LANDASAN HUKUM

Penerapan program TJSL PELNI memiliki sejumlah landasan hukum, dengan perincian sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. ISO 26000.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TJSL

Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero) tanggal 27 Januari 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukan bahwa Divisi *Treasury* C.q. Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditunjuk untuk melaksanakan Program PUMK, *Vice President Treasury* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan Program PUMK di PT PELNI (Persero), Susunan Pelaksana Program PUMK sebagai berikut : Plt. *Vice President Treasury* selaku penanggung jawab Program PUMK dibantu oleh *Manager* TJSL, 1 (satu) orang *Supervisor* dan 1 (satu) orang *Officer*.

3. Economic Pillar, aimed at achieving quality economic growth through sustainable job and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy, and supported partnerships;
4. Legal and Governance Pillar, aimed at achieving legal certainty and effective, transparent, accountable, and participatory governance to create security stability and uphold the rule of law.

LEGAL FRAMEWORK

The implementation of PELNI's TJSL programs is based on the following legal frameworks:
1. Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023, dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
2. Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
3. ISO 26000.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR TJSL MANAGEMENT

The organizational structure is authorized by the Board of Directors' Decree Number 01.27/01/SK/HKO.01/2023 concerning the Organizational Structure, Main Duties, and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero) dated January 27, 2023. According to these provisions, the Treasury Division, specifically the Social and Environmental Responsibility Department, is designated to implement the PUMK Program. The Vice President of Treasury reports directly to the Director of Finance and Risk Management. In executing the PUMK Program at PT PELNI (Persero), the composition of the PUMK Program Implementing Team is as follows: the Acting Vice President of Treasury as the person in charge of the PUMK Program, assisted by the TJSL Manager, one Supervisor, and one Officer.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

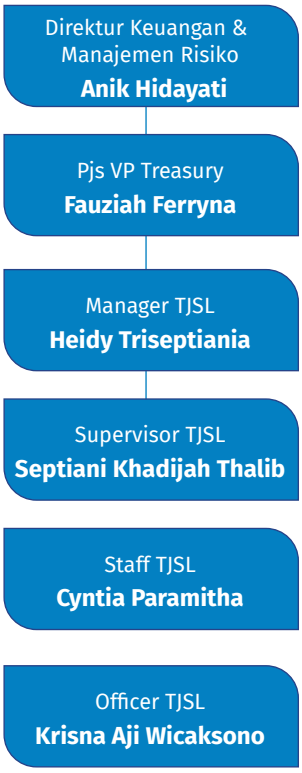

TUGAS-TUGAS BIDANG TJSL

Pihak pengelola TJSL PELNI bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas bidang TJSL, dengan perincian sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi dan menetapkan calon Mitra Binaan secara langsung dan yang diusulkan oleh cabang PT PELNI (Persero) atau dari daftar disusun oleh BUMN Koordinator;
2. Menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
3. Melakukan administrasi atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4. Menyusun dan menyampaikan perencanaan kerja dan anggaran serta laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Menteri BUMN cq. Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi – Asisten Deputi bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
5. Melaporkan hasil audit dari auditor atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Menteri BUMN cq. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi;

DUTIES OF THE TJSL DIVISION

The TJSL management team at PELNI is responsible for performing the following duties:

1. Selecting and appointing potential Partner Beneficiaries, both directly and as proposed by PT PELNI (Persero) branches or from lists compiled by the Coordinating State-Owned Enterprises (SOEs);
2. Distributing Social and Environmental Responsibility funds;
3. Administering the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program;
4. Preparing and submitting work plans, budgets, and implementation reports of Social and Environmental Responsibility to the Minister of SOEs, specifically the Human Resources, Technology, and Information Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility;
5. Reporting the audit results from auditors on the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program to the Minister of SOEs, specifically the Deputy for Human Resources, Technology, and Information;

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

6. Melaksanakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

ISU EKSTERNAL TERKAIT TJSL DAN *STAKEHOLDERS MAPPING*

PELNI memahami bahwa aspek berkelanjutan dalam pengelolaan bisnis merupakan hal yang secara esensial penting untuk diwujudkan. Lebih dari itu, PELNI memahami, pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak yang secara signifikan memberi pengaruh terhadap, dan pada waktu bersamaan menerima dampak dari, aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh Perseroan. Atas dasar pemahaman tersebut, PELNI memiliki komitmen untuk secara konsisten melaksanakan upaya-upaya yang diperlukan dalam menjaga hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Program TJSL tidak hanya dapat membantu mitigasi risiko yang dihadapi perusahaan, namun juga dapat menghadapi isu-isu eksternal di lingkungan masyarakat dalam rangka membina hubungan baik dan berkesinambungan dengan lingkungan dan masyarakat.

Secara periodik, PELNI melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak pemangku kepentingan serta menetapkan batasan lingkup tanggung jawab yang disalurkan melalui program TJSL. Sebagai upaya dalam mengoptimalisasi program TJSL, PELNI melakukan proses identifikasi terhadap topik-topik keberlanjutan yang material dan relevan, sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap strategi keberlanjutan Perseroan.

6. Collaborating with relevant government agencies and non-governmental organizations in executing Social and Environmental Responsibility.

EXTERNAL ISSUES RELATED TO TJSL AND STAKEHOLDER MAPPING

PELNI understands that sustainability in business management is fundamentally important. Furthermore, PELNI recognizes that stakeholders significantly influence and are simultaneously impacted by the company's business activities. Based on this understanding, PELNI is committed to consistently undertaking necessary efforts to maintain harmonious relationships with all stakeholders.

The TJSL program not only helps mitigate the risks faced by the company but also addresses external issues within the community to foster good and sustainable relations with the environment and society.

Periodically, PELNI conducts stakeholder mapping and defines the scope of responsibilities channeled through the TJSL program. To optimize the TJSL program, PELNI identifies material and relevant sustainability topics, which serve as a reference in decision-making processes and in evaluating the company's sustainability strategy.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
1	Meningkatnya permasalahan sampah di Destinasi Pariwisata	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pemilahan sampah, tidak berfungsinya TPS 3R secara optimal, belum ada penggerak dan motivator untuk mengelola sampah secara baik dan benar. 2. Destinasi wisata menimbulkan banyak timbunan sampah yang digunakan oleh wisatawan. Kemenparekraf dan KLHK telah menyusun petunjuk teknis dan melakukan pendampingan pengelolaan sampah di tujuh destinasi wisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Banyuwangi, Bali, Lombok, Labuan Bajo, dan Likupang. 3. Pengolahan sampah dan Pemilahan Sampah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021	PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program TJSL Kolaborasi Olah Sampah di Likupang Pelatihan pengelolaan sampah terpadu, mulai dari pemilahan sampah, daur ulang, hingga penciptaan produk turunan.	1. Pemerintah Daerah Minahasa Utara 2. BUMDes 3. *Local Hero* 4. Masyarakat dan Komunitas 5. BUMN Kolaborasi 6. Media
	Increasing Waste Issues in Tourism Destinations	1. Lack of public knowledge about waste separation systems, suboptimal functioning of 3R waste disposal sites, absence of drivers and motivators for proper waste management. 2. Tourist destinations generate a lot of waste used by tourists. The Ministry of Tourism and Creative Economy and the Ministry of Environment and Forestry have developed technical guidelines and provided assistance for waste management in seven super-priority tourist destinations, namely Lake Toba, Borobudur, Banyuwangi, Bali, Lombok, Labuan Bajo, and Likupang. 3. Waste processing and waste separation in accordance with the regulations of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021	PT PELNI (Persero) has implemented the TJSL Collaborative Waste Processing Program in Likupang, providing training on integrated waste management, from waste sorting to recycling and the creation of derivative products.	1. North Minahasa Regency Government 2. Village-Owned Enterprises (BUMDes) 3. Local Heroes 4. Community and Communities 5. Collaborative State-Owned Enterprises (BUMN) 6. Media

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
2	Terbatasnya pengetahuan Nelayan untuk mengolah hasil tangkapan ikan	1. Terdapat peluang untuk mengembangkan potensi nelayan selain menangkap ikan tetapi juga bisa mengolah hasil tangkapannya sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih dan produk ini bisa dijual ke luar pulau 2. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mempengaruhi keberlangsungan aktivitas produksi dan pemasaran hasil perikanan. Rantai pasok komoditas perikanan terjadi penurunan permintaan ekspor di Indonesia sebesar 10-20% 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan program terobosan yaitu pengembangan sebanyak 25 kampung nelayan yang tersebar di berbagai daerah pada tahun 2021. Upaya program terobosan kampung nelayan tersebut dilakukan untuk mengubah kampung nelayan dari kesan miskin, kumuh, dan kotor, menjadi lebih maju 4. Meningkatkan kemampuan nelayan dalam mengelola hasil tangkapannya menjadi makanan olahan laut 5. Meningkatkan kemampuan nelayan dalam mengelola hasil tangkapannya menjadi makanan olahan laut 6. Menyediakan pusat pemberdayaan masyarakat/ *empowering centre* sebagai tempat berkumpul para penerima manfaat untuk saling berkordinasi dan bersinergi	PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Rumah Kelola Ikan (RKI) di Larantuka dengan rincian kegiatan: 1. Pembangunan Rumah Kelola Ikan 2. Pemberian Kapal Jukong untuk Nelayan 3. Pemberian sarana & prasarana untuk kelompok olah ikan 4. Pelatihan Untuk Kelompok Olah Ikan	1. Masyarakat dan Komunitas 2. *Local Hero* 3. Pemerintah daerah (Dinas Koperasi & UMK) 4. Pegawai PELNI

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
2	Limited knowledge of fishermen in processing fish catches	1. There is an opportunity to develop the potential of fishermen not only to catch fish but also to process their catch into products that have higher market value, which can be sold outside the island. 2. The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has affected the continuity of production activities and the marketing of fishery products. There has been a 10-20% decrease in export demand for fishery commodities in Indonesia. 3. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) targets a breakthrough program to develop 25 fisherman villages scattered in various regions in 2021. The effort of the breakthrough program for fisherman villages is carried out to change the fisherman villages from poor, slum, and dirty impressions to more advanced ones. 4. Enhancing the ability of fishermen to manage their catches into processed seafood. 5. Improving the ability of fishermen to manage their catches into processed seafood. 6. Providing community empowerment centers as a place for beneficiaries to gather, coordinate, and synergize.	PT PELNI (Persero) has implemented the Fish Processing House (RKI) Program in Larantuka with the following activities: 1. Construction of Fish Processing House 2. Provision of Jukong Boats for Fishermen 3. Provision of facilities and infrastructure for fish processing groups 4. Training for Fish Processing Groups	1. Communities and Community Groups 2. Local Heroes 3. Local Governments (Cooperatives & MSMEs Agency) 4. PELNI Employees

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
3	Meningkatnya permasalahan sampah di *Homebase* Kapal PELNI	1. Kapal PELNI turut menyumbang sampah di Denpasar sehingga harus turut bertanggungjawab untuk mengatasi masalah sampah tersebut 2. Sebagai salah satu upaya mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan dan mengurangi residu yang dibuang ke TPA 3. Membentuk wilayah yang mampu menangani masalah sampah dengan tepat melalui pembentukan sarana pengelolaan terpadu dan terintegrasi 4. Mendorong kesadaran masyarakat untuk menerapkan kaidah kesehatan lingkungan melalui pemanfaatan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis 5. Menciptakan kader-kader lingkungan yang mampu memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, khususnya generasi muda 6. Menjadikan lokasi program sebagai *Collaboration Innovation Centre* (CIC) untuk menciptakan peluang usaha baru yang mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi warga sekitar 7. Pengolahan sampah dan Pemilahan Sampah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021	PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Rumah Kelola Sampah (RKS) Denpasar dengan rincian kegiatan: 1. Pembangunan RKS 2. Pelatihan Relawan Sampah cara memilah, dan mengolah sampah menjadi bernilai jual 3. Pemberian Mesin *Crusher* 4. Pemberian Kendaraan Angkut Sampah hingga efisiensi *cost* biaya angkut sampah bagi PT PELNI cabang Denpasar Pemberitaan program	1. Masyarakat dan Komunitas 2. *Local Hero* 3. Tokoh masyarakat (Banjar bidang lingkungan) 4. Pemerintahan daerah (Dinas Lingkungan Hidup) 5. Pegawai PELNI

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
3	Increasing waste issues at PELNI's Ship Homebase	1. PELNI ships contribute to waste in Denpasar and thus must take responsibility for addressing the waste issue. 2. As part of efforts to achieve sustainable waste management and reduce residue disposed of in landfills. 3. Establishing areas capable of handling waste issues appropriately through the formation of integrated and integrated waste management facilities. 4. Encouraging public awareness to apply environmental health principles by utilizing waste into economically valuable goods. 5. Creating environmental cadres capable of providing waste management education to the community, especially the younger generation. 6. Making the program location a Collaboration Innovation Centre (CIC) to create new business opportunities that can have a welfare impact on the surrounding residents. 7. Waste processing and sorting in accordance with the regulations of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021. PT PELNI (Persero) has implemented the Waste Management House (RKS) Program in Denpasar with the following activities:	1. RKS Construction 2. Training of Waste Volunteer on waste sorting and processing into valuable products 3. Provision of Crusher Machine 4. Provision of Waste Transport Vehicle to reduce waste transport costs for PT PELNI's Denpasar branch.	1. Communities and Community Groups 2. Local Heroes 3. Community Figures (Banjar in the field of environment) 4. Local Government (Environmental Agency) 5. PELNI Employees

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
4	Alih Fungsi Lahan di Bima mengakibatkan banyak Hutan Gundul yang berakibat Banjir dan Kekeringan Land Conversion in Bima Resulting in Deforested Areas Leading to Floods and Drought	1. Kawasan hutan di Kota Bima mengalami perombakan dan alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan wilayah tersebut mengalami banjir saat musim penghujan dan kekeringan saat musim kemarau. Sehingga perlu menciptakan kawasan resapan air dan penanaman kembali hutan gundul. Berdasarkan Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019, dari 200 lebih mata air sekarang hanya tersisa 50 mata air dengan debit yang berkurang 2. Salah satu bibit yang akan ditanam adalah pohon kemiri, karena pohon kemiri merupakan komoditi unggulan di Kota Bima 1. Forest areas in the city of Bima have been reorganized and converted into agricultural land, resulting in flooding during the rainy season and drought during the dry season. It is necessary to create water infiltration areas and replant deforested areas. Based on data from the Bima City Environmental Agency in 2019, out of more than 200 springs, only 50 remain with reduced discharge. 2. One of the tree species to be planted is the candlenut tree, as it is a superior commodity in the city of Bima.	PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pemulihan ekosistem di Bima dengan rincian kegiatan : 1. Penanaman 2800 bibit pohon kemiri 2. Pembangunan Markaz PELNI 3. Penyemaian 10.000 bibit pohon kemiri 4. Sosialisasi/kampanye pentingnya menanam dan cara menanam pohon serta pembagian bibit ke wilayah sekitar PT PELNI (Persero) has implemented a community-based economic empowerment program based on ecosystem restoration in Bima, including the following activities: 1. Planting 2800 candlenut tree seedlings 2. Construction of PELNI Markaz 3. Sowing 10,000 candlenut tree seedlings 4. Socialization/campaign on the importance of planting and how to plant trees, as well as distributing seedlings to the surrounding areas.	1. Kelompok Tani Hutan 2. Pemerintahan daerah (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan) 3. Masyarakat Umum 4. *Local Hero* 5. Pegawai PELNI 1. Forest Farmer Groups 2. Local Government (Forest Management Unit) 3. General Public 4. Local Heroes 5. PELNI Employees

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
5	Kurangnya pengetahuan UMKM mengenai perijinan, kemasan (*packaging*) dan pemasaran produknya	1. Kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan sektor UMKM agar bisa naik kelas 2. Pelaku UMKM Tidak dapat memenuhi permintaan 3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas/*Coorporate Social Responsibility* di Kota Bitung 4. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Keuangan. Dalam kebijakan ini diuraikan bahwa langkah awal dalam implementasi program sinergi pemberdayaan UMKM dimulai dengan kolaborasi berbagai program pemberdayaan dengan didukung basis data UMKM dan menjadi Daftar Sasaran Bersama (DSB) program sinergi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Kementerian Keuangan (Program UMKM Kemenkeu Satu) Tahun 2023.	PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Pelatihan UMKM di Kota Bitung bekerja sama Dinas Koperasi dan UMK Kota Bitung dengan kegiatan Pelatihan 30 UMK dengan Narasumber sebagai berikut: 1. Digitalisasi UKM oleh Drs. E. Lomboan 2. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan KUMKM oleh Drs. Sikamang, MAP 3. Pengaruh Digital dalam Peningkatan Wira Usaha oleh Ir. C. Simbala 4. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif oleh Drs. Yahya P. Gultom, MAP Pembiayaan/Permodalan Perbankan/BRI oleh Moh. Nursan	1. Pemerintah Kota Bitung 2. Kelompok UMK 3. Pegawai PELNI 4. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
5	Limited knowledge of MSMEs regarding licensing, packaging, and marketing of their products	1. Lack of government involvement in empowering the MSME sector to upgrade 2. MSME actors unable to meet demand 3. Bitung Mayor's Regulation Number 31 of 2022 concerning Amendments to Bitung Mayor Regulation Number 24 of 2015 concerning Procedures for Facilitating the Implementation of Social Responsibility and Limited Liability Companies/Corporate Social Responsibility in the City of Bitung 4. Minister of Finance Decision (KMK) Number 396/KMK.01/2022 concerning the Synergy Program for Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises of the Ministry of Finance. This policy outlines that the initial step in implementing the MSME empowerment synergy program begins with the collaboration of various empowerment programs supported by MSME databases and becomes the Joint Target List (DSB) of the synergy program for empowering micro, small, and medium enterprises of the Ministry of Finance (Ministry of Finance MSME Program One) in 2023.	PT PELNI (Persero) has implemented an MSME Training Program in Bitung City in collaboration with the Bitung City Cooperative and MSME Office, with training activities for 30 MSMEs with the following speakers: 1. UKM digitalization by Drs. E. Lomboan 2. Government Policy in Empowering MSMEs by Drs. Sikamang, MAP 3. The Influence of Digitalization on Entrepreneurship Enhancement by Ir. C. Simbala 4. Development of Creative Economy Businesses by Drs. Yahya P. Gultom, MAP Financing/Banking Capital/BRI by Moh. Nursan	1. Bitung City Government 2. MSME Groups 3. PELNI employees 4. Bitung City Cooperative and MSME Office of North Sulawesi Province

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
6	Rusaknya ekosistem bawah Air Deterioration of underwater ecosystems	1. Upaya konservasi sudah dilakukan oleh masyarakat setempat namun penutupan karang keras alami kurang dari 30%. 2. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan setempat dengan menggunakan bahan kimia berbahaya sehingga menyebabkan rusaknya karang. Kerusakan karang terjadi sekitar tahun 1980 hingga tahun 2000. 3. Salah satu upaya untuk mengurangi kerusakan terumbu karang ini dengan membuat terumbu buatan. Terumbu buatan ini yang kemudian akan menjadi media sebagai tempat penempelan bagi larva karang yang akan menjadi rekrutmen karang (Ampou et al., 2021). 1. Conservation efforts have been undertaken by local communities, but natural hard coral coverage is less than 30%. 2. Unsustainable fishing activities by local fishermen using harmful chemicals have led to coral damage. Coral damage occurred from around 1980 to 2000. 3. One effort to reduce coral reef damage is by creating artificial reefs. These artificial reefs will serve as a medium for coral larvae attachment, which will then become coral recruits (Ampou et al., 2021).	PT PELNI (Persero) bersama Universias Brawijaya telah melaksanakan Program Rehabilitas Terumbu Karang di Bangsring *Underwater* dengan kegiatan: 1. Pembuatan *artificial reef* dengan penanaman 1000 media transplantasi 2. Melakukan sosialisasi kepada nelayan sekitar untuk turut melestarikan biota laut Pembagian 100 *life jacket* kepada Kelompok Nelayan 3. Identifikasi biota-biota laut 4. *Monitoring* rekrutmen dan pertumbuhan karang yang dilakukan setiap bulan PT PELNI (Persero), together with Brawijaya University, has implemented a Coral Reef Rehabilitation Program in Bangsring Underwater, including the following activities: 1. Construction of artificial reefs with the planting of 1000 transplantation media 2. Conducting socialization to local fishermen to participate in marine biodiversity conservation 3. Distribution of 100 life jackets to Fishermen Groups 4. Identification of marine biota 5. Monitoring of coral recruitment and growth conducted monthly	1. Pegawai PELNI 2. Dinas Lingkungan Kabupaten Banyuwangi 3. Fakultas Perikanan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya 4. Kelompok Nelayan Samudra Bakti 5. *Local Hero* 1. PELNI employees 2. Banyuwangi District Environmental Office 3. Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Brawijaya University 4. Samudra Bakti Fishermen Group 5. Local Hero

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
7	Kekeringan Hebat di Kabupaten Nunukan Severe Drought in Nunukan Regency	1. Minimnya ketersediaan air bersih saat musim kemarau akibat sumber PDAM hanya berasal dari embung tadah hujan. Dengan demikian di perlukan adanya tambahan sumber mata air yg berasal dari sumur bor yang akan di bangun di beberapa titik di Pulau Nunukan 2. Prediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait peningkatan kekeringan 3 kali lipat pada musim kemarau tahun 2023 1. Limited availability of clean water during the dry season due to the water source of the Regional Drinking Water Company (PDAM) only coming from rainwater catchment reservoirs. Therefore, additional water sources are needed from bore wells to be built at several points on Nunukan Island. 2. Prediction from the National Disaster Mitigation Agency (BNPB) regarding a threefold increase in drought during the 2023 dry season.	PT PELNI (Persero) Bersama TJSLP Kabupaten Nunukan telah melaksanakan Program Pengeboran 4 Titik Sumur di beberapa desa antara lain : 1. Jl. Sungai Fatimah (Kp Timur) 2. Jl. Sungai Fatimah (Belakang SMK) 3. Jl. Penamas, RT.003/RW 002 Mansapa 4. Jl. Mansapa Dalam (KP. Timur) 5. Jl. Tanjung Harapan RT 09 PT PELNI (Persero), together with TJSLP Nunukan Regency, has implemented a program to drill 4 wells in several villages, including: 1. Jl. Sungai Fatimah (East Village) 2. Jl. Sungai Fatimah (Behind SMK) 3. Jl. Penamas, RT.003/RW 002 Mansapa 4. Jl. Mansapa Dalam (East Village) 5. Jl. Tanjung Harapan RT 09	1. Pegawai PELNI 2. TJSLP Kabupaten Nunukan 3. Masyarakat Desa Mamolo, Desa Sei Bilal, Desa dan Desa 1. PELNI Employees 2. TJSLP Nunukan Regency 3. Communities of Mamolo Village, Sei Bilal Village, and other villages.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Isu Eksternal Terkait TJSL dan *Stakeholders Mapping*
Isu Eksternal Terkait TJSL dan Stakeholders Mapping

No	Isu Eksternal External Issues	Latar Belakang Background	Uraian Peran TJSL Description of CSR's Role	Pemangku Kepentingan Stakeholders
8	Minimnya kesediaan air bersih layak minum bagi masyarakat Limited Availability of Clean Drinking Water for Communities	1. Program penyediaan air bersih merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang belum memenuhi target hingga 2019 berakhir Saat ini proyek Air Bersih Indonesia hanya mencapai angka 77% dari target yang direncanakan pemerintah 2. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen target menuju 100% akses air minum dan sanitasi. Rancang Teknokratik RPJMN 2020-2024 juga telah ditargetkan untuk akses air minum layak dan sanitasi layak 100%. 1. The provision of clean water is one of the programs of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) that has not yet met its target by the end of 2019. Currently, the Indonesia Clean Water Project has only reached 77% of the target set by the government. 2. The Indonesian government is committed to reaching a target of 100% access to clean drinking water and sanitation. The Technocratic Design of RPJMN 2020-2024 has also set a target for 100% access to safe drinking water and sanitation.	PT PELNI (Persero) berkolaborasi dengan BUMN Lain dengan melaksanakan Program Air Bersih di Desa Aikprapa Lombok Timur : 1. Revitalisasi Mata Air 2. Pembuatan Jalur 3. Pipa dan Reservoar Kap 18m3 4. Penyediaan Alat *Water Treatment Plant* (WTP) 5. Rumah *Water Treatment Plant* (WTP) PT PELNI (Persero) collaborates with other State-Owned Enterprises (BUMN) to implement the Clean Water Program in Aikprapa Village, East Lombok. The activities include: 1. Revitalization of Springs 2. Construction of Pipelines 3. Reservoir Cap of 18m³ 4. Provision of Water Treatment Plant (WTP) Equipment 5. Establishment of Water Treatment Plant (WTP) House	1. BUMN Lain 2. Masyarakat di Desa Aikprapa *3. Local Hero* 1. Other BUMN 2. Communities in Aikprapa Village 3. Local Heroes

Berdasarkan beberapa ilustrasi mitigasi risiko perusahaan serta pemecahan isu eksternal melalui program TJSL, maka dapat disimpulkan stakeholder utama TJSL antara lain:

KEY PARTNER:
1. Pemegang Saham (Kementerian BUMN)
2. Pemerintah / Regulator (DPR RI, Kementerian Perhubungan)
3. Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa)
4. Lembaga/Institusi (Sekolah/Universitas, Asosiasi, BUMDes, Yayasan, dst)

Based on several illustrations of company risk mitigation and external issue resolution through the TJSL program, the main stakeholders of TJSL include:

KEY PARTNERS:
1. Shareholders (Ministry of State-Owned Enterprises)
2. Government / Regulators (House of Representatives, Ministry of Transportation)
3. Local Government (Provincial Government, District, Sub-District, and Village Governments)
4. Institutions (Schools/Universities, Associations, Village-Owned Enterprises, Foundations, etc.)

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

5. Masyarakat Sekitar Perusahaan (Komunitas dan UMKM)
6. Media

KEY RESOURCES:
1. Pegawai

5. Community Around the Company (Communities and SMEs)
6. Media

KEY RESOURCES:
1. Employees

Strategi Mitigasi Risiko Melalui Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2023
Risk Mitigation Strategy Through the Implementation of the 2023 TJSL Program

No.	**Sasaran** Objective	**Kategori** Risiko Risk Category	**Peristiwa** Risiko Risk Event	**Penyebab** Risiko Risk Cause	**Dampak** Risiko Risk Impact	**Level** Risiko Risk Level	**Penanganan** Risiko Risk Handling
1	Meningkatkan kinerja keuangan Korporat Increasing Financial Performance	Risiko Finansial Financial Risk	Risiko Laporan Keuangan Tidak Akurat & Tidak Tepat Risk of Inaccurate and Inappropriate Financial Reporting	1. Kesalahan pencatatan Biaya tak terduga yang tidak ter*cover* di RKAP 2. Tidak mencantumkan perhitungan pajak 3. Data dari pihak divisi, cabang, SBU, & anak usaha 1. Errors in recording unexpected costs not covered in the RKAP. 2. Failure to include tax calculations. 3. Incorrect decision-making based on data from divisions, branches, SBUs, and subsidiaries.	Pengambilan keputusan keliru Incorrect Decision Making	*Low to Moderate*	1. Verifikasi transaksi pencatatan kantor pusat cabang & SBU 2. Verifikasi Laporan Keuangan Cabang dan SBU 3. Rekonsiliasi transaksi dengan anak usaha & user/divisi terkait 4. Penyelesaian laporan keuangan program pendanaan UMK Tahunan audit tepat waktu

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Strategi Mitigasi Risiko Melalui Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2023
Risk Mitigation Strategy Through the Implementation of the 2023 TJSL Program

No.	Sasaran Objective	Kategori Risiko Risk Category	Peristiwa Risiko Risk Event	Penyebab Risiko Risk Cause	Dampak Risiko Risk Impact	Level Risiko Risk Level	Penanganan Risiko Risk Handling
2	*Fleet Management & Safety Compliance*	Risiko Operasional Operational Risk	Risiko *Claim* Atas Pencemaran Lingkungan yang ditimbulkan oleh Kapal Risk of Claims Related to Environmental Pollution Caused by Ships	1. Ketidakpatuhan pada regulasi MARPOL yang tertuang. 2. Adanya kecelakaan atau insiden pada kapal. 1. Non-compliance with MARPOL regulations. 2. Accidents or incidents on ships.	1. Biaya Penanganan Kerusakan Lingkungan 2. *Image* Perusahaan Timbulnya denda 1. Costs of Environmental Damage Management 2. Company Image Fines	*Moderate*	1. Melakukan sosialisasi ABK untuk regulasi terkait lingkungan melalui kegiatan visit maupun Internal Audit di kapal 2. *Monitoring* secara berkala kepada Divisi terkait dalam hal pencemaran lingkungan oleh Kapal 3. Kegiatan TJSL yang mendukung pelestarian lingkungan, contohnya : Revitalisasi Terumbu Karang, Penanganan Sampah 1. Conducting crew awareness sessions on environmental regulations through visits and Internal Audits on ships. 2. Regular monitoring of relevant Divisions regarding ship-related environmental pollution. 3. TJSL activities supporting environmental preservation, such as Coral Reef Revitalization and Waste Management

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Strategi Mitigasi Risiko Melalui Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2023
Risk Mitigation Strategy Through the Implementation of the 2023 TJSL Program

No.	Sasaran Objective	Kategori Risiko Risk Category	Peristiwa Risiko Risk Event	Penyebab Risiko Risk Cause	Dampak Risiko Risk Impact	Level Risiko Risk Level	Penanganan Risiko Risk Handling
3	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Improving the Effectiveness of Fuel Oil Management	Risiko Operasional Operational Risk	Risiko Konsumsi Bahan Bakar per Mile Tinggi Risk of Fuel Consumption per Mile - High	1. Deviasi dari Rute normal 2. Kondisi cuaca dan ombak yang tidak menentu 1. Deviation from the normal route 2. Unpredictable weather and sea conditions	Konsumsi per Mile naik Increased fuel consumption per mile	*Moderate*	1. Penetapan Rencana Rute yang bekerja sama dengan Divisi Operasi secara presisi 2. Penggunaan bahan bakar minyak jenis B35 (senyawa 35% nabati, 65%) yang ramah lingkungan 1. Precise Route Planning in collaboration with the Operations Division 2. Use of environmentally friendly B35 type fuel oil (35% vegetable compound, 65% fuel oil)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

PELNI berkomitmen untuk memastikan aktivitas operasional dalam memenuhi aspek perlindungan dasat Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PELNI memperlakukan seluruh Pemangku kepentingan sesuai dengan hak yang sama. Hal tersebut meliputi komitmen PELNI dalam melaksanakan Tanggung jawab, HAM mencakup perhatian dan non-diskriminasi, hak-hak pekerja, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

PT PELNI (Persero) is committed to ensuring that its operational activities comply with fundamental human rights protection aspects. In accordance with applicable laws and regulations, PELNI treats all stakeholders equally. This includes PELNI's commitment to implementing its responsibility for human rights, including attention to and non-discrimination, labor rights, and economic, social, and cultural rights.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAM

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

PENYEDIAAN KESEMPATAN KERJA YANG SETARA

Lingkup kegiatan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja antara lain meliputi program ketenagakerjaan (kesetaraan gender dan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja lokal, kesetaraan kesempatan pengembangan kompetensi, remunerasi, kebebasan ber*serikat* serta program pensiun). Selain itu, PELNI juga memastikan bahwa praktik non-diskriminatif diterapkan atas perbedaan *gender* pegawai dengan memberikan kesempatan kerja yang adil dan setara, baik pada pegawai laki-laki maupun perempuan.

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

In the scope of labor activities, health and safety, PELNI includes employment programs (gender equality and employment opportunities, the use of local labor, equal opportunities for competency development, remuneration, freedom of association, and pension programs). Furthermore, PELNI ensures that non-discriminatory practices are applied to gender differences in employees by providing fair and equal employment opportunities, both for male and female employees.

PENCEGAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ANAK DAN PRAKTIK KERJA PAKSA

PELNI dalam melaksanakan kegiatan operasional terkait dengan ketenagakerjaan memiliki usia minum pekerja yang mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur larangan untuk mempekerjakan anak atau pekerja berumur di bawah 15 tahun. PELNI secara periodik melakukan penggolongan usia pegawai.

PREVENTION OF CHILD LABOR AND FORCED LABOR PRACTICES

In carrying out operational activities related to labor, PELNI has a minimum working age that refers to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which prohibits the employment of children or workers under 15 years of age. PELNI periodically categorizes employee ages.

PELNI memastikan pemenuhan hak-hak yang akan diterima oleh pegawai sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti hak cuti, hak tunjangan, hak ketenagakerjaan, hak cuti dan hak libur pada hari besar keagamaan. Hal ini dilakukan PELNI untuk menjaga praktik ketenagakerjaan agar terhindar dari kerja di bawah paksaan.

PELNI ensures the fulfillment of rights to be received by employees in accordance with applicable regulations, such as leave rights, allowance rights, employment rights, leave rights, and holidays on religious holidays. PELNI does this to ensure that labor practices are free from coercion.

PERLINDUNGAN HAK ADAT ISTIADAT, BUDAYA, DAN AGAMA

PELNI melaksanakan aktivitas operasi pada cakupan lokasi-lokasi yang tersebar secara luas di wilayah Indonesia. Cakupan yang luas ini kemudian memungkinkan Perseroan untuk bersinggungan dengan masyarakat dengan latar belakang identitas budaya, etnis, serta agama yang berbeda-beda. Atas situasi tersebut, PELNI memiliki kesadaran yang kuat untuk dapat menghormati dan menjaga pemenuhan hak terkait adat istiadat, budaya, dan agama dari masing-masing pemangku kepentingan.

PROTECTION OF CUSTOMARY, CULTURAL, AND RELIGIOUS RIGHTS

PELNI conducts operational activities in locations scattered widely across Indonesia. This wide coverage allows the Company to interact with communities from various cultural, ethnic, and religious backgrounds. In this situation, PELNI has a strong awareness to respect and uphold the fulfillment of rights related to customs, culture, and religion of each stakeholder.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

Secara mendasar, pelindungan terhadap hak adat istiadat, budaya, dan agama dilakukan untuk menjaga komunikasi dan interaksi antara Perseroan dengan pemangku kepentingan, agar senantiasa didasarkan pada prinsip toleransi. Perseroan memastikan bahwa seluruh praktik ketenagakerjaan dilaksanakan dengan memberikan toleransi bagi seluruh pegawai untuk melaksanakan ibadah dan praktik keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing, di samping secara rutin menyelenggarakan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama yang berlaku di Indonesia.

Fundamentally, the protection of customary, cultural, and religious rights is carried out to maintain communication and interaction between the Company and stakeholders, always based on the principle of tolerance. The Company ensures that all labor practices are implemented by providing tolerance for all employees to perform religious worship and practices according to their beliefs, as well as regularly organizing religious activities on major religious days observed in Indonesia.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL
SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

PELNI memiliki komitmen untuk senantiasa untuk menjalankan kegiatan operasional yang adil, melalui berbagai kebijakan yang dimiliki PELNI diantaranya Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) yang mengatur hubungan antara unsur Perseroan dengan pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan mewujudkan keseimbangan atas kepentingan seluruh *stakeholder*. Dimana wujud dari kegiatan operasional yang adil yaitu netralisasi dalam isu-isu politik, menghormati kekayaan intelektual, bebas dari korupsi dan suap, berkompetensi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku. Selain itu juga PELNI sangat menjujung tinggi kompetensi yang adil. Operasional yang adil menekankan pada pentingnya transparan, wajar dan setara dengan melaksanakan operasional yang adil serta terlaksananya kebijakan dengan baik dapat meminimalisasikan konflik yang terjadi dilingkungan operasional.

PELNI is committed to conducting fair operational activities through various policies, including the Code of Conduct that regulates the relationship between the Company and stakeholders. By respecting the rights of stakeholders, PELNI creates harmonious relationships and balances the interests of all stakeholders. Fair operational activities include neutrality in political issues, respect for intellectual property, freedom from corruption and bribery, fair competition, and compliance with applicable laws and regulations. Additionally, PELNI highly values fair competence. Fair operations emphasize the importance of transparency, fairness, and equality in conducting operations, and well-implemented policies can minimize conflicts in the operational environment.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

PRAKTIK ANTI-KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PELNI senantiasa melaksanakan kebijakan anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi yang mengacu pada Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*). Hal ini bertujuan untuk

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

ANTI-CORRUPTION PRACTICES AND GRATIFICATION CONTROL

PELNI consistently implements anti-corruption and gratification control policies based on the Code of Conduct. This aims to prevent and address corruption within the

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL
SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

mencegah dan menindak tindakan korupsi di lingkungan Perseroan mencakup interaksi para pegawai dengan pemangku kepentingan.

Company, including interactions between employees and stakeholders.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) memiliki fungsi yang independent dan bertanggung jawab kepada Manajemen Risiko & Kepatuhan. Dengan adanya UPG adalah sebagai wujud dari komitemen PELNI dalam mencegah praktif korupsi mencakup gratifikasi, praktik suap, pencucian uang dan hal-hal yang terkait dengan korupsi.

The Gratification Control Unit (UPG) functions independently and reports to the Risk Management & Compliance. The UPG is part of PELNI's commitment to preventing corruption practices, including gratuities, bribery, money laundering, and related corruption issues.

Seluruh insan Perseroan wajib untuk menandatangani pakta integritas yang memuat larangan terkait dengan praktik-praktik korupsi. Selain itu, PELNI melakukan maklumat Penandatanganan Kesepakatan Anti-Penyuapan yang berlaku sejak 7 Juni 2020, guna mendukung terciptanya lingkungan Perseroan yang senantiasa bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi.

All Company personnel are required to sign an integrity pact that prohibits corrupt practices. Additionally, PELNI issued an Anti-Bribery Agreement Memorandum effective June 7, 2020, to support the creation of a clean environment free from corruption and gratification within the Company.

Selama tahun 2023, terdapat 4 (empat) laporan penerimaan gratifikasi dan telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) serta telah ditindaklanjuti.

In 2023, there were 4 (four) reports of gratuity acceptance submitted to the Corruption Eradication Commission through the Online Gratification (GOL) application and have been followed up.

PRAKTIK PENGADAAN YANG TRANSPARAN

Dalam melaksanakan pengadaan yang transparan Perseroan senantiasa menjaga situasi persaingan yang sehat dengan berpedoman serta melaksakan sesuai dengan kebijakan dan menjujung tinggi transparan, efektif dan efisien, terbuka dan bersaing, serta akuntabel. Adapun, untuk menjaga prinsip transparansi dalam penentuan pemasok atau vendor, proses pengadaan yang harus dilakukan melalui tahapan prosedur:

1. Kualifikasi dan evaluasi vendor.
2. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.
3. Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang.
4. Pengukuran kepuasan dan pembinaan vendor.

PELNI mengutamakan pemasok *local*, sesuai dengan program pemerintah untuk memberdayakan pemasok lokal dan nasional tanpa menguai kualitas dan mutu barang atau jasa yang diperoleh.

TRANSPARENT PROCUREMENT PRACTICES

In conducting transparent procurement, the Company maintains a healthy competitive environment based on policies that prioritize transparency, effectiveness, efficiency, openness, competition, and accountability. To maintain transparency in supplier selection, the procurement process must adhere to the following procedural stages:

1. Vendor qualification and evaluation.
2. Procurement planning and implementation.
3. Receipt, storage, and issuance of goods.
4. Vendor satisfaction measurement and development.

PELNI prioritizes local suppliers, following the government's program to empower local and national suppliers without compromising the quality and standard of goods or services obtained.

KETERLIBATAN POLITIK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Setiap Insan PT PELNI (Persero), selaku warga Negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perseroan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Segala

RESPONSIBLE POLITICAL INVOLVEMENT

Every individual of PT PELNI (Persero), as a citizen, has the fundamental right to assemble, associate, organize, and express their political and social aspirations. The Company does not compel, influence, or direct individual participation in political contributions. Any consequences arising from

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL
SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

konsekuensi yang timbul akibat aktivitas Karyawan dalam politik ditanggung oleh Karyawan yang bersangkutan.

Bagi Insan PT PELNI (Persero) yang mencalonkan diri menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif maka yang bersangkutan harus non aktif selama pencalonannya. Jika yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi anggota legislatif maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Harus Dilakukan:
1. Meminta izin Atasan anda dan memberitahukannya kepada Divisi SDM/Direktur SDM & Umum cc Divisi Kesekretariatan Perusahaan jika Anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus;
2. Selalu menjaga citra dan reputasi Perusahaan Ketika beraktivitas dalam politik.

Harus Dihindari:
1. Mengatasnamakan PT PELNI (Persero) dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik;
2. Menggunakan dana, harta benda, pelayanan atau sumber daya PT PELNI (Persero) lainnya untuk aktivitas dan kontribusi politik;
3. Menggunakan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja.

PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
Perkembangan bisnis yang semakin dinamis dan terbuka membuat PELNI harus terus berinovasi dan meningkatkan daya saing. PELNI menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pelanggan. PELNI terus menerapkan berkompetisi dengan sehat dan *fair*. Dengan adanya pesaing membuat PELNI terus menerus meningkatkan kualitas dan layanan shingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis.

employee activities in politics are the responsibility of the individual.

For PT PELNI (Persero) employees who nominate themselves for political party positions and/or legislative members, they must be inactive during their candidacy. If they have already held political party positions and/or become legislative members, they must resign from the Company as stipulated by applicable laws and regulations.

Should Be Done:
1. Obtain permission from your Supervisor and inform the HR Division/Director of HR & General Affairs cc Secretariat Division if you are active in a political party as a member or officer;
2. Always maintain the image and reputation of the Company when engaging in politics.

Should Be Avoided:
1. Using PT PELNI (Persero) in activities and contributions to political activities;
2. Using funds, assets, services, or other resources of PT PELNI (Persero) for political activities and contributions;
3. Using party attributes, campaigning, and political activities in the workplace.

HEALTHY BUSINESS COMPETITION
The dynamic and open business environment requires PELNI to continuously innovate and enhance competitiveness. PELNI avoids entering into unfair agreements with other industry players to gain profit at the expense of customers' interests. PELNI continues to compete fairly and healthily. Competition stimulates PELNI to continually improve quality and services to remain competitive in the business arena.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT

PELNI menyadari bahwa aktivitas operasi yang dilaksanakan menghadirkan dampak tertentu bagi lingkungan hidup. Lebih dari itu, Perseroan memahami bahwa pemenuhan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup merupakan aspek penting penunjang keberlanjutan usaha secara jangka panjang. Atas kesadaran tersebut, PELNI memiliki komitmen yang kuat serta telah memberi perhatian khusus bagi pemenuhan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup.

PELNI realizes that its operational activities have certain impacts on the environment. Moreover, the Company understands that fulfilling social responsibilities related to the environment is an important aspect supporting long-term business sustainability. In light of this awareness, PELNI has a strong commitment and has paid special attention to fulfilling social responsibilities related to the environment.

Penerapan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup oleh PELNI dilaksanakan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Sesuai ketentuan tersebut, PELNI mengembangkan upaya sistematis dan terpadu dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, khususnya di sekitar area operasional Perseroan.

PELNI's implementation of social responsibilities related to the environment is carried out based on prevailing laws and regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In accordance with these provisions, PELNI develops systematic and integrated efforts to prevent pollution and environmental damage, especially in the areas around the Company's operational areas.

Secara periodik, PELNI menerapkan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup sebagai salah satu objek program dari keseluruhan pelaksanaan program TJSL Perseroan. Sebagai wujud pelaksanaan hal tersebut, PELNI telah melaksanakan implementasi pengelolaan dan pencegahan dampak lingkungan dengan berpedoman pada dokumen Sistem Manajemen Keselamatan. Selain itu, PELNI secara berkala memastikan setiap proyek yang dilaksanakan memenuhi standar perizinan dan baku mutu lingkungan sesuai regulasi yang berlaku.

Periodically, PELNI implements social responsibilities related to the environment as one of the program objectives of the Company's overall implementation of the TJSL program. To implement this, PELNI has implemented environmental impact management and prevention based on the Safety Management System document. Additionally, PELNI periodically ensures that every project undertaken meets environmental permitting and quality standards according to applicable regulations.

PELNI memetakan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya dengan hasil berupa potensi risiko, serta melakukan mitigasi secara terpadu terdapat masing-masing potensi risiko, di antaranya terkait isu-isu utama sebagai berikut:

PELNI maps the environmental impacts of its operational activities, resulting in potential risks, and implements integrated mitigation for each potential risk, including key issues such as:

Isu-Isu Utama Main Issues	**Lingkup Pelaksanaan** Scope of Implementation		
	Internal PELNI Internal PELNI	**Anak Perusahaan** Subsidiaries	**Eksternal PELNI** External PELNI
Energi Energy	v	v	v
Air Water	v	v	
Limbah Waste	v	v	
Keanekaragaman Hayati Biodiversity	v	v	

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT

Secara terperinci, penggelompokkan isu-isu lingkungan sebagai topik material dalam pemenuhan tanggung jawab sosial bagi pemangku kepentingan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PT PELNI (Persero) tahun 2023.

In detail, the categorization of environmental issues as material topics in fulfilling social responsibilities for stakeholders can be seen in the PT PELNI (Persero) Sustainability Report for the year 2023.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN

PELNI menyusun rencana kegiatan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup untuk tahun 2023, dengan fokus-fokus pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Melaksanakan kebijakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan.
2. Melakukan perawatan kapal dalam rangka mendorong efisiensi penggunaan energi.
3. Melakukan pemasangan alat pencacah limbah padat pada kapal.
4. Melaksanakan program TJSL kolaborasi olah sampah di Likupang.
5. Melaksanakan program Rumah Kelola Sampah (RKS) Denpasar.
6. Melaksanakan Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat berbasis pemulihan ekosistem di Bima.
7. PT PELNI bersama Universias Brawijaya telah melaksanakan Program Rehabilitas Terumbu Karang di Bangsring Underwater.

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY ACTIVITY PLAN

PELNI has developed an environmental social responsibility activity plan for 2023, focusing on the following implementation activities:

1. Implementing a policy for the use of environmentally friendly fuels.
2. Conducting ship maintenance to promote energy efficiency.
3. Installing solid waste counting devices on ships.
4. Implementing the TJSL collaboration program for waste processing in Likupang.
5. Implementing the Waste Management House (RKS) program in Denpasar.
6. Implementing the Community-based Ecosystem Recovery Economic Empowerment Program in Bima.
7. PT PELNI, together with the University of Brawijaya, has implemented the Coral Reef Rehabilitation Program in Bangsring Underwater.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

PENGELOLAAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI

PELNI senantiasa secara efektif dan efisiensi dalam mengelola energi yag digunakan, hal ini sebagai salah satu upaya dalam mendorong penguranan dampak dari emisi dan gas karbon. Selain itu juga PELNI melaksanakan pengelolaan energi agar tetap optimal. Hal ini sebagai efisiensi biaya operasional disamping penggunaan sumber daya.

Listrik dan bahan bakar merupakan penggunaan sumber energi yang dilakukan oleh PELNI secara umum. Dimana listrik digunakan untuk mendukung aktvitas Perseroan sementara itu untuk bahan bakar merupakan utama operasi kapal.

PELNI menerapkan praktik pengelolaan energi bahan bakar melalui keberadaan Divisi Pengelolaan Bahan Bakar, sebagai unit khusus yang menyiapkan rumusan kebijakan, penelaahan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan pengelolaan, serta kegiatan *monitoring*. Lebih dari itu, Divisi Pengelolaan Bahan Bakar juga melaksanakan perencanaan dan pengendalian

IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY

ENERGY MANAGEMENT AND EFFICIENCY

PELNI effectively and efficiently manages the energy used, as one of the efforts to reduce the impact of emissions and carbon gases. Additionally, PELNI manages energy to remain optimal, as a cost efficiency measure alongside resource use.

Electricity and fuel are the main energy sources used by PELNI. Electricity is used to support company activities, while fuel is the primary fuel for ship operations.

PELNI implements fuel energy management practices through the Fuel Management Division, a specialized unit that formulates policies, reviews, implements, controls, reports on management, and monitors activities. Moreover, the Fuel Management Division also plans and controls fuel and lubricant for ships, in accordance with applicable regulations,

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT

bahan bakar serta minyak pelumas kapal, sesuai ketentuan yang berlaku, dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi pemakaian bahan bakar dan minyak pelumas kapal.

to maintain the effectiveness and efficiency of fuel and lubricant use for ships.

Sepanjang tahun 2023, PELNI mencatatkan penurunan penggunaan energi di dalam organisasi sebesar 4,81% dari 9.769.313 GJ menjadi 9.299.804 GJ. Perolehan ini merupakan penjumlahan dari seluruh pemakaian energi berdasarkan sumbernya, terdiri atas listrik PLN, Diesel, BBM, gas alam, dan dan biosolar.

Throughout 2023, PELNI recorded a 4.81% reduction in energy use within the organization, from 9,769,313 GJ to 9,299,804 GJ. This reduction is the sum of all energy consumption based on its sources, consisting of PLN electricity, diesel, fuel, natural gas, and biodiesel.

KONSERVASI AIR

Penggunaan air yang di gunakan oleh PELNI dibagi menjadi 2 yaitu pada wilayah darat dan laut. Dimana pada wilayah darat mencakup ada area kantor pusat PELNI sedangkan pada penggunaan operasi kapal PELNI menggunakan sumber air dari Pelabuhan dan air laut yang menggunakan *Fresh Water Generator* (FWG). PELNI membagi penggunaan air pada operasi kapal berdasarkan sumber air, dengan perincian proses penggunaan air dapat diliat pada Laporan Keberlanjutan PT PELNI (Persero) tahun 2023.

WATER CONSERVATION

PELNI's water use is divided into two categories: land and sea areas. The land area includes the PELNI headquarters office, while sea operations use water from ports and seawater using Fresh Water Generators (FWGs). PELNI divides water usage on ship operations based on water sources, with details of water usage processes available in the PT PELNI (Persero) 2023 Sustainability Report.

Sebagai upaya konservasi air, PELNI memonitor penggunaan air harian dan mendokumentasikannya secara bulanan. Data yang diperoleh atas monitor itu kemudian diolah dalam bentuk grafik, untuk dibandingkan dengan hasil penggunaan bulanan.

To conserve water, PELNI monitors daily water usage and documents it monthly. The data obtained from monitoring is then processed into graphs for comparison with monthly usage results.

Sejumlah upaya yang telah dilakukan sebagai wujud konservasi air di lingkungan PELNI adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan kebocoran instalasi air di semua sektor.
2. Pemasangan dan pengantian keran menjadi sistem otomatis.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi penghematan air, secara rutin setiap bulan pada lingkungan Perseroan.

Several efforts undertaken to conserve water in the PELNI environment include:
1. Repairing leaks in water installations in all sectors.
2. Installing and replacing taps with automated systems.
3. Conducting regular monthly water conservation socialization and education in the Company's environment.

MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI

PELNI menerapkan upaya penjagaan keanekaragaman hayati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 serta perubahan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, PELNI memahami bahwa Kawasan konservasi merupakan instrumen penting dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan, agar dapat melindungi habitat, struktur ekosistem, fungsi ekosistem, hingga menjaga keanekaragaman spesies.

BIODIVERSITY CONSERVATION

PELNI implements biodiversity conservation efforts according to applicable laws and regulations, including provisions in Law Number 31 of 2004 and its latest amendment based on Law Number 45 of 2009. Based on these provisions, PELNI understands that conservation areas are important instruments in fisheries resource management efforts to protect habitats, ecosystem structures, ecosystem functions, and species diversity.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem perairan laut, PELNI memiliki dan melaksanakan program untuk memperbaiki habitat pada ekosistem perairan khususnya

As part of its efforts to maintain marine ecosystem sustainability, PELNI has and implements programs to improve habitats in marine ecosystems, especially coral reef

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT

habitat terumbu karang. Kegiatan revitalisasi terumbu karang merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sebagai bagian dari program TJSL.

habitats. Coral reef revitalization activities are planned and implemented as part of the TJSL program.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, PELNI menyalurkan ke TPB 15 yaitu ekosistem daratan berupa menanam pohon di Bima, NTT sehingga berdampak dapat melakukan perawatan 12.800 bibit kemiri dengan bibit dan perlengkapan yang sudah diberikan pelni, mendapatkan tempat yang nyaman untuk berdiskusi dengan komunitas dan bersosialisasi mengenai penanaman pohon, mendapatkan daerah penyerapan air, mengurangi pendangkalan air laut, mendapatkan penghasilan dengan penjualan tanaman sela (cabe) dan kemiri, serta mereduksi emisi carbon. Melakukan rehabilitasi Terumbu Karang dengan menurunkan 1.000 Bibit Terumbu Karang di Pantai Bangsring, Banyuwangi Jawa Timur, Mencegah abrasi dengan melakukan penanaman 10.000 bibit mangrove di Pamekasan, Jawa Timur serta Membantu menambah daerah resapan air dengan menanam 500 bibit cokelat di Narut, Nusa Tenggara Barat.

Until December 31, 2023, PELNI distributed to TPB 15, which is a land ecosystem in the form of planting trees in Bima, NTT, resulting in the maintenance of 12,800 candlenut seedlings with seeds and equipment provided by PELNI, providing a comfortable place to discuss with the community and socialize about tree planting, obtaining water absorption areas, reducing sea water intrusion, generating income through the sale of intercropping plants (chili) and candlenut, and reducing carbon emissions. Conducting Coral Reef Rehabilitation by lowering 1,000 Coral Reef Seeds on Bangsring Beach, Banyuwangi, East Java, Preventing abrasion by planting 10,000 mangrove seedlings in Pamekasan, East Java, and Helping to increase water absorption areas by planting 500 chocolate seedlings in Narut, West Nusa Tenggara.

PENGELOLAAN LIMBAH

Dengan mempertimbangkan adanya potensi pencemaran terhadap laut, sistem pengelolaan limbah menjadi aspek penting yang diperhatikan dalam keseluruhan operasi PELNI. Secara mendasar, PELNI melakukan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan di dalam (1) Surat Keputusan Direksi Nomor 01.18/01/SK/HKO.01/2019 tentang Standard *Operating Procedure Pengelolaan* BBM, Pelumas (LO), dan Pelumas Bekas (B3) tanggal 18 Januari 2019 serta (2) Surat Keputusan Direksi Nomor 01.18/02/SK/HKO.01/2018 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Manual Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (*Safety Management System Manual*).

WASTE MANAGEMENT

Considering the potential for pollution to the sea, waste management systems are an important aspect of PELNI's overall operations. Fundamentally, PELNI manages waste based on (1) the Directorate Decree Number 01.18/01/SK/HKO.01/2019 regarding the Standard Operating Procedure for Managing Fuel, Lubricants (LO), and Used Lubricants (B3) dated January 18, 2019, and (2) the Directorate Decree Number 01.18/02/SK/HKO.01/2018 dated January 18, 2021 regarding the Determination of the Ship Safety Management System Manual (Safety Management System Manual).

Sesuai kebijakan tersebut, PELNI menerapkan metode pengolahan limbah berdasarkan jenis limbah, yaitu limbah padat dan cair. Setiap jenis limbah memiliki mekanisme pengelolaan khusus dengan tujuan untuk mencegah pencemaran kepada lingkungan. Perincian lebih lanjut mengenai metode pengelolaan limbah dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PT PELNI (Persero) tahun 2023.

According to these policies, PELNI implements a waste management method based on the type of waste, solid and liquid. Each type of waste has a specific management mechanism to prevent pollution to the environment. Further details on waste management methods can be seen in the PT PELNI (Persero) 2023 Sustainability Report.

PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Penghargaan bidang lingkungan hidup merupakan pengakuan eksternal terhadap praktik pelaporan kinerja keberlanjutan, PELNI memperoleh predikat "*Gold Ranking*" pada ajang penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2023. Penghargaan tersebut secara spesifik memperlihatkan tingkat kepatuhan yang baik atas pelaporan kinerja ekonomi, sosial, hingga lingkungan oleh PELNI terhadap standar GRI, sebagai pedoman pelaporan yang berlaku secara internasional.

ENVIRONMENTAL AWARDS

Environmental awards are external recognition of sustainability performance reporting practices. PELNI obtained the "Gold Ranking" predicate at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2023. This award specifically demonstrates PELNI's good compliance with reporting on economic, social, and environmental performance to GRI standards, as an internationally recognized reporting guideline.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

PELNI berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan praktik ketenagakerjaan serta K3 secara baik, hal ini merupakan aspek terpenting yang memberikan dampak signifikan bagi Perseroan bagi pencapaian keberlanjutan usaha Perseroan.

PELNI senantiasa berupaya dalam meminimalisasi tingkat kecelakaan kerja menuju angka kecelakaan kerja nol (*zero accident*), sesuai visi, misi, dan tujuan Perseroan dengan menciptakan praktik lingkungan kerja yang kondusif dan sehat. diterapkan sesuai peraturan keselamatan internasional (*Safety of Life at Sea*/SOLAS) yang termuat di dalam ISM Code.

Sebagai wujud dari upaya tersebut, PELNI telah memiliki dan memberlakukan kebijakan internal berupa Manual Sistem Manajemen Keselamatan.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

Tahun 2023, PELNI memiliki target dan rencana kerja bidang ketenagakerjaan dan K3 dengan perincian sebagai berikut:
1. Memastikan Kepatuhan ISM-*Code*
2. Memastikan Kepatuhan SMKLH
3. Memastikan Efektivitas Pemenuhan ISO
4. Meningkatkan *Organizational & Human Capital*
5. Digitalisasi Proses Bisnis di Divisi DPA-QHSSE

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN K3

KETENAGAKERJAAN

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI

PELNI memberikan kesempatan bagi seluruh Insan PELNI dalam mengembangkan dan pelatihan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun periodik, PELNI mengikutsertakan pegawai di dalam program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal, dalam memenuhi kebutuhan organisasi sesuai jabatan masing-masing personel. Uraian terperinci mengenai program pendidikan dan pelatihan pegawai PELNI pada 2023 dapat dilihat pada bab Fungsi Pendukung Bisnis, subbagian Sumber Daya Manusia.

PELNI is committed to managing employment practices and HSE (Health, Safety, and Environment) well, as this is the most important aspect that has a significant impact on the company's sustainability.

PELNI continually strives to minimize the level of work accidents towards zero accidents, in line with the Company's vision, mission, and objectives, by creating a conducive and healthy work environment. This is implemented in accordance with international safety regulations (Safety of Life at Sea/SOLAS) outlined in the ISM Code.

As a manifestation of these efforts, PELNI has established and implemented internal policies in the form of the Safety Management System Manual.

TARGETS AND PLANS FOR 2023

In 2023, PELNI has targets and plans in the field of employment and HSE, detailed as follows:
1. Ensure ISM-Code Compliance
2. Ensure SMKLH (Safety and Health Management System) Compliance
3. Ensure Effectiveness of ISO Compliance
4. Improve Organizational & Human Capital
5. Business Processes in the DPA-QHSSE Division

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT AND HSE

EMPLOYMENT

EMPLOYEE EDUCATION AND TRAINING PROGRAM

PELNI provides opportunities for all PELNI employees to develop and train fairly and equally without discrimination in any form. Periodically, PELNI involves employees in education and training programs, both internally and externally, to meet the organization's needs according to each personnel's position. Detailed descriptions of PELNI employee education and training programs in 2023 can be seen in the Business Support Functions, Human Resources subsection.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

FASILITAS PENUNJANG BAGI PEGAWAI

PELNI menyediakan fasilitas penunjang bagi pegawai mulai dari ketersediaan tempat, sarana prasarana dalam penunjang pegawai, mencakup fasilitas ibadah, bagi pada area kantor pusat, kantor cabang, maupun kapal. Hal tersebut dilaksanakan sebagai salah satu pemenuhan PELNI terhadap hak pegawai dalam melaksanakan aktivitas ibadah serta kegiatan keagamaan, sesuai agama masing-masing.

PEMENUHAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

PELNI senantias memperhatikan pemenuhan kesejahteraan bagi seluruh pegawai mulai dari pemberian kompensasi dan manfaat serta cuti sesuai dengan regulasi regulasi serta standar besaran yang berlaku pada industri. Untuk mendorong penciptaan tingkat produktivitas yang diharapkan dengan Pemberian kompensasi dan manfaat. Dimana kompensasi dan manfaat yang diberikan bagi pegawai PELNI terdiri atas gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan, dengan besaran yang disesuaikan dengan golongan dan/atau jabatan masing-masing pegawai. Selain kompensasi dan manfaat, PELNI juga memberikan jatah cuti yang disesuaikan dengan skala/golongan masing-masing personel, dengan perincian sebagai berikut:

1. **Cuti tahunan**, sejumlah 12 hari kerja bagi pegawai yang telah memenuhi masa kerja 1 (satu) tahun;
2. **Cuti bersalin**/keguguran, sejumlah 1,5 bulan sebelum hari perkiraan kelahiran serta 1,5 bulan setelah melahirkan;
3. **Cuti bersama**, yang diberikan sesuai ketetapan Pemerintah dan peraturan yang berlaku;
4. Selain cuti-cuti di atas, PELNI memenuhi hak pegawai untuk dapat mengambil izin tidak masuk kerja atas kondisi tertentu, seperti izin sakit, izin haid, izin penting, serta izin meninggalkan pekerjaan di luar tanggungan Perseroan.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai wujud dari pemenuhan PELNI terhadap hak pegawai dan berserikat dalam mengemukakan pendapat dimana PKB ini sebagai dokumen yang mengatur seluruh hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi bagi pegawai serta ditandatangani oleh pihak manajemen.

Sampai dengan 2023, PELNI memiliki 1 (satu) Serikat Pekerja dengan jumlah pegawai yang terdaftar sebanyak 2.475 Orang pegawai atau setara dengan 49,35% pegawai.

REMUNERASI PEGAWAI

PELNI dalam melaksanakan pemberian remunerasi dengan besaran yang disesuaikan dengan ketentuan Upah Minimum

SUPPORT FACILITIES FOR EMPLOYEES

PELNI provides supporting facilities for employees, including the availability of places, infrastructure, and facilities to support employees, including worship facilities, for the central office, branch offices, and ships. This is done as one of PELNI's fulfillments of employees' rights to carry out religious activities and religious activities according to their respective religions.

EMPLOYEE WELFARE FULFILLMENT

PELNI consistently pays attention to the welfare fulfillment of all employees, starting from compensation and benefits, as well as leave in accordance with the regulations and standards applicable in the industry. To encourage the creation of the expected level of productivity through the provision of compensation and benefits. The compensation and benefits provided to PELNI employees consist of basic salary and welfare benefits, with amounts adjusted according to the grade and/or position of each employee. In addition to compensation and benefits, PELNI also provides leave entitlement tailored to the scale/grade of each personnel, detailed as follows:

1. **Annual leave**, amounting to 12 working days for employees who have completed 1 (one) year of service;
2. **Maternity/miscarriage leave**, amounting to 1.5 months before the estimated date of delivery and 1.5 months after childbirth;
3. **Shared leave**, given according to government regulations and applicable rules;
4. In addition to the above leave types, PELNI fulfills employees' rights to take leave for certain conditions, such as sick leave, menstrual leave, important leave, and leave the job outside the Company's responsibility.

FREEDOM OF ASSOCIATION

The Collective Labor Agreement (CLA) is a manifestation of PELNI's fulfillment of employee rights and association in expressing opinions, where this CLA is a document that regulates all rights and obligations that must be fulfilled by employees and signed by the management.

As of 2023, PELNI has 1 (one) Workers Union with a total of 2,475 registered employees, equivalent to 49.35% of the employees.

EMPLOYEE REMUNERATION

PELNI provides remuneration with amounts adjusted to the Regional Minimum Wage (UMR/P) regulations according to the

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

Regional/ Provinsi (UMR/P) sesuai wilayah kerja dari masing-masing pegawai. Melalui pemberlakuan tersebut, besaran gaji paling rendah yang diterima oleh pegawai baru PELNI sekurangkurangnya sama dengan standar UMR/P yang berlaku pada wilayah kerja masing-masing. Lebih dari itu, pegawai PELNI juga menerima tunjangan lain sesuai kinerja dan golongan jabatan. Secara terperinci, pembahasan remunerasi pegawai PELNI dapat dilihat pada bab Fungsi Pendukung Bisnis subbagian Sumber Daya Manusia.

working area of each employee. Through this implementation, the lowest salary received by new PELNI employees is at least equal to the UMR/P standard applicable in their respective working areas. In addition, PELNI employees also receive other allowances based on performance and job grade. In detail, the discussion of PELNI employee remuneration can be seen in the Business Support Functions, Human Resources subsection.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

PELNI memfasilitasi penyelesaian apabila terjadi pengaduan maupun perselisihan terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Pada tahap pertama, perselisihan ataupun pengaduan akan ditangani oleh atasan langsung dari pegawai terkait. Kemudian, jika pengaduan belum dapat terselesaikan, pegawai dapat melanjutkan pengaduan kepada atasan dengan level jabatan yang lebih tinggi. Apabila pada tahap ini perselisihan ataupun pengaduan belum juga terselesaikan, pegawai yang bersangkutan dapat meneruskan pengaduan kepada Serikat Pekerja untuk dapat diteruskan kepada Direksi, sebagai upaya untuk dapat mencapai penyelesaian. Apabila perselisihan ataupun pengaduan belum juga dapat terselesaikan pada tingkat Direksi, persoalan tersebut dapat diteruskan oleh pihak yang berperkara kepada Departemen Tenaga Kerja atau lembaga berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EMPLOYEE COMPLAINT MECHANISM

PELNI facilitates the resolution of labor disputes or complaints related to labor issues. In the first stage, disputes or complaints will be handled by the direct supervisor of the employee concerned. Then, if the complaint is not resolved, the employee can escalate the complaint to a higher-level supervisor. If the dispute or complaint is still not resolved at this stage, the employee can escalate the complaint to the Workers Union to be forwarded to the Board of Directors, as an effort to reach a resolution. If the dispute or complaint still cannot be resolved at the Director level, the issue can be forwarded by the litigating party to the Department of Labor or the relevant authority, according to applicable regulations.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah wujud dari komitmen dalam mendukung implementasi pemenuhan aspek K3 di lingkungan kerja, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan kerja. Di samping itu, pembentukan P2K3 juga dilakukan sebagai pemenuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagai regulasi yang mengatur perusahaan dengan pegawai minimal 100 orang dan memiliki tingkat potensi dan risiko tinggi untuk membentuk SMK3, LH, serta P2K3.

ESTABLISHMENT OF THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COMMITTEE

The Occupational Safety and Health Committee (P2K3) is a manifestation of the commitment to support the implementation of HSE aspects in the workplace, formed based on Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health, as well as Minister of Manpower Regulation No. 04/MEN/1987 concerning the Occupational Safety and Health Committee and Procedures for the Appointment of Occupational Safety and Health Experts. In addition, the formation of P2K3 is also carried out in accordance with Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems (SMK3), Environment, and P2K3.

P2K3 PELNI berada di bawah jalur koordinasi SMK3, serta melakukan koordinasi serta bertanggung jawab dengan lingkup

PELNI's P2K3 is under the coordination of the SMK3, and coordinates and is responsible for all PELNI employees.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

seluruh pegawai PELNI. Secara umum, P2K3 PELNI bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai masalah K3 di lingkungan Perseroan. Sampai dengan 31 Desember 2023, guna menjamin perencanaan dan implementasi SMK3 LH terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, P2K3 PELNI menerapkan sistem pelaporan sesuai peraturan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

AUDIT ISM-CODE, ISPS-CODE, DAN SMK3

Secara periodik, PELNI melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan melalui program kerja DPA-QHSSE, yaitu ISM-*Code* dan ISPS*Code*. Audit tersebut dilakukan sesuai regulasi International Maritime *Organization* (IMO) yang juga dikonsolidasikan pada *Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 Chapter IX (untuk ISM-*Code*) dan XI-2 (untuk ISPS-*Code*), di samping SMK3 yang didasari oleh konvensi *International Labour Organization* (ILO) beserta ketentuan turunannya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PEMENUHAN FASILITAS KESEHATAN BAGI PEGAWAI

PELNI menerapkan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi pegawai sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT PELNI (Persero) Tahun 2014 Bab XII tentang Pemeliharaan Kesehatan & Keselamatan Pegawai, Pasal 57 mengenai Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Pasal 58 tentang Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan lingkungan. Hal tersebut antara lain terwujud melalui adanya dokter perusahaan, yaitu pada (klinik pegawai di lantai dasar dekat *lobby auditorium*), asuransi kesehatan BPJS, Bringinlife, serta Jamsostek untuk pegawai dan keluarganya.

LAPORAN KEADAAN DARURAT KAPAL

Management Response Team (MRT) merupakan Tim Lintas Direktorat yang merespons dan memberikan panduan, apabila diterima laporan dari salah satu kapal PT PELNI (Persero) terkait terjadinya suatu insiden atau keadaan darurat yang dimana MRT akan segera mengadakan rapat untuk menindaklanjuti. Selama tahun 2023, terdapat 14 (empat belas) laporan keadaan darurat kapal yang terdiri dari 8 (delapan) keadaan darurat pada Kapal Penumpang, 4 (empat) pada Kapal Perintis, dan 2 (dua) pada Kapal Barang dan Tol Laut.

Tidak semua kasus keadaan darurat yang dilaporkan kepada DPA akan masuk Mahkamah Pelayaran. Hanya

In general, PELNI's P2K3 is tasked with providing advice and considerations regarding HSE issues in the Company. Until December 31, 2023, to ensure that the planning and implementation of SMK3 LH (Occupational Safety and Health Management System) are carried out in accordance with applicable regulations, PELNI's P2K3 has implemented a reporting system in accordance with the regulations of the DKI Jakarta Department of Labor and Transmigration.

ISM-CODE, ISPS-CODE, AND SMK3 AUDITS

Periodically, PELNI conducts audits of the Safety Management System through the DPA-QHSSE work program, namely the ISM-Code and ISPS-Code. These audits are conducted in accordance with International Maritime Organization (IMO) regulations, which are also consolidated in the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 Chapter IX (for the ISM-Code) and XI-2 (for the ISPS-Code), in addition to the SMK3 based on the International Labor Organization (ILO) convention and its derivative regulations such as Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health and Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems.

HEALTH FACILITIES PROVISION FOR EMPLOYEES

PELNI provides health facility provisions for employees according to the Collective Labor Agreement (CLA) of PT PELNI (Persero) Year 2014 Chapter XII concerning Employee Health and Safety Maintenance, Article 57 regarding Health Facility Services and Article 58 regarding Safety, Security, Health and Environment. This includes the presence of a company doctor at the employee clinic on the ground floor, health insurance from BPJS, Bringinlife, and Jamsostek for employees and their families.

EMERGENCY SHIP SITUATION REPORTS

The Management Response Team (MRT) is a Cross-Directorate Team that responds to and provides guidance if a report is received from one of PT PELNI (Persero) ships regarding an incident or emergency situation, where the MRT will immediately hold a meeting to follow up. During 2023, there were 14 (fourteen) emergency ship situation reports consisting of 8 (eight) emergency situations on Passenger Ships, 4 (four) on Pioneer Ships, and 2 (two) on Cargo Ships and Sea Toll.

Not all emergency cases reported to the DPA will go to the Shipping Court. Only cases that cause harm to others and

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

kasus menyebabkan kerugian pihak lain dan korban jiwa/ pencemaran lingkungan maritim serta viral di media baik media sosial maupun media elektronik. Selama tahun 2023, tidak terdapat keadaan darurat pada kapal PT PELNI (Persero) yang masuk ke Mahkamah Pelayaran.

SISTEM MANAJEMEN MUTU

Dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga proses, dan memperluas jaringan pemasaran serta menjadi perusahaan berstandar Internasional, maka PT PELNI (Persero) menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan cakupan aktivitas operasional pelayanan kapal.

Pedoman Mutu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan peningkatan jasa pelayanan transportasi kapal laut dengan memperhatíkan pengelolaan Pelayanan dan Keselamatan Kapal sesuai dengan prosedur berbasis Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Adapun ruang lingkup penetapan Sistem Manajemen Mutu adalah "*Management Procedure of Passenger Service and Safety*". Adapun, pedoman mutu ini digunakan sebagai *manual system* dalam pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

loss of life/ pollution of the maritime environment and go viral in the media, both social media and electronic media. During 2023, there were no emergency situations on PT PELNI (Persero) ships that went to the Shipping Court.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

In an effort to maintain and improve service quality, improve human resource quality, maintain processes, and expand marketing networks as well as become an internationally standardized company, PT PELNI (Persero) implements a Quality Management System with the scope of operational activities of ship service.

This Quality Guide is designed to meet the needs of improving sea transportation services by considering the management of Ship Services and Safety according to ISO 9001:2015 International Standard Management System procedures. The scope of the establishment of the Quality Management System is the "Management Procedure of Passenger Service and Safety." This quality guide is used as a system manual in implementing ISO 9001:2015 Quality Management System certification.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PELANGGAN
CUSTOMER SOCIAL RESPONSIBILITY

PELNI menerapkan tanggung jawab sosial kepada pelanggan, atas dasar kesadaran bahwa pelanggan merupakan pemangku kepentingan dengan dampak yang bersifat signifikan bagi keberlangsungan usaha Perseroan. PELNI berkomitmen untuk menjaga hubungan timbal balik positif antara Perseroan dan pelanggan, melalui upaya terus-menerus dalam menghadirkan pelayanan dengan kualitas terbaik.

Penyampaian dan tindak lanjut keluhan pelanggan melalui mekanisme berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 04.28/03/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan *Standard Operating Procedures* (SOP) *Contact Center* Info PELNI yang mengatur standar pelayanan pelanggan melalui "Info PELNI 162."

Sesuai ketentuan tersebut, PELNI menyediakan layanan contact center sebagai berikut:

PELNI implements social responsibility towards customers, based on the awareness that customers are stakeholders with significant impact on the company's sustainability. PELNI is committed to maintaining a positive reciprocal relationship between the Company and its customers, through continuous efforts to provide the best quality services.

The delivery and follow-up of customer complaints are carried out through mechanisms based on the Board of Directors' Decree Number 04.28/03/SK/HKO.01/2016 regarding the Determination of Standard Operating Procedures (SOP) for the PELNI Info Contact Center, which regulates customer service standards through "Info PELNI 162."

In accordance with these provisions, PELNI provides the following contact center services:

KONTAK KAMI

021-162 atau 162

PELNI Point (Fan Page: Pelayaran Nasional Indonesia

@pelni162_ID

pelni162

PELNI162

INFO PELNI162

PT. PELNI (Persero)

infopelni162@pelni.co.id

OUR CONTACTS

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN 2023

Tahun 2023, Perseroan memiliki rencana kerja dan kegiatan mengenai tanggung jawab sosial di bidang konsumen antara lain:

1. Pengangkutan muatan UMKM dan instansi lainnya menggunakan skema LCL.
2. Peningkatan infrastruktur dan perubahan layanan di atas kapal penumpang.
3. Penataan layanan muatan dan *over* bagasi.
4. Penyediaan infrastruktur digitalisasi transaksi mitra di atas kapal penumpang.
5. Digitalisasi proses bisnis penunjang operasional yang unggul.

TARGET AND ACTIVITY PLAN FOR 2023

In 2023, the Company has work plans and activities regarding social responsibility in the consumer field, including:

1. Transporting goods from MSMEs and other agencies using the LCL scheme.
2. Improving infrastructure and changing services on passenger ships.
3. Arrangement of cargo and over baggage services.
4. Providing infrastructure for digitalizing partner transactions on passenger ships.
5. Digitalization of business processes supporting operational excellence.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PELANGGAN
CUSTOMER SOCIAL RESPONSIBILITY

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGAN

Tahun 2023, PELNI melakukan kegiatan tanggung jawab terhadap pelanggan dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar pelayanan dalam memberikan *service excellence* kapada pelanggan.
2. Melakukan transformasi digital secara efektif dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jasa perihal Aplikasi Penjualan (Sitolaut, Mycargoo) secara *online* dan *offline* di beberapa daerah pelabuhan singgah dengan *support* dan koordinasi dari Cabang yang bersangkutan.
4. Proses SOP Hubungan Pelanggan diimplementasikan dengan cara :
   a. Menghubungi,mengunjungi *customer* (*shipper*), membangun *relationship* terhadap *customer (shipper)*
   b. Menyelesaikan *claim* yang diajukan *customer* contohnya *claim* asuransi.
   c. Pelayanan purna jual dengan cara memberikan *souvenir* di agenda tertentu.

CUSTOMER RESPONSIBILITY ACTIVITIES

In 2023, PELNI carried out customer responsibility activities focusing on the following activities:

1. Improving service standards in providing service excellence to customers.
2. Conducting effective and comprehensive digital transformation.
3. Conducting socialization and education for service users regarding Sales Applications (Sitolaut, Mycargoo) online and offline in several port cities with support and coordination from the respective Branch.
4. The Customer Relations SOP process is implemented by:
   a. Contacting, visiting customers (shippers), building relationships with customers (shippers).
   b. Resolving claims filed by customers, such as insurance claims.
   c. After-sales service by providing souvenirs at certain events.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PELNI senantiasa berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Diwujudkan dalam bentuk pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat sekitar dan PELNI.

Melalui program TJSL PELNI menerapkan tanggung jawab sosial terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-1/MBU/03/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Program Tanggung Jawab dan Lingkungan Sosial Badan Usaha Milik Negara. Sesuai ketentuan tersebut, program tanggung jawab sosial PELNI ditujukan untuk:

1. memberikan kemanfaatan bagi Pembangunan ekonomi, Pembangunan sosial, Pembangunan lingkungan serta Pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; dan
3. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar perusahaan.

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Tahun 2023, PELNI melaksanakan kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakat melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Program Non-PUMK dan Program *Creating Share Valued* (CSV). Berikut adalah target dan rencana, antara lain:

1. Melakukan Pengukuran Dampak Terhadap Program TJSL dengan Metode *Social Return On Investment* (SROI).
2. Menetapkan Kebijakan *Levelling Unit* Kerja TJSL Menjadi Setingkat BOD-1 atau Disesuaikan dengan Hasil Kajian.
3. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Program TJSL, Termasuk untuk Pemenuhan Pengisian Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi KBUMN.
4. Meningkatkan Kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain.
5. Melibatkan Peran Serta seluruh karyawan Secara Aktif dalam Program TJSL.
6. Penyaluran dana TJSL berbasis *Created Shared Value* (CSV).

9 Tujuan atau prioritas TPB tersebut terdiri dari:

1. Tanpa Kemiskinan

COMMITMENT AND POLICY

PELNI consistently contributes to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia, manifested through social and community development. This is done to maintain harmonious relations between the surrounding community and PELNI.

Through the TJSL program, PELNI implements social responsibility related to social and community development in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023, dated March 3, 2023, regarding the Program of Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises. According to these provisions, PELNI's social responsibility program is aimed at:

1. Providing benefits for economic development, social development, environmental development, and legal and governance development for the company;
2. Contributing to the creation of added value for the company with integrated, targeted, and measurable impact principles, as well as accountability; and
3. Developing micro and small businesses to be more resilient and independent, as well as the surrounding community of the company.

ACTIVITY PLAN AND BUDGET

In 2023, PELNI implemented social and community development activities through the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), as well as the Non-PUMK Program and the Creating Shared Value (CSV) Program. The targets and plans include:

1. Conducting Impact Measurement on the TJSL Program with the Social Return On Investment (SROI) Method.
2. Establishing a TJSL Work Unit Leveling Policy to be Equivalent to BOD-1 or Adjusted to the Study Results.
3. Increasing the Use of Information Technology in the TJSL Program, Including for Fulfilling the Filling of the Information System Based on State-Owned Enterprise Information Technology.
4. Enhancing Collaboration among State-Owned Enterprises and with other parties.
5. Actively Involving all Employees in the TJSL Program.
6. Disbursing TJSL funds based on Created Shared Value (CSV).

The 9 goals or priorities of the SDGs are:

1. No Poverty

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

2. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
3. Pendidikan Berkualitas;
4. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
5. Air Bersih dan Sanitasi;
6. Kota dan Pemukiman;
7. Konsumsi dan Produksi;
8. Ekosistem Daratan;
9. Perdamaian

2. Good Health and Well-being
3. Quality Education
4. Decent Work and Economic Growth
5. Clean Water and Sanitation
6. Sustainable Cities and Communities
7. Responsible Consumption and Production
8. Terrestrial Ecosystems
9. Peace

Program CSV bertujuan untuk menciptakan nilai bersama, nilai manfaat positif bagi masyarakat, dan menciptakan nilai ekonomi bagi Perusahaan.

The CSV Program aims to create shared value, positive benefits for society, and economic value for the Company.

Program TJSL PELNI 2023 antara lain diterapkan berdasarkan rencana anggaran 4 (empat) pilar TPB, dengan uraian anggaran serta pemenuhan di tahun 2023 sebagai berikut:

The 2023 PELNI TJSL Program is implemented based on the budget plan of the 4 (four) pillars of the SDGs, with the budget description and fulfillment in 2023 as follows:

No	Pilar	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment
1	Pilar Sosial Social Pillar	19.842.000.000	19.270.292.732	97,12%
2	Pilar Ekonomi Economic Pillar	2.650.000.000	2.650.000.000	100,00%
3	Pilar Lingkungan Environmental Pillar	3.140.000.000	3.145.808.451	100,18%
4	Pilar Hukum Tata Kelola Legal Governance Pillar	1.670.000.000	1.544.456.706	92,48%
Jumlah		27.302.000.00	26.610.557.889	97,47%

Sampai dengan tahun 2023, realisasi program TJSL untuk program CID dan non CID sebesar Rp26.610.557.889,- atau sebesar 97,47% dari RKA tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi *cost* pada saat pengadaan pelaksanaan program Non CID dan adanya kegiatan pendidikan atau pelatihan yang dilakukan secara *hybrid* dan *online*.

As of 2023, the realization of the TJSL program for CID and non-CID programs amounted to Rp26,610,557,889, which is equivalent to 97.47% of the 2023 RKA. This is due to cost efficiencies in the procurement and implementation of Non-CID programs, as well as educational or training activities conducted in a hybrid and online manner.

PELAKSANAAN REALISASI PROGRAM TJSL

Pelaksanaan Program TJSL tahun 2023 berdasarkan RUPS dikelompokkan dalam empat pilar TPB dengan anggaran Program CID sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF THE TJSL PROGRAM REALIZATION

The implementation of the TJSL Program in 2023, based on the RUPS, is categorized into four pillars of TPB with the CID Program budget as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2023 yang Dikelompokkan dalam Pilar TPB
Implementation of the TJSL Program in 2023 Categorized into TPB Pillars

No	Jenis Type	Realisasi (Audited) TJSL 2023 (Rp) Realization (Audited) TJSL 2023 (Rp)
1	Pilar Sosial Social Pillar	3.214.714.124
2	Pilar Ekonomi Economic Pillar	2.650.000.000
3	Pilar Lingkungan Environmental Pillar	2.585.285.876
4	Pilar Hukum Tata Kelola Legal Governance Pillar	100.000.000
Total		8.550.000.000

Anggaran Program – CID Non PUMK
Anggaran Program – CID Non PUMK

No	Jenis Type	Audited Tahun 2022 Audited 2022 (Rp)	RKA 2023 (Rp)	Realisasi 2023 Realization 2023 (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage	
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1	Pilar Sosial Social Pillar	2.257.424.227	3.050.000.000	3.214.714.124	105,40	142,41
2	Pilar Ekonomi Economic Pillar	507.180.500	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	197,17
3	Pilar Lingkungan Environmental Pillar	2.490.195.903	2.750.000.000	2.585.285.876	94,01	103,82
4	Pilar Hukum Tata Kelola Legal Governance Pillar	25.200.000	100.000.000	100.000.000	100,00	396,83
Total		5.280.000.630	6.900.000.000	6.900.000.000	100,00	130,68

Realisasi penyaluran Program TJSL PT PELNI (Persero) non PUMK tahun 2023 sebesar Rp6.900.000.000,- atau 100% dari RKA Program TJSL tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

PILAR SOSIAL

Realisasi penyaluran dana Pilar Sosial sebesar Rp3.214.714.124,- atau 105,40% dari RKA tahun 2023. Dengan prioritas TPB 1 tanpa kemiskinan direalisasikan penyalurannya untuk santunan masyarakat kurang mampu (Meringankan beban para pemudik dengan pemberian 300 tiket mudik gratis dengan rute Tanjung Priok – Batam & Kumai – Semarang, Membantu memenuhi kebutuhan 510 anak yatim di seluruh cabang PT PELNI

The realization of the non-PUMK TJSL Program distribution of PT PELNI (Persero) in 2023 amounted to Rp6,900,000,000, or 100% of the RKA of the TJSL Program in 2023, with the details as follows:

SOCIAL PILLAR

The realization of the distribution of funds for the Social Pillar amounted to Rp3,214,714,124, or 105.40% of the 2023 RKA. With priorities for TPB 1 without poverty, the distribution was realized for the assistance of underprivileged communities (Easing the burden of travelers by providing 300 free round-trip tickets from Tanjung Priok to Batam & Kumai to Semarang, Helping meet the needs of 510 orphans in all branches of PT

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

(Persero), Meringankan beban Masyarakat sekitar operasional perusahaan dengan pemberian 2,766 paket sembako di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Sarmi di Jayapura, Ternate dan Makassar, meringankan beban 14 pegawai pelni yang tidak mampu dengan memberikan bantuan 2 hewan qurban dan dibagikan ke Masyarakat sekitar serta Meringankan beban 19 Orang Terlantar yang tidak mampu pulang ke wilayah asalnya dengan memberikan 19 tiket kapal kolaborasi dengan Dinas Sosial Di kumai), TPB 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera berupa meringankan beban pengungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memberikan bantuan sembako dan alat tidur dari PELNI grup kepada korban bencana alam tanah longsor di serasan, bencana musibah kebakaran Plumpang, Jakarta Utara, Membantu meningkatkan perlindungan terhadap Kesehatan tubuh kepada masyarakat dengan memfasilitasi 1.122 vaksin *booster* II bekerjasama dengan Yayasan BUMN Untuk Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan 124 ABK di Semarang dan Denpasar dengan bantuan mobilisasi vaksin *booster* 2 sehingga dapat memberikan pelayanan *excellent* diatas kapal, dan mengurangi beban sewa *ambulance* sebesar Rp 1juta/pengantaran dengan memberikan bantuan 1 unit kendaraan *ambulance* bagi Gereja Paroki Nabire dan Masjid di Palu meningkatkan tingkat keselamatan dan pengetahuan pelayaran dengan membagikan 340 *life jacket* di Kota Denpasar, Badung, Kendari dan Ternate Maluku Utara, Bau Bau, Membantu penumpang yang tidak sehat dan ibu hamil dengan memberikan fasilitas pendukung berupa 2 Kursi Roda di KKP Palu.

PELNI (Persero), Easing the burden of the community around the company's operations by providing 2,766 basic food packages in North Jakarta, South Jakarta, Sarmi in Jayapura, Ternate, and Makassar, Easing the burden of 14 PELNI employees who are unable to afford by providing assistance of 2 sacrificial animals distributed to the surrounding community and Easing the burden of 19 homeless individuals who are unable to return to their hometowns by providing 19 ship tickets in collaboration with the Social Services in Kumai.), TPB 3, which is healthy and prosperous life, by easing the burden of refugees to meet their daily needs by providing food and bedding assistance from PELNI group to landslide disaster victims in Serasan, Plumpang fire disaster, North Jakarta, Helping to improve body health protection for the community by facilitating 1,122 booster II vaccines in cooperation with the BUMN Untuk Indonesia Foundation, improving health protection for 124 crew members in Semarang and Denpasar with the assistance of booster 2 vaccine mobilization so that they can provide excellent service on board, and reducing ambulance rental costs by Rp 1 million/delivery by providing 1 ambulance vehicle for the Nabire Parish Church and mosque in Palu Improving maritime safety and knowledge by distributing 340 life jackets in Denpasar, Badung, Kendari and North Maluku, Bau Bau, Helping unhealthy passengers and pregnant women by providing supporting facilities in the form of 2 Wheelchairs at the Palu Health Office.

Meningkatkan pelayanan puskesmas dengan memberikan fasilitas pendukung untuk puskesmas di Mojokerto, Jakarta Utara, Alor). Penyaluran TPB 4 yaitu Pendidikan berkualitas berupa menambah pengetahuan & meningkatkan penghasilan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan melalui seminar secara *offline*, biaya transportasi & akses aplikasi pijar mahir selama 6 bulan kepada 1.971 wirausaha dengan Yayasan BUMN untuk Indonesia serta sarana & prasarana Pendidikan (Meningkatkan kualitas dan kenyamanan proses belajar mengajar siswa dengan bantuan renovasi 20 sekolah dan pondok pesantren dengan jumlah PM 5.580 di Depok, Cianjur, Blitar, Lombok Tengah, Jepara, Kudus, Yogyakarta, Labuan Bajo, Sulawesi Tengah, Riau, Jawa Barat, Fak-Fak, Mendapatkan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan pelajar dengan memberikan dukungan transportasi 175 pelajar dari Jayapura ke Jakarta serta meningkatkan literasi/budaya membaca anak-anak suku asmat dengan bantuan pengiriman 1.000 buku untuk anak suku asmat di Papua), bantuan renovasi 1 *toilet* di sekolah anak jalanan (SAAJA),serta pemberian bantuan baju latihan untuk 35 atlet senior karate (FORKI).

Improving health center services by providing supporting facilities for health centers in Mojokerto, North Jakarta, Alor). The distribution of TPB 4, which is quality education, includes increasing knowledge & income by providing entrepreneurship training through offline seminars, transportation costs & access to the skilled spark application for 6 months to 1,971 entrepreneurs with the BUMN for Indonesia Foundation and facilities & infrastructure Education (Improving the quality and comfort of student learning processes by providing assistance in renovating 20 schools and pesantren with a total of 5,580 PM in Depok, Cianjur, Blitar, Central Lombok, Jepara, Kudus, Yogyakarta, Labuan Bajo, Central Sulawesi, Riau, West Java, Fak-Fak, Getting the opportunity to learn and increase knowledge for students by providing transportation support for 175 students from Jayapura to Jakarta and increasing literacy/culture of reading for Asmat tribal children by sending 1,000 books to Asmat children in Papua), renovation assistance for 1 toilet in a street child school (SAAJA), and providing training uniforms for 35 senior karate athletes (FORKI).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

PILAR EKONOMI

Penyaluran dana Pilar Ekonomi tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,- atau 100% dari RKA tahun 2023 dengan prioritas TPB nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pilar ekonomi disalurkan untuk Program PUMK (Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil) di Ambon dan Makassar sebagai modal usaha para Mitra Binaan, pembinaan mitra binaan akan menambah pengalaman, meningkatkan penghasilan dan mendapatkan konsumen baru dengan pembinaan kepada 2 Mitra Binaan berupa keikutsertaan dalam Pameran INACRAFT di JCC *Convention Centre* dan meningkatkan pengetahuan dalam mengelola budidaya ikan tawar dengan pelatihan budidaya ikan di air payau di Pemalang bagi 25 MB dengan bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, dan pengembangan UMK dengan mengikutsertakan 36 UMK dalam kegiatan bazaar untuk menambah pengalaman, dan membantu memasarkan produk UMK di daerah jakarta utara & pusat. & sarana dan prasarana pada kelompok usaha bersama lumbung barokah dan bank sampah ngaringan berseri di Blitar agar dapat meningkatkan jumlah produksi usaha dengan memberikan alat penunjang usaha seperti blender, etalase, sealer cup, mesin pencacah sampah, Memberikan sarana dan prasarana untuk pengembangan UMKM di Bitung, Jawa Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Blitar, Larantuka, Ambon, Sangihe, Makassar dan Tual serta pendampingan rumah kelola ikan berdampak pada menghemat sewa kapal Rp200rb/kapal bagi kelompok nelayan (12 orang) dengan hasil tangkapan ikan 195kg/bulan dan mendapat tempat yang nyaman sebagai tempat mengolah ikan bagi kelompok olah ikan (20 orang), menambah pengetahuan kelompok olah ikan (seperti pengolahan produk olahan ikan, kemasan, jaringan pasar, pengembangan produk, legalitas NIB, sertifikasi halal dan PIRT). Serta menambah nilai jual ikan segar dan olahan ikan lainnya seperti abon ikan seharga Rp20.000/150 gram & diharapkan penjualan keluar pulau dengan menggunakan jasa *redpack* PELNI.

PILAR LINGKUNGAN

Realisasi penyaluran dana Pilar Lingkungan tahun 2023 sebesar Rp 2.585.285.876,- atau sebesar 94,01% dari RKA tahun 2023, yang disalurkan ke TPB 6 yaitu Air bersih dan sanitasi layak dengan Membuat 5 sumur bor di Kabupaten Nunukan dan Lombok untuk mengatasi kekeringan, TPB 11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan dengan renovasi 15 tempat ibadah di Tangerang, Bogor, Tanjung Pinang,

ECONOMIC PILLAR

The distribution of funds for the Economic Pillar in 2023 amounted to Rp1,000,000,000, or 100% of the 2023 RKA with priority for TPB number 8, which is decent work and economic growth. The economic pillar is distributed for the PUMK Program (Micro and Small Business Funding) in Ambon and Makassar as business capital for fostered partners, fostering fostered partners will add experience, increase income and get new consumers with fostering for 2 fostered partners in the form of participation in the INACRAFT Exhibition at the JCC Convention Centre and increasing knowledge in managing freshwater fish cultivation with freshwater fish cultivation training in Pemalang for 25 MB in collaboration with the Pemalang District Fisheries Service, and UMK development by involving 36 UMKs in bazaar activities to add experience, and help market UMK products in North Jakarta & center. & facilities and infrastructure for joint business groups, Lumbung Barokah and Bank Sampah Ngaringan Berseri in Blitar to increase the production volume of businesses by providing business support tools such as blenders, showcases, cup sealers, trash shredders, Providing facilities and infrastructure for UMKM Development in Bitung, West Java, North Jakarta, North Blitar, Larantuka, Ambon, Sangihe, Makassar, and Tual, as well as mentoring for impact households. on saving ship rental costs of Rp200,000/ship for a group of fishermen (12 people) with a catch of 195 kg/month and getting a comfortable place as a place for processing fish for a fish processing group (20 people), increasing the knowledge of the fish processing group (such as processing fish products, packaging, market networks, product development, NIB legality, halal certification, and PIRT). And Increasing the sale value of fresh fish and other processed fish such as fish floss priced at Rp20,000/150 grams & expected sales off the island using PELNI's redpack services.

ENVIRONMENTAL PILLAR

The realization of the distribution of funds for the Environmental Pillar in 2023 amounted to Rp2,585,285,876, or 94.01% of the 2023 RKA, which was distributed to TPB 6, namely clean water and proper sanitation by drilling 5 boreholes in Nunukan Regency and Lombok to overcome drought, TPB 11, namely sustainable cities and settlements by renovating 15 places of worship in Tangerang, Bogor, Tanjung

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Bintan, Palu, Riau, Waingapu, Pontianak, Makassar, Ambon, Timika untuk mendapatkan kenyamanan dalam beribadah, Meningkatkan sumber pemasukan rumah ibadah dari hasil penjualan sampah plastik serta mengurangi sampah plastik di rumah ibadah di kota Tarakan dengan memberikan 150 tempat sampah sedekah dengan pelaksana karang taruna kota tarakan, dan meningkatkan kemudahan akses internet, dan meningkatkan penghasilan BUMDES serta UKM masyarakat sekitar dengan bantuan dana pemasangan internet pada program kolaborasi Tana lino lestari II di pulau Komodo, Pemasangan 15 LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) di kabupaten lewoleba serta renovasi sarana olahraga di lombok, Tersedianya 4 sarana tempat penonton dan pemain yang memadai dengan memberikan bantuan pembangunan Tribun Penonton di Lombok Timur dan Jawa Barat serta Melakukan renovasi saluran air dan jalan di Kabupaten Nunukan.

Pinang, Bintan, Palu, Riau, Waingapu, Pontianak, Makassar, Ambon, Timika to get comfort in worship, Increasing the income source of places of worship from plastic waste sales and reducing plastic waste in places of worship in Tarakan city by providing 150 charity trash cans with the implementation of the Tarakan city youth coral reef, and increasing internet access ease, and increasing BUMDES and SMEs income of the surrounding community by providing internet installation funds in the collaboration program of Tana Lino Lestari II on Komodo Island, Installing 15 LPJUs (Public Street Lighting) in Lewoleba Regency and renovating sports facilities in Lombok, Availability of 4 adequate audience and player facilities by providing assistance in building Spectator Stands in East Lombok and West Java and Renovating water channels and roads in Nunukan Regency.

TPB 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab berupa pendampingan RKS di Denpasar yang berdampak pada mendapatkan pembinaan dan pendampingan pengolahan sampah kapal pelni menjadi bernilai jual, menambah penghasilan penjualan plastik press (sebulan sekitar 500Kg) dengan harga RP1.500/kg, Sampah organik (sekitar 100Kg/Ritase) dijual sebagai makanan ternak dengan harga Rp5.000/kg, Pengurangan biaya pengangkutan sampah kapal Pelni sebesar 10 % dan pelni tidak menambah sampah di daerah tsb (*zero waste*), dengan volume 500-1000Kg/ritase, Menyediakan 4 Tempat Sampah, 1 Mesin Daur Ulang Sampah Organik dan 1 Mesin Pencacah Sampah Anorganik di Maumerre, Menyediakan alat pengolah sampah, pelatihan dan pendampingan tata kelola sampah, pelatihan ekonomi kreatif pendukung wisata, renovasi gazebo pantai di likupang. Serta TPB 15 yaitu ekosistem daratan berupa menanam pohon di bima, NTT sehingga berdampak dapat melakukan perawatan 12.800 bibit kemiri dengan bibit dan perlengkapan yang sudah diberikan pelni, mendapatkan tempat yang nyaman untuk berdiskusi dengan komunitas dan bersosialisasi mengenia penanaman pohon, mendapatkan daerah penyerapan air, mengurangi pendangkalan air laut, mendapatkan penghasilan dengan penjualan tanaman sela (cabe) dan kemiri, serta mereduksi emisi carbon. Melakukan Rehabilitasi Terumbu Karang dengan menurunkan 1.000 Bibit Terumbu Karang di Pantai Bangsring, Banyuwangi Jawa Timur, Mencegah abrasi dengan melakukan penanaman 10.000 bibit mangrove di Pamekasan, Jawa Timur serta Membantu menambah daerah resapan air dengan menanam 500 bibit cokelat di Narut, Nusa Tenggara Barat.

TPB 12, which is responsible consumption and production, includes mentoring RKS in Denpasar which impacts on getting coaching and mentoring for processing PELNI ship waste into saleable value, increasing plastic press sales income (about 500Kg/month) at a price of Rp1,500/kg, Organic waste (about 100Kg/Ritase) sold as animal feed at a price of Rp5,000/kg, Reducing Pelni ship waste transportation costs by 10% and pelni not adding waste in the area (zero waste), with a volume of 500-1000Kg/ritase, Providing 4 Trash Cans, 1 Organic Waste Recycling Machine and 1 Inorganic Waste Shredder in Maumerre, Providing waste processing equipment, waste management training and mentoring, creative economy training to support tourism, gazebo renovation on the beach in Likupang. And TPB 15, which is terrestrial ecosystems, includes planting trees in Bima, NTT so that it impacts on maintaining 12,800 nutmeg seedlings with seeds and equipment provided by pelni, getting a comfortable place to discuss with the community and socialize about tree planting, getting a water absorption area, reducing sea water silting, getting income from selling intercropping plants (chili) and nutmeg, and reducing carbon emissions. Rehabilitating Coral Reefs by lowering 1,000 Coral Reef Seedlings at Bangsring Beach, Banyuwangi East Java, Preventing abrasion by planting 10,000 mangrove seedlings in Pamekasan, East Java and Helping to increase the water absorption area by planting 500 brown seedlings in Narut, West Nusa Tenggara.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

Penyaluran dana pilar hukum dan tata kelola tahun 2023 sebesar Rp100.000.000,- atau 100% dari anggaran tahun 2023, yang disalurkan ke TPB 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dalam program tes urine narkoba bagi ABK 4 (Empat) kapal PT PELNI (Persero) yaitu KM. Dorolonda, KM. Lawit, KM Awu, dan KM. Binaiya sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan kapal yang *excellent* dengan ABK yang bersih dari narkoba & meringankan beban pada divisi SDM untuk pelaksanaannya.

LEGAL GOVERNANCE PILLAR

The distribution of funds for the legal and governance pillar in 2023 amounted to Rp100,000,000, or 100% of the 2023 budget, which was distributed to TPB 16, namely Peace, Justice, and Resilient Institutions in the drug urine test program for 4 (four) ships' crews of PT PELNI (Persero) namely KM. Dorolonda, KM. Lawit, KM Awu, and KM. Binaiya thus impacting the improvement of excellent ship services with drug-free crews & easing the burden on the HR division for its implementation.

Anggaran Program – Non CID
Non-CID Program Budget

No	Jenis Type	Audited 2022 (Rp)	RKA 2023 (Rp)	Realisasi 2023 Realization 2023 (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage	
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1	Pilar Sosial	11.093.550.185	16.792.000.000	16.055.578.608	144,73	95,61
2	Pilar Ekonomi	-	-	-	-	-
3	Pilar Lingkungan	45.000.000	390.000.000	560.522.575	1.245,61	143,72
4	Pilar Hukum Tata Kelola	72.072.072	1.570.000.000	1.444.456.706	2.004,18	92,00
Jumlah		11.210.622.257	18.752.000.000	18.060.557.889	161,10	96,31

Realisasi biaya TJSL Non CID yang melekat pada perusahaan namun berada di luar unit Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp18.060.557.889,-. dengan rincian sebagai berikut: Pada pilar sosial total realisasi program Non CID sebesar Rp16.055.578.608,- yang terdiri dari: Program Pengembangan SDM Darat dan Laut termasuk budaya perusahaan pada Divisi SDM dan Program Padat Karya membersihkan kapal perintis pada Divisi Umum. Sementara pada Pilar lingkungan terdiri dari Perpanjangan Sertifikasi ISO 9001:2015, 45001:2018, serta uji lingkungan hidup terkait limbah domestik, B3, emisi, dan uji lingker (berdasarkan faktor fisika, biologi, psikologis, kimia dan ergonomi) dengan total keseluruhan sebesar Rp 560.522.575,- yang kesemua anggaran tersebut berada di divisi DPA. Sementara pada pilar Hukum & Tata Kelola total realisasi sebesar Rp 1.444.456.706,- yang terdiri dari Konsultan Manajemen untuk Sertifikasi SMAP, anti korupsi, pelaksanaan GCG dan Manajemen Risiko serta biaya untuk sosialisasi kepada pegawai.

The realization of non-CID TJSL costs inherent in the company but outside the Company's Social Responsibility Unit in 2023 amounted to Rp18,060,557,889, with details as follows: In the social pillar, the total realization of Non-CID programs amounted to Rp16,055,578,608, which consists of: Human Resource Development Program on Land and Sea including company culture in the HR Division and the Padat Karya program to clean pioneer ships in the General Division. While in the Environmental Pillar, it consists of Extending ISO 9001:2015, 45001:2018 certification, and environmental tests related to domestic waste, hazardous waste, emissions, and environmental tests (based on physical, biological, psychological, chemical, and ergonomic factors) with a total of Rp 560,522,575, all of which are budgeted in the DPA division. Meanwhile, in the Legal & Governance pillar, the total realization is Rp 1,444,456,706, which consists of Management Consultants for SMAP Certification, anti-corruption, implementation of GCG and Risk Management as well as costs for socialization to employees.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

No	Program	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Lokasi Location
Program Prioritas Pendidikan Education Priority Program				
1	Bantuan Pendidikan kewirausahaan dengan Yayasan BUMN Untuk Indonesia Entrepreneurship Education Assistance with BUMN Untuk Indonesia Foundation	690.000.000	690.000.000	Jakarta
2	Sarana & Prasarana Pendidikan Education Facilities and Infrastructure	1.340.000.000	1.026.545.904	Papua, Cianjur, Depok, Jakarta, Blitar, Kediri, Kudus, Jepara, Lombok Tengah, Kep. Riau, Nabire, Sulawesi Tengah, Yogyakarta
3	Bina Olahraga Karate Karate Sports Development	100.000.000	100.000.000	Jakarta
Bidang Lingkungan Environmental Field				
1	Revitalisasi Terumbu Karang Coral Reef Revitalization	650.000.000	378.130.520	Pantai Bangsring, Jawa Timur Bangsring Beach, East Java
2	Penanaman mangrove di Pamengkasan Mangrove Planting in Pamengkasan	-	50.000.000	Banyuwangi, jawa Timur Banyuwangi, East Java
3	RKS Denpasar Waste Management House (RKS) Denpasar	400.000.000	372.954.999	Denpasar
4	Revitalisasi Hutan Forest Revitalization	300.000.000	127.000.000	Bima
5	Penanaman coklat Cocoa Planting		25.466.000	Labuan Bajo
6	Penyediaan Sarana Air bersih Provision of Clean Water Facilities	100.000.000	150.771.400	Nunukan, Lombok
Bidang Pengembangan UMK UMK Development Field				
1	Pembinaan Mitra Binaan (Pameran & Pelatihan)	150.000.000	90.857.380	Jakarta, Pemalang
2	Program pendampingan UMK	450.000.000	590.043.120	Jakarta Utara, Blitar, Bitung, Lombok, Bima, Makassar, Semarang, Ambon
3	Rumah Kelola Ikan	400.000.000	319.099.500	Larantuka

PROGRAM CREATING SHARED VALUE (CSV)

CSV adalah Program TJSL yang menciptakan nilai bersama, nilai manfaat positif bagi masyarakat dan menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan. Untuk merealisasikan program CSV

CREATING SHARED VALUE (CSV) PROGRAM

CSV is a TJSL Program that creates shared value, positive benefits for the community, and creates economic value for the company. To realize this CSV program, PT PELNI (Persero)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

ini PT PELNI (Persero) telah membuat Rumah Kelola Sampah (RKS). RKS Denpasar telah memberikan dampak bagi penerima manfaat yaitu menambah penghasilan penjualan plastik press (sebulan sekitar 500Kg) dengan harga RP1.500/kg, Sampah organik (sekitar 50/Ritase) dijual sebagai makanan ternak dengan harga Rp15.000/kg serta dampak bagi perusahaan yaitu pengurangan biaya pengangkutan sampah kapal sebesar 10%. Juga PELNI tidak menambah sampah di TPA Denpasar atau *zero waste*, dengan volume 500 kg – 1.000 kg/ritase.

has established a Waste Management House (RKS). RKS Denpasar has had an impact on beneficiaries by increasing income from selling pressed plastic (about 500 kg/month) at a price of RP1,500/kg, organic waste (about 50/Ritase) sold as animal feed at a price of Rp15,000/kg, and an impact on the company by reducing ship waste transportation costs by 10%. Pelni also does not add waste to the Denpasar landfill or zero waste, with a volume of 500 kg - 1,000 kg/ritase.

Selain RKS, CSV Pelni juga akan diwujudkan dalam bentuk Kampung Nelayan. Dimana telah diresmikan di bulan Agustus 2022 di Larantuka. Pemberian kapal jukong kepada kelompok nelayan (12 orang) telah menghemat sewa kapal sekitar. Kampung Nelayan diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dengan menambah wawasan, baik bagi kelompok nelayan maupun kelompok olah ikan, dalam mengolah produk ikan dan memasarkan produknya, sehingga dapat menambah nilai jual selain dari penjualan ikan segar melalui penjualan aneka olahan ikan lainnya (abon dan aneka frozen food). Nilai manfaat CSV bagi PT PELNI (Persero) diharapkan penjualan produk olahan ikan dapat meluas hingga ke luar daerah Larantuka untuk kemudian dapat dikirimkan dengan menggunakan kapal PT PELNI (Persero). Saat ini Program Rumah Kelola Ikan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Kelompok Pengolahan Ikan RKI dan Ketua Kelompok Nelayan. Koordinasi telah dilakukan kepada Kelurahan setempat untuk menjadikan UMKM RKI menjadi salah satu UMKM Binaan Keluraan, sehingga memiliki peluang mengikuti kegiatan bazar dan kegiatan lainnya.

In addition to RKS, Pelni's CSV will also be realized in the form of a Fishermen's Village. Which was inaugurated in August 2022 in Larantuka. Providing jukong boats to fishermen groups (12 people) has saved boat rental costs. The Fishermen's Village is expected to increase income by adding insights, both for fishermen groups and fish processing groups, in processing fish products and marketing them, so that it can add value other than from selling fresh fish through the sale of various processed fish products (floss and various frozen foods). The CSV benefits for PT PELNI (Persero) are expected to expand the sale of processed fish products to areas outside Larantuka to then be shipped using PT PELNI (Persero) ships. Currently, the Fish Farming House program is fully entrusted to the Chairman of the Fish Processing Group and the Chairman of the Fishermen's Group. Coordination has been carried out with the local sub-district to make the RKI MSMEs one of the sub-district's fostered MSMEs, thus having the opportunity to participate in bazaar activities and other activities.

No	Program	Anggaran 2023 Budget 2023 (Rp)	Realisasi 2023 Realization 2023 (Rp)	Nilai Manfaat CSV CSV Benefit Value
1	RKS (Rumah Kelola Sampah) Denpasar Waste Management House (RKS) Denpasar	400.000.000	372.954.999	1. Pengurangan biaya pengangkutan sampah kapal PELNI sebesar 10 % 2. Pengiriman produk olahan dan atau bibit plastik ke Surabaya menggunakan kapal PELNI 3. PELNI tidak menambah sampah di daerah tsb (*zero waste*), dengan volume 500-1000Kg/ritase 1. Reduction in PELNI ship waste transportation costs by 10% 2. Shipment of processed products and/or plastic seeds to Surabaya using PELNI ships 3. PELNI does not add waste in the area (zero waste), with a volume of 500-1000Kg/ritase

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

No	Program	Anggaran 2023 Budget 2023 (Rp)	Realisasi 2023 Realization 2023 (Rp)	Nilai Manfaat CSV CSV Benefit Value
2	Kampung Nelayan Fishermen's Village	400.000.000	319.099.500	Pengiriman produk olahan ikan ke luar pulau Larantuka dengan menggunakan jasa *redpack* pelni. Shipment of processed fish products to outside Larantuka island using PELNI redpack services

PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (PUMK)

Selama tahun 2023, PELNI melaksanakan program PUMK dimana sumber dana Program berasal dari pengembalian pinjaman mitra binaan (dana bergulir) yaitu berupa angsuran pokok ditambah dengan jasa administrasi pinjaman, penerimaan jasa giro dan penerimaan lain-lain. Penyaluran dana Program PUMK terealisasi sebesar Rp1.650.000.000.

Berikut adalah perbandingan antara anggaran dan realisasi penyaluran program PUMK tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel. Sebagai berikut:

FUNDING FOR MICRO AND SMALL BUSINESSES (PUMK)

During 2023, PELNI implemented the PUMK program where the funding source of the program came from the repayment of fostered partner loans (revolving funds) in the form of principal installments plus loan administration fees, receipt of check services fees, and other receipts. The disbursement of PUMK Program funds amounted to Rp1,650,000,000.

The following is a comparison between the budget and the realization of the disbursement of the 2023 PUMK program which can be seen in the table below:

No	Uraian Description	2023		Persentase Pemenuhan Percentage of Fulfillment
		Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	
Penerima Recipient				
1	Saldo Awal Beginning Balance	-	91.944.035	-
2	Angsuran Pokok Principal Installments	1.543.409.870	1.643.485.349	106,48%
3	Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Fees	105.490.130	73.819.760	69,98%
4	Jasa Giro Check Services Fees	1.100.000	574.238	52,20%
5	Pendapatan Lain-lain Other Income	-	3.097.464	-%
Total		1.650.000.000	1.812.920.846	109,87
Penyaluran Disbursement				
1	Penyaluran dana PUMK Disbursement of PUMK funds	1.650.000.000	1.650.000.000	100,00%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

No	Uraian Description	2023		Persentase Pemenuhan Percentage of Fulfillment
		Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	
2	Pengembalian kelebihan angsuran Excess installment returns	-	3.127.470	-
Total		**1.650.000.000**	**1.653.127.470**	**100,19%**
Saldo Akhir **Ending Balance**		**-**	**159.793.376**	**-**

Jumlah dana tersedia sampai dengan triwulan IV tahun 2023 terdiri dari angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, jasa giro dan penerimaan lain-lain serta ditambah dengan saldo awal Januari 2023 menjadi Rp1.812.920.846,- atau 109,87% dari RKA tahun 2023. Penyaluran dana Program PUMK terealisasi sebesar Rp1.650.000.000,- atau sekitar 105,43% dari *audited* tahun 2022 atau 100% dari anggaran tahun 2023 dan pengembalian kelebihan angsuran kepada mitra binaan sebesar Rp3.127.470,-. Sehingga saldo akhir kas Desember 2023 sebesar Rp159.793.376,- atau meningkat sebesar 73,79% diakibatkan adanya pembayaran angsuran pinjaman di akhir tahun dan akan ditransfer ke PT Bank BRI (Persero) di bulan Januari 2024.

The total funds available until the fourth quarter of 2023 consisted of principal installments, loan administration fees, check services fees, and other receipts plus the beginning balance of January 2023 amounting to Rp1,812,920,846, or 109.87% of the 2023 budget. The disbursement of PUMK Program funds amounted to Rp1,650,000,000, or about 105.43% of the audited 2022 or 100% of the 2023 budget, and the excess installment returns to fostered partners amounted to Rp3,127,470. Thus, the cash balance at the end of December 2023 amounted to Rp159,793,376, or an increase of 73.79% due to loan installment payments at the end of the year and will be transferred to PT Bank BRI (Persero) in January 2024.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Posisi Piutang Program PUMK Tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 Berdasarkan Provinsi
Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Position of PUMK Program Receivables as of December 31, 2022, and 2023 by Province

Provinsi Province	Posisi Tahun 2022 Position in 2022		Posisi Tahun 2023 Position in 2023		% dari Tahun lalu % from Previous Year	
	Σ Unit Mitra Binaan Σ Partner Units	Total (Rp)	Σ Unit Mitra Binaan Σ Partner Units	Total (Rp)	Σ Unit Mitra Binaan Σ Partner Units	Total (Rp)
Penyaluran Mandiri: (Piutang Mitra Binaan) Self-Distribution: (Receivables from Fostered Partners)						
Aceh	1	61.923.126	1	43.890.521	100	71
Bali	1	15.802.729	1	15.802.729	100	100
Banten	14	547.428.993	13	399.398.815	93	73
DI Yogyakarta	1	2.314.333	1	2.314.333	100	100
DKI Jakarta	21	689.490.402	19	610.852.182	90	89
Jambi	3	144.009.383	2	96.953.854	67	67
Jawa Barat	140	3.294.809.826	130	2.761.903.515	93	84
Jawa Tengah	75	2.070.133.868	71	1.882.721.346	95	91
Jawa Timur	5	282.623.886	4	203.309.926	80	72
Lampung	36	900.442.514	27	692.538.156	75	77

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Posisi Piutang Program PUMK Tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 Berdasarkan Provinsi
Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Position of PUMK Program Receivables as of December 31, 2022, and 2023 by Province

Provinsi Province	Posisi Tahun 2022 Position in 2022		Posisi Tahun 2023 Position in 2023		% dari Tahun lalu % from Previous Year	
	Σ Unit Mitra Binaan Σ Partner Units	Total (Rp)	Σ Unit Mitra Binaan Σ Partner Units	Total (Rp)	Σ Unit Mitra Binaan Σ Partner Units	Total (Rp)
NTB	14	365.000.000	1	20.808.333	7	6
Jumlah	**311**	**8.373.979.060**	**270**	**6.730.493.711**	**87**	**80**

PENILAIAN PENERAPAN ESG OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Asesmen penerapan fator *Environment, Social, and Governance* (ESG) dimaksudkan untuk mengukur kualitas penerapan faktor ESG pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Standar asesmen merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan AAIPI Tahun 2021, sedangkan metode asesmen merujuk pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Asesmen Penerapan Faktor *Environment, Social, and Governance* pada BUMN.

Hasil asesmen penerapan faktor ESG PT PELNI (Persero) Tahun 2022 menunjukkan total capaian sebesar 71,60% atau mendapatkan predikat **"Cukup Baik"** dengan rincian sebagai berikut:

ASSESSMENT OF ESG IMPLEMENTATION BY THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY (BPKP)

The assessment of the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) factors is intended to measure the quality of the implementation of ESG factors at PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), as well as to provide necessary improvement recommendations.

The assessment standards refer to the Head of BPKP Regulation Number 1 of 2019 concerning the Standards of Internal Audit Work of BPKP and the Standards of Internal Audit of the Government of Indonesia issued by AAIPI in 2021, while the assessment method refers to the Deputy Head of BPKP Regulation Number 2 of 2023 concerning Guidelines for the Assessment of the Implementation of Environmental, Social, and Governance Factors at SOEs.

The results of the assessment of the implementation of ESG factors at PT PELNI (Persero) in 2022 showed a total achievement of 71.60% or received a "Fairly Good" predicate with details as follows:

No.	Faktor-Faktor ESG ESG Factors	Bobot Weight	Capaian (%) Achievement (%)	Nilai Value
1	Faktor Lingkungan (E) Environmental Factor (E)	20	71,80	14,36
2	Faktor Sosial (S) Social Factor (S)	35	75,20	26,32
3	Faktor Tata Kelola (G) Governance Factor (G)	20	64,30	12,86
4	Faktor Finansial (D) Financial Factor (D)	25	72,24	18,06
	Nilai Agregat ESG Aggregate ESG Value	100	71,60	71,60

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		I. General Provision
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	✓	a. Annual Report is a report on the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) financial year to the General Meeting of Shareholders based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation regarding the Annual Report of Issuers or Public Companies.
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	n/a	b. Issuers are parties who make public offerings.
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	n/a	c. Public Company is a company whose shares are by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	n/a	d. Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Public Company.
e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	✓	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.
f. Direksi:		f. Board of Directors:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	✓	1) for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	✓	2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that runs the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
g. Dewan Komisaris:		g. Board of Commissioners:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	✓	1) for an Issuer or Public Company in the form of a limited liability company is the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	✓	2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is the organ that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:		h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	✓	1) for an Issuer or Public Company in the form of a limited liability company is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	✓	2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that has authority that could not be given to an organ that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the laws and/or articles of association governing the legal entity.
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	✓	2. The Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making an investment decision, and is a means of monitoring an issuer or public company.

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	✓	3. Along with the development of the Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through an annual report.
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	✓	4. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	✓	5. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		**II. Format of Annual Report**
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.	✓	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	✓	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	✓	3. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF).	✓	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. Isi Laporan Tahunan		**III. Content of Annual Report**
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:		**1. Annual Report should contain at least the following information:**
a. Ikhtisar data keuangan penting;	✓	a. Summary of key financial information;
b. Informasi Saham (jika ada);	✓	b. Stock information (if any);
c. Laporan Direksi;	✓	c. The Board of Directors report;
d. Laporan Dewan Komisaris;	✓	d. The Board of Commissioners report;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	e. Profile of Issuer or Public Company;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	✓	f. Management Discussion and Analysis;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	✓	i. Audited annual report; and
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	✓	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		**2. Description of Content of Annual Report**
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:		**a. Summary of Key Financial Information** Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) Pendapatan/penjualan;	14	1) Income/sales;
2) Laba bruto;	14	2) Gross profit;
3) Laba (rugi);	14	3) Profit (loss);
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	15	4) Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interests;
5) Total laba (rugi) komprehensif;	15	5) Total comprehensive profit (loss);
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	15	6) Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) Laba (rugi) per saham;	15	7) Earning (loss) per share;
8) Jumlah aset;	14	8) Total assets;
9) Jumlah liabilitas;	14	9) Total liabilities;
10) Jumlah ekuitas;	14	10) Total equities;
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	16	11) Profit (loss) to total assets ratio;
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	16	12) Profit (loss) to equities ratio;
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	16	13) Profit (loss) to income ratio;
14) Rasio lancar;	16	14) Current ratio;
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	16	15) Liabilities to equities ratio;
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	16	16) Liabilities to total assets ratio; and
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	16	17) Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		**b. Stock Information** Stock Information for Public Company at least contains:
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	20	1) Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) Jumlah saham yang beredar;		a) Number of outstanding shares;
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;		b) Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan		c) Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d) Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		d) Share volume at the Stock Exchange where the shares list
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	20	2) In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;		a) Date of corporate action;
b) Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;		b) Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;		c) Number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan		d) Number of conversion effects performed (if any)
e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;		e) Share price prior to and after corporate action;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	n/a	3) In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	n/a	4) In the event that the suspension and/ or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		**c. The Board of Directors Report** The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		1) The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	66-73	a) Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	73	b) The Board of Directors roles in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	73	c) The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer or Public Company strategy;
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	74-79	d) Comparison between achievement of results and targets by the issuer or Public Company; and
e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	79-80	e) Challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	82-83	2) Description on business prospects; or Public Company; and
3) Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	80-82	3) Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company;
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		**d. The Board of Commissioners report** The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	44-46	1) Assessment of the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;
2) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	56-57	2) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
3) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	49	3) View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
e. **Profil Emiten atau Perusahaan Publik** Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:		e. **Profile of the Issuer or Public Company** Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	92	1) Name of Issuer or Public Company, including change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name during the year under review
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	92	2) Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where the public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) Alamat;		a) Address
b) Nomor telepon;		b) Telephone number;
c) Alamat surat elektronik; dan		c) E-mail address; and
d) Alamat situs *web*;		d) Website address;
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	93-95	3) Brief history of the Issuer or Public Company;
4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan;	100-103	4) Vision and mission of the Issuer or Public Company as well as corporate culture or values
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	104-113	5) Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	114-125	6) The operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or district for implementing operational activities or the range of the company's operational activities.

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	125-127	7) Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
8) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	128	8) A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	130-139	9) The Board of Directors profiles include:
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;		a) Name and short description of duties and functions;
b) Foto terbaru;		b) Latest photograph;
c) Usia;		c) Age;
d) Kewarganegaraan		d) Citizenship
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;		e) Education and/or certification;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;		(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan		(2) Concurrent position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan		g) Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major or controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	140-141	h) Changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	144-151	10) Board of Commissioners Profile, include:
a) Nama dan jabatan;		a) Name and position;
b) Foto terbaru;		b) Latest photograph;
c) Usia;		c) Age;
d) Kewarganegaraan;		d) Citizenship
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;		e) Education and/or certification;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;		(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners
(2) Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;		(2) Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan		(3) Concurrent position, as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;		g) Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors , and major or controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan		h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods; and
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	152-153	i) Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	141-142, 153-154	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	155-158	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year; Disclosure of information can be presented in table form.
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	191	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;		a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan		b) Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;		c) Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	191	14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	191	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) Kepemilikan institusi lokal;		a) Ownership of local institutions;
b) Kepemilikan institusi asing;		b) Ownership of foreign institutions;
c) Kepemilikan individu lokal; dan		c) Ownership of local individual; and
d) Kepemilikan individu asing;		d) Ownership of foreign individual;
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	192	16) Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	194-196	17) Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any); For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
18) Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	197	18) Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	197	19) Other securities listing information other than securities as referred to in number 18), which have not matured in the financial year at least containing the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi:	198-199	20) Information on public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/allies includes:
a) Nama dan alamat;		a) Name and address;
b) Periode penugasan;		b) Assignment period
c) Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;		c) Information on audit and/or non-audit services provided;
d) Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan		d) Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the financial year; and
e) Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.		e) In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and Disclosure of information on AP and KAP services and their networks/ associations/allies can be presented in table form.

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	198-199	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	286-342	**f. Management Discussion and Analysis** Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	290-299	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	✓	a) Production, which includes process, capacity and its development;
b) Pendapatan/penjualan; dan	✓	b) Income/sales; and
c) Profitabilitas;	✓	c) Profitability;
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	300-310	2) Comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	✓	a) Current assets, non-current assets, and total assets;
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	✓	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c) Ekuitas;	✓	c) Equities;
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	✓	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e) Arus kas;	✓	e) Cash flows;
3) Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	314	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	314	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	315-316	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:	317	6) Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) Tujuan dari ikatan tersebut;	✓	a) The purpose of such ties;
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	✓	b) Source of funds expected to fulfill the said ties;
c) Mata uang yang menjadi denominasi; dan	✓	c) Currency of denomination; and
d) Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	✓	d) Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	317	7) Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) Jenis investasi barang modal;	✓	a) Type of investment of capital goods;
b) Tujuan investasi barang modal;	✓	b) Objective of the investment of capital goods;and
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	✓	c) Value of the investment of capital goods;
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	322	8) Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9) Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	339-342	9) Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	318-320	10) Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) Pendapatan/penjualan;	✓	a) Income/sales;
b) Laba (rugi);	✓	b) Profit (loss);
c) Struktur modal (*capital structure*); atau	✓	c) Capital structure; or
d) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	d) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	319	11) Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) Pendapatan/penjualan;	✓	a) Income/sales;
b) Laba (rugi);	✓	b) Profit (loss);
c) Struktur modal (*capital structure*);	✓	c) Capital structure;
d) Kebijakan dividen; atau	✓	d) Dividend policy; or

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	e) Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12) Aspek pemasaran atas barang dan/ atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	337-338	12) Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	323	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	✓	a) Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;
b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/ atau tanggal distribusi dividen non kas;	✓	b) The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/ atau non kas); dan	✓	c) Amount of cash per share (cash and/ or non cash); and
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	✓	d) The amount of dividends paid per year;
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		Disclosure of information can be presented in table form.
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.
14) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	333	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	✓	a) During the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	✓	b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	321-322	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, along others include:
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	✓	a) Transaction date, value and object;
b) Nama pihak yang melakukan transaksi;	✓	b) Name of transacting parties;
c) Sifat hubungan afiliasi (jika ada);	✓	c) The nature of the affiliate relationship (if any);
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	✓	d) Description of the fairness of the transaction; dan
e) Pemenuhan ketentuan terkait; dan	✓	e) Compliance with related rules and regulations;
f) Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	✓	f) In the event that there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:
(1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*); dan		(1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has conducted through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is in line with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle; and
(2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*);		(2) The Board of Commissioners and the audit committee roles in carrying out adequate procedures to ensure that affiliate transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	✓	g) For affiliate transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/ or continuously, an explanation is added that the affiliate transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/ or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	✓	h) For disclosure of affiliate transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliate transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	✓	i) In the event that there is no affiliate transaction and/or conflict of interest transaction, then this matter shall be disclosed;
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	333	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	333-334	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		**g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company** Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) RUPS, paling sedikit memuat:		1) GMS, at least contains:

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	365-402	a) Information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
(1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan		(1) Resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and
(2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;		(2) Resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them;
b) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	364-365	b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;
2) Direksi, paling sedikit memuat:		2) Board of Directors, at least contains:
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	415-417	a) Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;
Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.		Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in table.
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi;	411-412	b) Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	364, 377, 385, 396, 418-420, 445	c) Policies and frequency of Board of Directors meetings, joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;
Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.		Information on the attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, joint meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in table.
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	471-474	d) Training and/or competency of members of the Board of Directors:
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan		(1) Policies related to training and/ or the competence improvement of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);		(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);
e) Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	474	e) The Board of Directors' assessment of the committees' performance that support the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan		(1) Performance appraisal procedures; and
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan		(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
f) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	474	f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		3) The Board of Commissioners, cover:
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	493-496	a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris;	492-493	b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	364, 377, 385, 396, 499, 506	c) Policies and the frequency of the Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting including attendance at the GMS;
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.		Information on the attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in table.
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	517-518	d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan		(1) Policies on training and/or the competency improvement of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);		(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);
e) Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	519-527	e) Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least contain:
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;		(1) Procedure for the implementation of performance assessment;
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan		(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
(3) Pihak yang melakukan penilaian; dan		(3) Assessor;
f) Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	528-529	f) The Board of Commissioners' assessment of the Committees' performance that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan		(1) Performance appraisal procedures; and
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;		(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	531-543	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan		a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;		(1) The procedure for determining the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan		(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and
(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in table.
5) Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	n/a	5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) Nama;		a) Name;
b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;		b) Legal basis of appointment of Sharia Supervisory Board
c) Periode penugasan dewan pengawas syariah;		c) Term of office of Sharia Supervisory Board
d) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan		d) Duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;		e) Frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles of the Issuer or Public Company in the Capital Market;
6) Komite audit, paling sedikit memuat:		6) Audit Committee, among others covering:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	549-550	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	549-550	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	549-550	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	549-550	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	549-550	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;		(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		(2) Dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite audit;	549-550	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi komite audit;	552-553	g) Statement of independence of the Audit Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	553	h) Training and competency development participated in during the book year.
i) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	553-557	i) Policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee; and
j) Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit;	557-558	j) The activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		7) Committee or remuneration and nomination functions of Issuer or Public Company at least contains;
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	561	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	561	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	561	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	561	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	560-561	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;		(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		(2) Dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;	560	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Pernyataan independensi komite;	561-562	g) Statement of independence of the Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	562-563	h) Training and/or competency development participated in during the book year
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	563	i) Description of duty and responsibility;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite;	563	j) The statement that the Committee has already had the Charter;
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	564	k) Policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	564	l) Brief description on the activities of the committee;
m) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		m) In the event that nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan		(1) The reason why does not form the committee
(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;		(2) The party who carries out the nomination and remuneration function;
8) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	567-586	8) Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least contains;
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	568, 578	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	569-570, 579-581	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	569-570, 579-581	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	569-570, 579-581	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	569-570, 579-581	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;		(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		(2) Dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;	569-570, 579-581	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi komite;	570-571, 581-582	g) Statement of independence of the Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	572, 582	h) Training and/or Competency Development participated in during the book year; i) Uraian tugas dan tanggung jawab;
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	572, 582-583	i) Description of duty and responsibility;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite;	573, 582	j) The statement that the Committee has already had the Charter;
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	573-574, 584-585	k) Policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	576, 586	l) Brief description on the activities of the committee;
9) Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:	593-614	9) Corporate Secretary, including:
a) Nama;		a) Name;
b) Domisili;		b) Domicile;
c) Riwayat jabatan, meliputi:		c) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan		(1) Legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d) Riwayat pendidikan;		d) Education background;
e) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	594	e) Training and competency development participated in during the book year
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	595-614	f) Brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
10) Unit audit internal, paling sedikit memuat:	615-627	10) Internal Audit Unit, among others including:
a) Nama kepala unit audit internal;	615-616	a) Name of Head of Internal Audit Unit;
b) Riwayat jabatan, meliputi:	616	b) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan		(1) Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	616-617	c) Qualification or certification as internal auditor (if any);
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	616-617	d) Training and/or Competency Development participated in during the book year
e) Struktur dan kedudukan unit audit internal;	619-620	e) Structure and position of Internal Audit Unit;
f) Uraian tugas dan tanggung jawab;	621	f) Description of duties and responsibilities;
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan	621	g) Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	622	h) Brief description of the duties implementation of the internal audit unit in the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	626	a) Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	626-627	b) Review on the effectiveness of internal control systems;
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	627	c) Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		12) Risk management system implemented by the company, at least includes:

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	631	a) General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya;	640-648	b) Types of risk and the management; and
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	649-650	c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company; and
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	651-652	d) Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	653-654	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a) Pokok perkara/gugatan;	653-654	a) Substance of the case/claim;
b) Status penyelesaian perkara/ gugatan; dan	653-654	b) Status of settlement of case/claim; and
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	653-654	c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
14) Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	654	14) Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	656-660	15) Information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) Pokok-pokok kode etik;	656-657	a) Key points of the code of conduct;
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	658-659	b) Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	656	c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/ MSOP) dan/ atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/ MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	661	16) A brief description of the policy for providing long-term performance-based compensation to management and/ or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (ESOP) and/or program employee stock ownership (ESOP); In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (ESOP) and/ or employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:
a) Jumlah saham dan/atau opsi;		a) Number of share and/or option;
b) Jangka waktu pelaksanaan;		b) Period;
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan		c) The requirement for eligible employee and/or management; and
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;		d) Exercised price;
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	661	17) A brief description of the information disclosure policy regarding:
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan		a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;		b) Implementation of that policy;
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	662-673	18) A description of the whistleblowing system in the Issuer or Public Company, at least contains;
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran;	662-667	a) Mechanism for violation reporting;
b) Perlindungan bagi pelapor;	668-669	b) Protection for the whistleblower;
c) Penanganan pengaduan;	670	c) Handling of violation reports;
d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan	670-671	d) Unit responsible for handling of violation report; and
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	673	e) Results from violation report handling, at least includes:

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan		(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2) Tindak lanjut pengaduan;		(2) Follow up of complaints;
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, it is disclosed regarding this matter
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	674-675	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least contains;
a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	674-675	a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and
b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	676	b) Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.		In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.
20) Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	684-755	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	688-755	a) Statement regarding the recommendation that has been implemented; and/or
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	688-755	b) Description of recommendation that has not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		Disclosure of information can be presented in table.
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	✓	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	✓	1) Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, containing at least:

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Penjelasan strategi keberlanjutan;	✓	a) Sustainability strategy explanation;
b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	✓	b) Sustainability aspects overview (economic, social and environmental);
c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	c) Brief Profile of Issuers or Public Company;
d) Penjelasan Direksi;	✓	d) The Board of Directors explanation;
e) Tata kelola keberlanjutan;	✓	e) Good corporate governance;
f) Kinerja keberlanjutan;	✓	f) Sustainability Governance;
g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	✓	g) Written verification from an Independent Party (if any);
h) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan	✓	h) Feedback sheet for stakeholders (if any);
i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	✓	i) The Issuer or Public Company response to the previous year's report feedback;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	833-1001	i. Audited Financial Statements The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	88-89	j. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Report

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN / *AND*
ENTITAS ANAK / *ITS SUBSIDIARIES*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / *INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*
DAN / *AND*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
As of December 31, 2023 and for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2022 and
for The Year then Ended)

Nomor / *Number* : 00056/2.0999/AU.1/06/0139-3/1/IV/2024
Tanggal / *Date* : 01 April 2024

DAFTAR ISI | ***TABLE OF CONTENTS***

	Halaman / *Pages*	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		***DIRECTOR'S REPRESENTATIVE LETTER***
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		***INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK		***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES***
• **LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN** Tanggal 31 Desember 2023 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)	1 - 2	• ***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)*** *As of Desember 31, 2023 (With Comparative as of December 31, 2022)*
• **LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)	3	• ***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*** *For the Year Ended December 31, 2023 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2022)*
• **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)	4	• ***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY*** *For the Year Ended December 31, 2023 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2022)*
• **LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)	5	• ***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS*** *For the Year Ended December 31, 2023 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2022)*
• **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN** Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)	6 - 153	• ***NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*** *As of December 31, 2023 and for The Year then Ended (With Comparative as of December 31, 2022 and for The Year then Ended)*
Informasi Tambahan:		***Additional Information:***
LAPORAN KEUANGAN POKOK PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)		***FINANCIAL STATEMENTS OF PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)***
(Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri)		***(Financial Information - Parent Entity Only, As a Separate Financial Statements)***
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)		*As of December 31, 2023 and for The Year then Ended (With Comparative as of December 31, 2022 and for The Year then Ended)*
• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk Saja		• *Statements of Financial Position (Balance Sheets) - Parent Only*
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja		• *Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Only*
• Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja		• *Statements of Changes in Equity - Parent Only*
• Laporan Arus Kas - Induk Saja		• *Statement of Cash Flows - Parent Only*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
DIRECTOR'S REPRESENTATIVE LETTER

AKHLAK
AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

PELNI
We Connect, We Unify

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS
AT DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND
ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned*

Nama	:	Tri Andayani	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta, 10130	:	*Office Address*
NIK	:	3175076907730002	:	*ID Number*
Jabatan	:	Direktur Utama / *President Director*	:	*Position*
Nama	:	Anik Hidayati	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta, 10130	:	*Office Address*
NIK	:	3578036010660003	:	*ID Number*
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / *Finance and Risk Management Director*	:	*Position*

Menyatakan bahwa : / *State that :*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak; / *We are responsible for preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries;*
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *The consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information contained in the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries are complete and correct;*
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *The consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. / *We are responsible for the internal control system within PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries to enable the preparation of the Consolidated Financial Statements to be free from material misstatement, whether caused by fraud or error.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 01 April 2024/ *April 01, 2024*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Direktur Utama
/ President Director

Tri Andayani

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
/ Finance and Risk Management Director

Anik Hidayati

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat
10130, DKI Jakarta, Indonesia
Telp. 021-6334342
Fax. 021-63854130
www.pelni.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Nomor : 00056/2.0999/AU.1/06/0139-3/1/IV/2024 *Number :*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Saham, Dewan dan Direksi Komisaris
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary ofsignificant accounting policies. We also conduct tests of adherence to laws and regulations and internal control direct and material effect on the consolidated financial statements.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas Laporan Keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Pelayaran Nasional Indonesia (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries as at December 31, 2023 and for the year then ended was petform ed for the purpose of forming an opinion on these consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pelayaran Nasional Indonesia (parent entity only), which comprises the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information "), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presentedfor the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

HEAD OFFICE:
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081
Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

Selanjutnya, mendasar pada pengalaman penagihan PSO selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2020 - 2022), maka Grup menerapkan kebijakan pencadangan PSO pertama kali pada tahun buku 2023 dengan nilai maksimal 6% dari setiap pencatatan akrual bulanan penghasilan PSO untuk mengantisipasi dampak koreksi dari hasil verifikasi penagihan PSO oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK R.I.). Hal tersebut didasarkan pada hasil telaahan risiko dan pengawasan atas pelaksanaan di lapangan oleh manajemen sehingga berkeyakinan bahwa, nilai maksimal pencadangan PSO tersebut mampu mengelola risiko dari dampak penurunan secara material dan signifikan apabila nilai koreksi BPK RI naik secara signifikan. Dengan demikian, laporan keuangan terlampir tidak terdampak bilamana terdapat koreksi PSO yang material di tahun 2023 ini. (Catatan 4, huruf x, dan Catatan 5, huruf e dan i)

Furthermore, based on the PSO collection experience for 3 (three) consecutive years (2020 - 2022), the Group implemented a PSO reserve policy for the first time in the 2023 financial year with a maximum value of 6% of each monthly accrual recording of PSO income to anticipate the impact of corrections from the results of verification of PSO billing by the Supreme Audit Agency - Republic of Indonesia (called "BPK R.I."). This is based on the results of risk studies and supervision of implementation in the field by management so that it is confident that the maximum value of the PSO reserve is able to manage the risk of a material and significant decline if the BPK R.I. correction value increases significantly. Thus, the attached financial report will not be affected if there is a material PSO correction in 2023. (See Note 4, letter x, and Note 5, letter e and i)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DJOKO, SIDIK & INDRA
DJOKO, SIDIK & INDRA REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA,. CPI.
NRAP / *Public Accountant License* AP. 0139

01 April / *April 01*, 2024

00056

NOTICE TO READERS

The above auditor's report and the accompanying consolidated financial statements are English translations of the Indonesian auditor's report and consolidated financial statements enclosed prepared for and used in Indonesia. The accompanying consolidated financial statements were prepared using accounting principles, procedures and reporting practices generally accepted in Indonesia and are not intended to present the financial positions, financial performances and their cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements are conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of Desember 31, 2023
(With Comparative as of December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Des./ *Dec.* 31, 2023	31 Des./ *Dec.* 31, 2022	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	4c;4g;4h;4k;6	3.494.572.510.108	3.440.770.843.425	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	4g;4h;7	118.837.699.666	74.325.188.507	*Accounts Receivables*
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp54.379.676.429 dan Rp54.173.144.041)				*(Net of provision for expected credit loss as of December 31, 2023 and 2022, respectively Rp54.379.676.429 and Rp54.173.144.041)*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	4g;4h;4l;8	811.020.551.456	408.774.878.598	*Other Current Financial Assets*
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.339.359.681 dan Rp4.129.777.958)				*(Net of provision for expected credit loss as of December 31, 2023 and 2022 respectively Rp7.339.359.681 dan Rp4.129.777.958)*
Persediaan	4m;9	375.462.947.659	424.244.315.024	*Inventories*
Pajak Dibayar Dimuka	4y;10a	39.966.597.357	97.176.852.569	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	4n;11	154.888.050.845	49.958.374.809	*Advances Payment*
Biaya Dibayar Dimuka	4n;12	67.295.671.788	69.713.080.612	*Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar		**5.062.044.028.879**	**4.564.963.533.544**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON CURRENT ASSETS***
Investasi pada Entitas Asosiasi	4o;13	240.324.819.715	208.284.214.875	*Investment in Assosiate*
Properti Investasi	4p;4s;14	183.938.230.000	173.439.829.615	*Invesment Properties*
Alat Produksi	4q;4s;15	2.157.776.604.669	2.407.461.637.715	*Production Equipment*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp7.094.083.503.857 dan Rp 6.661.922.810.540)				*(Net of accumulated depreciation as of December 31, 2023 and 2022, respectively Rp7.094.083.503.857 and Rp6.661.922.810.540)*
Aset Tetap	4q;4s;16	298.020.673.453	267.428.526.556	*Production Equipment*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp266.643.327.207 dan Rp259.676.382.481)				*(Net of accumulated depreciation as of December 31, 2023 and 2022, respectively Rp266.643.327.207 and Rp259.676.382.481)*
Aset Tak Berwujud	4r;4s;17	18.294.398.360	20.819.224.551	*Intangible Assets*
Aset Hak Guna	4u;18	3.903.429.867	2.342.915.811	*Right of Use Assets*
Aset Pajak Tangguhan	4y;10d	71.660.641.912	68.766.643.254	*Deferred Tax Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	19	69.670.750	471.845.410	*Other Non Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**2.973.988.468.726**	**3.149.014.837.787**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET		**8.036.032.497.605**	**7.713.978.371.331**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan /
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of Desember 31, 2023
(With Comparative as of December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Des./ *Dec.* 31, 2023	31 Des./ *Dec.* 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***SHORT TERM LIABILITIES***
Pinjaman Jangka Pendek	4g;4i;20	22.000.000.000	-	*Short-Term Loans*
Utang Usaha	4g;4i;21	205.462.829.587	209.169.771.797	*Trade Payable*
Beban Akrual	4i;22	599.334.661.433	485.845.655.751	*Accrued Expenses*
Liabilitas Kontrak	4i;4t;23	78.061.221.471	53.637.024.185	*Contract Liability*
Utang Pajak	4y;10b	59.340.710.336	78.375.605.886	*Tax Payables*
Bagian Lancar atas:				*Current Portion of:*
Utang Kepada Negara	4g;4i;25	3.621.510.600	3.210.279.836	*Debt to the State*
Liabilitas Jangka Panjang	4i;26	4.519.052.786	5.519.000.800	*Long-Term Liabilities*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	4i;24	39.898.210.351	48.653.065.510	*Other Short Term Financial Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**1.012.238.196.564**	**884.410.403.765**	***Total Short-term Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***LONG TERM LIABILITIES***
Utang Kepada Negara	4g;4i;25	28.972.084.800	32.102.813.410	*Debt to the State*
Liabilitas Jangka Panjang	4i;26	8.228.142.102	9.975.347.564	*Long-term Liabilities*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	4v;27	162.853.081.134	101.665.255.360	*Long term Employee Benefits*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**200.053.308.036**	**143.743.416.334**	***Total Long-term Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**1.212.291.504.600**	**1.028.153.820.099**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal dasar 13.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 7.629.900 saham per 31 Desember 2023 dan 2022	28	7.629.900.000.000	7.629.900.000.000	*Shares Capital - par value of Rp1.000.000 per share. Authorized - 13.000.000 share. Issued and fully paid – 7.629.900 share as of December 31, 2023 and 2022*
Penyertaan Modal Pemerintah	29	143.585.642	143.585.642	*Government Capital*
Tambahan Modal Disetor	30	397.878.907.714	397.878.907.714	*Additional paid in Capital*
Cadangan	4z;31	1.342.665.131.496	1.169.417.204.918	*Appropriated Related Earnings*
Saldo Laba (Defisit)	4z;32	(2.453.137.655.701)	(2.481.091.576.775)	*Accumulated Deficit*
Komponen Ekuitas Lainnya	4v;33	(97.593.396.190)	(33.821.398.423)	*Other Equity Component*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**6.819.856.572.960**	**6.682.426.723.076**	***Total equity atributable to owners of the company***
Kepentingan Non Pengendali	4d;34	3.884.420.045	3.397.828.156	*Non Controlling Interest*
JUMLAH EKUITAS		**6.823.740.993.005**	**6.685.824.551.232**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**8.036.032.497.605**	**7.713.978.371.331**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan /
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2023
(With Comparative for The Year Ended December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Pendapatan Usaha, Bersih	4x;35	5.766.618.594.021	4.906.600.111.359	*Operating Revenues, Netto*
Beban Pokok Usaha	4x;36	4.894.057.572.901	4.118.494.016.618	*Operating Expenses*
Laba Kotor		**872.561.021.120**	**788.106.094.741**	***Gross Profit***
Beban Pemasaran dan Distribusi	4x;37	21.181.336.363	15.087.559.715	*Distribution and Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	4x;38	732.263.704.100	666.988.569.702	*General and Administrative Expenses*
Laba (Rugi) Usaha		**119.115.980.657**	**106.029.965.324**	***Operating Profit or (Loss)***
Pendapatan Non Usaha - Bersih	4x;39	179.404.869.552	168.365.732.666	*Non Operating Income - Net*
Laba Sebelum Pajak		**298.520.850.209**	**274.395.697.990**	***Profit Before Tax***
Beban Pajak	4y;10c	(96.889.623.714)	(100.776.508.049)	*Tax Expenses*
Laba Tahun Berjalan		**201.631.226.495**	**173.619.189.941**	***Profit for the Current Year***
Penghasilan Komprehensif Lain				***Other Comprehensive Income***
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				*Items That Will Not be Reclassified Subsequently To Profit or Loss:*
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Periode Berjalan	4v	(69.936.652.767)	88.908.802.091	*Actuarial Gain (Loss) for the Period*
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Aset Tetap	4v	6.164.655.000	-	*Fair Values of Property Gain (Loss) Current Period*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		**(63.771.997.767)**	**88.908.802.091**	***Total Other Comprehensive Income***
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		**137.859.228.728**	**262.527.992.032**	***Total Comprehensive Income of The Current Year***
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Profit for the Current Year Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		201.201.847.651	173.247.926.578	*Owner of the Company*
Kepentingan Nonpengendali		429.378.844	371.263.363	*Non Controlling Interest*
Jumlah		**201.631.226.495**	**173.619.189.941**	***Total***
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Total Comprehensive Income Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		137.427.636.840	262.144.704.982	*Owners of the Company*
Kepentingan Nonpengendali		431.591.888	383.287.050	*Non Controlling Interest*
Jumlah		**137.859.228.728**	**262.527.992.032**	***Total***
Laba Bersih Per Saham Dasar	4aa	**26.426,46**	**22.755,11**	***Basic Earnings Per Share***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan/
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(With Comparative for The Year Ended December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid of Shares Capital*	Penyertaan Modal Pemerintah/ *Goverment Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Cadangan Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated Retained Earnings*	Saldo Rugi (Defisit)/ *Retained Earnings (Deficits)*	Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Components*	Kepentingan Non-Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2021		**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**397.878.907.714**	**1.128.489.393.747**	**(2.613.411.692.181)**	**(122.730.200.513)**	**2.964.541.108**	**6.423.234.535.515**	***Balance as of December 31, 2021***
Laba Tahun Berjalan	4z;32	-	-	-	-	173.247.926.578	-	371.263.363	173.619.189.941	*Profit for the current year*
Cadangan	4z;31	-	-	-	40.927.811.171	(40.927.811.171)	-	-	-	*Reserve*
Kerugian/Keuntungan Aktuaria		-	-	-	-	-	88.908.802.090	12.023.686	88.920.825.776	*Actuarial Losses/Profit*
Investasi Entitas Grup		-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	*Group Entity Investments*
Saldo per 31 Desember 2022		**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**397.878.907.714**	**1.169.417.204.918**	**(2.481.091.576.774)**	**(33.821.398.423)**	**3.397.828.157**	**6.685.824.551.232**	***Balance as of December 31, 2022***
Laba Tahun Berjalan	4z;32	-	-	-	-	201.201.847.651	-	429.378.844	201.631.226.495	*Profit for the current year*
Cadangan	4z;31	-	-	-	173.247.926.578	(173.247.926.578)	-	-	-	*Reserve*
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria		-	-	-	-	-	(69.936.652.767)	2.213.044	(69.934.439.723)	*Actuarial Gain (Loss)*
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Aset Tetap		-	-	-	-	-	6.164.655.000	-	6.164.655.000	*Gain (Loss) on Fair Value of Fixed Assets*
Investasi Entitas Grup		-	-	-	-	-	-	55.000.000	55.000.000	*Investment Properties*
Saldo per 31 Desember 2023		**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**397.878.907.714**	**1.342.665.131.496**	**(2.453.137.655.701)**	**(97.593.396.190)**	**3.884.420.045**	**6.823.740.993.005**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan/
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2023
(With Comparative for The Year
Ended December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	2.705.259.725.324	2.688.795.919.989	*Receipt from Customers*
Penerimaan *Public Service Obligation (PSO)* dan Subsidi	3.040.918.105.872	3.559.892.871.068	*Receipt from Public Service Obligation (PSO) and Subsidies*
Pembayaran kepada Pemasok	(3.575.041.576.030)	(3.439.157.732.740)	*Payment to Suppliers*
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	50.650.602.746	113.359.662.758	*Receipt of other operating activities*
Pembayaran Biaya Operasional	(680.014.559.618)	(592.130.572.212)	*Payment of Operating Expenses*
Pembayaran Biaya *Overhead*	(1.017.018.870.360)	(871.184.363.909)	*Payment of Overhead Expenses*
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya	(95.382.065.949)	(103.649.467.288)	*Payment of Other Operating Expenses*
Pembayaran Pajak	(341.174.367.438)	(348.458.581.604)	*Tax Payments*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**88.196.994.547**	**1.007.467.736.062**	***Net Cash Flows from Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan Aset Tetap	24.840.295.346	-	*Sale of Fixed Assets*
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	105.674.751.984	46.309.799.591	*Interest Deposit and Demand Deposit Receipt*
Penerimaan Dividen	-	17.984.141.676	*Dividend Receipt*
Perolehan Alat Produksi dan Aset Tetap	(183.409.165.381)	(168.097.649.898)	*Acquisition Production Equipment and Fixed Assets*
Perolehan Aset Dalam Konstruksi	(932.430.801)	(8.119.326.829)	*Acquisition of Asset Under Construction*
Perolehan Aset Takberwujud	(1.290.900.000)	(14.904.761.306)	*Acquisition Intangible Assets*
Penambahan Investasi	55.000.000	50.000.000	*Increase on Investement*
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	**(55.062.448.852)**	**(126.777.796.766)**	***Net Cash Flows used to Investment Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman Bank	226.500.000.000	58.947.819.716	*Acceptance of Bank Loan*
Pembayaran Pinjaman Bank	(205.832.879.012)	(63.571.737.860)	*Bank Loan Payments*
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	**20.667.120.988**	**(4.623.918.144)**	***Net Cash Flows from (used to) Financing Activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**53.801.666.683**	**876.066.021.151**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	**3.440.770.843.425**	**2.564.704.822.274**	***CASH AND CASH EQUIVALENT BEGINNING BALANCE***
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	**3.494.572.510.108**	**3.440.770.843.425**	***CASH AND CASH EQUIVALENT ENDING BALANCE***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan/
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. U M U M

1.1. Pendirian Perusahaan

Berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Pada tanggal 28 April 1952 Yayasan Pepuska resmi dibubarkan. Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952.

Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Usaha. Pada tahun 1961 pemerintah menetapkan perubahan status dari Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (PN) dan dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. Kemudian pada tahun 1975 status perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PELNI sesuai dengan Akte Pendirian No. 31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Berita Negara RI No. 562-1979 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 1976. Dan Akte Perubahan No. 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 No. 31 Tambahan Berita Negara No.2203.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dituangkan dengan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH.,No. 02 tanggal 7 Februari 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010660.AH.01.02 tanggal 11 Februari 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH.,No. 02 tanggal 7 Februari 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dibidang:

a. Aktivitas jasa penunjang pertambangan;
b. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;

1. G E N E R A L

1.1. Company Establishment

PT PELNI (Persero) establishment was began with the issuance of a joint Decree of Three Ministers that issued by the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on September 5, 1950 to established of Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

On April 28, 1952 Yayasan PEPUSKA was officially dissolved. At the same time was established of PT PELNI (Persero) based on the Decree of Minister of Transportation No.M.2/1/2 on February 28, 1952 and No.A.2/1/2 on April 19, 1952, and by the National Gazette of Republic of Indonesian No.50 on June 20, 1952.

The Company underwent several changes in form of business entities. In 1961, government of Indonesia set a change of status from Company to State Company (PN) and was stated in the National Gazette of the Republic of Indonesia No. LN 1961. Then in 1975 the status of company was changed to Limited Company (PT) PELNI based on the Articles of Incorporation No.31 on October 30, 1975. The amendment was included in RI State Gazette No. 562-1976 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60 dated June 27,1976. This was amended based on No.22 on March 4, 1998 about Articles Association of PT PELNI (Persero) which was published on the National Gazette of the Republic of Indonesian on April 16, 1999 No.31 that it was announced in Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesian No.2203.

The latest amendment of Articles of Association to Company is set forth with Notarial Deed of Ida Adiningsih, SH.,No. 02 on the date of February 7, 2022 which has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No:AHU-0010660.AH.01.02 dated February 11, 2022.

1.2. Purposes and Objectives

Based on Deed of Notary Ida Adiningsih, SH., No. 02 dated 7 February 2022, the aims and objectives of the Company are to engage in:

a. Mining support service activities;
b. Repair and installation of machines and equipment;

1. U M U M (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

c. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
d. Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
e. Angkutan perairan;
f. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan;
g. Penyediaan akomodasi;
h. Aktivitas jasa informasi;
i. *Real estat;*
j. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen;
k. Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya;
l. Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya;
m. Pendidikan.

Adapun untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang;
b. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang;
c. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata;
d. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang;
e. Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk penumpang;
f. Angkutan laut luar negeri untuk wisata;
g. Angkutan laut dalam negeri untuk umum;
h. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
j. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang;
k. Angkutan laut luar negeri untuk barang umum;
l. Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus;
m. Aktivitas penunjang pertambangan penggalian lainnya;
n. Pengadaan armada dan kelengkapannya untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan barang;
o. Pergudangan dan penyimpanan;
p. Aktivitas *cold storage* ;
q. Aktivitas *Bounded Warehousing* atau wilayah kawasan berikat;

1. G E N E R A L *(continued)*

1.2. Purposes and Objectives *(continued)*

c. Wholesale trade, not cars and motorcycles;
d. Retail trade, not cars and motorcycles;
e. Water transportation;
f. Warehousing and transportation support activities;
g. Provision of accommodation;
h. Information service activities;
i. Real estat;
j. Head office activities and management consulting;
k. Activities of travel agents, tour operators and other reservation services;
l. Office administration activities, office support activities and other business support activities;
m. *Education.*

As for achieving the aims and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:

a. Liner and tramper domestic sea transportation for passengers;
b. Domestic sea transportation for passengers;
c. Domestic sea transportation for tourism;
d. Pioneering domestic sea transportation for passengers;
e. Liner and tramper foreign sea transportation for passengers;
f. Overseas sea transportation for tourism;
g. Domestic sea transportation for the public;
h. Sea transportation of domestic port waters for goods;
i. Domestic sea transportation for special goods;
j. Pioneering domestic sea transportation for goods;
k. Overseas sea transportation for general goods;
l. Overseas sea transportation for special goods;
m. Other excavation mining supporting activities;
n. Procurement of the fleet and its equipment to carry out the transportation of passengers and goods;
o. Warehousing and storage;
p. Cold storage activities;
q. Bounded Warehousing activities or bonded zone areas;

1. U M U M (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

r. Pengelola gudang sistem resi gudang;
s. Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
t. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut;
u. Aktivitas pengelolaan kapal;
v. Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya;
w. Jasa pengurusan transportasi (JPT);
x. Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL);
y. Angkutan multimoda;
z. Jasa keagenan kapal/agen perkapalan perusahaan pelayaran;
aa. Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL;
ab. Portal *web* dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial;
ac. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
ad. Perdagangan besar hasil perikanan;
ae. Perdagangan besar beras;
af. Perdagangan besar buah-buahan;
ag. Perdagangan besar sayuran;
ah. Perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
ai. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
aj. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;
ak. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;
al. Perdagangan besar daging dan daging olahan;
am. Perdagangan besar hasil olahan perikanan;
an. Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
ao. Perdagangan besar susu dan produk susu;
ap. Perdagangan besar minyak dan lemak hewani;
aq. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
ar. Perdagangan eceran hasil perikanan;
as. Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
at. Perdagangan eceran beras;
au. Reparasi mesin untuk keperluan umum;
av. Reparasi kapal, perahu dan banguna terapung;
aw. Aktivitas konsultasi pariwisata;
ax. Aktivitas konsultasi transportasi, dan
ay. Kegiatan penunjang pendidikan;

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

a. Real estat yang dimiliki sendiri atau sewa;
b. Penyewaan *venue* penyelenggaraan aktivitas MICE dan *event* khusus;

1. G E N E R A L *(continued)*

1.2. Purposes and Objectives *(continued)*

r. Warehouse manager of warehouse receipt system;
s. Warehousing and other storage;
t. Sea port service activities;
u. Ship management activities;
v. Other water transportation supporting activities;
w. Transportation management services (JPT);
x. Ship cargo expedition activities (EMKL);
y. Multimodal transportation;
z. Ship agency services/shipping agency shipping companies;
aa. Other transportation support activities YTDL;
ab. Web portals and/or digital platforms for commercial purposes;
ac. Large trading on the basis of fees or contracts;
ad. Wholesale trade of fishery products;
ae. Rice wholesale trade;
af. Wholesale trade of fruit;
ag. Wholesale trade of vegetables;
ah. Wholesaling of coffee, tea and cocoa;
ai. Wholesale trade of food and other agricultural products;
aj. Wholesale of beef and processed beef;
ak. Wholesale trade of chicken meat and processed chicken meat;
al. Wholesale of meat and processed meat;
am. Wholesale trade of processed fishery products;
an. Wholesale trade of eggs and processed eggs;
ao. Wholesale of milk and milk products;
ap. Wholesale trade of animal oils and fats;
aq. Wholesale trade of food and other beverages;
ar. Retail trade of fishery products;
as. Retail trade of other agricultural products;
at. Rice retail trade;
au. Repair of machines for general purposes;
av. Repair of ships, boats and floating structures;
aw. Tourism consulting activities;
ax. Transportation consulting activities, and
ay. Educational support activities;

In addition to the main business activities, the Company can carry out business activities in order to optimize the utilization of its resources for:

a. Real estate owned or rented;
b. Rental of venues for organizing MICE activities and special events;

1. U M U M (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

c. Hotel bintang;
d. Hotel melati;
e. Penyediaan akomodasi jangka pendek;
f. Penyediaan akomodasi lainnya;
g. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE);
h. Jasa penyelenggara *event* khusus (*special event*);
i. Aktivitas agen perjalanan wisata;
j. Aktivitas agen perjalanan lainnya;
k. Aktivitas biro perjalanan wisata;
l. Aktivitas biro perjalanan lainnya;
m. Jasa informasi pariwisata;
n. Jasa informasi daya tarik wisata;
o. Jasa pramuwisata;
p. Jasa *interpreter* wisata;
q. Jasa reservasi lainnya;

1.3. Modal

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% Penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH tanggal 01 Februari 2016 yang telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.030012165 Tahun 2016 tanggal 02 Februari 2016. Penambahan modal dasar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 melalui konversi uang pokok *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* serta kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan tahun buku 2015. Perubahan Akta Terakhir No.2 tanggal 7 April 2017, dari Notaris Ida Adiningsih, S.H. Notaris di Jakarta, dengan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0126086 tahun 2017.

Total 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp7.629.900.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:

a. Sebesar Rp7.065.092.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta No. 1, tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 tanggal 02 Februari 2016.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.2. Purposes and Objectives *(continued)*

c. Star hotels;
d. Jasmine hotels;
e. Provision of short term accommodation;
f. Provision of other accommodations;
g. Organizers of meetings, incentive trips, conferences and exhibitions (MICE);
h. Special event organizer services;
i. Travel agent activities;
j. Other travel agency activities;
k. Tour and travel agency activities;
l. Other travel agency activities;
m. Tourism information services;
n. Information services on tourist attractions;
o. Tour guide services;
p. Travel interpreter services;
q. Other reservation services;

1.3. Capital

Capital Shares of the Company is owned 100% by Government in accordance with Notarial Deed Ida Adiningsih, SH dated of February 01, 2016 which has been approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.030012165 Year 2016, dated February 02, 2016. The addition of authorized capital was from Revenue and Expenditure Budgeted of State on the year of Budgeted Years of 2016 and through Money Conversion Subsidiary Loan Agreement (SLA) and part of capitalized reserves of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) until the year of 2015. The last amendment was deed No. 2 dated 7 April 2017, from Notary Ida Adiningsih, S.H. Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No: AHU-AH.01.03-0126086 of 2017.

Total 100% of the nominal value of each issued share or a total of Rp7,629,900,000,000 has been fully paid-up by the Republic of Indonesia (Shareholders) in the following manner:

a. Amounting to Rp7,065,092,000,000 represents old capital deposits in accordance with Deed No. 1, dated February 1, 2016 made before the Notary Ida Adiningsih, SH., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHUAH.01.03-0012165 dated February 02, 2016.

1. U M U M (lanjutan)

1.3. Modal (lanjutan)

Total 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp7.629.900.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:(lanjutan)

b. Sebesar Rp564.807.589.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi utang pokok Subsidiary Loan Agreement (SLA) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016.

c. Sebesar Rp411.000 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai Laporan Auditor Independen No. LAI_AU- 015/KAP. BM&W/BM/VI/2016, tanggal 01 April 2016.

1.4. Tempat dan Kedudukan

Perseroan berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki Kantor Cabang, Terminal Point, Kantor Perwakilan dan Unit Bisnis Strategi, dengan rincian sebagai berikut:

a. 4 Cabang Kelas 1;
b. 9 Cabang Kelas 2;
c. 18 Cabang Kelas 3;
d. 13 Cabang Kelas 4;
e. 20 Terminal Penghubung Kelas A;
f. 286 Terminal Penghubung Kelas B;
g. 1 Kantor Perwakilan di Singapura; dan
h. 2 Unit Bisnis Strategi (Galangan Surya, Surabaya dan Hotel Bahtera, Cipayung).

1. G E N E R A L *(continued)*

1.3. Capital *(continued)*

Total 100% of the nominal value of each issued share or a total of Rp7,629,900,000,000 has been fully paid-up by the Republic of Indonesia (Shareholders) in the following manner: (continued)

b. Amounting to Rp564,807,589,000 originating from the 2016 State Budget through the conversion of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 's Subsidiary Loan Agreement (SLA) to the Republic of Indonesia based on the Loan Forwarding Agreement Number 1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 and Number 1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002 as stipulated in Government Regulation Number 87 of 2016.

c. Amounted to Rp411,000 derived from the capitalisation of part of the Company's reserves as recorded in the Financial Statements for the Financial Year 2015 audited by a Public Accountant in accordance with the Independent Auditor's Report No. LAI_AU- 015/KAP. BM&W/BM/VI/2016, dated 01 April 2016.

1.4. Place and Domicile

The Company domiciled in Gajah Mada No. 14, Central Jakarta.

In carrying out its business activities, the Company has Branch Offices, Terminal Points, Representative Offices and Strategic Business Units, with the following details:

a. 4 Branches of Class 1
b. 9 Branches of Class 2
c. 18 Branches of Class 3
d. 13 Branches of Class 4
e. 20 Terminal Point of Class A
f. 286 Terminal Point of Class B
g. 1 Representative Office in Singapore
h. 2 Strategy Business Units (Galangan Surya, Surabaya dan Hotel Bahtera, Cipayung)

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH,. No.1, tanggal 02 Juni 2022, tentang Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (Persero). Susunan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ali Masykur Musa	:	*President Commisioner*
Komisaris Independen	:	Kristia Budiyarto	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Wahju Adji Herpriarsono	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Eddy Susanto Soepadmo	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Faturohman	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Raden Suhartono	:	*Commissioner*

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi perusahaan perseroan (persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 1, tanggal 3 Oktober 2023, susunan Direksi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Tri Andayani	:	*President Director*
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	:	Nuraini Dessy Winiastuty	:	*Director of Passenger Transportation*
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko	:	Anik Hidayati	:	*Director or Finance and Risk Management*
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Yossianis Marciano	:	*Director of Maritime Goods and Toll Road Transport*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Rainoc	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur Armada dan Teknik	:	Robert MP Sinaga	:	*Director of Fleet and Engineering*

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan sehingga Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia pada Tahun 2022.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.5. Management of Company

Boards of Commissioners and Directors

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-121/MBU/05/2022 dated 19 May 2022 and Deed of Notary Ida Adiningsih, SH,. No.1, June 2, 2022, regarding the Decree of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders in the Company (Persero). The composition of the Board of Commissioners for 2023 and 2022 are as follows:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-262/MBU/09/2023 dated 21 September 2023 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of the company PT Pelayaran Nasional Indonesia and the Deed of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 1, dated 3 October 2023, the composition of the Board of Directors for 2023 is as

Based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number: SK-263/MBU/11/2022 dated 21 November 2022 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors Limited Liability Company so that the Directors of Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia in 2022.

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Susunan Direksi untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Tri Andayani	:	*President Director*
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	:	Yahya Kuncoro	:	*Director of Passenger Transportation*
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko	:	Anik Hidayati	:	*Director or Finance and Risk Management*
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Yossianis Marciano	:	*Director of Maritime Goods and Toll Road Transport*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Rainoc	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur Armada dan Teknik	:	Robert MP Sinaga	:	*Director of Fleet and Engineering*

Sesuai Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-1/Wk.MBU.11/07/2023, tanggal 24 Juli 2023, perihal penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tahun 2023, bahwa Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem/Insentif Kerja atas kinerja Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

a. Gaji Direktur Utama sebesar Rp223.000.0000 per bulan. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, dan honorarium Komisaris ditetapkan 90% dari honorarium Komisaris Utama.
c. Tunjangan dan fasilitas Direksi sebagai berikut:
   1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji;
   2) Asuransi Purna Jabatan, ditanggung Perusahaan sebesar maksimal 25% dari gaji dalam 1 tahun;
   3) Tunjangan Perumahan sebesar Rp27.500.000 per bulan;
   4) Fasilitas Kendaraan 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, dengan spesifikasi maksimal 3.500 cc;

***1. G E N E R A L** (continued)*

***1.5. Management of Company** (continued)*

***Boards of Commissioners and Directors** (continued)*

The composition of the Board of Directors for 2022 is as follows:

In accordance with the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-1/Wk.MBU.11/07/2023, dated July 24 2023, concerning the determination of the income of the Directors and Board of Commissioners of PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2023, that the Salary/Honorarium of the Directors and Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2023 as well as Tantiem/Work Incentives for the performance of the 2022 Financial Year are as follows:

a. Salary of President Director is Rp208,000,000 per month and salaries of other Directors are 85% of salary of Presdent Director.
b. The President Commissioner's honorarium is set at 45% of the President Director's salary, and the Commissioner's honorarium is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.
c. Directors' allowances and facilities are as follows:
   1) Religious Holiday Allowance of 1 (one) time salary;
   2) Retirement Insurance, borne by the Company at a maximum of 25% of salary in 1 year;
   3) Housing Allowance of Rp27.500.000 per month;
   4) Vehicle facilities: 1 (one) unit along with maintenance and operational costs, taking into account the company's financial condition, with a maximum specification of 3,500 cc;

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

c. Tunjangan dan fasilitas Direksi sebagai berikut: (lanjutan)
   5) Fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian *(at cost)* ;
   6) Fasilitas Bantuan Hukum, sebesar pemakaian *(at cost)* ;

d. Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris sebagai berikut:
   1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali honorarium;
   2) Asuransi Purna Jabatan, ditanggung Perusahaan sebesar maksimal 25% dari honorarium dalam 1 tahun;
   3) Tunjangan Transportasi, sebesar 20% dari honorarium per bulan;
   4) Fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian *(at cost)* ;
   5) Fasilitas Bantuan Hukum, sebesar pemakaian *(at cost)* ;

Mendasar pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-184/MBU/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2022 serta memperhatikan surat Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Nomor:53/DK/VI-2022 tanggal 16 Juni 2022 dan menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disahkan pada tanggal 29 Juni 2022, maka ditetapkan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi serta tantiem/insentif kinerja/insetif khusus atas kinerja tahun buku 2021 sebagai berikut:

a. Gaji Direktur Utama sebesar Rp208.000.0000 per bulan dan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.5. Management of Company *(continued)*

Boards of Commissioners and Directors *(continued)*

c. Directors' allowances and facilities are as follows: (continued)
   5) Health Facilities, in the form of health insurance or reimbursement of medical costs at cost;
   6) Legal Aid Facilities, at cost;

d. The Board of Commissioners' allowances and facilities are as follows:
   1) Religious Holiday Allowance of 1 (one) time honorarium;
   2) Retirement Insurance, borne by the Company at a maximum of 25% of honorarium in 1 year;
   3) Transportation Allowance, 20% of the honorarium per month;
   4) Health Facilities, in the form of health insurance or reimbursement of medical costs at cost;
   5) Legal Aid Facilities, at cost;

Based on BUMN Minister Regulation Number PER-13/MBU/09/2021 dated 24 September 2021 Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and BUMN Supervisory Board and Decree of the Minister of BUMN Number: SK-184/MBU/08/2022 dated 29 August 2022 concerning Determination of Income for Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises for 2022 and taking into account the letter of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number: 53/DK/VI-2022 dated 16 June 2022 and following up on the Resolution of the General Meeting of Shareholders PT PELNI (Persero) regarding the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2021 Fiscal Year which was ratified on June 29, 2022, the Income for the Board of Commissioners and Directors and bonuses/performance incentives/special incentives for the performance of the 2021 financial year are determined as follows:

a. Salary of President Director is Rp208,000,000 per month and salaries of other Directors are 85% of salary of President Director.

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45 % dari Gaji Direktur Utama. Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan 90 % dari Komisaris Utama.

c. Gaji/Honorarium bagi Direksi & Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2022 berlaku efektif 1 Januari 2022.

Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris juga menerima insentif kinerja tahun buku 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Insentif Kinerja Direktur Utama, Anggota Direksi lainnya dan Komisaris Utama masing-masing 100%, 85% dan 45% dari insentif kinerja Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris sebesar 90% dari insentif Komisaris Utama dan pembayarannya dihitung proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2021.

- PPh menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Tahun 2023 dan 2022 secara berurutan Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Anton HG Napitupulu.

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat independen dan mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.5. Management of Company *(continued)*

Boards of Commissioners and Directors *(continued)*

b. Honorarium of Commissioner was assigned to 45% of the salary of the President Director. Honorarium of Board of Commissioners is set to 90% of the Commissioner.

c. Salary/Honorarium for Board of Directors and Commissioners as well as allowances and facilities for 2022 become effectively commencing on January 1, 2022.

In addition the Board of Commissioner also received performance incentives for the fiscal year 2021 subject to the following conditions:

- *Performance Incentives of President Director, other Directors and Commissioner are respectively 100%, 85% and 45% of performance incentives of President Director while the incentives of Board of Commissioners are amounting to 90% of the Commissioner incentive and the payment is calculated proportionately and by calculating the effective work on fiscal year of 2021.*
- *PPh is should by the recepient and it is not allowed as a company fee.*

In supporting of implementation of functions and role effectiveness of Board of Commissioners. BOC is assisted by Secretary of Board of Commissioners. In 2023 and 2022 sequentially the Secretary of Board of Commissioners held by is Anton HG Napitupulu.

The Audit Committee

The Audit Committee is an organ of Board of Commissioners which was formed by Board of Commissioners as mandated by Constitution No. 19 of 2003 concerning on State Owned Enterprises. The Audit Committee serves to assist the Board of Commisioners in carrying out supervisory duties. Audit Committee is independent and self-sufficient both in the execution of it duties and reporting directly responsible to Board of Commissioners.

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Komite Audit (lanjutan)

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-03/DK/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-07/DK/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Audit tahun buku 2023 dan 2022, sebagai berikut:

1. G E N E R A L *(continued)*

1.5. Management of Company *(continued)*

The Audit Committee *(continued)*

Audit Committee members are appointed and dismissed by Board of Commissioners and is reported to General Meeting of Shareholders (RUPS). Audit Committee members tenure should not be longer than term of Board of Commissioners in accordance with Articles of Association of Company and may be reelected only for next one (1) term.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-03/DK/VII/2023, dated 31 July 2023, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), and Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-07/DK/VII/2022 dated 29 July 2022, concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) as Members of the Committee of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee for the 2023 and 2022 financial years, as follows :

Ketua Komite Audit (juga selaku Dewan Komisaris)	:	Raden Suhartono	:	*Chairman of Audit Committee (also as Commissioner)*
Anggota (juga selaku Dewan Komisaris)	:	Wahju Adjie Herpriarsono	:	*Members (also as Commissioner)*
Anggota	:	Muryati Nini Utami	:	*Members*
Anggota	:	Baliya Munadjat	:	*Members*

Pelaksanaan tugas Komite Audit PT PELNI (Persero) berlandaskan pada Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2016 dan diperbaharui tanggal 30 September 2020 dengan No:96/DK/IX-2020.

Tasks Implementation of Audit Committee in PT PELNI (Persero) has been based on the Audit Committee Charter which was endorsed on January 8, 2016 and updated on 30 September 2020 with No: 96/DK/IX-2020.

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk menerapkan GCG. Terkait implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Kebijakan Risiko menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Berdasarkan perubahan terakhir serta Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-1/DK/IV/2023, tanggal 18 April 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun buku 2023 dan 2022 sebagai berikut:

1. G E N E R A L *(continued)*

1.5. Management of Company *(continued)*

Risk Management Monitoring Committee

Formationed of Management Monitoring Committee is part of company's efforts to implement the GCG. Related to the implementation of good corporate governanc, the role and functions of Risk Policy Committee are to be very strategic in assisting and enhancing the role of Board of Commissioners in performing its supervisory function.

Based on the latest changes and Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-1/DK/IV/2023, dated April 18, 2023, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Risk Management Monitoring Committee for the fiscal years 2023 and 2022 is as follows:

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko				*Chairman of the Risk Policy Committee*
(merangkap Anggota Komisaris)	:	Eddy Susanto Soepadmo	:	*(also as members Commissioner)*
Wakil Ketua				*Vice Chairman*
(merangkap Komisaris Independen)	:	Kristia Budiyarto	:	*(also as Independent Commissioner)*
Anggota	:	Mahruddin Harahap	:	*Members*
Anggota	:	Sukirno Dwi Susilo	:	*Members*

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Talent & Succession Management Direksi BUMN, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasar Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Nomination and Remuneration Committee

Based on the Letter of the Minister for State-Owned Enterprises Number: S-254 / MBU / 04/2020 dated April 17, 2020 regarding the Talent & Succession Management of the Directors of BUMN, the Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02 / DK / IV-2020 dated April 20, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Komite Nominasi dan Remunerasi (lanjutan)

Berdasarkan perubahan terakhir serta Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-2/DK/IV/2023, tanggal 18 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun buku 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	:	Ali Masykur Musa	:	Chairman of the Numeration and Remuneration Committee
Wakil Ketua (merangkap Komisaris)	:	Faturohman	:	Vice Chairman (also as Commissioner)
Anggota	:	Fadli Yasir	:	Members

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No.KEP-02/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-07/DK/IX/2023, tanggal 30 September 2023 tentang Tenaga Pendukung Tata Kelola Terintegrasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun buku 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tenaga Pendukung Komite Tata Kelola Terintegrsi	:	Luqmanul Hakim	:	Support Personnel of Integrated Good Governance Committee

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki

Usaha pokok PT PELNI (Persero) adalah menyediakan jasa angkutan transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Berdasarkan usaha pokok tersebut, bidang usaha yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) antara lain:

a. Jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran tetap teratur dan terjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu;
b. Jasa keagenan;

***1. G E N E R A L** (continued)*

***1.5. Management of Company** (continued)*

***Nomination and Remuneration Committee** (continued)*

Based on the latest changes and Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-2/DK/IV/2023, dated April 18, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee for the fiscal years 2023 and 2022 is as follows:

The Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities as stated in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No.KEP-02/DK/IV-2020 dated April 20, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Integrated Good Governance Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-07/DK/IX/2023, dated September 30, 2023 concerning Integrated Good Governance Support Personnel of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Integrated Good Governance Committee for the fiscal year 2023 and 2022 is as follows:

1.6. Business Line and Owned Business Unit

The main business of PT PELNI (Persero) is to provide sea transportation services which includes passenger transport services and inter-island freight cargo services. Based on that main business the services provided by PT PELNI (Persero) among others :

a. Jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran tetap teratur dan terjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu;
b. Agency services;

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

c. Jasa operasi terminal, pergudangan dan ekspedisi/*forwarding* ;
d. Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal;
e. *Charter* dan *broker* kapal;
f. Jasa konsultan, pelatihan, dan usaha perhotelan.

Jasa Perkapalan

a. Kapal 2 in 1

Kapal jenis 2 in 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Welf dan dibangun di galangan Pepenburg, Jerman. Kapal 2 in 1 ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dengan panjang 146,80 dan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

b. Kapal Penumpang Serbaguna

Kapal jenis 3 in 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan kendaraan sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 in 1, yaitu kapal serbaguna yang dapat mengangkut kontainer di bagian depan dan belakang serta penumpang dan kendaraan. Kapal ini telah dimodifikasi di galangan Sembawang Singapura.

c. Kapal Barang

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, PT PELNI (Persero) memiliki 1 kapal barang yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 22 untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

Selain itu, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 9 (sembilan) armada Kapal Tol Laut yaitu KM.Logistik Nusantara I, KM.Logistik Nusantara II, KM.Logistik Nusantara III, KM.Logistik Nusantara IV, KM.Logistik Nusantara V dan KM.Logistik Nusantara VI, KM Kendhaga Nusantara 01, KM Kendhaga Nusantara 07, KM Kendhaga Nusantara 11.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

c. Terminal operation, warehouse and expedition/forwarding services;
d. Ship maintenance and dock business or ship reparation services;
e. Ship charter and broker;
f. Consultant, training and hotel business.

Shipping Services

a. 2 in 1 Ship

2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Welf and built at Pepenburg Shipyard Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid of 2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knots.

b. Multipurpose Passenger Ship

The 3 in 1 type of ship is a multipurpose passenger ship capable of transporting containers, passengers and vehicles at the same time. Dobonsolo Motor Ship and Ciremai Motor Ship are passenger ships that have been modified into 3 in 1 type ships, namely multipurpose ships that can transport containers on the front and rear as well as passengers and vehicles. This ship has been modified at the Singapore Sembawang shipyard.

c. Cargo Ship

For the purposes of distributing logistics goods throughout Indonesia, PT PELNI (Persero) has 1 cargo ship, namely KM Caraka Jaya Niaga III – 22 to transport large volumes of cargo with the best service and professional human resource support.

In addition, PT PELNI (Persero) was operating 9 (nine) Marine Highway fleet namely KM. Logistics Nusantara I, KM. Logistics Nusantara II, KM. Logistics Nusantara III, KM. Logistics Nusantara IV, KM. Logistics Nusantara V, KM. Logistics Nusantara VI, KM Kendhaga Nusantara 01, KM Kendhaga Nusantara 07, KM Kendhaga Nusantara 11.

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

Jasa Perkapalan (lanjutan)

c. Kapal Barang (lanjutan)

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke daerah tertingal, terpencil, terluar, dan perbatasan dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 65 Tahun 2018 tentang penyelenggarakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, PT PELNI (Persero) ditunjuk sebagai salah satu pelaksana penyelenggarakan kewajiban pelayanan publik tersebut atau yang disebut sebagai program Tol Laut (layanan angkutan barang yang terjadwal, tetap dan teratur).

d. Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan rute Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

e. Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak.

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 48 (empat puluh empat) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

f. Kapal Rede

Kapal rede merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 16 (enam belas) kapal rede yang tersebar diseluruh Indonesia.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

Shipping Services (continued)

c. Cargo Ship (continued)

Tol Laut Ship is operated referring to the RI Presidential Decree No. 70 Year 2017 concerning the Implementation of Public Service Obligations for Marine Freight Transportation and the Regulation of the Minister of Transportation No. PM 65 Year 2018 concerning on public service obligations for the marine freight transportation, PT PELNI (Persero) was appointed as one of the executor of the implementation of these public service obligations or what is referred to as the Sea Toll program (scheduled, fixed and regular freight transportation services).

d. Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 1 (one) fleet of Livestock Vessels, namely KM Camara Nusantara I with the route Kupang – Waingapu – Bima – Selamat – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. The presence of the Livestock Ship aims to help the Government reduce meat prices and improve the welfare of livestock farmers in domestic cattle breeding centers.

e. Pioneer Ship

Pioneer ships fleet are part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Sea Toll and Cattle ships.

PT PELNI (Persero) operates 48 (fourty four) Pioneer Ships covering remote area across Indonesia.

f. Rede Ship

Rede ship is part of the assignment of the authority to PT PELNI (Persero) by operating 16 (sixteen) Rede ships spread throughout Indonesia.

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

Unit Bisnis Strategis

a. Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

b. Galangan Surya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan menjadi PELNI *Maintenance Facilities (PMF*, proyek strategis yang diharapkan dapat menjamin space dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Unit Usaha Lainnya

a. Keagenan Kapal

Jenis keagenan kapal meliputi:
1) *Clearance in / out*
2) *Bunker, Fresh Water and Provision Supply*
3) *Crew Attendance*
4) *Protecting Agent*
5) *Custom Clearance*
6) *Layanan Sea Pollution*
7) *Layanan Garbage Removal*

b. Pengusahaan Aset

Persewaan gedung atau ruang kantor dari aset gedung perusahaan yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PELNI serta persewaaan toko dan cafe di atas kapal.

Sebagai perusahaan pelayaran, saat ini PT PELNI (Persero) mengoperasikan 26 unit armada kapal penumpang, dan mengoperasikan 9 unit armada kapal barang dengan total bobot mati sebesar 35.044 ton. Untuk melayani penumpang dan barang tersebut, PT Pelni (Persero) membagi armada menjadi:

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

Strategic Business Unit

a. Hotel Bahtera

Hotel with meeting and training center facilities which is equipped with meeting rooms facilities with a capacity of more than 200 people and other supporting facilities.

b. Galangan Surya

Founded on May 20 1996 and became PELNI Maintenance Facilities (PMF, a strategic project which is expected to guarantee docking and repair space for all ships (including large ships) operated by PT PELNI (Persero).

Others Business Unit

a. Ship Agency

Type of Agency Services:
1) *Clearance in / out*
2) *Bunker, Fresh Water and Provision Supply*
3) *Crew Attendance*
4) *Protecting Agent*
5) *Custom Clearance*
6) *Sea Pollution Services*
7) *Garbage Removal Services*

b. Asset Management

Leasing of buildings or office space from company building assets scattered in all branches of PT PELNI (Persero). Apart from that, the property business also includes rental of advertising space on board PELNI ships as well as renting out shops and cafes on board.

As a shipping company, PT PELNI (Persero) currently operates 26 units of passenger vessels, and operates 9 units of freight vessels with a total deadweight of 35,044 tonnes. To serve these passengers and goods, PT Pelni (Persero) divides the fleet into:

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

1) Tipe 3000 penumpang
2) Tipe 2000 penumpang (2 unit dimodifikasi 3 in 1)
3) Tipe 1000 penumpang
4) Tipe 500 penumpang
5) Ro-Ro tipe cargo
6) Kapal Barang Tipe Caraka
7) Kapal Logistik Nusantara (Tipe Kontainer)
8) *Type High Speed Vessel*

PT PELNI (Persero) dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki unit-unit usaha yang terdiri dari:

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

1) Type 3000 pax
2) Type 2000 pax (2 unit modificated to be 3 in 1)
3) Type 1000 pax
4) Type 500 pax
5) Ro-Ro type cargo
6) Cargo Ship Type Caraka
7) Logistik Nusantara Ship (Type Container)
8) Type High Speed Vessel

PT PELNI (Persero) in managing the business operation has business units that consists as below:

	Total	
• **Kantor Pusat**	1	• ***Head Office***
• **Kantor Cabang Kelas 1, lokasi di:**	4	• ***Class 1 Branch Office, located at:***
1) Tanjung Priok		*Tanjung Priok* 1)
2) Surabaya		*Surabaya* 2)
3) Makasar		*Makasar* 3)
4) Ambon		*Ambon* 4)
• **Kantor Cabang Kelas 2, lokasi di:**	9	• ***Class 2 Branch Office, located at:***
1) Sorong		*Sorong* 1)
2) Bau-bau		*Bau-bau* 2)
3) Bitung		*Bitung* 3)
4) Kupang		*Kupang* 4)
5) Tanjung Pinang		*Tanjung Pinang* 5)
6) Jayapura		*Jayapura* 6)
7) Manokwari		*Manokwari* 7)
8) Balikpapan		*Balikpapan* 8)
9) Semarang		*Semarang* 9)
• **Kantor Cabang Kelas 3, lokasi di:**	18	• ***Class 3 Branch Office, located at:***
1) Larantuka		*Larantuka* 1)
2) Denpasar		*Denpasar* 2)
3) Batam		*Batam* 3)
4) Ternate		*Ternate* 4)
5) Namlea		*Namlea* 5)
6) Biak		*Biak* 6)
7) Serui		*Serui* 7)
8) Pare-pare		*Pare-pare* 8)
9) Nabire		*Nabire* 9)
10) Kumai		*Kumai* 10)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

	Total	
• **Kantor Cabang Kelas 3, lokasi di:**		• ***Class 3 Branch Office, located at:***
11) Sampit		*Sampit* 11)
12) Tarakan		*Tarakan* 12)
13) Nunukan		*Nunukan* 13)
14) Tual		*Tual* 14)
15) Medan		*Medan* 15)
16) Maumere		*Maumere* 16)
17) Pontianak		*Pontianak* 17)
18) Fak Fak		*Fak Fak* 18)
• **Kantor Cabang Kelas 4, lokasi di:**	13	• ***Class 4 Branch Office, located at:***
1) Bima		*Bima* 1)
2) Waingapu		*Waingapu* 2)
3) Timika		*Timika* 3)
4) Ende		*Ende* 4)
5) Dobo		*Dobo* 5)
6) Kotabaru/Batulicin		*Kotabaru/Batulicin* 6)
7) Palu		*Palu* 7)
8) Kendari		*Kendari* 8)
9) Merauke		*Merauke* 9)
10) Tanjung Balai Karimun		*Tanjung Balai Karimun* 10)
11) Labuan Bajo		*Labuan Bajo* 11)
12) Luwuk		*Luwuk* 12)
13) Kaimana		*Kaimana* 13)
• **Terminal Penghubung Kelas A, lokasi di:**	20	• ***Class A Terminal Point, location at:***
1) Bengkulu		*Bengkulu* 1)
2) Blinyu		*Blinyu* 2)
3) Teluk Bayur		*Teluk Bayur* 3)
4) Bandanaira		*Bandanaira* 4)
5) Geser		*Geser* 5)
6) Saumlaki		*Saumlaki* 6)
7) Bontang		*Bontang* 7)
8) Raha		*Raha* 8)
9) Wanci		*Wanci* 9)
10) Gorontalo		*Gorontalo* 10)
11) Tahuna		*Tahuna* 11)
12) Kalabahi		*Kalabahi* 12)
13) Wasior		*Wasior* 13)
14) Ampenan/Lembar		*Ampenan/Lembar* 14)
15) Banyuwangi		*Banyuwangi* 15)
16) Lewoleba		*Lewoleba* 16)
17) Sanana		*Sanana* 17)
18) Babang (Bacan)		*Babang (Bacan)* 18)
19) Banggai		*Banggai* 19)
20) Agats		*Agats* 20)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

- **Terminal Penghubung Kelas B, lokasi di:**
  1) Enggano
  2) Linau
  3) Pangkal Pinang
  4) Labuan Bajau
  5) Muarasaibi
  6) Pasapuat
  7) Pei-Pei
  8) Penasahan
  9) Siberut
  10) Sikabaluan
  11) Sikakap
  12) Sinakak
  13) Sioban
  14) Tua Pejat
  15) Ciwandan
  16) Panjang
  17) Patimban
  18) Jangkar
  19) Kalianget
  20) Kangean
  21) Keramaian
  22) Masalembo
  23) P. Raas
  24) Pagerungan Besar
  25) Sapeken
  26) Sapudi
  27) Tanjung Wangi
  28) Jampea
  29) Bantaeng
  30) Bonerate
  31) Doangdoang Caddi
  32) Doangdoang Lompo
  33) Jinato
  34) Kalatoa/Latodo
  35) Kayuadi
  36) Macini Baji
  37) Marasende
  38) P. Balobaloang Lompo
  39) P. Dekawang Lompo
  40) P. Kalukalukuang
  41) P. Kapoposang Bali
  42) P. Matalaang
  43). P. Pamantawang
  44) P. Sailus Lompo
  45) P. Sapuka Lompo
  46) P. Sumanga
  47) P. Tampaang
  48) Selayar
  49) Amahai
  50) Werinama

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

286

- ***Class B Terminal Point, location at:***
  Enggano 1)
  Linau 2)
  Pangkal Pinang 3)
  Labuan Bajau 4)
  Muarasaibi 5)
  Pasapuat 6)
  Pei-Pei 7)
  Penasahan 8)
  Siberut 9)
  Sikabaluan 10)
  Sikakap 11)
  Sinakak 12)
  Sioban 13)
  Tua Pejat 14)
  Ciwandan 15)
  Panjang 16)
  Patimban 17)
  Jangkar 18)
  Kalianget 19)
  Kangean 20)
  Keramaian 21)
  Masalembo 22)
  P. Raas 23)
  Pagerungan Besar 24)
  Sapeken 25)
  Sapudi 26)
  Tanjung Wangi 27)
  Jampea 28)
  Bantaeng 29)
  Bonerate 30)
  Doangdoang Caddi 31)
  Doangdoang Lompo 32)
  Jinato 33)
  Kalatoa/Latodo 34)
  Kayuadi 35)
  Macini Baji 36)
  Marasende 37)
  P. Balobaloang Lompo 38)
  P. Dekawang Lompo 39)
  P. Kalukalukuang 40)
  P. Kapoposang Bali 41)
  P. Matalaang 42)
  P. Pamantawang 43)
  P. Sailus Lompo 44)
  P. Sapuka Lompo 45)
  P. Sumanga 46)
  P. Tampaang 47)
  Selayar 48)
  Amahai 49)
  Werinama 50)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

- **Terminal Penghubung Kelas B, lokasi di:**

51) Bula
52) Gorom
53) Kelimuri
54) Kesui
55) Pulau Teor
56) Adaut
57) Amau
58) Arwala
59) Bebar
60) Dawera
61) Kisar
62) Kroing
63) Lakor
64) Larat
65) Lelang
66) Leti
67) Lewa
68) Luang
69) Marsela
70) Moa
71) Molu
72) Nila
73) Rumean
74) Rumyaan
75) Seira
76) Sermata
77) Serua
78) Teon
79) Tepa
80) Tutukembong
81) Wetang
82) Wulur
83) Buano
84) Tehoru
85) Banjamasin
86) Samarinda
87) Ereke
88) Kwandang
89) Bumbulan
90) Bengdarat
91) Manalu
92) Damau
93) Dampulis
94) Beo
95) Bukide
96) Dapalan
97) Essang
98) Gemeh
99) Kahakitang
100) Kakorotan

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

- ***Class B Terminal Point, location at:***

Bula 51)
Gorom 52)
Kelimuri 53)
Kesui 54)
Pulau Teor 55)
Adaut 56)
Amau 57)
Arwala 58)
Bebar 59)
Dawera 60)
Kisar 61)
Kroing 62)
Lakor 63)
Larat 64)
Lelang 65)
Leti 66)
Lewa 67)
Luang 68)
Marsela 69)
Moa 70)
Molu 71)
Nila 72)
Rumean 73)
Rumyaan 74)
Seira 75)
Sermata 76)
Serua 77)
Teon 78)
Tepa 79)
Tutukembong 80)
Wetang 81)
Wulur 82)
Buano 83)
Tehoru 84)
Banjamasin 85)
Samarinda 86)
Ereke 87)
Kwandang 88)
Bumbulan 89)
Bengdarat 90)
Manalu 91)
Damau 92)
Dampulis 93)
Beo 94)
Bukide 95)
Dapalan 96)
Essang 97)
Gemeh 98)
Kahakitang 99)
Kakorotan 100)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

- **Terminal Penghubung Kelas B, lokasi di:**

101) Karatung
102) Kawaluso
103) Kawio
104) Lipaeng
105) Lirung
106) Mangaran
107) Marampit
108) Marore
109) Matutuang
110) Melonguane
111) Miangas
112) Ngalipaeng
113) Petta
114) Rainis
115) Sawang
116) Amurang
117) Biaro
118) Makalehi
119) Munte (Likupang)
120) P. Mahangiang
121) P. Ruang
122) Para
123) Pehe
124) Siau
125) Tagulandang
126) Talise
127) Depapre
128) Kurudu
129) Miosnum
130) Sarmi
131) Ilwaki
132) Lirang
133) Lerokis
134) Atapupu
135) Naikliu
136) Ndao
137) Raijua
138) Rote
139) Sabu
140) Wiini
141) Windesi
142) Yende
143) Yamakan
144) Bintuni
145) Mner
146) Oransbari
147) Saukorem
148) Waiben
149) Wanden
150) Wau

***1. G E N E R A L** (continued)*

***1.6. Business Line and Owned Business Unit** (continued)*

- ***Class B Terminal Point, location at:***

Karatung 101)
Kawaluso 102)
Kawio 103)
Lipaeng 104)
Lirung 105)
Mangaran 106)
Marampit 107)
Marore 108)
Matutuang 109)
Melonguane 110)
Miangas 111)
Ngalipaeng 112)
Petta 113)
Rainis 114)
Sawang 115)
Amurang 116)
Biaro 117)
Makalehi 118)
Munte (Likupang) 119)
P. Mahangiang 120)
P. Ruang 121)
Para 122)
Pehe 123)
Siau 124)
Tagulandang 125)
Talise 126)
Depapre 127)
Kurudu 128)
Miosnum 129)
Sarmi 130)
Ilwaki 131)
Lirang 132)
Lerokis 133)
Atapupu 134)
Naikliu 135)
Ndao 136)
Raijua 137)
Rote 138)
Sabu 139)
Wiini 140)
Windesi 141)
Yende 142)
Yamakan 143)
Bintuni 144)
Mner 145)
Oransbari 146)
Saukorem 147)
Waiben 148)
Wanden 149)
Wau 150)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

- **Terminal Penghubung Kelas B, lokasi di:**

151) Cirebon
152) Karimun Jawa
153) Babo
154) Hopmare
155) Kapadiri
156) Kwoor
157) P. Ayu
158) P. Fani
159) Saubeba
160) Sausapor
161) Sopen
162) Waisai
163) Warmandi
164) Werur
165) Yellu
166) Dabo
167) Kijang
168) Kuala Maras
169) Letung
170) Midai
171) Moro
172) Natuna
173) P.Pekajang
174) Pulau Laut
175) Sedanau
176) Selat Lampa
177) Serasan
178) Subi
179) Tambelan
180) Tarempa
181) Kaipuri
182) Korido
183) Miosbipondi
184) P. Insobabi
185) P. Mapia
186) P. Mbromsi
187) P. Wundi
188) Randawaya
189) Arandai
190) Karas
191) Kokas
192) Balauring
193) Baranusa
194) Mananga
195) Bade
196) Gunung Sitoli
197) Kuala Tanjung
198) Lhokseumawe
199) Meulaboh
200) Pulau Banyak

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

- ***Class B Terminal Point, location at:***

Cirebon 151)
Karimun Jawa 152)
Babo 153)
Hopmare 154)
Kapadiri 155)
Kwoor 156)
P. Ayu 157)
P. Fani 158)
Saubeba 159)
Sausapor 160)
Sopen 161)
Waisai 162)
Warmandi 163)
Werur 164)
Yellu 165)
Dabo 166)
Kijang 167)
Kuala Maras 168)
Letung 169)
Midai 170)
Moro 171)
Natuna 172)
P.Pekajang 173)
Pulau Laut 174)
Sedanau 175)
Selat Lampa 176)
Serasan 177)
Subi 178)
Tambelan 179)
Tarempa 180)
Kaipuri 181)
Korido 182)
Miosbipondi 183)
P. Insobabi 184)
P. Mapia 185)
P. Mbromsi 186)
P. Wundi 187)
Randawaya 188)
Arandai 189)
Karas 190)
Kokas 191)
Balauring 192)
Baranusa 193)
Mananga 194)
Bade 195)
Gunung Sitoli 196)
Kuala Tanjung 197)
Lhokseumawe 198)
Meulaboh 199)
Pulau Banyak 200)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

	Total	
• **Terminal Penghubung Kelas B, lokasi di:**		• ***Class B Terminal Point, location at:***
201) Sibolga		*Sibolga 201)*
202) Sinabang		*Sinabang 202)*
203) Singkil		*Singkil 203)*
204) Tapaktuan		*Tapaktuan 204)*
205) Koweda		*Koweda 205)*
206) Napan Wainami		*Napan Wainami 206)*
207) Puiway		*Puiway 207)*
208) Bobong		*Bobong 208)*
209) Dofa		*Dofa 209)*
210) Fala		*Fala 210)*
211) Lede		*Lede 211)*
212) Malbufa		*Malbufa 212)*
213) Sanuya		*Sanuya 213)*
214) Tikong		*Tikong 214)*
215) Ambalau		*Ambalau 215)*
216) Leksula		*Leksula 216)*
217) Namrole		*Namrole 217)*
218) Tifu		*Tifu 218)*
219) P. Sebatik		*P. Sebatik 219)*
220) Awerange		*Awerange 220)*
221) Majene		*Majene 221)*
222) Tanjung Silopo		*Tanjung Silopo 222)*
223) Sintete		*Sintete 223)*
224) Ansus		*Ansus 224)*
225) Dawai		*Dawai 225)*
226) Poom		*Poom 226)*
227) Saribi		*Saribi 227)*
228) Teba		*Teba 228)*
229) Waren		*Waren 229)*
230) Windesi/Yapen		*Windesi/Yapen 230)*
231) Wooi		*Wooi 231)*
232) Bataka		*Bataka 232)*
233) Galela		*Galela 233)*
234) Gane Dalam		*Gane Dalam 234)*
235) Gumumu/Manu		*Gumumu/Manu 235)*
236) Jailolo		*Jailolo 236)*
237) Laiwui		*Laiwui 237)*
238) Maba		*Maba 238)*
239) Madapolo		*Madapolo 239)*
240) Morotai		*Morotai 240)*
241) Moti		*Moti 241)*
242) P. Dawora		*P. Dawora 242)*
243) Pigaraja		*Pigaraja 243)*
244) Sekeli		*Sekeli 244)*
245) Soa Sio/Tidore		*Soa Sio/Tidore 245)*
246) Sum		*Sum 246)*
247) Tifure		*Tifure 247)*
248) Tobalai		*Tobalai 248)*

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

1. G E N E R A L *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

	Total	
• **Terminal Penghubung Kelas B, lokasi di:**		• ***Class B Terminal Point, location at:***
249) Wayaloar		*Wayaloar 249)*
250) Weda		*Weda 250)*
251) Elat		*Elat 251)*
252) P. Kur		*P. Kur 252)*
253) Romang		*Romang 253)*
254) Badas		*Badas 254)*
255) Badas/Khayangan		*Badas/Khayangan 255)*
256) Calabai		*Calabai 256)*
257) P.Sailus		*P.Sailus 257)*
258) Maumbawa		*Maumbawa 258)*
259) P. Ende		*P. Ende 259)*
260) Waiwole/Waewole		*Waiwole/Waewole 260)*
261) lobo		*lobo 261)*
262) Warifi		*Warifi 262)*
263) Bungku (Morowali)		*Bungku (Morowali) 263)*
264) Molawe		*Molawe 264)*
265) Batulicin		*Batulicin 265)*
266) Kotabaru		*Kotabaru 266)*
267) Marabatuan		*Marabatuan 267)*
268) Maradapan		*Maradapan 268)*
269) Matasiri		*Matasiri 269)*
270) Reo		*Reo 270)*
271) Ampana		*Ampana 271)*
272) Kimaam		*Kimaam 272)*
273) Wanam		*Wanam 273)*
274) Toli-Toli		*Toli-Toli 274)*
275) Leok		*Leok 275)*
276) Paleleh		*Paleleh 276)*
277) Atsy		*Atsy 277)*
278) Eci		*Eci 278)*
279) Ikisi		*Ikisi 279)*
280) Sawa Erma		*Sawa Erma 280)*
281) Tagemon		*Tagemon 281)*
282) Boma		*Boma 282)*
283) Moor		*Moor 283)*
284) Pomako		*Pomako 284)*
285) Mamboro		*Mamboro 285)*
286) Waikelo		*Waikelo 286)*
• **SBU :**	2	• ***SBU :***
1) Galangan Surya Surabaya		*Galangan Surya Surabaya 1)*
2) Hotel Bahtera Cipayung		*Hotel Bahtera Cipayung 2)*
• **Kantor Perwakilan, lokasi di :**	1	• ***Representative Branch :***
Singapore		*Singapore*
Jumlah	**353**	***Total***

1. U M U M (lanjutan)

1.7. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan memiliki pegawai tetap masing-masing sebanyak 5.011 karyawan dan 5.003 karyawan. (Tidak Diaudit)

Dari jumlah karyawan tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang masuk dalam perhitungan kewajiban atas imbalan pasca kerja sebagai berikut:

	31 Des./ *Dec.* 2023 (orang/*person*)	**31 Des./ *Dec.* 2022 (orang/*person*)**	
Program Santunan Meninggal dan Cacat.			***Death and Disability Compensation Program***
Uang Pisah, THT dan MPP	3.105	3.245	*Separate Money, THT and MPP*
Program UUCK No. 11 Tahun 2022	1.647	1.860	*UUCK No. 11 Year 2022 Program*
Program Dana Pensiun	1.762	2.061	*Pension Fund Program*
Program Selisih UUCK No. 11/2022 dan DPLK	1.458	1.385	*Difference Program UUCK No.11 / 2022 and DPLK*

1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance atau GCG)* di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diperbaharui melalui Nomor PER-09/MBU/2012, bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

***1. G E N E R A L** (continued)*

1.7. Human Resources

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has 5.011 and 5.003 permanent employees, respectively.(Unaudited)

From the total number of permanent employees of the Company as of December 31, 2023 and 2022 which are included in the calculation of liabilities for post-employment benefits as follows:

1.8. The Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

The Company has been implementing of GCG structure and mechanism to aim of operating process and structure to achieve of performance target and accountability of the Company to generate of added value for the Shareholders and Stakeholders by considering interests to other Stakeholders.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices at PT PELNI (Persero) refers to number of laws and regulations in Indonesia among others Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Minister of State Owned Enterprise Decree Number Kep-117/M-MBU/2002 on the date of July 31, 2002 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises (SOE) and the Regulation of Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 on the date of August 1, 2011 on Application of Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State Owned Enterprises, as updated through No. PER-09 / MBU / 2012, GCG that State Owned Enterprises (BUMN) must implement GCG consistently and it's sustainable by referring to this Ministrial Regulation while still observing the provisions, norms that apply and the articles of association of BUMN.

1. U M U M (lanjutan)

1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (lanjutan)

Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

a. Pedoman GCG
b. Pedoman *Code of Conduct*
c. Tata Laksana Kerja *(Board* Manual) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
d. Pedoman Benturan Kepentingan
e. Pakta Integritas
f. Pedoman Penanganan Gratifikasi

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG (GCG Assessment) secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Untuk tahun buku 2023 (secara mandiri) dan 2022 (oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta), assessment GCG menghasilkan skor masing-masing 86,821.dan 85,227 atau predikat sangat baik.

1.9. Manajemen Risiko

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000:2018 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas. mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Kebijakan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.14/03/SK/HKO.01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko PT PELNI (Persero).

Guna mendukung penerapan Manajemen Risiko ISO 31000:2018, dilakukan peningkatan kesadaran risiko diseluruh lapisan organisasi, membangun ketahanan dan melakukan mitigasi risiko serta menjaga risiko yang tersisa *(residual risk)* pada tingkat yang dapat ditoleransi *(tolerable level)* . Hal ini dimaksudkan agar daya saing *(competitiveness)* dan kelangsungan usaha *(going concern)* perusahaan dapat selalu terjaga. Pedoman ini dapat diterapkan juga pada anak usaha sepanjang telah disetujui oleh Direksi anak usaha. Penerapan manajemen risiko pada anak usaha perlu dilakukan dengan beberapa adaptasi mengingat karakter usaha yang berbeda dengan induk usaha.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.8. The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) *(continued)*

GCG implementation commitment in the Company is manifested in a series of guidelines related to GCG implementation and signing of GCG integrity pact by Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

a. Manual of GCG
b. Manual of Code of Conduct
c. PT PELNI (Persero) Board Manual for Directors and Board of Commissioners
d. Manual of Conflict of Interest
e. Integrity Pact
f. Anti-Gratification Manual

The Company evaluates GCG practices through GCG Assessment activities periodically to measure the quality of GCG implementation in each of the Company's organs. For the financial years 2023 (independently) and 2022 (by BPK RI DKI Jakarta Representative), the GCG assessment resulted in scores of 86.821 and 85.227 respectively or very good predicate.

1.9. Risk Management

PT PELNI (Persero) has been implemented of Risk Management System that it's based on ISO 31000:2018 framework to establish risk management practices with more wider perspective. easier to be understood, measured and to support of all coordination and integration inter of working unit of the Company.

Risk Management System policy has been updated according to Board of Directors Decree No. 01.14/03/SK/HKO.01/2022 on the date of January 14, 2022 regarding establishment of PT PELNI (Persero) Risk Management Policy.

In order to support the implementation of ISO 31000:2018 risk management, there is an increase in risk awareness across the organizational layer, build resilience and mitigate risk and maintain residual risk at a tolerable level. It is intended so that the competitiveness and the business continuity company can always be awake. These guidelines may be applied also to subsidiaries as long as approved by the Subsidiariy Directors. The application of risk management in subsidiaries needs to be done with some adaptations considering the different business characters with the parent company.

1. U M U M (lanjutan)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Perseroan telah memperoleh sertifikasi atas aset yang digunakan dalam kegiatan usaha utama dibidang pelayaran, meliputi:

1. G E N E R A L *(continued)*

1.10. Certification of Quality Management System

The Company has obtained certificates for assets those used in the main business activities in the shipping sector, including:

No.	Nama Sertifikat/ *Name of Certificate*	Lembaga Penerbit Sertifikat/ *Certificate Issuer Institution*	Masa Berlaku/ *Validity Period*
1.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang / *Passengers Vessels Safety Certificate*	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / *Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	
	a. KM Tilong kabila		15 Mei 2024
	b. KM Egon		15 Mei 2024
	c. KM Pangrango		15 Mei 2024
	d. KM Lambelu		15 Mei 2024
	e. KM Bukit Siguntang		30 April 2024
	f. KM Sirimau		15 Mei 2024
	g. KM Nggapulu		15 Mei 2024
	h. KM Jetliner		24 April 2024
	i. KM Sangiang		12 Mei 2024
	j. KM Bukit Raya		15 Mei 2024
	k. KM Leuser		07 Mei 2024
	l. KM Awu		15 Mei 2024
	m. KM Lawit		15 Mei 2024
	n. KM Kelimutu		15 Mei 2024
	o. KM Dorolonda		15 Mei 2024
	p. KM Sinabung		15 Mei 2024
	q. KM Ciremai		15 Mei 2024
	r. KM Kelud		15 Mei 2024
	s. KM Binaiya		30 Juni 2024
	t. KM Dobonsolo		15 Mei 2024
	u. KM Tatamailau		15 Mei 2024
	v. KM Wilis		15 Mei 2024
	w. KM Labobar		15 Mei 2024
	x. KM Gunung Dempo		15 Mei 2024
	y. KM Umsini		15 Mei 2024
	z. KM Tidar		15 Mei 2024
2.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/*Minimum Safe Manning Document*	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / *Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	
	a. KM Sangiang		03-01-2024 - 02-01-2025
	b. KM Bukit Raya		04-12-2023 - 03-12-2024
	c. KM Lambelu		27-03-2024 - 26-03-2025
	d. KM Lawit		22-11-2023 - 21-11-2024
	e. KM Labobar		30-11-2023 - 29-11-2024
	f. KM Tidar		27-02-2024 - 26-05-2025
	g. KM Ciremai		30-05-2023 - 29-05-2024
	h. KM Dobonsolo		30-05- 2023 - 29-05-2024

1. U M U M (lanjutan)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

1. G E N E R A L *(continued)*

1.10. Certification of Quality Management System *(continued)*

No.	Nama Sertifikat/ *Name of Certificate*	Lembaga Penerbit Sertifikat/ *Certificate Issuer Institution*	Masa Berlaku/ *Validity Period*
2.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/*Minimum Safe Manning Document* (lanjutan/*continued*)	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / *Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia* (lanjutan/*continued*)	
	i. KM Sinabung		07-12-2023 - 06-12-2024
	j. KM Tatamailau		30-03-2024 - 29-09-2025
	k. KM Kelud		01-03-2024 - 01-06-2025
	l. KM Dorolonda		16-06-2023 - 15-06-2024
	m. KM Nggapulu		21-12-2023 - 20-12-2024
	n. KM Gunung Dempo		26-05-2023 - 25-05-2024
	o. KM Kelimutu		05-01-2024 - 04-01-2025
	p. KM Sirimau		02-08-2023 - 01-08-2024
	q. KM Awu		05-01-2024 - 04-01-2025
	r. KM Leuser		22-11-2023 - 21-11-2024
	s. KM Binaiya		06-03-2024 - 05-09-2024
	u. KM Tilongkabila		27-03-2024 - 26-06-2024
	v. KM Wilis		29-11-2023 -28-05-2024
	w. KM Bukit Siguntang		04-04-2023 - 03-04-2024
	x. KM Egon		28-08-2023 - 27-08-2024
	y. KM Umsini		15-01-2024 - 14-01-2025
3.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal / *National Certificate Of Prevention Of Pollution From Ships*	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / *Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	
	a. KM Sangiang		27-12-2023 - 19-09-2024
	b. KM Bukit Raya		25-01-2023 - 08-11-2025
	c. KM Lambelu		31-08-2023 - 19-06-2024
	d. KM Lawit		22-09-2022 - 22-09-2025
	e. KM Labobar		06-03-2024 - 05-06-2024
	f. KM Tidar		04-05-2023 - 16-02-2024
	g. KM Ciremai		24-10-2023 - 14-08-2024
	h. KM Sinabung		21-07-2021 - 20-07-2024
	i. KM Bukit Siguntang		03-06-2022 - 23-05-2025
	j. KM Tatamailau		14-08-2023 - 18-06-2026
	k. KM Kelud		09-01-2023 - 28-09-2025
	l. KM Nggapulu		13-06-2023 - 26-03-2026
	m. KM Kelimutu		02-02-2024 - 01-05-2024
	n. KM Awu		08-03-2024 - 07-06-2024
	o. KM Leuser		08-03-2024 - 07-06 -2024
	p. KM Binaiya		08-06-2023 - 23-03-2024
	q. KM Tilongkabila		21-02-2024 - 17-05-2024
	r. KM Jetliner		02-05-2023 - 29-01-2024
	s. KM Egon		09-10-2023 - 30-08-2026
	t. KM Wilis		23-11-2021 - 22-11-2024
	u. KM Gunung Dempo		15-08-2023 - 28-05-2026
	v. KM. Sirimau		13-07-2021 - 06-06-2024

1. U M U M (lanjutan)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

1. G E N E R A L *(continued)*

1.10. Certification of Quality Management System *(continued)*

No.	Nama Sertifikat/ *Name of Certificate*	Lembaga Penerbit Sertifikat/ *Certificate Issuer Institution*	Masa Berlaku/ *Validity Period*
3.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal / *National Certificate Of Prevention Of Pollution From Ships (*lanjutan*/continued)*	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / *Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia* (lanjutan*/continued)*	
	w. KM Umsini		29-09-2023 - 02-07-2026
	x. KM Pangrango		05-01-2024 - 23-10-2026
	y. KM Dobonsolo		05-07-2023 - 13-04-2026
	z. KM Dorolonda		17-10-2023 - 03-08-2026
4.	Sertifikat Garis Muat. Lambung dan Mesin - Kapal Penumpang/*Load Line, Hull and Machine - Passenger Ships Certificate:*	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	
	a. KM Awu		06-04-2021 - 08-06-2026
	b. KM Bukit Raya		11-06-2019 - 27-03-2024
	c. KM Binaiya		03-05-2019 - 25-03-2024
	d. KM B. Siguntang		05-04-2021 - 23-05-2026
	e. KM Ciremai		15-08-2023 - 01-08-2028
	f. KM Dobonsolo		19-05-2023 - 10-03-2028
	g. KM Dorolonda		10-08-2021 - 11-07-2026
	h. KM Egon		10-07-2020 - 29-06-2025
	i. KM G. Dempo		27-06-2023 - 20-06-2028
	j. KM Kelimutu		20-03-2020 - 04-02-2025
	k. KM Kelud		30-10-2023 - 28-09-2027
	l. KM Lawit		18-11-2019 -31-08-2024
	m. KM Leuser		04-07-2023 - 28-05-2028
	n. KM Lambelu		15-05-2022 - 15-05-2027
	o. KM Labobar		01-07-2019 - 26-06-2024
	p. KM Nggapulu		05-04-2022 - 05-04-2027
	q. KM Pangrango		12-03-2022 - 09-11-2024
	r. KM Sirimau		09-06-2020 - 17-05-2025
	s. KM Sinabung		18-04-2022 - 18-04-2027
	t. KM Sangiang		18-04-2019 - 12-05-2024
	u. KM Tilong Kabila		30-04-2020 - 04-03-2025
	v. KM Tatamailau		07-04-2020 - 25-03-2025
	w. KM Tidar		31-05-2022 - 26-11-2026
	x. KM Umsini		30-04-2020 - 31-03-2025
	y. KM Wilis		23-04-2020- 25-10-2024
	z. KM Caraka Jn III-32		11-12-2018 - 20-09-2023
	aa. KFC Jet Liner		09-10-2023 - 04-06-2027

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak

a. Kepemilikan Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan sebagai berikut:

***1. G E N E R A L** (continued)*

1.11. Subsidiaries

a. Direct Controlling

As of December 31, 2023 and 2022, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company as follows:

Entitas Anak/ ***Subsidiaries***	**Bidang Usaha/** ***Line of Business***	**Tahun Operasi Komersial/** ***Start of Commercial Operations***	**Persentase Kepemilikan/** ***Persentage of Ownership***	**Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/** ***Total Assets (Before Elimination)***	
				2023	**2022**
PT Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, custom clearance, pedalaman depo / t*ransportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.*	1987	99.47%	576.000.030.490	475.382.131.963
PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal/*General trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services, entertainment services on board.*	1970	99.50%	328.319.381.090	333.651.427.369

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

b. Kepemilikan Tidak Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan sebagai berikut:

1. G E N E R A L *(continued)*

1.11. Subsidiaries *(continued)*

b. Indirect Controlling

As of December 31, 2023 and 2022, the subsidiaries which were consolidated. including the respective percentages of ownership held by the Company as follows:

Entitas Anak/ ***Subsidiaries***	**Bidang Usaha/** ***Line of Business***	**Tahun Operasi Komersial/** ***Start of Commercial Operations***	**Persentase Kepemilikan/** ***Persentage of Ownership***	**Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/** ***Total Assets (Before Elimination)***	
				2023	**2022**
PT Sarana Bandar Logistik	Bergerak dalam bidang transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan dan bidang kepabeanan. / *Engaged in transportation, warehousing, cargo consolidation, provision of cargo space and customs sector.*	2015	99,96%	34.522.288.381	26.138.259.577
PT Pelita Bandar Nasional	Bongkar Muat / *Unloading and loading*	1989	98,00%	10.268.031.608	7.020.944.497
PT Sarana Bandar Indotrading	Perdagangan / *Trading*	2022	99,00%	34.013.419.144	34.907.977.731

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)

PT PBM Sarana Bandar Nasional didirikan berdasarkan Akta Notaris Soelaiman Arjasasmita di Jakarta No. 59 tanggal 31 Maret 1986 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan dengan Surat Keputusan Nomor 02- 1932 HT 01.01 tahun 1987 tanggal 5 Maret 1987. Anggaran Dasar Entitas diperbaharui dengan Akta Notaris Ny. Imah Fatimah, SH No. 17 tanggal 12 Agustus 1998. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp15.000.000.000.

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)

PT PBM Sarana Bandar Nasional was established based on the Notary Deed Soelaiman Arjasasmita in Jakarta No. 59 March 31, 1986 and has received approval by the Minister of Law and legislation with the Decree HT 01.01 02-1932 Number 1987 on March 5, 1987. The basic budget entity updated with the Notary Deed Mrs. Imah Fatimah, SH No. 17 on August 12, 1998. Issued and fully paid capital of Rp15.000.000.000.

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) (lanjutan)

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta No. 01 tanngal 02 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0078035.AH.01.02 TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional.

Modal Saham

Modal Dasar Perseroan ini sebagaimana tertuang pada pasal 4 Akta Anggaran Dasar Nomor: 11 tanggal 30 Nopember 2015 dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh. SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0947214.AH.01.02 tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PBM Sarana Bandar Nasional adalah sebesar Rp60.000.000.000 terbagi atas 60.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 15.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.11. Subsidiaries *(continued)*

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) *(continued)*

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through Deed No. 01 dated 02 October 2019, made before Ida Adiningsih, S.H., Notary in Jakarta, and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, No. AHU-0078035.AH.01.02 YEAR 2019 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company PT Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional.

Shares Capital

The company's basic capital as stipulated in article 4 of the Constitution Act Number: 11 dated November 30, 2015. was made in front of Yulkhaizar Panuh, SH, notary in Jakarta and has obtained approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia, Number: AHU-0947214 AH.01.02 year 2016 on approval of amendment of the company's limited liability of PT PBM Sarana Bandar Nasional is Rp 60.000.000.000 divided into 60.000 shares, each shares with a nominal value of Rp 1.000.000. From The underlying capital has been placed and deposited 25% or a total of 15,000 shares with a total nominal niai of Rp 15.000.000.000.

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Jumlah Lembar Saham /** ***Shares***	**Nilai Nominal/** ***Par Value (Rp)***	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh /** ***Issued and Fully Paid Shares Capital (Rp)***	**Persentase Kepemilikan/** ***Ownership Percentage***
PT PELNI (Persero)	14.920	1.000.000	14.920.000.000	99,47%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	80	1.000.000	80.000.000	0,53%
Jumlah / ***Total***	**15.000**	**1.000.000**	**15.000.000.000**	**100,00%**

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan Nomor: 11.10/02/BA/DU/2023, tanggal 10 November 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional tahun 2023 sebagai berikut:

***1. G E N E R A L** (continued)*

***1.11. Subsidiaries** (continued)*

***1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)** (continued)*

Board of Commissioners and Directors

Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT PBM Sarana Bandar Nasional with Number: 11.10/02/BA/DU/2023, dated 10 November 2023, concerning the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional, then The composition of the Board of Commissioners and Directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional in 2023 is as follows:

Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	A.A.N Budi Tresnawan	:	*President Commissioner*
Komisaris Independen	:	M. Jasman Panjaitan	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Tatang Ruskianta Dasuki	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Edward Tobing	:	*President Director*
Direktur Operasi dan Komersial	:	Antonius L. Gaol	:	*Operation and Commercial Director*
Direktur Keuangan dan SDM	:	Affan Tauffan	:	*Finance and SDM Director*

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PBM Sarana Bandar Nasional dengan Nomor: 09.28/01BA/090/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. PBM Sarana Bandar Nasional, Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PBM Sarana Bandar Nasional dengan Nomor: SR-25MBU/09/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Persetujuan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. PBM Sarana Bandar Nasional, dan Surat Pengunduran Diri dari Dr. Capt. Mugen S. Sartoto, MSc., tanggal 25 Oktober 2022 sebagai Komisaris PT PBM Sarana Bandar Nasional, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional tahun 2022 sebagai berikut :

Based on the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT. PBM Sarana Bandar Nasional with Number: 09.28/01BA/090/2022 dated 28 September 2022 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners and Directors of PT. PBM Sarana Bandar Nasional, Letter of the Minister of State Owned Enterprises PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) As the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. PBM Sarana Bandar Nasional with Number: SR-25MBU/09/2022 dated 16 September 2022 concerning Approval for the Appointment of Members of Directors and Board of Commissioners of PT. PBM Sarana Bandar Nasional,and Letter of Resignation from Dr Capt. Mugen S. Sartoto, MSc. dated 25 October 2022 as Commissioner and Directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional, the composition of the Board of Commissioners of PT PBM Sarana Bandar Nasional in 2022 as follows:

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Tri Andayani	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	M. Jasman Panjaitan	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Edward Tobing	:	*President Director*
Direktur Operasional	:	Murdiyoto	:	*Operation Director*
Direktur Keuangan & SDM	:	Plt. Edward Tobing	:	*Finance & SDM Director*

Tempat dan Kedudukan

Dalam menjalankan usahanya PT Sarana Bandar Nasional berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Tengah II Blok B 13-14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510.

Place and Position

Currently, PT Sarana Bandar National is located in Jl. Cempaka Putih. Central II Block B 13-14 Cempaka Putih 10510.

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 255 dan 242 karyawan. (Tidak Diaudit)

Place and Position

The number of employees of the company on December 31, 2023 and 2022 are 255 and 242 employees. (Unaudited)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting / ***Summary of Key Financial Information***

	2023	2022	
Aset	576.000.030.490	475.382.131.963	*Assets*
Liabilitas	100.856.230.268	49.307.845.173	*Liabilities*
Ekuitas	475.143.800.222	426.074.286.790	*Equity*
Pendapatan	541.110.100.160	485.004.065.257	*Revenues*
Beban	(492.175.889.196)	(442.567.817.038)	*Expenses*
Laba Tahun Berjalan	48.934.210.964	42.436.248.219	*Profit for The Year*

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

PT Pelita Indonesia Djaya Jakarta didirikan berdasarkan Akta Notaris Djojo Mulyadi, SH di Jakarta No. 3 tanggal 29 September 1969 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1969.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No. 6, tanggal 31 Januari 2023, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H., dan telah mendapat Persetujuan Menhumkam Nomor : AHU-AH.01.09-0190153, tanggal 9 Februari 2023.

***1. G E N E R A L** (continued)*

***1.11. Subsidiaries** (continued)*

***1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)** (continued)*

***Board of Commissioners and Directors** (continued)*

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

PT Pelita Indonesia Djaya Jakarta was established based on the Notary Act Djojo Mulyadi, SH in Jakarta No. 3 dated September 29, 1969 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 9, 1969.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through Notarial Deed. 6, dated January 31, 2023, made before Notary Ida Adiningsih, S.H., and has received approval from the Minister of Law and Security Number: AHU-AH.01.09-0190153, dated February 9, 2023.

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) (lanjutan)

Modal Saham

Modal saham yang disetor ke entitas merupakan 99.5% penyertaan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan 0.5% penyertaan Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto. SH No. 7 tanggal 10 Juni 2009 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU-43800.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 4 September 2009.

1. G E N E R A L *(continued)*

1.11. Subsidiaries *(continued)*

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) *(continued)*

Shares Capital

Shares Capital paid to the entity is 99,5% ownership of PT Pelayaran Nasional Indonesia and 0,15% ownership in accordance Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni Deed Raden Mas Soediarto Soenarto, SH No. 7 dated June 10, 2009 were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-43800.AH.01.02 in 2009 on September 4, 2009.

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham / *Shares***	**Nilai Nominal/ *Par Value (Rp)***	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid Shares Value (Rp)***	**Persentase Kepemilikan/ *Ownership Percentage***
PT PELNI (Persero)	2.000	1.000.000	2.000.000.000	99.50%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	10	1.000.000	10.000.000	0.50%
Jumlah / Total	**2.010**	**1.000.000**	**2.010.000.000**	**100%**

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 6, tanggal 20 November 2023 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0198598.AH.01.09-0190153, tanggal 28 November 2023. Maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors

Based on the statement from the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Number: 6, November 20, 2023 which was notarized before Notary Ida Adiningsih. S.H regarding changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU-0198598.AH.01.09-0190153, dated 28 November 2023. So the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) as of 31 December 2023 as follows:

Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris	:	Mardiyanto	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Sukendra	:	*President Director*
Direktur Keuangan	:	Suparno	:	*Finance Director*
Direktur Operasional	:	Didik Martono	:	*Operation Director*

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 09.28/02/BA/090/2022, tanggal 28 September 2022 yang telah diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih SH., dengan Akta nomor 2, tanggal 4 Oktober 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Pelita Indonesia Djaya dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.09-0062257 tanggal 5 Oktober 2022, maka susunan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya tahun 2022 sebagai berikut:

1. G E N E R A L *(continued)*

1.11. Subsidiaries *(continued)*

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) *(continued)*

Board of Commissioners and Directors *(continued)*

Based on the statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Number: 09.28/02/BA/090/2022, dated 28 September 2022 which was notarized before Notary Ida Adiningsih SH., with Deed number 2, dated 4 October 2022, concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners and Directors of PT Pelita Indonesia Djaya and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU-AH.01.09-0062257 dated 5 October 2022, then the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Pelita Indonesia Djaya on the year 2022 as follows:

Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris	:	Robert MP Sinaga	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Sukendra	:	*President Director*
Direktur Keuangan	:	Suparno	:	*Finance Director*
Direktur Operasional	:	Dr. Rooshardianti	:	*Operation Director*

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 1.771 dan 1.492. (Tidak Diaudit)

Place and Position

The number of employees of the company on December 31, 2023 and 2022 are 1.771 and 1.492 employees. (Unaudited)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting / ***Summary of Key Financial Information***

	2023	2022	
Aset	328.319.381.090	333.651.427.369	*Assets*
Liabilitas	112.997.615.241	146.857.119.666	*Liabilities*
Ekuitas	215.321.765.849	186.794.307.703	*Equity*
Pendapatan	575.655.286.058	464.006.759.041	*Revenues*
Beban	(547.482.605.482)	(438.076.594.238)	*Expenses*
Laba Tahun Berjalan	28.172.680.577	25.930.164.803	*Profit for The Year*

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN

PT PELNI (Persero) dalam menjalankan kegiatan jasa perkapalan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan jasa perkapalan:

a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.

b. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

c. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan.

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 65 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut.

e. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis.

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 tahun 2019 diubah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik *(Public Service Obligation)* .

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2019. Pemeriksaan kesehatan pelaut, tenaga penunjang keselamatan pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran.

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

2. SHIPPING SERVICES REGULATION

PT PELNI (Persero) in carrying out shipping service activities agrees with Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector, as well as provisions stipulated by the Minister of Transportation. Several important provisions relating to shipping services:

a. Presidential Regulation Number 2 on the year of 2016 concerning of State Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.

b. Presidential Regulation Number 59 of 2020 concerning Determination and Storage of Basic Necessities and Important Goods. Presidential

c. Presidential Regulation No. 27 of 2021 Amendments to Presidential Regulation Number 106 of 2015 concerning Implementation of Public Service Obligations for the Transportation of Goods to and from Disadvantaged, Remote, Outermost and Border Areas.

d. Regulation of the Minister of Transportation Number PM. 65 of 2018 Amendments to the Minister of Transportation Regulation Number PM. 4 of 2018 concerning Implementation of Public Service Obligations for Transportation of Goods at Sea.

e. Minister of Transportation RI Regulation Number PM. 48 in the year of 2018 concerning the Implementation of Pioneering Public Service Obligations.

f. Minister of Transportation Regulation Number 23 on year of 2019 is amended on the second amendment to Regulation of Minister of Transportation Number PM 29 on the year of 2018 concerning Tariffs for freight Goods at Sea in Context of Implementing Public Service Obligations.

g. Minister of Transportation Regulation Number PM 40 on the year of 2019. Sailors' health checks. shipping safety support personnel and shipping work environment.

h. Minister of Transportation Regulation Number PM 119 on the year of 2015 concerning of changes to the Minister of Transportation Regulation Number PM 37 on the year of 2015 concerning Sea transport passengers service standards.

i. Minister of Transportation Regulation Number 10 of 2021 concerning Cost and Revenue Components to be Taken into Account in the Implementation of Public Service Obligatory Transport in the Sector of Sea Transport for Economy Class Passengers..

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN (lanjutan)

j. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 59 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 49 tahun 2017 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan.

k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak.

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019, tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

2. SHIPPING SERVICES REGULATION *(continued)*

j. Regulation of the Minister of Transportation number PM 59 of 2021 concerning amendments to the Regulation of the Minister of Transportation number PM 49 of 2017 concerning the Implementation of Services Business Related to Transport in Waters.

k. Minister of Transportation Regulation Number PM 109 on the year of 2017 concerning of rate limits on domestic economy class sea passengers transportation.

l. Minister of Transportation Regulation Number PM 76 of 2019 concerning amendments to Minister of Transportation Regulation Number PM 109 of 2018 concerning the fourth amendment to the Minister of Transportation Regulation Number PM 182 of 2015 concerning cargo tariffs for subsidized activities for the operation of special livestock transport ships.

m. Regulation of the Minister of Transportation Number PM 10 of 2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Transportation Number PM 2 of 2019, concerning Components of Costs and Revenues Calculated in the Implementation of Obligatory Transportation of Public Services in the Sea Transportation Sector for Economy Class Passengers.

3. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

a. Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

3. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK)

a. The following are amendments and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding the classification of liabilities as short term or long term;*
- *Amendments to PSAK 16: Fixed Assets related to Proceeds before Intended Use;*
- *Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;*
- *Amendment to PSAK 46: With-holding Tax regarding Asset-Related Deferred Tax and Liabilities Arising From a Single Transaction; and*
- *Revised PSAK 107: Accounting for Ijara.*

3. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) (lanjutan)

a. (lanjutan)

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

b. Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Efektif 1 Januari 2025

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan-perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak mempengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

3. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) *(continued)*

a. (continued)

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

b. Amendments to the Statement of Financial Accounting Standards that have been issued but have not yet become effective for the financial year starting on 1 January 2023 are as follows:

Effective January 1, 2024

- *Amendment PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" regarding non-current liabilities with covenants;*
- *Amendment to PSAK 73 "Leases" regarding lease liabilities in a sale and leaseback transaction.*

Effective January 1, 2025

- *SFAS 74, "Insurance Contracts";*
- *Amendment to SFAS 74, "Insurance Contracts" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.*

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.

c. DSAK-IAI also ratified changes to the numbering of PSAK and ISAK which will be effective on January 1 2024, these changes do not affect the substance of requirement in each PSAK and ISAK.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan konsep harga perolehan dan basis akrual, kecuali disebutkan lain dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 5.

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah Rupiah. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements had been prepared on going concern assumption and accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows using the cash basis. The basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs, except for certain accounts which had been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the historical cost concept and accrual basis, except as otherwise disclosed in the relevant notes herein.

The statements of cash flows prepared using the direct method the cash flows into operating investing and financing activities. For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents comprise of cash on hand, cash in bank and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 5.

Functional Currencies and Reporting

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency

The functional currency of the Company and subsidiaries is Rupiah. The consolidated financial statements are presented in Rupiah.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing secara umum diakui dalam laporan laba rugi.

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

	31 Des./*Dec.* 2023 (Rp)	31 Des./*Dec.* 2022 (Rp)	
1 EURO	17.140	16.713	*1 EURO*
1 USD	15.416	15.731	*1 USD*
1 SGD	11.712	11.659	*1 SGD*
1 AUD	10.565	10.581	*1 AUD*
1 JPY	110	118	*1 JPY*

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah dan dicatat sesuai dengan 'kurs pajak mingguan' yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.e

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Foreign Currency Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated into Rupiah at the rates of exchange prevailing at end of the the reporting period.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are generally recognised in the profit or loss.

Closing exchange rate that used at the end of reporting is the middle exchange rate of Bank Indonesia as follows:

For the next, the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) in relationship to claims and liabilities in foreign currency would be pay in dollars and it's recorded in accordance by 'weekly tax rate" that applicable at the date of issuance of tax invoice.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as described in Note 1.e.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, wherein the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights in which the Group has the practical ability to exercise (i.e, substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls other entities.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

1) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
2) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Principles of Consolidation *(continued)*

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Group and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities are eliminated in full.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the noncontrolling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity of the owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in cessation of control are equity transactions (which are transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group lo - ses control, the Group:

1) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
2) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup: (lanjutan)

3) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

4) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

5) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

6) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

e. Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi untuk setiap akuisisi yang dilakukan baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui akan berdampak pada aset atau liabilitas.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Principles of Consolidation *(continued)*

If the Group lo - ses control, the Group: (continued)

3) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*

4) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*

5) *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;*

6) *Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

e. Business Combinations

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred by the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Noncontrolling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration will impact the assets and liabilities.

Acquisition related costs are expensed as incurred.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Jika, setelah penilaian kembali jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada). Selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi pada saat kehilangan pengendali.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
   1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

f. Business Combinations of Entities under Common Control

If after the reassessment the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred the amount of any non controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as additional paid in capital and is not recycled to profit and loss when control is lost.

The difference between the transfer price and the book value is presented as additional paid in capital and is not recycled to profit and loss when control is lost.

g. Transactions with Related Parties

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7, Related Party Disclosures.

Related party is a person or Entity that it's related to Entity complainant:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   1) Has control or joint control over the reporting entity;
   2) Has significant influence over the reporting entity; or
   3) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).

2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).

7) Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) angka (1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

8) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

g. Transactions with Related Parties *(continued)*

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

1) The entity. and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

3) Both of entities are joint ventures of the same third parties.

4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

5) The entity is a post-employment benefit plan for employees benefit from one of the reporting entities, or entity that are related to reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.

6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

7) A person who is identified in (a) (1) has significant influence over the entity or key of management entity personnel (or parent of the entity).

8) The entity or members of a group of which it's a part of the group it's provides key management personnel services to reporting entity or to parent of entity reporter.

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pengukuran

Pada pengakuan awal grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- **Instrumen Utang**

  Pengukuran instrumen utang selanjutnya tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset dan karakteristik arus kas aset tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

h. Financial Assets

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI"); and*
- *Those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held.

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

Measurement

At initial recognition. the group measures a financial asset at its fair value plus in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in consolidated profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

- ***Debt Instrument***

  Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. As at 31 December 2023, the Group has financial assets measured at amortised cost.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran (lanjutan)

- **Instrumen Utang** (lanjutan)

  Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah aset yang dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual di mana arus kas tersebut semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam "penghasilan bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.

  Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian dan disajikan sebagai "lain-lain, bersih". Kerugian penurunan nilai disajikan sebagai item baris terpisah dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2023, aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

- **Instrumen Ekuitas**

  Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perseroan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perseroan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

  Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku.

  Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

h. Financial Assets *(continued)*

Measurement (continued)

- ***Debt Instrument*** *(continued)*

  Financial assets measured at amortised cost are assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in "interest income" in the consolidated statement of profit or loss using the effective interest rate method.

  Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in the interim consolidated statement of profit or loss and presented in "others, net". Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss. As at 31 December 2023, the Group's financial assets measured at amortised cost comprise of cash and cash equivalents, trade receivables, and other current financial assets in the consolidated statement of financial position.

- ***Equity Instrument***

  The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income. There is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the group's right to receive payments is established.

  Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognized in other gain/(loss) in the statement of profit or loss as applicable.

  Impairment losses (and recovery of impairment) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Perusahaan menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian perusahaan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan bukan perubahan jumlah kerugian kredit yang diharapkan.

Untuk membuat penilaian tersebut, perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup). *("Expected Credit Loss - ECL")* didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset tersebut.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diharapkan *("Expected Credit Loss - ECL")* tersebut untuk piutang usaha dan piutang lain-lain.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

h. Financial Assets *(continued)*

Derecognition of Financial Assets

The Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment the company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). Expected credit loss ("ECL") are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Loss allowances for financial assets measured at amortized cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss ("ECL") for trade receivables and other receivables.

For investments in equity instruments classified as available-for- sale, a significant and prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an indicator that the asset is impaired.

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire. or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer). Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

h. Financial Assets *(continued)*

Derecognition of Financial Assets (continued)

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset. the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.

If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset. the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received

On derecognition of financial asset in its entirety. the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulat ed in equity is recognized in profit or loss.

Derecognition of a financial asset for only one part (eg when the Group retains the right to repurchase part of the transferred asset).The Group allocates the previous carrying amount of these financial assets to the part that continues to be recognized on the basis of continuing involvement and the part that is no longer recognized based on the relative fair values of the two parts at the date of transfer.

The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the amount of payments received to the part that is no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to the part that is no longer recognized that was previously recognized in other comprehensive income is recognized in profit and loss. The cumulative gains and losses previously recognized in other comprehensive income are allocated between the part that continues to be recognized and the part that is derecognized based on the relative fair values of the two parts.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan
- liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, bagian lancar liabilitas jangka panjang, liabiltias kontrak, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, utang non usaha jangka panjang dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, Grup mencatat liabilitas keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika dampak diskontonya signifikan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dibayar.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil yang diterima setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

i. Financial Liabilities and Equity Instruments

The group classifies its financial liabilities in the following measurement categories:

- *those to be measured subsequently at fair value through profit or loss, and*
- *those to be measured at amortised cost.*

As at 31 December 2023 and 2022, the Group only has financial liabilities measured at amortised cost, which comprise of short-term loans, trade payables, accrued expenses, current portion of long-term liabilities, contract liabilities, other short-term financial liabilities, long-term non-trade payables and long-term liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

After initial recognition, which is at fair value plus transaction costs, the Group measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method, if the impact of discounting is significant. Financial liabilities are derecognised when extinguished.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Equity instruments

An equity instruments is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received. net of direct issue costs.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

j. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

k. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

1) deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*); dan
2) instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

l. Kas dan Setaran Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi, jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai ”kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya" dan dikelompokkan pada aset keuangan lancar lainnya jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

i. Financial Liabilities and Equity Instruments *(continued)*

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities if and only if, their obligations are discharged cancelled or expired The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

j. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position (balance sheets) if and only if currently. has the legal entitlement to indemnify the recognized amount and there is an intention to settle the net or to realize assets and settle their obligations simultaneously.

k. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, bank and instruments that can be classified as cash equivalents include:

1) time deposits with original maturities of three months or less from the date of placement and is unrestricted and not warranted (including deposits on call); and
2) market instruments and can be liquid within a period of not more than three (3) months.

l. Restricted cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which are placed as bank guarantees, performance bond and others for a particular purpose are classified as “restricted cash and cash equivalents” and are classified into other current financial assets if maturity is less than 1 year .

m. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value whichever is lower.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Persediaan (lanjutan)

Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First In First Out*. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Persediaan rusak atau persediaan yang alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan, dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok “aset tidak lancar lainnya”.

n. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing- masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir periode pelaporan biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan.

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

o. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah semua entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun tidak mengendalikan, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sejumlah nilai perolehan dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian laba atau rugi investor dari laba atau rugi entitas asosiasi setelah tanggal akuisisi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

m. Inventories *(continued)*

Cost is determined using First In First Out method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Allowance for decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values int the current period.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the statements of financial position date.

Damaged inventories or inventories whose main equipment is no longer available or economically unusable, are presented separately into “other non-current assets” group.

n. Prepaid Expenses and Advance Payment

Prepaid expenses are expenses that have been paid for a useful life of twelve months or more. Prepaid expenses are amortized over the period of benefit of each expense using the straight-line method.

At the end of the reporting period prepaid expenses are stated at the value of the goods / services / benefits or equivalent which has not been recognized in the current period. Long-term prepaid expenses are presented as "Other Current Assets" in the Statement of Financial Position.

Advances are a number of cash out or costs incurred by the company for an activity or something that will have the responsibility in a certain time and have been assigned.

o. Investments in Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights.

Under the equity method, an investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of profit or loss from the profit or loss of the associate after the acquisition date.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi konsolidasian.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lainnya dengan melakukan penyesuaian atas jumlah tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali jika Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas hasil bersih entitas asosiasi" dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Perseroan menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perseroan mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan. Perseroan mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71.

Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

o. Investments in Associates *(continued)*

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to the consolidated profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in the consolidated profit or loss and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment.

When the Group's share of losses in associate equals to or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value and recognises the amount to "share of results of associates" in the consolidated profit or loss.

Company has been discontinued of equity method using from date when investment stopped to be associate entities investment or when investment is classified as held for sale. When Company maintain of interest in associate entities previously and remaining interest is financial asset. Company measured of interest remaining at fair value in the date and it's considered as it's fair value upon initial recognition in accordance with SFAS 71.

Difference between of carrying amount of associate entities on the date of equity method was discontinued, and fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in associate entities is included in the determination of gain or loss or loss of associate entities release.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Selanjutnya, Perseroan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait. Perseroan mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

p. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai.

Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

o. Investments in Associates *(continued)*

Continue, the Company recorded all amounts previously that recognized in other comprehensive income related to associate entities on same basis as required if associate entities had directly released of related assets and liabilities. Therefore, if gain or loss previously that recognized in other comprehensive income by an associate entities it's will be reclassified to profit or loss upon disposal of it's related to asset or liability. Company had reclassified of profit or loss from equity to profit or loss (as an adjustment to reclassification) of association entity when the equity method is terminated.

p. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both.

Costs after the initial acquisition is recognized in the carrying amount of investment property if and only if it is probable that future economic benefits in respect of the investment property will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably, and does not include the cost of the maintenance of investment property.

Investment property is initially measured at cost which includes the purchase price and costs directly attributable. Furthermore. after the initial measurement, property investments valued using fair value. Gains or losses arising from changes in fair value recognized in profit or loss as incurred.

Investment property includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion.

Accumulated acquisition and development costs (including borrowing costs incurred) are amortized when completed and ready for use.

Investment properties are derecognised upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Properti Investasi (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi (ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

q. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan *(acquisition cost)* setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai,jika ada. Namun, tidak termasuk biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari.

Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya *(cost model)* dalam melakukan pengukuran untuk seluruh aset tetapnya setelah pengakuan awal aset tetap yang bersangkutan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Investment Properties *(continued)*

Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated profit or loss in the period in which the property is derecognised or disposed of.

Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owneroccupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sell.

q. Fixed Assets

Fixed assets, except land are stated at the acquisition cost. after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment losses If any. However, it does not include daily repairs and maintenance costs.

The Company still chooses to use the cost model in measuring all of its fixed assets after the initial recognition of the fixed assets concerned.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended on use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the land rights.

Major spare parts and stand by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset Tetap (lanjutan)

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Fixed Assets *(continued)*

Expenses incurred after fixed assets are used. such as repairs and maintenance expenses are charged to profit or loss when incurred. If these expenses lead to an increase in future economic benefits from the use of these fixed assets that can exceed their normal performance. then these expenses are capitalized in addition to the acquisition cost of fixed assets.

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or no future economic benefit is expected from its use or disposal.

Fixed asset sold or disposed of are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset.

Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds if any and the carrying amount of fixed assets and recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

Depreciation (except for land) is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, depreciation is recognized so as to write off the cost of assets less residual values based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Metode/ *Method*	Tarif/ *Rates*	Umur Ekonomis/ *Economic Life*	Nilai Residu/ *Residual Value*	*Type of Assets*
Alat Produksi					***Production Equipments***
Armada Niaga					***Commercial Fleet***
- Kapal Penumpang	Garis Lurus/ *Straight Line*	3,33%	30 Tahun / *Year*	5,00%	*Passenger Ship* -
- Kapal Roro	Garis Lurus/ *Straight Line*	4,00%	25 Tahun / *Year*	5,00%	*RoRo Ship* -
- Kapal Barang	Garis Lurus/ *Straight Line*	5,00%	20 Tahun / *Year*	5,00%	*Cargo Ship* -
- *Tug Boat* dan Tongkang	Garis Lurus/ *Straight Line*	6,66%	15 Tahun / *Year*	2%	*Tug Boats and Barges* -
- Suku Cadang dan Perlengkapan Kapal	Garis Lurus/ *Straight Line*	33,30%	3 Tahun / *Year*		*Parts* -

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Aset Tetap (lanjutan)

q. Fixed Assets *(continued)*

Jenis Aset Tetap	Metode/ *Method*	Tarif/ *Rates*	Umur Ekonomis/ *Economic Life*	Nilai Residu/ *Residual Value*	*Type of Assets*
Container					***Container***
- *Refeer Container/Container*	Garis Lurus/ *Straight Line*	6,66%	15 Tahun / *Year*		*Refeer Container/Container* -
Alat Produksi Perhotelan					***Hotel Production Tools***
- Bangunan Hotel	Garis Lurus/ *Straight Line*	2,50%	40 Tahun / *Year*		*Hotel Building* -
- Fasilitas Penunjang Hotel					*Hotel supporting facilities* -
- Kolam Renang	Garis Lurus/ *Straight Line*	6,66%	15 Tahun / *Year*		Swimming Pool -
- Fasilitas Penunjang Hotel Lainnya	Garis Lurus/ Straight Line	14,28%	7 Tahun / Year		*Other Hotel supporting facilities* -
- Perlengkapan Hotel	Garis Lurus/ *Straight Line*	20,00%	5 Tahun / *Year*		*Hotel Equipment* -
- Perlengkapan Dapur	Garis Lurus/ *Straight Line*	20,00%	5 Tahun / *Year*		*Kitchen Equipment* -
Alat Produksi Galangan Kapal					***Shipyard Production Equipment***
- Perlengkapan Galangan Kapal	Garis Lurus/ *Straight Line*	10%	10 Tahun / *Year*		*Shipyard Equipment* -
- Peralatan Penunjang Galangan Kapal	Garis Lurus/ *Straight Line*	10%	10 Tahun / *Year*		*Shipyard Support Equipment* -
- Alat Angkut	Garis Lurus/ *Straight Line*	20,00%	5 Tahun / *Year*		*Conveyance* -
Aset Tetap					***Fixed Assets***
- Bangunan	Garis Lurus/ *Straight Line*	2,50%	40 Tahun / *Year*		*Building* -
- Kendaraan Bermotor	Garis Lurus/ *Straight Line*	20,00%	5 Tahun / *Year*		*Vehicle* -
- Peralatan Elektronik	Garis Lurus/ *Straight Line*	20,00%	5 Tahun / *Year*		*Electronic Equipment* -
- Peralatan Komunikasi	Garis Lurus/ *Straight Line*	20,00%	5 Tahun / *Year*		*Communication Equipment* -
- Perabotan Kantor/Rumah Tangga	Garis Lurus/ *Straight Line*	20,00%	5 Tahun / *Year*		*Office/Household Furniture* -
Aset Takberwujud					***Intangible Assets***
- Piranti Lunak	Garis Lurus/ *Straight Line*	20,00%	5 Tahun		*Software* -
- Sertifikat	Garis Lurus/ *Straight Line*		Sesuai Masa Berlaku Sertifikat/ *Certificate Validity Period*		*Certificate* -

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai residu, umur manfaat serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan.

Pinjaman dana secara spesifik telah ditentukan penggunaannya, jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Pinjaman dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian dengan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut.

Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan proyek telah selesai atau pada saat konstruksi selesai dan aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai konstruksi aset tertentu yang memenuhi syarat. dikapitalisasi sampai konstruksi tersebut selesai.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Fixed Assets *(continued)*

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate. at each financial year end.

Borrowing Costs

Borrowing costs that can be distributed directly with the acquisition, construction or manufacture of qualifying assets are borrowing costs that can be avoided if the expenditure on qualifying assets is not carried out.

Specific use of the loan has been determined. the amount of borrowing costs that can be capitalized is equal to the actual borrowing costs incurred during the period less investment income on the temporary investment of the loan.

Fund loans generally use it to obtain a qualifying asset the amount of borrowing costs that can be capitalized by applying a capitalization rate to the expenditure on the asset.

Rate capitalization is the weighted average borrowing cost for the loan balance during the period outside the specific loan to obtain the qualifying asset. The amount of borrowing costs capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing costs incurred during that period.

Capitalization of borrowing costs discontinued when activities associated with the acquisition and development projects have been completed or when construction is completed and the asset is ready for its use.

Interest expense and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used to finance construction of certain assets are eligible. are capitalized until construction is completed.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Dalam Konstruksi

Aset dalam konstruksi merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada akhir tahun sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.

Aset dalam konstruksi disajikan sebagai bagian dari aset tetap yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah digunakan sesuai tujuannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama.

Aset Tetap Usul Hapus

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi / usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan / pelepasannya dikategorikan sebagai aset tetap usul hapus dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tetap usul hapus dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 02/MBU/2010, tentang Tata cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara dan SK Direksi No.04.09/02/SK/HKO.01/2021, tentang *Standard Operational Prosedure (SOP)* Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap PT Pelni (Persero).

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Fixed Assets *(continued)*

Construction in Progress

Construction in progress (CIP) are fixed assets in the construction phase. which are stated at cost based on the physical percentage of work completed at the end of the year in accordance with the Minutes of Physical Progress of Work.

CIP are presented as part of fixed assets. which are stated based on acquisition costs costs directly attributable costs. initial estimates of the costs of dismantling and moving fixed assets and restoring the location of fixed assets and borrowing costs used to finance assets during the period development.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets when the construction is substantially completed and the assets are ready for its intended use. as evidenced by the Minutes of First Taking Over.

Fixed Assets Write-off

Fixed assets that do not provide benefits in production activity / her business or no future economic benefits are expected from the use / disposal are categorized as write-off fixed assets and are presented in the other non-current assets group. .

Fixed assets in that category of impaired its carrying value at the time no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of write-off fixed assets created as the application of the accounting impairment.

The write off and the alienation of property and equipment following the regulation stated by the Minister of State Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010, regarding Procedure for Written off and Transfer of Fixed Assets of State Owned Company and Decree of the Board of Directors No. 04.09/02/SK/HKO.01/2021, concerning Standard Operational Procedures (SOP) for Write-offs and Transfers of PT Pelni (Persero) Fixed Assets.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tetap Usul Hapus (lanjutan)

Aset tetap usup hapus dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usul hapus diakui pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

r. Aset Takberwujud

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud. Beban tersebut diamortisasi selama mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Aset takberwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang- kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan.

Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Fixed Assets *(continued)*

Fixed Assets Write-off (continued)

Write-off fixed assets are derecognised when the the elimination has received approval from the Board of Commissioners and or Shareholders. Gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed to be written off it was recognized in the group of other income (expenses).

r. Intangible Assets

Cost incurred for extension or renewal of land rights are recognized as intangible assets. Amortized over the period whichever is shorter between the legal life or economic life of the land. If the cost incurred are not material, then charged in the current period.

Intangible assets are recorded at acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their useful lives. The Group estimates the recoverable value of its intangible assets.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method. as appropriate. and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the profit or loss as the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 5 (lima) tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra operasi / perintisan usaha.

s. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

r. Intangible Assets *(continued)*

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised but are tested for impairment annually either individually or at the cashgenerating unit level. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount. the asset is written down to its estimated recoverable amount. The useful life of an intangible asset that is not being amortised shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Software is amortized using the straight line method. based on the estimated useful lives of the assets of 5 (five) year.

Intangible assets are derecognized when no further economic benefits are expected. either from further use or from disposal. The difference between the carrying amount and the net proceeds received from disposal is recognized in the statement of profit or loss.

The costs that do not have a useful life of more than one period can not be suspended including losses arising from the initial operation and cost of pre operative / pioneering effort.

s. Impairment of Non financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that the assets have suffered an impairment loss. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount.

Recoverable amount is the higher of its fair value less cost to sell and the value in use of the assets. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (lanjutan)

Setiap tanggal pelaporan, aset non-keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pemulihan nilai langsung diakui dalam laba rugi konsolidasian, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain goodwill, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain.

Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik kembali.

t. Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak merupakan kewajiban perusahaan untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana perusahaan telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan sebelum kewajiban pelaksanaan direalisasikan.

u. Transaksi Sewa

Pada tanggal awal dimulainya suatu kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak mengandung sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

s. Impairment of Non financial Assets *(continued)*

At each reporting date, non-financial assets that suffered impairment are reviewed for possible recoverable of the impairment. Recoverable amount is immediately recognised in the consolidated profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognised.

An impairment loss, for assets other than goodwill, is recognized if, and only if, there has been a change in the estimate used in determining the asset's recoverable amount since the last impairment test. The reversal of the impairment loss is recognized immediately in profit or loss, except for assets which are presented at revalued amounts in accordance with other PSAK.

The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

t. Contract Liabilities

Contract liabilities are obligations of the company to transfer goods or services to customers where the company has received consideration (or the amount due) from the customer before the performance obligation is realized.

u. Lease Transactions

On the initial date of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract contains a lease if the contract transfers the right to control the use of an identified asset for a period of time to be exchanged for compensation.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Transaksi Sewa (lanjutan)

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

  a. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau

  b. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Aset yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, lessee mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh lessee dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar serta biaya restorasi.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

u. Lease Transactions *(continued)*

- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:*

  a. The Group has the right to operate the asset; or

  b. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.

Assets obtained through lease are recognised as right of use of asset and lease liabilities. On the initial date, lessee measures right of use of asset at cost which include the initial measurement of lease liabilities, lease payments made on or before the commencement dates less the incentives received, the initial direct costs incurred by the lessee, and estimated cost to be incurred by the lessee in dismantling and moving the underlying assets and restoration costs.

The right of use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprises the following:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Transaksi Sewa (lanjutan)

- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi penghentian tersebut.

Setelah awal masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi.

Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap, sedangkan liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa satu tahun atau kurang dan sewa dengan aset bernilai rendah.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

v. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

u. Lease Transactions *(continued)*

- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees,*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that termination option.*

After the commencement date, each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding.

The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss.

Right of use of asset is presented as Fixed Asset, whereas lease liabilities are presented as long-term liabilities except for the parts that are due in 12 months or less that are presented as short-term liabilities. The Group does not recognise the right of use of asset and lease liabilities for short-term leases that have lease period of one year or less and leases with low-value assets.

The Group has elected not to recognise right-ofuse assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less, and leases with low value asset. The Group recognises the payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

v. Employment Benefits

Short Term Employee Benefits

Short term employee benefits are employee benefits payable in less than one year, including the following salaries, wages and social security contributions. The obligation to pay these benefits are recognized at its undiscounted amount and and as an expense in the consolidated statement of comprehensive income for the year and recorded as accrued expenses.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Kewajiban Pensiun

Program Iuran Pasti

Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun kini dan sebelumnya.

Perusahaan menerapkan kebijakan pembentukan cadangan beban kesejahteraan pegawai pada tahun buku 2023 melalui Surat Keputusan Direksi No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, tanggal 2 Januari 2023 sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terkait kesejahteraan pegawai purna bakti dengan menjaga kecukupan dana pada Dana Pensiun Pelni, yang dilakukan secara akrual setiap bulannya. Pembentukan cadangan beban kesejahteraan pegawai PT PELNI (Persero) dengan menyesuaikan kinerja dan kemampuan Perusahaan. (Lihat Catatan 5)

Program Imbalan Pasti

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected-unit-credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

v. Employment Benefits *(continued)*

Long Term Employment Benefits

Pension obligations

Defined Contribution Plan

A defined pension contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity (a pension fund) and will have no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

The Company implemented a policy of establishing employee welfare expense reserves in fiscal year 2023 through Board of Directors Decree No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, dated January 2, 2023 as a form of the Company's responsibility regarding the welfare of retired employees by maintaining sufficient funds in the Pelni Pension Fund, which is carried out on a monthly accrual basis. Establishment of PT PELNI (Persero) employee welfare expense reserves by adjusting the Company's performance and capabilities. (See Note 5)

Defined Benefits Plan

A defined pension benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors, such as age, years of service or compensation.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statement of financial position date, less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected-unit-credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Program Imbalan Pasti (lanjutan)

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi konsolidasian yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Pengukuran kembali imbalan pascakerja yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi konsolidasian ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi konsolidasian.

Pada tanggal 4 April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers mengenai 'Mengatribusikan manfaat untuk masa kerja (PSAK 24)' sebagai tanggapan terhadap International Financial Accounting Standard Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard ("IAS") 19 Employee Benefit - Attributing Benefit to periods of service ("IFRIC") yang diterbitkan di bulan Mei 2021. DSAK-IAI menilai bahwa skema manfaat pensiun yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja sepertinya memiliki karakteristik yang serupa dengan pola fakta yang dibahas dalam IFRIC.

Manajemen telah mengkaji dampak siaran pers DSAK-IAI ini dan menyimpulkan bahwa dampak perubahan pola fakta tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode lalu, dan oleh karena itu telah membukukan dampak perubahan tersebut pada laporan laba rugi periode berjalan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

v. Employment Benefits *(continued)*

Long Term Employment Benefits *(continued)*

Defined Benefits Plan (continued

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the interim consolidated statement of profit or loss in employee benefit expense, which reflects the increase in the defined obligations resulting from employee service in the current year.

Remeasurement of post-employment benefits consists of actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognised in other comprehensive income and reported in retained earnings.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the consolidated statement of profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Past-service costs are recognised immediately in the consolidated statement of profit or loss.

On 4 April 2022, the Financial Accounting Standards Boards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") published a press release regarding 'Attributing benefit to periods of service (PSAK 24)' in response to the International Financial Accounting Standard Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard ("IAS") 19 Employee Benefits - Attributing Benefit to periods of service ("IFRIC") published in May 2021. DSAK-IAI assessed that the pension benefit scheme introduced in the Job Creation Law shares similar characteristics with the fact patterns discussed in the IFRIC.

Management has assessed the impact of this DSAK-IAI press release and concluded that the impact of changes in the fact patterns is not significant to the Group's consolidated financial statements in the prior period, and has therefore accounted for the impact on current period profit or loss.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan program santunan meninggal dan cacat, uang pisah, tunjangan hari tua, dan masa persiapan pensiun untuk karyawan tertentu. Hak atas imbalan ini biasanya berdasarkan pencapaian masa kerja karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Estimasi biaya imbalan ini diakui selama masa kerja. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan metode yang digunakan untuk program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Kesejahteraan Karyawan

Untuk mensejahterakan karyawannya PT PELNI (Persero) memiliki beberapa program kesejahteraan, antara lain:

Tantiem

Tantiem dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta dibukukan sebagai beban *(expense)* tahun berjalan.

Jasa Produksi/Bonus

Bonus dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). dibukukan sebagai beban *(expense)* tahun berjalan.

Cuti Besar dan Cuti Tahunan

Perseroan memberikan kesempatan cuti tahunan (selama 12 hari per tahun) dan cuti besar (selama 30 hari) untuk melengkapi pelaksanaan cuti tersebut. Perseroan memberikan tunjangan cuti tahunan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

v. Employment Benefits *(continued)*

Other Long Term Benefits

The Group provides died and disabled compensation programs, separating money, old age benefits, and retirement preparation periods of its employees. The entitlements to these benefits are usually based on the completion of a certain number of service years by the employees in accordance with the Collective Labor Agreement. The estimated costs of these benefits are recognised over the year of employment. These benefits are accounted for using the same method as for the defined benefit pension plan, except for actuarial gains and losses which are recognised in the consolidated statement of profit or loss.

Employee Welfare

For the welfare of their employees PT PELNI (Persero) has several welfare programs such as:

Tantiem

Tantiem is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (RUPS) and recorded as expenses in the current year.

Incentives for Employee/Bonus

Incetives for employee/Bonus is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (RUPS) charged to expenses of the current year.

Annual and Long Leave

The Company provides annual leave opportunities (for 12 days per year) and long leave (for 30 days) to complete the execution of such leave the Company provides annual vacation allowance.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Dana Pindah Rumah

Perseroan menyediakan uang pindah bagi karyawan Perusahaan yang dipindahtugaskan dan memasuki masa bebas tugas (MBT).

Asuransi Jiwa dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Perseroan membiayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perseroan bekerja sama dengan beberapa Perseroan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perseroan juga mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

w. Provisi

Provisi diakui apabila Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

v. Employment Benefits *(continued)*

Long Term Employment Benefits *(continued)*

Employee Welfare *(continued)*

Relocation Allowance

The Company provides annual leave opportunities (for 12 days per year) and long leave (for 30 days) to complete the execution of such leave the Company provides annual vacation allowance.

Life Insurance and Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

The Company entitles its employees in the life insurance program. In supporting this program. the Company has agreement with several insurance companies to provide the insurance products The Company's employees are also entitled to the social security of employee in BPJS Ketenagakerjaan.

w. Provision

A provision is recognised when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.

2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelangan.

3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel. Perusahaan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.

4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah marjin.

5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).

b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

x. Revenue and Expense Recognition

The Group has adopted PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1) Identify contracts with customers.

2) Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer different goods or services to the customer.

3) Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration expected to be entitled to the entity in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. If the consideration promised in the contract includes a variable amount. the Company estimates the amount of consideration that is expected to be entitled in exchange for the transfer of goods or services promised to the customer less the estimated amount of guaranteed service levels to be paid during the contract period.

4) Allocate the transaction price for each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract. If this cannot be observed directly the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus a margin.

5) Recognizes revenue when performance obligations are fulfilled by transferring the promised goods or services to the customer (that is. when the customer gains control of the goods or services).

The implementation obligation can be fulfilled in the following conditions:

a) A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer).

b) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time. the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan atas penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau *Public Service Obligation* (PSO) dan Subsidi

Pendapatan atas penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) dan subsidi diakui pada saat pengajuan klaim terhadap seluruh biaya yang terkait langsung dengan kegiatan PSO dan subsidi.

Selisih kekurangan pembayaran atau kelebihan pencairan dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik akan diperhitungkan setelah dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh pihak yang ditunjuk dalam Perjanjian.

Perusahaan menerapkan kebijakan pembentukan cadangan PSO pada tahun buku 2023 maksimal 6% dari setiap pencatatan akrual bulanan penghasilan PSO untuk mengantisipasi dampak koreksi atas hasil verifikasi penagihan PSO oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK R.I.) melalui Surat Keputusan Direksi No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, tanggal 2 Januari 2023. Dasar pertimbangannya adalah jumlah koreksi dari hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, secara rata-rata prosentase koreksi sebesar 3,44% dari total penagihan PSO dan kriteria / acuan verifikasi yang digunakan oleh verifikator adalah PM No. 10 Tahun 2021 dan kontrak pelaksanaan PSO. Nilai cadangan PSO yang dibentuk diakui sebagai beban pengurang pendapatan PSO dan beban akrual pencadangan.

Pendapatan Tambang Pasasi dan Muatan

Pendapatan tambang pasasi dan muatan diakui saat kapal meninggalkan pelabuhan atas dasar uang tambang pasasi dan uang tambang muatan yang diterima.

Pendapatan Charter, Bongkar Muat, Komisi Keagenan, EMKL dan Reparasi

Pendapatan charter, bongkar muat, komisi keagenan, EMKL dan reparasi diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dilaksanakan.

Pendapatan Sewa, Bunga dan Lainnya

Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

x. Revenue and Expense Recognition *(continued)*

Revenue for the implementation of public service obligations (PSO) and subsidies

Revenue for the implementation of public service obligations (PSO) and subsidies are recognized at the time of filing a claim against all costs associated directly with PSO and subsidy activities.

The difference in underpayment or excess disbursement of funds for the implementation of Public Service Obligations will be calculated after document verification and field verification by the party appointed in the Agreement.

The company implements a policy of establishing a PSO reserve in the 2023 financial year of a maximum of 6% of each monthly accrual recording of PSO income to anticipate the impact of corrections on the results of verification of PSO billing by the Indonesian Financial Audit Agency (BPK R.I.) through Directors' Decree No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, January 2 2023. The basis for consideration is the number of corrections from the results of document verification and field verification in the last 3 (three) years, with an average percentage of corrections of 3.44% of the total PSO billing and the verification criteria/reference used by the verifier is PM No. 10 of 2021 and the PSO implementation contract. The value of the PSO reserves formed is recognized as an expense reducing PSO income and accrued reserve expenses. See Note 5

Pasasi Mines and Cargo Revenues

Passenger and cargo ticket revenues are recognized when the ship leaves the port on the basis of the ticket and cargo fees received.

Revenue Charter, Stevedoring, Agency Commissions, EMKL and Reparations

Revenue charter, stevedoring, agency commissions and reparations EMKL recognized when services have been completed.

Rental Income, Interest and Other

Rental income, interest and other recognized on an accrual basis.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan Dividen dari Investasi Saham

Penghasilan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.

Uang yang diterima sehubungan dengan pelayanan jasa yang belum digunakan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan disajikan sebagai liabilitas kontrak.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

y. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut maka kelebihannya diakui sebagai aset dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

x. Revenue and Expense Recognition *(continued)*

Dividend Income from Shares Investment

Dividend income from investment in shares capital is recognized when the shareholders rights to receive such dividend have been established.

The cash received from customers related to unused services are recorded as current liabilities and presented as contract liabilities.

Expenses are recognised when incurred on an accrual basis.

y. Income Taxes

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Tax is recognised in the consolidated statements of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity or other comprehensive income. In this case, the tax is also recognised directly in equity or other comprehensive income.

Current Taxes

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantially enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in its annual tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes a provision, where appropriate, on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Current tax assets and liabilities are recognized if the amount of taxes paid for the current period and prior periods exceeds the amount of tax payable for that period then the excess is recognized as an asset. and if the amount of unpaid taxes is now recognized as a liability.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recoverd from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Grup menggunakan metode neraca (*balance sheets method)* pada akuntansi pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan liabilitas atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi, aset atau liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam jumlah bersih.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

y. Income Taxes *(continued)*

Current Taxes (continued)

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is decided. Shortage / excess income tax payments are recorded as part of the "Current Tax Expense" in the income statement and other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legal right to offset the recognized amounts and has the intention to finish with a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred Taxes

The Group applies the balance sheets liability method of deferred tax accounting which arises on temporary differences between tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. For each of the consolidated subsidiaries, the deferred tax assets or liabilities are shown at the applicable net amounts.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan. kecuali untuk transaksitransaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

z. Penggunaan Saldo Laba

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

aa. Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Grup dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

y. Income Taxes *(continued)*

Deferred Taxes (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each consolidated statement of financial position date and is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction is reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable income would be available.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations. except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax related to transactions both in other comprehensive income or directly charged to shareholders' equity, are recorded in other comprehensive income or equity in question.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

z. The Usage of Retained Earnings

The use of profit balance made on the basis of the decision/treatise of the general Meeting of Shareholders (AGM).

aa. Basic Net Earnings (Loss) Per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing profit for the period attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is computed by dividing net profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

ab. Informasi Segmen

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup. Segmentasi berdasarkan sifat usaha. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Grup membagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

ac. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian. apabila jumlahnya material telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

aa. Basic Net Earnings (Loss) Per Share *(continued)*

As at December 31, 2023 and 2022, there were no existing instruments which could result in the issuance of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share is the same as basic earnings per share.

ab. Segment Information

he Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. Directors are the Group's chief operating decision-maker. The segments are based on the nature of business. All transactions between segments have been eliminated.

An operating segment is a component of an entity:

1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses;
2) whose operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and value its performance;

3) *for which discrete financial information is available.*

For management purposes, the Group are divided into operating segments based on products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of each segment. The segment managers report directly to the management regularly review the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance.

ac. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Group's financial position at the date of the consolidated statement of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year- end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa mendatang.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling material dan signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK 46, "Pajak Penghasilan". Grup membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

5. *MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS*

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these estimates and assumptions could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of assets or liabilities affected in future periods.

The following judgments, estimates and assumptions were made by management in the process of applying the Group's accounting policies and have the most material and significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group accounting policies that have the significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Uncertainty of tax exposures

In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigations by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognised in respect of an uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognised in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK 46, "Income Taxes". The Group makes an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognised.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

c. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

d. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Suatu evaluasi atas piutang. yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Judgments *(continued)*

b. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to control the use of an identifiying asset throughout the period in exchange for consideration even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Group has various lease agreements where theGroup acts as a lessee in respect of certain assets. The Group classifies each of its leases as either an operating lease or finance lease.

The Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

c. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the group accounting policies.

d. Provision for Impairment of Financial Assets

The formed of provision is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided, is performed periodically during the period. Therefore, timing and amount of allowances for impairment value of doubtful accounts recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

e. Cadangan *Public Service Obligation (PSO)*

Mendasar pada pengalaman penagihan PSO selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2020 - 2022) manajemen memutuskan untuk membentuk cadangan PSO maksimal sebesar 6% dari setiap pencatatan akrual bulanan penghasilan PSO sesuai Surat Keputusan Direksi No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, tanggal 2 Januari 2023 yang bertujuan untuk mengelola risiko dari dampak penurunan secara material dan signifikan apabila nilai koreksi BPK RI naik secara signifikan. (Lihat Catatan 4, huruf x)

f. Cadangan Beban Kesejahteraan Pegawai

Mendasar pada Laporan Valuasi Aktuaria tanggal 31 Desember 2022 atas Dana Pensiun Pelni, bahwa Dana Pensiun Pelni mengalami defisit pendanaan sebesar Rp28.172.151.980, maka PT PELNI (Persero) sebagai pendiri mimiliki tanggung jawab atas kesejahteraan pegawai purna bakti dengan menjaga kecukupan dana pada Dana Pensiun Pelni, melalui tambahan iuran sebesar nilai defisit tersebut. Selanjutnya, mendasar pada surat Dana Pensiun Pelni No. 001/DPP/KEU/I-2024, tanggal 4 Januari 2024, defisit pendanaan tersebut ditindaklanjuti dengan pengenaan iuran tambahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (Lihat Catatan 4, huruf v)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun-tahun mendatang dipaparkan di bawah ini.

a. Cadangan Penurunan Nilai Piutang

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lain-lain dengan menggunakan tingkat provisi yang berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

5. *MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS* *(continued)*

Judgments *(continued)*

e. Provision for Public Service Obligation

Based on the PSO collection experience for 3 (three) consecutive years (2020 - 2022), management decided to establish a maximum PSO reserve of 6% of each monthly accrual recording of PSO income in accordance with Directors' Decree No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, dated 2 January 2023, which aims to manage the risk of a material and significant decrease in the impact if the BPK RI correction value increases significantly. (See Note 4, letter x)

f. Employee Welfare Expense Reserves

Based on the Actuarial Valuation Report dated 31 December 2022 for the Pelni Pension Fund, that the Pelni Pension Fund experienced a funding deficit of IDR 28,172,151,980, then PT PELNI (Persero) as the founder is responsible for the welfare of retired employees by maintaining sufficient funds in the Pelni Pension Fund, through additional contributions equal to the value of the deficit. Furthermore, based on the Pelni Pension Fund letter no. 001/DPP/KEU/I-2024, dated January 4 2024, the funding deficit was followed up with the imposition of additional contributions for a period of 2 (two) years. (See Note 4, letter v)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years are addressed below.

a. Allowance for Impairment of Receivables

The Group calculates expected credit losses for trade receivables and other receivables by using the provision rates based on days past due for groupings of various customer segments that have similiar credit risk characteristics.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

a. Cadangan Penurunan Nilai Piutang (lanjutan)

Grup menyesuaikan kerugian kredit historis masa lalu dengan informasi *forward-looking* . Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan

Grup menghitung pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

c. Pemulihan dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai dengan nilai dimana kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan.

5. *MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS* *(continued)*

Estimates and Assumptions *(continued)*

a. Allowance for Impairment of Receivables (continued)

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if economic conditions forecast are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At each reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, and economic conditions forecast and expected credit losses is a significant estimate.

The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of economic conditions forecast. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of the customer's actual default in the future.

b. Allowance for Impairment of Inventories

The Group provides allowance in decline in inventories based on estimated future usage and the condition of the inventories. Uncertainty associated with these factors may result in the realisable amount being different from the reported carrying amount of the inventories.

c. Recoverability of Deferred Tax Assets

The Group reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised. The Group's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Group's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

c. Pemulihan dari Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan ekspektasi utilisasi dari aset dengan didukung rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud didasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain penggunaan aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Jumlah dan saat beban dicatat setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Grup akan meningkatkan beban usaha dan menurunkan aset tidak lancar yang tercatat. Penambahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap Grup menurunkan beban usaha dan meningkatkan aset tidak lancar yang tercatat.

e. Nilai Wajar Properti Investasi

Nilai wajar dari properti investasi ditentukan menggunakan teknik valuasi yang dilakukan oleh penilai independen profesional yang memiliki kualifikasi yang relevan dan memiliki pengalaman yang berhubungan dengan properti investasi yang akan dinilai. Setiap perubahan dalam asumsi penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal akan berdampak pada nilai tercatat properti investasi.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and Assumptions *(continued)*

c. Recoverability of Deferred Tax Assets (continued)

However, there is no assurance that the Group will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised.

d. Estimated Useful Lives of Intangible Assets and Fixed Assets

The Group estimates the useful lives of its intangible assets and fixed assets based on expected asset utilisation as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of intangible asseta and fixed assets are based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Group's fixed asset increases the recorded operating expenses and decreases recorded noncurrent assets. An extension in the estimated useful lives of the Group's fixed assets decreases the recorded operating expenses and increases noncurrent assets.

e. Fair Value of Investment Property

The fair value of investment property is determined by using valuation techniques which were applied by independent professionally qualified valuers who hold a recognised relevant professional qualification and have recent experience in the locations of the investment properties valued. Each change in assumption and valuation performed by external independent appraisers would affect the carrying amount of investment properties.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Asumsi penting untuk penurunan nilai aset non keuangan sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Rencana strategis mencakup perkiraan dampak perubahan iklim bisnis di masa depan terhadap Grup sejauh ini dapat diperkirakan dengan andal.

g. Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuaria. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas investasi dana program pensiun iuran pasti dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

h. Pajak Penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan nilainya, dimana hal ini tergantung pada kecukupan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen atas arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal dan transaksi lainnya di masa depan.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and Assumptions *(continued)*

f. Impairment of Non Financial Aassets

Fixed assets and other non-current assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating unit is determined based on the higher of its fair value less costs to sell and its value in use, calculated on the basis of management's assumptions and estimates.

Other key assumptions for the impairment of nonfinancial assets are based in part on current market conditions. Strategic plans include estimations of the future impact of business climate change on the Group to the extent these can be reliably estimated.

g. Liabilities for Employee Benefits

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined based on a number of actuarial assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on investment of the defined contribution pension fund and the relevant discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of the employee benefits obligation.

Other key assumptions for the employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

h. Income Taxes

Deferred tax assets, including those arising from tax losses, provisions and other temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the sufficiency of the future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future sales of goods and services, prices, operating costs, capital expenditure and other future transactions.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

i. Cadangan *Public Service Obligation (PSO)*

Cadangan PSO dibentuk berdasarkan pengalaman penagihan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2020 - 2022) dimana risiko koreksi pendapatan PSO memiliki level risiko tinggi.

Dengan tingkat risiko kemungkinan "hampir pasti terjadi" dan tingkat dampak "medium" maka Perusahaan berkeyakinan sepenuhnya dengan keputusan yang tepat untuk melakukan pencadangan PSO sebesar Rp13.875.614.803 atau 0,52% dari pencatatan penghasilan PSO sebesar Rp2.647.456.574.541 sehingga dapat menurunkan level risiko menjadi moderat. Selanjutnya, manajemen telah mencatat koreksi sementara atas proses audit PSO oleh BPK R.I yang masih berlangsung sebesar Rp4.875.614.803 sehingga penghasilan PSO menjadi Rp2.642.580.959.738 dan nilai pencadangan PSO menjadi sebesar Rp9.000.000.000, selanjutnya manajemen berkeyakinan nilai pencadangan tersebut dapat mengakomodir koreksi final BPK R.I. Penentuan nilai dan metode pencadangan PSO ini akan dievaluasi atau direviu kembali oleh manajemen sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. (Lihat Catatan 4, huruf x)

j. Cadangan Beban Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Surat Dana Pensiun Pelni No. 001/DPP/KEU/I-2024, tanggal 4 Januari 2024, defisit pendanaan sebesar Rp28.172.151.980 ditindaklanjuti dengan pengenaan iuran tambahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Nilai iuran tambahan setiap bulan untuk tahun 2024 sebesar Rp1.152.923.576 atau secara total sebesar Rp13.835.082.912. Oleh karena itu untuk pemenuhan defisit pendanaan di Dana Pensun PELNI telah dibentuk cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14 Miliar. Manajemen berkeyakinan nilai pencadangan tersebut cukup untuk menyehatkan kembali Dana Pensiun Pelni. (Lihat Catatan 4, huruf v)

5. *MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS* *(continued)*

Estimates and Assumptions *(continued)*

i. Provision for Public Service Obligation

The PSO provision is formed based on the collection experience over the past 3 (three) consecutive years (2020 - 2022), where the risk of PSO revenue correction has a high level of risk.

With the risk level of "almost certain to occur" and the impact level of "medium", the Company is fully confident that it made the right decision to reserve PSO amounting to Rp13.875.614.803 or 0.52% of the recorded PSO income of Rp2.647.456.574.541 so that it can reduce the risk level to moderate. Furthermore, management has recorded a temporary correction of the PSO audit process by BPK R.I which is still ongoing amounting to Rp4,875.614.803 so that PSO's income becomes Rp2.642.580.959.738 and the value of PSO reserves becomes Rp9.000.000.000, furthermore management believes that the value of these reserves can accommodate the final correction of BPK R.I. Determination of the value and method of PSO reserves will be evaluated or reviewed by management at least once a year. (See Note 4, letter x)

j. Employee Welfare Expense Reserves

Based on Pelni Pension Fund Letter No. 001/DPP/KEU/I-2024, dated January 4, 2024, the funding deficit of Rp28.172.151.980 was followed up with the imposition of additional contributions for a period of 2 (two) years. The value of additional contributions each month for 2024 amounted to Rp1.152.923.576 or a total of Rp13,835,082,912. Therefore, to fulfill the funding deficit in the PELNI Pensun Fund, a reserve has been formed as of December 31, 2023 of Rp14 billion. Management believes that the reserve value is sufficient to rejuvenate the Pelni Pension Fund. (See Note 4, letter v)

6. KAS DAN SETARA KAS / *6. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Kas:			***Cash:***
Rupiah	4.047.219.979	5.093.916.506	*Rupiah*
Valuta Asing (2023: SGD 451,03 2022: USD 98,00 ; SGD 779,17)	5.282.346	10.625.981	*Foreign Currency (2023: SGD 451,03 2022: USD 98.00 ; SGD 779.17)*
Jumlah Kas	**4.052.502.325**	**5.104.542.487**	***Total Cash***
Bank:			***Bank:***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	217.475.518.385	72.519.388.891	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	197.126.092.338	241.591.376.261	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	15.563.940.308	13.589.228.733	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	3.781.896.822	102.437.947.376	*PT Bank Syariah Indonesia, Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	1.737.458.217	103.541.167.016	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
Sub Jumlah	**435.684.906.070**	**533.679.108.276**	***Sub Total***
Valuta Asing			*Foreign Exchange*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2023: USD 2.466.571 dan 2022: USD 2.246.421,98	38.024.659.923	35.338.464.167	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2023: USD 2.466.571 and 2022: USD 2,246,421.98)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (2023: USD 27.939,05; SGD 812,78; EUR 6.599,88 dan 2022: USD 27.936; SGD 8.211; EUR 6.630)	634.224.608	645.989.050	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (2023: USD 27.939,05; SGD 812,78; EUR 6.599,88 and 2022: USD 27.936; SGD 8.211; EUR 6.630)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2023: USD 10.714 dan (2022: USD 10.760 dan	165.163.941	169.279.089	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2023: USD 10.714 and (2022: USD 10,760 and*
PT Bank Jabar Banten, Tbk	15.232.475	15.324.221	*PT Bank Jabar Banten, Tbk*
Sub Jumlah	**38.839.280.947**	**36.169.056.527**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia, Tbk	625.753.551	619.607.028	*PT Bank Central Asia, Tbk*
Sub Jumlah	**625.753.551**	**619.607.028**	***Sub Total***
Jumlah Bank	**475.149.940.568**	**570.467.771.831**	***Total Bank***

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Deposito:			***Deposit:***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	1.014.755.214.515	900.000.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	781.423.304.498	876.604.687.930	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	741.097.707.024	425.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	431.668.841.177	601.668.841.177	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	46.425.000.000	61.925.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Jumlah Deposito	**3.015.370.067.214**	**2.865.198.529.107**	***Total Deposit***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**3.494.572.510.108**	**3.440.770.843.425**	***Total Cash & Equivalents***

Tingkatan bunga deposito Rupiah per tahun berkisar antara 3,25% - 7,00% pada tahun 2023 dan 3,25% - 6,75% pada tahun 2022.

The interest rate per year of Rupiah deposits ranged between 3,25% - 7,00% in 2023 and 3,25% - 6,75% in 2022.

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perseroan dan entitas anak dan tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaan.

The entire cash and cash equivalents of the Company and subsidiaries are not pledged as collateral for liabilities and other loans and there are no restrictions for use.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 41.

Explanations of related parties refer to Notes 41.

7. PIUTANG USAHA / *7. ACCOUNTS RECEIVABLE*

a. Berdasarkan Pelanggan / *a. Based on the Customer*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
PT Rumah Sakit Pelni	18.305.626.414	12.342.047.154	*PT Rumah Sakit Pelni*
PT Adhikarya	16.688.163.256	-	*PT Adhikarya*
PT Jembatan Nusantara	8.445.206.939	5.113.493.723	*PT Jembatan Nusantara*
Kementerian Perhubungan CQ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	8.169.761.989	-	*The Ministry of Transportation CQ Directorate General of Sea Transportation*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	8.115.482.777	8.103.632.777	*Health Foundation Pelni Pensioner*
PT Hakaaston	7.881.677.596	12.246.366.112	*PT Hakaaston*
PT Semen Indogreen Sentosa	6.114.263.118	-	*PT Semen Indogreen Sentosa*
Jasa Prima Logistik	2.110.678.934	-	*Jasa Prima Logistik*
Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	1.829.078.586	245.793.670	*Central Maritime Transport Traffic Safety Improvement Work Unit*
PT Telekomunikasi Seluler	1.233.546.730	1.338.540.250	*PT Telekomunikasi Seluler*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.093.148.035	1.215.711.924	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT PP Urban	1.037.171.496	1.237.171.496	*PT PP Urban*
PT Waskita Beton Precast (Persero)	1.067.443.000	1.107.700.000	*PT Waskita Beton*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	860.817.498	860.817.498	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT PINDAD Internasional	700.000.000	700.000.000	*PT PINDAD Internasional*
PT Petrokimia Gresik	-	910.267.434	*PT Petrokimia Gresik*
PT Pupuk Kaltim	-	834.321.750	*PT Pupuk Kaltim*
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	893.254.073	831.571.911	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah - dipindahkan	**84.545.320.441**	**47.087.435.699**	***Sub Total - carried forward***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

7. ACCOUNTS RECEIVABLE *(continued)*

a. Berdasarkan Pelanggan (lanjutan)

a. Based on the Customer *(continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Sub Jumlah - pindahan	**84.545.320.441**	**47.087.435.699**	***Sub Total - brought forward***
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
PT Lintang Daya Selaras	16.248.710.000	16.248.710.000	*PT Lintang Daya Selaras*
PT Putra Master	4.534.090.000	4.271.950.018	*PT Putra Master*
CV Tri Putra Mandiri	4.159.519.105	4.159.519.105	*CV Tri Putra Mandiri*
CV Indotrad Berkah Mandiri	1.884.456.112	1.884.456.112	*CV Indotrad Berkah Mandiri*
PT ASA Internasional Line	1.834.323.412	1.834.323.412	*PT ASA Internasional Line*
Linblad Expeditions LTD	1.632.824.430	-	Linblad Expeditions LTD
PT Cipta Batu Alam	1.515.662.512	-	*PT Cipta Batu Alam*
KAPP Nusa Wangi	1.494.245.378	1.216.058.000	*KAPP Nusa Wangi*
PT Dock dan Perkapalan Immaniar	1.427.249.956	-	*PT Dock and Immaniar Shippinng*
PT Daya Satria Nusantara	1.389.180.944	-	*PT Daya Satria Nusantara*
PT Parani Artamandiri	1.164.772.050	810.022.500	*PT Parani Artamandiri*
CV Anambas Expedisi	1.152.813.370	1.152.813.370	*CV Anambas Expedisi*
PT Cakrawala Inti Persada	1.100.000.000	1.100.000.000	*PT Cakrawala Inti Persada*
Alamsyah	975.312.465	975.512.466	*Alamsyah*
PT Tiga Lentera Abadi	930.000.000	930.000.000	*PT Tiga Lentera Abadi*
UD Putra Sanjaya Cileungsi	923.614.960	923.614.960	*UD Putra Sanjaya Cileungsi*
PT Pelayaran Putra Sejati	922.180.990	1.878.690.255	*PT Pelayaran Putra Sejati*
PT DHL Supply Chain Indonesia	919.207.263	1.839.291.774	*PT DHL Supply Chain Indonesia*
CV Fazza Mitra Usaha	840.790.750	840.790.750	*CV Fazza Mitra Usaha*
PT Prima Sejahtera Line	721.742.900	-	*PT Prima Sejahtera Line*
PT Equator Marindo	693.866.091	-	*PT Equator Marindo*
PT Karya Bangun Tiga Bersaudara	686.400.000	686.400.000	*PT Karya Bangun Tiga Bersaudara*
PT Karya Retra	683.981.360	683.981.360	*PT Karya Retra*
PT Geofreight Indonesia	676.381.628	676.381.628	*PT Geofreight Indonesia*
Harry Surabaya (MRT)	653.330.881	653.330.881	*Harry Surabaya (MRT)*
PT H.Hamzah	622.071.808	1.020.938.641	*PT H.Hamzah*
Logisly	606.436.947	-	*Logisly*
PT Selapura	596.394.528	-	*PT Selapura*
Travel PT PID	571.143.500	-	*Travel PT PID*
PT TPIL	569.051.182	-	*PT TPIL*
PT Aman Mandiri	560.988.351	688.988.350	*PT Aman Mandiri*
PT Surya Timur Line	511.106.000	-	PT Surya Timur Line
Sung Marine LTD	-	1.046.181.491	*Sung Marine LTD*
Zhongyu Ocean Shipping Co. LTD	-	1.041.417.586	*Zhongyu Ocean Shipping Co. LTD*
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	-	786.374.410	*PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk*
CV Malaeka Jaya Perkasa Log	-	752.107.650	*CV Malaeka Jaya Perkasa Log*
PT Atosim Lampung Pelayaran	-	616.541.651	*PT Atosim Lampung Pelayaran*
PT Dharma Satya Nusantara	-	581.867.858	*PT Dharma Satya Nusantara*
PT ALOIS Gumilang	-	572.503.544	*PT ALOIS Gumilang*
PT Pewete Bahtera Kencana	-	520.234.300	*PT Pewete Bahtera Kencana*
Lainnya (dibawah Rp500 juta)	35.470.206.781	31.017.894.775	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah	**88.672.055.654**	**81.410.896.849**	***Sub Total***
Jumlah - dipindahkan	**173.217.376.095**	**128.498.332.549**	***Total - carried forward***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / ***7. ACCOUNTS RECEIVABLE*** *(continued)*

a. Berdasarkan Pelanggan (lanjutan) / ***a. Based on the Customer*** *(continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Jumlah - pindahan	**173.217.376.095**	**128.498.332.549**	***Total - brought forward***
Dikurangi:			***Less:***
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(54.379.676.429)	(54.173.144.041)	*Provision for Impairment Losses*
Jumlah	**118.837.699.666**	**74.325.188.507**	***Total***

Piutang kepada YKPP merupakan piutang atas transaksi sewa ruangan, toko/kafe, mini teater di kapal dan pengelolaan lahan parkir di gedung Pelni Pusat.

Receivable to YKPP are receivables for rent, shop/cafe, mini theater transactions on board and management of parking lots in the central office.

Piutang kepada Kementerian Perhubungan CQ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan piutang atas penugasan pemerintah.

Receivables to the Ministry of Transportation CQ Directorate General of Sea Transportation are receivables from government assignments.

Piutang kepada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat merupakan piutang atas Kegiatan mudik gratis tahun 2023 dan tiket gratis penumpang kapal laut masa angkutan natal tahun 2023.

Receivables to Central Maritime Transport Traffic Safety Improvement Work Unit are receivables for free homecoming activities in 2023 and free tickets for sea ship passengers during Christmas transportation in 2023.

Piutang PT RS. Pelni merupakan tagihan iuran dana pensiun.

Receivables of PT RS. Pelni is a bill for pension contributions.

b. Berdasarkan Jenis Usaha / ***b. Based of Type Business***

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Perkapalan	24.823.906.411	16.370.119.097	*Shipping*
Perhotelan	59.159.671	126.411.208	*Hospitality*
Perbengkelan	21.161.098.947	16.334.371.122	*Workshop*
Usaha Lainnya	24.445.240.916	18.492.412.841	*Others*
Sub Jumlah	**70.489.405.945**	**51.323.314.268**	***Sub Total***
Dikurangi:			*Less:*
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(18.781.441.820)	(17.766.508.001)	*Provision for Expected Credit Loss*
Sub Jumlah	**51.707.964.125**	**33.556.806.267**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Sarana Bandar Nasional	90.077.137.080	72.122.969.807	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	12.650.833.071	5.052.048.474	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**102.727.970.151**	**77.175.018.281**	***Sub Total***
Dikurangi:			*Less:*
Provisi Penurunan Nilai	(35.598.234.610)	(36.406.636.040)	*Provision for Expected Credit Loss*
Sub Jumlah	**67.129.735.541**	**40.768.382.240**	***Sub Total***
Jumlah	**118.837.699.666**	**74.325.188.507**	***Total***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai selama tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

7. *ACCOUNTS RECEIVABLE* *(continued)*

Movements of provision for expected credit losses during 2023 and 2022 as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	54.173.144.041	48.672.726.685	*Beginning Balance*
Pembentukan (Pemulihan) Provisi	206.532.388	5.500.417.356	*Reserved (Recovery) Provision*
Saldo akhir	**54.379.676.429**	**54.173.144.041**	***Ending balance***

Terhadap piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak berelasi, perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

Toward accounts receivable from the related parties, the company did not set up a reserve provision for impairment as management believes the amount of such receivables are collectible.

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa provisi kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review at the end of the year management believes that the provision for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 41.

Explanations of related parties refer to Notes 41.

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

8. *OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Aset Kontrak	618.433.377.686	222.175.999.915	*Contract Asset*
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	180.457.832.318	175.789.710.702	*Restricted Cash and Cash Equivalent*
Piutang Lain-lain	12.072.041.452	10.751.867.981	*Other Receivables*
Penempatan Jangka Pendek	57.300.000	57.300.000	*Short-term Investment*
Jumlah	**811.020.551.456**	**408.774.878.598**	***Total***

a. Rincian Aset Kontrak

a. *Detail of Contract Asset*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Public Service Obligation (PSO) dan subsidi	455.802.130.622	130.930.965.100	*Public Service Obligation (PSO) and subsidies*
PT. Semen Indogreen Sentosa	73.432.043.258	-	*PT. Semen Indogreen Sentosa*
Bulog	3.984.116.400	-	*Bulog*
PT. Adhi Karya	532.617.005	14.249.606.106	*PT. Adhi Karya*
PT Hakaaston	1.031.407.690	4.316.401.230	*PT Hakaaston*
Usaha Penunjang	59.756.733.705	33.275.999.267	*Supporting Business*
Lainnya	23.894.329.006	39.403.028.212	*Others*
Jumlah	**618.433.377.686**	**222.175.999.915**	***Total***

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

a. Rincian Aset Kontrak (lanjutan)

Aset Kontrak Public Service Obligation (PSO) dan subsidi merupakan pendapatan PSO dan subsidi tahun berjalan yang belum terealisasi pencairan dananya sampai dengan akhir tahun berjalan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA – 999.07.1.985120/2023 pada tanggal 30 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 999.07.1.985120/2022 pada tanggal 18 November 2022.

Pendapatan usaha yang masih harus diterima PT Sarana Bandar Nasional merupakan pengakuan pendapatan atas kegiatan pelayanan bongkar muat tol laut, crane dan refeer container yang pada akhir Desember 2023 dan 2022. Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa, tidak perlu dilakukan pembentukan provisi kerugian penurunan nilai karena jangka waktu pekerjaan masih berlangsung setelah akhir tahun.

b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas setara kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu seperti bank garansi, jaminan pelaksanaan dan sebagainya yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS *(continued)*

a. Detail of Contract Asset *(continued)*

Public Service Obligation (PSO) and subsidy contract assets represent PSO income and subsidies for the current year whose disbursement of funds has not been realized until the end of the current year in accordance with the State General Treasurer's Budget Implementation List for Fiscal Year 2023 Number: DIPA – 999.07.1.985120/2023 on the date 30 December 2023 and Fiscal Year 2022 Number: SP DIPA – 999.07.1.985120/2022 on 18 November 2022

The accrued operating income of PT Sarana Bandar Nasional represents revenue recognition for loading and unloading services for sea tolls, cranes and refeer containers at the end of December 2023 and 2022. Based on the review at the end of the year, management is of the opinion that it is not necessary to establish a loss provision impairment due to the length of time the work is still ongoing after the end of the year.

b. Restricted Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents restricted cash equivalents represent cash reserved for specific purposes such as bank guarantees, performance bonds and so the term of 1 year or less. Cash and cash equivalents restricted as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Berelasi :			***Related Parties :***
Deposito – Rupiah			***Deposit - Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	160.000.000.000	160.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Sub Jumlah	**160.000.000.000**	**160.000.000.000**	***Sub Total***
Pihak Berelasi :			***Related Parties :***
Bank – Rupiah			***Deposit - Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	20.182.740.328	15.514.618.712	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Sub Jumlah	**20.182.740.328**	**15.514.618.712**	***Sub Total***

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya (lanjutan)

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Ketiga :			***Third Parties :***
Deposito – Rupiah			***Deposit - Rupiah***
PT Unilever Indonesia	145.000.000	145.000.000	*PT Unilever Indonesia*
Lainnya	130.091.990	130.091.990	*Others*
Sub Jumlah	**275.091.990**	**275.091.990**	***Sub Total***
Jumlah	**180.457.832.318**	**175.789.710.702**	***Total***

Deposito pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp160.000.000.000 merupakan dana Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2023 dan 2022.

Deposits of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk of Rp160,000,000,000 are State Equity Participation Fund as of December 31, 2023 and 2022.

c. Piutang Lain-lain

c. Other Receivables

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Berelasi :			***Related Parties :***
Pegawai	7.145.887.877	5.362.128.582	*Employee*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	1.530.400.369	1.530.400.369	*Health Foundation Pelni Pensioners*
Lainnya	1.010.563.899	883.136.056	*Others*
Sub Jumlah	**9.686.852.145**	**7.775.665.007**	***Sub Total***
Pihak Ketiga :			***Third Parties :***
Koperasi Karyawan Sejahtera	2.728.036.662	618.597.246	*Koperasi Karyawan Sejahtera*
PT Nirwana Lautan Cahaya	561.972.688	-	*PT Nirwana Lautan Cahaya*
PT Lazada	516.957.320	-	*PT Lazada*
Lainnya	5.917.582.318	6.487.383.686	*Others*
Sub Jumlah	**9.724.548.988**	**7.105.980.932**	***Sub Total***
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(7.339.359.681)	(4.129.777.958)	*Provision for Impairment Lesses*
Sub Jumlah	**(7.339.359.681)**	**(4.129.777.958)**	***Sub Total***
Jumlah	**12.072.041.452**	**10.751.867.981**	***Total***

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

c. Piutang Lain-lain (lanjutan)

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai tahun 2023 dan 2022, sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo Awal	4.129.777.958	5.282.612.292	*Beginning Balance*
Pembentukan Provisi	3.209.581.723	(1.152.834.334)	*Reserved Provision*
Saldo Akhir	**7.339.359.681**	**4.129.777.958**	***Ending Balance***

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS *(continued)*

c. Other Receivables *(continued)*

Movements of allowance for impairment losses of 2023 and 2022, as follows:

Based on a review at the end of the year, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on other receivables uncollectible.

d. Penempatan Jangka Pendek

d. Short Term Investment

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	57.300.000	57.300.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**57.300.000**	**57.300.000**	***Total***

Merupakan penempatan deposito berjangka milik entitas anak PT Pelita Indonesia Djaya yang tidak dijaminkan sebesar Rp57.300.000 berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan namun tidak lebih dari dua belas bulan dengan tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 3,5% dan 7,00% untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Represents time deposits placements owned by subsidiaries PT Pelita Indonesia Djaya that are not pledged as collateral amounting to Rp57,300,000 with maturities of more than 3 (three) months but not more than twelve months with an annual interest rate on Rupiah deposits of 3.5% and 7.00% for the following year. ends December 31, 2023 and 2022.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 41.

Explanations of related parties refer to Notes 41.

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Suku cadang	269.789.430.518	307.921.658.918	*Spareparts*
Bahan bakar	46.613.462.850	46.978.691.283	*Fuel*
Pelumas	21.245.370.330	32.570.142.569	*Lubricants*
Makanan	8.935.096.280	6.461.837.137	*Food*
Tiket Penumpang	899.307.052	959.773.574	*Passenger Ticket*
Lainnya	270.974.929	377.257.908	*Others*
Sub Jumlah	**347.753.641.959**	**395.269.361.389**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Sarana Bandar Nasional	17.459.931.482	19.094.512.019	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	10.249.374.218	9.880.441.616	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**27.709.305.700**	**28.974.953.635**	***Sub Total***
Jumlah	**375.462.947.659**	**424.244.315.024**	***Total***

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kemalingan dan resiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perseroan terletak pada beberapa lokasi sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah tidak signifikan.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset dan tidak terdapat persediaan usang pada komponen aset lancar.

Persediaan usang telah dilakukan reklasifikasi kedalam aset tidak lancar lainnya.

***9. INVENTORIES** (continued)*

Inventories are not insured against fire, burglary and other risks. Management believes that, the company's inventory is located in several locations so the possibility of a loss in the same time to multiple locations is not significant.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed replacement or recovery value of assets and there are no obsolete inventories in current assets component.

Inventory obsolescence is reclase into other noncurrent assets.

10. PERPAJAKAN / ***10. TAXATION***

a. Pajak Dibayar Dimuka / ***a. Prepaid Taxes***

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Pajak Penghasilan Pasal 28(a)	-	3.720.775.594	*Income Tax Article 28(a)*
Pajak Lainnya	12.140.886.119	15.702.564.883	*Other Tax*
Sub Jumlah	**12.140.886.119**	**19.423.340.477**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Pajak Penghasilan	491.977.026	8.242.956.735	*Income Tax*
Pajak Pertambahan Nilai	27.333.734.212	69.510.555.357	*Value Added Tax*
Sub Jumlah	**27.825.711.238**	**77.753.512.092**	***Sub Total***
Jumlah	**39.966.597.357**	**97.176.852.569**	***Total***

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sedang dalam pemeriksan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat tentang Pengujian Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dengan No: PRIN-253/RIKSIS/KPP.1904/2023, tanggal 5 Juli 2023, untuk masa pajak 2022.

As of the publication of this report, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) is currently under tax audit by the Tax Service Office of the Four Largest Taxpayers regarding Compliance Testing for Compliance with Tax Obligations with No: PRIN-253/RIKSIS/KPP.1904/2023 on July 5, 2023, for the 2022 tax period.

Pada tanggal 20 Juni 2023, perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan untuk masa pajak 2021 dengan nomor: 00035/406/21/093/23 sebesar Rp6.080.248.220 di tahun 2023.

On June 20, 2023, the company received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for Income Tax for the 2020 tax period with number: 00035/406/21/093/23 in the amount to Rp6.080.248.220 in 2023.

Pajak dibayar dimuka atas pajak lainnya merupakan pajak PPh Badan Tahunan yang lebih dibayar oleh Perseroan, dimana dilakukan restitusi Peseroan.

The prepaid tax on other taxes is the Annual Corporate Income Tax which is overpaid by the Company, where the Company's restitution is made.

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXATION*** *(continued)*

b. Utang Pajak / ***b. Tax Payable***

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Pajak Pertambahan Nilai	12.081.040.532	13.488.905.278	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 15	2.603.551.420	248.741.989	*Tax Income Article 15*
Pajak Penghasilan Pasal 21	21.695.025.028	7.021.967.098	*Tax Income Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.771.795.716	2.005.761.218	*Tax Income Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.778.583.172	2.430.518.094	*Tax Income Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	287.517.675	287.574.374	*Tax Income Article 25*
Pajak Penghasilan Pasal 29	3.422.178.368	-	*Tax Income Article 29*
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	242.003.776	202.556.535	*Tax Income Article 4 Paragraph 2*
Pajak Daerah	37.039.062	67.124.686	*Local Tax*
Sub Jumlah	**44.918.734.749**	**25.753.149.272**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Pajak Pertambahan Nilai	9.797.236.432	46.745.948.277	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 15	-	780.300	*Tax Income Article 15*
Pajak Penghasilan Pasal 21	759.110.018	1.515.924.799	*Tac Income Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 23	34.564.398	16.961.630	*Tax Income Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	352.654.408	506.280.548	*Tax Income Article 25*
Pajak Penghasilan Pasal 29	3.393.298.873	3.747.838.403	*Tax Income Article 29*
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat2	54.511.503	42.671.252	*Tax Income Article 4 Paragraph 2*
Pajak Lainnya	30.599.955	46.051.405	*Other Tax*
Sub Jumlah	**14.421.975.587**	**52.622.456.614**	***Sub Total***
Jumlah	**59.340.710.336**	**78.375.605.886**	***Total***

c. Beban (Manfaat) Pajak / ***c. Tax Expense (Benefit)***

	2023	2022	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Beban Pajak Final	60.355.982.838	77.044.694.678	*Final Tax Expense*
Beban Pajak Kini	13.140.119.581	5.013.589.936	*Current Tax Expense*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(3.375.013.543)	(1.821.873.487)	*Deffered Tax Expense (Benefits)*
Sub Jumlah	**70.121.088.876**	**80.236.411.127**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Beban PajakTangguhan	347.857.464	(2.085.565.051)	*Deffered Tax Expense*
Beban Pajak Kini	26.420.677.374	22.625.661.973	*Current Tax Expense*
Sub Jumlah	**26.768.534.838**	**20.540.096.922**	***Sub Total***
Jumlah	**96.889.623.714**	**100.776.508.049**	***Total***

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXATION*** *(continued)*

d. Rekonsiliasi Fiskal / ***d. Fiscal Reconciliation***

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan entitas Induk	**271.322.936.527**	**253.484.337.704**	***Profit before income tax of the Parent Entity***
Bagian laba entitas anak yang telah dipungut pajak penghasilan dan PPh Final	(109.079.263.413)	(97.772.646.546)	*Income from subsidiaries And Final tax*
Sub Jumlah	**162.243.673.114**	**155.711.691.158**	***Sub Total***
Perbedaan Temporer:			***Temporary Differrences:***
Liabilitas imbalan pasca kerja	9.987.544.473	5.860.101.235	*Employee Benefits Liability*
Penyisihan piutang usaha	4.860.332.745	1.871.776.213	*Receivable Allowance*
Penyusutan aset tetap	493.093.432	549.365.675	*Fixed Assets Depreciation*
Sub Jumlah	**15.340.970.650**	**8.281.243.123**	***Sub Total***
Perbedaan Permanen:			***Permanent Differences:***
PPh 21 ditanggung Entitas	31.581.876.065	19.566.045.617	*Income tax article 21 by entity*
Beban pemasaran	8.652.577.534	8.747.139.455	*Marketing expenses*
Pendapatan di luar usaha lainnya	(172.016.836.032)	(143.137.439.225)	*Other revenues*
Sub Jumlah	**(131.782.382.433)**	**(114.824.254.153)**	***Sub Total***
Beban (Pendapatan) terkait yang telah dikenakan Pajak Final:			***Related Expenses (Income) that have been charged Final Tax:***
PPh final Usaha perkapalan	(1.742.784.338.816)	(1.408.126.525.442)	*Income Tax Shipping*
Penghasilan PSO	(3.445.326.954.781)	(3.010.560.824.508)	*PSO Income*
Usaha sampingan	(8.005.662.311)	(25.726.010.230)	*Other Income*
Pendapatan deposito dan jasa giro	(105.630.921.759)	(46.309.799.591)	*Deposit income and current accounts*
Beban usaha perkapalan	4.517.799.236.944	3.853.639.454.931	*Shipping businessess expenses*
Beban *overhead*	728.088.558.221	577.672.607.236	*Overhead expenses*
Beban terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final	46.409.364.941	19.112.567.758	*Expenses related to income subject to Final tax*
Sub Jumlah	**(9.450.717.561)**	**(40.298.529.846)**	***Sub Total***
Penghasilan Kena Pajak	**36.351.543.770**	**8.870.150.282**	***Taxable Income***
Pajak Penghasilan Badan Terutang	**7.997.339.460**	**1.951.433.000**	***Corporate Income Tax***
Kredit Pajak:			*Tax Deduction :*
Pajak Penghasilan Pasal 22	4.088.381.394	3.806.729.487	*Income Tax Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 23	352.729.582	293.557.121	*Income Tax Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	134.050.116	1.571.921.986	*Income Tax Article 25*
Sub Jumlah	**4.575.161.092**	**5.672.208.594**	***Sub Total***
Pajak Penghasilan Badan (Kurang) Lebih Bayar	**(3.422.178.368)**	**3.720.775.594**	***Corporate Income Corporate (Less) Overpayment***
Beban Pajak Penghasilan Kini:			***Current Income Tax Expense:***
Entitas Induk	7.997.339.460	1.951.433.000	***Parent Entity***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Sarana Bandar Nasional	15.402.554.000	14.419.495.860	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	10.927.846.917	8.100.249.740	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**26.330.400.917**	**22.519.745.600**	***Sub Total***
Jumlah	**34.327.740.377**	**24.471.178.600**	***Total***

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

***10. TAXATION** (continued)*

e. Pajak Tangguhan

e. Deffered Taxes

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Dibebankan ke Laba (Rugi)/ *Charged to Profit (Loss)***	**Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Other Comprehensive Income***	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Entitas Induk:/ *Parent Entity :*					
Penurunan Nilai Piutang/*Expected Credit Loss of Receivables*	4.776.065.730	1.069.273.204			5.845.338.933
Penyusutan Aset Tetap/*Depreciation of Fixed Assets*	5.363.968.240	108.480.555			5.472.448.795
Liabilitas Imbalan Kerja/ *Liability for Employee Benefits*	41.572.970.641	2.197.259.784			43.770.230.425
Sub Jumlah/*Sub Total*	**51.713.004.610**	**3.375.013.543**	**-**	**-**	**55.088.018.153**
Entitas Anak/*Subsidiaries* :					
PT Sarana Bandar Nasional	14.288.981.491	(767.739.972)	(38.162.234)		13.483.079.285
PT Pelita Indonesia Djaya	2.764.657.153	419.882.507	(94.995.186)		3.089.544.474
Sub Jumlah/*Sub Total*	**17.053.638.644**	**(347.857.465)**	**(133.157.420)**	**-**	**16.572.623.759**
Jumlah/*Total*	**68.766.643.254**	**3.027.156.078**	**(133.157.420)**	**-**	**71.660.641.912**

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Dibebankan ke Laba (Rugi)/ *Charged to Profit (Loss)***	**Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Other Comprehensive Income***	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Entitas Induk:/ *Parent Entity :*					
Penurunan Nilai Piutang/*Expected Credit Loss of Receivables*	4.364.274.963	411.790.767	-	-	4.776.065.730
Penyusutan Aset Tetap/*Depreciation of Fixed Assets*	5.243.107.791	120.860.448	-	-	5.363.968.240
Liabilitas Imbalan Kerja/ *Liability for Employee Benefits*	40.283.748.369	1.289.222.272	-	-	41.572.970.641
Sub Jumlah/*Sub Total*	**49.891.131.123**	**1.821.873.487**	**-**	**-**	**51.713.004.610**
Entitas Anak/*Subsidiaries* :					
PT Sarana Bandar Nasional	12.716.624.299	76.708.331	(108.411.394)	1.604.060.255	14.288.981.491
PT Pelita Indonesia Djaya	2.925.294.191	568.821.875	(729.458.913)	-	2.764.657.153
Sub Jumlah/*Sub Total*	**15.641.918.490**	**645.530.206**	**(837.870.307)**	**1.604.060.255**	**17.053.638.644**
Jumlah/*Total*	**65.533.049.613**	**2.467.403.693**	**(837.870.307)**	**1.604.060.255**	**68.766.643.254**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

Sesuai Undang-undang No. 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab III, pasal 17 ayat (2), bahwa tarif pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebelumnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020, antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022.

***10. TAXATION** (continued)*

f. Administration

In accordance with Law no. 7 of 2021, concerning Harmonization of Tax Regulations, Chapter III, article 17 paragraph (2), that the tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent business forms is 22% which will take effect in the 2022 tax year. Previously the government issued a government regulation in lieu of law Invite No. 1 of 2020, including reducing the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for the 2020 and 2021 fiscal years, and to 20% since the 2022 fiscal year.

11. UANG MUKA / ***11. ADVANCES PAYMENT***

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Perkapalan	84.541.973.277	15.517.961.496	*Shipping*
Administrasi dan umum	11.219.207.510	6.514.100.404	*General and Administrative*
Penunjang	1.185.699.801	1.894.200.888	*Agency*
Sub Jumlah	**96.946.880.588**	**23.926.262.788**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Sarana Bandar Nasional	29.434.317.965	4.275.434.044	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	28.506.852.292	21.756.677.977	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**57.941.170.257**	**26.032.112.021**	***Sub Total***
Jumlah	**154.888.050.845**	**49.958.374.809**	***Total***

Uang muka perkapalan yang tercatat pada entitas induk merupakan pemberian uang muka atas transaksi pembelian suku cadang kapal.

Shipping advances recorded on the parent entity is the provision of advance payment on the purchase transaction of the ship parts.

Uang muka perkapalan di biayai melalui fasilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan uraian ringkas perjanjian fasilitas sebagai berikut:

Shipping advances purchased through the facilities of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, with a brief description of the facility agreement as follows:

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 005/BIN/PK-KMK/2019 dengan nilai kredit maksimum Rp300.000.000.000.

Approval of Amendment to Credit Agreement No. (4) 005/BIN/PK-KMK/2019 with a maximum credit value of IDR 300,000,000,000.

Perjanjian antara PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang diberikan dalam bentuk *plafond/revolving* yang ditujukan untuk kegiatan operasional/aktivitas usaha pelayaran perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.

Agreement between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., with PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) given in the form of a ceiling/revolving which is intended for operational activities/business activities of the company's shipping with a period of up to July 25, 2023.

11. UANG MUKA (lanjutan)

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 005/BIN/PK-KMK/2019 dengan nilai kredit maksimum Rp300.000.000.000. (lanjutan)

Tanggal 28 Juli 2022, persetujuan perubahan perjanjian fasilitas kredit tidak langsung dinyatakan mulai tanggal 26 Juli 2022 dan diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas atau terhitung sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.

Tanggal 28 Juli 2023, persetujuan perubahan perjanjian fasilitas kredit tidak langsung dinyatakan mulai tanggal 26 Juli 2023 dan diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas atau terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Perjanjian No.006/BIN/PFKTL/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit tidak langsung antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Fasilitas kredit tidak langsung diberikan dalam bentuk *plafond/revolving* . Bank memberikan fasilitas kredit tidak langsung dengan tujuan untuk:

a. Pembukaan LC/SKBDN Sight, Usance, UPAS untuk pengadaan *sparepart* kapal.
b. Penerbitan Garansi Bank dan/atau SBLC untuk jaminan tender, uang muka pemeliharaan, pelaksanaan sesuai kontrak yang diperoleh.

Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. (4) 006/BIN/PFKTL/2019 dengan nilai kredit maksimum Rp115.000.000.000.

Maksimum fasilitas kredit tidak langsung yang diberikan sebesar Rp115.000.000.000 (seratus lima belas miliar rupiah). Jangka waktu permohonan fasilitas kredit tidak langsung dapat diajukan selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini atau terhitung sejak tanggal 26 Juli 2019 - 25 Juli 2020.

Tanggal 28 Juli 2022, persetujuan perubahan perjanjian fasilitas kredit tidak langsung dinyatakan mulai tanggal 26 Juli 2022 dan diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas atau terhitung sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.

Tanggal 28 Juli 2023, persetujuan perubahan perjanjian fasilitas kredit tidak langsung dinyatakan mulai tanggal 26 Juli 2023 dan diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas atau terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

11. ADVANCES PAYMENT *(continued)*

Approval of Amendment to Credit Agreement No. (3) 005/BIN/PK-KMK/2019 with a maximum credit value of IDR 300,000,000,000. *(continued)*

On July 28, 2022, the approval of the amendment to the indirect credit facility agreement is declared starting on July 26, 2022 and extended for 12 (twelve) months from the maturity of the facility or starting from July 26, 2021 until July 25, 2023.

On July 28, 2023, the approval of the amendment to the indirect credit facility agreement is declared starting on July 26, 2023 and extended for 12 (twelve) months from the maturity of the facility or starting from July 26, 2023 until July 25, 2024.

Agreement No.006 / BIN / PFKTL / 2019 dated July 26, 2019 regarding the approval of the provision of indirect credit facilities between PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk and PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Indirect credit facilities are provided in the form of ceiling / revolving. The Bank provides indirect credit facilities with the aim to:

a. Opening LC / SKBDN Sight, Usance, UPAS for procurement of ship spareparts.
b. Publishing Bank Guarantees and/or SBLC for tender guarantees, maintenance advances, performance according to contracts obtained.

Approval of Amendment to Indirect Credit Facility Agreement No. (4) 006/BIN/PFKTL/2019 with a maximum credit value of Rp115,000,000,000.

Maximum indirect credit facilities granted are Rp115,000,000,000 (one hundred and fifteen billion rupiah). The application period for indirect credit facilities can be submitted for 12 (twelve) months from the signing of this agreement or starting from July 26, 2019 - July 25, 2020.

On July 28, 2022, the approval of the amendment to the indirect credit facility agreement is declared starting on July 26, 2022 and extended for 12 (twelve) months from the maturity of the facility or starting from July 26, 2022 until July 25, 2023.

On July 28, 2023, the approval of the amendment to the indirect credit facility agreement is declared starting on July 26, 2023 and extended for 12 (twelve) months from the maturity of the facility or starting from July 26, 2023 until July 25, 2024.

11. UANG MUKA (lanjutan)

Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. (3) 006/BIN/PFKTL/2019 dengan nilai kredit maksimum Rp115.000.000.000.(lanjutan)

Aset yang menjadi agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1864 tanggal 28 Agustus 2007, seluas 16.293M2 sesuai Surat Ukur Nomor 00026/2007 tanggal 18 April 2007, terdaftar atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT PELNI (Persero) berkedudukan di Jakarta, terletak di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yang menurut sifat maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak berikut segala turutan-turutannya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai sebesar Rp437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Uang muka administrasi dan umum merupakan uang muka operasional unit-unit kerja di lingkungan PT PELNI (Persero).

Uang muka yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan uang muka yang dibayarkan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Uang muka yang tercatat pada entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) merupakan uang muka yang dibayarkan divisi komersial untuk membeli bahan makanan yang akan dikirim ke kapal-kapal PT PELNI (Persero), uang muka yang dibayarkan kepada Divisi Jasa Maintenance & IT, Pelayanan Jasa, Komersial untuk swakelola pekerjaan perbaikan diatas kapal-kapal PT Pelni (Persero), Uang muka jasa kebersihan di kapal merupakan alat penunjang kebersihan diatas kapal-kapal PT Pelni (Persero).

Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Treasury Line No. (3) 42/BIN/PPFTL/2020 dengan nilai kredit maksimum USD 1.500.000

Maksimum fasilitas kredit tidak langsung yang diberikan sebesar USD 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat). Jangka waktu permohonan fasilitas kredit tidak langsung dapat diajukan selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini atau terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 - 25 Juli 2024.

***11. ADVANCES PAYMENT** (continued)*

***Approval of Amendment to Indirect Credit Facility Agreement No. (3) 006/BIN/PFKTL/2019 with a maximum credit value of Rp115,000,000,000.** (continued)*

Assets which become collateral in the form of Certificate of Building Use Rights (SHGB) Number 1864 dated August 28, 2007 covering an area of 16,293M2 in accordance with Measurement Letter Number 00026/2007 dated April 18, 2007 registered under the name of PT Pelayaran Nasional Indonesia Company abbreviated as PT PELNI (Persero) domiciled in Jakarta, located in North Petojo Sub District, Gambir Sub District, Central Jakarta City DKI Jakarta Province including buildings, plants and works that have been and/or will be existing standing and embedded which constitute a unity with the said land which according to their nature purpose and designation as well as statutory provisions considered to be immovable objects along with all their derivatives, shall be burdened with a Mortgage Right of I (First) with a value of Rp437,500,000 (four hundred thirty seven billion five hundred million rupiah).

Administrative and general advances represent operational advances for work units within PT PELNI (Persero).

Advances in the subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) is an advance payment paid for the company's operational activities.

Advances recorded at a subsidiary (PT Pelita Indonesia Djaya) represent advances paid by the commercial division to purchase food ingredients to be sent to PT PELNI (Persero) ships, down payments paid to the Maintenance & IT Service Division, Commercial Services for self-management of repair work on PT Pelni (Persero) ships, Advances for cleaning services on ships are a means of supporting cleanliness on ships PT Pelni (Persero).

Approval of Amendment to Treasury Line Credit Facility Agreement No. (3) 42/BIN/PPFTL/2020 with a maximum credit value of USD 1,500,000.

The maximum indirect credit facility granted is USD 1,500,000.00 (one million five hundred thousand United States dollars). The period of application for indirect credit facilities can be submitted for 12 (twelve) months from the signing of this agreement or starting from July 26, 2023 - July 25, 2024.

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *PREPAID EXPENSES*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Usaha Perkapalan	16.482.928.900	31.051.678.664	*Shipping*
Umum dan Administrasi	201.036.856	193.227.689	*General and Administrative*
Usaha Perhotelan	65.840.829	56.333.299	*Hotel*
Sewa	152.337.022	739.074.343	*Rent*
Lainnya	22.150.495.801	19.745.651.577	*Other*
Sub Jumlah	**39.052.639.408**	**51.785.965.572**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	27.911.528.711	17.450.417.259	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	331.503.669	476.697.781	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**28.243.032.380**	**17.927.115.040**	***Sub Total***
Jumlah	**67.295.671.788**	**69.713.080.612**	***Total***

Biaya dibayar dimuka usaha perkapalan merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional usaha perkapalan.

Prepaid shipping costs are costs related to shipping business operational activities.

Biaya dibayar dimuka umum dan administrasi merupakan biaya yang berkenaan dengan kegiatan operasional umum dan administrasi, seperti imbalan kerja dan asuransi.

Prepaid general and administrative expenses are expenses related to general operational activities and administration, such as employee benefits and insurance.

Biaya dibayar dimuka pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pelabuhan, seperti kegiatan ekpedisi muatan kapal laut dan kegiatan operasional dipelabuhan lainnya yang telah dibayarkan namun pada akhir tahun buku, jasa belum seluruhnya dapat dimanfaatkan, dan akan ditagihkan setelah pekerjaan selesai.

Prepaid expenses to a subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) are costs related to port operational activities, such as shiploading expedition activities and other port operations that have been paid but at the end of the financial year, services have not been fully utilized, and will be billed after the job is done.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *INVESTMENT IN ASSOCIATES*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
PT. Rumah Sakit Pelni	240.324.819.715	208.284.214.875	*PT. Rumah Sakit Pelni*
Jumlah	**240.324.819.715**	**208.284.214.875**	***Total***

Mutasi nilai penyertaan saham pada PT RS. Pelni untuk tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Changes in the value of equity participation in PT RS. Pelni for 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	208.284.214.875	196.333.983.575	*Beginning Balance*
Dividen	-	(17.984.141.674)	*Dividen*
Laba tahun berjalan	32.401.750.716	29.777.496.890	*Profit for the Current Year*
Laba Komprehensif	(361.145.876)	156.876.084	*Compherensive Income*
Saldo Akhir	**240.324.819.715**	**208.284.214.875**	***Ending Balance***

14. PROPERTI INVESTASI / *14. INVESTMENT PROPERTIES*

	2023				
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Addition***	**Pengurangan/** ***Reduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***
Entitas Induk/ ***Parent Entity***					
Tanah/*Land*	132.329.700.000	6.217.005.000	-	3.335.000	138.550.040.000
Gedung/*Building*	21.168.600.000	998.645.000	-	3.945.000	22.171.190.000
Sub Jumlah/Sub *Total*	**153.498.300.000**	**7.215.650.000**	**-**	**7.280.000**	**160.721.230.000**
Entitas Anak/ ***Subsidiary***					
Tanah/*Land*	17.861.054.614	2.441.362.386	-	-	20.302.417.000
Gedung/*Building*	2.080.475.001	834.107.999	-	-	2.914.583.000
Sub Jumlah/Sub *Total*	**19.941.529.615**	**3.275.470.385**	**-**	**-**	**23.217.000.000**
Jumlah/*Total*	**173.439.829.615**	**10.491.120.385**	**-**	**7.280.000**	**183.938.230.000**

	2022				
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Addition***	**Pengurangan/** ***Reduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***
Entitas Induk/ ***Parent Entity***					
Tanah/*Land*	127.742.930.000	4.586.770.000	-	-	132.329.700.000
Gedung/*Building*	19.586.240.001	1.582.359.999	-	-	21.168.600.000
Sub Jumlah/*Sub Total*	**147.329.170.001**	**6.169.129.999**	-	-	**153.498.300.000**
Entitas Anak/ ***Subsidiary***					
Tanah/*Land*	15.294.363.615	2.566.690.999	-	-	17.861.054.614
Gedung/*Building*	1.748.000.000	332.475.001	-	-	2.080.475.001
Sub Jumlah/*Sub Total*	**17.042.363.615**	**2.899.166.000**	-	-	**19.941.529.615**
Jumlah/*Total*	**164.371.533.616**	**9.068.295.999**	-	-	**173.439.829.615**

Penilaian atas nilai wajar properti investasi pada entitas induk untuk tahun berjalan dilakukan oleh penilai independen berdasarkan laporannya Nomor 00726/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023, 00727/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023, dan 00731/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023 masing-masing untuk properti investasi yang terletak di Medan untuk gedung kantor, rumah dinas dan Ampenan.

The valuation of the fair value of investment properties in the parent entity for the current year is carried out by an independent appraiser based on his reports Number 00726/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023, 00727/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023, dan 00731/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023 respectively for investment properties located in Medan for office building and official residence and Ampenan.

Kenaikan bersih nilai wajar properti investasi milik Entitas Induk PT Pelayaran Indonesia (Persero) sebesar Rp1.054.940.000 diakui sebagai pendapatan non usaha dan sebesar Rp6.164.655.000 diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

The net increase in the fair value of investment properties owned by the Parent Entity PT Pelayaran Indonesia (Persero) amounting to Rp1.054.940.000 was recognized as non-business income, and Rp6.164.655.000 was recognized as other

14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Penilaian nilai wajar properti investasi yang berlokasi di Surabaya dan Makassar didasarkan pada estimasi yang dilakukan oleh manajemen. Mendasar pada pertimbangan bahwa:

a. Tanah memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas sehingga nilai wajar tanah tidak mengalami penurunan, selain disebabkan hal-hal diluar kendali. Sehingga nilai wajar tanah akan mengalami peningkatan mengikuti perkembangan pasar dan perubahan lingkungan disekitarnya.
b. Bangunan memiliki umur ekonomis yang terbatas, sehingga nilai wajar bangunan cenderung mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan fisik bangunan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan perhitungan tahun-tahun sebelumnya, manajemen mengestimasi bahwa tanah mengalami kenaikan sebesar 5% dari nilai tercatatnya dan bangunan mengalami penurunan 5% dari nilai tercatatnya.

Penilaian atas nilai wajar properti investasi pada entitas Induk tahun berjalan yang dilakukan oleh manajemen menghasilkan kenaikan nilai tanah sebesar Rp525.900.000 sedangkan untuk bangunan mengalami penurunan nilai wajarnya sebesar Rp609.000.000, sehingga secara bersih mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp83.100.000 diakui sebagai beban non-usaha.

Penilaian atas nilai wajar properti investasi pada entitas anak PT Pelita Indonesia Djaya untuk tahun berjalan dilakukan oleh penilai independen berdasarkan laporannya Nomor 00151/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023, Nomor 00152/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023 dan Nomor 00153/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023, masing-masing tanggal 28 Desember 2023. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan Rp3.275.470.385 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya.

14. INVESTMENT PROPERTIES *(continued)*

The fair value valuation of investment properties located in Surabaya and Makassar is based on estimates made by management. Based on the consideration that:

a. Land has an indefinite economic life so that the fair value of the land does not decrease, other than due to things beyond control. So that the fair value of the land will increase following market developments and changes in the surrounding environment.

b. Buildings have a limited economic life, so the fair value of the building tends to decrease which is influenced by the condition or physical condition of the building.

Based on the above considerations and calculations from previous years, management estimates that land has increased by 5% from its carrying value and buildings located in Ampenan have decreased by 5% from their carrying value and buildings located have decreased by 5%.

The assessment of the fair value of investment properties in the Parent entity for the current year carried out by management resulted in an increase in the land value of Rp525.900.000, while the building experienced a decrease in fair value of Rp609.000.000, so that on a net basis the decrease in fair value of Rp83.100.000 was recognized as a non-expense. -business.

The assessment of the fair value of investment property in a subsidiary PT Pelita Indonesia Djaya for the current year was carried out by an independent appraiser based on report Number 00151/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023, Number 00152/2.0167-05/ PI/05/0638/I/XII/2023 and Number 00153/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023, respectively dated 28 December 2023. Increase in the fair value of land and buildings Rp. 3,275,470,385 recognized as a fair value surplus gain in the non-business income group in the year in which it occurs.

	2023					
	Nilai Tercatat/ *Book Value*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar/ *Increase*		
Entitas Induk						***Parent Entity***
Tanah	132.329.700.000	3.335.000	138.550.040.000	6.217.005.000		*Land*
Gedung	21.168.600.000	3.945.000	22.171.190.000	998.645.000		*Building*
Sub Jumlah	**153.505.580.000**	**7.280.000**	**160.721.230.000**	**7.215.650.000**	***Sub Total***	
Entitas Anak						***Subsidiary***
Tanah	17.861.054.614	-	20.302.417.000	2.441.362.386		*Land*
Gedung	2.080.475.001	-	2.914.583.000	834.107.999		*Building*
Sub Jumlah	**19.941.529.615**	-	**23.217.000.000**	**3.275.470.385**	***Sub Total***	
Jumlah	**173.447.109.615**	**7.280.000**	**183.938.230.000**	**10.491.120.385**	***Total***	

14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Penilaian atas nilai wajar properti investasi pada entitas anak PT Pelita Indonesia Djaya untuk tahun 2022 dilakukan oleh penilai independen berdasarkan laporannya Nomor 00152/2.0167-05/PI/05/0638/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023, untuk tanah dan bangunan yang berlokasi di Wisma Bahtera Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan, serta Nomor 00148/2.0004-01/PI/09/0378/1/II.2023, tanggal 20 February 2023, untuk tanah dan bangunan yang berlokasi di Perak Timur, Surabaya.

Penilaian atas nilai wajar properti investasi pada entitas induk untuk tahun 2022 oleh penilai independen berdasarkan laporannya Nomor 00566/2.0053-00/PI/06/0095/1/XII/2022, 00567/2.0053-00/PI/06/0095/1/XII/2022 dan 00568/2.0053-00/PI/05/0095/1/XII/2022 masing-masing untuk Properti Investasi yang terletak di Medan, Makassar dan Ampenan.

***14. INVESTMENT PROPERTIES** (continued)*

The assessment of the fair value of investment properties in the subsidiary (PT Pelita Indonesia Djaya) for 2022 was carried out by an independent appraiser based on his report Number 00152/2.0167-05/PI/05/0638/XII/2023, dated December 28, 2023, to land and buildings located at Wisma Bahtera Tretes, Prigen, Pasuruan Regency, and Number00148/2.0004-01/PI/09/0378/1/II.2023, dated February 20, 2023, for land and buildings located in Perak Timur, Surabaya.

Assessment of the fair value of investment properties in the parent entity for 2022 by an independent appraiser based on report Number 00566/2.0053-00/PI/06/0095/1/XII/2022, 00567/2.0053-00/PI/06/0095/1/XII/2022 and 00568/2.0053-00/PI/05/0095/1/XII/2022 respectively for Investment Properties located in Medan, Makassar and Ampenan.

	2022			
	Nilai Tercatat/ *Book Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar/ *Increase (Decrease) of Fair Value*	
Entitas Induk				***Parent Entity***
Tanah	127.742.930.001	132.329.700.000	4.586.769.999	*Land*
Bangunan	19.586.240.000	21.168.600.000	1.582.360.000	*Building*
Sub Jumlah	**147.329.170.001**	**153.498.300.000**	**6.169.129.999**	***Total***
Entitas Anak				***Subsidiary***
Tanah	15.294.363.615	17.861.054.614	2.566.690.999	*Land*
Gedung	1.748.000.000	2.080.475.001	332.475.001	*Building*
Sub Jumlah	**17.042.363.615**	**19.941.529.615**	**2.899.166.000**	***Sub Total***
Jumlah	**164.371.533.616**	**173.439.829.615**	**9.068.295.999**	***Total***

Kenaikan bersih nilai wajar properti investasi sebesar Rp9.068.295.999 diakui sebagai pendapatan non usaha.

The net increase in the fair value of the investment property amounting to Rp9.068.295.999 was recognized as non-operating income.

Manajemen berkeyakinan bahwa kenaikan dan penurunan atas properti investasi tanah dan bangunan di kedua lokasi tersebut telah mencerminkan nilai wajarnya.

Management believes that the increase and decrease in the investment properties of land and buildings in these two locations have reflected their fair values.

Tidak terdapat properti investasi yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman/kewajiban lainnya dan properti investasi berupa gedung diasuransikan.

There are no investment properties that are pledged as collateral to other loans/liabilities and investment properties in the form of insured buildings.

Berdasarkan hasil evaluasi, mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi.

Based on evaluation of regarding the recoverable value on December 31, 2023 and 2022, the company believes that there are changes in circumstances indicate impairment of investment property.

15. ALAT PRODUKSI / *15. PRODUCTION EQUIPMENT*

	2023				
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Addition***	**Pengurangan/** ***Reduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***
Biaya Perolehan/ ***Acquisition Cost:***					
Perolehan Langsung/ ***Direct Acquisition***					
Kapal Penumpang/ *Passanger Ship*	8.306.137.056.172	117.450.548.029	-	(18.320.059.320)	8.405.267.544.881
Kapal Kargo/*Cargo Ship*	460.664.245.248	711.468.500	(12.879.436.045)	-	448.496.277.703
Kontainer/*Container*	100.177.696.237	24.365.375.811	-	30.151.481.328	154.694.553.376
Alat Produksi Lainnya/ *Other Production Tools*	155.556.954.983	50.633.108.451	(25.124.898)	(2.148.146.327)	204.016.792.209
Sub Jumlah/*Sub Total*	**9.022.535.952.640**	**193.160.500.791**	**(12.904.560.943)**	**9.683.275.681**	**9.212.475.168.169**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	45.000.000	59.940.000	(45.000.000)	-	59.940.000
Sewa Pembiayaan/ ***Leasing Financing***					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	46.803.495.616	2.746.999.668	(10.225.494.927)	-	39.325.000.357
Jumlah/*Total*	**9.069.384.448.256**	**195.967.440.459**	**(23.175.055.870)**	**9.683.275.681**	**9.251.860.108.526**
Akum. Penyusutan dan Penurunan Nilai/ ***Accum. Depreciation and Impairment:***					
Kapal Penumpang/ *Passanger Ship*	6.386.995.626.849	380.015.549.114	-	(18.320.059.320)	6.748.691.116.645
Kapal Kargo/*Cargo Ship*	126.678.774.356	26.293.083.665	(11.766.358.655)	-	141.205.499.366
Kontainer/*Container*	58.006.897.027	10.195.449.147	1	30.193.754.827	98.396.101.002
Alat Produksi Lainnya *Other Production Tools*	69.439.515.419	19.291.351.119	(25.125.395)	(2.124.928.770)	86.580.812.373
Sub Jumlah/*Sub Total*	**6.641.120.813.651**	**435.795.433.045**	**(11.791.484.049)**	**9.748.766.737**	**7.074.873.529.386**
Sewa Pembiayaan/ ***Leasing Financing***					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	20.801.996.889	8.684.917.358	(10.276.939.777)	-	19.209.974.471
Nilai Buku/*Book Value*	**2.407.461.637.715**	**(248.512.909.944)**	**(1.106.632.044)**	**(65.491.056)**	**2.157.776.604.669**

15. ALAT PRODUKSI (lanjutan) / ***15. PRODUCTION EQUIPMENT*** *(continued)*

	2022				
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Addition***	**Pengurangan/** ***Reduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***
Biaya Perolehan/ ***Acquisition Cost:***					
Perolehan Langsung/ ***Direct Acquisition***					
Kapal Penumpang/ *Passanger Ship*	8.172.190.029.018	133.947.027.154	-	-	8.306.137.056.172
Kapal Kargo/*Cargo Ship*	458.371.521.617	2.292.723.631	-	-	460.664.245.248
Kontainer/*Container*	109.738.836.410	-	-	(9.561.140.173)	100.177.696.237
Alat Produksi Lainnya/ *Other Production Tools*	137.150.500.551	5.947.889.562	-	12.458.564.870	155.556.954.983
Sub Jumlah/*Sub Total*	**8.877.450.887.596**	**142.187.640.347**	**-**	**2.897.424.697**	**9.022.535.952.640**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	45.000.000	-	-	-	45.000.000
Sewa Pembiayaan/ ***Leasing Financing***					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	33.651.645.507	51.546.639.972	(38.394.789.863)	-	46.803.495.616
Jumlah/*Total*	**8.911.147.533.103**	**193.734.280.319**	**(38.394.789.863)**	**2.897.424.697**	**9.069.384.448.256**
Akum. Penyusutan dan Penurunan Nilai/ ***Accum. Depreciation and Impairment:***					
Kapal Penumpang/ *Passanger Ship*	6.089.424.213.224	297.571.413.625	-	-	6.386.995.626.849
Kapal Kargo/*Cargo Ship*	103.755.601.960	22.923.172.396	-	-	126.678.774.356
Kontainer/*Container*	44.059.389.619	14.999.321.296	-	(1.051.813.888)	58.006.897.027
Alat Produksi Lainnya *Other Production Tools*	56.664.302.569	11.845.378.077	-	929.834.773	69.439.515.419
Sub Jumlah/*Sub Total*	**6.293.903.507.372**	**347.339.285.394**	**-**	**(121.979.116)**	**6.641.120.813.651**
Sewa Pembiayaan/ ***Leasing Financing***					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	18.414.357.543	13.693.886.849	(11.306.247.503)	-	20.801.996.889
Nilai Buku/*Book Value*	**2.598.829.668.187**	**13.693.886.849**	**(11.306.247.503)**	**-**	**2.407.461.637.715**

Beban penyusutan dialokasikan pada: / *Depreciation expense is allocated to:*

	2023	**2022**	
Beban Pokok Pendapatan Usaha	428.276.086.972	334.792.823.293	*Cost of Revenue*
Beban Umum dan Administrasi	16.204.263.431	12.546.462.101	*General and Administrative Expense*
Jumlah	**444.480.350.403**	**347.339.285.394**	***Total***

Lihat Catatan 36 dan37. / *See Note 36 and 37*

15. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

Penambahan Kapal Penumpang tahun 2023 merupakan suku cadang untuk kapal penumpang sebesar Rp107.573.775.033 dan suku cadang perbaikan kapal penumpang sebesar Rp9.886.772.996

Pengurangan Alat Produksi Kapal Kargo merupakan penjualan KM Caraka J.N.III-32.

Penambahan Alat Produksi Lainnya tahun 2023, antara lain:

a. 4 unit Trailer 40 feet, 5 unit trailer 20 feet, dan 1 unit trailer 20 feet type rangka sesuai kontrak No. SBN/AGR/08.28-01/2023.
b. 2 unit truck sesuai kontrak No. SBN/AGR/08.28-02/2023
c. 3 unit head truck sesuai kontrak No. SPK/AGR/08.18-02/2023
d. 3 unit head truck sesuai kontrak No. SPK/AGR/09.15-01/2023
e. 1 unit truck sesuai kontrak No. SPK/SBN/PBJ/21.02/XII/2022

Reklasifikasi Alat Produksi tahun 2023, antara Lain:

a. Alat Produksi Kapal Penumpang Ke Kontainer Sebesar Rp18.320.059.320
b. Aset Tetap Kendaraan Bermotor ke Alat Produksi Kontainer Sebesar Rp12.435.927.534
c. Alat Produksi Kontainer Ke Aset Tidak Produktif Sebesar Rp604.505.526
d. Alat Produksi Lainnya Ke Aset Tidak Produktif Sebesar Rp2.148.146.327
e. Penambahan Aset Kontainer Tahun 2023 Sebesar Rp16.897.875.811 Yang Dimiliki Oleh Entitas Induk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Sebesar Rp7.467.500.000 Yang Dimiliki Oleh Entitas Anak PT PBM Sarana Bandar Nasional

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat alat produksi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masih dibawah nilai wajarnya.

Alat produksi berupa armada kapal diasuransikan pada PT Asuransi Kredit Indonesia dan Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan cukup memadai untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian terhadap aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat alat produksi yang digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/pinjaman Grup.

15. PRODUCTION EQUIPMENT *(continued)*

Addition of Production Equipment for Cargo Vessels in 2023 Spare Parts for Cargo Vessels amounting to Rp107.573.775.033 and Repair of Passenger Parts amounting to Rp9.886.772.996.

Reduction of Cargo Vessel Production Equipment Sale of KM Caraka J.N.III-32.

Addition of Forklift Equipment in 2023, including:

a. 4 units of 40 feet trailer, 5 units of 20 feet trailer, and 1 unit of frame type 20 feet trailer according to contract No. SBN/AGR/08.28-01/2023.
b. 2 trucks according to contract no. SBN/AGR/08.28-02/2023
c. *3 head truck units according to contract no. SPK/AGR/08.18-02/2023*
d. *3 head truck units according to contract no. SPK/AGR/09.15-01/2023*
e. *1 truck unit according to contract no. SPK/SBN/PBJ/21.02/XII/2022*

Reclassification of Production Equipment in 2023 Among Others:
a. Passenger Ship to Container Production Equipment Amounting to Rp18,320,059,320
b. Motor Vehicle Fixed Assets to Container Production Equipment Rp12,435,927,534
c. Container Production Equipment to Non-Productive Assets Amounting to Rp604,505,526
d. Other Production Equipment to Non-Productive Assets Amounting to Rp2,148,146,327
e. Addition of Container Assets in 2023 Amounted to Rp16,897,875,811 Owned by Parent Entity PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Amounted to Rp7,467,500,000 Owned by Subsidiary Entity PT PBM Sarana Bandar Nasional

Management is in order that the carrying value of the production equipment for the year ended December 31, 2023 and 2022 is still below fair value.

The production equipment in the form of an insured fleet at PT Asuransi Kredit Indonesia and the Group believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses to the insured assets.

There are no production equipment used as collateral for Group liabilities.

16. ASET TETAP / *16. FIXED ASSETS*

	2023				
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Addition***	**Pengurangan/** ***Reduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***
Biaya Perolehan/*Acquisition Cost:*					
Perolehan Langsung/*Direct Acquisition*					
Tanah/*Land*	37.361.635.237	50.783.695	-	2.204.754.716	39.617.173.648
Gedung/*Building*	266.123.266.227	15.173.726.797	-	2.399.462.520	283.696.455.544
Kendaraan Bermotor/*Vehicle*	49.720.287.181	910.533.033	150.000.000	(12.809.137.534)	37.671.682.680
Inventaris Kantor/*Office Inventory*	119.050.075.279	17.572.573.978	16.198.000	220.174.466	136.826.625.723
Alat Produksi Lainnya/ *Other Production Tools*	25.534.321.496	708.250.330	-	(27.406.500)	26.215.165.326
Sub Jumlah/*Sub Total*	**497.789.585.420**	**34.415.867.833**	**166.198.000**	**(8.012.152.332)**	**524.027.102.921**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets UnderConstruction*	29.315.323.617	18.650.641.356	-	(7.329.067.234)	40.636.897.739
Jumlah/*Total*	**527.104.909.037**	**53.066.509.189**	**166.198.000**	**(15.341.219.566)**	**564.664.000.660**
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/*Accumulated Depreciation and Impairment:*					
Gedung/*Building*	110.496.576.496	7.135.864.401	-	(3.945.480)	117.628.495.417
Kendaraan Bermotor/*Vehicle*	41.671.876.222	2.147.089.497	150.000.000	(12.809.137.534)	30.859.828.185
Inventaris Kantor/*Office Inventory*	85.009.835.144	10.778.149.365	(16.198.000)	(852.464.738)	94.919.321.770
Alat Produksi Lainnya/ *Other Production Tools*	22.498.094.619	755.744.019	-	(18.156.803)	23.235.681.835
Sub Jumlah/*Sub Total*	**259.676.382.481**	**20.816.847.283**	**133.802.000**	**(13.683.704.555)**	**266.643.327.207**
Nilai Buku/*Book Value*	**267.428.526.556**				**298.020.673.453**

	2022				
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Addition***	**Pengurangan/** ***Reduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***
Biaya Perolehan/*Acquisition Cost:*					
Perolehan Langsung/*Direct Acquisition*					
Tanah/*Land*	33.977.035.237	3.400.600.000	16.000.000	-	37.361.635.237
Gedung/*Building*	246.441.238.651	19.715.058.068	-	(33.030.492)	266.123.266.227
Kendaraan Bermotor/*Vehicle*	47.925.304.611	2.432.178.570	-	(637.196.000)	49.720.287.181
Inventaris Kantor/*Office Inventory*	100.912.890.909	18.482.321.239	-	(345.136.869)	119.050.075.279
Alat Produksi Lainnya/ *Other Production Tools*	22.687.246.265	2.847.075.231	-	-	25.534.321.496
Sub Jumlah/*Sub Total*	**451.943.715.673**	**46.877.233.108**	**16.000.000**	**(1.015.363.361)**	**497.789.585.420**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets UnderConstruction*	38.311.568.950	12.438.239.529	-	(21.434.484.862)	29.315.323.617
Jumlah/*Total*	**490.255.284.623**	**59.315.472.637**	**-**	**(21.434.484.862)**	**527.104.909.037**

16. ASET TETAP (lanjutan) / ***16. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	2022				
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Addition***	**Pengurangan/** ***Reduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/*Accumulated Depreciation and Impairment:*					
Gedung/*Building*	104.349.346.712	6.180.260.276	-	(33.030.492)	110.496.576.496
Kendaraan Bermotor/*Vehicle*	40.065.627.687	2.243.444.535	-	(637.196.000)	41.671.876.222
Inventaris Kantor/*Office Inventory*	79.154.143.324	6.401.522.999	-	(545.831.179)	85.009.835.144
Alat Produksi Lainnya/ *Other Production Tools*	22.208.977.896	289.116.723	-	-	22.498.094.619
Sub Jumlah/*Sub Total*	**245.778.095.619**	**15.114.344.533**	**-**	**(1.216.057.671)**	**259.676.382.481**
Nilai Buku/*Book Value*	**244.477.189.004**				**267.428.526.556**

Perseroan menilai tidak terdapat indikasi penurunan nilai pada aset tetap sehingga Perseroan tidak melakukan penilaian kembali dan tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun berjalan.

The company assesses no indication of impairment on fixed assets so that the company does not re evaluate and does not need to form a reserve of impairment losses in the year.

Penambahan gedung tahun 2023, antara lain gedung yang dimiliki oleh entitas induk PT Pelayaran Indonesia (Persero) sebesar Rp14.238.726.797 dan entitas anak PT PBM Sarana Bandar Nasional Sebesar Rp935.000.000

Additional buildings in 2023 include buildings owned by the parent entity PT Pelayaran Indonesia (Persero) amounting to IDR 14.238.726.797 and the subsidiary PT PBM Sarana Bandar Nasional amounting to Rp935.000.000

Reklasifikasi aset tetap tahun 2023, antara lain:

Reclassification of Fixed Assets in 2023 Among Others:

a. Aset dalam konstruksi Ke tanah sebesar Rp2.204.754.716
b. Aset tetap ke alat produksi kontainer sebesar Rp12.435.927.534 dan aset tidak produktif sebesar Rp.373.210.000
c. Inventaris Kantor Ke Aset Tidak Produktif Sebesar Rp.99.080.034

Assets under construction to land amounting to Rp2.204.754.716
Fixed Assets to Container Production Equipment amounted to Rp12.435.927.534 and non-productive assets amounted to Rp373.210.000
Office Inventory to non-productive Assets Rp99.080.034

Penambahan Peralatan Elektonik tahun 2023, antara lain: 6 unit PC komputer sebesar Rp43.800.000, 35 unit Laptop sebesar Rp387.979.000, 3 unit Proyektor sebesar Rp36.946.000, 3 unit laptop sebesar Rp16.100.000.

Additional Electronic Equipment in 2023, including: 6 PC computers amounting to Rp43,800,000, 35 laptop units amounting to Rp387,979,000, 3 projector units amounting to Rp36,946,000, 3 laptop units amounting to Rp16,100,000.

Reklasifikasi ke Properti Investasi tahun 2023 milik entitas induk terdiri dari tanah Jl.Hasanudin No.29 Medan Sumatera Utara sebesar Rp3.335.000 dan bangunan sebesar Rp3.945.480

Reclassification to Investment Property in 2023 belonging to the parent entity consists of land on Jl. Hasanudin No. 29 Medan, North Sumatra amounting to Rp3,335,000 and buildings amounting to Rp3,945,480

16. ASET TETAP (lanjutan)

***16. FIXED ASSETS** (continued)*

Beban penyusutan dialokasikan pada:

Depreciation expense is allocated to:

	2023	2022	
Beban Pokok Pendapatan Usaha	1.087.789.443	6.719.526.880	*Cost of Revenue*
Beban Umum dan Administrasi	19.729.057.839	8.394.817.653	*General and Administrative Expense*
Jumlah	**20.816.847.282**	**15.114.344.533**	***Total***

Lihat Catatan 36 da 37.

See Note 36 and 37.

17. ASET TAKBERWUJUD

17. INTANGIBLE ASSETS

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Reduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost:*					
Perangkat lunak/*Software*	40.013.704.736	1.290.900.000	-	(378.000.000)	40.926.604.736
HGB/*Building Rights*	2.925.863.688	4.671.742	-	-	2.930.535.430
Sub Jumlah/*Sub Total*	**42.939.568.424**	**1.295.571.742**	**-**	**(378.000.000)**	**43.857.140.166**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	6.868.737.560	266.991.000	-	-	7.135.728.560
Sub Jumlah/*Sub Total*	**49.808.305.984**	**266.991.000**	**-**	**-**	**50.992.868.726**
Akumulasi Amortisasi/ *Amortization Accumulated:*					
Perangkat lunak/*Software*	26.204.399.978	3.703.810.058	-	-	29.908.210.036
HGB/*Building Rights*	2.784.681.455	5.578.875	-	-	2.790.260.330
Sub Jumlah/*Sub Total*	**28.989.081.433**	**3.709.388.933**			**32.698.470.366**
Nilai Buku/*Book Value*	**20.819.224.551**				**18.294.398.360**

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Reduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost:*					
Perangkat lunak/*Software*	35.687.456.949	3.239.134.151	4.250.000	1.091.363.636	40.013.704.736
HGB/*Building Rights*	2.925.863.688	-	-	-	2.925.863.688
Sub Jumlah/*Sub Total*	**38.613.320.637**	**3.239.134.151**	**4.250.000**	**1.091.363.636**	**42.939.568.424**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	2.537.656.188	4.331.081.372	-	-	6.868.737.560
Sub Jumlah/*Sub Total*	**41.150.976.825**				**49.808.305.984**
Akumulasi Amortisasi/ *Amortization Accumulated:*					
Perangkat lunak/*Software*	22.290.548.913	4.182.988.380	269.137.315	-	26.204.399.978
HGB/*Building Rights*	2.728.385.190	56.296.265	-	-	2.784.681.455
Sub Jumlah/*Sub Total*	**25.018.934.103**	**4.239.284.645**	**269.137.315**	**-**	**28.989.081.433**
Nilai Buku/*Book Value*	**16.132.042.722**				**20.819.224.551**

17. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) / *17. INTANGIBLE ASSETS (continued)*

Beban amortisasi dialokasikan pada: / *Amortization expense is allocated to:*

	2023	2022	
Beban Pokok Pendapatan Usaha	231.800.236	147.300.820	*Cost of Revenue*
Beban Umum dan Administrasi	3.477.588.697	4.091.983.825	*General and Administrative Expense*
Jumlah	**3.709.388.933**	**4.239.284.645**	***Total***

Lihat Catatan 36 dan 37. / *See Note 36 and 37.*

18. ASET HAK GUNA / *18. RIGHT OF USE ASSETS*

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Reduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost:*					
Tanah/ *Land*	672.000.000	-	-	-	672.000.000
Gedung/ *Building*	170.000.000	3.717.678.090	-	-	3.887.678.090
Alat Angkut/ *Vehicle*	2.155.142.931	-	-	-	2.155.142.931
Sub Jumlah/*Sub Total*	**2.997.142.931**	**3.717.678.090**	**-**	**-**	**6.714.821.021**
Akumulasi Amortisasi/ Amortization Accumulated:					
Tanah/ Land	196.000.000	-	-	-	196.000.000
Gedung/ *Building*	155.833.330	1.653.129.599	-	-	1.808.962.928
Alat Angkut/ *Vehicle*	302.393.790	504.034.434	-	-	806.428.225
Sub Jumlah/*Sub Total*	**654.227.120**	**2.157.164.033**	**-**	**-**	**2.811.391.154**
Nilai Buku/*Book Value*	**2.342.915.811**				**3.903.429.867**

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Reduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost:*					
Tanah/ *Land*	10.028.973.618	-	9.356.973.618	-	672.000.000
Gedung/ *Building*	889.065.881	-	719.065.881	-	170.000.000
Alat Angkut/ *Vehicle*	2.168.348.762	2.155.142.931	2.168.348.762	-	2.155.142.931
Sub Jumlah/*Sub Total*	**13.086.388.261**	**2.155.142.931**	**12.244.388.261**	**-**	**2.997.142.931**
Akumulasi Amortisasi/ Amortization Accumulated:					
Tanah/ Land	3.165.096.393	218.376.573	3.187.472.966	-	196.000.000
Gedung/ *Building*	594.200.112	85.000.000	523.366.782	-	155.833.330
Alat Angkut/ *Vehicle*	1.694.045.443	266.160.823	1.657.812.476	-	302.393.790
Sub Jumlah/*Sub Total*	**5.453.341.948**	**569.537.396**	**5.368.652.224**	**-**	**654.227.120**
Nilai Buku/*Book Value*	**7.633.046.313**				**2.342.915.811**

18. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Penambahan aset hak guna usaha tahun 2023 merupakan objek sewa lahan penumpukan container di Tanjung Priok dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak 01 Juni 2023 hingga 31 Mei 2026, dan objek sewa aset untuk PT SBI dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun sejak 01 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024.

Penambahan aset hak guna usaha tahun 2022 merupakan objek sewa tanah di Surabaya dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun sejak 01 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2024, objek sewa 2 kendaraan untuk PT SBN dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun sejak 27 Juni 2022 hingga 26 Juni 2024, objek sewa kendaraan untuk PT SBI dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak 01 November 2022 hingga 31 Oktober 2025 dan objek sewa kendaraan untuk PT SBL dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak 30 Desember 2022 hingga 29 Desember 2025.

Pengurangan aset hak guna usaha tahun 2022 merupakan objek sewa tanah di Banyuwangi, bangunan di Surabaya dan kendaraan dinas direksi yang sudah habis masa sewanya.

Nilai perolehan dicatat sebesar nilai dibayar dimuka pada saat melakukan perjanjian sewa, nilai amortisasi dicatat sebesar perhitungan amortisasi dari awal masa sewa sampai dengan akhir masa sewa.

***18. RIGHT OF USE ASSETS** (continued)*

The addition of leasehold assets in 2023 is a rental object for container stacking land in Tanjung Priok with a rental period of 3 (three) years from 01 June 2023 to 31 May 2026, and an asset rental object for PT SBI with a rental period of 2 (two) years from 01 January 2023 to 31 December 2024.

Additional leasehold assets in 2022 are land rental objects in Surabaya with a rental period of 2 (two) years from 01 August 2022 to 31 August 2024, 2 vehicle rental objects for PT SBN with a rental period of 2 (two) years from 27 June 2022 to 26 June 2024, vehicle rental objects for PT SBI with a rental period of 3 (three) years from 01 November 2022 to 31 October 2025 and vehicle rental objects for PT SBL with a rental period of 3 (three) years from 30 December 2022 to December 29, 2025.

The reduction in leasehold assets in 2022 is land rental objects in Banyuwangi, buildings in Surabaya and directors' official vehicles whose leases have expired.

The acquisition value is recorded at the prepaid amount at the time of entering into the lease agreement, the amortization value is recorded at the amortization calculation from the beginning of the lease term to the end of the lease term.

Beban amortisasi dialokasikan pada:

Amortization expense is allocated to:

	2023	2022	
Beban Pokok Pendapatan Usaha	194.306.276	178.960.948	*Cost of Revenue*
Beban Umum dan Administrasi	1.962.857.758	390.576.448	*General and Administrative Expense*
Jumlah	**2.157.164.034**	**569.537.396**	***Ending Balance***

Lihat Catatan 36 dan 37.

See Note 36 and 37.

19. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *19. OTHER NON CURRENT ASSETS*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Biaya Perolehan:			***Acquisition Cost:***
Piutang Usaha Tak Tertagih	85.232.771.433	86.368.218.923	*Account Receivable Not Collectible*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	45.518.725.354	53.992.527.587	*Fixed Assets Damage*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	6.108.570.600	5.615.178.171	*Inventory Damaged*
Lainnya	43.670.650	445.345.310	*Other*
Jumlah	**136.903.738.037**	**146.421.269.991**	***Total***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai			***Accumulated Depreciation and Impairment***
Piutang Usaha			*Account Receivable*
Tak Tertagih	(85.232.771.433)	(86.368.218.923)	*Not Collectible*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	(45.492.725.254)	(53.966.027.487)	*Fixed Assets Damage*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	(6.108.570.600)	(5.615.178.171)	*Inventory Damaged*
Jumlah	**(136.834.067.287)**	**(145.949.424.581)**	***Total***
Nilai Buku	**69.670.750**	**471.845.410**	***Book Value***

Piutang usaha yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan piutang usaha tidak tertagih milik entitas induk sebesar Rp83.590.097.211 dan entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) sebesar Rp1.642.674.222.

Trade receivables recorded on other uncurrent assets are uncollectible business receivables belonging to the parent entity amounting to Rp83,590,097,211 and subsidiary (PT Pelita Indonesia Djaya) amounting to Rp1,642,674,222.

Aset tetap tidak produktif yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan aset tetap yang tidak digunakan milik entitas induk sebesar Rp39.840.612.595 dan entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) sebesar Rp5.678.112.759.

An unproductive fixed asset recorded on other uncurrent assets is a permanent asset that is not used belonging to the parent entity amounting to Rp39,840,612,595 and a subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) of Rp6,678,112,759.

Pengurangan Aset Tidak Lancar Lainnya Kapal Kargo merupakan penjualan KM Caraka J.N.III-4.

Reduction of Other Non-Current Assets for Cargo Ships is the sale of KM Caraka J.N.III-4.

Persediaan tidak produktif yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan persediaan yang tidak dapat digunakan milik entitas induk sebesar Rp6.108.570.600.

Unproductive inventories recorded in other non-current assets represent unused inventories of the parent entity amounting to Rp6.108.570.600.

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK / *20. SHORT-TERM LOANS*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	22.000.000.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Jumlah	**22.000.000.000**	**-**	***Total***

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pinjaman jangka pendek merupakan utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 5.000.000.000 dengan nomor surat RCO.JKB/0045/KMK/2020 dengan Tingkat suku bunga: 8,50% per tahun. Jangka Waktu Kredit 1 Oktober 2020 s/d 30 September 2021 (12 bulan). Tujuan penggunaan kredit yaitu pembiayaan kebutuhan produktif usaha food and beverages, outshourching service, car rent, wisata, informastion technology service management (ITSM), maintenance service, crewing dan usaha penunjang lainnya untuk pelayani PT PELNI (Persero). Penerima kredit menyerahkan agunan kepada Bank Sebidang tanah SHGB rumah toko 4 (empat) lantai di komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 5 Jl. Letjen Suprapto, Kel Sumur Batu Kec Kemayoran Jakarta Pusat.

Perjanjian kredit ini telah dilakukan addendum I (kesatu) dengan Nomor Akta 01, tanggal 01 April 2021 dengan jangka waktu 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, terakhir telah diubah dengan addendum II (kedua) tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2023. Kemudian diubah yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.JKB/0099/KMK/2021, Akta Nomor 02, tanggal 1 Nopember 2021, dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., notaris di Jakarta.

Selanjutnya, dilakukan Addendum I, tanggal 31 Oktober 2022, tentang penurunan limit kredit semula Rp12.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000 dan perpanjangan jangka waktu kredit terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023. Agunan kredit dalam bentuk:

a. Bukan Aset Tetap, berupa seluruh tagihan/piutang usaha kepada pihak ketiga, telah diikat Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10.00606013.AH.05.01.Tahun 2021, tanggl 4 Nopember 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000;

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Short-term loans represent debt to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the amount of IDR 5,000,000,000 with letter number RCO.JKB/0045/KMK/2020 with an interest rate of: 8.50% per year. Credit Term 1 October 2020 to 30 September 2021 (12 months). The purpose of using credit is to finance the productive needs of food and beverages businesses, outsourcing services, car rent, tourism, information technology service management (ITSM), maintenance services, crewing and other supporting businesses to serve PT PELNI (Persero). The credit recipient submits collateral to the Bank. A plot of SHGB land, a 4 (four) storey shop house in the Ruko Mega Grosir Cempaka Mas complex, Block Q No. 5 Jl. Lt. Gen. Suprapto, Wells Stone Kel, Kemayoran District, Central Jakarta.

This credit agreement has been amended by addendum I (first) with Deed Number 01, April 1, 2021 with a period of April 1, 2021 to March 31, 2022, the latest has been amended by addendum II (second) November 1, 2021 to October 31, 2023. Then it was amended as stated in the Working Capital Credit Agreement Number RCO.JKB/0099/KMK/2021, Deed Number 02, November 1, 2021, made before Siti Rohmah Caryana, S.H., notary in Jakarta.

Furthermore, Addendum I was carried out, dated October 31, 2022, concerning a decrease in the original credit limit from Rp12,000,000,000 to Rp10,000,000,000 and an extension of the credit period starting from October 31, 2022 to October 30, 2023. Credit collateral in the form of:

a. *Not Fixed Assets, in the form of all trade receivables/receivables to third parties, which have been bound by a Fiducia Guarantee Certificate Number W10.00606013.AH.05.01.Tahun 2021, November 4 2021 with a guarantee value of Rp15,000,000,000;*

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (lanjutan)

b. Aset Tetap, yaitu tanah dan bangunan ruko, terletak di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q, Nomor 5, Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Sumur Batu, telah diikat Sertifikat Hak Tanggunan Nomor 00622/2022, tanggal 12 April 2021, dengan nilai pengikatan sebesar Rp8.487.000.000.

Tanah dan bangunan villa yang terletak di Jalan Wilis (Taman Wisata) Nomor 19, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00804/Pecalukan, seluas 3.915 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00805/Pecalukan, seluas 3.766 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00806/Pecalukan, seluas 4.488 M2;

Ketiga sertifikat tersebut telah diikat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02783/2021, tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp9.000.000.000.

Seluruh pencairan selama tahun 2022 telah dilunasi oleh Grup.

***20. SHORT-TERM LOANS** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** (continued)*

b. *Fixed assets, namely land and shop buildings, located in Mega Grosir Cempaka Mas Shophouse Block Q, Number 5, Jalan Letjen Suprapto, Sumur Batu Village, Kemayoran District, Central Jakarta, with proof of ownership in the form of: Certificate of Right to Build Number 1488/Sumur Batu , has been bound by Mortgage Certificate Number 00622/2022, April 12, 2021, with a binding value of Rp8,487,000,000.*

Land and villa building located at Jalan Wilis (Taman Wisata) Number 19, Pecalukan Village, Prigen District, Pasuruan Regency, East Java, with proof of ownership in the form of:

- *Building Use Right Certificate Number 00804/Pecallukan, covering an area of 3,915 M2;*
- *Building Use Right Certificate Number 00805/Pecalukan, covering an area of 3,766 M2;*
- *Building Use Right Certificate Number 00806/Pecallukan, covering an area of 4,488 M2;*

The three certificates have been bound by Mortgage Certificate Number 02783/2021, December 21 2021 in the amount of Rp9,000,000,000.

All disbursements during 2022 have been paid by the Group.

21. UTANG USAHA

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok, sebagai berikut:

21. TRADE PAYABLE

Details of the trade payable by supplier, as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	6.822.642.017	14.069.793.470	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Pertamina Patra Niaga	6.200.424.585	10.378.475.386	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Asuransi Kredit Indonesia	4.388.619.145	2.779.319.306	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
PT Sarana Gama Sejahtera	3.931.063.578	2.803.254.769	*PT Sarana Gama Sejahtera*
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2.469.768.877	1.295.688.751	*PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)*
PT Dok Perkapalan Kodja Bahari	1.283.022.367	525.111.339	*PT Dok Perkapalan Kodja Bahari*
PT Sucofindo (Persero)	1.237.095.000	210.357.000	*PT Sucofindo (Persero)*
PT Isa Telkom	1.158.154.950	278.350.000	*PT Isa Telkom*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	1.079.238.547	8.158.605.928	*Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni*
Kepala Operasi QQ Pelabuhan	748.301.885	1.228.646.376	*Kepala Operasi QQ Pelabuhan*
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	716.504.276	25.142.191	*PT Industri Kapal Indonesia (Persero)*
PT Sigma Cipta Cakara	687.405.600	1.039.083.334	*PT Sigma Cipta Cakara*
Saldo dipindahkan	**30.722.240.827**	**42.791.827.850**	***Carried forward balance***

21. UTANG USAHA (lanjutan) / ***21. TRADE PAYABLE*** *(continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Saldo pindahan	**30.722.240.827**	**42.791.827.850**	***Brought forward balance***
PT Pertamina (Persero)	628.552.000	628.552.000	*PT Pertamina (Persero)*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	600.601.583	2.339.501.254	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)*
Syahbandar	562.101.196	520.423.002	*Syahbandar*
PT Sang Hyang Seri	-	1.355.970.000	*PT Sang Hyang Seri*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	-	563.102.000	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indones	-	768.523.104	T Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
PT Pal Indonesia	-	539.609.000	*PT Pal Indonesia*
PT Perusahaan listrik Negara ((Perser	-	505.729.751	T Perusahaan listrik Negara ((Persero)
Lainnya (dibawah Rp500 Juta)	7.104.839.300	3.709.239.048	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah	**39.618.334.906**	**53.722.477.009**	***Sub Total***
Pihak Ketiga:			***Thrid Parties:***
PT Dalekesa Asri Cemerlang	14.228.933.709	7.895.766.102	*PT Dalekesa Asri Cemerlang*
PT Pancura Cahaya Wahyu	9.637.719.197	4.561.689.515	*PT Pancura Cahaya Wahyu*
PT Global Marinedo Safety Indonesia	8.335.082.795	4.525.034.861	*PT Global Marinedo Safety Indonesia*
Insan Kencana Perdana	5.424.321.528	760.501.738	*Insan Kencana Perdana*
Koperasi Bina Sejahtera	5.181.264.681	4.926.904.970	*Koperasi Bina Sejahtera*
PT Tisindo Jaya	4.995.152.350	4.042.074.484	*PT Tisindo Jaya*
PT Segara Permai	4.770.708.560	1.802.367.964	*PT Segara Permai*
PT Adhitrans Prima	4.091.475.065	3.735.448.206	*PT Adhitrans Prima*
Tri Agung Sinergi	4.091.003.753	719.977.677	*Tri Agung Sinergi*
PT Dreko Marina System	4.012.980.617	894.202.598	*PT Dreko Marina System*
PT Araya Internusa	3.616.607.363	9.733.022.641	*PT Araya Internusa*
PT Eastern Citra Bamantara	3.614.884.964	1.094.188.013	*PT Eastern Citra Bamantara*
Amidis Tirta Mulia	3.176.520.756	4.257.968.663	*Amidis Tirta Mulia*
PT Bahtera Biru	2.555.294.540	2.846.312.651	*PT Bahtera Biru*
PT Luber Sukses	2.463.028.572	3.247.631.506	*PT Luber Sukses*
PT Surya Segara Safety Marine	2.417.188.849	1.696.156.670	*PT Surya Segara Safety Marine*
PT Klasaman Indah Raya	2.181.861.854	182.079.406	*PT Klasaman Indah Raya*
Wahana Sejahtera Food	2.063.647.600	1.217.747.600	*Wahana Sejahtera Food*
Multi Diesel Service	2.020.695.255	583.091.236	*Multi Diesel Service*
PT Karya Mandiri Makmur Sejati	1.888.365.223	1.861.153.450	*PT Karya Mandiri Makmur Sejati*
PT Pertalube Nusajaya	1.791.025.500	3.069.062.590	*PT Pertalube Nusajaya*
PT Erdeha Multi Niaga	1.556.235.200	-	*PT Erdeha Multi Niaga*
PT Skyreach	1.463.826.000	1.463.826.000	*PT Skyreach*
Persekutuan Advokad & Konsultan Hukum Toni Hendarto & Rekan	1.460.725.000	1.127.000.000	*Persekutuan Advokad & Konsultan Hukum Toni Hendarto & Rekan*
PT Jotun Indonesia	1.215.497.047	2.341.420.511	*PT Jotun Indonesia*
PT ITI Marine & Oilfield Utama	1.133.740.943	1.557.454.232	*PT ITI Marine & Oilfield Utama*
PT Pahala Artha Lestari	1.133.628.231	1.250.549.711	*PT Pahala Artha Lestari*
PT Pasific Prima Indah	1.210.682.660	-	*PT Pasific Prima Indah*
PT Central Marine Indonesia	817.298.786	1.355.070.719	*PT Central Marine Indonesia*
PT Karimun Marine Shipyard	796.412.595	-	*PT Karimun Marine Shipyard*
PT Osami	786.480.830	2.093.625.060	*PT Osami*
PT Jaya Karya Makassar	764.163.544	-	*PT Jaya Karya Makassar*
CV Makassar Teknik Abadi	762.139.475	1.410.875.682	*CV Makassar Teknik Abadi*
Koperasi Karya Sejahtera	717.970.692	333.821.445	*Koperasi Karya Sejahtera*
PT Multi Integra	666.027.110	778.029.025	*PT Multi Integra*
CV Sinar Terang	654.074.179	1.311.445.802	*CV Sinar Terang*
Sub Jumlah - dipindahkan	**107.696.665.023**	**78.675.500.728**	***Carried forward balance***

21. UTANG USAHA (lanjutan) / *TRADE PAYABLE (continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Saldo Jumlah - pindahan	**107.696.665.023**	**78.675.500.728**	***Brought forward balance***
PT Gading Mas Murni Utama	590.379.025	4.966.792.334	*PT Gading Mas Murni Utama*
PT Anuta Karya Prima	543.528.334	-	*PT Anuta Karya Prima*
PT Enseval Putra Megatrading TBK	-	1.292.579.162	*PT Enseval Putra Megatrading TBK*
CV Subandar	-	1.277.891.050	*CV Subandar*
PT Harapan Abadi Niagatama	-	1.260.398.215	*PT Harapan Abadi Niagatama*
PT Tani Hook Indonesia	-	1.092.537.640	*PT Tani Hook Indonesia*
PT Sinar Niaga Sejahtera	-	924.435.389	*PT Sinar Niaga Sejahtera*
PT Tiga Teknik Samudera	-	840.255.000	*PT Tiga Teknik Samudera*
PT Shanti Dharma Artha	-	681.375.557	*PT Shanti Dharma Artha*
PT indoboiler	-	678.168.589	*PT indoboiler*
CV Sedulur Papat Sejahtera	-	501.950.000	*CV Sedulur Papat Sejahtera*
Lainnya (dibawah Rp500 Juta)	57.013.922.299	63.255.411.125	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah - dipindahkan	**165.844.494.681**	**155.447.294.789**	***Carried forward balance***
Jumlah	**205.462.829.587**	**209.169.771.797**	***Total***

Utang usaha pada PT Dok Perkapalan Kodja Bahari, PT Dalekesa Asri Cemerlang, PT Eastern Citra Bamantara, PT Araya Internusa, merupakan utang pekerjaan pemeliharaan kapal.

Trade payables to PT Dok Perkapalan Kodja Bahari, PT Dalekesa Asri Cemerlang, PT Eastern Citra Bamantara, PT Araya Internusa, are payables for ship maintenance work.

Utang usaha pada PT Surya Segara Safety Marine, PT Sinar Kencana merupakan utang pengadaan suku cadang kapal.

Trade payables to PT Surya Segara Safety Marine, PT Sinar Kencana are payables for the procurement of ship spare parts.

Utang usaha pada PT Gading Mas Murni Utama, PT Global Marinedo Safety Indonesia merupakan utang pengadaan perlengkapan kapal.

Trade payables to PT Gading Mas Murni Utama, PT Global Marinedo Safety Indonesia are debts for ship equipment.

22. BEBAN AKRUAL / *ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Usaha Perkapalan	301.175.095.837	264.548.236.663	*Shipping*
Cadangan Beban Pengurang PSO	9.000.000.000	-	*PSO Reduction Expense Reserve*
Cadangan Beban Kesejahteraan Pegawai	14.011.224.567	-	*Employee Welfare Expense Reserves*
Lainnya	182.584.117.973	181.228.008.781	*Other*
Sub Jumlah	**506.770.438.377**	**445.776.245.444**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	56.410.196.068	10.740.194.784	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Pelita Indonesia Djaya	36.154.026.989	29.329.215.523	*PT Sarana Bandar Nasional*
Sub Jumlah	**92.564.223.056**	**40.069.410.307**	***Sub Total***
Jumlah	**599.334.661.433**	**485.845.655.751**	***Total***

22. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

Beban akrual jasa perkapalan merupakan pencatatan transaksi untuk usaha perkapalan, antara lain kepelabuhanan, penumpang serta muatan.

Beban pencadangan PSO merupakan nilai cadangan PSO yang dibentuk atas estimasi koreksi hasil verifikasi penagihan PSO oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (Lihat catatan 4x)

Beban akrual lainnya merupakan pencatatan transaksi untuk non usaha perkapalan yang manfaatnya sudah diterima tetapi belum diterimna penagihannya.

Beban akrual yang tercatat pada entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) merupakan transaksi untuk usaha permakanan, usaha jasa dan lainnya.

Beban akrual yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan transaksi untuk operasional bongkar muat.

Pengembalian Dana Subsidi atas kegiatan tahun 2019 (PT PID)

Berdasarkan surat No 07.30/01/S-B/090/2020 tanggal 30 Juli 2020 dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) perihal rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas belanja subsidi Kewajiban Pelayaran Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, entitas anak di haruskan melakukan pengembalian atas kekurangan pembayaran upah dan denda keterlambatan sebesar Rp7.566.266.874.

PT Pelita Indonesia Djaya telah membayar sepenuhnya kewajiban pada PT PELNI, dan secara bertahap akan menyelesaikan kewajiban pada petugas kebersihan dan kasur di atas kapal penumpang.

***22. ACCRUED EXPENSES** (continued)*

Accrued shipping service expenses are the recording of transactions for the shipping business, including ports, passengers and cargo.

PSO reserve expense is the value of PSO reserves which is formed based on estimated corrections from the verification results of PSO billing by the Indonesian Financial Audit Agency (BPK RI). (See note 4x)

Other accrued expenses represent the recording of transactions for non-ship business where benefits have been received but billing has not yet been received.

The accrual expenses in subsidiaries (PT Pelita Indonesia Djaya) are transactions for the business of food, service business and others.

The accrual expenses in the subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) is a transaction for the operation of loading and unloading.

Refund of Subsidized Funds for 2019 (PT PID)

Based on a letter No. 07.30/01/S-B/090/2020 dated July 30, 2020. From PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) regarding recommendation "Badan Pemeriksa Keuangan" for subsidy expenditure for Public Shipping Liabilities for Economic Passenger Sea Transportation in Domestic Sea Transportation for Fiscal Year 2019, the subsidiary is required to make a refund for the underpayment of wages and late fees of Rp7,566,266,874.

PT Pelita Indonesia Djaya has fully paid its obligations to PT PELNI, and will gradually settle its obligations to the cleaners and mattresses on board the passenger ship.

23. LIABILITAS KONTRAK / ***23. CONTRACT LIABILITIES***

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pendapatan Diterima Dimuka			***Prepaid Revenues***
Entitas Induk:			*Parent entity:*
Sewa	2.117.962.950	1.533.188.485	*Rental*
Lainnya	2.152.698.561	2.122.438.585	*Others*
Sub Jumlah	**4.270.661.511**	**3.655.627.070**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	440.651.853	428.869.773	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	231.174.692	297.421.618	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**671.826.545**	**726.291.391**	***Sub Total***
Jumlah	**4.942.488.056**	**4.381.918.461**	***Total***

23. LIABILITAS KONTRAK (lanjutan) / ***23. CONTRACT LIABILITIES*** *(continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Uang Muka Diterima			***Advance Received***
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Usaha Perkapalan	37.694.013.732	20.954.080.361	*Shipping Business*
Uang Jaminan	7.308.629.004	9.028.659.859	*Deposits*
Usaha Keagenan	5.245.618.705	5.496.332.548	*Agency*
Usaha Sampingan	23.400.000	35.295.000	*Side Business*
Lainnya	14.427.986.514	8.852.528.877	*Others*
Sub Jumlah	**64.699.647.955**	**44.366.896.645**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	4.918.643.931	3.107.682.052	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	3.500.441.529	1.780.527.027	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**8.419.085.460**	**4.888.209.079**	***Sub Total***
Jumlah	**73.118.733.415**	**49.255.105.724**	***Total***
Jumlah Liabilitas Kontrak	**78.061.221.471**	**53.637.024.185**	***Total Contract Liabilities***

Liabilitas kontrak yang tercatat di entitas induk meliputi:

a. Uang muka diterima usaha perkapalan merupakan uang muka yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha perkapalan, meliputi tambang pasasi, tambang muatan, *charter* kapal, sewa ruang kapal, wisata bahari dan lainnya.

b. Uang muka jaminan merupakan uang muka/deposit sebagai jaminan atas hubungan kerja sesuai kontrak/ketentuan dan akan dikembalikan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan/ketentuan yang berlaku, meliputi uang deposit agen/biro perjalanan dan uang jaminan rekanan.

c. Uang muka diterima usaha keagenan merupakan uang muka diterima sehubungan dengan kegiatan pelayanan jasa keagenan.

d. Pendapatan diterima dimuka lainnya antara lain pendapatan atas pelayanan kegiatan wisata bahari, pendapatan subsidi kapal rede, kapal ternak, dan tol laut.

Pendapatan diterima dimuka yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan pendapatan diterima dimuka atas pelayanan usaha kepelabuhanan termasuk didalamnya uang muka usaha pemuatan dan pembongkaran serta uang jaminan berkenaandengan pelayanan kepelabuhanan.

Contract Liabilities recorded on the parent entity include:

a. Advances received from shipping business represent advances received in connection with shipping business activities, including pasasi mining, cargo mining, ship charter, ship space rental, marine tourism and others.

b. Advance guarantee is an advance/deposit as a guarantee for the working relationship according to the contract/determination and will be returned at once or gradually in accordance with the applicable agreement/determination, including agent/travel agency deposit and counterparty deposit.

c. Advances received from agency business represent advances received in connection with agency service activities.

d. Other unearned income includes revenue from marine tourism services, subsidy revenue for rede ships, livestock ships, and sea tolls.

Prepaid revenues in the subsidiaries (PT Sarana Bandar Nasional) is an acceptable income on the business services of port including the advance of loading and disassembling business as well as collateral money regarding the service of the port.

24. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA / *24. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL LIABILITIES*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	10.606.857.460	9.748.323.407	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
Pegawai	3.351.559.841	8.368.858.398	*Employee*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	1.946.534.199	1.186.181.171	*Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni*
PT Jasa Raharja Putera	1.297.195.356	3.302.351.086	*PT Jasa Raharja Putera*
PT Jasa Raharja (Persero)	77.660.652	1.391.310.938	*PT Jasa Raharja (Persero)*
Otoritas Pelabuhan	130.048.499	775.857.135	*Otoritas Pelabuhan*
Lainnya	11.413.457.976	2.187.570.962	*Others*
Sub Jumlah	**28.823.313.982**	**26.960.453.097**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			***Related Parties***
PT Asuransi Purna Artanugraha	2.991.524.909	2.342.377.855	*PT Asuransi Purna Artanugraha*
PT Inco Global Nusantara	440.663.601	1.007.824.551	*PT Inco Global Nusantara*
Lainnya	887.994.620	4.099.837.107	*Others*
Sub Jumlah	**4.320.183.130**	**7.450.039.513**	***Sub Total***
Sub Jumlah Entitas Induk	**33.143.497.112**	**34.410.492.610**	***Sub Total Parent Entity***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Sarana Bandar Nasional	1.945.564.099	1.371.788.715	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	4.809.149.140	12.870.784.185	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah Entitas Anak	**6.754.713.239**	**14.242.572.900**	***Sub Total Subsidiaries***
Jumlah	**39.898.210.351**	**48.653.065.510**	***Total***

25. UTANG KEPADA NEGARA / *25. DEBT TO THE STATE*

31 Desember/*December 31,* 2023					
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2023 / *Balance Dec 31. 2023***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity***
KFW - Spareparts	1.25%	2025	20.852.866.800	2.316.985.200	18.535.881.600
KFW - KM Labobar	1.25%	2025	11.740.728.600	1.304.525.400	10.436.203.200
Jumlah / *Total*			**32.593.595.400**	**3.621.510.600**	**28.972.084.800**

31 Desember/*December 31,* 2022					
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2022 / *Balance Dec 31. 2022***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity***
KFW - Spareparts	1.25%	2025	22.592.685.215	2.053.879.790	20.538.805.425
KFW - KM Labobar	1.25%	2025	12.720.408.031	1.156.400.046	11.564.007.985
Jumlah / *Total*			**35.313.093.246**	**3.210.279.836**	**32.102.813.410**

25. UTANG KEPADA NEGARA (lanjutan)

KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1144/DP3/2001-Nilai Pinjaman DM 44.000.000.

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar DM 44.000.000 sesuai dengan Loan Agreement 1999 66 383 tanggal 31 Juli 2000 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Menteri Keuangan No. S-047/MK.17/2001 tanggal 15 Januari 2001 sebagai *Project Executing Agency* dan *Sub borrower* dalam rangka pengadaan *spareparts* untuk kapal penumpang yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank DKI Jakarta sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

a. Bagian A sebesar DM 28.600.000 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.

b. Bagian B sebesar DM 15.400.000 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 9,54% per tahun.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka menyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan *cut off date* pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar DM 28.468.125 atau setara dengan Euro 14.555.521 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2040 dan DM 15.328.990 atau setara dengan Euro 7.837.588.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA- 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA-488/SLA- 1144/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015 diubah menjadi:

a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR 22.393.109,43 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. yang terdiri dari:

   1) pinjaman lunak sebesar EUR 14.555.521,09.
   2) pinjaman komersil sebesar EUR 7.837.588,34.

***25. DEBT TO THE STATE** (continued)*

KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia : SLA - 1144/DP3/2001-Value of Loan DM 44,000,000.

Loans to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to DM 44,000,000 according to the 1999 66 383 Loan Agreement dated July 31, 2000 which was forwarded to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) through the Ministry of Finance letter No. S-047 / MK.17 / 2001 dated January 15, 2001 as Project Executing Agency and Sub-borrower in order to procure spare parts for passenger ships as outlined in the Agreement SLA No.1144/DP3/2001 dated February 25, 2001 between the Government of Indonesia with PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and PT Bank DKI Jakarta appoint as an intermediary in the payment of principal and interest costs with details of the loan as follows:

a. Part A of DM 28,600,000 as soft loans with an interest rate of 1.25% per year.

b. Part B of DM 15,400,000 as a commercial loan with an interest rate of 9.54% per year.

Based on the Minutes of Reconciliation in the Context menyelesaian sourced from the State Receivables Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33/PB4.1/PT Bank DKI/2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut off date of March 31, 2007 with total liabilities of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amounting to DM 28,468,125 or equivalent to Euro 14,555,521 to soft loans ended June 30, 2040 and DM 15,328,990 equivalent to Euro 7,837,588.

Based on the Amendment Agreement (Amendment) on the Loan Settlement Agreement No. SLA-1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of the Republic of Indonesia and company PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number; AMA-488 / SLA-1144 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015 changed to:

a. The principal liability of EUR 22,393,109.43 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law, which consists of:

   1) a soft loan of EUR 14,555,521.09.
   2) a commercial loan of EUR 7,837,588.34.

25. UTANG KEPADA NEGARA (lanjutan)

KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1144/DP3/2001-Nilai Pinjaman DM 44.000.000. (lanjutan)

b. Kewajiban non pokok senilai EUR2.457.823.45 dibayarkan selama 10 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2025 yang terdiri dari:

1) pinjaman lunak sebesar EUR 431.540,19.
2) pinjaman komersil sebesar EUR 2.026.283,26.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia. maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA-1144/DP3/2001) sebesar EUR2.457.823,45.

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16.361.340.

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW)* merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar Euro 81.806.700 sesuai dengan Loan Agreement 2001 65 159 tanggal 1 Februari 2002 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Menteri Keuangan No. S-115/MK.17/2002 tanggal 22 April 2002 sebesar Euro 16.361.340 dalam rangka pengadaan Kapal Penumpang Nomor 23 Pelni yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga, dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

a. Bagian A sebesar Euro 8.180.670 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.

b. Bagian B sebesar Euro 8.180.670 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 6,39% per tahun.

25. DEBT TO THE STATE *(continued)*

KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia : SLA - 1144/DP3/2001-Value of Loan DM 44,000,000. *(continued)*

b. Non principal liabilities of EUR 2,457,823.45 are payable for 10 years from 2016 to 2025 consisting of:

1) a soft loan of EUR 431,540.19.
2) a commercial loan of EUR 2,026,283.26.

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1144 / DP3 / 2001) of EUR2,457,823.45.

KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340.

Loans to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to Euro 81,806,700 according to the 2001 65 159 Loan Agreement dated February 1, 2002 which was forwarded to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) through the Ministry of Finance letter No. S-115/MK.17/2002 April 22, 2002 amounted to Euro 16,361,340 in order to procure Passenger Vessel No. 23 Pelni as outlined in the Agreement SLA No.1151/DP3/2002 dated May 30, 2002 between the Government of Indonesia with PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (BRI) as an intermediary in the payment of principal and interest costs, with details of the loan as follows:

a. Part A of Euro 8,180,670 as a soft loan with an interest rate of 1.25% per year.

b. Section B of Euro 8,180,670 as a commercial loan with an interest rate of 6.39% per year

25. UTANG KEPADA NEGARA (lanjutan)

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16.361.340. (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 34/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan *cut off date* pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Euro 7.469.800 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2042 dan Euro 7.460.000 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA - 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA- 489/SLA - 1151/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015, diubah menjadi:

a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR 14.929.800 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

   1) pinjaman lunak sebesar EUR 7.469.800.
   2) pinjaman komersil sebesar EUR 7.460.000.

b. Kewajiban non pokok senilai EUR 1.383.833,45 dibayarkan selama 10 tahun dai tahun 2016 sampai dengan 2015 yang terdiri dari:

   1) pinjaman lunak sebesar EUR 220.414,14.
   2) pinjaman komersil sebesar EUR 1.163.419,31.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia. maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA- 1151/DP3/2002) sebesar EUR 1.383.833,45. (Lihat Catatan 28).

***25. DEBT TO THE STATE** (continued)*

***KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340.** (continued)*

Based on the Minutes of Settlement Reconciliation in the Context of State Receivables sourced from Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Pelayaran Nasional Indonesian No. 34/PB4.1/PT Bank DKI/ 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut off date of March 31, 2007 with total liabilities of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amounting to Euro 7,469,800 for soft loans ended June 30, 2042 and Euro 7,460,000 for commercial loans ended June 30, 2015.

Based on the Amended Agreement (Amendment) to the Loan Forwarding Agreement Number SLA-1151/DP3/2002 dated May 30, 2002 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number; AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 dated December 1, 2015. changed to:

a. The principal liability of EUR 14,929,800 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law, which consists of:

   1) a soft loan of EUR 7,469,800.
   2) a commercial loan of EUR 7,460,000.

b. Non principal liabilities of EUR 1,383,833.45 are payable for 10 years from 2016 to 2015 consisting of:

   1) a soft loan of EUR 220,414.14.
   2) a commercial loan of EUR 1,163,419.31

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1151 / DP3 / 2002) of EUR 1,383,833.45. (See Note 28)

25. UTANG KEPADA NEGARA (lanjutan)

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16.361.340. (lanjutan)

Pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan penghapusan Utang SLA Non Pokok atas pinjaman AMA-448/SLA-1144/DSMI/2015 dan AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 kepada Pemerintah berdasarkan surat Kementerian BUMN RI Nomor: SR-464/MBU/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal usulan Tambahan Dana PMN Non Tunai dan Penghapusan Piutang pada BUMN untuk APBN TA 2021.

Pada tanggal 29 November 2021, melalui Surat Nomor S-111/MK.5/2021 perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pinjaman SLA Nomor: SLA-1144/DP3/2001 dan SLA-1151/DP3/2002 pada PT PELNI (Persero).

Skema penyelesaian yang disetujui adalah penyelesaian piutang Negara yang bersumber dari Perjanjian pinjaman Subsidiary Loan Agreement (SLA) Nomor SLA-1144/DP3/2001 dn SLA-1151/DP3/2002 dengan skema penjadwalan kembali pembayaran terhadap kewajiban nonpokok dengan jumlah sebesar EUR 2.112.911,70 selama 12 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun yaitu tahun 2021-2022, dan pembayaran angsuran selama 10 tahun dimulai sejak tahun 2023 s.d 2032 sebesar EUR 211.291,17 per tahun.

25. DEBT TO THE STATE *(continued)*

KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340. *(continued)*

On October 2, 2020, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) has submitted a proposal to write off Non-principal SLA Debt for loans AMA-448/SLA-1144/DSMI/2015 and AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 to the Government based on a letter The Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia Number: SR-464/MBU/07/2020 dated July 2, 2020 regarding the proposal for Additional Non-Cash PMN Funds and the Elimination of Receivables from SOEs for the 2021 FY APBN.

On November 29, 2021, PT PELNI (Persero) received Approval for Settlement of State Receivables Sourced from SLA Loans Number: SLA-1144/DP3/2001 and SLA-1151/DP3/2002 at PT PELNI (Persero) which will be followed up immediately.

The agreed settlement scheme is the settlement of State receivables originating from the Subsidiary Loan Agreement (SLA) No. SLA-1144/DP3/2001 and SLA-1151/DP3/2002 with a scheme to reschedule payments for non-principal obligations in the amount of EUR 2,112,911.70 for 12 years including a grace period of 2 years, namely 2021-2022, and installment payments for 10 years starting from 2023 to 2032 amounting to EUR 211,291.17 per year.

26. LIABILITAS JANGKA PANJANG / ***26. LONG-TERM LIABILITIES***

	31 Desember/ *December 31*, 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Liabilitas Jangka Panjang:			*Long-Term Liabilities:*
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	10.427.093.158	13.888.131.800	*Finance Lease Liabilities*
- Liabilitas Sewa Hak Guna	2.320.101.730	1.606.216.564	*Right of Use Lease Liabilities*
Jumlah	**12.747.194.888**	**15.494.348.364**	***Total***
Bagian Lancar Jt.Tempo 1 Tahun:			*Current Portion of Due to 1 year:*
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	(4.519.052.786)	(5.519.000.800)	*Finance Lease Liabilities*
Bagian Jt. Tempo Lebih dari 1 Tahun	**8.228.142.102**	**9.975.347.564**	***Portion Due more than 1 year***

Utang sewa pembiayaan per tanggal 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari pembelian kendaraan bermotor/alat angkut yang akan disewakan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan kepada pihak ketiga lainnya.

Liabilitas sewa merupakan perjanjian sewa yang terdiri dari sewa bangunan dan alat angkut yang memiliki jangka waktu sewa lebih dari 1 tahun sampai dengan tahun 2026.

As of December 31, 2021 the financial lease payables consists of the purchase of a motorized vehicle / transportation tool that will be leased to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and to other third parties.

Lease liabilities represent rental agreements which consist of rental of buildings and transportation equipment which have a rental period of more than 1 year until 2026.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG / *27. LIABILITIES OF LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Tingkat diskonto	5.70%	5.70%	*Discount Rate*
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	3%	3%	*The Projected rate of salary Increase*
Usia pensiun normal	57 Tahun	56 Tahun	*Normal retirement age*
Tingkat mortalita	Indonesia - VI (2019)	Indonesia - VI (2019)	*Mortality Rate*
Tingkat cacat tetap	0.02% per tahun	0.02% per tahun	*Permanent disability rate*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) awal periode	95.148.220.006	183.107.947.133	*Reserves (Prepaid Expenses) at beginning of period*
Pembayaran imbalan pada tahun berjalan	(3.350.697.784)	(9.092.818.877)	*Benefit payments in the current year*
Beban (pendapatan) imbalan pada Laba Rugi	16.408.097.694	20.215.264.014	*(Benefit) Expenses on the Profit and Loss*
Pendapatan (Beban) pada Penghasilan Komprehensif lain	70.008.373.896	(86.374.863.235)	*Benefits (Expenses) on other Comprehensive Income*
Iuran Pemberi kerja	(22.783.306.000)	(12.707.309.029)	*Employer Contributions*
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) akhir periode	**155.430.687.812**	**95.148.220.006**	*Reserves (Prepaid Expenses) at end of period*
Entitas Anak	7.422.393.322	6.517.035.354	***Subsidiaries***
Jumlah	**162.853.081.134**	**101.665.255.360**	***Total***

Rincian beban yang diakui di laporan laba rugi: / *Details of the expense recognized in the income statement:*

	2023	**2022**	
Biaya Jasa Kini	9.663.491.134	9.267.159.518	*Current service cost*
Biaya Bunga	35.110.191.698	33.264.415.036	*Interest Cost*
Pendapatan Bunga atas Aset	(28.365.585.138)	(22.316.310.540)	*Interest Income on Assets*
Jumlah	**16.408.097.694**	**20.215.264.014**	***Total***

28. MODAL SAHAM / *28. SHARES CAPITAL*

Modal dasar. ditempatkan dan disetor penuh masing masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Authorized Capital. issued and fully paid respectively on December 31, 2023 and 2022, are as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Lembar Saham/*Shares*	Nilai Nominal per Lembar Saham/ *Nominal Value per Share*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah Nilai Saham/ *Total Value of Shares*
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	7.629.900	1.000.000	100%	7.629.900.000.000
Jumlah / *Total*	**7.629.900**	**1.000.000**	**100%**	**7.629.900.000.000**

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

Total 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp7.629.900.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (pemegang saham) dengan cara sebagai berikut:

a. Sebesar Rp7.065.092.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta No. 1, tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 tanggal 02 Februari 2016.

b. Sebesar Rp564.807.589.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi utang pokok Subsidiary Loan Agreement (SLA) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016.

c. Sebesar Rp411.000 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto sebagaimana suratnya nomor LAI_AU- 015/KAP.BM&W/BM/VI/2016 tanggal 01 April 2016.

***28. SHARES CAPITAL** (continued)*

Total 100% of the nominal value of each issued share or a total of Rp7,629,900,000,000 has been fully paid-up by the Republic of Indonesia (shareholders) in the following manner:

a. Amounting to Rp7,065,092,000,000 represents old capital deposits in accordance with Deed No. 1, dated February 1, 2016 made before the Notary Ida Adiningsih, SH., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHUAH.01.03-0012165 dated February 02, 2016.

b. Amounting to Rp564,807,589,000 originating from the 2016 State Budget through the conversion of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Subsidiary Loan Agreement (SLA) to the Republic of Indonesia based on the Loan Forwarding Agreement Number 1144/DP3/2001 dated February 25, 2001 and Number 1151/DP3/2002 dated May 30, 2002 as stipulated in Government Regulation Number 87 of 2016.

c. amounting to Rp411,000 which comes from the capitalization of a portion of the Company's reserves as recorded in the Financial Statements for the 2015 Financial Year which has been audited by KAP Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto as his letter number LAI_AU- 015/KAP.BM&W/BM/VI/2016 dated April 01, 2016.

29. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

29. GOVERNMENT CAPITAL

Landasan Hukum/ ***Legal Foundation***	**Penyertaan Modal Pemerintah/** ***Goverment Capital***	**Pengalihan/** ***Redirect***	**Jumlah /** ***Total***
PP. RI No. 40 Tahun 1992	309.143.585.642	(309.000.000.000)	143.585.642
PP. RI No. 87 Tahun 2016	564.807.589.000	(564.807.589.000)	-
Jumlah / ***Total***	**873.951.174.642**	**(873.807.589.000)**	**143.585.642**

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Non Tunai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan nilai sebesar Rp564.807.589.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi Utang *Soft Loan Agreement (SLA)* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia kepada Negara Republik Indonesia.

The addition of the Government of Non Cash by the Indonesian Government Regulation No. 87 Year 2016 About the Addition of Investment of the Republic of Indonesia in Capital Shares Owned Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia with a value of Rp564,807,589,000 sourced from budget of the State 2016 through the conversion of debt Soft Loan Agreement (SLA) Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia to the Republic of Indonesia.

30. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *ADDITIONAL PAID IN CAPITAL*

Merupakan tambahan modal yang berasal dari Pelepasan Kepemilikan di PT RS Pelni per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

This account to loss of control of entity Is the Additional capital of the year is from divesment of interest at PT RS Pelni to December 31, 2023 as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Saldo Awal			*Beginning balance*
Nilai Pelepasan:	397.878.907.714	397.878.907.714	*Divesment Values:*
Jumlah	**397.878.907.714**	**397.878.907.714**	***Total***

31. CADANGAN DITENTUKAN PENGGUNAANNYA / *APPROPRIATED RETAINED EARNINGS*

Merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari laba setelah pajak yang belum ditentukan peruntukkannya sebagai berikut:

It is a proposal formed based on the General Meeting of Shareholders of the income after the unspecified tax as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	1.169.417.204.918	1.128.489.393.747	*Beginning Balance*
Penggunaan Laba	173.247.926.578	40.927.811.171	*Distribution Profit*
Saldo Akhir	**1.342.665.131.496**	**1.169.417.204.918**	***Ending Balance***

Lihat Catatan 32. / *See Note 32.*

32. SALDO LABA (DEFISIT) / *RETAINED EARNINGS (DEFICITS)*

Merupakan akumulasi laba tahun berjalan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Is the accumulated deficit of the year running up to 31 December 2023 and 2022 as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	(2.481.091.576.775)	(2.613.411.692.181)	***Beginning Balance***
Distribusi Saldo Laba Tahun Lalu:			*Distribution of Retained Earnings:*
Cadangan	(173.247.926.578)	(40.927.811.171)	*Appropriated Retained Earnings*
Laba Tahun Berjalan	201.201.847.651	173.247.926.578	*Profit of Current Year*
Saldo Akhir	**(2.453.137.655.701)**	**(2.481.091.576.775)**	***Ending Balance***

Penggunaan laba tahun buku 2022 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 32, tanggal 21 Juni 2023.

The use of profit for the year 2022 is accordance with the Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 32, date June 21, 2023.

Lihat Catatan 31. / *See Note 31.*

33. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA / *OTHER COMPONENT EQUITY*

	2023	2022	
Saldo Awal	(33.821.398.423)	(122.730.200.513)	*Beginning Balance*
Keuntungan (Kerugian) dari:			*Profit (Loss) from:*
- Aktuaria	(69.936.652.767)	88.908.802.090	*Current Actuarial -*
- Perubahan Nilai Wajar Aset Tetap	6.164.655.000	-	*Change in Fair Values of Property -*
Saldo Akhir	**(97.593.396.190)**	**(33.821.398.423)**	***Ending Balance***

34. KEPENTINGAN NON PENGENDALI / *34. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Pemegang Saham / *Shareholders*	% Penyertaan / *Participation*	Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (awal) / *Part of the owners of shares of non controlling interests (beginning)*	Dividen/Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / *Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital*	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / *Profit (Loss) Current Year*	Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (akhir) / *Part of shareholders of non controlling interests (end)*
31 Desember / *December 31,* 2023					
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.53% in SBN	80.000.000	2.192.768.320	260.875.926	2.533.644.246
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.50% in PID	10.000.000	920.161.708	140.120.763	1.070.282.471
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	2.00 % in PBN	60.000.000	126.582.144	8.407.260	194.989.404
Koperasi Sabanas/ *Cooperative Sabanas*	0.040 % in SBL	3.800.000	2.039.356	1.272.774	7.112.130
Koperasi Sabanas/ *Cooperative Sabanas*	1.00 % in SBI	50.000.000	9.689.673	18.702.121	78.391.794
Jumlah / *Total*		**203.800.000**	**3.251.241.201**	**429.378.844**	**3.884.420.045**

Pemegang Saham / *Shareholders*	% Penyertaan / *Participation*	Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (awal) / *Part of the owners of shares of non controlling interests (beginning)*	Dividen/Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / *Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital*	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / *Profit (Loss) Current Year*	Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (akhir) / *Part of shareholders of non controlling interests (end)*
31 Desember / *December 31,* 2022					
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.53% in SBN	80.000.000	1.965.954.463	226.092.244	2.272.046.707
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.50% in PID	10.000.000	784.379.644	134.290.632	928.670.276
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	2.00 % in PBN	5.000.000	121.573.869	5.008.275	131.582.144
Koperasi Sabanas/ *Cooperative Sabanas*	0.040 % in SBL	3.800.000	722.776	1.316.580	5.839.356
Koperasi Sabanas/ *Cooperative Sabanas*	1.00 % in SBI	50.000.000	-	9.689.673	59.689.673
Jumlah / *Total*		**148.800.000**	**2.872.630.752**	**376.397.404**	**3.397.828.156**

35. PENDAPATAN USAHA / *35. OPERATING REVENUES*

Pendapatan usaha merupakan penjualan jasa pelayaran dan jasa lainnya, terdiri dari:

Operating revenues represent the sale of shipping services and other services, consisting of:

	2023	2022	
Pendapatan Usaha. Bruto:			***Gross Operating Revenue:***
Penugasan Pemerintah	3.445.326.954.781	3.010.560.824.508	*Government Assignments*
Tambang Pasasi	1.350.800.921.672	1.024.601.800.851	*Ticketing*
Tambang Muatan	361.100.297.428	367.030.797.177	*Cargo*
Usaha Perkapalan Lainnya	36.029.980.734	21.635.522.511	*Other Shipping Business*
Usaha Perbengkelan	22.741.760.881	14.978.694.218	*Workshop Business*
Usaha Perhotelan	5.231.179.162	4.591.672.889	*Hospitality Business*
Usaha Penunjang Lainnya	550.534.360.381	468.342.394.302	*Other Supporting Enterprises*
Sub Jumlah	**5.771.765.455.039**	**4.911.741.706.456**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Reduksi Tambang Muatan	1.874.135.118	3.723.456.197	*Cargo Reduction*
Reduksi Tambang Pasasi	3.272.725.900	1.418.138.900	*Ticketing Reduction*
Sub Jumlah	**5.146.861.018**	**5.141.595.097**	***Sub Total***
Jumlah Pendapatan Usaha – Bersih	**5.766.618.594.021**	**4.906.600.111.359**	***Total Revenue - Net***

Pendapatan Penugasan Pemerintah merupakan kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik *(Public Service Obligation - PSO)* dan subsidi meliputi:

Government Assignment Revenue is compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) and subsidies assignments including:

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak;
c. Angkutan Barang di Laut (Tol Laut);
d. Kapal Perintis Milik Negara: dan
e. Kapal Rede.

a. Sea Freight for Economy Class Passengers;
b. Activities of Operation of Livestock Ships;
c. Freight in the Sea (Sea Toll);
d. State owned Pioneer ships; and
e. Rede Ships.

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi / *a. Sea Freight for Economy Class Passengers*

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 Nomor: HK.201/I/3/DJPL/2023 dan Nomor: TH.01.02-02/KNP/2023.

The revenue assignment for carrying out the obligations of public services for sea transportation for economy class passengers is based on the Agreement on the Implementation of Obligatory Services for Sea Transport for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2023 Number: HK.201/I/3/DJPL/2023 and Number: TH.01.02-02/KNP/2023.

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022 Nomor: HK.201/1/12/DJPL/2022 dan Nomor: TH.01-03-06/SS/2022.

The revenue assignment for carrying out the obligations of public services for sea transportation for economy class passengers is based on the Agreement on the Implementation of Obligatory Services for Sea Transport for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2022 Number: HK.201/1/12/DJPL/2022 and Number: TTH.01-03-06/SS/2022.

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (lanjutan)

Nilai perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.395.825.599.000 dan Rp2.150.524.860.000, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA – 999.07.1.985120/2023 pada tanggal 30 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 999.07.1.985120/2022 pada tanggal 18 November 2022.

Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

***35. OPERATING REVENUES** (continued)*

***a. Sea Freight for Economy Class Passengers** (continued)*

The value of the agreement on the implementation of public service obligations in the field of sea transportation for economy class passengers sourced from the state budget for 2023 and 2022 in the amount of Rp2.395.825.599.000 and Rp2,150,524,860,000 respectively, based on the Budget Implementation List (DIPA) of the State General Treasurer Budget Implementation Registration Number 2023 Number: DIPA – 999.07.1.985120/2023 on December 30, 2023 and Budget Implementation Registration Number 2022 Number: SP DIPA – 999.07.1.985120/2022 on November 18, 2022.

The number of trips and compensation per unit of ship carrying out the Sea Transport Sector Public Service Obligations for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2023 and 2022 are as follows:

No.	Nama Kapal/ *Name of Ship*	Jumlah Trip/ *Total Voyage*		Jumlah Kompensasi/ *Total Compensation (Rp)*	
		2023	2022	2023	2022
1	KM. Awu	24	23	69.639.465.743	53.547.059.361
2	KM. Binaiya	24	23	63.247.405.584	65.097.616.969
3	KM. Bukit Raya	24	22	73.302.840.984	65.240.597.021
4	KM. Bukit Siguntang	23	23	126.844.100.983	118.410.162.677
5	KM. Ciremai	20	18	118.152.399.916	91.493.629.126
6	KM. Dobonsolo	24	20	123.659.935.736	90.541.797.805
7	KM. Dorolonda	25	20	149.457.058.205	121.524.426.394
8	KM. Egon	22	21	64.206.513.323	49.366.076.392
9	KM. Gunung Dempo	24	24	130.271.519.367	120.796.112.003
10	KM. Jet Liner	46	35	87.179.200.574	75.712.450.766
11	KM. Kelimutu	24	23	60.750.092.989	55.752.485.152
12	KM. Kelud	46	46	123.031.259.597	104.068.411.182
13	KM. Labobar	24	23	174.563.733.554	153.389.677.333
14	KM. Lambelu	22	23	136.571.788.229	115.912.019.068
15	KM. Lawit	24	23	75.159.756.053	61.872.700.477
16	KM. Leuser	12	12	76.968.846.448	63.230.072.572
17	KM. Nggapulu	23	20	144.552.295.425	122.056.058.217
18	KM. Pangrango	23	23	61.519.041.151	52.363.175.135
19	KM. Sangiang	24	23	58.634.287.878	54.270.266.950
20	KM. Sinabung	23	24	143.282.608.388	112.512.462.590
21	KM. Sirimau	13	11	82.164.167.937	68.495.140.010
22	KM. Tatamailau	25	23	80.583.508.044	53.681.474.187
23	KM. Tidar	24	25	150.950.745.352	126.287.096.857
24	KM. Tilongkabila	24	24	56.892.436.863	52.516.565.763
25	KM. Umsini	24	23	152.828.616.036	123.751.037.450
26	KM. Wilis	20	24	58.167.335.379	46.108.695.639
Jumlah/*Total*		**631**	**599**	**2.642.580.959.738**	**2.217.997.267.098**

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak

Pendapatan penugasan penyelenggaraan subsidi pengoperasian kapal ternak didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Tahun Anggaran 2023 Nomor: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2022 dan Nomor: TH.12.28-10/SS/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD-II/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 pada tanggal 08 Desember 2023.

Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jaringan trayek tetap dan teratur *(liner)* sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJL 679 Tahun 2022 dan lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) *round voyage* sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal *(home base)* sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal, setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi Tahun Anggaran 2023 untuk pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1, tanpa menggunakan kapal pengganti kode Trayek: RT-1, yaitu Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok/Patimban - 1179/1005 - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 dengan target frekuensi per tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2023 sebesar Rp11.240.730.589 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.439454/2023 tanggal 30 November 2022.

Sedangkan pendapatan penugasan penyelenggaraan subsidi pengoperasian kapal ternak didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Tahun Anggaran 2022 Nomor: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2021 dan Nomor: TH.12.30- 03/SS/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang di amandemen sebanyak 3 kali dengan Nomor: 03.ADD/SATKERLALA/RT-1/XI/2022 pada tanggal 11 November 2022.

***35. OPERATING REVENUES** (continued)*

b. Activities of Operation of Livestock Ships

Assignment income for subsidizing operation of livestock vessels is based on the implementation of subsidization activities subsidy operation of livestock vessel year 2023 Number: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2022 and Number: TH.12.28-10/SS/2022 dated December 12, 2022, which 2 times amended with No. ADD-II/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 dated December 08, 2023.

The work of organizing subsidy activities for the operation of livestock vessels year in 2023 is based on a fixed and regular route network according to the Decree of the Director General of Sea Transportation Number: KP-DJL 679, 2022 and the length of ship shipping takes a maximum of one round voyage in accordance with the route stipulated in the Decree of the Director General of Sea Transportation, starting from the time the ship arrives at the base port (home base) until the ship arrives back at the base port, after sailing according to the specified port order.

The vessel used in the activities of subsidizing fiscal year in 2022 for operation of livestock vessels is KM. Camara Nusantara 1, without the use of a replacement vessel the code of route: RT- 1, namely Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok - 1179 - Kupang. The execution time of KM. Camara Nusantara 1 with a target frequency of January 1, 2023 to December 31, 2023.

The value of the activity of subsidizing operations of livestock vessel operation year 2022 amounted to Rp11.240.730.589 is charged to the Register of Budget (DIPA) registration Number: SP DIPA-022.04.439454/2023 dated November 30, 2022.

Assignment income for subsidizing operation of livestock vessels is based on the implementation of subsidization activities subsidy operation of livestock vessel year 2022 Number: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2021 and Number: TH.12.30-03/SS/2021 dated December 30, 2021, which 3 times amended with No. 03.ADD/SATKERLALA/RT-1/XI/2022 dated November 11, 2022.

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak (lanjutan)

Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak Tahun Anggaran 2022 berdasarkan jaringan trayek tetap dan teratur *(liner)* sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.997/DJPL/2021 dan lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) *round voyage* sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal *(home base)* sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal, setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi Tahun Anggaran 2022 untuk pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1, tanpa menggunakan kapal pengganti kode Trayek: RT-1, yaitu Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok - 1179 - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 dengan target frekuensi per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.049.197.531 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.439454/2022 tanggal 14 Desember 2021.

Tarif penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2023 dan 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak.

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik Tahun Anggaran 2023 untuk angkutan barang di laut didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2022 Tahap I Nomor: 01/KONTRAK-TL/PPK/PELNI/XII/DITLALA-2021 dan Nomor: TH.12.30-06/SS/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang di amandemen sebanyak 6 kali dengan Nomor: ADD.32/PELNI/XII/PPK/DITLALA-2022 pada tanggal 09 Desember 2022.

***35. OPERATING REVENUES** (continued)*

***b. Activities of Operation of Livestock Ships** (continued)*

The work of organizing subsidy activities for the operation of livestock vessels year in 2022 is based on a fixed and regular route network according to the Decree of the Director General of Sea Transportation Number: KP.997/DJPL/2021 and the length of ship shipping takes a maximum of one round voyage in accordance with the route stipulated in the Decree of the Director General of Sea Transportation, starting from the time the ship arrives at the base port (home base) until the ship arrives back at the base port, after sailing according to the specified port order.

The vessel used in the activities of subsidizing fiscal year in 2022 for operation of livestock vessels is KM. Camara Nusantara 1, without the use of a replacement vessel the code of route: RT- 1, namely Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok - 1179 - Kupang. The execution time of KM. Camara Nusantara 1 with a target frequency of January 1, 2022 to December 31, 2022.

The value of the activity of subsidizing operations of livestock vessel operation year 2022 amounted to Rp11,049,197,531 is charged to the Register of Budget (DIPA) registration Number: SP DIPA-022.04.439454/2022 dated December 14, 2021.

Rates implementation of the activities of livestock vessels operating subsidy of fiscal year 2022 and 2021 based on Regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia Number 76 Year 2019 on Freight rates for Ships Operating Subsidies Livestock Event.

Income assignment for the implementation of public service obligation of Fiscal Year 2021 for freight in the sea is based on the agreement of Public service obligation to transport goods in the Sea year budget 2022 Number: 01/KONTRAK-TL/PPK/PELNI/XII/DITLALA-2021 and Number: TH.12.30-06/SS/2021 dated December 30, 2021, which 6 times amended with No. ADD.32/PELNI/XII/PPK/DITLALA-2021 dated December 9, 2022.

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

c. Angkutan Barang di Laut (Tol Laut)

Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal dan kode trayek yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

***35. OPERATING REVENUES** (continued)*

c. Freight in the Sea (Sea Toll)

The number of trips and compensation per unit of ship and route code that carry out the Public Service Transport Obligations in the Sea in the Fiscal Year 2023 and 2022 are as follows:

No.	Nama Kapal/ *Name of Ship*	Kode Trayek/ Route Code		Jumlah Trip/ Total Voyage		Jumlah Kompensasi/ *Total Compensation (Rp)*	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
1	KM. Caraka Jaya Niaga III-22				6	-	7.651.023.927
2	KM. Kendhaga Nusantara 1	T-5	T-5	21	26	10.255.628.774	9.863.061.127
3	KM. Kendhaga Nusantara 11	T-13	T-13	10	20	10.487.653.435	13.762.925.123
4	KM. Kendhaga Nusantara 7	T-14	T-14	16	15	12.712.880.736	14.021.408.638
5	KM. Kendhaga Nusantara 8	T-19	T-19	12	9	15.731.201.405	11.744.937.122
6	KM. Logistik Nusantara I	T-11	T-28B	10	13	28.733.616.435	23.509.802.324
7	KM. Logistik Nusantara II	H-1	T-9	11	9	20.097.495.257	17.625.013.341
8	KM. Logistik Nusantara III	T-15	T-15	11	10	19.498.742.633	15.916.861.076
9	KM. Logistik Nusantara IV	T-3	T-3	9	15	20.392.136.960	17.604.955.720
10	KM. Logistik Nusantara V	T-10	T-10	5	10	18.071.789.610	29.608.807.344
11	KM. Logistik Nusantara VI		H-1	4	8	18.267.436.094	20.142.170.639
				109	**141**	**174.248.581.339**	**181.450.966.381**

Kapal Logistik Nusantara V merupakan kapal cadangan, sehingga tidak mendapatkan rute trayek normal.

The Logistik Nusantara V ship is a reserve ship, so it does not get normal routes.

d. Kapal Perintis Milik Negara

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2023 Nomor: 04/KTRK/PRTS/PELNI/IX/2023 dan Nomor TH.09.25-01/KNP/2023 tanggal 25 September 2023, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD.01/PRTS/PELNI/III/2023 pada tanggal 02 Maret 2023.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara tahun anggaran 2023 sebesar Rp380.349.898.000, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2023 tanggal 30 November 2022.

d. State Owned Pioneer Ships

The assignment income for public service activities of the State owned pioneer ship is based on the agreement on Organizing public service activities of the State owned pioneer ship fiscal year 2023 Number : 04/KTRK/PRTS/PELNI/IX/2023 and Number TH.09.25-01/KNP/2023 dated September 25, 2023, which 2 times amended with Number: ADD.01/PRTS/PELNI/III/2023 dated March 02, 2023.

The value of the agreement on the implementation of public service activities of pioneering vessels belonging to the State in 2023 fiscal year amounting to Rp380.349.898.000, is charged to the Budget Implementation Entry List (DIPA) No. : SP DIPA-022.04.1.439454/2023 dated November 30, 2022.

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

d. Kapal Perintis Milik Negara (lanjutan)

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2022 Nomor: 03/KTRK/PRTS/PELNI/VIII/2022 dan Nomor TH.08.24-06/SS/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang di amandemen sebanyak 3 kali dengan Nomor: 06/KTRK/ADD/PRTS/PELNI/XII/2022 pada tanggal 06 Desember 2022.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara tahun anggaran 2022 sebesar Rp324.677.000.000, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2022 tanggal 17 November 2021.

e. Kapal Rede

Pendapatan Kapal Rede didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor 01/KTRK/REDE/PELNI/XII/2023 dan Nomor:TH.12.28-09/SS/2022 pada tanggal 28 Desember 2022.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) tahun anggaran 2023 sebesar Rp44.000.000.000 yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor SP-DIPA 022.04.1.439454/2023 Tanggal 30 November 2022.

Pendapatan Kapal Rede didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor 01/KTRK/REDE/PELNI/XII/2021 dan Nomor:TH.12.30-05/SS/2021 pada tanggal 30 Desember 2021 yang diamandemen dengan No. 04/KTRK/ADD/REDE/PELNI/XII/2022 pada tanggal 07 Desember 2022.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) tahun anggaran 2022 sebesar Rp40.163.940.000 yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor SP DIPA-022.04.1.439454/2022 Tanggal 17 November 2021.

35. OPERATING REVENUES *(continued)*

d. State Owned Pioneer Ships *(continued)*

The assignment income for public service activities of the State owned pioneer ship is based on the agreement on Organizing public service activities of the State owned pioneer ship fiscal year 2022 Number : 03/KTRK/PRTS/PELNI/VIII/2022 and Number TH.08.24-06/SS/2022 dated Agust 24, 2022, which 3 times amended with Number: 06/KTRK/ADD/PRTS/PELNI/XII/2022 dated December 6, 2022.

The value of the agreement on the implementation of public service activities of pioneering vessels belonging to the State in 2020 fiscal year amounting to Rp324,677,000,000, including 10% VAT, is charged to the Budget Implementation Entry List (DIPA) No. : SP DIPA-022.04.1.439454/2022 dated November 17, 2021.

e. Rede Ships

The assignment income for Kapal Rede is based on the Agreement for the Implementation of Port Water Transportation Activities by Using State-Owned Vessels (Rede Ship) for Fiscal Year 2023 with Number 01/KTRK/REDE/PELNI/XII/2023 and Nomor:TH.12.28-09/SS/2022 dated December 28, 2023.

The amount of the agreement's port water transportation service activities using State Owned Ships (Rede Ship) for the 2023 fiscal year is equal to Rp44.000.000.000 is charged to the Budget Implementation Entry List (DIPA) (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat No. SP-DIPA 022.04.1.439454/2023 dated November 30, 2022.

The assignment income for Kapal Rede is based on the Agreement for the Implementation of Port Water Transportation Activities by Using State-Owned Vessels (Rede Ship) for Fiscal Year 2021 with Number 01/KTRK/REDE/PELNI/XII/2021 and Nomor:TH.12.30-05/SS/2021 dated December 30, 2021 as amended by No. 04/KTRK/ADD/REDE/PELNI/XII/2022 dated December 7, 2022.

The amount of the agreement's port water transportation service activities using State Owned Ships (Rede Ship) for the 2022 fiscal year is equal to Rp40,163,940,000 including VAT charged to Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat No. SP DIPA- 022.04.1.439454 / 2022 dated November 17, 2021.

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan) / *OPERATING REVENUES (continued)*

Pendapatan Penugasan Pemerintah merupakan kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik *(Public Service Obligation - PSO)* dan Subsidi meliputi:

Government Assignment Revenue is compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) and Subsidies assignments including:

	2023	2022	
Kapal Penumpang Kelas Ekonomi	2.642.580.959.738	2.220.615.978.118	*Economy Class Passenger Ships*
Subsidi - Kapal Perintis	578.850.104.656	557.280.742.477	*Subsidies - Pioneer Ships*
Subsidi - Kapal Tol Laut	174.248.581.339	181.450.966.381	*Subsidies - Sea Toll Ship*
Subsidi - Kapal Ternak	8.593.240.759	11.049.197.530	*Subsidies - Cattle Ships*
Subsidi - Kapal Rede	41.054.068.289	40.163.940.002	*Subsidies - Rede Ships*
Jumlah	**3.445.326.954.781**	**3.010.560.824.508**	***Total***

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA / *COST OF REVENUES*

	2023	2022	
Perkapalan	1.902.892.774.389	1.621.171.621.281	*Shipping*
Penumpang	540.459.666.057	435.576.009.942	*Passenger*
Pegawai	788.042.238.070	744.799.702.603	*Employee*
Pemeliharaan dan Perbaikan	725.217.535.128	555.861.345.670	*Maintenance and Repair*
Penyusutan dan Amortisasi *)	429.789.982.937	341.838.611.941	*Depreciation and Amortization*
Asuransi	52.597.179.450	46.552.687.245	*Insurance*
Muatan Ternak	9.106.349.542	3.357.982.941	*Livestock Cargo*
Kendali Mutu Pelayanan	14.208.647.233	13.342.270.939	*Quality Service Control*
Perbengkelan	16.661.809.803	10.043.289.601	*Workshop*
Perhotelan	2.552.969.267	2.479.805.560	*Hospitality*
Sewa	2.931.855.970	2.070.391.688	*Rent*
Pajak dan Retribusi	21.254.000	6.906.000	*Taxes and Levies*
Beban Pokok Lainnya	409.575.311.056	341.393.391.208	*Other Cost of Revenues*
Jumlah	**4.894.057.572.901**	**4.118.494.016.618**	***Total***

)** Lihat Catatan 15,16,17 dan 18 / *)*** *See Note 15, 16, 17, and 18.*

37. BEBAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI / *MARKETTING AND DISTRIBUTION EXPENSES*

	2023	2022	
Kehumasan	10.076.245.376	6.706.019.142	*Public Relations*
Penjualan	5.009.469.814	4.764.976.835	*Sales*
Promosi dan Periklanan	819.922.010	1.613.830.028	*Promotion and Advertising*
Pemasaran Lainnya	5.275.699.163	2.002.733.710	*Others Marketing*
Jumlah	**21.181.336.363**	**15.087.559.715**	***Total***

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *38. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2023	2022	
Pegawai	478.109.952.777	444.178.505.713	*Employees*
Pemeliharaan dan Perbaikan	41.218.342.131	49.023.291.272	*Maintenance and Repair*
Konsultan dan Audit	39.083.408.559	33.411.948.016	*Audit and Consultant*
Penyusutan dan Amortisasi *)	41.373.767.717	25.423.839.757	*Amortization and Depreciation*
Sewa	13.133.651.512	12.690.374.430	*Rent*
Adminsitrasi Perkantoran	18.990.503.329	19.075.557.929	*Office Administration*
Rumah Tangga	18.637.729.842	17.740.334.450	*Household*
Provisi Penurunan Nilai Piutang	5.448.745.350	14.636.287.414	*Provision of Impairment of Receivables*
Keamanan dan Keselamatan	826.928.813	58.465.000	*Security and Safety*
Asuransi	8.728.328.017	9.081.863.371	*Insurance*
Pajak dan Restribusi	13.980.250.546	6.414.737.339	*Taxes and Levies*
PKBL	8.041.180.709	6.115.116.751	*PKBL*
Imbalan Paska Kerja	17.417.655.411	2.603.538.310	*Post Employment Benefits*
Perencanaan dan Pengembangan	1.586.561.865	879.283.081	*Development and Planning*
Sumbangan	993.382.106	871.315.228	*Donations*
Denda/Klaim	23.139.173	198.588.406	*Penalties / Claims*
Olah Raga dan Kesenian	447.645.873	130.264.500	*Sport and Art*
Lainnya	24.222.530.370	24.455.258.736	*Others*
Jumlah	**732.263.704.100**	**666.988.569.702**	***Total***

)** Lihat Catatan 15,16,17 dan 18 / *)*** See Note 15, 16, 17, and 18.

39. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA / *39. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)*

	2023	2022	
a. Pendapatan Non Usaha:			***a. Non-Operating Revenues:***
Bunga	103.977.620.041	43.632.070.638	*Interest*
Klaim Asuransi	3.194.800.560	36.931.414.668	*Insurance Claim*
Laba Entitas Asosiasi	32.401.750.716	29.777.496.887	*Associated Entity's Profit*
Keuntungan Perubahan Nilai Wajar Aset Non Keuangan	12.449.175.490	18.443.348.439	*Gains of Changing Fair Value of Non-Financial Assets*
Jasa Administrasi	15.724.561.910	11.893.663.049	*Administration Services*
Keuntungan Selisih Kurs	9.808.644.374	5.347.446.015	*Foreign Exchange Gains*
Jasa Giro	4.791.528.084	4.844.897.635	*Current Account Service*
Keuntungan Penjualan Aset	22.578.587.055	3.065.029.695	*Gains of Asset Sale*
Denda	3.011.037.910	684.231.494	*Penalties*
Pelunasan Piutang Dihapuskan	191.077.866	92.215.234	*Repayment of Accounts Receivable*
Lainnya	21.802.113.036	35.640.545.550	*Others*
Sub Jumlah	**229.930.897.042**	**190.352.359.304**	***Sub Total***
b. Beban Non-Usaha:			***b. Non-Operating Expenses:***
Administrasi Bank	3.486.765.288	1.664.865.578	*Bank Administration*
Kerugian Selisih Kurs	9.259.962.163	1.359.655.437	*Foreign Exchange Losses*
Beban Keuangan	572.935.932	846.858.408	*Financial Expenses*
Lainnya	37.206.364.107	18.115.247.215	*Others*
Sub Jumlah	**50.526.027.490**	**21.986.626.638**	***Sub Total***
Jumlah Pendapatan Non Usaha - Bersih	**179.404.869.552**	**168.365.732.666**	***Total Non Operating Income - Net***

39. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

Keuntungan perubahan nilai wajar aset non keuangan merupakan kenaikan perubahan nilai wajar properti investasi tanah dan gedung.

Keuntungan penjualan aset tahun 2023 merupakan penjualan KM Caraka III-32 dan III-4 Sebesar Rp18.225.225.225 yang dimiliki oleh entitas induk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan penjualan alat angkut sebesar Rp4.119.611.830 yang dimiliki Entitas Anak PT Pelita Indonesia Djaya.

Pendapatan klaim asuransi merupakan pendapatan klaim KM Logistik Nusantara 4.

Laba entitas asosiasi merupakan pengakuan bagian laba tahun berjalan PT Rumah Sakit PELNI.

39. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)

The gains of changing the fair value of non financial assets is an increase in the fair value of investment property of land and buildings.

The gain on sale of assets in 2023 represents the sale of KM Caraka III-32 and III-4 amounting to Rp18,225,225,225 owned by the parent entity PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and the sale of transport equipment amounting to Rp4,119,611,830 owned by the subsidiary PT Pelita Indonesia Djaya.

Insurance claim income represents KM Logistik Nusantara 4 claim income.

Profit of associates represents the recognition of share of profit for the year of PT Rumah Sakit PELNI

40. INFORMASI SEGMEN USAHA

a. Segmen Penugasan dan Non Penugasan

40. SEGMENT INFORMATION

a. Assignment and Non Assignment Segment

	2023		2022		
	Penugasan / *Assignment*	Non Penugasan / *Non Assignment*	Penugasan / *Assignment*	Non Penugasan / *Non Assignment*	
Pendapatan Usaha	4.812.113.075.593	968.046.226.206	4.066.031.399.772	845.710.306.684	*Operating Revenues*
Reduksi Pendapatan Usaha	-	(13.540.707.778)	-	(5.141.595.097)	*Reduction in Operating Revenues*
Pendapatan Usaha Bersih	**4.812.113.075.593**	**954.505.518.428**	**4.066.031.399.772**	**840.568.711.587**	***Net Operating***
Beban Pokok Usaha	(4.029.309.404.009)	(864.749.251.141)	(3.398.516.535.239)	(719.977.481.379)	*RevenueOperating Expenses*
Laba Kotor	**782.803.671.584**	**89.756.267.287**	**667.514.864.533**	**120.591.230.208**	***Gross Profit***
Beban Pemasaran dan Distribusi	-	(21.181.336.363)	-	(15.087.559.715)	*Distribution and Marketing Expense*
Beban Umum dan Administrasi	(344.019.180.241)	(388.243.441.608)	(286.462.028.880)	(380.526.540.822)	*General and Administration Expense*
Laba (Rugi) Usaha	**438.784.491.343**	**(319.668.510.684)**	**381.052.835.653**	**(275.022.870.329)**	***Operating Profit or (Loss)***
Pendapatan (Beban) Non Usaha Lainnya, Bersih	-	179.404.869.551	-	168.365.732.666	*Non Operating Income (Expense) Net*
Laba Sebelum Pajak	**438.784.491.343**	**(140.263.641.133)**	**381.052.835.653**	**(106.657.137.663)**	***Profit Before Tax***
Beban Pajak	(57.745.356.907)	(39.144.266.808)	(73.832.733.844)	(26.943.774.205)	*Tax Expense*
Laba Tahun Berjalan	**381.039.134.436**	**(179.407.907.941)**	**307.220.101.809**	**(133.600.911.868)**	***Profit For The Current Year***

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / ***40. SEGMENT INFORMATION*** *(continued)*

b. Segmen Wilayah / ***b. Region Segment***

b.1. Pendapatan Usaha menurut wilayah / ***b.1. Operating Revenue by Region***

	2023		2022		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	81.445.789.799	1,41%	68.292.025.998	1,39%	*Sumatera*
Jawa	4.579.593.197.728	79,42%	3.839.565.526.713	78,25%	*Jawa*
Kalimantan	155.264.705.639	2,69%	150.982.439.440	3,08%	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	148.205.906.534	2,57%	144.465.352.743	2,94%	*Bali dan Nustra*
Sulawesi, Maluku dan Papua	802.108.994.321	13,91%	703.294.766.465	14,33%	*Sulawesi, Maluku dan Papua*
Jumlah	**5.766.618.594.021**	**100,00%**	**4.906.600.111.359**	**100,00%**	***Total***

b.2. Hasil Usaha Laba (Rugi) Kotor menurut Wilayah / ***b.2. Results of Gross Operations Income (loss) by Region***

	2023		2022		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	52.046.212.039	5,96%	29.731.444.902	3,77%	*Sumatera*
Jawa	262.526.727.122	30,09%	562.460.497.286	71,37%	*Jawa*
Kalimantan	109.143.660.179	12,51%	107.202.989.083	13,60%	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	96.431.441.094	11,05%	76.036.088.130	9,65%	*Bali dan Nustra*
Sulawesi, Maluku dan Papua	352.411.898.436	40,39%	12.675.075.340	1,61%	*Sulawesi, Maluku dan Papua*
Jumlah	**872.559.938.870**	**100,00%**	**788.106.094.741**	**100,00%**	***Total***

b.3. Aset menurut Wilayah / ***b.3. Assets by Region***

	2023		2022		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	212.074.189.687	2,64%	170.882.915.819	2,22%	*Sumatera*
Jawa	6.780.310.176.021	84,37%	6.376.304.992.785	82,66%	*Jawa*
Kalimantan	524.995.136.711	6,53%	433.071.459.068	5,61%	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	329.707.555.082	4,10%	248.995.169.157	3,23%	*Bali dan Nustra*
Sulawesi, Maluku dan Papua	188.945.440.102	2,35%	484.723.834.503	6,28%	*Sulawesi, Maluku dan Papua*
Jumlah	**8.036.032.497.603**	**100,00%**	**7.713.978.371.332**	**100,00%**	***Total***

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / ***40. SEGMENT INFORMATION*** *(continued)*

b. Segmen Wilayah (lanjutan) / ***b. Region Segment*** *(continued)*

b.4. Properti Investasi, Alat Produksi, Aset Tetap, Aset Takberwujud dan Aset Hak Guna menurut Wilayah / ***b.4. Investment Property, Production Equipment, Fixed Assets, Intangible Assets and Right to Use Assets by Region***

	2023		2022		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	33.330.260.196	1,25%	26.621.168.291	0,93%	*Sumatera*
Jawa	2.391.448.495.628	89,84%	2.608.348.471.050	90,84%	*Jawa*
Kalimantan	37.519.103.924	1,41%	35.476.291.250	1,24%	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	22.623.609.709	0,85%	22.928.218.779	0,80%	*Bali dan Nustra*
Sulawesi, Maluku dan Papua	177.011.866.891	6,65%	178.117.984.878	6,20%	*Sulawesi, Maluku dan Papua*
Jumlah	**2.661.933.336.348**	**100,00%**	**2.871.492.134.248**	**100,00%**	***Total***

b.5. Biaya penyusutan menurut wilayah / ***b.5. Depreciation costs by region***

	2023		2022		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	926.583.130	0,20%	784.193.587	0,21%	*Sumatera*
Jawa	457.468.815.503	97,31%	360.802.544.182	97,04%	*Jawa*
Kalimantan	2.296.795.497	0,49%	1.930.208.082	0,52%	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	838.188.113	0,18%	745.511.637	0,20%	*Bali dan Nustra*
Sulawesi, Maluku dan Papua	8.595.827.017	1,83%	7.548.993.072	2,03%	*Sulawesi, Maluku dan Papua*
Jumlah	**470.126.209.260**	**100,00%**	**371.811.450.560**	**100,00%**	***Total***

b.6. Liabilitas menurut wilayah / ***b.6. Liabilities by region***

	2023		2022		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	16.850.322.091	1,39%	15.271.832.390	1,49%	*Sumatera*
Jawa	1.081.420.616.303	89,20%	925.763.818.615	90,04%	*Jawa*
Kalimantan	31.229.544.589	2,58%	23.555.788.471	2,29%	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	21.519.880.055	1,78%	11.726.367.583	1,14%	*Bali dan Nustra*
Sulawesi, Maluku dan Papua	61.271.141.563	5,05%	51.836.013.040	5,04%	*Sulawesi, Maluku dan Papua*
Jumlah	**1.212.291.504.601**	**100,00%**	**1.028.153.820.099**	**100,00%**	***Total***

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut :

41. RELATED PARTY TRANSACTION

The nature of relationship and type of material transactions with parties who have a special relationship with the following details:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ *Nature of relationship Related Parties*	Transaksi/ *Transactions*
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R,I, / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	*Setara Kas, Piutang, Utang Usaha / Cash Equivalent, Receivable, Account Payable*
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R,I, / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	*Setara Kas, Piutang / Cash Equivalent, Receivable*
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R,I, / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	*Setara Kas / Cash equivalent*
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R,I, / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	*Setara Kas / Cash equivalent*
5	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R,I, / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	*Setara Kas / Cash equivalent*
6	PT Adhi Karya	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R,I, / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
7	PT Jembatan Nusantara	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R,I, / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
8	Kementrian Perhubungan CQ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R,I, / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
9	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Personil Kunci / *Common Key Management*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
10	PT Hakaaston	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
11	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R,I, / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
12	PT Telekomunikasi Seluler	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
13	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R,I, / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
14	PT PP Urban	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
15	PT Waskita Beton Precast (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI ***41. RELATED PARTY TRANSACTION*** *(continued)*
(lanjutan)

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ *Nature of relationship Related Parties*	Transaksi/ *Transactions*
16	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R,I, / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
17	PT PINDAD Internasional	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
18	PT Petrokimia Gresik	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
19	PT Pupuk Kaltim	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
20	PT Semen Indogreen Sentosa	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Asset*
21	Perum Bulog	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Asset*
22	PT Pertamina Patra Niaga	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
23	PT Asuransi Kredit Indonesia	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
24	PT Sarana Gama Sejahtera	Personil Kunci / *Common Key Management*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
25	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
26	PT Dock Perkapalan Kodja Bahari	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
27	PT Sucofindo (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
28	PT Isa Telkom	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
29	Kepala Operasi QQ Pelabuhan	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
30	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
31	PT Sigma Cipta Caraka	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI ***41. RELATED PARTY TRANSACTION*** *(continued)*
(lanjutan)

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ *Nature of relationship Related Parties*	Transaksi/ *Transactions*
32	PT Pertamina (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R,I, / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
33	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
34	Syahbandar	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
35	PT Pal Indonesia	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
36	PT Energi Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
37	PT Jasa Raharja Putra	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
38	PT Jasa Raharja (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*
39	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	*Utang Piutang / Receivable - Payable*

Jumlah tansaksi dengan pihak-pihak berelasi tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The amount of transactions with related parties in year 2023 and 2022 is as follows:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Jenis Transaksi/*Transaction Type*	Jumlah (Rp)/ *Amount (Rp)*	
			2023	2022
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas/*Cash and CashEquivalents*	281.575.752.261	338.854.840.428
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ *Restricted Cash and Cash Equivalent*	180.182.740.328	175.514.618.712
		Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	-	36.850.000
		Utang Usaha/*Account Payable*	-	71.689.333
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalents	797.152.408.747	949.293.355.910
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ Penempatan Jangka Pendek/Short Term Investment	57.300.000	57.300.000
		Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	119.304.857	119.304.857
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas/*Cash and CashEquivalents*	649.778.584.170	674.834.219.117
		Utang Usaha/*Account Payable*	-	3.112.064
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas/*Cash and CashEquivalents*	742.835.165.241	528.541.167.016
5	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kas dan Setara Kas/*Cash and CashEquivalents*	1.018.537.109.337	1.002.437.947.376

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI ***41. RELATED PARTY TRANSACTION*** *(continued)*
(lanjutan)

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Jenis Transaksi/*Transaction Type*	Jumlah (Rp)/ *Amount (Rp)*	
			2023	2022
6	PT Adhi Karya	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	16.688.163.356	-
		Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	532.617.005	14.249.606.106
7	PT Jembatan Nusantara	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	8.445.206.939	5.113.493.723
8	Kementrian Perhubungan CQ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	8.169.761.989	-
9	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	8.115.482.777	8.103.632.777
		Utang Usaha/*Account Payable*	1.079.238.547	8.158.605.928
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ *Other Short Term Financial Liabilities*	1.946.534.199	1.186.181.171
10	PT Hakaaston	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	7.881.677.596	12.246.366.112
		Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	1.031.407.690	4.316.401.230
11	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	1.829.078.586	245.793.670
12	PT Telekomunikasi Seluler	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	1.233.546.730	1.338.540.250
13	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	1.093.148.035	1.215.711.924
		Utang Usaha/*Account Payable*	6.822.642.017	14.069.793.470
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ *Other Short Term Financial Liabilities*	10.606.857.460	9.748.323.407
14	PT PP Urban	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	1.037.171.496	1.237.171.496
15	PT Waskita Beton Precast (Persero)	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	1.067.443.000	1.107.700.000
16	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	860.817.498	860.817.498
17	PT PINDAD Internasional	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	700.000.000	700.000.000
18	PT Petrokimia Gresik	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	-	910.267.434
19	Pupuk Kaltim	Piutang Usaha / *Accounts Receivable*	-	834.321.750
20	PT Semen Indogreen Sentosa	Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	73.432.043.258	-
21	Perum Bulog	Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	3.984.116.400	-
22	PT Pertamina Patra Niaga	Utang Usaha/Account Payable	6.200.424.585	10.378.475.386
23	PT Asuransi Kredit Indonesia	Utang Usaha/Account Payable	4.388.619.145	2.779.319.306
24	PT Sarana Gama Sejahtera	Utang Usaha/Account Payable	3.931.063.578	2.803.254.769
25	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	2.469.768.877	1.295.688.751
26	PT Dock Perkapalan Kodja Bahari	Utang Usaha/*Account Payable*	1.283.022.367	525.111.339
27	PT Sucofindo (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	1.237.095.000	210.357.000
28	PT Isa Telkom	Utang Usaha/*Account Payable*	1.158.154.950	278.350.000
29	Kepala Operasi QQ Pelabuhan	Utang Usaha/*Account Payable*	748.301.885	1.228.646.376

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *41. RELATED PARTY TRANSACTION (continued)*

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Jenis Transaksi/*Transaction Type*	Jumlah (Rp)/ *Amount (Rp)*	
			2023	2022
30	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	716.504.276	25.142.191
31	PT Sigma Cipta Caraka	Utang Usaha/*Account Payable*	687.405.600	1.039.083.334
32	PT Pertamina (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	628.552.000	628.552.000
33	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	600.601.583	2.339.501.254
34	Syahbandar	Utang Usaha/*Account Payable*	562.101.196	520.423.002
35	PT Pal Indonesia	Utang Usaha/*Account Payable*	-	539.609.000
36	PT Energi Pelabuhan Indonesia (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	-	563.102.000
37	PT Jasa Raharja Putra	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ *Other Short Term Financial Liabilities*	1.297.195.356	3.302.351.086
38	PT Jasa Raharja (Persero)	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ *Other Short Term Financial Liabilities*	77.660.652	1.391.310.938

42. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN / *42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian:

Here's an overview of the carrying value and the estimated fair value of financial instruments are stated in the statement of consolidated financial position:

	31 Desember/*December* 31, 2023		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset Keuangan:			***Financial Assets:***
Kas dan Setara Kas	3.494.572.510.108	3.494.572.510.108	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	118.837.699.666	118.837.699.666	*Account Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	811.020.551.456	811.020.551.456	*Other Current Financial Assets*
Jumlah	**4.424.430.761.229**	**4.424.430.761.229**	***Total***
Liabilitas Keuangan:			***Financial Liability:***
Pinjaman Jangka Pendek	22.000.000.000	22.000.000.000	*Short-Term Loans*
Utang Usaha	205.462.829.587	205.462.829.587	*Account Payables*
Beban Akrual	599.334.661.433	599.334.661.433	*Accrued Expenses*
Bagian Lancar atas:			*Current Portion of:*
Utang Kepada Negara	3.621.510.600	3.621.510.600	*Debt to the State*
Liabilitas Jangka Panjang	4.519.052.786	4.519.052.786	*Long-Term Liabilities*
Liabilitas Kontrak	78.061.221.471	78.061.221.471	*Contract Liability*
Liabiltias Keuangan Jangka Pendek Lainnya	39.898.210.351	39.898.210.351	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Kepada Negara	28.972.084.800	28.972.084.800	*Debt to the State*
Liabilitas Jangka Panjang	8.228.142.102	8.228.142.102	*Long-Term Liabilities*
Jumlah	**990.097.713.130**	**990.097.713.130**	***Total***

42. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

	31 Desember/*December* 31, 2022		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset Keuangan:			***Financial Assets:***
Kas dan Setara Kas	3.440.770.843.425	3.440.770.843.425	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	74.325.188.507	74.325.188.507	*Account Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	408.774.878.598	408.774.878.598	*Other Current Financial Assets*
Jumlah	**3.923.870.910.531**	**3.923.870.910.531**	***Total***
Liabilitas Keuangan:			***Financial Liability:***
Utang Usaha	209.169.771.797	209.169.771.797	*Account Payables*
Beban Akrual	485.845.655.751	485.845.655.751	*Accrued Expenses*
Bagian Lancar atas:			*Current Portion of:*
Utang Kepada Negara	3.210.279.836	3.210.279.836	*Debt to the State*
Liabilitas Jangka Panjang	5.519.000.800	5.519.000.800	*Long-Term Liabilities*
Liabilitas Kontrak	53.637.024.185	53.637.024.185	*Contract Liability*
Liabiltias Keuangan Jangka Pendek Lainnya	48.653.065.510	48.653.065.510	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Non Usaha Jangka Panjang	32.102.813.410	32.102.813.410	*Long Term Debt*
Liabilitas Jangka Panjang	15.494.348.364	15.494.348.364	*Long-Term Liabilities*
Jumlah	**853.631.959.654**	**853.631.959.654**	***Total***

43. RASIO PENGGUNAAN UTANG YANG TERKENA BUNGA

43. INTEREST BEARING DEBT RATIO

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	Deviasi/ *Deviation (%)*	
Utang yang Terkena Bunga	32.427.093.158	11.593.802.014	20.833.291.144	*Interest-Bearing Debt*
Rasio Penggunaan Utang yang Terkena Bunga				*Interest-Bearing Debt Ratio*
Utang terkena Bunga/ Ekuitas	**0,48%**	**0,18%**	**0,30%**	***Interest-Bearing Debt/ Equity***

44. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA - TIDAK DIAUDIT

44. REVIEW OF THE GOING CONCERN - UNAUDITED

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum go-public oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

Rasio/ Ratio	Rumus/ *Formula Altman Z-Score*		
Likuiditas	6,56	x	Modal Kerja Bersih / *Net Working Capital* Jumlah Aset / *Total Assets*
Profitabilitas	3,26	x	Akumulasi Saldo / Retained Earning Jumlah Aset / *Total Assets*

44. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum go-public oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut: (lanjutan)

44. REVIEW OF THE GOING CONCERN - UNAUDITED *(continued)*

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows: (continued)

Rasio/ Ratio	Rumus/ *Formula Altman Z-Score*		
Profitabilitas	6,72	x	Laba Sebelum Bunga & Pajak / *Earning Before Tax & Interest* Jumlah Aset / *Total Assets*
Solvabilitas	1,05	x	Nilai Buku Ekuitas / *Equity* Jumlah Kewajiban / *Total Liabilities*

Untuk perusahaan non manufaktur, klasifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Jika hasilnya, Z < 1,1 mengindikasikan Perusahaan berpotensi besar pailit.
b. Jika hasilnya, 1,1 < Z < 2,60 mengindikasikan terdapat kondisi keuangan Perusahaan yang perlu perhatian khusus.
c. Jika hasilnya, Z > 2,60 mengindikasikan Perusahaan bagus dan aman dari kepailitan.

For non-manufacturing companies, the classification used is as follows:

a. If the result is, Z <1.1 indicates the Company has a great potential for bankruptcy.
b. If the result, 1.1 <Z <2.60 indicates that there is a financial condition of the Company that needs special attention.
c. c. If the result is, Z> 2.60 indicates that the Company is good and safe from bankruptcy.

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum go-public oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

2023

Rasio/ Ratio	Rumus/ *Formula Altman Z-Score*			*Jumlah/Total*
Likuiditas	6,56	x	4.049.805.832.315 / 8.036.032.497.605	3,31
Profitabilitas	3,26	x	(1.110.472.524.206) / 8.036.032.497.605	(0,45)
Profitabilitas	6,72	x	299.093.786.141 / 8.036.032.497.605	0,25
Solvabilitas	1,05	x	6.823.740.993.005 / 1.212.291.504.600	5,91
Jumlah/*Total*				**9,02**

44. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

Berdasarkan hasil perhitungan Z-Score model pada tahun berjalan diperoleh skor sebesar 9,02 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas aman dari kepailitan (Z >2,60) atau dapat diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya secara konsolidasi sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.

44. REVIEW OF THE GOING CONCERN *(continued)*

Based on the results of the Z-Score model calculation in the current year a score of 9,02 was obtained, indicating that it is very far above "safe from bankruptcy" limit or it can be interpreted that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries in a consolidated manner are very capable of maintaining business continuity.

2022

Rasio/ Ratio	**Rumus/ *Formula Altman Z-Score***			**Jumlah/*Total***
Likuiditas	6,56	x	3.680.553.129.779 / 7.713.978.371.331	3,13
Profitabilitas	3,26	x	(1.311.674.371.857) / 7.713.978.371.331	(0,55)
Profitabilitas	6,72	x	275.242.556.399 / 7.713.978.371.331	0,24
Solvabilitas	1,05	x	6.685.824.551.232 / 1.028.153.820.099	6,83
Jumlah/*Total*				**9,61**

Berdasarkan hasil perhitungan Z-Score model pada tahun berjalan diperoleh skor sebesar 9,61 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas aman dari kepailitan (Z >2,60) atau dapat diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya secara konsolidasi sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.

Based on the results of the Z-Score model calculation in the current year a score of 9.61 was obtained, indicating that it is very far above "safe from bankruptcy" limit or it can be interpreted that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries in a consolidated manner are very capable of maintaining business continuity.

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI

a. Peninjauan Kembali atas Aset Jl. Angkasa No. 18, Kemayoran (Peninjauan Kembali Kedua).

   Upaya Hukum terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Hasan Ismail yang diduga menyuruh menempatkan keterangan palsu atau pemalsuan surat atau akta otentik di tempat kejadian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 266 KUHP dan/atau 263 KUHP dan/atau 264 KUHP.

   Status hukum: Dalam proses penyidikan dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor serta para saksi ahli yakni saksi ahli pidana, ahli bahasa, ahli sejarah serta saksi-saksi dari KUA, Dukcapil, Badan Pertanahan untuk kemudian dilaksanakan gelar perkara di Bareskrim Polri.

45. LITIGATION CASES

a. Asset Review Jl. Angkasa No. 18, Kemayoran (Second Review).

   Legal efforts related to the alleged crime committed by Hasan Ismail who allegedly ordered to place false statements or falsify authentic letters or deeds at the scene of the Central Jakarta District Court in accordance with Article 266 of the Criminal Code and/or 263 of the Criminal Code and/or 264 of the Criminal Code.

   Legal Status: In the process of investigation and examination will be carried out on the reported party and expert witnesses, namely criminal expert witnesses, linguists, historians and witnesses from the KUA, Dukcapil, the Land Agency to then hold the case at Bareskrim Polri.

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

a. Peninjauan Kembali atas Aset Jl. Angkasa No. 18, Kemayoran (Peninjauan Kembali Kedua). (lanjutan)

Tindak lanjut tahun 2023: Proses penyidikan masih berlanjut pada tahap penyidik menunggu surat izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam rangka sebagai dasar melakukan penyitaan terhadap alat bukti surat yang diduga palsu.

b. Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Atas Aset PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) memiliki aset tanah yang terletak di Jl. Seruni Nomor 3 Desa/Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau saat ini dikenal Jl. H.Moh. Faisal Nomor 6 RT 004 RW 002 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, yang merupakan Hasil Nasionalisasi Dari Eks Perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).

Obyek aset tersebut telah terdaftar dalam Akutansi Perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.07/03/SK/HKO.01/2018 tanggal 7 November 2018 tentang Penetapan Aset dan Bangunan Milik PT PELNI (Persero) dalam Portal Aset Kementrian BUMN dan saat ini terdapat unsur pidana yang dilakukan oleh Pihak Lain karena menguasai aset yang dimaksud.

Status Hukum: Telah dikeluarkan SP2HP oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NTB sebagaimana Surat Nomor: B/516/X/RES.1.24./2022/Ditreskrimum tanggal 20 Oktober 2022 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan serta telah dilakukan pemeriksaan saksi.

Tindak Lanjut 2023 : Pada tanggal 4 September 2023 Kepolisian Nusa Tenggara Barat telah menetapkan tersangka atas kasus dimaksud sebagaimana surat pemberitahuan penetapan tersangka No : B/331/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimsus perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka.

45. LITIGATION CASES *(continued)*

a. Asset Review Jl. Angkasa No. 18, Kemayoran (Second Review). (continued)

Follow-up in 2023: The investigation process is still continuing at the investigator stage, waiting for a special confiscation permit to the chairman of the South Jakarta district court as a basis for confiscating documentary evidence that is suspected of being fake.

b. Alleged Crimes Committed by Third Parties on Assets of PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) owns land assets located on Jl. Seruni Number 3 Selong Village/Sub-district, Selong District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province or currently known as Jl. H. Moh. Faisal Number 6 RT 004 RW 002 Sandubaya Village, Selong District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara, which is the result of the nationalization of the former Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) company.

The asset object has been registered in the Company's Accounting as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: 11.07/03/SK/HKO.01/2018 dated 7 November 2018 concerning the Determination of Assets and Buildings Owned by PT PELNI (Persero) in the Asset Portal of the Ministry of SOEs and currently there is a criminal element committed by other parties for controlling the assets in question.

Legal Status: SP2HP has been issued by the National Police of the Republic of Indonesia for the West Nusa Tenggara region as referred to in Letter Number: B/516/X/RES.1.24./2022/Ditreskrimum dated October 20, 2022 Regarding: Notification of the Progress of Report Investigation Results and witness examinations have been carried out.

Follow-up 2023: On September 4, 2023 the West Nusa Tenggara Police have named a suspect in the case in question as per the notification letter of suspect determination No. B/331/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimsus regarding : Notification of Suspect Determination.

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

c. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Adanya Relaas Panggilan Turut Tergugat Nomor: 225/Pdt.G/2021/PN Sda dari Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada PT. PELNI (Persero) Cabang Ternate sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 255/Pdt.G/2021/PN Sda.

Status Hukum: Proses persidangan dengan agenda Sidang Ketiga, dimana tergugat I dan tergugat II tidak hadir setelah dilakukan panggilan sidang melalui surat kabar sehingga akan dilakukan panggilan terakhir.

Tindak Lanjut 2023 : Telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana Surat Penetapan No : 255/Pdt.G/2021/PN bahwa perkara tersebut telah dicabut atas permohonan penggugat.

d. Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Kepentingan PT PELNI (Persero)

Dugaan Pemalsuan Dokumen Perusahaan dan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Sdr. Ekoyunitriato, pegawai yang telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.23/03/SK/HKO.01/2016 namun terdapat surat atas nama ybs selaku Enterprise Risk Management pada Surat Nomor: 010/SMO/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukan Konsultan Asuransi.

Status Hukum: Berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor: B/689/II/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 10 Februari 2023 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), perkara sedang dalam tahap penyidikan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta permohonan persetujuan sita dari ketua PN Jakarta Selatan. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap beberapa saksi lainnya.

Tindak Lanjut 2023 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya No. B/350/I/res.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 18 januari 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), perkara dalam tahap penyidikan dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 28 Desember 2023 dengan hasil terlapor sdr Eko Yuni Triyanti ditingkatkan stastusnya menjadi tersangka.

45. LITIGATION CASES *(continued)*

c. Lawsuit for Unlawful Acts at the Sidoarjo District Court.

Relaas Summons for Co-Defendants Number: 225/Pdt.G/2021/PN Sda from the Sidoarjo District Court to PT PELNI (Persero) Ternate Branch as Co-Defendant in Civil Case Number: 255/Pdt.G/2021/PN Sda.

Legal Status: The trial process with the agenda of the Third Session, where the Defendant I and Defendant II were not present after the summons was made through the newspapers so that a final summons would be made.

Follow-up 2023: It has been determined by the panel of judges of the Sidoarjo District Court as stipulation letter no: 255/Pdt.G/2021/PN that the case has been revoked at the request of the plaintiff.

d. Alleged Crime of Counterfeiting and Abuse of Authority which is Harmful to the Interests of PT PELNI (Persero)

Alleged Falsification of Company Documents and Abuse of Authority committed by Mr. Ekoyunitriato, an employee who has entered retirement age since July 1 2016 based on the Decree of the Board of Directors Number: 06.23/03/SK/HKO.01/2016 but there is a letter on behalf of him as Enterprise Risk Management in Letter Number: 010/SMO/II/ 2017 dated 17 February 2017 concerning Appointment of Insurance Consultant.

Legal Status: Based on the Dirreskrimum Polda Metro Jaya Letter Number: B/689/II/RES.1.9./2023/Ditreskrimum dated 10 February 2023 regarding Notification Letter on the Progress of Investigation Results (SP2HP), the case is currently in the investigation stage and witnesses have been examined -witnesses and requests for confiscation approval from the chairman of the South Jakarta District Court. Examination will be carried out on several other witnesses.

Follow-up 2023 : Letter from the Director of Criminal Investigation of Polda Metro Jaya No. B/350/I/res.1.9/2024/Ditreskrimum dated January 18, 2024 regarding Notification Letter on the Progress of Investigation Results (SP2HP), the case is in the investigation stage and a case title has been held on December 28, 2023 with the result that the reported party Eko Yuni Triyanti was upgraded to a suspect.

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

e. Dugaan Tindak Pidana oleh pihak lain terhadap aset PT Pelni (Persero) di Jalan Jambi/Kutai/Cisadane, Surabaya

PT PELNI (Persero) melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menguasai Aset di Jalan Jambi No 49-63 Kota Surabaya, kepada Polrestabes Surabaya sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/B/632/V/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM tanggal 30 Mei 2022.

Status Hukum: Polrestabes Surabaya telah meminta keterangan kepada Lurah Darmo, Kantor Pertanahan, Aria Duta, Bambang Nunuk, Drg Vitria Dewi sebagaimana SP2HP Nomor: B/3363/SP2HP/VII/RES1.2./2022/Satreskrim dan salah satu penghuni aset di Jl. Cisadane No 24/1 atas nama Suarso telah menyerah terimakan aset dimaksud kepada PT Pelni (persero) berdasarkan serah terima tanggal 21 Oktober 2022.

Tindak Lanjut 2023 : Dilakukan pemeriksaan tambahan kepada saksi-saksi penyelidikan sebagaimana SP2HP No: B/4774/X/RES1.2/2023/Satreskrim tanggal 25 Oktober 2023.

f. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Tol Laut di Pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe

Adanya Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor B- 10/P.1.13/Fd.1/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Tol Laut di Pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Status Hukum: Telah dilakukan penyidikan dan penyitaan benda/barang bukti/dokumen/surat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor: Print-13/P.1.13.Fd.1/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penyitaan Kepala Negeri Kepulauan Sangihe Nomor: PRINT-17/P.1.13/Fd.1/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Tindak Lanjut 2023 : Perkara Telah diselesaikan

***45. LITIGATION CASES** (continued)*

e. Alleged Criminal Acts by other parties against the assets of PT Pelni (Persero) on Jalan Jambi/Kutai/Cisadane, Surabaya

PT PELNI (Persero) reported the alleged crime committed by a third party who controls assets on Jalan Jambi No. 49-63 Surabaya City, to the Surabaya Police as evidence of Report Number: TBL/B/632/V/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA /POLDA JATIM May 30, 2022.

Legal Status: Surabaya Police have requested information from Darmo Village Head, Land Office, Aria Duta, Bambang Nunuk, Drg Vitria Dewi as per SP2HP Number: B/3363/SP2HP/VII/RES1.2./2022/Satreskrim and one of the occupants of the assets in Jl. Cisadane No 24/1 on behalf of Suarso has handed over the said assets to PT Pelni (Persero) based on the handover date of 21 October 2022.

Follow-up 2023: Additional examination of investigation witnesses was carried out as SP2HP No. B/4774/X/RES1.2/2023/Satreskrim dated October 25, 2023: B/4774/X/RES1.2/2023/Satreskrim dated October 25, 2023.

f. Alleged Corruption Crime Using the Sea Highway at Tahuna Port, Sangihe Islands Regency

There is a Sangihe Islands District Attorney's Letter Number B-10/P.1.13/Fd.1/03/2022 dated March 10, 2022 regarding the alleged criminal act of corruption using the Sea Highway at Tahuna Port, Sangihe Islands Regency.

Legal Status: An investigation and confiscation of objects/evidence/documents/letters has been carried out based on the Investigation Order of the Sangihe Islands District Attorney Number: Print-13/P.1.13.Fd.1/08/2022 dated August 9, 2022 and the Confiscation Warrant Head of State for the Sangihe Islands Number: PRINT-17/P.1.13/Fd.1/08/2022 dated 29 August 2022.

Follow-up 2023 : Case Completed

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

g. Dugaan Tindak Pidana atas Aset di Jalan Gajah Mada Nomor 14, Jakarta Pusat

Dugaan Tindak Pidana Penggelapan atas barang tak bergerak juncto memasuki atau menempati perkarangan atau tempat kediaman PT PELNI tanpa izin di Jl. Gajah Mada Nomor 14 Jakarta. Dugaan tindak pidana dimaksud telah dilaporkan PT PELNI (Persero) kepada Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/6261/X/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

Status Hukum: Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta denga No. Perkara : 266/Pid/2023/PT DKI Harry Houtman Marpaung dinyatakan bersalah.

Tindak Lanjut 2023 : Perkara Telah diselesaikan

h. Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PT Bandar Bahari Borneo

PT Pelni (Persero) telah digugat oleh PT Bandar Bahari Borneo seusai surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 dalam pokok perkara menyatakan PT Pelni (Persero) te;ah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan dengan tidak menindaklanjuti berita acara klarifikasi dan negoisasi kerja sama aset milik PT Pelni berupa gedung kantor cabang Pontianak sesuai surat No : 04.21/108/044/BAP/2022 dan menuntut PT Pelni (Persero) dengan membayar kerugian materiil senilai Rp500.000.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000

Status Hukum : Berdasarkan Putusan pada tanggal 29 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan No : 203/PDT.G/2023/PN.JKT/PST dengan aman putusan berbunyi sebagai berikut :

Tindak Lanjut 2023 :
Dalam Konpensi :
- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi
- Menolak gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi/tergugat konpensiuntuk seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi
- Menghukum penggugat Konpensi atau tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp620.000.

45. LITIGATION CASES *(continued)*

g. Alleged Crime of Assets at Jalan Gajah Mada Number 14, Central Jakarta

Alleged Crime of Embezzlement of immovable property juncto entering or occupying PT PELNI's yard or residence without permission on Jl. Gajah Mada Number 14 Jakarta. The alleged crime has been reported by PT PELNI (Persero) to Polda Metro Jaya as stated in Police Report Number: LP/6261/X/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

Legal Status: Based on the decision of the Jakarta High Court with Case No.: 266/Pid/2023/PT DKI Harry Houtman Marpaung was found guilty.

Follow-up 2023 : Case Completed

h. Default Lawsuit at the Central Jakarta District Court by PT Bandar Bahari Borneo

PT Pelni (Persero) has been sued by PT Bandar Bahari Borneo in accordance with the lawsuit letter dated March 27, 2023 in the main case stating that PT Pelni (Persero) has committed an act of default on the agreement by not following up on the minutes of clarification and negotiation of cooperation of PT Pelni's assets in the form of a Pontianak branch office building in accordance with letter No: 04.21/108/044/BAP/2022 and demanding PT Pelni (Persero) to pay material losses of Rp500,000,000 and immaterial losses of Rp1,000,000,000.

Legal Status: Based on the Decision on August 29, 2023, the Panel of Judges of the Central Jakarta District Court has handed down decision No. 203/PDT.G/2023/PN.JKT/PST with a safe decision as follows 203/PDT.G/2023/PN.JKT/PST with a safe decision reads as follows:

Follow-up 2023 :
In Konpensi:
- *Reject the plaintiff's lawsuit in its entirety.*

In Rekonpensi
- *Reject the counterclaim of the counterclaim plaintiff/concurrent defendant in its entirety.*

In Konpensi dan Rekonpensi
- *Punish the plaintiff or counterclaim defendant to pay the costs incurred in this case which up to now amount to Rp620,000.*

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

h. Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PT Bandar Bahari Borneo (lanjutan)

Bahwa sampai dengan 14 hari paska dibacakannya putusan PT Bandar Bahari Borneo tidak mengajukan upaya banding dengan demikian putusan dapat dinyatakan telah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap dan PT Pelni (persero) dinyatakan menang.

***45. LITIGATION CASES** (continued)*

h. Default Lawsuit at the Central Jakarta District Court by PT Bandar Bahari Borneo (continued)

That up to 14 days after the reading of the decision PT Bandar Bahari Borneo did not file an appeal, thus the decision can be declared Inkracht or legally binding and PT Pelni (Persero) is declared the winner.

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Nomor SK-6/MBU/01/2024, tanggal 9 Januari 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, bahwa memberhentikan dengan hormat Rainoc sebagai Direktur SDM dan Umum dan mengangkat Heri Purnomo sebagai Direktur SDM dan Umum yang baru.

Selanjutnya, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Nomor SK-9/MBU/01/2024, tanggal 16 Januari 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, bahwa mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, memberhentikan dengan hormat Wahyu Adji Herpriarsono sebagai Komisaris, dan mengangkat Muhammad Awaludin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen serta mengangkat Budi Mantoro sebagai Komisaris yang baru.

Selanjutnya, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Nomor SK-70/MBU/03/2024, tanggal 18 Maret 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, bahwa mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Yossianis Marciano sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut, dan mengangkat Kokok Susanto sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut yang baru.

46. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

Based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Number SK-6/MBU/01/2024, dated January 9 2024, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, honorably dismissed Rainoc as Director of Human Resources and General Affairs and appointed Heri Purnomo as the new Director of Human Resources and General Affairs.

Furthermore, based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Number SK-9/MBU/01/2024, dated January 16 2024, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, confirms the honorable dismissal of Ali Masykur Musa as President Commissioner and Independent Commissioner, honorably dismisses Wahyu Adji Herpriarsono as Commissioner, and appoints Muhammad Awaludin as President Commissioner and Independent Commissioner and appoints Budi Mantoro as the new Commissioner.

Furthermore, based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT. Indonesian National Shipping Number SK-70/MBU/03/2024, dated March 18 2024, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT. Indonesian National Shipping, confirmed the honorable dismissal of Yossianis Marciano as Director of the Goods Transport and Sea Toll Business, and appointed Kokok Susanto as the new Director of the Goods Transport and Sea Toll Business.

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Muhammad Awaludin	:	*President Commisioner*
Komisaris Independen	:	Kristia Budiyarto	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Budi Mantoro	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Eddy Susanto Soepadmo	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Faturohman	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Raden Suhartono	:	*Commissioner*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Tri Andayani	:	*President Director*
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	:	Nuraini Dessy Winiastuty	:	*Director of Passenger Transportation*
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko	:	Anik Hidayati	:	*Director or Finance and Risk Management*
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Kokok Susanto	:	*Director of Maritime Goods and Toll Road Transport*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Heri Purnomo	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur Armada dan Teknik	:	Robert MP Sinaga	:	*Director of Fleet and Engineering*

Ketiga peristiwa penting setelah periode pelaporan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Grup untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

46. EVENT AFTER REPORTING PERIOD *(continued)*

Composition of the Board of Commissioners and Directors of PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), as follows:

Composition of the Board of Commissioners and Directors of PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), as follows:

The three important events after the reporting period did not have a material impact on the Group's financial statements for the year ending 31 December 2023.

47. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 01 April 2024.

47. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements are the responsibility of management and have been approved by the Board of Directors for issue on the date April 01, 2024.

INFORMASI TAMBAHAN /
ADDITIONAL INFORMATION

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(NERACA) - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(BALANCE SHEETS) - PARENT ENTITY
As of Desember 31, 2023
(With Comparative as of December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December* 31, 2023	31 Desember/ *December* 31, 2022	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	3.340.274.232.991	3.251.274.407.856	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	71.119.772.632	48.538.049.696	*Accounts Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	670.653.102.543	351.477.244.087	*Other Current Financial Assets*
Persediaan	347.753.641.959	395.269.361.389	*Inventories*
Pajak Dibayar Dimuka	12.140.886.119	19.423.340.477	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	96.946.880.588	23.926.262.788	*Advances Payment*
Biaya Dibayar Dimuka	39.052.639.408	51.785.965.572	*Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar	**4.577.941.156.240**	**4.141.694.631.865**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR			***NON CURRENT ASSETS***
Investasi pada Entitas Asosiasi	240.324.819.715	208.284.214.875	*Investment in Assosiates*
Investasi pada Entitas Anak	686.581.146.024	609.470.766.340	*Investment in Subsidiaries*
Properti Investasi	160.721.230.000	153.498.300.000	*Invesment Properties*
Alat Produksi	2.030.269.253.987	2.278.669.110.086	*Production Equipment*
Aset Tetap	234.214.701.325	200.182.897.305	*Fixed Assets*
Aset Takberwujud	14.255.637.327	16.750.224.147	*Intangible Assets*
Aset Hak Guna	330.296.293	14.166.670	*Use Right of Assets*
Aset Pajak Tangguhan	55.088.018.153	51.713.004.610	*Deferred Tax Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	69.670.750	471.345.410	*Other Non Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**3.421.854.773.574**	**3.519.054.029.443**	***Total Non Current Asset***
JUMLAH ASET	**7.999.795.929.814**	**7.660.748.661.308**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***SHORT-TERM LIABILITIES***
Utang Usaha	212.445.399.077	196.907.358.420	*Trade Payables*
Beban Akrual	568.895.398.985	512.870.902.002	*Accrued Expenses*
Liabilitas Kontrak	68.970.309.466	47.547.428.978	*Contract Liabilities*
Utang Pajak	44.918.734.749	25.753.149.272	*Tax Payables*
Bagian Lancar atas Utang Kepada Negara	3.621.510.600	3.210.279.835	*Current Portion of Debt to the State*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	96.685.231.365	64.781.786.308	*Other Short-term Financial Assets*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**995.536.584.242**	**851.070.904.815**	***Total Short-term Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***LONG-TERM LIABILITIES***
Utang Kepada Negara	28.972.084.800	32.102.813.410	*Debt to the State*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	155.430.687.812	95.148.220.006	*Long-term Employee Benefits*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**184.402.772.612**	**127.251.033.416**	***Total Long-term Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS	**1.179.939.356.854**	**978.321.938.231**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Modal dasar 13.000.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 7.629.900 saham per 31 Desember 2022 dan 2021	7.629.900.000.000	7.629.900.000.000	*Capital Stock - par value of Rp1.000.000 per share. Authorized - 13.000.000 share, issued and fully paid – 7.629.900 share as of December 31, 2022 and 2021*
Penyertaan Modal Pemerintah	143.585.642	143.585.642	*Government Equity*
Tambahan Modal Disetor	397.878.907.714	397.878.907.714	*Additional Paid-in Capital*
Cadangan	1.342.665.131.496	1.169.417.204.918	*Appropriate Retained Earnings*
Saldo Laba (Defisit)	(2.453.137.655.703)	(2.481.091.576.775)	*Retained Earnings (Defisits)*
Komponen Ekuitas Lainnya	(97.593.396.189)	(33.821.398.422)	*Other Component Equity*
Jumlah Ekuitas	**6.819.856.572.960**	**6.682.426.723.077**	***Total Equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**7.999.795.929.814**	**7.660.748.661.308**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY
For the Year Ended December 31, 2023
(With Comparative for The Year Ended December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2023	2022	
Pendapatan Usaha, Bersih	5.229.347.433.405	4.463.979.539.412	*Operating Revenues, Netto*
Beban Pokok Usaha	4.557.684.034.879	3.866.951.097.743	*Operating Expenses*
Laba Kotor	**671.663.398.526**	**597.028.441.669**	***Gross Profit***
Beban Pemasaran dan Distribusi	20.346.670.084	14.479.804.748	*Distribution and Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	614.067.414.265	550.792.223.794	*General and Administrative Expenses*
Laba (Rugi) Usaha	**37.249.314.177**	**31.756.413.127**	***Operating Profit or (Loss)***
Pendapatan Non Usaha - Bersih	234.073.622.350	221.727.924.577	*Non Operating Income - Net*
Laba Sebelum Pajak	**271.322.936.527**	**253.484.337.704**	***Profit Before Tax***
Manfaat (Beban) Pajak	70.121.088.876	(80.236.411.127)	*Tax Benefits (Expense)*
Laba Tahun Berjalan	**201.201.847.651**	**173.247.926.577**	***Profit for the Current Year***
Penghasilan Komprehensif Lain			***Other Comprehensive Income***
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			*Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss :*
- Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Periode Berjalan	(69.936.652.767)	88.908.802.091	*Actuarial Gain (Loss) for the Period* -
- Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Aset Tetap	6.164.655.000	-	*Fair Values of Property Gain (Loss) - Current Period*
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**137.429.849.884**	**262.156.728.668**	***Total Comprehensive Income of The Current Year***
Laba Bersih Per Saham Dasar	**26.370,18**	**22.706,45**	***Basic Earnings Per Share***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY
For the Year Ended December 31, 2023
(With Comparative for The Year Ended December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ *Share Capital*	Penyertaan Modal Pemerintah/ *Goverment Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Cadangan di Tentukan Penggunaannya/ *Appropriated Retained Earning*	Saldo Rugi (Defisit)/ *Retained Earnings (Accumulated Deficits)*	Komponen Ekuitas lainnya/ *Other Equity Components*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2021	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**397.878.907.714**	**1.128.489.393.747**	**(2.613.411.692.181)**	**(122.730.200.513)**	**6.420.269.994.409**	***Balance as of December 31, 2021***
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	173.247.926.577	-	173.247.926.577	*Profit for the Current Year*
Cadangan	-	-	-	40.927.811.171	(40.927.811.171)	-	-	*Reserve*
Kerugian Aktuaria	-	-	-	-	-	88.908.802.091	88.908.802.091	*Actuarial Losses*
Saldo per 31 Desember 2022	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**397.878.907.714**	**1.169.417.204.918**	**(2.481.091.576.775)**	**(33.821.398.422)**	**6.682.426.723.077**	***Balance as of December 31, 2022***
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	201.201.847.651	-	201.201.847.651	*Profit for the Current Year*
Cadangan	-	-	-	173.247.926.578	(173.247.926.578)	-	-	*Reserve*
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	-	-	-	-	-	(69.936.652.767)	(69.936.652.767)	*Actuarial Gain (Loss)*
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Ase	-	-	-	-	-	6.164.655.000	6.164.655.000	*Gain (Loss) on Fair Value of Fixed Assets*
Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	*Adjustment*
Saldo per 31 Desember 2023	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**397.878.907.714**	**1.342.665.131.496**	**(2.453.137.655.703)**	**(97.593.396.189)**	**6.819.856.572.960**	***Balance as of December 31, 2021***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
For the Year Ended December 31, 2023
(With Comparative for The Year
Ended December 31, 2022)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1.805.920.242.902	1.674.699.555.321	*Receipt from Customers*
Penerimaan *Public Service Obligation* dan Subsidi	3.040.918.105.872	3.559.892.871.068	*Receipt from Public Service Obligation and Subsidies*
Pembayaran Kepada Pemasok	(3.060.170.334.392)	(2.897.266.321.250)	*Payment to Suppliers*
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	35.501.303.371	105.886.735.764	*Receipt of other operating activities*
Pembayaran Biaya Operasional	(340.757.891.470)	(313.568.459.841)	*Payment of Operating Expenses*
Pembayaran Biaya *Overhead*	(1.017.018.870.360)	(871.184.363.909)	*Payment of Overhead Expense*
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya	(21.944.135.554)	(37.997.438.802)	*Payment of Other Operating Expenses*
Pembayaran Pajak	(315.343.294.036)	(315.343.294.036)	*Tax Payments*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**127.105.126.333**	**905.119.284.315**	***Net Cash Flows from Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	105.674.751.984	46.309.799.591	*Interest Deposit and Demand Deposits Receipt*
Penerimaan Dividen	-	17.984.141.676	*Dividend Receipt*
Penjualan Alat Produksi dan Aset Tetap	20.230.000.000	-	*Acquisition of Production Equipment and Fixed Assets*
Perolehan Alat Produksi dan Aset Tetap	(161.744.743.369)	(153.762.117.755)	*Acquisition of Production Equipment and Fixed Assets*
Perolehan Aset Dalam Konstruksi	(932.430.801)	(6.871.911.193)	*Acquisition of Asset Under Construction*
Perolehan Aset Takberwujud		(7.485.615.523)	*Acquisition of Intangible Assets*
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	**(36.772.422.186)**	**(103.825.703.204)**	***Net Cash Flows used to Investment Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman Bank	100.000.000.000	50.000.000.000	*Acceptance of Bank Loan*
Pembayaran Pinjaman Bank	(101.332.879.012)	(50.255.208.333)	*Bank Loan Payments*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(1.332.879.012)**	**(255.208.333)**	***Net Cash Flows from Financing Activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**88.999.825.135**	**801.038.372.778**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**3.251.274.407.856**	**2.450.236.035.078**	***BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**3.340.274.232.991**	**3.251.274.407.856**	***ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT***

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

2023 Laporan Tahunan Annual Report

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

PELNI
We Connect, We Unify

PT PELNI (Persero) HQ

Jl. Gajah Mada No. 14,
Jakarta Pusat, 10130
DKI Jakarta, Indonesia

Kontak Pusat

T. 162 (Jabodetabek)
F. +62 21 6385 4130
E. infopelni162@pelni.co.id